





✓
INDONESIA. DEPARTEMEN PENERANGAN.

REPUBLIK INDONESIA

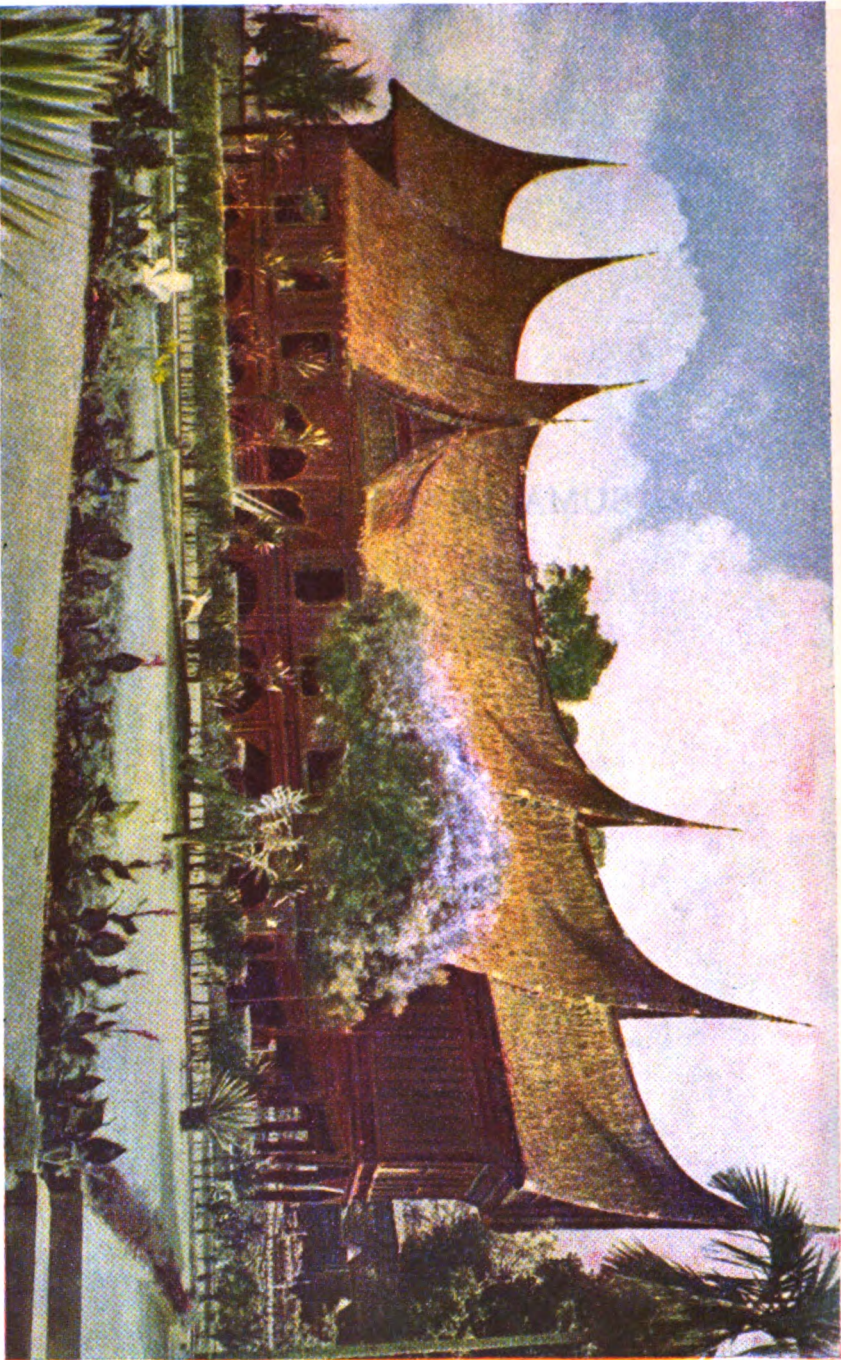
201. 103

PROPINSI SUMATERA TENGAH

KEMENTERIAN PENERANGAN

av

**PROPINSI
SUMATERA TENGAH**



..Adat bersendi Siarak,
Siarak bersendi kitabullah".

DAFTAR ISI.

Pendahuluan.

halaman

Sambutan Sdr. Gubernur Kep. Daerah Prop. Sumatera Tengah.

Sambutan Sdr. Kom. Res. IV J. J. I Bukit Barisan.

BAB I: PERKEMBANGAN POLITIK.

Bhg. I: Perjuangan menentang pendjadjahan dan
Susunan Pemerintahan sebelum Proklamasi
Kemerdekaan.

Pasal 1. Perjuangan Rakjat Minangka- bau menentang pendjadjahan ...	23
Pasal 2. Pemerintahan dan Perjuangan rakjat di Djambi	55
Pasal 3. Dari perjuangan bersendjata keperjuangan dengan formasi Partai	75

Bhg. II. Perjuangan sesudah Proklamasi.

Pasal 4. Di Sumatera Barat	83
Pasal 5. Di Riau	233
Pasal 6. Di Kepulauan Riau	245
Pasal 7. Di Djambi	255

Bhg. III. Perkembangan Azas-azas Demokrasi.

Pasal 8. Pemerintahan Sumatera Tengah sesudah Pemulihan	289
Pasal 9. Di Negeri/Wilajah	315
Pasal 10. Di Kabupaten/Kotapradja	363
Pasal 11. Di Keresidenan	379
Pasal 12. Di Propinsi	393
Pasal 13. Kepartaian di Sumatera Tengah semendjak Proklamasi Kemerde- kaan	53

BAB II: PERKEMBANGAN TENTERA NASIONAL DAN KEPOLISIAN.

Bhg. IV. Ketenteraan.

Pasal 14. Djiwa perdjjuangan dasar tentera	537
Pasal 15. Kesatuan tentera dibentuk	547

Pasal 16.	Terbentuknja Barisan-barisan Rakjat	553
Pasal 17.	Pembentukan tentera di Riau ...	557
Pasal 18.	Ketenteraan dipesisir Samudera Hindia (Front Selatan)	561
Pasal 19.	Perkembangan disekitar Kuranadji (Front Timur)	563
Pasal 20.	Perkembangan disekitar Front Utara	565
Pasal 21.	Penjusunan Komandemen Sumatera	567
Pasal 22.	Daerah Perairan Kepulauan Riau dan peristiwa Bagan Siapi-Api	571
Pasal 23.	Ketenteraan menghadapi agresi Belanda jang pertama	575
Pasal 24.	Penjusunan ALRI (Angkatan Laut R.I.)	581
Pasal 25.	Belanda melantjarkan agresi ke-II	585
Pasal 26.	Reorganisasi dalam ketenteraan	593

Bhg. V. Kepolisian Negara.

Pasal 27.	Kepolisian dizaman Belanda ...	603
Pasal 28.	Kepolisian dizaman Djepang ...	605
Pasal 29.	Kepolisian sesudah Proklamasi	617
Pasal 30.	Kepolisian dalam agresi ke-II	617
Pasal 31.	Kepolisian sesudah Pemulihan ...	619

BAB III: PEREKONOMIAN.

Bhg. VI. Membangun Ekonomi Nasional.

Pasal 32.	Pertanian	65
Pasal 33.	Koperasi	66
Pasal 34.	Kehutanan	67
Pasal 35.	Karet Rakjat	67
Pasal 36.	Perkembangan Perindustrian ...	67
Pasal 37.	Perikanan Darat/Laut	68
Pasal 38.	Perkembangan Lalu-Lintas	71
Pasal 39.	Pertambangan di Sumatera Tengah	72
Pasal 40.	Sumatera Tengah dengan Perkembangan bangsa Asing (cultuur be- drijven)	72

Pasal 41. Peternakan	741
Pasal 42. Persatuan Saudagar Indonesia	753

BAB IV: PEMBANGUNAN MASJARAKAT.

Bhg. VII. Perkembangan pendidikan.

Pasal 43. Pendidikan dalam masa pemerintahan Belanda	773
Pasal 44. Pendidikan selama pemerintah pendudukan Djepang	781
Pasal 45. Perkembangan pendidikan sesudah Proklamasi	783
Pasal 46. Perkembangan selanjutnya sesudah penjerahan Kedaulatan ...	789
1. Sekolah Rakjat.	
2. Sekolah Landjutan.	
3. Sekolah Tinggi.	

Bhg. VIII. Pendidikan Massa dan Kesehatan

Pasal 47. Usaha mempertinggi mutu daerah	819
Pasal 48. Pendidikan Orang Dewasa	827
Pasal 49. Persurat-Kabaran	833
Pasal 50. Pertumbuhan dan perkembangan Radio	849
Pasal 51. Pendidikan Agama	863
Pasal 52. Kesehatan	895

BAB V: KEBUDAJAAN.

Bhg. IX. Di Minangkabau.

Pasal 53. Masyarakat dan Kebudayaan Alam Minangkabau	917
Pasal 54. Kasta di Minangkabau	919
Pasal 55. Apakah Minangkabau itu?	925
Pasal 56. Daerah Keradjaan Minangkabau	927
Pasal 57. Tjara mendjalankan pemerintahan	931
Pasal 58. Masyarakat Minangkabau	933
Pasal 59. Penghulu dan tjara pengangkatan	935
Pasal 60. Pengawasan dan penguasaan atas harta	941
Pasal 61. Rumah Gadang, Rangkiang, Balai-balai Adat dan Mesdjid ...	943

Pasal 62.	Bentuk dan perintjian Adat	949
Pasal 63.	Hubungan kekeluargaan dan upatjara perkawinan dan peminangan	951
Pasal 64.	Adjaran-adjaran dan Etiquette dalam pergaulan	957
Pasal 65.	Norm hukum dan norm sosial ...	965
Pasal 66.	Bergotong-rojong	969
Pasal 67.	Adat Minangkabau dan persintuhannja	973
Pasal 68.	Kedudukan adat Minangkabau dihari depan	981
Pasal 69.	Tjandi-tjandi dan peninggalan-peninggalan lainnja	983
Pasal 70.	Ukiran dan Bangunan-bangunan	985
Pasal 71.	Randai dan Sandiwara	987
Pasal 72.	Bunji-bunjian dan tari-tarian ...	989
Pasal 73.	Seni Lukis	991
Pasal 74.	Pakaian	995
Pasal 75.	Pentjak-Silat	999
Pasal 76.	Kesusasteraan	1001
Pasal 77.	Kepulauan Mentawai	1005

Bhg. X. Di Djambi.

Pasal 78.	Undang-undang Adat di Djambi	1013
Pasal 79.	Persukuan di Djambi	1017
Pasal 80.	Zaman Pemerintah Sultan Abdul Kahar Agung	1021
Pasal 81.	Pembagian Tanah	1023
Pasal 82.	Waris dan Harta-pusaka	1027
Pasal 83.	Perkawinan	1029
Pasal 84.	Pergaulan budjang dengan gadis	1033
Pasal 85.	Bunji-bunjian/tari-tarian, ukiran dan sendjata	1037
Pasal 86.	Suku „Anak Dalam”	1041
Pasal 87.	Adat-istiadat Suku „Anak Dalam”	1045

Bhg. XI. Di Kepulauan Riau.

Pasal 88.	Sumber Sedjarah	1049
Pasal 89.	Suku Bangsa dan asal-usulnja ...	1051
Pasal 90.	Tjara pemerintahan dan tjara pengangkatannja	1053

Pasal 91. Kepertjajaan Agama dan perkawinan	1057
Pasal 92. Zaman Pemerintahan Radjaradja	1059
Pasal 93. Hubungan kemasjarakatan	1063
Pasal 94. Hukum dan hak tanah	1065
Pasal 95. Dizaman pendjadjahan Belanda	1067

Bhg. XII. Perkembangan Agama Islam di Sumatera Tengah.

Pasal 96. Masuknja Islam dan pengaruhnja	1071
Pasal 97. Pengaruh gerakan Paderi	1073
Pasal 98. Pembaharuan	1075
Pasal 99. Dizaman Djepang	1079
Pasal 100. Dizaman Indonesia Merdeka ...	1081

Bhg. XIII. Perkembangan Agama Kristen di Sumatera Tengah.

Pasal 101. Di Kepulauan Mentawai	1087
Pasal 102. Di Sumatera Barat	1089
Pasal 103. Nias Kristen	1091
Pasal 104. Missi Roma Katholik	1093
Pasal 105. Geredja Huria Kristen Batak Protestan	1095
Pasal 106. Geredja Masehi Advent Hari ke Tudjuh	1097

SUMATERA

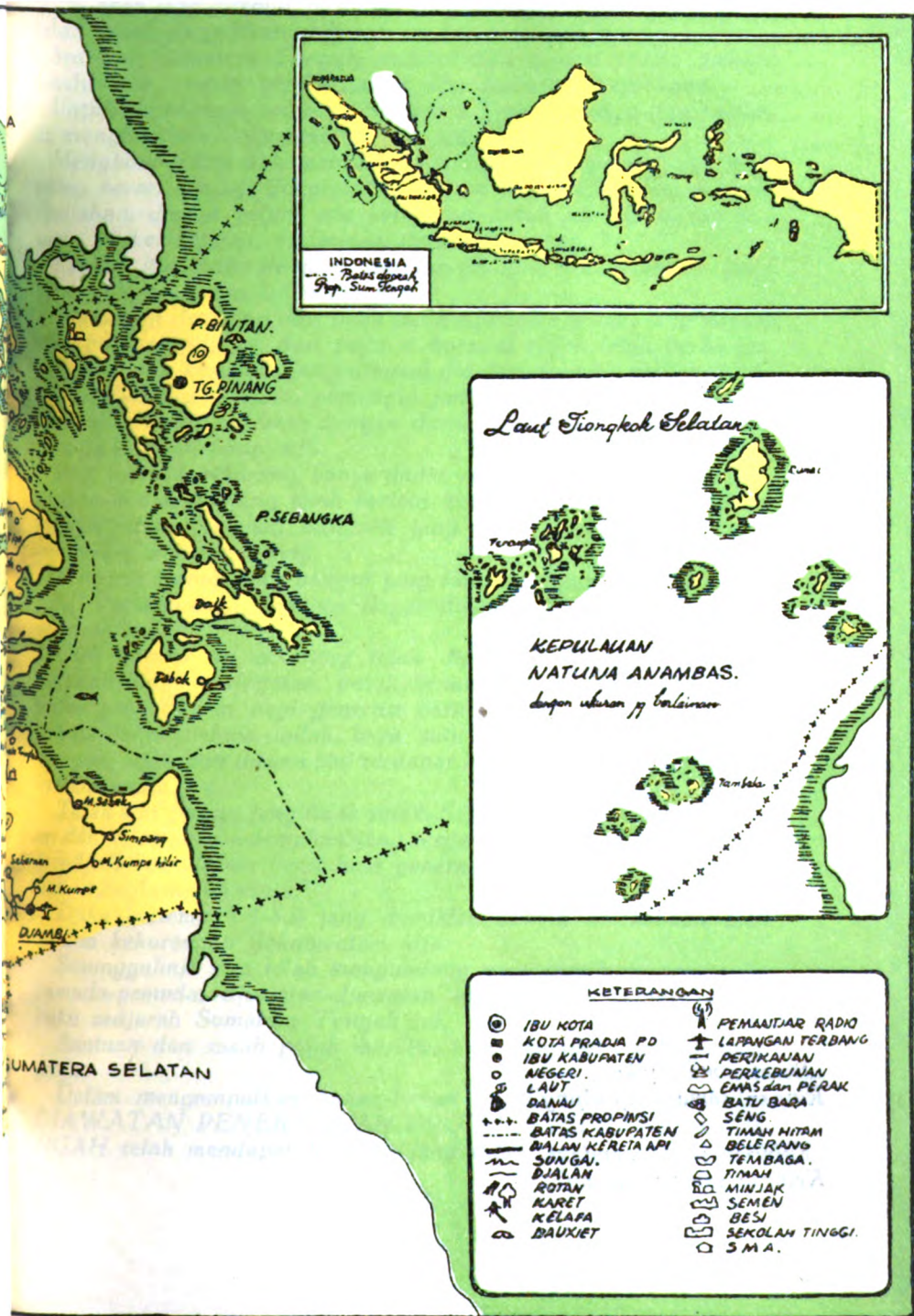
KABUPATEN dan KOTA

- | | |
|-------------------|---------------|
| ① KOTABINGGI | ⑨ BENGKALIS |
| ② KOTAPADANG | ⑩ KEP. RIAU |
| ③ AGAM | ⑪ SUL. SIDI. |
| ④ PADANG PARIAMAN | ⑫ SOLOK |
| ⑤ JO KOTA | ⑬ MERANGIN |
| ⑥ PASAMAN | ⑭ BATANG HARI |
| ⑦ TANAH DATAR | ⑮ INDRA GIRI |
| ⑧ P. S. K. | ⑯ KAMPAR |

SUMATERA UTARA



TENGAH



„Berat sama dipikul,
Ringan sama didjindjing”

„Kebukit sama mendaki,
Kelurah sama menurun”.

PENDAHULUAN

MENULIS sedjarah tidaklah mudah. Banjak kesulitan-kesulitan jang ditemui, terutama jang menjangkut dengan bahan-bahan untuk dijadikan sedjarah itu.

Sedjarah Sumatera Tengah, melalui tiga zaman, jaitu : zaman dahulu kala, zaman pendjadjahan dan zaman kemerdekaan.

Untuk melengkapi sedjarah Sumatera Tengah ketiga-tiga zaman itu menghendaki dokumentasi jang lengkap.

Menghimpunkan dokumentasi itu adalah suatu pekerdjaan jang paling berat, apalagi dokumentasi zaman bahari dan zaman pendjadjahan, disa'at belum ada keinginan untuk mengabadikan sesuatu perkembangan, kedjajaan dan keruntuhan.

Karena itu sedjarah jang didjalin dengan dokumentasi jang kurang, akan terasa kelemahannja.

Walaupun demikian dari pada tiada ada sama sekali, jang inipun telah berharga djuga; dari pada si buta, si tjelek lebih berharga.

Begitu pula kesulitan jang ditemui didalam menulis sedjarah ini; banjak diantara pemuda, pemimpin jang mereka sendiri membuat sedjarah, meukir sedjarah dengan darah dan djiwa, tetapi mereka lupa pada dokumentasinja.

Bagi mereka sekarang hanja dapat mengenang, merasakan kedjadian-kedjadian jang telah berlalu, tetapi mereka tidak sanggup mengudjudkan ke-alam sedjarah jang dapat dipusakakan untuk keturunan kita dibelakang.

Sungguh merugi satu bangsa jang tidak mempunjai buku sedjarah! Perkembangan bangsa dapat dikenal, hanja dengan buku sedjarah itulah!

Oleh karena itu sekarang telah dirasakan kepentingan buku sedjarah untuk peringatan, untuk kenang-kenangan dan terutama untuk pengetahuan bagi generasi baru.

Saja yakin bahwa inilah baru satu buku sedjarah Sumatera Tengah, walaupun disana-sini terdapat kekurangan, kechilafan dan kelemahannja.

Tidak ada gading jang tidak retak. Segala kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan jang terdapat dalam buku ini, adalah mendjadi kewadjiban berat buat generasi muda untuk melengkapkan, mengkomplittkannja.

Djika bertemu hal-hal jang demikian adalah disebabkan oleh karena kekurangan dokumentasi kita.

Sesungguhnja kita telah mengundang para pemimpin-pemimpin, pemuda-pemuda, djawatan-djawatan untuk turut menulis dalam buku sedjarah Sumatera Tengah ini.

Bantuan dan susah pajah mereka, kita hargakan setinggi-tingginja.

Dalam mengumpulkan bahan-bahan untuk buku sedjarah ini. DJAWATAN PENERANGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH telah mendapat bantuan jang tidak ternilai dari seluruh

lapisan masyarakat Sumatera Tengah, bahkan juga dari luar Sumatera Tengah.

Atas semua bantuan itu, yang berupa karangan, keterangan, buku-buku, madjalah-madjalah, dan bahan-bahan dokumentasi, kami mengutjapkan terima kasih yang tak terhingga.

Terlebih lagi terima kasih kami kepada saudara-saudara :

Mr. St. M. Rasjid, Chaidir Gazali, Marah A. Rahman St. Hidayat Sjah, Abu Hanifah Z., Major A. Hossen, Kapten Alwi St. Maradjo, Hasan Basri (bekas Let. Kolonel T.N.I.), Dahlan Ibrahim (bekas Let. Kolonel T.N.I.), Makinuddin (bekas Majoor T.N.I.), M. Apan, M. Sjafei, Sjarnubi, Makalam, Bachsan, R. H. Thalib, T. Sjariif bin Pangeran Purbo, Sudarsono, Kamarsjah, Dt. Panduko Batuah, Soeleman Effendy dan lain-lain para terkemuka di Propinsi dan Kabupaten-kabupaten se-Sumatera Tengah yang telah memberikan keterangan-keterangan setjara lisan dan tulisan, untuk bahan penjsunan buku ini.

Pun juga kepada Djawatan-djawatan Propinsi Sumatera Tengah yang telah memberikan bahan-bahan tertulis mengenai lapangan usahanya masing-masing, seperti Inspeksi Kesehatan, Kehutanan, Perindustrian, Karet Rakjat, Koperasi, Perikanan Darat, Perikanan Laut, Sekolah Menengah, Lalu Lintas Djalan, Perwakilan Kebudayaan Sumatera Tengah, Djawatan-djawatan Pertanian, P.P.K., Sosial, R.R.I., Studio Padang dan Bukittinggi, Kantor Pendidikan Agama, Kepolisian bagian Public Relation, para Bupati dan Wali Kota, Dewan-dewan Pemerintah Kab/Ko se-Sumatera Tengah, serta Djapen Kab/Ko se-Sumatera Tengah dan lain-lain.

Begitu juga kepada pengarang buku-buku dan madjallah yang kami djadikan bahan atau dikutip untuk menjusun buku sedjarah ini, seperti :

Harian-harian: Kedaulatan Rakjat, Daulat Rakjat, Detik, Haluan, Penerangan, Madjallah Perkembangan, buku-buku: Tuanku Imam Bondjol oleh D. Dt. Madjolelo, Kenangan Hidup ke-IV oleh Hamka, dan perslah-perslah K.N.I. Sumatera Barat, arsip K.N.I. kewedanaan Daerah Djambi, perslah-perslah sidang D.P.R. Sumatera Tengah, himpunan peraturan instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat — Sumatera Tengah dan lain-lain.

Begitupun usaha Panitia Buku ini yang terdiri dari Saudara-saudara Decha (Pengamat), Mansoer Jasin (Ketua), Maisir Thaib (wk. Ketua) dan anggota-anggota Sdr. H.B. Yahja, Basjaruddin Ahmad, M. Joesoef, Saiburrahman, A. Rivai Yogi, Sjamsoelbahar dan Adjhuri Hamidy, yang telah bersimbul peluh mengumpulkan, mentjari bahan yang berserak sana-sini, serta menjusunnja kita hargakan sekali.

Moga-moga Tuhan memberi berkah terhadap usaha ini, sehingga dapat bermanfa'at untuk keturunan kita dan generasi angkatan muda.

DJAWATAN PENERANGAN
PROPINSI SUMATERA TENGAH

MELUKIS SEDJARAH DENGAN USAHA

BERSAMA dengan rakyat diseluruh Kepulauan Indonesia, maka rakyat di Sumatera Tengah pun telah melukis sedjarah perjuangannya dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan ini, diusahakan menggambarkan dengan tjara selintas akan lukisan perjuangan rakyat itu, dalam segi-segi pemerintahan, ketenteraan, perekonomian, kemasjarakatan dan kebudayaan, dari bahan-bahan dokumentasi sekedar yang dapat dikumpulkan oleh Djawatan Penerangan Sumatera Tengah.

Sedjarah adalah tempat bertjermin, dimana kita dapat melihat usaha-usaha dimasa yang lalu, dengan pandangan zaman sekarang, kemudian kita dapat membuat bandingan dan pertimbangan, untuk kesempurnaan usaha dimasa depan.

Dengan membuat sedjarah kita dapat merasa hidup kembali dizaman perjuangan yang maha hebat dimasa yang silam itu, perjuangan yang telah meningkatkan kita dari bangsa yang terdjadjah menjadi bangsa yang merdeka, untuk dapat merasakan dengan penuh keinsjaan, bahwa bangsa kita mempunyai tenaga yang hebat, dan masyarakat kita mempunyai potensi yang sebesar-besarnya, yang dapat kita pakai selanjutnya untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan kearah kemakmuran rakyat.

Bahwa kita masih berada dipertengahan djalan dalam perjuangan mengisi kemerdekaan ini, tak seorangpun rasanja yang akan memungkiri. Tetapi beralihnja lapangan perjuangan dari medan romantiek-heroisme kemedan pemerasan keringat-pikiran-tenaga yang terus-menerus, banjak mengaburkan pandangan mata, karena membangun tidaklah selekas merubuhkan, sehingga terasa oleh lambatnja tiba kemakmuran, seakan-akan masyarakat kita telah menghabiskan tenaga dan tidak mempunyai potensi lagi, sehingga katja mata hitam mempengaruhi pandangan.

Dengan meneliti sedjarah ini, akan jakinlah kita kembali bahwa masyarakat kita chususnya di Sumatera Tengah ini tetap mempunyai potensi yang sehebat-hebatnja, buminja kaya raya, dan rakyatnja ulet dan rajin, asal dapat pimpinan yang tepat, hanja faktor waktu harus diperhitungkan, karena bagaimanapun djuga, padi tidaklah bisa berbuah dalam masa tiga bulan.

Disinilah titik beratnja kepentingan buku sedjarah ini ! Dalam pada itu tak ada buku sedjarah yang dapat mengatakan bahwa ia

lengkap, satu buku sedjarah hanjalah untuk mendjadi pegangan dan bahan bagi penulis sedjarah jang selandjutnja, dan begitulah pula dengan buku ini. Ini hanjalah usaha permulaan dari membukukan perdjuaan rakjat di Sumatera Tengah, jang semoga akan diiringi oleh para tjerdik tjendekia kita dengan pembukuan jang lebih lengkap.

Pemerintah Sumatera Tengah mengharapkan bahwa dengan dibukukannja sedjarah perdjuaan rakjat ini, kita akan semakin insaf kepada kewadjiban kita pada masa ini, jaitu :

- 1. Mengatasi segala akibat dari perdjuaan kita dimasa jang lalu, jang kehebatannja tjukup tertera dalam buku ini.*
- 2. Memberi isi kepada kemerdekaan kita, untuk mentjiptakan suatu negara jang berdaulat, adil dan makmur, jang dimungkinkan kepada kita oleh potensi masjarakat kita jang begitu besar.*
- 3. Menjelamatkan negara jang telah kita perdjuaan dengan korban jang tak terpermanai ini, dari anasir-anasir jang akan membahajakan kedudukannja dari luar dan dari dalam.*

Pun Pemerintah Sumatera Tengah telah berusaha dengan segala alat kesanggupan jang ada padanja untuk memadjukan, terutama Kemakmuran, Pendidikan dan Kesehatan Rakjat, sebagaimana jang dapat diteliti dalam buku ini. Dan ini hanja akan dapat terlaksana dengan sepenuhnya, apabila ada kerdjasama jang erat dan baik dari segala pihak.

Dan kerdja sama ini adalah salah satu kewadjiban jang mendjadi konsekwensi dari proklamasi kemerdekaan kita sendiri !

Marilah kita mengukir sedjarah baru dengan usaha-usaha besar !

Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah

ROESLAN MULJOHARDJO

TENTERA RAKJAT

DALAM buku sedjarah perdjuaan rakjat di Sumatera Tengah ini, diuraikan djuga sedjarah perdjuaan ketentaraan di Sumatera Tengah. Menarik untuk diketahui, bahwa sedjarah ketentaraan di Sumatera Tengah dan seluruh Indonesia berbeda pertumbuhannja dengan sedjarah ketentaraan dinegara-negara lain, jang djuga berepolusi.

Djika di Perantjis dan Rusia mereka berepolusi dalam suatu Negara jang telah tersusun baik pemerintahan dan ketentaraannja, maka kita di Indonesia dan Sumatera Tengah chususnja, menjusun pemerintahan dan tentara sambil berepolusi, jang mana sebelum repolusi belum ada pemerintahan dan belum ada ketentaraan Indonesia.

Rakjat jang berepolusi dipelopori oleh para pemudanja mendirikan pemerintahan dalam gedjolak api repolusi, dan mendirikan ketentaraan sebagai apparaat pemerintahan jang mempunyai kemampuan bertindak dengan sendjata untuk melindungi kemerdekaan dari negara jang baru didirikan itu.

Dalam mengamuknja api repolusi, adalah biasa sadja, dan banjak kali terdjadi, bahwa orang-orang dari pemerintahan memimpin ketentaraan dan siasat pertempuran, dan biasa pula terdjadi bahwa seorang tentara memimpin pemerintahan sipil.

Karena sebenarnja jang berepolusi adalah seluruh rakjat, dan tentara merupakan exponent jang bersendjata dari rakjat berdjuaan itu. Sehingga karenanja perdjuaan rakjat adalah perdjuaan tentara, dan perdjuaan tentara adalah perdjuaan rakjat.

Terutama dalam masjarakat Sumatera Tengah ini, dimana tenaga-tenaga pedjuang satu sama lain sangat rapat berdjalin dengan masjarakat, maka lapangan perdjuaan bagi seseorang pemuda mudah beralih, walaupun tudjuannja tetap. Hal ini agaknja jang mendjadikan pertahanan totaal disini begitu hebat, dimana para pemuda jang pagi ini masih memegang tjangkul, pena, atau anak timbangan dan meteran kain, besok bila negara menghendaki, telah memanggul senapang dan mengajunkan pedang menangkis serangan musuh. Dan setelah pertempuran berachir, mereka kembali kepekerdjaannja masing-masing dalam masjarakat, dengan tak menimbulkan kegontjangan apa-apa dalam suasana penghidupan sehari-hari.

Inilah satu faktor masyarakat yang unik di Sumatera Tengah ini, dimana berdjalin-djalinnja aturan-aturan agama, adat istiadat dan pemerintahan dapat mendjamin keamanan dengan sepenuhnya.

Bolchlah dengan bangga saja mengatakan, bahwa semendjak berachirnja perang kolonial, tentara di Sumatera Tengah dapat mempergunakan waktu dengan sepenuhnya untuk memperkuat diri setjara ketentaraan, dan menjerahkan soal-soal keamanan kepada alat-alat pemerintah sipil, sebelum dan sesudah dihapuskannja S.O.B.

Karena di Sumatera Tengah tentara itu adalah rakjat, dan rakjat itu adalah tentara !

Komandan Res. IV T & T I Bukit Barisan

Major A. HOSSEN

BAB I
PERKEMBANGAN POLITIK

BAHAGIAN 1

**PERDJUANGAN MENENTANG PENDJADJAHAN
DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN SEBELUM
PROKLAMASI KEMERDEKAAN.**

Pasal 1.

PERDJUANGAN RAKJAT MINANGKABAU MENENTANG PENDJADJAHAN

PENDAHULUAN

A GAKNJA tidak pernah ada suatu daerah diseluruh Kepulauan Indonesia jang menjambut kedatangan pendjadjahan bangsa Belanda dengan baik. Dan tidak pernah ada satu puak (suku) bangsa Indonesia jang menjambut kedatangan pendjadjahan itu dengan manis, apalagi dengan hati jang reda.

Pendjadjahan bangsa Belanda di Indonesia jang bermula pada tahun 1598 dan diachirinja pada achir tahun 1949 itu, adalah sedjarah pendjadjahan jang dilakukannja dengan nafas jang tidak pernah legah dan dengan penuh ketjemasan. Walau betapapun djuga beratnja tekanan jang diadakannja guna membendung kemungkinan adanja perlawanan dari rakjat jang didjadjhja itu, namun sedjarah pendjadjahan di Indonesia adalah sedjarah jang penuh dengan berbagai peristiwa penumpahan darah.

Beratus matjam perlawanan bersendjata jang dilakukan oleh bangsa Indonesia, jaitu perlawanan jang dapat ditjatat semendjak siasat pendjadjahan itu berlangsung, merupakan pukulan-pukulan jang tidak sedikit meminta pengorbanan djiwa dan harta benda kedua belah pihak.

9 diantara perlawanan-perlawanan itu dilakukan di Sumatera Barat oleh bangsa Indonesia di Minangkabau sendiri. Ke 9 matjam perlawanan itu dapat ditjatat disini sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Perlawanan „MINANGKABAU” | (1645—1667), |
| 2. Pemberontakan „Pariaman” | (1818), |
| 3. Gerakan „Harimau nan Salapan” | (1820), |
| 4. Perdjungan „Sulit Air” | („ ”), |
| 5. Perang PADRI | (1821—1837), |
| 6. Perang „Kerintji” | (1901—1906), |
| 7. Perang „Manggopoh” | (1906), |
| 8. Perang „Kamang” | (1908) dan |
| 9. Pemberontakan „Silungkang” | (1926). |

Biarpun kesembilan matjam perlawanan itu disebut dengan „pemberontakan”, „gerakan”, perdjungan dan sebagainya, tapi semua menampakkan rupa jang sama, jaitu „Perlawanan rakjat Minangkabau karena mereka tidak sudi didjadjah oleh bangsa asing, walau siapapun djuga matjamnja bangsa itu”.

Guna mengikuti serba sedikit djalannja sedjarah perlawanan-perlawanan itu, marilah kita tindjau kembali lembaran sedjarah pada abad-abad jang lalu.

Dan agar agak mudah bagi kita mengikuti kedjadian-kedjadian jang bersedjarah itu dengan lebih mendalam, ada baiknja kalau lebih dahulu kita menindjau masjarakat Minangkabau sebelum kedatangan bangsa dan kebudayaan barat.

Minangkabau sebelum kedatangan bangsa Belanda.

Kebesaran dan kekuasaan keradjaan Modjopahit dipulau Djawa antara tahun 1239 dengan tahun 1520, besar djuga pengaruhnja di Minangkabau. Meskipun Minangkabau tidak merupakan daerah takluk keradjaan Modjopahit, tapi dia tidak dapat melepaskan dirinja dari serba matjam pengaruh keradjaan besar itu, dan agaknya dapat ditetapkan, bahwa kebesaran-kebesaran keradjaan Minangkabau diwaktu itu adalah kebesaran jang di „import” dari peleburan antara kebudajaanja jang asli dengan kebudajaan Hindu jang didatangkan dari dan oleh keradjaan Modjopahit ini. Dan oleh karena ini, maka keadaan dan bentuk masjarakat Minangkabau dalam abad-abad ke 14, 15 dan 16 adalah masjarakat jang bertjorak sendiri. Apa jang didatangkan dari Modjopahit tidaklah dapat mempengaruhi kebudajaan Minangkabau dengan bentuk jang njata.

Dan kedatangan Agama Islam jang selalu mengadakan perobahan-perobahan besar didalam segala bentuk pergaulan hidup rakjat didaerah-daerah jang didatanginja, djuga ikut serta merobah bentuk masjarakat, djuga kebudajaan Minangkabau ini. Adjaran adat jang mendalam dan jang selalu menjadi pedoman dalam semua liku-liku kehidupan rakjat Minangkabau jang sudah berabad-abad lamanja, dalam waktu jang tidak terlalu lama dapat dimasuki oleh adjaran agama Islam itu. Pengaruh dan adjaran agama Islam ini demikian besarnja, sehingga pembesar-pembesar Keradjaan terpaksa harus memberikan tempat jang sebesar-besarnja kepada agama jang baru datang ini. Dan karena itu, maka dalam waktu jang singkat, adat dan agama harus disegandingkan. Norm adat dan norm agama Islam tidak dapat dipisah-pisahkan.

Kedatangan bangsa Belanda ke Minangkabau.

Pada pertengahan tahun 1667 dipelabuhan kota Padang berlabuh kapal dagang Belanda jang pertama. Sebagai djuga dengan siasat untuk menduduki dan mendjadjah, maka kapal jang pertama ini selain dari membawa alat-alat dan bahan-bahan jang akan diperdagangkan djuga penuh bermuatkan serdadu-serdadu „Angkatan Perang” Belanda jang tidak resmi ini dikepalai oleh Cornelis van der Lijn. ²

Pada waktu itu daerah-daerah pantai Sumatera Barat diduduki oleh dan dibawah pengawasan tentera Keradjaan Atjeh. Dari itu dengan sendirinja maka kuntji-kuntji perdagangan berada dalam

tangan bangsa Atjeh inilah. Perasaan tidak senang terhadap Keradjaan Atjeh ini sudah lama djuga bersemi didalam dada pemimpin-pemimpin rakjat Minangkabau, apalagi karena keradjaan Atjeh melakukan system monopoli atas semua rempah-rempah dan bahan export Minangkabau lainnja.

Dari itu kedatangan bangsa dan tentera Belanda dibawah pimpinan Cornelis van der Lijn itu pada mulanja tidak dipandang berbahaya bagi rakjat Minangkabau, bahkan ada jang bersangka, bahwa roda perdagangan mereka akan berdjalan lantjar kembali sebagai sebelum dikuasai oleh tentera Keradjaan Atjeh. Inilah sebabnja maka seorang Radja di Inderapura dengan tidak menaruh tjuriga apa-apa telah sudi menjerahkan daerah pantai negeri Salido sampai ke Painan kepada Kompeni Belanda itu untuk tempat berniaga bagi mereka.

Dengan bantuan tentera Belanda ini, maka dapatlah diusir mereka tentera Keradjaan Atjeh jang menguasai pantai-pantai Minangkabau pada waktu itu. Dengan terusirnja kekuasaan Atjeh itu, Kompeni Belanda mendapat kedudukan jang lebih baik karena tidak ada lagi jang akan mendjadi saingan mereka dalam melakukan perniagaan, dan tambah kuasanya mereka dalam melakukan perniagaan-perniagaan, dan mulai dari saat itu, maka diadakanlah bermacam-macam perdjandjian dengan rakjat, terutama perdjandjian perdagangan setjara monopoli. Dan bersamaan dengan itu bermula pulalah sedjarah pendjadjahan bangsa Belanda di Minangkabau.

Peperangan Minangkabau.

Pengaruh dan kekuasaan tentera dan kompeni Belanda dipantai-patai Minangkabau dengan tjepat mendjadi berkembang. Selain dari menguasai hampir seluruh mata perdagangan, mereka mulai ikut serta mentjampuri urusan pemerintahan anak negeri. Larangan bagi anak negeri untuk membikin garam sendiri dan paksaan membeli garam jang didatangkan oleh kompeni Belanda dari Madura dengan harga jang ditetapkan telah menjebabkan bertambah besarnya kekesalan hati rakjat kepada mereka. Negeri Pauh dan Koto Tangah melakukan pemberontakan jang pertama terhadap kompeni Belanda itu. Dan karena pembikinan garam ini tidak hanya dilakukan oleh penduduk-penduduk atau rakjat-rakjat jang bertempat tinggal ditepi pantai sadja, tapi djuga oleh rakjat jang untuk itu sengadja datang dari pedalaman, maka perlawanan-perlawanan terhadap kompeni Belanda itu berlaku bergelombang-gelombang. Negeri Ulakan dan Pauh djuga memberontak dan mengadakan perlawanan karena larangan pembikinan garam ini djuga.

Selain karena garam ini, perlawanan terhadap kompeni Belanda itu djuga dilakukan karena tidak senangnja rakjat sebab Belanda ikut serta mentjampuri urusan pemerintahan Keradjaan Minangkabau.

Keradjaan Minangkabau pada waktu itu diperintahi oleh seorang Radja Perempuan (Ratu) jang sangat dikasihi dan dipatuhi oleh semua rakjatnja. Maharani ini beroleh gelaran dari rakjatnja dengan sebutan „Tadju Alam” (Bunda Kandung). Bentuk pemerintahan keradjaan merupakan bentuk kesatuan. Tapi semendjak kompeni Belanda beroleh kesempatan untuk memperlemah kesatuan itu, maka kekuasaan di Minangkabau pun mendjadi terpetjah 3 buah, jaitu kekuasaan-kekuasaan jang berpusat di Pagarrujung, di Sungai Tarab dan di Saruaso. Usaha untuk mempersatukan kembali ketiga kekuasaan itu mendjadi satu, telah menjebabkan timbulnja pertempuran-pertempuran bermandikan darah antara rakjat dengan tentera kompeni Belanda.

Dengan demikian, maka pertempuran melawan tentera kompeni Belanda jang pertama di Minangkabau, adalah peperangan untuk mempersatukan kembali kekuasaan jang sudah dipetjah belahkannja dan pemberontakan terhadap monopoli dagang, terutama monopoli garam.

Kedua matjam perlawanan itu berachir pada tahun 1704.

Pemberontakan Pariaman.

Beberapa tahun lamanja sesudah berlangsungnja Perang Minangkabau, perlawanan rakjat seakan terhenti. Kesempatan ini dipergunakan oleh rakjat Minangkabau dan oleh tentera Belanda untuk menjusun kekuatan baru. Dalam pada itu kompeni Belanda selalu berusaha untuk memperbesar lapangan perdagangannja. Lodji-lodji (Factory-factory) baru didirikkannja dibeberapa tempat jang dirasanja penting.

Didaerah pantai Pariaman didirikan mereka lodji-lodji besar, dan daerah serta rakjat ditempat itu seakan diblokir untuk melakukan perhubungan perdagangan keluar negerinja. Hal ini mendjadi bertambah meluapnja kemarahan hati rakjat terhadap usaha dan siasat Belanda ini. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan sendjata mereka tidak berimbangan dengan kekuatan sendjata kompeni Belanda itu tapi api kebentjiaan jang meluap-luap tidak sempat memperhitungkan laba-rugi perlawanan jang akan mereka adakan.

Dengan demikian, maka pada permulaan tahun 1818 rakjat Pariaman melakukan penjerbuan setjara besar-besaran terhadap lodji-lodji (jang selain merupakan bangsal perdagangan djuga dipergunakan untuk perkampungan serdadu-serdadu) kompeni Belanda dibeberapa tempat. Penjerbuan ini dilakukan mereka dengan tiba-tiba dan dengan tjara besar-besaran. Tidak sadja lodji-lodji jang mereka bakar dan musnahkan, bahkan tempat-tempat kedudukan dan gedung-gedung kompeni Belanda lainnja mereka hantjur binasakan.

Dan tentu sadja hal ini tidak dapat dibiarkan begitu sadja oleh kompeni Belanda. Mereka mengadakan pembalasan „jang setim-

pal" menurut ukuran mereka. Serdadu-serdadu Belanda melakukan penembakan dan pembakaran setjara besar-besaran dengan membabi-buta terhadap rakjat dengan tidak mengadakan pengusutan terlebih dahulu. Kota Pariaman pada waktu itu menjadi lautan api.

Karena akibat dari pembalasan tentera Belanda ini, maka sangat banjak rakjat jang melarikan dirinja dari tempat kediaman mereka untuk menjelamatkan dan memperlindungi diri mereka. Disamping itu tidak pula sedikit djumlahnja diantara mereka jang mati dan hilang.

Karena didalam peristiwa ini Belanda memandang dirinja berada dipihak jang menang, maka mereka mengumumkan, bahwa mulai dari saat itu semua daerah kekuasaan keradjaan Minangkabau berada ditangan mereka. Kekuasaan-kekuasaan Minangkabau di Pagarrujung, di Sungai Tarab dan di Saruaso mereka batakkan semua dan ketiga-tiganja oleh mereka dinjatakan telah hapus.

Upatjara penjerahan kekuasaan Minangkabau kepada pemerintah kompeni Belanda ini dilakukan dikota Padang pada tanggal 10 Pebruari tahun 1821. Piagam penjerahan kekuasaan ini ditanda tangani oleh 14 orang jang menamakan diri mereka sebagai wakil-wakil dari berbagai daerah. Kemudian ternjata bahwa ke 14 orang „wakil" ini adalah orang-orang jang sekian lama menjadi kaki tangan tentera Belanda jang dipergunakannja sebagai alat untuk menghasut-hasut dan memetjah belah persatuan rakjat Minangkabau sendiri.

Tanggal penanda tanganan piagam penjerahan itu dipandang sebagai hari pertama dari pendjadjahan Belanda atas seluruh daerah Minangkabau jaitu penanda-tanganan jang dilakukan oleh orang-orang jang berusaha untuk beroleh keuntungan untuk diri mereka sendiri dan tidak setahu rakjat.

Gerakan „Harimau nan salapan".

Kegelisan-kegelisahan dan rasa tidak senang terhadap penipuan jang dilakukan oleh kompeni Belanda pada tahun 1821 itu mendjalar kemana-mana diseluruh daerah di Minangkabau.

Setahun sebelum itu, jaitu pada tahun 1820 beberapa orang alim ulama jang berpengaruh dan bertempat tinggal ditengah-tengah alam Minangkabau telah mempersiapkan diri mereka untuk memelopori pertempuran guna menghapuskan penipuan kompeni Belanda itu. Gerakan pemberontakan dan perlawanan ini dikepalai oleh Tuanku nan Rentjeh dan Tuanku Imam Bondjol.

Gerakan mereka ini mendapat sambutan jang sangat baik dan besar dari rakjat, sehingga dalam waktu jang singkat sadsja mereka sudah dapat menjusun suatu kekuatan dan angkatan perang jang tjukup besar djumlahnja.

Karena gerakan ini dipimpin oleh delapan orang kijai-kijai besar jang dipandang oleh rakjat sebagai pendorong semangat

perdjoangan dan bersemangat matjan, maka gerakan ini dinamai mereka dengan „Gerakan Harimau nan Salapan” (Harimau jang delapan).

Dalam gerakan pembersihan jang mereka lakukan didaerah-daerah jang mendjadi daerah „kekuasaan” Belanda, mereka selalu beroleh kemenangan-kemenangan besar. Kekuasaan keradjaan Minangkabau jang semendjak beberapa tahun jang lampau dipe-tjah-belah oleh kompeni Belanda, mereka persatukan kembali. Pemerintahan alam Minangkabau jang mereka bebaskan itu mereka pusatkan kembali ke Pagarrujung, dimana Tuanku Pasa-man bertindak sebagai kepala Pemerintahan. Hampir seluruh daerah kekuasaan Belanda itu mereka bebaskan kembali.

Gerakan Harimau nan Salapan in iboleh dipandang sebagai langkah pertama dari rakjat Minangkabau dalam menghadapi perlawanan jang berpandjang-pandjang dan tidak sedikit meminta pengorbanan. Dan gerakan ini pula merupakan gerakan jang memelopori Perang Padri jang sangat masjhur itu.

Perdjuangan „Sulit Air”.

Perdjuangan berlangsung hampir bersamaan dengan sedang berkobarnja gerakan Harimau nan Salapan. Timbulnja perdjuangan ini adalah disebabkan karena tidak senangnja beberapa orang ulama jang berpendirian „kolot” atau jang biasa disebut dengan „kaum tua” terhadap tindakan-tindakan jang dilakukan oleh ulama-ulama jang progresip itu.

Melihat timbulnja kekatjauan-kekatjauan jang terdjadi disebabkan karena berlangsungnja perlawanan terhadap kekuasaan kompeni Belanda, maka beberapa orang ulama jang berpendirian pitjik itu pergi dengan tjara menjelundup ke Bengkulu untuk menemui pembesar Inggeris jang berkuasa disana pada waktu itu, jaitu Letnan Djenderal Thomas S. Raffles. Kedatangan mereka adalah untuk meminta pertolongan dan bantuan dari pembesar Inggeris ini untuk mengembalikan keamanan di Minangkabau.

Achirnja Raffles datang dengan tenteranja. Untuk menghantjurkan kekuasaan Minangkabau jang berpusat di Pagarrujung, maka Raffles mendirikan sebuah kubu (benteng) dipinggir danau Singkarak, dinegeri Sinawang. Tapi karena serangan ini tertahan disebabkan oleh perlawanan jang dilakukan oleh rakjat dari arah Sulit Air, maka rentjana penggempuran Raffles itu mendjadi gagal dan Pagarrujung tidak djadi dapat dialahkannya.

Mungkin karena mendapat teguran dari Pemerintah Inggeris, bahwa dia tidak dibolehkan ikut serta mentjampuri perdjoangan antara rakjat dengan tentera kompeni Belanda, maka achirnja Raffles meninggalkan daerah Minangkabau dan kembali ke Bengkulu, dengan meninggalkan benteng jang baru dipersendjatainja (Port Simawang).

Peranan ulama-ulama Islam dalam perdjjoangan menentang pendjadjahan :

Hampir semua perlawanan dan peperangan menentang pendjadjahan Belanda di Sumatera Barat (Minangkabau) dipelopori oleh para alim-ulama atau orang-orang yang terkemuka dalam kalangan Agama Islam. Perlawanan yang sudah berlangsung semendjak bangsa Belanda mendjedjakkan kaki di Minangkabau merupakan perlawanan-perlawanan yang digerakkan oleh dan dari kaum-kaum Kijai inilah. Disamping Tuanku nan Rentjeh dan Tuanku Imam Bondjol, yang selandjutnja akan memegang peranan penting dalam perang Padri nanti, tertjatat pula nama-nama Hadji Miskin, yang kuburannja di Kuala Tinggi (Suliki), Hadji Sumanik dari Tanah Datar dan Hadji Piobang dari Pajakumbuh, sebagai pahlawan perdjjoangan. Ketiga orang ulama besar inilah sebenarnja yang memelopori revolusi besar didalam negeri, jaitu perobahan-perobahan yang menjebabkan timbulnja perlawanan-perlawanan dan pemberontakan-pemberontakan terhadap hukum adat yang sangat kolot dan terhadap pendjadjahan itu. Paham baru yang disebarkan oleh Hadji Miskin dan kawan-kawannja sekembalinja mereka dari Mekkah pada tahun 1803 telah menggerakkan hati rakjat Minangkabau untuk membentji pendjadjahan dan menentang kungkungan adat yang kolot itu. Karena itu maka Hadji Miskin dan kawan-kawannja mendapat tantangan dari dalam dan luar, jaitu dari kalangan pemimpin-pemimpin adat dan dari kalangan tentera Belanda sendiri. Karena dorongan ketiga ulama diatas itu pulalah timbulnja perlawanan yang dipimpin oleh delapan orang ulama tadi.

Kedelapan pemimpin itu adalah : Tuanku Kubu Sanang, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Kalung, Tuanku Kubu Ambalau, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Bansa dan Tuanku nan Rentjeh.

Disamping gerakan perlawanan dan pembersihan yang digerakkan oleh kedelapan Tuanku diatas, tersebut pula nama Tuanku Lintau yang sangat progresip gerak dan tindakannja.

Mengenai Hadji Miskin, yang sampai pada saat ini namanja masih belum hilang dari ingatan rakjat Minangkabau itu, dapat diterangkan, bahwa nama beliau tidak kerap benar terdengar didalam zaman perang Padri karena beliau tidak memegang pimpinan yang langsung, tetapi lebih banjak memberikan djiwa dan semangat kepada perdjjoangan.

Riwajat hidup beliau selandjutnja tidak dapat ditjatat, tapi kuburan beliau sampai sekarang masih dipelihara dengan baik dan kerap kali diziarahi, yang terdapat di Puar Datar, Koto Tinggi didaerah Lima Puluh Kota.

Perang „Padri” .

Diantara peperangan jang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menentang kekuasaan Belanda di Indonesia, perang Padri tertjatat sebagai salah satu perang jang paling banyak meminta korban jiwa dan harta benda kedua belah pihak. Dan perang Padri ini pulalah salah satu perlawanan jang dilakukan dengan tjara tersusun dan teratur dan dengan memakai segala matjam alat peperangan jang ada pada waktu itu.

Perang Padri berlangsung mulai tahun 1823 sampai dengan tahun 1837.

Dia dipimpin oleh seorang ulama Agama Islam jang terbesar di Minangkabau pada waktu itu, jaitu TUANKU IMAM BONDJOL.

Sedjarah perdjoangan jang dipimpin oleh Tuanku Imam Bondjol ini sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun sebelumnja, jaitu mulai dari tahun 1820, dimana dia termasuk salah seorang komandan didalam „Gerakan Harimau nan Salapan”. Dari itu, maka dapatlah dipandang bahwa perang Padri merupakan rentetan perlawanan-perlawanan jang berlangsung sebelum tahun 1823 itu. Karenanja, maka untuk mengetahui sedjarah perang Padri ini dari semula, orang haruslah lebih dahulu mengenal keadaan-keadaan jang terdjadi sebelum peperangan itu berlangsung.

Sebagai pada permulaan uraian ini sudah diterangkan, bahwa sebelum kedatangan tentera dan kompeni Belanda ke Minangkabau, di Minangkabau tengah terdjadi suatu perobahan besar mengenai perkembangan adat istiadat dan perhubungan kemasjarakatan. Usaha perobahan-perobahan itu dilakukan oleh dan atas andjuran beberapa orang Ulama Islam jang menganut aliran baru. Pelopor-pelopor revolusi ini memandang, bahwa pada waktu itu adjaran-adjaran Agama Islam jang sebenarnya sudah dilengahkan oleh penduduk. Adjaran Agama itu hampir tidak diatjuhkan lagi oleh penduduk diberbagai daerah. Perdjudian, pengisapan tjandu dan minuman tuak (alkohol) jang dilarang oleh Agama Islam, pada waktu itu mendjadi kegemaran oleh rakjat. Bahkan ada diantara para alim ulama itu jang berpendapat, bahwa minum rokok dan makan sirih termasuk pekerdjaan jang dilarang dalam Agama.

Untuk mengembalikan ketaatan rakjat mengikut segenap perintah Agama Islam jang sebenarnya itu, maka beberapa orang Ulama itu berusaha dengan segala djalan, diantaranya ialah dengan djalan mengambil over sendiri pemerintahan diberbagai daerah. Negeri-negeri jang mereka bebaskan dari pengaruh dan kekuasaan ninik-mamak (penghulu-penghulu), mereka bersihkan dari semua perbuatan-perbuatan jang mereka pandang kedji dan mungkar. Perobahan ini kadang-kadang dilakukan dengan paksa.

Dan sudah tentu sadja hal ini menimbulkan dua matjam pendapat dan pendirian, ada jang memudji dan ada pula jang mentjela.

Pihak jang mentjela dan sangat tidak setudju dengan tindakan-tindakan itu ialah pihak penghulu-penghulu jang selama ini memegang kekuasaan didalam negeri, jang merasa bahwa mereka dirugikan. Djadi tidaklah mengherankan bila didalam negeri sendiri pada waktu itu timbul kekatajauan-kekatajauan dan penumpahan-penumpahan darah.

Masa inilah jang sebaik-baiknya bagi Kompeni Belanda guna memperbesar pengaruhnja. Penghulu-penghulu jang dikalahkan oleh alim ulama dan kekuasaannya digantikan, bahkan harta bendanya dirampas, banjak jang melarikan diri ke Padang untuk meminta pertolongan kepada kompeni Belanda guna mengembalikan kekuasaan mereka.

Dengan djalan ini bertambah mudahlah bagi Belanda untuk menjalankan siasat „memetjah dan memerintah” daerah Minangkabau.

Tapi hal ini sudah tentu tidak dibiarkan berdjalan begitu sadja oleh para ulama-ulama tersebut.

Siapakah Tuanku Imam Bondjol ?

Tuanku Imam Bondjol pemimpin jang „tertjelak tampak djauh — terberombong tampak hampir” dari Perang Padri ini, diwaktu ketjilnja bernama Peto Sjarif. Dia berasal dari negeri Tandjung Bungo, anak dari Tuanku Radjo Nurdin. Peto Sjarif diwaktu mudanja beladjar hukum agama dengan Tuanku/Tuo di Tjangking IV Angkat dan kemudian dengan Tuanku Nan Rentjeh di Kamang (Bukittinggi).

Karena luas pandangan hidup dan dalam pengetahuannya, maka dia diangkat untuk menggantikan kedudukan seorang Ulama jang berkuasa djuga disuatu tempat jang bernama Kaju Kelat, di Alahan Pandjang (Bondjol), jaitu Datuk Bandaro. Mulai saat itu nama Peto Sjarif ditukar dengan Tuanku Mudo.

Karena sangat banjaknja pengikut-pengikut Tuanku Mudo jang datang beladjar dan menuntut ilmu pengetahuan dunia dan achirat ke Kaju Kelat, maka pada suatu waktu terniat oleh Tuanku Mudo ini hendak mendirikan suatu kota (negeri) baru. Niat ini mendapat sambutan jang sangat besar dari pengikut-pengikut dan murid-muridnja. Karena itu maka ditjarilah suatu tempat jang dirasa dapat memenuhi sjarat-sjarat untuk mendirikan suatu negeri baru itu.

Pilihan mereka achirnja djatuh pada suatu dataran tinggi jang terletak dikaki bukit.

Setelah bekerja giat beberapa lamanja dan dengan mengerahkan segenap tenaga jang ada, beberapa tahun kemudian, maka mereka pun dapatlah membangunkan negeri jang sebagai mereka tjita-tjitakan semula. Selain dari mendirikan beberapa buah rumah

tempat beribadat dan tempat beladjar serta rumah-rumah biasa tempat kediaman, djuga mereka bangunkan sebuah benteng jang kuat dan kokoh.

Kampung jang baru dibangunkan itu, diberi nama oleh Tuanku Mudo dengan BONDJOL. Tuanku Mudo diangkat oleh pengikut-pengikutnja mendjadi kepala dari kampung jang baru bangun itu, dengan gelaran TUANKU IMAM.

Kota Bondjol sangat kerap mendapat serangan dari golongan-golongan jang tidak menyetujui gerak dan tindak serta adjaran-adjaran Tuanku Imam Bondjol. Dari itu benteng jang baru didirikanja itu kerap mendapat serangan dan gempuran. Tapi Bondjol dapat bertahan dengan kuat dan teguhnja.

Pengikut-pengikut Tuanku Imam Bondjol kian sehari kian bertambah banjak, dan karena demikian tidaklah ada suatu djalupun bagi mereka untuk menakuti serangan-serangan jang mungkin datang dari luar.

Pertempuran menghadapi tentera Kompeni Belanda .

Serangan-serangan jang dilakukan oleh tentera Pemerintah Belanda kepada daerah-daerah pedalaman Minangkabau pada permulaan abad ke 19 hampir melumpuhkan kekuatan-kekuatan dari para alim ulama jang memimpin penangkisan serangan dan gempuran-gempuran itu. Perpetjahan antara kaum adat dengan kaum Agama telah menjebakkan lemahnja pertahanan rakjat Minangkabau pada waktu itu. Banjak diantara ulama-ulama pedjoang jang melarikan diri ke Bondjol dan menggabungkan kekuatannja dengan kekuatan jang tengah disusun oleh Tuanku Imam Bondjol. Salah seorang diantara ulama jang datang menggabungkan diri itu adalah Tuanku nan Rentjeh bekas guru Tuanku Imam Bondjol sendiri. Dari itu maka kekuatan dan siasat per-djoangan jang direntjanakan bertambah kuat dan sempurna. Dan seluruh kekuatan kini sudah dapat dikerahkan untuk mengusir dan menumbangkan kekuasaan Belanda dari Minangkabau.

Pada permulaan tahun 1822, dibawah pimpinan Tuanku Imam Bondjol dilantarkanlah serangan jang pertama oleh Kaum Padri ini kepada tentera Belanda jang berpusat di Air Bangis. Dalam pertempuran jang pertama ini, kaum Padri berhasil merampas banjak sendjata-sendjata tentera Belanda, diantaranya 4 putjuk meriam.

(Perkataan „PADRI” adalah nama jang diberikan oleh tentera Belanda terhadap perlawanan jang dilakukan oleh ulama-ulama Minangkabau. „Padri” berasal dari bahasa Portugis „Pater” („vader” dalam bahasa Belanda) jang berarti „Bapa”, jaitu suatu panggilan terhadap pembesar-pembesar Agama).

Pada penghabisan bulan Agustus 1822, pasukan Padri dibawah pimpinan Tuanku Imam Bondjol bergerak untuk membebaskan daerah-daerah Agama dari pendudukan tentera Belanda. Dalam

pertempuran di Kapau, tentera Belanda sangat banyak mengalami kekalahan-kekalahan.

Perdjandjian Perdamaian antara Belanda dengan Padri .

Pada tanggal 22 Djanuari 1824 dinegeri Masang ditanda tangani piagam perdamaian antara tentera Belanda dengan tentera Padri. Surat perdjandjian perdamaian itu ditanda tangani oleh 4 orang ulama dari pihak Padri dan dua orang dari pihak Belanda. Sebabnja timbul perdamaian jang pertama (hanja untuk sementara) ini adalah disebabkan karena kaum Padri buat sementara sudah merasa beroleh beberapa keuntungan dari hasil perjuangannja selama tahun-tahun jang lampau itu, jaitu dengan dikosongkannya kembali beberapa buah negeri ditepi pantai jang sekian lama diduduki oleh tentera Belanda. Biarpun perdjandjian itu djuga menguntungkan kepada pihak Belanda, tapi keuntungan bagi kaum Padri nampaknja djuga sangat besar. Diantara pasal-pasal perdjandjian itu menjatakan, bahwa kedua belah pihak tidak akan diganggu-ganggu dalam melakukan perdagangan pada kedua daerah jang mendjadi daerah kekuasaan masing-masing, dan bahwa kedua belah pihak akan hidup dengan aman dan damai dan tidak akan mentjampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Tapi perdjandjian ini tidak lama umurnja. Belum sampai sebulan sesudah naskah perdjandjian itu ditanda tangani, tentera Belanda kembali menjerang dan menduduki beberapa buah negeri jang menurut perdjandjian tidak boleh didudukinja.

Dalam bulan April 1824 Tuanku Imam Bondjol mengirim surat antjaman kepada pemerintah Belanda, menerangkan, bahwa kalau beberapa negeri jang ditentukan tidak segera ditinggalkan oleh tentera Belanda kembali maka kaum Padri akan segera mengumumkan permusuhan kembali dengan tentera Belanda. Tapi antjaman ini nampaknja tidak mendapat perhatian dari pembesar-pembesar tentera Belanda.

Perjuangan bergolak kembali .

Sesudah melalui beberapa perundingan jang buntu djalannja, maka pada tanggal 7 Djuni 1831 perdjooangan jang beberapa tahun lamaanja dapat dihentikan itu, tiba-tiba bergejolak kembali.

Pertempuran ini dimulai dengan perjuangan untuk membebaskan negeri Naras dari pendudukan tentera Belanda. Djuga di Tiagan terdjadi pertempuran seru antara pasukan-pasukan Belanda dibawah pimpinan Kapten de Stuers jang didaratkan dengan sebuah kapal perang diperairan Pariaman. Perang di Tiagan berlangsung selama 4 hari siang-malam mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Desember 1831. Kedua belah pihak menderita kerugian jang besar.

Tudjuan penjerangan tentera Belanda dalam penjerangan-penjerangannja pada tahun 1831 itu adalah untuk menundukkan

dan menduduki kota Bondjol yang menjadi pusat kedudukan tentera Padri. Tapi Bondjol tidak dapat diduduki dengan mudah. Dari itu sebagai langkah pertama negeri-negeri yang berada disekeliling kota Bondjol itu haruslah direbut dan dikuasai lebih dahulu.

Selama menghadapi tahun-tahun perdamaian dengan Belanda, tentera Padri tidaklah tinggal diam atau berpangku tangan saja. Mereka sudah menduga sedjak semula, bahwa perdamaian dengan Belanda pasti tidak akan panjang usianja. Dari itu disamping memperkuat benteng yang lama, dengan giat merekapun menambah kubu-kubu pertahanan yang lain, yaitu benteng-benteng ketjil yang tersebar disekeliling daerah perbentengan lama itu. Dan sudah tentu saja mereka rahasiakan persendjataan pertahanan mereka itu.

Bondjol diduduki tentera Belanda .

Sesudah menduduki beberapa negeri yang akan menjadi batu lontjatan guna menduduki negeri Bondjol, maka tentera Belanda dibawah pimpinan Letnan Kolonel Vermeulen Krieger memulai gerakannya menuju Bondjol. Pasukannya dibaginya dua. Pasukan pertama dibawah pimpinan Letnan Engelbert van Bevervoorden bergerak melalui Matur (Bukittinggi). Kedua Pasukan itu mulai berangkat dari pangkalannya pada tanggal 26 Djuli 1832.

Penjerbuan untuk menduduki kota Bondjol ini memakan waktu yang sangat lama dan banyak meminta pengorbanan tentera Belanda, karena mereka selalu mendapat perlawanan dimana-mana.

Karena hebatnya tekanan dari tentera Belanda, maka timbullah berbagai pendirian dikalangan pemimpin-pemimpin rakyat Minangkabau. Sebahagian mereka hendak berdamai saja dengan tentera Belanda itu, dan sebahagian lainnya ingin mempertahankan kedudukan negerinya sebagai semula.

Dalam saat kekatjauan didalam negeri ini, Tuanku Imam Bondjol tengah berada di Alahan Panjang dekat Bondjol merampungkan siasat baru untuk menghadapi serangan tentera Belanda tersebut. Dan disinipun timbul perselisihan paham menghadapi serangan tentera Belanda itu. Karena sebal hatinja, maka Tuanku Imam Bondjolphun kembali ke Bondjol. Sesudah merantjang siasat baru dengan beberapa orang pembantunya, maka beliauupun meninggalkan Bondjol untuk sementara tinggal di Lubuk Sikaping.

Pada tanggal 21 September 1832 kota Bondjol diduduki oleh tentera Belanda tanpa perlawanan tapi dengan beberapa sjarat. Diantara sjarat-sjarat itu adalah penentuan bahwa tentera Belanda tidak dibenarkan untuk menduduki tempat-tempat beribadat dan tidak boleh menjampuri urusan agama serta harus selalu menjaga keamanan dan ketenteraman umum.

Tapi sayang, sjarat-sjarat itu tidak pernah dipenuhi oleh tentera Belanda itu, bahkan untuk tempat mereka tinggal, sebagai tangsi

mereka pakai mesdjid, langgar, surau dan lain-lain tempat jang mereka sukai.

Pada waktu itu boleh dikatakan hampir seluruh daerah Minangkabau dapat diduduki oleh tentera Belanda dan di beberapa tempat mereka mendirikan benteng-benteng pertahanan. Paksaan dan tekanan terhadap penduduk sangat besar. Dalam tjatatannja mengenai keadaan dan penderitaan penduduk pada waktu itu diterangkan oleh Kolonel de Stuers sebagai dibawah ini :

„Anak negeri jang sudah kesal hatinja itu disuruh pula bekerdja keras untuk menggali dan membuat benteng-benteng dan djalan-djalan dan mengadakan bahan-bahan jang perlu-perlu untuk djalan dan djembatan; pendeknja tiada tempo anak-anak negeri dipaksa bekerdja untuk keperluan Gubernemen. Demikian djuga kelakuan tentera-tentera banjak jang menjakitkan hati anak negeri.

Supaja Gubernemen mendapat penghasilan, diperkembang pengisapan tjandu dengan giat. Opsir-opsir dan pegawai-pegawai Gubernemen disuruh berlumba-lumba mendjual tjandu”.

Demikianlah kekotoran siasat gubernemen Belanda pada waktu itu di Minangkabau menurut apa jang ditulis oleh Kolonel de Stuers.

Dakjat memberontak kembali.

Rentjana untuk memberontak dan menumbangkan kekuasaan pemerintahan Gubernemen Belanda di Minangkabau sudah lama direntjanakan oleh pemimpin-pemimpin adat dan agama. Pendudukan tentera Belanda di Bondjol sangat menjakitkan hati rakjat. Dari itu mereka berpendapat, bahwa usaha pertama untuk mengusir tentera Belanda dari Minangkabau haruslah dimulai dari Bondjol.

Demikianlah, sebagai direntjanakan semula, dengan tidak diduga-duga lebih dahulu oleh tentera Belanda itu, pada hari Djum'at tanggal 11/12 Djanuari 1838 pukul 3 subuh, benteng Bondjol diserbu oleh barisan rakjat jang dipimpin oleh dua orang hulubalang, jaitu Tuanku Nan Garang dan Radja Lajang. Penjerbuan ini dilakukan mereka dengan diam-diam dan membunuh tentera Belanda jang ada dibenteng itu. Dalam masa setengah djam sadja mereka memusnahkan semua isi benteng itu jang terdiri dari 36 orang tentera Belanda dan 19 orang tentara jang berasal dari Djawa dan Ambon.

Benteng-benteng di Lubuk Sikaping, di Tarantang Tunggang dan di Lubuk Ambalau djuga diserbu dengan serentak.

Pemberontakan rakjat ini baru diketahui oleh Letnan Kolonel Vermeulen Krieger jang pada waktu itu mendjadi kepala Pemerintah Belanda di Padang Darat, pada tanggal 12 Djanuari 1833.

Tidak sadja serdadu-serdadu jang berada didalam benteng Bondjol jang digempur oleh barisan rakjat ini, tapi djuga ditempat-tempat pertahanan mereka jang lainnja djuga dihantjurkan. Dalam

beberapa hari sadja, tidak seorangpun diantara tentera Belanda jang masih hidup jang tinggal didaerah Bondjol.

Sajang, didaerah-daerah Agam, Tanah Datar dan Lima Puluh Kota pemberontakan serentak itu tidak dapat dilakukan karena surat-surat perintah untuk itu dapat ditangkap oleh pemerintah Belanda dari tangan seorang kurir.

Karena ketahuannya rentjana ini, maka dengan segera diambil tindakan-tindakan jang dirasa perlu oleh pembesar-pembesar tentera Belanda bersama dengan Residen Belanda di Sumatera Barat. Diantara tindakan-tindakan jang diambil itu, ialah menangkap serta membuang dan membunuh pemimpin-pemimpin rakjat jang mereka pandang bersangkutan dalam pemberontakan itu. Diantara mereka jang dibuang itu terdapat Daulat Jang Dipertuan Besar di Pagarrujung. Dari tjatatan jang dapat dikumpulkan, mereka jang tersebut dibawah ini didjatuhi hukuman gantung sampai mati, jaitu :

1. Tuanku Pamansiangan Kotolawas (Enam Kota),
2. Pakih Sulaiman, anak beliau,
3. Pakih Mangkala, djuga anak beliau,
4. Datuk Bandaro dari negeri Gunung,
5. Datuk Bandaro Nan Gapuk, kepala Laras VI Koto,
6. Datuk nan Gele, Koto Lawas,
7. Datuk Bandaro Putih, Kotolawas,
8. Datuk Pamuntjak, Kotolawas,
9. Datuk Sati, Pandai Sikat,
10. Datuk Bandaro, Koto Baru,
11. Datuk Sinaro Pandjang, Air Angat,
12. Orang Kajo Tuo,
13. Datuk Putih dari Singgalang,
14. Datuk Putih, Pandai Sikat, dan
15. Hulubalang Diatjeh.

Tuanku nan Tjadik dibuang ke Betawi dan Tuanku Alam ditembak sampai mati.

Menurut penjelidikan jang dilakukan sesudah itu, dan berdasar kepada orang-orang jang didjatuhi hukuman mati pada permulaan tahun 1833 itu, ternjata bahwa pemberontakan serentak itu djuga disokong oleh orang-orang jang dahulunya tergolong kepada golongan „kaum Hitam” (golongan adat) jang oleh pemerintah Belanda dipandang sebagai golongan jang memusuhi „golongan putih” dan berpihak kepada tentera Belanda.

Djadi njatalah, bahwa perlawanan ini bukanlah perlawanan jang dilakukan oleh segolongan orang, tapi dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan sendirinja maka timbullah pertanyaan-pertanyaan, kenapa dalam pemberontakan jang sekali ini, timbul persatuan rakjat untuk menentang kekuasaan Gubernemen Belanda ?

Tiga hal pada waktu itu jang mendorong rakjat bersatu mengadakan pemberontakan :

Pertama : „Golongan Hitam” jang pada mulanja berbesar hati karena tentera Belanda dapat melumpuhkan perlawanan „golongan putih” dan mengembalikan kekuasaan-kekuasaan mereka sebagai pemimpin rakjat, achirnja menjesal karena diperlakukan rendah oleh Gubernemen Belanda, karena mereka dipaksa bekerdja berat untuk menggali dan mendirikan benteng-benteng pertahanan tentera Belanda. Disamping itu mereka selalu mendjadi sasaran edjeikan dari „golongan putih” jang menggelarkan mereka dengan „tukang-angkat kotoran orang Belanda” dan lain-lain. Hal ini bagi mereka merupakan suatu penghinaan jang sangat besar.

Kedua: Sikap dan peraturan-peraturan jang dibikin oleh Residen De Stuers untuk memungut bea dan tjukai sangat menge-salkan kedua golongan tersebut. Disamping itu perlakuan jang menganak tirikan dan menganak kandung penduduk sangat mereka sesali. Orang-orang Tionghoa diberi kedudukan jang lebih tinggi dari penduduk asli dalam segala hal. Pemungut-pemungut bea pada waktu itu terdiri dari orang-orang Tionghoa jang memperlakukan penduduk dengan tjara jang kasar.

Ketiga: Diadakannja tjukai penjabungan ajam jang sangat digemari oleh „golongan hitam”, pada hal sebelum itu tidak dipungut bea apa-apa dan tidak pula ditentukan suatu tempat untuk itu. Dan meluaskan pendjualan tjandu dan minuman keras jang sangat ditentang oleh „golongan putih”.

Ketiga soal inilah jang mendjadi pendorong kepada kedua golongan rakjat itu untuk bersatu guna mengadakan pemberontakan serentak.

Perang Bondjol jang pertama .

Sesudah terusirnja semua tentera Belanda dari Bondjol dan daerahnja, maka Tuanku Imam Bondjolpun mulailah memperkuat benteng-benteng pertahanan Bondjol dan menjusun kekuatan pasukannja untuk meneruskan pertempuran sampai tentera dan kekuasaan Belanda dapat diusir dari Minangkabau.

Selain dari menambah banjaknja kubu pertahanan, djuga dilakukan pembagian-pembagian tugas dan kewadajiban diantara hulu-balang-hulubalang jang didjadikan pemimpin-pemimpin pasukan.

Laporan-laporan jang diterima Tuanku Imam dari mata-mata jang dikirimnja ke Padang dan lain-lain tempat jang diduduki oleh tentera Belanda menjatakan kesibukan-kesibukan besar jang tengah terdjadi dalam kalangan tentera Belanda itu. Diantara kabar jang disampaikan kepada Tuanku Imam menjatakan, bahwa tentera Belanda kian diperbesar dengan tentera-tentera jang didatangkan dari pulau Djawa, dan perlengkapan-perengkapan alat sendjata berat dan ringan djuga begitu. Bahkan ada kabar-kabar jang menjatakan, bahwa penggempuran kota Bondjol jang akan dilakukan

Belanda itu akan dipimpin sendiri oleh Gubernur Djenderal Hindia Belanda van den Bosch.

Pada tanggal 23 Agustus 1833 benarlah van den Bosch tiba di Padang dengan pasukan jang besar untuk menduduki dan menaklukkan Bondjol. Sebelum penjerangan itu dilakukan, lebih dahulu diaturnja siasat pengepungan kota Bondjol ini dilakukan dari 3 djurusan, jaitu dari djurusan Bukittinggi melalui Matur, dari djurusan Pariaman dan Tiku dan dari djurusan Rao dan Lubuk Sikaping.

Tanggal 6 September 1833 berangkatlah satuan penggempur jang pertama dari Bukittinggi dikepalai oleh G.G. van den Bosch sendiri dengan dibantu oleh Djenderal Riesz. Dalam perdjalanannja menudju Bondjol, pasukan ini selalu menghadapi perlawanan dari rakjat, dan beberapa lamanja serangan mereka tertahan didaerah Matur. Perlawanan pasukan rakjat sangat hebat, sehingga van den Bosch harus memerintahkan agar pasukan jang dikepalai oleh Residen (Kol. Elout) jang akan memimpin penjerangan dari djurusan Pariaman dan Tiku, harus dimintakan bantuannja guna memperkuat perlawanan tentera Belanda di Matur itu. Tapi Elout sendiri tidak dapat mengabulkannja permintaan Bosch karena pasukannja itu dikepung pula oleh barisan rakjat.

Achirnja karena djalan Matur ini tidak dapat ditembus oleh pasukan van den Bosch itu maka diperintahkannya agar pasukannja kembali ke Bukittinggi dan penjerangan itu dihentikannja. Dalam perlawanan jang dilantjarkan oleh rakjat di Matur ini selama 4 hari, tentera Belanda kehilangan 60 orang tenteranja jang meninggal diantara mana terdapat Letnan Rietveld jang sudah banjak berdjasa kepada tentera penjerang itu.

Pasukan penjerang jang dipimpin oleh Kol. Elout djuga tidak beruntung didalam usahanja untuk mentjapai kota Bondjol. Di Tiku dia mendapat perlawanan jang sangat sengit sehingga dengan susah payah barulah dia dapat menjelamatkan diri dan pasukannja dari pengepungan barisan rakjat dan terpaksa meninggalkan beberapa putjuk meriamnja jang berukuran besar dan ketjil.

Pasukan jang berangkat melalui djurusan Rao dan Lubuk Sikaping dibawah pimpinan major Eilers lain pula pengalamannja. Dalam instruksi jang diberikan kepadanja dinjatakan, bahwa nanti pada tanggal 18 Agustus 1833 dia akan menerima penambahan kekuatan dari Natal. Bersama dengan pasukannja jang baru itu, dia akan melakukan pengepungan Kota Bondjol sementara menunggu kedatangan kesatuan-kesatuan dari Bukittinggi dan dari Pariaman, dan kemudian serangan akan dilakukan bersama-sama. Pada tanggal 12 September 1833 Major Eilers berangkat dari Rao dengan pasukannja jang dikepalainja jang tidak kurang dari 1600 orang tentera dan tentera bantuan. Tanggal 18 September mereka-pun sampai kedekat Kota Bondjol, jaitu kira-kira 36 djam terlambat dari djangka waktu jang ditetapkan semula. Karena pasukan-pasukan dari Bukittinggi dan Pariaman masih belum

sampai, maka dia tidak berani memulai penjerangan terhadap Bondjol. Karena persediaan makanan dan obat-obat bedilnja bergantung kepada kedua pasukan jang didjandjikan semula, maka dengan seketika itu djuga mereka mengalami kekurangan bahan makanan. Dari itu sesudah bermusjawarat dengan opsir-opsirnja, mereka mengundurkan diri kembali ke Rao. Dalam perdjalan mundur ini, mereka diserang oleh pasukan rakjat dan berpuluh-puluh orang tenteranja menemui adjal. Dengan menanggung banjak kesengsaraan dan kelaparan achirnja pada tanggal 23 September 1833 sampailah pasukan ini di Rao kembali.

Penjerangan terhadap kota Bondjol kali jang keduanya inipun gagal sebelum penjerangan dimulai. Gubernur Djenderal van den Bosch merasakan sendiri betapa sulitnja untuk menduduki dan menundukkan Bondjol. Dari itu pada malam hari tanggal $\frac{2}{3}$ Oktober 1833 dia berangkat kembali ke Djakarta dan sebagai wakilnja di Padang diangkatnja dua orang Komisaris untuk memperkuat pemerintahannja di Sumatera Barat, jaitu J.J. van Sevenhoven dan Djenderal Major J. G. Riesz.

Bertukar siasat.

Karena dirasa belum mungkin tentera Belanda dapat menundukkan kota Bondjol dengan kekuatan sendjata, maka kedua wakil van den Bosch itu menukar siasatnja dengan tipu muslihat.

Pada tanggal 25 Oktober 1833 dikeluarkannja sebuah maklumat pemerintah untuk membudjuk pemimpin-pemimpin Padri dan pemimpin rakjat lainnja. Maklumat pemerintah Belanda ini merupakan suatu perdjandjian perdamaian jang direntjanakan sendiri oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Dan karena bunji serta isinja sangat „manis” didengar telinga, maka pada waktu diumumkannja maklumat itu, diberbagai tempat di Sumatera Barat diadakan keramaian setjara besar-besaran.

Maklumat tersebut sangat pandjang isinja, dan oleh karena itu dikalangan rakjat namanja masjhur dengan „**Pelakat Pandjang**” (Pelakat = maklumat). „Pelakat Pandjang” ini ditulis dengan huruf Arab karena dia ditudjukan kepada Tuan-tuanke dan Lebai-lebai jang mendjadi pemimpin Padri dan salinannja dibikin banjak-banjak agar tersiar pula dikalangan Penghulu-penghulu (Ninik-Mamak), Datuk-datuk dan pemimpin golongan adat seluas-luasnja. Maklumat jang pandjang itu berisi beberapa andjuran dan perdjandjian jang antara lain bermaksud:

1. Agar perselisihan didalam negeri, terutama antara kaum Ulama dengan kaum Adat dapat dihabisi dengan tjara damai menurut setjara adat dan undang-undang kedua golongan itu, dan pemerintah Belanda tidak akan mentjampurinja.
2. Pemerintah Belanda tidak akan mentjampuri urusan rumah-tangga negeri masing-masing. Pemilihan dan pengangkatan penghulu-penghulu dan alat pemerintahan lain-lain tidak akan

disertai oleh pemerintah Belanda. Pengadilan-pengadilan sengketa dan kedjahatan didalam negeri hanja akan diurus oleh Penghulu-penghulu itu sendiri.

3. Penghulu-penghulu jang diangkat oleh Pemerintah Belanda sebagai wakilnja, akan diberi gadji oleh pemerintah Belanda. Mereka ini hanja akan bertindak sebagai orang perantara sadja antara rakjat dengan pemerintah Belanda. Lain dari itu dia tidak mempunjai kekuasaan lain.
4. Pemerintah Belanda berdjandji akan memberikan bantuannja melindungi Minangkabau dari serangan musuh dari luar, dan sebaliknya pasukan rakjat haruslah memberikan bantuannja pula bila kedudukan pemerintahan Belanda diserang oleh negeri lain.
5. Pemerintah Belanda tidak akan memungut bea atau padjak apa-apa dari rakjat, tapi diandjurkannja agar penanaman kopi dan meritja diperluas dan dipergiat untuk keuntungan kedua belah pihak.

Pada mula lahirnja „Pelakat Pandjang” ini disambut dengan gembira oleh rakjat karena mereka djuga sudah agak letih menghadapi peperangan jang hampir tidak berkeputusan itu. Tapi lambat-laun ternyata bahwa „Pelakat Pandjang” tidak mungkin dapat mendjamin tindak dan gerak jang djudjur dari alat kekuasaan pemerintah Belanda di Sumatera Barat. Hanja 5 bulan sadja lamanja udara Minangkabau jang agak reda dan tenang sesudah maklumat itu keluar, karena dia dibikin oleh pihak jang terdesak dan hanja dipakai sebagai siasat sadja.

Perang Bondjol kedua.

Pada tanggal 14 Djuni 1834 dengan tiba-tiba Komandan tentera Belanda di Sumatera Barat memerintahkan dan memimpin tentera nja menjerang Matur. Penjerangan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Bauer. Dengan tidak banjak mendapat perlawanan, benteng-benteng jang dipertahankan dengan gigih oleh rakjat dengan mudah djatuh ketangannja.

Mulai dari hari itu tentera Belanda jang dipimpin oleh Bauer melakukan serangan besar-besaran dengan segala kekuatan jang ada padanja. Tidaklah mengherankan bila dalam waktu jang tidak begitu lama banjak negeri-negeri jang sekian lama tidak dapat ditundukkan, sekarang dapat diduduki oleh tenteranja. Tudjuan serangannja jang terutama adalah untuk membuka djalan ke kota Bondjol.

Karena serangan itu dilakukan didalam suasana perdamaian menurut apa jang tertjantum didalam „Pelakat Pandjang”, maka barisan rakjat tidak dapat dengan segera mengadakan perlawanan dan pertahanannja. Sungguhpun demikian serangan tjurang ini tidaklah diterima begitu sadja oleh barisan rakjat dan mereka mengadakan perlawanan jang sengit dimana mereka bisa dan

sempat. Tanggal 3 Agustus 1834 barisan rakjat melantjarkan serangan pembalasan difront Sipisang dan menjerang benteng tentera Belanda di Bamban. Perlawanan jang seru ini berdjalan agak lama djuga dan ditangkis dengan sepenuh kekuatan oleh tentera Belanda jang mempertahankan benteng itu.

Tanggal 4 September 1834 barisan rakjat gelombang ke II mengadakan gempuran pula, meskipun tidak tersusun dan teratur sebagai serangan-serangan jang mereka lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan karena serangan-serangan pembalasan ini, maka kemadjuan tentera Belanda djadi terhambat karenanja.

Dalam suatu serangan malam jang dilantjarkan oleh barisan rakjat di Sipisang, pasukan Bauer mendjadi terkepung. Pada waktu itu Tuanku Imam Bondjol mengutus sebuah delegasi jang terdiri dari 4 orang Tuanku ke Matur guna mengusulkan „Cease fire” kepada Bauer. Usul gentjatan sendjata ini, mendapat persetudjuan kedua belah pihak. Salah satu fasal gentjatan sendjata ini, ialah, bahwa rakjat berdjandji akan memperbaiki sebuah djembatan sungai Masang jang memperhubungkan Matur dengan Lubuk Sikaping, djalan jang akan dipakai oleh pasukan Belanda untuk mengepung kota Bondjol.

Tapi tenaga rakjat jang dikerahkan untuk itu bukanlah dipergunakan untuk membikin dan memperbaiki kerusakan-kerusakan djembatan tersebut, hanja dipakai untuk mendirikan kubu-kubu dan benteng-benteng pertahanan jang baru dihadapan kedudukan tentera Belanda sendiri. Hal ini baru diketahui oleh tentera Belanda pada hari berachirnja perdamaian gentjatan sendjata ini, jaitu pada waktu dilantjarkannja serangan jang besar-besaran oleh barisan rakjat terhadap pertahanan tentera Belanda dipinggir Sungai Masang tersebut.

Kembali tentera Belanda menemui kegagalan untuk mengepung dan menundukkan Bondjol. Pasukan Letnan Kolonel Bauer harus surut kembali kepangkallannja dengan menderita kerugian jang besar.

Perang Bondjol ketiga.

Kegagalan-kegagalan jang dialami oleh tentera Belanda untuk menduduki dan menundukkan kota Bondjol selama 3 tahun jang lampau; pengorbanan jang dialaminja dan jang terbuang dengan pertjuma sadja selama mengadakan serangan-serangan itu; tipu muslihat dan ketjurangan-ketjurangan serta djerat-djerat jang dipasang untuk menipu dan mendjerumuskan serta memetjah-belahkan persatuan rakjat dengan kaum Padri, tidaklah berachir sampai disana sadja.

Rentjana untuk menduduki dan menundukkan Bondjol serta menghabisi kekuasaan pemimpin-pemimpin Padri ini bukanlah rentjana dari pemerintah Belanda daerah Sumatera Barat sadja, tapi adalah rentjana dari pemerintah pusatnja di Betawi dan di

Den Haag. Dari itu tidak putus-putusnja direntjanakan muslihat dan siasat baru untuk menghadapi kaum Padri ini.

Sesudah mengalami kekalahan di Matur dalam serangannya terhadap Bondjol jang kedua kalinya, beberapa bulan lamanya suasana menjadi tenang dan aman. Tapi ketenangan ini hanya kelihatan dari luar saja. Dengan diam-diam kedua belah pihak sama-sama mempersiapkan diri, terutama kaum Padri jang sudah kerap kali kena tipu oleh perdjandjian-perdjandjian bagus dari tentera Belanda, tidak lagi menaruh kepertajaan sedikit djuga terhadap kedjudjuran musuhnya.

Pada tanggal 22 April 1835 sepasukan besar tentera Belanda mulai bergerak dari Matur ke Sipisang dan membikin kubu pertahanan dipinggir sungai Masang. Sepasukan jang lain bergerak dari Simawang, (Batusangkar) menuju Kumpulan, dipinggir sebuah sungai. Perlawanan-perlawanan dari rakjat tidaklah banyak mereka temui sampai ketanggal 27 April 1835.

Pada tanggal itu pasukan Belanda jang tengah berkubu ditepi sungai Kumpulan itu diserang oleh pasukan tentera Padri dengan tiba-tiba dari segala djurusan. Pengepungan ini dilakukan mereka dengan teratur, dan dengan demikian maka kemadjuan tentera Belanda ini menjadi terhalang dan banyak mengorbankan jiwa dan harta benda tentera dan pasukannya.

Pada waktu serangan barisan rakjat menghebat, tiba-tiba datanglah balabantuan tentera Belanda jang sedang terkepung itu, dan dengan demikian maka kehantjurannya buat sementara dapat dipertahankannya. Pada tanggal 3 Mei 1835 kedua pasukan Belanda jang baru bergabung itu melantjarkan serangan jang besar dibawah pimpinan Letnan Kolonel Bauer dimana komandan ini kena randjau kakinya dan pimpinan selandjutnja diserahkan kepada seorang major dibawahnja. Penjerangan jang berlangsung beberapa hari lamanya itu meminta pengorbanan jang sangat banyak dari tentera Belanda dan beberapa orang opsirnja meninggal. Pada malam tanggal 6/7 Djuni 1835 pasukan Belanda jang sudah diperkuat dengan tenteranja jang masih segar melantjarkan penjerangan dari Kumpulan menuju kelembah Alahan Pandjang untuk menembus pertahanan rakjat dikubu Padang Lawas, jaitu sebuah benteng rakjat jang letaknja hanya kira-kira 1 km saja dari Kota Bondjol. Pertempuran untuk menduduki dan mempertahankan benteng itu berlangsung dengan hebat dan kedua belah pihak berdjuaug dengan gigih. Achirnja pasukan Padri terpaksa melepaskan benteng itu sesudah kedua belah pihak memberikan korban jiwa jang beratus-ratus orang djumlahnja.

Dengan didudukinja benteng itu oleh Tentera Belanda, maka penjerangan terhadap kota Bondjolpun dapat dilantjarkan dengan tembakan meriam-meriam besar, pada tanggal 17 Djuni 1835.

Tapi penggempuran tembakan-tembakan meriam itu tidaklah memberikan hasil memuaskan bagi tentera Belanda karena seba-

gian besar diantara sasaran meriam itu sudah dibongkar lebih dahulu oleh tentera Padri, terutama atap mesdjid yang mudah terbakar.

Sementara itu kubu pertahanan tentera Belanda diansurkan memadjukannya setapak demi setapak kemuka sehingga mentjapai jarak yang hanya beberapa ratus meter sadja dari kota Bondjol. Dalam pertempuran yang berlangsung selama sepuluh hari sampai tanggal 21 Djuli 1835 tentera Belanda kerugian 257 orang yang luka-luka dan mati, diantaranya banjak opsir-opsirnja.

Kekalahan yang diderita oleh pasukan Belanda inilah yang menyebabkan bertambah meluapnja semangat perdjuaan rakjat dan tentera Padri. Dari mana-mana Tuanku Imam Bondjol menerima balabantuan yang tidak sadja terdiri dari hulubalang-hulubalang dan pahlawan-pahlawan yang gagah berani, tapi djuga terdiri dari obat-obat bedil dan sendjata-sendjata perang lainnja.

Pada tanggal 9 Djuli 1835 tentera Belanda menerima balabantuan baru yang terdiri dari pasukan yang didatangkannya dari Air Bangis dibawah pimpinan Letnan Schultze. Segera djuga pasukan yang baru datang itu diperintahkan untuk menjerang dan menduduki kubu pertahanan rakjat di Lubuk Ambatjang yang letaknya lebih ketinggian dari benteng-benteng lainnja. Dengan kekuatan 1500 orang serdadu dan barisan pembantu dan dengan memberikan pengorbanan yang banjak pula, benteng itu achirnja dapat diduduki oleh barisan Letnan yang masih muda ini. Menurut tjatatan untuk merebut benteng yang satu itu sadja, tentera Belanda mengorbankan tidak kurang dari 50 orang tentera yang paling tjakap dan yang sudah berdjasa kepadanya.

Dalam pertengahan bulan Agustus 1835 Letnan Kolonel Bauer menerima balabantuan yang baru didatangkan dari Betawi dengan jumlah yang sangat besar dan bersendjatakan meriam-meriam yang pada waktu itu sangat dibutuhkannya.

Mulai dari permulaan bulan September 1835, tentera Belanda melantjarkan serangan besar-besaran yang tidak putus-putusnja terhadap pertahanan-pertahanan tentera Padri yang bertahan disekeliling kota Bondjol. Penjerangan-penjerangan dilakukan oleh Letnan Kolonel Bauer dari segala djurusan. Dalam mempertahankan Bondjol dari penjerangan tentera Belanda yang ketiga kalinja ini, ikut djuga memperlihatkan keperwiraannya berpuluh orang kaum wanita yang masih muda belia. Kesatria-kesatria puteri belia ini tidak hanya menjumbangkan tenaganya untuk merawat tentera-tentera yang luka, tapi djuga ikut mengajunkan kelewangnja dan menjerbu kekubu pertahanan musuh dengan gagah beraninja.

Dalam suatu serangan malam yang dilakukan oleh tentera Padri terhadap kubu pertahanan tentera Belanda yang terdepan, tentera Belanda kehilangan sangat banjak pula tenteranya yang sekian lama sangat dibanggakannya. Dan karena itu maka terasalah oleh

pimpinan dan opsir-opsir tingginya jang lain kelemahan-kelemahan tenteranya untuk menghadapi serangan dan gempuran rakjat selanjutnya.

Penjerangan dan pengepungan jang dilakukan oleh tentera Belanda selama 3 bulan lamanja tidaklah membawa kemajuan dan kemenangan jang menjenangkan baginya. Berkali-kali didatangkan bantuan-bantuan dari berbagai tempat jang sudah didudukinya untuk mengisi kekurangan tenaga-tenaga jang sudah kosong dan untuk lebih memperkokoh kedudukan barisan jang telah ada.

Pada tanggal 10 Nopember 1835 kembali Letnan Kolonel Bauer menerima bantuan jang kuat jang terdiri dari 1800 orang serdadu jang lengkap alat sendjatanya dan masih segar. Tapi kemajuan tentera Belanda jang baru didatangkan itu terhalang dalam perjalanannya karena adanya bandjir besar didaerah Alahan Pandjang. Kesempatan ini tidak dibiarkan lalu begitu sadja oleh Tuanku Imam Bondjol. Selain dari melantjarkan serangan jang besar-besaran djuga dikobarkannya semangat rakjat ditempat-tempat lain untuk mengepung dan menghalangi kemajuan-kemajuan tentera Belanda jang akan didatangkan itu.

Dalam serangan-serangan jang dilakukannya pada permulaan bulan Desember 1835 tentera Belanda dapat menduduki beberapa buah kubu pertahanan rakjat jang ketjil dari kampung Alai dan Sungai Alahan Pandjang. Tapi sementara itu sebanjak 2070 orang serdadunya jang menjerang Alahan Mati, sebuah lembah di Alahan Pandjang terkepung sama sekali dan hanja menunggu mautnya. Dan untuk menjelamatkan pasukannya jang terkepung itu, maka beberapa tempat jang sangat penting terpaksa harus dilepaskan kembali oleh Tentera Belanda. Karena itu, maka sebanjak 8 putjuk meriam berbagai ukuran dapat dirampas oleh Barisan Padri disamping berbagai matjam barang rampasan lainnya.

Letnan Kolonel Bauer jang memimpin penjerangan tentera Belanda ke Bondjol dan jang sudah sangat banjak „djasaanja” kepada pemerintahnya ini digantikan oleh Djenderal Major Tit. Cleerens, karena kesehatan Bauer tidak mengizinkanja lebih lama tinggal didaerah Bondjol. Pada bulan September 1836 panglima perang Belanda ini meninggal dunia di Betawi disebabkan penjakit jang dibawanya dari Bondjol.

Dibawah pimpinan komandan jang baru ini, disusunlah kembali oleh tentera Belanda siasat pengepungan dan penjerangan setjara besar-besaran. Sebuah komisi penjelidikpun disusun untuk mempe-ladjari dan menjelidiki kekuatan Angkatan Perang kaum Padri jang dipimpin oleh Tuanku Imam Bondjol ini.

Pengepungan dan serangan terhadap Bondjol diperhebat.

Karena tidak mempanja tipu muslihat untuk mendjebak Tuan-ku Imam, maka pengepungan dan penjerangan terhadap kota

Bondjol diperhebat. Sebuah pasukan baru didatangkan dari Betawi jang terdiri dari 1500 orang (6 kompi) serdadu Ambon digabungkan pula dengan pasukan tentera jang dibawa oleh Djenderal Cleerens dan direntjanakan untuk memulai penjerangan baru.

Mendjelang dapat disiapkannja segala alat keperluan perang, terutama obat-obat bedil oleh Djenderal Cleerens, dengan perantara residen Francis maka dilakukan pula perdjandjian gentjatan sendjata buat sementara.

Saat „beristirahat” ini dipergunakan oleh kedua belah pihak untuk memperkuat kedudukan dan pertahanannja masing-masing. Tapi sebelum habis djangka waktu perdjandjian itu, dengan tiba-tiba tentera Belanda melakukan penembakan besar-besaran terhadap kota Bondjol. Oleh sebab itu maka semangat perdjjuangan makin menggelegak dikalangan pasukan Padri karena ketjurangan tentera Belanda itu. Kedatangan Cleerens dengan pasukannja jang besar itu tidaklah dapat mematahkan semangat perdjjuangan dan perlawanan rakjat.

Pada suatu hari dibulan Desember 1836 oleh Djenderal Cleerens diperintahkan untuk menduduki sebuah benteng jang pada mulanja disangka dan dipandang sudah dikosongkan oleh tentera Padri. Untuk penjerbuan ini dipergunakan tenaga dari 900 orang tentera Belanda. Dalam gerakannja jang pertama mereka tidak mendapat perlawanan suatu apa dari tentera Padri dan semua menjangka bahwa Bondjol pada hari itu djuga akan dapat ditaklukkan. Tiba-tiba dengan tidak disangka-sangka mereka berhadapan dengan sepasukan tentera Padri jang berpakaian putih dan melakukan penjerangan pembalasan sehebat-hebatnja. Karena mendapat sambutan jang sangat tiba-tiba itu, maka pasukan Belandapun kutjar-katjir dan banjak meninggalkan korban. Mereka terpaksa mundur kembali kepangkalannja dengan meninggalkan majat berpuluh orang serdadu dan opsir-opsirnja. Banjak pula alat-alat sendjata mereka jang dirampas oleh barisan rakjat ini.

Karena kandasnja semua rentjana penjerangan dan penaklukan kota Bondjol dan kaum Padri itu, maka G. G. Hindia Belanda di Betawi memerintahkan kepada komandan tentera Hindia Belanda, Djenderal Cochius untuk pergi ke Sumatera Barat untuk memimpin sendiri penjerangan terhadap Bondjol selandjutnja. Pada tanggal 12 April 1836 panglima besar inipun sampai didaerah Bondjol. Perobahan-perobahan besar dalam siasat dan pimpinan tentera Belanda untuk menjerang Bondjol itu diadakannja, pengepungan terhadap kota Bondjol dari segala pendjuru disempurnakannja. Kota itu diblokir dari segenap pendjuru. Sungguhpun Bondjol sudah terkepung dengan sempurna dan perhubungan dengan luar Bondjol mendjadi terputus sama sekali, tapi kekuatan dan semangat perlawanan dari penduduknja tidak berkurang dari biasa. Setiap penjerangan jang dilakukan oleh tentera Belanda, ditangkis dengan baik dan teratur. Karena ini maka kedudukan tentera Belanda

dibawah pimpinan Djenderal Cochius itu tidaklah bertambah baik, tapi mendjadi sebaliknya.

Bondjol diduduki tentera Belanda.

Mudah dimengerti, bahwa walau betapapun djuga unggulnja kekuatan suatu pasukan bila perhubungannja diputuskan, maka perlawanannja itu akan bertambah lemah djuga. Begitu djuga halnja dengan pasukan-pasukan Padri jang sudah terkepung berbulan-bulan lamanja, dan jang berdjuaug siang malam dengan tidak berhenti-hentinja.

Sungguhpun demikian, kesungguhan hati dan ketabahan semangat dalam menghadapi perlawanan itu tidak kundjung padam-padamnja dari djiwa tiap-tiap penduduk. Fatwa-fatwa jang diberikan oleh Tuanku Imam Bondjol merupakan sendjata batin jang tidak dapat ditumpulkan oleh tekanan-tekanan dan provokasi serta antjaman-antjaman tentera Belanda dari luar kota Bondjol.

Suatu kedjadian jang tidak dapat dimaafkan dan dilupakan oleh rakjat di Bondjol terhadap kekedjaman sepasukan tentera Belanda pada waktu itu, ialah pentjulikan jang dilakukannja atas diri dua orang isteri Tuanku Imam. Kedjadian tersebut adalah sebagai dibawah ini:

Pada suatu malam dalam bulan Djuli 1837 satu pasukan ketjil tentera Belanda mentjoba memasuki kota Bondjol dengan djalan menjelundup. Sebagai akibat karena berpuluh-puluh malam tidak pernah tidur sebagaimana mestinja, kemasukan tentera Belanda kekota pada malam itu tidaklah diketahui oleh pengawal benteng.

Pasukan ketjil tentera Belanda itu terus menudju kerumah tempat kediaman Tuanku Imam dengan anak-anak dan dua orang isterinja. Dengan serta merta kedua isteri Tuanku Imam itu diseret oleh tentera Belanda itu untuk dibawa lari. Perbuatan ini diketahui oleh salah seorang putera Tuanku Imam dan dia terus mengadakan perlawanan guna mempertahankan kedua orang ibunja itu. Putera ini jang bernama Mahmud diserang bersama-sama oleh beberapa orang serdadu dan ditusuk perutnja; sementara salah seorang diantara isteri Tuanku Imam diputuskan pahanja dan meninggal ditempat itu djuga. Isteri jang seorang lagi djuga mendapat luka parah.

Karena mendengar ribut dan djeritan, maka Tuanku Imam jang tengah tidur terbangun dari tidurnja, terus menghunus pedangnja dan memburu ketempat ribut-ribut itu. Demi dilihatnja tentera Belanda itu, maka terdjadilah perkelahian seru antara beliau dengan tentera-tentera Belanda itu.

Perdjuangan seorang lawan seorangpun terdjadi. Dalam perdjuangan ini Tuanku Imam mendapat sebuah tusukan bajonét, tapi pasukan-pasukan musuh melarikan diri. Selain dari sebuah tusukan bajonét ini, Tuanku Imam mendapat luka-luka pada beberapa

bahagian badan beliau dan karena itu maka mulai dari saat itu beliau tidak dapat lagi memimpin pertempuran selandjutnja.

Sore hari itu sepasukan besar tentera Belanda mentjoba menjerang kembali dengan kekuatan jang sangat besar. Pertempuran berdjalan dengan sengit selama tudjuh djam dengan tidak berhenti dan sangat banjak meminta korban kedua belah pihak, dan tentera Belanda achirnja melarikan diri kepangkalannja. Pertahanan kota Bondjol mulai dari hari itu diambil over oleh Bagindo Madjolelo dan kawan-kawannja.

Keesokan hari dengan djalan meletuskan sedjumlah besar bahan peledak kedinding pertahanan rakjat, tentera Belanda dibawah pimpinan Letnan Lange dapat menjerbu memasuki kota. Penjerbuan ini mereka lakukan dengan sangat tiba-tiba.

Meskipun kota Bondjol dipertahankan, tapi karena kekuatan musuh sangat berlipat ganda, kedjatuhan kota itu tidak dapat dipertahankan lagi.

Dengan pertolongan beberapa orang hulubalang jang gagah berani, Tuanku Imam dapat mereka selamatkan dari kepungan musuh dan melarikannja kekampung Marapak.

Pendudukan kota Bondjol ini terdjadi pada tanggal 16 Agustus 1837.

Nasib Tuanku Imam Bondjol selandjutnja.

Sesudah menduduki kota Bondjol, maka tentera Belanda mengadakan pembersihan setjara besar-besaran. Tempat-tempat jang disangka mendjadi tempat persembunjian Tuanku Imam digeledahi dan dimusnahkannja. Semua ichtiar dilakukan untuk menangkap Tuanku Imam, tapi sampai sedjauh itu Tuanku Imam tidak ditemui. Achirnja kampung Marapak djuga digeledahi dan Tuanku Imam seakan mendjadi orang buruan. Pada suatu hari beliau menerima seputjuk surat dari Residen Padang, Francis jang meminta agar beliau sudi datang ke Palupuh. Isi surat itu beliau penuhi karena beliau tidak pernah mau lagi berurusan dengan pihak tentera Belanda. Tapi kemudian ternjata bahwa beliau kena tipu. Sesampainja beliau dengan pengiring-pengiringnja di Palupuh, beliau dikepung serdadu-serdadu Belanda jang bersendjata lengkap dan lantas beliau ditawan.

Dengan dikawal oleh 12 orang serdadu bersendjata dan dikepalai oleh seorang Kapten dan seorang Letnan, achirnja beliau dibawa ke Padang dan dari sini diantarkan pula ke Betawi. Setelah empat bulan lamanja di Betawi, beliau dibuang ke Tjiandjur sebagai seorang buangan politik. Di Tjiandjur Tuanku Imam Bondjol mendapat sambutan baik dari rakjat dan fatwa-fatwa serta adjaran-adjaran agama jang beliau kembangkan mendapat perhatian besar dari rakjat. Takut akan berkembangnja pengaruh beliau dikalangan rakjat Tjiandjur ini, achirnja beliau dipindahkan pula

ke Ambon. Di Ambonpun beliau berusaha untuk mengembangkan Agama Islam. Dari itu, tiga tahun kemudian, beliau dipindahkan pula ke Menado. Di Menado ini beliau tidak tinggal disuatu tempat sadja. Sekali setahun tempat tinggal beliau dipindahkan oleh tentera dan pemerintah Belanda dari satu negeri kesatu negeri, jaitu di Kumbi, Kuka dan achirnja di Lutak. Di Lutaklah beliau agak lama menetap, jaitu sampai kepada achir hayat beliau.

Pada hari Selasa tanggal 12 hari bulan Zulhidjah 1283, bertepatan dengan tahun 1864 Masehi, berpulanglah Tuanku Imam Bondjol di Lutak dalam berusia 92 tahun, sesudah mengidapkan penjakit selama beberapa waktu lamanja.

Maka berachirlah riwayat perjuangannya Tuanku Imam Bondjol yang dimasa mudanya bernama Pandito Bainuddin dan diwaktu masih ketjil bernama Peto Sjarif; dan berachir pulalah riwayat perjuangannya Padri yang sekian lama berusaha menentang pendjadjahan Belanda, setjara teratur dan organisatoris.

Perang Kerintji (1901—1906).

Sebagai sudah diterangkan dalam bahagian „Kedatangan bangsa Belanda ke Minangkabau”, perangkatan pasukan Kompeni Belanda yang mula-mula mendarat didaerah Sumatera Barat dibawah pimpinan Cornelis van der Lijn, diterima dengan baik oleh salah seorang radja di Inderapura, bahkan diberi pula kesempatan kepada tentera yang baru datang itu untuk menguasai pantai negeri Salido sampai ke Painan sebagai bandar perdagangan.

Pada pertengahan abad ke 19 kekuasaan kompeni dan keradjaan Belanda didaerah ini belum dilebarkannya kebahagian-bahagian lain, seperti Kerintji, dan lain-lain tempat disekitar daerah itu. Perhubungan antara rakjat didaerah-daerah tersebut dengan tentera Belanda sampai sekian djauh hanjalah merupakan perhubungan perdagangan yang bertjorak „ruilhandels”. Dari itu, maka diantara mereka sebegitu lama timbul suasana yang baik dan aman.

Keadaan seperti ini berdjalan berpuluh-puluh tahun lamanja. Kedua belah pihak nampaknja berusaha untuk mendjauhkan segala matjam persengketaan betapa djuapun bentuknja.

Tapi achirnja siasat penipuan dan pengabuan mata rakjat ini tidak dapat dipertahankan lebih lama oleh pihak Belanda, karena disamping berita-berita yang diterima oleh rakjat, djuga hasil penindjauan dan penjelidikan mereka terhadap semua gerak dan tindak Belanda didaerah-daerah yang didudukinja itu dikenal baik oleh rakjat. Rasa tjuriga dan bentjipun mulailah timbul dalam hati mereka terhadap akal busuk Belanda yang tidak djudjur itu.

Pada mulanja perasaan mendendam yang bersemi didalam dada tiap-tiap rakjat Kerintji dan sekitarnja kepada Belanda itu dapat mereka bendung untuk beberapa tahun lamanja, karena sampai

sekitar djauh mereka belum dirugikan dengan setjara langsung oleh siasat itu, meskipun mereka mengetahui dengan baik apa jang terdjadi dengan dan selama peperangan padri dan lain-lainnja di Minangkabau.

Pada permulaan tahun 1900 timbullah kegelisahan jang besar dikalangan rakjat didaerah Kerintji. Hal ini adalah disebabkan karena perbuatan seperangkatan pasukan „expeditie” jang senga-dja dikirim oleh tentera Keradjaan Belanda dari Muko-muko kewilajah daerah mereka. Maksud dan tudjuan pengiriman barisan penjelidik ini sebenarnja adalah untuk mempeladjar kemungkinan dibukanya suatu djalan „perhubungan” jang lebih lempang dengan daerah-daerah jang masih belum didudukinja dan untuk menjelidiki keadaan djalan perhubungan jang sudah ada. Di Puntjak gunung Raja (Kerintji Hilir) pasukan ini mendirikan sebuah pos, sesudah daerah disekitar itu mereka selidiki dengan seksama. Di Puntjak gunung itu djuga mereka mendirikan beberapa buah bangunan penindjauan dan pilaar-pilaar penundjuk djalan.

Perbuatan tentera Belanda ini menimbulkan rasa tjuriga dan kedjengkelan dikalangan rakjat. Segera sesudah pasukan expeditie itu meninggalkan tempat tersebut, rakjatpun menghantjurkan dan memusnahkan semua bangunan-bangunan jang didirikan oleh tentera Belanda itu, jaitu sesudah oleh Adipati Hampan Besar di Rawang diadakan sebuah pertemuan dengan pemimpin-pemimpin rakjat lainnja guna memutuskan masalah niat djahat dari tentera Belanda itu. Dalam pertemuan itu djuga mereka mengambil putusan tidak akan menerima kedatangan tentera Belanda walau bagaimanapun djuga.

Peristiwa ini diterima oleh tentera Belanda dengan perasaan tjemas. Karena itu diadakannja pula suatu pertemuan dengan para saudagar serta orang terkemuka jang berasal dari Kerintji di Muko-muko.

Pertemuan di Muko-muko ini disudahi dengan pengiriman sebuah delegasi oleh tentera Belanda kepada pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar rakjat di Kerintji. Delegasi tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin rakjat jang berasal dari Muko-muko asli, bernama Imam Marusa sesudah kepadanya didjandjikan beberapa hadiah dan pensiun untuk hari tuanja bila dia dapat mengadakan semua usul-usul jang diadjukan Belanda sampai diterima oleh rakjat Kerintji.

Di Rawang rombongan delegasi Belanda ini minta diadakan pertemuan dengan seluruh Adipati-adipati daerah Kerintji untuk membitjarakan usul-usul jang dibawakannja dari pihak Belanda. Tapi tawaran Imam Marusa ini tidak diterima oleh rakjat dan tidak seorang Adipatipun jang mau menemuinja karena dia dan kawan-kawannja ditjap oleh rakjat sebagai kaki tangan Belanda.

Dalam perdjalanan kembali pulang ke Muko-muko rombongan utusan tentera Belanda ini tidak pernah merasa aman karena

dengan segera sadja mereka dipandang sebagai musuh oleh seluruh rakjat didaerah itu. Disuatu tempat antara Lolo dan Lumpur mereka ditjegah oleh serombongan rakjat dan hulubalang-hulubalang Kerintji Hilir dibawah pimpinan Adipati Perbo German Besi. Ditempat ini rombongan Imam Marusa terpetjah dan lari dengan kutjar-katjir. Hanja beberapa orang sadja diantara mereka jang dapat meloloskan diri, antaranja ialah Imam Marusa sendiri jang dengan susah pajah achirnja sampai djuga ke Muko-muko.

Sebagai akibat dari pentjegatan utusan-utusan Belanda oleh rakjat dan hulubalang-hulubalang Kerintji Hilir ini, maka semua orang Kerintji jang berada di Muko-muko pada waktu itu ditangkap oleh tentera Belanda.

Ketegangan diantara kedua belah pihakpun timbullah, dan alasan-alasan untuk memulai peperangan sudah ada. Siasat menggempur dari pihak tentera Belanda dan siasat bertahan dari pihak rakjat Kerintji mulai sibuk disusun.

Pada pertengahan tahun 1901, jaitu sesudah 6 bulan semendjak terdjadinja peristiwa tersebut diatas, sepasukan tentera Belanda dibawah pimpinan seorang kapten memulai gerakan penjerangan. Di Ranah Mendjoto terdjadi pertempuran pertama, dimana kedua belah pihak mendapat kerugian-kerugian jang sangat besar, dan tentera Belanda terpaksa mengundurkan diri. Berita pertempuran di Ranah Mendjoto ini didjadikan bahan untuk mengobarkan semangat perlawanan rakjat di Kerintji Hilir terhadap penjerangan-an-penjerangan pasukan Belanda seterusnya.

Peperangan-peperangan jang terdjadi sesudah itu merupakan peperangan dihutan-hutan. Baru pada tahun 1903 terdjadi lagi pertempuran jang besar di Koto Limau Sering antara pasukan Belanda jang hendak menudju ke Kerintji melalui djalan Tapan dan Muaro Sako. Tapi pertempuran di Koto Limau Sering itu tidak berlangsung lama karena tentera rakjat mengetahui bahwa didalam rombongan tentera Belanda itu kelihatan pula Regen Inderapura, Moh. Sjah, jaitu seorang pembesar rakjat jang sangat disegani dan dihormati oleh mereka. Dengan bertamengkan Regen ini, pasukan Belanda achirnja dapat memasuki Kerintji, terus pula ke Rawang.

Setelah merasa bahwa kedudukannja di Kerintji dirasanja kuat, maka tentera Belandapun memulai operasinja untuk menundukkan dan menduduki negeri jang berada disekitar tempat itu. Tapi usaha penundukan ini tidaklah mudah mereka lakukan. Di Hiang mereka disambut dengan perlawanan-perlawanan dibawah pimpinan hulubalang-hulubalang Kemendapo. Di Kemendapoan Tiga Helai Kain pun tentera Belanda ini mendapat dan menemui perlawanan jang sengit pula, begitupun di Lalo dan Keliling Danau, jaitu pertempuran menghadapi perlawanan jang dilakukan oleh pasukan rakjat dibawah pimpinan Adipati Perbo.

Dalam pertempuran-pertempuran ditempat ini tentera Belanda mendapat kerugian jang sangat besar sehingga mereka terpaksa

melarikan diri kembali ke Rawang. Sementara itu oleh Adipati Perbo diperkuat susunan pasukannya dengan mengerahkan kekuatan-kekuatan yang masih tersimpan untuk mempertahankan daerah Kerintji Hilir seluruhnya. Djerat-djerat dan randjau-randjau darat dipasang mereka di beberapa tempat yang disangka akan dilalui oleh tentera Belanda. Sembojan yang dipakai pada waktu itu ialah: „Lebih baik mati semuanya dari pada didjadjah oleh kafir Belanda”. Disinilah tampak persatuan rakyat yang sebesar-besarnya untuk menentang dan melawan kepada Pendjadjahan.

Kepada pasukan Belanda yang berkubu di Kerintji oleh Adipati Perbo dikirim sebuah ultimatum yang berisikan agar tentera Belanda dengan segera harus meninggalkan seluruh daerah Kerintji bila mereka inginkan keselamatan jiwa mereka. Ultimatum ini menjadikan gontjangnya kedudukan mereka, dan mereka terpaksa meminta bala bantuan dari Padang.

Baru saja bala bantuan dari Padang itu sampai di Rawang, maka pertempuran besar-besaranpun terdjadilah. Dengan menggunakan senjata berat dan mengerahkan tenaga serdadu-serdadu yang masih segar, pada beberapa tempat pasukan Belanda ini mendapat kemadjuan besar. Tapi hal ini tidaklah menjadikan mundurnya semangat perlawanan rakyat. Pertempuran yang terdjadi dibukit-bukit Lumpur Semerap merupakan pertempuran-pertempuran yang seru didalam sedjarah perang Kerintji ini. Pertahanan rakyat ditempat itu, dikepung dari berbagai jurusan oleh tentera Belanda dengan meriam-meriam berukuran besar.

Setelah dapat merebut beberapa perkubuan rakyat didaerah-daerah Lolo, Sandaran Agung, Tandjung Batu dan Djudjun, maka tentera Belandaupun mendapat perlwanan yang sangat sengit dari tentera rakyat dibawah pimpinan beberapa hulubalang kenamaan di Bantjah, dimana terdjadi pertempuran berhadap-hadapan, satu lawan satu, keris melawan sangkur. Di Pulau Tengah terdjadi pertempuran dari rumah kerumah, dimana tidak hanya barisan-barisan yang bergerak, tapi juga perempuan-perempuan dan orang-orang tua turut bertindak. Karena itu maka komandan pasukan Belanda memerintahkan untuk membakar seluruh rumah ditempat itu dan dengan demikian barulah tempat tersebut dapat mereka duduki. Akibat dari kekedjaman yang tidak ada taranja dalam sedjarah peperangan Kerintji ini akan dapatlah dibayangkan sendiri. Setelah negeri itu menjadi abu, maka diantara tumpukan puing pembakaran itu didapatkanlah abu majat beratus orang hulubalang, anak-anak dan perempuan-perempuan, bahkan tidak sedikit abu majat serdadu Belanda sendiri.

Adipati Perbo yang memegang pimpinan seluruh pertempuran di Kerintji dapat memindahkan teras pasukannya kekubu pertahanannya di Telago, dan dari sini perlawanan mereka teruskan dengan gigih.

Tapi sajang perlawanan itu tidak dapat mereka teruskan sebagaimana mereka tjita-tjitakan karena kedudukan mereka tidak terlalu menguntungkan didalam siasat peperangan. Benteng Telago ini dengan segera dapat dikepung oleh tentera Belanda dari semua djurusan dan dengan mengorbankan sangat banjak djiwa serdadu-serdadunja.

Hampir seluruh negeri dalam wilajah Kerintji sudah diduduki oleh tentera Belanda dan dimana-mana mereka mengadakan pembersihan umum. Adipati Perbo dan beberapa orang kawan-kawannya jang sangat setia terpaksa mengundurkan diri kerimba-rimba dan untuk sementara waktu harus bersembunji disana.

Semua keluarganja ditangkap dan dipendjarakan oleh pembesar tentera Belanda. Semua keluarga ini dinjatakan akan dibunuh dengan hukuman pantjung bila Adipati Perbo tidak menjerahkan dirinja dalam waktu jang ditentukan. Mendengar hal ini, maka Adipati perwira ini dengan kemauannya sendiri datang menjerahkan dirinja kepada pembesar tentera Belanda di Lolo dengan sjarat agar semua tawanan-tawanan dari rakjat pada waktu itu harus dibebaskan seluruhnja. Adipati Perbo ini achirnja dapat ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Ternate. Pada ± tahun 1825 beliau dikembalikan ke Kerintji dan kemudian wafat di Kerintji setelah terlebih dahulu dapat menunaikan rukun Islam jang kelima (naik Hadji).

Dengan demikian, maka berachirlah peperangan Kerintji babak pertama dan seluruh daerah itu sudah mendjadi daerah djadjahan pemerintah keradjaan Belanda, jaitu pada achir tahun 1904; setelah bertempur selama 4 tahun lamanja.

Tetapi sedjarah perang di Kerintji belum habis sehingga itu sadja. Baru sadja keamanan hampir tertjapai menurut pendapat tentera Belanda, maka petjah pulalah suatu pemberontakan jang dikerahkan oleh Pangeran Hadji Umar dengan pembantunja Pangeran Mudo pada tahun 1905. Timbulnja perlawanan dari kedua orang Pangeran ini adalah sebagai penuntutan bela atas perbuatan tentera Belanda terhadap Adipati Perbo, disamping melihat kekedjaman-kekedjaman jang dilakukan oleh tentera Belanda sesudah itu. Gerakan pemberontakan ini mendapat sambutan sangat besar dari bekas-bekas hulubalang-hulubalang dan peradjurit-peradjurit Adipati Perbo. Dalam waktu jang singkat dapatlah mereka menggerakkan tenaga-tenaga perlawanan jang teratur setjara gerilja.

Karena besarnja kerugian-kerugian tentera Belanda jang timbul sebagai akibat dari pertempuran ini, maka oleh pembesar pemerintahan tentera Belanda itu dilakukan suatu peraturan baru, jaitu mengenakan denda kepada seluruh rakjat disuatu tempat dimana perlawanan terhadap tentera Belanda terdjadi. Dengan djalan demikian maka rakjat Kerintji tidak sedikit jang kehilangan

ternak, emas, hasil-hasil bumi dan lain-lain harta benda mereka untuk membayar denda yang dikenakan kepada mereka.

Perlawanan pangeran Hadji Umar dan kawan-kawannya berdjalan terus sampai pada akhir tahun 1906. Dalam suatu pertempuran yang terdjadi di Pungut (dimarkas pertahanan Hadji Umar), kedua panglima itu menemui adjalnya. Kawan-kawan mereka menjingkirkan diri ketempat lain.

Sesudah meninggalnja Pangeran Hadji Umar dan Pangeran Mudo, barulah keamanan di Kerintji bagi tentera Belanda dapat dipulihkannya. Peraturan-peraturan sebagai yang didjalkan dilain-lain tempat diseluruh daerah djadjahannya yang lain-lainpun didjalkanlah didaerah Kerintji. Pajak mulai dipungut dan kerdja paksa dikerahkan.

Perang Manggopoh (1908).

Berachirnja Perang Padri tidaklah berarti berachir pula perdjuaan kaum ulama Islam di Minangkabau untuk menentang pendjadjahan bangsa Belanda. Berpuluh tahun usaha terpentjar masih berdjalan untuk menentang pendjadjahan. Pemimpin-pemimpin Padri dan turunan atau murid-murid mereka yang tidak senang dengan semua tindak laku pemerintahan Belanda di Bondjol banjak yang melarikan diri kemana-mana diantaranya ke Manggopoh dan dimana-mana disambut dan diperlindungi dengan baik oleh rakjat. Mendengar hal ini maka timbullah ketjurigaan pemerintah Belanda. Bersama dengan itu oleh pemerintah Belanda diumumkan untuk memungut belasting kepada rakjat. Dengan demikian maka timbullah rasa yang tidak senang dikalangan rakjat sendiri dan mereka menjusun tenaga untuk mengadakan perlawanan.

Beberapa bulan sesudah itu, maka rakjat Manggopohpun menjetuskan api pemberontakan dan perlawanan terhadap pemerintah dan tentera Belanda itu. Perlawanan ini dipimpin oleh Jahja Tuanku Sutan, Rahman Sidi Radjo, Sutan Sjarif, Kana Angku Padang dan Madjo Ali.

Pada pertempuran pertama yang dilakukan mereka pada pertengahan tahun 1908, mereka bercleh kemenangan yang sangat besar diluar dari dugaan mereka semula. Sepasukan besar tentera Belanda yang sedang berkubu disebuah Benteng di Manggopoh mereka sapu bersih dalam suatu pertempuran seru. Perdjuaan didalam benteng itu terdjadi pada tengah malam berkat tipu muslihat dari seorang gadis bernama Siti. Pada malam tersebut pasukan tentera Belanda yang berada di Benteng itu tengah asjik bergembira dan berdjudi. Siti masuk kedalam benteng itu dan minta ikut berdjudi. Permintaan Siti ini diterima baik oleh tentera Belanda tersebut karena dia seorang perempuan yang tjantik. Selagi mereka asjik berdjudi itu, maka benteng tersebut diserbu oleh

barisan rakjat dan semua isinja mereka musnahkan. Hanja 4 orang sadja diantara serdadu Belanda itu jang sempat melarikan diri.

Mengingat hal demikian, maka benteng itu diperkuat dengan seperangkatan besar tentera Belanda jang baru didatangkan. Pertempuran kedua kalinjapun timbullah; kedua belah pihak bertempur dengan semangat jang bergelora. Dalam perlawanan jang sekali ini, tentera rakjat dapat dikalahkan oleh tentera Belanda. Banjak diantara mereka jang dapat ditawan. Siti dibuang ke Pariaman. Suaminja Rasjid dibuang ke Menado dan pemimpin-pemimpin jang lain banjak pula jang ditembak mati dan dibuang keluar pulau Sumatera.

Perang Kamang (1908).

Sebagai djuga dengan Manggopoh, di Kamangpun timbul pula pemberontakan rakjat karena sebab jang sama. Dalam menghadapi perlawanan rakjat ini, tentera Belanda djuga banjak menghadapi kekalahan djiwa dan harta benda. Tetapi persendjataan Belanda jang modern, dan hanja dihadapi dengan pisau dan kelewang, sudah dapat menentukan kesudahan pemberontakan ini. Perlawanan terpaksa dihentikan dan pemberontakan rakjat dilumpuhkan oleh tentera Belanda dengan sendjata muslihatnja.

Pemberontakan Silungkang (1926).

Sebagai djuga dibanjak tempat diseluruh kepulauan Indonesia dalam tahun 1926, dibeberapa tempat di Minangkabau timbul pula pemberontakan rakjat. Pemberontakan sekali ini merupakan pemberontakan jang diorganisir oleh suatu partai politik jang sangat menentang pendjadjahan, jaitu oleh P.K.I.

Di Silungkang terdjadi perlawanan rakjat jang sangat sengit, tidak sadja oleh rakjat jang tergabung dalam lingkungan P.K.I. ini, tapi djuga oleh mereka jang sama tidak senang dengan pendjadjahan. Kekuatan-kekuatan tentera Belanda jang bersarang di Sawah Lunto dan dibeberapa tempat di Sumatera Barat dikerahkan untuk menindas pemberontakan tersebut.

Meskipun perlawanan itu tidak berdjalan lama, tapi tentera Belanda tidak pula sedikit mengalami kerugian dan kekalahan. Pertempuran di Silungkang itu tertjatat sebagai salah satu perdjjuangan jang banjak meminta pengorbanan dari rakjat dan tentera Belanda sendiri, dan Silungkang merupakan tempat penjembelihan besar oleh tentera Belanda. Diantara pelopor-pelopor perdjjuangan rakjat pada waktu itu tertjatat pula seorang wanita jang masih remadja bernama si Upik Itam.

Pasal 2.

PEMERINTAHAN DAN PERDJUANGAN RAKJAT DI DJAMBI.

Abad ke-12.

Pada permulaan abad ke 12 Keradjaan Melaju dapat berdiri sendiri lepas dari kekuasaan Sriwidjaja, bahkan pada tahun 1183 keradjaan Melaju dapat merebut kekuasaan Sriwidjaja ditengah Semenanjung Melaka. Demikianlah dalam abad ke 12 negeri Sriwidjaja dari sedikit kesedikit berkurang kekuasaannya hingga keradjaan besar itu hanya tinggal sedikit s saja terbatas didaerah Palembang yang sekarang ini. Disamping itu negeri Melaju dengan pesatnya sampai dapat menggantikan Sriwidjaja dalam menguasai perniagaan Selat Melaka.

Pada tahun 1286.

Kekuasaan Melaju dipegang oleh radja bangsa Sjailendera djuga yang berkedudukan di Ulu Batang Hari, didaerah Siguntur sekarang. Pada masa itu keradjaan Melaju disebut keradjaan **Darmaseraja**. Jang memerintah ditengah Melaju pada sebelum adanya keradjaan Darmaseraja itu tidak dapat diketahui, hanya setelah adanya keradjaan Darmaseraja itu terdapat bekas-bekas (tulisan diatas batu tjandi) jang menunjukkan bahwa jang memerintah keradjaan Darmaseraja itu adalah keturunan keluarga Sjailendera. Dari hal ini dapat diduga bahwa petjahnja keradjaan Sriwidjaja itu adalah disebabkan perselisihan anggota-anggota keluarga Sjailendera jang akhirnya bertjerai-berai. Djuga diduga bahwa selagi berada dibawah kekuasaan Sriwidjaja, negeri Melaju sebagai djadjahan dari Sriwidjaja, oleh salah seorang dari keluarga Sjailendera didirikan pusat keradjaannya di Ulu Batang Hari (Siguntur).

Pada tahun 1275 — 1293.

Sementara itu dipulau Djawa telah berdiri keradjaan jang besar kekuasaannya jaitu keradjaan **Tumapel-Singosari** dibawah pemerintahan Seri Kartanegara. Pada tahun 1275 Seri Kertanegara mengutus peradjuritnja kenegeri Melaju untuk menundukkan keradjaan ini. Perutusan Tumapel-Singosari kenegeri Melaju ini dinamakan „Pemelaju”. Utusan Pemelaju ini berangkat dari Tuban (Djawa Timur) mendarat didaerah Djambi mendjalani Sungai Batang Hari sampai keibu kota Darmaseraja. Dengan kedatangan peradjurit Djawa kenegeri Melaju itu, negeri Melaju menjadi kekuasaan keradjaan Tumapel-Singosari jang diperintah oleh

Radja Melaju sendiri, **Radja Mauliwarmadewa** jang bergelar **Adji Mantrolot**. Walaupun keradjaan ini dibawah kekuasaan Tumapel-Singosari, ia tetap mendjadi keradjaan jang teramai dipulau Sumatera.

Pada tahun 1294.

Pada tahun 1294 keradjaan Tumapel-Singosari roboh karena perselisihan dengan Daha dan Madura dan Seri Kartanegara dibunuh oleh radja Daha Djakatwang. Dengan kebidjaksanaan Raden Widjaja, salah seorang menantu dari Seri Kartanegara, dapatlah didirikan keradjaan baru dekat Modjokerto sekarang, bernama keradjaan Modjopahit diperintahi oleh Raden Widjaja sendiri jang bergelarkan Kartaradjasa Djajawardana.

Untuk mendjaga perselisihan dalam negeri jang masih berlaku, Kartaradjasa perlu menambah kekuatan tenteranja kemudian dipanggilnja pradjurit Seri Kartanegara jang berada dinegeri Melaju kembali ketanah Djawa. Peradjurit Djawa pulang ke Madjapahit dengan membawa seorang puteri Melaju nama **Dara Petak** jang mendjadi selirnja **Perabu Kartaradjasa** diiringi oleh permaisuri Radja **Mauliwarmadewa Dara Djingga**, ibu putera Mahkota dinegeri Melaju tuan Djenaka, jang pada tahun 1347 berada di istana Madjapahit. Dengan sendirinja keradjaan Melaju pada waktu itu meliputi Djambi, Tebo, Ulu Batang Hari dan Minangkabau mendjadi dibawah kekuasaan Keradjaan Madjapahit dan pada tahun 1342 Radja Adityawarman memerintah dinegeri Melaju.

Pada tahun 1375 pusat keradjaan Melaju dengan sebab jang tidak diketahui berpindah ke Pagarrujung dekat Batusangkar (bahagian Minangkabau) dan pemerintahannja hanja meliputi Minangkabau dan Ulu Batang Hari sadja. Serempak dengan ini hilanglah keradjaan Darmaseraja. Sebahagian lagi dari keradjaan Melaju dulu, ialah Mangundjaja (Tebo) dan Djambi, pada lahirnja tetaplah mendjadi sebahagian dari keradjaan Modjopahit. Pada tahun 1377 keradjaan Sriwidjajapun dikuasai oleh Madjapahit. Kemudian setelah peradjurit Djawa kembali ke Madjapahit, pedagang-pedagang bangsa Tiongkok jang berada di Sriwidjaja dibawah pemimpinnja Loang Tao Ming mengakui kekuasaan Sriwidjaja dan pernah pula menguasai negeri Melaju, sedang kekuasaan Madjapahit masih tetap berlaku.

Pada tahun 1400.

Kira-kira pada tahun 1400 Radja Tan Talanai memerintah negeri Djambi dan beristana di Muara Djambi sekarang. Tan Talanai mempunjai seorang putera. Ramalan nudjum bahwa putera Radja ini kelak akan mempunjai kekuasaan jang sangat besar dan akan membunuh ajahnja. Baginda Tan Talanai takut dibunuh puteranja sebagai kata nudjum, maka diikatnja puteranja diatas

sebuah rakit lalu dihanjutkan kelautan besar. Rakit ini sampai dinegeri Siam dan dipungut oleh radja negeri itu. Baginda Tan Talanai mendengar bahwa di Minangkabau ada tiga orang puteri Radja jang tjantik rupanja, dan ingin sekali beristerikan salah seorang puteri Minangkabau itu dan pergilah ia kenegeri Minangkabau. Disana Baginda pilihlah salah seorang puteri jang bernama **Selaras Pinang Masak**, tetapi baik orang tuannya maupun puterinya sendiri tidaklah senang akan Radja Tan Talanai itu. Ditjarinja ihtiar supaja pertunangan itu dibatalkan sadja. Achirnja tidak djadi.

Setelah putera Tan Talanai jang dibuang hanjut ke Siam menjadi dewasa, dan mendengar tjeritanja bahwa ia dibuangkan ajahnja, ia bermaksud akan membalas kelakuan ajahnja terhadap pada dirinja itu. Diiringi oleh dengan panakawannja ia melawat kenegeri ajahnja, sesampainja disana, ajahnja dibunuhnja dan negerinja diserahkan kepada Puteri Selaras Pinang Masak. Kemudian ia pulang ke Siam dengan membawa beberapa rakjat negeri ajahnja. (Sekarang masih ditemui pada dusun Muara Djambi (20 km dari Kota Djambi) bekas runtuhannya Istana dan Tjandi Tan Talanai).

Pada tahun 1460.

Kira-kira pada tahun 1460 jang memerintah negeri Djambi adalah Puteri **Selaras Pinang Masak** dengan memindahkan pusat negerinja kesebelah pesisir Djambi sekarang dan dinamai Udjung Djabung. Negeri Udjung Djabung ramai perdagangannya dan didatangi djuga oleh pelajar-pelajar dari Madjapahit. Pelajar-pelajar ini menamakan negeri Puteri Pinang Masak negeri Djambi (dalam bahasa Djawa, artinja Pinang). Mulailah terkenal negeri ini dengan nama Djambi.

Pada suatu hari datanglah seorang pelajar ditempat jang sekarang dinamakan pulau **Berhala** jang pada waktu itu masih bersambung daratannya dengan tanah negeri Djambi. Pelajar itu dinamakan orang **Datuk Panduko Berhala** jang menurut tjerita orang, dia datang dari Turki. Terdjadilah perkenalan Datuk Panduko Berhala dengan Puteri Selaras Pinang Masak di Udjung Djabung. Sebagai tanda kebangsawanannya Datuk Panduko Berhala menundukkan sebuah senapang pusaka jang dibawanya dari negeri Rum. Pertjaja akan kebangsawanannya Datuk Panduko Berhala itu, maka Puteri Selaras Pinang Masak kawinlah dengan Datuk Panduko Berhala, kemudian bersama-sama memerintah negeri Djambi. Perkawinan keduanya melahirkan tiga orang putera dan seorang puteri.

Puteri ini bernama **Orang Kaja Gemuk**, dan ketiga putera itu memerintah berturut-turut seperti dibawah ini:

Pada tahun 1480.

Orang Kaja Pingai jang menggantikan orang tuannya pada tahun 1480.

Pada tahun 1490.

Orang Kaja Kedataran jang menggantikan saudaranya pada tahun 1490.

Pada tahun 1500.

Orang Kaja Hitam jang menggantikan saudaranya pada tahun 1500.

Orang kaja Hitam adalah seorang putera Radja jang terkenal kesaktiannya sampai kenegeri-negeri ditanah Djawa. Orang kaja Hitam sangat murkanja melihat negerinja dibawah kekuasaan Madjapahit itu, lalu melarang keluarganja membajar upeti. Keluaranja atau orang tuanja seorangpun tidak ada jang berani membantah larangan Orang kaja Hitam itu, hingga pada tahun itupun upeti kepada Madjapahit tidak dibajarnja. Mendengar sebab-sebab tjukai negeri Djambi tidak dibajar itu, Radja Madjapahit amat murkanja dan dirantjangkan pembalasan terhadap Orang kaja Hitam. Tetapi oleh karena menurut tjeritera, Orang kaja Hitam sangat saktinja, hingga tak dapat dibunuh dengan sendjata biasa, melainkan dengan keris jang terbikin dari besi sembilan desa, maka Radja Madjapahit segera memerintahkan membikin keris dari pada besi dari sembilan desa itu. Tetapi rentjana Radja Madjapahit itu dapat diketahui oleh Orang kaja Hitam, maka segeralah ia melawat kepulau Djawa. Sesampainja dipulau Djawa, dengan kepandaianja, Orang kaja Hitam dapat mentjari tukang besi jang sedang membikin (menempa) keris dari besi sembilan desa itu. Tukang besi itu dibunuhnja dan keris dirampasnja. Mendengar kedjadian ini Radja Madjapahit sangat gusar hatinja achirnja ditjari persahabatan dengan Orang kaja Hitam dan dikawinkanlah seorang puterinja jang bernama Puteri Ratu dengan Orang kaja Hitam. Beserta dengan permaisurinja Orang kaja Hitam pulang ke Djambi dengan membawa keris besi sembilan desa jang dinamakannja „**Keris Segindje**”. Didalam masa perlawatannya ke Djawa, Orang kaja Pingai diwakilkan memerintah negeri Djambi. Sekembalinja Orang kaja Hitam ke Djambi, Orang kaja Pingai mengundurkan dirinja. Sedjak itu keris **Segindje** didjadiakannja tanda pangkat Keradjaan Djambi. Barang siapa jang dapat memegang keris **Segindje** itu barulah diakui oleh umum sebagai Radja negeri Djambi.

(Pada waktu wakil Presiden Drs. Moh. Hatta pertama kali mengundjungi kota Djambi tahun 1946, oleh Rakjat Djambi diserahkan sebilah keris jang ditamsilkan „**Keris Segindje**” jang artinja Keradjaan Djambi sudah menjerahkan kedaulatannya pada Pemerintah R. I. dengan maksud merubah Monarsi mendjadi Demokrasi).

Diwaktu pemerintahan Orang kaja Hitam, negeri Djambi dibagi atas kalbu (bangsa), jang dikepalai oleh orang-orang dari keluarga Radja. Kalbu VII Koto dan IX Koto dikepalai oleh sunan Pulau

Djohor, atas kalbu (bangsa), jang dikepalai oleh orang-orang dari keluarga Ratadjon dikepalai oleh Orang kaya Kedataran: Kalbu Marosebo dikepalai oleh Sunan Kembang Seri. Kalbu Djebus Radjasari dikepalai oleh Orang kaya Pingai: Kalbu Air Hitam dikepalai oleh Orang kaya Gemuk: Kalbu Awin, Penagan, Midji dan Pinikawan Tengah jang pimpinannja diserahkan kepada Sunan Muara Pidjoan saudara tertua dari Puteri Selaras Pinang Masak, masing-masingnja dikepalai oleh putera-putera Sunan Muara Pidjoan.

Pada tahun 1528.

Pada tahun 1528 djatuhlah keradjaan Madjapahit karena masuknja agama Islam kepulau Djawa dan timbullah sebuah negeri Islam jang kuat bernama **Demak**. Para keluarga Radja dan Bangsawan dari Madjapahit jang tidak mau memeluk Agama Islam, sama mengenjahkan diri dari Madjapahit jang takut akan pasukan negeri Demak. Salah seorang dari padanja **Kyai Geding Sura** melarikan diri ke Palembang pada tahun 1574 dan diangkat orang djadi Radja di Palembang. Kyai Geding Sura ini mendjadi bapak asal dari keluarga Keradjaan Palembang.

Kira-kira pada masa ini Orang kaya Hitam memulai memeluk Agama Islam dan menjiarkan agama itu dinegerinja.

Sedjarah masuknja agama ini ke Djambi tidak dapat diketahui. Tetapi djika dipandang, bahwa perhubungan Djambi dengan Madjapahit terputus karena djatuhnja negeri itu dan djatuhnja negeri Madjapahit karena kekuasaan Radja Demak jang beragama Islam, tidak sangsi lagi Djambi mempunjai perhubungan dengan Demak. Ada jang mengatakan, bahwa setelah djatuhnja negeri Madjapahit, dikuasai oleh ke Sultanatan Banten dan tidak disebutkan kekuasaan Demak. Tetapi dengan langsung dibawah kekuasaan Banten itu, tidak dapat dipastikan pula karena keradjaan Banten baru berdiri dalam tahun 1568. Walaupun demikian keradjaan Demak semendjak berdirinja terus-menerus berusaha menjiarkan agama Islam. Jang diserahi untuk menjiarkan dibahagian Djawa Barat dan Sumatera Selatan, ialah Maulana Sjarif Hidayatullah jang dibantu oleh puteranja Sjarif Hasanuddin jang lalu mendjadi Sultan jang pertama di Banten, Lampung dan sebahagian dari Bengkulu. Karena penjiaran Islam oleh Pahlawan-pahlawan Demak ini, mungkin lah diterimanja perhubungan oleh Orang kaya Hitam dari Sjarif Hidayatullah atau Sjarif Hasanuddin, jang menyebabkan masuk agama Islam di Djambi diwaktu pemerintahan Orang kaya Hitam. Orang kaya Hitam berputera dua orang: Pengeran Ilang di Aor dan Paduka Narah.

Pada tahun 1515.

Pangeran Ilang di Aor memerintah pada tahun 1515 dan dikuburkan di Rantau Kapas (1 km dari Muara Tembesi). Pange-

ran Ilang di Aor itu disebutkan orang djuga **Penembahan Rantau Kapas** berputera satu orang bernama Penembahan Rengas.

Pada tahun 1540.

Dalam tahun 1540, Djambi diperintahi oleh Penembahan Rengas Pandak jang berputera Penembahan Bawa Sawo jang memerintah pada tahun 1565. Penembahan Bawa Sawo berputera empat orang: Kyai Patih Mestong diangkat mendjadi kepala Kalbu (bangsa) Singa Patih. Bangsa Mas memerintah Kalbu Pajung. Penembahan Kota Baru diangkat mendjadi Radja Djambi pada tahun 1590. Penembahan Kota Baru berputera: Kyai Mas Patih diangkat mendjadi Patih Radja dan Pangeran Keda jang menggantikan ajahnja pada tahun 1615 dengan gelar Sultan Abdul Kahar.

KEDATANGAN BANGSA BELANDA DI DJAMBI.

Tjerita singkat tentang perhimpunan Kumpulan dagang India Timur.

Setelah beberapa kali rakjat Belanda mentjoba untuk mendapatkan djalan ke India Timur, dimana mereka sangka akan mendapat banjak keuntungan dalam pelajaran mereka, kebetulan seorang Belanda nama Jan Herigen van Linschoten, bekas pegawai Pendita Keristen bangsa Portugis di Goa (India) menulis buku-buku dalam tahun 1552 tentang pelajaran ke Hindia. Segeralah didirikan satu perkumpulan pelajaran kenegeri djauh: „Compagnie van Verro”, terdiri dari andil-andil orang bernama. Pada tahun 1595 berangkatlah sekumpulan kapal jang pertama ke Indonesia dibawah pimpinan **Cornelis Houtman**. Mereka sampai ke Banten mendirikan kantor disana dan kembali kenegerinja membawa keuntungan jang sangat besar. Dengan bantuan uang dari Pemerintah Belanda (**Staten van Holland**) berangkatlah pula serombongan kapal dibawah pimpinan **Jacob van Neck** sebagai nachoda, dan dua orang nachoda muda Wybrandt van Weerwijsk dan Jacob van Heemskerck. Van Neck kembali dengan empat buah kapal membawa muatan jang penuh. Kapal lain-lainnja meneruskan pelajarannja ke Maluku. **Van Heemskerck** sampai dipulau Banda dan mendirikan kantor disana, **Van Warwijck** pergi ke Ambon dan Ternate, dimana didirikan pula kantor-kantor. Terbuktilah keuntungan jang didapat dalam pelajaran jang kedua kali 400% lebih dari pada pokok. Keadaan ini mengakibatkan timbulnja banjak perselisihan diantara perkumpulan-perkumpulan itu satu sama lainnja, maka atas andjuran Radja Muda Prins Maurits dan Johan van Oldenbarnevelt semua perkumpulan-perkumpulan itu didjadikan 1 (satu) perhimpunan besar dengan nama „**Vereenigde Oost Indische Compagnie**” (Himpunan perkumpulan Hindia Timur disingkatkan Kumpeni). Pada tahun 1602, perhimpunan ini mendapatkan monopoli untuk berdagang ke Hindia Timur dan mempunjai hak-hak

politik dan pengadilan. Putjuk pimpinannja terdiri dari wakil-wakil perkumpulan jang dipersatukan itu sedjumlah 17 orang; pimpinan sehari-hari dipegang oleh 60 orang pemegang andil, terdiri dari pemimpin-pemimpin perkumpulan jang dulu. Timbullah masa untuk memperluas dan menundukkan perdagangan dan kekuasaan. Kapten van Waerwijck dan lain-lain nachoda berangkat ke Timur mendirikan kantor-kantor perdagangan di Banten, Gersik, Djohor, Petani untuk memperhubungkan dagang ke Tiongkok, Nippon, India, Makasar, Djakarta, Japara, Mazulipatman dan lain-lain. Oleh karena perdagangan rempah-rempah jang banjak mendatangkan untung, maka tanah Maluku direbutnja dari tangan Portugis jang menduduki negeri itu. Semakin lama semakin terang bagi pemimpin-pemimpin jang berlajar, bahwa Kompeni ini mempunyai urusan Pemerintahan dan merupakan badan pemerintahan. Oleh karenanja tindakan-tindakan Nachoda-nachoda itu diarahkan pada tudjuan Pemerintah di Hindia. Tetapi dalam tindakan mereka ini, mereka mendapat rintangan dari putjuk pimpinan Kompeni jang semata-mata mengharapkan langsungnja kepentingan dagang bukan kepentingan siasat. Perselisihan paham antara Nachoda-nachoda dan putjuk Pimpinan Kompeni ini semakin lama semakin hangat, hingga dianggap perlu sekali untuk mengadakan persatuan dalam menjalankan urusan sehari-hari di Timur itu. Akhirnya didapatkan orang djalan kedjurusan ini dengan mengangkat seorang pemimpin Umum jang dibantu oleh satu Dewan terdiri dari lima orang. Pemimpin Umum itu dinamai Gubernur Djenderal (Gouverneur Generaal) dan Dewan itu dinamai Dewan Hindia (Raad van Indie). Gubernur Djenderal mendapat instruksi dari Putjuk Pimpinan Kompeni jang dibenarkan oleh Dewan Perwakilan Belanda (Staten General). Dengan pembangunan pimpinan ini Kompeni dapat menjalankan urusan siasatnja di Hindia Timur dan tidak berapa lama lagi pimpinan di Djakarta itu disebut orang Pemerintah Tinggi (Hoge Regeering). Salah satu pegawai Kompeni jang berpangkat onderkoopman (pedagang muda) nama Abraham Strek dengan pemimpin-pemimpin kapal „Wapen van Amsterdam”, datanglah kenegeri Djambi pada tahun 1615, dan pada tahun berikutnya 1616 didirikanlah sebuah kantor Kumpeni di Djambi untuk pembelian lada dan hasil hutan. Tudjuh tahun sudah itu kantor dibubarkan jaitu ditahun 1623, diduga karena susahnja perhubungan dengan penduduk. Pada tahun 1630 Radja Djohor (Malaka) meminta penjerahan negeri **Tungkal** dari pangeran **Keda**, tetapi perselisihan ini tidak diindahkan oleh Pangeran **Keda**. Pada tahun 1636 Kompeni mendirikan Kantor pula di Djambi. Pada masa ini keadaan Kompeni di Djambi sedang berlawanan dengan Sultan Ageng Keradjaan Mataram jang mendjadi musuh jang besar bagi Kompeni. Terdengariah kabar bahwa Radja Djambi memihak kepada Sultan Ageng dan bermusuah dengan Kompeni. Hendrik van Gont Kepala pedagang Kompeni di Djambi segera mengirim warta

kepada Gubernur Djenderal dan mengharapkan perintah dari „Pemerintah Tinggi” untuk mengangkat sendjata terhadap Djambi. Oleh karena Pangeran Depati tidak mengakui adanya perhubungan dengan Mataram, Gubernur Djenderal Antonie van Diemen mengirimkan hadiah kepada Radja Djambi disertai dengan surat peringatan. Peristiwa ini terdjadi dalam tahun 1642. Pada tahun 1643 Pangeran Keda **Sultan Abdul Kahar** digantikan oleh puteranya **Pangeran Depati Anom Sultan Agung Abdul Djalil** dan pada tahun ini dibuatnja surat perdjandjian (kontrak) jang pertama antara Djambi dan Kompeni (V.O.C.). Pada tahun 1664 menurut berita dari kepala kantor Kompeni di Djambi Andress Hogaert Blook, bahwa Radja Djambi telah menentang Djohor.

Pada tahun 1665 Sultan Abdul Kahar turun dari tacht keradjaannya digantikan oleh Raden penulis Sultan Abdul Mohmohij gelar Sultan Seri Ingologo. Setelah perselisihan, terdjadilah peperangan dengan keradjaan Djohor pada tahun 1667. Djohor dibantu oleh Palembang, tetapi dapat ditangkis dengan bantuan Kompeni. Kepala kantor Kompeni di Djambi, bernama Sybrandt Swart, mati dibunuh orang pada tahun 1660. Dalam pembunuhan ini Sultan Seri Ingologo disangka tjampur tangan. Kemudian dia dibudjuk oleh Belanda masuk kedalam benteng Belanda dimana Sultan Seri Ingologo ditangkap dan dikirim ke Djakarta (Batavia). Oleh putjuk pimpinan Kompeni diputuskan mengasingkannya ke Pulau Banda (Mluku). Putera Sultan Seri Ingologo, **Pangeran Tjakranegara** diangkat mendjadi Sultan Djambi dengan gelar **Sultan Kyai Gedeh**. Dua orang saudara muda dari Sultan Kyai Singga Pati sangat murkanja terhadap penobatan Sultan Kyai Gedeh itu, karena menurut pesanan ajahnja, Sultan Seri Ingologo, Pangeran Depati Tjakranegara (Sultan) Kyai Gedeh tidak diperkenankan naik tacht keradjaan karena dosanja menghianat ajahnja. Oleh karena itu **Raden Djaelat** jang berhak menggantikan ajahnja itu berontak terhadap saudara tuannya, dibantu oleh adiknya **Kyai Singa Pati**, tetapi terusir keuluan sampai di Muara Tebo. Muara Tebo adalah letaknja Kalbu VII-IX Koto jang dulu diperintahi oleh Sunan Pulau Djohor. Sesampainja di Muara Tebo, Raden Djaelat mengumpulkan penduduk VII-IX Koto dan mentjeritakan hal ichwal jang kedjadian itu atas dirinja di Djambi, lalu pergi ke Pagar Rujung. Untuk meminta pertolongan dari Radja Pagar Rujung. Oleh Radja ini Raden Djaelat diakui sebagai Sultan, bergelar Seri Maharadja Batu. Sekembalinja di Muara Tebo Raden Djaelat dinobatkan mendjadi Sultan dan berkedudukan di Mangodjajo dekat Muara Tebo. Pangeran Depati Tjakranegara meninggal dunia pada tahun 1696 dan digantikan oleh puteranya Sultan Mohd. Sjach. Berbareng dengan ini perhubungan antara Kompeni dan Sultan sangat gentingnja hingga terpaksa kantor Kompeni ditutup. Sultan Mohd. Sjach mengirimkan utusan ke Gubernur Djenderal pada tahun 1707 untuk mengadakan perhubungan kembali dengan Kompeni. Sesudah ini sebagai akibat dari pengutusan itu, Kompeni

mendirikan pula kantor di Muara Kumpeh Ilir sebeuah tempat dikuatkan dengan benteng. Setelah kira-kira 30 tahun memisahkan kekuasaan dari Sultan Djambi yang berkedudukan di Tanah Pilih (Kota Djambi) sesudah matinja Kyai Singga Pati, kaki tangan yang terpenting bagi Sultan Seri Maharadja Batu, maka berkuranglah pengaruh Sultan Seri Maharadja Batu dan kembali ke Djambi untuk berdamai dengan Sultan Mohd. Sjach. Sultan Mohd. Sjach turun tachtta keradjaan dan Sultan Seri Maharadja Batu diakui sebagai Sultan Djambi dengan gelar **Suto Ingologo**. Tetapi tidak lama lagi Sultan Suto Ingologo ditangkap oleh Kompeni dan di buang ke Batavia (Jakarta). Sultan Muhamad Sjach bertachtta lagi hingga wafatnja tahun 1740 dan digantikan oleh Putera Raden Djaelat (Raden Tjulip) bernama **Sultan Istera Ingalaga**. Sultan Istera Ingalaga teringat akan pengasingan ajahnja, lalu mentjari daja upaja untuk mengusir Kompeni dari Djambi. Pada tahun 1742 berhasillah usahanja dan kantor serta benteng Kompeni di Muara Kumpeh ditutup dan ditinggalkan oleh Belanda. Sultan Istera Ingalaga wafat pada tahun 1770 digantikan oleh puteranya **Sultan Anom Seri Ingalaga** (Achmad Zainuddin). Sultan Anom Seri Ingalaga (Achmad Zainuddin) digantikan oleh puteranya Mas'ud Badaruddin bergelar **Sultan Ratu Seri Ingalaga** pada tahun 1790.

BUBARNJA KOMPENI.

Pada anggaran Tatanegara tahun 1798 bagi „Bataafsche Republik” dinegeri Belanda disebutkan bahwa segala hutang piutang dan hak milik Kompeni djatuh ketangan Pemerintah Negeri Belanda dan segala urusan Hindia Timur untuk sementara diatur oleh satu pengurus perdagangan dan hak milik Hindia Timur (Comite tot de Zaken van Oost Indische handel en bezettingen).

Pada tahun 1799 Kompeni dibubarkan dan segala hak milik dan hutang piutang Kompeni pindah ketangan pemerintah Belanda (Bataafsche Republik), dengan ini beberapa bagian dari kepulauan Indonesia yang diduduki oleh Kompeni mendjadi tanah djadjahan negeri Belanda. Pada waktu penjerahan hak milik dan urusan Kompeni kepada pemerintah Belanda, kedudukan Kompeni diseluruh pulau Sumatera hanja terdapat di Palembang sadja. Terbuktilah, bahwa pada waktu penjerahan itu Djambi tidak diduduki oleh Kompeni walaupun pada tahun 1791. Djambi telah dikundjungi wakil Kompeni Staving dari Palembang dan **Sultan Mas'od Badarudin** menawarkan Staving supaja menduduki benteng Kompeni yang ada di Djambi itu kembali. Sewafatnja Sultan Mas'od Badarudin pada th. 1812 saudara mudanja **Raden Denting Sultan Mohd. Mahidin** menggantikannja dan bergelar sultan **Agung Seri Inlogo**.

Ketika Sultan Palembang mengadakan pemberontakan terhadap kompeni pada tahun 1819, Djambi mengirim tentera bantuan kepada Sultan Palembang. Sewafatnja Sultan Agung, sementara

permaisurinja memegang kendali keradjaan hingga berachirnja pemberontakan rakjat. Pada tahun 1833 **Pangeran Ratu Raden Mohd. Fachruddin** dinobatkan mendjadi Sultan dan digelar orang **Sultan Keramat**.

Pada tahun ini djuga Pemerintah Belanda mengirim Utusan Umum (Commissaris-General) van den Bosch kepulau Sumatera untuk menguasai pantai Timur dan Barat pulau Sumatera supaya dapat mempengaruhi perdagangan diseluruh pulau Sumatera. Di dalam usahanja untuk menguasai pantai laut Djambi, kebetulan negeri Djambi sedang diganggu oleh badjak laut jang tinggal dimuara Bt. Hari. Segeralah datang serombongan pasukan laut Belanda menguasai badjak laut dimuara Bt. Hari itu, dengan maksud untuk mempengaruhi Djambi. Tetapi dugaan Belanda akan dapat mempengaruhi Djambi dengan mengusir Badjak laut itu, sia-sia saja. Beserta dengan beberapa Bangsawan keradjaan Palembang jang melarikan diri ke Djambi, Sultan Fachruddin mengadakan penjerangan terhadap kedudukan Belanda di Rawas Palembang. Tindakan ini dilakukan oleh Sultan Fachruddin berhubung dengan hasratnja para bangsawan Palembang untuk mengadakan pembalasan akibat diturunkannja Sultan Raden Achmad Nadjamuddin ke 11 dari tacht keradjaan Palembang pada tahun 1823 jang berarti bubarnja ke Sultanan Palembang. Dibawah pimpinan Letnan Kolonel Michels pasukan Belanda masuk Sarolangun Djambi dan menutup perdjalan sungai. Belanda dapat mematahkan penjerangan ini dan memaksa Sultan Fachruddin dengan tentaranja kembali dari tempat penjerangan. Pada tanggal 14 Nopember 1823 Letnan Kolonel Michiels memaksa Sultan Fachruddin menanda tangani surat perdjandjian didusun **Sungaibaung**.

Dalam perdjandjian itu disebutkan :

- a. Negeri Djambi dikuasai dan dilindungi oleh negeri Belanda.
- b. Negeri Belanda mempunyai hak untuk mendirikan kekuatan dalam daerah Djambi dimana perlu.

Pada achir tahun 1833 Muara Kumpoh diduduki Belanda lagi dengan dikepalai oleh pengusaha Belanda (Europeesch Gezaghebber) dan di Sabak diadakan pendjaga Bumiputera (Inl. posthouder).

Oleh karena surat perdjandjian jang ditjiptakan oleh Michiels itu, untuk memperluas kekuasaan Pemerintah Belanda di Djambi belum dianggap sempurna, maka pada tanggal 15 Desember 1834 dimajukan pula satu surat perdjandjian menurut tjiptaan Residen Palembang Practorius sebagai wakil dari Pemerintah Belanda jang ditanda tangani oleh Sultan Mohammad Fachruddin, pangeran Ratu Abdurahman Kartaningrad dan beberapa bangsawan Djambi. Surat perdjandjian itu dibenarkan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 21 April 1835.

Tambahan surat perdjandjian :

- a. Pemerintah Belanda memungut tjukai daripada segala pemasukan dan pengeluaran barang.
- b. Pemerintah Belanda berhak monopoli dalam pendjualan garam.
- c. Pemerintah Belanda tidak memungut lain tjukai.
- d. Pemerintah Belanda tidak akan turut tjampur dalam urusan tatanegara dalam negeri, dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri, ketjuali dalam hal penggelapan tjukai jang berhak dipungut oleh Pemerintah Belanda.
- e. Kepada Sultan dan Pangeran Ratu diberikan uang tahunan sebesar Rp. 8000,—.

Sultan Mohamad Fachruddin bermaksud mengusir Belanda dari negeri ini, tetapi terikat oleh surat perdjandjian selama itu. Pada tahun 1841 Sultan Mohamad Fachruddin wafat dan diganti oleh saudara mudanja, **Sultan Abdur Rachman Nazaruddin** (Nasruddin) dan putera Sultan Fachruddin bernama Taha Saifiuddin menjadi Pangeran Ratu. Sedjak didjalankannya siasat Van den Bosch untuk menguasai pantai Timur dan Barat pulau Sumatera, terdapatlah rintangan dari Inggeris jang pada masa itu sama mentjari djadjahan. Setelah beberapa kali diterimanja pengaduan dari negeri Inggeris tentang tindakan-tindakan serdadu Belanda dipantai Pulau Sumatera, diperintahkan oleh Minister Belanda BAUD untuk membubarkan pemerintahan-pemerintahan militer di Sumatera seperti di Pertibi, Dalubila dan Inderagiri, sedang benteng di Muara Kumpeh tetap diduduki, karena negeri Djambi sudah ditetapkan menjadi sebahagian daripada djadjahan Belanda di Indonesia, ditambah pula dengan permintaan Sultan Nasruddin supaya dilindungi daripada gangguan saudara (perang saudara) misalnja Raden Tabong. Pada tahun 1851 datanglah sebuah kapal Amerika Serikat „Flirt” dikepalai oleh **Walter Gibson**. Sesampainja di Djambi Walter Gibson mentjoba menghasud Sultan Nasruddin supaya berontak terhadap Belanda. Setelah diketahui oleh pemerintah Belanda, Walter Gibson dikirim ke Betawi, tetapi dapat melepaskan dirinja. Perkara ini berakibat jang sangat pandjang antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Amerika.

Berhubung dengan pemberontakan di Palembang jang dilakukan oleh para bangsawan disana, pada tanggal 31 Djuli 1852 dimaklumkan oleh Pemerintah Belanda, bahwa pengangkutan mesiu kenegeri Djambi untuk sementara dilarang. Setelah diketahui oleh Pemerintah Belanda, bahasa Sultan Djambi memasukkan mesiu kenegeri Djambi, memberikan kesempatan bersembunyi kepada para bangsawan Palembang jang melarikan diri dari Palembang dan menggelapkan pemasukan barang-barang supaya djangan kena tjukai, maka Assistent Resident Palembang Storm van 's Gravesande diutus ke Djambi untuk memberi peringatan kepada

Sultan Djambi supaja menepati perdjandjian tahun 1834 dan maklumat tentang larangan masuknja mesiu. Peringatan itu tidak diindahkan.

Kemudian Sultan Abdur Rachman Nazaruddin wafat pada tahun 1855 dan digantikan oleh Pangeran Ratu dengan gelar Pangeran Djajadiningrat atau **Sultan Thaha Safiuddin**, sebagai Pangeran Ratu diangkat pula putra dari Sultan Abdur Rachman Nasruddin **Raden Muhammad** yang bergelar Pangeran Ratu Kartaningrat.

Sultan Thaha Safiuddin memaklumkan penobatannja kepada Pemerintah Belanda. Tetapi tidak memberi piagam berisi pengakuan kekuasaan Pemerintah Belanda dinegeri Djambi dan tidak pula menepati apa-apa yang ditetapkan dalam perdjandjian tahun 1834 itu. Djuga oleh karena surat-surat perdjandjian tahun 1833 dan 1834 dianggap kurang menjukupi keperluan tatanegara pada masa itu, maka Pemerintah Hindia Belanda memberi perintah kepada Resident Palembang Gouperus pada bulan September 1857 untuk memajukan surat perdjandjian baru, yang ditjiptakan oleh Pemerintah sendiri. Diperingatkan pula kepada Resident Palembang, bahwa surat perdjandjian itu setcepat mungkin harus selesai, berhubungan dengan kepentingan tatanegara lainnja, ditambah lagi dengan adanya tindakan-tindakan dari negeri lain (Inggeris) dalam negeri Djambi. Pemerintah sangat mengharapkan ketetapan hitam diatas putih bahwa negeri Djambi telah mendjadi sebahagian dari pada djadjahan Belanda. Dengan selesainja surat perdjandjian baru dengan Sultan Thaha ini, harapan itu dapat dilaksanakan. Akan tetapi beberapa kali Resident Gouperus berusaha, ihtiar menjelesaikan surat perdjandjian itu sia-sia belaka, karena Sultan Thaha tetap tidak menjetudju perdjandjian itu.

Pemerintah Belanda berichtiar pula dengan setjara damai.

Pemerintah mengangkat satu badan utusan (komisi) untuk mengadakan perundingan dengan Sultan Thaha yang terdiri dari Resident Gouperus dan Assistant Resident Storm van's Gravesande. Sebelum komisi mereka berangkat ke Djambi, lebih dahulu dikirimnja 2 orang, ialah Djaksa Palembang Pangeran Kartawidjaja dan Kepala Kampung Said Ali bin Husin bin Sjahabuddin untuk menjelidiki siapa diantara keluarga Sultan Djambi yang menjetudju perdjandjian dan siapa yang tidak menjetudjuinja. Djuga dikirim sehelai surat dari Gubernur Djenderal sendiri kepada wakil Pemerintah Belanda di Muara Kumpeh untuk disampaikan kepada Sultan Thaha. Adjakan pemerintahan Belanda itupun sia-sia sadja. Kedua orang yang dikirimkannja lebih dahulu itu tidak diterima oleh Sultan Thaha dan tetap berpegang pada surat perdjandjian tahun 1834, karena surat perdjandjian itu telah tjukup disumpahi oleh ajahnja untuk baginda dan turunannja dan tidak dapat dirobah lagi. Meskipun tanda-tanda menundjukkan, bahwa usaha tidak akan berhasil, Resident Gouperus bersama

Assistent Resident Storm 's Gravesande berangkat djuga ke Djambi. Sultan Thaha tetap tidak menghendaki adanja perdjandjian baru jang mereka usulkan ini. Oleh badan utusan didengar kabar pula, bahwa pada pertengahan tahun 1875 Pangeran Ratu telah membawa surat Sultan Thaha ke Singapore untuk dikirimkan terus kepada Sultan Turki. Dalam surat ini Sultan Thaha memohonkan kepada Sultan Turki supaya Turki mengeluarkan maklumat kepada negeri-negeri di Eropah barat berisikan larangan mengganggu Kesultanan Djambi. Menurut kejakinan Sultan Thaha, permohonannja itu akan diluluskan oleh Sultan Turki. Sultan Thaha bertambah enggan menjetudjui perdjandjian baru itu.

Pemerintah Belanda jang merasa terhina oleh segala tjara jang dilakukan oleh Sultan Thaha dalam penobatan dan dalam perkara pengusulan perdjandjian baru itu, achirnja diputuskan penjelesaian akan didjalankan dengan paksaan dan **menetapkan** :

- a. Satu pasukan serdadu dikirim ke Djambi.
- b. Sultan Thaha akan diberikan kesempatan memikir (ultimatum) selama dua kali 24 djam untuk membikin perdjandjian baru itu.
- c. Djika Sultan Djambi tidak berkehendak menjetudjui perdjandjian ini, Baginda akan diturunkan dari tachtta keradjaan dan akan digantikan oleh seorang Sultan jang bersedia menjetudjui perdjandjian ini.
- d. Djika Sultan Djambi tidak berkehendak menjetudjui perdjandjian itu, mungkin baginda diasingkan ke Betawi.
- e. Sultan Djambi diwadjabkan mengirimkan utusan ke Betawi untuk memberi tanda kehormatan kepada Gubernur Djenderal di Betawi.

Pada pertengahan bulan Agustus 1858 datanglah pasukan infanterie di Djambi dikepalai oleh Major Van Langen dan pada permulaan bulan September pasukan sudah siap dikota Djambi. Sultan Thaha diberinja surat ultimatum, tetapi beliau tidak mengirimkan djawaban dalam tempo jang ditentukan. Pada tanggal 25 September itu djuga wakil Pemerintah Belanda di Djambi menerangkan dengan resmi tidak mengakui daulat Sultan Thaha dan menganggap Sultan Thaha sudah diturunkan dari tachtta keradjaan.

Keraton Sultan diserang pasukan Belanda. Setelah terdjadi pertempuran jang sengit, Keraton dapat diduduki oleh Belanda dan Sultan Thaha beserta Pangeran Ratu dan beberapa bangsawan lainnja melarikan diri keuluan dengan membawa harta pusaka Keradjaan Djambi berikud keris Segindje jang mendjadi tanda Keradjaan negeri Djambi. Sultan Thaha bersemajam di Muara Tembesi untuk mengawasi daerah Ulu Batang Hari dan Tabir.

Pangeran Ratu tidak sanggup diangkat mendjadi Sultan, maka pada tanggal 2 Nopember tahun itu Pemerintah Belanda meng-

angkat Pamanda Sultan Thaha Adinda Sultan Abdur Rachman Nasruddin bernama Perabumandja djadi Sultan Djambi dengan gelar **Sultan Ratu Ahmad Nachruddin**.

Pangeran Ratu Martaningrat ditetapkan mendjadi Pangeran Ratu lagi. Pada hari itu djuga surat perdjandjian baru diusulkan oleh Pemerintah Belanda dan ditanda tangani oleh Sultan serta diperkuatkan oleh piagam Gubernur Djenderal bulan Desember 1858. Dalam surat perdjandjian ini antaranja disebutkan :

- a. Mengingat isi surat-surat perdjandjian jang dulu dan karena alasan kemenangan jang didapat oleh Belanda terhadap Sultan Negeri Djambi, maka Djambi adalah sebahagian daripada djadjahan Belanda di Hindia Timur dan dengan ini negeri Djambi berada dibawah kekuasaan negeri Belanda.
- b. Negeri Djambi hanja dipindjamkan kepada Sultan Djambi jang harus bersikap menurut dan setia serta menghormati terhadap Pemerintah Belanda.
- c. Pemerintah Belanda berhak memungut tjukai pengangkutan barang masuk dan keluar negeri Djambi.
- d. Kepada Sultan dan Pangeran Ratu diberikan uang tahunan sedjumlah Rp. 10.000, djumlah mana mungkin diperbesar djika penghasilan tjukai pengangkutan barang bertambah.
- e. Segala perdjandjian tersebut dalam surat perdjandjian 15 Desember 1834 tetap berlaku, djika tidak digugurkan atau berlawanan dengan isi surat perdjandjian ini.
- f. Sultan dan Pangeran Ratu harus mengirim utusan untuk menghormati Gubernur Djenderal di Betawi, djika dianggap perlu oleh Pemerintah Belanda.
- g. Batas-batas negeri Djambi akan ditetapkan oleh Pemerintah Belanda dalam piagam lain.

Perbatasan negeri Djambi ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Belanda dalam piagam tanggal 20 Djanuari 1863. Dengan penobatan Sultan Ahmad Nazaruddin timbullah masa perselisihan kekuasaan ke Sultan negeri Djambi. Rakjat tetap menganggap kekuasaan Sultan Thaha Safiuddin karena baginda ini jang memegang keris Segindje, dan keluarga keradjaan menetapkan bahwa sebagian dari negeri Djambi ini tetap dibawah kekuasaan Sultan Thaha. Di Djambi sampai ke Muara Tembesi orang terpaksa mengakui kekuasaan Sultan Achmad Nazaruddin, tetapi di Uluhan dan tanah Tungal mengakui kekuasaan Sultan Thaha.

Pembantu Sultan Thaha menguasai sebagian dari pada negeri Djambi itu, ialah saudara tuanja Pangeran Dipanegara. Kerap kali Sultan Achmad Nasruddin meminta pertolongan Pemerintah Belanda supaya meluaskan kekuasaannja sampai ke Uluhan, tetapi Pemerintah Belanda tidak dapat memenuhinja. Sultan Achmad Nachruddin bersemajam di Dusun Tengah kira-kira dua hari per-

djalanan perahu dari kota Djambi dan mengadakan wakil dikota Djambi untuk berurusan dengan Pemerintah Belanda sehingga perhubungan Sultan dengan Pemerintah Belanda sangat jarang.

Keadaan ini oleh Pemerintah Belanda dianggap sangat berlawanan dengan surat perdjandjian. Pangeran Raturpun pindah ke Dusun Tuo, lalu pindah pula kedusun Teluk Puan beberapa hari perdjalan perahu dari kota Djambi. Pemerintahan kesultanan negeri Djambi diserahkan kepada bangsawan dan kepala lainnja. Pada tahun 1868 pertahanan di Muara Kumpeh dibubarkan dan hanya ditempatkan seorang bendahara sadja. Di Tungkal, Berbak dan Sabak ditempatkan pemeriksaan barang angkutan masuk dan keluar. Residen Palembang mengusulkan supaya pangkat Politik Agent djangan diserahkan kepada Militer tetapi kepada ambtenaar jang berpangkat Assistent Resident.

Pada tahun 1875 ketika komandan Militer di Djambi dipindahkan, pangkat politik agent diserahkan kepada Controleur 1e kl. **Niessen** untuk sementara. Untuk mendjaga terhadap pegawai Pemerintah Belanda surat perdjandjian itu ditambah isinja pada tahun 1876. Meskipun tambahan ini diturut oleh Sultan Achmad Nachruddin tetapi rakjat Sultan Thaha tetap bersebojan tidak akan memperkenankan Belanda seorangpun mengindjak negeri Djambi.

Serombongan penjelidik Ilmu Bumi negeri Sumatera di Djambi diserang oleh rakjat Sultan Thaha pada tahun 1877 dan 1878. Dengan tambahan surat perdjandjian tanggal 13 Djuli 1880 dengan dibenarkan oleh piagam Gubernur Djenderal tanggal 16 Pebruari 1881, monopoli tjandu oleh Pemerintah ditebus dengan Rp. 4000 setahun kepada Sultan dan Pangeran Ratu. Sesudah beberapa kali Pangeran Ratu meminta idzin mengundurkan diri dari djabatannja dan menerangkan tidak sanggup mendjadi Sultan Djambi djika diangkat oleh Pemerintah Belanda sekalipun, tetapi setelah wafatnja Sultan Achmad Nachruddin pada tanggal 16 Djuli 1881 didusun Tengah, Pangeran Ratu menggantikan Sultan Achmad Nachrudin dengan gelar **Sultan Ratu Muhamad Mahiluddin** (Mujiddin) dan untuk mendjadi Pangeran Ratu diangkatnja saudara tiri Sultan Thaha, Pangeransurio dengan gelar Pangeran Ratu Tjakra-negara.

Pada tanggal 2 Mei 1882 Resident Palembang **Laging Tobias** mengadakan perdjandjian dengan Sultan baru ini. Pada umumnja surat perdjandjian baru ini sama dengan surat-surat jang dahulu dengan beberapa tambahan sadja :

- a. Bangsa Timur asing (Tiongkok, India, dan lain-lain) harus memperoleh izin dari Gubernur Djenderal lebih dahulu untuk tinggal dinegeri Djambi.
- b. Semua bangsa Timur asing dilindungi pengadilan dari Pemerintah Belanda.
- c. Kepada mereka ini tidak diizinkan mendjual atau menjewakan tanah djika tidak setuju Pemerintah Belanda.

- d. Pemerintah Belanda berhak untuk menguasai hasil pertambangan.
- e. Uang tahunan pengganti pemungutan tjukai sebesar Rp. 10.000 dinaikkan menjadi Rp. 12.000.—.

Untuk menaklukkan Sultan Toha Pemerintah Belanda menetapkan perdjandjian pula pada tahun 1882. Djika Sultan Toha menjerahkan diri kepada Pemerintah Belanda dan mengakui Sultan jang dinobatkan oleh Pemerintah Belanda serta mengakui surat perdjandjiannya :

- a. Sultan Toha diangkat sebagai Pembesar negeri dengan gelar „Sultan Toha”.
- b. Sultan Toha berhak menerima uang tahunan dari Pemerintah Belanda.
- c. Sultan Toha diberi penggantian kerugian setingginya Rp. 500.—sebulan.

Meskipun pemerintah Belanda mengira dapat menaklukkan Sultan Toha dengan tawaran ini, tetapi Sultan Toha tidak berniat sedikitpun menjerahkan dirinya kepada Belanda.

Sultan Muhamad Mahiluddin wafat pada tanggal 10 April 1885 dan Pemerintah Belanda bermaksud menobatkan Pangeran Ratu dan meminta pertimbangan lebih dahulu.

Pada tanggal 23 Mei 1885 di Balai pertemuan di Djambi terjadi pembunuhan dua orang Officier Belanda dan seorang serdadu. Atas pembunuhan atas diri dua orang Officier Belanda dan seorang serdadu. Atas permintaan Resident Palembang oleh bangsawan Djambi diserahkan beberapa orang jang bersangkutan dalam pembunuhan ini. Pada pemeriksaan dewan Pengadilan di Palembang terbukti bahwa pengandjur dalam pembunuhan ini **Raden Anom**. Pada tahun 1880 Raden Anom telah melarikan beberapa buah sendjata api Belanda ketempatnja Sultan Toha.

Pada malam 27 ke 28 Agustus 1885 Raden Anom beserta 300 orang menjerang benteng Belanda di Djambi. Pada bulan Djuli 1885 Pangeran Ratu Tjakranegara datang ke Djambi untuk memberi jawaban atas tawaran Belanda untuk menjadi Sultan di Djambi. Penobatannya terdjadi di Kampung Petjinan di Djambi, dihadiri oleh Resident Palembang. Sultan baru ini bergelar **Sultan Achmad Zainuddin** dan sebagai Pangeran Ratu dipilihja Putera jang ketiga dari Sultan Toha, jang baru berumur 4 tahun dan bergelar Pangeran Anom Kesumajuda. Sebagai kuasa dari Pangeran Ratu jang belum tjukup umur ini diangkatja Raden Abdur Rachman putera Sultan Ratu Muhamad Mahiluddin dan Pangeran Aria Djajakesuma putera Sultan Ratu Achmad Nasruddin. Akan tetapi karena Raden Abdur Rachman merasa ketjil hati karena tidak diangkat menjadi Pangeran Ratu, tidak menjukai pengangkatan Aria Djaja Kesuma ini, maka sebagai gantinya diangkat Pangeran Marta Djajakesuma putera Sultan Abdur Rachman Nasruddin.

Menilik keinginan Pemerintah Belanda untuk menaklukkan Sultan Toha Safiuddin tidak heranlah jika dikatakan bahwa pengangkatan Raden Anom Kesumajuda sebagai Pangeran Ratu ini adalah tipu muslihat Pemerintah Belanda, untuk memikat Sultan Toha. Sedjak larinja Sultan Toha keuluan Djambi untuk mendjadi tanda Mahkota ke Sultan Djambi hanya dipakai keris Singamadjaja, jang sebenarnya digunakan bagi tanda pangkat Pangeran Ratu sadja karena keris Segindje dipegang oleh Sultan Toha. Setelah putera Sultan Toha Pangeran Anom Kesumajuda diangkat mendjadi Pangeran Ratu, Keris Segindje diterimakannja kepada Sultan Achmad Zainuddin dan keris Singamadjaja diambilnja. Keadaan ini meyakinkan Pemerintah Belanda bahwa Sultan Toha mengakui Sultan jang diangkat oleh Pemerintah Belanda dan dengan sendirinja rakjat Djambipun mengakui Sultan Achmad Zainuddin sebagai satu-satunya Sultan dinegeri Djambi. Sehabisnja penobatan segeralah terdjadi surat perdjandjian baru antara Belanda dan Sultan Djambi, jang pada tanggal 28 Mei 1888 diperbaharui lagi dengan tambahan-tambahan :

- a. Penetapan tanah-tanah kepunjaan Pemerintah Belanda disekitar kota Djambi, Muara Sabak, Muara Kumpeh, Simpang, dan Kuala Tungkal.
- b. Pemerintah Belanda akan membayar uang tahunan kepada Sultan dan tidak akan mengganggu urusan ke Sultan, selama Sultan menepati perdjandjian-perdjandjian.
- c. Menetapkan perhubungan antara Pemerintah Belanda dengan ke Sultan Djambi.
- d. Menetapkan bagian negeri Djambi, dimana Kerintji terhitung sebagai sebahagian negeri Djambi.
- e. Sultan harus sering mengundjungi kota Djambi.

Sultan Achmad Zainuddin bersemajam di Muara Ketalo dan djarang sekali datang di Ibu kota Djambi.

Keadaan ini kurang menjenangkan Pemerintah Belanda karena menjalahi surat perdjandjian ini.

Diuluan Pangeran Dipanegara dan Pangeran Husin memungut tjukai pengangkutan barang masuk dan keluar serta mendirikan pendjualan garam di Muara Tembesi. Dengan keadaan ini Pemerintah Belanda merasa kerugian. Setelah beberapa kali ditegur dengan antjaman, pemungutan tjukai dan pendjualan garam di Muara Tembesi itu dihentikan dan dipindahkan ke Muara Tabir dan Muara Sekamis (Batang Tembesi).

Pada bulan Pebruari 1890 perbentengan Pemerintah Belanda di Sarolangun Rawas diserang oleh serombongan orang Djambi dibawah pimpinan Hadji Kedemang jang kemudian tertangkap dan dikirim ke Palembang.

Pada tanggal 1 Nopember 1890 Pangeran Martadjajakesuma atas permintaan Sultan, karena tidak mengindahkan urusan peme-

rintahan dipetjat dari djabatannja dan digantikan oleh Pangeran Natamanggala.

Djanuari 1891 Residen Palembang de Vies mengundjungi Sultan di Muara Kotalo untuk menguruskan kontrak tentang hak memberi idzin perusahaan pertanian dan tambang. Karena Sultan sedang sakit urusan ini diwakilkan kepada Pangeran Wirakesuma. Sultan Achmad Zainuddin tidak keberatan memperkenankan Kontrak ini. Pada masa ini diantara pendjagaan Belanda jang mendjadi pusat penjerangan rakjat Djambi, ialah Sarolangun Rawas. Pada tahun 1891 seorang Djambi dapat membunuh Controleur Van Laer dan pada tahun 1895 terdjadi pula pembunuhan Komandan Militer dan keributan berdjalan terus. Resident Palembang mengundang Sultan dan Pangeran Ratu untuk diadjak berembuk untuk mentjari keamanan. Tetapi Sultan tidak memenuhi undangan itu. Pada bulan Desember 1899 Sultan Achmad Zainuddin memakzulkan diri dengan mendapat bantuan Rp. 4000,— setahun.

Mulai pemerintahan langsung Hindia Belanda.

Permusjawaratan antara para bangsawan Djambi dengan pemerintahan Belanda tentang gantinja Sultan tidak mendapat keputusan pasti, hingga pemerintahan negeri Djambi diserahkan kepada Pemerintah di Palembang sebagai satu daerah djadjahan Belanda di Hindia Timur. Pada tanggal 27 Pebruari 1921 Resident Palembang menerima penjerahan ini. Pendjagaan Militer Daerah Djambi segeralah diperkuat. Bulan Maret tahun itu Muara Tembesi diduduki oleh pasukan Infanterie. Berhubung dengan penjerangan rakjat (aanval) dari Ulu Tembesi dan Batang Asai ke Sarolangun Rawas, datanglah serombongan Infanterie dari Betawi menduduki Sarolangun Djambi pada bulan Oktober tahun itu.

Sementara itu Sultan Toha dan Pangeran Dipanegara bersemajam di Ulu Tabir (Tanah Garo). Dari patroli Militer jang didjalankan dari tahun 1901 sampai 1903, terbukti bahwa serangan-serangan berasal dari rakjat Sultan Toha. Pada tahun 1902 Pemerintah Belanda menempatkan Controleur di Muara Tembesi, Muara Tebo, Mesumei dan Merangin. Pada bulan Desember 1903 Pangeran Ratu menjerahkan tanah kekuasaannja dari Muara Tebo sampai ke Muara Tembesi kepada Pemerintah Belanda jang bersemajam dikota Djambi. Pada bulan Maret 1904 Pangeran Ratu menjerahkan Keris Singamadaja kepada Resident Palembang dan tidak lama lagi antaranja keris Segindje diserahkan pula oleh Pangeran Perabunegara putera Sultan Mahiluddin dan menantu Sultan Toha. (Kedua keris ini sekarang berada digedung Gajah Betawi). Patroli serdadu diteruskan di Sekamis dan Pemusiran dimana perlawanan rakjat dipimpin oleh Pangeran Ali putera Sultan Toha. Achirnja Pangeran Ali menjerahkan diri. Di Kumpoh serdadu dapat memadamkan perlawanan rakjat.

Pengandjurnja Raden Mat Thahir sesudah melalui Ulu Pidjoan dan Tungkal. Pangeran Aria Djajakesuma, Pangeran Wirakesuma dan Pangeran Hadji Kasim menjerahkan diri dan tinggal dikota Djambi. Pada bulan April 1904 patroli serdadu Belanda dapat membunuh Raden Seman di Tungkal dan pada bulan itu djuga patroli serdadu di Betung Bedara dapat mengepung dan membunuh Sultan Toha. Tidak lama sesudah itu wafatlah Pangeran Dipanegara dan Pangeran Sutadjaja atau Raden Anom.

Pada bulan September 1904 datanglah di Djambi seorang bangsa Hongaria **Karl Hirsch** menamakan dirinja **Abdullah Jusuf** mengaku mendjabat pangkat Kolonel pada tentera di Turki, sebagai utusan dari Sultan Turki untuk membantu keluarga radja Djambi dalam perlawanan kepada Belanda. Para Bangsawan Djambi diantaranya Pangeran Ratu dan Pangeran Djajakesuma jang pertjaja kepada pengakuannya, menggabungkan diri, tetapi **Karl Hirsch** segera ditangkap Pemerintah Belanda dan dikirim ke Betawi. Sembilan belas orang bangsawan Djambi dibuangkan ke Madiun (Djawa). Pangeran Ratu dapat melarikan diri lari ke Ulu Batang Hari melalui Inderagiri dan Lubuk Ramo. Pada bulan Nopember 1904 Controleur Krussen diserang di Nalo (Bangko) dan dibunuh didusun dalam.

Dengan ketetapan keradjaan Belanda pada tanggal 1 Pebruari 1906 daerah Djambi dijadikan daerah pemerintahan langsung oleh Hindia Belanda jang diperintahi oleh seorang resident, seorang Assistent Resident dan sembilan Controleur. Assistent Resident Djambi O. L. Helfach diangkat mendjadi Resident.

Bangko, Sarolangun, Muara Bungo dan Kerintji dibawah pemerintahan Assistent Resident berkedudukan di Bangko. Pada bulan Mei 1906 Pangeran Ratu Anom Kesumajuda menjerahkan diri, tetapi melepaskan diri lagi dari Muara Tebo dan pada bulan September menjerahkan diri lagi dan diasingkan (dibuang) ke Perigi (Menado). Sementara ini negeri belum djuga aman. Di Sarolangun terdjadi penjerangan atas dirinja Assistent Resident Van den Bor. Pada bulan Djuli terdjadi pula atas dirinja Resident Helfrich dan Controleur Krom, tetapi tidak berbahaja. Patroli serdadu terus didjalankan dan berturut-turut membunuh keluarga radja Raden Hamzah, Pangeran Singo, Pangeran H. Umar di Pemunjian (Ulu Tebo) dan pendekar besar **Raden Mat Thahir** di Muara Djambi. Dengan wafatnja Raden Mat Thahir berhentilah perlawanan terhadap Pemerintah Belanda. Pada bulan Desember 1908 Resident O. L. Hefich digantikan oleh Resident A. J. N. Engelemborg.

Sesudah tahun 1911 hanja Kota Djambi sadja didjaga oleh kekuatan militer. Tahun 1911 Resident digantikan oleh Th. A. L. Hijng. Dalam tahun 1912 mulai diadakan pemerintahan district. Tahun 1913 Resident digantikan A. L. Kamerling dengan pangkat Controleur. Pada 3 Desember 1915 Resident digantikan H. E. C.

Quast. Karena pengaruh dari Rawas Palembang maka pada tahun 1915, di Sarolangun berdiri perkumpulan Serikat Islam dan kemudian di Muara Tembesi didesa Rantau Kapas dipimpin oleh Raden Gunawan pemuka Serikat Islam.

Pada tanggal 26 Agustus 1916 terdjadi penjerangan pada Pemerintah di Muara Tembesi. Controleur dan Demang tidak ada Tangsi polisi diserangnja, sepuluh orang polisi tiwas dan seorang Dokter Djawa mati. Pada esok harinja Controleur bersama Demang baru kembali dari tournee dengan kapal. Setelah mengetahui kedjadian ini, mereka tidak singgah lagi di Muara Tembesi, dan kapal terus ditudjukan ke Djambi. Sesampai didusun Melapari kapal ditembak oleh pemberontak sehingga Demang Arbein tiwas. 880 orang menggabungkan diri pada S.I. dengan pengandjur-pengandjurnja memakai gelar keturunan Radja Djambi dahulu kala jang membikin pemberontakan seluruh Uluan Djambi.

Pada 31 Agustus 1916 Sarolangun Djambi diserang, sehingga Controleur Water dan pegawai-pegawainja dibunuh. Militer Belanda datang dari Djambi jang dipimpin oleh Overste Gerlach dengan beberapa buah kapal memudikkan Batang Hari untuk menindas pemberontak itu. Pada malam 1/2 September tahun 1916 Muara Tebo diserang. Dan Muara Tebo mendapat bantuan Polisi dari Kotabaru jang dipimpin oleh Kapten Ot sehingga tanggal 5 kembali aman dan banjak pembakaran terdjadi sewaktu penjerangan itu.

Tanggal 11 bulan itu djuga Bangko dapat giliran penjerangan. Bangko dapat dipertahankan oleh Militer jang dapat bantuan dari Djambi, Rawas, Kotabaru dan Sungei Penuh jang dipimpin oleh Kolonel Krusen jang menguasai militer Palembang di Djambi.

Sehingga bulan Oktober 1916 daerah Djambi baru kembali aman. Banjak korban-korban pemberontak jang tiwas, ditangkap dan dihukum pendjara dikirim ke Djawa.

Susunan penggantian Resident Djambi :

Pertri tahun 1918.

C. Poortman, 7 Maret 1923.

G. J. V. Ezerman, 24 Agustus 1927.

J. R. F. Verschoor van Nisse, 8 Nopember 1928.

W. Steinbuch 2 Nopember 1931.

Ph. J. van der Meulen, 10 Djuli 1933.

H. E. K. Van Dongen, 4 Mei 1935.

Dr. V. E. Korn, 9 April 1936.

M. J. Ruychaver, 26 September 1936.

J. Reuvers, 4 Maret 1942.

*
**

Pasal 3.

DARI PERDJUANGAN BERSENDJATA KEPERDJUANGAN DENGAN FORMASI PARTAI.

Pemberontakan Silungkang merupakan perlawanan bersendjata yang terakhir oleh rakyat Minangkabau dalam menentang penjajahan Belanda. Beberapa tahun sebelum itu taktik dan siasat perjuangan itu sudah diarahkan dari dan kepada segi yang lain, yaitu kepada segi politik.

Kesadaran yang tengah berkembang diseluruh benua Asia pada permulaan abad ke XX, di Indonesia dan Minangkabau khususnya juga mendapat tanah yang subur untuk berkembang selanjutnya. Kemenangan yang diperoleh oleh bangsa Djepang dari peperangannya melawan Tentara Rusia di Port Arthur yang merupakan tunas kebangunan semangat menentang penindasan di Asia, dengan perlahan tapi tentu, juga bersemi dalam jiwa bangsa Indonesia di Minangkabau ini.

Bila sedjarah kebangunan dan kebangkitan jiwa Nasional di Indonesia ini kita hubungkan dengan sedjarah perkembangan dan kebangkitan Minangkabau, maka ternyatalah, bahwa tidak berapa tahun sesudah banggunja Budi Utomo di Pulau Jawa, di Minangkabau bangkit pula semangat perjuangan didalam lapangan politik. Timbulnja hal ini tidak hanya disebabkan karena kandasnja dan tidak berhasilnja perlawanan-perlawanan bersendjata, tapi juga karena timbulnja kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia.

Karena itu tidaklah mengherankan, bila setiap tjita-tjita dan rentjana perlawanan, baik yang disalurkan oleh suatu organisasi yang tersusun, maupun oleh suatu golongan yang dipandang kuat, selalu mendapat sambutan baik dari rakyat. Lahirnja Sjarikat Islam di Pulau Jawa yang dengan tjepat merangkum dan menarik minat dan perhatian rakyat Minangkabau, karena tjita-tjita dan perjuangannja selaras dengan keinginan rakyat. Dalam masa beberapa tahun saja, partai politik yang berpaham dan berhaluan Islam ini berkembang dengan pesat diseluruh Minangkabau. Berpuluh-puluh tjabangnja terutama didaerah-daerah yang sekian lama menjadi pusat perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Demikian populernja Sjarikat Islam dikalangan rakyat Minangkabau, sehingga dimasa yang pendek partai ini mempunyai berpuluh ribu pengikut dan anggota, yang sebagian besar terdiri dari kaum dan golongan yang dipandang tjerdik dan tjendekia.

Selain itu oleh beberapa orang golongan terpeladjar Sumatera Barat di Padang, pada tahun 1917 dibentuk satu organisasi pemuda dengan nama Jong Sumatranen Bond. Pemimpin-pemimpinnya yang terkenal waktu itu antaranja alm. H. Abdullah Ahmad, alm. M. Taher Marah Sutan, alm. Dr. Amir dan M. Hatta. Sebagai peringatan kebangunan dan kesatuan pemuda ini, didirikan satu monument dimuka Hotel Muara sekarang. Pembukaan monument ini bertepatan pula dengan Kongres I dari J. S. B. ini, dimana antara lain berpidato pemuda Amir yang menarik perhatian dari pemuda terpeladjar Minangkabau kearah persatuan dan kebangunan. J.S.B. ini pada tahun 1930 ikut melebur diri bersama organisasi persatuan pemuda dari daerah lain dalam Indonesia Muda.

Sebagai djuga dengan perkembangan-perkembangan partai tersebut di Djawa sesudah itu, S. I. Minangkabau pun achirnja terpetjah dua, merupakan S. I. Putih dan S. I. Merah dan jang belakangan ini mendjelma mendjadi Partai Komunis Indonesia. Lahirnja partai Komunis ini, kembali mengobarkan semangat perlawanan dan pemberontakan jang berachir dengan pemberontakan Silungkang. Mudah dapat dimengerti apa jang terdjadi sesudah selesainja perdjjuangan jang kandas itu. Sesudah perlawanan rakjat ini dapat dipatahkan oleh Militer Belanda dalam tahun 1927, beribu-ribu anggota P.K.I. Minangkabau ditangkap dan disiksa dan beratus-ratus orang pula jang dibuang dan diasingkan ke Boven Digul, dan lain-lain tempat jang sengadja diperuntukkan untuk itu.

Zaman Pergerakan Nasional.

Peladjaran jang diperdapat selama zaman Sjarikat Islam dan P.K.I. memaksa rakjat bergerak dengan lebih litjin dan lebih konsekwen dari biasa. Pengalaman-pengalaman ditahun-tahun jang lampau memperdalam kesadaran kepada mereka, bahwa kemerdekaan itu tidak mungkin direbut kalau hanja diperdjuangkan oleh segolongan ketjil sadja dari bangsa Indonesia, karena jang terdjadjah pada waktu itu bukan suku bangsa Minangkabau sadja. Dengan demikian maka kesadaran berbangsa dan bertanah air jang satu dengan suku-suku bangsa lainpun timbullah dengan subur. Rasa persatuan berbangsa dan bertanah air bagi seluruh bangsa dan golongan bangsa Indonesia dipelopori dengan adjaran dari Partai Nasional Indonesia jang dibangunkan oleh Bung Karno dengan kawan-kawannja di Djawa. Minangkabau menjambut paham ini dengan tangan terbuka. P. N. I. mendapat lapangan jang bagus dan besar djuga disini.

Ditangkapnja Bung Karno dan dibubarkannja „Partai Nasional Indonesia” serta tumbuhnja „Pendidikan Nasional Indonesia” dibawah pimpinan Bung Hatta—Sjahrir dan mendjelmanja „Partai Indonesia” (Partindo) jang digerakkan oleh Bung Sartono c.s., berpengaruh djuga kepada perkembangan tjita-tjita dan perdjjuang-

an Nasional di Minangkabau. Sesudah zaman Partai Nasional Indonesia dan didalam masa kebesaran Pendidikan Nasional Indonesia dan Partindo ini, makin mendalamlah kesadaran kebangsaan dikalangan rakyat. Dorongan untuk mentjapai kemerdekaan untuk seluruh bangsa dan tanah air Indonesia itu makin berkobar. Sjarikat Islam kemudian mendjelma menjadi Partai Sjarikat Islam Indonesia.

Zaman kesadaran Nasional ini memuntjak dalam tahun-tahun perkembangan partai Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) yang berhaluan Islam dan kebangsaan, yaitu sebuah partai politik yang bangun ditengah-tengah rakyat Minangkabau dibawah pimpinan trio pentolan politik yang waktu itu namanya banjak disebut-sebut, yaitu alm. Hadji Muchtar Luthfi, H. Djalaluddin dan Hadji Iljas Ja'kub.

Tidak saja dalam lapangan politik kesadaran bersatu itu berkembang, tapi dalam lapangan lainpun timbul pula semangat persatuan itu dengan pesat. Organisasi Agama dan Pemuda, organisasi Kebudayaan dan Kepanduan mendjelma pula.

Gerakan Muhammadiyah yang diketuai oleh ulama yang terkenal A. R. St. Mansur merupakan gerakan keagamaan yang sangat populer di Minangkabau. Bersamanya lahir pula Aisijah dan Nasjiatul Aisjah yang khusus bagi gerakan wanita Islam dan Hizbul Wathan, badan Kepanduan pemuda Islam.

Persatuan Tarbiah Islamijah (Perti) yang digerakkan oleh beberapa orang ulama-ulama Islam bergerak didalam lapangan pendidikan agama Islam dan sosial. Gerakan ini dewasa ini dikepalai oleh Saudara Hadji Siradjuddin Abbas.

Dalam lapangan adat kebudayaan Minangkabau timbul pula gerakan kearah perbaikan dan persatuan, yaitu dengan muntjulnja Madjelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) yang dikepalai oleh Saudara Datuk Simaradjo.

Dalam lapangan pemuda muntjul „Himpunan Pemuda Islam Indonesia” (HPII). Dan hampir tiap-tiap organisasi yang disebutkan diatas itu mempunyai bahagian pemudanya sendiri, baik organisasi yang berpusat di Djawa, maupun organisasi setempat seperti Perti dan MTKAAM.

Usaha-usaha dari organisasi-organisasi pemuda itu sebagian besar diarahkan kepada memperdalam persatuan dan persaudaraan diantara seluruh bangsa Indonesia, dan bergerak dalam lapangan kepanduan dan keolah-ragaan.

Disamping Hizbul Wathan terdapat Sjarikat Islam Afdeeling Pandu (SIAP), Al Hilal, Persatuan Murid Dinijah School (PMDS) dengan Kepanduan Indonesia Muslimnja (KIM), Nasionale Indonesische Padvinderij (Natipij) dan lain-lain sebagainya. Disamping itu, kaum wanita Indonesia Minangkabau pun tidak mau ketinggalan dalam menjusun diri agar djangan sampai tertjetjer dalam mengikuti aliran masa. Pendeknja, tahun-tahun itu

merupakan tahun-tahun perkembangan kesadaran bersatu untuk menjapai tudjuan dan maksud jang satu, kemerdekaan untuk seluruh tumpah darah dan bangsa Indonesia.

Pertengahan tahun 1933 periode persatuan ini menjapai puntjaknja jang tertinggi. Pada waktu itu sebagian besar diantara pemimpin-pemimpin partai-partai politik ditangkapi oleh Pemerintah Belanda. Trio Permi jang disebutkan diatas tadi diserkep, pentolan PSII H. Udin Rahmany c.s. ditangkap, mereka diasingkan keluar daerah, ditempatkan di Boven Digul. Organisasi politik semuanya dikenakan vergader verbod, larangan untuk mengadakan permusjawaratan. Tidak satupun diantara partai politik jang dibiarkan bergerak dengan bebas, sampai kepada peladjaran disekolah-sekolah partikulier diawasi dan diadakan peraturan-peraturan jang mengekang. Ordonansi Sekolah-sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonnantie) diadakan dengan paksaan dan ditentang dengan hebat oleh rakjat.

Mulai dari saat itu, dengan sendirinja maka lumpuhlah semua alat-alat perdjjuangan rakjat jang legaal. Tapi semangat untuk memperkokoh persatuan kian sehari kian kuat, berkat bertambah hebatnja penindasan pemerintahan Belanda.

Demikianlah suasana itu berlangsung sampai kepada hari pertama dari pendudukan Djepang di Minangkabau.

PENDUDUKAN DJEPANG DI MINANGKABAU.

Tahun-tahun jang berdjalan sebelum Tentera Djepang menduduki Indonesia adalah tahun-tahun jang penuh dengan ketjemasan dan tindakan-tindakan jang gugup bagi pemerintahan keradjaan Belanda dan Hindia Belanda, terutama setelah Negeri Belanda digiling Djerman pada 10 Mei 1940 dan pemerintahannja dipindahkan ke London. Sikap masa bodo jang diperlihatkan oleh rakjat Indonesia pada waktu itu terhadap Pemerintah Hindia Belanda jang sangat membutuhkan tenaga rakjat untuk mempertahankan Indonesia dari serangan bangsa Djepang, merupakan satu bantuan besar jang tidak langsung jang mempertjepat Djepang menduduki daerah ini.

Mulai bulan Maret 1942, tahun berachirnja pendjadjahan bangsa Belanda dan bermulanja pendudukan dan kekedjamaan militer Djepang di Indonesia, berobah pulalah siasat perdjjuangan rakjat Indonesia dalam membebaskan dirinja dari pendjadjahan. Karena pembebasan diri itu bukanlah hanja dimaksudkan bebas dari pendjadjahan bangsa Belanda sadja tapi djuga bebas dari pendjadjahan bangsa manapun djuga.

Bagaimanakah bentuk perdjjuangan rakjat Minangkabau dizaman pendudukan Djepang? Siasat Djepang di Minangkabau tidak berobah dengan siasatnja ditempat-tempat lain diseluruh Indonesia. Partai-partai politik tidak pernah boleh hidup, begitupun sesuatu

organisasi yang dirasanya mungkin membahayakan kedudukannya. Yang boleh terus berdiri hanya organisasi-organisasi sosial, agama serta organisasi perang Djepang sendiri.

Pada tahun pertama dizaman pendudukan Djepang ini, oleh alm. Chatib Soelaiman diusahakan untuk mempersatukan semua organisasi-organisasi pemuda dan kepanduan yang pada hari pertama Djepang masuk ke Minangkabau masih bangun atau berdiri. Gabungan dari seluruh organisasi pemuda itu diberi nama dengan „Pemuda Nippon Raya”. Tujuan pokok dari penggabungan ini ialah untuk mend jauhkan jiwa pemuda-pemuda Indonesia dari pengaruh-pengaruh jahat yang nampaknya akan dipaksakan menanamkannya oleh tentera Djepang didalam dada pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu. Pada mulanya usaha mempersatukan itu tidak mendapat tentangan apa-apa dari tentera pendudukan Djepang. Tapi setelah diketahuinya apa yang menjadi pokok tujuan „Pemuda Nippon Raya” ini, maka organisasi itu dibubarkannya dan Chatib Soelaiman ditangkap bersama dengan beberapa orang pemimpin-pemimpin lainnya. Tapi segera juga Chatib Soelaiman dan kawan-kawannya dibebaskan kembali, karena Chatib Soelaiman merupakan suatu tokoh yang berpengaruh besar dalam lingkungan dan kalangan pemuda-pemuda di Sumatera Tengah.

Untuk menjalankan siasat pemerasan dan penindasan selanjutnya, Djepang mendekati beberapa orang pemimpin rakyat. Pada waktu itu sangat didekatinya M. Sjafe'i (pembangun ruangan pendidikan I.N.S. dan anggota Parlemen sekarang), dari kalangan Alim Ulama didekatinya alm. Sjech M. Djamil Djambek, dan dari kalangan pemuda didekatinya alm. Chatib Soelaiman. Sebagai langkah pertama, oleh pemerintah pendudukan Djepang itu dibentuk Syu Sangi Kai untuk daerah Sumatera Barat, dimana ketiga pemimpin-pemimpin itu juga ikut menjadi anggotanya. Badan ini diketuai oleh M. Sjafe'i.

Kemudian oleh pembesar tentera pendudukan Djepang dianjurkan dan dilakukan penerimaan Heiho yang sebagai diketahui hanya merupakan serdadu pekerdja paksa untuk balatentera Dai Nippon. Pelaksanaan penerimaan Heiho ini tidak dapat ditolak oleh pemimpin-pemimpin rakyat dimasa itu, karena dia merupakan suatu paksaan yang harus dijalankan. Untuk mengimbangi pelaksanaan kehendak balatentera Djepang itu, maka oleh Chatib Soelaiman c.s. dianjurkan pula agar disamping diterima menjadi Heiho itu, pemuda-pemuda Minangkabau haruslah pula diberi kesempatan untuk berlatih menjadi tentera rakyat yang sebenarnya, seperti PETA yang sudah lama diadakan di Djawa. Andjuran dan permintaan itu diterima oleh tentera Djepang dan dengan demikian maka di Minangkabau pun dibentuklah Gyu Gun.

Karena banggunya Gyu Gun ini adalah atas kehendak dari pemimpin-pemimpin rakyat, maka badan penjelenggaraannya pun

haruslah dibentuk sendiri oleh rakjat. Dari itu, maka dibangun pulalah badan jang dinamakan dengan Gyu Gun Ko En Kai atau Badan Pengurus Lasjkar Rakjat jang diketuai oleh Chatib Soelaiman. Badan jang baru dibentuk ini menarik berpuluh-puluh bahkan beratus pemuda terpeladjar, dan berkat kebidaksanaan para pemimpinnja, berdirilah satu badan ketenteraan jang terlatih dan jang merupakan inti sari dan teras untuk BKR dan selandjutnja TKR dizaman kemerdekaan.

Pemerintah Militer Djepang mendjadikan Sumatera mendjadi satu daerah kekuasaan Militer jang diperintah dibawah kekuasaan seorang Saiko Siki Kan. Selaras dengan itu pada permulaan tahun 1945 di Sumatera dibentuk pula satu Dewan jang dinamakannja Sumatora Tyuo Sangi In. Dewan ini diketuai oleh M. Sjafé'i djuga. Badan Kebaktian Rakjat Sumatera Barat pun dibentuk pula dengan nama Seikaigansyu Hoko Kai jang djuga diketuai oleh M. Sjafé'i.

Karena usaha dan pekerdjaan Ko En Kai sangat rapat hubungannja dengan pekerdjaan Ho Ko Kai, maka Ko En Kai didjadikan sebagian dari Ho Ko Kai Sumatera Barat.

Suasana perang semangkin meruntjing. Tanda-tanda bahwa Djepang akan kalah sudah kelihatan dan terasa. Dari itu, maka penjelenggaraan latihan pada Gyu Gun telah semangkin teliti dan diperhebat sehingga ia mempunjai corps officieren sendiri, jang memimpin pasukan-pasukan Gyu Gun ini.

Dekat sebelum Djepang menjerah kalah, atau beberapa saat sebelum tanggal 17 Agustus 1945, Gyu Gun sudah dapat menamatkan dua kali latihan bagi para opsir, sehingga pada hari-hari permulaan pengoperan kekuasaan dari tangan tentera Djepang, para pemuda dari kalangan Gyu Gun ini mendjadi pelopor jang ulet dan mendjadi teras penjusunan tentara R.I. di Sumatera Barat.

Sudah tentu baik oleh pihak tentara pendudukan Djepang, maupun oleh pemimpin-pemimpin rakjat jang pada waktu itu diberi kekuasaan untuk memimpin berbagai instansi penting sudah direntjanakan untuk menghilangkan satu diantara dua pengaruh jang tengah berkuasa, jaitu pengaruh tentera Djepang dan pengaruh pemimpin-pemimpin. Tapi keadaan dan waktu tidak memberikan kesempatan untuk melaksanakan apa jang mendjadi rentjana kedua belah pihak, karena berita kekalahan balatentera Djepang datangnja djauh lebih tjepat dari disangka semula.

BAB I
BAHAGIAN II

PERDJUANGAN SESUDAH PROKLAMASI.

Pasal 4.

DI SUMATERA BARAT.

Pertengahan Agustus 1945.

Djatuhnja bom atom Sekutu atas kota-kota Djepang, pada masa Djepang telah sangat letih oleh pukulan-pukulan Sekutu diseluruh medan perang Pasifik, ditambah pula dengan penjerbuan tentera Sovjet Rusia atas Mansjuria, telah memaksa Djepang suatu waktu jang tepat benar untuk menjerah kalah.

Tetapi hal ini adalah rahasia besar jang waktu itu hanya beredar dalam markas-markas besar dibawah tanah dikota Tokyo, sedangkan di Sumatera, chususnya di Sumatera Tengah, surat kabar kepunjaan Sendenhan, „Sumatera Shimbun” masih meneriakkan bahwa :

„Kemenangan terachir pasti berada dipihak kita”.

Pada tanggal 15 Agustus 1945, tiba-tiba Pemantjar Radio Sumatera (Sumatera Hosokyoku) di Bukittinggi diam tak bersuara selama beberapa hari. Radio umum disetiap liku ibu kota Sumatera ini djuga sepi dan dari orang-orang Djepang, dan tenteranja jang beribu-ribu banjaknja di Bukittinggi, kelihatan kegelisahan jang luar biasa, dimana mereka mengobrali barang-barangnja, memulangkan sekalian pekerdja, dan djuga melutjuti sendjata-sendjata Gyu Gun jang berasrama disekitar kota Bukittinggi di Gulai Bantjah, Belakang Blok, Pabidikan dan Sarik dan dikotakota Padang, Painan, dan lain-lain kemudian memulangkan semua Gyu Gun jang telah dilutjuti sendjatanja itu, dengan hanya sepasang pakaian seragam jang lekat dibadan.

Barulah pada tanggal 21 Agustus 1945 Pemantjar Radio bersuara lagi, menjatakan bahwa : „Tenno Heika telah memerintahkan supaja perang dihentikan dan kabinet Djepang jang lama bubar, serta dibentuk kabinet baru oleh Pangeran Higashi Kuni no Mya Naruhiko O Denka”.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Di Djakarta sudah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia jang sedianja Sumatera dalam Panitia itu akan diwakili oleh Saudara M. Sjafei ketua Sumatera Tjuo Sangi In, tapi karena keberangkatan beliau ke Djawa dihalang-halangi oleh pihak Djepang, maka diwakili oleh Saudara Dr. Amir (almarhum), Mr. T. M. Hasan dan Mr. Abbas dari Lampung.

Proklamasi tersiar.

Kegembiraan dari sebagian pemimpin memuntjak ketika dari pihak P.T.T. Bukittinggi dan Padang dan pemuda-pemuda Indonesia jang bekerdja pada Kantor Berita „Domei” Bukittinggi, terutama Saudara Subidiya dari P.T.T. Padang jang selalu berhubungan dengan pemimpin-pemimpin, diterima kabar, bahwa Kemerdekaan Indonesia sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Djakarta oleh Sukarno-Hatta, proklamasi mana terus diiringi oleh instruksi-instruksi Pemerintah R.I. jang baru dibentuk, untuk pelaksanaan pemindahan kekuasaan diseluruh Indonesia.

Berdasarkan kepada salah satu instruksi ini jang menetapkan perlunya dibentuk suatu Komite Nasional Indonesia didaerah-daerah sebagai pendjelmaan kebulatan tudjuan dan tjita-tjita bangsa Indonesia untuk menjelenggarakan kemerdekaan Indonesia, jang berdasarkan kedaulatan Rakjat dan akan berusaha untuk:

1. Menjatakan kemauan rakjat Indonesia untuk hidup, sebagai bangsa jang merdeka.
2. Mempersatukan rakjat dari segala lapisan dan djabatan, supaja terpadu pada segala tempat diseluruh Indonesia, persatuan kebangsaan jang bulat dan erat.
3. Membantu menenteramkan rakjat dan turut mendjaga keselamatan umum.
4. Membantu pemimpin dalam menjelenggarakan tjita-tjita bangsa Indonesia dan didaerah membantu pemerintah daerah untuk kessedjahteraan umum.

Pun dalam instruksi ini ditegaskan bahwa Komite Nasional di Pusat memimpin dan memberi petundjuk kepada Komite-komite Nasional didaerah dan dimana perlu didirikan pusat daerah, jaitu untuk Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Ketjil.

Rapat pertama di Padang tanggal 27 Agustus 1945.

Dan seterimanja instruksi ini di Sumatera, para pemimpin lalu mengadakan rapat di Padang tanggal 27, 28 dan 29 Agustus 1945, untuk membitjarakan bagaimana tjaranja melaksanakan instruksi Pemerintah R.I. ini.

Dalam rapat itu diputuskan antara lain :

1. Menjiarkan Proklamasi Kemerdekaan untuk seluruh Sumatera dengan andjuran bahwa dengan ini seluruh Rakjat Sumatera mengakui kemerdekaan Indonesia seperti jang dimaksud dalam Proklamasi Kemerdekaan jang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 serta mendjundjung keagungan kedua Pemimpin Besar Indonesia Soekarno-Hatta.

2. Mengeluarkan maklumat Pembubaran Seikaiganshu Hookookai (Badan Kebaktian Rakjat) jang isinja :
 - a. Membubarkan Seikaiganshu Hookookai Sumatera Barat.
 - b. Menjerahkan segala harta benda dan kekajaannja kepada satu badan jang akan meneruskan tjita-tjita pergerakan Nasional Indonesia.
 - c. Menjiarkan maklumat ini kepada penduduk Sumatera Barat dengan perantaraan surat-surat kabar Sumatera Barat untuk diketahui.
3. Membentuk satu Komite Nasional Indonesia daerah Sumatera Barat selaras dengan pengumuman Presiden tanggal 22-8-1945, dengan ketentuan bahwa sementara waktu anggota-anggotanja terdiri dari anggota-anggota Pengurus Hookookai lama sebanyak 41 orang.
Pengurus-pengurus dari Si/Gun Hookookai dijadikan Pengurus K.N.I. tjabang (diibu negeri kewedanaan) dan Pengurus Son Hookookai dijadikan Pengurus K.N.I. ranting (dinagari-nagari).

Buat pertama kalinja K.N.I. Sumatera Barat berkantor dibekas Kantor Persatuan Saudagar Indonesia di Pasar Gedang Padang dan segala inventaris Hookookai itupun dibawa kesana.

Selesainja rapat tersebut maka disiarkanlah sebanjak-banjaknja kebulatan tekad untuk mengikuti dan menguatkan proklamasi kemerdekaan jang bunjinja dapat dibatja selengkapnja dibawah ini:

PERMAKLUMAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Mengikuti dan menguatkan pernjjataan Kemerdekaan Indonesia oleh Bangsa Indonesia seperti PROKLAMASI pemimpin-pemimpin besar kita **Soekarno-Hatta** atas nama Bangsa Indonesia seperti berikut :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara sak-sama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17 Agustus 1945.

**ATAS NAMA BANGSA INDONESIA
SOEKARNO-HATTA**

Maka kami Bangsa Indonesia di Sumatera dengan ini mengakui Kemerdekaan Indonesia seperti dimaksud dalam proklamasi diatas dan mendjunjung keagungan kedua pemimpin Indonesia itu.

Bukittinggi hari 29, bulan 8 tahun 1945
Atas nama Bangsa Indonesia di Sumatera
Moehammad Sjaf'e'i.

Maka tersiarlah proklamasi ini diseluruh plosok dari kota sampai kedesa. Orang banjak membatja dengan penuh minat untuk mewujudkan tjita-tjita jang telah lama dikandungnja. Dalam hati bergelut pertanyaan : Benarkah kita sudah merdeka ? Maka dilengongkan kanan kiri, dan jang tampak hanjalah tentera Djepang jang bersendjata lengkap mendjaga tetap diposnja diseluruh daerah.

Pemerintahan sipil pun masih dikuasai oleh Djepang, dimana para Bun Shu Tyo dan pegawainja bangsa Djepang masuk dan pulang dari kantornja sebagai biasa. Jang lebih sulit kedudukannja ialah para pegawai dan pamongpradja bangsa Indonesia sendiri, terutama didaerah-daerah.

Didorong oleh hasrat hendak membuktikan permakluman kemerdekaan itu para pemuda dari kampung berdujun-dujun kekota dan sekembalinja kekampung menjiarkan berita kemerdekaan ini keseluruh rakjat jang seterusnya memperkunjahkan soal ini sampai diwarung-warung kopi. Pendeknja permakluman kemerdekaan ini dalam sedikit waktu telah mendjadi pembitjaraan umum.

Para pemuda ini kebanyakan terdiri dari pemimpin Seinendan atau Barisan Pemuda jang sebelum ini telah dilatih dalam beberapa pusat latihan antaranja di Kajutanam, dibawah pimpinan M. Sjaf'e'i dan Chatib Soeleiman, jang mereka ini sekembalinja dikampung melatih pula akan pemuda kampung dalam memainkan bambu runtjing dan berolah-raga serta meniup-niupkan hasrat kemerdekaan. Dan sesudah tersiarnja proklamasi ini, maka para pemuda disetiap kampung dengan serentak lalu menaikkan Sang Merah Putih dikantor-kantor Negeri dan dirumah-rumah untuk menjatakan berdiri teguh membela proklamasi kemerdekaan ini.

K. N. I. dibentuk 31 Agustus 1945.

Dan sebagai diterangkan diatas tadi, telah dibentuk Komite Nasional Indonesia daerah Sumatera Barat jang dalam rapatnja jang pertama pada tanggal 31 Agustus 1945 bertempat dirumah Saudara A. Muluk di Alang Lawas, Padang, menetapkan susunan pengurus dan anggotanja. Maka ditetapkanlah sebagai Ketua I Saudara M. Sjaf'e'i, jang sebelum ini mengetuai Sumatora Tyuo Sangi In.

Dan sesudahnja K.N.I. Sumatera Barat ini terbentuk, maka para anggotanja lalu berangkat kesetiap kewedanaan untuk mendirikan K.N.I. Tjabang diibu kota kewedanaan jang dibentuk pada permulaannja dari pengurus Si/Gun-Hoo Koo Kai dan selandjutnja para pengurus K.N.I. kewedanaan ini lalu mempelopori pula pemben-

tukan K.N.I. Ranting disetiap negeri, jang pengurusnja pada permulaan diambil dari pengurus Son Hoo Koo Kai. Dengan tjara begini didesak oleh gelora revolusi, maka dalam waktu jang tidak berapa lama berdirilah K.N.I. Tjabang dan Ranting, merata diseluruh Kewedanaan dan negeri di Sumatera Tengah. Dan berputarlah roda revolusi dengan lantjarnya dan meluapnja semangat kemerdekaan jang sehebat-hebatnja.

Pemuda memelopori perdjuaan.
B.P.P.I. di Padang 18 Agustus 1945.

Disamping K.N.I. sebagai badan resmi, maka perdjuaan dipelopori oleh para pemuda, maupun jang sebelum ini telah tersusun dalam susunan-susunan jang dibentuk Djepang, maupun jang tidak. Kebangkitan pemuda meluap dengan sehebat-hebatnja. Tidaklah salah kalau dikatakan bahwa bulan-bulan revolusi jang pertama ini adalah bulannja pemuda jang dengan tak kenal letih pajah, siang dan malam mengusahakan dan memperdjuaan agar pemindahan kekuasaan seperti jang diudjud oleh proklamasi, berdjalan dengan lantjar.

Memanglah heroisme jaitu semangat kepahlawanan adalah sangat menghebat geloranja pada para pemuda, jang sekali telah ditjetuskan apinja oleh pemimpin jang diagungkan, maka njalanja akan merebak berupa revolusi.

Maka pada tanggal 18 Agustus 1945 para pemuda jang telah mengetahui bahwa semendjak 14 Agustus 1945 Djepang telah kalah dalam perang, lalu bertindak mengadakan diantaranja di Padang pada tanggal 18 Agustus 45 suatu rapat rahasia jang dipimpin oleh Saudara Ismael Lengah dan seterusnya pada tanggal 25 Agustus 1945, dimana telah dibentuk Balai Penerangan Pemuda Indonesia (B.P.P.I.) jang pengurusnja terdiri dari Saudara-saudara :

Ketua I	: Ismael Lengah;
Ketua II	: Soeleiman;
Setia Usaha	: Nasrun A.S. dan Jahja Djailil;
Bendahara	: Dahlan J. St. Mangkuto;
Perbekalan	: Iljas Jacob;
Keamanan	: Burhanuddin;
Kesehatan	: Dr. Nazaruddin;
Penerangan	: Rusdi;
Koordinator	: Kasim Dt. Malilit Alam;
Penghubungan	: Sjarif Usman, Bgd. Aziz Chan almarhum, Chatib Suleiman almarhum dan Mr Naza- ruddin;
Pembantu ²	: Djamaluddin, Muchtar Thaib, Jazid Abidin, H. Hasan, Sjarief Gani, Bagindo Taha, Mahjuddin dan lain-lain.

Badan inilah jang kemudian mendjadi saluran untuk membentuk tentera kita di Sumatera Barat ini. B.P.P.I. bermarkas di Pasar

Gedang, yang kemudian telah digerebek oleh tentera Inggeris karena dituduh mendjadi sarangnja pemuda-pemuda pedjuang yang oleh Inggeris dinamakan „terrorist”.

Dan dalam waktu yang hampir serentak, para pemuda di Bukittinggi pun telah bertindak pula, demi setelah tersiar berita bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan.

P. R. I. Bukittinggi 21 Agustus 1945.

Suatu rapat pendahuluan diadakan pada malam 21 Agustus 1945 dan mengambil tempat dikantor Madjelis Islam Tinggi (Surau Sjech M. Djamil Djambek) atas inisiatif beberapa orang pemuda jaitu: Saudara-saudara Chaidir Gazali, Nasrul, Noesjerwan Aminuddin Junus, Zainul, R. Hadjimar Bermawi, Marakerma, Sjoftjan Kamal, Sjahbuddin dan lain-lain.

Empat hari kemudian dilandjutkan rapat yang bertempat dikantor P.D. Bumiputera Djalan Tembok 32, yang dihadiri selengkapnja oleh wakil-wakil dari organisasi-organisasi pemuda yang selama djaman Djepang tak dapat bergerak seperti H.W., Siap, P.M.I., H.P.I.I. dan wakil dari pemuda-pemuda disetiap wijk kota Bukittinggi.

Rapat ini djuga dikundjungi oleh Saudara-saudara Iskandar Tedja Sukmana dan Sjarif Usman. Dan pada malam itu diresmikanlah berdirinja Pemuda Indonesia (P.I.) yang beberapa minggu kemudian dirobah mendjadi Pemuda Republik Indonesia (P.R.I.). P.R.I. ini kemudian dengan bahagian-bahagiannja telah mengambil sikap mendjaga dan menetapkan keamanan daerah Bukittinggi dan mempelopori berdirinja tjabang-tjabang dan ranting P.R.I. diseluruh kota dan desa di Sumatera Barat, yang ditempatnja masing-masing bertindak sebagai suatu badan Revolusioner dan pendjamin keamanan revolusi.

Diusahakannja djuga mengambil rumah-rumah bekas kediaman orang Djepang, yang terus diserahkan kepada Pemerintah (K.N.I.) untuk dipergunakan buat kantor-kantor dan kepentingan alat-alat pemerintah lainnja. Dan yang terpenting pula ialah dengan resiko djiwa yang besar menggondol kendaraan-kendaraan bermotor yang dibawah tilikan Djepang yang terus diserahkan pula kepada pemerintah untuk digunakan bagi kepentingan perdjuaan. Sehingga perhubungan yang sangat diperlukan dalam melantjarkan revolusi, dapat berdjalan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian pemuda-pemuda di Padang dan utusan-utusan P.R.I. dari Bukittinggi, berusaha untuk mendjalankan dengan tegas akan bunji proklamasi, jaitu melaksanakan pemindahan kekuasaan pemerintahan yang pada masa itu masih dipegang oleh Djepang dan di Sumatera Barat adalah dipegang oleh Syu Tjokan.

Memang atas inisiatif para pegawai, dibeberapa kantor pemerintahan telah dinaikkan bendera merah putih, yang dipandang

dengan keheranan oleh Djepang dan pada beberapa tempat dihalanginja, karena kekuasaan pemerintahan masih ditangan Djepang.

Rapat pengoperan September 1945.

Maka para pemuda tersebut jang berapat di Padang pada pertengahan September dengan dihadiri djuga oleh pemimpin-pemimpin K.N.I. Sumatera Barat, diantaranya M. Sjafe'i, Dr. Djamil dan Rasuna Said, diadakan perundingan untuk mengover pemerintahan bertempat dibekas rumah Mr. Egon Djalan Belantung Ketjil.

Dalam perundingan tersebut diadakan Saudara M. Sjafe'i untuk mendjadi residen Kepala Daerah Sumatera Barat.

Sesudahnja rapat, maka putusan ini dirembukkan penglaksanaannya dengan Syu Tyokan, karena hubungan dipihak pemimpin dengan pembesar Djepang masih ada.

Tetapi hal ini ditolak oleh Djepang dan Saudara M. Sjafe'i hanya diakuinja sebagai pembantu Tyokan sadja.

Kemudian dalam rapat pleno K.N.I. Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober tahun 1945 dipilihlah Saudara M. Sjafe'i untuk memangku djabatan residen/Kepala Daerah Sumatera Barat, jang ditetapkan kemudian oleh Gubernur Sumatera sementara menanti pengesahan dari Pemerintah Pusat.

M. Sjafe'i Residen ke-I, 1 Oktober 1945.

Dengan sokongan dari pemuda dan bantuan jang penuh dari para pegawai Indonesia dalam segala tjabang djawatan pemerintahan, maka penjusunan Pemerintah dapatlah didjalankan dengan lantjar. Jang terlebih dahulu disusun ialah Kantor Keresidenan dengan djawatannya sekalian, begitu djuga kepala-kepala Kabupaten jang pada masa itu dinamai Kepala Luhak, jang selama zaman Djepang dan Belanda belum pernah dipegang oleh bangsa Indonesia.

Empat tindakan jang bersedjarah ini dilaksanakan dengan beslit tanggal 8 Oktober 1945 nomor R.I.-I jang kita terakan dibawah ini dengan selengkapnja :

No. R.I./I Petikan dari Daftar beslit-beslit Kepala Pemerintah Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat.

Padang, pada 8 Oktober 1945.

RESIDEN SUMATERA BARAT:

Menimbang, bahwa perlu menetapkan Kepala-kepala Pedjabat dan Kepala Luhak jang akan bertanggung-djawab menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan dalam pedjabat dan daerah masing-masing.

Menimbang lagi bahwa perlu menentukan Kepala-kepala Pemerintahan didaerah.

M e n e t a p k a n :

Pertama : Ditentukan untuk mengepalai :

1. Urusan Umum dikantor Residen Sumatera Barat
Mohammad Rusjad gelar Dt. Perpatih Baringek.
Urusan surat-menjurat dikantor itu D. Dt. Djundjung M.
2. Kantor Kesedjahteraan Minangkabau
Ahmad Arif gelar Dt. Madjo Urang.
3. Pedjabat Pengadilan: Mr. Harun Al Rasjid.
4. „ Kedjaksaan: Mr. Sutan Mohd. Rasjid dan A. Rezak
gelar Sutan Malelo.
5. „ Polisi: Raden Suleman.
6. „ Kesehatan: Dr. Mohammad Djamil.
7. „ Pengadjaran: A. Muluk.
8. „ Urusan Pekerdjaan Umum: Mohd. Jasin Dt. Kajo.
9. „ Pertanian: Mohammad Said.
10. „ Urusan Ternak: A. H. Endamora.
11. „ Urusan Kehutanan: Amir Hakim Siregar.
12. „ Perhitungan uang negara: R. M. Sanjojo Sastra-
ningrat.
13. „ Administrasi Kas Negara: Agus Sastradipradja.
14. „ Kas Negara: Setti Heran gelar Soetan Namora.
15. „ Pajak: R. Supardi Pawirodiredja.
16. „ Pegadaian: Mohamad Jakim.
17. „ Duane: Abu Nawas.
18. „ Tjukai dan Perhubungan Laut: Sjamsuddin.
19. „ Tjandu Garam: Burhanuddin gelar Dt. Madjo
Besar.
20. „ Tera: M. Sutono.
21. „ Pos, Kawat, Telepon dan Radio: Sudibio.
22. „ Kereta Api: Marah Badaruddin.
23. „ Umbilin: Rusli.

Kedua : Diperserahi buat sementara mewakili pekerdjaan Kepala Luhak :

1. Padang dan kelilingnja: Djamalus Jahja gelar St. Pamuntjak.
2. Painan: Mohd. Sjarif gelar Sutan Bandaro.
3. Kerintji Indrapura: M. Djardjis Bebastani.
4. Tanah Datar: Palin gelar Sutan Alamsjah.
5. Agam: St. Muhammad Djosan gelar St. Bidjo Radjo.
6. Lima Puluh kota: Sjahfiri gelar St. Pangeran.
7. Solok: Sutan Diatas gelar Dt. Bagindo Radjo.
8. Luhak Ketjil Talu: Abdul Rahman gelar St. Larangan.

Ketiga : Ditentukan mendjadi Demang dan Demang Muda segala Demang dan Demang Muda jang ada sekarang masing-masing untuk mengepalai pemerintahan dalam daerahmasing-masing.

Keempat : Menetapkan segala pegawai jang ada dalam pedjabat-pedjabat jang tersebut pada Pertama dalam djabatannja sekarang.

Salinan dikirimkan pada :

1. Gubernur Republik Indonesia daerah Sumatera di Medan.
2. Kepala-kepala jang tersebut diatas, supaja dimaklumi dan disiarkan dengan seluas-luasnja.

Konperensi Pemerintahan 15 Oktober 1945.

Ketetapan jang diatas itu berangsur-angsur mendapat perobahan dan tambahan karena terdjadinja perpindahan disebabkan oleh bertambahnja bilangan pedjabat-pedjabat maupun karena dengan ditukarnja seseorang pegawai. Segala pegawai jang ada dalam djawatan-djawatan pemerintahan diakui sekali dalam djabatannja jang dipegangnja pada waktu itu, sehingga pekerdjaan pemerintahan dapat langsung dengan lantjar. Inilah jang dikatakan oleh Bung Hatta suatu perebutan kekuasaan dari dalam, jang ternyata sangat effectief dalam melantjarkan perdjuaan. Djumlah para pegawai ini pada waktu itu diseluruh Sumatera Barat ini kurang sedikit dari 8000 orang. Seminggu sesudah keluarnja beslit ini pada tanggal 15 Oktober 1945, diadakan suatu konperensi di Padang bertempat di Balai Kota sekarang jang dihadiri oleh kepala-kepala Luhak, Demang-demang dan Kepala-kepala Polisi dari seluruh Sumatera Barat, dimana Residen M. Sjaf'e'i mengangkat sumpah setia akan memenuhi kewadjiban Negara Republik Indonesia jang dipikulkan kebahunja dan diiringi pula oleh upatjara serupa ini dikantor Residen oleh Kepala-kepala Djawatan Keresidenan, jang seterusnya menerima sumpah dari para pegawai didjawatannja masing-masing demikian pula dilangsungkan ditiaptiap ibu negeri Luhak dan kewedanaan.

Bunji sumpah ini adalah sebagai berikut :

„DEMI ALLAH”.

1. Saja bersumpah, berdjandji dengan sepenuh-penuhnja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai dari Negara R. I.
2. Saja bersumpah, setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kepada peraturan-peraturan jang datang dari Pemerintah Pusat dan kepada Presiden Republik Indonesia.
3. Saja bersumpah, sedia memberikan segenap fikiran tenaga harta dan djiwa untuk negara, tanah air dan bangsa.
4. Saja bersumpah, selalu akan bersungguh-sungguh memajukan daerah pemerintah saja serta bekerdja dan berlaku djudjur dan adil dengan tidak memandang orang dan golongan.

Perdjandjian saja ini dengan hati jang sutji djikalau saja tidak memenuhi sepandjang perdjandjian saja ini, boleh saja dimakan kutuk kalamullah.

Diperbuat surat sumpah ini 5 lembar untuk dipergunakan dimana perlu.

Tanda tangan jang bersumpah :

Dimuka saja :

Saksi :

Kadi jang menjumpah :

Pada waktu itu pemerintahan berpusat dalam tangan residen. Sekalian Djawatan sampai kepada ketenteraan, urusan perjuang-an dan kehakiman udjung talinja terdapat dikantor Residen dimana beliau memerintah bersama badan eksekutief K.N.I. Sumatera Barat dan penasehat-penasehatnja.

K.N.I. Sumatera Barat diperkuat.

Ketua K.N.I. harus terpisah.

Oleh karena semakin beratnja urusan perjuangan, dan diteri-manja kawat dari Gubernur Sumatera, maka K.N.I. ditambah anggotanja. Isi kawat itu antara lain sebagai berikut :

1. Ketua K.N.I. tidak boleh orang jang memimpin pemerintahan dalam daerahnja.
2. Dimana-mana K.N.I. harus diperkuat sebagai badan pendjelmaan keamanan rakjat.
3. Dalam K.N.I. mesti lengkap masuk segala lapisan dan golongan rakjat dengan bersatu hati dan dalam K.N.I. mesti ada wakil-wakil dari Pamongpradja, Polisi dan pegawai-pegawai lainnja, serikat sekerdja, kooperasi dan orang-orang politik jang terkemuka.
4. Buat sementara K.N.I. harus merupakan Badan Perwakilan Rakjat jang membantu pekerdjaan Pemerintah.

Dengan demikian disusunlah anggota-anggota K.N.I. jang terdiri dari wakil golongan-golongan organisasi, partai dan pemuda.

Terbentuknja T.K.R.

Sesudahnja Proklamasi Kemerdekaan diteruskan di Sumatera oleh Saudara M. Sjaf'e'i, maka segera terasa perlunja suatu badan bersendjata untuk mendukung repolusi seperti jang dimaksud dalam instruksi dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pasal II jang berbunji sebagai berikut :

Memelihara keselamatan masjarakat dan keamanan itu adalah satu, maka itu di „BADAN PENOLONG KELUARGA KORBAN PERANG” diadakan satu bagian jang bernama BADAN KEAMANAN RAKJAT.

Maka seiring dengan tersiarnja proklamasi, berdirilah disetiap tempat utamanja diibu tempat kewedanaan Badan Keamanan

Rakjat jang dipelopori terutama oleh para pemuda bekas Gyu Gun, Seinendan dan Heiho, jang segera setelah berdirinja memper-sendjatai dirinja dengan apa sadja sendjata jang ada, dan semakin rapi organisasinja. Dalam melantjarkan repolusi, B.K.R. berdjalan berdampingan dengan P.R.I., dan sementara P.R.I. bertindak sebagai pemuda sipil dalam melanjutkan perdjuaan rakjat, maka B.K.R. makin lama makin menjusun dirinja dalam susunan ketenteraan.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 keluarlah maklumat dari pemerintah jang berbunji sebagai berikut :

MAKLUMAT PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN TENTERA KEAMANAN RAKJAT.

Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentera Keamanan Rakjat.

Djakarta, 5 Oktober 1945.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

T.K.R. di Padang dan Bukittinggi 10 dan 14 Oktober 1945.

Sekeluarnja decreet Presiden ini, maka B.K.R. jang telah terbentuk disetiap ibu tempat Kewedanaan diseluruh Sumatera Tengah itu, lalu menjusun dirinja mendjadi Tentera Keamanan Rakjat (T.K.R.), umpamanja di Padang disusun pada tanggal 10 Oktober 1945 dan di Bukittinggi pada tanggal 14 Oktober. Pembentukan di Padang dan di Bukittinggi ini disegerakan oleh berita-berita mendaratnja Tentera Sekutu di Djawa, dan akan mendaratnja pula di Sumatera.

Panglima Tentera Sekutu jang telah mendarat di Djakarta bulan September 1945 jaitu Djenderal Christison menegaskan bahwa tugas jang harus dilaksanakannja di Indonesia ialah melutjuti sendjata Djepang, mengurus tawanan perang Sekutu, dan mendjaga keamanan. Tetapi amat besar ketjurigaan umum bahwa Tentera Sekutu ini akan membawa pula Tentera Belanda, — jang memang salah satu negara Sekutu pula, apalagi mendengar suara-suara Belanda di Australia, dalam mana ternjata bahwa Belanda tetap tidak mengakui Republik Indonesia, dan menganggap Indonesia diadjahannja jang harus diterimanja kembali sebagai inventaris dari Djepang via Sekutu.

Semua hal ini mendorong melekaskan terbentuknja T.K.R. di daerah sesudahnja keluar decreet Presiden ini.

Dan pada tanggal 13 Oktober 1945 medaratlah Tentera Sekutu di Padang yang terdiri dari tentera India dan Ghurka yang dipimpin oleh opsir-opsir Inggeris, dalam mana membontjeng tentera N.I.C.A. (Belanda). Pendaratan tentera Sekutu ini disambut sebagaimana mestinja oleh Pemerintah R.I. dan beberapa hari kemudian mereka pun terus ke Bukittinggi. Tentera Sekutu telah mendarat. Dan mereka memulai menempati pos-posnja pada tempat-tempat yang penting di Padang dan di Bukittinggi. Mereka telah pula berurusan dengan Djepang, yang dikumpulkan dari posnja diseluruh Sumatera Barat kebeberapa tempat pengumpulan seperti Baso, dan lain-lain.

Infiltratie N.I.C.A.

Pegawai-pegawai Nica (Netherlands Indies Civil Administration, pegawai sipil Belanda) mengadakan infiltrasi dengan memasuki kantor-kantor dan mendatangi sebagian pegawai-pegawai lama (zaman pendjadjahan Belanda), dimana dalam kedatangannja kekantor-kantor itu mereka mengemukakan historisch recht (hak sedjarah)nja, bahwa merekalah yang berkuasa atas kantor-kantor itu. Dan para pemimpin Nica giat mendatangi pegawai-pegawai lama yang mereka kenal dan mengemukakan budjukan dan djandji yang muluk-muluk kepada siapa yang mau mengikut mereka, serta terlebih dahulu mereka memastikan bahwa mereka telah kembali berkuasa.

Suasana mulai mendjadi tegang, karena masing-masing pihak sama dipengaruhi oleh pelbagai prasangka dan tjuriga yang memang telah seharusnja terdjadi dalam keadaan penuh pertentangan itu. Kedatangan Belandalah yang terutama memperkeruh keadaan dengan infiltrasi mereka yang berbagai matjam tjoraknja serta berusaha mengadu dombakan pihak Indonesia dengan Sekutu dan Djepang. Maka disamping tindakan-tindakan pemerintah untuk menghadapi bahaya ini, maka djuga didjalankan usaha oleh pemerintah untuk merebut alat-alat dan tempat yang diperlukan oleh pemerintah dari pihak Djepang dengan djalan berdiplo-masi, usaha-usaha mana banjak pula hasilnja, seperti pertjetakan dan pemantjar radio di Bukittinggi, dan sebagainya.

Rombongan pemuda dari Djawa, 30 Oktober 1945.

Dalam pada itu ditengah suasana yang penuh pertentangan ini maka Pemerintah Pusat tidak tinggal diam. Mengingat gelora suasana keadaan di Djawa, maka Kementerian Penerangan yang masa itu dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin almarhum, mengadakan latihan bagi pemuda-pemuda progressif, dan kemudian mengirim mereka itu dalam beberapa rombongan keseluruh nusantara Indonesia, untuk menjalankan api repolusi yang telah ditjetuskan dengan Proklamasi 17 Agustus itu. Satu rombongan berangkat

ke Sumatera via Tandjung Karang jang di Selat Sunda mendapat gangguan pula dari Belanda. Sesudahnja mendarat di Tandjung Karang, maka merekapun bersebar diseluruh Sumatera diantaranya ke Sumatera Barat. Rombongan jang ke Sumatera ini diketuai oleh Saudara Kamal dan Saudara Karim Halim, jang sampai di Sumatera Barat pada tanggal 30 Oktober 1945.

Mereka menjelaskan dengan kata-kata jang berapi akan kisah perebutan kekuasaan di Djawa, jang penuh dengan pertempuran melawan Djepang dan Sekutu, serta mengandjurkan agar taktik perjuangan di Djawa itu agar dilaksanakan pula disini. Dengan giat dan tak kenal letih karena digelorakan semangat repolusi jang menjala-njala mereka memberi penerangan kesegenap pelosok Sumatera Barat, Riau dan Djambi.

PERGOLAKAN PEMUDA DI PADANG.

Diantara peristiwa-peristiwa penting jang dihadapi oleh pemuda-pemuda dikota Padang adalah pada saat pendaratan Sekutu (Inggeris). Setelah para terkemuka dan pemimpin-pemimpin Indonesia di Padang mengetahui, bahwa tentera pendudukan Sekutu akan mendarat di Padang, hal ini langsung diberitahukan kemarkas B.P.P.I. di Pasar Mudik. Dalam waktu jang pendek telah disusun rentjana untuk menghadapi peristiwa jang akan dihadapi itu.

Pertama sekali akan diperlihatkan „goodwill” kepada tentera Sekutu jang akan mendarat di Padang. Terhitung sedjak zaman pendudukan Djepang, pelabuhan Teluk Bujur mendjadi sepi. Kapal-kapal djarang jang masuk. Oleh karena itu buruh pelabuhan hampir tidak kelihatan lagi disana. Sekiranya tentera Sekutu mendarat, tentu mereka akan mengalami kesukaran, karena tidak ada orang jang akan menolong mereka membongkar barang-barangnja. Oleh B.P.P.I. dikerahkan tenaga pemuda-pemuda jang menjedjikan dirinja setjara sukarela menolong pendaratan tentera Sekutu. Lebih dari 500 orang pemuda menjedjikan dirinja untuk tudjuan tersebut. Sebagian besar dari mereka itu terdiri dari para terpeladjar jang dapat memahami bahasa-bahasa Belanda dan Inggeris. Dibalik tugas „goodwill” itu sudah tentu ada pula tugas-tugas lain jang didjalankan oleh pemuda-pemuda itu.

Pada tanggal 10 Oktober 1945 itulah hari pertama kali tentera Sekutu mengindjatkan kakinja dikota Padang. Pagi-pagi benar hari itu pemuda-pemuda jang telah menjedjikan diri itu berkumpul dimarkas B.P.P.I. Semuanya mereka benar-benar merupakan dirinja sebagai „Kuli”. Dengan motor gerobak dibawa ke Teluk Bujur.

Untuk mendjaga ketertiban dan mentjegah terdjadinja hal-hal jang tidak diingini, kepada para pemuda itu diberikan petundjuk-petundjuk seperlunja. Kira djam 10 kelihatan beberapa motor-boot jang memuat pasukan-pasukan Sekutu dengan para opsirnja memasuki pelabuhan Teluk Bujur. Mereka disambut oleh beberapa orang pemimpin dan para terkemuka Indonesia. Perundingan di-

langsungkan. Pemuda-pemuda menunggu ditempat jang terletak beberapa ratus meter dari tempat perundingan itu. Suatu insiden hampir sadja terdjadi, ketika pemuda-pemuda itu melihat bendera Merah-Putih jang terpasang dipuntjak tiang dikantor Sjahbandar diturunkan. Pemuda-pemuda itu merasa terhina dan tersinggung perasaannya, karena bendera jang dinaikannya dengan bersusah payah itu tiba-tiba diturunkan begitu sadja. Apalagi sebagai pengganti bendera itu dinaikkan pula bendera tentera Sekutu (Inggeris). Insiden itu dengan tjepat diatasi, ketika diberitahukan kepada pemuda-pemuda itu, bahwa hal itu adalah melalui perundingan dan menurut aturan-aturan internasional. Meskipun demikian, peristiwa itu merupakan permulaan timbulnya rasa dendam dan tjuriga pemuda-pemuda itu kepada tentera Sekutu.

Kemudian barulah menjusul kapal-kapal besar sebanyak 12 buah memasuki pelabuhan. Selesai kapal-kapal itu merapat, mulailah pemuda-pemuda itu melakukan tugasnya sebagai „Kuli” untuk membongkar muatan kapal-kapal itu. Diantarannya mentjatat djumlah tentera jang datang, matjam dan banjaknya sendjata jang dibawa, memperbedakan diantara tentera Sekutu itu orang-orang Belanda jang ikut membontjeng dan djuga mengadakan hubungan dengan beberapa orang opsir tentera Sekutu.

Pada malam harinja disampaikan laporan-laporan oleh pemuda-pemuda itu. Disamping itu dimulai pula pentjurian sendjata dari tempat-tempat simpanan jang telah diketahui pada siang harinja. Kepada rakjat diperingatkan apa jang akan terdjadi. Diantarannya ialah, bahwa tentera Sekutu akan menjebarkan uang Nica. Oleh karena itu harus berhati-hati dan menolak penerimaan uang tersebut.

Sedjak hari pendaratan tentera Sekutu itu terasalah keadaan-keadaan jang menggelisahkan rakjat. Sikap tentera Sekutu mentjurigakan pemuda-pemuda. Hal ini terutama dirasakan ialah ketika gedung-gedung jang terpenting ditempati oleh mereka itu dengan semau-maunya. Pemuda-pemuda mengadakan pengawalan dikantor-kantor Pemerintah, seperti kantor-kantor pos, telepon pemantjar radio (ketika itu masih disimpang Haru) dan lain-lain. Sendjata jang dipergunakan buat pertama kali hanyalah batu. Siapa jang berani mendekati kantor-kantor itu dengan tidak seizin pimpinan pemuda-pemuda akan dilempar dengan batu. Kemudian sendjata batu itu diganti dengan bambu runtjing, dan berangsur-angsur mulailah dipunjai sendjata-sendjata api jang dapat dirampas dari Djepang atau ditjuri dari tentera Sekutu.

Insiden-insiden ketjil mulai terdjadi. Pemuda-pemuda mengobarkan semangat perdjjuangan diantaranya dengan mempergunakan poster-poster jang ditjoret dengan tangan. Bukan sadja dalam bahasa Indonesia, malah djuga dalam bahasa — Inggeris jang berisi menentang pendjadjahan dalam berbagai tjorak. Tentera Sekutu merasa tersinggung dengan poster-poster itu. Mereka mulai

melakukan tindakan menentang gerakan pemuda-pemuda itu. Beberapa pasukan tenteranja dikerahkan untuk menghanturkan tempat-tempat jang ditempli dengan poster-poster itu. Udara mendjadi panas. Tindakan Sekutu itu bertambah memuntjak djuga. Gedung Pertjetakan Negara di Kampung Tionghoa dimana surat kabar „Utusan Sumatera“ ditjetak, dihanturkan Sekutu dengan dinamit.

Berpuluh-puluh pemuda ditangkap dan ditawan serta disiksa. Kantor pemuda di Kampung Djawa dibakar. Panggung bioskop diudjung Kampung Djawa, jang ketika itu ditempati oleh sandiwara „Ratu Asia“ djuga turut kena dinamit. Dikalangan tentera Sekutu itu terdapat pula djumlah terbesar jang terbagi dua. Sebagian orang Gurkha jang benar-benar berpihak kepada Inggeris dan sebagian lagi dari golongan India jang beragama Islam.

Mereka jang tersebut belakangan ini kemudiannja berpihak kepada gerakan pemuda kita, setelah mereka mendapat penerangan dan pendjelasan tentang tudjuan pemuda-pemuda itu. Perhubungan itu bertambah lebih njata lagi setelah terdjadinja beberapa peristiwa. Diantaranja ketika salah seorang anggota tentera Sekutu jang berasal dari India Moslem itu mati ditembak oleh serdadu Belanda pada suatu insiden. Pemuda-pemuda kota Padang pada malamnja mengerahkan tenaga sebanjak-banjaknja, sehingga pada hari penguburan orang India Moslem itu keesokan harinja terlihatlah barisan pemuda jang beribu djumlahnja turut mengantarkan djenazahnja itu.

Peristiwa lainnja ialah pada waktu dilangsungkan sembahjang Idulfitri ditanah lapang Alang Lawas (sekarang lapangan Banteng).

Golongan India Moslem dari tentera Sekutu beberapa truck banjaknja ikut bersembahjang. Sesudah sembahjang itu diadakan pawai jang bersifat demonstrasi. Tentera Sekutu merasa, bahwa golongan India Moslem telah memihak kepada perdjjuangan bangsa Indonesia. Diantara mereka jang turut bersembahjang Idulfitri itu dilutjuti sendjatanja. Sedjak saat itu golongan India Moslem bertambah banjak jang menjatakan simpati kepada perdjjuangan bangsa Indonesia. Dengan berbagai djalan mereka memberikan bantuan sendjata dan alat-alat jang diperlukan dalam perdjjuangan.

Pemuda-pemuda dikota Padang menginsjafi, bahwa dibalik kedok tentera Sekutu itu berlindung kaum pendjadjah jang akan menghanturkan tjita-tjita bangsa Indonesia. Peristiwa Gaung mendjadiakan semangat pemuda-pemuda itu memuntjak. Berpuluh-puluh rumah rakjat jang tidak bersalah dibakar oleh tentera Sekutu. Beratus-ratus rakjat ditangkap, dibunuh dan disiksa. Sebabnja hanja karena tentera Sekutu kehilangan seorang opsir dan seorang anggota palang merahnja sewaktu mandi-mandi di Sungai Beramas.

Berturut-turut kemudiannja terdjadilah pertempuran-pertempuran di Simpang Haru, Rimbo Kaluang, Batu Busuk dan lain-lain.

KEMBALI KEPADA PEMUDA PELOPOR.

Api jang dikobarkan oleh para Pemuda Pelopor ini menjala dengan sangat hebatnja, karena memang sesuai dengan semangat heroisme. Disetiap kota, terutama Padang dan Bukittinggi jang diduduki Sekutu, timbullah kemauan bertindak jang sangat bergelora. Dinding-dinding rumah jang dipinggir djalan diukiri dengan sembojan-sembojan jang garang dan galak bunjinja dalam pelbagai bahasa seperti :

Tekad kita „MERDEKA ATAU MATI !”
Down with Imperialism !
Away with Colonialism !
Indonesia for Indonesian !

Mereka mengandjurkan perampasan sendjata dari Djepang agar pedjuang dapat mempersendjatai diri, dan perampasan ini harus dilakukan dengan segala tjara jang mungkin. Maka terdjadilah insiden-insiden dimana-mana. Insiden-insiden ini bukan sadja terdjadi dengan Djepang, tetapi djuga dengan pihak Sekutu utamanja di Padang, dan makin lama perampasan sendjata ini makin merata dan terdjadi dalam ukuran jang lebih besar dengan setjara tersusun.

PERGANTIAN RESIDEN SUMATERA BARAT JANG PERTAMA.

Residen ke-II Datuk Perpatih Baringek, 15 Nopember 1945.

Pada bulan Nopember 1945, Saudara M. Sjafe'i oleh kesehatan terganggu mengundurkan diri dari djabatan Residen, dan diganti oleh K.N.I. Sumatera Barat pada tanggal 15 Nopember dengan Saudara Dt. Perpatih Baringek.

Setiap repolusi tak sunji dari excessen. Begitu djuga di Sumatera Barat. Semangat jang meluap menentang musuh dan kaki tanganja, — melandjut kepada tindakan terhadap bangsa sendiri jang dengan beralasan dan kadang-kadang dengan tak beralasan dituduh mendjadi kaki tangan musuh. Maka terdjadilah peristiwa „Barisan Maut” di Sawah Lunto, Padang dan Bukittinggi dan sebagainya jang bertindak sendiri menangkap dan menghukum orang-orang dianggapnja pengchianat repolusi dari bangsa Indonesia. Keadaan ini tak dapat dibiarkan terus. Pemerintah lalu mengeluarkan satu maklumat No. 15 tanggal 7 Desember 1945 dimana dilarang bertindak menghukum sendiri dan melanggar diantjam dengan hukuman berat.

Maklumat 7 Desember 1945 tidak boleh bertindak liar.

Maklumat ini diiringi dengan tindakan penangkapan terhadap orang-orang jang bersalah dalam hal ini. Maka djalan repolusi

semakin teratur dan kemudian pada tanggal 24 Desember 1945 diadakan permusjawaratan yang dihadiri oleh Residen Sumatera Barat dan badan Eksekutif K.N.I. Sumatera Barat, pembesar-pembesar pemerintahan, Kepala-kepala Polisi, Komandan-komandan T.K.R. dan para pemimpin rakyat dalam mana diambil keputusan yang tegas buat membasmi tindakan-tindakan liar dari perseorangan atau golongan yang merugikan negara. Dan tindakan penangkapan dan lain-lain hanya diwajibkan kepada Polisi dan T. K. R.

Pertempuran di Lubuk Sikaping, 25 Nopember 1945.

Dengan pembersihan kedalam ini maka tindakan keluar semakin hebat dan tersusun, sehingga perampasan senjata setjara besar-besaran lalu dilakukan, dimana terdjadi pertempuran-pertempuran dengan Djepang, diantaranya di Lubuk Sikaping tanggal 25 Nopember 1945 dan di Sungai Tanang Bukittinggi tanggal 20 Nopember 1945, di Batu Sangkar (Lintau) dalam pertengahan Desember 1945, dan di Pajakumbuh atas usaha berunding Djepang menjerahkan senjata mereka dengan setjara damai.

Dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden tentang mengizinkan mendirikan partai-partai, maka maklumat ini mendapat perhatian besar pula dari masyarakat Sumatera Tengah yang tengah bergolak itu. Sedianja setelah instruksi tentang Komite Nasional sampai di Sumatera Barat, maka yang akan didirikan hanyalah satu partai saja jaitu P.N.I. (Partai Nasional Indonesia).

Maka dengan keluarnya maklumat ini, didirikanlah partai-partai yang akan turut dalam perdjjuangan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu (uraian landjut tentang kepartaian sesudah proklamasi ini, dapat dibatja dalam pasal 13).

Insiden yang menimbulkan kemarahan rakyat.

Pertempuran di Padang telah mulai menghangat, yang asal mula-nja terdjadi pertempuran besar-besaran ini ialah ketika pada tanggal 27 Nopember 1945 tentera Nica dan Nica Inlander menduduki Sekolah Teknik N.R.I. di Simpang Haru Padang dengan tidak ada perundingan sedikitpun dengan pihak Pemerintah kita. Saudara Said Rasjad yang waktu itu mendjadi guru disana terus memprotes tindakan sewenang-wenang ini, karena memang sekolah ini telah diakui serta mendapat surat dari pembesar Inggeris (Sekutu). Tetapi Saudara ini lalu diperpukulkan oleh beberapa orang Nica Inlander, sehingga Saudara Said Rasjad djatuh pingsan.

Insiden inilah yang mendjadi awal bagi meledaknya api kemarahan dari rakyat, dan lalu mengambil bentuk penjerangan besar-besaran, dimana pada malam itu djuga para pemuda kita menggempur tempat itu sehingga menimbulkan korban yang hebat dari pihak lawan. Hampir semua tentera Nica yang ada disana tiwas,

sedang alat sendjata banjak jang dapat dirampas. Semendjak itu boleh dikatakan hampir setiap hari terdjadi pertempuran-pertempuran dengan pihak Inggeris, Gurkha, Nica, siang dan malam. Dan diperuntjing pula dengan suatu insiden jaitu kematiannya Majoor Anderson dan nona A. Hallingen di Sungai Baramas pada tanggal 5 Desember 1945. Permusuhan semangkin menghebat, pada hal menurut keterangan jang kita peroleh, Majoor itu dibunuh oleh orang-orang jang sengadja diupah oleh Nica dengan tjara gelap. Hal ini didjadikan pula oleh tentera Sekutu di Padang bagaikan peristiwa pembunuhan Mallaby di Surabaya jang mendjadi awal dari serangan besar-besaran.

Pemerintah kita lalu bertindak untuk menjelesaikan tiap-tiap insiden jang terdjadi itu melalui djalan diplomasi dengan Inggeris. Akan tetapi setiap hari tentera Inggeris, Gurkha-Nica melakukan penggeledahan, penjerobotan, penangkapan, pembakaran rumah-rumah dan sebagainya jang menjebakkan penduduk tak dapat bersenang diam, karena keamanan dan ketentraman sudah terganggu benar, dan kota Padang tidak sunji-sunjina lagi dari letusan karabijn, handgranaat, dan lain-lain sendjata. Pendeknja penduduk sudah seakan-akan hidup diatas bara.

Pedoman pemerintah Propinsi Sumatera.

Dalam pada itu dilain-lain keresidenan diseluruh Sumatera jang ketika itu mendjadi satu propinsi, revolusi telah berdjalan pula dengan lantjarnya, dan dimana-mana telah berdiri Pemerintahan Keresidenan jang memegang pimpinan dalam revolusi. Maka datanglah masanja bagi Gubernur Sumatera Mr. Teuku M. Hassan untuk mengeluarkan satu **pedoman** pemerintah untuk propinsi Sumatera. Dalam suatu Maklumat Gubernur Sumatera jang dikeluarkan tanggal 26 Djanuari 1946 didjelaskan bahwa Sumatera sebagai suatu propinsi dari Republik Indonesia tidaklah terlepas haluan politiknya dari politik jang diturut oleh Pemerintah Agung Republik Indonesia. Segala perundingan politik dalam tingkat tinggi jang berkenaan dengan status Indonesia dilakukan di Djawa oleh kabinet. Rakjat Sumatera berdiri teguh dibelakang Presiden dan kabinet Sjahrir. Menegakkan kemerdekaan serta mempertahankan Republik Indonesia sekuat-kuatnja.

Terhadap mendjaga keamanan pemerintah Sumatera bersedia kerdja sama dengan tentera Sekutu asal mereka (Sekutu) tak menjampuri atau menghalangi politik nasional kita serta usaha kita membela kedaulatan Republik.

Pemerintah dipulau Sumatera tak ada bermaksud mengadakan perundingan politik tersendiri dengan Belanda, hanja kalau perlu harus dilaksanakan oleh kabinet Sjahrir di Djakarta.

Terhadap tawanan Belanda jang ada dikamp Rapwi dipulau Sumatera ($\pm$ 18.000 djiwa) dipermaklumkan, bawa pemerintah R.I. tidak bermusuhan dengan Belanda sebagai bangsa, hanja menentang sistim pendjadjahan.

Pemerintah Sumatera akan membantu, supaya penghidupan mereka sehari-hari terpelihara dan pengungsian mereka keluar negeri berdjalan dengan baik. Tetapi akan mengambil tindakan djika ternyata mereka melakukan provokasi atau bertindak memperkosa kedaulatan Republik kita.

Pendeknja segala aktiviteit Nica atau Amacab baik kaki tangannja jang untuk menegakkan pendjadjahan kembali akan ditumpas.

Terhadap Inggeris dan India.

Selama tentera Inggeris membuktikan sikap netral dilapangan politik dan tidak menjakutkan hati Rakjat kami dalam perasaan kebangsaan, perasaan agama, adat dan lain-lain maka pemerintah di Sumatera selalu sudi bekerdja sama dengan tentera Inggeris untuk mendjaga keamanan di pulau Sumatera ini. Kepada T.K.R. dan badan-badan resmi lainnja akan diberikan instruksi jang selaras dengan sikap ini.

Penduduk Sumatera harus mengerti, bahwa tentera Inggeris termasuk India, akan meninggalkan negeri ini, djika kewadjabannja disini (evacuatie bekas tawanan, melutjuti sendjata Djepang) sudah dihabisinja.

Terhadap Tionghoa.

Pemerintah menganggap penduduk Tionghoa sebagai tamu dan Saudara kita se Asia jang hidup disini berabad-abad mentjari nafkah, haruslah patuh pada undang-undang negara. Djangan ada perbuatan jang merugikan kedaulatan Negara Republik. Pemerintah menghargakan tinggi sympathie jang ditundjukkan oleh sahabat-sahabat kita Tionghoa terhadap Republik. Marilah kita kerdja sama mendjaga keamanan.

Terhadap Djepang.

Pemerintah Republik tidak bermusuah dengan Djepang oleh sebab itu tidak ada alasan bagi penduduk untuk bermusuah dengan Djepang, meskipun Djepang telah melakukan penindasan terhadap penduduk kita.

Penduduk mesti insjaf bahwa selain dari Republik Indonesia tidak ada pihak jang boleh melakukan perintah-perintah tentang pemerintahan negeri (civiël bestuur) terhadap penduduk.

Segala tindakan provokasi dan keganasan jang dilakukan mereka atas susunan siapapun terhadap rakjat kami, akan dibalas dengan setimpal.

Meminta kepada rakjat istimewa kepada pemuda, djangan mengganggu lasjkar Djepang dipulau ini.

Sekian bunji maklumat itu !

Maklumat ini jang keluarnja dari pimpinan pemerintahan memang memperlihatkan tjara berfikir jang luas dan hati revolu-

sioner jang tulus buat memperdjuangkan tjita-tjita kemerdekaan dengan membatasi pengorbanan sehingga sedikit mungkin.

Tetapi antara tjita-tjita dan kenyataan memang ada jarak jang djauh jang penuh dengan kepahitan dan kegetiran. Tjita-tjita jang baik dari pemerintah itu sulit dapat dilaksanakan karena hebatnja provokasi dari agen-agen Nica jang dengan tak putusnja meman-tjing huru-hara jang kemudian setelah insiden terdjadi, lalu diper-salahkan kepada pemerintah Republik, dan dituduh pemerintah Republik tidak sanggup mendjaga keamanan dalam daerahnja. Dari sebelah pihak lagi pemerintah dipandang lemah dan terlalu pandjang pikir dalam bertindak, oleh element-element jang terlalu meluap semangat perdjuangannja.

Gubernur T. M. Hassan jang memimpin pemerintahan untuk Sumatera menghadapi segala kenyataan ini dengan tabah, dan ber-sama rombongan jang terdiri pemimpin-pemimpin pemerintahan dan organisasi mendjalani seluruh Sumatera untuk berusaha menje-lasakan segala kesulitan.

Rombongan Sumatera ke Djawa.

Pun pemimpin-pemimpin Sumatera kerap kali ke Djawa untuk meminta petundjuk-petundjuk dari dekat, dan pada tanggal 13 Desember 1945 berangkatlah ke Djawa Saudara² Dr. M. Amir, Mr. Luat Siregar, dan Adinegoro jang sekembalinja ke Sumatera Dr. M. Amir lalu diangkat mendjadi wakil Gubernur Sumatera. Dan Saudara Adinegoro diangkat mendjadi Perwakilan Pemeritah Agung di Sumatera dengan berkedudukan di Bukittinggi, dan mem-bentuk kantornja pada tanggal 19 Djanuari 1946.

Sementara itu di Sumatera Barat perdjungan berlangsung terus dan karena keadaan bertambah genting djuga, maka K.N.I. Su-matera Barat memadjukan beberapa usul kepada pemerintah, usul mana terus dilaksanakan dengan segera, jaitu :

- a. supaya mengatur distribusi bahan makanan terutama beras.
- b. supaya membentuk Pedjabat Penerangan, Pedjabat Sosial.
- c. supaya mengatur pemungutan bakti-bakti dari rakjat.
- d. supaya mengatur perbelandjaan T.R.I. dan mengambil over segala barisan-barisan kedalam T.R.I.
- e. supaya mengatur pengangkutan motor.

Kemudian didirikan pula Pedjabat Agama Sumatera Barat.

Pada tanggal 1 Djanuari 1946 daerah Kewedanaan Bangkinang jang pada masa Djepang dimasukkan kekeresidenan Riau, dikem-balikan mendjadi daerah Sumatera Barat.

Oleh karena kemerdekaan pada waktu itu baru berbilang bulan, maka setiap bulan diadakan peringatan kemerdekaan dengan tjara jang meriah sekali. Segenap lapisan rakjat turut serta dalam upatjara-upatjara jang penuh semangat ini, dimana para pemimpin mendapat kesempatan untuk semakin mendjelaskan tudjuan per-djuangan dan taktik menghadapi musuh.

PEMUDA SUMATERA TENGAH HADIR DALAM KONGRES PEMUDA INDONESIA.

DJIKA kita surut agak selangkah kebulan Nopember 1945 dapatlah pula kita menuruti suatu peristiwa jang bersifat Indonesia, tetapi sangat besar pula bekasnja dalam membangkitkan semangat perdjjuangan di Sumatera Tengah chususnja dan Sumatera umumnja, jaitu Kongres Pemuda Indonesia di Djokja, jang menghasilkan berdirinja satu benteng perdjjuangan pemuda jaitu Pesindo (Pemuda Sosialis), pendjelmaan dari P.I. dan P.R.I. diawal proklamasi. Kongres ini dihadiri oleh utusan pemuda dari seluruh Sumatera, jang tiba di Djokja dengan berbagai-bagai djal-an, bahkan ada jang berdjjalan kaki. Kongres ini berlangsung tepat dengan memuntjaknja semangat perdjjuangan jang mentjapai klimaxnja pada hari Pahlawan 10 Nopember berupa letusan pertempuran di Surabaya. Njalaan semangat inilah jang dibawa oleh para utusan kembali ke Sumatera jang tersimpul dalam kata sembojan „Merdeka atau mati“. Rintisan dari para pemuda jang pulang dari kongres ini, jang telah mulai bertunas, apinja disirami lagi dengan minjak tanah oleh anggauta barisan pelopor jang kemudian datang pula dari Djawa jang dipimpin oleh saudara M. Kamal. Dalam pada itu persatuan pemuda jang tadinja bergerak dalam organisasi Pemuda Republik Indonesia (P.R.I.). mulai terpetjah, utamanja sedjak utusan-utusan Pemuda Sumatera Tengah kembali dari Kongres Pemuda Indonesia di Djokja. Diantara utusan-utusan itu ingin hendak menukar P.R.I. itu mendjadi Pemuda Sosialis Indonesia, dan sebagian lain masih ingin tetap mempertahankan berdiri terus PRI, guna untuk mendjaga kesatuan pemuda, apa lagi disa'at jang genting penting itu.

Timbulnja dua aliran jang berlawanan itu, menjejabkan tjepatnja tumbuh satu demi satu organisasi-organisasi pemuda, apalagi organisasi-organisasi itu sudah mempunjai sedjarah sedjak dizaman pendjadjahan Belanda, seperti Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Perti, Gabungan Pemuda Islam Indonesia, Pemuda Demokrat dan lain-lain.

Dan untuk mendjaga langkah dan gerak pemuda didalam mempertahankan proklamasi, diadakan satu badan kontak pemuda dengan nama Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia.

Kongres Rakjat Sumatera Barat, 2 Nopember 1945.

Dalam suatu rapat besar jang berlangsung di Gedung Balai Penjelidik Republik Indonesia P. Pandjang (Gedung Kebudayaan sekarang) pada tanggal 2 Nopember 1945, berkumpulah wakil-wakil dari Komite Nasional Sumatera Barat, T.K.R., Pesindo, Palang Merah Indonesia, Ulama Penghulu jang datang dari seluruh Sumatera Tengah berdjumlah kira-kira 500 orang. Rapat

lengkap ini diadakan dengan barisan pelopor dari Djawa itu, dan dipimpin sendiri oleh saudara M.Kamal. Dalam rapat ini diambil keputusan bahwa Kongres Rakjat Sumatera Barat ini adalah guna mencari jalan yang sebaik-baiknya dalam perjuangan revolusioner sekarang menurut garis organisasi dan pembangunan. T.K.R. harus diperkuat sebagai apparatus pemerintah dalam perjuangan. Sifat serta bentuk Komite Nasional haruslah merupakan Perwakilan Rakjat yang sebetulnya, agar tertjapai dengan berangsur-angsur tjita-tjita kedaulatan rakjat. Palang Merah Indonesia yang diketuai oleh Wakil Presiden Hatta sendiri, harus diperteguh susunannya.

Kongres Rakjat di Padang Pandjang ini semakin memperkuat pemerintah revolusioner dalam melaksanakan perjuangan.

KONGRES M.I.T. DI BUKITTINGGI, 7 DESEMBER 1945.

DALAM pada itu oleh karena pertempuran dengan Inggeris, Gurkha, Nica semakin menjadi-djadi djuga, maka kaum Muslimin yang bersatu dalam M.I.T. (Madjelis Islam Tinggi) Sumatera lalu tampil pula memperbesar njala api dapur perjuangan dengan kongresnya yang berlangsung tanggal 7 Desember 1945 bertempat di Bukittinggi, dan dihadiri oleh ulama-ulama se-Sumatera meneriakkan sembojan: **siapa-siapa yang tiwas dalam perjuangan kemerdekaan dewasa ini, adalah mati sjahid dunia dan akhirat.** Lalu dibentuk tiga panitia, jaitu Panitia Fatwa, Panitia Barisan Sabilillah, dan panitia politik. Lalu diambil putusan bahwa :

1. M.I.T. Sumatera akan membentuk Barisan Sabilillah, yang mendapat latihan dari T.K.R. dan mempunyai perhubungan dengan badan ketenteraan tersebut.
2. Menetapkan bahwa berjuang mengusir musuh dari tanah air kita ini atau menghantjurkannya adalah Fardhoe Ain hukumnya (bukan Fardhu Kifajah).
3. Menetapkan bahwa siapa-siapa yang tiwas didalam perjuangan ini adalah mati sjahid dunia dan akhirat, tidak dimandikan, dikapani dengan pakaian yang dipakainya, dan tidak disembahjangkan.
4. Pengchianat bangsa dinasehati dan diawasi ; manakala sikapnya tidak berubah djuga, **hallallah darahnja** (boleh dibunuh).
5. Barisan Palang Merah puteri dituntut oleh agama Islam.

Djawatan Penerangan.

Peneranganpun diperhebat, yang dilakukan oleh seluruh partai dan barisan, dengan dikoordinir oleh Pemerintah dengan Pedjabat Penerangannya. Disamping Pedjabat Penerangan Sumatera Barat atau P.P.S.B. ini, djuga berdiri P.P.R.I.S. (Pedjabat Penerangan Republik Indonesia Sumatera), yang dipimpin oleh saudara Adi-

negoro jang memangku djuga djabatan Wakil Pemerintah N.R.I untuk Urusan Umum buat Sumatera dan berkedudukan di Bukittinggi. Kemudian karena Penerangan Propinsi harus dipusatkan ditempat kedudukan Gubernur maka P.P.R.I.S. dihapuskan, dan didirikan Badan Penerangan jang baru di Medan dibawah pimpinan Wakil Gubernur Dr. M. Amir dan diresmikan pada tanggal 12 Desember 1945.

Kongres P.R.I se Sumatera 15 Desember 1945.

Dalam pada itu gerakan P.R.I. telah meluas sehingga pimpinan se Sumatera dari P.R.I ini jang berkedudukan di Bukittinggi telah menganggap sampai masanja untuk mengadakan satu Kongres P.R.I. se Sumatera, jang dengan perantaraan radio diberi wedjangan oleh Wakil Presiden Hatta dimana beliau menegaskan a.l. bahwa : „Perjuangan kita sekarang menghendaki disiplin jang kokoh. Tiap-tiap golongan bagian rakjat harus tunduk kepada pimpinan jang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah Negara kita tersusun dalam berbagai djawatan jang memimpin urusan masing-masing dari atas sampai kebawah. Tiap-tiap djawatan telah diberi kewadajiban jang tertentu. Oleh karena itu djanganlah pula ada golongan diluar pemerintah jang bertindak sendiri dengan melakukan hal-hal jang mendjadi salah satu kewadajiban dari pada salah satu pedjabat tersebut. Umpamanja, menangkap orang jang ditjuri-gai dan terus melakukan hukuman sendiri adalah tindakan jang bertentangan dengan dasar negara jang teratur. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum dan bukanlah negara Anarchie ! Sebab itu segala tindakan jang menghukum haruslah diserahkan kepada Pedjabat Kedjaksaan dan Mahkamah Pengadilan. Djanganlah menghukum sendiri, karena inilah pokok segala kezaliman ! Negara Republik Indonesia berdiri diatas dasar peri kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dan dalam pidato radio jang pandjang-lebar pada tanggal 15 Desember 1945 itu, Bung Hatta menegaskan, bahwa djanganlah berdjuang buat masa sekarang sadja dengan sembojan, „Merdeka atau mati” tetapi berdjuanglah buat sekarang dan masa jang akan datang dengan sembojan „Merdeka dan tetap merdeka !”.

Kongres Masjumi dan M.T.K.A.A.M.

Masa ini adalah penuh dengan rapat-rapat raksasa dan kongres-kongres, diantaranya kongres Perserikatan Islam se Sumatera pada tanggal 21 Desember 1945, Kongres M.T.K.A.A.M. di Padang Pandjang tanggal 21 Desember djuga, jang mana dalam Kongres Perserikatan-perserikatan Islam se Sumatera itu, telah didirikan Masjumi Sumatera, jang bersifat Federasi dengan segala dewan-dewannja, yakni sebagai pimpinan Propinsi Sumatera dari pusat Masjumi di Djawa.

Maklumat Gubernur Sumatera 20 Desember 1945.

Maklumat Pemerintah Sumatera Barat 7 Desember 1945 dibenarkan oleh Gubernur Sumatera No. 4/MGS dimana dilarang keras dengan antjaman hukuman mati dan hukuman berat membuat : 1. Kesalahan terhadap djiwa seseorang 2. Perampokan dan 3. Penggangguan Kemerdekaan perdjalan (lalu lintas) dari segala orang orang didjalan-djalan umum oleh orang-orang jang tidak dikuasakan untuk ini. Maklumat ini dikeluarkan di Medan pada tanggal 20 Desember 1945 dan diumumkan di Sumatera Barat tanggal 25 Desember oleh Residen Sumatera Barat Dt. Perpatih Baringek.

Hadji Iljas Yacob di Sumatera Barat 21 Desember 1945.

Suatu hal jang menambah kuat djuga pimpinan perdjungan ialah pulangnja pemimpin-pemimpin jang dulu dibuang ke Digul oleh Belanda, dengan melalui Australia kemana mereka itu dilarikan Belanda sesudahnja Djepang menjerang. Pada tanggal 21 Desember sampailah di Sumatera Barat saudara Dt. Singo Maradjo (almarhum) jang sesudah itu diiringi oleh saudara H. Iljas Jacob dan lain-lain. Para pemimpin jang telah matang oleh perdjungan puluhan tahun dalam dan luar negeri ini, menambah kuatnja dasar moril bagi para pedjuang.

Dan untuk mewujudkan lebih terdjaminnja keamanan jang banjak terganggu oleh karena tindakan-tindakan liar itu, maka pemerintah Sumatera Barat bersama kepala Polisi Sumatera Barat mengadakan rapat dengan pimpinan T.K.R. Sumatera Barat pada tanggal 21 Desember 1945 bertempat di Padang jang mana putusannja kemudian diumumkan oleh saudara Dahlan Djambek pemimpin T.K.R. Sumatera Barat, jang antara lain berbunji sebagai berikut.

Maklumat TKR No. 7 tanggal 9 Djanuari 1946.

„Keamanan kedalam adalah tanggung djawab dan kewadjiban polisi Negara, dan djika perlu dan kalau dikehendaki polisi Negara dibantu oleh T.K.R. Dengan keamanan kedalam dimaksud disini : keamanan jang bergantung dengan urusan sipil, misalnja pentjuran, pembunuhan, penangkapan beras, penahanan dan sebagainya.

Pada warga tentara diperintahkan supaja semua pemeriksaan atau tangkapan jang bersangkutan dengan pemerintah sipil hendaklah dihentikan. Kalau T.K.R. menangkap seseorang, hendaklah orang itu diserahkan secepat-cepatnja kepada polisi dengan alasan-alasan dan bukti tentang penangkapan itu. Begitu djuga semua orang tangkapan dan tahanan sekarang ini jang ada diasrama T.K.R. djuga mesti diserahkan orang-orang jang dianggap spion Nica. Dari mulai sekarang, T.K.R. tidak akan bertindak lagi sebagai polisi. Menahan dan memeriksa oto, menangkap beras, kain dan uang, adalah kewadjiban polisi semata-mata. T.K.R. hendaklah

menudjukan kepada latihan ketenteraannya untuk menentang musuh dari luar. Tetapi apabila polisi minta bantuan, maka bantulah dengan segera."

Untuk membayangkan kepada pematja bagaimana keadaan pada masa itu, dimana pembahagian kekuasaan diragukan karena partai-partai mempunyai barisan-barisan pula dan badan-badan penjelidik sendiri, dapat diteliti dengan penutup muklumat ini jang berbunji sebagai berikut :

„T.K.R. adalah tentera. Tidak diizinkan sekali-kali menerima dan melakukan perintah selain dari perintah pemimpin-pemimpin T.K.R., Badan-badan Pemerintahan, apalagi badan-badan partikular seperti P.R.I., PSII dan lain-lain bukanlah badan-badan tempat T.K.R. menerima perintah, tetapi boleh menerima usul-usul dari orang-orang itu. Jang menetapkan perintah adalah Kepala Daerah sadja. Oleh sebab itu anggota T.K.R. dilarang keras melakukan andjuran (perintah) dari orang luar dengan tidak setahu pemimpin-pemimpin T.K.R. (sekurang-kurangnya kepala dari satu barisan)."

Demikianlah bunjinja maklumat T.K.R. Sumatera Barat No. P/7 tanggal 9 Djanuari 1946, jang ditanda tangani oleh Kolonel Dahlan Djambek sendiri. Pematja tentu akan dapat membayangkan, bahwa maklumat seperti itu djika dikeluarkan sekarang, tentu akan dianggap berolok-olok, tetapi buat masa itu memang perlu.

Selanjutnja Residen Sumatera Barat djuga mengeluarkan maklumat sesudah rapat itu, jang bunjinja hampir sama dengan jang diatas itu.

Urusan tjukai diserahkan pada Pabean, 5 Djanuari 1946.

Sebagaimana kita ketahui bahwa uang masuk negara banjak bersumber dari pabean dan Accijns, jaitu tjukai barang masuk dan bandrol rokok dan minuman keras. Dengan maklumat No. 1 dan 2/46, 5 Djanuari 1946, Residen Sumatera Barat menjatakan bahwa accijns rokok dan minuman keras jang selama ini masuk urusan pedjabat pajak negara, mulai 31 Djanuari dimasukkan bahagian pedjabat Pabean dan accijns. Sedangkan pedjabat Pabean Sumatera (duane) dan pedjabat Perhubungan Laut dan Tjukai disatukan memakai nama : Pedjabat Pabean dan Accijns Sumatera Barat.

Pemantjar R.R.I. Bukittinggi pertengahan Djanuari 1946.

Selama kemerdekaan masih dihitung masanja dengan bulan ini, maka baik pulalah kita ikuti perdjalanannya dari bulan kebulan, karena iapun dirajakan saban tanggal 17 dari setiap bulan. Beberapa hari sebelum perajaan 5 bulan Indonesia merdeka, diresmi-kanlah pembukaan Pemantjar Radio N.R.I. Bukittinggi, jang tidak sedikit sumbangannya dalam memperdjuangkan kemerdekaan melalui udara.

Mutasi diantara pamongpradja, 23 Djanuari 1946.

Dalam pada itu dikalangan pemerintahan tetap didjalankan perubahan-perubahan dan mutasi, untuk meniupkan angin revolusioner kedalam kalangan Pamongpradja jang bertanggung-djawab sebagai wakil Pemerintah dalam kelantjaran revolusi. Para pemimpin rakjat diangkat dalam barisan pamongpradja, agar semangat revolusioner dari mereka dapat dipadu dengan pengalaman pemerintahan dari satu perpaduan jang sanggup memikul pemerintahan dalam masa revolusi.

Mengiringi mutasi Wali Luhak jang telah diuraikan sebelum ini, maka pada tanggal 23 Djanuari 1946, diumumkanlah pengangkatan wakil Wali Kota dan Demang-demang di Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Wakil Wali Kota Padang Saudara Azizchan dari pegawai Kantor Penyelidikan di Padang Pandjang.
2. Wakil Wali Kota Bukittinggi, Saudara Iskandar Tedjasukmana dari anggota Komite Nasional ditempat itu.

Pengangkatan Demang-demang.

Diperbantukan kepada :

1. Residen Sumatera Barat sebagai Demang, Saudara Dahlan gelar Datuk Djoendjoeng Maradjo dari Demang Muda dikan-tor Residen Sumatera Barat Padang.
2. Wali Kota Padang, Saudara Naazim gelar Sutan Sjarif dari Demang Kota Padang.
3. Wali Luhak Painan Kurintji, Saudara Djamalus Jahja gelar Sutan Pamuntjak dari Demang Padang Luar Kota.
4. Wali Luhak Agam, Saudara Anwar gelar Datuk Madjo Besar Nan Koening dari Demang Muda Indrapura Kedemangan Kerintji Indrapura.
5. Wali Luhak T. Datar, Saudara Ali Akbar dari Demang Alahan Pandjang.
6. Wali Luhak L. Kota, Saudara Bagindo Moerad dari Demang Solok.
7. Wali Luhak Solok, Saudara Enny Karim dari Demang Muda Air Bangis.
8. Wali Luhak Pasaman, Saudara Abdoel Hakim gelar Radjo Mangkuto dari Demang Muda jang diperbantukan kepada Demang Padang Luar Kota.

Diangkat mendjadi :

9. Demang Padang, Saudara Haroenalrasjid dari Demang Muda sarik Kedemangan Agam Tua Luhak Agam.
10. Demang Pariaman Saudara Noeskan dari Demang Air Bangis Luhak Agam (lama).

11. Demang Lubuk Alung, Saudara Sutan Alifoeddin Saldin dari Demang Muda Batang Hari Kedemangan Sidjundjung Luhak Solok (lama).
12. Demang Painan Saudara Ahmad Suib dari Ketua Komite Nasional Batusangkar.
13. Demang Kerintji, Saudara H. Adnan dari Ketua Komite Nasional Kerintji Indrapura di Sei. Penuh.
14. Demang Balai Selasa, Saudara Basaruddin dari Demang Muda Tarusan Kedemangan Painan.
15. Demang Agam Tua, Saudara M. Sjarif gelar Sutan Bandaro dari Demang Painan.
16. Demang Manindjau, Saudara Bachtiar gelar Sutan Pamuntjak dari Demang Muda Pajakumbuh Kedemangan Pajakumbuh Luhak Lima Puluh Kota.
17. Demang Batipuh Sepuluh Koto, Saudara Samad dari Demang Muda jang diperbantukan kepada Demang Batipuh Sepuluh Koto Luhak T. Datar (lama).
18. Demang Sawahlunto, Saudara Nurdin gelar Datuk Radjo Hitam dari Demang Muda Pagarujung Kedemangan Batu Sangkar Luhak T. Datar (lama).
19. Demang Batu Sangkar, Saudara Sinjar dari Demang Muda Kaju Tanam Tudjuh Koto, Kedemangan Paringan, Luhak T. Datar (lama).
20. Demang Sidjundjung, Saudara H. Roesli dari anggota pengurus Besar Perti di Guguk Suliki.
21. Demang Pajakumbuh, Saudara Malik Siddik dari anggota Komite Nasional Bukittinggi.
22. Demang Suliki, Saudara Arisoen dari anggota pengurus Komite Nasional Pajakumbuh.
23. Demang Bangkinan, Saudara Sutan Bahroemsjah dari Wakil Demang disitu.
24. Demang Solok, Saudara Ibrahim gelar Datuk Pamuntjak dari Demang Lubuk Sikaping Luhak Agam (lama).
25. Demang Alahan Pandjang, Saudara Ahmad Jusuf dari Demang Muda Luhak Kedemangan Pajakumbuh Luhak Lima Puluh Kota.
26. Demang Muara Labuh, Saudara Sjahbuddin Latif gelar Datuk Sibongsu dari guru Sekolah Landjut Pertama (S.M.P.) di Bukittinggi.
27. Demang Lubuk Sikaping, Saudara Muin gelar Datuk Rang-kajo Maradjo dari Demang Muda Tandjung Pati Kedemangan Pajakumbuh Luhak Lima Puluh Kota.
28. Demang Taloe, Saudara A. Malik Muhamad gelar Dt. Nan Bareno dari Kepala Negeri Balingka Kedemangan Agam Tua dan anggota Komite Nasional Bukittinggi.
29. Demang Air Bangis, Saudara Aminuddin dari Demang Muda Solok Kedemangan Solok Luhak Solok.

Mutasi jang mengagumkan ini berdjalan dengan lantjar, dan mendapat sambutan baik dari masjarakat Sumatera Barat, dan hilanglah dengan ini sentimen jang kerap dihembus-hembus oleh orang berniat djahat, antara corps Pamongpradja jang berasal dari B.B. lama dengan mereka jang menamakan dirinja pemimpin rakjat.

Memperlengkap anggota K.N.I., 23 Djanuari 1946.

Pun K.N.I. Sumatera Barat jang mendjadi pedoman dalam tindak-tanduk pemerintah Sumatera Barat, semakin memperbaiki dirinja dengan memperlengkap perwakilan golongan dan partai-partai didalamnya, sehingga ia mulai mempunyai tjorak Dewan Perwakilan Rakjat.

Maka untuk mempererat hubungan K.N.I. dari Pusat sampai ketjabang di Kewedanaan dan ranting di Negeri, K.N.I. mengeluarkan Maklumat pada tanggal 23 Djanuari 1946 sebagai berikut :

Oleh karena K.N.I. sekarang sudah mulai berupa Dewan Perwakilan Rakjat, maka tiap-tiap usul, permohonan atau tuntutan dari rakjat hendaklah disampaikan dengan perantaraan :

1. Anggota K.N.I. Sumatera Barat, djika mengenai Sumatera Barat.
2. Anggota K.N.I. Kedemangan, djika mengenai daerah Kedemangan.
3. Anggota K.N.I. Negeri, djika mengenai negeri.

Jang bersangkutan dengan K.N.I. Daerah Sumatera Barat di-alamatkan kepada: Dewan Harian K.N.I. Sumatera Barat, Djalan Rumah Bola No. 3 Padang, atau diberikan kepada anggota jang berada ditempatnja.

Demikianlah revolusi berdjalan disegenap lapangan hidup, tak terketjuai dikalangan para pegawai pemerintah jang telah bersatu pula dalam ikatan **Gepam** (Gerakan Pegawai Angkatan Muda) jang berusaha agar para pegawai akan dapat mendjalankan tugasnja dengan sebaik-baiknya, walaupun dalam kesulitan penghidupan dan gangguan keamanan (terutama di Padang) jang semakin lama semakin memuntjak. Residen Sumatera Baratpun sebagai bapa dari para pegawai, setiap waktu mengadakan tjeramah dan pemandangan-pemandangan dalam pertemuan-pertemuan jang diselenggarakan oleh Gepam ini.

Gubernur Sumatera tornee, 10 Pebruari 1946.

Pun Pemerintah Propinsi Sumatera jang dipimpin oleh Gubernur T. M. Hassan, selalu memberi bimbingan pula, jang diantaranya termaktub didalam garis-garis besar politik Pemerintah Sumatera jang telah kita terangkan sebelum ini. Dan untuk menindjau dari dekat serta mengusahakan agar segala sesuatunja berdjalan dengan

„running well”, maka Gubernur T.M. Hassan mengadakan tornee keseluruhan Sumatera bersama rombongan jang terdiri dari pembesar-pembesar Pemerintahan dan pemimpin rakjat, jang mana rombongan ini sebagai telah kita siarkan sebelum ini, sampai di Bukittinggi pada tanggal 10 Pebruari hari Minggu djam 6.30 sore. Malam itu djuga mulai djam 9.15 dilangsungkan satu pertemuan khusus diantara para pembesar ini dan wakil-wakil rakjat, dimana Gubernur dan Residen A. Karim M.S. memaparkan pedoman-pedoman untuk Pemerintah Sumatera. Besoknja beliau terus ke Padang ibu Kota Sumatera Barat, dimana pada malamnja diadakan perundingan tentang pemerintahan.

Rapat umum jang pertama dengan Gubernur Sumatera, 17 Pebruari 1946.

Dan sekembalinja beliau dari Padang, maka diadakanlah satu rapat umum jang bersedjarah dimana buat pertama kalinja rakjat disekitar Bukittinggi berhadapan muka dan mendengar wedjangan dari Gubernur Sumatera jang diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia. Lebih dari 20.000 orang menghadiri rapat raksasa itu, sehingga lapangan Atas Ngarai penuh sesak oleh lautan manusia.

Sampai pada masa djalan sedjarah jang kita ikuti bulan demi bulan ini, pada tanggal 17 Pebruari 1946, dimana diperingati 6 bulan Indonesia Merdeka tidak kurang dari 2 km pandjangnja barisan jang terdiri dari T.R.I., P.T., Lasjmi, Barisan Istimewa, P.S.I., (Persatuan Sopir Indonesia), Pemuda Tionghoa, Hizbullah, Sabilillah, Puteri Kesatria, P.R.I., B.K.R., Barisan Tjilik dan lain-lain telah melakukan pawai berkeliling kota dengan bendera dan sembojan-sembojan jang menggambarkan semangat revolusi nasional jang bergelora.

Volksfront, 14 Maret 1946.

Dalam pada itu di Djawa telah berdiri Volksfront (Persatuan Perdjjuangan) jang menjatukan dalam ikatan perdjjuangan akan partai-partai dan badan-badan perdjjuangan di Djawa. Gelora semangat jang dikobarkan oleh Persatuan Perdjjuangan ini memuntjak hebat, karena diantara promotornja terdapatlah Saudara Tan Malaka jang mempunyai sedjarah dalam pergerakan revolusioner menentang pendjadjahan.

Dalam suatu kongres Volksfront di Solo, suatu panitia ketjil dibentuk untuk menjaring putusan, dan terdiri dari Saudara-saudara; Ibnu Parna (Pesindo), Wali al Fatah (Masjumi), Ir. Sakirman (Dewan Perdjjuangan Djawa Tengah), Mr. Abdul Madjid (Partai Sosialis), Sudirman (T.K.R.), jaitu (Djenderal Sudirman almarhum), Atmadji (T.K.R. Laut, A.L.R.I.), Sugijono (K.N.I. Solo), Tan Malaka, Usman (P.R.I. Surabaya), Njonja Mangunkusumo (Perwani) telah memutuskan suatu minimum program jang terdiri dari tudjuh pasal sebagai berikut :

1. Berunding atas dasar pengakuan kemerdekaan 100%.
2. Pemerintah Rakjat (dalam arti sesuainja haluan Pemerintah dengan kemauan rakjat).
3. Tentera Rakjat (dalam arti sesuainja haluan tentera dengan kemauan rakjat).
4. Melutjuti sendjata tentera Djepang.
5. Mengurus tawanan bangsa Eropah.
6. Menjita dan menjelenggarakan pertanian musuh (kebun).
7. Menjita dan menjelenggarakan perindustrian musuh (fabrik, bengkel, tambang dan lain-lain).

Persatuan jang dapat memusatkan semua partai dan badan perdjuaan memang telah terasa benar perlunya sehingga dalam rapat-rapat partai politik selalu diandjurkan mendirikan Volksfront.

Dan usaha jang langsung untuk membentuk Volksfront ini, di Sumatera Barat dilakukan dalam rapat Komite Nasional Sumatera Barat pada tanggal 14—15 Maret 1946 di Bukittinggi.

PEMERINTAHAN RESIDEN Dr. M. DJAMIL.

Dr. Djamil Residen ke-III, 18 Maret 1946.

TETAPI dalam pada itu terdjadi suatu mutasi dalam pemerintahan Sumatera Barat, dimana Residen M. Rusad gelar Dt. Perpatih Baringek mulai 14 Maret diperbantukan pada Gubernur Sumatera di Medan, dan berhubung dengan itu untuk mewakili buat sementara ditetapkan Dr. M. Djamil gelar Dt. Rang-kajo Tuo, Ketua K.N.I. Sumatera Barat, jang kemudian pada tanggal 18 Maret ditjalonkan mendjadi Residen oleh K.N.I. Sumatera Barat, tjalon mana ditetapkan oleh Pemerintah, dan kedudukan beliau sebagai Ketua K.N.I. digantikan oleh Saudara Mr. M. Nasroen.

Tjara pembentukan Volksfront, 14 Maret 1946.

Berbeda dengan keadaan perkembangan di Djawa, maka Volksfront Sumatera Barat dibentuk atas inisiatif K.N.I. Sumatera Barat, tegasnja atas andjuran Pemerintah sendiri. Maka pada tanggal 14 Maret dengan mengambil tempat di Gedung K.N.I. Sumatera Barat Bukittinggi, dimulailah rapat pembentukan Volksfront (Persatuan Perdjuaan) daerah Sumatera Barat dengan dihadiri oleh Gubernur Sumatera, Residen Sumatera Barat, Residen Xarim M.S., Adinegoro (Wakil Pemerintah N.R.I. buat urusan Umum Sumatera) Ketua K.N.I. Sumatera Barat dan Kolonel Dahlan Djambek. Dalam rapat jang dipimpin oleh Saudara Marzoeki Jatim ini, berbitjara Saudara-saudara Bariun A.S. dan Chatib Sulaiman memberikan penerangan berkenaan dengan kepentingan

Volksfront dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dewasa ini. Saudara Chatib Suleiman menegaskan bahwa Persatuan Perjuangan inilah sekarang yang akan mengendalikn tenaga dan kemauan rakyat untuk mempertahankan kedaulatan negara dan hak kebangsaannya dari segenap daja upaja busuk dari luar dan dalam yang hendak mentjemarkan kemerdekaan negara.

Setelah berbintang pandjang lebar dan setelah mempertimbangkan nasehat-nasehat dan petundjuk-petundjuk yang berharga, maka tersusunlah daftar usaha Volksfront yang pada garis besarnya, terbagi atas Dewan Pimpinan, dengan dibawahnja Dewan Perjuangan, terbagi atas siasat dan lasjkar, Dewan Pembangunan, Dewan Penjelidik, Dewan Pengadilan dan Badan Sekretariat yang tersebar pada setiap Luhak, Kedemangan, Kedemangan Muda dan Negeri. Segala Dewan-dewan ini mempunjai pula bahagian-bahagiannya, untuk pekerdjaan dan usaha-usaha yang memang sesuai dan sangat dituntut oleh suasana perjuangan pada waktu itu, dimana segenap rakyat dapat menjerahkan waktu dan pengorbanannya dengan teratur untuk kemerdekaan Indonesia yang sedjahtera dan makmur. Diatas sekali untuk memberikan putusan-putusan penting yang diluar dari kekuasaan Dewan Pimpinan serta Dewan-dewan lainnya berdirilah Madjelis Permusjawaratan Persatuan Perjuangan. Dengan ini dapatlah dipersatukan segenap partai dan barisan didalam persatuan perjuangan ini untuk memperteguh perjuangan rakyat.

Dan setelah rapat menerima susunan usaha yang tersebut diatas itu, maka dilakukanlah undian suara untuk menetapkan 7 orang anggota Dewan pimpinannya, yang achirnja terpilihilah Saudara-saudara :

1. Bariun A.S. (P.B.I.);
2. Bachtaruddin (P.K.I.);
3. Chatib Suleiman (Partai Sosialis);
4. Iskandar Tedjasukmana (Partai Sosialis);
5. Suleiman (P.R.I.);
6. Basjah Lubis (SOBSI);
7. Seorang Opsir Tinggi yang namanya tidak diumumkan.

Tempat kedudukan Dewan Pimpinan Volksfront ini ditetapkan di Bukittinggi. Begitupun Pura Nasional diserahkan bulat mengurusnja kepada Volksfront.

Pembagian tingkat D.P.R., 17 Maret 1946.

Demikianlah setelah selesai rapat pembentukan Persatuan Perjuangan pada tanggal 14 dan 15, maka pada tanggal 16 dimulai sekali sidang Pleno ke-V dari K.N.I. Sumatera Barat, dimana buat pertama kalinya diberi kesempatan kepada para anggota untuk mengadakan pertanyaan-pertanyaan dan kata-kata sambutan atas keterangan-keterangan Pemerintah. Rapat dipimpin oleh Mr. St.

M. Rasjid, Wakil Ketua K.N.I. Sumatera Barat, dan dalam rapat yang berlangsung selama 3 hari ini diputuskan untuk membentuk Dewan-dewan Perwakilan Rakjat yang akan merupakan tiga tingkatan, jaitu Dewan Perwakilan Negeri (D.P.N.), Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat, dan Dewan Perwakilan Kota. Maka dibentuk sebuah panitia untuk menyusun rentjana peraturan rumah tangga dan tjara pemilihan dari Dewan-dewan tersebut yang terdiri dari Saudara-saudara: Adinegoro, Djamin Dt. Bagindo, A Gafar Djambek, Anwar St. Saidi, I. Tedjasukmana, Azizchan dan Basjrah Lubis.

Djuga diputuskan untuk menjerahkan Pura Nasional (Fonds Kemerdekaan) kepada Volksfront, begitu djuga tentang controle ekonomi diserahkan melaksanakannya kepada Volksfront.

Pelantikan Opsir-opsir T.R.I., 17 Maret 1946.

Serentak dengan sidang K.N.I. ini, pada tanggal 17 Maret, dihari genapnja 7 bulan kemerdekaan, diresmikanlah pelantikan para Opsir Markas Divisi ke III dan regiment X T.R.I. Sumatera Tengah, yang mendapat kundjungan meriah dari rakjat, para pemimpin dan barisan-barisan. Djenderal Major R. Suhardjo Hardjo Wardjo Kepala Staf Umum T.R.I. Sumatera meresmikan pelantikan para Opsir ini, sesudah mana diadakan pawai sekeliling kota.

Salah satu keputusan dari K.N.I. Sumatera Barat yang telah dibebankan kepada Pemerintah Sumatera Barat untuk mendjalankannya ialah tentang membentuk Dewan Perwakilan Rakjat, terutama Dewan Perwakilan Negeri (D.P.N.). Hal ini adalah untuk menjempurnakan demokrasi yang mendjadi salah satu tiang dari Pantjasila.

Tetapi dibalik pertimbangan-pertimbangan teoristis dan idealistis ini, sebenarnya terletak dasar-dasar berpikir praktis yang dapat disimpulkan pada bunji pepatah: bersedia pajung sebelum hudjan, tapi revolusi tentu mempunyai excessen. Tetapi kewadajiban pimpinanlah dalam suatu revolusi untuk membatasi excessen ini sampai kepada seketjil-ketjil mungkin. Tertjapai maksud dengan korban yang sesedikit mungkin, adalah tandanja suatu revolusi mempunyai pimpinan yang sehat, yang dapat menindjau kemuka dalam djarak djauh, djika perlu dengan hitungan abad.

D.P.N. adalah Dewan yang terendah, 17 Maret 1946.

Pemerintah Sumatera Barat telah mengambil langkah yang terdahulu diseluruh Indonesia untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Negeri (D.P.N.), dimana pemerintahan dinegeri dipegang oleh D.P.N. ini bersama Wali Negeri yang dipilih oleh seluruh rakjat. Dalam D.P.N. ini, ninik mamak hanja merupakan satu golongan yang berwakil disana, sedangkan dalam kerapatan negeri mereka merupakan seluruh anggota yang mewakili segala golongan dalam negeri.

Dengan ini diusahakan agar golongan muda dapat memegang Pemerintahan negeri, dan golongan ninik mamak tetap turut dalam pemerintahan negeri, dan tidak merasa ditinggalkan, sehingga dapatlah dihindarkan perbenturan besar-besaran seperti di Sumatera Timur jang banjak menumpahkan darah itu.

Apalagi dengan terbentuknja Volksfront, maka penjelesaian setjara teratur dari susunan Pemerintah ini, akan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Maka setelah masuk rantjangan peraturan tentang D.P.N. dari Komisi jang tersebut diatas, maka ditanamlah panitia jang akan bertanggung-djawab atas pelaksanaan terbentuknja Dewan-dewan Perwakilan Negeri itu, jang terdiri dari Saudara-saudara: Marah A. Munit sebagai Ketua, dan Saudara-saudara St. Maradjo, H. Mahmud Junus, Sjamsu Anwar, Darwis Maaroeff, Sultani St. Malako, Rasuna Said, Rustam Thaib, Sjarifah Arif dan Jacob Rasjid sebagai anggota.

Peraturan-peraturannya telah disiapkan begitu rupa, sehingga dalam beberapa bulan sadja akan terbentuklah D.P.N. dan dipilih Wali Negeri baru diseluruh Sumatera Barat jang terdiri dari lebih-kurang 500 negeri itu.

Tindakan-tindakan Volksfront, 26 Maret 1946.

Sekarang marilah kita ikuti kembali kegiatan-kegiatan Volksfront Sumatera Barat jang dibentuk oleh Pemerintah itu, jang kemudian mempunyai sedjarah jang unik pula dalam perdjalanannya revolusi di Sumatera Barat. Pada tanggal 26 Maret disampaikan kepada Dewan Pimpinan Volksfront Sumatera Barat suatu tuntutan rakjat jang berbunyi sebagai berikut :

1. Segala orang Belanda jang ada dibawah perlindungan Inggeris supaja diserahkan kepada pengawasan T.N.I. sebab mereka ini jang menimbulkan amarah rakjat berhubung dengan adanya usaha dan tipu daja mereka untuk menegakkan kembali kekuasaan pendjadjahan Belanda di Indonesia, antaranja daerah Sumatera Barat.
2. Segala orang Indonesia jang ditahan dan tersiksa sekarang ditangan Inggeris, diserahkan kepada polisi Republik Indonesia untuk diperiksa dan diadili seterusnya.
3. Segala apa keperluan Inggeris tentang hasil bumi dan barang jang ada di Sumatera Barat, mesti dimintakan kepada Residen Republik Indonesia di Padang, dan tidak boleh mengadakan perhubungan dengan orang lain atau badan lain.
4. Gedung Kantor Residen Republik Indonesia di Padang (jang letaknya di Kamp. Djawa) supaja diserahkan kembali oleh Inggeris, karena Markas Besarnya untuk seluruh Sumatera sudah pindah ke Medan.

5. Segala serdadu Inggeris dan motor Inggeris jang keluar dari areanja di Padang tidak dapat ditanggung lagi keselamatannja.
6. Residen hendaklah mengeluarkan perintah resmi untuk Sumatera Barat supaya dibasmi segala kaki tangan dan pembantu Nica.

Tuntutan rakjat ini didengungkan oleh Volksfront Sumatera Barat dengan sehebat-hebatnja, dan kemudian dikeluarkan maklumat bahwa segala matjam bakti, derma dan lain-lain jang datangnja dari rakjat umum tidak boleh diminta atau dipungut oleh partai, perkumpulan, barisan-barisan manapun djuga jang ada diseluruh Sumatera Barat.

Jang berhak menerima bakti, derma dan lain-lain dari rakjat umum hanja Volksfront sadja, bahagian Pura Nasional.

Segala perbelandjaan dari badan-badan perdjuaan rakjat, diichtiarkan oleh Volksfront dengan tidak mengetjualikan badan perdjuaan jang manapun djuga.

Soal keuangan perdjuaan dan kontrole ekonomi telah berada ditangan Volksfront, dan Volksfront telah mendapat kepertjajaan penuh dari rakjat dan Pemerintah untuk melantjarkan perdjuaan sehingga untuk menghargai kegiatan Volksfront itu oleh Pemerintah Sumatera Barat telah dilepaskan dari tahanan di Bukittinggi 13 orang pemuda, jang semendjak 3 bulan jang lalu ditahan dengan tuduhan bertindak liar. Para pemuda itu diserahkan kepada pengawasan Volksfront.

Uang NICA tidak laku, 23 Maret 1946.

Dalam mengurus soal keuangan perdjuaan, maka Volksfront tertumbuk kepada banjaknja uang Djepang dalam peredaran, uang mana tetap dianggap laku, setelah Djepang menjerah. Memanglah uang Djepang jang ditjetak dengan tak ada perkiraan telah menimbulkan inflasi jang sehebat-hebatnja, dan inflasi itu kini dipusakai oleh Republik. Telah terkabar bahwa uang Republik akan keluar tetapi baru kabar-kabar sadja, sedangkan ekonomi dan peredaran uang harus berdjalan terus. Ditempat-tempat jang diduduki Sekutu, Belanda mentjoba menjiarkan uang Nicanja jang oleh Pemerintah Republik tegas dinjatakan tak laku dengan maklumat Residen pada tanggal 23 Maret 1946 jang berbunji :

PERINGATAN

Diperingatkan kepada rakjat umum, bahwa uang-uang Nica tidak laku sebagai pembajaran. Terhadap barangsiapa jang memperedarkan uang-uang tersebut akan diambil tindakan jang keras dan dianggap sebagai pengchianat bangsa.

Padang, 23 Maret 1946.
Residen Sumatera Barat,
Dr. M. Djamil glr. Dt. Rangkajo Tuo.

Tjara NICA melemahkan keuangan R.I.

Dengan keluarnya maklumat ini, bahkan lama sebelumnya maka Nica telah mendapat akal lain, yaitu mengambil persediaan uang kertas Djepang via Sekutu dan memakai uang kertas Djepang ini untuk membeli-beli bahan makanan dari rakjat. Kebanyakan uang yang dapat dirampas dari Djepang ini terdiri dari uang kertas 100 rupiah, yang dihabur-hamburkannya dengan tiada perkiraan, sehingga pasar menjadi dibandjiri uang kertas Djepang f 100 ini. Pemerintah berada pada posisi yang sulit. Akan dianggap uang Djepang ini tidak laku, ekonomi rakjat akan katjau-balau karenanya, karena belum ada uang Republik untuk pengganti uang Djepang ini. Akan dilakukan terus, berarti Nica dapat mengambil bahan makanan rakjat dengan semudah-mudahnya, berkat banyaknya persediaan uang Djepang yang dirampoknya via Sekutu itu. Ahli-ahli keuangan di Sumatera Baratpun pusing pula memikirkan. Umpamanya Saudara Anwar St. Saidi, direktur Bank Nasional dalam salah satu tjeramahnya mengusulkan agar, semua uang kertas Djepang yang berharga seratus rupiah disuruh simpankan ke Bank Pemerintah dengan syarat pembayaran kembali dalam jangka panjang dan jangan diperedarkan lagi. Akibatnya mengurangi sirkulasi uang dan terutama melumpuhkan tenaga-tenaga perlawanan Nica yang hampir semuanya terdiri dari uang kertas Djepang yang berharga f 100 itu.

Semua uang kertas Djepang yang berharga f 10,— dan f 5,— supaya disimpan ke Bank Pemerintah atau Bank yang dipertjakannya dengan ketentuan simpanan uang tersebut boleh mengambil kembali dengan batas yang ditentukan, dan terutama uang kertas yang kembali beredar ini musti ditjap dengan stempel baru Pemerintah R.I. Uang kertas f 10,— dan f 5,— dari Djepang yang tidak bertjap R.I. dianggap tidak laku.

Maklumat I.C.P tentang uang f 100,—.

Pokok pikiran dari Saudara Anwar St. Saidi ini lekas ditangkap oleh masyarakat, maklumlah masyarakat dalam revolusi, sehingga beberapa hari kemudian tertempellah dikota Bukittinggi dipelbagai tempat dalam pasar suatu maklumat yang menerangkan bahwa uang kertas 100 rupiah Djepang tidak berlaku lagi, maklumat mana ditandatangani oleh I.C.P. (International Communist Party). Dengan segera maklumat ini menimbulkan kesan yang hebat sehingga rakjat djadi bimbang dan tak mau lagi menerima uang kertas Djepang f100,— itu. Polisi terpaksa bertindak untuk mendjaga peredaran ekonomi, dan Kepala Polisi Bukittinggi mengeluarkan maklumat pada tanggal 27 Pebruari 1946 dimana ditegaskan bahwa uang kertas f 100,— tetap berlaku sebagai biasa, dan barangsiapa yang masih membuat kekatjauan dalam soal itu akan dituntut sebagaimana mestinya. Maklumat polisi ini dikuatkan lagi

oleh maklumat Kantor Wakil Pemerintah Urusan Umum No. 2-46 yang dikeluarkan sehari sudah itu.

Gara-gara uang kertas f 100,— Djepang ini belum berachir sehingga ini sadja, bahkan dimasukkan pula oleh musuh uang kertas Djepang yang berbahasa Inggeris, sehingga Residen Sumatera Barat mengeluarkan maklumat pula pada tanggal 11 Maret 1946 berbunyi sebagai berikut :

Maklumat Residen tentang uang f 100,—, 11 Maret 1946.

PERINGATAN

Kepada rakjat umum, bahwa sekarang mungkin ada dimasukkan kedaerah ini uang kertas Djepang harga f 100,— (seratus rupiah) yang sepintas lalu serupa dengan uang kertas yang laku sekarang, tetapi memakai perkataan dalam bahasa Inggeris. Uang kertas itu tidak laku, artinja palsu.

Padang, 11 Maret 1946
Residen Sumatera Barat.

Volksfront bertindak, 1 April 1946.

Dengan begini maka desas-desus tentang uang kertas f 100,— tidak laku itu makin mendjalar, dan dalam pada itu Nica semakin hebat djuga menghambur-hamburkan uang Djepang f 100,— ini. Keadaan semakin sulit, dan karena Volksfront telah diserahi kontrol ekonomi, maka tanggung-djawab dalam hal ini dirasakan oleh Volksfront terletak dipundaknja. Sebagai satu organisasi revolusioner maka Volksfront lalu bertindak tegas dengan mengeluarkan maklumat yang bersedjarah itu pada tanggal 1 April 1946 yang berbunyi :

MAKLUMAT VOLKSFRONT SUMATERA BARAT

Andjuran menjimpan uang kertas Djepang f 100,— di Bank.

Mengandjurkan kepada sekalian warganegara di Sumatera Barat untuk menjimpan uang kertas Djepang f 100,— (seratus rupiah) pada Bank Pemerintah atau Bank yang ditundjukan Pemerintah dalam tempo satu bulan ini, mulai tanggal 1 April 1946 sampai 30 April 1946.

Sesudah tanggal 30 April 1946 perputaran uang kertas Djepang f 100,— (seratus rupiah) tidak disahkan lagi.

Semua tjabang-tjabang dan anak-anak tjabang Volksfront harap mendjalankan maklumat ini.

1 April 1946.
Dewan Pimpinan
Volksfront
Sumatera Barat.

Rakjat ribut dan partai-partai tampil mengusahakan penjelesaian menurut tjara masing-masing pula. Umpamanja P.K.I. bertindak menetapkan harga barang-barang dipasaran Bukittinggi.

Sesudah itu Volksfront bertindak pula melandjutkan kontrole ekonominja tentang uang ketjil dan dibawah f 100,— (seratus rupiah Djepang) dengan maklumatnja pada tanggal 4 bulan April 1946, karena setelah uang kertas f 100,— (seratus rupiah) dibekukan, uang ketjil mendjadi sangat sukar sedangkan harga barang-barang naik.

Maklumat itu berbunji sebagai berikut :

MAKLUMAT VOLKSFRONT SUMATERA BARAT

Tidak boleh menjimpan lebih dari f 500,—

Barangsiapa menjimpan uang kertas ketjil (dibawah uang kertas seratus rupiah) lebih dari f 500,— (lima ratus rupiah) hendaklah memberitahukan pada Bank Rakjat Indonesia.

Barangsiapa menahan (menumpuk) uang kertas ketjil tersebut dengan tidak ada surat keterangan dari bank uang itu boleh disita.

Setelah utusan Volksfront Sumatera Barat dan utusan Divisi T.R.I. kembali dari Tapanuli maka dimaklumkan jang berikut ini:

1. Segala oto Sumatera Barat djangan berangkat dulu ke Tapanuli, menunggu datangnya utusan dari Tapanuli kemari.
2. Segala oto Tapanuli jang masih ada didaerah Sumatera Barat hendaklah selekasnja pulang ke Tapanuli.

Merdeka

Bukittinggi, 4 April 1946
Dewan Pimpinan Volksfront
Sumatera Barat.

Maklumat ini djatuh bergegar laksana sebuah bom dalam masjarakat Sumatera Barat. Menimbulkan pro dan contra jang hebat sekali, tetapi dalam kenyataan uang kertas f 100,— Djepang itu tidak diterima lagi oleh masjarakat. Oleh karena itu timbullah berbagai-bagai pendirian tentang maklumat Volksfront ini. Tuduannya jang baik untuk mematahkan usaha Nica itu telah menimbulkan kekalutan dalam ekonomi rakjat, terutama disebabkan hanja Sumatera Barat jang tidak menganggap laku, sehingga uang kertas f 100,— itu mengalir keluar, dan diperdjual belikan setjara speculasi sehingga sampai separo harga, dan tidak banjak jang masuk di bank. Uang ketjil mendjadi sulit, sedangkan harga barang-barang naik karena dikontrol, lenjap dari pasaran dan diperdjual-belikan setjara gelap. Memang pada tanggal 1 April

Residen Sumatera Barat telah mengeluarkan Maklumat No. 7-46 bahwa uang yang sudah robek-robekpun harus diterima asal direkat, tetapi oleh karena sulitnya uang ketjil, biarpun tak ada maklumat ini toch akan diterima orang djuga biarpun robek-robek.

Maklumat Residen. Uang f 100,— tetap berlaku, 5 April 1946.

Oleh karena sulitnya keadaan ekonomi akibat dari maklumat Volksfront ini, maka Pemerintah Sumatera Barat terpaksa bertindak dengan mengeluarkan maklumat lain besok harinja (tanggal 5 April 1946) yang menegaskan bahwa maklumat Volksfront itu hanjalah andjuran semata-mata, dan uang kertas f 100,— Djepang tetap laku, sedangkan kontrole ekonomi yang tadinja diserahkan kepada Volksfront diambil kembali oleh Pemerintah.

Maklumat Pemerintah itu selengkapnja berbunji sebagai berikut :

MAKLUMAT

10/46

KEPALA PEMERINTAHAN SUMATERA BARAT.

Diberitahukan bahwa andjuran dalam maklumat Volksfront tanggal 1 April 1946 yang bunjinja seperti berikut :

Maklumat Volksfront.

Andjuran menjimpan uang kertas Djepang f 100,— di Bank.

Mengandjurkan kepada sekalian warganegara di Sumatera Barat untuk menjimpan uang kertas f 100 (seratus rupiah) pada bank Pemerintah atau bank yang diundjukkan Pemerintah dalam tempo 1 bulan ini, mulai tanggal 1 April 1946 sampai 30 April 1946.

Sesudah tanggal 30 April 1946 perputaran uang kertas Djepang f 100 (seratus rupiah) tidak disahkan lagi.

Semua tjabang-tjabang dan anak tjabang-tjabang Volksfront harap mendjalankan maklumat ini.

1 April 1946.

Dewan Pimpinan

Volksfront Sumatera Barat.

hanja semata-mata andjuran sadja dan bukanlah berarti undang-undang Pemerintah, demikian djuga andjuran tentang menghilangkan uang kertas f 100,— dari masjarakat yang dimaksud dalam Permakluman Volksfront No. 1 tanggal 19 Maret 1946.

KESIMPULAN: Uang kertas f 100,— (seratus rupiah) laku terus.

Padang, 5 April 1946.

Residen Sumatera Barat,

Dr. Moh. Djamil glr. Dt. Rangkajo Tuo.

UANG KERTAS SERATUS SJAH LAKU !
MAKLUMAT No. 11/46
KEPALA PEMERINTAHAN SUMATERA BARAT.

Menjambung maklumat kita tanggal 5 April 1946 No. 10/46 dengan ini diberitahukan, bahwa barangsiapa jang menolak pembayaran atau tidak mau menerima uang kertas f 100,— jang dinjatakan laku oleh Pemerintah selama ini, ataupun mengatakan bahwa uang kertas itu tidak laku atau tidak akan dilakukan, akan ditangkap dan dihukum.

Padang, 6 April 1946.
Residen Sumatera Barat,
Dr. Moh. Djamil glr. Dt. Rangkajo Tuo.

Penjerahan kembali oleh Volksfront pada Pemerintah, 5 April 1946.

MAKLUMAT BERSAMA

Dalam permusjawaratan antara Pemerintah dengan Dewan Pimpinan Volksfront Sumatera Barat pada hari ini telah diperoleh kesepakatan seperti berikut :

1. Hak jang diberikan kepada Volksfront dalam rapat K.N.I. Sumatera Barat tanggal 18-3-1946 tentang melaksanakan kontrole ekonomi diserahkan kembali kepada Pemerintah.
2. Pemerintah akan membentuk satu Dewan Ekonomi Pemerintah jang diperserahi memikirkan dan melaksanakan kontrole ekonomi.

Dalam badan itu akan duduk ahli-ahli ekonomi dari kalangan rakjat dan partai-partai terutama orang-orang jang telah mengurus hal itu dalam Volksfront.

Bukittinggi, 5 April 1946.
Dewan Pimpinan Volksfront
Sumatera Barat,

Residen
Sumatera Barat.

Rombongan Pemerintah Pusat di Sumatera Barat, 17 April 1946.

Dalam pada itu sampailah di Sumatera Barat rombongan utusan Pemerintah Pusat jang terdiri dari Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin, Menteri Penerangan M. Natsir, Menteri Agama H. Rasjidi, beserta rombongan jang disambut di Bukittinggi dengan satu rapat raksasa tepat pada peringatan ulang bulan Kemerdekaan jang ke-8 tanggal 17 April 1946, dimana sehari sebelumnya, rombongan Menteri menghadiri pelantikan Opsir Sabilillah se Sumatera.

Berbagai-bagai soal pemerintahan dan ketenteraan diselenggarakan oleh rombongan ini, dan sesudah itu keluarlah Maklumat Gubernur Sumatera No. 8/MGS yang memutuskan membentuk K.N.I. di Propinsi, Keresidenan, Kota berotonomi dan lain-lain daerah yang dianggap perlu di Sumatera, dimana K.N.I. Daerah dijadikan Badan Perwakilan Rakjat Daerah, dan bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi dari padanya.

Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa oleh K.N.I. dipilih beberapa orang, sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai Badan Exe-cutief dan bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu. Selanjutnya Ketua K.N.I. yang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Perwakilan ini dan jika tidak ada Ketua lama, maka Wakil Ketua harus dipilih oleh rapat K.N.I. sendiri.

Dan dengan dihadiri rombongan, berlangsunglah beberapa peristiwa besar yang bersifat Sumatera di Bukittinggi, jaitu :

1. Sidang Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera.
2. Konperensi Persatuan Perjuangan se Sumatera.
3. Rapat para Residen se Sumatera.

Pembentukan Dewan Perwakilan Sumatera (D.P.S.), 17 April 1946.

Marilah kita djeladjah satu persatu !

D.P.S. (Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera) bersidang semendjak tanggal 17 April, dimana dilantik 100 orang anggotanya yang terdiri dari Saudara-saudara :

Atjeh : Sutikno Padmosumarto, T. Ismail Jacoub, Amelz, Afan Daulay, Mhd. Ibrahim Daud, Karim Mhd. Doerdjat, H. Mustafa Salim, Abd. Mukti, Mdh. Abduh Sjam.

Sumatera Timur : St. Seri Mulia, Amin Soetardjo, Lokot Batu-bara, Usman Effendi, Usman, Njonja Munar S. H., Abdullah Jusuf, Tama Ginting, Natar Zainuddin, Saleh Umar, S. M. Tarigan, Jusuf Abdullah, Kario Siregar, Nolong Sirait, Dr. Gindo Siregar, M. Hutasoit, S.M. Simatupang, Dr. R. Soenario, Hadji Abd. Rahmansjahab, Bachtiar Junus.

Tapanuli : Patuan Radja Natigor, S. M. Simandjuntak, Mr. R. L. Tobing, Radja Djundjungan, St. Mangaradja Muda, Sutan Naga, Bagindo Kalidjundjungan, Radja Barita Sinambela, S. Silitonga, Abd. Hakim, Washington Hutagalung.

Sumatera Barat : Chatib Suleiman, Aziz Chan, Darwis Ma'roef, Rangkajo Rasuna Said, Bariun A.S., Sidi Bakaruddin, Bagindo M. Tahir, Abdullah, Dt. Simaradjo, Bachtaruddin, Mr. M. Nasroen,

Jacoeb Rasjid, Sjarif Said, Sultani St. Malako, Mr. Nazaruddin, Marzuki Jatim, H. M. Joenoes, Roestam Thaib, A. Gafar Djambe.

Riau : Agus Ramadan, Amatsuka, Dt. Mangku, Rangkajo Azir, Burhanuddin.

Djambi : Abdul Chatab, Dr. Sjagaf Jahja, Sjamsul Bahroen, H. Nawawi.

Palembang : Josodipuro, A. Wahab, A. Gathmyr, Dr Isa, R. M. Utojo, Noeng Tjik, H. Tjik Wan, K. H. Malian Djaman, K. Hutabarat, A. Hamid Kemang, Basri, Pangeran Tjik Mat, Ir. Ibrahim, Agoes Rohcman, R. Sudamadi.

Lampung : Wan Abd. Rachman, Raden Abdoel Rasjid, H. Mhd. Toha. Ismail, Bermawi.

Bengkulu : Mhd. Ali Hanafiah, Rasjid Talib, Djadil Abdoellah, Raden Abdullah.

Bangka-Beliton : Suriaman, Ali Asgar.

Susunan Badan Pekerja D.P.S.

D.P.S. ini diketuai oleh Gubernur Sumatera sendiri, dan dalam rapat-rapat jang berikutnja dipilihlah mendjadi Wakil Ketua Dr. Gindo Siregar (Sumatera Timur), dan untuk Executief terpilih: Dr. Soenario (Sumatera Timur), Soetikno Padmosumarto (Atjeh), Mr. R. L. Tobing (Tapanuli), Mr. Mhd. Nasroen, (Sumatera Barat) dan H. Tjik Wan (Palembang).

Sumatera dibagi 3 Daerah Propinsi.

Tentang Pemerintahan Sumatera, berhubungan dengan daerahnja terlalu luas maka didalam pembagian administratifnja dibagi atas tiga daerah sub Gubernur, jaitu :

1. Sumatera Utara jang melingkungi keresidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli.
2. Sumatera Tengah jang meliputi Sumatera Barat, Riau dan Djambi.
3. Sumatera Selatan terdiri dari Palembang, Lampung, Bangkahulu dan Bangka Beliton.

Lalu ditentukan nama-nama daerah pemerintahan serta kepala-kepalanja jaitu, propinsi Sumatera dikepalai oleh Gubernur, Keresidenan dikepalai oleh Residen, Kabupaten (sekarang Luhak) oleh Bupati, Kewedanaan dikepalai oleh Wedana, Ketjamatan (Demang Muda) dikepalai oleh Tjamat, sedangkan tentang Negeri (Desa) akan diatur lebih djauh nanti dan buat sementara berdjalan seperti biasa.

Keuangan dipimpin oleh Fonds Kemerdekaan.

Tentang keuangan diputuskan, bahwa pemungutan bakti dari rakjat diselenggarakan dibawah satu pimpinan jaitu Fonds Kemerdekaan jang dipimpin oleh D.P.R. buat seluruh Sumatera.

Bea Tjukai dan Perdagangan diaktifkan, dan diserahkan kepada Badan Pekeraja untuk menjusun satu program tentang kemakmuran.

Konperensi Persatuan Perdjungan, 20 April 1946.

Konperensi Persatuan Perdjungan se Sumatera berlangsung pada tanggal 20 April 1946 dan pembukaannya dihadiri oleh rombongan Pemerintah Pusat, dengan dihadiri oleh utusan-utusan dari Atjeh, Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Djambi, Bangkahulu dan Palembang dibawah pimpinan Saudara Sarwono dari Pusat Persatuan Perdjungan Sumatera (Medan).

Sesudah mengadakan beberapa kali rapat tertutup, maka Persatuan Perdjungan Sumatera mengeluarkan resolusi sebagai berikut :

- a. Siap sedia mengorbankan segala-galanya mempertahankan Negara Republik Indonesia atas dasar kesatuan dan persatuan segala bagian-bagian Negara Republik Indonesia.
- b. Setia patuh kepada Pemerintah dan menaruh kepertjajaan sepenuh-penuhnya atas pimpinan Kabinet Sutan Sjahrir.
- c. Siap sedia memberantas, membasmi dan menghantjurkan segala sesuatu jang berupa aliran-aliran, gerombolan-gerombolan dan golongan-golongan jang mentjoba membelokkan dasar dan sikap PERSATUAN PERDJUANGAN se-Sumatera.

Bukittinggi, 22 April 1946.

Sekrertariat

Putjuk Pimpinan

Persatuan Perdjungan
Sumatera.

Konperensi Residen-residen Sumatera, 16 April 1946.

Dan dalam konperensi para Residen jang dimulai tanggal 16 April 1946, dan dihadiri oleh para Residen :

Atjeh	T. M. Daud Sjah
Sumatera Timur	Mr. Luat Siregar
Tapanuli	Dr. F. L. Tobing
Riau	Abd. Malik
Sumatera Barat	Dr. M. Djamil
Djambi	A. Manan (Wakil)
Palembang	Dr. A. K. Gani
Lampung	Raden Basjit (Wakil)
Bengkulen	Mr. Dr. Hazairin

dan Residen-residen d/p A. Xarim M.S., Dt. Perpatih Baringek serta Sekretaris Propinsi Mas Tahir, dan dihadiri djuga oleh

Wakil N.R.I. Adinegoro serta rombongan Pemerintah Pusat. Dalam konperensi yang dilakukan setjara tertutup ini dibicarakanlah segala sesuatu yang penting dalam mendjalankan pemerintahan yang memimpin perdjuaan kemerdekaan diseluruh Sumatera. .

**Maklumat Residen Sumatera Barat tentang uang f 100,—,
21 April 1946.**

Sekali lagi dinjatakan dalam satu maklumat Residen Sumatera Barat No. 12-46, bahwa menurut putusan konperensi para Residen se Sumatera, uang kertas Djepang f 100,— tetap laku, dan dihukum berat barangsiapa yang tidak mau menerima atau mengirakan bahwa uang kertas tersebut tidak laku atau akan tidak laku lagi, dan djuga orang yang menukar uang kertas tersebut dengan harga lebih rendah atau dibawah seratus rupiah.

Maklumat ini dikeluarkan pada tanggal 21 April, dimana njata benar bahwa masjarakat belum djuga lantjar menerima uang kertas seratus rupiah itu. Dalam keterangan dari maklumat ini, ternjata dari perkataan yang tadjam-tadjam didalamnja, sesuai keadaan masjarakat pada masa itu.

Dalam rapat Volksfront Sumatera dengan Paduka Tuan Gubernur dan Residen-residen serta wakil-wakil dari Kementerian di Djawa, Volksfront Sumatera telah berdjandji akan berdiri dibelakang Pemerintah dan sekalian tindakan-tindakan ataupun rantjangan-rantjangan yang hendak didjalankan terlebih dahulu akan dipermusjawaratkan dengan Pemerintah sebelum dilakukan. Oleh sebab itu sekalian maklumat-maklumat atau andjuran-andjuran yang tidak berasal dari Pemerintah tidak sjah. Kedaulatan Rakjat bukan berarti bahwa tiap-tiap orang atau golongan boleh berbuat sekehendak hatinja.

Makin hari keadaan ini semakin meningkat mendjadi conflict dan soal prestige antara Pemerintah dan Volksfront, sehingga keadaan memaksa Pemerintah Sumatera Barat untuk bertindak keras, djika ia tidak mau kehilangan prestigenja dimata rakjat.

Pemimpin-pemimpin Volksfront ditahan, 24 April 1946.

Dan pada tanggal 24 April 1946, Pemerintah mendjatuhkan pukulannja dengan menangkap keenam orang anggota Dewan Pimpinan Volksfront, jaitu Saudara-saudara Bachtaruddin, Suleiman, Chatib Suleiman, Bariun A.S., Basrah Lubis, dan Iskandar Tedjasukmana.

Penangkapan ini bergegar pula diseluruh Sumatera Barat, tak kurang hebatnja dari maklumat tentang uang kertas f 100,— itu. Serentak keluar pendjelasan dari Pemerintah Sumatera Barat, dari K.N.I. Sumatera Barat dan dari Kedjaksanaan Tinggi Sumatera

Barat — Riau tentangan soal ini, dimana ditegaskan bahwa waktu akan melakukan penahanan ini, Pemerintah Sumatera Barat, telah disepakati oleh Dewan Excecutief untuk melakukan penahanan tersebut, berdasarkan kepada perlu lekasnja kembali keamanan dalam negeri jang bersangkutan dengan penghidupan dan keadaan rakjat sehari-hari. Dan K.N.I. Sumatera Barat meminta kepada seluruh penduduk supaya tenang dan tenteram.

Demikianlah periode pemerintahan Residen Djamil dimulai dengan kedjadian-kedjadian jang hebat ini, dan dengan penuh kebidjaksanaan Pemerintah bertindak laksana seorang dokter (memang Residen Djamil seorang dokter ahli!) jang tempo-tempo mengadakan diagnose teliti, lalu mengambil putusan untuk mendjalankan operasi besar-besaran untuk menolong djiwa pasien jang sedang dihinggap demam revolusi extrim jang sangat tinggi temperatuurnja.

Dan penangkapan ini diiringi beresoknja dengan satu maklumat No. 13-46, dimana didjelaskan bahwa dilarang keras dengan tidak berhak melakukan perbuatan :

1. Memindahkan, membawa, mengambil dan mendjual barang-barang atau harta benda kepunjaan orang lain.
2. Membeli, menjimpan dan mempertukarkan barang-barang atau harta benda jang dimaksud di sub I.
3. Melakukan pengeledahan, penjitaan (pembersihan) atas barang-barang atau harta benda orang lain.
4. Merampas kemerdekaan atau melakukan pengeledahan atas diri orang lain.
5. Melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan jang dianggap atau dapat mengatjau perekonomian rakjat atau keamanan rakjat.
6. Meminta atau menerima uang jang merupai tjukai terhadap rakjat.

Pelanggaran-pelanggaran atas larangan tersebut dianggap sebagai perbuatan-perbuatan jang mengatjau Pemerintah N.R.I. dan akan dihukum berat.

Dibebaskan kembali, 22 Mei 1946.

Maka kegelisahan mulai reda, dan perekonomian berdjalan kembali seperti biasa, sehingga pada tanggal 22 Mei 1946 para pemimpin jang ditahan itu, lalu dibebaskan kembali dari tahanan.

Hal ini adalah sebahagian karena semakin memuntjaknja udara perdjuaan di Padang, sedangkan para pemimpin itu sangat diperlukan tenaganja dalam revolusi. Di Padang Belanda atas nama Sekutu telah melakukan banjak sekali penangkapan-penangkapan terhadap para pemimpin dan pemuda-pemuda pedjuang. Dengan tjara diplomasi insiden-insiden ini diurus oleh Pemerintah dengan pihak Sekutu, tetapi suasana dikota Padang makin suram dan tegang djuga.

10% Hasil padi buat Negara.

Dalam pada itu karena Volksfront telah ditjabut haknja untuk kontrole ekonomi dan fonds kemerdekaan, maka perbekalan perdjungan diusahakan oleh Pemerintah sendiri. Selama ini barisan-barisan jang tergabung dalam Dewan Perdjungan, jaitu satu bahagian dari Volksfront, dibelandjai oleh Volksfront, dan sekarang dibelandjai oleh Pemerintah. Untuk menjelenggarakan perbekalan ini jang berupa bahan makanan, maka Pemerintah Sumatera Barat memungut bakti dari rakjat sebanjak 10% dari hasil sabitan padi. Dalam maklumat No. 14-1946, Kepala Pemerintah Sumatera Barat meng-instruksikan bahwa menurut putusan dalam rapat para Bupati (Wali Luhak) seluruh Sumatera Barat pada tanggal 7 April 1946 jang dihadiri djuga oleh Dewan Executief K.N.I. Sumatera Barat, telah disepakati memungut bakti dari hasil sawah dipertahunan sekarang ini untuk keperluan negara jaitu 10% dari sabitannja.

Sebab itu diminta supaja sekalian warganegara jang mendapat hasil dari sawah akan menjerahkan sebagai bakti 10% dari hasil sawahnja pada satu komisi ditiap-tiap negeri jang terdiri dari Kepala Negeri sebagai ketua, dan sekurang-kurangnya dua orang anggota, dan jang 2 orang ini Wakil Komite Nasional.

Pada sekalian badan-badan, partai-partai, barisan-barisan, golongan-golongan dan perkumpulan-perkumpulan diminta memberi pertolongan pikiran dan tenaga.

Dengan inilah Pemerintah mengatasi kesulitan perbekalan perdjungan, dan sampailah kita kepada tanggal 1 Mei 1946 jang diperingati dengan besar-besaran diseluruh Sumatera Barat, jang mengapiakan semangat perdjungan terutama dikalangan buruh.

Pindjaman Nasional dilantjarkan.

Obligasi dari Pemerintah Pusat.

Dalam pada itu Pemerintah Pusat jang djuga menghadapi kesulitan dalam perbelandjaan perdjungan, lalu melantjarkan pindjaman nasional atau obligasi sedjumlah satu miljard (seribu djuta) terbagi atas andeel seribu rupiah, seratus rupiah dan lima ratus rupiah. Pindjaman Nasional diatur dengan undang-undang No. 4 dan akan diselenggarakan oleh Bank Negara Indonesia, dan pembayaran kembali didjamin oleh Pemerintah dengan hadiah 4%. Dari djumlah itu akan dikeluarkan 1000 djuta untuk pembangunan negara, sedangkan Sumatera mulanja akan mendapat 250 djuta, tapi kemudian diberi 500 djuta.

Dalam Undang-undang No. 4 itu didjelaskan bahwa Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mendjual surat-surat pengakuan hutang atas tanggungan negara dengan jang dipandangnja perlu untuk memperoleh uang sedjumlah seribu djuta rupiah, sedangkan

pendjualan tersebut dapat diselenggarakan, baik sekali gus sampai semua djumlah jang dimaksudkan dalam ajat ke-I, maupun berturut-turut sebagian-sebagian dari djumlah itu, pada waktu-waktu jang dipandang baik oleh Menteri Keuangan.

Pindjaman Nasional, 17 Mei 1946.

Pada tanggal 17 Mei 1946 keluarlah maklumat Gubernur Sumatera tentang pindjaman nasional dimana didjelaskan bahwa dari pindjaman jang seribu djuta ini sedjumlah 500 miljun dikeluarkan di Sumatera untuk keperluan Pemerintah Sumatera, dan didjelaskan pula bahwa surat pengakuan hutang ini dibayar kembali dalam 40 tahun dengan tjara undian. Pendjualan obligasi ini dilakukan atas pimpinan filiaal Bank Negara di Medan, Padang dan Palembang, mulai 1 Djuni 1946.

Jang hendak turut (segala golongan bangsa) dalam pindjaman ini hendaklah mendaftarkan nama, alamat, djumlah uang dan matjam obligasi jang dikehendaki pada Kantor Pemerintah (Wedana, Bupati, Residen, kantor-kantor pos dan kantor-kantor pembantunja, rumah gadai, Bank Rakjat Indonesia dan bank-bank jang ditundjuk oleh Residen.

Pembayaran dilakukan dengan tunai.

Kepada jang membayar diberi kwitansi sementara untuk ditukar kelak dengan obligasi atau kalau ini belum selesai dengan recieves (surat tanda penerimaan), kepada recieves mana ditjantumkan kupon-kupon jang djatuh pada tanggal 1 Djanuari dan 1 Djuli 1946.

Selandjutnja pada tanggal 21 Mei 1946 oleh Gubernur Sumatera dan Residen Sumatera Barat dikeluarkan satu maklumat bahwa mulai tanggal ini untuk penduduk jang hendak turut dalam pindjaman tersebut diberi kesempatan untuk mendaftarkan nama dan matjam obligasi jang dikehendaki pada kantor Pemerintahan, Kantor-kantor Pos, Rumah Gadai dan Bank Rakjat Indonesia.

Sementara itu kampanye dilakukan dengan sebesar-besarnja untuk melantjarkan pindjaman Nasional ini, dimana setiap partai dan golongan menjokong dengan sehebat-hebatnja.

Pengurus Pindjaman Nasional.

Di Sumatera Barat dibentuk Badan Pekerdja Pindjaman Nasional jang terdiri dari :

Ketua :

Marzoeki Jatim Executief K.N.I. Sumatera Barat.

Wakil Ketua :

P. S. Zainuddin, Kepala Madjelis Keuangan Pemerintah Sumatera Barat.

Setia Usaha :

B. Bachtiar, pengawas B.R.I. Sumatera Barat.

Anggota-anggota :

Sudibijo Kepala P.T.T. Sumatera Tengah, M. Taharuddin, Direktur Perseroan Bank Sumatera, Hasan Qalbi Notaris, Agus Sastradipradja, Kepala Kas Negara, Sofjan Wakil Direktur Bank Nasional, A. Hamid Wakil Direktur Bank Muslimin.

Penerangan serentak, 10 Djuni 1946.

Saranan tentang pindjaman nasional ini dipikulkan kepada Pedjabat Penerangan Sumatera Barat. Dan ditetapkan bahwa pada tanggal 1 Djuni 1946 Pemerintah memberi penerangan tentang pindjaman Nasional dalam Sidang Pleno K.N.I. Sumatera Barat, dan kira-kira tanggal 10 Djuni 1946 rapat penerangan dilakukan disetiap Kewedanaan jang dihadiri oleh Wedana, Tjamat-tjamat, Pengurus K.N.I. Tjabang, Wakil Kantor Pos dan Bank-bank, Wakil Tjabang-tjabang Partai dan perkumpulan, serta orang-orang jang terkemuka. Rapat ini harus diurus oleh K.N.I. tjabang.

Kira-kira tanggal 15 Djuni rapat penerangan dilangsungkan diketjamatan dan dihadiri oleh Tjamat, para Kepala Negeri, Wakil ranting-ranting partai dan perkumpulan, serta orang-orang jang terkemuka. Rapat ini diadakan oleh Tjamat disetiap ketjamatan seluruh Sumatera Barat.

Penerangan seterusnya didalam negeri dilakukan oleh Kepala Negeri, K.N.I. dan pengurus partai dan perkumpulan.

Dengan tjara begini maka berlakulah kampanye besar-besaran tentang pindjaman Nasional ini, dan terselenggarakan dengan itu perbelanjaan untuk perjuangan dan Pemerintahan.

Mendirikan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian dilakukanlah langkah selanjutnja untuk mendemokratisir pemerintahan, dengan membentuk Dewan Perwakilan Negeri, disetiap negeri diseluruh Sumatera Barat.

Sebelum mendjalankan usaha-usaha besar ini, Pemerintah memperkuat dirinja dengan membentuk pedjabat-pedjabat baru, jaitu Pedjabat Agama, jang diketuai oleh Saudara Hadji Nasrudin Thaha, Pedjabat Sosial jang diketuai oleh Saudara B. M. Tahar, dan Pedjabat Penerangan jang diketuai oleh Saudara Fachruddin Husaini dan Wakil Ketua Saudara M. Rasjid Manan. Dan dibentuk Dewan-dewan disamping beberapa Djawatan jang akan bertindak sebagai badan Pemikir dan Perantjang kemandjauan djawatan-djawatan tersebut.

Pengresmian Djawatan dan Dewan-dewan, 17 Mei 1946.

Dewan-dewan ini ialah Dewan Ekonomi jang diketuai oleh Saudara S. M. Latif, Dewan Kepolisian jang diketuai oleh Saudara Udin, Panitia Pembangun D.P.R. diketuai oleh Saudara Marat A. Munit, Badan Fonds Kemerdekaan jang diketuai oleh Saudara

Hasan Qalbi gelar Dt. Radjo Adil, Penjelidik Anggaran Gadji Pegawai Negeri diketuai oleh Saudara St. M. Djosan.

Peresmian semua Djawatan dan Dewan ini dilakukan oleh Residen tepat pada hari 17 Mei hari peringatan Kemerdekaan jang ke-9 bulan bertempat di Padang.

Pengumpulan sendjata, 15 Djuni 1946.

Dalam lapangan kepolisian diadakan sekolah Polisi Istimewa Sumatera Barat dan diresmikan pada tanggal 18 Mei 1946 untuk memperkuat barisan Kepolisian jang akan mendjamin keamanan dalam negeri. Dan oleh karena memuntjaknja perdagangan sendjata gelap, jang memang sudah semestinja dalam masa revolusi, untuk menghindarkan kekatjauan dan djatuhnja sendjata ketangan jang tak berhak, maka diperintahkan mendaftarkan sendjata jang dipunyai oleh barisan-barisan dan rakjat umum sebelum tanggal 15 Djuni 1946, dan sendjata-sendjata jang tidak didaftarkan pada tanggal tersebut akan dibeslag.

Sidang K.N.I. ke-VI, 3 Djuni 1946 mendjernihkan suasana.

Dan sebelum mendjalankan usaha mendemokratisir pemerintahan sampai kenegeri-negeri ini, terlebih dahulu udara dibersihkan antara Pemerintah dan Persatuan Perjuangan, jang selama ini agak suram berhubung dengan penangkapan terhadap Dewan Pimpinan Volksfront sebelum ini, jang walaupun telah dibebaskan, tetapi untuk mempererat hubungan dan mendjernihkan suasana, diberilah kesempatan dalam Sidang Pleno K.N.I. jang ke-VI bertempat di Padang Pandjang mulai tanggal 3 Djuni 1946, untuk membukakan segala jang terasa dan membeberkan isi hati, jang dipergunakan dengan sepenuhnya oleh para pemimpin Volksfront tersebut.

Dalam pembitjaraan jang tadjam-tadjam, tetapi dalam suasana persaudaraan, para pemimpin Volksfront membuka isi hatinja, mengemukakan apa jang terasa pintjang, dalam 59 pasal dan menegaskan hasrat dan tudjuan mereka jang sebenarnja, jaitu untuk mengabdikan dan berbakti kepada Nusa dan Bangsa Indonesia Merdeka.

Lima puluh sembilan pasal „serangan” ini, kemudian didjawab satu persatu oleh Badan Pekerdja K.N.I. Dan sesudah itu djernihlah udara dan diperbintjangkanlah dengan sedalam-dalamnja tjara melantjarkan pindjaman Nasional dan demokratisering pemerintahan.

Demikianlah psychologie rakjat Sumatera Barat, jang asal diberi kesempatan untuk membuka isi hati sanggup menerima kebenaran walau bagaimana pahitnja sekalipun.

Pembentukan Dewan Perwakilan Negeri (D.P.N.), 21 Mei 1946.

Iniilah sebenarnja tugas jang historis dari pembentukan D.P.N. jang diatur dengan maklumat Residen Sumatera Barat No. 29-1946 jang mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 1946 itu.

Uraian lengkap tentang D.P.N. dan Kerapatan Negeri ini boleh pematja teliti lebih landjut dalam buku ini dibahagian Perkembangan Demokrasi, dan disini hanja akan ditindjau dari segi pemerintahan sadja.

Tidaklah mengherankan djika Maklumat No. 29 ini mendapat tentangan dari Ninik Mamak jang berkumpul didalam MTKAAN, jang memadjukan mosi menolak keputusan Sidang Pleno K.N.I. Sumatera Barat jang berhubungan dengan pembentukan susunan Badan Perwakilan Rakjat dinegeri, karena kerapatan negeri jang sekarang telah bersifat kedaulatan rakjat jang sedjati.

Mosi ini didjawab oleh Pemerintah bahwa Pemerintah tetap menjetudjui garis-garis jang telah ditetapkan oleh rapat lengkap K.N.I. Sumatera Barat tentang D.P.N., sedangkan D.P.N. ini tidaklah akan memasuki lapangan adat jang tetap dalam kompetensi kerapatan negeri. Tegasnja mosi MTKAAM ini ditolak oleh Pemerintah. Dengan terlaksananja Peraturan Pemerintah No. 29 ini, berdirilah Dewan Perwakilan Negeri dengan Dewan Harianja setiapi negeri jang banjaknja 500 buah di Sumatera Barat, dan dipilihlah Wali Negeri jang kebanyakan didapat oleh pemuda-pemuda revolusioner.

Maka sampailah kita kepada hari peringatan 10 bulan kemerdekaan jang dipenuhi dengan udara D.P.N. dan Pindjaman Nasional.

Pembentukan D.P.D. Sumatera Barat, 6 Djuli 1946.

Pada tanggal 28 Djuni 1946 dimaklumkan oleh Presiden keadaan Negara dalam bahaya dan dibentuk **Dewan Pertahanan Negara** jang terdiri dari Perdana Menteri, beberapa orang Menteri, Panglima Besar T.K.R. dan 3 orang wakil Organisasi Rakjat. Pun didaerah ditetapkan, bahwa harus dibentuk **Dewan Pertahanan Daerah** jang terdiri dari Residen dan 2 orang anggota Dewan Executief D.P.R. Keresidenan, Komandan Tentera Tertinggi dalam daerah itu, dan 3 orang dari Organisasi Rakjat didaerah itu. Residen dan Komandan tentera mendjadi anggota karena djabatannja dan anggota-anggota lainnja diangkat oleh Ketua Dewan Pertahanan Daerah atas usul Dewan Pertahanan Daerah dan disahkan oleh Ketua Dewan Pertahanan Negara. Ketua D.P.D. ialah Residen, Wakil Ketuanja Komandan Tentera.

Sesampainja pengumuman ini di Sumatera Barat, segeralah diusahakan pelaksanaannja, dan pada tanggal 6 Djuli 1946 diresmikanlah terbentuknja D.P.D. Sumatera Barat, jang merupakan suatu badan jang mempunjai kekuasaan jang tertinggi didaerah, sebagai satu pemusatan (konsentrasi) tenaga dan kekuatan antara Pemerintah, tentera dan rakjat.

Dengan Maklumat Residen Sumatera Barat No. 32-46, diumumkanlah susunan jang pertama dari D.P.D. Sumatera Barat ini jang terdiri dari :

- a. Ketua : Residen Sumatera Barat Dr. M. Djamil.
- b. Wakil Ketua : Divisi Komandan, Kolonel Dahlan Djambe.
- c. 2 Orang executief : Mr. Rasjid, Dr. A Rahim Usman.
- d. 3 Orang Wakil organisasi : Duski Samad, Bachtaruddin dan Abdullah.

Susunan ini kemudian kerap kali berubah dengan adanya mutasi-mutasi dalam lingkungan Pemerintahan Sumatera Tengah, tetapi D.P.D. tetap berdiri dalam kewadjabannya sebagai pusat djala pumpunan ikan dari kendali perdjuaan di Sumatera Barat.

Dr. M. Djamil djadi Gubernur Muda Sumatera Tengah, 2 Djuli 1946.

Dalam pada itu pada tanggal 2 Djuli 1946, keluarlah surat ketetapan Gubernur Sumatera No. 134 jang isinja menetapkan Residen Dr. M. Djamil mendjadi Gubernur Muda Sumatera Tengah jang sebagaimana kita njatakan sebelum ini, bahwa Sumatera Tengah didjadikan satu sub Propinsi.

Mr. St. M. Rasjid djadi Residen Sumatera Barat, 20 Djuli 1946.

Dan untuk menetapkan pengganti beliau sebagai Residen Sumatera Barat, pada tanggal 20 Djuli diadakanlah Sidang Pleno K.N.I. Sumatera Barat untuk memilih tjalon Residen jang akan diusulkan kepada Pemerintah. Dalam mana dipilih Mr. St. M. Rasjid sebagai tjalon jang kemudiannya ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Residen Sumatera Barat.

MASA PEMERINTAHAN RESIDEN Mr. St. M. RASJID.

Susunan Executief Sumatera Barat, 20 Djuli 1946.

MASA pemerintahan Dr. Djamil boleh dikatakan diakhiri dengan peringatan bulan kesebelas dari kemerdekaan, tetapi ketika Komite Nasional bersidang pada tanggal 20 itu masih dibawah pimpinan beliau. Dalam sidang ini setelah ditjalonkan Mr. M. Rasjid mendjadi Residen Sumatera Barat untuk ganti Dr. M. Djamil, maka dibaharui susunan executief, jang bersifat koalisi dari partai-partai jang terdiri dari Saudara-saudara Iskandar Tedjasukmana (Partai Sosialis, P.K.I. dan P.B.I.) Sidi Bakaruddin (Pemuda) B. Azizchan (Partai-partai Islam) Sofjan (Ekonomi) Orangkajo Ganto Suaro (P.N.I., MTKAAM). Djuga dipilih anggota D.P.D. dari organisasi Rakjat dengan hasil sebagai jang telah diterangkan sebelum ini.

Sementara itu keadaan diibu kota pemerintahan Sumatera Barat jaitu Padang, telah semakin lama semakin panas djuga, dan bebe-

rapa djawatan keresidenan telah diangsur memindahkannya ke Bukittinggi. Sekutu jang didalam kantongnja berada tentera Belanda telah semakin mengganas. Mulanja mereka menetapkan djam malam untuk kota Padang dimana penduduk tidak boleh keluar malam, tetapi setelah diprotes oleh Kepala Polisi Kota Padang, Johny Anwar, atas nama Pemerintahan R.I., maka djam malam ini kemudian dihapuskannya, tetapi gangguan-gangguan masih tetap ada.

Mr. Abubakar Djaar dibebaskan dari tugas Wali Kota Padang, Agustus 1946.

Walikota Padang Saudara Mr. Abubakar Djaar karena mendapat tugas jang lain sebagai Residen Sumatera Timur, dibebaskan dari tugasnja sebagai Walikota Padang, jang dalam situasi begitu memang satu kewadjiban jang amat berat. Permulaan bulan Agustus 1946 tiba dibulan puasa, Sekutu/Nica pada pukul 9.30 pagi menduduki kantor Demang Luar Kota Padang dan Kantor Pemerintahan jang lain. Para pemuda mendjadi marah melihat hal ini, dan pertempuran pun segera terdjadi, dimana tentera Sekutu melepaskan mortir. Pertempuran menerus sampai tengah malam jang mengakibatkan kebakaran pada beberapa tempat. Tanggal 2 tentera Sekutu melarikan 2 orang gadis dari P.M.I. dan membakar mesdjid di Anduring, Kota Padang, dan dalam pertempuran telah gugur Saudara Hamid Rachman, Grifir Pengadilan Negeri Kota Padang jang turut bertempur. Orang-orang tahanan dirumah pendjara Simpang Haru dilepaskan oleh Sekutu, sehingga dikota Padang berkeliaran para pendjahat jang telah mendapat hukuman dari Pemerintah kita itu. Sekutu bertindak terus menurunkan bendera Merah Putih dari gedung-gedung orang Indonesia.

Mr. St. M. Rasjid ditangkap Belanda, Agustus 1946.

Kerusuhan ini kemudian memuntjak pada hari-hari sebelum perajaan setahun kemerdekaan, dimana Sekutu sesudahnja menu-runkan bendera Merah Putih dari kilang kain R.I. jang diiringi oleh insiden-insiden, lalu menangkap Residen Sumatera Barat, Mr. St. M. Rasjid dan Johny Anwar, Kepala Polisi Kota Padang. Penangkapan ini dilakukan oleh pihak Sekutu dengan memantjing supaya Residen dan Kepala Polisi Kota Padang datang ke Markas-nja buat membitjarakan keamanan; kemudian Sekutu meminta dikembalikan Salim Lenggang kaki-tangan Nica sebagai tukaran-nja; hal mana menimbulkan kemarahan besar dari rakjat seluruh-nja. Gubernur Muda Sumatera Tengah Dr. M. Djamil lalu bertindak tjepat-tjepat dengan datang sendiri ke Markas Sekutu memprotes kjadian ini, sehingga kedua pembesar itu dibebaskan, dan Sekutu mengadjak Pemerintah Sumatera Barat untuk berunding membitjarakan penjelesaian keadaan.

Dan setibanja Residen di Bukittinggi untuk menghadiri perajaan setahun merdeka, maka Pemerintah mengeluarkan satu maklumat No. 45/46 jang berbunji sebagai berikut :

Seruan kerdjasama dari Residen, 14 Agustus 1946.

1. Musuh kita kian membuktikan niatnja memperkosa negara kita. Berhubung dengan ini maka Pemerintah memusatkan segenap pikiran, tenaga dan usaha-usaha untuk perjuangan.
2. Maka kepada rakjat jang berada dibelakang medan-medan pertempuran, tidak habis-habisnja diserukan supaja semangat usaha dan pengorbanan tetap setara dengan hebatnja perjuangan, sehingga dibelakang pemuda-pemuda kita jang siang malam gugur sebagai pahlawan terus dikerahkan pikiran, tenaga, usaha dan harta untuk kepentingan perjuangan dan pembangunan negara, sehingga mendjadi perjuangan raksasa.
3. Kepada pedjabat-pedjabat, pamongpradja dan seluruh pegawai negara diserukan supaja memimpin rakjat dengan sebaik-baiknya dalam pengerahan tersebut diatas.
4. Untuk perjuangan dan pembangunan negara tidak ternilai usaha dan harta untuk kepentingan perjuangan, kepentingannja organisasi-organisasi rakjat, Partai-partai Politik, Perkumpulan-perkumpulan Agama, Sosial dan Ekonomi, Serikat-serikat Buruh dan Tani, Gerakan-gerakan Pemuda dan Barisan-barisan.

Maka kepada organisasi-organisasi tersebut, lebih-lebih kepada **Persatuan Perjuangan** sebagai gabungan dari segala organisasi-organisasi, dengan ini diserukan supaja bekerdja sama dengan Pemerintah dalam usaha mengerahkan rakjat, memperhebat tenaga perjuangan ini.

Bukittinggi, 14 Agustus 1946.
Residen Sumatera Barat,
Mr. St. M. RASJID.

Aziz Chan diangkat mendjadi Walikota Padang, 15 Agustus 1946.

Pemerintah merasa perhatian harus dipusatkan kepada mempertahankan kekuasaan Pemerintah Sipil N.R.I. di Kota Padang jang telah sangat terantjam itu. Lowongan kedudukan Walikota tentu semakin menjulitkan keadaan. Maka djatuhlah pilihan kepada diri Saudara Azizchan untuk memikul djabatan dizaman jang sangat sulit itu. Djabatan penting, tetapi berbahaja itu diterimanja dengan utjapan „Bismillah”.

Keangkatannja mendjadi Walikota ini disambutnja dengan satu siaran jang berbunji antara lain-lain sebagai berikut :

Tanggal 16 menghadap 17 Ramadhan berdekatan benar dengan turunnja Al-Qur'anul Karim, sebagai kurnia Allah Subhanahu-wata'ala dalam suatu kerapatan lengkap Badan-badan Pemerintah-

an resmi N.R.I. Sumatera Barat dengan pimpinan P.T. Residen Sumatera Barat, jang dihadiri pula oleh P.T. Gubernur Muda Sumatera Tengah dan Gubernur Muda Sumatera Selatan, merangkap Wakil Menteri Pertahanan N.R.I. di Sumatera, oleh P.T. Gubernur Muda Sumatera Tengah, dengan persetujuan suara bulat dari hadirin, telah diangkat saja memangku djabatan : Walikota Padang.

Angkatan ini saja terima dan sambut dengan utjapan hati : „Allahuakbar, fi Sabilillah”.

Atas kepertjajaan Pemerintah kita menjerahkan pimpinan Daerah Kota Padang, jang hanja Allah jang lebih mengetahui hebat dan genting keadaannja, saja sungguh banjak-banjak mengutjapkan terima kasih.

Dalam usaha beladjar memperkokoh susunan kesempurnaan kemerdekaan Negara dan Bangsa kita, dibahagian mana sadja dari pada garis muka atau belakang sama ada sukar dan manisnja. Kian banjak anggota masjarakat kita beroleh Takdir Allah berdjwa besar, berachlaq mulia, petundjuk dan alat-alat zahir bathin seterusnja, kian tjepatlah sempurna Kemerdekaan Bahagian-bahagian Dunia seluruhnja memperbanjak Do'a kehaderat Allah beroleh kesuburan perbendaharaan alam : fikir, rasa, perbuatan.

Tegur sapa, nasehat, dan bantuan Saudara-saudara semuanya zahir bathin, saja harapkan dengan sangat.

Kepada Allah djuga kita mohonkan Taufik Hidajah dan kepada Nja djua kita memulangkan segala djasa dan pudji. Insja Allah !

Bukittinggi, 15 Agustus 1946

AZIZ CHAN.

Tjahaja Padang.

Djabatan jang penting dan sulit ini dipikul oleh Saudara Aziz Chan dengan tugas mempertahankan Pemerintahan Sipil R.I. di kota Padang ditengah-tengah tentera musuh jang semakin lama semakin mengganas. Sebagai siaran kepada rakjat dikota, diterbitkannja suratkabar **Tjahaja Padang** jang membawa suara R.I.

Kemudian udara perdjuangan dipenuhi oleh peringatan-peringatan setahun kemerdekaan jang mana adalah buat pertama kalinya dirajakan diseluruh Indonesia Merdeka. Sebelum ini kemerdekaan dirajakan setiap bulan karena umurnja barulah berbilang bulan pula.

Pidato Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan Perdana Menteri Sjahrir didengarkan dengan chidmat diseluruh Sumatera Barat dimana jang ada radio, dan didengungkan oleh surat-surat kabar.

Dalam rapat raksasa dipangung Merdeka Bukittinggi, dimajukan resolusi jang isinja tetap siap sedia dan patuh kepada pimpinan Presiden N.R.I. dan memperkuat kebulatan tekad meneruskan

perjuangan untuk kemerdekaan yang abadi dan tetap memperkuat kesatuan Djawa dengan Sumatera khususnya dan kesatuan Indonesia umumnya.

Perundingan dengan Belanda/Sekutu, 15 Agustus 1946.

Suasana di Padang telah agak mulai tenang sesudahnya pertemuan yang diadakan antara Pemerintah Sumatera Tengah dengan pihak Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1946.

Dalam pertemuan itu hadir dari pihak R.I.: Dr. M. Djamil Gubernur Muda Azizchan Walikota Padang dan Azhari Kepala Polisi Sumatera Barat, sedangkan dari pihak Sekutu hadir: Brigadir Thompson, Major Fischer, dan Kapten Gilman, dimana pihak Sekutu berdjandji dimasa yang akan datang akan kerdjasama 100% dengan pembesar-pembesar Indonesia untuk mendjaga keamanan. Dibicarakan djuga beberapa soal technis tentang soal-soal Post, S.S., dan Kepolisian.

Tapi walaupun bagaimana keadaan di Padang tetap suram, karena setiap perdjandjian yang dibikin itu hanjalah dibikin oleh Sekutu untuk dilanggar saja, dan rakjatpun mengungsilah berbondong-bondong ke Padang Darat yang dikatakan daerah pedalaman itu.

Suasana Padang pada 'Idulfitri, 27 Agustus 1946.

Begitulah dimalam beresoknja akan Hari Raja pada tanggal 27/28 Agustus terdjadilah pertempuran dimana pada kurang-lebih pukul 1.30 kota Padang telah merupakan lautan api, dengan terbakarnya tiga tempat didekat Tabing, Kantin dan Simpangharu. Dan pertempuran terdjadi pula di Teluk Bajur sampai djam 4 pagi. Beresoknja Hari Raja 'Idulfitri sedang orang ber-Hari Raja, musuh me-mobilisir seratus trucknja untuk menjerang kembali, tetapi tak djadi dilangsungkannja.

Demikianlah keadaan di Padang, tetapi di Pusat Pemerintah Sumatera Barat yang telah dipindahkan ke Bukittinggi tetap berlangsung usaha-usaha besar untuk konsolidasi pemerintahan. Dalam lapangan pertahanan dibentuk Koordinasi Pertahanan Propinsi Sumatera, yang diketuai oleh Gubernur T. M. Hassan. Wakil Ketua Dr. A. K. Gani Wakil Kementerian Pertahanan di Sumatera, Sekretaris, Kolonel Hassan Kasim dan anggota-anggota Let. Jenderal Suhardjo, dan Dr. Gindo Siregar Wakil Ketua D.P.S.

Dalam lingkungan Sumatera Barat diadakan perbaikan tentang gadji pegawai yang telah sangat menderita oleh inflasi, dengan menetapkan Peraturan Gadji Sementara Pegawai R.I. Sumatera Barat dimana diletakkan gadji paling tinggi Rp. 88,— dan permulaan paling rendah Rp. 40,— dan diberi tulag tempat,

10 sampai 15%, tulag kemahalan 10%, tulag keluarga Rp. 2,— setiap anggota keluarga, tulag perang 20% pun diadakan pula tulag luar biasa.

Dalam lapangan ketenteraan di Sumatera Tengah berlangsung pertukaran Divisi Komandan dari Kol. Dahlan Djambek kepada Kol. Ismael Lengah, dan Kol. Dahlan Djambek diangkat menjadi Kepala Sub Komandemen Seksi II. Dalam lapangan perdjuaan rakjat diadakan pula aturan-aturan mobilisasi dan kordinasi perdjuaan oleh Dewan Perdjuaan jang didirikan disetiap kere-sidenan, bertjabang dikabupaten/kota, dan beranting dinegeri.

PERDJUANGAN DI PADANG MENINGKAT LAGI.

Belanda mentjoba menanamkan kekuasaan, 6 September 1946.

Dengan pengumuman resmi dari London pada bulan September, bahwa tentera Inggeris-India akan ditarik dari Indonesia pada tanggal 30/11-1946, maka mereka berangsur-angsur menjerahkan kekuasaannja kepada tentera Belanda dan Pemerintah Sipil Belanda (N.I.C.A.).

Keadaan di Padang menghebat pula kembali berupa pertempuran-pertempuran dan perampokan-perampokan, jang diprotes oleh rakjat Sumatera Barat dengan perantaraan Persatuan Perdjuaan Sumatera Barat, terutama tentang tindakan Sekutu hendak menjerahkan pemeriksaan orang tahanannja kepada Pemerintah Belanda, jang mana dinjatakan dengan surat kepada tuan Aziz Chan Walikota Padang sebagai berikut :

Kepada tuan Aziz Chan.

Beberapa orang Indonesia jang dipendjarakan (Sekutu) dihadapkan kedepan pengadilan Belanda pekan ini (6-9-'46).

Adakah tuan bermaksud untuk memberi mereka hakim pembela ?

dto.
COOPER.

Walikota membalas surat sebagai berikut :

Tuan Cooper HQ Padang B.B.E.

Pemerintahan Republik saja tidak mengizinkan pemeriksaan perkara matjam manapun oleh Belanda. Putjuk pimpinan tentara Sekutu sepatutnja menjerahkan perkara itu kepada Pengadilan Indonesia. Sesungguhnja saja bersama ini memprotes.

Kemudian atas usaha Kepala Polisi Kota Padang, hanja dibolehkan mengantarkan makanan buat orang tahanan Sekutu itu.

Poh An Tui Organisasi Tionghoa.

**Rombongan Pemerintah dan Persatuan Perdjuaan
ke Padang Luar Kota, 8 Oktober 1946.**

Selama bulan September kerap kali terdjadi pertempuran dan Divisi Komandan jang baru, Kol. Ismail Lengah mengadakan pemeriksaan ke front-front di Padang untuk menghebatkan per-djuangan. Dan diawal Oktober Sekutu menahan pengangkutan cement dan diambilnja untuk kepentingannja.

Bangsa Tionghoa di Padang mendirikan Barisan Poh An Tui, untuk mendjaga keamanan Tionghoa. Disamping itu disekeliling tempat kediaman mereka jang disebut dengan kampung Tionghoa dipagar dengan kawat berduri. Pada tanggal 8 Oktober rombongan Pemerintah dan Persatuan Perdjungan datang mengundjungi daerah Padang Luar Kota untuk menjusun dengan lebih rapi akan taktik perdjungan kita disana.

KEGIATAN-KEGIATAN DILAPANGAN EKONOMI.

Konperensi Kemakmuran, 1 Oktober 1946.

SEBAGAI kita uraikan sebelum ini, bahwa beberapa djawatan Keresidenan jang usahanja terletak dilapangan kemakmuran seperti Perekonomian, Bank dan Dagang, Pertanian, Perikanan, Koperasi. dikoordinir mendjadi satu djawatan jang dinamakan Djawatan Kemakmuran jang dikepalai oleh Saudara Chatib Suleiman. Pada tanggal 1 Oktober diadakan satu konperensi Kemakmuran se Sumatera Barat, jang dihadiri oleh para saudagar se Sumatera Barat. Dalam konperensi itu dimadjukan beberapa tjara-tjara berusaha, dan ditetapkan beberapa keputusan sebagai berikut :

1. mengandjurkan kepada Pemerintah buat menetapkan satu pimpinan ekonomi.
2. memusatkan keuangan kepada Bank-bank dan mengatur pembayaran dengan cheque, giro dan sebagainja.
3. Menentukan kedudukan dari Bank-bank jang ada sekarang, jang sedang diselenggarakan oleh satu Komisi jang mengkoordinir Bank-bank jang ada di Sumatera Barat ini.
4. Untuk memberikan penerangan serta rantjangan pengatur lanjutarkan pembentukan bank-bank, N.V., Veem, dan sebagainja diserahkan kepada pusat Persatuan Saudagar Sumatera Barat bersama Djawatan Kemakmuran Sumatera Barat.

Dalam pada itu Persatuan Saudagar akan dibaharui susunannja agar lebih dapat memikul tugasnja selaku pengendali ekonomi.

Peraturan melipat-gandakan makanan, 30 September 1946.

Dalam menghadapi perdjungan, soal makanan adalah soal terutama, untuk mendjamin persediaan makanan tentera dan barisan-barisan serta pegawai negeri dan rakjat didaerah minus. Untuk menambah hasil makanan ini, maka Pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan sebuah peraturan pada tanggal 30 September 1946

jang dinamakan peraturan Melipat Gandakan Hasil Makanan, dimana kepada D.P.N. disetiap negeri (Dewan Hariannja) dengan bermufakat dengan wakil pedjabat Pertanian harus menetapkan dan menundjukkan tanah jang mesti ditanami, dan matjam makanan jang akan ditanam, waktu dan tjara menanam serta siapa-siapa jang akan menanam, bila ada kedapatan tanah kosong jang tidak ditanami berupa gurun dan sebagainya. Pelanggaran atas peraturan ini diantjam dengan hukuman kurungan dan denda.

Angin Linggardjati berhembus.

Dengan diparaafnja rentjana persetudjuan Linggardjati pada 15 Nopember 1946, dan disiarkannja teks persetudjuan itu dengan seluas-luasnja, berembuslah angin Linggardjati dalam suasana perdjuaan Sumatera Tengah chususnja dan Indonesia umumnja. Hal ini membawa berbagai-bagai akibat jang luas sekali dalam segala lapangan penghidupan dan alam pikiran rakjat.

Pada suatu pihak pasal-pasal dari naskah ini jang memuat pengakuan Belanda setjara de fakto atas Republik Indonesia di Djawa dan Sumatera, menimbulkan suatu rasa kegembiraan jang diiringi kelegaan karena telah tertjapai satu tingkat jang tertentu dalam perdjuaan kemerdekaan. Dilain pihak terbatasnja pengakuan ini pada de fakto dan kepada Djawa dan Sumatera, menimbulkan ragu-ragu atas kokohnja dasar naskah ini, karena udara telah lama diratjuni oleh sifat selalu mungkir djandji dari Belanda.

Rombongan Pemerintah Pusat di Sumatera Barat, 8 Desember '46.

Maka Pemerintah Pusat lalu mengutus Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin dan Menteri Kemakmuran Dr .A. K. Gani bersama Let. Djenderal Urip untuk membentangkan pendjelasan tentang Naskah Linggardjati ini di Sumatera, jang tiba di Medan pada tanggal 5 Desember 1946, dan setelah memberi penerangan-penerangan di Medan serta menjelesaikan soal garis demarkasi di Medan, lalu menudju ke Bukittinggi dan sampai pada hari Minggu 8 Desember 1946. Malamnja terus diadakan rapat bertempat di Gedung Penginapan Tamu Agung dengan pemimpin-pemimpin tentera, Pamongpradja dan pemimpin Partai dan Barisan Rakjat. Dalam rapat jang diketuai oleh Residen Sumatera Barat Mr. St. M. Rasjid. Menteri Amir dan Gani memberi pendjelasan tentang Naskah Linggardjati jang telah diparap itu dan sekarang sudah diserahkan kepada K.N.I. Pusat oleh delegasi Indonesia dan kepada Parlemen Belanda oleh delegasi Belanda.

Dalam kalangan ketenteraan, maka rentjana persetudjuan jang didalamnya djuga berisi ketentuan gentjatan sendjata jang telah diangsur memperundingkannja semendjak perundingan Linggardjati, membawa udara baru djuga dengan mulai populernja kalimat demarkasilijn dan gentjatan perang, dimana tentera masing-masing pihak akan membatasi gerakannja dalam lingkungan demarkasinja.

Perundingan Demarkasi ke-I, 23 Nopember 1946.

Perundingan pendahuluan telah dilakukan buat pertama kalinya dalam membitjarakan soal demarkasi daerah Padang ini, pada tanggal 23 Nopember 1946 bertempat di Markas besar Sekutu di Padang, dimana delegasi kedua belah pihak walaupun telah berunding tiga djam lamanya tetapi tidak mendapat persetujuan apa-apa.

Dalam pada itu kegiatan-kegiatan pertempuran tidaklah berhenti, begitu djuga usaha pertempuran dari pihak kita melandjut terus, jang dapat dilihat dari rentetan kedjadian-kedjadian dibawah ini.

Pada awal Desember 1946, telah dilantik dengan resmi Barisan Istimewa Polisi Sumatera Barat, jang akan mendjadi teras bagi tenaga polisi didaerah pertempuran.

Begitupun Hizbullah telah memperkokoh organisasinya jang telah bersifat Sumatera Tengah dengan keangkatan Saudara Agus Salim Murai mendjadi Divisi Komandan Hizbullah dan Sabilillah Sumatera Tengah.

Tentera dan rakjat menghebatkan serangan di front Padang, dan semendjak bulan Nopember berlangsunglah pertempuran-pertempuran seru disekitar Andalas, dan Simpang Haru, begitu djuga di Alai, Seberang Padang, dan perhubungan musuh Padang-Teluk Bujur kerap terputus karena Teluk Bujur sering dikepung dan diduduki oleh barisan kita. Semendjak tanggal 2 Nopember pertempuran seru memuntjak disegala front sekitar Padang, dimana kepungan atas Teluk Bujur dirapatkan, dan musuh mentjoba menembus kepungan ini dengan segala alatnja, dan di Indarung terdjadi pertempuran sengit dari djarak 50 meter. Kegentingan ini mengakibatkan Belanda menahan kereta api ke Padang di Tabing pada awal Desember.

Pelaksanaan pengungsi dari D.P.D.

Sumatera Tengah, 2 Desember 1946.

Oleh karena menghebatnja pertempuran ini jang telah merupakan perang besar-besaran, maka pengungsianpun mendjadi-djadi lah didaerah sekitar Padang menudju kepedalaman Sumatera Barat, sehingga Pemerintah dengan perantaraan Djawatan Sosialnja sibuk menghadapi pengungsian ini, dan dalam konperensi Pedjabat Sosial Sumatera Barat pada tanggal 2 Desember soal ini mendjadi atjara hangat dan sesudah itu Dewan Pertahanan Daerah Sumatera Barat mendjelaskan dalam satu peraturannya No. 6/1946 tentang garis besar dari tjaranja pedjabat Sosial harus menghadapi soal pengungsian ini.

Para pegawai jang boleh dikatakan dalam keadaan pengungsian djuga semendjak pindah dari Padang, pun tak lupa memperkokoh semangat perdjuaannya, dan dalam ikatan **Gepam** (Gerakan

Pegawai Angkatan Muda) menggembleng semangat pegawai, dan tanggal 5 Desember menggerakkan organisasinya kembali di Bukit-tinggi. Dalam suatu rapat dimana ketua Dewan Pimpinan Gepam Saudara M. Rakana Daljan menjelaskan bahwa pegawai harus menjelarkan djiwanja dengan suasana revolusi sekarang ini.

Badan Pembantu Garisan Depan (B.P.G.D.), 7 Desember 1946.

Begitulah selama awal Desember ini pertempuran-pertempuran di Padang mendjadi-djadi djuga, sehingga pada tanggal 7 Desember D.P.D. mendirikan lagi sebuah badan yang bernama B.P.G.D. (Badan Pembantu Garis Depan) yang diketuai oleh Saudara Anwar St. Saidi, dan anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai-partai Politik di Sumatera Barat.

Gentjatan sendjata di Padang, 9 Desember 1946.

Kedatangan Menteri Sjarifuddin dan Gani, selain dari untuk memberi pendjelasan tentang Linggardjati, adalah terutama untuk menjelesaikan soal gentjatan perang. Dan sebagai hasilnya buat daerah pertempuran Medan dan Padang telah diperdapat persetudjuan.

Didalam menjelesaikan soal gentjatan perang di Padang diantara utusan Pemerintah Agung beserta pihak delegasi Indonesia daerah Sumatera Barat dengan pihak tentera Belanda, 2 kali dilakukan perundingan jaitu pertama kalinja pada tanggal 9-12 dan jang kedua kalinja 11-12.

Perundingan jang kedua-dua kalinja ini diketuai oleh Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin.

Perundingan pertama dihadiri antara lain-lain dari pihak Indonesia oleh Let. Djend. Urip, Dr. A. K. Gani, Mr. St. M. Rasjid, Let.Kol. Halim, Marzuki Jatim, Hadji Salim, Darwis dan Nazaruddin sebagai penindjau, Nasroen A.S. Kepala Penerangan Tentera dan Johny Anwar Kepala Polisi Kota Padang. Dipihak Belanda diantara lainnja Dr. Koets, Djend. Majoor Buurman v. Vreden, Kapt. Hendricks, Dr. v. d. Velde, Kol. Sluyter, Major Schotborgh, Kapten Tiddens, Lt. Veenendal, De Boer dan Warnaar.

Dalam rundingan selandjutnja jang diadakan di Padang dari pukul 11 sampai pukul 2.00 petang, jang dihadiri dari pihak Indonesia antara lain-lain oleh Let. Djenderal Urip, Dr. A. K. Gani, Kolonel Ismael Lengah Divisi Komandan Banteng I, Dr. Djamil, Residen Sumatera Barat, Marzoeki Jatim, Hadji Salim, Aziz Chan, Mr. Nazaruddin dan dari pihak Belanda Dr. Koets, Buurman van Vreeden, Dr. Van der Velde, De Boer, telah didapat persetudjuan jang pada garis-garis besarnya adalah tentang penetapan demarkasilijn dan jang berhubungan dengan itu, jang berita selandjutnja akan diterangkan lebih djauh dalam communique bersama jang berbunji sebagai berikut :

MAKLUMAT BERSAMA TENTANG PERUNDINGAN INDONESIA BELANDA DI PADANG.

Tentang perundingan Indonesia-Belanda di Padang telah dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak satu maklumat jang bunjinja sebagai berikut :

1. Daerah primeter sekeliling kota Padang akan dikosongkan sama sekali oleh T.R.I. dan Barisan-barisan Indonesia jang bersendjata pada tanggal 31 Desember 1946 djam 24.00.
2. Segala pos-pos Tentera Belanda jang bertambah sesudah 14 Oktober 1946 akan ditjabut.
3. Untuk melaksanakan hal jang tersebut diatas, Tentera Republik Indonesia dan Belanda dengan ini memerintahkan menghentikan pertempuran dan menghindarkan kemungkinan pertikaian sendjata.
4. Polisi N.R.I. bersendjata setjukupnja didalam kota Padang akan diperluas kekuasaannja sehingga dapat mendjalankan kewadjabannja mendjaga keamanan dengan sebaik-baiknya, untuk mana akan diadakan perembukan lebih landjut.
5. Polisi N.R.I. berhak mengadakan perondaan didaerah perondaan tentera Belanda.
6. Opsir-opsir penghubung akan diadakan oleh pihak tentera Republik Indonesia dan pihak Belanda.

Pro dan Contra Linggardjati.

Sebagai telah kita katakan diatas maka rentjana persetudjuan Linggardjati ini memberi stimulans jang hebat, kepada situasi politik di Sumatera Barat apalagi setelah datang pernnyataan pendirian dari pusat-pusat partai di Djawa tentang Linggardjati ini.

Pada tanggal 5 Desember 1946 dalam konperensi Partai Komunis Indonesia di Solo telah diambil keputusan menerima Naskah Persetudjuan Linggardjati dimana ditegaskan bahwa setelah membatja serta mempeladjadi Naskah Persetudjuan Indonesia-Belanda itu, jang langsung mengenai kepada politik dan perekonomian negara kita, maka kita (P.K.I.) memandang perlu menerima naskah itu dan menjetudjuinja sebagai satu sjarat jang baik untuk masa jang akan datang.

Pada tanggal 4-12 Masjumi dalam konperensinja di Solo menjatakan menolak rentjana persetudjuan Linggardjati ini dengan mengadakan kampanye penolakan selama satu minggu mulai tang-

gal 10-17 Desember dengan tjara mengadakan rapat umum, gerakan puasa, menghiburkan pahlawan-pahlawan dan mengundjungi rumah-rumah sakit dan makam-makam.

Dan dalam rapat lengkap Dewan Pusat Pesindo jang disjahkan oleh konperensi kilat Pesindo tanggal 4-12 di Madiun, dinjatakan pendirian menerima Naskah Linggardjati dengan disertai tuntutan agar Pemerintah dengan segala alat-alatnja jang akan menjelenggarakan persetudjuan ini harus terdiri dari orang-orang jang revolusioner dan progresip. Dalam pada itu Barisan Tani Indonesia menerima, sedangkan Partai Rakjat Djelata menolak.

Dan pada tanggal 6-12 dalam konperensinja di Jogja Partai Sosialis menjatakan menerima Naskah Linggardjati dan menganjurkan kepada seluruh rakjat untuk menerimanja dan memperkuat persatuan rakjat serta menyusun segenap tenaga, supaja persetudjuan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mengambil dan mengokohkan seluruh Negara Indonesia Merdeka.

Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) djuga menolak rentjana Naskah persetudjuan ini.

Semua pendirian partai-partai ini bergema kepada tjahang-tjabangnja di Sumatera Tengah, dan segala kampanje di Djawa itu dalam formaat ketjil dilakukan pula di Sumatera Tengah.

Anggota K.N.I. Pusat dari Sumatera Barat, 7 Djuni 1947.

Dan oleh karena soal Linggardjati ini telah diserahkan kepada K.N.I. Pleno sebagai Parlemen sementara dari Republik Indonesia, maka telah didjelaskan pula oleh Pemerintah Pusat bahwa Sumatera akan mengirimkan 50 orang wakil ke K.N.I. Pusat itu, jang mana dari Sumatera Barat ditjalonkan 15 orang. Dalam sidang pleno K.N.I. ke-VIII di Bukittinggi tanggal 4—6 Djanuari 1947, dipililhlah untuk mendjadi tjalon anggota K.N.I. ini 15 orang jaitu Saudara-saudara Iskandar Tedjasukmana, Marzuki Jatim, Dr. Rahim Usman, Bachtaruddin, Chatib Suleiman, Darwis Thaib, Basjrah Lubis, Rangkajo Rasuna Said, Bariun A.S., Anwar St. Saidi, H. Mahmud Junus dan Sidi Bakaruddin.

Dari anggota-anggota jang diusulkan oleh K.N.I. Sumatera Barat ini diangkat oleh Presiden mendjadi anggota K.N.I.P. Saudara-saudara I. Tedjasukmana, Marzuki Jatim, Dr. A. Rahim Usman, Bachtaruddin dan Chatib Suleiman.

Dan dari pemimpin-pemimpin Rakjat Sumatera Barat diangkat P.J.M. Presiden Saudara-saudara Djuir Muhamad, H. Siradjuddin Abbas, Darwis Thaib, Udin, Rangkajo Rasuna Said, A. R. St. Mansjur dan H. Dt. Batuah.

Latihan politik, 24 Nopember 1946.

Dalam pergolakan politik jang hebat ini, maka Pemerintah Sumatera Barat mengambil inisiatip untuk mengadakan satu ruang-

an pendidikan politik jang berupa tempat latihan bagi para pemimpin se Sumatera Barat jang terambil dari wakil-wakil partai dari tiap-tiap kewedanaan, jang dimulai pada tanggal 24-11 dengan 120 orang kader, dan dipimpin langsung oleh Residen Sumatera Barat sendiri beserta para pemimpin pemerintahan dan pemimpin rakjat jang terkemuka di Sumatera Barat. Latihan ini berdjalan sebulan lamanja dan ditutup pada hari Sabtu tanggal 21-12 dengan satu upatjara jang dipimpin oleh Saudara Iskandar Tedjasukmana Ketua Madjelis Guru.

Perundingan jang tidak putus, 17—18 Desember 1946.

Tetapi perundingan selandjutnja di Padang antara pihak Belanda dan pihak kita jang telah diteruskan lagi pada 17 dan 18 Desember 1946, tidak mendapat hasil jang njata, karena sub-sub komisi dari pihak Belanda tidak dapat memberikan keputusan dari setiap soal jang diperbintjangkan, jang terdiri dari tiga soal jaitu :

1. Soal orang tahanan Indonesia (menjerahkannya sama sekali kepada pembesar-pembesar Indonesia).
2. Soal djumlah polisi N.R.I. dikota Padang.
3. Soal persendjataan dan jang terpenting lagi soal perbedaan pendapat kedua belah pihak, dimana Belanda menjatakan dia sadja jang bertanggung-djawab tentang keamanan dalam demarcatielij, sedang pihak Indonesia berpendapat, bahwa atas keamanan bangsa Indonesia dalam demarcatielij hanjalah polisi N.R.I. jang bertanggung-djawab; tanggung-djawab ini tidak kepada pihak Belanda akan tetapi kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Panitia Gentjatan Sendjata, 30 Desember 1946.

Pada tanggal 30 dan 31 Desember 1946 di Padang telah dilangsungkan lagi perundingan Joint Truce Commission (Panitia Bersama Gentjatan Sendjata) antara pihak Indonesia dan Belanda, jang dari pihak Indonesia dihadiri oleh Walikota Padang Aziz Chan, Let. Kol. A. Halim, Iskandar Tedjasukmana dan Kepala Polisi Darwin. Hadir djuga Gubernur Sumatera Tengah serta beberapa orang penindjau. Dari pihak Belanda hadir De Boer, Let. Kol. Van Erp, Mr. Van Straten, Kapt. Warnaar, dan beberapa Opsir sebagai penindjau. Perundingan ini adalah landjutan dari perundingan jang diadakan pada tanggal 11 Desember jang lalu dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin, Dr. A. K. Gani dan Djenderal Urip bersama Dr. Koets dari pihak Belanda. Pada perundingan jang lalu itu telah diperoleh pesetudjuan tentang gentjatan sendjata, dan penetapan demarkasiijn dengan ketentuan-ketentuan bahwa Pemerintah N.R.I. akan menghidupkan kota Padang, mengembalikan keamanan dengan alat-alat pemerintahan dan Kepolisian N.R.I., pun ditetapkan bahwa pada

tanggal 31 Desember akan selesai pelaksanaan truce, garis demarkasi dan pembangunan kota Padang tersebut.

Kemudian dalam perundingan yang berulang-ulang antara tanggal 11 dan 31 Desember itu, Belanda memungkiri dan menjabotir pokok persetudjuan tanggal 11 tersebut. Tegasnja tidak menjetudjuinja, menghalang-halangi pembangunan kota Padang, menghalang-halangi polisi N.R.I. menjalankan tugasnja, menjabotir penyelesaian orang-orang tahanan, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.

Pada tanggal 31 Desember perundingan dilakukan kembali dimana pihak Belanda mengatakan bahwa soal garis demarkasi tidak ada sangkut-pautnja dengan soal menguatkan Pemerintahan N.R.I. dikota Padang, sedang pihak Indonesia menegaskan sebaliknya dengan bukti-bukti. Begitupun tentang soal Kepolisian, Belanda tetap berkeras dan berkepala batu, walaupun pihak Indonesia mengurangi usulnja dari semulanja seribu orang menjadi 500 orang.

Ultimatum Belanda. Perundingan deadlock.

Karena itu perundingan menjadi dead-lock, dan pada akhirnya Belanda memaklumkan ultimatum bahwa Barisan Rakjat dan anggota ketenteraan mesti keluar dari garis demarkasi sebelum jam 24.00 malam ini, dan jika tidak, mereka akan menggempur sesudah jam 24.00 itu. Ultimatum mana ditolak oleh pihak Indonesia dan setjara satria delegasi Indonesia menegaskan bahwa „Jika dijual tetap akan dibeli”.

PERMULAAN TAHUN 1947.

TAHUN 1946 digantikan oleh tahun 1947, bermulalah lagi pertempuran-pertempuran disekitar kota Padang dan Belanda mempergunakan pesawat-pesawat terbang untuk melakukan serangan udara atas Indarung, Anduring dan Lubuk Bagalung, dan Pasar Usang, yang walaupun Pasar Usang ini letaknja diluar garis demarkasi (30 km. dari Padang) tetapi dihantamnja juga dengan bom pada tanggal 11 Djanuari pukul 1 siang kemudian hari Minggu diulangnya lagi pukul 9.00 pagi.

Dentuman meriam mengeruhkan udara sekitar Padang, tembakan senapan mesin dan bedil silang siur mentjari sasarannja. Kapal terbang tidak pula ketinggalan memainkan rolnja menderuderu diangkasa sambil memuntahkan maut dan kebakaran serta kerusuhan. Demikianlah nasib kota Padang dan sekitarnja. Meskipun demikian satu hal yang menggembirakan ialah bahwa pemerintahan Kota tetap dibawah kekuasaan R.I. dan tetap berputar terus dibawah pimpinan Walikotanja, Saudara Aziz Chan.

Dalam suatu interviewnja pada masa itu, Walikota Revolusioner Aziz Chan menerangkan, bahwa masalah Padang ini harus

dihadapi dengan rentjana jang njata dan perbelandjaan jang tjukup. Harus ditambah lagi pegawai-pegawai jang telah diseleksi, tabah, dan patuh-setia pada perdjjuangan R.I. Semendjak awal bulan Djanuari Pemerintah telah dapat mendjamin makanan penduduk dan pegawai R.I. dikota Padang jang berdjumlah lebih-kurang 10.000 djiwa. Makanan itu dibagikan dengan pertjuma untuk meringankan kesengsaraan rakjat.

Perundingan dibuka kembali, 10 Djanuari 1947.

Selandjutnja pada tanggal 8 Djanuari 1947 pihak Belanda meminta supaya perundingan dibuka kembali. Untuk menundjukkan goodwill, tawaran itu diterima oleh Pemerintah kita dan perundingan berlangsung pada tanggal 10 Djanuari. Dari pihak R.I. hadir Walikota Aziz Chan, St. M. Djosan, Dr. M. Djamil, Orang-kajo Ganto Suaro dan Sjamsu Anwar, sedang dari pihak Belanda hadir De Boer, Van Straten dan Kapten Warnaar. Atjara ialah mengenai soal-soal penghentian tembak-menembak, garis demarkasi, polisi N.R.I. dan orang-orang tahanan. Pembijtaraan telah menghasilkan satu rentjana persetudjuan antara kedua belah pihak sesudah terdjadi perdebatan jang sengit. Usul pihak kita tentang djumlah polisi N.R.I. (500 orang) diterima Belanda. Besoknja tanggal 12 Djanuari rentjana persetudjuan ditandatangani oleh kedua delegasi, dengan pihak kita diketuai oleh Saudara Aziz Chan.

Tanggal 18, pertemuan diadakan lagi, untuk merundingkan tjara mendjalankan persetudjuan jang telah didapat itu. Karena soal-soal sebagian besar mengenai kemiliteran, maka diandjurkan supaya hal ini diserahkan untuk membitjarakannja kepada Koman-dan tentera masing-masing, jaitu Kol. Ismael Lengah dipihak kita dan Kol. Sluyter dari pihak Belanda. Usul ini diterima oleh sidang. Tetapi tentang tempat perundingan belum didapat persetudjuan. pihak Belanda mengusulkan supaya pertemuan diadakan di Padang, dan pihak kita mengusulkan supaya diadakan di Tabing jang letaknja 11 km. dari Padang dan 81 km. dari Bukittinggi.

Untuk melantjarkan persetudjuan jang mengenai sipil, jaitu soal kehakiman telah diputuskan bahwa kedua belah pihak akan mengirim utusannja ke High Level Joint Truce Commission di Djakarta.

B.P.B.M. (Badan Pembantu Barisan Muka), 31 Djanuari 1947.

Begitulah perdjjalanan keadaan di Padang, dan untuk membantu perlengkapan perdjjuangan di Padang ini, Pemerintah mengadakan aturan-aturan tegas, diantaranya pada 31 Djanuari 1947 dibentuk satu Badan jang bernama **Badan Pembantu Barisan Muka** (BPBM) sebagai tjabang dari Fonds Kemerdekaan, dan kepada badan ini diserahkan pungutan bakti dari rakjat umum jang berupa bahan-

bahan makanan dan pakaian. Sedangkan kepada Fonds Kemerdekaan diserahkan pemungutan bakti yang berupa uang dan barang-barang selain dari makanan dan pakaian. Dalam pada itu dilarang keras badan-badan lain memungut bakti dari rakjat. Hal ini ditetapkan dengan Maklumat No. 4-1947, dan dikuatkan dengan Maklumat No. 1-DPD Sumatera Barat.

Dan dengan Maklumat No. 6-47 ditetapkanlah peraturan perhitungan ternak buat daerah Sumatera Barat, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Pebruari, dengan mana dimaksudkan untuk mentjatat banjaknja ternak sebagai langkah pertama untuk mengadakan tindakan seterusnya untuk memadjukan peternakan, yang sangat penting bagi perekonomian rakjat itu.

Peringatan B.K.P.R.I. 1½ tahun dan Cease-fire.

Maka sampailah pula kita dalam rentetan sedjarah ini kepada peringatan 1½ tahun merdeka, dimana atas usaha B.K.P.R.I. Andalas Tengah diadakan peringatan meriah, diantaranya pidato yang direlay oleh R.R.I. dalam segala bahasa, dan seluruh Sumatera Barat memperingati hari yang penting ini, dan pada hari itu pula keluar perintah cease fire dari Panglima Tertinggi.

Selanjutnja oleh karena perkebunan-perkebunan asing di Sumatera Barat, seperti di Alahan Pandjang dan Muara Labuh telah didjalankan oleh Pemerintah R.I. sedjak kemerdekaan, maka rombongan Residen pada tanggal 24—26 Pebruari berangkat ke Alahan Pandjang dan Muara Labuh, djuga keperkebunan Peconina dan beramah tamah dengan kaum buruh disana.

PERISTIWA 3 MARET.

REVOLUSI tidaklah sunji dari exessen, yang djika tidak dengan ini tidaklah pula ia bernama revolusi, karena revolusi ialah suatu lompatan sedjarah yang sangat tjepat, dimana hal-hal yang dalam perkembangan biasa memakan waktu puluhan dan ratusan tahun, diselesaikan dalam masa berbulan sadja.

Revolusi ditentang oleh dua kekuatan, dari luar dan dari dalam. Dari luar oleh musuhnja sendiri, dan dari dalam oleh kaum revolusioner yang merasa bahwa revolusi tidak berdjalan setjepat yang dikehendaki mereka. Begitu pulalah keadaannja dengan peristiwa 3 Maret yang bersifat Sumatera Barat ini. Keadaan ini disebabkan oleh karena adanya orang-orang revolusioner yang menganggap djalannja revolusi terlalu lambat. Mereka lalu menganggap pembesar-pembesar yang bertanggung-djawab dalam pemerintahan dan ketenteraman melambatkan djalan revolusi ini, yang dengan sendirinja ditentang oleh mereka dengan mendirikan suatu perkumpulan rahasia yang bernama PAKI (Pembanteras Anti Kemerdekaan Indonesia).

Pembanteras Anti Kemerdekaan Indonesia (P.A.K.I.).

Mereka dapat menarik beberapa orang anggota Barisan Hizbullah dan Sabilillah, dan dua orang pemuda dari sekretariaat Komandemen Tentera Sumatera, yang dengan memakai stempel Komandemen, kedua tentera ini mengeluarkan blanco surat perintah yang ditjap dan ditandatangani untuk menangkap orang-orang yang hendak ditangkap oleh P.A.K.I.

Surat perintah ini diisi oleh P.A.K.I. dengan nama pembesar-pembesar Sumatera Barat seperti Residen, Divisi Komandan, dan lain-lain lalu diserahkan oleh P.A.K.I. kepada Hizbullah-Sabilillah untuk dilaksanakan.

Pada tanggal 2 Maret 1947 rombongan Dr. Isa tiba di Bukit tinggi, dan mengadakan pertemuan dengan para pembesar pemerintah diantaranya Residen dan Divisi Komandan pada sore harinja. Besoknja bersama dengan Residen Sumatera Barat, Dr. Isa yang mewakili Pemerintah Pusat menghadiri Mukthamar Ulama Islam se Minangkabau di Padang Pandjang, dimana dilantik Imam Perdujangan Sjech Abbas Abdullah, dengan 7 orang stafnja.

Peristiwa 3 Maret, menahan pemimpin-pemimpin.

Pada malam inilah terdjadinja Peristiwa 3 Maret yang terkenal itu, dimana barisan bersendjata mentjoba mentjulik pembesar-pembesar, tetapi tempat tinggal Residen dikawal oleh Mobrig yang tak bisa ditembus oleh pentjulik, begitu pula tempat diam Divisi Komandan tak djuga dapat ditundukkan pengawalnja, sehingga kedua pembesar ini tak dapat ditjulik.

Maka tertangkaplah beberapa orang diantaranya Saudara A. Gafar Djambek dan Anwar St. Saidi, djuga Saudara-saudara dari Pamongpradja dan Tentera yang terus ditahan mereka diasramanja.

Bertepatan pula pada ketika itu banjak para pemimpin yang sedang di Djawa menghadiri sidang K.N.I.P. di Malang yang memutuskan soal Linggardjati.

Pemimpin Peristiwa 3 Maret ditangkap, 4 Maret 1947.

Beresoknja tanggal 4 Maret keadaan telah dapat diatasi oleh Pemerintah, orang-orang yang ditjulik dibebaskan, dan pentjulik-pentjulik ditangkap, begitu djuga para pemimpin P.A.K.I. jaitu Dt. Radjo Mangkuto dan S. J. St. Mangkuto.

Tak lama kemudian para anggota barisan yang melakukan pentjulikan itu dibebaskan semuanya karena mereka mengaku bahwa mereka adalah ditipu dengan surat perintah itu. Hanya para pemimpin P.A.K.I. yang tetap ditahan, jaitu Dt. Radjo Mangkuto dan S.J. St. Mangkuto c.s.

Maklumat No. 10 menenteramkan.

Pada tanggal 6 Maret Residen Sumatera Barat mengeluarkan maklumat jang menjerukan supaya warganegara di Sumatera Barat akan mendjaga diri dari perbuatan dan tindakan sendiri-sendiri dari siapapun djuga, dan akan membantu Pemerintah dan alat-alatnja dalam melaksanakan dan menetapkan keamanan. Maklumat ini diberi No. 10-47, dan dikeluarkan tiga hari sesudah peristiwa 3 Maret.

Natsir, Menteri Penerangan di Bukittinggi, 23 Maret 1947.

Sementara itu Menteri Penerangan M. Natsir tiba di Bukittinggi, untuk penindjauan keseluruh Sumatera dan tak terlepas dari hubungan penjelidikan atas peristiwa 3 Maret, pun para anggota K.N.I. tjepat-tjepat pulang dari Djawa ke Sumatera Barat. Menteri Penerangan Natsir sampai di Bukittinggi pada tanggal 23 bersama para anggota K.N.I.P. itu.

Ketika ditanjakan pendapatnja tentang peristiwa 3 Maret dalam satu rapat khusus, Natsir menerangkan dengan mensitir satu ayat Qur'an, bahwa disini telah terdjadi mentjampur antara jang benar dengan jang salah (*talbisul hak bil bathil*).

Linggardjati ditandatangani, 25 Maret 1947.

Dan pada tanggal 25 Maret ditandatangani Naskah Linggardjati dan Menteri Natsir dimana-mana mengadakan tanja-djawab tentang persetudjuan ini.

Konperensi Wali-wali Negeri, 27 Maret 1947.

Dan sesudah mengeluarkan maklumat pembelian padi oleh Pemerintah jang mana pada tahun jang lalu diminta 10% sebagai bakti, maka Pemerintah Sumatera Barat lalu mengadakan Konperensi Wali-wali Negeri se Sumatera Barat jang dihadiri oleh 450 dari 500 orang Wali-wali Negeri di Sumatera Barat mulai tanggal 27—30 Maret 1947.

Peristiwa 3 Maret diadili Mahkamah Tentara, 15 Djuli 1947.

Kembali pada peristiwa 3 Maret, dapat kita uraikan bahwa perkara ini dibuka di Mahkamah Tentara Bukittinggi pada tanggal 15—16 dan 17 Djuli 1947, dimana pesakitan dibela oleh Saudara Hamka, tetapi karena pemeriksaan belum selesai, diundurkan lagi ketanggal 28 Agustus 1947 ketika Bung Hatta telah berada di Bukittinggi. Diputuskan achirnja bahwa Nasruddin Dt. Radjo Mangkuto dihukum 1 tahun pendjara, dan S.J. St. Mangkuto dan lain-lainnja mendapat hukuman voorwaardeljik.

Demikianlah awal dan achir dari peristiwa 3 Maret ini.

SESUDAH LINGGARDJATI.

MUNGKIN P.M. Sjahrir telah menaksir djuga, apa jang akan terdjadi sesudah penandatanganan Linggardjati, karena segera sesudah ditandatangani ia berangkat ke Konperensi Asia di New Delhi dan sampai disana pada 1 April 1947, terutama untuk meminta sokongan bangsa-bangsa Asia bagi perdjjuangan Indonesia. Pun sebelum dia berangkat telah tiba di Delhi rombongan delegasi Indonesia jang terdiri dari sedjumlah besar para pemimpin, jang dengan begini telah dapat menembus blokade Belanda, dan banjak jang tak pulang kembali ke Indonesia, tetapi bersebar keseluruh dunia untuk memperkuat perdjjuangan Indonesia diluar negeri.

Memang demikianlah djadinja, karena segera sesudah penandatanganan lalu timbul sengketa tentang pelaksanaan naskah jang 17 pasal itu. Tetapi pengakuan de facto atas Republik Indonesia itu, tidak sedikit pula meninggikan semangat perdjjuangan dan harga diri dari bangsa Indonesia.

Pusat Pemerintahan Sumatera Barat dipindahkan ke Padang lagi, 8 April 1947.

Didaerah-daerah, umpamanja di Sumatera Barat memang ada terasa kelegaan sesudah penandatanganan naskah, karena mulai tanggal 3 April delegasi kita mulai lagi mengadakan perundingan dengan pihak Belanda di Padang untuk membitjarakan soal-soal garis demarkasi serta urusan Pemerintahan Sipil. Perundingan dilandjutkan pula pada hari Selasa tanggal 8 April dan sebagai hasil dari perundingan itu diputuskan bahwa Pusat Pemerintahan Sumatera Barat sedjak tanggal 8 April dipindahkan kembali ke-kota Padang, sedang Residen buat sementara hanya 3 hari dalam seminggu berkedudukan di Padang jaitu hari-hari Senin, Selasa dan Rabu. Selainnja di Bukittinggi karena sebahagian dari Pusat Pemerintahan Sumatera Barat masih ada di Bukittinggi. Pun pihak Belanda telah menjetudjui polisi kita masuk dan tinggal dikota Padang dengan bersendjata lengkap. Disamping itu Belanda telah mengembalikan sebahagian dari sendjata kita jang dahulu diambil oleh Inggris.

Mulai memindahkan pegawai ke Padang, 11 April 1947.

Untuk melaksanakan pemindahan Pemerintah Sumatera Barat itu pada tanggal 11 April telah berangkat dari Bukittinggi ke Padang sedjumlah 50 orang pegawai jang penting-penting untuk segera memulai pembangunan kota Padang. Tanggal 14 April berangkat lagi sedjumlah 100 orang bersama dengan polisi bersendjata. Untuk tempat tinggal para pegawai ini, maka Belanda berdjandji akan menjerahkan Hotel Central.

Djuga pengungsi-pengungsi akan segera pula diatur pengembaliannya ke Padang, dan pemitjaraan tentang soal kereta api masih dilandjutkan. Tentang pos umumnja diputuskan bahwa soal itu diserahkan kepada High Level Joint Truce Commission bagian teknik dan pos, begitu djuga tentang ketenteraan.

Urips diedarkan di Sumatera, 11 April 1947.

Dalam lapangan keuangan jang telah semendjak kemerdekaan dipakai uang Djepang, maka semendjak tanggal 11 April telah dikeluarkan uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera (Urips) jang dikoers 1 : 100 dengan uang Djepang sedangkan uang Djepang tetap berlaku terus. Uang Republik Indonesia Propinsi ini diedarkan sebagai tanda pembayaran sementara menunggu uang Republik Indonesia beredar di Sumatera. Tanda pembayaran sementara ini hanja berlaku dalam daerah Sumatera sadja, sedangkan uang Republik Indonesia tetap dilarang memperedarkannya di Sumatera menurut maklumat Gubernur Sumatera tanggal 6 Januari 1947. Alat pembayaran baru ini didjamin oleh Pemerintah dan kelak dapat ditukar dengan uang Republik dengan koers 1 : 1. Pengeluaran Urips ini diatur dengan maklumat Gubernur Sumatera tanggal 8 April No. 92/K.O.

Hamengku Buwono dan Dr. Sukiman di Sumatera Tengah, 16 April 1947.

Pada tanggal 16 sampai di Padang rombongan Sultan Hamengku Buwono untuk mengatur soal-soal pemerintahan dan telah sampai pula Dr. Sukiman Ketua Umum Masjumi untuk menghadiri konferensi Masjumi Sumatera Tengah.

Mr. M. Nasrun mendjadi Gubernur Muda, 29 April 1947.

Dan pada tanggal 29 April 1947 keluarlah ketetapan Gubernur Sumatera No. 326 tentang pengangkatan Dr. M. Djamil mendjadi Ketua Panitia Persiapan Sekolah Tinggi Propinsi Sumatera, dan untuk ganti beliau mendjadi Gubernur Muda Sumatera Tengah diangkat Mr. M. Nasrun.

Tentang pelaksanaan pengembalian ibu Kota ke Padang menemui kesulitan pula karena satu insiden, jaitu ditangkapnja Kepala Polisi Johny Anwar bersama 4 orang stafnja oleh Polisi Militer Belanda, tetapi setelah diprotes oleh Residen dan Walikota, maka Saudara Johny Anwar c.s. dibebaskan kembali. Dalam pada itu perundingan berdjalan terus antara delegasi Indonesia jang diketuai oleh Residen sendiri dengan delegasi Belanda, dan untuk melaksanakan hasil-hasil perundingan ini dibentuk satu Panitia Pekerdja jang diketuai oleh Walikota Aziz Chan.

Bea tjukai Pelabuhan dipungut oleh R.I.

Pemerintah telah mulai memungut bea dan tjukai dari kapal-kapal dan perahu-perahu di Teluk Bujur dan Muara Padang, dan bangsa Timur asing jang tinggal dikota Padang djuga dikenakan pajak seperti bangsa Indonesia begitu djuga Pemerintah Kota Padang akan memungut pajak-pajak jang biasa dipungut untuk penghasilan kota seperti Pajak Kendaraan, Pajak Djalan, Pajak Tontonan dan lain-lain. Dan semendjak tanggal 21 April kereta api sudah mulai masuk kota Padang dan buat sementara tetap berdjalan satu kali sehari masuk kota, sedangkan sesudah tanggal 1 Mei akan diatur lebih landjut. Atas berdjalannja kereta api ini, maka Walikota Padang menerima kawat utjapan selamat dari Menteri Penerangan Natsir, jang mana Menteri menganggap bahwa hal ini adalah langkah pertama dari penyelesaian kota Padang dan melaksanakan pasal 1 Naskah Linggardjati.

Maka sampailah kita kepada hari peringatan 1 Mei 1947, jang dirajakan dengan meriah diseluruh Sumatera Barat, sebagai hari perdjjuangan buruh dan tani mentjapai kemerdekaan jang mendjadi sjarat utama bagi pelaksanaan tjita-tjita keadilan sosial.

Keputusan Garis Demarkasi, 3 Mei 1947.

Tentang soal ketenteraan, maka pada tanggal 3 Mei 1947 di Padang dilangsungkan perundingan antara Kol. Ismael Lengah dan Kol. Sluyters jang dihadiri djuga oleh Walikota Padang dimana telah didapat keputusan tentang batas-batas garis demarkasi. Tentang permintaan Belanda untuk menempati 6 pos diantara batas garis demarkasi (niemandslan) pihak kita tidak keberatan menerimanja djika Belanda sedia pula menerima permintaan kita untuk menduduki pos diantara kedua garis demarkasi itu. Sesudah berunding maka Kol. Ismael Lengah dan Kol. Sluyters mengadakan perdjjalanan memeriksa garis demarkasi Timur.

Gubernur Sumatera meninjau Padang, 5 Mei 1947.

Pada tanggal 3 itu djuga Gubernur Sumatera dan Djenderal Suhardjo bersama rombongan tiba di Bukittinggi, dan pada tanggal 5 meninjau kekota Padang dan disambut oleh rakjat kota Padang dengan penuh kegembiraan. Besoknja tanggal 6 kedua pembesar itu mengadakan perdjjalanan peninjauan ke Pariaman jang mendapat sambutan meriah pula dari rakjat. Pada tanggal 10 Gubernur mengadakan pertemuan dengan ulama-ulama Sumatera Barat, jang dikundjungi sendiri oleh Gubernur ketempat ulama-ulama itu mengadjar. Dan pada itu djuga diresmikan pelantikan Gubernur Muda Sumatera Tengah Mr. M. Nasrun, dan Ketua Panitia Persiapan Sekolah Tinggi Sumatera Dr. M. Djamil jang dilakukan oleh Gubernur Sumatera sendiri.

Dr. A. Halim B.P.K.N.I.P. ke Sumatera Barat, 27 Mei 1947.

Tetapi sesudah Linggardjati ini, keadaan tetap suram dan Dr. A. Halim anggota B.P.K.N.I.P. jang datang ke Sumatera Barat tanggal 27 Mei 1947 menjatakan, bahwa Naskah belum tampak hasilnja dan keadaan semakin hari semakin buruk. Kaum reaksi-oner Belanda hendak menjelesaikan soal Belanda-Indonesia dengan perang jang terbukti dari usahanja memperhebat gerakan militernja dengan menambah kekuatan tenteranja ke Indonesia.

Rombongan Wakil Presiden ke Sumatera, 10 Djuni 1947.

Dan karena ternjata bahwa Sumatera adalah lapangan jang lebih tepat untuk perdjjuangan gerilja setjara berlama-lama berhubung dengan luas daerahnja dan lebat hutan-hutannja, maka Pemerintah Pusat lalu mengirim satu rombongan besar jang terdiri dari 20 orang pemimpin dalam berbagai-bagai lapangan, dipimpin oleh Wakil Presiden M. Hatta sendiri, dan berangkat dari pelabuhan Merak menudju Sumatera pada tanggal 10 Djuni 1947. Perdjjalanan Wakil Presiden ini adalah satu awal dari sedjarah pandjang jang mendjadikan beliau harus tinggal berbulan-bulan di Sumatera. Dan tindakan ini sangat tepat sebagai akan ternjata sesudah ini.

Terdjadi beberapa kali pertukaran nota antara Komisi Djen-deral Belanda dengan Pemerintah Republik, dan kemudian dalam kabinet sendiri dan partai-partai jang mendukungnja timbul perbedaan paham, jang berakibat djatuhnja kabinet Sjahrir tanggal 26 Djuni 1947 dan pada hari itu djuga Wakil Presiden Hatta sampai di Bukittinggi bersama rombongannja. Dalam saat negara sedang dalam keadaan jang segenting-gentingnja itu, rakjat menjambut kedatangan Wakil Presiden dengan sehebat-hebatnja.

Usaha-usaha Konsolidasi di Sumatera Barat, 9 Djuni 1947.

Sementara itu di Sumatera Barat didjalankan terus usaha-usaha konsolidasi pemerintahan, ekonomi dan ketenteraan.

Pada tanggal 9 Djuni dibentuk Pusat **Permiri** Sumatera Tengah (Pertambangan Republik Indonesia) berkedudukan di Bukittinggi, jang akan mencentralisir urusan minjak di Sub. Propinsi Sumatera Tengah.

B.P.B.M. ditukar dengan B.P.K.K.P., 16 Djuni 1947.

Sebagai kita terangkan sebelum ini bahwa, telah dibentuk B.P.B.M. atas andjuran Badan Penerangan Tentera Divisi IX jang diketuai oleh Kapten Nasroen A.S. Dengan peraturan D.P.D. tanggal 2 Mei 1947 jang diumumkan pada tanggal 13 Djuni, maka B.P.B.M. ini didjadikan B.P.K.K.P. (Badan Penolong Keluarga Korban Perdjjuangan) jang berlaku mulai tanggal 17 Djuni. Dan

pada tanggal 16 Djuni dilangsungkanlah Konperensi B.P.B.M. Sumatera Barat yang dihadiri oleh pembesar-pembesar pemerintahan dan ketenteraan dimana diresmikan pergantian nama B.P.B.M. menjadi B.P.K.K.P., yang berada dibawah pengawasan D.P.D. Sumatera Barat.

Perundingan tentang Pos-pos T.R.I. di Padang, 19 Djuni 1947.

Dan pada tanggal 19 Djuni telah dilangsungkan pula perundingan militer di Padang antara pihak Indonesia-Belanda, dimana pihak T.R.I. hadir Kol. Ismael Lengah bersama stafnja dan pada pihak Belanda Kol. Sluyters bersama stafnja. Perundingan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang akhir ini disekitar front Padang. Sebagai hasil perundingan, pihak Belanda menyetujui kedudukan tetap dari pada beberapa pos-pos T.R.I. didalam daerah 2 km dibelakang garis demarkasi.

Dan pada tanggal 18 Djuni telah tammat dari latihan 60 orang tjalon Opsir Tentera Divisi IX Banteng, yang peresmianja dilangsungkan oleh Panglima Tentera Sumatera sendiri.

Dewan kelasjkan Sumatera Tengah, 1 Djuli 1947.

Dan untuk mengkoordinir barisan-barisan bersendjata yang diluar ketenteraan, maka pada 1 Djuli 1947 didirikan Dewan Kelasjkan Sumatera Tengah yang diketuai oleh Kol. Sjarif Usman, Wakil Ketua Saudara Agus Salim Murai Komandan Hizbullah, Sekretaris Saudara Anwar Muin Komandan Sabilillah, dan anggota-anggota saudara-saudara H. Sofjan Siradj Komandan Lasjmi, Gazali Ismy Komandan Barisan Hulubalang, dan Nasroel Komandan Kesatria Pesindo.

AGRESSI KE-I.

PADA tanggal 3 Djuli 1947 terbentuknja Kabinet R.I. dengan P.M. Amir Sjarifudin dan para Menteri yang seluruhnja berdjumlah 36 orang. Tak lama sesudah kabinet ini terbentuk, maka Belanda lalu memadjukan nota yang bersifat ultimatum, diantaranya menuntut diadakan Gendarmerie Bersama yang terdiri dari tentera Belanda dan tentera Republik yang akan „mendjaga keamanan“ didaerah-daerah strategis dari Republik di Djawa dan Sumatera, yang pada tanggal 17 Djuli ditolak oleh B.P.K.N.I.P. dan Pemerintah R.I.

Njata bajangan bahwa Belanda akan menjerang, dan memang sebelum ini Panglima Besar Sudirman telah memerintahkan djuga penjatuan seluruh Barisan Bersendjata dalam T.N.I., hal mana didjelaskan dengan maklumat Tentera Sumatera No. 1/T.N.I.-'47/1 tanggal 13-6-'47 yang diumumkan pada tanggal 10 Djuli 1947 untuk penjusunan seluruh Barisan Bersendjata kedalam T.N.I., usaha

mana didjalankan dengan segiat-giatnja untuk mentjapai satu komando ketenteraan.

Tanggal 17 Wakil Presiden Hatta tiba kembali di Bukittinggi, jaitu sesudah berangkat beberapa hari dalam perkundjungan rahasia ke India menemui Pandit Nehru dan Ali Djinnah untuk memusjawaratkan agar India akan memadjukan soal Indonesia-Belanda ke Dewan Keamanan U.N.O. dan pada tanggal 18 Djuli beliau meneruskan perdjalanannya menudju ke Sumatera Utara.

Aziz Chan ditembak di Padang, 19 Djuli 1947.

Tanggal 19 Djuli puasa dimulai, dan beresoknja sebagai pendahuluan dari agresi ke I di Sumatera Tengah, maka tentera Belanda di Padang menembak mati Walikota Padang Aziz Chan.

Tjara pembunuhan Aziz Chan.

Djalannja peristiwa adalah sebagai berikut :

Sore hari itu antara djam 5 dan 6, Aziz Chan bersama keluarganya berangkat dari Padang menudju Padang Pandjang. Sesampainya di Purus, oto beliau ditahan oleh Let Kol. Van Erps, dan Walikota terus dibawa dengan oto Jeep pergi ke Nanggalo didalam garis Demarkasi Belanda, karena menurut keterangan Belanda ditempat tersebut ada suatu insiden.

Sesampainya ditempat itu, oto berhenti dan Walikota turun ketanah guna memeriksa kedjadian jang dikatakan itu, tetapi kemudian dengan tiba-tiba sebuah pelor melajang mengenai leher beliau, sehingga meninggal dunia dalam garis demarkasi tersebut. Dari sana majat beliau dibawa dengan Jeep tersebut kerumah sakit Padang. Itu menurut berita pertama.

Residen Mr. Rasjid bersama pemimpin-pemimpin Sumatera Barat dan keluarga Aziz Chan berangkat ke Padang sesudah makan sahur dimalam itu, untuk menjemput majat almarhum. Diantaranya turut Residen sendiri, Chatib Sulaiman, Marzuki Jatim, Dr. Rahim Usman, Bupati Agam Djamalus Jahja, Hamka, Major Thalib dan lain-lain.

Kira-kira djam setengah enam pagi sampailah rombongan di stasion Tabing dekat batas daerah pendudukan Belanda, Lalu Kepala Polisi Abd. Sani membuat kontak dengan pendjaga Belanda, sedang sementara itu kedengaranlah riuh buni meriam dan mortir. Sedjam kemudian barulah dibolehkan masuk Padang dengan sjarat tak membawa sendjata. Karena itu Major Thalib tidak turut, dan karena mendapat kesan jang kurang baik dari utusan Belanda itu maka Residen djuga tidak turut. Rombongan dengan dikawal oleh pasukan-pasukan Belanda dihentikan lebih-kurang 1 djam dimuka markas tentera Belanda, barulah diantar-kan kerumah Aziz Chan, dimana didapat mereka majat telah

terbudjur dengan dikawal pula oleh tentera Knil. Kelihatan dibelakang telinga ada lubang pelor, dan kepala itu petjah bekas dipukul. Djenazah dibawa dengan kereta api, jang sampai di Bukittinggi malam beresoknja, dan rombongan pun kembali, dimana mendapat chabar bahwa pukul 6 tadi Van Mook telah memaklumkan aksi polisioneel (agressie pertama) terhadap Republik.

Setibanja majat Aziz Chan di Bukittinggi, djam 9 malam lalu diadakan pemeriksaan teliti oleh 4 orang dokter dan hasil dari pemeriksaan itu menjatakan bahwa meninggalnja Saudara Aziz Chan disebabkan oleh karena dipukul dengan barang berat dikepalanja, sehingga tulang kepala hantjur. Lalu malam itu djuga djam 2 djenazah beliau dimakamkan di Taman Bahagia dalam satu upatjara besar.

Maklumat istimewa oleh Pemerintah Sumatera Barat, 22 Djuli 1947.

Beresoknja tanggal 22 Pemerintah Sumatera Barat dengan persetujuan D.P.D., Dewan executief, wakil partai, alim ulama, ninik mamak dan kelasjkan diseluruh Sumatera Barat mengeluarkan satu maklumat istimewa, dimana didjelaskan bahwa Belanda telah memulai penjerangan dengan besar-besaran disegenap medan pertempuran, dan djuga didaerah pedalaman, diseluruh daerah kekuasaan de facto Republik Indonesia. Lalu diserukan bahwa telah masanja benar kita dengan setjepat-tjepatnja menjediakan tenaga bantuan jang sewaktu-waktu dapat kita hancurkan ke front untuk menambah tenaga Saudara-saudara kita jang sedang berdjuaug sekarang, dan perdjuaugan kita ini harus teratur dan mempunjai komando jang bertanggung-djawab.

Peraturan D.P.D. No. 10 dan 11, 26 Djuli 1947.

Pada tanggal 26 D.P.D. mengeluarkan peraturan No. 10 dan 11 jang berisi pelarangan dengan antjaman pendjara 5 tahun, menjiarkan segala chabar-chabar dan berita jang merugikan perdjuaugan, beserta gerakan-gerakan T.N.I., dan peraturan jang berikutnya tentang pengawasan (sensur) segala pertjetakan dan penjiaran oleh D.P.D.

Pardhu 'Ain berdjihad, 27 Djuli 1947.

Pada tanggal 27 Residen dan Divisi Comandan mengadakan pertemuan dengan seluruh pemimpin-pemimpin rakjat dan ulama bertempat dipenginapan Tamu Agung di Bukittinggi dimana langkah perdjuaugan disatukan, dan pada hari itu djuga keluarlah seruan Perang Sabil dari ulama-ulama se Sumatera Barat dimana dinjatakan bahwa kepada seluruh kaum Muslimin dan Muslimat adalah Pardu 'Ain untuk berdjihad memerangi Belanda, dengan harta, njawa, tenaga, dan fikiran. Seruan ini ditandatangani oleh 10 orang ulama tua jang terkemuka diseluruh Sumatera Barat.

Hatta sampai di Bukittinggi, 29 Djuli 1947.

Dan pada tanggal 29 Djuli 1947, sorenja Wakil Presiden Hatta telah tiba kembali di Bukittinggi. Beliau meninggalkan Kota Siantar pada tanggal 27 Djuli, jaitu 2 djam sebelum kota itu diduduki Belanda.

Sjukurlah beliau dan pemerintahan Propinsi Sumatera, diantaranya Gubernur Sumatera Mr. Teuku Hassan sendiri dan beberapa orang anggota stafnja dapat meloloskan diri bersama-sama ke Bukittinggi. Maka pada malam itu djuga, sebelum beristirahat sedikit djuga, beliau telah menjuruh panggil segenap pemimpin-pemimpin jang bertanggung-djawab, dari segala partai perkumpulan dan ulama dan pegawai-pegawai Negara berkumpul kerumah Penginapan Tamu Agung, buat memberikan tuntutannja menghadapi perdjjuangan jang hebat memuntjak ini. Mulai malam itu, beliau telah mulai memasukkan tangannja kepada pimpinan di Sumatera, sebagaimana jang telah dibajangkannja djuga seketika dia akan berangkat ke Pematang Siantar tempo hari.

Pidato Wakil Presiden Hatta di Bukittinggi, 29—30 Djuli 1947.

Ketika Wakil Presiden mulai pidato, ditekankannja titik berat perhatian jang hadir kepada kesatuan komando. Dan beliau berkata pula, bahwasanja meskipun Pemerintah mengizinkan partai banjak berdiri, bukanlah maksudnja sebagai jang terdjadi sekarang, jaitu petjahnja kekuatan. Keizinan banjak partai, dimaksudkan ialah hendak menundukkan kepada dunia bahwa negara kita bukan negara Facis.

Oleh sebab itu dimasa perdjjuangan Nasional masih menghendaki perpaduan tenaga, hendaklah segala tenaga partai itu difase sekarang ini disatukan, jaitu menyelesaikan „Revolusi Nasional”. Dan hendaklah diusahakan dengan tjepat menjatukan komando segala barisan dan tentera.

Dan ada djuga disebut beliau jang didapatinja di Siantar dan tempat lain, jaitu kurang kontak diantara pemimpin. Sekarang pusat Pemerintahan Sumatera dengan sendirinja dipindahkan ke Bukittinggi, dan diatas itu semuanya, tenaga telah dibagi. Bung Karno memimpin perdjjuangan di Djawa, dan beliau memimpin perdjjuangan di Sumatera. Sjarat-sjarat untuk melantjarkan perdjjuangan di Bukittinggi, boleh dikatakan tjukup. Sebab itu saja harap kepada segenap pemimpin jang hadir supaja menjatukan pikiran dan usaha kedjurusan ini.

Front Pertahanan Nasional dibentuk 30 Djuli 1947.

Sesudah itu beliau meninggalkan rapat.

Para pemimpin lalu meneruskan rapat untuk melaksanakan seruan Bung Hatta itu, dan setelah berunding pandjang lebar

dibentuklah satu tenaga gabungan jang diberi nama „F.P.N.” (Front Pertahanan Nasional), dengan diketuai oleh Saudara Hamka, dan sekretariat jang terdiri dari Saudara-saudara Chatib Sulaiman, Karim Halim, Rasuna Said dan Udin. Pimpinan ialah Sekretariat dan anggotanja ialah seluruh partai politik, perkumpulan Sosial dan ekonomi diseluruh Sumatera Barat, dan seluruh Barisan Rakjat ketjuali T.N.I., seluruh gerakan Wanita dan seluruh gerakan pemuda.

Ketua Sekretariat Hamka dan Sekretaris Chatib Sulaiman.

Udin mengepalai urusan barisan-barisan, Karim Halim mengepalai urusan pemuda, dan Rasuna Said mengepalai gerakan wanita. Simbul F.P.N. ialah tindju besar jang padat berwarna merah. Diatasnja tertulis „satu” dengan warna hitam, dan dasarnja ialah putih dikelilingi rantai. Pada tanggal 2 Agustus diadakan rapat lengkap membitjarkan anggaran dasar, program dan pekerdjaan F.P.N. ini.

56 Partai dan Organisasi dalam F.P.N.

Badan-badan jang bersatu dalam F.P.N. adalah 56 buah. Diantaranja Masjumi, Masjumi Muslimat, P.N.I., P.K.I., Lokal Islamy, Barisan Hizbullah, Sabilillah, Pesindo, Sobsi, Perti, Lasjmi, P.P.T.I., Pemsji, Saifullah, M.T.K.A.A.M., Hulubalang, Muhammadijah, Aisjiah, G.P.I.I., KOWANI, Perwari, Putri Kesjatria, Persatuan Saudagar, P.S.I.I., Partai Sosialis, Barisan Teras, Barisan Merah, dan lain-lain.

F.P.N. bertali langsung dengan D.P.D. (Dewan Pertahanan Daerah) jang sebelum ini telah mengandjurkan mendirikan B.P.N.K. (Barisan Pengawal Negeri dan Kota). Maka dengan berdirinja F.P.N. dapatlah B.P.N.K. itu dilaksanakan. Setiap putera Sumatera Barat jang berusia 17 sampai 35 tahun harus masuk B.P.N.K. Maka dalam sementara waktu sadja lebih kurang 500.000 pemuda diseluruh Sumatera Barat telah beladjar perang. Tentera resmi dan Barisan Rakjat melatih pemuda-pemuda itu dalam perang gerilja.

Sjahrir—Hadji Agus Salim ke Lake Success.

Sementara itu tepat pada hari pertama Belanda menjerang, bekas P.M. Sjahrir terbang dari Djokja menudju India dan bersama H.A. Salim berangkat dari Kairo menudju Markas U.N.O. di Lake Success di Amerika, untuk mengemukakan soal Indonesia di U.N.O.

U.N.O. mengeluarkan perintah Cease-Fire pada tanggal 22 Agustus 1947, dimana Belanda sementara itu telah meneruskan penjerangnja ke Lubuk Alung dan sebelah Timur diserangnja sampai ke Sitindjau Laut dekat Solok. Keselatan diserangnja sampai ke Siguntur tak djauh lagi dari Tarusan.

Supeno dan Mr. Lukman Hakim djadi komisaris Negara di Sumatera, 2 Agustus 1947.

Tanggal 2 itu datanglah serombongan pemimpin dari Djawa untuk meneruskan perdjuaan di Sumatera dipimpin oleh Supeno anggota B.P.K.N.I.P., dan pada tanggal 3 keluarlah maklumat Wakil Presiden Hatta bahwa semendjak tanggal 27 Djuli Pemerintah Pusat telah mengangkat Saudara-saudara Supeno dan Mr. Lukman Hakim mendjadi Komisaris Negara di Sumatera untuk urusan Dalam Negeri dan Keuangan, jang mana rangnja Komisaris ini sama dengan Menteri.

Pada tanggal 4 Presiden Sukarno memerintahkan Cease-Fire, jang diteruskan untuk Sumatera oleh Djenderal Suhardjo pada tanggal 5 Agustus dengan instruksi sebagai berikut : „Pertempuran harus dihentikan, pertahanan tempat-tempat jang sudah kita duduki. Djika Belanda menjerang atau menobros pertahanan kita, wadjiblah dibalas dengan sebaik-baiknya”.

Tetapi pada tanggal 6 sudah dilanggar Cease-Fire ini oleh Belanda dengan madju ke Parit Malintang sebelah Utara Lubuk Alung.

Wakil Presiden lalu memaklumkan bahwa Bukittinggi mendjadi ibu kota Sumatera, setelah Siantar djatuh ketangan Belanda. Dan di Bukittinggi didirikan KOPENSUM (Koordinasi Penerangan Sumatera) jang dipimpin oleh Parada Harahap, Jahja Jakub dan Rasjid Manggis.

Djam malam di Bukittinggi, 12 Agustus 1947.

Dan mulai tanggal 12 Agustus D.P.D. memaklumkan djam malam untuk Bukittinggi, Pajakumbuh, Padang Pandjang, Solok Sawahlunto, Pariaman dan Kajutannam. Lalu diangkat mendjadi Wakil Walikota Padang Saudara Said Rasjad jang berkedudukan di Padang Pandjang, dan Saudara Azir Jenni mendjadi Wakil Walikota Bukittinggi.

Dalam satu interviunja sesudahnja dibebaskan oleh Belanda dari tahanan ketika permulaan agressi, Said Rasjad menerangkan bahwa ia ditahan bersama 34 orang polisi Republik.

Sesudah berapa hari tidak diberi makan lalu dibudjuk untuk bekerdja dengan Belanda, dan setelah budjukan ini tidak mempan, kemudian dilepaskan dan diantarkan sampai ke Lubuk Alung.

Demikianlah perdjalanan keadaan sampai kepada waktu perajaan dua tahun merdeka pada 17 Agustus 1947 jang dirajakan dengan besar-besaran bersamaan dengan Hari Raja 'Idilfithri diseluruh Sumatera Barat, ditengah-tengah asap perdjuaan Agresesi I. Dan kemudian F.P.N. lalu mengadakan timbang terima dengan Dewan Perdjuaan, jang mana selama ini D.P. mengkoordiner barisan-barisan, dan seterusnya pimpinan atas barisan-barisan ini dipegang oleh F.P.N.

DALAM TAHUN KE-III DARI KEMERDEKAAN.

Cease-fire jang merugikan.

PERINTAH cease-fire telah dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Tetapi Belanda tidaklah mau surut kedaerah jang didudukinja sebelum agressive. Apa jang telah mereka dapat dengan agressienja tetap mereka pertahankan. R.I. semakin sempit daerahnja, jaitu tinggal sepertiga pulau Djawa dan $\frac{4}{5}$ pulau Sumatera. Hanja di Sumatera Tengah, kemadjuan Belanda jang berbilang puluhan kilometer, sedangkan ditempat lain berbilang ratusan. Mereka di Sumatera Barat hanja maju sampai di Lubuk Alung 23 km dari kedudukannja di Tabinj sebelum agressive. Walaupun bagaimana, „dream-line” Van Mook telah mendiadi kenyataan.

Kemudian Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (P.B.B.) membentuk Komisi Tiga Negara jang dikirim ke Indonesia untuk memberi djasa-djasa baik dalam penyelesaian pertikaian Indonesia Belanda. Jang terpilih ialah Australia, Amerika, dan Belgia. Sebagai langkah pertama dikirimlah dari Diakarta konsol-konsol Inggris (mewakili Amerika) Belgia dan Australia untuk datang menjelidiki ke Djokja dan Bukittinggi.

Wakil K.T.N. di Bukittinggi, September 1947.

Mereka datang ke Bukittinggi pada awal bulan September 1947, untuk menjelidiki perkembangan perdjjuangan kemerdekaan rakyat dan hasrat untuk kemerdekaan. Sambutan atas Konsol Tiga Negara ini diselenggarakan oleh F.P.N. (Front Pertahanan Nasional) jang baru berdiri itu. F.P.N. mengerahkan para pemuda jang tergabung dalam B.P.N./K. untuk mengadakan arak-arakan besar, dan atas nama rakyat F.P.N. menjampaikan hasrat rakyat untuk kemerdekaan. Pukul sebelas diantara 10 dengan 15.000 orang pemuda B.P.N./K. berarak dengan teratur menudju lapangan dihadapan istana Wakil Presiden, lalu tampillah Wakil Presiden bersama stafnja diserambi muka istana, dan konsol-konsol itu bersama wartawan-wartawan luar negeri menunggu dimuka istana. Saudara Hamka ketua F.P.N. menjampaikan sepatah kata kepada Konsol Tiga Negara itu, kata-kata selamat datang dan menegaskan kepada utusan ini akan besarnja hasrat kemerdekaan rakyat jang walaupun dengan bambu runtjing sadja akan tetap dipertahankan, dan keinginan bangsa Indonesia untuk hidup damai dan bersahabat dengan bangsa-bangsa lain dalam suasana kemerdekaan.

URIPS ditjetak di Bukittinggi.

Dan semendjak itu berlangsunglah pula kembali perundingan-perundingan tentang demarkasi baru antara T.N.I. dan Belanda, dan penuhlah Bukittinggi oleh para pengunjung dari Padang, Medan

dan Siantar yang terdiri dari pegawai-pegawai Pemerintahan dan keluarganya yang menyebabkan semakin tingginya harga bahan-bahan makanan, dan uang Uripis pun ditjetak di Bukittinggi oleh Pertjetakan Negara, untuk memenuhi kebutuhan perdjuaan.

Perbelandjaan tentera dan bermatjam-matjam barisan seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah dan partai-partai yang mendirikan barisan itu. Lama-lama keadaan telah mendjadi begitu rupa, sehingga partai-partai ini dapat dikatakan hanya mendjadi intendant dari barisan-barisannja sendiri. Karena itu uang mendjadi inflasi, dan kesatuan Komando yang sangat dihadjat itu tidak tertjapai. Oleh karena itu diadakan tindakan untuk menjatukan seluruh barisan-barisan itu; mana yang bersendjata api kedalam T.N.I. dan mana yang tidak bersendjata kedalam B.P.N./K. Untuk usaha ini, maka Wakil Presiden mengangkat A.R. St. Mansur mendjadi Djenderal Major Tituler, dengan tugas menjelenggarakan usaha ini. Pada tingkat pertama, seluruh barisan-barisan yang berdasar Islam seperti Hizbullah, Sabilillah, dan lain-lain disatukan dalam satu Legiun tentera istimewa yang diberi nama Legiun Sjahid, yang dipimpin oleh Kolonel Sjarif Usman, dan kemudian digabungkan kedalam T.N.I. Divisi IX dengan ukuran sendjata 4 : 1 artinja satu karaben dengan 4 orang.

Di Djawa perundingan berlangsung diatas kapal Renville, dimana P.M. Amir Sjarifuddin berhadapan dengan Rd. Abd.Kadir ketua Delegasi Belanda, dan mutu perdjuaan menurun kebawah. Keuntungan-keuntungan yang didapat dari Linggardjati boleh dikatakan lepas seluruhnja, dan tentera harus ditarik dari kantong-kantong (pertahanan-pertahanan strategis) di Djawa Barat. Ketika perundingan hampir mentjapai tingkat mengambil keputusan, maka P.M. Amir berangkat ke Bukittinggi, via Singapura dimana ia menjinggahi Sjahrir dan H.A. Agus Salim, dan setibanja di Bukittinggi disambut dengan sangat meriah oleh rakjat pada achir tahun 1947.

Dan sesampainja Bung Hatta di Djawa, maka persetudjuan Renville ditandatangani pada tanggal 17 Djanuari 1948, dengan ditentang oleh Masjumi dan P.N.I. Sudah njata akan terdjadi perpetjahan yang besar sesudah ini. Dan memanglah, pada tanggal 23 Djanuari 1948 kabinet Amir bubar, dan dibentuklah kabinet Presidentieel Hatta pada tanggal 29 Djanuari 1948, dengan program yang ringkas tetapi berat jaitu : Berunding atas dasar Renville, melekaskan terbentuknja Negara Indonesia Serikat, Rasionalisasi, dan Pembangunan.

Sementara itu dalam kalangan pemerintahan di Sumatera Barat berlangsung pulalah sidang K.N.I. Sumatera Barat yang ke-X pada tanggal 12-13-14 Djanuari bertempat di Bukittinggi, dimana sidang pada pembukaannja mengirim seputjuk kawat kepada sidang Menteri di Djogja yang sedang mengambil keputusan Renville, yang berbunji : Menjokong dengan sepenuhnja akan usaha Pemerintah

Pusat mempertahankan Kedaulatan N.R.I. dan setia berdiri dibelakang Pemerintah Pusat memperjuangkan Kemerdekaan bulat tunggal dan penuh dari negara kita.

Soal yang hangat dalam rapat K.N.I. pleno ini, ialah membaharui K.N.I. menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Sidang menyetujui pembubaran K.N.I. yang sekarang dan pembubaran itu otomatis berlaku setelah terbentuknya D.P.R.. Dalam pada itu Executief disisip, dan diambil satu keputusan yang penting yaitu : **Kepada Executief diberikan hak legislatif**, dimana keadaan mendesak dan sukar mengadakan sidang pleno.

Sesudah ini siaplah rentjana anggota D.P.R. itu, dari partai-partai berjumlah 38 orang, dari kewedanaan 78 orang, dan anggota angkatan 14 orang. Tetapi pada waktu itu keluarlah Undang-undang No. 10 tahun 48 tentang pembahagian Sumatera menjadi 3 Propinsi, dan Undang-undang No. 22 yang menjederhanakan tingkat Pemerintah menjadi 3 sadja, yaitu Propinsi, Kabupaten dan Wilayah, sehingga tidak ada alasan lagi untuk meneruskan D.P.R. Sumatera Barat. Dan dalam satu Kongres Rakyat Sumatera Barat yang dilangsungkan bulan Nopember 1948 ditalkinkanlah K.N.I. Sumatera Barat dan D.P.R. Sumatera Barat yang baru terpilih itu.

USAHA DEWAN PERTAHANAN DAERAH SUMATERA BARAT.

Panitia Kesehatan Sumatera Barat, 8 Oktober 1947.

PADA tanggal 8 Oktober 1947 D.P.D. membentuk Panitia Kesehatan Daerah Sumatera Barat yang diketuai oleh Dr. Anas, dan anggota-anggotanya Dr. Nazaruddin (dokter ten-tera), Dr. Akmam (Wakil P.M.I.), Major Jusuf (Kep. Bahagian Pharmasi) dan seorang Djururawat, untuk menjempurnakan urusan Kesehatan dalam keadaan bahaya serta mengkoordinir organisasi-organisasi yang mengurus kesehatan, mengadakan pendaftaran tenaga, alat, obat, dan bangunan.

Dan untuk menjamin makanan dan mentjegah persaingan dalam pembelijannya, dibentuk B.P.M. (Badan Pembeli Makanan) yang terdiri dari P.M.R. dan intendance dipisi IX.

Panitia Penjelenggara Warganegara Pendudukan.

Selanjutnya untuk menghadapi soal-soal yang berhubungan dengan daerah-daerah R.I. yang diduduki musuh sekarang, maka didirikan suatu Panitia yang bernama **Panitia Penjelenggara Warganegara dalam daerah Pendudukan (P.P.W.P.)** yang anggota-anggotanya terdiri dari „Wakil Walikota Padang, Wakil Tentera yang ditundjuk oleh Divisi Komandan, Wakil F.P.N., dan 4 orang wakil rakyat dari daerah pendudukan yang ditundjuk oleh anggota-

anggota yang disebut diatas. Badan ini berada dibawah pimpinan D.P.D. dan bertanggung-djawab kepada D.P.D.

Dalam pada itu setelah kabinet Amir bubar, maka kaum Sosialis dan Kominis menjatukan diri dalam F.D.R. (Front Demokrasi Rakjat) dan terus mengadakan oposisi terhadap kabinet Hatta, yang mana oposisi ini ditentang pula habis-habisan oleh Masjumi dan P.N.I. Perpetjahan dalam kalangan partai menjadi-djadi, dan Sumatera Barat yang selalu berimam ke Djawa, dilanda pula oleh pertengkaran partai-partai ini. Sebahagian dari kaum Sosialis tidak setuju dengan politik Amir dan F.D.R. ini, lalu memisahkan diri dan mendirikan Partai Sosialis Indonesia dan Partai Sosialis Sumatera Barat banjak masuk kedalam P.S.I., yang diresmikan berdirinja dalam bulan Pebruari 1948, ketika Sjahrir berada di Bukittinggi.

Markas Pertahanan Rakjat Daerah (M.P.R.D.).

Oleh karena sebab-sebab ini, maka F.P.N. berangsur lemah ikatan organisasinja, karena telah menjadi gelanggang pertentangan partai sadja. Achirnja D.P.D. mengetengahi dengan mengemukakan suatu susunan pertahanan yang bulat politis dan organisatoris, menurut dasar-dasar yang telah disetujui oleh sidang pleno K.N.I. Sumatera Barat pada bulan Djanuari 1948. Untuk melaksanakan keputusan itu maka D.P.D. membentuk suatu badan yang bernama M.P.R.D. (Markas Pertahanan Rakjat Daerah) dimana digabungkan Sekretariat F.P.N. dengan B.P.N.K. dalam susunan perang totaal yang mempunyai tugas: menjalankan pimpinan dan mengurus B.P.N.K., dan memusatkan pimpinan badan-badan untuk kelantjaran pekerdjaan dan kebaikan perhubungan satu sama lain. Dalam pada itu melakukan segala tindakan yang perlu untuk memperkuat semangat pertahanan dan pengorbanan rakjat untuk kepentingan perjuangang, serta memberi latihan, penerangan dan menjusun rakjat untuk segala usaha pertahanan.

Susunan ini diteruskan kekewedanaan dengan nama M.P.R.K. dan kenagari-nagari dengan nama M.P.R.N., (Markas Pertahanan Rakjat Nagari).

Dengan berubahnja keadaan perjuangang oleh penandatanganan Renville, yang mendjandjikan Plebisit (Pemungutan suara rakjat) yang dikatakan mengalihkan perjuangang; „from the bullet to the ballot” jaitu dari peluru kepada pemungutan suara itu, maka D.P.D. menjerahkan pelaksanaan soal plebisit ini kepada sekretariat F.P.N.

Maka leburilah F.P.N. sebagai suatu ikatan organisasi oleh karena suasana sesudah Renville, dimana pertentangan ideologie sangat menadjam diantara partai-partai dan barisan yang menjadi anggotanja, dan banjaknja 56 buah itu. Sehingga dalam kenyataan hanya tinggal sekretariatnja sadja lagi yang dijadikan Badan

Plebisit dibawah M.P.R.D. Sebagaimana Persatuan Perdjuaan Sumatera Barat telah lebur pula sebelum itu oleh ditandatangani Linggardjati.

Badan Penjelenggara Pengungsi, 31 Maret 1948.

Dan karena banjarknja pengungsi, maka oleh D.P.D. dibentuk B.P.P. (Badan Penjelenggara Pengungsi) pada tanggal 31-3-1948, dibawah pimpinan Djawatan Sosial, jang diketuai oleh Saudara Harun Junus.

Dan untuk memenuhi permintaan P.T.T.S. (Panglima Tentera dan Territorial Sumatera), telah dibentuk oleh D.P.D. suatu panitia Penindjau Perawatan dan Rasionalisasi Tentera di Sumatera Barat jang anggota-anggotanja terdiri dari Saudara-saudara Let. Kol. Dahlan Ibrahim (Tentera) sebagai ketua, dan anggotanja Saudara-saudara Chatib Sulaiman (Pamongpradja) H. Siradjuddin Abbas (D.P.D.) Dr. Ali Akbar (D.P.D.) dan Alwi (B.P.B.M. Sumatera Barat). Berdasarkan lapuran panitia ini, maka diadakanlah beberapa perubahan perbaikan dalam organisasi tentera.

Hatta—Sjahrir—Amir di Sumatera Barat, 5 Pebruari 1948.

Setelah selesai pembentukan kabinetnja, maka P.M. Hatta berkundjung ke Sumatera untuk menjelesaikan hal-hal jang perlu diselesaikan tentang pemerintahan Sumatera dengan Gubernur dan Komisaris Negara. P.M. Hatta datang bersama Bung Amir dan Bung Sjahrir jang keduanja bekas P.M., pada tanggal 5 Pebruari 1948. Ketiga para pemimpin itu disambut dengan meriah dan masing-masing berbitjara pula sepatah dua kepada rakjat di Bukittinggi dan kemudian kembali ke Djawa.

Presiden Sukarno di Sumatera Barat, Djuni 1948.

Diawal Djuni 1948 ketika udara perdjuaan djauh dari pada tjerah, maka Presiden Sukarno buat pertama kalinja berkundjung ke Sumatera, dan ketika tiba di Sumatera Barat disambut dengan sangat meriah oleh rakjat, dimana dalam suatu rapat raksasa, Presiden mendengarkan bahwa: „Walaupun daerah R.I. semakin lama semakin ketjil, tetapi walaupun ia hanja tinggal sebesar pajung lagi, ia tetap bersemangat besar, dan tetap kita djadikan modal untuk memperdjuaan kemerdekaan seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke!”

Kedatangan Bung Karno ini menghangatkan dapur perdjuaan diseluruh Sumatera, dan membaharui kejakinan akan kemenangan.

Dan dalam suasana jang beginilah dirajakan tiga tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 1948.

Saneering uang di Sumatera.

Peristiwa Madiun menimbulkan kekalutan di Djawa dan dalam pada itu perundingan melaksanakan Renville berdjalan terus, dan K.T.N. berusaha dengan sekeras-kerasnja, mula-mula dengan usul kompromi Du Bois-Critchley kemudian dengan usul kompromi Cochran kedua-duanja diterima oleh pihak Indonesia tetapi ditolak oleh Belanda. Keadaan politik semakin suram, blokkade Belanda semakin keras, dan di Sumatera Barat chususnja dan Sumatera umumnja harga barang-barang mendjadi naik dan inflasi meradja-lela. Tindakan-tindakan buat saneering uang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera dengan membekukan dari peredaran uang kertas tjetakan Siantar karena banjak jang palsu, kemudian dilakukan tindakan jang lebih keras dari itu dengan membekukan uang kertas Rp. 25,— jang terkenal dalam kalangan masjarakat dengan : **djatuhnja kapal terbang hidjau**, sebab uang kertas Rp. 25,— itu berwarna hidjau dan bergambar kapal terbang.

Dalam pada itu untuk melaksanakan Undang-undang No. 22-1948 jang berisi Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah, maka **Kompempus** membentuk satu Panitia Desentralisasi jang diberi tugas merentjanakan pembentukan kabupaten-kabupaten dan wilajah diseluruh Sumatera Tengah. Berdasarkan laporan Panitia ini, maka keluarlah peraturan Kompempus No. 80 tentang pembentukan Kabupaten dan Wilajah, peraturan mana ditugaskan pula kepada panitia itu untuk mendjalankannja, dengan limit waktu 31 Desember 1948, artinja pada tanggal 1 **Djanuari 1949** telah terbentuklah diseluruh Sumatera Tengah Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dan Dewan Pemerintahannja beserta Wilajah-wilajahnja. Usaha inipun didjalankan dengan segiat-giatnja pula, jang uraiannja lebih djauh dapat pematja teliti dalam Bab Demokrasi di Sumatera Tengah.

Dalam lapangan pemerintahan selama tahun 1948 ini, usaha sebagian besar dipusatkan kepada mengkonsolidir djawatan-djawatan pemerintahan dari atas sampai kebawah, sehingga uraiannja dapat pematja ikuti dibahagian Perekonomian dan Bab Kemasjarakatan dalam buku ini.

Kolonel Ismael Lengah dan Djenderal Major Suhardjo Hardjowardojo dipindahkan.

Dalam lapangan ketenteraan terdjadi perubahan-perubahan berdasarkan Rasionalisasi dengan diturunkannja pangkat Opsir tentera dari Letnan II keatas dengan setingkat diseluruh Sumatera. Kedatangan Menteri Pertahanan a.i. Bung Hatta jang berteepatan dengan Hari Raja 'Iduladha tahun 1948, membawa perubahan besar pula dalam pimpinan ketenteraan, dengan dipindahkannja Djenderal Major Suhardjo Komandan Tentera Sumatera dan Kol.

Ismael Lengah Komandan Divisi Banteng ke Djawa, dan kedudukan mereka digantikan oleh Kolonel Hidajat.

Achirnja pada tanggal 17/18 Desember 1948 D.P.R.S.T. ber-sidang buat kedua kalinya dibawah pimpinan ketuaanja H. Iljas Jacoub dimana diputuskan penghapusan keresidenan dan kewedanaan diseluruh Sumatera Tengah, berhubung dengan telah lan-tjarnja pembentukan Kabupaten.

Sidang berlangsung dalam situasi politik jang seruntjing-run-tjingnja antara Indonesia dan Belanda, dan sehari sesudah sidang ini berachir, maka Belanda pun melantjarkan agressinja jang ke-II pada tanggal 19 Desember 1948.

MENDJELANG AGRESSI KE-II.

SURIPNO DAN MUSO KE SUMATERA, 2 AGUS. 1948.

[[RING beriring dengan perajaan tiga tahun kemerdekaan ini, mendaratlah sebuah pesawat udara dilapangan Gadut pada tanggal 9 Agustus tahun 1948 jang datang dari luar negeri, membawa Duta Indonesia untuk negara-negara Eropah Timur, Suripno, jang perawakannya ketjil symphatik bersama sekretarisnja Suparto seorang jang berbadan tinggi besar. Pada tanggal 11 Agustus keduanya berangkat ke Djokja sesudah mengadakan pertemuan-pertemuan di Bukittinggi.

Belakangan ternjata bahwa Suparto ini adalah sebenarnya Muso pemimpin P.K.I. jang telah lama diluar negeri.

Muso merebut kekuasaan di Madiun pada 18 September 1948.

Tak lama sesudahnja Muso-Suripno tiba di Djawa, maka pada tanggal 18 September kaum Komunis merebut kekuasaan di Ma-diun, dan setelah Presiden berpidato: rakyat boleh pilih antara Sukarno-Hatta atau P.K.I.-Muso, barulah orang di Sumatera Barat mengetahui bahwa di Djawa telah meletus pemberontakan Komunis sebagai akibat dari pertentangan jang makin lama makin tadjam antara F.D.R. jang kemudian difusikan oleh Muso P.K.I. dengan lawan-lawan politiknya. Lalu para pemimpin P.K.I. Sumatera, dan Sumatera Barat, berkundjung kepada Gubernur Sumatera, menjatakan bahwa P.K.I. Sumatera tetap berdiri dibelakang Pemerintah, sehingga di Sumatera Barat tidak ada timbul keributan apa-apa sebagai akibat dari peristiwa Madiun ini.

Sebelum ini telah kita uraikan tentang terbentuknja Komisariaat Negara Urusan Dalam Negeri dan Keuangan jang dipimpin oleh Saudara-saudara Supeno dan Mr. Lukman Hakim. Dengan keluar-nja Undang-undang tentang pembagian Sumatera mendjadi tiga propinsi, maka Pemerintah mengangkat Mr. T. M. Hassan, dan

A. K. Pringgodigdo mendjadi Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera dan Komisariaat Negara digabungkan dengan Kantor Gubernur Sumatera mendjadi Komisariaat Pemerintah Pusat (Kompempus), dengan tugas menjelenggarakan penjelesaian pembagian Sumatera mendjadi tiga propinsi.

Djawatan-djawatan Propinsi Sumatera Tengah didirikan, djuga D.P.S. (Dewan Perwakilan Sumatera) dibagi tiga anggotanja, dan anggota jang berasal dari masing-masing propinsi membentuk Dewan Perwakilan dipropinsinja, sehingga dengan ini terbentuklah D.P.R.S.T. (Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Tengah) jang bersidang buat pertama kalinja di Bukittinggi dengan diketuai oleh Mr. M. Nasrun, Gubernur Sumatera Tengah.

Susunan Komisariaat Pemerintah Sumatera kemudian diperkuat lagi dengan diangkatnja Mr. St. M. Rasjid mendjadi Komisaris Keamanan jang diberi kekuasaan atas polisi dan mobrig serta boleh minta bantuan tentera bila perlu.



PEMERINTAHAN DALAM DARURAT.

Suasana mula agresi ke-II, 19 Desember 1948.

DALAM memuntjak panasnja udara politik antara Indonesia dan Belanda, dimana perundingan penghabisan antara P.M. Hatta dan Menteri Stikker telah gagal, maka datanglah undangan dari pemerintah India kepada Presiden Sukarno agar Bung Karno berkundjung ke India.

Diterima berita bahwa rombongan Presiden dalam perjalanannya ke India akan singgah di Bukittinggi. Pada masa itu Bukittinggi jang telah mendjadi ibukota Sumatera lalu bersiap-siap untuk menjambut kedatangan Presiden. Presiden akan datang dari Jogja ke Bukittinggi jang telah mendapat nama djulukan „Jogja kedua” atau ibu kota R.I. kedua. Dikira-kirakan bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 ini Presiden akan singgah di Bukittinggi. Malamnja memang terdengarlah suara kapal terbang meraung-raung diudara Bukittinggi.

Dan besoknja pagi-pagi sebelum rakjat sampai mengetahui apa jang telah terdjadi, kapal terbang Belanda telah mulai menjatuhkan bom-bom diatas kota Bukittinggi sebagai permulaan agresi ke-II dipusat-pusat pertahanan, dan diburunya segala kendaraan jang nampak didjalan raja Padang-Pajakumbuh dan Padang-Solok. Pada tanggal 19 itu hari Minggu, Belanda menjatuhkan pukulannya dengan sekeras-kerasnya. Rakjat menjingkir keluar kota, dan iring-iringan pandjang jang terdiri dari rakjat umum kelihatan berangkat keluar kota, dikedjutkan dan dilengangkan sebentar oleh ulangan serangan udara, tetapi kemudian melandjut lagi sampai-sampai djauh malam, Belanda terus maju menjerang dengan pasukan Angkatan Daratnya ke Air Sirah di front Timur dari Kota Padang, dan ke Lubuk Alung di front Utara, dan Teluk Kabung di front Selatan, serta mendaratkan pesawat-pesawat terbang air (Catalina) di Danau Singkarak, dan dari segenap djurusan itu maju ke Bukittinggi, untuk menduduki ibukota kedua ini.

Badan-badan pemerintahan dan ketenteraan lalu menjingkir pula keluar kota, dan sebelum meninggalkan kota, maka Penghujung Masyarakat dari tentera Sumatera Tengah (Divisi Banteng) masih sempat menerbitkan sebuah bulletin dimana ditegaskan bahwa rombongan Presiden telah selamat sampai di India, hal mana walaupun tak benar, sangat besar pengaruhnja untuk menghilangkan panik jang disebabkan oleh siaran Belanda bahwa Sukarno-Hatta telah ditangkap.

Lama sesudah itu barulah sumber-sumber R.I. sendiri jang menerangkan duduk perkara jang sebenarnya, tetapi maksud jang ditudju dengan bulletin itu telah tertjapai jaitu hilangnya kegelisah-pada pada waktu permulaan penjerangan.

Dan pada tanggal 19 Desember itu djuga diistana Bukittinggi diadakan rapat jang diketuai oleh Menteri Keuangan R.I. Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan dihadiri oleh Ketua Komisariat Pemerintah Pusat untuk Sumatera Teuku Moh. Hassan, P.T.T.S. Kolonel Hidajat, Gubernur Sumatera Tengah Mr. M. Nasrun dan beberapa pegawai tinggi jang lain, dimana diambil ketetapan bahwa Propinsi Sumatera Tengah sementara dibekukan dan D.P.D. Keresidenan dihidupkan kembali dan diberi kekuasaan penuh untuk melantjarkan pemerintahan dan perjuangan dalam keresidenan masing-masing. Dalam hal ini Gubernur Propinsi Sumatera Tengah ditetapkan sebagai koordinator dari D.P.D.-D.P.D. dalam Propinsi Sumatera Tengah. Instruksi dan pendjelasan dalam hal ini untuk Riau dibawa oleh Saudara Gulmat Siragar dan Umar Usman, sedangkan untuk Djambi instruksi ini dapat diteruskan dengan perantaraan anggota D.P.R. dari Djambi jang pada waktu itu tidak sampai ke Bukittinggi, tetapi hanya sampai di Batusangkar. Setelah itu Gubernur beserta Ketua D.P.R. H. Iljas Jacoub, atas andjuran dan nasehat kepolisian Sumatera Tengah dan ketenteraan pergi menjingkir ke Lubuk Sikaping tanggal 20/21 Desember. Dalam rombongan ini turut Suska, Kepala Penerangan Sumatera Tengah dan beberapa orang pegawai tinggi.

Pembentukan P.D.R.I., 22 Desember 1948.

Pada tanggal 22 Desember 1948, setelah mendengar berita jang resmi bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditawan oleh Belanda, dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (P.D.R.I.) dengan susunan sebagai berikut :

1. Mr. Sjafruddin Prawira- : Ketua, merangkap Pertahanan,
negara Penerangan dan mewakili urusan
Luar Negeri.
2. Mr. A. A. Maramis : Menteri Luar Negeri.
3. Mr. Teuku Moh. Hassan : Pengadjaran, Pendidikan dan Ke-
budajaan mewakili urusan Dalam
Negeri dan Agama.
4. Mr. Lukman Hakim : Keuangan dan mewakili Keha-
kiman.
5. Mr. Sutan M. Rasjid : Perburuhan dan Sosial, Pemba-
ngunan dan Pemuda, serta ke-
amanan.

6. Ir. Sitompul : Pekerdjaan umum dan mewakili Kesehatan.
7. Ir. Inderatjaja : Perhubungan dan mewakili Kemakmuran.

Pada tanggal 16 Mei 1949, maka dibentuk Komisariat P.D.R.I. di Djawa, jang terdiri dari :

1. Menteri Kehakiman : Mr. Susanto Tirtoprodjo.
2. Menteri P.M.R. : I. Kasimo.
3. Menteri Agama : K. H. Masjkur, dan R. P. Suroso untuk Urusan Dalam Negeri.

Maka D.P.D. Sumatera Barat dibawah pimpinan ketuanja Mr. St. Mohd. Rasjid lalu menjingkir ke Koto Tinggi bersama pegawai-pegawai lain, dan dari situlah diteruskan pemerintahan keseluruhan Sumatera Barat. Dalam instruksi kilatnja jang pertama D.P.D. Sumatera Barat meng-instruksikan kepada seluruh Bupati dan Wedana di Sumatera Barat bahwa kedudukan Pemerintah adalah bersifat mobil dan bergerak kemana-mana. Anggota-anggota D.P.D. Sumatera Barat, Badan Executief dan beberapa pemimpin rakjat ikut bersama serta. Segala berita-berita dan instruksi disampaikan dengan perantaraan kurier dan diminta supaya tiap-tiap Wedana jang menerimanja akan menjampaiakannja kepada Wedana jang terdekat dengan tjepat dan demikianlah seterusnya. Ditegaskan lagi bahwa dengan ini diulangi lagi instruksi jang lalu bahwa para Wedana mengetuai M.P.R.K. dikewedanaannja dan dalam keadaan perhubungan terputus **mempunyai kekuasaan D.P.D. Sumatera Barat.**

Sebagai biasanja pada instruksi-instruksi gerilja itu dibawahnja dikatakan :

Dikeluarkan disatu tempat di Sumatera Barat pada tanggal 23 Desember 1948.

Dewan Pertahanan Daerah
Sumatera Barat
Ketua
dto.

Mr. St. MOHD RASJID.

Instruksi jang dikeluarkan „disatu tempat di Sumatera Barat” ini, mempunyai kekuatan jang sanggup menggenggam semangat perdjuaan rakjat pada masa itu, walaupun dalam keadaan kesulitan-sulitnja moreel dan materieel, toch rakjat masih dapat melihat adanya pimpinan perdjuaan berupa Pemerintah jang mengatur dan memerintah menudju kemenangan peperangan kemerdekaan. Segelap-gelapnja hari, sekelam-kelamnja alam perdjuaan, toch masih ada satu bintang jang bertjahaja, jang pimpinannja dapat dipedomani oleh rakjat !

Dewan Pertahanan Daerah (D.P.D.) ini adalah instansi yang tertinggi dimasa perang, yang jika kita melihat riwayatnya adalah didirikan pada tanggal 28 Juni 1946 dengan dekrét Presiden yang mengumumkan keadaan bahaya diseluruh Indonesia. Dalam pasal 4 dari Undang-undang tentang keadaan bahaya ini dinjatakan, bahwa jika seluruh negara dinjatakan dalam bahaya, maka setiap-tiap keresidenan dibentuk satu **Dewan Pertahanan Daerah** (D.P.D.) yang diketuai oleh Residen. Wakil ketuaanya seorang Opsir didaerah itu yang ditundjuk oleh Panglima Besar, dan anggota-anggotanya dua orang anggota Executief D.P.R. Daerah dan tiga orang wakil dari organisasi-organisasi rakyat. Pada tanggal 6 Juli 1946 dibentuklah D.P.D. Sumatera Barat yang merupakan suatu Badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi didaerah, sebagai satu pemusatan (konsentrasi) tenaga dan pepaduan kekuatan antara pemerintah, tentera dan rakyat. Susunannya semula adalah: Ketua Residen Sumatera Barat Dr. M. Djamil, Wakil Ketua Divisi Kom: Kol. Dahlan Djambek, 2 orang anggota executief Saudara Mr. St. M. Rasjid, Dr. A. Rahim Usman, dan 3 orang wakil organisasi yaitu Saudara-saudara Duski Samad, Bachtaruddin, dan Abdullah. Susunan ini dalam perjalanannya keadaan berubah-ubah, dengan bergantinya Residen, Divisi Komandan, dan anggota Executief, tetapi D.P.D. tetap dalam keadaannya, suatu badan pemusatan kekuasaan antara Pemerintah tentera dan rakyat di Sumatera Barat. Sedangkan susunannya pada masa Belanda menjerang itu adalah: Ketua Residen Mr. St. M. Rasjid, Wakil Ketua Let. Kol. Dahlan Ibrahim, anggota dari Executief Saudara-saudara Dr. Ali Akbar dan Orangkajo Ganto Suaro, dari organisasi rakyat Saudara-saudara Abdullah, Bachtaruddin dan Hadji Siradjuddin Abbas.

Pengumuman Pemerintah P.D.R.I.

Dan dalam instruksinya yang kedua yang ditujukan kepada Pamongpradja, Djawatan-djawatan dan Kepolisian, D.P.D. menjelaskan, bahwa telah diumumkan adanya wakil Pemerintah Pusat N.R.I. yang terdiri dari Saudara-saudara Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr. St. M. Rasjid, Mr. Lukman Hakim, Ir. Indratjaja dan Ir. Sitompul. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama **Pemerintah Darurat Republik Indonesia** (P.D.R.I.). Didjelaskan dalam instruksi itu bahwa kedudukan pemerintahan ini mobil. Oleh sebab itu diandjurkan supaya selekasnya disusun Pemerintah Darurat setempat-setempat menurut keadaan, supaya dapat menerima perintah dan instruksi seterusnya. Semua instansi harus membuat kontak yang rapat sekali yang dikewedanaan dipimpin oleh Wedana dan Komandan tentera. Begitu juga Tjamat dalam ressort ketjamatannya. Pun disekeliling tempat yang diduduki musuh hendaklah semua instansi dipusatkan dengan lekas, dan jika perlu kedudukan dapat dipindah-pindahkan.

Tentang soal perbekalan dijelaskan bahwa pengumpulan bantuan perbekalan perjuangannya sebolehnya dengan pengumpulan gotong-rojong dinegeri-negeri, jika perlu dibeli. Tetapi (dan disinilah letaknya **darurat**!) dalam keadaan terpaksa boleh diambil dengan kekerasan. Lalu diandjurkan supaya diusahakan sedapat mungkin adanya orang-orang berjualan dan warung-warung, sehingga umum dapat juga membeli keperluan sehari-hari ditempat yang aman. Sedangkan segala pekerjaan pertahanan yang memerlukan musjawarat bersama (sipil, polisi, dan tentera) hendaklah diatas nama M.P.R.K. (Markas Pertahanan Rakyat Ketjamatan), sehingga dapat memutuskan atas nama D.P.D. dan dengan kekuatan D.P.D. Lalu diperingatkan supaya ada tindakan-tindakan dinegeri-negeri untuk membantu para pengungsi. Sedangkan arsip yang berkenaan dengan perintah-perintah D.P.D. dan pelaksanaannya haruslah dapat disimpan seaman-amannya. Dan dalam memakai B.P.N.K. (Badan Pengawal Negeri dan Kota) sebagai pelaksanaan total defence untuk menjamin keamanan haruslah dihematkan tenaga, dan jika ada antjaman musuh akan lalu haruslah mereka bersembunyi. Tentang tjara melakukan penyerangan, B.P.N.K. diberi petunjuk oleh tentera. Akhirnya diserukan, hendaklah Pamongpradja bersama pemimpin rakyat membantu badan penerangan yang mobil untuk memberi penerangan serta menghidupkan semangat pertempuran dan menjelaskan tindakan-tindakan Pemerintah. Mengusahakan supaya ada perhubungan tetap antara kewedanaan yang berdekatan dengan Sekretariat D.P.D. Sumatera Barat dan supaya disampaikan kepada pemimpin-pemimpin jawatan keresidenan, propinsi dan sebagainya serta pegawai-pegawai jawatan-jawatan itu supaya datang kepada Wedana yang terdekat untuk menerima instruksi selanjutnya. Seperti juga instruksi No. 1 maka instruksi D.P.D. No. 2 ini dikeluarkan pada 23 Desember 1948 disatu tempat di Sumatera Barat dan ditandatangani oleh Ketua D.P.D. Mr. St. M. Rasjid.

PERSEDIAAN PERANG GERILJA, 28 DJANUARI 1948.

SEMENTARA itu Belanda meneruskan juga dengan serangannya yang sangat hebat. Pukulan yang seberat gempa itu yang didatuhkan dengan sekongong-kongong beserta peralatan dan perhitungan yang lengkap, sedianja akan mengkutjar-katjirkan segala usaha pertahanan kita. Kota-kota seperti Bukittinggi, Pajakumbuh, Padang Pandjang dan lain-lain djatuh ketangan musuh, dan mereka duduki dengan ketenteraannya.

Dengan bangga mereka menjerukan dengan alat-alat pengeras suaranya, bahwa Republik telah habis, telah finish!

Tetapi djalan kekedjatuhan Republik itu masih djauh, karena ia bersemajam didada rakyat, dan karena para pemimpin pemerin-

tahan telah menjediakan organisasi-organisasi jang akan bertindak bila saatnja datang jaitu organisasi gerilja jang diberi nama M.P.R.D. (Markas Pertahanan Rakjat Daerah) jang bersandar pula kepada para pemuda jang bergabung dalam B.P.N.K. (Badan Pengawal Negeri dan Kota).

M.P.R.D. didirikan oleh Dewan Pertahanan Daerah pada tanggal 28 Djanuari 1948, sesudah F.P.N. (Front Pertahanan Nasional) jang mengikat seluruh partai-partai berangsur longgar ikatannja karena ikatan jang seperti itu belum dapat menjusun tenaga perdjuaan jang sesungguhnya. M.P.R.D. didirikan untuk menjapai suatu susunan jang bulat, politis dan organisatoris, dan didalam rapat pleno K.N.I. Sumatera Barat bulan Djanuari 1948 disetujui prinsipnja. Maka D.P.D. disertai membentuknja dengan menjatukan sekretariat F.P.N. dan B.P.N.K. dengan susunan jang sanggup mendukung perang totaal dan mempunjai tugas kewadajiban dalam garis besarnja sebagai berikut :

- a. Mendjalankan pimpinan dan mengurus B.P.N.K.
- b. Memusatkan pimpinan badan-badan umum untuk kelantjaran pekerdjaan dan kebaikan perhubungan satu sama lain.
- c. Melakukan segala tindakan jang perlu untuk memperkuat semangat pertahanan dan pengorbanan rakjat untuk kepentingan perdjuaan rakjat totaal.
- d. Memberi latihan, penerangan dan menjusun rakjat untuk segala usaha pertahanan.

Maka untuk keresidenan Sumatera Barat berdirilah M.P.R.D. jang dikewedanaan bertjabang dengan nama M.P.R.K., dan dinegari beranting bernama M.P.R.N.

Dan B.P.N.K. didirikan untuk memobilisir tenaga seluruh rakjat oleh F.P.N. dengan peraturan D.P.D. Sumatera Barat No. 15/P/1947 jang mendjadi gabungan dari seluruh pemuda pedjuang, sehingga setiap putera Sumatera Barat jang berusia 17 sampai 35 tahun harus djadi anggota jang mengawal kampung dan kota tempat tinggalnja, sehingga dalam sebentar waktu sadja lebihkurang 500.000 pemuda diseluruh Sumatera Barat telah beladjar perang. Tentera dan barisan-barisan Rakjat melatih para pemuda itu dalam peperangan gerilja. Kedua badan inilah jang mendukung usaha perang disamping tentera dan kepolisian serta pamongpradja. M.P.R.D. diketuai oleh Saudara Chatib Sulaiman, dan B.P.N.K. djuga rentjananja.

Dalam memuntjaknja perang, maka M.P.R.K. jang sekarang dipusatkan diketjamatan dan M.P.R.N. didjadikan Badan Pemerintahan, jang susunannja didjelaskan dalam suatu instruksi jang berbunji antara lain sebagai berikut :

Markas Pertahanan Rakjat Negeri (M.P.R.N.).

Adalah satu organisasi pemerintahan negeri **dalam perang** jang aktif menghadapi pemerintahan dan pertahanan rakjat sehari-hari dan jang merupakan persatuan Nasional serta pemaduan tenaga rakjat semesta.

Dalam pertanggung-djawab dan melakukan kewadjabannja bersifat **pemerintahan collegiaal** jang dipimpin oleh Wali Negeri Perang disertai pembahagian tugas jang tertentu bagi masing-masing anggota M.P.R.N. agar dapat dipertanggung-djawabkan kepada rakjat dan instansi pemerintahan atasan. M.P.R.N. terdiri dari paling banjak tudjuh orang anggota termasuk :

1. Wali Negeri Perang sebagai Ketua.
2. Anggota-anggotanja terdiri dari : Wakil Ketua D.P.N., Komandan B.P.N.K. dan 4 orang wakil-wakil dari segala lapisan masjarakat jang aktif berdjuaug selama perang dengan djalan mengundjukkan dari golongan tersebut (partai-partai/organisasi-organisasi rakjat dan lain-lain) Wakil Ketua M.P.R.N. dipilih oleh dan dari anggota M.P.R.N. sesudahnja mendapat persetujuan dari Tjamat Militer jang bersangkutan.

Wali Negeri Perang sebagai Pamongpradja jang dimiliterisir mempunjai hak suara memutus jang harus dipatuhi dengan penuh tanggung-djawab (disiplin) oleh anggota-anggota M.P.R.N. seluruhnja dalam hal-hal jang menhendaki putusan tjepat dan dipertanggung-djawabkan. Pun Wali Negeri Perang bertanggung-djawab keluar dan kedalam serta kepada instansi pemerintahan atasan.

Kewadjaban anggota M.P.R.K. dibagi kepada lima tugas jang tertentu :

1. Keamanan dan Pengawalan (B.P.N.K.).
2. Perbekalan Keuangan (termasuk pemungutan iuran perang negara dan sumber-sumber keuangan Pemerintah jang lain).
3. Penerangan.
4. Sosial (B.P.K.K.P.), Palang Merah, Dapur Umum, pengungsi dan lain-lain.
5. Pembangunan (kewadjaban-bekerdja, pertanian, pendidikan, perikanan dan ekonomi rakjat umum).

MARKAS PERTAHANAN RAKJAT KETJAMATAN (M.P.R.K.).

Pada umumnja M.P.R.K. ini mempunjai sifat jang sama dengan M.P.R.N. dan mengkoordinir serta memimpin M.P.R.N. jang ada dalam daerahnja. M.P.R.K. ini **hanja** didirikan diketjamatan, dan terdiri dari paling banjak **7 orang** anggota, jaitu :

1. Tjamat Militer sebagai Ketua.
2. Komandan kesatuan T.N.I. diketjamatan itu atau seorang Opsir yang ditundjuk oleh Komandan sektor yang bersangkutan, sebagai Wakil Ketua merangkap pemimpin M.P.R.K. bahagian pertempuran.
3. Kepala Polisi Ketjamatan sebagai anggota merangkap pimpinan bagian keamanan dalam M.P.R.K.
4. Empat orang anggota lainnja yang diambil dari pemimpin-pemimpin rakjat yang berpengaruh dan aktif dalam perdjjuangan diketjamatan.

Dalam pada itu Tjamat Militer sebagai Pamongpradja yang dimiliterisir mempunyai hak suara memutuskan yang harus dipatuhi dengan penuh tanggung-djawab (disiplin) oleh anggota-anggota M.P.R.K. seluruhnja dalam hal-hal yang menghendaki keputusan tjepat dan dipertanggung-djawabkan. Pun Tjamat Militer bertanggung-djawab keluar dan kedalam serta kepada pemerintahan atasan.

Kewadajiban anggota-anggota M.P.R.K. terbagi kepada tugas-tugas yang tertentu sebagai berikut : pertempuran (pasukan Mobil teras B.P.N.K., kedua : Bahagian keamanan, ketiga : Bahagian Perbekalan dan Keuangan, keempat: Bahagian Penerangan, kelima: Bahagian Sosial, keenam : Bahagian Pembangunan.

Mulanja M.P.R.K. berpusat dikewedanaan, dan dengan dihapuskannja M.P.R.K. dikewedanaan ini maka Wedana Militer **memimpin dan mengkoodinir** M.P.R.K. yang ada dalam daerahnja serta menjampaikan segala peraturan, instruksi, dan lain-lainnja kepada instansi-instansi pemerintahan dalam daerahnja dan memeriksa apakah peraturan-peraturan, dan lain-lainnja itu sampai kepada yang dimaksud. Pun setiap saat harus mengundjungi ketjamatan-ketjamatan dan negeri-negeri untuk memberikan tuntunan-tuntunan, soal-soal pemerintahan dan perbekalan serta lain-lain hal yang bersangkutan dengan urusan kenegaraan. Pun menurut instruksi itu Wedana diwadjabkan pula mengambil iniatif dan langkah-langkah yang perlu untuk kebaikan kewedanaan yang dipimpinnja dalam lapangan ekonomi, sosial dan perdjjuangan rakjat umumnja.

M.P.R.K. dan M.P.R.N. sebagai satu konsentrasi dari tenaga perdjjuangan dilapangan sipil dan militer, mempunyai suatu himpunan tenaga raksasa yang sumbernja takkan kundjung habis walaupun perdjjuangan berlangsung berapa djuga lamanya. Himpunan tenaga ini ialah B.P.N.K. (Badan Pengawal Negeri Kota) yang sebagaimana kita terangkan diatas tadi, didirikan pada achir bulan Djuli 1947 oleh D.P.D. Sumatera Barat sewaktu Belanda memulai serangannja yang pertama.

M.P.R.D. dan M.P.R.N. kita sedjarahkan sedikit badan yang telah memikul beban perdjjuangan yang maha berat itu, yang berpuntjak kepada perang gerilja.

Pada waktu serangan Belanda jang pertama itu, terasa betul keperluan berdirinja satu Badan jang disamping kepolisian dapat mendjamin keamanan dan keselamatan penduduk tiap-tiap negeri. Sebab, bagaimanapun hebatnja perlawanan kita terhadap serangan Belanda, kalau dalam tiap-tiap negeri tidak ada keamanan, maka hal ini dapat menimbulkan kekatjauan, bahkan melemahkan per-djuangan dan kerdja sama digaris belakang, begitulah kedudukan B.P.N.K. mula-mula. Beberapa bulan sesudah didirikan B.P.N.K., rupanja perintah menghentikan tembak-menembak tidak mendapat perindahan dari pihak Belanda, sehingga suasana ditanah air kita tetap genting dan sampai saatnja perundingan diatas kapal Renville bulan 12 tahun 1947, belumlah lagi membawa kedjernihan, dan permulaan bulan 1 tahun 1948, seakan peperangan akan meletus kembali. Saat itu didirikanlah oleh D.P.D. Sumatera Barat Markas Pertahanan Daerah Sumatera Barat (M.P.R.D.) dengan M.P.R.K.-nja ditiap-tiap kewedanaan dan M.P.R.N. ditiap-tiap negeri. M.P.R.D. sebagai badan jang tertinggi mengepalai B.P.N.K. seruluh Sumatera Barat dan didalam segala tindakannja bertanggung djawab kepada D.P.D. Sumatera Barat. Sesudah Renville ditandatangani (17-1-1948) terasalah kerugian kita waktu itu, baik politik maupun militer jang menjejabkan pemimpin-pemimpin jang selama ini memberikan tenaga, waktu dan pikiran serta harta benda untuk menegakkan negara, mengenangkan nasib tanah air dengan mempunyai hati jang luka. Terasalah oleh kita akan bertempur kembali dengan Belanda dan timbullah keinginan untuk menghadapi Belanda setjara semesta; artinja tentera dan rakjat mesti bahu-membahu menghadapi Belanda. Maka dilatihlah pemuda-pemuda jang berumur 18 tahun keatas, istimewa jang telah bergabung dalam B.P.N.K. setjara kemiliteran dan gerilja, dan dalam tempo 6 bulan hampir diseluruh Sumatera Barat pemuda-pemuda telah dapat didikan dan latihan, meskipun tidak sempurna, tetapi dasar-dasar dan pengertian memperdjuangkan negara telah dimasukkan kedalam djiwa pemuda-pemuda itu. Dan ternjata latihan itu tidak sia-sia. Waktu Belanda dengan sekonjong-konjong menjerang kita tanggal 19-12-1948, sehingga banjak alat-alat pemeritah permulaan kutjar-katjir, maka B.P.N.K. ditiap-tiap negeri jang didatangi dapat meladeni alat-alat pemerintah dengan baik, dan jang penting pula B.P.N.K. dapat mempertahankan keamanan dalam negeri masing-masing. Inilah djasa-djasa B.P.N.K. dan atas keichlasan bekerdja pemuda-pemuda itu Pemerintah selalu menjatakan penghargaan kepada pemuda-pemuda kita itu. Per-djuangan diteruskan dan terbukti pemuda-pemuda B.P.N.K. bersama-sama dengan tentera menghadapi Belanda, banjak jang luka, banjak pula jang tiwas, semuanya ini korban untuk kedjajaan Tanah Air.

Untuk menghindarkan sifat-sifat penganiajaan dan pembunuhan sebagai tindakan diluar hukum, maka pemerintah Militer Sumatera

Barat lalu mengeluarkan sebuah instruksi dimana ditegaskan antara lain sebagai berikut :

Tentang soal keamanan maka B.P.N.K. bersama dengan dan dibawah pimpinan Wali Negeri ditempatnja, mendjaga keamanan dalam negeri. Tiap-tiap penduduk negeri mesti bebas dari pada perasaan ketakutan dan merasa diperlindungi oleh alat-alat pemerintah, termasuk didalamnja B.P.N.K. Keselamatan harta benda dan djiwa penduduk mesti mendjadi tudjuan utama dari Wali-wali Negeri dan Badan Kepolisian beserta B.P.N.K.

Tentang lalu lintas dan pendjagaannya didjelaskan bahwa penduduk asli dalam negeri dan orang-orang yang dikenal oleh Wali Negeri, M.P.R.N. dan M.P.R.K. bebas keluar masuk dalam negeri. Sedangkan orang-orang yang berasal dari luar daerah negeri tersebut, kalau hendak keluar masuk mesti seizin Wali Negeri, Badan Kepolisian dan B.P.N.K. Kalau orang-orang itu menginap disatu rumah mesti diketahui apa tudjuannya dan kemana ia hendak pergi. Pun kalau disuatu negeri ada berkedudukan Komandan Ketenteraan Kota (K.K.K.) maka orang-orang keluar masuk negeri itu, sesudah ditjatat namanya, daftar itu mesti diteruskan kepada K.K.K. Dan K.K.K. melihat keadaan setempat-setempat boleh membuat peraturan untuk kesempurnaan lalu lintas diwilajahnja. Adapun kurir yang membawa surat yang melalui satu-satu negeri mesti mendapat perlakuan baik, dan kalau perlu pertolongan untuk menundjukkan djalan, B.P.N.K. setiap waktu harus bersedia membantunja. Surat-surat yang dibawa kurir yang berasal dari pembesar-pembesar negara (sipil dan militer) tidak guna diperiksa dan yang bersifat rahasia sekali-kali tidak boleh dibuka dan diperiksa.

Tentang orang-orang yang ditjurigai didjelaskan, bahwa kalau ada seseorang yang keluar masuk satu negeri ditjurigai, boleh diperiksa dan ditahan selama-lamanja 24 djam. Sesudah itu dengan segera mesti diserahkan kepada Badan-badan Kepolisian dengan setahu Wali Negeri. Orang-orang ini tidaklah boleh disiksa atau dianiaja apalagi dibunuh, karena perbuatan seperti ini akan menurunkan deradjat dan nama baik Pemerintah dan Negara. Orang-orang yang ditjurigai ini hartanja tidak boleh diambil atau dirampas, dan kalau ada diantara surat-surat dan keterangan-keterangan lain yang memberatkan tuduhan kepadanya, maka surat-surat itu boleh dirampas untuk mendjadi tanda bukti. Dan tindakan keras akan diambil terhadap anggota-anggota B.P.N.K. yang melanggar instruksi ini dan kalau terdjadi pembunuhan dengan tidak ada alasan, maka orang yang membunuh boleh dihukum berat oleh alat-alat Pemerintah yang berwadjib (Mahkamah Militer).

Tentang soal pertahanan maka diinstruksikan kepada B.P. N.K. supaya disesuatu negeri yang belum didatangi musuh wadjiblah menjiapkan pertahanan melihat keadaan negeri itu sendiri. Dan kalau diperintahkan oleh Komandan front, K.K.K. atau Wali

Negeri dan M.P.R.N. untuk menghantjurkan djalan atau membuat halangan-halangan, maka B.P.N.K. harus memberikan bantuan sepenuhnya. Djuga diperingatkan supaja pengawalan didjalan-djalan tjukup dua tiga orang sadja, tetapi didekat itu ditempat jang tersembunji mesti ada tenaga bantuan. Tenaga-tenaga pengawalan diatur pembagiannja begitu rupa, sehingga tidak mengganggu kesehatan, misalnja satu negeri mempunyai 100 anggota B.P.N.K., maka jang seratus itu dibagi tujuh sehingga setiap orang hanya mengawal 1 hari dalam seminggu. Dan kalau disatu negeri berada Komandan Pertempuran dan/atau K.K.K., maka tanggung-djawab pertahanan adalah ditangan mereka itu dengan dibantu oleh Pamongpradja jang bersangkutan.

Bila musuh mendatangi satu negeri, maka mestilah didjaga kalau hendak menggempur agak dekat kebatas negeri untuk menghindarkan korban penduduk. Dan bila musuh datang harus bersebar, sedangkan perempuan, orang tua-tua dan anak-anak tak usah menjingkir. Tetapi kalau kenjataan bahwa musuh djuga menganiaja mereka ini, maka kaum wanita dan anak-anak buat kali jang kedua musuh datang, baiklah menjingkir sama sekali. Dalam pada itu sesuatunja ditetapkan lebih landjut oleh Komandan Pertempuran dan K.K.K. ditempat masing-masing. Pun B.P.N.K. setiap waktu melatih diri untuk dikirim ke front menurut ketentuan Komandan Pertempuran masing-masing. Achirnja diperingatkan bahwa perdjungan kita selain dari mendirikan negara jang merdeka dan berdaulat, adil dan makmur, adalah mempunyai visie dan tudjuan jang lebih dalam, jaitu mendjamin tiap-tiap penduduk bebas dari ketakutan dan bebas dari penghinaan, serta mendjamin keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. Hanjalah dengan keichlasan jang sungguh-sungguh dan dengan kesutjian hati menghadapi perdjungan, tiap-tiap negeri dapat merasa bangga mendjadi dasar kekokohan negara untuk masa jang akan datang.

Kemenangan Belanda.

Demikianlah instruksi jang dikeluarkan oleh Pemerintah Sumatera Barat tentang pembentukan tenaga-tenaga pendukung perdjungan ini, instruksi mana dengan sendirinja telah membajangkan akan kehebatan perdjungan pada waktu itu. Djauh berbeda dengan peraturan-peraturan pemerintahan dimasa damai jang dimulai dengan : „mengingat menimbang” dan sebagainja, lalu diteruskan setjara juridis staatsrechtelijk dengan kata-kata juris jang sukar dipaham. Maka instruksi dizaman darurat ini, memang mengetok lubuk hati dan djiwa, dizaman pemerintahan perang dari rakjat berdjuang, dimana setiap kampung mendjadi benteng dan setiap kota jang diduduki musuh beserta daerah sekelilingnja mendjadi medan perdjungan, dimana setiap sa'at terdjadi peristiwa-peristiwa jang kedjam dan bengis, dimana harga djiwa manusia merendah mendjadi seharga sebutir pelor, dan tenaga-

tenaga Indonesia dan Belanda yang berhadap-hadapan dalam peperangan yang hebat itu memajukan segala apa yang bisa dimajukan oleh manusia dalam mempertahankan pendirian beserta hidup dan kehidupan. Pihak Belanda memajukan suatu tentera yang bersenjata lengkap dipimpin oleh Opsir-opsir yang ahli strategik dan taktik militer disokong oleh suatu administrasi sipil yang berpengalaman puluhan tahun dalam menggunakan segala tiorak manusia untuk kepentingannya, yang mengetahui sedalam-dalamnya dimana terletak titik kelemahan dan kekuatan dari masyarakat Sumatera Barat. Sedangkan pihak Indonesia mempertaruhkan dalam perang kemerdekaan ini akan segala apa yang dipandang berharga oleh manusia berupa jiwa, harta benda, ternak dan sawah ladang.

Daerah Sumatera Tengah sebagai satu bahagian dari Indonesia yang berdjung menjadi lapangan bagi beradunya kedua kekuatan itu !

Diawal Djanuari 1949 kelangsungan perdjungan telah mengambil bentuk yang nyata. Kabut panik dan kegugupan telah terjah dan tampaklah keadaan yang nyata, realiteit yang pahit tapi harus diakui sebagai berikut: kota-kota yang selama ini menjadi pusat pemerintahan dan gerak-gerik ekonomi telah lepas ketangan musuh seperti Solok, Padang Pandjang, Bukittinggi (yang sebelum ini pernah dibanggakan sebagai Jogja kedua!), Pajakumbuh, Tanjung Ampalu, Sawah Lunto, Batusangkar, Sidjundjung, dan lain-lainnya.

Dengan berpusat kepada kota-kota yang diduduki ini, Belanda melancarkan patroli kekampung-kampung berkeliling, dibajangi diudara oleh „tjapung” dan „Mustang” yang membom dan menembaki dengan howitser dan mortir akan segala tempat yang dianggapnya sebagai pemusatan pertahanan kita. Pemerintahan Darurat telah berdiri dari Keresidenan sampai ke Kabupaten, Kewedanaan dan Ketjamatan, sampai kenegeri-negeri. Roda pemerintahan telah berputar kembali, dan dari kabut pertempuran dan gelanggang panik, muntjullah suatu pemerintahan yang berupa motor perdjungan yang menghimpunkan pada dirinya akan **kekuatan sipil dan militer** yang berbentuk D.P.D. di keresidenan, beserta M.P.R.K., M.P.R.N., dan B.P.N.K. yang berdjung bahu-membahu dengan Angkatan Perang.

Daerah Militer, 2 Djanuari 1949.

Maka tibalah saatnya bahwa pemerintahan yang dengan sendirinya oleh serangan Belanda telah menjadi Pemerintah Militer itu dimiliterisir setjara resmi. Maka pada tanggal 2 Djanuari 1949 dengan ketetapan Panglima Tentera dan Territorium Sumatera No. WKS/SI/Ist 038, daerah Sumatera Barat dijadikan daerah militer dan Residen Sumatera Barat Mr. St. M. Rasjid dijadikan Gubernur Militer Sumatera Barat, dan kemudian juga keresidenan Riau dijadikan daerah Militer dan Residen R. M. Utojo

didjadikan Gubernur Militer Riau, sedangkan daerah Djambi didjadikan daerah militer tetapi dimasukkan ke Sumatera Selatan, djadi dibawah kekuasaan Gubernur Militer Sumatera Selatan. Maka dibawah Gubernur Militer memerintahlah Bupati Militer jang berpangkat Major Titulair, seterusnya Wedana Militer jang berpangkat Kapten Titulair, dan Tjamat Militer jang berpangkat Letnan I Titulair dan Wali Negeri jang dinamakan dengan Wali Negeri Perang. Polisi djuga dimiliterisir sehingga disamping pangkatnja dalam kepolisian, ia djuga mempunjai pangkat titulair setjara ketenteraan.

Dalam pendjelasan tentang kedudukan Gubernur Militer Daerah Sumatera Barat itu, dinjatakan, bahwa dengan ketetapan Panglima Tentera dan Territorium Sumatera jang tersebut diatas sementara menanti penetapan resmi dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia (P.D.R.I.), maka daerah Sumatera Barat didjadikan daerah militer dengan dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (Residen Sumatera Barat) dan wakilnja adalah Komandan Sub Territorium dan Kesatuan-kesatuan di Sumatera Barat dengan dibantu oleh staf anggotanja dan staf penasehat, serta satu staf sekretariaat. Pertimbangan-pertimbangan untuk mengadakan daerah Militer ini ialah karena kita berada dalam keadaan perang, instansi pemerintahan terpisah-pisah dan bertjerai, sedangkan banjak soal-soal jang mesti mendapat keputusan tjepat dan tegas, istimewa jang mengenai pertahanan. Maka didalam peperangan totalitair ini, dimana pemerintah, tentara dan rakjat bersama-sama dengan tekad jang satu menghadapi Belanda, maka untuk mendjalin effektifnja djalan perdjjuangan, perlulah **pimpinan pemerintah dipegang setjara militer** agar dapat dengan langsung memberi perintah dan instruksi kepada Kesatuan-kesatuan Tentera, dengan tidak mengurangi hak technis militer dari Komandan Sub. Territorium Sumatera Barat untuk Kesatuan-kesatuan jang dibawah pimpinannja. Didjelaskan selandjutnja bahwa titik berat perdjjuangan ini ialah kekuatan dan kesanggupan rakjat bertahan dan menjerang dan dengan dipelopori oleh tentara dan polisi, dapat setiap watku melantjarkan serangan kepada musuh. Habislah sementara perbedaan rakjat berdjjuang dengan tentara dan hal ini mesti diisjafi untuk mendjaga kesatuan bertindak sedangkan Komando pertempuran tetap dipegang oleh ahli ketenteraan.

Selandjutnja ditegaskan benar bahwa agar djangan menimbulkan salah faham, dinjatakan bahwa pemerintah sipil dari Bupati kebawah tetap berdjalan sebagai biasa, dan masing-masing diberi status militer untuk dengan lekas bertindak dan mengambil keputusan bersama-sama pimpinan tentera ditempatnja.

Mahkamah Militer.

Mengenai orang-orang jang merugikan perdjjuangan, melambatkan djalannja sesuatu untuk kepentingan pertahanan, dapat

diambil tindakan dengan tepat dengan mengadakan **Mahkamah Militer terpentjar** jang tempatnja akan ditentukan oleh Gubernur Militer. Dan dengan dibentuknja daerah militer ini, hak-hak dan milik rakjat tidaklah akan terganggu, malahan lebih mendapat djaminan perlindungan dari pemerintah, tetapi sebaliknya diharap-kan agar rakjat lebih lagi dari waktu jang lampau memenuhi kewadjabannja untuk negara dan mematuhi tiap-tiap peraturan jang dikeluarkan mengenai beban rakjat menurut kesanggupan masing-masing.

Pendjelasan itu diachiri dengan seruan bahwa hanja dengan kesatuan dan persatuan jang bulat, satu pimpinan dan satu komando, rakjat berdjuaug akan mendapat kemenangan.

Dan pendjelasan ini rasanja telah tjukup djelas!

Perdjuangan berdjalan dengan sengitnja, sedangkan uang kertas tidak ditjetak lagi, agar inflasi djangan memuntjak. Dari manakah diambilkan bekal dan belandja untuk perdjuangan?

Iuran Perang.

Perbelandjaan ditutup dengan mengadakan sematjam padjak jang dinamakan **Iuran Perang Negara**, atau lebih populer dengan sebutan **I.N.P.** (Iuran Negara dalam Perang), jang meliputi akan **sepersepuluh** dari apa jang dihasilkan dan dipunjai oleh rakjat, ketjuali rumah dan barang-barang perhiasan. **I.N.P.** ini adalah satu udjian maha berat tetapi sangat tepat untuk mengukur sampai dimana besarnja hasrat rakjat untuk merdeka karena pada masa segala sumber kehidupan dan perekonomian terkandas dan tertutup mati, pada masa seluruh rakjat menderita kemelaratan jang sebesar-besarnja, akibat dari tiga setengah tahun pendudukan Djepang dihimpit lagi oleh beban tiga setengah tahun perdjuangan kemerdekaan, maka sekarang dalam masa jang sesulit-sulitnja ini, dimana hampir setiap orang tidak mempunjai apa-apa lagi, dia masih harus menjerahkan lagi sepuluh persen dari harta-benda dan hasil sawah ladangnja beserta ternaknja untuk Negara. Tetapi masjarakat Sumatera Barat jang ekonominja berpangkal kepada pertanian itu masih dapat memikul beban ini, dan Pemerintah dapat meneruskan memimpin perdjuangan dengan tak usah mengeluarkan uang kertas baru, sedangkan segala belandja dipikul oleh rakjat.

Untuk mengatur tjara pemungutan **I.N.P.** ini maka **D.P.D.** Sumatera Barat pada tanggal 28 Desember 1948 mengeluarkan Peraturan No. 2/DPD/P-Ist tentang pemungutan Iuran Perang Negara dimana dinjatakan bahwa untuk memperkuat tenaga perdjuangan dan untuk mentjegah pengambilan hak milik rakjat dengan setjara tak teratur, maka pemungutan resmi dipusatkan dalam satu tangan. Maka ditetapkan bahwa disetiap kawedanaan dan negeri haruslah dibentuk satu panitia pemungutan jang dike-tuai oleh Wedana, dan anggotanja terdiri dari Kepala Polisi, ang-

gota B.P.N.K. dan pemimpin-pemimpin Rakjat, dan dinegeri-negeri terdiri dari Wali Negeri sebagai Ketua, dan anggota D.H.N., seorang penghulu, ulama dan Komandan B.P.N.K.

Didjelaskan bahwa pemungutan ini dilakukan atas dasar sepuluh persen (sepersepuluh) dari kekayaan penghasilan rakjat berupa natura (jaitu bahan makanan, beras, djagung, ternak, dan lain-lain).

Maka panitia ini mempunyai tugas kewadjaban menaksir dan memungut Iuran Perang Negara dengan dibantu oleh Ninik Mamak, Alim Ulama dan anggota-anggota B.P.N.K. Sedangkan penaksiran dan pemungutan natura haruslah dilakukan dengan bidjaksana sehingga rakjat yang miskin djangan menderita. Dan djika pemungutan natura sukar didjalankan mengingat keadaan makanan rakjat dinegeri masing-masing, maka boleh dilakukan pemungutan menurut harga pemungutan natura. Kemudian hasil pemungutan dikumpulkan dikantor Wali Negeri dan dilapurkan kepada Tjamat, Wedana, Bupati, dan D.P.D. Sumatera Barat. Tiap-tiap pemungutan ini dilakukan, harus ditinggalkan tanda bukti penerimaannya yang ditandatangani oleh Wali Negeri yang bersangkutan atas nama D.P.D. Sumatera Barat.

Achirnja didjelaskan bahwa kepada tiap-tiap pemungut akan diberi komisi sebanyak 10% dari hasil pemungutan dan sebahagiannya diserahkan kepada Wali Negeri atas petundjuk Wedana dan Tjamat yang bersangkutan. Sedangkan setiap warganegara yang tidak memenuhi peraturan ini akan dituntut menurut undang-undang keadaan perang.

Sekianlah undang-undang tentang pemungutan I.N.P. itu !

Perhubungan Pos, 4 Djanuari 1949.

Sekarang tentang perhubungan pos. Bagaimanakah pula tjara-nja mengatur satu hubungan yang rapi dan tetap antara segala badan-badan Pemerintahan dan ketenteraan diseluruh daerah berdjuaug, sedangkan segala Kantor Pos yang terletak dikota-kota telah tak dapat dipakai lagi, karena djatuh ketangan musuh !

Satu sistim kurir yang sambung-bersambung djalannya memper-talikan seluruh daerah perdjuaugan dan badan-badan pertempuran, sehingga segala instruksi dan perintah beserta lapuran dapat ber-djalan dengan beres. Dalam hal ini amat besarlah djasa dari para kurir yang umumnya terdiri dari anak-anak yang berumur kurang dari 18 tahun. Ada diantaranya yang dari kalangan peladjar dikota-kota, dan banjak pula dari anak kampung biasa sadja, yang mem-pertaruhkan djiwanja untuk menjampaikan segala instruksi dan perintah serta banjak yang gugur ditembak dan ditangkap musuh, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan urat dan darahnja mereka telah mendjadi urat nadi perdjuaugan kemerdekaan.

Dalam instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat tanggal 4 Dja-nuari 1949 No. 8/DPD/Instr. didjelaskan bentukan perhubungan pos diseluruh Sumatera Barat ini.

Ditegaskan bahwa M.P.R.K. mengatur satu susunan untuk menjalankan perhubungan pos sipil dan transport barang-barang Pemerintah setjara sambung-bersambung antara negeri kenegeri. Tjaranja ialah dengan setiap M.P.R.K. mengadakan satu djumlah anggota-anggota B.N.P.K. untuk menjampaikan dan menerima pos, menjalin kabar dan sebagainya untuk dinegeri sendiri dan untuk dikirim terus, sedangkan ditiap-tiap negeri ditentukan tempat menerima dan membagi pos tersebut, djika perlu tempatnja mobil dan dirahasiakan, pun ditempat itu sebaiknja diadakan alat-alat penjalin kabar. Djika antara negeri kenegeri terlampau djauh, maka diper-tengahan diantara dua negeri itu, (kampung) diadakan pos bantuan (hulppos). Dan dari satu M.P.R.K. ke M.P.R.K. lain untuk membawa instruksi kebawah hendaklah diadakan lijn istimewa, tidak menurut lijn biasa, jaitu dari satu negeri kenegeri, tetapi antara kedua M.P.R.K. itu diadakan beberapa pos sadja, jang semakin sedikit posnja semakin baik. Untuk lijn istimewa ini disetiap pos ditentukan orang-orangnja, begitu djuga di M.P. R.K. sendiri supaya segala instruksi-instruksi dan surat penting itu kalau hilang dapat dikontrol dimana hilangnya, sehingga orang-orang jang ditentukan menghadapi soal ini dapat memper-tanggung-djawabkan pkerdjaannja. Tiap-tiap M.P.R.K. hendak-lah mengadakan lijn istimewa ini dengan M.P.R.K. jang berdekatan, sehingga dengan demikian perhubungan surat-menjurat ke dan dari Gubernur Militer dapat dilantjarkan dengan mudah. Dan lijn istimewa ini akan dipakai pula untuk perhubungan antara Gubernur Militer dan Bupati Militer, Wedana-wedana Militer dan lain-lain instansi diseluruh Sumatera Barat. M.P.R.K. selekas mungkin harus melapurkan kepada Gubernur Militer tentang pembentukan lijn istimewa ini, dimana pos-posnja dan siapa orang-orangnja umpamanya dalam perhubungan antara M.P.R.K. Pajakumbuh sektor Utara dengan M.P.R.K. sektor Selatan ialah; Limbanang-Taeh-Batu Balang-Padang Laweh-Taram dan Batang Tabit. Seterusnja dalam perhubungan antara M.P.R.K. Pajakumbuh dengan M.P.R.K. Batu Sangkar ialah Batang Tabit-Situdjuh-Tungkar-Sumanik-Lima Kaum, dan begitulah seterusnya dengan M.P.R.K.-M.P.R.K. lain. Dalam pada itu tentera mempunyai dinas kurir sendiri, tetapi boleh minta bantuan kepada dinas sipil dengan seizin M.P.R.K.-M.P.R.N.

Demikianlah dengan terselenggaranja hubungan pos ini, maka segala perintah, instruksi dan pemberitaan berdjalan dengan beres menudju alamatnja masing-masing, dan rakjat berdjuaug dan seluruh rakjat tetap mengetahui dan dapat mengikuti dengan teliti akan perdjalanan perdjuaugan, serta mendapat pula warta berita dari dalam dan luar negeri. Warta berita ini diambil dengan radio accu jang accunjia ditjas dengan dinamo dari motor-motor rusak, jang diputar dengan tenaga manusia atau tenaga kintjir air. Warta berita ini diterima oleh badan penerangan dari M.P.R.K. jang ada mempunyai radio ini, dimana berita itu disaring dan titik

lalu distensil banjak dan disebarkan oleh para kurir keseluruhan daerah.

Djadi seterbentuknja Pemerintahan Militer Sumatera Barat, maka dapatlah ia memakai alat-alat jang telah dibentuk oleh D.P.D. ini dengan se-efektif-efektifnja berupa M.P.R.D., M.P.R.K., dan M.P.R.N. dan B.P.N.K. beserta peraturan-peraturannja tentang I.N.P. dan perhubungan pos istimewa ini. Bagaimana sifat Pemerintahan Militer ini dapatlah diperhatikan dari uraian Gubernur Militer Mr. St. M. Rasjid sendiri dalam salah satu tulisannja jang petikannja antara lain sebagai berikut :

Sifat Pemerintah Militer.

Setjara Negara demokrasi tiap-tiap tindakan jang bersifat militer sedapat-dapatnja didjauhkan, tetapi keadaan jang memaksa untuk menghadapi serangan-serangan Belanda, maka dengan terpaksa dipusatkanlah kekuasaan dalam satu tangan tetapi dibantu oleh para penasehat jang terdiri dari anggota-anggota D.P.D., badan Executief dan beberapa orang pemimpin rakjat. Kalau sebelum aksi militer pertama dan kedua, oleh karena hal-hal organisasi dan keuangan kita terus menerus menghadapi kesulitan, maka lebih-lebih terasa lagi dizaman darurat itu sulitnja mendjalankan pemerintahan karena semua alat-alat seperti zender dan mesin-mesin tik hanya sebagian ketjil jang dapat dibawa keluar. Tetapi dengan ketabahan dan kemauan jang keras serta berpegang teguh kepada tjita-tjita negara, semua tugas dapat dilaksanakan dengan tetap bertawakkal kepada Allah s.w.t. dan didukung oleh Pemerintah dan rakjat jang tabah hati serta diinsjafi oleh rakjat jang sadar dan mendapat penerangan setjukupnja, maka dengan bantuan nasi bungkus rakjat, dengan kurir-kurir jang aktif mendjalankan instruksi dari pemerintahan militer, dengan mengadakan padjak perang, dengan meruntuhkan djalan-djalan besar jang dapat dilalui Belanda dengan kendaraannja, dengan hanya sebagian ketjil rakjat bersendjata, itupun banjak senapang berlansa, dengan timbulnja rasa keinsjafan dari pemuda-pemuda berdjuaug karena pembentukan M.P.R.K., maka dapat djuga disemua tempat jang strategis diberi pukulan hebat kepada Belanda.

Belanda sedia berunding, Maret 1949.

Pihak Belanda mengira bahwa dengan hampir seluruh daerah kita diduduki tenteranja, dan dengan ditangkapnja pemimpin-pemimpin kita, mereka bisa berkuasa lagi dan dapat mendjalankan pemerintahan kolonial seperti sebelum tahun 1941. Tetapi sesudah tiga bulan Belanda melihat tidak ada djuga kemadjuan dalam pemerintahannja, sedangkan tentera jang muda-muda mulai gelisah tentang hasil jang diperdapat dari usaha perang, maka pada bulan Maret 1949 Pemerintahan Belanda mengutjapkan satu

keterangan jang menjatakan bahwa Belanda bersedia berunding dan akan memberi kemerdekaan penuh kepada rakyat Indonesia, asal saja mau bekerdja sama dengan pihak Belanda untuk membangun Negara Indonesia jang sudah hantjur sebagian besar itu. Tetapi omong kosong dari Belanda ini jang sudah berkali-kali mereka utjapkan tetap tidak kita pertjajai, **karena rakyat belum menerima keterangan tentang sesuatuja dari pemerintah P.D.R.I.** jang mendapat mandat penuh dari kabinet pada tanggal 19 Desember 1948 itu.

Tindakan kedjam dari Belanda.

Rumah-rumah rakyat dapat dibakar oleh Belanda, kedudukan tentera kita dapat mereka kutjar-katjirkan, orang-orang pengchia-nat dapat mereka pakai sebagai alat, tetapi djiwa kemerdekaan jang telah mulai berurat-berakar dalam dada rakyat, tidak dapat dimusnahkan oleh Belanda.

Dan keinginan luhur jang mempunjai dasar kehormatan sebagai manusia mendorong tiap-tiap putera dan puteri Indonesia jang insjaf buat memikul kewadajiban jang harus didjundjung tinggi diwaktu darurat itu Disaat-saat sekarang dan disaat-saat jang akan datang banjaklah jang dikeluarkan teori strategi dan taktik perdjuaan, banjaklah usaha-usaha untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan negara, walaupun mungkin dihambat oleh faktor-faktor jang berada diluar kemauan kita, tetapi satu hal jang tidak boleh kita lupakan ialah hanja **kedjudjuran bekerdja** dengan tidak menghendaki balasan tetapi menganggap pekerdjaan itu suatu kewadajiban untuk kepentingan nusa dan bangsa.

Hanja dengan tjara beginilah usaha pembangunan setjara besar-besaran dapat dilaksanakan. Pada saat sekarang dan masa jang akan datang tidaklah dapat kita meletakkan satu kesalahan kepada dunia luar, tetapi selama Indonesia mempunjai pemimpin-pemimpin jang sanggup berusaha dan berkorban dengan mengenjampingkan kepentingan diri dan mengemukakan kepentingan umum (ape tite sosio tates) maka Indonesia dihari depan akan mendapat tempat jang sewadjarnja dalam gelanggang internasional. Moga-moga Tuhan Jang Maha Kuasa akan melindungi negara Republik Indonesia dan memberi kemerdekaan jang penuh bagi bangsa dan tjita-tjita kita.

Sekian jang kita petik tulisan dari bekas Gubernur Militer Sumatera Barat dan kemudian Gubernur Militer Sumatera Tengah, jang membayangkan bagaimana sifat-sifatnja Pemerintahan Militer jang didjalankan dibawah pimpinannja pada waktu darurat.

Bahan makanan berkurang, Djanuari—Maret 1949.

Pada masa perang, soal keamanan rakyat jang sedang memikul beban perdjuaan jang begitu hebat, adalah soal jang sangat

penting. Faktor-faktor ekonomis dan psikologis pada masa itu memanglah sangat menggelisahkan sekali. Belanda tahu benar pada saat mana ia harus menjatuhkan pukulannya. Bulan-bulan Januari dan Februari sampai Maret adalah masa patjeklik, yang dikatakan orang kampung musim guntung. Masa dimana padi disawah barusan habis disiang (berumur 2 bulan) dan padi hasil dari panen yang lalu, telah delapan bulan dimakan dan dibelanjakan, sehingga umumnya persediaan makanan dikampung-kampung telah habis. **Pada masa ini benarlah Belanda menjerang!** Kesulitan beras menjadikan harganya naik melontjat-lontjat sehingga dari harga tiga/empat puluh Urips sebelum agresi, melambung menjadi 100 à 150 Urips pada permulaan agresi. Perdagangan barang-barang keperluan sehari-hari, praktis terputus pada permulaan agresi, sehingga kaum pedagang ketjil juga menderita sangat hebat. Faktor-ekonomis ini ditambah pula dengan kekuatiran dan kegelisahan yang sudah semestinya diawal setiap peperangan, menjadi himpitan psikologis pula. Dalam pada itu rakyat dan badan-badan perjuangan. Ini saja dalam keadaan biasa sudah bisa menimbulkan gangguan keamanan, apalagi dalam keadaan perang. Oleh karena itu untuk menjamin keamanan rakyat yang sedang memikul beban perjuangan, agar aman dalam mencari nafkah sehari-hari, dalam bertani dan berdagang ketjil-ketjilan, maka Gubernur Militer Sumatera Barat dengan instruksinya No. 6/GM/Instr. menegaskan akan tugas dan kedudukan kepolisian, yang dengan dibantu B.P.N.K. adalah menjamin keamanan yang terutama.

Pemeliharaan keamanan.

Dalam instruksi itu ditegaskan, bahwa kedudukan polisi sama dengan Pamongpradja. Disatu tempat yang diserang dan diduduki oleh musuh, polisi boleh pindah tempat, tapi tidak boleh keluar ressortnya. Sedangkan polisi ditempat-tempat yang belum diduduki musuh bekerdja sebagaimana biasa, yaitu menjamin keamanan dan sewaktu-waktu tenaganya dapat diminta oleh Pamongpradja dan tentera ditempat itu. Dan polisi diharuskan memakai tenaga B.P.N.K. untuk memperkuat keamanan ditempat itu. Maka kalau sebagian daerah diduduki musuh, polisi bersama-sama dengan pamongpradja, tentera dan B.P.N.K. mengatur pertahanan disekitar kota yang diduduki musuh itu. Dalam hal ini polisi mesti memperlihatkan kesanggupannya dan tanggung-jawabnya melindungi rakyat yang selalu mengharapkan jaminan perlindungan dan keamanan dari Pemerintah. Tentang polisi P.A.M. tetap sebagai selama ini memberikan laporan kepada Wedana dan Bupati yang bersangkutan tentang hal-hal yang terdjadi dalam daerahnya. Anggota kepolisian, baik umum maupun P.A.M. (Pengawas Aliran Masyarakat) yang tidak mentaati instruksi ini tidak

diberi tjatu dan gadji, dan mereka dianggap tidak memberikan kewadajibannja dan sewaktu-waktu dapat dituntut menurut Undang-undang Militer. Oleh karena kedudukan pusat Kepolisian Sumatera Barat masih terpentjar-pentjar (ini diawal Djanuari 1949 !) maka tiap-tiap Kepala Polisi berkedudukan ditempat Bupati Militer dan mengepalai Kepolisian di Kabupaten jang bersangkutan.

Mengenai politik polisionil beleid mereka berada dibawah kekuasaan Bupati jang bersangkutan atas nama Gubernur Militer, sedangkan mengenai technis beleid mereka tetap berada dibawah kekuasaan Kepala Kepolisian Keresidenan Sumatera Barat, dan kalau perhubungan terputus boleh mengambil satu keputusan sesudah diperembukkan dengan Bupati Militer dan Komandan Tentera ditempatnja.

*
**

DEMIKIANLAH perjuangan dilandjutkan dengan berpangkal kepada kemauan berbakti dari rakjat. Seandainya dalam keadaan biasa, pada musim patjeklik ini, telah susah mendjamin keamanan, apalagi dalam masa perang pula, jang memuntjak dengan patroli-patroli musuh dan tembakan-tembakannja dengan mortir dan houwitser jang menjebar maut, kebinasaan dan kebakaran diseluruh daerah perang.

Tetapi memang aneh djuga sudut liku dari djiwa manusia !

Dalam keadaan jang begini sulit, dihipit perang dan patjelik, dibebani dengan I.N.P. 10% dan seribu satu matjam bakti, keamanan disetiap negeri dapat didjamin oleh **tenaga** negeri itu sendiri. Tak sampai bernapas keluar badan, tak sampai rakjat memerlukan tenaga tentera kita, apalagi tenaga musuh buat mendjamin keamanan. Hanjalah gangguan keamanan datang dari pihak Belanda dan tenteranja jang menerakakan setiap daerah jang mereka tempuh dalam patrolinja.

Persediaan bahan makanan Djanuari 1949.

Walaupun begitu soal perbekalan peperangan bukanlah soal mudah. Harus ada satu organisasi jang teratur dan berdasarkan memberikan penuh kepertjajaan kepada rakjat, serta sanggup pula menerima kepertjajaan rakjat itu untuk mengumpulkan perbekalan perjuangan. Badan jang harus mendasarkan usahanja kepada penerangan dan memberi pengertian, bukan memaksa dan memeras dengan „mengepitkan kepala harimau“. Dan untuk ini tak ada jang lain lagi dari M.P.R.K./M.P.R.N. jang berupa pemerintahan ketjamatan dan negeri dimasa perang. Dalam instruksi No. 5 tanggal 17 Djanuari 1949, maka Gubernur Militer Sumatera Barat memberi instruksi kepada seluruh Pamongpradja (termasuk Wali Negeri), B.P.B.M. dan intendance diseluruh Sumatera Barat,

bahwa karena kemungkinan menghadapi perdjungan setjara berlama-lama, maka harus ada persediaan bahan-bahan makanan untuk keperluan Angkatan Perang, pegawai-pegawai dan rakjat berdjung. Dan berhubung dengan kemelut keuangan Pemerintah dan dalam 2 à 3 bulan ini beras mulai berkurang dalam daerah Sumatera Barat, maka harus diperbuat rentjana 3 bulan untuk menghadapi soal makanan.

Tjaranja begini :

Tiap-tiap M.P.R.K. dibawah pimpinan Wedana jang bersangkutan dan dibawah Pengawasan Bupati dengan segera berapat dengan P.P.B.M. tjabang Kewedanaan, intendance Kewedanaan dan negeri-negeri serta Pemimpin-pemimpin Rakjat, untuk menetapkan djumlah angkatan perang jang actief, pegawai-pegawai jang bekerdja, ditambah dengan jang mengungsi ditempat itu dan rakjat jang ikut berdjung.

Sesudah ini berlaku ditetapkan djumlah keperluan persediaan beras, djagung, ubi dan lain-lain untuk sampai 1 April 1949.

Dengan segera didaftarkan djumlah ternak (kerbau, sapi, kambing, ayam dan lain-lain) untuk keperluan perdjungan.

Memungut beras dan ternak serta bahan-bahan makanan lain didjalankan dengan memakai peraturan D.P.D. No. 2/DPD/P. Ist. tanggal 7-12-1948 dan pindjaman 10% dari rakjat, iuran negara biasa, pajak potong, banderol, tjukai dan lain-lain, dengan tidak mengurangkan kemauan rakjat untuk berbakti.

Kalau sub 6 dari peraturan tersebut belum djuga mentjukupi, maka barang kepunjaan Pemerintah jang ada boleh didjual atau digadaikan.

Semua hasil pemungutan dikumpulkan oleh M.P.R.K. dengan bantuan B.P.B.M. tjabang dan Intendance, (sedapat-dapatnja Intendance dengan langsung memungut). Untuk menghindarkan perasaan-perasaan, waktu memungut mesti dengan bidjaksana sekali dan djangan memakai kekerasan atau perkataan-perkataan jang menjinggung perasaan. Kalau ada jang engkar baru diambil tindakan seperlunja. M.P.R.K. bersama dengan B.P.B.M. dan intendance atas nama Gubernur Militer dan D.P.D. membagi segala barang-barang jang masuk dengan seadil-adilnja.

Persediaan jang berlebih sampai tanggal 1-4-1949 hendaklah disimpan ditempat jang aman dan lebih terpentjl ditempat Wali-wali Negeri jang berdekatan.

Kalau kenjataan sesuatu kewedanaan tidak dapat mentjukupi makanan buat keperluan selama waktu tersebut diatas, maka Bupati dengan segera mengambil tindakan mengalirkan bahan makanan dari tempat jang berlebih ketempat jang kurang.

Hendaklah djangan dilenjakkan waktu mendjalankan segala pemungutan, tetapi mesti dipelihara, **kepertjajaan rakjat kepada Pemerintah** dan segala tindakan berbau fascistisch mesti didjauhi.

Perjuangan berlama-lama hanya dapat dilakukan, kalau tjukup diinsjafi hal pemungutan bahan makanan tersebut diatas, oleh sebab itu tiap-tiap 10 hari sesudah keluarnya instruksi ini minta diandjurkan tentang pemungutan (pengumpulan dan persediaan) bahan makanan itu.

Tanggung djawab dalam pemungutan dan pembahagian-pembahagian bahan-bahan makanan tetap dipegang oleh M.P.R.K. jang bersangkutan dibawah pengawasan Bupati.

Tjara melaksanakan pembagian dengan dapur umum atau dengan pertolongan B.P.N.K. diserahkan kepada M.P.R.K. jang bersangkutan.

Achirnja kita pertjaja segala sesuatu untuk kepentingan pertahanan, instruksi ini dapat dijalankan dengan baik dan kalau seandainya perhubungan terputus dengan kita, **maka kalau sudah dianggap datang saatnja M.P.R.K. dengan petundjuk Bupati-bupati boleh mengeluarkan uang Kabupaten/Kewedanaan atas nama Gubernur Militer dengan djumlah tak boleh melebihi keperluan tiap-tiap bulan untuk perbelanjaan perjuangan.**

Demikianlah bunjinja instruksi tentang pelaksanaan mengumpulkan perbekalan untuk perjuangan itu, jang memang telah tjukup djelas sehingga tak memerlukan komentar lebih djauh lagi. Dengan terlaksananya instruksi ini beserta instruksi No. 2/D.P.D. dalam mana ditentukan tjara pembentukan Panitia Pemungutan Perbekalan jang berupa 10% dari harta rakjat itu, dapatlah diperbekali perjuangan gerilja jang amat sengit itu.

Adakah perbekalan ini terkumpul, atau lebih tegas lagi adakah instruksi-instruksi ini terlaksana ?

Sedjarah telah mendjawab : **ADA !** dan segala pradjurit gerilja, serta para pegawai Pemerintah jang aktif dalam darurat dapat mendjadi saksi atas pendjawaban ini ! Diantara desingan pelor musuh dan patrolinja, para pemungut jang biasanja dipimpin oleh wanita, mengumpulkan perbekalan ini dan menjimpannya tidak disatu tempat tetapi disebar dirumah-rumah orang, serta memberikan tjatatan lengkapnja kepada badan-badan Pemerintah.

*
**

Penerangan.

Usaha penerangan sangat menolong lantjarnja djalan pemungutan, serta dapat pula mengatasi insiden-insiden perasan jang kadang-kadang terdjadi diwaktu mengumpulkan, karena tentu sadja tidak semua para pemungut mempunjai kesabaran tjukup untuk meladeni semua kehendak.

Maka perjuangan pun melandjut djuga, dan patroli-patroli Belanda semangkin meluas. Dari pusat kedudukan dikota-kota, mereka berpatroli kekampung-kampung berkeliling, dan bila tak

ada perlawanan, sampai-sampai djauh dari tempat kedudukannja, seraja menjebar maut, kebakaran dan ketakutan.

Markas Gubernur Militer diserang, 10 Djanuari 1949.

Rupa-rupanja dari sistim intelligence servicenja jang luas itu, mereka telah dapat mengetahui bahwa pusat pemerintahan Sumatera Barat berada di Koto Tinggi lebih-kurang 50 km sebelah Utara Pajakumbuh, dimana pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Militer bersama stafnja lengkap dengan alat-alat radio dan lain-lain. Maka setia kepada bunji pepatah : „Pukullah besi itu selagi hangat“, merekapun buru-buru meneruskan patrolinja ke Koto Tinggi itu pada tanggal 10 Djanuari 1949, dan madju dengan leluasa, tak ada serangan, tak ada halangan didjalan-djalan, mereka djalan terus sampai di Koto Tinggi, kepusat Pemerintahan Darurat.

Belanda jang rupanja belum merasa tjukup kekuatan untuk menduduki tempat-tempat strategis itu kembali ke Pajakumbuh. Tetapi madjuna Belanda sampai ke Koto Tinggi ini mendjadi satu peladjaran jang pahit bagi Pemerintah dan pemimpin-pemimpin perdjuaan, bahwa selama ini koordinasi sangat kurang disebabkan **perbedaan tindjauan** dalam menghadapi pekerdjaan masing-masing, jang dalam perdjuaan ini memang tak dapat disesali terdjadinja.

Instr. No. 8/GM/Instr.-49, 11 Djanuari 1949.

Mengakui kekurangan-kekurangan.

Oleh karena itu Gubernur Militer dalam suatu instruksi panjang-lebar membentangkan dengan terus-terang akan segala kekurangan-kekurangan dan kelemahan ini, serta memberi perintah tegas untuk mengatasinja. Instruksi ini rupanja disusun begitu rupa dengan hati jang penuh keichlasan dan keimanan perdjuaan, sehingga berbeda dengan lain-lain instruksi Pemerintah, ia dapat mengetok hati dan lubuk djiwa kita. Instruksi jang berse-djarah ini diberi bernomor 8/GM/Instr.-49, dan dikeluarkan pada tanggal 11 Djanuari 1949 djam 03.00 w.i. dan ditandatangani oleh Gubernur Militer St. M. Rasjid sendiri, jang menegaskan tentang perhubungan tentera, Pemerintah dan rakjat.

Ia dimulai dengan uraian bahwa selama penjerangan Belanda dalam beberapa waktu ini agak terasa kekurangan-kekurangan rakjat. Ini antara lain-lain disebabkan tindjauan kita berlain-lain menghadapi pekerdjaan masing-masing, sehingga koordinasi jang senantiasa diandjur-andjurkan tidak dapat dibuktikan dengan udjud jang sebenarnja.

Baiklah kita tindjau kembali hal-hal jang tersebut agak lebih dalam untuk dapat mengatur muslihat perdjuaan berlama-lama,

sehingga tjita-tjita rakjat untuk tetap hidup sebagai satu rakjat jang merdeka dapat terdjamin.

Orang-orang Pemerintahan, baik setjara baru mendjabat pekerdjaan maupun setjara lama jang masih ada, banjak tenggelam dalam menghadapi pekerdjaan sehari-hari dan ditambah dengan tekanan-tekanan ekonomi jang kadang-kadang agak mengetjewakan, menjebabkan lemahnja semangat bekerdja. Ketenteraan jang dalam segala lapangan masih baru, ditambah dengan senantiasa kekurangan perbelandjaan dan perbekalan, menjebabkan renggangnja perhubungan antara Tentera dengan Pemerintah. Tentera sama Tentera, lebih-lebih Tentera dengan Rakjat. Belumlah banjak corps opsir jang mengetahui akan administrasi bekerdja, belumlah dapat menempatkan diri sebagai orgaan Negara sebenarnja, tidaklah dapat menindjau lebih dalam tjita-tjita dan djiwa rakjat, sehingga tindakan-tindakan banjak terdjadi jang mengakibatkan kurang stabielnja kedudukan Pemerintahan. Sebaliknja orang-orang Sipil banjak jang kurang revolusioner dalam tindakan dan perbuatannja, sehingga tiap-tiap sesuatu dalam timbang-menimbang banjak jang kurang lantjar djalannja. Sebagian dari Organisasi Rakjat belum dapat melihat akan isi dan tudjuan Negara sehingga belum dapat mengikat Rakjat dalam ikatan organisasi. Dan jang akan dapat diharapkan mematuhi pimpinan, kadang-kadang berbuat sekehendaknja. Djangan disebut lagi alat-alat pemerintahan lainnja, seperti polisi, Kepala Djawatan jang satu sama lainnja bekerdja terlepas dari koordinasi jang dikehendaki.

Kita tidak akan sesalkan itu, karena factor-factor, baik psychologisch maupun jang objectief banjak menghalangi kita mentjapai satu maksud, dalam beberapa tingkatan perdjuaan jang sudah-sudah.

Kemudian ditegaskan bahwa dengan tidak mengurangi akan harga kerdjasama jang diadakan setempat, baiklah kita tindjau kembali bagaimana hendaknja kita menjusun kembali akan tenaga-tenaga rakjat begitu rupa sehingga betul-betul „weerbaar” menghadapi segala udjian jang disorongkan oleh Belanda kepada kita sekarang. Lalu dikupas lebih landjut bahwa untuk ini perlu diketahui mentaliteit bangsa Belanda sendiri. Belanda satu bangsa jang ketjil, tetapi mempunjai ketjakapan organisasi, telah berpuluh-puluh tahun mempunjai pemerintahan dan angkatan perang jang lengkap dan teratur, tetapi semendjak perang dunia kedua telah lumpuh sama sekali. Waktu Belanda hendak bangun kembali, disokong terutama oleh Inggeris dan Amerika, kita mulai bangun pula sebagai bangsa jang merdeka. Pertentangan kita dengan Belanda adalah pertentangan kehidupan kemanusiaan. Belanda hendak mentjari „lebensraum” (ruangan hidup) seperti sebelum perang kembali, sedangkan kita hendak membasmi segala keinginan Belanda. Tidak ada rasanja sesuatu djalan jang bisa mendekatkan kedua bangsa itu selain dari Belanda mesti mengakui keduduk-

an kita, atau dengan kekuatan sendjata seperti jang kita hadapi sekarang.

Kalau ditinjau selandjutnja apakah peladjaran jang dapat dipetik selama beberapa waktu perdjuaan ini !

Kita melihat kediri kita sendiri:

Akibat berdjalan sendiri-sendiri mendjadikan kita sangat kekurangan koordinasi, tidak dapat membedakan antara macht (kekuatan) dan gezagt (kekuasaan). Buktinja dalam penggempuran Belanda setjara besar-besaran, banjak kita jang djadi tjera-berai.

Sebagian orang-orang pemerintahan tidak diketahui kemana perginja. Pemerintahan dibawah, karena belum biasa berdiri sendiri merasa seperti ajam kehilangan induk, pemimpin-pemimpin rakjat sebagian gugup dan tentera sendiri kalau kita mau mengakui terusterang banjak jang katjau-balau. Psychologisch effect gempuran Belanda memang buat sementara amat hebat, lebih-lebih negeri-negeri jang belum pernah merasai serangan udara berada dalam panik. Tetapi tiap-tiap sesuatu habis dengan sendirinja dan waktu mendjadi obat jang mudjarab (de tijd is het beste geneesmiddel van alle dingen) dan sekarang dapat kita susun kembali pemerintahan dan ketenteraan.

Terasa sekali dimana-mana orang-orang pemerintahan berada, lebih-lebih orang-orang dari ketenteraan, kalau tidak dibantu oleh rakjat akan mengalami kesulitan besar. Betullah rakjat itu djiwa bangsa jang tidak boleh diabaikan.

Sedangkan bagi Belanda sendiri ia telah berhasil menduduki kota-kota (istimewa Jogja dan Bukittinggi) untuk kemenangan politik luar negeri, dan semua djalan-djalan jang menghubungkan ketempat-tempat jang penting-penting dikuasainja, sehingga dalam sedikit waktu ia dapat menguasai sebagian besar djalan-djalan perhubungan, dan kita sama kita karena terpentjar-pentjar sesudah diserang Belanda sulit sekali mengadakan perhubungan.

Tetapi Belanda sendiri merasa akan kehebatan perlawanan rakjat jang dalam hal apa sadja tidak mau bekerdja sama dengan Belanda, sehingga Belanda sendiri dengan siarannja dan propagandanja, mengadjak pegawai bekerdja seperti biasa dan rakjat meneruskan pekerjaan sehari-hari. Buat Belanda faktor waktu sangat penting, kalau ia dikota-kota jang didudukinja dapat memperkuat dan mengkonsolidir kedudukannja, dalam tempo jang pendek akan berhasillah maksudnja, sedangkan buat kita untuk menghadapi peperangan berlama-lama, soal waktu itu tidaklah mendjadi faktor terpenting, asalkan Belanda belum dapat memperkuat kedudukannja. Buat kita waktu jang pandjang — tetapi tetap terus-menerus dapat mendjadikan kota-kota jang diduduki Belanda mendjadi neraka bagi dia, dan mengatjaukan kedudukannja — sangatlah menguntungkan kita.

Oleh sebab hal-hal jang tersebut diatas, untuk menghadapi per-
djuangan berlama-lama, maka diinstruksikan sebagai berikut:

Tidak boleh kerdja-sama dengan Belanda.

Hendaklah orang-orang pemerintahan, istimewa Pamongpradja, Polisi dan pegawai-pegawai perhubungan pos, radio dan lain-lain dapat mengambil kedudukannya kembali disekitar kota-kota jang diduduki Belanda, tetapi tetap dalam wilayah masing-masing. Dalam pada itu harus tetap mengingat sumpah setia kepada N.R.I. dan dalam segala hal tidak boleh bekerdja sama dengan Belanda. Dengan segera dilantjarkan segala instruksi perintah dan peraturan an D.P.D. Sumatera Barat dan semendjak tanggal 3 Djanuari 1949 dari Gubernur Militer Sumatera Barat.

Rakjat dengan segera dapat melihat adanya pemerintahan kembali dan sebagai pusat penghidupan perekonomian diadakan pasar-pasar dipinggir kota. Djaga betul kenaikan harga barang-barang dan ambil tindakan dengan segera terhadap orang-orang jang hendak mengatjau-balaukan perekonomian rakjat. Dan pada saat sekarang lebih lagi dari waktu jang lampau akan terbukti siapa jang sanggup menjalankan pekerdjaannya untuk kepentingan rakjat dan seleksi pegawai akan dapat dilihat dengan segera.

Tentang soal ketenteraan dijelaskan, bahwa warga tentera harus dengan segera menggabungkan dirinya kepada kesatuan-kesatuan. Sesudah didaftarkan namanya satu demi satu, serahkan daftar itu kepada M.P.R.K. dan Komandan jang bersangkutan, sedangkan M.P.R.K. meneruskan kepada Gubernur Militer dan Komandan tersebut kepada Komandan sub Territorium Kesatuan Sumatera Barat.

Karena buat sementara waktu Pemerintah mengharapakan bantuan langsung dari rakjat, hendaklah diinsjafi betul kedudukan tentera ditengah-tengah rakjat. Tentera dengan rakjat **seperti ikan dalam air**, artinya : Ikan itu dimisalkan tentera dan air itu rakjat. Ikan dapat bebas berenang kemana-mana dalam air, tetapi sebaliknya air mesti tetap djernih. Lebih-lebih dalam suasana peperangan gerilja, tentera mesti menginsjafi betul, bahwa tudjuan perdjungan ialah kebahagiaan rakjat.

Sebagian tentera jang atas perintah Komandannya tiada langsung menghadapi perdjungan, mesti bersama-sama orang-orang pengungsi dan rakjat mengerdjakan tanah kosong untuk perbekalan. Mana jang engkar dikeluarkan dari kesatuannya. Tindakan sendiri-sendiri atau liar dihabisi dan jang melanggar instruksi boleh ditahan.

Setiap waktu bersedia atas perintah komandannya dikirim kesuatu tempat, istimewa front pertempuran untuk menggempur

musuh. Seleksi atau saringan segera terbukti dan jang tinggal akan mendjadi inti atau kern tentera kita jang sebenarnja.

Terhadap rakjat dan para pemimpin diserukan agar semua menginsjafi bahwa disaat jang sulit ini Pemerintah hanja dapat berdiri kalau dapat sumbangan sepenuhnya dari rakjat. Maka pemimpin-pemimpin dapatlah hendaknja mengembalikan kepertjaan rakjat kepada Pemerintah dan tentera.

Harus dihilangkan buat sementara segala pertentangan-pertentangan faham antara kita sama kita, karena Belanda takut kalau kita bersatu menghadapinja. Ikutlah dimana-mana dalam pembentukan barisan gerilja, kobarkanlah semangat rakjat untuk menghadapi perdjjuangan dan untuk tetap dapat bertahan berlama-lama.

Basmi andjuran Belanda.

Berikanlah bantuan sebanjak-banjaknja dalam apa sadja untuk memperkuat kembali kedudukan negara, dan segala andjuran dari pihak Belanda kalau sampai kepada rakjat mesti dapat dibasmi bersama-sama dengan Pamongpradja dan Polisi. Bantulah mengerahkan tenaga rakjat buat perbekalan dan perdjjuangan.

Instruksi ini diachiri dengan suatu rangkaian kata jang sangat uniek dan prozais jang djarang-djarang bertemu dalam instruksi-instruksi dizaman damai, jaitu sebagai berikut :

„Achirnja disatu saat ditempat jang lebih aman dari sekarang, kita akan bertemu kembali, dan djasa-djasa jang diberikan sekarang akan mendjadi buah bibir orang dibelakang hari, dan ketahuilah tanah Air dalam bahaja, wadjah mata pemimpin jang duka akan dapat ditolong dengan gotong-rojong menghilangkan rasa ketinggian diri untuk satu tudjuan.

Indonesia tetap merdeka dibawah pimpinan bangsa sendiri.

TETAP REPUBLIKEIN !

Laksana suatu kalimat bersihir dan menggenggam dalam dirinja akan semangat jang berkobar beserta tjara-tjara mengatasi kelemahan diri sebagai manusia, maka instruksi ini diseluruh Sumatera Barat membangkitkan tenaga bekerdja jang menjapu habis akan segala panik dan sengketa, serta memberi isi kepada kegiatan perdjjuangan jang memuntjak dalam serangan-serangan balasan terhadap pos-pos Belanda jang bersebar diseluruh daerah. Pedjuang-pedjuang baru mendapat latihan jang praktis ditengah-tengah tembakan dan pertjikan darah, sehingga taktik gerilja dapat semakin dipertinggi mutunja.

Pembagian Kabupaten setjara perang.

Seluruh Sumatera Barat jang dulunja dibagi kepada tujuh Kabupaten, dan direntjanakan akan didjadikan enam Kabupaten, oleh karena keadaan perdjuaan didjadikan delapan Kabupaten, dengan tambahan Kabupaten Sawah Lunto/Sidjundjung, jaitu :

1. Kabupaten Padang/Pariaman jang dipimpin oleh Bupati Militer B.A. Murad, dengan dibantu oleh Patih Udin.
2. Kabupaten Agam jang dipimpin mulanja oleh Bupati Militer Dahlan Djambek jang merangkap Komandan Pertempuran berpangkat Let. Kolonel, dan kemudian kedudukannja sebagai Bupati digantikan oleh Bupati Militer Said Rasad.
3. Kabupaten Lima Puluh Kota jang dipimpin oleh Bupati Militer Arisun St. Alamsjah, dan setelah beliau gugur dalam perdjuaan, digantikan oleh Bupati Militer S.J. St. Mangkuto.
4. Kabupaten Tanah Datar jang dipimpin oleh Bupati Militer Sidi Bakaruddin jang sebelum agresi mengepalai Djawatan Kereta Api Sumatera Barat.
5. Kabupaten Solok dipimpin oleh Bupati Militer H. Darwis Dt. Temenggung.
6. Kabupaten P.S.K. (Pesisir Selatan Kerintji), jang dipimpin oleh Bupati Militer Aminuddin.
7. Kabupaten Pasaman jang dipimpin oleh Bupati Militer Basjrah Lubis.
8. Kabupaten Sawah Lunto Sindjundjung jang mulanja dipimpin oleh Bupati Militer Tan Tuah Bagindo Ratu, dan kemudian oleh Bupati Militer A. Djardjis Bebasthani.

Dengan keluarnja instruksi No. 8 jang tersebut diatas semakin terasalah pentingnja koordinasi dalam segala lapangan perdjuaan, terutama antara Pemerintah Sipil, Ketenteraan dan organisasi-organisasi Rakjat. Dimana-mana hasrat untuk mengkoordinir segala tindakan lalu diudjudkan berupa rapat-rapat koordinasi jang menghasilkan akan kerdjasama jang semakin erat antara segenap instansi-instansi pemerintahan itu.

Situdjuh diserang, 15 Djanuari 1949.

Rapat-rapat diwaktu itu merupakan bahaya besar, karena bila ketahuan tempatnja oleh musuh, tentu sadja akan diserbu oleh patrolinja. Suatu kedjadian jang menjedihkan dalam hal ini ialah waktu rapat di Situdjuh Batur dari pemimpin-pemimpin Pemerintah, ketenteraan dan organisasi-organisasi di Sumatera Barat. Rapat jang penting ini telah dapat diketahui oleh musuh, sehingga tempat berapat dikepung oleh patrolinja pada waktu subuh dan terus ditembaki dari segala djurusan, sehingga menimbulkan banjak korban diantara para pemimpin Sumatera Barat. Peristiwa

ini terdjadi pada 15 Djanuari 1949, dan dibawah ini diuraikan sedikit sedjarahnja.

Situdjuh Batur adalah satu tempat dalam Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana djuga bertempat dalam Kabupaten ini ibu tempat Pemerintahan Militer. Djadi tepatlah djika disini diadakan rapat jang bersifat Sumatera Barat. Ia terletak dikaki gunung Sago dalam sebuah lurah sempit ditepi padang lengang jang disebut Padang Siantah, letaknja lebih-kurang 12 km dari pos tentera Belanda dari kota Pajakumbuh. Pada malam tanggal 14 itu telah berkumpul disana para pemimpin pemerintahan, ketenteraan dan organisasi-organisasi. Perundingan belum dimulai pada malam itu, karena harus beristirahat karena lelah dari berdjalan kaki puluhan km bahkan ada jang ratusan km. Kira-kira djam 4.30 pagi tentera Belanda masuk. Sekeliling lurah ditembaki, pintu djalan keluar sudah tertutup oleh letusan sendjata api tentera Belanda. Beberapa pemimpin dapat meloloskan diri diantaranya Let Kol. Dahlan Ibrahim, sedangkan sebanjak 49 orang, diantaranya Saudara-saudara Chatib Suleiman Ketua M.P.R.D., Arisun St. Alamsjah Bupati Lima Puluh Kota, Kapten Zainuddin, Major Munir Latif dan lain-lain, gugur oleh tembakan-tembakan Belanda, sedangkan Let Kol. Thalib dapat luka dikakinja.

Peristiwa ini menimbulkan kesedihan besar di Sumatera Barat, tetapi setia kepada bunji pepatah **patah tumbuh hilang berganti**, tenaga muda madju kedepan dan roda revolusi kembali berputar kentjang !

Kesedihan atas kehilangan pemimpin ditekan mendjadi dendam kepada pendjadjah.

Dalam kenang-kenangannja tentang peristiwa Situdjuh ini, Saudara Hamka meng-analisa pribadi Chatib Suleiman: „Perdjuangan di Sumatera Barat tidaklah dapat memisahkan nama Chatib Suleiman baik dizaman Belanda, atau pendudukan Djepang, apalagi dizaman Republik. Dia adalah pentjinta Tanah Air, jang kalau sekiranya duduk di Djawa, barangkali sudah mendjadi Menteri, ... kalau ditilik djiwanja, disana berkumpul ketjintaan kepada Tanah air, ilmu sosialisme, Agama Islam dan djiwa Minang. Tunduk kepada jang diatas, setia berkawan dan keras kepala !

Dia kaja dengan teori. Dia pandai merantjang berbagai rantjangan dan skema. Tjuma harus jang lain jang akan mendjalankan. Dan dia rela, walaupun namanja tidak disebut asal jang ditudju langsung !”

Tetapi sebaliknya peristiwa Situdjuh ini mengadjar para pemimpin kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat untuk rapat-rapat, serta lebih ingat lagi dengan melengkapi pendjagaan agar djangan diserkap musuh sedang berapat itu.

Pemerintahan semakin lama semakin teratur, walaupun pada mulanja kurang djelas pembagian tugas oleh karena semua usaha dilakukan setjara bergotong-rojong dan collegiaal sadja.

Pembagian tugas, achir Djanuari 1949.

Pada achir Djanuari 1949 tibalah masanja untuk mendjelaskan pembagian pekerdjaan antara masing-masing instansi, dan dengan instruksi Gubernur Militer No. 10/GM/Instr. didjelaskanlah tugas kewadajiban Pamongpradja, termasuk wali-wali Negeri di Sumatera Barat dalam waktu darurat.

Dalam pendahuluannja dinjatakan bahwa dengan tidak mengurangkan instruksi-instruksi jang telah diberikan pada waktu jang lampau, maka perlu ditetapkan tugas-tugas kewadajiban pamongpradja termasuk Wali Negeri dalam waktu perang, supaja dapat lebih lantjar mendjalankan pemerintahan sehari-hari. Istimewa kepada Wali-wali Negeri jang langsung dan terdekat sekali bergaul sehari-hari dengan rakjat diharap dengan sangat mendjalankan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan kepada Pamongpradja lainnja diminta bantuan sepenuhnya. Sebagian dari hasil kemenangan kita bergantung dari usaha-usaha jang didjalankan menurut instruksi ini !

I. TUGAS WALI-WALI NEGERI PERANG.

- a. Mendjaga keamanan dan ketertiban umum dalam negeri dengan dibantu oleh B.P.N.K.
- b. mengawasi orang-orang jang lalu lintas dinegeri terutama menjelidiki spion musuh.
- c. Memberi tempat kepada pengungsi-pengungsi dan pegawai-pegawai jang datang kenegeri itu.
- d. Menjuruh mengerdjakan tanah-tanah kosong kepada orang-orang mengungsi dan pegawai-pegawai beserta tentera dan polisi jang tidak bekerdja.
- e. Mendjalankan dengan giat iuran perang negara 10% dan bakti rakjat dibawah pimpinan M.P.R.K. Kewedanaan/Ketjamatan.
- f. Berhubung dibeberapa tempat orang telah mulai menjabit, mengatur dengan segera pemasukan padi 10% untuk perbekalan tentera, pegawai dan rakjat berdjuaug, sesudah didaftarkan nama-nama mereka itu. Dengan bantuan M.P.R.N., D.H.-N., B.P.K.K.P., ninik mamak, alim ulama dan orang-orang terkemuka lainnja dinegeri beserta wakil-wakil petani dan perkumpulan, mesti mendjamin, bahwa pemasukan padi 10% mesti menurut penghasilan sebenarnja, tidak boleh seperti jang sudah-sudah, sebagian kena dan sebagian terlepas dari kewadajiban membajar 10%.
- g. Bagaimana djugapun, istimewa dekat front pertempuran, berusaha supaja tentera, pegawai dan rakjat berdjuaug mendapat makanan setjukupnja.

- h. Mendjalankan perintah-perintah, peraturan-peraturan beserta instruksi-instruksi dari pihak atas dengan seksama.
- i. Mengadakan kerdja sama dengan segala lapisan dengan tidak mengingat pangkat dan kedudukan, tetapi menginsjafi akan kedudukan negara dalam perang waktu ini.

II. TUGAS TJAMAT-TJAMAT.

Tjamat jang menurut ketetapan Gub. Mil. No. 31/GM/BB49 tanggal 30-1-'49 telah diberi status militer, hendaklah menginsjafi akan penghargaan Pemerintah kepada mereka oleh sebab itu diharapkan mereka lebih dari waktu jang lampau berani bertindak dengan tegas dan bidjaksana. Sebagai anggota Pamongpradja Tjamat-lah jang terdekat dengan rakjat, maka terutama pekerdjaan Tjamat ialah:

- a. Mengkoordinir tenaga-tenaga Wali-wali Negeri beserta pembantunja dengan memberikan pimpinan dan petunjuk-petunjuk jang perlu.
- b. Perlu setiap waktu djalan keliling mengundjungi negeri-negeri terutama menghiburkan rakjat jang kena malapetaka.
- c. Mengawasi berdjalannja peraturan-peraturan pemerintah dan kalau kurang lantjar djalannja memberi pendjelasan seperlunja.
- d. Mengusulkan kepihak lebih atas akan perobahan-perobahan jang perlu dari peraturan-peraturan pemerintah untuk kebaikan umum.
- e. Bersama-sama dengan Wali-wali Negeri mendjamin tjukupnja makanan tentera, pegawai dan Rakjat berdjuaug dengan hasil pemungutan 10%.
- f. Kalau diketjamatan ada MPRK Ketjamatan, dibawah pimpinan badan-badan itu betul-betul menggembleng semangat rakjat untuk menghantjurkan musuh.
- g. Bagaimanapun sulitnja keadaan dan merasa kesal dalam hati, djalankan pekerdjaan dengan hati tenang dan tabah, karena rakjat jang baik menghendaki pimpinan dari pemerintahan.

III. TUGAS WEDANA-WEDANA.

- a. Menjampaikan peraturan-peraturan, perintah-perintah, instruksi-instruksi dan lain-lain kepada negeri-negeri baik langsung maupun d/p Tjamat dan memeriksa peraturan-peraturan itu sampai kepada jang dimaksud dan kalau sampai apa sudah didjalankan.
- b. Bersama-sama dengan MPRK membimbing rakjat menghadapi perdjuaugan.
- c. Mengkoordinir tenaga-tenaga pemimpin-pemimpin rakjat dalam wilajahnja bersama-sama tentera dan poisi.

- d. Setiap saat mengundjungi ketjamatan dan mana negeri jang lemah semangatnja, maupun perbekalannja lekas dikundjungi untuk memberikan pimpinan.
- e. Menurut instruksi Gub. Mil. Sumatera Barat No. 5/GM/Instr. tanggal 7 Djanuari 1949, Wedana bersama MPRK bertanggung djawab atas berhasilnja masuk ijuran perang negara untuk mendjamin makanan tentara, pegawai dan rakjat berdjuaug, maka terutama perhatian Wedana ditumpahkan kepada baik masuknja ijuran perang itu.
- f. Mengambil inisiatief dan langkah-langkah jang perlu untuk kebaikan kewedanaannja, baik dilihat dari segi ekonomi, sosial maupun dari segi semangat rakjat.

IV. TUGAS BUPATI-BUPATI.

- a. Jang tersebut dalam I, II, dan III mendjadi perhatian Bupati dan sekali-sekali memeriksa keadaan kewedanaan sampai ke-negeri-negeri.
- b. Bupati menetapkan dengan komandan pertempuran langkah-langkah jang akan diambil untuk kepentingan pertahanan dan keselamatan rakjat.
- c. Bupati sebagai wakil Gub. Mil. ditempat masing-masing membagi tenaga-tenaga dalam masing-masing kewedanaan begitu rupa, sehingga tiap-tiap kewedanaan mendapat tuntunan jang seimbang.
- d. Dalam keadaan terpaksa dan mungkin perhubungan terputus, Bupati berhak mengambil segala tindakan untuk kepentingan kabupatennja a/n. Gub. Mil. dan sesudah itu dengan segera melapurkannja kepada Gubernur Militer.

Instruksi diatas berisi garis-garis besar. Ia diberikan sekedar menetapkan pedoman pekerdjaan. Banyak hal-hal lain, jang tidak disebutkan, tetapi kurang pentingnja. Hanja dengan penuh ketjintaan kepada Tanah Air, bangsa dan Agama, ditambah dengan perasaan penuh tanggung djawab sesuatu instruksi dapat didjalan-kan dengan baik.

Walaupun tidak ada petundjuk orang jang mau dan suka bekerdja akan tetapi dengan hati gembira, dimana sadja kita berada dan apa pun pekerdjaan jang kita kerdjakan karena hanja satu Tanah Air kita, jaitu Indonesia jang besar dan makmur oleh usaha kita bersama. Sekianlah instruksi itu, dan dengan pembagian tugas jang terang ini, maka dapatlah seluruh Pamongpradja mendjaikan dengan teliti akan segala tugas mereka dalam darurat.

Mobilisasi sabil.

Perdjuangan melandjut djuga, dan segala golongan dalam masja-rakat sama-sama bangkit mengadakan perlawanan jang sehebat-

hebatnja. Terutama dari golongan ulama-ulama sangatlah bergiat untuk mendorong rakjat dalam melakukan perang sabil terhadap Belanda. Para ulama mendesak Gubernur Militer untuk mendjalkan suatu mobilisasi jang bersifat keagamaan, jang dinamakan mobilisasi sabil. Dalam instruksi Gub. Mil. tentang mobilisasi sabil ini didjelaskan bahwa para anggota mobilisasi diberi tugas sebagai berikut:

Terutama menguatkan pemuda-pemuda berdjuang dan semangat perang sabil.

Sesudah memberi penerangan dinegeri-negeri istimewa dekat front pertempuran, maka bersama-sama dengan ulama-ulama ditempat itu memilih dari tiap-tiap negeri 15 orang untuk perang sabil. Ulama-ulama jang ditentukan difront itu bersama komandan disitu mengatur latihan dengan semangat sabil. Dan dalam pertempuran mereka berada dibawah komandan front dan djika pulang kenegeri mereka kembali mendjadi pemuda biasa dalam BPNK. Sedangkan perbekalan selama latihan paling lama seminggu ditanggung oleh negeri masing-masing.

Bagi para anggota mobilisasi sabil diberi tugas menggerakkan dengan sehebat-hebatnja pelaksanaan peraturan-peraturan pemerintah mengenai ijuan perang, pindjaman 10%, padjak potong, bandrol, tjukai dan lain-lain untuk membelandjai perdjuangan.

Kemudian untuk memperhebat penerangan, maka dengan instruksi Gub. Mil. No. 11/GM/Instr. dibentuklah badan-badan penerangan pada setiap MPRK jang langsung berada dibawah pimpinan badan penerangan Gub. Mil. dan segala badan-badan penerangan sipil, tentera, partai dan rakjat berdjuang harus dikoordinir oleh badan penerangan dan tentera. Pula badan-badan Penerangan MPRK dalam waktu jang ditentukan hendaknya dapat membentuk badan-badan penerangan MPRN dalam kewedanaanja, jang susunannja sama dengan badan penerangan MPRK.

Peringatan 3½ tahun kemerdekaan 17 Pebr. 1949.

Maka sampailah saatnja perdjalan perdjjuangan kepada memperingati hari jang bersedjarah jaitu tiga setengah tahun kemerdekaan pada tanggal 17 Pebruari 1949. Hari jang bersedjarah itu diperingati diseluruh daerah gerilja dengan semeriah-meriahnja, dan kobaran semangat jang dihasilkan oleh perajaan-perajaan ini, telah memungkinkan semakin pastinja pikiran dan tindakan rakjat menudju kemenangan peperangan kemerdekaan.

Dalam suatu uraian jang penuh semangat pemerintah menjerukan agar seluruh rakjat memperingati tiga setengah tahun kemerdekaan ini dimana dikatakan a.l.:

3½ abad dibawah telapak kaki pendjadjahan Belanda, membuat rakjat ketakutan, kemiskinan dan kemelaratan, tidak bebas bergerak

dan mengeluarkan pendapat dengan lisan ataupun tulisan. Rakjat Indonesia jang diperas keringat dan tenaganja dari pagi sampai petang dihargai oleh Belanda Pendjadjah tjuma dengan hidup sebeggol sehari.

$3\frac{1}{2}$ tahun meringkuk dibawah tindakan militer fascist Djepang, membuat rakjat Indonesia jang sudah lama kurang makan, tambah lebih sengsara dan lebih kelaparan lagi. Rakjat Indonesia jang dipaksa melipat-gandakan bahan-bahan makanan dibawah antjaman bajonet kempetai Djepang, disuruh makan rumput, sedang Djepang sendiri makan enak dengan beras kelas satu. Bangsa Indonesia jang terkenal dengan nama djulukan „Bangsa jang paling lemah-lembut” didunia, tidak kurang 4 djuta djiwa mendjadi korban maut akibat sistim Romusja Djepang.

$3\frac{1}{2}$ bulan naskah Persetudjuan Linggardjati, tambah memberi bukti kenjataan kepada kita 70 djuta bangsa Indonesia tentang kepalsuan dan ketjurangan Belanda terhadap penglaksanaan sesuatu djandji jang tertulis hitam diatas putih. Sedjarah „Pelakat Pandjang” hendak diulang Belanda kontan-kontan kembali di Indonesia. Maksud naskah tersebut dimana pemerintah Belanda kontan-kontan telah mengakui kekuasaan de facto Pemerintah Negara Republik Indonesia jang meliputi Djawa, Sumatera dan Madura, dengan tidak punja rasa malu terhadap dunia jang beradab telah dichianati oleh Belanda dengan tindakan perang kolonialnja jang pertama tanggal 21 Djuli 1947 dengan niat djahat mau mendjadjah Tanah Air Bangsa Indonesia kembali.

$3\frac{1}{2}$ tahun kemerdekaan Indonesia, sebagaimana sama-sama kita peringati pada tanggal 17 Pebruari 1949 ini, terhitung sedjak tanggal 17 Agustus 1945 diwaktu mana semangat kemerdekaan 70 djuta rakjat Indonesia dengan dipelopori pemuda-pemuda pahlawannja meledak sebagai dinamit, memberi kesempatan kepada kita bergerak seluas-luasnja untuk mengatur penderitaan, ketakutan dan kesakitan rantai pendjadjah jang mengikat. Walaupun usaha kita bersama belum sempurna memuaskan disegenap lapangan pembangunan menudju satu Indonesia Raja merdeka penuh, berdaulat adil dan makmur, namun $3\frac{1}{2}$ tahun Kemerdekaan Indonesia tjukup djadi saksi besar dan bukti kenjataan bagi dunia luar tentang kesanggupan kita mengurus nasib sendiri.

Dan biarpun penjerangan Belanda pendjadjah setjara biadab sedjak tanggal 19 Desember 1948 tidak sedikit mendatangkan siksaan atas Rakjat kita jang tak bersalah, menghudjani kampung-kampung setiap hari dengan peluru-peluru meriam, mortier, hou-witser, senapan masin dan bom, membakar rumah-rumah dan merampas harta benda penduduk, menembaki, membunuh dan menjembelih Rakjat jang tak bedosa, terhitung orang-orang tua, perempuan dan anak-anak dan semuanya ini adalah semata-mata perlawanan rakjat berdjuang untuk menghantjurkan musuh sampai kepada serdadu-serdadu fascistnja jang penghabisan.

Oleh karena itu berhubungan dengan genapnya 3½ tahun kemerdekaan kita sekarang, kita serukan dan andjurkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya, kepada seluruh anggota-anggota Angkatan Perang kita, seluruh anggota-anggota Barisan Gerilja kita dan pemuda-pemuda pahlawan yang tergabung dalam BPNK umumnya, terutama kepada yang sedang berada di front, peringatilah 3½ tahun kemerdekaan kita ini semeriah-meriahnya dan sehebat-hebatnya dengan memperkuat tekad, memperkokoh kejakinan dan semangat perlawanan, djauh lebih kuat, lebih tabah, lebih ulet dan dengan tak kenal bosan dari dimasa yang sudah-sudah untuk menghantjurkan musuh yang disertai dengan bukti perbuatan berupa gempuran dan tikaman yang memautkan terhadap musuh pendjadjah.

Kepada segenap badan-badan pemerintahan, pamongpradja, pemimpin-pemimpin rakyat, Ninik Mamak, alim ulama dan tjerdik pandai umumnya, kita serukan dan andjurkan dari hati yang ichlas dan penuh ketjintaan terhadap negara Republik Indonesia, djantung hati kita bersama, marilah sama-sama kita peringati 3½ tahun kemerdekaan kita ini dengan rasa penuh tanggung djawab dan kesedaran, memperkuat sumpah dan tekad, *sekali Merdeka tetap merdeka!*

Dan adakanlah upatjara peringatan disekolah-sekolah, mesdjid-mesdjid, langgar-langgar dan Balai-balai Adat dan dimana sadja kita berada mengingat suasana, waktu dan keadaan setempat-setempat. Naikanlah dan kibarkanlah sang Saka Merah Putih di tiap-tiap rumah dan lagukanlah lagi kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama sehingga berkumandang keangkasa bumi Tanah Air.

Sebagai penutup kita serukan lagi. Marilah sama-sama kita peringati 3½ tahun kemerdekaan ini dengan penuh semangat perjuangan berlama-lama serta pertanggungan djawab sepenuhnya terhadap keselamatan Tanah Air!

Bangsa dan Agama serta turunan kita dimasa datang. Tidak sadja didaerah-daerah aman Republik, tetapi djuga dikalangan saudara-saudara kita didaerah pendudukan musuh menurut kebidjaksanaan masing-masing dan dengan mengingat sumpah setia terhadap Negara kita Republik Indonesia yang tertjinta.

Sekianlah, sekali merdeka, tetap merdeka!

Maka dirajakanlah 3½ tahun kemerdekaan ini diseluruh Sumatera Barat dengan sehebat-hebatnya dan dengan itu semangat untuk bertempur semakin berkobar. Dan karena ternjata bahwa kemandjuan disegala front adalah karena perhubungan mereka yang intact (lantjar) dengan oto, truk, tank, pantserwagen dan lain-lain kendaraan, maka kemandjuan musuh ini harus dihalang-halangi, dan tjaranja ialah dengan melakukan peruntuhan djalan dan djembatan-jembatan yang bisa dilalui oleh kendaraan musuh.

Memutus djalan.

Gub. Mil. Sumatera Barat sendiri me-instruksikan supaya seluruh pamongpradja tentera dan segala pemimpin akan mengerahkan tenaga rakjat dan MPRN menghantjurkan djalan-djalan dan djembatan-djembatan jang mungkin dilalui oleh musuh. Sedang wali negeri dan MPRN dipertanggung djawabkan tentang penghantjuran djalan-djalan dan djembatan dinegeri masing-masing. Didjelaskan bahwa djarak tempat penghantjuran dengan jang lain sekurang-kurangnja 500 meter dan pandjangnja tempat jang dihantjurkan itu sekurang-kurangnja 10 meter. Djika ada bandar air dekat djalan itu, airnja dialirkan kesana, dan batang-batang kaju, kalapa dan lain-lain dibelintangkan didjalan-djalan.

Penghantjuran ini berdjalan pula dengan sistimatis, dan djalan-djalan jang dihantjurkan itu digenangi air, dan pada tempat jang banjak sawah, tentera Belanda diedjek pula dengan menanamkan padi ditengah djalan jang telah berlumpur itu. Dengan penghantjuran ini maka frontaal-lijn (operasi) musuh bertambah sempit, sedangkan patrolinja tidak bisa bersimaradjalela lagi djauh masuk kekampung-kampung mengganggu keamanan dan penghidupan rakjat.

Ditempat-tempat jang banjak batang kelapa, seperti didaerah 50 Kota dan sependjang Pesisir Barat, djalan-djalan raja penuh dengan batang kelapa jang berbelintangan, sehingga tak dapat dilalui kendaraan musuh, dan patrolinja tak begitu mengganas lagi djauh-djauh, karena takut terdjarak dari kendaraannya.

SUSUNAN PEMERINTAH MILITER.

Dimaksudkan dengan memilitarisir pemerintahan ini agar pimpinan perdjuaan disatukan, artinja sipil dan tentera berada dibawah satu komando. Berlainan dengan susunan D.P.D., dalam badan mana hanya terdapat koordinasi antara sipil, tentera dan organisasi rakjat, dan tindakan keluar tetap dilakukan oleh tiap-tiap instansi mengenai bagian masing-masing, maka dipemerintahan militer tindakan keluar hanya satu jaitu atas perintah Gub. Mil. dan atau wakilnja ialah komandan Sub. Territorium Kesatuan Tentara S. Barat.

Bahagian-bahagian pada Gub. Mil.

Pembahagian pekerdjaan dipusat pemerintahan Gubernur Militer S. Barat dalam peperangan kemerdekaan ini ialah: diputjuk berdiri Gubernur Militer dibawahnja terdapat dua bahagian jaitu: Pertama bagian Sekretariaat, jang mendampingi staf sipil jang terdiri dari 4 bagian jaitu: bagian-bagian Umum, Siasat, Pemerintahan, dan Penerangan.

Jang kedua ialah Kepala Staf (Wakil Gubernur Militer) jang terbagi pula kepada 3 bagian jaitu: bagian-bagian Operasi, Per-

bekalan, dan Siasat. Staf sipil berada dibawah kepala staf dengan pengertian bahwa Kepala Staf sebagai wakil Gub. Mil. berhak mengenai segala sesuatu yang mengenai sipil. Urusan Umum mengerdjakan surat-menjurat, arsip, menjiapkan peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, dan lain-lain. Pemerintahan memperhatikan soal-soal yang terdjadi disekitar pemerintahan dan mengusulkan mutasi untuk kepentingan pemerintahan. Untuk ini perlu dokumentasi dari orang-orang yang memegang pemerintahan ditempat masing-masing.

Buat sementara siasat dibagi dua, mengenai sipil dan militer, yang keduannya akan disatukan.

Penerangan memperhebat penerangan keluar dan kedalam dengan bagian-bagiannya yang ada.

Dalam staf Militer ada bagian istimewa jaitu bagian operasi yang dikepalai oleh seorang Opsir Tinggi.

Bagian perbekalan dikepalai oleh seorang sipil atau militer.

Sedangkan dibawah disusun pula setjara dipusat dengan disederhanakan.

Membakar ganti balasan.

Tindakan-tindakan meruntuhkan djalan dilawan oleh Belanda dengan siasat bakar-rampok-bunuh yang sangat mengerikan. Dimana bersua djalan runtuh maka dengan tak ampun lagi rumah-rumah yang berdekatan dengan itu, dibakar, dan siapapun yang bertemu disekitar itu ditembak mati, lalu mereka membawa kuli-kuli untuk menimbun djalan itu kembali. Tetapi bila hari telah malam dan Belanda kembali kesarang-sarangnya, rakjatpun telah bergotong rojong kembali menghantjurkan djalan itu. Demikianlah ganti berganti, sehingga karena susahnja Belanda mentjari penimbun djalan itu, mereka sering mendinamit rumah-rumah yang berdekatan, dan ditimbunkan runtuhannya kesitu.

Untuk mengatjaukan ekonomi, dan mematahkan blokade kekota, maka Belanda sengadja mendatangi pasar-pasar darurat, mengempung dan menembaki serta menggeledah pedagang-pedagang ketjil dipasar-pasar darurat itu.

Dan bila ada serangan gerilja mengorbankan tentera Belanda disatu tempat, maka kampung-kampung disekitar itu dibakar habis rumah-rumahnya. Ribuan rumah mendjadi korban, ribuan jiwa melajang oleh keganasan Belanda, ratusan ribu rupiah kerugian dari perampokan-perampokan Belanda, tetapi semuanya itu hanya menambah kemarahan rakjat terhadap Belanda. Sedih tinggal sedih, yang mati dikubur, yang luka diobat, rumah yang terbakar diganti dengan pondok-pondok, dan peperangan kemerdekaan dilangsungkan terus dengan tak berkurang hebatnja.

Peringatan Partai-partai 26 Maret 1949.

Persatuan semakin erat, dan bajangan pertentangan partai-partai yang telah menghantu sebelum agresi, karena dihembuskan oleh pertengkaran-pertengkaran pemimpin-pemimpin di Djawa yang berpuntjak dengan „Peristiwa Madiun” segera hilang bagai embun ditimpa tjahaja matahari dipagi hari.

Maka pada 26 Maret 1949 tibalah masanja hari yang bersedjarah, dimana seluruh partai di S. Barat sesudah berapat diibu tempat Pemerintahan Militer, lalu mengeluarkan suatu maklumat bersama yang berbunyi sbb.:

MAKLUMAT BERSAMA

dari partai-partai politik se Sumatera Barat.

Dengan dihadiri oleh p.t. Gubernur Militer Sumatera Barat, rapat dari pemimpin-pemimpin Partai-partai Politik se-Sum. Barat, telah dilangsungkan pada hari Djum'at 26 Maret 1949, bertempat di Sum. Barat, yang dihadiri oleh:

1. M.T.K.A.A.M., diwakili oleh sdr²: Datuk Simaradjo dan Dt. Bgd. Basa nan Kuning.
2. PERTI, diwakili oleh saudara-saudara: H. Siradjuddin Abbas Dt. Bandaro dan Hasan Zaini.
3. P.K.I., diwakili oleh saudara Bachtaruddin.
4. PESINDO, diwakili oleh saudara Baharuddin.
5. MASJUMI, diwakili oleh saudara-saudara: H. Iljas Jacoub, H. Udin Rahmani dan M. Dien Jatim.
6. Partai Sosialis Indonesia, diwakili oleh saudara Djuir Muhammad dan Hamdani.
7. P.S.I.I., diwakili oleh saudara: Harun Junus dan Daradjat Daud.
8. G.P.I.I., diwakili oleh saudara: Iljas Dt. Madjo Indo.

Setelah mengemukakan pendidikan masing-masing menginsjafi bahwa tuntutan perjuangannya bangsa dan Negara sekarang ini harus meliputi seluruh lapisan masyarakat dan untuk mendapatkan tenaga semesta ini harus disingkirkan pertentangan paham dan ideologie masing-masing.

M e m u t u s k a n .

1. Tiap-tiap partai bertindak dibawah memasukkan keinsjafan sesungguhnya dalam saat menghadapi perjuangan melawan musuh yang satu sekarang ini, yaitu Belanda, menghindarkan sesuatu kemungkinan pertentangan paham, ideologie dan golongan-golongan dalam masyarakat.

2. Berusaha membasmi segala anasir-anasir dalam kalangan sendiri yang mungkin membawa akibat perpetjahan dalam masyarakat.
3. Menjelaskan kepada seluruh partai masing-masing tentang M.P.R.K., dan M.P.R.N., serta kedudukan sebagai anggota dalam badan-badan Pemerintahan tsb. haruslah memiliki kepada kesanggupan melaksanakan pekerjaan actief menurut pembahagian tugas.

Dibuat dan dikeluarkan disuatu tempat
di Sumatera Barat pada tgl. 26 Maret 1949.
(d.t.o. semua yang hadir).

Dalam pedoman penjelasannya diuraikan a.l. bahwa: dasar perjuangan yang kita lakukan sekarang, adalah perjuangan kebangsaan yang sebulat-bulatnja. Dia harus merupakan perjuangan rakjat semesta. Tenaga dan perjuangan rakjat semesta itu harus terudjud lahir dan bathin. Untuk mentjapai ini harus dapat diudjudkan persatuan rakjat yang kokoh, persatuan berpikir dan bertindak. Sjarat yang utama untuk melaksanakan ini, adalah menjingskirkan segala sesuatu yang mungkin menimbulkan retak dalam masyarakat, walaupun retak dalam tjara berpikir untuk melaksanakan tiap-tiap sesuatu kewadajiban yang harus dipikul oleh tiap diri ataupun golongan. Didjelaskan pula bahwa kemadjuan dan kemenangan ideologie hanja dapat berkembang dalam negara yang merdeka. Oleh karena itu tiap pertentangan paham politik dalam masyarakat, harus dapat disingkirkan, karena pertentangan paham itu mungkin dapat membawa kerenggangan dalam tjara berpikir dan tjara meudjudkan lagi lebih meutamakan penjelenggaraan perlengkapan pertempuran. Dalam pada itu perdjalanen perjuangan menimbulkan pula (dan memang sudah semestinja) akan gerombolan-gerombolan pedjuang yang merupakan bermacam-macam barisan, yang dalam berlomba-lomba membuktikan ketangkasannya dalam memerangi Belanda, sering pula nafsu ingin berdjasa sendiri, yang menimbulkan situasi tidak baik dikalangan pedjuang-pedjuang.

Pasukan Mobil Teras. 5 April 1949.

Untuk mengatasi keadaan ini, dan agar kompetisi djangan menjadi konkurensi, maka Pemerintahan Militer dengan instruksi Gubernur Mil. No. 24/GM/Instr. tanggal 5 April 1949 memerintahkan pembentukan Pasukan *Mobil Teras B.P.N.K.*, dalam mana anggota-anggota B.P.N.K. yang paling giat dalam pertempuran, ditambah dengan anggota gerilja dari matjam-matjam barisan, disatukan dalam satu ikatan repolusioner yang berada dibawah komando M.P.R.K. bagian pertempuran, yang sebagaimana kita ketahui adalah dipegang oleh Komandan Ketenteraan dalam ketjamatan itu. Tetapi diluar technis pertempuran mereka berada dibawah bimbingan M.P.R.K., sehingga merupakan pengawal Ketjamatan yang ahli dalam pertempuran.

Dalam instruksi itu antara lain ditegaskan bahwa pasukan Mobil Teras B.P.N.K. (dengan singkatnja P.M.T. B.P.N.K.) ini didirikan dan dipusatkan pimpinannja dalam Ketjamatan dan merupakan bahagian dari M.P.R.K. pertempuran. P.M.T. merupakan persatuan dan kemajuan tenaga rakjat, diluar organisasi Angkatan Perang, jang titik berat tugas kewadjabannja terletak dalam pertempuran dalam hubungan besar adalah bagian gerakan Angkatan Perang; dalam melakukan tindakan gangguan dan sabotage (gerilja taktik) setempat-setempat mempunjai iniatief sendiri. P.M.T. tidak bersifat tetap atau stationair dan menanti, tetapi sebaliknja mobiel dan offensief.

Selain dari menghadapi musuh, baik dalam daerahnja maupun dibelakang garis pertahanan musuh ataupun dalam daerah pendudukan musuh, turut actief mendjaga stabiliteit pemerintahan di daerahnja.

Sesuai dengan sifat dan persendjataannja P.M.T. dalam pertempuran menghadapi musuh, akan menerima instruksi-instruksi dan perintah-perintah lebih landjut dari M.P.R.K. bagian pertempuran jang akan diturunkan setjara rahasia dari atas. Anggota-anggota P.M.T. diambil dari anggota pilihan B.P.N.K. atau teras dalam Ketjamatan. Sjarat-sjarat untuk mendjadi anggota:

- a. ketjakapan, ketangkasan, kedjudjuran dan keberanian.
- b. ukuran persendjataan, upm. karaben, stengun, senapang mesin, brengun, pistol, senapang berlansa, granat tangan dsb. (perban-

perdjuangan kebangsaan kita. Kita sekarang hanja menghadapi dan mempunjai satu kepentingan jaitu kepentingan negara. Kemudian ditegaskan bahwa pertentangan ideologie dan golongan dalam masa peperangan semesta sekarang, harus dihentikan. Tetapi karena faham politik itu dan faham susunan hidup masjarakat berdasarkan demokrasi sudah tumbuh dalam masjarakat kita bukanlah dimaksud mematikan partai-partai. Terutama di Sum. Barat ini susunan masjarakat ada sedemikian rupa hingga activiteit partai itu dapat dipergunakan sebaik-baiknja untuk mentjapai kesatuan, dan kemajuan tenaga rakjat seluruhnja dalam menghadapi dan melaksanakan perdjuangan sekarang ini melawan agresie Belanda, dan menjatkan langkah dan diri serta tiap golongan dalam masjarakat hingga seluruh bangsa mendjadi satu, bulat dan padu.

Achirnja para pemimpin partai itu menjerahkan kepada pemerintah kekuasaan sepenuhnya, untuk mengambil sikap dan tindakan jang tegas keras untuk membasmi tiap diri, tiap individu dan apabila perlu tiap-tiap golongan jang bertindak menghalangi terlaksananja persatuan tenaga rakjat dan persatuan tenaga perdjuangan menentang aksi kolonial dari musuh bangsa dan Negara sekarang ini.

Sekianlah pendjelasan dari Maklumat Bersama itu !

Belanda menjeleksi surat kabar.

Maklumat bersama ini menjadikan semakin terpadunya persatuan untuk perjuangannya, dan diseluruh daerah S. Barat semakin menjadilah gerakan gerilja, yang walaupun dengan bermatjam-matjam djalan ditjoba mematahkannya setjara moreel dan materieel oleh Belanda, tetapi ia merupakan njala api yang berkobar-kobar dan tak kundjung padam.

Dalam pada itu surat-surat kabar Belanda di Bukittinggi dan Padang yang disiarkan oleh tentaranya kekampung-kampung, mulai meniupkan hembusan bisanja dengan mengemukakan suara-suara hendak berdamai dari pihak Belanda dengan pihak Indonesia, rentjana K.M.B. dan lain-lain, dengan maksud agar melengah rakjat dari perlawanan gerilja, tetapi rakjat yang telah begitu menderita akan keganasan Belanda tak mempertjajai akan segala omong kosong itu. Mereka berpendirian bahwa Belanda tak bisa dan tak dapat dipertjajai.

Dalam pada itu B.P.N.K. yang anggotanya bersebar ratusan ribu diseluruh S. Barat, yang aktif dalam setiap perjuangan, makin lama makin mendapat kesempurnaan latihannya dalam praktik gerilja yang maha hebat itu.

Dan perjuangan ini dalam segala kesengitannya telah menjadi saringan pula, dengan mana B.P.N.K. telah menjaring dirinya sendiri, sebagian anggotanya lebih meutamakan bertempur, dan sebanding sendjata dengan orang menurut ketentuan-ketentuan selanjutnya).

Pimpinan P.M.T. dalam M.P.R.K. dipegang oleh sector comandant atau opsir yang ditundjuk untuk itu oleh Kom. Sub. Komando, atau dari anggota P.M.T. yang tjakap memegang pimpinan, dengan persetudjuan anggota-anggota M.P.R.K. dan disahkan oleh Kom. Sub. Komando.

Perbekalan anggota-anggota P.M.T. selama actief menjalankan kewadajiban ditanggung oleh Pemerintah atau M.P.R.K. yang bersangkutan. Manakala mereka pulang atau dipulangkan ketempat masing-masing, mereka kembali menjalankan tugas-tugas biasa B.P.N.K. dan meneruskan penghidupan sebagaimana rakjat biasa.

Ketjamatan-ketjamatan yang langsung mempunyai front pertempuran, perlu mengumpulkan dan memusatkan teras B.P.N.K. kedalam pimpinan M.P.R.K. bagian pertempuran. Djumlah pemusatan tenaga itu dalam keadaan biasa (keadaan perang) djangan lebih dari 60 orang, boleh dibawah djumlah itu.

Karena dibeberapa front telah ada bentukan-bentukan dan susunan barisan gerilja rakjat dengan berbagai matjam nama dan organisasi sebagai langkah pertama dalam pengumpulan dan pemusatan tenaga, mereka itu mendapat voorang (didahulukan) dalam pengumpulan dan pemusatan pasukan Mobiel Teras B.P.N.K.

ini karena telah mempunyai Pemusatan pasukan, pengertian tjara-tjara bertempur, dan taktik gerilja.

Sampai terudjudnja instruksi ini tanggal 10 Mei 1949, maka sesudah tanggal tsb. barisan-barisan selain Angkatan Perang, B.P.N.K., Pasukan Mobiel Teras B.P.N.K. dan segala barisan-barisan diluar M.P.R.K. bagian pertempuran, tidak dibenarkan berdiri lagi.

Barang siapa jang menghalangi, mengsaboteer dsb. dengan lidah, tulisan dan perbuatan akan pelaksanaan instruksi ini, biar langsung atau tidak langsung maka perbuatan itu dipandang sebagai penga-tjau pertahanan dan pengaduan tenaga perdjjuangan rakjat semesta dan akan dituntut serta dihukum menurut undang-undang militer.

GUBERNUR MILITER SUM.-BARAT MENDJADI GUBERNUR MILITER SUM.-TENGAH.

Djalan perdjuaan telah mengantarkan kita keawal Mei 1949. Dalam suatu rapat P.D.R.I. (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) ditindjau kembali bentuk pemerintahan Militer jang telah didjalankan selama beberapa bulan. Keadaan jang njata ialah bahwa dengan pembentukan pemerintahan Gub. Militer ini, maka D.P.D.-D.P.D. tidak terang lagi kedudukannja oleh karena ketua-ketua D.P.D. telah mendjadi Gubernur Militer.

Inilah jang ditindjau dalam rapat P.D.R.I. diawal Mei 49 itu. Maka dalam rapat itu diambillah keputusan sbb.:

Gubernur Prop. Sumatera Tengah didjadikan Komisaris Pemerintahan Pusat, jang dimana perlu boleh mengambil tindakan atas nama pemerintah pusat, atau atas nama salah seorang Menteri, ketjuali Menteri Luar Negeri.

Sedangkan Gubernur Militer diberi tugas disamping mengurus soal pertahanan djuga memegang pemerintah sipil, djadi kekuasaan Gubernur Prop. Sum Tengah dahulu didjalankan oleh Gubernur Militer. Pada waktu itu djuga *ditetapkanlah Gubernur Militer Sum.-Barat mendjadi Gubernur Militer Sum.-Tengah.*

Daerah kekuasaannja ialah Sum.-Barat dan Riau, dan D.P.D.-D.P.D. dihidupkan kembali, sedangkan untuk Riau R.M. Utojo mendjadi Ketua D.P.D., dan untuk Sum.-Barat saudara Enny Karim sebagai fd. ketua.

Dengan berdirinja D.P.D. ini maka pembagian pekerdjaan antara Gubernur Militer dan D.P.D. ditetapkan pula, jaitu segala dinas-dinas atau djawatan jang dahulu diserahkan kepada prop. Sum. Tengah diurus oleh D.P.D., sedangkan dinas-dinas jang lain langsung dibawah pengawasan Gubernur Militer.

Peredaran politik diluar Sum. Tengah kemudian meningkat begitu rupa, bahwa perdjuaan rakjat diseluruh Indonesia dan desakan dari luar negeri jang berpusat di Persatuan Bangsa-Bangsa, telah memaksakan Belanda buat mentjari hubungan dengan para pemimpin R.I. jang diasingkannja ke Bangka.

Tuntutan P.D.R.I. tentangan sjarat-sjarat Cease-Fire jang berisi membebaskan para pemimpin R.I. jang ditawan, penarikan tentara Belanda kedaerah Renville, pembentukan Negara Indonesia Merdeka jang meliputi seluruh Hindia Belanda dahulu, dan sesudahnja penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia, tuntutan-tuntu-

tan ini berdentung kedalam Konperensi Asia di New Delhi yang diadakan istimewa untuk membela Indonesia, dan menghasilkan resolusi New Delhi, yang dengan sedikit perobahan menjadi resolusi Dewan Keamanan, yang masjhur dengan Resolusi 28 Djanuari, dalam mana ditegaskan bahwa pemerintahan R.I. harus dikembalikan ke Jogja, dan harus didirikan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat, sedangkan penjerahan kedaulatan harus dilakukan pada tanggal 1 Djanuari 1950.

Dr. Beel dari pihak Belanda berusaha mengelakkan isi resolusi 28 Djanuari ini dengan mengundang pemimpin-pemimpin di Bangka ke Konperensi Medja Bundar di Den Haag pada bulan Maret 1949.

Dasar mengadakan K.M.B. ini disetujui oleh Presiden, tetapi harus dilakukan sesudahnya R.I. dipulihkan ke Jogja.

Perundingan selandjutnja menghasilkan Rum — Royan statement pada tanggal 7 Mei 1949, dalam mana prinsip penjerahan kedaulatan via K.M.B. disetujui.

Tetapi Rum — Royen statement ini tak terasa akibatnja di Sum. Tengah, karena pertempuran berlangsung terus. Disamping tentera, maka P.M.T. B.P.N.K. memegang rol penting dalam pertempuran, mengurung Belanda dikota-kota, dan sebaliknya Belanda lalu dengan intensif mendirikan pos-posnja disepanjang djalan raja Padang-Pajakumbuh dan ditempat-tempat yang strategis seperti Palupuh, dengan mana mereka bermaksud akan mentjapai Bondjol, dan akan mendjepit kedudukan Pemerintah Militer di Koto Tinggi dalam djepitan kakak-tua yang dilangsungkan dari Bondjol dan Pajakumbuh.

Djuli 1949 pemerintah R.I. telah dipulihkan kekota Jogja dan perundingan Cease Fire dimulai.

Walaupun begitu didaerah Sum. Tengah Belanda masih terus menggerakkan tenteranja dengan lebih hebat lagi, dan pada 31 Djuli 1949 mereka berhasil menduduki Kamang, tetapi hanya selama 1 hari.

Madju ke Koto Tinggi ini tidak terburu lagi, oleh karena perundingan cease fire telah berhasil sedemikian rupa, sehingga sampai kepada tingkatan memerintahkan penghentian tembak menembak yang dikeluarkan oleh Panglima Besar Tentera Belanda di Indonesia, dan Panglima Tertinggi Tentera Nasional Indonesia, serentak mulai berlaku di Sumatera pada tanggal 14 Agustus 1949 mulai djam 0,00 (sesudah djam 12 tengah malam).

Pertempuran dihentikan, masing-masing tetap ditempat mana ia pada waktu perintah itu berlaku, dan perdjuaan dialihkan kepada perundingan dalam Central Joint Board dipusat, dan Local Joint Committee (L.J.C.) yang nanti akan kita bitjarakan lebih lanjut.

Dalam satu pidatonja jang dibatjakan diseluruh Sum. Tengah untuk perajaan-perajaan 17 Agustus, Gubernur Militer Mr. St. M. Rasjid mengemukakan satu pertanggungan djawab jang berisi chutbah kemerdekaan dan patut mendjadi tjatatan sedjarah. Pidato jang disusun sebelum perintah menghentikan tembak menembak di-keluarkan ini, jang dibatjakan diseluruh Sum. Tengah tepat pada djam 10 w.i. pada tanggal 17 Agustus 1949, dipuntjak perajaan 4 tahun kemerdekaan jang maha meriah itu, berbunji sbb.:

Saudara-saudara rakjat dan penduduk Sum. Tengah.

Hari ini, Rebo tanggal 17 Agustus 1949 seluruh Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya jang keempat, istimewa didaerah Republik hari ini mendjadi hari kebangsaan jang terbesar, seperti 4 Djuli tiap-tiap tahun di Amerika dan Filipina, 14 Djuli di Perantjis, 10 Oktober di Tiongkok (mungkin akan berubah sesudah Mau Tse Tung mendapat kemenangan di Tiongkok), Rusia, India, Burma, Vietnam, negara-negara Arab dan tiap-tiap negara didunia tiap-tiap tahun memperingati hari kebangsaannya.

Memperingati hari kebangsaan berarti memperingati djasa-djasa pahlawan-pahlawan jang memelopori kemerdekaan sesuatu bangsa. Merajakan hari Kebangsaan mempunyai pengertian memperingatkan kepada orang-orang jang merajakan hari itu, bahwa kegembiraan dan kesenangan jang dirasakan pada hari itu adalah oleh karena orang-orang jang terdahulu dari mereka mengorbankan tenaga djiwa dan raganja untuk mendapat hari kebesaran itu dan buat Indonesia jang kita tjintai, jang ini hari kita rajakan keempat kali kemerdekaannya, hari ini mempunyai pengertian jang sangat istimewa.

Hari ini buat kita lepas dari pendjadjahan, bebas dari penindasan, hari ini buat kita berarti kembalinja kepangkuan ibu pertiwi hak-hak azasi (asli) dari kemanusiaan, bebas bergerak, bersuara, bersidang, berkumpul, bebas memeluk agama, bebas dari perasaan takut, lepas dari kehinaan dan kemelaratan.

Hak-hak asli kemanusiaan ini walaupun berangsur-angsur baru mendjelma dan terasa dalam hati masing-masing, akan tetap kita perdjjuangan dan pertahankan sampai betul-betul tiap-tiap warga Indonesia hidup dalam suatu masjarakat jang berbahagia, adil dan sentosa.

Mentjapai suatu masjarakat jang bebas dari angkara murka pendjadjahan, penindasan suatu negara, dalam mana terdjamin pembagian rezeki jang adil buat tiap-tiap putera dan puterinja, menghendaki suatu sjarat mutlak jaitu kemerdekaan 100% bulat, tunggal dan tidak bersjarat.

Saudara-saudara,

Selama suatu negara diatas dunia mempunyai kemerdekaan jang masih bersjarat, tidak tunggal dan penuh, selama itu bangsa dan negara itu tidak dapat mengembangkan djiwanja untuk kesempurnaan bagian-bagian negara itu, (tjontoh Filipina sampai tahun 1946 dan Mesir beberapa tahun jang lalu) tetapi sebaliknya djuga betul, walaupun sesuatu negara merdekaa 100%, tetapi kalau sjarat-sjarat untuk menjempurnakan bagian-bagian negara itu tidak tjukup, negara itu mustahil akan mentjapai kemakmuran (karena kemiskinan alamnja, sumber-sumbernja tidak ada, pemimpin-pemimpinnya belum banjak jang tjakap dan sebagainja).

Oleh karena itu seperti seorang manusia tidak dapat hidup sendiri, begitupun negara jang hidup sandar bersandar dengan negara lain istimewa dengan negara tetangganya.

Buat Indonesia jang baru setengah windu atau $1/25$ abad mereka atau lebih tepat mempertahankan kemerdekaannya, karena sampai pada saat ini tetap menghadapi penjerangan dari Belanda, dalam perdjalanannya sedjarah sama dengan setetes air dalam telaga besar, tetapi terus menerus empat tahun berdjuang dan bertempur, sedikit sekali kesempatan membangun, senantiasa mendapat udjian, istimewa dua kali mendapat udjian berat (aksi militer Belanda jang pertama 21 Djuli 1947 dan kedua tanggal 19-12-1948) menjebakkan angkatan manusia jang hidup diwaktu sekarang dan memberikan dengan ichlas darma bakti untuk perdjjuangan menegakkan Negara Republik Indonesia, merasa hidup dalam suatu saat luar biasa jang djarang tandingannya diatas dunia. Berbahagialah teman-teman seperdjjuangan jang kemudian hari oleh angkatan (generasi) dibelakang kita akan diperingati sebagai pahlawan tanah air pelopor kemerdekaan.

Saudara-saudara,

Apakah gerangan jang menjebakkan begitu banjak dan serentak di Nusantara kita korban-korban diberikan oleh putera-putera dan puteri-puteri kita istimewa oleh Angkatan Perang, Pamongpradja, Kepolisian (Mobria), Tentera Peladjar, Rakiat Pedjuang, baik jang bernama BPNK atau pasukan Mobil Teras (PMT) Pasukan Gerilja atau nama apa sadjapun. Lain tidak karena didorong oleh satu tjita-tjita jang sama, satu idealisme, satu idee besar, jang bersemajam dalam tiap-tiap hati manusia jang tahu akan harga diri, jaitu hidup bebas sebagai manusia, diperintah oleh bangsa sendiri, taat kepada peraturan-peraturan dan undang-undang jang dibuat oleh pemerintah kita sendiri. Memanglah kemerdekaan itu kebahagiaan jang setinggi-tingginja buat sesuatu bangsa. Buat mereka jang berani menukik agak djauh, buat orang-orang jang djauh melihat kemuka, bukanlah satu tekateki lagi, bahwa Indonesia dimasa depan akan mendjadi satu negara jang

mempunyai peranan yang penting di Asia Tenggara ini, baik oleh karena letaknja dipersimpangan djalan antara lautan-lautan besar yang menghubungkan satu negara dengan negara lain.

Karena keinginan yang luhur untuk hidup kebangsaan yang bebas, sebagai kata pendahuluan dari Undang-undang Dasar kita, angkatan sekarang merintis djalan untuk orang-orang kita yang dibelakang hari.

Saudara-saudara,

Membitjarakan kedjadian yang empat tahun telah berlaku adalah berbeda dengan mengalaminja sendiri, apalagi buat mereka yang ditentukan oleh negara memegang tanggung djawab dalam matjam-matjam segi, baik pemerintahan, ketenteraan atau masjarakat sendiri.

Kadang-kadang terasa disatu saat sangat beratnja tanggung djawab itu, kadang-kadang terasa oleh kekurangan alat-alat bahwa pekerdjaan yang hendak dilaksanakan menghendaki tenaga yang tidak seimbangan dengan kemampuan orang-orang yang mengerdjakan, mana lagi pengalaman, pengetahuan, ketjerdasan, keberanian kadang-kadang kurang tjukup, tetapi setia menunaikan kewadajiban untuk tanah air.

Istimewa buat mereka yang djauh dari pusat pemerintahan dengan ichlas memberikan tenaga, waktu, pikiran, kadang-kadang dilihat, kadang-kadang tidak oleh orang atasan, djauh dari segala matjam hiburan-hiburan, tetap setiap waktu dengan gembira melakukan kewadajiban, buat Angkatan Perang yang digaris muka bersama-sama Mobrig, Tentera Peradjar dan Rakjat Berdjuaug dalam keadaan serba sederhana, malahan tidak tjukup mendjadi parit pagar negara, tidaklah putus-putusnja penghargaan negara dan dokumen negara yang berharga dibelakang hari.

Walaupun disaat ini penghargaan itu tidak dapat didjasmanikan berupa benda atau uang, pertjajalah pemerintah akan tetap menjtatat orang-orang yang berdjasa untuk negara dan bangsa.

Istimewa sekali kepada rakjat kita sendiri yang dibelakang garis pertahanan yang selama empat tahun ini bukan sadsja bertahan menderita tetapi membelandjai perdjuaugan kemerdekaan, lebih-lebih disaat 8 bulan yang achir ini betul-betul kita mau menjatakan, bahwa rakjat itu djiwa bangsa, tidak ada rakjat yang tak sadar, tetap diusahakan oleh pemerintah mendapat tjatatan benda rakjat, yang luka dan tiwas, begitupun dari Angkatan Perang, Mobrig, T.P. dan lain-lain semuanya ini untuk mendjadi kenang-kenangan dan dokumen negara yang berharga dibelakang hari.

Saudara-saudara,

Apakah segala kerugian dan kerusakan akan dipertimbangkan oleh pemerintah Pusat untuk menggantinya, kita belum tahu sebab ini adalah urusan pemerintah yang tertinggi (Dewan Menteri beserta Dewan Perwakilan). Tetapi walaupun bagaimana betullah apa yang dibuktikan oleh tiap-tiap sedjarah, bahwa tidak ada korban yang sisa-sisa, dan perjuangan kemerdekaan mesti dibayar dengan harta dan jiwa. Rakyat Indonesia telah membuktikan ini dan banyak harta yang musnah, ratusan bahkan ribuan jiwa yang melajang, lebih-lebih pada aksi militer Belanda yang kedua semendjak 19 Desember 1948 sampai sekarang. Oleh sebab itu pada tempatnya disini kita atas nama Pemerintah menjampaikan penghargaan yang tinggi dengan utjapan terima kasih kepada sekalian sanak saudara yang memberikan bantuan untuk perjuangan kemerdekaan kita selama empat tahun ini dan menjampaikan salam kehormatan (eresaluut) kepada sanak saudara yang telah tiwas didalam menegakkan Negara Republik Indonesia. Selama negara kita tetap mempunyai pahlawan-pahlawan dan senantiasa siap sedia dan waspada mendjalankan kewadjaban untuk tanah air, selama itu Indonesia tetap akan terdjamin kebesarannya dan penghidupannya ditahun-tahun yang akan datang.

Saudara-saudara !

Berlainan dengan tahun-tahun yang lalu, ini kali kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita, betul-betul dalam suasana peperangan, meskipun ada kemungkinan perintah penghentian tembak menembak (cease fire) akan diumumkan.

Dibawah dentuman meriam, mortier, senapang mesin dan karabijn digaris muka, saudara-saudara kita dengan tabah dan setia menghadapi musuh untuk mendjamin keselamatan kita dibelakang front, (kadang-kadang kurang mendapat perhatian dari masyarakat, karena salah pengertian sampai mengakibatkan renggangnya perhubungan dari sebagian sanak saudara kita yang berjuang dengan masyarakat disekitarnya) pada saat ini dengan segala kekurangan merayakan empat tahun kemerdekaan Republik djauh dari kota-kota dan dipinggir-pinggirnya ketjuali keresidenan Djokja dan Atjeh, dilereng bukit-bukit dan gunung-gunung Pemerintah dan Rakyat memperingati hari ulang tahun ini dengan segala kesederhanaan, tetapi tetap dengan jiwa kemerdekaan, ikut bersama-sama rakyat biasa memperingati hari yang mulia ini. Bagi pemimpin-pemimpin yang selama ini agak djauh dari masyarakat adalah selama 8 bulan ini suatu kesempatan yang baik djadi kenang-kenangan dan peringatan kalau telah kembali kekota nanti.

Bagi pegawai-pegawai dan rakyat kita yang tetap Republikein yang berada didaerah pendudukan Belanda, meskipun tidak dengan leluasa dapat merayakan hari ini tetapi didalam hati masing-masing tentu mengenangkan hari ini. Pendeknja diseluruh kepulauan Indonesia dari Sabang sampai ke Papua (Merauke) tiap-tiap putera-puteri Indonesia merayakan hari ini dengan segala kegembiraan.

Saudara-saudara !

Pada saat kita merayakan hari yang termulia ini, tjukuplah per-setudjuan Van Royen—Rum yang ditanda tangani 7 Mei yang lalu, berdjalan 3 bulan 10 hari atau 100 hari.

Persetudjuan Rum-Royen ini adalah akibat dari resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Djanuari 1949, yang memerintahkan kepada pihak Belanda membebaskan pemimpin-pemimpin Republik dan pengembalian Pemerintah Republik ke Djokjakarta dengan memerintahkan kepada pihak Indonesia—Belanda untuk menghentikan tembak-menembak serta mendesak Belanda kembali kedaerah yang didudukinja sebelum tanggal 19—12—1948.

Walaupun Republik setudju akan sebagian isi resolusi itu, tetapi Belanda tidak bersedia mendjalankanja, sebab maksud Belanda hendak menghantjurkan Republik dan mengira dengan didudukinja ibu kota Republik dan ditangkapnja pemimpin-pemimpin, seluruh Republik akan menjerah. Belanda sudah salah terka dan kalau sudah banjak kali Belanda membuat kesalahan politik dan militer di Indonesia, maka aksi militer yang kedua tanggal 18—12—1948 adalah satu kesalahan besar yang tidak diduga semula oleh Belanda. Kalau diabad ke-19 peperangan betul-betul diachiri apabila ibu kota sesuatu negara telah diduduki dan pemimpin-pemimpinnja ditangkap, maka dipertengahan abad ke-20 ini, tidaklah selesai sesuatu perdjuaan dengan menduduki ibu kota suatu negara dan menangkap pemimpin-pemimpinja. R.I. bukanlah kepunjaan satu dua orang pemimpin, tetapi adalah pendjelmaan hasrat seluruh rakyat Indonesia untuk ingin hidup sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua Belanda salah menerka kekuatan sendjata modern diabad ke-20 jaitu gerilja yang dipakai djuga di Tiongkok, Vietnam dan negara-negara lain yang memperdjuaan kemerdekaannja. Kalau Belanda mula-mula mengira dapat menaklukan seluruh daerah Republik dalam tempo satu bulan, sesudah itu tiga bulan dan paling achir 6 bulan, ternyata sampai saat ini dan sesudah 8 bulan, djangankan Republik akan hantjur, tetapi pemerintah Republik semendjak 6 Djuli yang lalu bertachta kembali diibu kota Djokjakarta.

Saudara-saudara!

Hendaklah kita insjaf, bahwa dua faktor atau sjarat jang menje-
bakkan Pemerintah Soekarno-Hatta dapat bersemajam kembali di
Djokja, jaitu pertama oleh perdjuaan rakjat Indonesia dengan
geriljanja dipelopori oleh Angkatan Perang R.I. dan kedua oleh
usaha Pemerintah Darurat Republik Indonesia (P.D.R.I.).

Kalau dua faktor ini tidak ada, mustahil Republik akan dapat
berdiri lagi.

Belanda dengan doorstoot-nja dapat menguasai kota-kota dan
djalan-djalan besar jang menghubungkan kota-kota itu. Tetapi
disekitar kota-kota itu siap sedia menanti tentara kita bersama
rakjat berdjuaan untuk menghantam Belanda sehingga sampai
saat ini, tidaklah sanggup Belanda mendirikan pemerintah sipilnja
didaerah-daerah jang baru didudukinja dan terus-menerus timbul
kekatjauan didaerah Belanda sehingga dunia luar menganggap,
Belanda tidak sanggup mengembalikan keamanan di Indonesia.
Dalam satu negara, kalau keamanan tidak ada, berarti pemerin-
tahan negara itu tidak sanggup mendjalankan kekuasaannja dan
mesti gulung tikar.

P.D.R.I. sebagai pemerintah pusat jang tertinggi dalam waktu
perang menentukan aliran politik jang disokong oleh rakjat meski-
pun tidak diakui Belanda, dalam pengembalian Pemerintah ke
Djokja djuga telah memberikan sumbangannja.

Saudara-audara!

Petundjuk-petundjuk (direktiven) Dewan Keamanan tanggal
23—3—1949 memberikan djalan tengah untuk membuka pintu pe-
rundingan jaitu:

1. pengembalian Pemerintah Republik ke Djokja,
2. penghentian tembak-menembak,
3. konperensi Medja Bundar.

Tingkat pertama telah didjalani, Belanda mengharap dan ingin
sekali sebelum Pemerintah Republik Indonesia ke Djokja supaja
perintah penghentian tembak-menembak dikeluarkan oleh Peme-
rintah Indonesia-Belanda tetapi kita tidak bersedia,
meskipun kita djuga tidak ingin perang berlama-lama, melihat ke-
adaan negara kita sudah hampir 8 bulan dan semendjak pendu-
dukan Djepang sampai sekarang terus-menerus berada dalam
suasana genting. Kita tahu, bahwa penghentian tembak-menembak
tidaklah soal primair (nomer satu), tetapi jang penting penjelesaian
insiden politik antara kita dengan Belanda dan persengketaan ini
hanja dapat diselesaikan dengan menjerahkan kedaulatan sepenuh-
nja kepada Republik Indonesia Serikat.

Sesudah tanggal 22 Djuni tertjapai persesuaian pikiran mengenai
penghentian tembak-menembak antara Republik dan Belanda,

barulah Belanda memerintahkan kepada tenteranja meninggalkan Djokja dan pengosongan baru selesai tanggal 30 Djuni jang lalu. Kedudukan kita sesudah kembali Pemerintah Republik ke Djokja mulai njata lagi. Belanda menelan kembali air iudah jang sudah dihamburkannya. Belanda mengakui Republik sebagai negara dan mengakui Angkatan Perangnya dan barulah sesudah itu kita mulai memajukan sjarat-sjarat baru untuk penghentian tembak-menembak.

Belanda achir-achirnja banjak mundur dan bergembira kalau sebahagian sadja dari perintah penghentian tembak-menembak dapat dijalankan, sebab titik berat dari penjelesaian politik terletak dalam Konperensi Medja Bundar (K.M.B.).

Saudara-saudara!

Tingkat kedua dari penjelesaian, penghentian tembak-menembak akan berdjalan (atau sudah berdjalan) dan kita akan menghadapi dan mempertaruhkan nasib kita kepada pemimpin-pemimpin kita jang pergi menghadiri K.M.B. sebagai babak ketiga dari lakon jang bermain di Indonesia. Apakah pemimpin-pemimpin kita dalam K.M.B. akan sanggup memainkan anak tjaturnja, beberapa bulan lagi, akan terbukti dengan hasil jang dibawa mereka dari K.M.B.

Tetapi buat kita, terlepas dari berhasil atau tidak berhasilnja KMB itu, adalah persatuan dan kesatuan kita keluar dan kedalam untuk menghadapi Belanda.

Walaupun ada pertentangan paham dan ideologi dari golongan-golongan jang ada ditanah air kita jang mengakibatkan bermacam-macam suara menghadapi persetudjuan Rum—Royen djanganlah sekali-kali kita lupakan, untuk djangan timbul perpetjahan dan mendjaga kekuatan militer kita, kita mesti berdiri dibelakang pemerintah Pusat, sebagai pengemudi negara jang tertinggi, kalau kita tidak atau kurang mentaati Pemerintah Pusat, siapa lagi jang mesti ditaati dan siapa jang mesti kita turuti lagi.

Saudara-saudara !

Pada saat persetudjuan Rum-Royen diumumkan, banjak hati jang luka dan wadjah muka jang duka, dan pada waktu perintah menghentikan tembak-menembak dikeluarkan, banjak air mata jang bertjutjuran lebih-lebih dari Pemimpin-pemimpin jang betul-betul mengikuti djalannya Revolusi di Indonesia dan sebagian dari Angkatan Perang dan Rakjat Berdjuaug, tetapi untuk mendjaga keselamatan negara, kita akan patuh menuruti perintah Pemerintah Pusat.

Memang sulit untuk mengikuti aliran politik dari orang-orang jang tidak mendalami djiwa rakjat jang begitu lama menderita, tetapi lebih sulit mendjalankan perintah berkenaan dengan pelaksanaan penghentian tembak-menembak. Kita akan menjalurkan

perhatian rakyat begitu rupa, sehingga rakyat mengikuti politik Pemerintah. Penerangan akan dirobah tjoraknja sedemikian rupa, sehingga dapat diikuti dan dimengerti oleh rakyat. Untuk ini banjak sekali kita harapkan bantuan pemimpin-pemimpin rakyat yang bergabung dalam Partai-partai dan Perkumpulan-perkumpulan, memanglah betul kalau dipimpin, tetapi hendaklah pemimpin-pemimpin memakai kesempatan untuk mengalirkan perhatian Rakyat kepada djalan yang telah ditentukan oleh garis-garis Revolusi kita.

Saudara-saudara !

Tiap-tiap peperangan dan perdjjuangan diachiri dengan perundingan dan persetudjuan.

Persetudjuan Linggardjati mengetjewakan kita.

Persetudjuan Renville memundurkan kita, istimewa dengan mengeluarkan Tentera kita dari kantong-kantong yang berada di daerah Belanda.

Persetudjuan Rum-Royen dengan berpedoman kepada perundingan dan persetudjuan-persetudjuan yang sudah-sudah, rasanja tjukup memberi kita pelajaran untuk lebih berhati-hati. Jang terang kita menuntut daerah Republik sebelum tanggal 19-12-1948 (daerah Renville) kembali dan tentera kita tidak akan ditarik dari kantong-katong.

Dapatkah kita bertahan? Dapat, asal rakyat dan penduduk Indonesia berdiri dibelakang Pemerintah dan Tentera, dan achirnja didalam perdjjuangan manapun dan dalam waktu apapun dan dalam sedjarah apa djuapun, rakyatlah, sekali lagi rakyat yang akan memberi keputusan jang terachir.

Moga-moga kedudukan kita yang mulai agak kuat lagi, akan dapat dengan segera membawa rakyat Indonesia kepada djalan yang telah ditentukan oleh Ilahi, jaitu kepada djalan kebenaran, keadilan dan kemakmuran dan untuk ini hanja satu sjarat mutlak;

Indonesia Merdeka 100%, berdaulat keluar dan kedalam, dikuasai dan diperintah oleh bangsa Indonesia sendiri.

Achirnja sebagai penutup dengarlah pantun kita :

Pulau pandan djauh ditengah
Dibalik pulau Angsa Dua
Hantjur badan dikandung tanah
Koto Tinggi dikenang djua.

Maka dirajakanlah 17 Agustus 1949 itu dengan sehebat-hebatnja, dan luapan semangat yang meningkat tinggi itu tidak pula melalaikan akan kewaspadaan, karena sudah kesekian kalinja djandji Belanda dalam perundingan dilanggarnja. Pun pelanggaran Belanda atas peraturan-peraturan cease fire djuga kerap kali terdjadi.

Staf Gubernur Militer.

Ada dua hal yang patut kita ingatkan kembali kepada pembatja, sebelumnja kita pindah kepada periode LJC dan PPC. Jaitu pertama susunan staf Gubernur Militer yang mendukung pimpinan selama perang gerilja. Selain dari Gubernur Militer dan wakilnja, maka stafnja terdiri dari:

- a. staf anggota;
- b. staf penasehat;
- c. staf sekretariaat.

Sedangkan tindakan keluar hanya dilakukan oleh Gubernur Militer atau wakilnja, atau atas perintah kedua pembesar tersebut. Dan tindakan keluar yang semata-mata mengenai ketenteraan tetap dipegang oleh Komandan Sub. Territorium Kesatuan Sumatera Barat. Kalau Gubernur Militer hendak memberi perintah, instruksi atau petunjuk kepada tentera haruslah melalui Komandan tersebut.

Adapun tindakan kedalam dilakukan oleh staf sekretariaat atas perintah Gubernur Militer dan untuk ini maka sekretariaat dibagi dalam beberapa bahagian.

Dalam instruksi No. 1 jaitu diawal agresi pada 13 Djanuari 1949, dinjatakan bahwa bahagian-bahagian itu dipimpin oleh;

- a. Saudara Rasjid Manan memimpin bahagian pemerintahan, perkara, personalia.
- b. Saudara Effendi Nur memimpin bagian umum, surat menjurat, menjimpan arsip biasa dan rahasia, menerima tamu-tamu biasa dan lain-lain.
- c. Saudara Nur Suhud memimpin bahagian penjiaran, penerangan dan ordonans.
- d. Saudara Ork. Ganto Suaro memimpin bahagian keuangan dan perbekalan dengan dibantu oleh saudara Alwi dan intendance Divisi.
- e. Saudara Chatib Suleiman memimpin bahagian undang-undang, menjiapkan peraturan-peraturan, menjambut tamu-tamu sebelum datang kepada Gub. Mil.
- f. Saudara Malik Achmad memimpin bahagian perburuhan dan sosial, termasuk pengungsian dan mengurus orang-orang yang masuk Koto Tinggi.
- g. Seorang Opsir yang tidak diumumkan namanja memimpin bahagian militer dan intelligence.

Selain dari itu para anggota staf yang terdiri dari pemimpin-pemimpin rakyat yang dipentjarkan kedudukannja diseluruh Sumatera Barat. Sedangkan Penasehat-penasehat pada umumnja terdiri daripada anggota D.P.D. yang berhubungan rapat dengan Gub. Mil. untuk memberi pertimbangan dan nasehat dalam mengambil

sesuatu tindakan penting. Dan mereka ini setiap waktu dapat diberi satu tugas untuk kepentingan pertahanan.

Para anggota Dewan Pemerintah Prop. Sumatera Tengah dalam bulan Agustus 1949 menurut ketetapan dari Ketua P.D.R.I. didjadian penasehat Komisaris Pemerintah Sumatera Tengah. Akan tetapi oleh karena Komisaris pemerintah tidak langgung mengurus pemerintahan, maka Dewan Pemerintah Sumatera Tengah itu oleh Komisaris Pemerintah diperbantukan kepada Gub. Mil. Sumatera Tengah dalam bulan Nopember 1949, karena Gub. Mil.-lah yang memegang pemerintahan setjara langsung.

Tentera Peladjar.

Suatu tenaga perdjuaan yang penting pula jaitu Tentera Peladjar yang telah disusun djuga sebelum agresi.

Tentera Peladjar ini dibentuk dengan sesuatu dekrit dari Menteri Pertahanan untuk memberi kesempatan bagi para peladjar untuk memberikan kebaktiannya bagi perdjuaan kemerdekaan dalam barisan bersendjata. Diseluruh Indonesia dibentuklah Tentera Peladjar ini dan diurus oleh I.P.P.I. (Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia). Angkatan Muda ini dengan segera terlatih baik, dan langsung menghadapi pertempuran-pertempuran mulai dari agresi pertama sampai kepada agresi kedua.

Maka berdjuaulah Tentera Peladjar di Sumatera Tengah terutama dalam agresi ke-II ini, dibarisan muka, dan dibarisan belakang menjelenggarakan administrasi perdjuaan dan Badan-badan Penerangan.

Untuk penghargaan atas djasa perdjuaan Tentera Peladjar ini, maka ketika Gub. Mil. memerintahkan melebur barisan dalam P.M.T. B.P.N.K. maka T.P. sadja yang dibenarkan terus berdiri.

Dalam instruksinya No. 30 tanggal 11 Djuni 1949, Gub. Mil. menegaskan bahwa menimbang akan kenjataan-kenjataan dalam perdjuaan kemerdekaan semendjak tanggal 17 Agustus 1945, hingga petjah perang Kolonial ke II tanggal 19 Desember 1948, pemuda peladjar memegang peranan penting dalam segala lapangan, baik difront paling depan maupun digaris belakang. Dan untuk mendjaga supaya Pemuda Peladjar tetap pada bentuk dan sifatnya, sebagai pemuda peladjar perlu sekali pemuda peladjar tersendiri di-organisir. Sedangkan IPPI telah mempunyai bahagian Pertahanan dengan Tentera Peladjar yang sudah tersusun sedjak bulan Desember 1945 dan telah memberikan bukti-bukti yang njata bekerja disamping T.N.I.

Makanja Gub. Mil. memutuskan bahwa Tentera Peladjar dibenarkan terus berdiri dan tidak termasuk dalam Instruksi No. 24/GM jaitu Instruksi yang melebur semua barisan-barisan dalam PMT BPNK.

CENTRAL JOINT BOARD.

Perundingan dalam L.J.C. 23-8-49.

Sesudahnja keluar perintah penghentian tembak-menembak pada tanggal 14 Agustus 1949, maka dipusat pemerintah di Djawa, dibentuk suatu badan yang dinamai *Central Joint Board* (Panitia Bersama Pusat) yang diketahui oleh seorang anggota UNCI dan anggota-anggota terdiri dari Wakil Republik dan wakil dari Belanda atau pemerintah Prae-Federaal, sedangkan didaerah-daerah dibentuk LJC atau Local Joint Committee (Panitia Bersama Sesetempat) yang diketahui oleh seorang anggota UNCI dan anggota-anggota terdiri dari delegasi Rep. dan delegasi Belanda. Delegasi Rep. untuk Sumatera Tengah diketuai oleh Mr. St. Mohd. Rasjid. Sidang yang pertama dari LJC diadakan di B. Tinggi pada tanggal 23-8-49. Perundingan yang dilakukan dengan Belanda itu boleh dikatakan tidak ada yang memuaskan disebabkan bertentangan pendirian dari kedua belah pihak, sehingga kebanyakan soal-soal yang dibicarakan juga tidak mendapat persesuaian dan terpaksa diserahkan kepada CJB yang juga tidak dapat mengambil keputusan yang menjenangkan.

Kemudian Mr. St. M. Rasjid dipanggil ke Djakarta untuk menjadi anggota delegasi Indonesia dalam Central Joint Board, dan terus menjadi anggota delegasi Indonesia ke Konferensi Medja Bundar di Den Haag.

Mr. Nasroen djadi Gub. Mil.

Kedudukan beliau sebagai Gubernur Militer digantikan oleh Mr. M. Nasroen yang sebelum ini menjadi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Tengah. Setelah Mr. Rasjid berangkat ke Djakarta, dan sebelumnya Mr. Nasroen tiba diibu tempat Koto Tinggi, maka Gubernur Militer diwakili oleh Residen Hamdani. Dalam bulan Oktober 1949 Gubernur Militer Nasroen mulai memegang pimpinan, dan pada 9 Nopember 1949 tibalah masanja untuk mengeluarkan Instruksi Gubernur Militer No. 10 untuk membentuk kabupaten-kecamatan berotonomi di Sumatera Tengah beserta Dewan Perwakilannya, halmana dijelaskan dalam buku ini dipasal „Demokrasi“.

Pemerintah R.I. ke Padang, 12 Nopember 1949.

Kemudian dalam suatu rapat istimewa yang diadakan di Padang antara Kolonel Van Erp beserta delegasi Belanda dengan Gubernur Militer M. Nasroen pada tanggal 12 Nopember 1949, pihak kita mengusulkan supaya sebelum tentera Belanda ditarik mundur dari daerah Rep. terlebih dahulu, wakil-wakil kita dapat masuk ke-

daerah-daerah itu, yang achirnja dapat diterima oleh pihak Belanda, udjudnja ialah supaya djangan ada vacuum dalam Pemerintahan.

Dalam laporannja dimuka DPRST pada tanggal 3 April 1950, Gubernur Nasroen mendjelaskan peristiwa sbb:

PERIODE P.P.C. (PENGHUBUNG PEMERINTAH SIPIL).

Berdasarkan keputusan yang diperoleh antara pihak kita dan Belanda yang disebutkan tadi, maka dikota-kota besar diseluruh Sumatera Barat ditundjuk pegawai-pegawai pamong-pradja dengan tugas nanti akan mengambil oper Pemerintahan dari pihak Belanda, apabila tentera Belanda ditarik mundur bersama-sama dengan penarikan tentera Belanda ini, maka djuga pemerintahnja meninggal-kan daerah kita.

Supply buat sipil, 25 Nopember 1949.

Boleh djuga diterangkan disini, bahwa berlainan dengan keadaan diseluruh Indonesia, waktu penarikan tentara Belanda, seluruh anggota kepolisian Belanda ditarik mundur dari daerah kita.

Pada tanggal 21 Nopember 1949 diadakan perundingan antara Gubernur Militer dan Residen van Straten di Padang membitjarkan soal keuangan. Seperti diketahui ketenteraan kita mulai dari bulan Nopember 1949 telah mendapat supply dari Pemerintah Pusat, akan tetapi Pemerintah Sipil dengan pegawainja yang sekian banyak tidak mendapat bantuan apa-apa dan kelihatannja Pemerintah pusat tidak sanggup memberi supply itu oleh kerena pusat tidak ada wang.

Dari sebab itu dalam pembitjaraan dengan Residen di Padang itu kita mengemukakan supaya fonds yang telah diperolehnja selama ini untuk seluruh Sumatera Barat, dapat diserahkan kepada Pemerintah R.I. Dalam principe Residen Padang setuju dengan usul itu dan bersedia djuga memberikan uang itu, asal ada instruksi dari pemerintah pusat atau C.J.B. Berhubung dengan ini Gubernur Militer, pergi ke Jogjakarta dan di Jogjakarta membitjarkan soal ini dan dapat pula disetudjui oleh C.J.B., sehingga bukan sadja untuk Sumatera Barat akan tetapi djuga untuk Daerah-daerah lainnja tjara memberi supply diturut oleh C.J.B. (regionale supply). Maka dengan kawat pada tanggal 28 Nopember 1949 Residen Van Straten mendapat perintah untuk merundingkan hal ini dengan kita, dan pada tanggal 9 Desember 1949 barulah Pemerintah sipil mendapat uang sebanyak f 700.000.

Penarikan tentera Belanda dengan pemerintah sipilnja selesai pada tanggal 20 Desember 1949.

Periode penjeraan kedaulatan sampai pengoperan Padang ke R.I.

Pada tanggal 25 Desember 1949 diterima kawat dari Wakil ketua P.P.N. Anak Agung Gde Agung jang mewadjabkan Gubernur Militer Sumatera Tengah mengambil kekuasaan dari Residen H.T.B. Padang pada tanggal 27 Desember 1949, pada hari mana penjeraan itu dilakukan dikedung Raad van Justitie Padang, dan semendjak itu Gubernur Militer Sumatera Tengah disamping pekerdjaannja djuga mendjadi Kepala Pemerintah R.I.S. Padang dan sekitarnja. Sehari sesudah penjeraan kedaulatan kepada Pemerintah R.I.S. Padang, maka melihat suasana dan keadaan pemerintahan, Gubernur mengambil tindakan mengganti kepala-kepala djawatan bangsa Belanda dengan orang Republikein, diantaranya Officier van Justitie, ketua pengadilan Negeri, kepala Polisi, Kepala Djawatan Sosial, P.P.K., semuanya didjadikan penesehat dan diganti dengan republikein jang diperbantukan oleh Gubernur Sumatera Tengah kepada Kepala Pemerintah R.I.S. Padang.

Demikian djuga halnja dengan Asistent Resident, Wedana Padang, Wali Kota Padang, dan beberapa pegawai jang lain. Ada sedjumlah 25 orang pegawai R.I. jang diperbantukan kepada Kepala Pemerintahan R.I.S. untuk menggantikan pegawai-pegawai Belanda atau pegawai federal jang tidak lagi mendapat kepertjajaan dari rakjat.

Padang djadi daerah R.I., Maret 1950.

Dengan ketetapan Presiden R.I.S. tanggal 8 *Maret 1950 daerah* Padang dan sekitarnja dimasukkan kedaerah R.I. c.q. Propinsi Sumatera Tengah.

Dalam penggabungan djawatan-djawatan ini, Gubernur Sumatera Tengah mempunjai tiga kekuasaan, pertama sebagai Kepala Propinsi, kedua sebagai mendjalankan bewind dari Pemerintah Pusat R.I. dan ketiga sebagai mendjalankan medebewind dari Pemerintah Pusat RIS.

Pada tanggal 21 Maret di Padang diadakan rapat dari Kepala-kepala Djawatan R.I. Sumatera Tengah dan dari djawatan-djawatan central bersama dengan seluruh kepala djawatan-djawatan jang ada didaerah Padang selama ini, dimana ditetapkan bahwa mereka harus selesai dengan penghubungan djawatan-djawatan jang ada di Padang selama ini dengan djawatan-djawatan Sumatera Tengah paling lambat pada tanggal 1 April 1950, dan pada saat ini setjara formeel segala djawatan jang semestinja diserahkan, harus diserahkan sungguhpun dalam penjelesaian administrasi masih ada jang belum selesai semuanya.

Pemerintahan disekitar Padang diserahkan kepada Bupati Padang, Pariaman.

Untuk memberi gambaran jang sebenarnja tentang keadaan pemerintahan perlu dikemukakan disini apa-apa jang telah dikerdjakan oleh Pemerintah dalam keadaan jang sangat sulit dan apa pula kesukaran-kesukaran jang dihadapi selama ini. Pada saat kedaulatan berada ditangan kita, keadaan pemerintahan pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

Usaha-usaha Pemerintah Sumatera Tengah.

Setjara formeel pemerintahan di Sumatera Tengah seperti telah diterangkan tadi adalah bersifat militer, karena kita ada mempunyai Gubernur Militer, Bupati Militer, Wedana Militer, dan sebagainya. Tetapi setjara kenjataan tidaklah ada militer jang positif pada pemerintahan sipil. Sungguhpun demikian dalam keadaan serba sulit antara lain jang telah dikerdjakan adalah;

1. Mendudukan soal kepegawaian, jang banjak menghendaki tenaga fikiran dan kebidjaksanaan.
2. Memindahkan kantor Gubernur Militer dari Suliki ke Bukit tinggi. Pun disini kesulitan banjak, berhubungan dengan perumahan pegawai, ongkos-ongkos mengumpulkan pegawai-pegawai jang tinggal terpentjar-pentjar diseluruh tempat, menghilangkan perselisihan faham antara pegawai jang ber-evacuatie dan pegawai-pegawai jang tinggal dalam daerah pendudukan.
3. Beleid Pemerintah ditudjukan pada menghilangkan sifat militer bestuur dan mentjiptakan demokratisch bestuur.
4. Pada tanggal 6 Pebruari 1950 Dewan Pemerintah Sumatera Tengah mulai bersidang kembali.
5. Kabupaten-kabupaten otonomi dibentuklah diseluruh Sumatera Tengah.
6. Seluruh dinas diorganiseer kembali dengan berpedoman pada Undang-undang No. 22.
7. Selain dari menghadapi normalisatie dan consolidatie kedalam, fikiran dan tenagapun dihadapkan pula pada menjambut saat kepergian Belanda, hingga djangan ada terdapat vacuum dalam pemerintahan.
8. Pun djuga dihadapi liquidatie dari instituu-instituut dalam zaman darurat, jang tak pula sedikit mengandung kesulitan, seperti *Pema*, *P.M.T.*, *B.P.N.K.* *T.P.*, dan lain-lain.
9. Selandjutnja, seperti jang dikatakan, dengan mematuhi perintah dari Pemerintah Pusat, terpaksa pula Gubernur Sumatera Tengah menghadapi soal Padang dan sekitarnya, jang djuga

banjak menghendaki waktu, tenaga dan fikiran. Tetapi semuanya ini rupanya tidaklah pertjuma, sebab sekarang telah ternyata daerah Padang dan sekitarnya telah dimasukkan kedaerah R.I. khususnja kedalam Propinsi Sumatera Tengah.

10. Kepegawaian pun disusun, berdasarkan desentralisasi dan berdasarkan formatie.
11. Me-inpassen pegawai dalam kedudukan dan gadji pun banjak menghendaki waktu dan penjelidikan, tetapi telah dikerdjakan dan berdjalan baik dan tjepat.

Pedoman Pemerintah.

Pada garis besarnya dan umumnya, jang dijadikan pedoman oleh Pemerintah tentulah politik program kabinet jang ada sekarang, jaitu;

1. Meneruskan perdjuaan untuk negara kesatuan.
2. Melaksanakan Undang-undang No. 22 dan Undang-undang Dasar fasal 33.
3. Mendemokratiseer Pemerintah; mengadakan pemilihan Umum dan memperbaharui D.P.R.
4. Pemulihan tenaga-tenaga perdjuaan jang dimobiliseer kedalam masjarakat.
5. Pemangunan budi dan djiwa keagamaan.
6. Pendidikan masjarakat.

Selain dari itu, maka tindakan jang akan diambil oleh Pemerintah di Propinsi adalah ditentukan oleh keadaan jang njata dari Propinsi dan keinginan jang njata dari rakjat dalam Propinsi.

Realisatie dari tudjuan Pemerintah ini adalah ditentukan oleh kesanggupan Pemerintah jang pada saat sekarang ini telah kita maklumi, jaitu amat terbatas. Terhadap pada pembangunan dan pelaksanaan tjita-tjita kesosialan, belumlah dapat dengan sepenuhnya dihadapi pemerintah. Pemerintah baru bisa menghadapi pembajaran gadji pokok dari pegawai-pegawainja sджа baru.

Berhubung dengan keadaan Pemerintah seperti ini, maka untuk mentjiptakan hasil jang njata dalam lapangan masjarakat dan sesuatu jang kita tjita-tjitakan, ialah **auto activiteit**, tenaga sendiri dari tiap-tiap badan otonom, jaitu propinsi, kabupaten dan wilajah. Auto activiteit otonomie ini tentulah berarti auto activiteit dari rakjat sendiri. Disinilah terletaknja membuktikan sembojan, dari rakjat, untuk rakjat dan oleh rakjat.

Dalam menjempurnakan otonomi dan demokrasi itu, adalah dua sjarat jang harus dipenuhi, jaitu;

- a. politisch — staatrechtelijk — paedagogisch.
- b. Sosiaal — ekonomisch.

Dalam politisch-staatsrechtelijk-paedagogisch ini Pemerintah dan pemimpin-pemimpin rakyat kedua-duanya bertanggung-djawab. Pemerintah dan pemimpin-pemimpin rakyat, pada tempatnya masing-masing harus memberi isi dan mempertinggi mutu dari otonomi dan demokrasi itu.

Selanjutnya otonomi itu dengan tindakan yang sosial ekonomisch harus dibimbing dan dijadikan kuat, diantaranya yaitu dengan jalan cooperative, bergotong-rojong dan lain-lain yang jika tidak terlaksana, maka pasti rakyat dalam soal perekonomian akan menderita oleh sistem ekonomi yang datang dari luar.

Ini adalah soal penting, yang harus lekas dilaksanakan. Memperdalam soal ekonomi dan demokrasi adalah dasar pembinaan dan pembangunan negara kita.

Pembagian kerja dan susunan bertingkat naik harus diperhatikan sedalam-dalamnya.

Trias politica, staatsorganisasi dan disiplin adalah syarat-syarat mutlak bagi suatu negara untuk menjadi kuat dan besar.

Dalam soal yang seberat ini, tentulah Pemerintah harus dibantu oleh seluruh lapisan rakyat dan partai-partai dan pemimpin-pemimpin rakyat, tak mungkin diserahkan pada Pemerintah saja.

Berhubung dengan ini, Dewan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah telah menyetujui mengadakan suatu Planning Board, yang akan terdiri dari pegawai-pegawai Pemerintah, para ahli dan pemimpin-pemimpin rakyat. Planning Board ini susunannya akan berubah-ubah menurut hal dan pasal yang akan menjadi perhatiannya.

Mudah-mudahan dengan melalui Planning Board ini tenaga dan usaha Pemerintah beserta masyarakat dan rakyat dapat dipadu satu dan dilaksanakan.

Berkenaan dengan jawatan-jawatan disini dapat diterangkan, bahwa dipropinsi Sumatera Tengah ini ada jawatan-jawatan yang telah diserahkan kepada propinsi yang dinamakan Jawatan propinsi. Disamping itu kita ada mempunyai jawatan-jawatan sentral, yang dapat pula dibagi dalam dua bahagian, yaitu diurus langsung oleh Pemerintah Pusat Djokjakarta dan yang diurus langsung oleh pemerintah Pusat R.I.S., yang dinamakan jawatan R.I.S. Pertanggung-jawab dari jawatan-jawatan pusat ini dilakukan oleh kepala jawatan kepada kementerian-kementerian yang bersangkutan dan nanti menteri ini memberikan tanggung-jawabnya pula kepada parlemen.

Kita sebagai Gubernur dalam hal ini, ja'ni jang mengenai djawatan centraal mendjalankan medebewind dari R.I. dan dari R.I.S. Akan tetapi sungguhpun pertanggungan-djawab dari djawatan-djawatan ini sebenarnja adalah pertanggungan-djawab menteri-menteri kepada parlemen, akan tetapi dari beberapa djawatan jang penting dirasa perlu djuga diberi keterangan tentang perdjalan djawatan-djawatan itu kepada sidang jang terhormat, supaja kita sama-sama mengetahui kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran jang kita hadapi sekarang.

Sekianlah kita petik uraian bersedjarah dari Gubernur Nasroen dimuka sidang D.P.R.S.T. itu.

Pemerintah Militer dihapuskan, 1 Djanuari 1950.

Maka terbajanglah diruangan mata kita bagaimana pemerintahan darurat dengan anggota-anggotanja jang selama ini kekurangan makanan, kekurangan pakaian, tetapi tetap bekerdja dengan semangat perdjuaan jang bernjala-njala, dan sekarang demi kemenangan telah membajang, dengan sikap hati-hati, penuh ketjurigan, menurun kekota-kota Bukittinggi dari gunung-gunung Suliki dan Kaman.

Mereka masuk kota bersama tentara dan polisi, dan setiba dikota disambut dengan gembira oleh para republikein didalam kota, dan dengan perasaan kuatir oleh golongan dan orang-orang jang selama ini bekerdja sama dengan Belanda. Tetapi ampunan umum telah di-ikrarkan disaat berachirnja K.M.B. dengan berhasil, dan ditutup mati pintu untuk pembalasan dendam. Bukittinggi kembali mendjadi tempat kedudukan Gubernur, mendjadi ibu kota propinsi Sumatera Tengah.

Maka dengan ketetapan ketua P.D.R.I. dalam bulan Desember 1949 pemerintah Militer Sumatera Tengah dihapuskan, dan dibangun kembali propinsi Sumatera Tengah mulai tanggal 1 Djanuari 1950. Akan tetapi ketetapan tentang ini barulah diterima pada achir bulan Djanuari 1950 dan barulah pada tanggal 1 Pebruari 1950 propinsi Sumatera Tengah berdiri kembali dengan resmi.

Demikian sedjarah Pemerintah dan militer di Sumatera Barat dan Sumatera Tengah jang telah berhasil mendukung perdjuaan gerilja, dan menghantarkan rakjat kegerbang kemenangan dan kemerdekaan.

Usaha-usaha kearah negara Minangkabau.

Dalam menghebatnja pertempuran-pertempuran dalam agresi kedua, maka Belanda disamping mengerahkan ketenteraan jang bersendjata lengkap dimedan pertempuran, djuga melantjarkan serangan dimedan politik, dengan meneruskan usaha „Gunting Malino” jaitu mendirikan negara-negara boneka, jang memang di-

luar Sumatera Barat telah dimulainja semendjak agresi pertama, bahkan sebelum itupun telah didirikan N.I.T diluar Djawa dan Sumatera, jaitu diluar daerah defacto Linggardjati.

Di Sumatera usaha ini dimulai sesudah agresi pertama dengan membentuk N.S.T. dan N.S.S.

Tetapi di Sumatera Tengah oleh karena daerah pendudukannya dalam agresi pertama itu hanya terbatas sekitar kota Padang maka usaha pembentukan negara boneka ini taklah dapat dilakukan dengan intensif.

Walaupun begitu semendjak tahun '46 dikota Padang telah berdiri **Persatuan Umum** jaitu satu perkumpulan jang tudjuannya untuk mengadakan kerdjasama dengan Belanda. Anggota-anggotanja kebanyakan terdiri dari orang-orang jang berada dalam kamp Belanda. Perkumpulan ini diketuai oleh Sidi Nan Putih, dan Secretarisnja Arif Lubis. Pekerjaannya selalu membusuk-busukan Republik Indonesia, dan menerbitkan sebuah surat kabar untuk melantjarkan usaha ini jang mereka beri nama „Suara Umum”.

Sesudah agresi jang pertama dalam tahun '47, Persatuan Umum ini sadja, dengan njata-njata memusuhi Republik, dan para anggota-nja kebanyakan bertugas mendjadi kaki tangan NEFIS jang mengintip-intip orang-orang R.I. jang tinggal dikota Padang.

Dan sesudahnja agresi kedua, dan diadakan konperensi kaum Federal Bandung dalam tahun 1949, maka di Padang berdiri Disba (Daerah Istimewa Sumatera Barat), jaitu sebagai leburan dari persatuan Umum diatas, jang diketuai oleh Dr. Anas, dan secretarisnja S. Alaudin. Tudjuannya ialah untuk mendirikan satu negara boneka sebagai jang telah didirikan di Sumatera Timur (N.S.T.) dan Sumatera Selatan (N.S.S.).

Disamping badan jang bersifat politik ini, didirikan pula sebuah badan terrorist jang bernama **Serikat Kutjing Hitam**, jang diketuai oleh Sidi Sjamsuddin, dan bertudjuan untuk menangkap anggota-anggota tentera Republik Indonesia jang menjelundup ke Padang, dan orang-orang R.I. di Padang. Serikat Kutjing Hitam ini bermarkas di Bandar Buat ditempat kedudukan ketuanja jaitu Asisten Wedana Sidi Sjamsuddin itu, dan anggota-anggotanja kebanyakan terdiri dari anggota-anggota I.D. (Inlichtingen Dienst) dan polisi Belanda. Mereka ini banjak menjiksa dan mengorbankan rakjat.

Dengan berangsur ramainja kembali pos-pos jang diduduki oleh Belanda di Sumatera Barat, maka gerakan DISBA ini dilantjarkan pula dimana-mana kota jang didudukinja, seperti Padang Pandjang dan Bukittinggi. Dikedua tempat ini perhatian istimewa ditumpahkan oleh Belanda, karena beradanja disitu beberapa orang intelek, dan bekas-bekas pegawai Belanda jang tidak memihak R.I.

Umpamanja di Bukittinggi didirikan Balai Permusjawaratan Sementara (BPS) jang mengadakan rapat-rapat seolah-olah

mereka sebuah Dewan Perwakilan Rakjat. BPS ini diketuai oleh Amadin gelar Dt. Berbangso, Wakil Ketuanja Dr. Zahar S.B. dan setia Usaha Hamzah gelar Radjo Alam.

Dan PBS ini terdiri dari lebih kurang 40 orang anggota.

Kemudian gerakan untuk mendirikan Daerah Istimewa Sumatera Barat ini dihebatkan dengan diberi tjorak dan dipusatkan di Padang dengan nama gerakan menudju Negara Minangkabau. Rupanja telah sampai saatnja bagi mereka untuk bertindak tegas menudju satu Negara Bagian jang terlepas dari R.I.

Gerakan Negara Minangkabau ini dipelopori oleh Dt. Perpatih Baringek dan Mr. Harun Al Rasjid jang menjiarkan via Djaw. Penerangan Belanda suara-suara jang mengemukakan dengan setjara halus, bahwa perdjjuangan R.I. dengan kekerasan telah menimbulkan bentjana dan malapetaka bagi rakjat, dan telah tiba masanja untuk mengalihkan perdjjuangan menudju kemerdekaan dengan kerdjasama dengan Belanda.

Dalam suatu siaran jang pandjang lebar pula, Gubernur Militer Sumatera Tengah Mr. St. M. Rasjid membantahk suara berbisa tentang Negara Minangkabau ini, dimana ditegaskan bahwa Revolusi Indonesia adalah berisi penentangan terhadap pendjadjahan dalam tjorak apapun djuga. Dan bahwa dari revolusi ini jang sedang bertahan mati-matian terhadap agresri Belanda, akan lahir suatu negara baru bagi rakjat Indonesia seluruhnja, jang merdeka dan berdaulat, adil dan makmur.

Suara-suara tentang Negara Minangkabau ini dengan segala DISBA dan BPS-nja memuntjak tinggi sebelum persetudjuan Rum-Royen pada 7 Mei 1949; Dan sesudah itu, apalagi setelah Pemerintah R.I. pulih ke Djokja dalam bulan Djuni 1949, suara ini semakin lemah bunjinja, dan setelah cease fire dimaklumkan pada tanggal 4 Agustus 1949, maka mereka mulai memutar haluan mendekati R.I.

Pada tanggal 5 Agustus 1949, Djawatan Penerangan Pemerintah GTBA Agam Bukittinggi, menjiarkan suatu maklumat bersama dari pemerintah Belanda dan pemerintah R.I. dimana ditegaskan antara lain bahwa :

„Hari ini oleh Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah R.I. dikeluarkan perintah penghentian permusuhan, dan ini berarti, bahwa keadaan permusuhan antara R.I. dengan Belanda telah diachiri.

Karena itu mulai sekarang, tiap orang harus menudjukan usahanja untuk membuangkan tiap pikiran permusuhan atau dendam dan mengachiri kechawatiran dan ketjurigaan”.

Keadaan baru terbajang, dimana Republik keluar dari peperangan dengan kemenangan. Maka kaum DISBA — BPS — Negara

Minangkabau, lalu memutar kemudi untuk menjelamatkan diri dan kedudukannya.

Dalam suatu resolusi yang diambil dalam rapatnya pada tanggal 29 Agustus 1949 BPS Bukittinggi memutuskan bahwa telah tiba waktunya untuk menegaskan sikap BPS sebagai berikut :

- a. menukar sifat BPS dijadikan badan politik yang akan ditentukan tujuan, tiorak dan langkahnya dalam satu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- b. didalam mana akan djadi tujuan daerah Sumatera Barat ini tetap sebagai satu bagian Republik Indonesia.
- c. mendjalankan semua usaha sekuat-kuatnya agar Republik Indonesia mempunyai alat-alat yang akan mengerahkannya kesuatu negara hukum yang sedjati.

Resolusi ini ditanda tangani oleh Ketua BPS Amadin Dt. Berbangso, Wakil Ketua Dr. Zahar S.B. dan Setia Usaha Hamzah gelar Radjo Alam.

Demikianlah kaum Negara Minangkabau — DISBA — BPS dan kontjo-kontjonja mealihkan langkah mereka dari menudju Negara Minangkabau ke-menjelamatkan diri dan kedudukan mereka dalam RIS via KMB. Dan dengan berhasilnya KMB, maka suara-suara tentang Negara Minangkabau ini hilang lenjap bagai embun ditimpa panas.

Pasal 5.

DI RIAU.

Keresidenan Riau.

Selama pendudukan Djepang, daerah Keresidenan Riau diaturnja menurut tjara jang dipandangnja menguntungkan kepada kedudukannja pada waktu itu. Daerah Riau jang berada didaratan pulau Sumatera digabungkannja mendjadi satu dengan daerah kewedanaan Bangkinang, dan daerah kepulauan Riau lainnja langsung mendjadi urusan administratif militer Djepang di Singapura (Syonan-to). Dari itu, maka ibu tempat keresidenan itu jang dulunja ditetapkan Tandjungpinang, semendjak dari waktu itu dipindahkan ke Pakanbaru.

Karena semua alat perhubungan berada didalam tangan tentera Djepang dan sangat diawasinja segenap berita-berita radio dan sebagainja oleh mereka, maka berita Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak kundjung diketahui oleh rakjat didaerah itu. Barulah pada tanggal 22 Agustus 1945 berita kemerdekaan itu dapat ditangkap oleh beberapa orang pemuda Indonesia jang bekerdja pada P.T.T. di Pakanbaru.

Sebaik berita itu diterima mereka, maka segera djuga mereka umumkan kepada rakjat. Dan dengan dipelopori oleh saudara Basroel Djamal mereka desak orang-orang Indonesia jang ikut mengendalikan pemerintahan pada waktu itu untuk melaksanakan isi proklamasi itu dengan sebaik-baiknja. Tapi karena beratnja tekanan dan pengawasan tentera Djepang, seruan itu tidak memperlihatkan hasil sebagai dikehendaki. Dan karena itu, maka mereka mulai melakukan aksi staking terhadap sep mereka di P.T.T., jaitu pembesar-pembesar Djepang pada waktu itu.

Pada tanggal 15 September 1945 oleh beberapa orang pemuda Indonesia jang bekerdja sebagai pegawai P.T.T. Somubu (keuangan), dengan semangat jang mau memikul segenap resiko, dikibarkanlah Sang Saka Merah Putih digedung P.T.T. tempat mereka itu bekerdja. Tindakan ini mendapat sambutan jang sangat hangat dari rakjat. Dari itu, maka esok harinja pada tanggal 16 September 1945, dilangsungkanlah suatu rapat umum di Pakanbaru jang mendapat kundjungan jang sangat ramai dari rakjat. Dalam pertemuan besar itu, oleh saudara Bustaman (hakim pengadilan negeri) diumumkanlah, bahwa Indonesia sudah dinjatakan merdeka oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus jang

lalu. Kepada rakyat diandjurkan agar tetap berdiri teguh dibelakang pernyataan proklamasi itu. Rakyat menjambut pernyataan itu dengan penuh semangat dan berdjandji akan tunduk dan patuh kepada Pemerintah Republik Indonesia dan akan berdiri teguh dibelakang Presiden Soekarno.

Untuk mendjaga kesedjahteraan dan ketenteraman umum, maka oleh kalangan pemuda dibangunkanlah suatu organisasi kesedjahteraan jang mereka namakan dengan „Pemuda Indonesia” jang nantinja mendjadi Pemuda Republik Indonesia (P.R.I.). Organisasi ini dipimpin oleh saudara-saudara Basroel Djamal, Zalik Aris, Razak Ali, Jahja Zakaria, Jahja Atan, J. U. Siregar, W. Pandjaitan, Ali Rasjid, Toha Hanafi, Hasan Basri, Noerdin Latif, Sjafei Karim, Abdullah S. Roeslan dan Isma Azir.

Radja-radja daerah Riau menjatakan kesetiaannja.

Pada tanggal 28 Nopember 1945, Sultan-sultan jang berada didaerah keresidenan Riau, jang terdiri dari Sultan Siak Sri Indrapura dan Radja Gunung Sailan mengetok kawat kepada Presiden Soekarno, dimana dinjatakan, bahwa sultan-sultan itu „Setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan berdiri teguh dibelakang Soekarno-Hatta”.

Pernyataan setia dari sultan-sultan ini menambah bergeloranja semangat rakyat untuk lebih menumpahkan tenaga untuk mendjung tinggi dan membela kemerdekaan tanah air mereka Indonesia.

Dengan terbentuknja K.N.I. Riau pada achir tahun 1945 itu, maka penjaluran semangat kemerdekaan itu dapat dikerahkan dan diarahkan kepada aliran jang dikehendaki.

Dalam menghadapi segenap matjam pertempuran selandjutnja, P.R.I. memberikan sumbangan jang tidak sedikit. Halangan-halangan jang sengadja diadakan oleh balatentera Djepang untuk membendung semangat pemuda-pemuda itu, tidak dapat membendung gelora semangat mereka. Hal ini ternjata, pada saat oleh mereka dilakukan suatu penyerbuan terhadap „Syonan Hotel” jang oleh tentera Sekutu ditukar namanja dengan „Mounbatten Hotel”. Hotel tersebut didjadikan oleh tentera Sekutu mendjadi markas besar mereka, dimana djuga mereka mengibarkan bendera Belanda. Karena adanja pengibaran bendera sitiga warna itu, maka hotel tersebut terpaksa mereka gempur dan duduki. Bendera sitiga warna itu achirnja mereka potong tjorak birunja dan kembali mereka naikkan mendjadi bendera R.I.

Achirnja P.R.I. ini pulalah jang sudah berdjasa membentuk B.K.R. jang nantinja mendjadi T.K.R. dan achirnja mendjadi T.R.I. itu.

Indragiri djuga „bergolak”.

„Pengibaran bendera Sang Saka diberbagai tempat di Indragiri berlangsung lebih tjepat dari pada di Pakanbaru. Tanggal 25 Agustus 1945 di Tembilahan sudah dikibarkan bendera kebangsaan itu jang kemudian segera djuga diikuti oleh tempat-tempat lain sekelilingnja.

Penjusunan alat-alat pemerintahan selandjutnja berdjalan dengan pesat dan lantjar dipimpin oleh pemuda-pemudanja jang berdjawa satria. Tenaga-tenaga pemimpin revolusi didaerah ini terdiri dari bekas peladjar-peladjar sekolah Agama Menengah di Sumatera Barat.

Insiden dalam kamp-kamp tawanan Djepang.

Diachir masa kekuasaannja, tentera Djepang mengadakan dua buah kamp tawanan didaerah keresidenan Riau, jaitu kamp-kamp untuk tawanan bangsa Belanda melulu. Kedua kamp itu adalah:

1. Kamp Sitanin ($\pm$ 3 km dari Bangkinang) dimana ditawan kira-kira 8300 bangsa Belanda laki-laki dan perempuan,
2. Kamp „Kilometer 3” dekat Pakanbaru, jang djuga banyak berisi tawanan bangsa Belanda.

Pada hari para tawanan itu dibebaskan oleh tentera Djepang, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah tersebar seluas-luasnja dikalangan rakjat, jaitu teks proklamasi jang didatangkan dari Sumatera Barat.

Pada tanggal 9 September 1945, para tawanan itu dengan dipimpin oleh bekas Residen Belanda di Sumatera Barat, Bosselaar, mengambil putusan hendak mengambil over semua pemerintahan didaerah itu dari tangan tentera Djepang. Beberapa orang pembesarnja jang diberinja kekuasaan penuh sudah mengambil kedudukan dikota Pakanbaru.

Dari itu, usaha rakjat untuk menaikkan bendera Merah Putih besok harinja dihalang-halangi oleh pembesar-pembesar Belanda itu. Maka timbullah insiden pertama antara para pemimpin bangsa Indonesia dengan bekas-bekas tawanan Djepang tersebut. Insiden pertama ini untunglah tidak sampai menumpahkan darah, karena pembesar-pembesar Belanda itu achirnja mengalah.

Sang Saka Merah Putih dikibarkan untuk menyatakan kepada bangsa Belanda bahwa kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia mendapat dukungan sepenuhnya dari rakjat.

Pada tanggal 12-9-1945 dikirimlah sebuah delegasi ke Kamp Belanda untuk menemui pimpinan tentera Sekutu (Majoor Lankly).

Delegasi itu terdiri dari:

1. H. Muhd. Amin
2. Dt. Madjolelo

Berdasarkan tugas tentera Sekutu di Indonesia untuk mengembalikan tawanan perang dan menjamin keamanan umum, delegasi mendesak supaya Majoor Lankly sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap tentera Sekutu, hendaklah mengembalikan orang-orang Belanda ke Kamp mereka, karena keamanan jiwa mereka tidak bisa dijamin, kalau mereka masih berkeliaran diluar dengan menghalang-halangi tindakan-tindakan dan usaha-usaha Kemerdekaan bangsa Indonesia.

Desakan ini diterima oleh Majoor Lankly.

Pemerintah Keresidenan Riau.

Sesudah dilangsungkan rapat Umum di Pakan Baru, rakyat menjatakan kesetiaannya kepada Negara dan berdiri dibelakang Pemerintah yang sah. Kemudian atas inisiatief suatu panitia yang dipelopori dan diketuai oleh sdr. Raden Sumpeno dari Djawatan Pelajaran, diadakanlah sebuah rapat dengan seluruh pemimpin-pemimpin rakyat guna membentuk K.N.I. daerah Riau dan membitjarakan kedudukan Residen Aminuddin yang diangkat oleh Gubernur Sumatera sebagai Residen Riau.

Dalam rapat tersebut dipilihlah sdr. Raden Jusuf Suriaatmadja sebagai Ketua K.N.I. daerah, dan kepada beliau diserahkan memilih kawan-kawannya yang akan ditetapkan sebagai Dewan Harian dan anggota K.N.I.

Sesudah sdr. Jusuf menunjukkan nama-nama yang akan duduk dalam K.N.I. disusunlah oleh rapat bentukan K.N.I. Daerah Riau sebagai berikut:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : R.J. Suriaatmadja |
| 2. Wk. Ketua I | : Agus Ramadhan |
| 3. Wk. Ketua II | : Raden Selamat |
| 4. Secretaris I | : Amat Suka |
| 5. Secretaris II | : Amir Hamzah |
| 6. Bendahari | : Akasah |
| 7. Anggota | : 1. Dt. Mangku
2. Arifin Lubis
3. Dll. |

Kemudian oleh K.N.I. yang sudah tersusun lengkap itu dipilihlah sdr. A. Malik Kepala Pabeau Riau, menjadi Residen untuk menggantikan sdr. Aminuddin yang tiada dapat mempergunakan ketetapanannya sebagai Residen untuk melandjutkan perjuangan kemerdekaan

an disa'at itu. Keputusan dari K.N.I. daerah ini kemudian mendapat persetujuan dari Gubernur Sumatera, maka A. Malik ditetapkanlah menjadi Residen Riau.

Sesudah berlangsung pelantikan sdr. A. Malik sebagai Residen Riau beliau terus menjalankan Pemerintahan dengan dibantu oleh K.N.I. daerah dengan meneruskan memakai aparat-aparat Pemerintah jang lama dengan tingkatan hierarchis sebagai berikut:

- a. Keresidenan
- b. Kabupaten (masih memakai nama Djepang Bunsyu)
- c. Kewedanaan
- d. Onderdistrict
- e. Kenegerian, kepulauan dan lain-lain sebagai Pemerintahan jang terendah.

Sedang pembagian administrasi masih tetap sebagai dizaman Djepang sampai datang perubahan-perubahan dari Pemerintah Pusat (Sumatera). Dalam pada itu di Gun-gun dan Negeri-negeri (kepenghuluhan diseluruh daerah Residensi sudah terbentuk K.N.I. tjabang dan ranting, jang membantu menjelenggarakan Pemerintah untuk daerah masing-masing.

Daerah-daerah perairan jang berada dibawah Pemerintahan Keresidenan Riau, amatlah berbahaya sekali karena umumnja laut dikuasai oleh tentera Belanda. Oleh karena itu maka untuk menghubungkan daerah-daerah diperairan terutama Bagan Siapi-API amat sukar.

Walaupun demikian, sebagai Pemerintah jang bertanggungjawab dengan Pemerintahannya, harus djuga mendatanginja untuk menstabiliseer Pemerintah dan mengkoordineer perdjuaan rakjat; apa lagi telah terdjadi peristiwa Bagan antara bangsa Tionghoa dengan bangsa Indonesia. Oleh karena itu Residen Malik berangkat ke Bagan Siapi-API walaupun telah dinasihatkan oleh Comd. Regimen H. Basri, bahwa djalan laut berbahaya dan haruslah melalui djalan darat via Pasirpangarajan. Nasehat jang berharga itu kurang diindahkan oleh Residen Malik sebab ingin supaya lekas sampai di Bagan Siapi-API.

Residen Malik bersama dengan rombongan memutuskan melalui djalan laut. Residen beserta rombongan ditangkap oleh Marine Belanda, terus dibawa ke Medan.

Tidak berapa bulan Residen Malik ditahan Belanda achirnja dia dibebaskan dan pulang kembali ke Pakanbaru. Sebab jang tersebut demikian menimbulkan ketjurigaan rakjat jang membawa kepada suatu resolusi agar dia diperhentikan dari djabatannya sebagai Residen.

Sebelum ini di Keresidenan Riau diperbantukan tiga orang Bupati. jaitu:

1. Dt. Wan Abd. Rahman
2. B.A. Muchtar
3. Tengku Hanafiah.

Ketika Residen A. Malik ditahan Belanda dan kedudukannya sebagai Residen tidak lagi diterima oleh rakyat Riau, maka oleh Pemerintah Propinsi Sumatera ditundjuklah Bupati T. Hanafiah untuk mewakili pekerjaan Residen sampai akhir tahun 1947.

Pada permulaan tahun 1948, Pemerintah Propinsi Sumatera menetapkan R.M. Utojo untuk mendjabat Residen daerah Riau. Djabatan ini dipegangnja sampai kepada penjerahan Kedaulatan.

Dalam pada itu di Inderagiri dalam perputaran djentra revolusi, berbagai badan perdjuaan tumbuh, bangun, bubar, bertukar sampai kesaat tertjptanja perdjandjian Linggardjati jang diachiri Belanda dengan penjerangan kolonial pertama tgl. 21 Djuli 1947.

Blokade jang dilakukan Belanda dalam agresi pertama hanja menambah memuntjak perdjuaan. Pertempuran-pertempuran berkobar diperairan, dikuala-kuala, disetiap liku dan tandjung muara sungai.

Putusnja perhubungan barang makan antara Malaya-Indragiri (keresidenan Riau umumnja) menjebabkan timbulnja aksi-aksi penembusan blokade terhadap Belanda. Mulai dari saat itu berlakulah perdjuaan „blokade lawan aksi penembusan blokade”. Dalam pertarungan ini tidak dilupakan djasa keperwiraan para saudagar-saudagar (penembus blokade) jang telah memberikan pengorbanan mereka untuk perdjuaan negara. Dengan penuh hormat segenap peradjurit mengingat djasa mereka.

Dalam keadaan demikian, Pemerintah Kabupaten Inderagiri tetap berdjalan dengan baik, mengatasi kesulitan-kesulitan perdjuaan. Kekurangan bahan makanan selandjutnja mendapat bantuan dari Sumatera Barat. Ketika keluar undang-undang Pemerintah No. 22 tahun 1948 untuk didjalankan di Sumatera Tengah, tanggal 22 Nopember 1948 (sebelum agresi ke-2) Inderagiri dibentuk menjadi Kabupaten Otonoom. Penglaksanaan mulai dilakukan disaat suasana genting semakin memuntjak jang achirnja disusul oleh agresi Belanda ke-2.

Pemerintah dizaman darurat.

Pada tanggal 29-12-1948 tentera Belanda menduduki Pakanbaru, dan pada waktu itu Residen Utojo menjingkir dari Kota bersama dengan rombongannya jang terdiri dari:

1. Residen Utojo sendiri,
2. Bupati Djalaluddin,
3. Bupati Dt. Wan Abd. Rahman,
4. Abu Samad, dan
5. A.F. Sungkar.

Rombongan terus menudju Teratak Buluh dan terus ke Langgam. Anggota-anggota Executief Daerah jang lain dengan para pemimpin jang lain-lain tinggal di Kota, karena tiada dapat menjingkir lagi. Di Langgam rombongan Residen dibagi dua:

Rombongan pertama terdiri dari: Residen Utojo, Bupati Djalaluddin, Abu Samad dan A.F. Sungkar, dan beberapa pemimpin lain jang sudah berada disana, meneruskan perdjalanannya menudju Rokan; dan satu rombongan lagi terdiri dari Bupati Dt. Wan Abd. Rahman bersama pembantunya terus ke Siak dan beliau langsung ditetapkan mendjadi Bupati Militer di Siak.

Untuk menghadapi Pemerintahan dan perdjuaan seluruh daerah Keresidenan Riau, disusunlah Pemerintahan militer jang dipimpin oleh Residen Utojo sebagai Gubernur Militer Keresidenan Riau, kemudian wakil Gubernur Militer Sumatera Tengah/Ketua Dewan Pertahanan Daerah Riau dan berkedudukan di Rokan.

Daerah Keresidenan Riau dibagi kepada dua daerah Militer:

1. Daerah Riau Utara diwakili oleh Major Akil dengan berpusat di Rokan.
2. Daerah Riau Selatan diwakili oleh Let. Kol. Hasan Basri berpusat di Kuntu.

Pemerintahan dibagi kepada 4 daerah Kabupaten Militer:

1. Riau Utara dikepalai oleh sdr. Bupati Militer Djalaluddin berkedudukan di Rokan.
2. Riau Selatan dikepalai oleh sdr. Bupati Militer Dt. Wan Abd. Rahman berkedudukan di Siak.
3. Bengkalis dikepalai oleh sdr. Bupati Militer H. Mahmud Muhammad berkedudukan di Domai (beliau diangkat oleh rakjat karena Bupati jang lama tinggal di Kota).
4. Inderagiri dikepalai oleh sdr. Bupati Militer Umar Usman berkedudukan di Lubuk Ambatjang (beliau diangkat oleh rakjat mendjadi Bupati Militer karena Bupati jang lama meninggal dibunuh Belanda).

Ketjamatan-ketjamatan jang lama sudah ditjiptakan mendjadi wilayah jang mempunyai Dewan Perwakilan Rakjat (dengan peraturan desentralisasi Kompempus) — (Komissariat Pemerintah

Pusat No. 81 Kom/U/tanggal 30 Nopember 1948) diteruskan dengan tidak merobah statusnja, hanja dengan mendjadikan Tjamat mendjadi Tjamat Militer merangkap mendjadi Komandan Pangkalan Pertempuran dan dibawahnja diangkat Kepala-kepala Desa jang jang dimiliteriseer.

Keadaan ini berlaku sampai adanja perintah menghentikan tembak-menembak (cease fire order). Sesudahnja berlaku cease fire order, Residen Utojo dipindahkan ke Koto Tinggi tempat kedudukan Gubernur Militer Sumatera Tengah, dan tidak kembali lagi ke Pakanbaru.

Dari itu maka ketika pemulihan Kota ketangan Republik maka timbang terima hanja dilakukan oleh Bupati masing-masing dan Residen Utojo diwakili Major Akil, sedang Ketua Dewan Pertahanan Daerah dipegang oleh Bupati Dt. Wan Abd. Rahman.

Guna melakukan timbang-terima dengan pihak Belanda, maka pihak Republik sudah lebih dulu mengadakan badan penghubung jang dinamakan Liaison Office dipegang oleh tentera terdiri dari saudara-saudara:

1. B. Nainggolan.
2. A. F. Langkai.

Ketika dilakukan timbang terima Kota, maka pihak Republik diwakili oleh:

1. Bupati Militer Djalaluddin untuk Bangkinang dan Renga.
2. Bupati Militer Dt. Wan Abd. Rahman untuk Pakanbaru.
3. Bupati Militer H. Mahmud untuk Bengkalis.

Sesudah Pemulihan Kota maka Kabupaten jang sekarang (Bengkalis, Indragiri dan Kampar) jang terbentuk pada tahun 1948 menurut peraturan Kompempus No. 81 berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 1948, bersama dengan Wilajah-wilajah jang sudah terbentuk pada tanggal 1 Januari 1949, terus di actiefkan.

Indragiri dalam clash ke-II.

Petjah clash ke-2, tentera Belanda melantjarkan penjerangan kedaerah ini dengan kekuatan jang tidak ketjil. Kota Tembilahan diserang dari udara dan laut. Tanggal 5 Djanuari 1949 kota Rengat (ibu negeri Kabupaten Inderagiri) diserang oleh 24 buah kapal terbang dengan 350 tentara pajung beserta 7 buah kapal-kapal perang perairan. Banjak rakjat dan pegawai Pemerintah jang tiwas oleh penjerangan tersebut. Diantaranja Kepala Daerah sendiri Patih Toeloes ajah dari alm. pudjangga muda Chairil Anwar serta Kepala polisi daerah jang mengadakan perlawanan sampai kesaat mereka gugur sebagai pahlawan.

Penjerangan ini kemudiannya disusul dengan pembunuhan-pembunuhan kedjam serta berbagai-bagai matjam penganiajaan pehak musuh jang telah menimbulkan korban beribu orang penduduk jang tidak bersalah. Untuk memperingati korban pembunuhan 5 Djanuari '49 ini, didirikan Tugu peringatan di Rengat.

Dalam clash ke-2 seperti disebutkan tadi, Pemerintah darurat dikendalikan oleh saudara Umar Usman jang sebelum agresi ke-2 mendjadi wakil Ketua D.P.R. Kresidenan Riau dan Koordinator perdjuaan untuk kepulauan Riau dengan saudara-saudara Umar Amin Husin (penasehat Pemerintah darurat), Amir Hamzah dan H. A. Rauf. Pemerintah Militer Inderagiri Hilir dipegang oleh Jamal Lako Sutan.

Dipertengahan bulan Pebruari 1949 bergeraklah seluruh Pemerintahan guerilja dari 12 buah Pangkalan-pangkalan dibawah kendali masing-masing Staf K.P.F. (Komandan-komandan Pangkalan guerilja) di seluruh Indragiri. 75% hutan jang meliputi daerah Inderagiri mendjadi benteng pertahanan peradjurit-peradjurit guerilja. Dari tempat-tempat itu pertempuran melantjar ke kota-kota hangus jang diduduki Belanda.

Dalam pertempuran-pertempuran selama tersebut tidak dilupakan nama-nama seperti saudara-saudara alm. Let. I Bojak alias Singa Perairan Inderagiri, Let. I H. Mohd. Amin alias Harimau Logas Riau Selatan, Let. II Ahmad Jusuf, Sersan Major Lego dan Let. Muda Wijono. Mereka adalah pemimpin-pemimpin pertempuran jang senantiasa memukul kekuatan-kekuatan Belanda.

Achirnja tanggal 19 Desember 1949 diadakan timbang terima kembali daerah Kabupaten Inderagiri antara pihak Belanda dengan Pemerintahan guerilja Inderagiri. Pihak Belanda diwakili oleh Kapten Knil Eddy King dengan stafnja, sedang dari pihak Pemerintahan Inderagiri hadir Kapten A.F. Langkay.

Wakil K.D.M. Pemerintah Militer Inderagiri Hulu Kampar Seatan, Umar Usman dan Bupati Militer Djalaluddin.

Perkembangan Dewan Perwakilan Rakjat di Riau.

Pada tanggal 16 September 1945 di Keresidenan Riau telah dibentuk K.N.I. dan pembagian tugas pekerdjaan para anggota menurut bakat dan ketjakaan masing-masing.

Dan semendjak itulah dibentuk K.N.I. Kewedanaan, Ketjamatan dan Negeri-negeri dengan setjara permufakatan diantara pemimpin-pemimpin.

Tjara jang demikian dirasakan kurang demokratis, apa lagi K.N.I. itu kebanjakannya melaksanakan djalannya Pemerintah lebih-lebih

dengan keluarnya Undang-undang No. 1-1945 yang menegaskan bahwa K.N.I. itu, haruslah menjadi Badan Perwakilan Daerah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah, menjalankan pekerjaan dan mengatur Rumah Tangga Daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi dari padanya. Seterusnya dinyatakan bahwa oleh K.N.I. Daerah dipilih beberapa orang, sebanyak-banyaknya 5 orang, sebagai badan executive yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah, menjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam Pemerintahan itu. Karena itu pada bulan Januari 1946 diadakanlah rapat anggota K.N.I. yang telah terbentuk pada bulan September yang lalu yang mengambil tempat di Pekanbaru. Diantara putusan yang diambil ialah: membubarkan K.N.I. yang lama dan membentuk K.N.I. daerah yang baru dengan cara pemilihan yang agak demokratis. Pemilihan ini dilakukan cara bertingkat yaitu tiap-tiap 200 orang penduduk, satu memilih. Pemilih-pemilih ini memilih anggota yang mewakili Kawedanaan.

Dalam rapat yang pertama dari K.N.I. yang agak demokratis ini ditetapkan anggota executive untuk Keresidenan Riau sbb..

1. A. Malik Res. Riau sebagai Ketua Executive dan Ketua Pleno K.N.I.
2. R. Jusuf Suriaatmadja Wk. Ketua Executive merangkap Wk. Ketua Pleno.
3. Agus Ramadhan anggota Executive.
4. Umar Usman anggota Executive.
5. Dt. Mangku anggota Executive.
6. Arifin Lubis anggota Executive.
7. Umar Amin Husin anggota Executive.
8. Jamal Lako Sutan anggota Executive.
9. Raden Selamat anggota Executive.

Pada akhir tahun 1946, K.N.I. ini yang sudah berkali-kali pula mengalami perubahan susunan, bertukar nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dengan menggabungkan antara Ketua Executive dan Ketua Legislatif yang dirangkap oleh Residen, dan tersusunlah Badan Executive sbb.:

1. Ketua. Residen
2. Wk. Ketua. Raden Jusuf Suriaatmadja
3. Anggota-anggota executive:
 1. Umar Usman
 2. Umar Amir Husin
 3. Dt. Mangku
 4. Gulmat Siregar
 5. Raden Selamat,

sedang anggota Pleno, sekalipun orangnja sudah mengalami perubahan tetapi tetap menurut djumlah pembentukan pada permulaan tahun 1946.

Di tiap-tiap Kewedanaan semendjak tersiarnja Proklamasi telah dibentuk K.N.I. Kewedanaan, jang anggotanja terpilih dari tiap-tiap Ketjamatan atau Negeri-negeri. Bersamaan dengan pembaharuan K.N.I. daerah, maka K.N.I. Kewedanaan dibaharui pula dengan peraturan jang sama. Umumnja pekerdjaan K.N.I. Kewedanaan tidak dapat berdjalan dengan lantjar selama D.P.R. Keresidenan Riau belum menentukan status jang njata tentang tugas-tugas jang harus didjalankan D.P.R. Kewedanaan itu. Kewedanaan Bangkinang dengan sebab-sebab untuk melantjarkan perdjuangan dimasukkan ke arah Keresidenan Sumatera Barat pada tanggal 1 Djanuari 1946.

Pembentukan Kabupaten Otonoom.

Hasrat hendak mengurus diri sendiri jang disebut otonomi, mempengaruhi djalan pikiran masjarakat, terutama pemimpin-pemimpin di Keresidenan Riau. Maka pada tanggal 27 Nopember 1948 dibentukulah Kabupaten Indragiri dengan ibu negerinja Rengat, (menurut Undang-undang No. 22 tahun 1948). Pembentukan ini diperbaharui dengan keputusan Gubernur Sumatera Tengah dgn. besluit 15 Pebruari 1950 No. B/G.P.S.T./50.

Untuk itu dibentuk D.P.R.D.S. Kab. Inderagiri jang meliputi Kewedanaan Taluk, Rengat dan Tembilahan, ditambah dengan Wilayah Singingi jang dahulunya masuk Kampar.

Bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Inderagiri dibentuk pula Kabupaten Kampar dengan ibu negerinja Pakanbaru, meliputi Kewedanaan Pakanbaru, Pasirpangeraian dan Bangkinang jang tadinja dimasukkan ke Keresidenan Sumatera Barat.

Djuga dibentuk Kabupaten Bengkalis dengan ibu negerinja Bengkalis, jang meliputi daerah Kewedanaan Bengkulis, Bagan Siapi-API, Selat Pandjang dan Siak. Dengan terbentuknja Kabupaten-kabupaten ini maka Keresidenan Riau dibagi kepada 3 Kabupaten tersebut diatas, jaitu Kepulauan Riau dijadikan satu Kabupaten pula.

Harus diterangkan dengan terbentuknja Kabupaten-Kabupaten ini maka D.P.R.-D.P.R. Kewedanaan dengan sendirinja tidak lagi bergerak dan achirnja dimatikan dengan resmi.

Keadaan Swapradja.

Did daerah kabupaten Kampar terdapat 6 daerah bekas swapradja jaitu: Rambah, Tembusai dan Kepenuhan mendjadi wilayah Rokan-Kanan; Kunto Darussalam dan Rokan mendjadi wilayah Rokan-Kiri; Gunung Sailan masuk wilayah Kampar-Kiri.

Di Kabupaten Bengkalis terdapat sebuah swapradja jaitu: Siak Sri-Indrapura jang kemudian mendjadi Ketjamatan Siak.

Dan didaerah Kabupaten Inderagiri terdapat pula dua buah daerah Swapradja jaitu:

1. Sw:apradja Inderagiri, masuk Ketjamatan Rengat dan Ketjamatan Siberida.
2. Swapradja Singingi masuk Wilajah Singingi.
Kedudukan Kepala-kepala Swapradja itu dizaman Djepang dan permulaan agressi adalah sbb. :
 1. Siak non actief dizaman Djepang, dan permulaan proklamasi mengirimkan kawat setia kepada Presiden Republik Indonesia menyatakan berdiri teguh dibelakang Presiden dan setia kepada Negara Republik Indonesia.
 2. Tembusai mendjadi Ku Tyo ditempat kedudukannja dan setingkat dengan Kepala Daerah Ketjamatan (Tjamat).
 3. Rambah berhenti.
 4. Kunto, dibekukan oleh Djepang karena tak mau kerdja sama.
 5. Rokan, dipendjarakan oleh Djepang dan meninggal dunia dalam tahanan.
 6. Kepenuhan ditahan Djepang dan meninggal dalam tahanan.
 7. Inderagiri non actief.
 8. Singingi mendjadi Ku Tyo.
 9. Gunung Sailan (Kampar Kiri), mendjadi Ku Tyo dan permulaan proklamasi mengirim kawat kepada Presiden seperti Siak.

*
**

Pasal 6.

DIKEPULAUAN RIAU.

I. PEMERINTAHAN

Tahun 1945.

OLEH karena sulitnja perhubungan, maka Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia jang diutjapkan oleh Bung Karno-Hatta atas nama rakjat Indonesia pada tanggal 17-8-1945, amat terlambat dapat diketahui oleh umum didaerah kabupaten Kepulauan Riau.

Tentera Sekutu mendarat di beberapa tempat penting di kepulauan Riau, jaitu di Dabo-Singkep (Kwd. Lingga) dalam bulan September 1945, dengan maksud melutjuti/mengambil orang-orang Djepang untuk dibawa ke Singapura.

Bersama dengan tentera Sekutu, turut djuga membontjeng tentera/Pegawai-pegawai Sipil/Polisi/Pegawai-pegawai Perusahaan-perusahaan Belanda (NICA = Ned. Ind. Civil Administration). Mereka jang disebut belakangan ini tinggal menetap ditempat-tempat dimana mereka datang bersama/membontjeng tentera Sekutu seperti di Tg. Pinang, Kidjang, Tg. Uban, Tg. Balai (Karimun). Dabo-Singkep, P. Sambu, Terempa dan lain-lain, dengan maksud untuk mendjadjah kembali.

Demikianlah di Tg. Pinang, Tg. Balai (Karimun) dan Dabo-Singkep masing-masing ditempatkan seorang „Hoofd van Plaatselijk Bestuur” Belanda disamping tentera/Polisinja.

Residen van Riouw untuk sementara waktu berkedudukan di Singapura. Perlu ditjatat, bahwa dalam rombongan tentera Sekutu jang datang di Dabo-Singkep dalam bulan September 1945 itu, ada ikut serta seorang bangsa Indonesia, kaki tangan Nica, Pekerdjaan Amir (tjamat) dalam masa pemerintah Djepang.

Karena sesuatu hal oleh Pemerintah Djepang dia diperhentikan dari djabatannja dan dimestikan meninggalkan tempat dengan selekas mungkin. Dalam pada itu terberita, bahwa di Singapura pemerintah Djepang telah menjerah kepada Sekutu. Dengan menumpang motorboot kepunjaan orang Tionghoa maka dia segera berangkat ke Singapura (Agustus 1945) dengan maksud akan melapurkan diri kepada Pemerintah/Tentera Serikat Belanda. Pada tanggal 2 Oktober 1945 pegawai Nica tersebut dan sebagai pandu dari kesatuan tentera Sekutu (NICA) sampai di Dabo untuk melutjuti tentera Djepang jang ada disana.

Bersama-sama tentera Djepang, djuga sdr. Muhammad Apan (sekarang patih, acting Bupati/Kepala Daerah Kepulauan Riau) atas tundjukan dari kaki tangan Nica tersebut ditangkap oleh tentera Sekutu dan setibanja di Singapura terus dimasukkan ke Rumah Pendjara Ochteram Road, tuduhan Collaborateur (kerdja bersama Djepang).

Tahun 1946.

Resident van Riouw jang berkedudukan di Singapura pada pertengahan tahun 1946 pindah ke Tg. Pinang.

Pada achir tahun 1946 oleh Belanda ditiap-tiap onderafdeling dibentuk suatu badan penasehat (Advies-raad) dan badan inilah dibelakangan mendjadi kern dari pembentukan „Riouw Raad Sementara”.

Tahun 1947.

Didalam tahun 1947 sesudah „Riouw Raad Sementara” membikin Undang-undang Dasarnja dan Peraturan Pemilihan, maka Riau Raad Sementara dibubarkan dan diganti dengan Dewan Riau (Riouw Raad) jang baru dilantik pada tanggal 4 Agustus 1947 mantan dan Timur Besar. Ketua Riouw-raad tersebut ialah Muchtar Husin (1e klerk) (sekarang ketua D.P.R.D.S. Kabupaten Kep. Riau).

Daerah otonom jang telah terbentuk ini berdasarkan atas Stbld. 1938 No. 529, Stbld. 1946 No. 17, Stbld. 1947 No. 9, 13 dan 125.

Untuk mengerdjakan Tata Usaha keuangan Daerah dipakai „Algemene Beheersregelen Landschapskassen Grote Oost,, (Besl. Alg. Reg. Comm.) untuk Kalimantan dan Timur Besar tanggal 27 September 1951 No. A.R.C. 10/1/27). Hak Veto dari Residen tidak diatur dalam sesuatu Peraturan, akan tetapi dalam artikel Undang-undang Dasar Daerah Riau, isinja mempunjai hak membatalkan atau mengubah Anggaran 2 Keuangan Daerah.

Pengumuman Peraturan Daerah dilaksanakan dalam berita resmi daerah dan Javasche Courant.

Tahun 1948.

Dengan besl. Resident van Riouw tanggal 15 Djuli 1948 No. 201/32 diserahkan didalam kekuasaan Riouw-Raad pendjabat-pendjabat seperti berikut:

1. Pamong pradjja
2. Kesehatan Rakjat (D.V.G.)
3. Pekerdjaan Umum
4. Kehutanan
5. Pengadjaran dan Pendidikan
6. Distributie

7. Djawatan Penerangan
8. Keuangan Daerah

Jang tidak diserahkan dalam pedjabat-pedjabat jang bersifat centraal seperti:

1. P.T.T.
2. Kantor Pendaftaran Tanah
3. Pengadilan Negeri
4. Justitie & Gevangeniswezen
5. Pandhuisdienst
6. Pelajaran
7. Immigrasi
8. Polisi
9. Kantor Pajak.

Dalam tahun 1948 Daerah Kepulauan Riau, Bangka dan Billiton mengadakan Ikatan Federatie jang dengan ringkas disebut **Babiri (Bangka, Billiton dan Riau)**. (Stbld. 1948 No. 123, Installatie dilakukan di Tg. Pinang pada tanggal 5/7-'48). Ikatan ini diadakan, katanja ialah mengingat kepentingan bersama dan dasar-dasar persamaan jang terdapat didalam ketiga daerah tersebut seperti:

1. Banjaknja penduduk Tionghoa
2. „ „ bahan-bahan logam
3. perikanan, mata pentjaharian rakjat jang terpenting
4. genealogis, ekonomis dan geografis.

Formil federasi ini telah diikat dan diadakan peraturan-peraturanja. Akan tetapi didalam praktek federasi ini tidak bisa berdjalan.

Tahun 1949.

Pada tanggal 27 Desember 1949 pada hari pemulihan Kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka Resident (Belanda) atas perintah dari Pemerintah Pusat (R.I.S.) di Djakarta menjerahkan pemerintahan Daerah kepulauan Riau (Riau-Raad) untuk sementara waktu kepada Ketua Dewan Riau.

Dan daerah kepulauan Riau mendjadi daerah Bahagian (Istimewa) menurut kamus K.M.B.

Dalam pada itu oleh Riouw-Raad ditundjuk:

1. Sdr. Mahmud (sekarang Komis Kepala pada Kantor Bupati di Tandjung Pinang) mendjadi anggota Senat R.I.S., dan
2. Sdr. Muhammad Nur (Tjamat, telah meninggal dunia dalam tahun 1950).
3. Sdr. Tengku Achmad (Wedana Karimun sekarang mendapat studieopdracht di Universiteit Negeri „Gadjah Mada” di Djokja) mendjadi anggota parlemen R.I.S.

Sdr. Mahmud dalam pertengahan tahun 1950 minta berhenti atas kemauan sendiri karena tenaganja amat dibutuhkan oleh pemerintahan militer BABIRI dan D.P.R.D. Begitupun Sdr. Tengku Achmad minta berhenti atas kemauan sendiri, untuk mentjurahkan tenaganja pada Kawedanaan Karimun sebagai Wedana. Lowongan tempat sdr. Muhammad Nur sampai sekarang belum diisi.

Tahun 1950.

Oleh Kementerian Dalam Negeri (R.I.S.), Sdr. R.T. Djuarsa diangkat mendjadi Residen BABARI berkedudukan di Pangkal Pinang (Bangka). Berhubung dengan itu maka pada tanggal 13 Maret 1950 Ketua Dewan Riau menjerahkan pula pemerintahan atas kepulauan Riau kepada Residen BABIRI tersebut tadi.

Atas desakan rakjat dan pemuda Panitia 17 dan Gerakan Pemuda Indonesia (Gepindo) maka Dewan Riau dalam rapat kilatnja tanggal 18 Maret 1950 memutuskan membubarkan diri dan mendesak Pemerintah Pusat (R.I.S.) menggabungkan Daerah Kepulauan Riau (tadinja Daerah Bahagian menurut kamus K.M.B.) kedalam Negara Republik Indonesia. Untuk mendjaga vacuum dalam pemerintahan, kekuasaan atas daerah Kepulauan Riau diserahkan oleh Dewan Riau kepada tentera jaitu T.N.I. jang berbadju A.P.R.I.S. pada waktu itu (Kapten Islam Salim, sekarang militer Attache di Peking).

Kemudian oleh Pemerintahan Militer pada achir bulan Maret 1950 dibentuk staf Pemerintahan Militer BABIRI jang terdiri dari:

1. Sdr. Muhammad Apan, sebagai anggota (sekarang Patih, act. Bupati kepulauan Riau).
2. Sdr. Mhd Samin, sebagai anggota (Pensiunan Djaksa Kepala di Tg. Pinang).
3. Sdr. Radja Hadji Abdullah, sebagai anggota (bekas Wedana Karimun waktu Pemerintahan Djepang, sekarang Partikulir di Tg. Balai (Karimun)).
4. Sdr. Mahmud sebagai djurubitjara Pemerintahan Militer (sekarang Komis Kepala pada kantor bupati di Tg. Pinang).

Kemudian oleh Pemerintahan Militer BABIRI (Kapten Islam Salim) dibentuk suatu Dewan jaitu Dewan Perwakilan Rakjat Riau Darurat (D.P.R.D.) sebagai badan penasihat pemerintahan militer.

D.P.R.D. tersebut diketuai oleh Sdr. Radja Muhammad (Wedana, act. Patih d/p pada Kantor Bupati Tdj. Pinang) dan wk. ketuanja Sdr. Mohd Samin. D.P.R.S. tersebut mempunjai 17 orang anggota (+ Ketua dan wakil ketua) dan berumur kira-kira dua bulan.

Pada awal bulan Mei 1950 datang di Tandjung Pinang Delegasi R.I. Prop. Sumatera Tengah jang diketuai oleh Sdr. Residen

M. Oetojo. Maka pemerintahan sipil atas daerah kepulauan Riau diserahkan oleh Tentera (T.N.I. berbadju A.P.R.I.S.) kepada delegasi R.I. tersebut dan begitupun Dewan Perwakilan Rakjat Riau Darurat R.I. tersebut dilandjutkan/dilantik mendjadi D.P.R.S. **Kabupaten Kepulauan Riau** dengan ketentuan, bahwa anggotanja ditambah 3 orang lagi, mendjadi 20 orang seluruhnja. 3 orang tambahan itu ialah Muchtar Husin, Amir Husin, dan radja Chatidjah.

Ketua dari D.P.R.S. Kabupaten Riau tersebut ialah Sdr. Muchtar Husin. Wakil ketua: Sdr. Mohd Samin (pensiun Djaksa di Tandjung Pinang) dan anggota-anggota Dewan Pemerintahnja terdiri dari:

1. Sdr. Machmud (sekarang Komis Kepala pada Kantor Bupati di Tandjung Pinang).
2. Sdr. Hadji Abdullah (sekarang partikulir di Tandjung Balai, Karimun).
3. Sdr. Hadji Muhamad Junus (Wakil Kementerian Penerangan, sekarang partikulir di Tandjung Pinang).
4. Sdr. Zamahsjari (sekarang pegawai Djawatan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Riau di Tandjung Pinang).
5. Sdr. Dahlan Deo (sekarang pegawai pada Kantor Bupati Bahagian Politik, di Tandjung Pinang).

Dan oleh delegasi R.I. Prop. Sumatera Tengah tersebut Sdr. Moh. Apan diangkat mendjadi Bupati Kepala Daerah Kepulauan Riau dan Sdr. Radja Muhamad mendjadi patih d/p.



II. PERDJUANGAN ILEGAL MENENTANG PENDUDUKAN BELANDA.

1. Pada achir tahun 1945 di Tandjung Pinang didirikan satu organsasi bernama **Badan Kebangsaan Indonesia Riau** (B.K.I.R.) yg. diketuai oleh Sdr. Dr. Iljas (sekarang Dokter Keresidenan berkedudukan di Pakanbaru) dan Wk. Ketua Sdr. R. Subarma (Pegawai Kadaster Bandung). B.K.I.R. tersebut adalah organisasi yg. bekerdja dibawah tanah. Dengan usaha-usaha jang ilegal oleh beberapa saudara-saudara sepaham jang sewaktu itu ditahan didalam rumah pendjara di Tandjung Pinang dapat djuga mendjadi anggota B.K.I.R. (Sdr. Mohd. Samin, Zamalsjari, Ismet Mochtar, Abd. Wachid, Radja Hasan, Radja Mun dan Mohd. Apan).

Pada pertengahan tahun 1946 Dr. Iljas atas nama organisasi B.K.I.R. menjampaikan permintaan kepada Resident van Riouw di Tandjung Pinang (Dr. J. van Waardenburg) agar penduduk Indonesia dikepulauan Riau dapat dibenarkan mengibarkan bendera Sang Merah Putih pada tiap-tiap peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Residen tersebut, malahan pendjagaan/penjelidikan semakin diperkeras terhadap orang-orang atau badan-badan jang ditjurigainja jang antara lain terdiri dari:

- a. Pada pertengahan tahun 1946 di Senajang (kewedanaan Lingga) dan Dabo Singkep dilakukan oleh Belanda penahanan/ penangkapan terhadap berpuluh-puluh orang Indonesia.
- b. Satu detasement polisi di Dabo Singkep dalam tahun 1946/1947 jang ditjurigai dibubarkan dengan tjara litjin sekali jaitu: anggota-anggota kepolisian dari detasement itu ada jang diont-slag dan ada jang dikirim keluar dari daerah Kepulauan Riau. Mengenai peristiwa di Lingga ini perlu ditjatat, bahwa setelah T.R.I. dari Tambilahan jang dipimpin oleh Sersan Major Andris Kilak menjerang pos militer di Penuba (Mei 1946), keadaan dikewedanaan Lingga chususnya dikepulauan Riau umumnja semakin hangat. Andris Kilak beserta anak buahnja nama Abdur Rachman gugur pada pertempuran itu, dan anak-anak buahnja ditawan.
- c. Dalam bulan Djuni 1946 Sunarjo (salah satu pemimpin dari B.K.I.R.), Posthuiscomdt. polisi tingkat I di Tandjung Pinang, diberhentikan dari pekerdjaannja dengan tiba-tiba. Kemudian ia ditahan oleh militer Belanda di Tandjung Pinang, karena dituduh „orang jang sangat berbahaja” (pro Republik), extre-mist, dan sebagainja.

Pada tanggal 12 September 1946 djam 12.00 siang ia **ditembak** (dengan stengun) sedang dalam kamar tahanannja dibenteng.

Jang menembaknja ialah pendjaganja nama Keyman Bruno (soldaat K.N.I.L.) di Brenkelen. Sdr. R. Sunarjo gugur pada ketika itu djuga. Perkara penembakan ini oleh pembesar-pembesar K.N.I.L. dideponeer dan Keyman Bruno tersebut diberi kesempatan kembali kenegeri Belanda. Tjatatatan: R. Sunarjo lahir dikampung Kebun Sari distrik Pasuruan pada tanggal 28-6-1920, ajahnja nama R. Wiroatmodjo. Mantri-polisi di Probolinggo. Isterinja bernama Rukini (sekarang pegawai Kantor Inspeksi S.R. di Tg. Pinang).

- d. Begitupun dikewedanaan Karimun, Tandjung Uban, Kidjang dan Tg. Pinang menjusul beberapa tangkapan/penahanan. Rumah-rumah pendjara penuh sebahagian besar dari orang-orang jang katanja „Merah-Putih”.

Dikewedanaan Karimun semakin hangat setelah dalam bulan Djuli 1946 T.R.I. jang dipimpin oleh Kapten Muchtar (kemudian gugur) dan Letnan Sardjono mendarat di Durai (Ketjamatan Morosulit/kewedanaan Karimun).

- e. Beberapa pegawai jang ditjurigai dipindahkan keluar dari daerah kepulauan Riau, seperti R. Subarma (Ketua II dari B.K.I.R.), pegawai Kantor Kadaster di Tandjung Pinang dipindahkan ke Bandung (tahun 1947), Sdr. Urip gelar Sutan Radja Indera (salah satu pemimpin B.K.I.R.), pegawai sipil pada Kleding Magazijn K.N.I.L. di Tg. Pinang dipindahkan ke Ambon (1947), sekarang berada di Djakarta. Sdr. Sutarmo (Ketua P.B.R.I. Tandjung Uban, pegawai pada N.V. S.V.M. di Tandjung Uban) dipindahkan ke Sungai Gerong (Palembang) kemudian diberhentikan (1950-1951 tidak bekerdja); sekarang di Tandjung Uban dan lain-lain.
- f. Dalam bulan Djuni 1948 (peristiwa 5 Djuni) di Tandjung Pinang dilakukan penggeledahan/penangkapan terhadap orang-orang jang ditjurigai jaitu saudara **Mohd. Amin Ali** (Ketua Amir; sekarang pegawai kantor Urusan Agama di Tandjung Pinang); saudara **Dahlan Deo** (Wk. Ketua Amir + Ketua G.R.I.R., sekarang pegawai kantor Bupati (Bahagian Politik) di Tandjung Pinang); saudara **Chairul Ali Rasahan** (secretaris Amir; sekarang pegawai Djawatan Penerangan Kabupaten Kepulauan Riau di Tandjung Pinang); saudara **A. Rachman-kadir** (anggota B.K.I.R.; sekarang agen G.I.A. di Tandjung Pinang); saudara **Abd. Wahab Hassan** (Secretaris II + Bendahara G.R.I.R.; sekarang pegawai kantor Djurubajar di Tandjung Pinang); saudara **Hasjim Ali** (Bendahara Amir; sekarang pegawai kantor Kehutanan Tandjung Pinang); saudara **Willem Sinjal** (anggota Amir G.R.I.R.; sekarang radio-monteur P.T.T. di Tandjung Pinang); saudara **Timporok** (anggota Amir + G.R.I.R.; anggota K.N.I.L., kemudian masuk T.N.I. sekarang pensiun di Tandjung Pinang); saudara **J. Wallewangko** (anggota G.R.I.R.; anggota K.N.I.L., seka-

rang pegawai kantor Bupati di Tandjung Pinang); Tjataan: Saudara-saudara Timporok dan J. Wallewangko ditahan di benteng militer Belanda di Tandjung Pinang dan dilepaskan sesudah ditanda tangani „Rum-Royen Agreement”

Jang diberhentikan dari pekerdjaan berhubung dengan peristiwa ini ialah: 1. Mohd. Amin Ali; 2. Dahlan Deo; 3. Chairul Ali Rasahan; 4. Abd. Wahab Hassan; 5. Abdullah Samian (pegawai kantor Polisi Tandjung Pinang, sekarang pegawai kantor Bupati di Tandjung Pinang); 6. A. Rachmankadir; 7. J. Wallewangko dan 8. Timporok.

2. Dalam pada itu djangan dilupakan ialah pada tanggal 10 November 1946 didalam suasana jang panas dan dalam genggaman Pemerintah Belanda, berdirilah di Tg. Pinang satu perkumpulan legal bernama K.R.I.R. (Keinsjafan Rakjat Indonesia Riau) jang diketuai oleh saudara Mohd. Apan (Sekarang Patih, Acting Bupati Kepulauan Riau di Tg. Pinang) dan setjara diam-diam organisasi ini bergerak/menjokong perdjuaan Republik Indonesia.

Dalam tahun 1947 B.K.I.R., K.R.I.R. dan A.M.I.R. menjampai-kan satu Oorkonde kepada Pemerintah R.I. Oorkonde mana kediaman oleh Belanda dapat ditangkap.

3. Pada awal tahun 1947 berdiri lagi satu organisasi pemuda diberi nama Angkatan Muda Indonesia Riau (A.M.I.R.) jang bekerdja dibawah tanah, Ketua I Mohd. Amin Ali, Ketua II Dahlan Deo, Sekretaris Chairul Rasahan. Organisasi ini adalah bekerdja dibawah tanah, dan boleh dikatakan sebagai sebahagian pemuda dari B.K.I.R.
4. Kemudian dalam awal tahun 1948 berdiri pula satu organisasi jang bekerdja dibawah tanah nama **Gerakan Rakjat Indonesia Riau** (G.R.I.R.) jang anggota-anggotanja terdiri dari pegawai-pegawai sipil/polisi dan K.N.I.L. serta orang-orang partikulir. Ketua saudara Dahlan Deo.
5. Jang mendjadi badan-badan penghubung jang terpenting dari organisasi-organisasi B.K.I.R., AMIR, KRIR dan GRIR dgn. daerah-daerah pedalaman/Pemerintah R.I. (+ Wakil pemerintah R.I. di Singapura) ialah saudara **Ismet Muchtar** (sekarang Pembantu Inspektur Polisi di Tandjung Pinang), saudara Chaidir dan saudara Mohd. Samin (sekarang pensiun Djaksa Kepala di Tandjung Pinang) dengan dibantu oleh saudara **Marzuki** (sekarang pegawai Kepolisian di Tandjung Pinang), saudara **Iljas** (sekarang pegawai Kantor Djurubajar di Tandjung Pinang), saudara **Hamid Thalib** (sekarang pegawai Kantor Kabupaten Bupati di Tandjung Pinang), sudara **R.M. Mohd. Junus** (sekarang partikulir di Tandjung Pinang) dan saudara **Usman Tjik** (meninggal dunia dalam tahun 1950, terachir bekerdja pada Djawatan Penerangan di Tandjung Pinang).



III. AKSI UNTUK MENGGABUNGKAN DAERAH KEPULAUAN RIAU.

(daerah istimewa menurut kamus K.M.B.) dengan
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. Pada tanggal 20 Nopember 1946 di Tandjung Pinang atas inisiatif dari beberapa anggota bekas B.K.I.R. AMIR, KRIR, GRIR, saudara Djaffar Armis (Rahim) bekas anggota T.N.I., didirikan satu perkumpulan pemuda yang legaal dengan nama **Gerakan Pemuda Indonesia** (Gepindo) yang mempunyai anggota lebih kurang 2.000 orang. Ketua umumnja saudara **M.J. Hasibuan** (kemudian berhenti sebagai Ketua Umum), Wakil Ketua Umum, saudara Dahlan Deo (kemudian mendjadi Acting Ketua Umum).

Urgensi program dari GEPINDO salah satunja ialah berusaha sekuat-kuatnja agar daerah Kepulauan Riau (daerah istimewa menurut kamus K.M.B.) selekas-lekasnja digabungkan dengan negara Republik Indonesia.

Pada awal tahun 1950 GEPINDO mengeluarkan satu Resolusi dalam mana diantaranya dituntut supaja:

- a. daerah Kepulauan Riau selekas-lekasnja digabungkan dengan negara Republik Indonesia.
- b. T.N.I. segera didatangkan didaerah Kepulauan Riau,
- c. Menolak daerah Kepulauan Riau didjadikan tempat persinggahan/berkumpul oleh tentara Belanda (K.L. dan KNIL).

Pada waktu itu anggota T.N.I. di Tandjung Pinang baru terdiri dari 3 orang jaitu:

1. **Major R. Akil Prawiradiredja** (sekarang Let. Kolonel).
2. **Kapten Islam Salim** (kemudian major, sekarang Militer Atache R.I. di Peking).
3. **Letnan Segito.**

Dalam suasana jang dari sehari kesehari semangkin hangat itu, maka pada tanggal 12 Maret 1950 atas inisiatif dari beberapa Pemuda jang progressif berdirilah di Tandjung Pinang satu badan dg. nama „**Panitia 17**” jang diketuai oleh saudara Zamachsari (sekarang pegawai Djawatan Kesehatan di Tandjung Pinang). Urgensi programnja ialah:

- a. Dewan Riau bentukan Kolonial dibubarkan.
- b. Menggabungkan Daerah Kepulauan Riau (daerah istimewa menurut kamus K.M.B.) dengan Negara Republik Indonesia.

Dalam pada itu telah didapat chabar oleh **Panitia 17** bahwa Dewan Riau akan mengadakan sidang pleno pada tgl. 20 Maret 1950. Maka pada tgl. 13 Maret 1950 **Panitia 17** tsb. mengeluarkan pengun-

muman akan mengadakan Rapat Raksasa dan Demonstrasi di Tandjung-Pinang pada hari bertepatan dengan diadakannya Sidang pleno Dewan Riau jaitu tgl. 20-3-1950, dengan maksud menuntut supaya:

- a. Dewan Riau bentukan kolonial dibubarkan,
- b. menggabungkan Daerah Kepulauan Riau dengan negara R.I.

Dalam surat pengumuman tsb. diandjurkan oleh Panitia 17 supaya semua penduduk, partai²/organisasi² rakjat seluruhnya akan turut serta dalam rapat Raksasa dan Demontrasi tersebut.

Begitupun Gerakan Indonesia (Gepindo) di Tandjung Pinang mengeluarkan satu resolusi tersendiri dalam mana diandjurkan kepada para anggotanya dan rakjat umum supaya turut serta dalam rapat raksasa dan demonstrasi yang dipimpin/diselenggarakan oleh **Panitia 17** itu.

Perlu ditjatat, bahwa pada waktu yang sedang hangat itu, tentera Belanda (KL dan KNIL) dan Polisi Belanda masih tjukup berada di Tandjung Pinang bahkan diseluruh daerah Kepulauan Riau, dan sebaliknya T.N.I. (APRIS) baru terdiri dari Major R. Akil Prawiradiredja, Kapten Islam Salim dan Letnan Sugito.

Namun demikian rakjat terutama pemudanya tidak menghiraukan hal itu, disebabkan karena perasaan untuk bebas merdeka yang ditekan-tekan sedjak tahun 1945 oleh pemerintah Belanda, kini tidak tertahan lagi.

Maka karena ketakutan, Dewan Riau bentukan kolonial dengan tergesa-gesa mengadakan sidang kilat pada tanggal 18 Maret 1950 (sidang dimadjukan 2 hari dari tanggal yang ditetapkannya semula), dalam mana diputuskan:

- a. membubarkan diri,
- b. mendesak Pemereintah Pusat (RIS) supaya daerah istimewa kepulauan Riau digabung dengan negara R.I.,
- c. menjerahkan kekuasaan atas daerah Riau kepada pihak Tentara (TNI).

Mengingat keputusan Dewan Riau ini, maka **Panitia 17** mengurungkan maksud akan mengadakan rapat raksasa dan demonstrasi, karena tuntutanja boleh dikatakan telah berhasil.

Dalam usaha **Panitia 17** tersebut selain sdr. Zamachsari, djuga perlu ditjatat bantuan-bantuan berupa moreel/matereel dari sdr. Ismet Muchtar, sdr Mohd Samin, sdr. Radja Hadji Mohd Junus, dan lain-lain Pemuda serta anggota-anggota bekas B.K.I.R., A.M.I.R., dan G.R.I.R. lainnya

Demikianlah sedjarah singkat dari **Daerah Kabupaten Kepulauan Riau** semendjak kemerdekaan sampai terbentuknja **Negara Kesatuan Republik Indonesia (1950)**.

Pasal 7.

DI DJAMBI

SEBELUM diketahui oleh rakyat umum dengan pasti, tentang kekalahan Dai Nippon dalam Perang Dunia II, kegelisahan dalam Pemerintahan Pendudukan Djepang didaerah Djambi telah berangsur-angsur kelihatan. Terutama dalam kalangan pegawai-pegawai jang berbangsa Djepang diadakan penarikan dari tempat-tempat kedudukan mereka digun-gun, dikumpul keibu kota Djambi. Peristiwa ini disertai pula dengan pembubaran Gyu-Gun dan semua badan-badan keamanan jang dibentuk oleh Pemerintah Djepang, seperti Bogodan, Seinen-dan, Fudjinkai, Tonari-gumi dan sebagainya.

Berita kekalahan Dai Nippon tersebut, mula-mula dirahasiakan, akan tetapi setelah kemudian diakui kebenarannya oleh Pemerintah Pendudukan Djepang, maka dikalangan rakyat umum timbullah pertanyaan: „Siapakah diantara keradjaan-keradjaan jang menang jang akan datang mengambil over pemerintahan?“ Dalam kalangan bangsa Tionghoa jang besar djumlahnja di Daerah Djambi ada pula jang meniup-niupkan kabar, bahwa Pemerintah Tiongkoklah jang akan datang memerintah di Indonesia, sehingga banjak diantara orang-orang Tionghoa di Djambi telah bersiap-siap menunggu kedatangan Pemerintahnja itu. Rakyat Indonesia umumnya bersikap menanti sadja.

Kawat Adi Negoro Oktober 1945.

Kemudian, pada bulan Oktober 1945 diterimalah satu kawat dari Adi Negoro jang memaklumkan tentang pernyataan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945; kawat mana mula-mula diragu-ragukan oleh beberapa orang terkemuka dikota Djambi tentang kebenarannya.

Dr. Sjagaf Jahja Residen pertama.

Akan tetapi setelah pernyataan itu kemudian disusul dengan kawat dari Tengku Mr. Mohd. Hasan, Gubernur N.R.I. di Medan, jang menundjuk Dokter Sjagaf Jahja untuk diangkat mendjadi Residen N.R.I. Daerah Djambi, maka Dokter Sjagaf Jahja teruslah mengadakan perhubungan dengan instansi-instansi pemerintahan serta orang-orang termuka diibu kota Djambi, diantaranya dengan:

Abd. Manan, Makalam, R. H. Soetopo, Abdullah Kartawirana, Mohd. Insja dan Dokter R. Poerwadi. Sang Dwi Warnapun mulailah dikibarkan, walaupun mula-mula mendapat sanggahan keras dari pihak Pemerintah Djepang.

K.N.I. Djambi terbentuk 2 September 1945.

Beberapa kali diadakan pertemuan-pertemuan setjara rahasia oleh para pemimpin rakjat itu, karena segala pertemuan jang tidak mendapat izin lebih dahulu dari Pemerintah Djepang, dilarang diadakan. Kemudian pada tanggal 2 September 1945 terbentuklah Komite Nasional Indonesia Daerah Djambi jang dipimpin oleh Makalam sebagai Ketua. Susunan pengurus selengkapnja adalah:

1. Ketua : Makalam,
2. Wk. Ketua : M. Chatab,
3. Sekretaris : Abdullah Kartawirana,
4. Urusan Pemuda : Abundjani,
5. Bendahara : Kemas A. Rivai,
6. Urusan Keamanan : Mohd. Insja,
7. R. H. Soetopo,
8. R. Kamil,
9. Noezoeaar,
10. Sudarsono: Anggota buat daerah tambang minjak.

Dalam pada itu semua pegawai-pegawai Pemerintah jang berbangsa Indonesia dengan serentak dan spontaan menjatakan kesediaannja membantu dengan segenap tenaga untuk menegakkan Pemerintahan R.I. jang baru diproklamirkan itu.

Angkatan Pemuda Indonesia (A.P.I.).

Djuga angkatan muda tidak pula tinggal diam. Pembentukan A.P.I. (Angkatan Pemuda Indonesia) jang dipelopori oleh Dokter R. Soepardi, Abundjani dan Abdullah Kartawirana menjatukan semua tenaga pemuda Indonesia Daerah Djambi, dalam menghadapi suasana untuk memperkokoh Pemerintahan R.I.

Disamping gerakan-gerakan jang dibentuk dikota Djambi, djuga ditiap-tiap gun didirikan pula Komite Nasional Indonesia dan A.P.I. setempat, jang dipelopori oleh Pemerintahan serta Pemimpin-pemimpin dan orang-orang jang terkemuka.

Fonds Kemerdekaan Indonesia.

Serupa dengan badan jang dibentuk dikota Djambi, djuga dimasing-masing kewedanaan didirikan satu badan „Fonds Kemerdekaan Indonesia” jang bertugas untuk membiyai Komite Nasional.

Sidang K.N.I. ke-I Nopember 1945.

Dalam bulan Nopember 1945 sidang pertama K.N.I. seluruh Daerah Djambi diadakan dikota Djambi jang dihadiri oleh wakil-wakil K.N.I. serta pemerintah dari segenap kewedanaan, dengan maksud untuk mengkosolider K.N.I. diseluruh Daerah Djambi serta Pemerintahan R.I. Serentak dengan rapat tersebut, djuga A.P.I. mengadakan Konperensi Pemuda seluruh Daerah Djambi jang dihadiri oleh wakil-wakil dari tiap-tiap kewedanaan. Dalam konperensi itu, diambil keputusan untuk mengganti nama A.P.I. dengan **P.R.I. (Pemuda Republik Indonesia)**, dan sebagai Ketuanja, dipilih Dokter R. Poerwadi.

Walaupun Pemerintahan Pendudukan Djepang dimasa itu masih ada di Daerah Djambi, akan tetapi Pemerintahan itu pada hakekatnja tidak berapa dipatuhi lagi oleh rakjat dan semangat Pemerintahnjapun sudah sangat lemah. Selain dari hal-hal jang mengenai keamanannja, segala sesuatu jang bersangkutan dengan kepentingan rakjat umum tidak lagi diselenggarakanja.

Melihat keadaan jang demikian, maka didorong oleh kesadaran dan keinsjafan atas tanggung djawab dari Pemerintahan Nasional jang baru diproklamirkan itu, semua kewadajiban-kewadajiban itu dipikul oleh Pemerintah R.I., lebih-lebih ditempat-tempat jang telah ditinggalkan oleh Pemerintahan Pendudukan Djepang. Kertertiban dan keamanan rakjat umum diatur bersama-sama K.N.I. dan Pemudanja.

Rapat-rapat umum sering-sering diadakan dikampung-kampung dan ditempat-tempat ramai untuk menenteramkan hati rakjat, serta memberi penerangan-penerangan tentang situasi.

Jang terutama ditanamkan kehati rakjat ialah pengertian dan semangat kemerdekaan, dan menolak setiap pemerintahan pendjadjahan. Disamping itu diserukan, agar setiap pemuda bersedia mentjurahkan segenap tenaganja untuk tjita-tjita kemerdekaan untuk mendjundjung tinggi kehormatan Negara dan memperkokoh Pemerintah N.R.I.

Sidang K.N.I. Tjabang Djambi.

Pada tanggal 11 Nopember 1945, dilangsungkanlah rapat Komite Nasional Indonesia tjabang Djambi, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri dikota Djambi.

Rapat ini memutuskan:

- a. Untuk mendjaga keamanan dan keselamatan umum, maka ditiap-tiap dusun dalam kewedanaan Djambi dibentuk Barisan Pemuda sekurang-kurangnya terdiri dari 30 orang, dibawah pimpinan Kepala Dusun masing-masing. Disamping Barisan Pemudanja didirikan pula dalam tiap-tiap dusun suatu „Barisan Istimewa” terdiri dari orang-orang jang berumur 30—50 tahun.

- b. Untuk menyesuaikan gerak langkah semua Kepala-kepala Marga dan Kepala-kepala Dusun dengan suasana sekarang, maka dianggap patut sekalian Kepala-kepala Marga dan Kepala Dusun dalam kewedanaan Djambi bersumpah setia kepada Presiden dan bersedia membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
- c. Untuk kepentingan dan kesentosaan penduduk, maka dianggap perlu didirikan satu badan Koperasi berpusat dikota Djambi dengan tjabang-tjabangnja ditiap-tiap Marga dalam kewedanaan Djambi.

Badan Koperasi ini berusaha memasukkan segala bahan-bahan makanan kebutuhan sehari-hari untuk dijual kepada rakjat umum di Daerah Djambi.

Dengan djalan demikian, maka alat-alat kendaraan (auto, motor air dan kapal) jang telah mendjadi milik Pemerintah Republik Indonesia, dapat dipergunakan untuk kepentingan penduduk Negara Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan tudjuan ini, maka semua anggota-anggota K.N.I. tjabang Djambi jang hadir ketika itu, menjanggupi menjediakan modal banjaknja Rp. 40.000, tetapi jang dikehendaki paling sedikit Rp. 50.000.

- d. K.N.I. tjabang Djambi berusaha supaja dalam tiap-tiap Marga dibentuk satu badan Serikat Tani, dengan tudjuan supaja sekalian kaum tani bergerak dan bersatu padu untuk bekerdja lebih giat dan lebih radjin memperlipat gandakan hasil bahan makanan.
- e. Untuk sumbangan bagi Fonds Kemerdekaan, S. Alhaddad menerangkan dan menjanggupi mengadakan pertundjukan Sandiwara dan pertandingan olah raga, jang diselenggarakan oleh pemuda-pemuda Arab.

Tentera Keamanan Rakjat pun (T.K.R.) dibentuklah dikota Djambi jang dikepalai oleh Mohd. Insja, dan kemudian oleh Abundjani. Anggota-anggotanja diambil dari pemuda-pemuda jang bersemangat dan dari bekas Gyu Gun.

MINJAK TANAH.

Persatuan Pegawai Minjak (P.P.M.).

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Tanah Minjak menerima kabar telepon dari Dokter A. K. Gani di Palembang, mengatakan bahwa Indonesia sudah Merdeka. Karena tentera Djepang bersedia meninggalkan Tanah Minjak, maka pemimpin-pemimpin buruh dipanggil untuk memilih siapa jang akan diangkat untuk mengepalai dan memimpin seluruh buruh minjak ini. Pilihan djatuh

kepada sdr. Sudarsono jang telah berpengalaman lama dalam soal minjak, dan mengetahui seluk-beluk pertambangan dan semua buruhnja. Sama dengan suasana tambang minjak Daerah Palembang, maka di Badjubang pun dibentuk pula Persatuan Pegawai Minjak (P.P.M.), dengan sdr. Sudarsono sebagai Ketua umumnja.

Djiwa dan semangat kemerdekaan ditambah minjak sudah bergelora disaat suasana dikota Djambi masih dingin, masih diselimuti oleh peristiwa tekanan Djepang. Semendjak lama ditambah minjak sudah ada Bank Buruh jang mempunyai modal F. 3.500.000, jang djuga dipimpin oleh Sudarsono. Bank Buruh inilah pada hakekatnja jang mendjadi penggerak kegiatan para buruh itu untuk berusaha giat bagi melaksanakan tjita-tjita perdjuaan.

Perusahaan Minjak Republik Indonesia (Permiri).

Setelah tentera Djepang berangkat meninggalkan Tanah Minjak maka dibentuklah organisasi Perusahaan Minjak R.I. (Permiri) dan Bank Buruh sebagai Bankirnja.

Pemuda-pemuda dari Persatuan Pegawai Minjak didjelmakan mendjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dan „Lasjkar Minjak” disusunlah dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi segala kemungkinan jang akan menghambat kelantjaran kemerdekaan Indonesia. Keduanja organisasi ini djuga berada dibawah pimpinan Sudarsono.

Hasil produksi Permiri tiap-tiap bulan:

1. Crusien (minjak lampu)	400 ton
2. Benzine	300 ton
3. Solar	120 ton
4. Diesel	100 ton
5. Benzine kapal terbang	150 ton

Hasil-hasil tersebut dikirim keseluruh Daerah Djambi, Sumatera Barat, Tapanuli, Palembang dan Bengkulu.

MUARA TEBO.

Untuk kelantjaran roda pemerintahan dan untuk menggelorakan semangat perdjuaan rakjat dengan berpedoman kepada perkembangan, maka dibentuklah K.N.I. Tjabang kewedanaan Muara Tebo jang dipimpin oleh Dr. Sjahriar Rahman dan Suprawoto sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Untuk mengkoordinir tenaga-tenaga pemuda, didalam K.N.I. djuga diadakan bahagian pemuda.

Tanggal 17 Oktober 1945 Pemimpin-pemimpin Komite Nasional dari Sarolangun, Bangko dan Muara Bungo datang ke Muara Tebo untuk bermusjawarat guna mengirim delegasi ke Djambi. Pemimpin-pemimpin dari kota Djambi tidak dapat datang menghadiri pertemuan itu.

Permusjawaratan itu antara lain memutuskan memilih Dokter Sjahriar Rahman dan Suprawoto sebagai utusan ke Djambi.

Tgl. 20 Oktober 1945 sdr. Mohd. Insja Kepala Polisi Daerah Djambi dan anggota K.N.I. Pusat Daerah, datang ke Muara Tebo untuk memberi penerangan tentang kemerdekaan Indonesia dan perkembangan pemerintahan di Sumatera yang dikepalai oleh Gubernur Teungku Mohd. Hasan.

Tgl. 26 Oktober 1945 datang pula sdr. R. H. Soetopo anggota K.N.I. Pusat Daerah Djambi, mengadakan rapat anggota dengan K.N.I. tjabang Muara Tebo, mengenai tugas Komite Nasional dan perjuangannya saat itu.

Tgl. 2 Nopember 1945 beberapa orang pemuda Muara Tebo dan Muara Bungo dikirim untuk memasuki Tentara Keamanan Rakyat di Djambi. 7 Desember 45, rombongan Panglima Agung Tentara Sumatera Selatan, dan Gusti Amir Mohammad Nur mengunjungi Muara Tebo, dan memberi penerangan kepada pemuda-pemuda, sehingga semangat mereka bertambah berkobar-kobar. Kemudian berdujun-dujunlah pemuda-pemuda datang dari kampung-kampung kekota hendak menjadi Tentara (T.K.R.). Markas Besar T.K.R. dipindahkan ke Sarolangun dari kota Djambi.

Tgl. 13 Desember 1945, dikirimlah pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi Muara Tebo untuk memasuki Palang Merah di Sarolangun.

MUARA BUNGO.

Proklamasi tentang kemerdekaan Indonesia keseluruh dunia, disambut oleh pemuda-pemuda di Muara Bungo, bahkan oleh rakyat umumnya dengan penuh gembira dan bersemangat. Muara Bungo ada istimewanya dalam Daerah Djambi terutama bila dipandang dari segi pergaulan penduduknya yang agak maju apa lagi khusus pemuda-pemuda; dengan banyaknya perhubungan mereka kedaerah luar, dan karena banyaknya orang-orang dari daerah lain yang masuk ke Muara Bungo silih berganti. Udara berorganisasi sudah tertanam bagi pemuda-pemudanya, lebih dari yang lain dalam Daerah Djambi.

Beberapa hari sebelum proklamasi, diwaktu Djepang memaklumkan „berhenti perang” dan menyerah kalah dengan tidak bersyarat kepada Sekutu, pemuda-pemuda Muara Bungo menjusun satu organisasi untuk menjaga keamanan dan ketenteraman umum.

Organisasi ini dibenarkan dan dilindungi oleh Pemerintah jang seketika itu sudah diserahkan oleh Djepang untuk memimpin pimpinan pemerintahan kepada Kepala Pemerintahan Gun Tjo Bachsan, Kepala Polisi untuk Keamanan Hei Bu Abd. Manap.

Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945, berdirilah „Badan Pendjaga Keamanan” (B.P.K.) jang beranggota 35 orang anggota Angkatan Muda dan diketuai oleh H.B. Yahya.

B.P.K. disusun demikian rupa dan terdiri dari 5 bahagian, jaitu:

- I. Pendjaga Keamanan terbagi pula kepada 3 pasukan, ialah:
 - a. Pasukan I, dikepalai oleh Ali R. Medan.
 - b. Pasukan II, dikepalai oleh Ramli H. Umar.
 - c. Pasukan III, dikepalai oleh Sjarifuddin.
- II. Pasukan Istimewa, dikepalai oleh H. B. Yahya.
- III. Urusan keuangan.
- IV. Urusan perbekalan.
- V. Urusan dapur Umum.

Bendera Merah Putih jang berkibar dihadapan kantor B.P.K. didjalan Centraal Muara Bungo, adalah lambang kemerdekaan jang pertama sekali berkibar diangkasa Daerah Djambi. Didjaga dan dipertahankan kibaran dan lambaiannya oleh Pemuda-pemuda pasukan B.P.K.

Muara Bungo terletak pada djalan raja jang memperhubungkan Bukittinggi dengan Lubuk Linggau-Palembang, terus ke Tandjung Karang.

Semua Pemimpin-pemimpin rakyat jang bepergian melalui djalan darat dari Bukittinggi hendak ke Djawa ataupun sebaliknya, tentu melalui Muara Bungo dan bermalam disini. Pemuda-pemuda bekas Gyu Gun, jang sudah bertempur dalam Perang Dunia II di Ternate, Halmahera, Amboina atau ditempat lain-lain, pulang ke Sumatera Barat dan Sumatera Timur, beberapa malam beristirahat di Muara Bungo. Sebab itu tidak heran djika di Muara Bungo lebih dahulu mengetahui situasi, dibandingkan dengan beberapa kewedanaan-kewedanaan lain didaerah Djambi. Semangat pemuda-pemuda djadi tambah berkobar-kobar, dan berapi-api dan B.P.K. melayani setiap peristiwa penting jang terdjadi di Muara Bungo ketika itu. Dengan tersiarnya proklamasi jang diutjapkan atas nama Rakjat Indonesia oleh Sukarno-Hatta, ditambah lagi dengan berita-berita dan pengalaman-pengalaman jang dibawa oleh Pemimpin-pemimpin dan Pemuda-pemuda progressief jang meliwati Muara Bungo dari beberapa kepulauan di Indonesia ini hendak ke Bukittinggi, Padang dan Medan, maka semangat dan djiwa para pemuda di Muara Bungo mendjadi bertambah panas dan bergelora.

B.P.K. bekerdja dengan giat bersama dengan badan Pemerintahan untuk turut menjambut dan memperdjuangkan kemerdekaan itu dengan menjusun dan menjiapkan apa-apa jang dibutuhi oleh proklamasi, jang bersesuaian dengan keadaan di Muara Bungo.

Beberapa orang bangsa Djepang jang masih djuga mundar-mandir di Muara Bungo sesudah proklamasi berusaha menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia, digempur oleh pemuda-pemuda. Sendjata dan harta bendanja diserahkan kepada Negara. Persiapan minjak jang selama perang dikumpulkan dan disimpan oleh Djepang, diambil over pendjagaannja oleh B.P.K. dan dipergunakan untuk kepentingan perdjuangan kemerdekaan.

Pada 10 Oktober 1945, didirikan Komite Nasional Indonesia buat kewedanaan Muara Bungo. Susunan pertama kali dan pengurus-pengurusnja adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Ketua | : | H. B. Yahya. |
| 2. Wk. Ketua | : | R. Sudarjo. |
| 3. Sekretaris I | : | Abd. Rauf R.M. |
| 4. Sekretaris II | : | Abd. Kadir Hamzah. |
| 5. Bendahara | : | 1. Victor Simatupang.
2. Abd. Kadir Hamzah.
3. Munawar. |
| 6. Fonds Kemerdekaan: | : | 1. Ali R. M.
2. Abd. Rauf R. M. |
| 7. Penerangan | : | Ludin. |
| 8. Anggota | : | 1. Sudarsono S.
2. Mohd. Zen Saman.
3. Abdul Hadi. |
| 9. Pemuda-pemuda | : | Semua anggota B.P.K. |

Kemudian tumbuh dan tersusun pula dengan suburnja 8 organisasi lagi.

I. A.P.I. (Angkatan Pemuda Indonesia) didirikan tanggal 10-10-1945 kemudian dilebur mendjadi:

II. P.R.I. (Pemuda Republik Indonesia), diketuai oleh Victor Simatupang.

- Anggota-anggota Pengurusnja:
- | | |
|----|--------------------|
| 1. | Sjarifuddin. |
| 2. | Muhd. Zen Saman. |
| 3. | Pontas Simatupang. |
| 4. | Tanan. |
| 5. | Ambun Sani. |
| 6. | Sjukur Nawas. |
| 7. | Jacub Manti. |
| 8. | Abd. Rahman. |

jang sebahagian besar terdiri dari Angkatan Muda Kota Muara Bungo.

- III. P.S.I. (Persatuan Sopir Indonesia) berdiri tanggal 23-10-1945.
- IV. P.D.I. (Persatuan Dagang Indonesia) berdiri tanggal 14-11-1945.
- V. Petir — berdiri tanggal 8-11-1945.
- VI. Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) berdiri tanggal 12-10-1945.
- VII. P.P.R.I. berdiri tanggal 11-11-1945.
- VIII. Satu partai politik, yaitu Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) berdiri tanggal 6-3-1946.

Komite Nasional Indonesia diperluas dan diperlengkapi lagi. Susunan jang kedua kali ini, mendapat tambahan tenaga dari persatuan-persatuan dan organisasi jang ada.

Susunannja adalah:

- 1. Ketua : H.B. Yahya.
- 2. Ketua Muda : R. Sudarjo.
- 3. Panitera : Muhd. Zein, A. Rauf, Hasan Thaher.
- 4. Bendahara : Munawar, Abd. Kadir Hamzah.
- 5. Penerangan : Ludin, Muchtar Ismail, Ibrahim Gr.
- 6. Pemeriksa : Muhd. Zahari, Muhd. Sjarif, Sudarsono.
- 7. Balai Umum:

I. Ketua : Abdul Manaf.

II. Ketua Muda : Ibrahim Yahya.

Anggota-anggota dari:

Pasirah-pasirah (Kepala Marga) sedjumlah 8 Pasirah.

- P.S.I. : H. Abd. Roni, Husin Ali.
- P.R.I. : Victor Simatupang, Anwar S.S.
- Perwari : Chadidjah, Raimin.
- B.P.K. : Sjarifuddin, Abd. Rahman.
- P.D.I. : Muchtar Ismail.
- Fonds Kemerdekaan: Ali R. M.
- Petir : Iljas Njanaib, Mahmud Bendaro.
- P.B.I. : Bachsan, Zainal Abidin.
- Tentera : Muhd. Thaib, Said Abdullah.

Patut ditjatat disini, bahwa untuk memupuk keuangan K.N.I., banjak diterima bantuan dari perkumpulan-perkumpulan organisasi-organisasi, dan lain-lain. Dari keuangan inilah dibantu T.R.I. dan dilantjarkan perdjuaan kemerdekaan Indonesia.

BANGKO.

Dikewedanaan Bangko, seperti djuga ditempat-tempat lain Angkatan Pemuda Republik Indonesia (A.P.R.I.), memegang peranan jang penting, diketuai oleh Bahar Mahjudin jang kemudian gugur dalam T.N.I. sewaktu pertempuran clash ke-II di Badjumbang. Komite Nasional tjabang kewedanaan Bangko berdiri dengan susunan pengurusnja:

1. Ketua : Dokter R. Poerwadi — kemudian pindah kekota Djambi, memimpin P.R.I.
2. Wk. Ketua : Marah Ismail.
3. Sekretaris I : Mhd. Samin.
4. Sekretaris II : Mhd. Saidi.
5. Anggota-anggota : I. Mohd. Saidi.
II. Ali Sudir.
III. Abi Hasan.
IV. Rukman Hadi.
V. Ismail.
VI. Satro.
6. Bhg. Perekonomian : Nung Tjik.
7. Penasehat : R. Soedarjo.

SAROLANGUN.

Di Sarolangun sesudah proklamasi, Organisasi jang mulai berdiri ialah: „Badan Keamanan Masyarakat” atau singkatnja B.K.M. jang kemudian mendjelma menjadi A.P.I. dan P.R.I.

Komite Nasional Indonesia tjabang kewedanaan Sarolangun mempunjai susunan Pengurus:

1. Ketua : Sjamsulbahrun.
2. Wk. Ketua : Ahmad Sjarnubi.
3. Sekretaris : Teleng.
4. Keuangan : Jusuf Nasri.
5. Anggota : I. Abu Tohid.
II. Aminuddin.

Raden Inu Kertapati menggantikan Sjagaf Jahja.

Djepang masih mempunjai kedudukan jang kuat dikota Djambi. Dalam bulan Desember 1945 Dokter Sjagaf Jahja ditangkap oleh Djepang. Djuga beberapa orang Pemimpin turut tertangkap. Maksud Djepang hendak menangkap lagi beberapa Pemimpin lain.

jang tenaga-tenaganja sangat dibutuhi bagi memelopori memper-tahankan proklamasi. Atas andjuran K.N.I. Djambi, diusulkan kepada Gubernur Sumatera, supaja Raden Inu Kertapati, salah satu dari keturunan-keturunan Sultan Djambi diangkat mendjadi Residen. Usul ini kemudian diterima oleh Gubernur, dan R. Inu Kertapati menggantikan kedudukan Dokter Sjagaf Jahja memegang pemerintahan Daerah Djambi.

Djanuari 1946: terdjadilah insiden antara pemuda-pemuda kota Djambi, Muara Bungo, Bangko dan Sarolangun dengan Djepang. Banjak sendjata tentera Djepang jang dapat dirampas dan diserahkan kepada Pemerintah. Tapi sajang dan sangat disedihkan pula pemuda-pemuda jang telah mengorbankan tenaganja untuk Negara itu, lantas ditjurigai pula. Dituduh membikin kekatjauan terhadap Djepang, sedangkan Djepang telah menduduki kembali kantor Post dan Keuangan. Satu hal jang sangat menjedihkan ketika itu, ialah muntjulnja satu komplotan jang bernama „Barisan Tengko-rak“, memusuhi pemuda-pemuda jang dengan penuh semangat memperdjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi untunglah semuanya itu dapat diatasi.

Di Sarolangun diadakan rapat dari empat tjabang Komite Nasional jaitu:

1. K.N.I. Muara Bungo diwakili oleh H. B. Yahya.
2. K.N.I. Muara Tebo diwakili oleh Dokter Sjahriar Rahman, Salamuddin dan H. Nawawi.
3. K.N.I. Bangko diwakili oleh R. Soedargo.
4. K.N.I. Sarolangun diwakili oleh, Sjamsulbahrun, A. Sjarnubi, Amiruddin dan Mahjuddin.

Keputusan jang diambil dalam rapat tersebut:

1. Mengandjurkan akan mengambil tindakan menjimpan mereka jang dianggap menghalang-halangi djalannja kemerdekaan Indonesia.
2. Memohonkan kehadiran Gubernur Sumatera, agar Gubernur menempatkan seorang dari luar keresidenan Djambi, dikota Djambi untuk mendjadi anggota Staf Residen, jaitu seorang sardjana hukum jang berpolitik dan berpengalaman, jang berguna untuk mendjadi orang perantara antara Residen dan Sekutu dan akan mendjadi Adviseur Pemerintah; sebab dalam Daerah Djambi sendiri seorang jang sebagai dimaksud belum ada.
3. Tempat kedudukan Residen Djambi tetap dikota Djambi dan harus turne ketempat-tempat jang diaggap penting, bersama-sama dengan Penghulu Kepala untuk kepentingan penerangan-penerangan bagi rakyat.

4. Dalam tiap-tiap kedemangan hendaklah secepat mungkin diadakan rombongan-rombongan yang terdiri dari Badan Komite Nasional, Pemerintah dan Alim Ulama; rombongan mana berdjalan kedusun-dusun segenap pelosok untuk mengadakan pertemuan dengan rakyat guna memberikan penerangan-penerangan dan keinsjafan tentang pertahanan kemerdekaan, persatuan, keagamaan dan lain-lain yang perlu.
5. Meminta kepada Penghulu Kepala dan Residen, supaya mengirim surat kepada Demang-demang, Hakim-hakim dan Alim Ulama di Marga-marga yang dimaksudkan sebagai perintah untuk mengadakan propaganda dan penerangan-penerangan dikewedanaan-kewedanaan.
6. Mengusulkan kepada Pemerintah, agar Pemerintah dapat mempersatukan segala tenaga bagi kepentingan pertahanan kemerdekaan dengan djalan:
 - a. Memasukkan pemuda-pemuda menjadi Tentara Keamanan Rakyat (T.K.R.).
 - b. Mengadakan organisasi Alim Ulama, supaya mereka dapat bekerja sama bergerak untuk menginsjafkan rakyat di kampung-kampung dan didaerah-daerah tentang maksud kemerdekaan dengan berdasarkan Agama Islam.

PEMBENTUKAN TENTARA KEAMANAN RAKJAT (T.K.R.).

Di Sarolangun, pembentukan T.K.R. ini dipelopori oleh H. Teguh dan anggota-anggota K.N.I.

Di Bangko oleh H. Ibrahim dan R. Abdurrahman.

Di Muara Bungo oleh Ramli dan L. Hasan.

Di Djambi oleh Abundjani.

Boleh dikatakan seluruh Angkatan Pemuda Indonesia (A.P.I.) dan P.R.I. juga dari lepasan Gyu Gun, masuk kedalam T.K.R. Untuk keperluan pembentukan T.K.R. tersebut, dikota Djambi telah diserahkan uang dan kain yang sangat dibutuhkan sekali oleh pemuda, terutama untuk melanjutkan latihan-latihan kepada Makalam, Ketua K.N.I.

Dalam masa pembentukan T.K.R. ini, diutuslah oleh Pemerintah Djambi sdr. H. B. Yahya ke Palembang untuk meninjau-ninjau keadaan dan situasi, dan untuk mengadakan pertemuan dengan Dr. A. K. Gani, Residen Palembang.

Sesudah Markas Besar T.K.R. pindah dari kota Djambi ke Sarolangun, tentera Djepang di Djambi kembali mengganggu keamanan. Abundjani, Kepala Markas Besar T.K.R. Daerah Djambi, mengutus sdr. H. B. Yahya sekali lagi sekembalinja dari

Palembang untuk mengadakan pertemuan dengan Wakil Pemerintahan Pusat di Bukittinggi, sdr. Adinegoro, guna membitjarakan soal-soal Djambi, dengan membawa satu surat kawat jang berbunyi: „Djepang tidak menurut permusjawaratan General Major Chambers dan Gubernur N.R.I. Djepang djaga didjalan sehingga lalu lintas terganggu, mengadakan penggeledahan orang-orang dan barang-barang. Pegawai N.R.I. 2 orang ditangkap dan ditahan. Djepang mengeluarkan maklumat menjuruh rakjat menjerahkan sendjata. Sudah diminta dengan surat oleh Residen dan saja agar Djepang menurut permusjawaratan General Major Chambers dan Gubernur Sumatera, tetapi sampai sekarang tidak diturutnja. Tindakan apa harus diambil karena rakjat merassa tidak senang”. Salinan dikirimkan kepada Gubernur Sumatera dan organisasi serta Koordinator T.K.R. Sumatera.

PERUBAHAN K. N. I MENDJADI DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Bulan Maret 1946, K.N.I. Daerah Djambi dibubarkan dan dibentuklah Dewan Perwakilan Rakjat.

Rentjana bentuk perubahan K.N.I. Daerah Djambi ini adalah sebagai berikut:

1. Komite Nasional mendjelmakan Badan Perwakilan Rakjat disaat genting ini dan terdiri dari selengkap-lengkapnja dari wakil-wakil segenap lapisan: Pangreh Pradja, Polisi, Perniagaan, Teknik, Kesehatan, Pemuda, Golongan pertukangan, Sopir, Kusir, Pedagang, Saudagar, Pemimpin Rakjat, Kepala Marga dan sebagainya.
2. Sifat pekerdjaan K.N.I. ialah sebagai **badan konsultatief** dan dimana perlu **legislatief** dan berdiri disamping Pemerintah Daerah.
3. Anggota terdiri dari 50 orang, rapat mempertimbangkan apakah perlu didudukan orang-orang dari luar tempat kedudukan pusat Pemerintahan, supaja menjerupai Badan Perwakilan Rakjat dimasa biasa, atau tidak. Djika perlu diadakan, maka proposinja sebagai berikut: 25 orang jang bersifat revolusioner dari tempat kedudukan Pusat Pemerintahan Daerah (P.P.D.). 11 orang jang bersifat bidjaksana dan berpengaruh. 7 orang Ketua K.N.I. kewedanaan, 7 orang wakil kewedanaan (dikehendaki tani jang revolusioner).
4. Djikalau tidak mendapat persetudjuan mendudukan anggota dari luar kedudukan P.P.D. maka dihadjatkan:
36 orang revolusioner atau jang dapat direvolusionerkan.
14 orang bidjaksana/berpengaruh.
5. Dengan sifatnja Komite Nasional **Konsultatief** dan **legislatief** itu, berhubung dengan sifatnja P.P.D. jang sudah sempurna

in fact, maka segala **executief** yang dapat diserahkan kepada badan lain atau diotonomikan dilepaskan dari K.N.I.

- a. **Pimpinan Organisasi** masih mungkin dilakukan oleh suatu permanen komite (Komite tetap) dalam Komite Nasional.
 - b. **Badan Kemasjarakatan** (Perhimpunan Fakir Miskin dan Jatim Piatu) dapat diserahkan kepada Pemerintah menurut tuntutan Dasar Negara Republik Indonesia.
 - c. **Badan Perekonomian Rakjat** (Perkumpulan Koperasi Rakjat) dapat diserahkan kepada Pedjabat Pemerintah, menurut tuntutan Dasar Partai Nasional Indonesia, yang selama ini digabungkan dengan Dasar Komite Nasional dalam pembentukan Komite Nasional Djambi.
 - d. **Balai Penerangan** diserahkan kepada Pemerintah.
 - e. **Fonds Kemerdekaan** dapat diurus oleh Permanen Komite dalam Komite Nasional.
6. Dalam Komite Nasional diadakan „Dewan Harian” (Standing Committee terdiri dari 5 sampai 7 orang, yang gunanja:
- a. Pengurus perkara harian.
 - b. Badan pertimbangan Residen.
 - c. Badan perantaraan Rakjat dengan Pemerintah.
 - d. Badan perantaraan Residen dengan Sekutu.
7. Persidangan sewaktu-waktu diadakan dengan hadirnja sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari djumlah anggota semua.
8. Kewadajiban anggota Komite Nasional:
- a. Mendjadi pelopor rakjat.
 - b. mendjadi organisator gerakan rakjat Republik.
 - c. Mempertahankan kedaulatan Rakjat.
 - d. Mengoreksi para Pegawai-pegawai Negeri.
 - e. Mendjaga ketenteraman **Umum**.
9. Mengurangi Dasar Partai Nasional dari Dasar yang sedang dipakai mendjadi patokan Komite Nasional Djambi (Dasar yang dipakai selama ini ialah assimilasi Dasar P.N.I. dan K.N.I.). Komite Nasional dikewedanaan mendjadi badan Konsultatief dari tubuh Pemerintahan kewedanaan. Diseluruh Marga-marga hendaknja diadakan Komite Nasional Marga yang merupakan Balai Penimbang, dengan perwakilan selengkap mungkin. Begitu djuga didusun-dusun yang besar (Balai Desa).

Kemudian pada bulan April 1946, tersiarlah Maklumat Gubernur Sumatera No. 8/M.G.S. yang isinja:

Kita Gubernur Sumatera Negara Republik Indonesia.

Menimbang:

Bahwa sebelumnja diadakan pemilihan umum perlu diadakan peraturan buat sementara waktu untuk menetapkan kedudukan K.N.I. daerah di Sumatera.

Mendengar:

Wakil Pemerintah Agung dan anggota Badan Pekerdja K.N.I. Pusat Djakarta jang mengundjungi Sumatera, dengan menunggu pengesahan Pemerintah Agung dikemudian hari:

Memutuskan:

Pertama: K.N.I. Daerah diadakan di Sumatera, di Propinsi, di Keresidenan, di Kota berotonomi dan lain-lain daerah jang dianggap perlu.

Kedua: K.N.I. Daerah mendjadi Badan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan pekerdjaan mengatur rumah tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jang lebih luas dari padanja. Badan tersebut dinamakan „Dewan Perwakilan Sumatera“, „Dewan Perwakilan Palembang“ dan sebagainya.

Ketiga: Oleh K.N.I. Daerah dipilih beberapa orang, sebanjak-banjaknja 5 orang sebagai Badan Executief, jang bersama-sama dengan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.

Keempat: Ketua K.N.I. Daerah jang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan jang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3 atau djika tiada Ketua lama, wakil Ketua harus dipilih oleh rapat K.N.I. tersebut.

Kelima: Biaja untuk keperluan K.N.I. Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Keenam: Maklumat ini berlaku mulai tanggal 17 April 1946. Medan 12 April 1946.

Kita, Gubernur Sumatera dari Negara Republik Indonesia Teungku Mr. Mohd. Hasan.

Diketahui oleh Sekretaris Propinsi Sumatera Negara Republik Indonesia: Mas Tahir.

Susunan Dewan Executief dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Djambi sedjak permulaan dibentuk sampai pada waktu sebelum Djambi diduduki oleh Belanda:

Maret 1946.

Ketua Muda: Sjamsulbahrun
Anggota-anggota:
H. Ali Hamzah.
Jang Tjik.
M. Chatib.
Dr. Sjagaf Jahja.

Djuni 1946.

Ketua Muda Sjamsulbahrun.
Anggota-anggota:
H. Ali Hamzah.
Jang Tjik.
M. Chatib.
Rd. Hamzah.
A. Sjarnubi.

September 1946.

Ketua Muda: Sjamsulbahrun.
Anggota-anggota:
H. Ali Hamzah.
A. Sjarnubi.
Rd. Hamzah.
Salim.
Ibrahim Bangko.

Djuli 1947.

Ketua Muda: A. Sjarnubi.
Anggota-anggota:
Rd. Hamzah.
Salim.
F. Silaen.
A. Chatib Suleman.

PEMUNGUTAN FONDS DAKOTA DAERAH DJAMBI SEHARGA 4 DAKOTA.

Dengan adanja rantjangan Pemerintah N.R.I. Daerah Djambi untuk membeli 4 (empat) Dakota, ternjata setingkat demi setingkat perlengkapan Negara kita dapat disiapkan dengan hasil Indonesia jang kaya-raja itu, tegasnja Djambi dengan hasil getahnja. 4 Dakota adalah seharga 1500 ton getah kering.

Usaha Pemerintah dalam mentjiptakan djumlah harga tersebut adalah:

- a. Dengan djalan menarik 5% dari hasil penjadapan getah, dan hasil pertanian jang bersesuaian dengan djumlah getah jang ditetapkan di kewedanaan jang tidak menghasilkan getah.
- b. Pertama kali untuk pembeli sebagian dari djumlah 4 Dakota Pemerintah Daerah Djambi dapat *memindjam* dari saudagar-saudagar dikota Djambi sedjumlah \$ 120.000, dengan djalan menarik 30% dari djumlah harga barang-barang jang dikeluarkan, djumlah ini mesti telah tersedia sebelum bulan Agustus 1948. 50% dari djumlah harga 4 Dakota dipandang sebagai bakti 50% dari djumlah harga 4 Dakota dipandang sebagai andeel.

Dengan kesanggupan rakjat Djambi untuk membeli 4 Dakota dengan kebidjaksanaan Pemerintah Djambi, kita bisa membangga-

kan Djambi dengan hasil getahnja. Memang tidak salah, djika Presiden Sukarno telah menerangkan: „Bahwa Djambi adalah satu Daerah Republik Indonesia jang teristimewa jang daerahnja aman dan makmur dan ekonomi-nja berdjalan dengan baik dan satu daerah pula jang dapat meng-export hasil buminja (karet) dan meng-import barang-barang dari luar negeri”.

Tetapi djika dilihat dari segi pertanian, bahan makanan rakjat, kita tidak bisa membanggakan, karena boleh dikatakan hanja 1 atau 2 kewedanaan sadja di Daerah Djambi jang dipandang tjukup dengan hasil pertaniannja.

DEWAN PERTAHANAN DAERAH DJAMBI.

Dalam tahun 1947, dibentuk oleh Pemerintah, Dewan Pertahanan Daerah, jang sebagai Ketuanja: Residen.

Wk. Ketua: Komandan Resimen.

Anggota-anggota:

A. Sjarnubi.

Sudarsono.

H. Ali Hamzah, Dr. Poerwadi.

R. H. Sutopo dan R. Hamzah.

Dalam tahun ini djuga, Serikat-serikat Sekerdja Daerah Djambi dapat menjusun dirinja masing-masing, dalam satu Vak Centrale jaitu dalam gabungan S.O.B.S.I. jang diketuai oleh saudara Sudarsono, anggota P.K.I.

Pada tahun 1948, berhubungan dengan keadaan bertambah genting, maka seluruh Daerah Djambi didjadikan Daerah Militer; sebagai Komandan Daerah Militer adalah Abundjani dengan pangkat Kolonel, dan Wakil Komandan, Sudarsono dengan pangkat Letnan Kolonel.

UANG DAERAH.

Tahun 1947, Pemerintah Djambi mendapat hak untuk mengeluarkan uang Daerah. Pertjetakan „Soei Liong”, dibeli oleh Pemerintah dan didjadikan Pertjetakan Negara. Sebagai Kepala Pertjetakan H.B. Yahja dan Wk. Kepala, Kamarny Thaib. Pertjetakan itu diserahkan kepada Djawatan Penerangan Daerah Djambi untuk mendjalankan dan mengawasinja. Kepala Djawatan adalah M.L. Tobing.

Uang Daerah jang pertama keluar, bernama „*Coupon Penukaran*” terdiri dari harga jang 1 rupiah dan $2\frac{1}{2}$ rupiah. Kertasnja adalah kertas biasa sadja, dipilih jang kuat dan jang tebal. Mula-mula keluar, bentuk dan ukurannja seperti digambarkan dibawah ini:

Bahagian muka dari harga $2\frac{1}{2}$ rupiah:

$2\frac{1}{2}$	No.	$2\frac{1}{2}$			
COUPON PENUKARAN Pemerintah Negara Republik Indonesia Daerah Djambi mendjamin penukaran Coupon Pemba- jaran ini seharga <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Dua setengah rupiah</td> <td style="width: 10%; text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">$2\frac{1}{2}$</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Dua setengah rupiah</td> </tr> </table> Residen N.R.I. Djambi			Dua setengah rupiah	$2\frac{1}{2}$	Dua setengah rupiah
Dua setengah rupiah	$2\frac{1}{2}$	Dua setengah rupiah			
$2\frac{1}{2}$	Komisi Keuangan	$2\frac{1}{2}$			

Bahagian belakang dengan berpetak ketjil djuga setiap sudut dan angka serta bertulisan:

Coupon ini berlaku hanja di Daerah Djambi sebagai alat penukaran jang sjah buat sementara. Penukaran dengan wang Orips R. 100 (Seratus rupiah) dan R. 25 (Dua puluh lima rupiah) ditanggung oleh Pemerintah setiap waktu di Kas Negara Djambi.

Djambi, 24 Oktober 1947.

Dalam bulan Desember 1947, bentuk Coupon ini diperbagus lagi dengan diberi berwarna dan pinggir berbunga-bunga; ditambah pula dengan pengeluaran dari Coupon jang seharga R. 5,— dan Rp. 10.— Pertjetakan berdjalan terus dengan produksinja sampai pada penghabisan tahun 1948, dan berkesudahan dengan hantjurnja pertjetakan tersebut pada waktu tentera Belanda menjerbu ke-kota Djambi dengan parachutenja.

DISEKITAR AGRESSIE BELANDA KE-II SAMPAI PENJERAHAN KEDAULATAN.

28 DESEMBER 1948, kota Djambi diserang dari udara dan dihudjani dengan peluru oleh kapal terbang Belanda selama $\pm$ 24 djam. Djumlah kapal udara jang menggempur ada 14 buah. Kota Djambi dibumi hanguskan. Tentara pajung Belanda diturunkan disekitar Tanah Minjak, dan didekat-dekat pinggir kota. T.N.I. mengadakan perlawanan sengit. Seorang Kapten T.N.I., Kapten Bakar, tewas dalam serangan kota ini. Residen dengan stafnja dan Dewan Pemerintahan Daerah, menjingkirkan diri melalui djalan air.

Dengan motorboat R.I. 120 Residen beserta stafnja dan Dewan Pemerintahan Daerah, bertolak dari kota Djambi pada waktu sendja hari, dan dalam malam gelap gulita itulah mereka memudiki sungai Batanghari, disaat kota terang benderang dengan kesibukan tjahaja api bumi hangus.

Pada keesokan harinja tanggal 29 Desember 1948, tentera Belanda menduduki kota Djambi, sedang Residen beserta staf dan anggota-anggota Pemerintahan telah sampai di Sengeti. Dari sini mereka menjeberang kedusun Rantaumadjo dan disinilah mereka memimpin pemerintahan dan perdjuaan.

Perlawanan di Tanah Minjak:

29 Desember 1948, tentera pajung Belanda menjerbu ke Badjubang, Tempino, Kenali Asam dan tempat-tempat disekitar Tanah Minjak. Disamping perlawanan jang diadakan oleh T.N.I., djuga Barisan Buruh turut menjerang musuh. Dari pihak buruh gugur dalam pertempuran sedjumlah 40 orang. Dari T.N.I. 15 orang. Kusin, kepala Rumah Sakit ditembak mati. Djuga 3 orang bangsa India disuruh berdiri dekat Rumah Sakit tersebut, dan ditembak mati oleh pihak Belanda.

Di Tempino, pasukan T.N.I. dibawah pimpinan Letnan Simatupang bersama 15 orang tentaranja, mengadakan perlawanan dengan sengit bersama-sama dengan Barisan Buruh. Dan achirnja karena terkepung, Letnan Simatupang beserta tentaranjapun gugur. Perdjuaan disini membawa korban:

Buruh tewas 30 orang, T.N.I. 20 orang dan Polisi 5 orang. Seorang wanita, Ketua Perwari Tempino jang ikut biasa disebut Ibu Mahmud; dalam mendjalankan tugas memimpin wanita-wanita me-

njingkirkan diri dari rumah masing-masing. Karena hebatnja serangan dari udara, dia dapat ditangkap oleh tentera pajung dan ditembak mati disamping 2 orang anaknja jang masih berumur 3 tahun dan 4 tahun.

Sampai sekarang kuburnja masih terdapat dipinggir djalan di Tempino. Di Kenali Asam, dalam penjerangan tentera pajung Belanda, Sudarsono Kepala Tambang Minjak djuga wakil Komandan Daerah Militer, bersama dengan staf Batalion Minjak, terdiri dari Kapten Rivai, Kapten Marzuki dan Kapten Sujono, memimpin pembakaran minjak. 30 sumber minjak terbakar hingga 3 bulan. Setelah melaksanakan pembakaran sumber-sumber minjak ini, maka Kapten Marzuki dan Rivai naik kendaraan jeep. Tetapi dalam perdjalanan, tiba-tiba muntjul kapal terbang Belanda dan terus menjerang dan menembak dari udara. Kapten Marzuki kena tembak pahanja, lalu meninggal dunia di Tempino. Kapten Sujono djuga tewas dalam pertempuran di Tanah Minjak ini oleh sebuah pelor jang menembus kepalanja dan meninggal di KM 8.

Sesudah penjerahan kedaulatan, sewaktu djenazah kedua Kapten ini dipindahkan dari tempat gugurnja masing-masing ke Taman Bahagia di Djambi, kelihatan dagingnja masih utuh dan rupanja masih dapat dikenal.

Korban djiwa dalam pertempuran Kenali Asam ini terdiri dari:

Buruh 50 orang dan T.N.I. 20 orang. Seorang Letnan T.N.I., R. Mansoer, sebagai kepala bahagian perusak (vernielingscorps), sungguhpun tentera pajung telah mendarat, masih berani djuga membakar sendiri beberapa sumber minjak. Rombongannja tertangkap dan tertawan semuanya oleh Belanda pada tanggal 1 Djanuari 1949. Sudarsono Kepala Tambang Minjak djuga tertangkap pada 1 Djanuari 1949 itu, dan mendjalankan tawanan di Djambi dan di Palembang sampai tanggal 22 Desember 1949.

Pada tanggal 31 Desember 1948 djalan 1 Djanuari 1949 djam 20.00 Residen R. Inu Kertapati beserta stafnja dan Dewan Pemerintahan Daerah jang berada di Rantau Madjo, mengadakan rapat dan sidang permusjawaratan. Setelah bertukar pikiran dan soal djawab terdapatlah kesimpulan:

1. Meneruskan perdjalanan dengan motor R.I. 120, tidak mungkin lagi, karena berita-berita jang tersiar bahwa Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko dan Sarolangun, telah diduduki oleh Belanda serempak dengan djatuhnja kota Djambi.
2. Diteruskan dengan perahupun tidak bisa.
3. Dengan auto pun tidak ada kemungkinan.
4. Kembali kekota Djambi, berarti menjerah kepada musuh, dan tertangkap bulat-bulat.

5. Akan tinggal sadja ditempat itu, pasti tertangkap djuga oleh musuh.
6. Satu-satunja djalan sekarang ialah djalan kaki menudju Marlung.
7. Dari Marlung nanti perdjalananan boleh diteruskan kemana sadja, sebab dari sana ada djalan (djalan kiri) ke Inderagiri, atau ke Kuala Tungkal.
8. Dari Rengat ada kesempatan untuk menggabungkan diri dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia jang tempatnja sekarang tidak diketahui, tjuma sadja ada di Daerah Sumatera Barat.
9. Dari Kuala Tungkal mungkin ada kesempatan untuk pergi keluar negeri, misalnja ke Singapura, disana ada Consol Republik Indonesia, Mr. Utoyo.
10. Pemerintah Daerah Djambi, tidak boleh tertangkap oleh musuh. Pemerintah akan pergi kemana sadja dan dimana sadja ada tanah Republik.
11. Jang akan pergi membawa suara Pemerintah Daerah Djambi itu ialah:
 - a. Bupati Djambi Ilir, R. Kamil.
 - b. Komisaris Polisi Noeskam, sebagai pembantu.
 - c. A. Sjarnubi Ketua Muda D.P.R. sebagai Sekretaris.
12. Residen R. Inu Kertapati akan kembali kekota Djambi untuk mengurus rumah tangga dan anak isterinja, sebab menurut keterangan jang diterima dari Said Abu Bakar, — berita jang dibawa oleh kurier tanggal 30-12-1948, — seorang anak Residen meninggal dalam keributan malam tanggal 29/30 Desember 1948. Isterinja luka, dan anaknja jang ketjil pun luka pula.
13. Residen tidak akan bekerdja sama dengan Belanda, dan tidak akan menanda tangani surat-surat penjerahan apa-apa kepada musuh, sebab jang berhak berbuat demikian hanjalah Gubernur Sumatera Tengah (Mr. Nasroen), karena sedjak tanggal 1 Desember 1948, Residen Djambi telah didjadikan Residen jang diperbantukan kepada Gubernur Sumatera Tengah.
14. Maka diperbuatlah surat kuasa untuk dibawa oleh tiga orang jang tersebut dalam keputusan No. 11 diatas sebanyak empat lembar, masing-masing memegang satu lembar, dan jang satu lembar lagi untuk archief Keresidenan Djambi. Surat kuasa itu berbunji sebagai jang tersebut dibawah ini:

SURAT KUASA.

Diberi kuasa pada M. Kamil Bupati Djambi Ilir untuk mewakili saja didalam Daerah Republik Indonesia.

Padanja diperbantukan Noeskam, Komisaris II Polisi, dan Sjarnubi, Ketua Muda D.P.R. sebagai Wakil Sekretaris.

Sengeti tgl. 1 Djanuari 1949.

Residen jang diperbantukan pada Gubernur
Sumatera Tengah
tertanda

RADEN INU KERTAPATI.

Setempel Keresidenan.

Selesai rapat dan permusjawaratan tersebut, Bupati Diambi Ilir, M. Kamil (R. Kamil) beserta A. Sjarnubi Ketua Muda D.P.R. Noeskam Komisaris Polisi dan beberapa orang temannja, bersiap untuk meneruskan perdjalanan menudju Muara Tebo.

Sedang Residen R. Inu Kertapati beserta beberapa orang pengikutnja, kembali kekota Djambi dengan mempergunakan perahu.

Sidang Pemerintahan di Muara Tebo.

Dalam bulan Djanuari 1949, di Muara Tebo diadakan rapat kilat untuk membitjarakan pengangkatan Bachsan sebagai Residen R.I. Daerah Djambi, menggantikan Residen R. Inu Kertapati. Jang hadir dalam rapat itu antara lain:

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Bachsan | : Residen. |
| 2. Abundjani | : Letnan Kolonel. |
| 3. Achmad Bastari | : Kepala Polisi Keresidenan. |
| 4. A. Sjarnubi | : Dewan Pertahanan Daerah. |
| 5. M. Kamil | : Bupati. |
| 6. Hasjim | : Letnan. |
| 7. Noeskam | : Komisaris Polisi. |

Pengangkatan Bachsan sebagai Residen itu, dimaksudkan untuk menghadapkan Belanda kepada suatu kenyataan, bahwa pusat Pemerintah R.I. Daerah Djambi, masih tetap ada. Pemerintahan diatur dengan dibagi-bagi rombongannja, apabila satu rombongan terangkap maka jang lain bisa meneruskan kewadjabannja. Daerah Pemerintah dibagi tiga:

a. Muara Tebo, dengan susunan Pemerintahnja:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Residen | Bachsan. |
| 2. Komisaris Polisi | : Achmad Bastari. |
| 3. Anggota Dewan Per-
tahanan Daerah | : A. Sjarnubi. |
| 4. Letnan T.N.I. | : Hasjim. |
| 5. Inspecteur Polisi | : Noeskam. |

b. Bangko, dengan susunan Pemerintahnja:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Bupati | : M. Kamil (R. Kamil). |
| 2. Letnan Kolonel (Ko-
mandan S.T.D.) | : Abundjani. |
| 3. Inspektur Polisi | : Darwis. |
| 4. Wedana | : M. Keras — d.l.l. |

c. Kuala Tungkal, dengan susunan Pemerintahnja:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Wedana | : Nurdin. |
| 2. Major | : Zainul Rifai. |
| 3. Inspektur Polisi | : Mahjuddin — d.l.l. |

Dengan ketetapan P.D.R.I. yang ditanda tangani oleh Sjafruddin Prawiranegara, No. 3/UP/PDRI tanggal 20 Pebruari 1949, diangkatlah Bachsan sebagai Residen Daerah Djambi. Ketetapan ini datangnja dengan perantaraan radio tentera (T.N.I.) di Muara Siau Bangko.

Perdjuangan Rakjat Kuala Tungkal.

Tgl. 2 Pebruari 1949: salah satu perdjuangan rakjat melawan Belanda, yang terhebat di Daerah Djambi, adalah perdjuangan rakjat Kuala Tungkal. Satu organisasi rakjat yang bernama Selempang Merah mempunyai 3000 anggota yang dipimpin oleh 1 Bataljon T.N.I.

Penekan ini memperlihatkan keuletan mereka menghadapi penjerbuan tentera Belanda. „Selempang Merah” diketuai oleh H. Saman dan Komandan Bataljon T.N.I. adalah Kapten Rivai. Front yang terbesar di Kuala Tungkal, jaitu Tungkal Ilir, mendjadi sasaran penjerbuan Belanda. Pimpinan pertempuran di Tungkal Ilir ini dipegang oleh Letnan Abd. Fatah. Selama pertempuran, telah gugur dari pihak „Selempang Merah” 300 orang, dan dari pihak Belanda tewas 40 orang. Banjak rumah-rumah rakjat dihantjur dan dibakar Belanda, sedjumlah 400 buah. Organisasi „Selempang Merah” ini, sekarang telah dilebur mendjadi satu organisasi yang bernama „Pantjasila”, berpusat di Djatinegara Djakarta.

Kedudukan Residen pindah dari Muara Tebo.

Pada bulan Maret 1949, utusan-utusan dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia tiba ke Muara Tebo. Mereka mengandjurkan supaya Residen beserta stafnja pindah ke Muara Bungo. Utusan P.D. R.I. itu terdiri dari: 1. Mr. Lukman Hakim, 2. Ir. Indera Tjahaja, 3. Mr. Karim, 4. Dan lain-lain. Dari Muara Tebo mereka mengadakan rapat umum di Muara Bungo, dan dari sini pulang kepangkalan dengan melalui Tanah Tumbuh.

Di Muara Bungopun dibentuklah staf jang kuat jang dapat menghadapi segala kemungkinan. Kedudukan Residen beserta staf pindahlah dari Muara Tebo ke Muara Bungo.

Pertjetakan Uang Urips.

Pada permulaan April 1949, diselenggarakanlah pemasangan mesin tjetak untuk mentjetak uang „Urips” (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera), jaitu sebagian dari sisa-sisa mesin Pertjetakan Negara di Djambi jang dapat disingkirkan lebih dahulu. Negara dalam mempertahankan kemerdekaannya dari serangan-serangan Belanda sangat memerlukan keuangan.

Pertjetakan ini didirikan di „Pulau Pekan”, satu dusun jang djauhnya $\pm 3\frac{1}{2}$ Km dari Muara Bungo, mempunjai pegawai 12 orang jang dikepalai oleh H. B. Yahya.

Alat-alat jang ada untuk keperluan mentjetak Urips itu, ialah:

1. Mesin tjetak besar, 5 peti huruf-huruf ukuran $40 \times 15, 5 \times 11$ Cm.
2. Motor Chevrolet model 1943 No. 4015838 untuk mendjalankan mesin tjetak tersebut.
1. Mesin charge (hulpagegraat 4 tact merk Norman No. 403 dari 1,75 P.K. model 1940.
1. Homelight 4 tact nomor 63536.
1. Motor Chevrolet No. Tr. 513088 model 1941.
1. Alat pemotong kertas, 235 liter tinta hitam dll.

Instruksi-instruksi jang datang dari P.D.R.I. mengenai pertjetakan dan pembikinan uang itu, sebagai berikut disalinkan:

Code

Zender djangan melalui Bangko, D.P.D. Djambi — No. 273/pdri tanggal 18/3-'49. Minta dichabarkan tentang pertjetakan, dan kapan dapat mulai djalan. Nummerrator sedang diambil dari satu tempat nanti akan diteruskan ke Djambi. Sebelum nummerrator datang, seperti telah dibitjarakan, pakailah tjara lain. Pengeluaran uang dari pertjetakan perlu sekali dihematkan, sedapat-

dapatnja perbelandjaan Negara dibayar dengan tjara lain. Minta kawatkan berapa pengeluaran Daerah Djambi tiap-tiap bulan dengan disebutkan posten jang penting-penting. pdri, keuangan Mr. L. Hakim.

Instruksi lain:

phb sector 1012 No. 012 4/4 10.00
Ketua D.P.D. Djambi No. 360/ku/pdri tanggal 4/4. Skwt ptn tgl 25/3-'49 No. 182/rag/49 dan surat ptn tgl 21/3-49 No. 1/rah, diberitahukan sebagai berikut: 1. Warna hitam diperbolehkan untuk sementara waktu, harap usahakan printing ink lain dari daerah pendudukan. 2. Ukuran uang ditetapkan oleh D.P.D. 3. Sebelum sedia nummerator, diperkenankan dengan tjara lain. 4. Beredar untuk seluruh Sumatera, karena itu harap diberi tahu: a. ukuran, b. tanda lain, c tanda tangan Gubernur Sumatera; tjontoh perlu dikirim.

Tambahan instruksi:

Kantor kawat Muara Bungo No. 013 5/4 21 sambungan No. 360/ku/Pdri. 5 Produksi harap diopvoeren. 6. untuk pertama kali diperkenankan mentjetak a Rp. 25. nominal r lima djuta. b. R. 50. nominal r tudjuh djuta lima ratus ribu. C. R. 100. nominal r dua belas djuta lima ratus ribu. d. dapat dimulai mentjetak dari R. 100.dulu 7. Sementara harap sedia-kan dalam bulan ini untuk keperluan daerah-daerah lain jang akan kami tentukan lebih djauh, r dua djuta lima ratus ribu, tentu mengingat productie. Harap tentang ini minta kabar, djuga anggaran pengeluaran daerah Djambi untuk bulan ini dan bulan-bulan jang akan datang.
pdri keuangan Mr. L. Hakim.

Sampai pada tanggal 25 Mai 1949 dengan didudukinja Muara Tebo oleh tentera Belanda, Pertjetakan Urips ini dipindahkan ke Tanah Tumbuh, dan dari sini dipindahkan pula ke Tandjung Belit, Rantau Ikil. Semua alat-alat keperluan pertjetakan diangkat kesana. Djumlah uang jang beredar selama Pertjetakan Urips berdjalan R. 42.750.000.

Bangko diserang dari udara.

Semendjak Djambi diduduki oleh Belanda, kota Bangko mulai dibandjiri T.N.I. jang mengundurkan diri dari Djambi. Bangko didjadikan tempat kedudukan Komandan S.T.D. Abundjani, beserta stafnja. Dibentuklah badan Komando Pertempuran (K.O.D.M.) jaitu Komando Onder District Militer, begitupun di Muara Bungo dan Muara Tebo.

Pada tanggal 8 Pebruari 1949 djam 15.00, kota Bangko tiba tiba diserang dari udara oleh kapal terbang Belanda 1½ djam.

Dengan tidak bertudjuan, Belanda menembak setjara membabit, seperti kantor-kantor dan gudang P.U., Rumah Sakit, Rumah Sekolah Rakjat, Rumah Sekolah Tionghoa dan 2 buah auto vracht. Komandan S.T.D. Abundjani, Bupati M. Kamil dan Kepala Komandan Kewedanaan Bangko A. Laman, ketigatiganya sedang berada pada satu tempat dalam kota Bangko. Utusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia djuga datang di Bangko sepuluh hari kemudian, guna memeriksa bekas-bekas jang mendjadi sasaran peluru musuh itu.

Setelah terdjadi penjerangan kota Bangko ini, maka Komandan S.T.D. Lt. Kolonel Abundjani beserta stafnja, memindahkan Markasnja ke Muara Siau $\pm$ 30 Km dari Bangko. Wedana A. Laman Kepala Pemerintah Bangko pindah ke Muara Bungo.

2 Maret 1949, terdjadilah pertempuran jang hebat antara tentera Indonesia (T.N.I.) dengan tentera Belanda disekitar Pauh, Mandiingin, Durian Luntjuk dan Sarolangun. Tentera Nasional Indonesia dipimpin sendiri oleh Komandan S.T.D. Let Kolonel Abundjani, dan dari pihak tentera Belanda dibawah pimpinan Major Slamet. Pertempuran jang sengit djuga terdjadi di Pamenang, Sungai Ulak dan Dusun Baru, hingga sampai ke Sekantjing. T.N.I. kelihatan bersemangat wadja, tabah dan kuat menghadapi tentera Belanda jang tjukup perkakasnja itu. Rakjat pun mengerahkan tenaga, djiwa dan raganja menghadapi serangan Belanda dan membantu dengan sepenuhnya kepada Tentera Nasional Indonesia. Selama pertempuran tersebut berdjalan dengan hebatnja, Gubernur Sumatera Selatan Dr. M. Isa dan Kolonel Simbolon Panglima Tentara Sumatera Selatan turut mempersaksikannja. Banjak pula T.N.I. dari Sumatera Selatan jang datang kebukit barisan di sekitar Merangin itu.

Pemerintah Sumatera Selatan di Muara Bangko.

19 Mei 1949, rombongan Pemerintahan dari Sumatera Selatan mengundjungi Muara Bungo, Rombongan terdiri dari:

1. Panglima Tentera Sumatera Selatan, Kolonel Simbolon.
2. Wk. Gubernur Militer/Gubernur Sum. Selatan, Dr. M. Isa.
3. Komisaris Polisi Sumatera Selatan, Hasan.
4. dll.

Disini diadakan rapat dan permusjawaratan beberapa kali mengenai soal pemerintahan dan pertahanan Negara.

Djuga diadakan rapat lengkap dengan anggota-anggota Pemerintah Daerah Djambi, Residen, Komisaris Polisi, Dewan Pertahanan, Pemimpin-pemimpin Rakjat, Pemimpin-pemimpin Party dan Organisasi, Alim Ulama, Kepala-kepala Marga dan Pemimpin-pemimpin Angkatan Muda, bertempat digedung Sekolah Islam di Talang Pantai, 2 Km dari Muara Bungo.

Tgl. 27 Mei 1949, setelah beberapa hari di Muara Bungo, rombongan bermaksud hendak mengundjungi Muara Tebo. Bersama-sama Residen beserta stafnja dan beberapa orang dari instansi Pemerintahan, rombonganpun berangkat ke Muara Tebo, dan di Muara Tebo sengadja akan mengadakan Rapat Umum. Tetapi baru sadja rapat umum dimulai, datang satu laporan jang mengemparkan dari tentera pengawal diperairan Batang Hari, mengatakan bahwa, Belanda madju menudju Muara Tebo dengan segala kelengkapannja, dengan memakai motorboot. Djaraknja dengan Muara Tebo sudah terlalu dekat sekali.

Memanglah benar laporan itu. Tidak berapa lama sesudah itu, kedengaranlah bunji motorboot jang didjalankan dengan ladjunja. Dan sebentar bunji itu hilang dan berhenti. Ternjatalah, bahwa Belanda akan menjerbu kota Muara Tebo dengan tiba-tiba. Rapat Umum bubar seketika itu djuga. Pada djam 17.00, Pemerintah beserta stafnja dan rombongan Sumatera Selatan, kembali ke Muara Bungo dengan auto. Tentera dan badan-badan perdjjuangan mengatur pertahanan sedapat mungkin sadja, dan bumi hangus didjalankan dibeberapa tempat, tetapi achirnja Belanda menduduki Muara Tebo djuga.

Pemerintah telah berkumpul di Muara Bungo. Sidang kilat diadakan, merantjang dan menjusun tindakan apa jang mesti dilakukan. Djarak antara Muara Tebo dan Muara Bungo 40 Km. Pada malam tersebut, Wk. Gubernur Militer Sumatera Selatan Dr. M. Isa, Kolonel Simbolon dan Letnan Kolonel Abundjani beserta kawan kawannja meneruskan perdjjalanan menudju Bangko, setelah mengambil beberapa keputusan dalam sidang kilat di Pasenggrehan Muara Bungo untuk jang akan dikerdjakan oleh Badan-badan Pemerintahan, Badan-badan Pertahanan dan Badan-badan Perdjjuangan jang akan tinggal melakukan gerakan-gerakannja disepandjang sungai dan hutan dalam daerah kewedanaan Muara Bungo. Bumi hangus dilakukan. Apipun bernjala-njala keudara dengan tingginja. Tjahaja api jang terang benderang dan mendjilat dengan tingginja itu kelihatan dari djarak jang djauh sekali. Pun musuh di Muara Tebo melihat terang tjuatja dilangit dan awan jang merah.

Keesokan harinja, Residen Bachsan bersama dengan stafnja pindah ke Tanah Tumbuh. Segala sesuatu jang berupa alat-alat pemerintahan disingkirkan. Hanja Wedana A. Laman sebagai Kepala Pemerintahan, sementara masih tetap di kota Muara Bungo dan berkantor dipinggir kota. Ketika kota Djambi diduduki Belanda, di Muara Bungo dibentuk Badan Penjelidik, disamping Badan Penggempur dan Pedjuang. Permulaan pembentuk Badan Penjelidik ini, adalah Letnan Abdulhadi dari T.N.I. jang anggota-anggotanja terdiri dari pemuda-pemuda Muara Bungo.

Kemudian disempurnakan susunannja oleh Letnan Nawawi dari security Tentara.

Badan-badan ini tambah diperkuat lagi dan diperlengkapi semen-
djak Muara Tebo diduduki oleh Belanda.

Badan Perjuangan dijadikan Pasukan Pemuda Gerilja jang
kemudian bernama „Pemuda Gerilja” sadja; Staf Pertempuran
Geriljapun dibentuk jang dengan singkatnja S.P.G. 5 Djuni
1949, Pasukan Pemuda Gerilja Muara Bungo menjusun staf Pim-
pinannja jang pertama kali, sebagai berikut:

1. Ketua : Muhd. Jusuf Manti.
2. Urusan makanan : Ambun Sani.
3. Persendjataan : Juliar Bj. Atjik.
4. Penasehat : 1. Jacob Manti
2. Ahmad Basjaruddin.
5. Anggota-anggota : Anggota permulaan berdjumlah
13 orang.

Pada tanggal 7 Djuni 1949 oleh Dewan Pertahanan Daerah
Djambi jang berkedudukan di Tanah Tumbuh, diberikan
bantuan kepada Pasukan Pemuda Gerilja.

Oleh Kom. Sektor 101/F.U./STD jaitu Acting Let. Muda
Adnan diperintahkan kepada Letnan Muda Nursaga untuk mem-
beri pimpinan dan bimbingan kepada Pasukan Pemuda Gerilja ini.
Rapat Umum jang pertama kali diadakan oleh Pasukan Pemuda
Gerilja, jaitu pada tanggal 15 djalat 16 Djuni 1949 di Muara
Bungo.

Patroli-patroli bersendjata, baik melalui djalat air ataupun
melalui djalat hutan, berturut-turut diadakan oleh Pasukan sampai
keperbatasan Muara Tebo, jaitu Sungai Alai dari darat dan
Muara Sungai Alai dari pihak air. Perang „tempe! pamflet” silih
berganti antara Pasukan Pemuda Gerilja dengan Gajah Merah
dan Knil dari tentera Belanda diperbatasan itu. Tanggal 5 Djuli
1949, Kampung Baru, satu dusun ketjil tidak djauh dari Muara
Sungai Alai, dimasuki Belanda pula. Pertempuran terdjadi di Muara
Pelepat didusun Kampung Baru tersebut.

Tgl. 23 Djuli 1949 pertempuran di Pebeko, 17 Km dari Muara
Bungo. Pagi-pagi waktu subuh Pebeko digempur oleh tentera
Belanda. Hampir sadja Pasukan Pemuda Gerilja terkepung.

Pada hari pertempuran Pebeko itu djuga, tentera Belanda mene-
ruskan gerakannja menudju kota Muara Bungo. Demikian maka
kira-kira djam 14, Belanda menjerbu kota Muara Bungo dan men-
dudukinja. Tentera Staf Pertempuran Gerilja mundur ke Talang
Pantai, 2 Km dari kota. Beberapa djam kemudian menjusul pula
Pasukan Pemuda. Kepala Pemerintahan Kewedanaan Muara Bungo
A. Laman, memindahkan kedudukannja ke Bedaro, ketjamatan
Rantau Pandan.

Di Talang Pantailah semua Staf Pertempuran dan Pasukan Pamuda Grillja, berembuk dan bermusjawarat pada malam 23 djalan 24 Djuli 1949.

Susunan tenaga perdjuaan diatur dan diperbaharui kembali. Front pertahanan dibagi dua: pertama: Front „Batang Bungo“, dengan susunan pasukannya dinamakan „Pasukan Batang Bungo“, singkatnja „Pasukan B.B.“, Kepala Pasukan: H. B. Yahya. Komandan front dipegang oleh sdr. Mohd. Nur Letnan K.N.I. Kedua: Front „Batang Tebo“ dengan susunan pasukannya, dinamakan „Pasukan Batang Tebo“, singkatnja „Pasukan B.T.“. Kepala pasukan: Daud Letnan T.N.I. Komandan front dipegang oleh Husin Saad Letnan T.N.I. djuga. Untuk memimpin kelantjaran djalan siasat dan penjelidikan disamping tugas keamanan, turut serta dalam Pasukan B.B. Inspektur Polisi Ramli dan Pembantu Inspektur Polisi Basjaruddin, sedang dalam Pasukan B.T. turut serta Inspektur Polisi kl. I sdr. Sabirin.

Pusat Pemerintahan Daerah Djambi jang berkedudukan di Tanah Tumbuh, pindah ke Rantau Ikil dan kemudian ke Tandjung Balit. Kepindahan ini dilakukan oleh Residen Bachsan bersama keluarga dan Komisaris Polisi Daerah Djambi Ahmad Bastari, Dewan Pertahanan Daerah/Ketua Muda D.P.R. Ahmad Sjarnubi beserta staf jang diperlukan. Begitu pula Pegawai-pegawai Registratie Keuangan jang dikepalai oleh Ibrahim Yahya dengan beberapa orang Pegawai dari Pertjetakan semuanya berpusat di Tandjung Balit.

Residen selalu diikuti oleh seorang Dokter jaitu Dokter Amir Husin. Dalam beberapa dusun berdjangkit penjakit pokken (tjatjar), djuga dalam bahagian Kabupaten Sawah Lunto, jang banyak meminta korban. Dengan pertolongan Dr. Amir Husin dapatlah penjakit itu diberantas. Sdr. H. Nawawie dari dusun Rantau Ikil ditugaskan menjadi kurier antara daerah Republik dan daerah pendudukan. Maka dengan kebidjaksanaannya dapatlah dia membawa sebuah radio dari daerah pendudukan. „Ibu Residen Bachsan, Rangkajo Sitti Emas, bersama-sama dengan Ketua Perwari Chadidjah, berusaha keras dengan penuh semangat menjenggarakan segala sesuatu keperluan Pasukan-pasukan Gerilja dan Badan-badan Perdjuaan. Bermatjam-matjam makanan jang tahan lama, dengan kegiatan kedua Pemimpin Wanita tersebut, dapatlah dikirimkan ketempat-tempat pertempuran gerilja dan kefront.

Penjerbuan Pasukan Gerilja B.B. kekota Muara Bungo.

Dua hari sesudah Belanda menduduki Muara Bungo, maka pada malam 25/26 Djuli 1949, Pasukan Gerilja B.B. bergerak menudju kota Muara Bungo. Djam 12 malam kota itu dimasuki dari dua djurusan. Tepat pada djam 2.00 perbentengan Belanda digempur

dari jarak 80 meter. Tembak-menembak terjdadi dengan sengitnja selama satu djam.

Front pasukan B.B. adalah disekitar Talang Pantai, Sungai Arang, Tambang Tjutjur, Mangun Djojo, Tandjung Agung, Dusun Tebat dan Bedaro. Penekan mempunyai perhubungan kurier dengan Wk. Kepala S.T.D. di Tanah Tumbuh dan Pusat Pemerintahan di Tandjung Balit. Perhubungan lain dengan Pasukan Gerilja B.T. jang berfront disekitar Teluk Pandak, Empelu, Sungai Mantjur dan Lubuk Landai.

Sebagai tali perhubungan jang akrab diantara anggota-anggota pasukan Gerilja B.B. dengan rakjat, Kepala Pasukan B.B. mengadakan perdjamaan untuk bersama dengan menjembelih kerbau di Tandjung Agung atas nama Allah.

T.B.A. (Belanda) di Muara Bungo.

Tgl. 2 Oktober 1949, rombongan dari T.B.A. Djambi datang ke Muara Bungo dikepalai oleh Assisten Residen C.C. Hartman untuk mengadakan penindjauan.

Tgl. 24 Oktober 1949, rombongan jang kedua kali dari T.B.A. Djambi mengadakan lagi penindjauan ke Muara Bungo. Rombongan terdiri dari 8 orang Indonesia jang pro Belanda.

Perundingan-perundingan antara Pemerintah R.I. dan Belanda.

Pada tanggal 11 Oktober 1949, P.M.C. Belanda di Muara Bungo mengirim seputjuk surat kepada Pemerintah R.I. jang isinja mengatakan, bahwa gentjatan sendjata telah berlaku. Oleh Pemerintah R.I. dikirim 2 orang kurier untuk menjelaskan lagi soal gentjatan sendjata itu. Kurier membawa balasan, bahwa perundingan-perundingan akan diadakan di Air Gemuruh, 12 Oktober 1949, djam 9.00 tepat, utusan-utusan dari Pemerintah R.I. berangkat ketempat perundingan di Air Gemuruh itu. Para utusan ini terdiri dari:

1. Letnan I: Daud.
2. Letnan II: Suhaimi.
3. Pembantu Letnan: Husin Saad.

Rombongan T.B.A. Muara Bungo dikepalai oleh P.M.C. Vrachter. Djam 10.00 perundingan dimulai. Perundingan berpokok pada soal menghilangkan rasa permusuhan berdasarkan adanya cease fire, dan tentang daerah patrolie. Perundingan berdjalan dengan aman, dan sorenja djam 15.30 kedua belah pihak kembali ketempat.

Tgl. 7 Nopember 1949, perundingan diadakan antara Pemerintah R.I. dan T.B.A. di Muara Bungo, Pemerintah R.I. hadir:

1. Residen R.I. Bachsan.

2. Dewan Pertahanan Daerah/Ketua Muda D.P.R. Daerah Djambi A. Sjarnubi.
3. Komandan Polisi R.I. A Bastari.
4. Inspektur Polisi R.I. Sabirin.
5. Sekretaris Keresidenan Machmoed.
6. Wk. S.T.D. pada D.P.D. Opsir T.N.I. Suhaimi.
7. Komandan Bataljon „Tjindur Mato” Letnan I. M. Hasjim.

Dari Pemerintah T.B.A. hadir:

1. Assisten Residen t/b J. B. Schendel.
2. Komandan tentera dari Muara Tembesi, Kooi,
3. Demang Muara Bungo.
4. Kepala Polisi Muara Bungo Harling.
5. PMC Muara Bungo, Pattiwael.

Perundingan berdjalan dengan lantjar. Pada keesokan harinja Pemerintah R.I. beserta Pembesar-pembesar R.I. lainnja kembali untuk beristirahat di Teluk Pandak.

Pada tanggal 10 Desember 1949, wedana A. Laman Kepala Pemerintah Kewedanaan Muara Bungo jang masih berada di Bedaro, diperintahkan berangkat kekota Muara Bungo, untuk menerima penjerahan kota dari tangan Pemerintah T.B.A.

Dipermulaan Desember 1949 ini djuga, Residen Bachsan beserta Komandan S.T.D. Daerah Djambi, mengadakan perundingan lagi dengan Belanda di Muara Tembesi, dan dari sini terus masuk kekota Djambi.

Tgl. 11 Desember 1949 djam 16.00 di Kantor Pemerintah Muara Bungo dilaksanakanlah penanda tanganan proses verbaal timbang terima penjerahan kota Muara Bungo dari T.B.A. kepada Pemerintah R.I. dihadapan Kapten UNCI. Semua pembesar-besar Belanda dan tenteranja meninggalkan kota Muara Bungo.

Pada djam 17, setelah selesainja penanda tanganan itu, Pasukan-pasukan T.N.I. dengan barisan dan persendjataannja masuk kedalam kota.

Penjerahan Kota-kota ke R.I.

Setelah melalui perundingan-perundingan maka diaturlah penjerahan kota-kota jang tadinja dibawah kekuasaan T.B.A. kepada Pemerintah R.I. sebagai berikut:

1. Kewedanaan Muara Bungo, antara Pemerintahan T.B.A. Wedana M. Hassan dengan Pemerintahan R.I. Wedana A. Laman, pada tanggal 11 Desember 1949.
2. Kewedanaan Tungkal, antara Pemerintahan T.B.A. Wedana Ishak dengan Pemerintahan R.I. Wedana Nurdin pada tanggal 15 Desember 1949.

3. Kewedanaan Sarolangun, antara Pemerintah T.B.A. As. Residen J. B. Van Schendel dengan Pemerintah R.I. Wedana Machmoed pada tanggal 18 Desember 1949.

4. Kewedanaan Muara Tebo antara Pemerintah T.B.A. Wedana R. H. Saman dengan Pemerintah R.I. Wedana Abd. Manap pada tanggal 18 Desember 1949.

5. Kewedanaan Muara Tembesi antara Pemerintahan T.B.A. Wedana Zainul Bahri St. Pesisir Barat dengan Pemerintah R.I. Wedana Raden Ateng pada tanggal 19 Desember 1949.

6. Kewedanaan Djambi antara Pemerintahan T.B.A. Wedana Kgs. M. Amin dengan Pemerintahan R.I. Wedana Nurdin pada tanggal 20 Desember 1949.

7. Penjerahan seluruh daerah Djambi dari Pemerintahan Belanda kepada Pemerintahan R.I. antara Residen T.B.A. D.J.A. Van der Vliet dengan Residen R.I. Bachsan pada tanggal 27 Desember 1949.

8. Kewedanaan Bangko antara Pemerintahan T.B.A. Wedana Abd. Hamid dengan Pemerintahan R.I. Wedana M. Keras pada tanggal 31 Djanuari 1950. Semua penjerahan-penjerahan tersebut dilaksanakan dihadapan Kapten Bossuyt wakil dari UNCI.

BAB I

BAHAGIAN III

PERKEMBANGAN AZAS-AZAS DEMOKRASI

Pasal 8

PEMERINTAHAN SUMATERA TENGAH SESUDAH PEMULIHAN.

Kembali ke Bukittinggi.

SESUDAH hampir setahun lamanya mengalami berbagai udjian yang sangat berat, achirnja Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dipulihkan kembali ketempat dari mana ia telah berhidjah (mengungsi).

Masa-masa yang dilalui semendjak tanggal 19 Desember 1948 sampai tanggal 7 Desember 1949, merupakan saat-saat bersedjarah yang amat banjak meminta tenaga dan perhatian didalam melantjarkan pemerintahan diseluruh daerah Sum. Tengah, seperti djuga dengan apa yang diminta oleh daerah-daerah lainnja diseluruh kepulauan Indonesia, terutama daerah-daerah yang dengan sebulat dan seponuh tenaganya menghadapi berbagai perlawanan dan perjuangan dengan tentera Keradjaan Belanda.

Pemindahan/pengungsian alat-alat dan badan-badan Pemerintahan Propinsi Sum. Tengah dari kota Bukittinggi yang berlangsung pada tanggal 21 Desember 1948 karena menghadapi clash ke-II, berachir pada bulan itu pula dalam tahun berikutnya (1949), jaitu pada tanggal 7 Desember. Kaki-kaki bukit dan lembah-lembah yang hampir setahun penuh itu dipakai sebagai sumber dari mana alat-alat pemerintahan itu digerakkan, mulai tanggal 7 Desember 1949 harus ditinggalkan kembali, biarpun dengan berangsur-angsur.

Dalam rangkaian sedjarah pemulihan Pemerintahan Propinsi Sum. Tengah kekota Bukittinggi ini, haruslah pula ditjatat beberapa peristiwa yang erat hubungannja dengan pemulihan tsb.

Terbukanja kesempatan untuk memasuki kota Bukittinggi bagi alat-alat pemerintahan, oleh sebahagian djawatan-djawatan dan instansi-instansi diterima dengan hati yang agak „berat” karena iklim „darurat” sudah mendjadi sesuatu yang biasa mereka alami. Meskipun dengan rasa yang agak berat, „kembali ke Bukittinggi” haruslah segera dimulai karena di Bukittinggi akan dibuka phase baru untuk perkembangan sedjarah selandjutnja nanti. Langkah menudju ke Bukittinggi (ibu tempat propinsi Sum. Tengah) ini dibuka oleh sebahagian diantara pegawai-pegawai Djawatan

Penerangan Gub. Militer Propinsi Sum. Tengah jang pada waktu itu mendapat tugas istimewa dalam menghadapi perkembangan suasana selandjutnja.

Tapi, sebelum perkembangan-perkembangan itu kita bitjarakan, baiklah lebih dahulu kita menelapaki peristiwa-peristiwa jang terdjadi sebelum „kembali ke Bukittinggi” ini dilakukan.

Pembentukan C.J.B. dan L.J.C.

„Cease Fire Order” jang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1949, di Pusat Pemerintahan seluruh Indonesia, sudah menelurkan terbentuknja suatu badan jang dinamai Central Joint Board jang bertugas untuk merundingkan dan memusyawaratkan tjara pelaksanaan penjerahan kedaulatan selandjutnja nanti.

Sesuai dengan pembentukan C.J.B. di Pusat, maka didaerah-daerah dibentuk Local Joint Committee (L.J.C.), badan jang diketuai oleh salah seorang anggota UNCI dan anggotanja terdiri dari wakil-wakil Pemerintah R.I. setempat dan wakil-wakil Pemerintah Militer Belanda setempat pula.

Pembentukan L.J.C. didaerah Propinsi Sumatera Tengah dilakukan tidak berapa lama sesudah terbentuknja C.J.B. di Pusat, dan pada tanggal 23 Agustus 1949 dikota Bukittinggi rapatnja jang pertama sudah dapat dilangsungkan.

Saudara Mr. St. Moh. Rasjid jang pada saat itu bertugas selaku Gubernur Militer Sum. Tengah, djuga ditundjuk sebagai ketua delegasi pihak Pemerintah R.I. Sum. Tengah. Karena mandatnja memperoleh rasa saling mengerti dan besarnya pertentangan pendapat dan pendirian kedua belah pihak selama sidang-sidang L.J.C. jang diadakan di Bukittinggi itu, maka keadaan darurat di Sum. Tengah harus berdjalan lebih lama.

Tidak sadja usaha L.J.C. dipusat propinsi jang kerap menghadapi djalan buntu, tapi djuga usaha-usahanja didaerah (kabupaten-kabupaten) djuga kerap „dead lock”. Pokok-pokok perselisihan paham dan pendapat antara kedua delegasi pada saat itu, terutama berkisar disekeliling penentuan „daerah patroli” bagi angkatan bersendjata kedua belah pihak. Tidak diakuinja beberapa buah pos-pos tentera Belanda sebagai daerah dibawah tilikannja oleh pihak tentera gerilja Republik Indonesia, menyebabkan tentera Belanda ini djuga tidak mau mengakui adanya daerah patroli gerilja atas daerah dimana sekian lama tentera Belanda harus menghadapi perlawanan jang sengit.

Dan selain itu, beberapa masalah lain jang dipandang sebagai soal pokok dalam melaksanakan „perdamaian” antara kedua belah pihak, djuga banjak jang menemui djalan buntu. Karena demikian, maka pertemuan-pertemuan jang dilangsungkan oleh L.J.C. di

Bukittinggi pada bulan Agustus dan September 1949 tidaklah menelurkan suatu putusan yang dapat dipegang.

Masalah-masalah yang dibicarakan harus dimintakan pertimbangan dan putusan-putusan dari C.J.B. lebih dahulu. C.J.B.-lah yang akan menetapkan dan menundukkan pasal-pasal yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dalam pada itu Mr. St. M. Rasjid berangkat ke Djakarta untuk menjadi anggota delegasi Indonesia dalam C.J.B. dan kedudukannya digantikan oleh Mr. M. Nasrun.

Dalam suatu pertemuan istimewa L.J.C. yang diadakan di Padang pada tanggal 12 Nopember 1949 antara delegasi tentera Belanda yang dikepalai oleh Kolonel Van Erp, dan delegasi Republik Indonesia yang dikepalai oleh Gubernur Militer Mr. M. Nasrun didapat persetujuan sebagai dibawah ini:

Sebelum semua tentera Belanda ditarik dari tempat-tempat yang didudukinya semendjak tanggal 19 Desember 1948, Pemerintah Republik sudah dapat memasuki daerah-daerah itu dengan alat-alat perlengkapannya guna menjaga djangan sampai terdjadi kekosongan (vacuum) pemerintahan.

Pembentukan P.P.C.

Berdasarkan pada hasil perundingan tersebut diatas, maka oleh Pemerintah R.I. di Sum. Tengah dibentuklah suatu badan yang diberi nama Penghubung Pemerintah Sipil, yang pada waktu itu disingkat dengan „P.P.C.“. P.P.C. ini merupakan suatu badan yang akan menerima dan mengambil pengoperan pemerintahan yang harus diserahkan oleh tentera dan militer Belanda dalam waktu yang tidak lama lagi dikota-kota yang didudukinya semendjak aksinya ke-II.

Dengan demikian, maka P.P.C. dibentuk dibanyak tempat, terutama dibekas-bekas ibu tempat kewedanaan lama, dimana tentera dan Pemerintah Militer Belanda sudah berkuasa. Pembentukan dan penundjukan orang-orang yang akan mengambil over pemerintahan dari Pemerintah dan tentera Belanda itu terasa harus lebih teliti dan diperkuat, karena berlainan dengan tjara yang dilakukannya ditempat-tempat lain diseluruh kepulauan Indonesia, disamping menarik alat pemerintahan dan tenteranya dari tempat-tempat dan kota-kota yang harus segera dikerahkannya, pembesar militer Belanda juga menarik semua alat-alat dan tenaga-tenaga kepolisian dari tempat-tempat dan kota-kota yang didudukinya di Sumatera Tengah.

Selain dari menundjuk P.P.C. diberbagai tempat, Pemerintah R.I. di Sum. Tengah juga menundjuk tenaga-tenaga yang akan menjadi badan penghubung antara kedua belah pihak dikota Padang dan daerahnya, jaitu daerah yang mendapat sebutan Daerah Istimewa yang dipisahkan dari R.I.” semendjak tentera Belanda menaklukkannya.

Penundjukan badan penghubung dikota Padang dimaksudkan djuga untuk berusaha agar dalam waktu jang sesingkat-singkatnja sesudah Belanda menjerahkan kedaulatannja, Daerah Istimewa itu kembali mendjadi daerah R.I.

Njatalah betapa kesibukan-kesibukan dalam kalangan Peme-rintahan di Sumatera Tengah dalam menjusun tenaga-tenaga dan alat-alat untuk menampung Penjerahan Kedaulatan jang segera akan dilakukan oleh Pemerintah Keradjaan Belanda, dan pemul-ian tempat-tempat dan kota-kota semendjak sekian lama diduduki oleh tenteranja. Kesibukan-kesibukan demikian memuntjak dan mendjadi-djadi dalam bulan dimana segenap upatjara dilakukan (Desember 1949).

14 Desember 1949 upatjara pemulihan ibu kota Propinsi.

Pemulihan kota Bukittinggi kepada Pemerintah R.I., merupakan salah satu puntjak peristiwa leburnja semua kekuasaan Keradjaan Belanda dari seluruh kepulauan Nusantara, karena kota ini dalam waktu belakangan ini mentjatat sedjarah jang tersendiri dalam perkembangannja. Meskipun kota Padang merupakan kota perda-angan dan perhubungan lalu-lintas jang mentjukupi sjarat-sjarat perhubungan modern, tapi Bukittinggi beroleh tjorak dan bentuk baru jang sama lahir dan sama besar dengan sedjarah revolusi bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannja. Dalam masa kurang dari 10 tahun sadja, kota Bukittinggi pernah mengalami peristiwa-peristiwa besar, jaitu dalam zaman pendudukan dan pe-naklukan Djepang dia pernah didjadikan ibu-kota seluruh kepu-lauan Sumatera; dizaman permulaan kemerdekaan dia djuga pernah ditundjuk dan ditentukan sebagai ibu-kota seluruh Propinsi Sumatera. Disaat pulau Sumatera dibagi mendjadi 3 propinsi, Bukittinggilah jang mendjadi ibu-kota propinsi Sumatera Tengah jang sampai pada saat ini masih dapat dipertahankannja. Pemudja-pemudja romantis dan naturalis tidak akan kehabisan bahan untuk mendjadikan kota Bukittinggi mendjadi sebutan.

Dari itu, peristiwa pemulihannja jang diupatjarakan pada tgi. 14 Desember 1949 harus dipandang sebagai suatu peristiwa isti-mewa peristiwa kenang-kenangan. Lama sebelum upatjara pemul-ihan itu berlangsung, dari segenap golongan dan lapisan masjarakat sudah tampak kegiatan-kegiatan untuk menjambut peristiwa demi-kian. Dalam hal ini kalangan Pemerintah amat banjak beroleh bantuan, baik dari rakjat jang diam dan bertempat tinggal diseke-liling kota itu, apalagi dari orang-orang jang selama pendudukan tentera Belanda terpaksa harus tetap tinggal didalam kota untuk kepentingan perdjjuangan dan kepentingan keluarganja.

Kemasukan rombongan pertama dari pegawai-pegawai Pemerintah R.I. ke kota Bukittinggi pada tanggal 7 Desember 1949, yang terdiri dari pegawai-pegawai Djawatan Penerangan Gubernur Militer Prop. Sum. Tengah disambut dengan sangat gembira dan meriah oleh penduduk kota. Kembalinja rombongan-rombongan lain sesudah itu djuga mendapat perhatian dan bantuan yang tjukup besar.

Pengaruh-pengaruh dan kesan-kesan yang berbekas pada djiwa rakjat kota selama perpisahan setahun kurang itu, membajangkan kembali hasrat yang sangat besar untuk kembali hidup sebagai rakjat yang bebas dari segala matjam tekanan dan ketakutan sebagai yang dialaminja sebelum tentera Belanda menduduki kota mereka.

Lain pula keadaannja dengan pegawai-pegawai yang baru kembali itu. Djiwa dan semangat yang sekian lama ditempa dalam alam gerilja dan berimba-raja yang sangat berlainan dengan apa yang ditemui mereka dikota, menjustuhkan pandangan hidup. Dari itu, timbullah kegiatan-kegiatan baru dalam menunaikan kewadajiban-kewadajiban yang harus dibajarkan dalam melaksanakan tugas-tugas masing-masing.

Uang harian yang dibajarkan kepada mereka sebanjak Rp. 3,— sehari terhitung dari hari pertama mereka „kembali ke Bukittinggi”, agaknja pada pandangan dan rasa mereka sudah lebih dari mentjukupi, karena selama bergerilja mereka tidak pernah menerima uang yang sebanjak itu.

Meskipun besar djuga bantuan dari penduduk kota yang mereka terima pada waktu itu, tapi tidak bertambah ringan pekerdjaan yang harus mereka hadapi dalam melakukan pekerdjaannja. Selain dari mempersiapkan segala sesuatu yang harus dihadapi oleh djawatan mereka masing-masing bila semua sudah berada dalam kota, pada beberapa bagian mereka haruslah memulai pekerdjaannja dan usahanja dari permulaan benar. Kantor dan alat-alat yang mereka tinggalkan sebehum bergerilja dulu, kini mereka dapati hantjur dan musnah, kadang-kadang tidak meninggalkan djedjak apa-apa.

Sungguh bukanlah pekerdjaan yang mudah untuk mengembalikan separuh sadja keadaan sebagai yang ditinggalkan dulu untuk memulai pekerdjaan baru sekarang. Meskipun sudah kembali berada ditempat yang lama, tapi kerap kali pekerdjaan haruslah dikerdjakan dengan tjara yang baru. Beberapa bulan lamanja, pekerdjaan tulis-menulis sebagian dikerdjakan dengan tangan karena ketiadaan dan kehilangan mesin tulis.

Sungguhpun demikian, semangat untuk bekerdja tidaklah berkurang karenanja, bahkan lebih giat lagi.

Karena perputaran roda pemerintahan pada waktu itu sangat tergantung kepada fonds yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, maka sangat sederhanalah keadaannja pada

waktu itu. Pada djawatan-djawatan jang administrasinja telah berdjalan baik dan mentjukupi sjarat-sjarat jang diperlukan, pegawai-pegawainja hanja menerima 25% dari djumlah gadjinja jang ditetapkan tiap-tiap bulan jang dianggap pembajaran gadji Desember 1949. Dengan wang itulah mereka harus membelandjai keluarga-keluarga mereka jang kadang-kadang tempat tinggalnja berpisah sangat djauh dari tempat kedudukan mereka.

Ja, suasana „kembali ke Bukittinggi” merupakan suasana jang banjak mempunjai bentuk dan tjorak.

Mulai tanggal 14 Desember 1949 itu, alat-alat dan perlengkapan-perengkapan Pemerintah Propinsi Sum. Tengah sudah tersusun kembali, dan dari selangkah keselangkah sudah dapat bergerak didalam suasana baru.

Dalam pada itu kesibukan-kesibukan dalam kalangan ketenteraan djuga meminta perhatian jang sangat besar, karena hampir seluruh pengawasan dan pendjagaan keamanan dikota-kota jang mulai dipulihkan itu, berada didalam tangan Tentera Rakjat jang baru sadja turun dari gunung-gunung.

Kota-kota dan sekitarnja jang semendjak setahun jang lampau itu seakan tenggelam didalam kelesuan, kini mulai hidup kembali sebagai selajaknja.

Tidak sadja mereka jang terlingkung didalam urusan dan alat pemerintahan jang sama „menurun” masuk kota, tapi rakjat umum jang selama ini djuga terlibat sebagai orang-orang jang harus memberikan pengorbanan, djuga sama berdatangan. Dapatlah kiranja dibayangkan, bahwa pada hari penyerahan kekuasaan kota Bukittinggi oleh pembesar-pembesar militer dan sipil Belanda kepada Pemerintah R.I. kota Bukittinggi mendapat kundjungan jang sangat luar biasa.

Tidak sadja Bukittinggi mengalami keadaan jang demikian pada saat pemulihan, tapi seluruh kota-kota jang dipulihkanpun mengalami keadaan jang serupa. Hari pemulihan jang tidak serentak dilangsungkan diseluruh tempat/kota memberikan peluang dan kesempatan kepada rakjat jang dari luar kota dan jang tetap dikota untuk lebih mendekatkan rasa saling mengerti, dan karena itu maka keamanan dan ketenteraman lebih terdjamin dari biasa.

Timbang terima kota Padang.

Berkat eratnja kerdja sama antara rakjat dengan Pemerintah, dan berkat kegiatan umum, maka semua djentera-djentera negara dapatlah mulai bergerak.

Sesuai dengan apa jang sudah diputuskan dalam sidang-sidang K.M.B. di Den Haaq, pada tanggal 27 Desember 1949 berachirlah seluruh kekuasaan Keradjaan Belanda diseluruh Indonesia. Pemulihan kota jang dimulai berturut-turut pada tanggal 12 Desember

1949 (kota Pajakumbuh), diachiri pada tanggal 27 Desember 1949 (penjerahan kota Padang dan daerah sekitarnja).

Berlainan sifat dan keadaannja dengan pemulihan, timbang terima kekuasaan dikota Padang merupakan suatu upatjara negara, karena daerah ini sebelum clash ke-II sudah mempunjai susunan dan status sendiri, jaitu status jang dipaksakan oleh pemerintah Belanda baginja. Dalam usahanja untuk mewudjudkan „tata-tertib baru” untuk Indonesia dizaman jang akan datang, daerah kota Padang oleh van Mook cs didjadikan sebagai suatu „daerah istimewa”. Disamping mendjadi markas besar tentera Keradjaan Belanda, kota Padang selama pendudukan tentera Belanda djuga didjadikan mendjadi pusat „Tijdelijk Bestuursambtenaren” untuk seluruh daerah Sum. Barat.

Mengingat kedudukannja itu, maka pengoperan kota Padang oleh pembesar Belanda haruslah melalui Pemerintah Pusat R.I.

Dengan kawatnja tertanggal 25 Desember 1949, wakil ketua P.P.N. (Panitia Persiapan Nasional) Anak Agung Gde Agung mewadjibkan kepada Gubernur Militer Sum. Tengah melakukan pengambilan over kekuasaan atas kota Padang dan daerahnja dari Residen H.T.B. Padang pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan demikian, maka pada tanggal 27 Desember itu dilangsungkanlah upatjara pengambilan over dengan baik. Mulai dari hari itu, disamping tugasnja jang lama, Gubernur Militer Sum. Tengah djuga mendjadi Kepala Pemerintahan R.I.S. buat kota Padang dan sekitarnja.



SOAL PEGAWAI FEDERAL (NON-CO).

KETIKA mulai masuk kota sentimen antara para pegawai Republik dan Federal lalu memuntjak, jang biasa disebut pertentangan non dan co. Didaerah Sumatera Tengah percentage kaum non lebih besar dari kaum co.

Dalam kalangan kepolisian maka polisi Federal seluruhnja di tarik oleh Belanda ke Padang. Pada waktu ini Gubernur Militer mengeluarkan sebuah Maklumat untuk menuduhkan pertentangan itu, dimana ditegaskan supaja para pegawai Federal melapurkan diri kepada Pemerintah R.I. sementara statusnja diperundingkan dengan Pemerintah R.I.S.

Hal ini menimbulkan beberapa reaksi a.l. berupa pemogokan dari para guru S.R. Federal di Bukittinggi, sehingga terpaksa didirikan pula sebuah panitia untuk menjelesaikan soal ini.

Penjusunan Dewan Pemerintahan Sumatera Tengah.

Njatalah sekarang betapa banjak dan beratnja pekerdjaan-pekerdjaan jang harus dihadapi oleh pemerintah Sumatera Tengah pada permulaan tahun 1950, terutama bila diingat bahwa keadaan pada waktu itu masih kurang stabiell dalam semua lapangan.

Karena itu, maka selekasnja Kepala Daerah harus dibantu oleh Dewan Pekerdja jaitu suatu Dewan Pemerintah Daerah sebagai jang berlaku pada sebelum adanja penjerbuan tentera Belanda.

Didalam susunannja jang baru pada permulaan tahun 1950, anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah terdiri dari:

Ketua	: Gubernur Propinsi Sumatera Tengah
Wakil Ketua	: Dr. A. Rahim Usman.
Anggota	: S. J. Sutan Mangkuto.
Acting-acting Anggota	: Dt. Mangku.
Sekretaris Propinsi	: Marzuki Jatim.
Sum. Tengah	: R. S. Suriapradja. M. Rakana Daljan.

Susunan tersebut diatas merupakan susunan sementara, jaitu sebelum dapat dilangsungkannja sidang pertama DPRST tahun 1950, dimana nanti akan dipilih anggota jang tetap.

Sidang pertama D.P.R.S.T.

Sidang pertama, dimana pembagian tugas djuga dilakukan oleh Dewan Pemerintah ini dilakukan pada tanggal 6 Pebruari 1950 dan sampai kepada bulan berikutnya dimana sidang Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi Sumatera Tengah ke-III (pertama semenjak penyerahan kedaulatan) dilangsungkan, Dewan Pemerintah ini sudah berusaha sekuat tenaganya untuk kemadjuan dan kelantjaran roda pemerintahan daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Tanggal 3 Sampai dengan 12 April 1950, barulah sidang pleno DPRST ke-III itu dapat dilangsungkan dikota Bukittinggi.

Akan dapatlah orang membayangkan betapa besarnya minat dan perhatian jang tertumpah dalam mengikuti sidang pleno ini, karena disamping sangat banyaknya soal-soal jang menjelingkit dihati rakjat dan pemimpin-pemimpin, djuga sangat banyak hal-hal jang harus dipermusjawaratkan.

Pada hari pembukaan sidang pertama tanggal 3 April 1950, hadir 25 orang diantara ke 30 orang anggotanya, hal mana menunjukkan besarnya perhatian mengingat keadaan-keadaan dan kerusakan-kerusakan perhubungan lalu-lintas didaerah Sumatera Tengah selama menghadapi perlawanan dengan tentera Belanda.

Pada waktu itu, susunan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi Sumatera Tengah adalah sebagai berikut:

1. Wakil-wakil daerah Sumatera Barat:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Hadji Iljas Jacoub. | 11. Abdullah. |
| 2. Marzuki Jatim. | 12. Bachtaruddin. |
| 3. Sultani Sutan Malako. | 13. R. S. Suriapradja. |
| 4. A. Gaffar Djambek. | 14. Zainal Zainur. |
| 5. Saaduddin Djambek. | 15. Dr. A. Rahim Usman. |
| 6. Usman Keadilan. | 16. Damanhuri Djamil. |
| 7. Anwar Sutan Saidi. | 17. Tan Tuah Bg. Ratu. |
| 8. Datuk Simaradjo. | 18. Hadji Rusli Abd. Wahid. |
| 9. S. J. Sutan Mangkuto. | 19. Taher Samad. |
| 10. Ahmad Sjuib. | 20. Hadji Mahmud Junus. |

2. Wakil-wakil daerah Riau:

21. Gulmat Siregar.
22. Amat Suka.
23. Datuk Mangku.
24. Rkj. Dr. Azir Jahja.
25. Umar Usman.

3. Wakil-wakil dari daerah Djambi:

26. Dr. Sjagaf Jahja.
27. Dr. R. Purwadi.
28. Dr. Sjahrial Rahman, dan
29. Sjamsu Bahrum.

4. Ketua, wakil ketua:

1. Ketua: Hadji Iljas Jacoub.
2. Wakil Ketua: Gulmat Siregar.

Sekedar bajangan sepintas lalu, laporan jang disampaikan oleh Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah dalam sidang pleno D.P.R.S.T. jang ke-III itu mentjerminkan usaha-usaha jang dikerdjakan oleh Pemerintah bersama dengan Dewannja selama 3 bulan semendjak pemulihan. Garis besar dari usaha-usaha Pemerintah ini adalah sebagai dibawah ini:

1. mendudukan soal kepegawaian jang pada waktu itu meminta tenaga dan fikiran serta kebidjaksanaan (terutama karena adanja pertentangan antara „non” dan „co”).
2. memindahkan alat-alat dan Kantor Gubernur Militer Sumatera Tengah dari Suliki ke Bukittinggi serta mengichtiarkan terkumpulnja pegawai-pegawai kantor itu jang sekian lama terpentjar-pentjar kedudukannja, serta mengumpulkan dan mengadakan pemondokan-pemondokan bagi mereka;
3. menghilangkan sifat „militer bestuur” dan menggantinya dengan „demokratisch bestuur”;
4. membentuk Kabupaten-kabupaten otonomi diseluruh daerah propinsi Sumatera Tengah;
5. meng-reorganiseer semua dinas-dinas pemerintahan berpedomankan Undang-undang No. 22;
6. me-normaliseer dan me-consolideer djentera-djentera pemerintahan, serta selalu berusaha agar djangan sampai terdjadi vacuum pada kota-kota dan tempat-tempat jang ditinggalkan oleh tentera dan Pemerintah Keradjaan Belanda;
7. dan banjak hal-hal jang bersangkutan dengan pesonalia.

Selandjutnja perkembangan-perkembangan dalam waktu jang singkat meningkat dengan pesat. Dalam sidangnya ke-III itu dia sudah dapat merobah kedudukan-kedudukan „sementara” menjadi kedudukan „jang tetap”, terutama dalam menetapkan susunan Dewan Pemerintah Daerah. Dalam salah satu atjara sidang, sudah dipilih anggota-anggota Dewan Pemerintahan Daerah jang baru jang terdiri dari:

1. S. J. Sutan Mangkuto, jang achirnja ditundjuk sebagai wakil ketua D.P.D.
2. Datuk Mangku.
3. Taher Samad.
4. Sultani Sutan Malako.

Djuga dalam sidang ini dimajukan *Mosi Tan Tuah* jang terkenal, jang menuntut pemindahan Gubernur Nasrun, mosi mana diterima oleh sidang dan bermulalah semendjak sidang ini konflik D.P.R.S.T. — Nasrun jang banjak akibatnja itu.

Rakjat dari bekas daerah gerilja merasa diabaikan.

Kegiatan-kegiatan untuk mengubah keadaan jang berlangsung dikota-kota; perubahan-perubahan „radikal” jang dihadapi oleh alat-alat pemerintahan sebaik mereka menempati kota jang sudah setahun ditinggalkannya; wajah-wajah dan bentuk-bentuk baru jang kelihatan pada mereka jang sekian lama hidup bersama-sama dengan penduduk desa jang tinggal ditepi-tepi hutan rimba, semua meninggalkan kesan-kesan jang kurang menjenangkan pada hati dan jiwa rakjat dibekas daerah gerilja.

Rasa kurang senang itu mereka pertalikan pula dugaan gandjil atas diri orang-orang jang pernah mengetjap pertolongan mereka selama bergerilja itu; hal mana achirnja menelurkan purba sangka masjarakat desa atas diri mereka jang sekarang sudah kembali mendjabat pekerjaan jang lama itu.

URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera) jang djuga disebut dengan „uang perdjoangan”, dikota-kota diimbangi dengan 1% sadja dengan uang „federal”, jaitu mata uang jang dipakai dikota-kota tersebut. Hal ini mengetjewakan rakjat.

Dan keketjawaan itu tambah mendalam pula waktu keluarnya maklumat untuk menukarkan semua uang URIPS dengan uang „federal” dengan perimbangan 125 rupiah Urips sama dengan 1 rupiah „federal”.

Dan bila didalami lebih landjut, banjak hal-hal dan faktor-faktor jang menjebabkan timbulnja rasa „keketjawaan” rakjat desa terhadap pedjuang dan pemimpin-pemimpin gerilja jang sekian lama mereka pergauli didaerah-daerah gerilja, jang pernah bekerdja sama dengan mereka untuk menghalangi kemadjuan-kemadjuan tentera Belanda diberbagai tempat.

Pohon-pohon kaju jang ditumbangkan disepanjang djalan raja menudju kedusun mereka untuk siasat pertempuran, djembatan-djembatan jang dihantjurkan, dan djalan-djalan raja jang dilobangi jang djuga disebut dengan siasat „sabot”, sekarang oleh Pemerintah dibiarkan begitu sadja, pada hal perang sudah usai dan keamanan sudah pulih. Ini djuga bahan „sentimen” penduduk desa terhadap Pemerintah.

Tapi untung djuga, hal demikian tidak lama berlaku. Berkat kesanggupan jang diperlihatkan oleh beberapa djawatan jarg bersangkutan, kepada rakjat desa bekas daerah gerilja itu dapat kembali dimasukkan pengertian dan pendjelasan serta penerangan bagaimana dan betapa kedudukan soal jang sebenarnja. Dengan demikian, maka perhubungan baik sekian lama, sekarang dapat dihidupkan dan berdjalan lantjar kembali.

Demonstrasi di Bukittinggi.

Salah satu peristiwa jang tidak akan mudah dapat dilupakan jang terdjadi pada permulaan tahun 1950 (beberapa lama sesudah kota Bukittinggi dipulihkan kembali), ialah suatu demonstrasi jang biasa disebut dengan demonstrasi „nasi bungkus”.

Lebih kurang 10.000 rakjat dari daerah-daerah sekeliling kota Bukittinggi ikut serta dalam demonstrasi jang bersedjarah ini, dan dibawah naungan berpuluh spandoecken mereka berbaris menuju ke Kantor Gubernur Sumatera Tengah untuk mengajukan beberapa tuntutan.

Untuk mengetahui „geest” demonstrasi itu selandjutnja orang harus kembali kepada masa sebelum kota Bukittinggi diduduki oleh tentara Belanda. Asal mula kedjadian itu adalah sebagai berikut:

Setelah njata bahwa kota Bukittinggi tidak dapat dipertahankan lagi dan guna kepentingan perdjoangan selandjutnja kota haruslah dibumi hanguskan, maka oleh pembesar kota Bukittinggi diandjurkanlah kepada seluruh pedagang-pedagang jang bertempat dipasar kota untuk meninggalkan kedai-kedai dan toko-toko mereka. Andjuran itu diterima oleh pedagang-pedagang dan saudagar-saudagar menengah jang berkedai/bertempat tetap di daerah pasar Bukittinggi dengan patuh dan dengan kesadaran. Mereka berpendapat, bahwa dengan djalan demikian mereka djuga ikut serta memberikan tenaganya untuk kemenangan perdjoangan selandjutnja. Pun dalam bulan Djanuari 1949 Komando Militer Agam memerintahkan pula agar kota Bukittinggi ditinggalkan oleh para pedagang.

Selama diduduki, oleh pembesar-pembesar tentera dan pemerintahan Belanda di Bukittinggi dilakukan berbagai-bagai tjara untuk kembali meramaikan kota sebagai keadaanja sebelum perang. Diantara siasat jang didjalkan guna meramaikan kembali kota Bukittinggi ini oleh tentera Belanda dipaksakan agar semua kedai-kedai dan toko-toko harus dibuka kembali, kalau tidak maka kedai-kedai itu diserahkan kepada orang lain. Karena antjaman-antjaman itu, maka sebahagian diantara kedai-kedai dan toko-toko jang ditinggalkan itu dibuka kembali oleh pemilik atau penjewanja jang karena suatu hal tidak dapat meninggalkan kota. Pemilik-pemilik dan penjewa-penjewa jang mengungsi keluar kota terpaksa menjerahkan keselamatan toko-toko dan kedai-kedai kepada orang-

orang yang ditunduk oleh pembesar kota pendudukan. Dengan demikian maka teranglah, bahwa pada waktu kota Bukittinggi dipulihkan kembali, hampir seluruh kedai-kedai dan toko-toko disana sudah ditempati kembali tapi tidak oleh pemilik atau penje-
wanja yang lama. Dan karena keadaan sudah pulih pula, maka pemilik-pemilik dan penghuni-penghuni yang lama itu tentu ingin kembali menempati kedai-kedai dan toko-toko mereka semula, sebagai yang terjdadi di Pajakumbuh dll. kota. Tapi penghuni-penghuni yang sekarang tidak mau meninggalkan tempat itu dengan begitu sadja, karena mereka merasa mempunyai backing yang tjukup kuat untuk mempertahankan kedudukan mereka itu, jaitu pemerintahan kota. Berlainan dengan dikota-kota lain.

Karena itu maka timbullah ketegangan-ketegangan antara para saudagar itu, jaitu ketegangan-ketegangan antara „saudagar gerilja” dengan saudagar-saudagar kota, dan antara saudagar gerilja dengan pemerintahan kota.

Dikota-kota lain tidak pernah terjdadi hal demikian, karena segera sesudah kota tersebut dipulihkan kembali, maka dikeluarkan maklumat oleh pembesar kota, bahwa kedai-kedai dan toko yang selama darurat ditinggalkan oleh penghuni-penghuninja, diperkenankan dihuni kembali oleh pemilik yang lama dan penghuni-penghuni baru diminta agar menjerahkan toko-toko dan kedai-kedai itu kepada yang berhak. Dengan demikian maka tidaklah pernah timbul suatu ketegangan berkenaan dengan itu.

Dalam ketegangan antara para saudagar ini, di Bukittinggi pembesar kota mendjandjikan untuk membereskannja dengan sebaik-baiknya, dan mendjandjikan kepada para saudagar gerilja untuk mengembalikan tempat yang lama itu. Djuga dari Gubernur Sumatera Tengah diperoleh ketegasan, bahwa kedai-kedai dan toko-toko tersebut haruslah dipulangkan kepada penghuninja yang lama.

Karena lambatnja urusan pemerintahan dalam hal ini, maka timbullah gelora yang kurang menjenangkan hati rakjat yang berkepentingan. Rasa djengkel ini kian bertambah besar demi dimasuki pula oleh beberapa anasir dan faktor-faktor yang tidak menjenangkan hati rakjat menjaksikannja. Diantara faktor-faktor yang tidak menjenangkan hati itu ialah, kurang tertumpahnja perhatian Pemerintah pada pandangan rakjat terhadap pemberian penghargaan kepada para bekas pedjoang; tidak diperhatikannja oleh Pemerintah nasib dari para bekas korban perang yang karena menghadapi agresi ke-II mereka kehilangan segala-galanja; lambatnja usaha-usaha Pemerintah untuk memperbaiki kembali kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh Negara untuk siasat perdjoangan, dan banjak hal-hal lain yang kemudian merupakan benzine untuk menambah bergedjolaknja api kemengkalan hati rakjat.

Faktor-faktor itulah jang menjebabkan timbul dan terdjadinja demonstrasi jang bersedjarah itu. Kira-kira 10.000 orang rakjat berarak dan berbaris ke Kantor Gubernur Sumatera Tengah untuk menjatakan hasrat hati mereka. Sangat untung, dalam suasana jang „sangat mendidih“ itu tidaklah terdjadi sesuatu insiden dan semua berdjalan dengan baik dan lantjar. Barisan pandjang ini memberikan pandangan dan kesan-kesan jang tidak mudah dilupakan.

Berpuluh-puluh spandoeken jang turut diarak didalam demonstrasi itu berisi tuntutan dan kehendak dari para demonstranten bekas pedjoang kemerdekaan itu, jang selain dari menghendaki agar kedai-kedai dan toko-toko jang lama itu hendaklah dikembalikan kepada mereka secepat mungkin; djuga mereka menuntut agar Pemerintah hendaklah segera menundukkan tanda penghargaan kepada para bekas pedjoang gerilja bersendjata jang sekian lama mempertaruhkan jiwa raganja untuk mempertahankan kemerdekaan. Djuga mereka menuntut agar Pemerintah dalam saat dan masa peralihan seperti pada waktu itu djanganlah sampai mudah ditarik oleh serba matjam kemewahan; pemimpin-pemimpin rakjat djanganlah melupakan berkah jang ditimbulkan oleh NASI BERTUNKUS jang selama bergerilja dulu telah dapat memperpanjang usia beribu-ribu orang pengungsi dari kota dan karenanja maka perdjongan dapat terus dilandjutkan sampai dapat menjapai kemenangan seperti sekarang, nasi bungkus mana merupakan tjinta kasih rakjat terhadap Negara dan para pemimpinnja.

Arakan-arakan rakjat jang pandjang itu bergerak melalui tempat-tempat instansi dan kantor-kantor pemerintahan jang sangat rapat hubungannja dengan isi tuntutan mereka, dan kepada Gubernur Sumatera Tengah mereka mengutus beberapa orang delegasi untuk menjelaskan lebih landjut tuntutan-tuntutan tersebut.

Sambutan jang baik dari pihak-pihak jang bersangkutan menjebabkan dapat dibendungnja gelora semangat jang akan membakar; dan karena itu maka tidaklah pernah terdjadi suatu insiden jang berarti.

Sesudah melalui Kantor Gubernur dan Kantor Wali Kota Bukittinggi jang mendjadi objek terpenting dari mereka, achirnja barisan jang sangat pandjang itupun dibubarkan oleh pemimpin-pemimpinnja didepan Kantor Kabupaten Agam, dimana mereka disambut pula dengan baik oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam sendiri. Dengan demikian maka berachirlah demonstrasi rakjat desa Kabupaten Agam jang sederhana tapi besar effectnja itu.

Padang dan Riau datang kembali

Sebagai sudah diterangkan diatas tadi, semendjak menghadapi perlawanan dan penjerangan tentera Belanda jang dua kali berturut-turut itu, Propinsi Sumatera Tengah selain dari kehilangan

banjak harta bendanja, djuga „kehilangan” beberapa bahagian diantara daerah territoriaalnja. Daerah Propinsi Sumatera Tengah jang sebelum agresi Belanda ke-II terdiri dari keresidenan-keresidenan Sumatera Barat, Djambi dan Riau serta pulau-pulau jang masuk daerah lingkungannja, pada saat penerimaan kedaulatan dari Pemerintah Keradjaan Belanda pada hakekatnja hanja terdiri dari sebahagian bekas daerah keresidenan Sumatera Barat dan sebahagian ketjil bekas daerah keresidenan Riau.

Dalam siasatnja untuk memetjah belah persatuan bangsa dan Negara Indonesia, pemerintahan van Mook c.s. menetapkan bahagian-bahagian daerah propinsi Sumatera Tengah ini mendjadi beberapa daerah jang satu sama lain tidak mempunyai hubungan apa-apa.

1. Daerah dan kota Padang sebagai basis kekuatan tentara Belanda, didjadiannja mendjadi suatu daerah istimewa dengan nama Disba (Daerah Istimewa Sum. Barat), jang mempunyai status sendiri. Dari daerah jang berdiri sendiri inilah oleh beberapa orang „pemimpin boneka” selama pendudukan Belanda diusahakan agar daerah Sumatera Barat dapat didjadikan dan diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai suatu daerah istimewa jang berdiri sendiri atau mempunyai status sebagai „Keradjaan Minangkabau” jang nanti akan mendjadi salah satu negara bahagian dari „Negara Indonesia Serikat” jang akan dibentuk oleh Pemerintah Keradjaan Belanda.

2. Daerah Riau, terutama daerah kepulauannja, selama pendudukan tentara Belanda djuga didjadiannja mendjadi suatu „daerah istimewa” jang didalam pemerintahan federal tjiptaan Belanda (B.F.O.) djuga mendjadi salah satu anggotanja.

3. Daerah keresidenan Djambi, dalam waktu jang tidak lama oleh van Mook dan kawan-kawannja akan dikembalikan kepada keadaan sebelum daerah itu didjadih oleh tentera Belanda, jaitu sebagai suatu Keradjaan. Sementara itu, tjalon Keradjaan itu disuruh ikut aktif untuk ikut serta membangunkan „Negara Indonesia Serikat”.

Untung sebahagian besar diantara rentjana pemetjahan itu belum sempat dilaksanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, terutama karena tidak mendapat sokongan jang tjukup kuat dari rakjat daerah-daerah itu.

Karena itu tidak mengherankan, bila mulai dari hari pertama sesudah keadaan dipulihkan kembali, kegiatan-kegiatan untuk menggabungkan daerah-daerah itu kepada kedudukannja semula berlangsung dan berdjalan dengan giat, jaitu sebagai landjutan dari usaha-usaha jang dilakukan dizaman pendudukan tentera Belanda.

Selaras dengan muntjulnja „hudjan-hudjan mosi dan resolusi didalam Parlemen Sementara RIS” dalam permulaan tahun 1950

untuk membubarkan negara-negara bahagian jang banjak itu dan untuk menggabungkannya dengan R.I. sehingga bentuk „serikat” itu segera dapat diubah mendjadi „kesatuan”, didaerah-daerah jang di-„resolusikan” itu timbul pula kehendak-kehendak dan tuntutan-tuntutan agar daerah mereka segera digabungkan dan dikembalikan kepada kedudukannya sebelum clash ke-II. Karena desakan dari dalam dan dari luar jang kian hari kian menghebat ini, maka pelaksanaan penggabungan kembali itu haruslah dilaksanakan satu persatu. Karena usaha penggabungan kembali itu tidak berlaku dalam waktu jang sama dan tidak pula mempunyai kedudukan jang sama, maka dibawah ini kita harus mengikutinja satu persatu. Tjara-tjaranja adalah sebagai berikut:

Kota Padang dan daerahnja.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Residen HTB Padang menjerahkan kekuasaannya atas kota dan daerah kota Padang kepada Gubernur Militer Sumatera Tengah jang dikuasakan untuk itu oleh wakil ketua P.P.N. Anak Agung Gde Agung dalam kawatnja tanggal 25 Desember 1949. Mulai hari itu pemerintahan dan pengawasan atas daerah tersebut berada ditangan Gubernur Sumatera Tengah dengan suatu dewannja. Dengan demikian, maka mulai dari saat itu kota dan daerah Padang setjara *de facto* sudah kembali kepada kedudukannya semula. Penggabungan kembali daerah ini mendjadi sebahagian dari daerah R.I. dengan begitu sadja, belum dapat dilangsungkan mengingat banjaknya urusan-urusan administrasi dan technis jang harus dipersamakan lebih dahulu.

Tanggal 9 Maret 1950 dengan keputusannya No. 111 tahun 1950 Presiden R.I.S. menetapkan, bahwa daerah Padang dan sekitarnya harus segera dimasukkan kedaerah asalnya (Sumatera Barat), sesuai dengan putusan jang diambil dalam sidang Parlemen R.I.S. sebelum itu. Pengambilan over kedudukan ini sudah tentu dengan disertai semua pertanggungan djawab atas segala hak milik, laba-rugi serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari daerah itu.

Tanggal 20 Maret 1950 mulailah dilakukan pertemuan-pertemuan dan penyelesaian dan timbang terima oleh beberapa Djawatan dan Instansi Pemerintahan. Pekerdjaan ini baru selesai pada tanggal 1 April 1950.

Karena pemulihan kota dan daerah kota Padang ini dipandang oleh rakjat sebagai salah satu peristiwa jang penting, banjak terdengar suara-suara dan tuntutan-tuntutan agar pengresmiannya dilakukan dengan djalan mengadakan suatu perajaan jang agak besar-besaran. Karena banjaknya usul-usul serta saran-saran tjara melangsungkan perajaan itu jang diketengahkan oleh rakjat, maka Pemerintah merasa perlu mendirikan suatu Panitia jang akan be-

kerdja untuk mempeladjar dan mengetahui hasrat rakyat itu. Panitia ini diketuai oleh Ketua DPRST (Hadji Iljas Jacoub).

Achirnja pada tanggal 16 April 1950 berlangsunglah perajaan-perajaan memperingati penggabungan kembali kota Padang dan daerah sekitarnya menjadi daerah R.I. yang merupakan sebahagian dari daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Perajaan itu berdjalan dengan sempurna, dan salah satu atjara penting yang dilaksanakan pada waktu itu, ialah meletakkan batu pertama untuk mendirikan sebuah tugu peringatan yang achirnja merupakan salah satu tugu peringatan yang terbagus diseluruh kepulauan Indonesia.

Kepulauan Riau.

Tanggal 20 Maret 1950 berakhirilah kekuasaan pemerintahan yang dilakukan oleh suatu Dewan atas daerah kepulauan Riau. Dewan yang dibentuk dizaman pendudukan tentera Belanda ini menjerahkan kekuasaannya kepada suatu kekuasaan militer yang ditundjuk oleh Pemerintah Pusat untuk itu.

Pada pertengahan bulan April 1950, dalam kawatnja kepada Gubernur Sumatera Tengah, Menteri Dalam Negeri RIS memerintahkan agar daerah kepulauan Riau segera dimasukkan menjadi salah satu bahagian dari daerah R.I. Propinsi Sumatera Tengah. Berdasarkan kepada bunji surat kawat itu, maka oleh Pemerintah Sumatera Tengah dilakukan pengiriman suatu delegasi pemerintahan yang akan melaksanakan perintah Menteri Dalam Negeri RIS itu.

Adapun susunan delegasi itu adalah sebagai berikut:

Ketua : R. M. Oetojo.
Sekretaris: Marah Ismail.
Anggota²: R. Djojodirdjo.
Adeli Abdullah.
Anwar Kadir.
Jahja Djalil.
Usman Keadilan.

Sebelum delegasi ini berangkat menuju ke Tandjung Pinang dimana timbang terima akan dilakukan, lebih dahulu sudah berangkat pula 3 orang wakil Pemerintah Sumatera Tengah yang bertugas melakukan penindjauan dan sebagai pelopor persiapan. Ketiga orang itu terdiri dari saudara-saudara Datuk Baginda, Dr. Iljas dan Umar Usman.

Pada tanggal 23 April 1950, berangkatlah delegasi Pemerintah Sumatera Tengah itu menudju ke Tandjung Pinang. Berkat adanya kerdja sama yang baik antara Pemerintah dengan rakjat dan tentera, maka pada tanggal 1 Mei 1950 dapatlah dilangsungkan timbang terima kekuasaan atas kepulauan Riau ini dari pembesar militer RIS disana dengan wakil-wakil pemerintahan propinsi Sumatera Tengah tersebut diatas.

Mengingat status kepulauan ini setjara politis atau strategis, orang akan dapat membayangkan, bahwa daerah kepulauan Riau meminta lebih banjak perhatian dan kebidjaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Letaknja yang sangat berhampiran dengan Singapura menjebabkan kepulauan ini amat dekat perhubungan perdagangan dan ekonominja dengan kota dagang itu dibandingkan dengan kota-kota lain dipulau Sumatera. Dan karena pengaruh perhubungan itu, maka daerah ini mau tidak mau harus berada dalam pengaruh dollar Malaja.

Dari itu maka tidaklah mengherankan, bila sampai pada saat ini, daerah Kabupaten Kepulauan Riau ini mendapat kedudukan yang agak lain dibandingkan dengan kedudukan daerah Kabupaten lainnja di Sumatera Tengah, sehingga disebutkan „daerah dollar” dimana uang R.I. tidak beredar.

Daerah Djambi dipulihkan pula.

Aliran-aliran dan usaha-usaha untuk memisahkan daerah Djambi dari propinsi Sumatera Tengah dan hendak menggabungkannja kedaerah Sumatera Selatan, bukanlah aliran-aliran dan usaha-usaha yang baru lahir. Usaha kearah ini sudah berdjalan sedari sekian lama, meskipun suara-suara untuk itu hanja diperdengarkan setjara aliran-aliran segolongan belaka. Dan karena soal penentuan status daerah Djambi dimasa yang akan datang sudah diambil over oleh Pemerintah Pusat, ada baiknja bila hal ini kita peladjar dengan agak „umum”, terlepas dari segala paham-paham dan pengaruh-pengaruh yang tengah berdjalan sekarang.

Penetapan status daerah Djambi mendjadi sebahagian daerah „Sub Propinsi Sumatera Tengah” ditetapkan dalam suatu konperensi wakil-wakil rakjat se Sumatera yang dilangsungkan dikota Bukittinggi pada permulaan tahun 1946. Daerah Djambi didalam konperensi itu diwakili oleh 4 orang utusan. Tiga diantara keempat wakil dan utusan itu menjetudju penetapan tersebut. Dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Djambi yang pertama pada tanggal 30 dan 31 Mei 1946, kemudian pada tanggal 1 Djuli 1946, soal status daerah ini kembali dibicarakan.

Meskipun didalam sidang itu tidak diambil suatu putusan, tapi reaksi-reaksi untuk berpisah dari Sumatera Tengah sudah mulai timbul dan hidup. Hal ini pernah diadjukan oleh wakil-wakil

daerah Djambi didalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi Sumatera, didalam sidang-sidangnja jang berlangsung sesudah itu. Adanja Undang-undang Pemerintah nomor 10 tahun 1948 jang menentukan dan menetapkan daerah Propinsi Sumatera mendjadi 3 Propinsi, dimana daerah Djambi ditetapkan mendjadi daerah Propinsi Sumatera Tengah, menjejabkan usaha-usaha untuk memasukan daerah ini mendjadi „Sub Propinsi Sumatera Selatan” mendjadi terhalang pula.

Kabarnja didalam pertemuan antara para Residen se Sumatera jang berlangsung di Bukittinggi dalam tahun 1948 jang djuga dihadiri oleh P.J.M. Wakil Presiden, oleh Residen Djambi soal ini kembali diadjukan.

Meskipun keberatan-keberatan jang diadjukan oleh wakil-wakil Djambi berkenaan dengan digabungkannya daerah itu mendjadi sebagian daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah mendjadi perhatian Pemerintah Pusat, dan Pemerintah berdjandji akan menjelidikinja, tapi karena keadaan dan suasana dalam negeri kian hari kian genting, tuntutan dan keberatan-keberatan itu belum mendapat penjelesaian sebagaimana jang dikehendaki.

Adanja agresi tentera Belanda jang ke-II mulai achir tahun 1948 menjejabkan terputusnja perhubungan antara daerah Djambi ini dengan daerah-daerah lainnja (Riau dan Sumatera Barat) dipropinsi Sumatera Tengah. Dan karena hampir, serta „bagusnja” perhubungan air dan djalan-djalan rimba antara Djambi dan Palembang, maka tidaklah mengherankan, bahwa selama menghadapi perlawanan tuntutan dan bantuan dari Staf Gubernur Militer Sumatera Selatan, dan karena demikian, maka sebahagian besar dari daerah itu masih dapat dipertahankan dari penguasaan tentera Belanda. Perhubungan baik ini berdjalan sampai beberapa bulan lamanja sesudah Penjerahan Kedaulatan, tidak sadsja perhubungan moreel, tapi djuga financieel dan dinas-dinas pemerintahan. Dari itu, biarpun keadaan sudah dipulihkan kembali sebagai keadaan sebelum agresi, pada permulaan tahun 1950 daerah Djambi masih „terikat” dengan Propinsi Sumatera Selatan, dan merasa dirinja sudah „terlepas” dari daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Sementara itu oleh wakil-wakil rakjat Djambi soal penentuan kedudukannya dimasa depan, djuga sudah diadjukan dan dibitjarkan dengan Pemerintah Pusat R.I. di Djokjakarta, jaitu dengan Perdana Menteri Halim dan Menteri Mr. Tandiono Manu, dimana oleh Pemerintah didjandjikan akan mempertimbangkan kembali.

Dan untuk menguatkan kedudukan politis dan administratif daerah Propinsi Sumatera Tengah, maka pada achir bulan April 1950 Dewan Pemerintah Sumatera Tengah, mengirim beberapa orang utusannja ke Djambi untuk membitjarakan soal pemulihan kembali daerah ini masuk daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Perutusan (delegasi) ini terdiri dari:

1. Dt. M. Basa nan Kuning : Ketua,
2. Marzoeki Jatim : Anggota,
3. Hadji Roesli : Anggota,
4. Leon Salim : Anggota/Sekretaris.

Perutusan ini berangkat dari Bukittinggi pada tanggal 30 April 1950 dan kembali ke Bukittinggi pada tanggal 17 Mei 1950. Kesan-kesan yang diperdapat dan dibawa oleh perutusan itu dari Djambi, diantaranya ialah, bahwa pemimpin-pemimpin dan rakyat Djambi buat sementara waktu tidak mau membitjarkan soal-soal politik dan status daerahnja, karena mereka mempertjajakan hal ini sebulatnja kepada kebidjaksanaan Pemerintah Pusat R.I. di Djokjakarta.

Berdasarkan laporan-laporan dari delegasi tersebut diatas, dan dikuatkan pula oleh surat kawat Perdana Menteri kepada DPRST mengenai status daerah itu, maka Dewan Pemerintah Sumatera Tengah tetap memandang dan menganggap serta menghargai daerah Djambi itu sebagai bahagian dari Propinsi Sumatera Tengah.

Adapun kawat Perdana Menteri R.I. itu lengkap dan aslinja berbunji sebagai berikut:

zq dprst bukittinggi via ptt/pd no. 409/50 mendjawab kwt no. 50/dprst/r/50 pemst belum repeat belum mengambil putusan tentang djambi ttk selama belum ada putusan status djambi tetap dalam lingkungan prop sum tengah ttk

pmri dk

Karena kedua hal tersebut diatas, maka pengoperan kembali daerah Djambi kepada daerah Propinsi Sumatera Tengah tidaklah terlalu sukar untuk dilaksanakan.

Setelah diadakannja hubungan dengan Gubernur dan DPD Propinsi Sumatera Selatan, agar hubungan financieel dan dinas-dinas Pemerintahan Daerah Djambi diserahkan kembali kepada Propinsi Sumatera Tengah, maka dengan sendirinja daerah Djambi sudah dapat dipulihkan kembali sebagai seharusnya.

Dengan pemulihan daerah Djambi ini, maka sebelum terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pertengahan tahun 1950, daerah territoriaal Propinsi Sumatera Tengah telah kembali sebagai keadaannja pada sebelum menghadapi agresi Belanda ke-II.

Masalah SWAPRADJA di Sumatera Tengah.

Satu-satunya bekas daerah Swapradja di daerah Sumatera Tengah ialah daerah Siak Sri Indera Pura dalam daerah Kabupaten Bengkalis sekarang. Pada saat terdjadinja „Revolusi Sosial” di Sumatera Timur dalam tahun 1947, sesungguhnya daerah ini tidak lagi merupakan daerah Swapradja. Hal ini disebabkan karena atas kemauan dan kehendaknja sendiri, Sri Sultan Siak menjerahkan seluruh kekuasaannja kepada Pemerintah R.I. dan mema'zulkan dirinja sebagai kepala daerah Swapradja tersebut.

Mulai dari saat itu maka status daerah bekas Swapradja ini ditetapkan menjadi suatu daerah kewedanaan.

Perubahan status daerah yang sama sekali tidak dipaksakan ini, selama pendudukan tentera Belanda dalam menghadapi clash ke-II menimbulkan reaksi djuga. Pada waktu itu ada niat dan maksud beberapa golongan yang merasa dirugikan, untuk mengembalikan daerah ini kembali menjadi daerah Swapradja.

Setelah pemulihan, usaha-usaha untuk mengembalikan status Swapradja itu diperhatikan djuga oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, tetapi dibiarkan berkembang terutama untuk menindjau hasrat hati rakjat yang sebenar-benarnja. Karena itu pada achirnja maka kenjataanlah, bahwa hasrat untuk mengembalikan kekuasaan Swapradja itu hanya merupakan kehendak dari sebahagian ketjil sadja. Hal ini didasarkan kepada resolusi-resolusi yang diajukan kepada Pemerintah Propinsi untuk menentang usaha dan maksud tersebut.

Resolusi-resolusi yang dikirim oleh putera-putera daerah itu merupakan tantangan yang sangat hebat kepada tjita-tjita untuk pengembalian status daerahnja menjadi daerah Swapradja, sebagai keadaannja sebelum terdjadinja „Revolusi Sosial” di Sumatera Timur dulu.

Dan dengan sendirinja, maka Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah tidak dapat mengabulkan tjita-tjita untuk sego-longan ketjil mereka yang merasa kerugian itu, dibandingkan dengan hasrat dan kehendak rakjat yang terbanjak.

Mendjelang ke N.K.R.I.

Usaha-usaha untuk mempersiapkan segala sesuatu guna memperlengkapi diri sebagai daerah yang harus „berdiri sendiri”, berdjalan dengan lantjar dan teratur. Seribu satu soal dan kesukaran-kesukaran yang harus diatasi, dapat diatasi dengan segenap kekuatan dan kebidjaksanaan yang ada. Kerdja sama yang rapi dan

erat dengan semua golongan, djawatan-djawatan serta instansi-instansi yang ada, menjebabkan roda pemerintahan daerah Propinsi Sumatera Tengah sesudah pemulihan dapat berdjalan dengan lantjar.

Sebelum keluarnya dekreet Presiden R.I.S. untuk mengubah bentuk pemerintahan negara dari „Serikat” ke „Kesatuan” kembali, alat-alat pemerintahan seluruh Propinsi Sumatera Tengah sudah berdjalan sebagaimana seharusnya. Mendjelang pertengahan tahun 1950, Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Tengah sudah melangsungkan sidang plenonja sampai dua kali berturut-turut, jaitu pada tanqqal 3-12 April — 10-14 Djuni 1950, jaitu plenonja ke-III dan ke-IV semendjak dia dibentuk. Dan sidang pleno ke-IV ini pulalah yang merupakan sidangnya yang terakhir sebelum dia dibekukan diawal tahun 1951.

Mengenai penjusunan diri kedalam, dapat dinjatakan, bahwa dalam masa beberapa bulan sadja daerah ini sudah dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk memperbaharui segenap susunannya, terutama daerah otonomi berbentuk Kabupaten. Meskipun sebelum penjerangan tentera Belanda pembentukan ini sudah dimulai dan di beberapa bahagian sudah mulai bergerak, tapi dia masih harus disempurnakan dan diulang pembentukannya, bahkan ada yang harus ditinjau semula kembali. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan-perubahan besar yang terdjadi selama daerah ini bergerilja dan berdarurat.

Djika pada mulanya direntjanakan, bahwa daerah Sumatera Tengah akan terdiri dan terbagi atas 10 buah daerah Kabupaten, maka sekarang rentjana itu harus diubah kembali memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tengah terasa.

Dalam pembentukan daerah Kabupaten yang baru ini, sudah tentu haruslah diperhatikan beberapa sjarat yang harus dipenuhi untuk itu, baik sjarat-sjarat yang mengenai segi ekonomi, politik dan strategi, apalagi soal-soal yang berhubungan rapat dengan kebudayaan.

Mendjelang diperingatinja ulang tahun ke-V Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, daerah yang disebut dengan Propinsi Sumatera Tengah ini meliputi 14 buah daerah Kabupaten dan 2 buah daerah Kotapradja. Ke 14 buah Kabupaten itu terdiri dari:

1. Kabupaten Agam (Bukittinggi),
2. „ Lima Puluh Kota (Pajakumbuh),
3. Kabupaten Tanah Datar (Batu Sangkar),
4. „ Pasaman (Lubuk Sikaping),
5. „ Padang/Pariaman (Pariaman),
6. „ Pesisir Selatan & Kerintji (Balai Selasa),
7. „ Solok (Solok),
8. „ Sawah Lunto/Sidjundjung (Sawah Lunto).

Kedelapan buah Kabupaten tersebut diatas merupakan daerah bekas keresidenan Sumatera Barat Lama. Adapun bekas daerah keresidenan Djambi terbagi atas 2 Kabupaten, jaitu:

9. Kabupaten Djambi (Djambi),
10. „ Merangin (Bangko).
Dan bekas daerah keresidenan Riau lama terdiri dari 3 buah Kabupaten, jaitu:
 11. Kabupaten Kepulauan Riau (Tg. Pinang),
 12. „ Bengkalis (Bengkalis),
 13. „ Kampar (Pakan Baru), dan
 14. „ Inderagiri (Rengat).

Dua buah daerah Kotapradja di Sumatera Tengah terdiri dari:

1. Kotapradja Bukittinggi.
2. Kotapradja Padang.

Disamping kedua Kotapradja tersebut diatas, kota-kota Djambi dan Pakan Baru djuga merupakan kota-kota jang sebelum ini telah berdiri sendiri.

CONFLIK NASROEN — D.P.R.S.T.

Demikianlah pada sidang D.P.R.S.T. jang ketika telah diterima satu mosi jang terkenal dengan nama mosi Tan Tuah jang menuntut pemindahan Gubernur Nasroen dari Sumatera Tengah, dan menjelang terbentuknja Negara Kesatuan, hal inilah jang mendjadi atjara hangat di Sumatera Tengah.

Uraian luas tentang hal ini akan pembatja dapati dalam bahagian Demokrasi dalam buku ini, dan disini hanja kita kemukakan garis besarnja sadja.

D.P.R.S.T. mentjalonkan Saudara H. Iljas Jacoub mendjadi Gubernur Sumatera Tengah, jang mana pentjalonan ini ditolak oleh H. Iljas Jacoub sendiri. Pun sesudah sidang ini ganti berganti missi dikirim ke Jogja untuk menjelesaikan pelaksanaan mosi Tan Tuah. Gubernur Nasroen jang tentu sadja tersinggung oleh mosi ini lalu bertjuti, dan sementara itu urusan pemerintahan dipegang oleh Dewan Pemerintahan Sumatera Tengah jang terdiri dari Saudara-saudara S. J. St. Mangkuto, Sultani St. Malako, Taher Samad dan Dt. Mangku,se dangkan sebuah kursi disediakan untuk Daerah Djambi jang buat sementara belum diisi. S. J. St. Mangkuto mendjadi wakil Ketua Dewan Pemerintahan.

Setelah habis tjuti Gubernur Nasroen, maka iapun masuk kantor kembali sebagai seorang pegawai negara jang mendjalankan kewadjabannja. Ia berpendirian bahwa walaupun ada tanda tidak pertjaja atas pimpinannja, tetapi karena ia belum menerima keputusan apa-apa dari Kementerian Dalam Negeri, ia tetap berhak untuk meneruskan pimpinannja di propinsi. Sementara itu D.P.R. S.T. menambah tjalon jaitu Dr. M. Djamil, Dr. A. Rahim Usman dan Mr. St. M. Rasjid.

Setelah berkali-kali pula mengirim missi ke Jogja dan para Menteri R. I. meninjau pula ke Sumatera Tengah, maka pada tanggal 1 Agustus 1950 Gubernur Nasroen dengan resmi dipindahkan ke Pusat Pemerintah R.I. di Jogja mendjadi Gubernur jang diperbantukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan pada 2 Agustus berlangsunglah timbang terima antara Gubernur Nasroen dan Dewan Pemerintahan Sumatera Tengah.

Tetapi konflik ini belum berachir sehingga disini sadja!

Sesudahnja Negara Kesatuan diproklamirkan pada 16 Agustus 1950, maka timbul lagi soal siapa jang akan mendjadi Gubernur Sumatera Tengah. D.P.R.S.T. tetap mempertahankan agar Gubernur ditetapkan dari antara 4 tjalon jang dimadjukannja, dan Pemerintah Pusat belum memberikan ketentuannja, sehingga pimpinan propinsi Sumatera Tengah tetap dipegang oleh Dewan Pemerintahan.

Ruslan Muljohardjo Acting Gubernur Sumatera Tengah.

Pada tanggal 9 Nopember 1950 tibalah ketetapan Kementerian Dalam Negeri jang mengenai diangkatnja Saudara Ruslan Muljohardjo mendjadi Acting Gubernur Sumatera Tengah.

Hal ini berarti bahwa Gubernur diangkat bukan dari tjalon jang dimadjukan D.P.R.S.T. Oleh karena itu dalam sidangnja jang ke-empat pada tanggal 15 Nopember, D.P.R.S.T. mengambil keputusan bahwa ketetapan Menteri Dalam Negeri ini diretur afzender, dan D.P.R.S.T. tetap berpegang dengan Undang-undang No. 22 serta menghendaki Gubernur, bukan Acting. Tegasnja ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 444 tentang keangkatan Acting Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Muljohardjo ditolak oleh D.P.R.S.T. Dalam pada itu Gubernur Ruslan sampai di Sumatera Tengah, tetapi pada tanggal 29 September 1950 berangkat lagi ke Djakarta untuk menemui Menteri Dalam Negeri, karena D.P.R.S.T. mengambil putusan tidak membenarkan timbang terima dari wakil Gubernur Sumatera Tengah S. J. St. Mangkuto, sehingga konflik antara D.P.R.S.T. dan Nasroen telah melandjut mendjadi konflik segi tiga antara D.P.R.S.T. — Acting Gubernur Ruslan — Kementerian Dalam Negeri. Dan tepat sehari sebelum tahun baru 1951 Acting Gubernur Ruslan tiba kembali di Padang bersama S. J. St. Mangkuto dan Residen Utojo.

Kemudian dengan tiba-tiba dan tak disangka-sangka djatuhlah bom atom!

Pemerintah (Kabinet Natsir) bertindak membekukan D.P.R.S.T. dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1951 jang terkenal itu. Dan pada 13 Djanuari dilakuklanlah timbang terima Pemerintah Sumatera Tengah dari Saudara S. J. St. Mangkuto jang mewakili Pemerintah Sumatera Tengah kepada Saudara Ruslan Muljohardjo, Acting Gubernur Sumatera Tengah.

Ruslan membangun.

Dalam mendjalankan tugasnja memimpin Pemerintahan di Sumatera Tengah, maka Gubernur Ruslan berpegang kepada trilogie Pemerintah Sumatera Tengah jaitu memadjukan kemakmuran rakjat dalam arti kata jang seluas-luasnja, pendidikan rakjat dalam arti kata jang seluas-luasnja pula.

Trilogie ini dipegang dengan teguh, dan terutama dititik beratkan perhatian kepada djawatan-djawatan Pemerintah jang usahanja berhubungan rapat dengan trilogie itu, seperti djawatan-djawatan P.U., Perdagangan, Perindustrian, Lalu-lintas, Pertanian, Kehewan, Kehutanan, P.P.K., Kesehatan, dan lain-lainnja, jang lapangan usaha masing-masingnja itu dibentangkan seluas-luasnja dibahagian lain dalam buku ini.

Sehingga dengan berdjalannja trilogie itu menudju kesempurnaannja, tibalah masanja pada bulan Mei 1951 kata-kata Acting dimuka pangkat Gubernur Sumatera Tengah dihilangkan, dan semendjak itu resmilah Ruslan Muljohardjo mendjadi Gubernur Sumatera Tengah.

Pasal 9.

DI NEGERI/WILAJAH

Demokrasi lama:

„Elok kato djo mupakat, buruk kato diluanjo, kok bulek lah dapek digulingkan, kok pitjak lah dapek dilajangkan, amal baik eloklah kito lakehkan, nak djan disalo dinan buruk l”

I NILAH gambaran demokrasi lama di Sumatera Tengah, jaitu permusjawaratan dirumah gedang, dan setingkat lagi lebih tinggi dari itu, musjawarat dibalairung, dari ninik mamak jang mewakili anak kemenakannya (rakjat).

Hal ini sesuai pula dengan bentukan masjarakat dan perekonomian dimasa itu, jang berdiri atas dasar kaum atau suku Minangkabau lama jang mana *suku* itu dikembangkan oleh wanita (matriarchaat). Sebagaimana ditegaskan oleh Saudara Darwis Dt. Madjo Lelo seorang ahli hukum adat dalam bukunya: *Tuanku Imam Bondjol*, bahwa:

„Baik laki-laki maupun perempuan jang keturunannya satu nenek jang perempuan, tergabung mendjadi satu, sebab dipertalikan oleh persekutuan harta, persekutuan kekuasaan, persekutuan kerdja, dan persekutuan kebesaran (pangkat dalam adat). Pendeknja kaum atau suku itu adalah satu persekutuan hak dan kewadajiban, jang didjundjung tinggi oleh orang Minangkabau, sebab ia ada mempunjai makdjizat atau kedaulatan. Seorang jang berbuat barang sesuatunya, jang merugikan atau merusakkan nama kaumnya, merasa bahwa ia sudah membuat chianat kepada kaumnya. Karena itu ada pepatah jang mengatakan „seekor kerbau berkubang, semua kena luluhnja” (luluh = lumpur).

Masing-masing suku ini diketuai oleh seorang penghulu adat (Datuk) jang turun temurun dari mamak ke-kemenakan, djadi djuga menurut keturunan dari ibu.

Beberapa suku mendjadikan satu negeri, jang terdiri dari sebanjak-banjaknya sembilan suku. Selandjutnja beberapa negeri

jang bertali adat penduduknja, mendjadi satu ikatan jang lebih besar, jang dinamai „Laras”.

Laras itu ada jang terdjadi dari dua, tiga dan sebanjak-banjaknja 20 negeri. Karena itu laras ini ada jang bernama II Koto, III Koto dan sebagainya.

Selandjutnja beberapa laras mendjadikan satu luhak, jang mana luhak ini terdiri dari: 1. Dataran-tinggi Tanah Datar (Batusangkar), 2. Dataran tinggi Agam (Bukittinggi), 3. Ranah Lima-Puluh (Pajakumbuh) dan 4. Ranah Kubung Tiga Belas (Solok). Tiap-tiap luhak itu mempunjai rantau sendiri, jaitu tempat perpindahan jang kemudian ditinggalkan oleh orang-orang dari luhak-luhak jang tersebut tadi. Luhak dan rantau inilah jang mendjadikan daerah Minangkabau lama.

Ringkasnja daerah Minangkabau lama itu terdiri dari gabungan (federatie) luhak, laras, negeri dan suku, jang masing-masing mempunjai organisasi pemerintahan sendiri, dan jang memegang kekuasaan ditiap-tiap daerah tersebut ialah Dewan atau Kerapatan dari penghulu-penghulu jang ada disitu. Inilah dasar Demokrasi Lama. Rapat dari para penghulu ini dilangsungkan didalam Balai Adat jang ada disetiap negeri dan didirikan setjara bergotong-rojong oleh rakjat.

Kerapatan penghulu ini dianggap mewakili seluruh rakjat jang ada dalam satu negeri. Mereka berhak membuat peraturan untuk mendjaga keselamatan negeri jang mana peraturan ini dijalankan oleh para Dubalang jang ada ditiap-tiap negeri dan pesukuan. Diatas dari *Dewan Negeri* ini ada *Dewan Laras* dan *Dewan Luhak*, jang djarang turut tjampur dalam urusan negeri-negeri.

Kebanyakan soal-soal perkara-sengketa diselesaikan oleh Dewan Negeri, dan jang tak terselesaikan olehnja barulah dibawa ke Dewan jang lebih tinggi.

Hakim jang paling tinggi di Minangkabau lama ialah *Basa Empat Balai* jang berhak memutuskan perkara jang tiada terselesaikan oleh Dewan Luhak.

Jang dinamai „Basa Empat Balai” itu ialah: *Tuanku Titah di Sungai Tarab; Indomo di Suruaso; Machudum di Sumanik* dan *Tuan Gadang di Batipuh*. Jang mendjadi ketua dari Dewan Basa Empat Balai itu ialah Tuanku Titah di Sungai Tarab.

Djadi dapatlah ditegaskan bahwa demokrasi lama berpusat disekitar negeri-negeri dan kerapatan negeri, jang mana kerapatan itu dianggap mewakili akan seluruh penduduk negeri. Penghulu suku anggota kerapatan itu adalah turun temurun, sehingga demokrasi itu dengan sendirinja djuga berbau feodal.

Pengaruh Agama Islam.

Demikianlah keadaan ini berdjalan terus dalam masa jang sangat lama, „tidak lapuk oleh hudjan dan tidak lejang oleh panas”, walaupun struktur pemerintahan jang diatasnja seringkali berubah. Perubahan ini terdjadi dengan beralihnja jang berkuasa atas daerah ini, dan terutama bergontjang hebat dengan masuknja agama Islam ke Minangkabau, jang membawa berbagai-bagai peraturan jang kadang-kadang bertentangan dengan tjara-tjara jang ada, dan menimbulkan pula akan kekuasaan suatu golongan disamping kekuasaan penghulu-penghulu jaitu orang-orang ahli agama jang disebut **Tuanku**. Djuga pergaulan dengan bangsa asing jang berdagang dipesisir Minangkabau membawa berbagai-bagai pengaruh pula. Tetapi semua ini dapat diassimilasi (ditelan) oleh masyarakat dan kekuasaan tetap berada pada Kerapatan Negeri.

Belanda jang mendjadjah dan berhasil menguasai Sumatera Tengah, djuga menjadi tekanan jang sematjam ini, dan lalu memakaikan susunan ini pula dengan semua perubahan untuk menetapkan kekuasaannja.

Belanda menggunakan kesempatan.

Belanda pada mulanja masuk sebagai djuru damai antara pihak jang bersengketa memperebutkan kekuasaan, jaitu golongan adat jang berpegang kepada tjara-tjara lama, dan golongan agama jang berpegang kepada tjara-tjara jang baru menurut ajaran Islam. Golongan adat lalu meminta pertolongan kepada pihak Belanda untuk melenjapkan pengaruh golongan Agama jang kekuasaannja berpusat di Bondjol, Kamang dan Kota Lawas. Hal ini adalah putjuk ditjinta ulam tiba bagi Belanda, karena dengan ini ia mendapat kesempatan untuk meluaskan kekuasaannja ke Padang Darat, dengan telah mempunyai pembantu jang kuat pula, jang akan didjadikannja kuda beban dalam mendjalankan politik „divide et impera” untuk melaksanakan kolonialismenja keseluruh Sumatera Tengah.

Dengan bertopengkan membantu golongan adat jang terantjam oleh golongan agama, maka Belanda memadjukan Angkatan Perangnja sampai-sampai kepusat benteng Bondjol, dengan mendapat sokongan penuh berupa tentera bantuan, bahan makanan dan pekerdja dari golongan adat. Tetapi ditempat-tempat jang telah dapat direbut, Belanda lalu langsung menanam wakil-wakilnja, atau lebih tepat pegawai B.B.-nja jang dipilih dari kalangan kepala-kepala adat jang berpengaruh dan patuh kepada Belanda.

Tetapi perlawanan setjara gerilja dari golongan agama, semendjak Djanuari 1820 sangat pula meletihkan ketenteraan Belanda, karena dalam perang berlama-lama itu mereka sukar memelihara tetapnja kepatuhan kaum adat jang telah di per-

kuda-kudanja itu. Rakjat dan penghulu-penghulu jang selalu dipaksa untuk mengangkut makanan, barang-barang dan alat sendjata dari benteng ke-benteng jang berpuluh-puluh banjaknja itu, disertai berbagai-bagai penghinaan, menjebabkan kaum adat djadi mendongkol pula kepada Belanda, dan apa jang dichawatiri oleh Belanda jaitu persatuan tindakan antara golongan adat dan agama pun terdjadilah. Pada bulan Djanuari 1833 pemberontakan terdjadi sekali lagi dipelopori oleh Bondjol. Belanda mendjalankan tindakan keras, sebagai jang telah kita uraikan sebelum ini, membuang beberapa pemuka adat, serta menembak mati dan menggantung jang lainnja, sehingga kaum adat tunduk kembali, dan dapat dikerahkan sekali lagi buat menjerang kaum agama. Tetapi djika mulanja, inisiatip berada ditangan kaum adat, jang setjara resmi membawa Belanda untuk membantu mereka, sekarang inisiatip seluruhnja berada ditangan Belanda jang telah dapat menguasai seluruh daerah kaum adat, dan memperkuda mereka pula untuk membantu Belanda dalam menguasai daerah kaum agama.

Bondjol pusat pemerintahan agama masih utuh, dan dari sana diatur, serangan-serangan setjara gerilja jang sangat memusingkan tentera Belanda, dan sesudah mendjalankan tindakan keras diatas, mereka lalu menempuh pula djalan diplomasi, dan mengeluarkan pengumuman jang dinamakan *Pelakat Pandjang*, pada tanggal 25 Oktober 1833 jaitu suatu statement dari *Komisaris Djenderal* jang mewakili Radja Belanda. Salinannja adalah sebagai berikut:

PELAKAT PANDJANG.

Diatas nama Seri Baginda Maharadja Belanda.

Kami Komisaris-komisaris dari Gubernemen Sumatera Barat J. J. Van Sevenhoeden, anggota Dewan Hindia, berbintang Ridder van den Nederlandschen Leeuw dan J. C. Riesz, Djenderal Major, berbintang Ridder der 3de klasse van de Militaire Willemsorde.

Kepada rakjat dari Padang Darat dan Padang Hilir, kami memberi hormat dan tabik.

Mempermaklumkan seperti dibawah ini:

Jang mulia Komisaris Djenderal, wakil dari Seri Beginda Maharadja Belanda, jang mempunyai pemerintahan di Djawa serta berkuasa dikepulauan Hindia, sudah datang menemui tuan-tuan untuk mengetahui perselisihan-perselisihan, jang terdjadi antara beberapa daerah dengan Pemerintah di Padang dan untuk menjelesaikan hal-hal itu sebagai seorang bapa dan djuga untuk membuat peraturan-peraturan jang lebih sesuai dengan adat dan Undang-undang tuan, supaja terpelihara kesentausaan dan keamanan, dan dapat memadjukan kemakmuran tuan-tuan. Peperangan itu

selalu mempunjai akibat, jang memberi sengsara seperti jang sudah tuan-tuan rasai sendiri; kampung-kampung, rumah-rumah dan harta-benda kepunjaan tuan-tuan mendjadi abu dan binasa, serta banjak orang jang luka dan mati. Bagi kamipun peperangan itu tiada menjenangkan dan banjak merugikan. Amat banjak timbul kerugian karena peperangan itu; orang kami banjak jang tiwas; baik tuan-tuan dan baikpun opsir-opsir dan serdadu-serdadu kami sama-sama merasai kesedihan atas kematian teman-teman dan sahabat-sahabat, seperti jang sudah kita rasai. Oleh karena itu buat kebaikan kedua belah pihaknja, djanganlah kita teruskan peperangan ini, melainkan marilah kita adakan keamanan dan kesentausaan. Itulah kehendak dari Jang Mulia Komisaris Djenderal; lebih-lebih karena sudah dua abad lamanja Kompeni Belanda mempunjai perhubungan perniagaan dengan tuan-tuan dipesisir Sumatera Barat ini dan djuga karena orang Islam dan orang Kristen, jang sebenarnja tiada bermusuhi, seperti jang digemborkan oleh setengah kawan-kawan tuan. Ketahuilah, bahwa tuan-tuan dan kami sama-sama menjembah dan memudja Tuhan jang satu itu djuga. Tuhan kita itulah, jang menjuruh kita supaya berkasih-kasihan sesama manusia dan djangan aniaja-menganiaja.

Barangsiapa jang melanggar suruhan Tuhan ini, baik orang Islam dan baikpun orang Kristen, tentu dapat hukuman dari Tuhan kita; dan barangsiapa jang mengerdjakan suruhan Tuhan itu tentu akan mendapat rahmat dan bahagia. Karena itu kita jang sebenarnja bersaudara, bukan bermusuhi. Oleh sebab itulah Komisaris Djenderal mau memberi pimpinan kepada tuan-tuan, sebagai bapa memimpin anaknja untuk berusaha dan bekerdja, supaya dapat dimadjukan kesenangan, kebahagiaan dan kemakmuran tuan-tuan.

Gubernemen banjak mengorbankan wang dan djiwa buat membantu tuan-tuan supaya tuan-tuan terpelihara dari orang-orang jang bermaksud hendak mengubah dan membinasakan adat dan Undang-undang tuan-tuan.

Wang pasar dan tjukai-tjukai jang lain, jang selama ini dipungut dari tuan-tuan sekarang dihapuskan; sebab kami mendapat kenjataan, bahwa semuanya itu memberatkan benar bagi tuan-tuan. Sekarang upah kuli sudah dinaikkan dan Komisaris Djenderal sudah memerintahkan, supaya ditjari kuli tetap dalam negeri ini atau dari negeri luaran.

Pedati-pedati buat pengangkat barang-barang akan datang dari Betawi dan kuda-kuda bebanpun sudah ada disini. Semuanya tindakan-tindakan itu diadakan, supaya tuan-tuan terlepas dari pekerdjaan kuli, jang selama ini setiap hari tuan-tuan kerdjakan. Dengan djalan demikian keberatan-keberatan tuan-tuan tentang soal itu mendjadi lenjap. Demikian djuga keberatan-keberatan jang lainpun akan habis djuga pada waktunja dibelakang hari.

Kehendak Komisaris Djenderal, sebagai wakil dari Seri Maharaja Belanda, hanjalah supaja berusaha buat kepentingan tuan-tuan dan kepentingan Gubernemen.

Pertama: supaja tuan-tuan djangan lagi mengadakan peperangan saudara, jang dinamai perang batu, perang bedil, perang dendam-kesumat, jang dahulu kerap kali tuan-tuan adakan. Segala perselisihan antara laras dengan laras, antara negeri dengan negeri akan diselesaikan dengan djalan perdamaian oleh penghulu-penghulu menurut setjara adat dan Undang-undang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan meminta pertolongan kepada kami untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan, akan kami putuskan dengan mufakat lebih dahulu dengan penghulu tuan-tuan. Kalau sesudah ini masih ada laras atau negeri, jang datang menjerang laras dan negeri jang lain, akan kami tolong menghukum jang menjerang itu. Kami mentjampuri urusan ini, hanja mendjaga, supaja tuan-tuan djangan mendapat sengsara dan supaja negeri mendjadi aman dan sentausa. Oleh sebab itu perlu sekali, segala benteng-benteng dan kubu-kubu, jang ada sekeliling negeri masing-masing, dibinasakan, supaja djangan terbit djuga nafsu untuk berperang-perangan. Kami jang akan mendjaga, supaja negeri tuan-tuan djangan dapat serangan dari luar. Oleh sebab itulah maka kami adakan benteng-benteng kami, diwatas-watas negeri atau laras, jaitu dimana jang perlu rasanja.

Kedua: Residen atau pegawai Gubernemen sekali-kali tiada boleh mentjampuri urusan rumah-tangga negeri; dan djuga tiada boleh mentjampuri kekuasaan kepala-kepala dan penghulu-penghulu. Memilih dan mengangkat kepala-kepala atau penghulu-penghulu itu dilakukan oleh tuan-tuan sendiri menurut adat dalam negeri tuan-tuan. Segala perkara utang-piutang, pelanggaran, kawin, rudjuk dan talak, pembagian harta pusaka dan sebagainya, hanja boleh diuruskan oleh penghulu tuan-tuan menurut adat. Demikian djuga tiada boleh orang mentjampuri perhukuman dan pengadilan dalam perkara kedjahatan, melainkan perkara itu diadili oleh penghulu-penghulu menurut adat. Hanja dalam soal kedjahatan-kedjahatan jang dilakukan terhadap kepada Gubernemen, seperti pemberontakan, perlawanan, membunuh atau menjiksa pegawai Gubernemen atau orang militer, merampas atau merampok barang-barang kepunjaan Gubernemen. Perkara-perkara jang serupa itu diadili oleh Dewan Djustisi (Raad van Justitie) di Padang.

Ketiga: Kepala-kepala dan penghulu-penghulu, jang diangkat mendjadi wakil kami akan mendapat gadji dari Gubernemen. Mereka itu tiadalah akan diberi kekuasaan jang besar, melainkan hanja bekerdja sebagai udjung lidah kami, dan memberi penerangan kepada kami segala hal, jang boleh menambah-kemadjuan tuan-tuan.

Ke-empat: Karena kami memelihara tuan-tuan dari serangan musuh, maka Komisaris Djenderal meminta, supaya tuan-tuan membantu kami dengan orang-orang bersendjata dalam peperangan, jang akan kami lakukan; maksudnja supaya kami tiada perlu memelihara tentera jang besar dan mahal ongkosnja. Oleh sebab itu, kalau ada peperangan, kami akan memanggil dari tiap-tiap negeri orang bersendjata, sebanyak jang perlu. Berhubung dengan itu wadjib djalan-djalan dan djembatan-djembatan dipelihara baik-baik. Untuk keperluan itu kami akan membantu dengan kuli dan alat perkakas.

Ke-lima: Gubernemen tiada akan memungut tjukai atau iuran wang dari tuan-tuan; tetapi Gubernemen hanja meminta, supaya tanaman atau perkebunan kopi dan lada ketjil diperluas, supaya mendatangkan keuntungan kepada tuan-tuan dan kepada kami. Perkebunan-perkebunan itu akan disuruh djagai oleh pegawai-pegawai Gubernemen, sebab kalau tanaman kopi dan lada ketjil itu tiada diperluas, tentu Gubernemen tiada mendapat wang masuk.

Supaja mudah bagi tuan-tuan untuk mendjual kopi dan lada ketjil itu, kami dirikan dimana-mana gudang, tempat mendjual garam dan barang-barang jang lain. Digudang-gudang itu nanti dibeli hasil-hasil dari tuan-tuan seperti kopi, lada ketjil dan lain-lain dengan harga menurut pasaran sekarang di Tanah Darat. Dengan djalan demikian tiada perlu lagi tuan-tuan bersusah pajah mendaki gunung-gunung dengan berbeban berat pergi ketempat jang djauh untuk mendjual hasil tuan-tuan dan membeli barang-barang jang perlu bagi tuan-tuan disitu. Sungguhpun demikian tuan-tuan merdeka untuk pergi ke Padang membawa hasil tuan-tuan dan boleh mendjualnja kepada siapa jang tuan-tuan sukai.

Rakjat dari Padang Darat dan Padang Hilir!

Lihatlah bagaimana mudahnja sjarat-sjarat untuk hidup rukun dan damai dengan Gubernemen Belanda dan untuk menghindarkan sengsara peperangan, sehingga kebahagiaan dan kemakmuran tuan-tuan mendjadi bertambah.

Karena Kepala-kepala Pemerintah disini kadang-kadang tiada mengerti benar akan kepentingan Gubernemen, dan dahulu tuan-tuan banjak disuruh memikul pekerdjaan jang terlampau berat, karena itu sekarang kami memberi kepastian bahwa Gubernemen tiada perlu lagi memberati tuan-tuan. Gubernemen akan banjak mendapat keuntungan dari tjukai barang-barang keluar masuk dipelabuhan, jang dipungut dari saudagar-saudagar; dan keuntungan dari memperdjual-belikan kopi, lada ketjil, garam, dan lain-lain. Jang terutama sekali mendatangkan keuntungan ialah kemandjuan perniagaan jang memberi muatan kepada kapal-kapal dan jang memberi penghidupan jang halal bagi beribu-ribu rumah tangga dinegeri Belanda. Tetapi disamping itu dapat pula dipelihara, supaya negeri ini dalam aman dan sentausa.

Demikian kesukaan dan kehendak Seri Maharadja, jang kita muliakan dan tjintai, dan jang tjinta kepada rukun dan damai. Dan lagi Seri Baginda berkehendak, supaja segala rakjat jang Mahamulia mendapat perbaikan dari pemerintahan Seri Baginda; jaitu dengan memadjukan perniagaan, dapat menambah kemakmuran negeri Belanda dan negeri-negeri disini.

Rakjat dari Padang Darat dan Padang Hilir!

Kami berkata terus-terang kepada tuan-tuan, sebab demikianlah perintah jang sudah kami terima. Beruntung benar tuan-tuan mendapat bahagia, seperti sekarang ini. Sebabnja ialah karena kedatangan Jang Mulia Komisaris Djenderal kenegeri tuan-tuan, jang melihat sendiri apa-apa jang sebaik-baiknya untuk kepentingan Gubernemen. Kami nasihatkan kepada tuan-tuan, supaja menerima sjarat-sjarat jang tersebut diatas dengan sjukur; turutlah dengan setia! Ditas nama Komisaris Djenderal, jang mendjadi wakil dari Seri Baginda Maharadja Belanda, kami menjatakan disini, bahwa pelakat ini tiada akan diubah isinja selagi tuan-tuan tiada memberi sebab untuk mengubahnja.

Dibuat di Padang pada 25 Oktober 1833.

PELAKAT PANDJANG BERUPA LEGALISASI KEKUASAAN BELANDA.

BELANDA bermaksud mendjadikan Pelakat Pandjang ini sebagai satu naskah untuk melegalisir kekuasaannya dimata rakjat, dengan mengemukakan hal² jang tampak sekilas sebagai suatu kemurahan hati dan kelapangan paham, tetapi bila diteliti lebih landjut, maka tampaklah bahwa dalam naskah itu tersimpul tjara² melaksanakan kekuasaan pendjadjahan jang paling litjin dan litjik.

Pelakat paandjang sebgi adem pauze bagi Belanda.

Dan ketika mereka madju memukul Bondjol dengan sehebat-hebatnja setahun kemudian, mereka mendapat kemadjuan pesat pada mulanja walaupun kemudian semakin dekat ke Bondjol perlawanan semakin sengit, tetapi Belanda bertindak tidak kepalang tanggung lagi, hingga empat tahun lamanja peperangan berlangsung dengan sengit, dimana pihak Bondjol memusatkan pimpinan kepada Tuanku Imam, dan Belanda mendatangkan Panglima Besar tentara Hindia Belanda sendiri Djenderal Cochiuss untuk memimpin operasi menghadapi Bondjol.

Penghulu diberi beslit.

Bondjol djatuh, dan Tuanku Imam ditangkap dengan tjedera, kemudian dibuang ke Menado, dan Belanda pun mensentralisir kekuasaannya diseluruh Sumatera Barat, dengan tetap mempergunakan penghulu² adat untuk menguasai rakjat disetiap negeri, jang lingkungannya makin diperketjil, dan mana jang tertjakap dan paling patuh diantara penghulu² adat itu lalu diangkat mendjadi Laras, dan kemudian mendjadi Ass. Demang dan Demang jaitu dipegawaikan. Kekuasaan dinegeri dipusatkan pada **Kerapatan Negeri**, jang terdiri dari para penghulu adat jang terkemuka dinegeri itu, dan mereka ini diberi besluit dan dianggap mewakili seluruh warga negerinja.

Besluit inipun mendjadi alat jang tadjam pula, karena dapat menerbitkan perpetjahan antara penghulu adat, jang berbesluit dan jang tidak, dan masing² berlomba mempertahankan gensinja dengan mengambil muka kepada Pemerintah Belanda.

Penghulu memungut belasting.

Setelah dikeluarkan kewadajiban membayar belasting, maka para penghulu adat sekali lagi direndahkan kedudukannya menjadi tukang pungut belasting dengan mendapat kollekteloon sebanyak 8%. Mereka dibudjuk dengan membebaskannya dari belasting ini, sehingga pemerintah djadjaan mendapat ribuan pegawai pemungut belasting jang tak usah digadji!

I.G.O.B.

Semua tindakan diatas kemudian diberi bentuk Undang² dengan keluarnya ordonansi tgl. 27 September 1918 (Stbl. No. 677) jang menetapkan ketentuan² tentang peraturan kepentingan rumah-tangga negeri² didaerah Sumatera Barat. Peraturan ini berkali-kali diubah dan ditambah sehingga dilengkapi dengan keluarnya I.G.O.B. (Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten) pada 3 September 1938 (Stbl. No. 490) diberi bernama Peraturan Negeri Otonoom diluar Djawa dan Madura.

Dalam pasal 1 ditegaskan bahwa: susunan dan hak² negeri dan susunan badan pengurus negeri dan susunan dari alat² negeri lainnya, terketjuai sebagaimana tersebut dalam pasal 8, sedapat²-nja akan dibiarkan diatur menurut kemauan adat (adatrecht).

Dalam pasal itu djuga dikatakan bahwa negeri adalah suatu Inlandsche rechtspersoon jang diwakili oleh kepala negerinja. Dan dalam pasal 2 dikatakan bahwa dengan berpedoman kepada hukum² adat, Residen dapat membuat peraturan² tentang pemilihan atau penundjukkan dan pemberhentian Kepala Negeri dan kepala² rakjat dibawahannya lainnya. Demikian djuga tentang perwakilan Kepala Negeri, djika dia berhalangan untuk melakukan tugas, tidak berada pada tempat kedudukannya atau djika belum ada Kepala Negeri, begitupun sumpah djabatan jang harus dilakukannya. Didjelaskan lagi bahwa atas pemilihan atau penundjukkan Kepala Negeri harus diminta persetudjuan Residen, dan djika persetudjuan didapat, kepada jang bersangkutan diberikan tanda pengesahan.

Residen berhak membatalkan.

Dalam pasal 3 dinjatakan, bahwa negeri berhak membuat aturan² jang mengenai rumah tangganya, dalam mana termasuk pengerahan rakjat untuk kerdja negeri dan penebusan kerdja itu dengan uang, dengan mengingat hukum² adat. Dan djika mengenai pengerahan rakjat untuk kerdja negeri dan penebusan kerdja itu dengan uang, dengan berpedoman kepada peraturan² jang dibuat oleh Residen. Tetapi dalam pasal 6 terus dikuntji dengan satu pendjelasan pemerintah atasan, dengan hukum² adat, atau dengan kepentingan umum, dapat **dibatalkan oleh Residen dengan satu ketetapan.**

Dalam pasal² selandjutnja didjelaskan bentuk pemerintahan negeri berupa **Dewan Negeri**, jang sebagai telah kita djelaskan sebelum ini, adalah terdiri dari penghulu² adat jang dianggap mewa-
kili seluruh warga negeri.

Umpamanja pasal 8 menerangkan:

1. Pemerintahan Negeri² jang telah ditundjuk seperti dimaksud dalam pasal 7, didjalankan oleh Kepala Negeri dan satu Dewan Negeri.
2. Kepala Negeri adalah ketua merangkap anggota dari Dewan Negeri. Ia memegang pimpinan sehari-hari dan pelaksanaan keputusan² Dewan ditugaskan kepadanya.
3. Susunan selandjutnja dari Dewan Negeri berdasarkan peraturan jang akan ditetapkan oleh Dewan itu, peraturan mana lebih dahulu harus disjahkan oleh Residen. Penjusunan pertama kali dari Dewan itu dilakukan oleh Pemerintah Negeri setelah bermusjawarat dengan orang² dinegeri itu, jang menurut kebiasaan dinegeri itu, patut dibawa berunding, dan dengan memperhatikan petundjuk² jang mungkin diberikan oleh Residen.
4. Residen, setelah bermusjawarat dengan Dewan Negeri dapat menetapkan maksimum untuk djumlah anggota Dewan itu.
5. Setahun sekali H.P.B. mentjatat susunan Dewan, menurut petundjuk² jang akan diberikan oleh Residen.

Pasal 9.

1. Rapat² Dewan Negeri dilangsungkan dengan sidang terbuka.
2. Kepala Negeri, harus mendjaga agar hal-hal jang akan diperingkan dalam rapat itu, dengan tjara jang lazim ditempat itu dan dengan djangka waktu jang patut terlebih dahulu diberi tahukan kepada penduduk.
3. Keputusan² Dewan, jaitu jang berupa aturan² dan penetapan² diperbuat dan diumumkan sepanjang adat.

Pasal 10.

1. Keputusan² Dewan baru mempunjai kekuatan hukum setelah didaftarkan oleh H.P.B. (Hoofd van Plaatselijke Bestuur, Kepala Pemerintahan setempat, biasanja dipegang oleh Kontelir!) jang hanja melakukannja setelah ia mendapat kejaminan bahwa keputusan itu telah diperdapat dengan sjah.
2. Mengenai pendaftaran keputusan² Dewan itu oleh Residen dikeluarkan petundjuk² ketata-usahaan (administratieve voorschriften).

3. Isi jang telah didaftarkan, dan demikian djuga tanggal jang telah didaftarkan mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 11.

Tentang hal² jang mengenai negeri², djika negeri ini terletak didalam resor Groepsgemeenschap atau didalam resor daerah otonoom setempat seperti dimaksud dalam pasal 2 decentralisasi-besluit, akan tetapi jang bukan kota otonoom, satu dan lain djika dianggap perlu oleh Residen akan dimintakan pendapat dari Dewan Pemerintah Groepsgemeenschap atau Dewan Perwakilan Daerah Otonoom jang bersangkutan.

Pasal 12.

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan kepada peraturan² jang ditetapkan oleh Dewan Negeri.
2. Dalam peraturan ini tidak boleh dibawa-bawa pemungutan-pemungutan jang berdasarkan kepada adat.

Pasal 13.

1. Atas pelanggaran peraturan²-nja Dewan Negeri berhak untuk menentukan antjaman hukuman, berupa hukuman pendjara buat selama²-nja 3 hari atau hukuman denda dengan setinggi²-nja f.10,— dengan atau tidak dengan perampasan barang² tertentu milik sipelanggar, jang diperolehnja karena pelanggaran itu atau dengan mana dilakukan pelanggaran itu.
2. Didaerah-daerah dimana rakjat masih mempunyai pengadilan adat sendiri, ketentuan tentang beratnja hukuman sebagai disebut dalam ajat I itu tidak berlaku; disana berat hukuman ditetapkan sependjang adat.
3. Perbuatan², jang didalam peraturan² tadi diantjam dengan hukuman, dianggap sebagai pelanggaran.

*
**

Pasal² seterusnya dari I.G.O.B. ini jang diachiri dengan pasal 18 menerangkan tentang hal² pemungutan pajak, dan tentang penjelenggaraan keuangan Negeri.

Dengan meneliti peraturan² ini dapatlah kita mengukur sampai kemana tingkat demokrasi dalam badan otonom jang terendah pada zaman Pemerintah Belanda. Pokok pangkal dari demokrasi jaitu pemilihan telah dihilangkan, karena jang duduk dalam Dewan ini adalah para Penghulu Adat jang mendapat kepenghuluanja dengan turun temurun dari mamak ke kemenakan setjara

matriarchaat. Mereka ini jang merupakan sisa-sisa feodal diperkuat oleh Pemerintah Belanda untuk didjadikan alatnja, karena ternjata merekalah golongan jang paling patuh kepada Pemerintah Belanda. Maka hilanglah isi dari demokrasi jang sebenarnya, dan tinggalah lagi „Demokrasi pura-pura“, jang sebenarnya berisi kekuasaan penuh bagi kaum adat selama mereka berdiri dipihak pemerintah djadjaan. Tetapi pun mereka ini tidaklah dipertjaja penuh, karena mereka berada dibawah kontrole jang keras dari H.P.B. (Kepala Pemerintahan Setempat) jang biasanja dipegang oleh Kontrolir Belanda. Karena bukankah dalam pasal 10 ditegaskan bahwa keputusan² Dewan baru mempunjai kekuatan hukum setelah didaftarkan oleh K.P.B. sehingga Kontrolirlah jang memegang kekuasaan tertinggi dalam hakekatnja.

Mana² peraturan jang dirasanja tidak atau kurang sedjalan dengan kepentingan pendjadjaan, tentulah tidak akan didaftarkanja, dan bila sedjalan dengan kepentingan itu barulah didaftarkan. Setelah terdaftar, maka Dewan Negerilah jang berhadapan dengan rakjat untuk pelaksanaannja, dan Kontrolir dapatlah berlepas diri dari akibat²-nja jang kurang menjenangkan. Apalagi karena pelaksanaan keputusan ini dapat pula dikuatkan dengan antjaman hukuman berupa hukuman pendjara paling lama 3 hari, atau hukuman denda setinggi²-nja f. 10.— jang mana memberi satu kekuasaan besar ditangan Dewan tegasnja ditangan Kepala Negeri, dengan mana ia diberi kuku jang boleh ditjengkamkannya bila dikehendakinja kepada rakjat jang menentang kehendaknja.

Tjara kepala negeri menggunakan kekuasaan.

Kekuasaan menghukum sampai tiga hari ini mendjadi alat jang mandjur sekali ditangan Kepala Negeri untuk menghalangi pergerakkan rakjat dan mematahkan usaha partai² politik dizaman pendjadjaan. Boleh dikatakan bahwa hampir setiap orang pergerakkan dimasa itu mendapat hadiah menginap dihotel prodeo ini, dan tak kurang pula jang mendapat hukuman denda setjara adat, hanja oleh karena mereka berani memasuki partai² jang kurang diingini oleh pendjadja. Mendjadi maha kuasalah Kepala Negeri dengan adanja kekuatan ini ditangannja, dan dengan sendirinja anggota Dewan jang terdiri dari penghulu berbeslit, naik pula kekuasaannja jang dilaksanakannya kepada anak kemenakannya, dalam bentuk penagihan belasting, uang rodi (pengganti kerdja negeri dengan uang) dan uang serajo (untuk membelandjai alat-alat pemerintahan negeri) serta berbagai-bagai padjak jang lain seperti uang kaum (padjak sawah), dan lain-lain iuran untuk kepentingan negeri sendiri. Hal ini mendjadikan mereka ditakuti oleh rakjat, tetapi dalam pada itu sangat dibentji, karena tindakan-tindakannya jang menganiaja, seperti menjita harta-benda, memasukkan kekurangan orang-orang jang tak pergi rodi dan tak

sanggup pula membayar dengan uang. Kebentjan ini mereka pikul sendiri, sedangkan jang sebenarnja bersalah adalah peraturan-peraturan dari pendjadjah jang mereka djalankan. Dan mereka mendjalankan ini adalah terpaksa oleh karena hendak melepaskan diri mereka sendiri dari beban padjak jang amat berat itu, dan untuk mendapat sedikit uang berupa kollekte-loon jang 8% jang dibagi-bagi pula dengan Kepala Negeri dan Dubalang-dubalang (orang suruhan Kepala Negeri, biasanja terdiri dari pemuda-pemuda kampung) jang berusaha memungut.

Maka berdjalanlah perintah dengan segala kekerasannja, makin kebawah makin keras, mulai dari Kontrolir Belanda jang menitikkan perintah kepada para Demang dan Demang kepada Ass. Demang, dan Ass. Demang kepada Kepala Negeri, dan Kepala Negeri kepada ninik mamak, seterusnya dari ninik mamak kepada Dubalang dan anak kemenakan. Segala perintah ini setitik mendjadi laut dan beban perintah jang telah berlipat ganda mulai dari Kontrolir, Demang dan Ass. Demang terus ke Kepala Negeri dan ninik mamak, dalam bentuk jang maha berat dipikul achirnja oleh rakjat, baik berupa uang maupun berupa kerdja.

Djadi bentuk demokrasi dari Dewan ninik mamak + Kepala Negeri telah beralih oleh tjorak pendjadjahan mendjadi diktatur jang maha garang dan menakutkan.

Zaman Djepang djuga demikian.

Keadaan ini tak banjak berubah dengan datangnja Djepang. karena Djepang kemudian segera memakai alat pemerintahan jang ditinggalkan Belanda ini untuk kepentingan pelaksanaan perang mereka.

Tentu mereka tahu dari ahli² penjelidiknja jang telah tersebar diseluruh Indonesia lama sebelum perang meletus, bahwa alat jang dimiliki Belanda dan terdiri dari bangsa Indonesia, jang telah tahan udji kepatuhannja dan ketepatannja mendjalankan perintah selama puluhan tahun ini, dapat pula mereka pakai untuknja sendiri.

Kepala² Negeri dan Dewan Negeri jang terdiri dari ninik mamak itu, sama sekali tak berdaja untuk mentjegah diri mereka dari mendjadi alat pemerintahan Militer Djepang, untuk mentjari orang gotong-rojong guna membikin djalan² dan pekerdjaan peperangan Djepang. Djuga tak berdaja untuk menahan padi rakjatnja jang diminta Djepang sebahagian besar, sehingga harga beras membubung berpuluh-puluh kali lipat dan dipasar-pasar hanja dapat dibeli setjara gelap. Pun djuga dalam penderitaan zaman Djepang jang maha hebat ini, banjak djuga diantara mereka jang timbul keinsjafannja untuk berdiri dipihak rakjat, dan mempergunakan kedu-dukannja dalam badan-badan jang dibentuk Djepang seperti Hoko Kai dan lain-lain untuk mengurangkan agak sedikit penderitaan rakjat.

Djadi dapatlah dikatakan bahwa kedudukan otonomi negeri² ini tidaklah mengalami banjak perubahan dizaman Djepang, hanja dari alat pemerintah kolonial Belanda, negeri² ini dengan Dewan-nja dan Kepala Negerinja lalu mendjadi alat penolong usaha perang dari pemerintah kolonial fasis Djepang, jang pelaksanaan politiknja tidak lagi dengan halus-halusan setjara Belanda, tetapi setjara kekerasan militer dengan segala tamparan dan siksaannja, dan semua orang jang berdekatan dengan Djepang djarang jang tak mendapat hadiah tempelengan „bagero” dari „kakak-tua” inil

Berdirinja dewan perwakilan rakjat negeri (D.P.N.).

K.N.I. Negeri Dewan jang terendah.

Serentak dengan proklamasi kemerdekaan, didirikanlah K.N.I. Sumatera Barat dari bangkai Hoko Kai lama, dan K.N.I. ini bertjambang dan beranting ke-kewadanaan sampai kesetiap negeri. Berdirinja K.N.I. disetiap negeri ini mempunyai arti membawa tangan revolusi untuk mendjamba keseluruh pelosok dan dusun diseluruh S. Barat. Tangan revolusi dinegeri-negeri jang berbentuk K.N.I. ini mendjamin keamanan djalannja revolusi dan menghambat usaha segala kaum jang anti kemerdekaan, serta meyakinkan akan orang jang masih ragu-ragu. Terutama dari golongan pemuda dan orang-orang terkemuka dalam negeri dari kalangan partai-partai politik jang lama, K.N.I. mendapat sambutan dan sokongan jang besar sekali.

Pembentukan D.P.N.

Dalam perdjalanjan revolusi ini, segera timbul anggapan bahwa susunan pemerintahan setjara kolonial dinegeri-negeri, memang tak sesuai lagi dengan keinginan masjarakat, dan suara ini dide-ngungkan dalam rapat-rapat K.N.I. Negeri jang terus bergema sampai-sampai ke K.N.I. Kewedanaan dan K.N.I. S. Barat. Maka dalam rapat pleno K.N.I. S. Barat pada tanggal 17 sampai 19 Maret 1946 di Bukittinggi, suara-suara ini diperdengarkan oleh para wakil rakjat jang duduk dalam K.N.I. S. Barat. Sidang pleno lalu memutuskan bahwa untuk kesempurnaan demokrasi dinegeri-negeri dan kelantjaran pemerintahannja perlu diadakan suatu **Dewan Perwakilan Negeri dan Dewan Harian Negeri**. Dan dalam sidang itu djuga lalu ditanam satu komisi jang bertugas menjiapkan segala rantjangan jang perlu tentang Dewan Perwakilan Negeri dan Dewan Harian Negeri ini, komisi mana harus menjiapkan rantjangan itu dalam waktu selekas mungkin dan menjerahkannya sekali kepada K.N.I. pada tanggal 1 April 1946. Komisi ini terdiri dari 7 orang anggota jaitu: saudara-saudara Iskandar Tedjasukmana, M. Djamin Dt. Bagindo, Adinegoro, Basjah Lubis, A. Gafar Djambek, Azizchan, dan Anwar St. Saidi.

Putusan K.N.I. pleno ini mendapat sambutan jang baik dan meriah dari seluruh golongan dalam masjarakat, karena dengan demikian rakjat dinegeri-negeri akan dapat ikut menjumbangkan tenaga dan pikirannja dalam pemerintahan, ketjuali dari golongan ninik mamak jang menginginkan tetap haknja untuk duduk dalam kerapatan negeri seperti jang diatur dalam *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (I.G.O.B.)*.

Begitulah pada tanggal 15 April 1946, golongan ninik mamak jang tergabung dalam Madjelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (M.T.K.A.A.M.) dalam kongresnja memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak keputusan rapat pleno Komite Nasional Pusat S. Barat di Bukittinggi tanggal 18 Maret 1946 jang berhubungan dengan pembentukan susunan Badan Perwakilan Rakjat dinegeri-negeri, karena:
 - a. Badan Perwakilan Rakjat jang ada sekarang (Kerapatan Negeri) telah bersifat kedaulatan rakjat sedjati, Penghulu penghulu dan orang-orang jang 4 djenis wakil rakjat menurut adat ditanam atau diangkat oleh rakjat laki-laki dan perempuan, tua dan muda.
 - b. Untuk memuaskan supaja Badan Perwakilan Rakjat itu sesuai dengan masjarakat sekarang, diputuskan supaja kerapatan negeri jang lama ditambah dengan wakil-wakil partai jang ada dalam negeri itu.

Putusan atau mosi itu disampaikan oleh M.T.K.A.A.M. kepada Pemerintahan Keresidenan Sum. Barat. Oleh Pemerintah mosi tersebut dijawab, dengan suratnja kepada M.T.K.A.A.M. jang menegaskan, bahwa Pemerintah tetap menjetudjui garis-garis jang telah ditetapkan oleh K.N.I. Sumatera Barat itu.

Antara lain ditegaskan bahwa dengan usul M.T.K.A.A.M. dalam bahagian 1 (lihat diatas) belum dirasa tjukup tertjapainja kedaulatan rakjat jang mendjadi dasar dan tudjuan perdjjuangan kemerdekaan segala lapisan rakjat. Seterusnja dikemukakan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat ini tidaklah akan memasuki lapangan adat, jang akan tetap tinggal dalam lapangan kerapatan adat atau kerapatan Penghulu-penghulu.

Demikianlah reaksi dari M.T.K.A.A.M. dan djawaban Pemerintah tentang hal itu.

Sebenarnja tugas Komisi jang disertai untuk menjiapkan rantjangan pembentukan Dewan Perwakilan Negeri pada rapat pleno K.N.I. tanggal 17-19 Maret dan mesti menjerahkannya pada Pemerintah tanggal 1 April (tjuma 10 hari) itu, tidak begitu berat lagi, disebabkan pada sidang pleno tersebut, sudah diberikan rantjangan dari saudara Anwar St. Saidi, jang dalam garis besarnya

diterima baik oleh K.N.I. dan untuk penjesuaiannya lebih djauh mendjadi peraturan, itulah tugas Komisi jang dibentuk itu.

Pada tanggal 21 Mei 1946 oleh Residen S. Barat, Dr. M. Djamil, dikeluarkan satu Maklumat No. 20-21-46 jaitu peraturan tentang susunan pemerintahan negeri, rumah tangga negeri dan tjara memilih anggota Dewan Perwakilan dan Badan Pemerintahannya.

Maklumat tersebut membawa perobahan dalam negeri-negeri di Minangkabau, jaitu dari sistim pemerintahan jang telah dipakainya semendjak beberapa zaman, jaitu demokrasi Minangkabau, untuk memakai satu sistim pemerintahan baru, jaitu sistim demokrasi Barat.

Maklumat itu berbunji selengkapnja sebagai berikut:

MAKLUMAT No. 20/46.

RESIDEN SUMATERA BARAT.

Menimbang bahwa perlu mengadakan Dewan Perwakilan ditiap-tiap negeri dalam daerah Sumatera Barat.

Setelah membuatja, Rantjangan Undang² Dewan Perwakilan Negeri² jang disusun oleh Komisi jang ditanam oleh Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat menurut dasar² jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah itu dalam rapatnja tanggal 17 Maret 1946.

Dengan berpedoman kepada Undang-undang No. 1 serta kepada keputusan jang diambil oleh Dewan Perwakilan Sumatera dalam rapatnja tanggal 17,18 dan 19 April 1946 seberapa jang berkenaan dengan Dewan Perwakilan Negeri.

M e n e t a p k a n,

Peraturan Dewan Perwakilan Negeri dalam daerah Sumatera Barat seperti berikut:

I. Pimpinan Negeri.

Pasal 1.

1. Pimpinan Pemerintahan Negeri terdiri dari:
 - a. Dewan Perwakilan Negeri (D.P.N.)
 - b. Dewan Harian Negeri (D.H.N.)
 - c. Wali Negeri (W.N.)
2. Wali Negeri mendjadi Ketua Dewan Perwakilan Negeri dan mendjadi Ketua Dewan Harian Negeri.

II. Dewan Perwakilan Negeri (D.P.N.)

Pasal 2.

Susunan Dewan Perwakilan Negeri diatur atas dasar banjak djiwa penduduknja jaitu seperti berikut:

- a. dalam negeri-negeri jang mempunjai penduduk 1000 djiwa atau kurang, banjak anggota Dewan Perwakilan Negerinja 9 orang. Setiap tambahan 500 penduduk diatas 1000 orang ditambah 1 orang anggota dan dihitung kalau sudah lebih 250 orang.
- b. perhitungan djiwa itu buat sementara berdasarkan perhitungan djiwa tahun 1930 ditambah 24%.

Pasal 3.

1. Menurut peraturan jang tertentu, anggota Dewan Perwakilan Negeri dipilih oleh segala Warga Negara Republik Indonesia jang diam dalam negeri itu dan,
 - a. telah berumur 18 tahun,
 - b. tiada dipetjat dari hak memilih dan hak mendjadi anggota Dewan Perwakilan.
2. Jang berhak mendjadi anggota Dewan Perwakilan Negeri ialah segala Warga Negara Republik Indonesia jang diam dalam negeri itu dan,
 - a. telah berumur 25 tahun,
 - b. tiada dipetjat dari hak memilih dan hak mendjadi anggota Dewan Perwakilan,
 - c. pandai menulis dan membatja setidaknja dalam huruf Arab,
 - d. mentjukupi sjarat-sjarat kepatuhan umum untuk mendjadi wakil rakjat.
3. Tidak boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Negeri, mereka jang tengah mendjalankan:
 - a. Wali Luhak.
 - b. Demang atau Demang Muda.
 - c. Setia Usaha atau pegawai Negeri jang bersangkutan.

Pasal 4.

1. Anggota boleh meminta berhenti dengan memasukkan surat kepada Dewan Perwakilan dinegerinja, jang akan memberi putusan tentang permintaan itu.
2. Dewan Perwakilan Negeri boleh mengusulkan kepada Wali Daerah (Residen) untuk memperhatikan sesorang anggotanja atas dasar kepentingan negeri dengan menerangkan alasan-alasan usul itu. Anggota jang merasa tidak puas dengan keber-

hentiannja oleh Wali Daerah, boleh membanding putusan itu kepada Dewan Perwakilan Daerah jang putusannja tidak boleh dibanding lagi.

3. Anggota jang meninggal dunia atau berhenti karena hal lain-lain seperti tersebut dalam ayat dan pasal ini dipertengahan djangka, diganti dengan pemilihan rapat Dewan Perwakilan Negeri diantara tjalon-tjalon jang mendapat suara terbanjak dalam Pemilihan Umum jang lalu, dengan memperhatikan kedudukan anggota jang akan diganti dalam Dewan Perwakilan Negeri.

Pasal 5.

1. Buat pertama kali ini anggota-anggota Dewan Perwakilan Negeri duduk dalam Dewan itu satu tahun mulai 1 Djuli 1946 tetapi kalau ditimbang perlu oleh Dewan Perwakilan Daerah maka djangka itu boleh ditambah tiap-tiap kalinja untuk setahun, paling lama sampai empat tahun.
2. Penggantian anggota seperti tersebut dalam pasal 4 ayat 3 berhenti menurut djangka anggota jang digantikan.

III. W a k i l K e t u a .

Pasal 6.

1. Dewan Perwakilan Negeri memilih seorang dari anggotanja untuk mendjadi Wakil Ketua.
2. Kalau Ketua berhalangan, maka Wakil Ketua itulah jang mendjalankan kewadajiban Ketua.

IV. D e w a n H a r i a n N e g e r i .

Pasal 7.

1. Dewan Perwakilan Negeri memilih sekurang-kurangnja 3 orang, paling banjak 5 orang diantara anggotanja untuk mendjadi anggota Dewan Harian Negeri.
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Negeri mendjadi anggota dan mendjadi Wakil Ketua Dewan Harian Negeri.

V. W a l i N e g e r i .

Pasal 8.

1. Wali Negeri dipilih langsung oleh segala Warga Negara jang memenuhi sjarat-sjarat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Negeri (pasal 13).

2. Jang boleh dipilih mendjadi Wali Negeri ialah segala Warga Negara jang memenuhi sjarat-sjarat untuk mendjadi anggota Dewan Perwakilan Negeri dengan ketentuan, bahwa sjarat-sjarat pandai membatja dan menulis ialah dalam huruf latin.
3. Pemilihan Wali Negeri wadajib disahkan oleh Wali Daerah (Residen) dan dengan pengesahan itu Wali Negeri itu diakui oleh Wali Daerah (Residen).

Pasal 9.

1. Wali Negeri boleh meminta berhenti dengan memasukkan surat pada Dewan Perwakilan Negeri. Keberhentian itu wadajib disahkan oleh Wali Daerah (Residen).
2. Dewan Perwakilan Negeri boleh mengusulkan kepada Wali Daerah (Residen) untuk memperhentikan Wali Negerinja.
3. Usul itu hendaklah diiringi dengan alasan, sebabnja Wali Negeri itu patut diperhentikan.

Kalau Wali Negeri itu tiada puas dengan keberhentiannya oleh Wali Daerah, boleh ia membanding putusan itu kepada Dewan Perwakilan Daerah jang putusannya tiada boleh dibanding lagi.

Pasal 10.

1. Untuk pertama kali Wali Negeri dipilih untuk 1 tahun mulai 1 Djuli 1946 tetapi kalau ditimbang perlu oleh Dewan Perwakilan Negeri, maka djangka itu boleh ditambah tiap-tiap kali untuk setahun, paling lama empat tahun.

VI. Setia Usaha dan Pegawai lain-lain.

Pasal 11.

1. Dewan Perwakilan Negeri mempunjai seorang Setia Usaha jang diangkat oleh Dewan itu.
2. Setia Usaha Dewan Perwakilan Negeri mendjadi Setia Usaha Dewan Harian Negeri.
3. Pegawai-pegawai lain, seberapa ditimbang perlu oleh Dewan Perwakilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Harian Negeri.

VII. Rumah Tangga Negeri.

Pasal 12.

1. Dewan Perwakilan Negeri bersama-sama dan dengan dipimpin oleh Wali Negeri mendjalankan pekerdjaan mengatur rumah tangga Negerinja, asal tidak bertentangan dengan Peraturan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah-daerah jang lebih luas padanja.

2. Dewan Perwakilan Negeri berhak mengemukakan kepentingan Negeri dan penduduknja kepada Wali Daerah (Residen), Gubernur dan Presiden Rep. Indonesia, demikian djuga kepada Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Propinsi dan Dewan Rakjat.
3. Dewan Harian Negeri mendjalankan putusan-putusan Dewan Perwakilan Negeri dan menjelenggarakan pemerintahan sehari-hari. Dalam persidangan Dewan Perwakilan Negeri lengkap, Dewan Harian Negeri memberi lapuran tentangan jang telah diselenggarakanja dalam masa jang lalu.

Pasal 13.

1. Setiap tahun selambatnja 2 bulan sebelum habis tahun, Dewan Perwakilan Negeri menetapkan anggaran belandja dan penghasilan Negeri untuk tahun dimukanja.
2. Anggaran belandja dan penghasilan itu, demikian djuga peraturan iuran penduduk, baru boleh didjalankan sesudah mendapat persetudjuan Wali Daerah (Residen).
3. Perbedaan faham antara Dewan Perwakilan Negeri dan Wali Daerah (Residen) dalam soal-soal jang tersebut dalam pasal ini, diputuskan oleh Dewan Perwakilan Daerah, jang putusannja tidak boleh dibanding lagi.

VIII. P e r s i d a n g a n .

Pasal 14.

1. Sekurang-kurangnja sekali 6 bulan diadakan rapat Dewan Perwakilan Negeri. Selain dari itu diadakan rapat setiap ditimbang perlu oleh Ketua, atau atas permintaan seperempat dari djumlah anggota jang dimajukan dengan surat kepada ketua.
2. Panggilan rapat dilakukan oleh Ketua dengan surat, sekurang-kurangnja 1 hari sebelum hari rapat, dengan menentukan sekali djam, tempat dan soal-soal jang akan dibitjarakan. Selain dari atjara jang telah tertentu, boleh djuga dibitjarakan dalam rapat-rapat itu, soal-soal lain, asal disetudjui oleh rapat.
3. Djika Ketua atau Wakil Ketua, tidak bisa memimpin rapat jang tjukup sjarat-sjarat panggilannja, maka Ketua rapat dipilih oleh dan dari anggotanja jang hadir.
4. Segala rapat-rapat diadakan setjara terbuka, ketjuali kalau menurut timbangan ketua atau timbangan seperempat djumlah anggota jang hadir, perlu rapat itu, didjadikan rapat tertutup.

5. Rapat baru sja djika jang hadir lebih dari seperdua djumlah anggota. Djika suatu kerapatan tidak dapat dilangsungkan karena kekurangan anggota, maka diputuskan oleh jang hadir, waktunja rapat jang kedua, dan undangan harus didjalankan sekali lagi, dengan panggilan, bahwa rapat jang kedua itu akan terus dan sja dengan tidak memandang djumlah jang hadir.
6. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanjak, artinja lebih dari separoh dari suara undian.
7. Pungutan suara didjalankan dengan memanggil nama anggota jang hadir.
8. Djika sama banjaknja suara, putusan diundurkan dan pemu-ngutan suara diulang sekali lagi pada rapat jang berikut. Kalau pada rapat jang kedua kali masih sama banjaknja suara, ketua berhak memutuskan.
9. Pungutan suara jang mengenai diri orang dilakukan dengan kertas jang tertutup dan tidak ditanda tangani.
10. Tiap-tiap anggota berhak melahirkan pikirannja dengan ketentuan bahwa suaranya dalam persidangan itu bebas dari tuntutan pengadilan.
11. Putusan jang mengenai umum harus disiarkan seluas-luasnja, supaja diketahui oleh orang banjak dengan djalan membatjakan atau menempelkan maklumat dimesdjid-mesdjid, surau-surau atau tempat-tempat lain jang banjak dikundjungi penduduk.

IX. P e n u t u p.

Pasal 15.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggalnja diumumkan.

Padang, 21 Mei 1946.

Residen Sumatera Barat,

d.t.o.

Dr. DJAMIL Gir. Dt. RANGKAJO TUO.

PERBEDAAN I.G.O.B. DENGAN D.P.N.

Dalam garis-garis besarnya sistem tersebut membawa perubahan sebagai berikut:

1. *Susunan Dewan Perwakilannya:*

- a. Dahulu anggota-anggota D.P.N. terdiri dari Kepala-kepala Adat dan turun temurun dalam beberapa kaum, sekarang terdiri dari orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat.
- b. Dahulu D.P.R. Negeri tidak dibubarkan pada jangka waktu yang ditentukan, sekarang bubar pada jangka yang ditentukan.

2. *Mendjalankan pemerintahan dan keputusan.*

- a. Dahulu beleid pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Kepala Negeri saja, sekarang Wali Negeri bersama dewan hariannya.
- b. Dahulu keputusan yang diperbuat oleh Kerapatan Negeri dijalankan sendiri oleh anggota-anggotanya, sekarang terpisah antara yang membuat aturan dan yang menjalankan.

3. *Kepala Negeri.*

Dahulu Kepala Negeri dipilih oleh Kerapatan Negeri saja, sekarang Wali Negeri dipilih langsung oleh rakyat umum di negeri.

4. *Tjara mengambil putusan.*

- a. Dahulu putusan diambil dengan suara bulat, sekarang dengan suara terbanyak.

5. *Dasar hubungan yang dipakai.*

Dahulu keputusan dari Kerapatan Negeri berdasarkan hukum adat, sekarang berdasarkan hukum yang tersurat.

6. *Lapangan pekerjaan.*

Dahulu yang mengurus oleh Kerapatan Negeri selain dari hal yang bersangkutan dengan soal pemerintahan negeri, juga soal-soal adat, sekarang semata-mata pemerintahan.

Dengan berdjalannya peraturan ini, maka terdjadilah suatu *revolusi besar* dalam suasana pemerintahan di Sumatera Barat. Satu revolusi besar yang mengalihkan tjorak pemerintahan di Sumatera Barat dari suatu tjara yang telah dianut ratusan tahun lamanja dan telah berbau feodal, kepada suatu tjara yang demokratis yang berdasarkan pemilihan rakjat setjara umum dan langsung.

Maka terdjadilah revolusi besar ini dengan aman tenteram dan tiada penumpahan darah, karena seperti dua kereta api yang sedang berlari kentjang dari dua djurusan yang berlawanan, pertumbukan antara keduanya telah dapat dihindarkan pada waktunya yang tepat oleh wisselwachter yang waspada.

Anggota D.P.N. dan Wali Negeri selesai dipilih.

Pada bulan Djuli selesailah pemilihan serentak dari anggota D.P.N. seluruh Sumatera Barat, dan pada tanggal 3 Agustus 46 selesai pula pemilihan Wali Negeri.

Pada pemilihan anggota D.P.N. dan Wali Negeri ditaksir kira-kira 5% dari djumlah djiwa yang datang memilih.

Dalam pembentukan D.P.N. ini terdjadi sedikit kesulitan, disebabkan beberapa negeri yang semasa pendjadjahan Belanda dan Djepang merupakan satu pemerintahan, sekarang dijadikan 2 negeri atau lebih dengan sembojan kedaulatan rakjat, dan dalam akhir tahun 1946 masih terdapat 31 negeri yang seperti itu.

Dengan berangsur-angsur, negeri yang terpetjah itu dapatlah disatukan kembali.

Menarik djuga buat diketahui tjara pemilihan anggota D.P.N. dan Wali Negeri yang memakai sistem kilat ini, dan mungkin hanya dapat dilakukan dalam suatu situasi yang revolusioner sadja. Penjengleggaraannya dibebankan kepada suatu badan yang telah berdiri disetiap negeri jaitu K.N.I. Negeri yang penuh dengan tenaga dinamis dan revolusioner. Panitia ini diketuai oleh Kepala Negeri lama dan wakil ketuanya adalah ketua K.N.I. Negeri, sehingga Kepala Negeri tidak merasa ditinggalkan sadja, dan bagi mereka mendjadi suatu saringan, apakah mereka masih disukai oleh rakjat atau tidak, dan dibuktikan nanti oleh hasil pemilihan Wali Negeri. Dan dalam panitia itu harus pula ada wakil penghulu-penghulu adat, alim ulama dan tjerdik pandai, sehingga merekapun turut pula diadjak berunding dalam panitia yang akan melikwidir kekuasaan mereka. Dalam suasana revolusioner dan semangat yang bergelora hebat, segala sentimen mendjadi hilang sadja, karena memang golongan ninik-mamak sendiri sama merasa bahwa pemuda lebih tepat dari mereka untuk memutar roda revolusi. Dan kerapatan adat sendiri tidaklah dibubarkan, bahkan tetap dalam fungsinya, tetapi kekuasaanja terbatas kepada soal adat semata-mata. Maka dalam maklumat No. 21 tahun 46 ditegaskan umpamanja dalam pasal 2

bahwa setiap seribu jang pertama dari angka djumlah penduduk mendapat 9 orang anggota, dan setiap seribu orang seterusnya mendapat 2 orang anggota, umpamanja 1 negeri jang berpenduduk 7 ribu orang mendapat seribu jang pertama 9 orang, dan 6 ribu jang selebihnja mendapat 6 kali 2 orang = 12 orang. Djadi D.P.N. di-negeri itu beranggota $9 + 12 \text{ orang} = 21 \text{ orang}$.

Banjaknja tjalon tak boleh lebih dari dua kali djumlah anggota jang harus dipilih, dan dalam pentjalonan ini dilakukan pula satu taktik jang penuh kebidjaksanaan dengan membagi tjalon itu menjadi lima bagian, jang disusun oleh lima golongan pula jaitu;

1. Seperlima oleh kerapatan penghulu-penghulu dan alim ulama jang diketuai oleh Kepala Negeri.
2. Seperlima oleh kerapatan ranting K.N.I. Negeri itu.
3. Seperlima oleh satu kerapatan jang dipimpin oleh ranting K.N.I. Negeri jang dihadiri oleh sekurangnja seratus orang lelaki jang berhak memilih.
4. Seperlima oleh suatu kerapatan jang dihadiri oleh sekurangnja 100 orang wanita jang berhak memilih dan dipimpin oleh wanita pula.
5. Tjalon jang selebihnja disusun oleh partai-partai politik jang ada dalam negeri itu.

Dan sekalian rapat ini harus dihadiri oleh seorang wakil panitia pemilihan, untuk mempersaksikan perdjalanannya rapat itu.

Dalam pasal 6 ditentukan pula bahwa hari memilih D.P.N. ini untuk seluruh Sumatera Barat ditentukan pada hari 25 *Djuni* 1946. Dan dalam pasal 8 ditegaskan bahwa pada tanggal 5 *Djuni* 1946 itu semua pemilih harus berkumpul pada djam 9 pagi ditempat jang ditentukan oleh panitia pemilihan, lalu panitia memberi penerangan sedjelas-djelasnja tentang tjara memilih dan mana jang telah bersuara, supaja keluar dari tempat berkumpul itu. Dalam pasal 9 didjelaskan lagi bahwa pemilihan dilakukan mulai djam 10 pagi, dan sipemilih jang datang lewat dari pukul 12 tengah hari tidak boleh lagi mengeluarkan suaranya.

Bila negeri terlampau luas sehingga sipemilih tidak bisa dikumpulkan dalam satu tempat sadja, maka pemungutan suara boleh diadakan pada beberapa tempat menurut bagian dalam negeri itu. Dan untuk menenggang kebiasaan dikampung, maka wanita boleh mengeluarkan suaranya pada tempat jang terpisah dari lelaki, tetapi pada hari itu djuga, jang boleh pula diurus oleh pendaftar-pendaftar wanita sendiri.

Tjara memilih Wali Negeri.

Dan pemilihan wali negeri didjelaskan dalam pasal 13 bahwa:

1. Wali Negeri dipilih langsung oleh penduduk negeri diantara empat tjalon jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Negeri jang telah dipilih menurut peraturan ini.

2. Kerapatan Dewan Perwakilan Negeri untuk menetapkan tjalon-tjalon Wali Negerinja diadakan pada tanggal 5 Djuli, diketuai oleh Kepala Negeri jang masih ada.
3. Tjalon Wali Negeri itu tidak dibatasi diantara anggota Dewan Perwakilan Negeri sadja.
4. Pemilihan tjalon itu dilangsungkan dengan kertas tertulis, tertutup dan tidak ditanda tangani.
5. 4 orang tjalon jang paling banjak mendapat suara dari tjalon-tjalon jang lain, itulah jang mendjadi tjalon Wali Negeri.
6. Nama-nama tjalon jang empat itu disiarkan sebanjak mungkin, seperti menjiarkan nama anggota Dewan Perwakilan Negeri oleh Panitia Pemilihan Wali Negeri, dan hari pemilihan Wali Negeri ditetapkan pada tanggal 10 Djuli 1946.

Demikianlah semendjak 25 Djuni itu djalan sedjarah ditjepatkan prosesnja di Sumatera Barat, dan dalam 15 hari jang bersedjarah ini pula berlakulah usaha besar kearah demokratisering pemerintahan negeri, jaitu otonomi jang terendah di Sumatera Barat, jang berhubungan langsung dengan rakjat. Dan dengan tindakan besar ini, jang dilakukan dengan tiada instruksi dari Pemerintah Pusat R.I., dapatlah dihindarkan perbenturan dan pertumpahan darah, dan berdjalanlah revolusi besar ini dengan aman dan tenteram. Sekali lagi patut ditjatat *tanggal 25 Djuni 1946* hari pemilihan anggota D.P.N. dan *tanggal 10 Djuli 1946* hari pemilihan Wali Negeri diseluruh Sumatera Barat.

*
**

Satu kenjataan adalah bahwa seselesainja D.P.N. terbentuk, kelihatan bahwa disebagian negeri djalannja pemerintahan kurang lanjut, dan hal ini adalah karena:

- a. Kebanyakan jang terpilih mendjadi D.P.N. dan D.H.N. serta Wali-wali Negeri adalah orang baru jang kurang berpengalaman dalam pemerintahan.
6. Negeri-negeri itu terlalu ketjil daerahnja untuk satu daerah otonoom dan terlalu lemah keuangannja untuk dapat membiajai alat-alat pemerintahan.

Karena itu pemerintah Sumatera Barat lalu berusaha dan berichtiar untuk menggabungkan beberapa negeri sehingga mendjadi suatu negeri jang tjukup kuat keuangannja, dan beberapa negeri jang berdekatan ini didjadikan satu negeri jang otonoom. Usaha ini tentu sadja harus dilakukan dengan teliti dan pelahan-lahan, dan didahului dengan menjebarkan tjita-tjita otonomi ini keseluruh Sumatera Barat.

Kursus otonomi.

Untuk ini diadakanlah suatu kader kursus di Bukittinggi jang anggotanja diambil dari daerah-daerah di Sumatera Barat. Kader kursus ini dilangsungkan pada achir tahun 46 jang dipelopori oleh Saudara Iskandar Tedjasukmana. Dalam kursus kader ini dibentangkanlah tjita-tjita membentuk suatu daerah otonomi jang terendah di Sumatera Barat jang harus terdjadi dari gabungan beberapa negeri dan diharapkan pada para kader-kader itu jang selama kursus telah dilengkapi dengan pelbagai ilmu pengetahuan terutama ketatanegaraan, agar mereka akan menjabarkan tjita-tjita otonomi dari beberapa negeri ini didaerahnja masing-masing sekembalinja dari kursus ini nanti.

Pertjobaan otonomi.

Kemudian dalam bulan Djanuari 1947 maka para pemuda tamatan kursus kader ini jang berasal dari IV Angkat Bukittinggi lalu mengambil inisiatif untuk menjadikan daerah mereka mendjadi lapangan pertjobaan untuk tjita-tjita otonomi ini. Mereka berusaha dengan giat mempropagandakan tjita-tjitanja agar daerah IV Angkat jang terdiri dari 7 buah negeri ini mendjadi satu daerah otonomi jang dinamakan dengan wilajah otonomi IV Angkat. Pada waktu jang serentak diadakan rapat-rapat, dan buah pikiran ini diterima oleh masjarakat IV Angkat, dan diadakanlah suatu rentjana untuk melaksanakan penggabungan beberapa negeri itu. Dalam bulan Pebruari 1947, seluruh Wali Negeri bersama dengan D.P.N. dan D.H.N. jang dipilih pada bulan Agustus 1946 itu dalam daerah IV Angkat jang terdiri dari 7 negeri, serentak meletakkan djabatan. Lalu di IV Angkat timbul satu perwakilan jang dinamakan Dewan Perwakilan IV Angkat dan Dewan Hariannja. Wali Negeri lama hapus, dan status pemerintahan berobah. Disamping Wali Otonomi, dibawahnja diangkat ditiap-tiap sidang Djum'at 1 orang sebagai pembantunja jang dinamai **Ketua Sidang**, jang dalam ketudjuh negeri itu berdjumlah 32 sidang. Dasar sidang Djum'at ini diambil untuk menjadikan pemerintah otonomi dapat berhubungan lekas dengan rakjat, karena memang disetiap Djum'at rakjat berkumpul disidang itu.

Konperensi Wali Negeri.

Pada tanggal 29-30 Maret 1947 diadakanlah di Sumatera Barat suatu konperensi besar jang dihadiri oleh 445 Wali Negeri, dan perhatian kepada konperensi ini dapatlah dilihat dengan hadirnja 445 orang dari 542 Wali Negeri di Sumatera Barat dalam suasana revolusioner jang menjulitkan benar bagi mereka untuk menyingkalkan daerahnja. Dalam konperensi ini Residen Mr. St. Moh.

Rasjid mengemukakan antara lain-lain soal wilajah otonomi ini, dan menjampaiakan harapan Pemerintah Sumatera Barat, agar dari 542 negeri ini dapat dibentuk lebih kurang 100 daerah jang ber-otonom.

Maka sesudah selesainja konperensi ini, semakin tersebarlah tjita-tjita pergabungan negeri-negeri ini diseluruh Sumatera Barat. Dan pedoman jang diambil untuk menggabungkan negeri-negeri ini ialah kesatuan kepentingan, kesatuan ekonomi, adat-istiadat dan djumlah djiwa.

Maka sesudah konperensi ini berlaku pulalah pergabungan negeri dipelbagai daerah seperti di Kurai Lima Djong jang terdiri dari 5 negeri pada 13 April, dan 10 Koto Manindjau, serta 5 Koto Baso.

Begitu pula daerah Kewedanaan Pajakumbuh telah bertindak pula, dan pada 7 sampai 14 April 47 selesailah digabungkan negeri-negeri jang berdjumlah 45 negeri mendjadi 6 otonomi besar jaitu :

1. Otonoom Luhak terdiri dari 7 negeri lama dengan 19.000 penduduk.
2. Otonoom Bungo Setangkai terdiri dari 8 negeri dengan penduduk 17.000.
3. Otonoom Tandjung Pati, terdiri dari 11 negeri dengan penduduk 16.000.
4. Otonoom Aka Beluru terdiri dari 6 negeri dengan penduduk 14.000.
5. Otonoom Sago terdiri dari 8 negeri dengan penduduk 18.000.
6. Otonoom Situdjuh terdiri dari 4 negeri dengan penduduk 8.500.

Rapat pembentukan negeri-negeri otonomi ini dihadiri djuga oleh Saudara Bachtiar Dt. Pado Penghulu, Kepala Kantor Urusan Negeri Sumatera Barat.

Pun di Kab. P. 5 K., telah terbentuk pula pada masa itu wilajah otonomi Pengajang dan Labitan.

Penggabungan berdjalan terus, hingga pada bulan Nopember 1948 dapatlah ditjatat berdirinja 21 negeri besar jang berotonom jang terdiri dari 100 negeri-negeri lama.

PROPINSI SUMATERA TENGAH TERBENTUK.

Semendjak zaman Belanda, pulau Sumatera jang begini luas dijadikan satu propinsi. Ketika kemerdekaan diproklamirkan, maka Sumatera tetap dijadikan satu propinsi djuga, dengan satu Undang-undang jang menetapkan bahwa seluruh Indonesia dibagi kepada 8 propinsi, diantaranya propinsi Sumatera. Djuga ditetapkan

buat mendjadi Gubernur Sumatera, saudara Mr. Teuku Moh. Hassan dengan berkedudukan di Medan. Dengan keaktifan jang luar biasa, dapatlah Gubernur Sumatera mengatur daerahnja jang luas itu, dimana perhubungan djuga amat sukar karena kurangnya alat kendaraan dan rusaknja djalan semendjak zaman Djepang. Suasana revolusi mengatasi akan kesukaran perhubungan ini, tetapi satu keadaan jang njata ialah bahwa sekali tournee bagi Gubernur memakai waktu sampai dua tiga bulan untuk memeriksa daerah dari Kotaradja ke Tandjung Karang. Dengan mendaratnja tentera Belanda jang membontjeng kepada Sekutu, maka kedudukan ibu-kota propinsi di Medan terpaksa dipindahkan ke Pematang Siantar, dan setelah Siantar djatuh dalam agresi pertama, lalu dipindahkan ke Bukittinggi jang semendjak itu mendjadi ibu kota propinsi Sumatera.

Sebelum inipun telah terasa djuga bagaimana sulitnja memerintah Propinsi Sumatera jang luas ini, sehingga Propinsi Sumatera lalu dibagi mendjadi tiga Sub Propinsi, jang terdiri dari Sub Propinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Muda Mr. M. Amin, Sub Propinsi Sumatera Tengah dengan Gubernur Muda Dr. M. Djamil, dan Sub Propinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Muda Dr. A. K. Gani, jang masing-masing berkedudukan di Kotaradja, Bukittinggi dan Palembang.

Sementara itu timbul pulalah pikiran-pikiran untuk mendekatkan pemerintah dengan rakjat, dengan menjederhanakan tingkatan pemerintahan, jaitu dengan menghapuskan keresidenan, kewedanaan dan ketjamatan, sehingga tinggal lagi tingkatan wilajah otonoom, kabupaten dan propinsi.

Bila umpamanja di Sumatera keresidenan dihapuskan, akan sangat sulitlah bagi kabupaten jang sebanjak itu buat berhubungan langsung dengan pemerintahan propinsi jang letaknja akan sangat djauh bagi kebanyakan kabupaten sehingga mengakibatkan pemerintahan tidak dapat berdjalan dengan lantjar.

Sumatera djadi tiga Propinsi.

Didorong oleh pertimbangan-pertimbangan ini dan pertimbangan lainnja, maka dibagilah Sumatera mendjadi tiga propinsi, jang diatur dengan Undang-undang No. 10 jang diumumkan pada 15 April 1948.

Dalam konsiderans dari Undang-undang itu dinjatakan bahwa :

- a. Melihat luasnja, daerah Sumatera perlu dibagi dalam tiga propinsi .
- b. Bahwa pemerintah daerah akan diatur berdasarkan kedaulatan rakjat dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Kemudian dalam pasal 1 ditegaskan bahwa : Sumatera dibagi menjadi 3 propinsi yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam pasal 2 diterangkan bahwa propinsi-propinsi itu ialah: propinsi Sumatera Utara yang meliputi keresidenan-keresidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Kedua propinsi Sumatera Tengah, yang meliputi Keresidenan-keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Djambi. Ketiga Propinsi Sumatera Selatan yang meliputi keresidenan-keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung dan Bangka-Beliton.

Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa bentuk, susunan, kekuasaan dan kewajiban pemerintahan propinsi-propinsi ditetapkan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, dan sebelum dapat dibentuk menurut undang-undang itu, maka pemerintahan propinsi terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Executief Propinsi.

D. P. S. dengan 100 anggota.

Patut diketahui bahwa pada waktu itu telah terbentuk **Dewan Perwakilan Propinsi Sumatera** yang beranggota 100 orang dari seluruh Sumatera, dari jumlah mana dipilih 5 orang Badan Executief untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari disamping Gubernur. Maka dengan terbentuknya 3 propinsi ini, tentulah D.P.R.-nya harus tiga pula, yang tjaranja ditegaskan dalam ayat 3 pasal 3 sebagai berikut : Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi terdiri dari anggota-anggota yang jumlahnya dan pemilihannya seperti D.P.R. Sumatera pada saat berlakunya undang-undang ini, disesuaikan dengan pembagian Sumatera menjadi tiga propinsi.

Arti dari kalimat juridis ini ialah bahwa D.P.R. Sumatera itu dibagi tiga saja, menurut dari mana asal anggota tersebut, sehingga dengan pembagian itu terbentuklah tiga D.P.R. Propinsi, juga di Sumatera Tengah.

Selanjutnya dijelaskan bahwa D.P.R. Propinsi diketuai oleh Gubernur yang tidak mempunyai hak suara. Dan Badan Executief Propinsi terdiri dari 5 orang anggota yang dipilih oleh dan dari anggota-anggota D.P.R. Propinsi, dan Badan Executief ini menjalankan pemerintahan sehari-hari bersama dan diketuai oleh Gubernur yang mempunyai hak suara.

Kedudukan Komisariat Pemerintah Pusat.

Dan dalam pasal 4 dinyatakan bahwa untuk mempersiapkan pembentukan pemerintahan propinsi dan pembentukan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan propinsi (tegasnya daerah otonoom !) diadakan satu **Komisariat Pemerintah Pusat** terdiri dari Komisar-

komisaris Negara, jang susunan dan tugas kewadjabannja lebih landjut ditetapkan dengan peraturan lain.

Maka dengan ini dibentuklah propinsi Sumatera Tengah, dan di Bukittinggi, berdirilah pula suatu instansi jang bernama Komisariat Pemerintah Pusat jang dipimpin oleh bekas Gubernur Sumatera Mr. Teuku M. Hassan.

Pun sebelum ini, telah dibentuk oleh saudara Supeno alm. suatu Komisariat Negara jang mengurus soal-soal pemerintahan dan keuangan di Sumatera. Oleh karena saudara Supeno sendiri dipanggil ke Djokja untuk mendjadi Menteri Pembangunan/Pemuda dalam Kabinet Hatta, maka badan ini dileburkan kepada Komisariat Pemerintah Pusat itu.

Dalam pada itu, keluarlah Undang-undang No. 22/1948 jang berisi peraturan tentang penetapan aturan-aturan pokok mengisi pemerintahan sendiri didaerah-daerah jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, djelasnja daerah otonoom.

Dalam pendjelasan undang-undang itu ditegaskan, bahwa baik pemerintah maupun Badan Pekerdja K.N.I.P. merasa akan pentingnja untuk dengan segera memperbaiki Pemerintahan Daerah jang dapat memenuhi harapan rakjat, ialah pemerintahan daerah jang kollegial berdasarkan kepada kedaulatan rakjat (demokrasi) dengan ditentukan batas-batas kekuasaannja.

Memang telah ada undang-undang No. 1 tentang Komite Nasional Daerah, jang memberikan kekuasaan legislatief kepada K.N.I. Daerah, dan menetapkan 5 orang dari anggota K.N.I. tersebut untuk mendjalankan kekuasaan executief bersama dan dipimpin Kepala Daerah, tetapi undang-undang tadi amat sederhana, sekedar untuk sedapat mungkin dapat mengadakan pemerintahan daerah jang masih dalam suasana revolusi jang hebat. Dalam pada itu sebelum undang-undang No. 22 ini keluar, maka pemerintahan kabupaten jang berotonomi seperti pada zaman Belanda diteruskan, tetapi karena otonomi tersebut amat tidak berarti, maka hal itu tidak dapat memberi kepuasan kepada Dewan Perwakilan Kabupaten; pemerintahan otonomi kota djuga diteruskan apa jang telah terdapat pada waktu pendjadjahan, dan otonomi ini lebih luas dari otonomi Kabupaten.

Pada pemerintahan Keresidenan, sekalipun terdapat Dewan Perwakilan Rakjat, hak otonomi kurang sempurna.

Kemudian Pemerintahan Desa ! Pada desa-desa jang telah terbentuk Dewan Perwakilan, djuga belum teratur hak otonominja. Hak otonomi desa menurut Peraturan jang lampau (ordonnantie tanggal 3 Pebruari 1906 stbl. No. 83) pada nakekatnja tidak berarti apa-apa jang sampai sekarang diteruskan. Didaerah-daerah, pemerintahan pada waktu sekarang ini masih dualistis, sebagai

pada zaman jang lampau, jang harus selekas mungkin dihindarkan, dan pemerintahan kolegial jang berdasarkan kedaulatan rakjat dapat dilahirkan. Mengingat apa jang tersebut diatas, maka amat perlulah menjusun undang-undang baru tentang pemerintahan daerah jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sempurna dan berdasarkan kedaulatan rakjat.

Undang-undang itu telah ditetapkan dengan diberi nama „Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah”.

Tiga tingkat Daerah otonomi.

Menurut undang-undang baru ini (pasal 1) daerah Negara R.I. tersusun dalam 3 tingkatan, ialah; propinsi, kabupaten, (kota besar) dan desa (kota ketjil), negeri, marga dan sebagainya jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Djadi melihat ketentuan ini, daerah Negara R.I. hanja mempunyai daerah-daerah otonoom, jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan diluar itu tidak ada lagi daerah N.R.I. jang mempunyai kedudukan (status) lain.

Adapun jang memegang kekuasaan jang tertinggi dari daerah-daerah tersebut ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintahannya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 ajat 1. Ini berlainan dengan ketentuan jang sekarang masih berdjalan, ialah bahwa pemerintahan daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakjat, Dewan Pemerintah dan Kepala Daerah. Maka dengan ketentuan ini, Kepala Daerah bisa merupakan satu alat (orgaan) pemerintahan sendiri diluar Dewan Perwakilan dan Dewan Pemerintahannya. Tetapi dengan ketentuan dalam undang-undang baru ini, hal ini tidak bisa kedjadian lagi, oleh karena dalam undang-undang baru itu disebutkan dengan tegas, bahwa pemerintah daerah terdiri dari D.P.R. Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah sadja. Maka dengan ketentuan inilah didjalankan pemerintahan daerah setjara kolegial (bersama-sama).

Jang penting buat diperhatikan ialah bahwa menurut undang-undang pokok ini, maka daerah otonomi jang terbawah ialah; desa, negeri, marga, kota ketjil dan sebagainya.

Menurut undang-undang pokok ini, maka daerah otonoom jang terbawah ialah, desa/negeri, marga, kota ketjil dan sebagainya. Ini berarti bahwa desa ditaruh kedalam lingkungan pemerintahan jang modern, tidak ditaruh diluarnya sebagai diwaktu jang lampau. Pada djaman itu tentunja pemerintahan pendjadjah mengerti, bahwa desa itu adalah sendi negara, mengerti bahwa desa sebagai sendi negara itu harus diperbaiki segala-galanya, diperkuat dan didinamiseer, supaja dengan begitu negara bisa mengalami kemajuan. Tetapi untuk kepentingan pendjadjahan, maka desa dibiarkan sadja tetap statis (tetap keadaannya). Pemberian hak

otonomi menurut Gemeente ordonnantie ini, adalah tidak berarti apa-apa, karena desa dengan hak itu tidak bisa berbuat apa-apa, oleh karena tidak mempunyai keuangan, dan oleh ordonnantie itu diikat pada adat-adat, jang sebetulnja didesa itu sudah tidak hidup lagi.

Desa tetap tinggal terbelakang, negara tidak berdaja, adalah sesuai dengan tudjuan politik pendjadjah.

Tetapi Pemerintah Republik kita mempunyai tudjuan sebaliknja. Untuk memenuhi Pasal 33 U.U.D., negara dengan rakjat Indone-sia harus makmur. Untuk mendapatkan kemakmuran ini harus dimulai dari bawah, dari desa. Oleh karena itu desa harus dibikin didalam keadaan senantiasa bergerak maju (dinamis). Maka untuk kepentingan itu pemerintahan desa dimasukkan didalam lingkungan pemerintahan jang diatur dengan sempurna (modern), malah tidak sebegitu sadja, tetapi djuga akan diusulkan supaja bimbingan terhadap daerah jang mendapat pemerintahan menurut Undang-undang pokok ini lebih diutamakan diadakan didaerah.

Mr. Nasrun Gubernur ke-I di Sumatera Tengah.

Alhasil maka terbentuklah Propinsi Sumatera Tengah menurut Undang-undang No. 10 jang telah kita uraikan diatas pada tanggal 15 April 1948 dengan Mr. Nasroen mendjabat Gubernur Kepala Daerah. Dan dibentuk pulalah D.P.R. Sumatera Tengah dengan membagi tiga D.P.R. Sumatera, dan para anggota jang berasal dari Sumatera Tengah ditetapkan menjadi anggota D.P.R.S.T. Dan tjita-tjita desentralisasi untuk membagi Sumatera Tengah dalam daerah-daerah otonoom itupun mulailah dilaksana-kan, walaupun situasi politik penuh dengan udara perdjungan jang tegang sesudah persetudjuan Renville ditanda tangani. Maka pada tanggal 30 September 1948 diadakan suatu rapat kombinasi Sumatera Tengah/Sumatera Barat guna mempertjepat terlaksananya desentralisasi itu, dimana beberapa orang pembesar telah mengem- mukakan usul-usulnja, bahwa;

1. Baik diadakan suatu panitia membuat rantjangan jang mengenai seluruh Sumatera Tengah, sebab kalau ditunggu rantjangan pusat mungkin lama sekali baru akan selesai.
2. Soal Desentralisasi ini hendaknja sebelum habis tahun 1948 ini sudah selesai, dan dasarnya hendaklah diambil dasar Sumatera Tengah.

Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah.

Demikianlah Badan Executif D.P.S.T. pada tanggal 2 Oktober 1948 telah mengambil suatu keputusan, menanam suatu Panitia jang sedemikian rupa susunannja, sehingga njata bahwa D.P.S.T. jang menjadi kernnja.

Tegasnja, hendaklah Panitia itu mempunyai anggota-anggota jang berasal dari tiap-tiap keresidenan dan hendaknja anggota D.P.S.T. sekali dan sedapat-dapatnja mendjadi anggota Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Rakjat pula dalam keresidenan itu. Djumlah anggota itu ditjukupkan lagi dengan seorang atau dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebagai wakil dari rakjat menurut dasar tjatjah djiwa daerah jang berkenaan, dan sesudah itu ditambah pula dengan masing-masing seorang Pamong dari tiap-tiap keresidenan dan seorang dari Propinsi Sumatera Tengah. Dengan djalan demikian diperolehh susunan Panitia jang diberi nama;

„Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah”.

sebagai berikut;

- | | |
|--|------------|
| 1. Sjamsuddin, Bupati d/p Gub. Sum. Tengah | Ketua |
| 2. Marzuki Jatim, angg. D.P.S.T. dan B.E. Sum. Barat | anggota |
| 3. Chatib Suleiman, angg. D.P.R. Sum Barat | .. |
| 4. Anwar St. Saidi, angg. D.P.S.T. dan D.P.R. Sum. Barat | .. |
| 5. Enny Karim, Bupati d p Res. Sum Barat | .. |
| 6. Umar Usman, angg. D.P.S.T. dan D.P.R. Riau ... | .. |
| 7. Djalalloe'ddin, Bupati d/p Res. Riau | .. |
| 8. Gulmat Siregar, angg. D.P.S.T. dan D.P.R. Riau ... | .. |
| 9. A. Chatab, angg. B.E. D.P.R. Djambi | .. |
| 10. Salim, angg. B.E. D.P.R. Djambi | .. |
| 11. Bachsan Bupati Muara (Djambi) | .. |
| 12. Ahmad Chatib Sekr. D.P.R. Sum. Barat | Sekretaris |

Ditetapkan dengan surat ketetapan Badan Executief D.P.S.T. tanggal 6 Oktober 1948 No. 6/B.E./I/10/Ste.

Dalam surat ketetapan itu ditetapkanlah sekali apa-apa jang mendjadi tugas kewadjiban Panitia itu, jaitu;

1. Mengumpulkan segala bahan-bahan jang perlu untuk pembentukan badan-badan otonomi seperti jang dimaksud dalam Undang-undang Pokok No. 22 tahun 1948, dalam daerah Propinsi Sumatera Tengah.
2. Membuat rantjangan serta mengemukakan usul-usul untuk meleakaskan tertjiptanja badan-badan otonomi jang dimaksud, kepada Badan Executief D.P.S.T.

Dengan keterangan ringkas diatas tadi itu djelaslah bahwa tjorak Panitia itu agak berlainan dari tjorak Panitia-panitia jang biasa kita kenal. Sebab selain dari merantjang-rantjang, djuga

Panitia itu mendapat persetujuan dari Badan Executief D.P.S.T., untuk bertindak melaksanakan. Dan djelaslah pula dengan itu bahwa tiap-tiap anggota itu bertanggung djawab penuh.

Tegasnja, rantjangan-rantjangan jang telah dipersama-samakan menjusunnja itu, sesudah mendapat koreksi dan persetujuan dari Badan Executief D.P.S.T. akan dibawa sekali pulang kedaerah masing-masing oleh anggota-anggota Panitia untuk dilantjarkan sekali sesampai disana.

Dengan djalan demikian diharapkan akan tertebuslah niat bersama diatas tadi, jaitu;

„meng-otonoomkan seluruh propinsi Sumatera Tengah paling lambat tanggal 31-12-1948”.

Limit panitia perantjang.

Selanjutnja diputuskan dan ditetapkan sekali oleh Badan Executief D.P.S.T. tanggal-tanggal Panitia itu harus memulai dan mengachiri rapat-rapatnja, untuk merantjang satu usul tentang pembagian propinsi Sumatera Tengah dalam Kabupaten dan Negeri;Marga otonoom dari segala bahan-bahan dari seluruh propinsi Sumatera Tengah jang telah terkumpul. Kesempatan untuk itu diberi seminggu lamanya, jaitu mulai dari tanggal 25-31-10-1948.

Demikianlah waktu jang seminggu itu dipakai dengan sebaik-baiknya oleh panitia, dengan udjud jang satu diruangan mata, jaitu bahwa pada tanggal 1 Djanuari 1949 seluruh propinsi Sumatera Tengah sudah musti otonoom. Sebagai dasar dalam melaksanakan pekerdjaan pantia ini adalah pendirian Badan Executief Sumatera Tengah jang dibentangkan dalam suratnja kepada Komisariat Pemerintah Pusat No. 2431/1/10/Ste. tanggal 21 September 1948 jang isinja antara lain sebagai berikut;

1. Kalau soal desentralisasi ditindjau dari segi juridisch staats-rechtelijk mungkin akan lama memakan waktu untuk pengumpulan bahan-bahan jang perlu untuk instelling ordonnantie dan lain-lain, berhubungan dengan sulitnja perhubungan.
2. Maka kalau ditindjau dari segi sosial psychologis, telah seharusnya didjalankan desentralisasi, karena desakan dari rakjat umumnja, apa lagi benih-benihnja telah ada, sebab didaerah Sumatera Tengah badan-badan otonomi itu hampir sudah rata terbentuk; bahkan di Sumatera Barat sudah berdjalan semendjak Djuli 1946.
3. Menjanggupi pembentukan daerah-daerah otonomi dalam masa 3 bulan.

Dan dalam suratnja tanggal 10 Oktober 1948 No. 209/I/10/Pste. Badan Executief Sumatera Tengah mengusulkan peraturan tambahan dari U.U.D. No. 22. jaitu antara lain supaja buat pertama

kali pembentukan daerah kabupaten, kota ketjil dan desa serta sekalian jang bersangkutan dengan itu, diserahkan kepada Dewan Pemerintah Propinsi, dalam hal mana selekas mungkin dikirim kepada Pemerintah Pusat supaya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam garis besarnya bahan-bahan jang dipakai dalam usaha panitia adalah:

- a. Rantjangan-rantjangan pembentukan daerah-daerah kabupaten dan desa dari masing-masing keresidenan, dari Kantor Desentralisasi Sumatera Tengah dan Sumatera Barat, dari masing-masing panitia daerah dan dari perseorangan anggota panitia sendiri.
- b. Rantjangan-rantjangan dari Pemerintah Sumatera Tengah.
- c. Undang-undang No. 10. Peraturan No. 10, dan Undang-undang No. 22 tahun 1948.
- d. Rantjangan-rantjangan tentang mengatur keuangan kabupaten dan desa, serta daftar tjtjah djiwa, dan daftar statistik kemakmuran Sumatera Tengah.

Patut djuga dijelaskan, bahwa Peraturan No. 10 jang dimaksud diatas ialah suatu peraturan Pemerintah tentang memenuhi pelaksanaan dari Undang-undang No. 10 tahun 1948, peraturan mana menetapkan tugas kewadjaban dari Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera, dikeluarkan 29/5-48.

Dalam pasal 1 dari peraturan ini, dinjatakan bahwa Komisaris Pemerintah Pusat terdiri dari tiga orang Komisaris Negara. Dan pada Komisaris itu diadakan sekretariat jang pimpinannja diangkat oleh Presiden. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa tugas Komisaris ialah:

- a. mengumpulkan bahan-bahan untuk pembentukan daerah-daerah otonoom propinsi dibawah.
- b. menindjau semua pekerdjaan jang hingga sekarang dijalankan oleh Gubernur Sumatera dan memadjukan usul-usul kepada Pemerintah untuk menentukan bagian-bagian pekerdjaan tersebut jang dapat ditetapkan sebagai urusan-urusan rumah tangga otonoom.
- c. menjelidiki dan djika perlu mengusulkan batas-batas daerah kabupaten sekarang.
- d. merentjanakan susunan pegawai bagi kantor-kantor daerah otonoom tersebut dalam a.
- e. mengerdjakan usaha lain-lain jang berhubungan dengan persiapan pembentukan daerah otonoom tersebut.

Selain dari pada kewadjaban tersebut diatas, maka Komisariat mendjalankan pekerdjaan guna pemerintah pusat atas petundjuk Dewan Menteri atau Menteri, dan Komisariatpun bertanggung

djawab kepada Dewan Menteri atau Kementerian jang bersangkutan atas segala hal jang diurusnja. Pun pekerdjaan Gubernur Sumatera didjalankan oleh Komisariat itu, jang selandjutnja menjerahkan pekerdjaan tersebut kepada pemerintah propinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.

Maka menurut petundjuk-petundjuk dan bahan-bahan ini, berusahalah panitia desentralisasi Sumatera Tengah ini, dan sesudah berunding masak-masak, panitia mengambil kesimpulan pendirian sebagai berikut:

1. Didalam hak kekuasaan jang diberikan kepadanya, tiap-tiap kabupaten hendaklah bisa mentjapai kemadjuan-kemadjuan sendiri, terutama dalam soal kemakmuran dan urusan sosial, dengan sedapat-dapatnja atas tanggungan keuangan sendiri.
2. Untuk itu diperlukan luas daerah begitu rupa, dengan djumlah djiwa dan kekuatan ekonomi (hasil alam) jang berimbangan.
3. Tiap-tiap daerah itu, in zijn geheel mestilah mempunyai economische aspecten untuk memenuhi dasar berdiri sendiri dengan teguh.
4. Daerah-daerah itu hendaklah mempunyai geografische mogelijkheden jang baik, jaitu jang memberi kesempatan bagi kesatuan lalu lintas didarat atau disungai ataupun dilaut.
5. Mempunyai kesatuan tjita-tjita pembangunan, umpama daerah-daerah getah sama-sama membutuhkan perbaikan mutu getah, politiek pendjualan, dan dimana mungkin membangun fabriek-fabriek buat barang-barang dari getah. Daerah-daerah laut sama-sama membutuhkan perbaikan dalam tjara penangkapan ikan, perkapalan dan lain-lain. Disamping itu jang sama-sama membutuhkan pertambahan sawah, irrigasi, peternakan ikan, kehewan, kesehatan, kanaliseering, djalan-djalan baru, dan lain-lain.
6. Kira-kira ada perimbangan antara luas, banjak penduduk, hasil padi, hasil lain-lain jang penting dan antara satu daerah dengan daerah lain.
Betul sebagian daerah djiwanja sedikit, tetapi daerahnja luas dan ada kekajaan alamnja, sehingga ada djuga sjarat-sjarat untuk bisa hidup sendiri.
7. Daerah itu mempunyai homogeniteit, jaitu kesatuan masjara-kat, meskipun didalamnja ada diam beberapa suku bangsa.
8. Sedapat-dapatnja daerah-daerah itu mempunyai kesatuan atau pertalian adat istiadat atau keturunan (dasar sosiologisch).
9. Sedapat-dapatnja memenuhi kehendak penduduk wilajah sendiri, jang meminta masuk kesesuatu daerah.

10. Histori, jaitu sesuatu keadaan daerah jang semendjak dahulu kala sudah begitu, sehingga tidak diperlukan lagi perubahan.
11. Dalam pembagian kabupaten diutamakan factor economie, dalam pembagian negeri diutamakan factor adat istiadat.
12. Ada perimbangan tentangan ketjerdasan rakjat.
13. Menghindarkan sentimen-sentimen rakjat jang mungkin timbul.
14. Dasar pertahanan dan strategie. Tiap-tiap daerah sedapat-dapatnja mempunjai pedalaman jang dimasa perdjungan bisa selfsupporting dalam soal makanan untuk bisa lama bertahan: djadi satu achterland jang economisch tjukup kuat.
15. Dasar realiteit jaitu, satu keadaan jang sekarang lantas bisa ditjiptakan dan bukan jang berdasarkan ideologie untuk beberapa tahun dimasa depan.
16. Dan last but not least: dasar tjepat.
17. Tentangan nama-nama Kabupaten diambil sedapat-dapatnja jang berdasarkan sedjarah dan alam (gunung dan sungai-sungai).

Dengan dasar-dasar ini dapatlah Propinsi Sumatera Tengah direntjanakan pembagiannja kepada 11 Kabupaten jaitu:

1. Kabupaten Singgalang-Pasaman: (dulu: Kabupaten Agam) dengan ibu negerinja Bukittinggi,
2. Kabupaten Sinamar: (dulu Kabupaten 50 Kota) dengan ibu negerinja Pajakumbuh.
3. Kabupaten Talang: (dulu Kabupaten Tanah Datar) dengan ibu negerinja Solok.
4. Kabupaten Samudera: (dulu Kabupaten Padang Pariaman) dengan ibu negerinja Pariaman.
5. Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerintji: (dulu Kabupaten Balai Selasa) ibu negerinja Sungai Penuh.
6. Kabupaten Kampar: (dulu Kabupaten Pakan Baru) dengan ibu negerinja Pakan Baru.
7. Kabupaten Inderagiri: (dulu idem) dengan ibu negerinja Rengat.
8. Kabupaten Bengkalis: (dulu idem) dengan ibu negerinja Bengkalis.

9. Kabupaten Kepulauan Riau: (dulu Kabupaten Tandjung Pinang) dengan ibu negerinja Tandjung Pinang.
10. Kabupaten Merangin: (dulu Kabupaten Djambi Hulu) dengan ibu negerinja Muara Tebo.
11. Kabupaten Batang Hari: (dulu Kabupaten Djambi Hilir) dengan ibu negerinja Djambi.

Perubahan jang terpenting dalam pembagian baru ini ialah antara lain-lain:

1. Sumatera Barat jang dulu mempunyai 7 Kabupaten sekarang dijadikan 5 Kabupaten menurut dasar-dasar jang telah dikemukakan tadi.
2. Kewedanaan Bangkinang masuk Kabupaten Kampar.
3. Kewedanaan Siak masuk Kabupaten Bengkalis.
4. Kewedanaan Pelalawan dibagi, bagian Hilir masuk Kabupaten Bengkalis, dan bagian Hulunja masuk Kabupaten Kampar.
5. Ketjamatan Singingi masuk Kabupaten Inderagiri.

B. Tentang pembagian Daerah Negeri.

Dasar-dasar jang dipakai buat menentukan pembagian daerah Negeri dalam garis besarnya adalah sama dengan dasar-dasar pembagian Kabupaten, hanya sadja disini lebih diutamakan **factor adat-istiadat dan perhubungan seperti tadi djuga telah diterangkan**. Pekerdjaan ini sangat dapat dipermudah, karena sebelum Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah dibentuk, tiap-tiap daerah Keresidenan jang lama telah mempunyai Panitia-panitia Desentralisasi Keresiden masing-masing dalam beberapa rombongan, dan mengadakan permusjawaratan dengan pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakjat, Wilajah-wilajah mana jang dapat atau suka, bergabung mendjadikan daerah Otonomi negeri jang dibesarkan, jang akan diberi hak mengatur dan menjusun rumah tangganya sendiri.

Didalam rapat-rapat Panitia Desentralisasi, anggota-anggota berpendapat tjukuplah kiranja, wilajah-wilajah itu dimusjawarkan oleh anggota dari masing-masing daerah jang bersangkutan sadja, dan sebagai hasil pembagiannya didapatkan wilajah-wilajah jang besarnya: di Sumatera Barat kira-kira berdasar kepada ketjamatan atau Kelarasan jang lama, dan di Djambi dan Riau: kira-kira sedikit lebih besar dari ketjamatan, tetapi lebih ketjil dari kewedanaan. Sebagai nama dari gabungan negeri-negeri itu ditetapkan 1 (satu) nama buat seluruh Sumatera Tengah, jaitu nama :

„W I L A J A H”

Rentjana pembagian Wilayah adalah sebagai berikut :

No.	Wilayah	Ibu negeri	Penduduk
1. Kabupaten SINGGALANG-PASAMAN, ibu negeri BU-KITTINGGI terdiri dari 16 Wilayah:			
1.	Tilatang Kamang	Pakan Kamis	61.010
2.	Lima Koto Baso	B a s o	19.350
3.	IV Angkat Tjandung	B i a r o	47.514
4.	IV Koto	Koto Tuo	37.128
5.	Sei. Puar/Banuhampu	Sungai Buluh	45.868
6.	X Koto	Padang Pandjang	36.413
7.	Batipuh	Pitalah	36.322
8.	X Koto Manindjau	Manindjau	44.132
9.	Palembajan Matur	M a t u r	40.845
10.	Lubuk Basung	Lubuk Basung	27.255
11.	B o n d j o l	B o n d j o l	23.312
12.	Lubuk Sikaping	Lubuk Sikaping	16.842
13.	Rao Mapat Tunggul	R a o	17.115
14.	Rao Mapat Tjantjang	Silajang	28.725
15.	Talamau	Talu	37.225
16.	Pasaman	Sukamenanti	17.815
2. Kabupaten SINAMAR (ibu negerinja PAJAKUMBUH, terdiri dari 14 wilayah.			
1.	Pajakumbuh	Pajakumbuh	60.003
2.	L u h a k	Sitjintjin	53.057
3.	Tandjung Pati	Tandjung Pati	25.018
4.	Pangkalan Kota Baru	Kota Baru	22.164
5.	S u l i k i	S u l i k i	40.528
6.	G u g u k	G u g u k	47.528
7.	Sumanik-Sungajang	Sumanik	25.088
8.	Sungai Tarab	Sungai Tarab	24.647
9.	Batu Sangkar	Batu Sangkar	17.162
10.	Tandjung Emas	Tandjung Barulak	19.377
11.	Salimpaung	Tabek Patah	22.146

No.	Wilajah	Ibu negeri	Penduduk
12.	Rambatan	Rambatan	25.679
13.	Lintau Buo	B u o	35.389
14.	Pariangan	Simabur	27.802

3. **Kabupaten TALANG**, ibu negerinja SOLOK,
terdiri dari 19 wilajah.

1.	Gunung Talang	T a l a n g	24.560
2.	Bukit Sundi	Muara Panas	18.705
3.	Bukit Lasung	S o l o k	33.541
4.	IX Koto	Sungei Lasi	10.126
5.	X Koto	Singkarak	37.190
6.	Panindjauan	Sulit Air	32.546
7.	Silungkang	Silungkang	19.584
8.	Talawi	Talawi	12.451
9.	Sidjundjung	Sidjundjung	29.626
10.	Tandjung Gadang	Tandjung Gadang	13.491
11.	V Koto	Tandjung Ampalu	12.651
12.	Kumanis	Kumanis	10.654
13.	Batang Hari	Sungei Dareh	11.858
14.	Koto Baru	Koto Baru	12.052
15.	Lembah Gumanti	Alahan Pandjang	33.418
16.	Lembang Djaja	Bukit Sileh	23.192
17.	Pajung Sekaki	Kubang Nan Duo	13.765
18.	Pasir Talang	Muara Labuh	37.784
19.	Lubuk Gadang	Lubuk Gadang	16.033

4. **Kabupaten SAMUDERA**, ibu negerinja PARIAMAN,
terdiri dari 17 wilajah.

1.	Sungei Beremas	Air Bangih	18.221
2.	Lembah Malintang	Udjung Gading	25.443
3.	T i k u	T i k u	30.919
4.	Pariaman	Pariaman	43.970
5.	Tjampago V Koto	Sikutjur	31.854
6.	Sungei Limau	Sungei Limau	59.015
7.	Lubuk Alung	Toboh Gadang	37.643

No.	Wilajah	Ibu negeri	Penduduk
8.	Negeri Nan Sebaris	Kurai Tadj	40.465
9.	VI Lingkung	Sitjintjin	40.385
10.	VII Koto	Sungei Sarik	46.131
11.	Lubuk Bagalung	Lubuk Bagalung	34.670
12.	Koto Tengah	T a b i n g	29.022
13.	P a u h	Pasar Ambatjang	34.813
14.	Sikakap	Sikakap	6.174
15.	Sipora	Sipora	4.865
18.	Siberut Utara	Muara Siberut	6.025
17.	Siberut Selatan	Sawang Tungku	5.560

5. **Kabupaten PASISIR SELATAN** dan **KERINTJI**,
ibu negerinja **SUNGAI PENUH**, terdiri dari 10 wilajah.

1.	Kerintji Hulu	Semerup	41.366
2.	Kerintji Tengah	Sungei Penuh	38.592
3.	Kerintji Hilir	Sanggaran Agung	27.903
4.	Kambang Lakitan	K a m b a n g	22.977
5.	Balai Selasa	Balai Selasa	35.657
6.	Inderapura	T a p a n	20.457
7.	IX Djurai	P a i n a n	17.679
8.	Bajang	Pasar Baru	34.254
9.	Tarusan	Tarusan	30.988
10.	Batang Kapas	Pasar Kuok	35.884

6. **Kabupaten KAMPAR** ibu negerinja **PAKAN BARU**,
terdiri dari 8 wilajah.

1.	Kampar Kiri	Lipat Kain	10.669
2.	Siak Hulu	Pakan Baru	12.129
3.	Langgam	Langgam	6.090
4.	Rokan Kiri	Udjung Batu	14.955
5.	Rokan Kanan	Pasir Pengarajan	28.750
6.	K a m p a r	Air Tiris	40.825
7.	Bangkinang	Bangkinang	25.315
8.	XIII Koto	Muara Mahat	12.500

No.	Wilajah	Ibu negeri	Penduduk
-----	---------	------------	----------

7. Kabupaten Inderagiri, ibu negerinja RENGAT,
terdiri dari 11 wilajah.

1.	Mandah Kateman	Chairiah Mandah	16.678
2.	G a u n g	Kuala Gaung	16.244
3.	Tembilahan	Tembilahan	34.052
4.	E n o k	E n o k	17.050
5.	Inderagiri	S a p a t	13.919
6.	R e t i h	Kota Baru	24.245
7.	Rengat	Rengat	22.117
8.	Kelajang	Aer Molek	28.927
9.	Baserah	Baserah	36.054
10.	T a l u k	T a l u k	37.408
11.	Singingi	Muara Lembu	6.902

8. Kabupaten BENGKALIS, ibu negerinja BENGKALIS
terdiri dari 9 wilajah.

1.	Tanah Putih	Tanah Putih	9.217
2.	Rokan Hilir	Tandjung Buku	47.614
3.	M a n d a u	B u a t a n	7.573
4.	D u m a i	Rantau Pandjang	11.549
5.	Bengkalis	Bengkalis	36.531
6.	Siak Hilir	S i a k	13.816
7.	M e r b a u	Teluk Belitung	14.329
8.	Selat Pandjang	Selat Pandjang	33.625
9.	Pelalawan Hilir	B u n u t	19.668

9. Kabupaten KEPULAUAN RIAU, belum dapat ditentukan.

10. Kabupaten MERANGIN, ibu negerinja BANGKO,
terdiri dari 9 wilajah.

1.	Petadjin	Muara Tebo	15.615
2.	Batang Bungo	Muara Bungo	22.463
3.	VII dan IX Koto	Teluk Kual	18.802
4.	S e n a g i	Tanah Tumbuh	26.632
5.	Mesumai	B a n g k o	20.729
6.	Luhak XVI	Muaro Siau	11.475
7.	T a b i r	Rantau Pandjang	16.237

No.	Wilajah	Ibu negeri	Penduduk
8.	Batang Asai Limun	Lubuk Resam	14.378
9.	Sarulangun	Sarulangun	24.068

11. **Kabupaten BATANG HARI**, ibu negerinja **DJAMBI**
terdiri dari 5 wilajah.

1.	Tengubuan	Kuala Tungkal	47.425
2.	S a b a k	Muaro Sabak	13.700
3.	K u m p e h	Arang-Arang	14.175
4.	Pidjauan	Lubuk Rusa	27.535
5.	Tembesi	Muara Tembesi	20.950

Kesimpulan rentjana ini ialah, bahwa Propinsi Sumatera Tengah akan terdiri dari 11 Kabupaten dengan 118 wilajah, jaitu 76 wilajah di Sumatera Barat, 28 wilajah di Riau (belum terhitung wilajah di Kepulauan Riau) dan 14 wilajah di Djambi.

Wilajah jang paling besar ialah Wilajah Pajakumbuh dalam Kabupaten Sinamar dengan 60.003 djiwa dan wilajah jang terketjil ialah Sipora di Kepulauan Mentawai dengan 4.865 djiwa. Meskipun ada tjita-tjita dari Panitia hendak menjadikan wilajah jang terketjil dengan kira-kira 7.000 penduduk, tetapi mengingat keadaan djarak dalam kepulauan Mentawai, tjita-tjita ini tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnja Panitia mengusulkan bahwa djumlah anggota D.P.R. wilajah adalah sebagai berikut :

5.000 penduduk jang pertama mempunyai 9 orang wakil.
Tiap-tiap 2.500 djiwa selanjutnja mempunyai 1 orang wakil.
Djumlah ini ditambah pula dengan anggota angkatan (sebagai koreksi buat keahlian dan menambah mutu perwakilan, djuga supaja masuk wakil-wakil semua Negeri gabungan) sebanyak 20%. Tjara membulatkan kelebihan 1.000 penduduk keatas ditambah 1 anggota perwakilan.

Djumlah anggota D.P.R. wilajah itu ditentukan (dihitung) oleh Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah dan disahkan oleh Propinsi dengan dasar-dasar seperti tersebut diatas.

Anggota D.P.R. wilajah buat fase pertama dipilih oleh gabungan anggota D.P.R. Negeri jang masuk dalam wilajah jang sekarang, diantara mereka sendiri, dengan tjara lijestenstelsel, dan jang memilih hanja mereka jang hadir sadja pada hari pemilihan jang telah ditentukan untuk itu.

Istimewa buat Sumatera Barat, pemilihan anggota D.P.R. wilayah adalah sebagai berikut :

Wali Negeri dan D.P.R. dalam negerinja masing-masing menjelenggarakan suatu rapat rakjat jang dihadiri oleh rakjat umum laki-laki perempuan jang berumur 18 tahun keatas. Didalam rapat itu ditjari sedjumlah pemilih sebanjak 2 X djumlah anggota D.P.R. jang ada sekarang dalam negeri itu. Tjaranja rapat untuk memperdapat anggota pemilih itu, diserahkan kepada kebidjaksanaan rapat itu sendiri.

Pemilih-pemilih itu ditambah dengan anggota-anggota D.P.N. (djadinja djumlah pemilih 3 X djumlah anggota D.P.N. sekarang) memilih anggota-anggota Perwakilan Wilayah dari Negeri itu, sebanjak jang telah ditentukan Negeri. Jang dipilih itu boleh dari negeri itu sendiri dan boleh pula dari orang jang berasal dari negeri itu dan diam dilain negeri, asal dalam lingkungan wilayahnja.

Dan Kepala Wilayah diangkat oleh Gubernur dengan gadjinja dibajar oleh Pemerintah buat waktu sampai diadakan pemilihan baru.

Dan mengingat pendirian Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah dan rantjangan pelaksanaan pembentukan daerah-daerah Kabupaten dan Wilayah jang berdasarkan serba tjepat, maka Panitia berharap dapat mentjapai terbentuknja Kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat dan Djambi pada tanggal 21 Desember 1948, di Riau pada tanggal 1 Desember 1948, dan terbentuknja Wilayah-wilayah di Sumatera Barat dan Djambi pada tanggal 1 Desember 1948, dan di Riau pada 31 Desember 1948.

Dan buat seluruhnja di Sumatera Tengah ditentukan tanggal hapusnja Residensi pada tanggal 31 Desember 1948.

Penetapan Daerah Kabupaten-kabupaten.

Rentjana Panitia Desentralisasi ini dimadjukan kepada Pemerintah setelah disiapkan pada tanggal 25 Nopember 1948.

5 hari kemudian jaitu pada tanggal 30 Nopember 1948, berdasarkan usul Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah ini, dikeluarkanlah oleh Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera (Kompempus) satu peraturan NO 81/Kom/U jang dalam konsideransinja dinjatakan bahwa untuk melantjarkan djalannja pemerintahan dan pembangunan dengan mempergunakan tenaga rakjat, perlu segera didjalankan pembagian daerah Propinsi Sumatera Tengah mendjadi daerah-daerah Kabupaten, menurut dasar jang telah digariskan oleh Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah itu. Selandjutnja sesudah ini usul-usul Panitia mengenai pembagian daerah-daerah dan pembentukan Wilayah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi Sumatera Tengah. Dan segera diangsur membentuknja pada beberapa Kabupaten.

Tetapi udara politik antara Republik Indonesia dan Belanda semakin tegang dan pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda pun melantarkan agressinja jang kedua, tepat sehari sudah berachirnja sidang D.P.R.S.T. ke II, dimana diputuskan antara lain pentjabutan status Keresidenan Riau, Djambi dan Sumatera Barat.

Dan pada hari itu djuga di Istana Wakil Presiden di Bukittinggi, diadakan rapat jang diketuai oleh Menteri Keuangan R.I. Mr. Sjafruddin Perawiranegara dengan dihadiri oleh Ketua Kompempus Mr T. M. Hassan, Panglima Tentera Terr. Sumatera Kolonel Hidajat, Gubernur Sumatera Tengah Mr. Nasroen dan beberapa pegawai tinggi lainnja, dimana diambil ketetapan bahwa Propinsi Sumatera Tengah buat sementara **dibekukan dan D.P.D. Keresidenan dihidupkan kembali** dan diberi kekuasaan penuh untuk melantarkan Pemerintahan dan perdjuaan dalam Keresidenan masing-masing. Dan Gubernur Sumatera Tengah ditetapkan sebagai **Koordinator** dari ketiga D.P.D. dalam Propinsi Sumatera Tengah itu. Dan dengan demikian, maka Dewan Perwakilan sedjak dari D.P.R.S.T. sampai ke D.P.R. Kabupaten dan Wilayah jang baru dibentuk, maupun D.P.R. Negeri-negeri jang lama, di **non aktifkan**.

Dan para anggota dari semua D.P.R. ini lalu menerdjunkan diri kedalam perang kemerdekaan didalam susunan-susunan jang dibentuk oleh Pemerintahan Militer seperti M.P.R.N., M.P.R.K., P.M.T., B.P.N.K. dan lain-lain.

Sesudahnja pada tanggal 14 Agustus 1949 dikeluarkan perintah cease-fire, maka dikeluarkan oleh Gubernur Militer Sumatera Tengah Peraturan No. 10/G.M./S.T./49 tentang pembentukan Kabupaten-kabupaten berotonomi jang luas daerahnja meliputi daerah Bupati Militer pada waktu itu, djadi berlainan dengan rentjana Panitia Desentralisasi jang sebelum perang telah disahkan oleh Kompempus.

Oleh sebagian Kabupaten-kabupaten jang berotonomi ini telah dimulai meneruskan pembentukan wilayah-wilayah berotonom jang pada umumnja menurut garis-garis dari Panitia Desentralisasi.

Dan dalam sidang pleno D.P.R.S.T. jang ke III tanggal 3 sampai 12 April 1950 banjak anggota menggugat tentang Wilayah jang berotonomi ini. Suara-suara ini mendjadi perhatian bagi Pemerintah Sumatera Tengah, dan pada tanggal 14 Djuni 1950 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Sumatera Tengah No. 50/G.P./50 tentang pembentukan Wilayah berotonom ini. Dalam pasal 2 dinjatakan bahwa luas dan batas-batasnja menurut jang ditentukan oleh Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah sebelum tanggal 19 Desember 1948, dan djika batas-batas tersebut tidak bersesuaian lagi dengan keadaan sekarang, maka Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten jang bersangkutan dengan pengesahan Dewan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah boleh mengubah batas-batas tersebut.

Tentang bentuk dan susunan Dewan Perwakilan dan Dewan Pemerintah Wilayah ini dijelaskan dalam pasal 4 bahwa; DPR Wilayah terdiri dari sejumlah anggota-anggota yang besarnya ditetapkan atas perhitungan yaitu setiap 2000 jiwa warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil, dengan ketentuan tiap-tiap wilayah, tidak melebihi dari 25 orang anggota dan tidak boleh kurang dari 9 anggota. Sedangkan pemilihan dan penggantian para anggota ini ditetapkan dengan peraturan Prop. Sumatera Tengah. Dan Dewan Pemerintah Wilayah terdiri dari sedikitnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota, diluar ketua (Wali Wilayah) yaitu buat Wilayah yang anggota D.P.R.-nya berjumlah 12 orang kebawah 3 orang, buat yang beranggota 18 kebawah setinggi-tingginya 4 orang, dan buat yang beranggota lebih dari 18 orang setinggi-tingginya 5 orang.

Didjelaskan pula bahwa DPR Wilayah mempunyai Ketua, dan Wakil Ketua, yang dipilih oleh dan dari anggota-anggota DPR Wilayah. Sedangkan buat pertama kali Kepala Wilayah ditunduk oleh Kepala Daerah Prop. Sumatera Tengah. Dan wilayah-wilayah yang sudah berdiri atau telah diputuskan berdirinya menurut peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan yang lain, berdjalan terus sampai diadakan pembentukan pemerintahan baru untuk wilayah-wilayah itu menurut peraturan ini atau peraturan umum. Tentang hak dan kewajiban wilayah ini ditegaskan dalam pasal 3 bahwa ini diatur dalam ketetapan pembentukan (instellings-besluit) oleh Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dan disahkan oleh D.P.R.S.T. sendiri.

Status Militer dihapuskan.

Pun pada waktu yang bersamaan, yaitu 14 Djuni 1950, keluarlah peraturan Prop. Sumatera Tengah No. 57/GP/50 tentang penjabutan status militer bagi wilayah-wilayah dan pembubaran MPRN/MPRK, dalam tugasnya menjusun dan mengendalikan pemerintahan, sedangkan segala harta benda dan kekayaan dari MPRK dan MPRN ini menjadi kekayaan wilayah yang bersangkutan.

Tentang keuangan wilayah diatur dengan peraturan tersendiri oleh DPR Sumatera Tengah, tetapi sebelumnja peraturan ini dikeluarkan, DPRST sudah kena „bom atom“, alias dibekukan, sehingga kesulitan-kesulitan dalam melantjarkan pemerintahan wilayah banyak berkisar disekitar soal-soal keuangan.

Dan disebagian kabupaten belumlah dapat dibentuk wilayah otonom ini, seperti di Kabupaten Sawah Lunto/Sidjundjung, Batang Hari dan Merangin, dimana masih berlaku tjara bernegeri lama yaitu di Kabupaten Sawah Lunto/ Sidjundjung, sedangkan di Kabupaten Batang Hari dan Merangin masih berlaku pembagian daerah tjara bermarga, dengan Dewan Marga-nja.

Demikianlah djalannja usaha untuk mengembangkan tjara ber-
otonomi wilajah ini, jang sebagai pelaksanaan dari tjita-tjita
demokrasi, mendjadi dasar penggerak dari Undang-undang Pokok
No. 22. Timbulnja usaha ini di Sumatera Tengah telah lebih
dahulu dari keluarnja Undang-undang No. 22, karena memang-
lah demokrasi mendjumpai tanahnja jang subur di Sumatera
Tengah.



Pasal 10.

DI KABUPATEN/KOTAPRADJA

Kabupaten dengan D.P.R.K.-nja.

SEKELUARNJA Undang-undang No. 10 tahun 1948 tentang pembagian Sumatera mendjadi 3 Propinsi, dan kemudian disusul dengan Undang-undang No. 22 tahun 1948, dimana tingkat Pemerintahan didaerah disederhanakan mendjadi 3 tingkatan, jaitu: *Propinsi, Kabupaten* dan *Wilajah*, maka Komisariat Pemerintah di Sumatera jang tugasnja diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1948, jaitu, terutama menjiapkan pembentukan daerah-daerah autonom, mengeluarkan peraturannja No. 81/Kom./U 1948 tentangan pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah, jang terdiri dari 11 Kabupaten sbb.:

1. Kabupaten SINGGALANG PASAMAN, ibu kotanja BUKITTINGGI dan melingkungi daerah Kewedanaan Agam Tua, Padang Pandjang, Manindjau, Lubuk Sikaping, Talu (ketjuali Negeri Sasak dan Latingan).
2. Kabupaten SINAMAR ibu kotanja PAJAKUMBUH melingkungi daerah Kewedanaan Pajakumbuh, Suliki, Batu Sangkar.
3. Kabupaten TALANG ibu kotanja SOLOK dan meliputi daerah Kewedanaan Solok, Sawah Lunto, Sidjundjung, Alahan Pandjang, Muara Labuh.
4. Kabupaten SAMUDRA ibu kotanja PARIAMAN dan meliputi daerah Kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar Kota, Mentawai, dan Negeri-negeri Tiku, Sasak dan Latingan.
5. Kabupaten KERINTJI/PASISIR SELATAN ibu kotanja SUNGAI PENUH dan meliputi daerah Kewedanaan Kerintji, Balai Selasa dan Painan.
6. Kabupaten KAMPAR ibu kotanja PAKAN BARU dan meliputi daerah Kewedanaan Bangkinang, Pakan Baru, ketjuali Ketjamatan Singingi, Pasar Pangiairaian, dan Ketjamatan Langgam.
7. Kabupaten INDRAGIRI ibu kotanja RENGAT dan meliputi daerah Kewedanaan Rengat, Taluk, Tembilahan, dan Ketjamatan Singingi.

8. Kabupaten BENGKALIS ibu kotanja BENGKALIS dan meliputi daerah-daerah Kewedanaan Bengkalis, Bagan Siapi-api, Selat Pandjang, Pelalawan ketjuali Ketjamatan Langgam, dan Kewedanaan Siak.
9. Kabupaten KEPULAUAN RIAU ibu kota TANDJUNG PINANG dan meliputi daerah-daerah Kewedanaan Karimun, Lingga, Tandjung Pinang dan Pulau Tudjuh.
10. Kabupaten MENRANGIN ibu kota MUARA TEBO dan Kewedanaan Djambi, Muara Tembesi, Kuala Tungkal, dan Muara Sabak.
11. Kabupaten BATANG HARI ibu kota DJAMBI dan meliputi Kewedanaan Djambi, Muara Tembesi, Kuala Tungkal, dan Muara Sabak.

Dalam Peraturan ini ditegaskan sekali dalam pasal 2, bahwa Pemerintahan Kabupaten terdiri dari D.P.R. Kabupaten dan Badan Executief Kabupaten yang diketuai oleh Bupati yang mempunyai hak suara dalam Badan Executief dan tidak mempunjainja dalam D.P.R. Dan dalam pasal 3 dan 4 dinjatakan bahwa anggota D.P.R. ini terdiri dari pilihan dan angkatan yang banjaknja dalam setiap Kabupaten adalah sbb.

Di Kabupaten SINGGALANG PASAMAN yang berpenduduk 525.596 banjaknja anggota 44 orang terdiri dari 37 anggota pilihan dan 7 angkatan.

Di Kabupaten SINAMAR yang berpenduduk 446.012 djiwa beranggota 40 orang, 33 pilihan dan 7 angkatan.

Di Kabupaten TALANG yang berpenduduk 346.012 djiwa beranggota 37 orang, 31 pilihan dan 6 angkatan.

Di Kabupaten SAMUDRA yang berpenduduk 482.873 djiwa beranggota 43 orang, 36 pilihan dan 7 angkatan.

Di Kabupaten KERINTJI/PESISIR SELATAN yang berpenduduk 305.757 djiwa beranggota 28 orang, 23 pilihan dan 5 angkatan.

Di Kabupaten KAMPAR dengan penduduk 151.233 djiwa beranggota 14 orang 12 pilihan dan 2 angkatan.

Di Kabupaten INDRAGIRI dengan penduduk 247.596 djiwa beranggota 23 orang, 19 pilihan dan 4 angkatan.

Di Kabupaten BENGKALIS dengan penduduk 193.922 djiwa beranggota 17 orang 14 angkatan dan 3 pilihan.

Di Kabupaten KEPULAUAN RIAU belum ada ketentuan.

Di Kabupaten MERANGIN berpenduduk 170.000 djiwa beranggota 16 orang, 13 pilihan dan 3 angkatan.

Di Kabupaten BATANG HARI berpenduduk 123.783 jiwa beranggota 11 orang, 9 pilihan dan 2 angkatan.

Dalam pasal-pasal berikutnya dijelaskan bahwa untuk pemilihan anggota D.P.R. Kabupaten, maka dalam tiap-tiap daerah Kabupaten diadakan Wilayah-wilayah pemilihan yang setiapnya memilih anggota D.P.R. Kabupaten sebanyak yang ditentukan oleh Executief Propinsi. Juga tjara pemilihan dan penggantian anggota ini ditetapkan oleh Executief Propinsi, yang juga mengangkat anggota-anggota angkatan.

Tugas yang akan dilaksanakan Kabupaten.

Urusan-urusan yang masuk dalam rumah tangga Kabupaten yang harus diurus oleh D.P.R. ialah:

- a. Memelihara dan memajukan kesehatan rakyat.
- b. Memajukan pertanian dan perikanan.
- c. Memperbanyak dan memperbaiki mutu ternak.
- d. Membuat dan memelihara jalan-djalan, gedung-gedung dan bangunan-bangunan pengairan.
- e. Memajukan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan rakyat.
- f. Menjelenggarakan penerangan kepada rakyat.
- g. Mengerdjakan pekerjaan sosial dan membimbing rakyat dalam lapangan pekerjaan itu.
- h. Dan lain-lain urusan yang nanti akan diserahkan kepadanya oleh Propinsi.

Pendapatan daerah Kabupaten ialah:

1. Retribusi.
2. Pajak kendaraan yang tidak bermotor.
3. Pajak tontonan.
4. Pajak minuman keras.
5. Pajak reklame.
6. Pajak penerangan jalan.
7. Hasil perusahaan Kabupaten.
8. Subsidi.

Peraturan-peraturan mengenai ini yang dikeluarkan oleh Kabupaten, harus lebih dulu disahkan oleh Propinsi.

Untuk mentjepatkan terbentuknja D.P.R. Kabupaten, maka buat fase yang pertama ini Pemerintah Sumatera Tengah menetapkan aturan peralihan mengenai pemilihan anggota D.P.R. Kabupaten sebagai berikut:

1. Buat Sumatera Barat dan Djambi, anggota D.P.R. Wilajah jang baru terpilih nanti, memilih wakil-wakilnja untuk D.P.R. Kabupaten, dengan tidak mengemukakan tjalon menurut djumlah jang telah ditetapkan oleh Propinsi.

2. Buat Keresidenan Riau, maka anggota D.P.R. Kabupaten dipilih oleh dan dari anggota D.P.R. Keresidenan dari daerah jang bersangkutan, ditambah dengan anggota K.N.I. Kewedanaan dari Kabupaten itu ditambah lagi dengan 20% dari djumlah semuanya jang diambil dari pihak-pihak jang dirasa patut.

Tindakan membentuk D.P.R.-D.P.R. dengan sistem kilat ini, adalah didorong oleh hasrat Pemerintah Sumatera Tengah untuk menjelesaikan maksud dari Undang-undang No. 22 tahun 1948 jaitu mendemokratisir pemerintahan dari atas sampai kebawah sebelum terbit niatahari pada tanggal 1 Djanuari 1949.

Dan sajang usaha jang mulia ini belum berdjalan dengan sempurna, dihalangi pelaksanaannja oleh agresi Belanda ke-II.

Sesudah cease-fire, dan pada tanggal 9 Nopember 1949 dikeluarkan Instruksi Gubernur Militer No. 10/GM/S.T./49 tentang pembentukan Kabupaten berautonomi, seperti jang dimaksudkan oleh Undang-undang No. 22.

Dalam pasal 1 dinjatakan bahwa Kabupaten di Daerah Gubernur Militer Sumatera Tengah dengan batas-batasnja seperti jang ada pada tanggal ketetapan ini, didjadikan Kabupaten jang berhak mengurus rumah tangganja sendiri. Perlu dinjatakan bahwa Keresiden Djambi tidaklah termasuk Daerah Gubernur Militer Sumatera Tengah pada waktu itu, begitu pula daerah Kabupaten di Sumatera Barat diwaktu itu masih seperti sebelum perang dan belum menurut seperti pembagian dari Kompempus.

Tjara membentuk D.P.R. Kabupaten buat Keresidenan Sumatera Barat adalah sbb.:

1. D.P.R. Kabupaten terdiri dari 3 orang jang dipilih oleh dan dari anggota Staf Bupati Militer ditambah dengan anggota-anggota jang dipilih oleh dan dari anggota-anggota Markas Pertahanan Rakjat Ketjamatan di Kabupaten itu, jaitu 2 orang buat setiap Ketjamatan. Sedangkan Bupati Militer, Tjamat Militer, anggota Tentara dan Polisi jang duduk dalam Staf Bupati dan MPRK hanja boleh memilih, tetapi tidak boleh dipilih mendjadi anggota D.P.R. Kabupaten.

2. Dewan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari 5 orang jang dipilih oleh dan dari anggota-anggota D.P.R. Kabupaten, dan Bupati mendjadi Ketua D.P.R. dengan tidak mempunjai hak suara.

Kepada Kabupaten-kabupaten ini diserahkan sebagai urusan rumah tangga daerahnya, djawatan-djawatan yang selama ini diurus oleh Pemerintah Pusat, terketjuali Djawatan PTT, Pelabuhan, Bea Tjukai, Tambang, Perusahaan Negara, Polisi, Kerdjaksaan dan Kehakiman, Kehutanan, Iuran Negara, Ktentaraan, Koperasi, Gas Listrik, Kependjaraan dan Agama. Dan buat membiyai urusan-urusan yang diserahkan kepada Kabupaten itu, Kabupaten-kabupaten tersebut menerima sebagian dari penghasilan Negara yang djumlahnya akan ditetapkan dalam peraturan yang tertentu, dan bila tak tjukup dapat diberi bantuan istimewa.

Dan tjara pembentukan ini buat daerah Keresidenan Riau ditetapkan menurut usul Panitia Desentralisasi yang telah didjadikan Peraturan oleh Kompempus sebelum agresi.

Pembentukan D.P.R.K.-D.P.R.K. di Sumatera Tengah.

Dengan keluarnya instruksinya ini, maka didaerah Gubernur Militer Sum. Tengah (Riau dan Sum. Barat) terbentuklah D.P.R.-D.P.R. Kabupaten.

Seperti dinjatakan sebelum ini, di Keresidenan Riau D.P.R.² sudah dibentuk sebelum agresi, dan didaerah Sumatera Barat dibentuklah D.P.R. Kabupaten Pasaman, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Solok, Agam, Sawah Lunto/Sidjundjung, Padang/Pariaman dan P.S.K.

Kemudian dengan Ketetapan Ketua PDRI, mulai 1 Djanuari 1950 Pemerintahan Gubernur Militer Sum. Tengah dihapuskan, dan dengan demikian dibangunkan kembali Propinsi Sumatera Tengah yang diresmikan pada tgl. 1 Pebruari 1950.

Dengan diaktivirnya kembali Propinsi Sumatera Tengah ini, maka Djambi yang dalam Pemerintahan Militer selama perang masuk ke Sumatera Selatan, kembali ke Propinsi Sumatera Tengah seperti yang dimaksud dalam Undang-undang No. 10 tahun 1948. Dan karena ketika D.P.R.-nya dibentuk, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 telah keluar, maka pembentukan D.P.R. Kabupaten Merangin dan Batang Hari yang meliputi daerah Keresidenan Djambi lama, dilaksanakan menurut P.P. 39 tersebut.

Dan untuk mendapat pandangan selintas tentangan D.P.R. Kabupaten di Sumatera Tengah, maka dibawah ini kami uraikan ichwal dari D.P.R. itu satu persatu.

KABUPATEN PASAMAN

Dibentuk menurut instruksi Gubernur Sumatera Tengah No. 10/GM/ST/49 tanggal 9 Nopember 1949 pada tanggal 12

Desember 1949, dengan djumlah anggota sebanyak 24 orang. Dan perimbangan kursi didalamnja adalah sebagai berikut:

Partai Sosialis Indonesia	9 orang
M a s j u m i	6 orang
Partai Murba	1 orang
Madjelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau	1 orang
Partai Komunis Indonesia	1 orang
P e r w a r i	1 orang
Partai Politik Islam Perti	1 orang
Tidak berpartai	4 orang

Wilajah-wilajah jang masuk dalam lingkungan Kabupaten Pasaman ini, adalah Lubuk Sikaping, Bondjol, Rao, Talamau (Talu), Pasaman, Lembah Malintang, Sungei Beremas.

LIMA PULUH KOTA

D.P.R. ini dibentuk menurut instruksi Gubernur Militer No. 10 djuga, dan diresmikan pada tanggal 19 Desember 1949. Anggota-tanja berdjumlah 24 orang, dan perimbangan kursi didalamnja adalah sebagai berikut:

M a s j u m i	15 orang
Partai Komunis Indonesia	3 orang
Partai Politik Islam Perti	3 orang
Muhammadijah	2 orang
Partai Sjarikat Islam Indonesia	1 orang

Sedangkan Wilajah-wilajah jang masuk dalam lingkungannya ialah Pangkalan, Kapur IX, Suliki, Harau, Guguk, Luhak dan Pajakumbuh.

TANAH DATAR

D.P.R. Kabupaten Tanah Datar dibentuk menurut Instruksi Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 10 djuga, dan diresmikan pada tanggal 26 Desember 1949. D.P.R. ini beranggota sebanyak 23 orang, dan perimbangan kursi didalamnja adalah sebagai berikut:

M a s j u m i	14 orang
Partai Komunis Indonesia	5 orang
Partai Sosialis Indonesia	2 orang
Madjelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau	1 orang
C.P.P.T.D. (Coordinasi Penghulu ² Tanah Datar)	1 orang

Dan Wilayah² jang masuk dalam lingkungan Kabupaten Tanah Datar adalah X Koto, Batipuh, Lintau/Buo, Rambatan, Pariangan, Tandjung Emas, V Kaum, Sungai Tarab, Sungajang, dan Salimpaung.

S O L O K.

Djuga D.P.R. Kabupaten Solok ini dibentuk menurut instruksi Gub. Mil. S. Tengah No. 10 thn. 1949, dan diresmikan pada tanggal 29 Desember 1949. D.P.R.-nja terdiri dari 15 anggota dan perimbangan kursi didalamnja adalah sbb.:

M a s j u m i	12 orang
Partai Sosialis Indonesia	2 orang
P e s i n d o	1 orang

Sedangkan Wilayah² jang masuk lingkungannja adalah Gunung Talang, IX Koto, X Koto Diatas, X Koto Dibawah, Lembang Djaja, Kubung, Lubuk Gumanti, Pajung Sekaki, Bukit Sundi, Pantai Tjermin, Sungai Pagu dan Sangir.

A G A M.

Pun D.P.R. Kabupaten Agam dibentuk menurut instruksi Gub. Mil. Sumatera Tengah No. 10 itu djuga, dan beranggota sebanjak 21 orang, sedangkan perimbangan kursi didalamnja adalah sebagai berikut:

M a s j u m i	9 orang
Partai Komunis Indonesia	5 orang
Partai Sosialis Indonesia	3 orang
Partai Sjarikat Islam Indonesia	2 orang
Partai Adat Rakjat	1 orang
Gabungan Pemuda Islam Indonesia	1 orang

Kabupaten ini melingkungi sembilan wilayah otonom, jaitu Tilatang/Kamang, IV Angkat/Tandjung, Baso, Banuhampu/ Sei. Puar, IV Koto, Tandjung Raja, Palembajan/Matur, Lubuk Basung, dan Tiku.

SAWAH LUNTO/SIDJUNDJUNG.

Djuga D.P.R.-nja dibentuk dengan instruksi No. 10 jang diresmikan pada tanggal 9 Pebruari 1950, dengan 21 anggota dan perimbangan kursi didalamnja adalah sebagai berikut:

M a s j u m i	6 orang
Muhammadiyah	5 ..
P e r t i	5 ..
G.P.I.I.	1 ..
P.S.I.I.	1 ..
P.K.I.	2 ..
M.T.K.A.A.M.	1 ..

Ketjamatan jang termasuk dalam lingkungan Daerah Kabupaten ini adalah Sawah Lunto, Talawi, Ampat Nagari, Koto Tudjuh (Tandjung Ampalu), Sumpur Kudus, Sidjundjung, Tandjung Gadang, Pulau Pundjung dan Koto Baru.

PADANG PARIAMAN.

Jang dibentuk menurut instruksi Gubernur Militer No. 10, dan diresmikan pada tanggal 22 Pebruari 1950 dengan 25 orang anggota, dan perimbangan kursi didalamnja adalah sebagai berikut:

M a s j u m i	14 orang
G.P.I.I.	4 ..
P e r t i	2 ..
P.K.I.	1 ..
P.S.I.	1 ..
Tidak berpartai	3 ..

Sedangkan Wilayah jang termasuk dalam lingkungan Kabupaten ini adalah Lubuk Alung, Tudjuh Koto, Nan Sabaris, Enam Lingkung, Pariaman, Lima Koto, Sungai Limau, Koto Tangah (Pantai Tjermin), Pauh (Tjermin Terus), Lubuk Bagalung/ Gunung Putih, Siberut Utara, Siberut Selatan, Sipora dan Pagai Utara/Selatan.

PESISIR SELATAN/KERINTJI.

Dibentuk D.P.R.-nja tanggal 23 Pebruari 1950 menurut instruksi Gubernur Militer No. 10 dengan beranggota 21 orang, jang mana perimbangan didalamnja adalah sebagai berikut:

M a s j u m i	12 orang
G.P.I.I.	2 ..
Serikat Tani Islam Indonesia	1 ..
P.S.I.	1 ..
M.T.K.A.A.M.	1 ..
P.N.I.	1 ..
P e r t i	2 ..
A i s j i a h	1 ..

Dan Wilayah yang masuk dalam lingkungan Kabupaten ini adalah sebagai berikut: Koto Sebelas, Bajang, Empat Djurai, Batang Kapas, Lengajang, Ranah Pesisir, Pantjung Soal, Kerintji Tengah, Kerintji Hilir dan Kerintji Hulu.

BENGKALIS.

Dibentuk pada tanggal 29 Nopember 1948 menurut Peraturan Kompempus No. 81/Kom/U: tahun 1948, dan pemilihan anggotanja berdasarkan putusan Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah tanggal 25 Nopember 1948. Dan D.P.R.-nja beranggota 16 orang, sedangkan perimbangan kursi didalamnja adalah sebagai berikut:

Masjumi	10 kursi
P.N.I.	4 ..
P.K.I.	1 ..
Parkindo	1 ..

Daerah Kabupaten ini melingkungi Ketjamatan-ketjamatan Bengkalis, Bukit Batu, Dumai, Siak Seri Indra Pura, Sungai Apit, Mandau, Bagan Siapi-api, Kubu, Tanah Putih, Selat Pandjang, Merbau, Pangkalan Bundut, Pangkalan Pasir, dan Kuala Kampar.

INDRAGIRI.

Dibentuk pada tanggal 27 Nopember 1948 menurut Peraturan Kompempus No. 81, dan pemilihan anggotanja berdasarkan putusan Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah tanggal 25 Nopember 1948, dan D.P.R.-nja beranggota 21 orang yang perimbangan kursi didalamnja adalah sebagai berikut:

Masjumi	18 orang
Murba	2 ..
Perti	1 ..

Sedangkan Wilayah-wilayah yang berada dalam Kabupaten ini adalah Rengat, Mandah Kateman, Kuala Indragiri, Enok, Kuantan Hilir, Singingi, Tembilahan, Pasir Penju, Siberida, Gaung Anak Serkah, Kuantan Hulu dan Retih.

KAMPAR.

Dibentuk menurut Peraturan Kompempus No. 81, dan pemilihan anggotanja berdasarkan putusan Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah 25 Nopember 1948, tanggal pembentukan, djumlah anggota dan perimbangan pembahagian kursi selengkapnja tidak diperdapat tjatatan yang pasti pada waktu menyusun laporan ini.

KEPULAUAN RIAU.

Karena daerah ini selama perdjuaan kemerdekaan diduduki oleh Belanda dan barulah sesudah pemulihan diserahkan kepada Pemerintah R.I. tanggal menurut Undang-undang No. tanggal, maka D.P.R.-nja barulah terbentuk tanggal 11 Maret 1951 menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950. Dan perimbangan kursi didalamnja adalah sebagai berikut:

Masjumi	9 orang
G.P.I.I.	2 ..
Muhammadiyah	2 ..
Aisjiah	1 ..
P.I.R.	2 ..
Buruh	2 ..
Perwari	1 ..
Parkindo	1 ..

Ketjamatan-ketjamatan dalam Kabupaten ini adalah sebagai berikut: Bintang Selatan, Datuk Kaja Tambelan, Bintang Utara, Batam, Karimun, Kundur, Muro Sulit, Singkep, Lingga, Belakang Daik, Siantan, Djemadja, Midai, Serasan, Bunguran Barat, dan Bunguran Timur.

MERANGIN.

Dibentuk D.P.R.-nja pada tanggal 16 Desember 1950 menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 dengan beranggota 20 orang jang perimbangan kursi didalamnja adalah sebagai berikut:

Masjumi	11 orang
P.N.I.	3 ..
P.K.I.	2 ..
P.S.I.	1 ..
G.P.I.I.	1 ..
P.G.R.I.	1 ..
Muslimat	1 ..

Ketjamatan-ketjamatan jang berada dalam lingkungannja adalah Bangko Ilir, Tabir Rantau Pandjang, Sungai Manau, Siau Djangkat (Muara Siau), Muara Bungo, Rantau Pandan, Tanah Tubuh, Muara Tebo Ulu, Muara Tebo Tengah, Muara Tebo Ilir, Sarolangun, Pauh dan Limun Batu Asai.

BATANG HARI.

Dibentuk pada tanggal 19 Pebruari 1951 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 dengan beranggota 21 orang jang perimbangan kursi didalamnja adalah sebagai berikut:

M a s j u m i	7 orang
P.N.I.	2 „
Pemuda Rakjat	2 „
Muhammadiyah	1 „
G.P.I.I.	2 „
P.S.I.	1 „
Serikat Buruh Islam Indonesia	1 „
Perwari	1 „
Parkindo	1 „
Tidak berpartai	3 „

Ketjamatan-ketjamatan jang termasuk dalam lingkungannja adalah: Djambi Kota, Djambi Luar Kota, Kumpeh, Sekarnam, Muara Sabak, Tungkal Ilir, Tungkal Ulu, Muara Tembesi, Mersam, Muara Bulian.

KOTAPRADJA PADANG.

GEMEENTE Padang didirikan pada tahun 1906 menurut artikel 1 Ordonnantie tanggal 1 Maret 1906 dan tertjantum dalam Lembaran Negara (Staatsblad) No. 151 jang mulai berdjalan tanggal 1 April 1906. Mulai waktu jang tersebut diatas, Burgemeester Padang dirangkap oleh Asisten Residen.

Menurut artikel 7 Ordonnantie tanggal 1 Maret 1906 termuat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) 151 tahun 1906, Gemeente Padang mulai membentuk suatu Dewan jang bernama *Gemeenteraad van Padang* dengan ditentukan djumlah anggota 19 orang terdiri dari 13 orang Eropah atau orang-orang jang telah digelijkgesteld, 4 Indonesia dan 2 orang asing.

Menurut Ordonnantie tanggal 25 September 1917 jang dimaklumkan dalam Staatsblad No. 587, maka djumlah anggota Gemeenteraad van Padang djadi 17 orang terdiri dari 10 orang Eropah atau orang jang telah digelijkgesteld, 5 Indonesia dan 2 orang asing, mulai tahun 1917 anggota-anggota Dewan dipilih, dan susunan anggota-anggota Dewan tersebut terus seperti tersebut, sampai tahun 1942.

Tanggal 7 Agustus 1928, diadakan Burgemeester pertama buat Kota Padang, sedang sebelum itu Gemeente Padang dirangkap/dipimpin oleh Asisten Residen, dan mulai tanggal 7 Agustus 1928 Gemeente Padang langsung dibawah Departemen B.B. bahagian Desentralisasi.

Pembentukan Gemeente Kota Padang (Stadsgemeente) mulai berlaku tanggal 1 Djuli 1938. Mulai dari tahun 1906, Ketua Gemeenteraad van Padang adalah Asisten Residen, dan mulai tahun 1928, Ketua Gemeenteraad van Padang, adalah Burgemeester dan Kepala Daerah djuga Burgemeester.

Dengan adanja Propinsi Sumatera tahun 1936, status dari Gemeente Padang hubungannja langsung ke Gubernur Sumatera di Medan. Tahun 1938 Gemeente Padang mendjadi Stadsgemeente jang dimaklumkan dalam Staatsblad tahun 1938 No. 357 tanggal 1 Djuli 1938 jang mulai berlaku pada waktu itu, dan berachir sewaktu masuknja tentara Djepang bulan Maret 1942.

Mulai pendudukan Djepang, Gemeente Padang diperintah oleh seorang Padang Sityo langsung statusnja ke Syu Tyokan Sumatera Barat.

Tahun 1946 Kota Padang dibawah pemerintahan Wali Kota Mr. Abu Bakar Djaar, statusnja langsung ke Residen Sumatera Barat, dan dalam tahun ini djuga dibentuk Dewan Kota Padang jaitu K.N.I. Tjabang Padang terdiri dari pleno dan harian.

Pada bulan Mei 1946, Wali Kota Mr. Abu Bakar Djaar digantikan oleh Wali Kota Aziz Chan sampai tanggal 20 Djuli 1947. Mulai tanggal 20 Djuli 1947, Pemerintahan Kota Padang pindah ke Padang Pandjang dibawah pimpinan Said Rasad.

Pada tahun 1946 dengan berdirinja Sub. Propinsi Sumatera Tengah, kemudian tanggal 15 April 1948 menurut Undang-undang No. 10 dengan hapusnja Sub. Propinsi Sumatera Tengah, (Sumatera dibagi 3 Propinsi), status Kota Padang langsung ke Propinsi Sumatera Tengah.

Setelah Pemerintahan Kota Padang pindah ke Padang Pandjang, di Kota Padang mulai bulan September 1947, oleh H.T.B. dibentuk Gemeenteraad van Padang dengan Burgemeesternja Dr. A. Hakim, dan anggota-anggotanja ditundjuk 17 orang, terdiri dari 7 orang Indonesia, 5 Belanda dan 5 orang asing sampai tahun 1950. Status Kota Padang waktu itu, kembali langsung berhubungan dengan H.T.B.

Sewaktu penjerahan kedaulatan, dimana Gemeente Padang bertukar dengan Kotapradja Padang dengan Acting Wali Kota Dr. Rasidin jang diangkat oleh Gubernur Sumatera Tengah Mr. Nasroen, untuk pengganti Dr. A. Hakim jang mendapat perlop pandjang, Dewannja sebagai tersebut diatas tidak bekerdja aktief sampai terbentuk Dewan baru menurut Peraturan Pemerintah No. 39/1950.

Untuk membentuk Dewan Kota Padang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tersebut pada tanggal 14 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penjelenggara Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota Padang dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Wali Kota Padang.
Anggota-anggota : Mr. Nazaruddin, Hasan Qalbi, Zubaidah Munaf dan Sjarif Said.

Pada tanggal 29 Djanuari 1951, dilakukan Pemilihan anggota-anggota D.P.R.D.S. Kotapradja Padang, dengan hasil pemilihan, dan ditundjuk oleh partai-partai dan diangkat oleh Pemerintah

sebanjak 22 anggota, dengan 5 orang Dewan Pemerintahan dengan perimbangan kursi sebagai berikut:

P.G.R.I.	1 kursi
Perpindo	2 „
Aisjiah	1 „
Muhammadiyah	1 kursi
Perti	2 „
G.P.I.I.	2 „
Masjumi	2 „
P.B.K.A.	1 „
Pemuda Muhammadiyah	1 „
P.P.I.	1 „
Perwari	1 „
Parkindo	1 „
P.S.I.	1 „
Murba	1 „
P.N.I.	1 „
Angkatan Pemerintah	3 „

Daerah Gemeente Padang (Kota Padang lama):

Berdasarkan Stadsgemeente Ordonnantie, daerah Gemeente Padang meliputi:

1. Kampung Djawa.
2. Belakang Tangsi.
3. Pondok.
4. Sebahagian Ulak Karang.
5. Alang Lawas.
6. Sawahan.
7. Parak Gedang.
8. Pasar Gedang.
9. Sebahagian dari Marapalam.

Djumlah penduduk 60.000 djiwa.

Semasa pendudukan Djepang (1942—1945) daerah Kota Padang, diperluas sehingga meliputi seluruh onderdistrict Padang, dengan demikian Marapalam dan Ulak Karang seluruhnja masuk Kota Padang ditambah lagi dengan Seberang Padang, Teluk Bajur, Bukit Air Manis dan Gunung Pengilun dengan djumlah penduduk 78.000 djiwa.

Sesudah penjerahan kedaulatan tahun 1949, oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah disusun Pemerintahan Kota Padang

begitu rupa dengan mengangkat Dr. Rasidin mendjadi Acting Wali Kota, dan dengan ketetapan Pemerintahan Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/GP50, daerah Kota Padang kembali diperluas sehingga meliputi lagi ketiga bekas kampung dari onderdistrict Padang dahulu dengan djumlah penduduk 148.937 djiwa.

Bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah Kota Padang.

Kepala Daerah ialah Wali Kota dan disampingnja D.P.R. dan D.P.D. jang dibentuk menurut Peraturan Pemerintah No. 39/1950. Urusan Pemerintahan Umum jang dahulunya diselenggarakan oleh H.P.B. ditugaskan kepada seorang Patih dan seorang Wedana jang dibantu oleh 3 orang Asisten Wedana. Tiap-tiap kampung jang djumlahnja 13 buah dikepalai oleh seorang Kepala Kampung.

Pasal 11.

DI KERESIDENAN.

Zaman Minangkabau Raad.

SEMENDJAK zaman Kolonial daerah Sumatera Barat sudah djuga mengenal akan autonomi jang waktu itu dinamakan Autonomi Groepsgemeenschap Ordonnantie jang memperlihatkan dirinja kepada rakjat dalam bentuk „Minangkabau Raad”.

Perhatian rakjat kepada Minangkabau Raad ini amat besar pada ketika sebelum dibentuk, karena dalam tingkat propaganda, kelihatan serasa-rasa luas lapangan didalamnja untuk melantjarkan tjita-tjita para pemimpin rakjat walaupun golongan orang pergerakan politik dimasa itu, lebih-lebih orang-orang jang non coperator hanja angkat bahu sadja meletjehkan Dewan ini.

Tetapi sesudah terbentuk dan berdjalan, semakin lama perhatian kepadanja semakin kurang, lebih-lebih sesudah negeri Belanda djatuh ketangan Djerman tanggal 10 Mei 1940, ternjata benar pembatasan hak-haknja sehingga ia mendjadi bungkus jang tak berisi.

Dan setelah Djepang menanamkan kekuasaannja jang pada mulanja berusaha mendekati pemimpin-pemimpin rakjat, dan setelah ternjata bahwa mereka ini tak dapat diperalat dengan begitu sadja, dan waspada sehingga tak dapat dipermainkan, maka Djepang kembali memakai alat-alat kolonial Belanda jang dipaksa dengan kekerasan tjambuk Militer Djepang dengan tempeleng dan „bagero”-nja untuk melaksanakan perintah mereka terhadap rakjat.

Zaman Syu Sangi Kai.

Insjaf akan kekuasaan pemimpin-pemimpin jang sekurang-kurangnya bisa menghalang-halangi lantjarnja usaha mereka, maka mereka membentuk sebuah Dewan Keresidenan jang dinamakan Syu Sangi Kai. Syu Sangi Kai ini tidak mempunyai hak autonomi apa-apa hanja mendjadi badan jang akan mendjawab pertanyaan-pertanyaan dari Syu Tyokan tentang tjara jang setepat-tepatnja untuk membantu usaha perang Djepang, dan hasil pemitjaraannja diterompetkan oleh Senden-han, dan barulah diiringi oleh pemu-ngutan bahan-bahan dan tenaga rakjat dengan segala kekerasan.

Para anggota Syu Sangi Kai jang berbitjara dibawah dagu Kem-petai jang menghantu itu, tentu sadja tak dapat berbuat selain dari pada berusaha buat mengobati sedikit-sedikit luka-luka jang dalam jang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan Djepang.

Semakin gentingnja keadaan perang bagi Djepang, semakin menjebakkan mereka berusaha keras buat menjatukan tenaga rakjat buat membantunja. Setelah PUTERA di Djawa jang dipimpin Bung Karno mendjadi HOKOKAI atau Badan Kebaktian Rakjat, maka sistim partai satu ini diadakan pula didaerah-daerah di Sumatera, karena seperti diketahui, semasuknja Djepang segala partai dan gerakan rakjat dibubarkan. Maka disusunlah Hokokai Sumatera Barat jang didalamnya tergabung orang-orang jang terkemuka pada waktu itu dari berbagai golongan masja-rakat.

Baru sadja Hokokai ini tersusun dan memulai usahanja, maka djatuhlah bom atom dan Djepang menjerah dengan tak bersjarat.

Segera sesampainja siaran Proklamasi Kemerdekaan di Sumatera Barat, maka para pemimpin Hokokai, mengadakan rapat di Kantor Pusatnja di Padang pada tanggal 27, 28 dan 29 Agustus 1945, dimana diambil putusan antara lain:

Pembentukan K.N.I.

Membubarkan Kokokai dan menjerahkan harta-bendanja kepada Pergerakan Nasional, membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Barat selaras dengan pengumuman Presiden pada 22 Agustus, dengan ketentuan bahwa buat sementara waktu anggotanja terdiri dari anggota pengurus Hokokai lama sebanyak 41 orang.

Sesudahnja terbentuk, maka diadakanlah Rapat Pleno K.N.I. daerah Sumatera Barat jang pada tanggal 31 Agustus 1945 bertempat di Alang Lawas, dimana telah ditetapkan susunan anggota pengurus beserta kepala dan anggota bagian-bagiannja sebagai berikut :

Ketua Saudara M. Sjafe'i.

Ketua Muda I: Saudara Dt. Perpatih Baringek, Ketua Muda II: Dr. M. Djamil, Setia Usaha — Bendahari, Mr. St. Mohd Rasjid.

Sedangkan anggota-anggota dibagi kepada beberapa bahagian, sebagai berikut :

1. Bahagian Persatuan dan Pendidikan: Saudara-saudara Mr. M. Nasrun dan Saaduddin Djambek.
2. Badan Penolong Keluarga Korban Perang (B.P.K.K.P.): Saudara-saudara Chatib Suleiman, Ismael Lengah, Suleiman, H. A. Wahab Amin, Dr. Nazaruddin, dan Burhanuddin.

3. Badan Keamanan Rakjat (B.K.R.): Saudara-saudara Ismael Lengah, Ahmaddin Dt. Berbangso, Sulaiman, dan Raden Suleiman.
4. Kesedjahteraan rakjat: Saudara-saudara Dt. Madjo Urang, Umar Marah Alamsjah, Dr. Athos Ausri, dan Mr. Nazaruddin.
5. Kaum ibu dan puteri: Saudari Rkj. Dt. Temenggung, Sjam-sidar Jahja, Zubeidah Munaf, Hapipah Lanjunin.

Kemudian dalam rapatnja pada tanggal 2-9-1945 karena keadaan keamanan sangat genting, maka pengurus B.K.R. disusun sebagai berikut:

Penasehat: Saudara-saudara A. Dt. Berbangso dan Rd. Suleiman.

Pengurus: Saudara-saudara Djamalus Jahja (Ketua), Marah M. Taher, Ismael Lengah, S. J. St. Mangkuto, dan H. Sira-djuddin Abbas.

Dan anggota-anggota selanjutnja ialah :

Saudara-saudara Mr. S. Harun Alrasjid, Bassa Bandaro, Darwis, Dr. Madjolelo, Abdullah, Sjaif Usman, Dr. Akkmam, Dt. Temenggung Gadang, Agus Sastra Dipradja, Dt. Palimo Kajo, A. Gaffar Djambek, Mr. Abu Bakar Djaar, Dr. Rasjidin, Amir Hakim Siregar, Ismail Karim, Bariun A. S., Aziz Latif, Abd. Malik, St. Usman Karim, M. Suib, Mustaffa St. Maradjo, St. Ahmad, A. Fattah St. Malano, dan Dt. Simaradjo.

Sidang Pleno ke-II.

Sidang ini diadakan di Pasar Gedang-Padang pada tanggal 4 dan 5 Oktober 1945. Oleh karena derasnja gelora revolusi rakjat, maka ternjata bagian-bagian yang diadakan pada K.N.I. itu belum dapat memenuhi kebutuhan perjuangannya meskipun para pengurus telah bekerja keras, maka diputuskanlah dalam rapat ini bahwa segala aliran dan golongan dalam masyarakat harus mempunyai wakil dalam K.N.I.

Untuk ini ditanam satu Komisi yang terdiri dari 5 orang yaitu saudara-saudara Dt. Madjo Urang, Abdullah Kamil, Anas St. Masa Bumi, Azizchan dan Ismail Lengah.

Komisi ini diberi tugas untuk mendaftarkan orang-orang yang patut duduk dalam K.N.I. daerah Sumatera Barat agar K.N.I. akan dapat menjerminkan seluruh masyarakat Minangkabau pada waktu itu. Tambahan anggota yang dimaksud akan berdjumlah 39 orang sehingga seluruh anggota K.N.I. berdjumlah 80 orang.

Selesailah Pleno ini maka pada tanggal 16 Oktober 1945 keluarlah Maklumat Pemerintah No. 10 tahun 1945 yang menegaskan antara lain bahwa Komite Nasional Pusat sebelumnya terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan D.P.R. disertai kekuasaan

Legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan Negara serta menjetudjui bahwa pekerdjaan K.N.I. Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan bertanggung djawab kepada K.N.I. Pusat.

Sebagai kelanjutan dari Maklumat ini untuk menegaskan kedudukan K.N.I. Daerah dikeluarkan pula Undang² No. 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah mendjadi badan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan pekerdjaan dan mengatur rumah tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Daerah jang lebih luas dari padanja. Seterusnja dinjatakan bahwa oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang sebanyak-banyaknja 5 orang sebagai Badan Executief jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu, dan peraturan itu dipertegas lagi buat daerah-daerah di Sumatera dengan Maklumat Gubernur Sumatera No. 8/MGS tanggal 12 April 1946.

Sidang Pleno ke-III.

Sidang ini bertempat di Padang dalam suasana jang semakin panas berhubung dengan pendaratan tentara Sekutu tanggal 10-10-1945.

Dan untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Sumatera jang telah diuraikan dibagian lain, maka sidang Pleno memutuskan bahwa Ketua M. Sjafei jang memangku djabatan Residen diganti dengan Dr. Djamil. Selandjutnja Pleno djuga memutuskan bahwa agar K.N.I. dapat memikul kewajiban sebagai perwakilan rakjat jang membantu pekerdjaan Pemerintah, anggotanja ditambah seperti jang dikemukakan oleh Komisi dengan beberapa perubahan dan banjaknja didjadikan 107 orang jang nama-namanja sebagai berikut:

Ketua dipegang oleh Dr. Djamil, Mr. Rasjid dan Mr. Nasrun masing-masing mendjadi Ketua 1 dan 2.

Dewan harian: Bachtaruddin, Sjarif Usman, Darwis Thaib Usman Keadilan, Abdullah Kamil, Chatib Suleiman, S. J. St. Mangkuto.

Sesudah perobahan dan penambahan ini, maka para anggota K.N.I. Sumatera Barat selain dari jang telah disebutkan itu, adalah Saudara-saudara: 1. p.t. Bariun A.S. 2. Mr. Nazaruddin 3. Bagindo Tahir 4. Jacob Jahja 5. Zainuddin P.S. 6. Dt. Simaradjo 7. Sjarifah Arif 8. Suleiman 9. A. Gaffar 10. Abd. Fatah St. Malano 11. Bgd. Darwis 12. R.S. Surjapradja 13. Rkj. Dt. Temenggung 14. Dt. Bagindo 15. R. O. Ganto Suaro 16. Dt. Bareno 17. Suleiman Effendi 18. Iskandar Tedjasukmana 19. Dr. Ali

Akbar 20. Basjah Lubis 21. Ahmad Basjah 22. Sidi Bakarudin 23. Dt. Maruhum 24. Darwis Maruf 25. Ahmad Sjuib 26. Aziz Chan (meninggal 20-7-1947) 27. Abdullah 28. Tamimi Usman 29. Gani Sjarif 30. Dr. Rifai 31. Chatib Salim 32. Dt. Kodoh 33. Dt. Maradjo 34. H. Siradjuddin Abbas 35. A. Gaffar Djambek 36. Anwar St. Saidi 37. Tan Tuah Bgd. Ratu 38. Thaher Marah Sutan 39. Marzuki Jatim 40. Rkj. Rasuna Said 41. S. M. Latif 42. H. Mahmud Junus 43. Saaduddin Djambek 44. G. Silitonga 45. Rkj. Chamsanah 46. Sjamsu Anwar 47. Mr. Zainal Zainul 48. Leon Salim 49. Bahar Dt. Mangkuto Alam 50. Anas St. Masa Bumi 51. Marah Abdul Munit 52. Sjarif Said 53. Jacob Rasjid 54. Mahjuddin Dt. R. Sampono 55. M. Sjarif St. Bandaharo 56. Abu Katar 57. H. A. Adnan Thaib 58. Abd. Rachman Dajah 59. Rustam (diganti dengan pt. Dr. A. Rahim Usman) 60. Arif St. Nagari 61. Raden Sadikin Adi Kusumah (diganti dengan Bgd. Muslim Nur) 62. S. D. M. Iljas (diganti dengan A. Rahim Munaf) 63. A. Sjuib (diganti dengan Basjaruddin Ahmad) 64. H. Usman Sjuib (diganti dengan Sjamsuddin Dt. B. M. Lelo) 67. Sofjan (meninggal 21-3-'47 sebagai anggota axecutief) 68. Djuir Muhammad 69. Mhd. Din Jatim (diganti dengan M. Nur St. Maruf) 70. Talib Radjo Nan Sutan (diganti dengan Sirin) 71. Rustam 72. B. St. Larangan 73. Maalip 74. Mansur Isa 75. H. A. Latif 76. H. Bakri Suleman 77. Dt. Tumenggung (diganti dengan Dt. Maradjo Diradjo 78. Dt. Madjo Indo (diganti dengan Nazaruddin Thaha) 79. Dt. Tunggak Besar 80. Damanhuri Djamil (diganti dengan Zamzami Kimin 81. Basir Latif 82. Nurdin Muhammad 83. H. Abd. Malik Idris (diganti dengan Marah Adin Dt. Penghulu Sati) 84. Sultani St. Malako 85. Ibrahim (diganti dengan Rustam Thaib dan sekali lagi digantikan oleh Raimin Dt. Sinaro Kajo) 86. H. Sjafei 87. Marzuki Bakri 88. Taher By 89. Rustam Dt. Gedang Kajo Basa 90. Rustam Jusuf Dt. R. Nan Peta 91. S. D. M. Iljas 92. Dt. R. Basa 93. Sjafri Musa 94. A. St. Saleh 95. Dt. Madjo Lelo 96. Mahmud Marzuki 97. Nursuhud (sebagai wakil pemuda).

Anggota-anggota ini adalah mewakili golongan Pamong Pradja, Kepolisian, Pegawai-pegawai, Serikat Sekerdja, Badan-badan Koperasi, Partai-partai Politik, Kaum Adat, Golongan Agama, Badan Perekonomian, Kaum Ibu, Kaum Tani, Para Guru, Kaum Wanita, Kaum Pelaut, Pemuda, Pekerdja Umbilin, Pekerdja S.S., dan 40 orang anggota jang mewakili Kewedanaan-kewedanaan

Dengan susunan ini dapatlah dikatakan bahwa K.N.I. Sumatera Barat telah merupakan satu Badan Perwakilan jang terdiri dari segala lapisan dan golongan serta wakil dari tiap-tiap kewedanaan.

Sidang Pleno ke-IV.

Sidang ini diadakan tanggal 4 dan 5 Desember tahun 1945 dengan mengambil putusan seperti berikut:

1. Mengadakan susunan pengurus baru dari K.N.I. sesuai dengan isi kawat dari Djawa yang mengandjurkan mengadakan Dewan Harian dan Dewan Executief, yang mana Dewan Harian itu terdiri dari saudara Dr. M. Djamil (Ketua) dan anggota-anggotanya S. J. St. Mangkuto, Usman Keadilan, Bachtaruddin, Darwis Thaib, Marzuki Jatim, Sjarif Usman dan Abdoellah Kamil.

Sedang Dewan Executief terdiri dari Residen Sumatera Barat, sebagai Ketua, Dr. M. Djamil, Wakil Ketua beserta anggota-anggota Mr. St. M. Rasjid, Mr. Nasroen, Chatib Soeleman, Anwar St. Saidi dan Abdoellah.

2. Memilih diantara mereka 20 orang untuk mendjadi anggota Dewan Perwakilan Sumatera, sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumatera dan untuk ini terpilihlah saudara-saudara Chatib Soeleman, S. J. St. Mangkoeto, Anwar St. Saidi, Rasuna Said, Mr. St. M. Rasjid, Barioen A.S., Dr. M. Djamil, Abdoellah, Dt. Simaradjo, Bachtaroeuddin, Mr. M. Nasroen, A. Sjoieib, Sultan St. Malako, Mr. Nazaroeddin, H. Mahmud Junus, Sjarif Usman, Marzoeki Jatim, Saadoeddin Djambek, dan A. Gafar Djambek.
3. Memilih anggota Mr. M. Nasroen untuk duduk dalam Badan Pekerja K.N.I. Pusat di Djakarta, memenuhi permintaan K.N.I.P.

Selanjutnja dalam rapat Executief dan Dewan Harian diadakan dalam K.N.I. beberapa bagian untuk malantjarkan djalan perdjuaan jaitu, Fonds Kemerdekaan diketuai oleh saudara Marzoeki Jatim, bagian Pendidikan diketuai oleh saudara Saaduddin Djambek, bahagian Penerangan diketuai oleh saudara Darwis Thaib, bagian yang mengurus penyelesaian insiden-insiden diketuai oleh Usman Keadilan dan bagian organisasi. Perobahan susunan Dewan Harian terdjadi lagi, disebabkan diangkatnja saudara-saudara Usman Keadilan, S. J. St. Mangkuto dan Saadoeddin Djambek mendjadi pegawai Pemerintah yang mana saudara-saudara itu kedudukannja dalam Dewan Harian digantikan oleh saudara B. M. Thahar, Sjamsoe Anwar dan Barioen A.S.

4. Mengingat gentingnja keadaan, Pleno mengusulkan kepada Pemerintah antara lain, supaya mengatur distribusi bahan makanan, terutama beras, membentuk Pedjabat Penerangan dan Pedjabat Sosial, mengatur pungutan bakti-bakti dari rakjat, mengatur perbelandjaan T.R.I. dan mengusahakan memasukkan

barisan-barisan kedalam T.R.I., dan mengatur pengangkutan bermotor.

Sidang pleno ke-V.

Sidang ini dilangsungkan di Bukittinggi pada tanggal 16, 17 dan 18 Maret tahun 1946, dimana buat pertama kalinya diberi kesempatan seluas-luasnya kepada anggota untuk memajukan pertanyaan dan mengadakan sambutan atas keterangan Pemerintah. Dalam rapat ini antara lain diputuskan:

1. Menanam satu Komisi untuk menjusun rentjana peraturan rumah tangga dan tjara pemilihan dari Dewan Perwakilan Negeri, Dewan Perwakilan Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat, jang terdiri dari Saudara² Adi Negro, Djamin Dt. Bagindo, A. Gafar Djambek, Anwar St. Saidi, Iskandar Tedjasoekmana, Azis Chan dan Basjah Loebis. Ini adalah satu langkah penting untuk mendemokrasikan pemerintahan di Sumatera Barat.
2. Mengusulkan Saudara Dr. M. Djamil menjadi Residen Sumatera Barat buat menggantikan Residen Dt. Perpatih Baringek jang diperbantukan kepada Gubernur Sumatera di Medan.
3. Merobah susunan Dewan Executief dan Dewan Harian sehingga menjadi sbb.:

Dewan Executief tetap diketuai oleh Residen Sumatera Barat, wakil Ketua Mr. M. Nasroen, dan anggota-anggota saudara-saudara Marzoeki Jatim, Sjarif Said, B.M. Thahar, Aziz Chan dan Sidi Bakaroeeddin. Dewan Harian diketuai oleh Mr. M. Nasroen dan Wakil Ketua Roestam Thaib dan anggota-anggota saudara-saudara H. Mahmoed Junus dan Abdoellah bagian Kebudajaan, Rasoena Said bahagian Perdjuaan, Jacob Rasjid dan Darwis Makroef bahagian Sosial, Sultani St. Malako dan Sjamsoe Anwar bahagian Perekonomian, Jacob Jahja bahagian Perdjuaan, sedang kepada Dewan Harian dan Dewan Executief diberi hak iniatief.

4. Untuk berurusan dengan tentera Sekutu ditetapkan Residen Sumatera Barat dan wakil Ketua K.N.I. Sumatera Barat jang boleh membawa pembantu-pembantunya seberapa diperlukan.

Sesudah Pleno ini berlangsung dan Komisi Dewan-dewan Perwakilan telah menjerahkan rentjana, maka untuk melaksanakan rentjana ini oleh Dewan Harian dan Executief K.N.I. dibentuk sebuah Panitia jang terdiri dari saudara-saudara Marah A. Munit, St. Maradjo, H. Mahmud Junus, Sjamsu Anwar, Darwis Ma'roef, Sultani St. Malako, Rasuna Said, Roestam Thaib, Sjarifah Arif dan Jacob Rasjid, Panitia mana diketuai oleh saudara Marah A. Munit.

Pada rapat gabungan Dewan Executief dan Dewan Harian K.N.I. Sumatera Barat tanggal 27 April 1946 ditetapkanlah, bahwa terhitung mulai hari itu Dewan Harian dimatikan, sedangkan Dewan Executief dirobah susunannya sebagai berikut: Ketua Dr. M. Djamil Residen Sumatera Barat, wakil Ketua saudara Marzoeki Jatim, dan anggota-anggota saudara Aziz Chan, Sjarif Said dan B.M. Thahar.

Sidang pleno ke-VI.

Sidang ini diadakan di Padang Pandjang tanggal 2 Djuni 1946, jang dalam rapat ini diputuskan:

1. Supaja Pemerintah membebaskan dari penahanan, pemimpin-pemimpin Volksfront Sumatera Barat, jaitu saudara Bachtaruddin, Barioen A.S., Iskandar Tedjasoekmana, Chatib Soeleman, Basjrah Loebis dan Suleman (penangkapan pada tanggal karena mengeluarkan maklumat tentang tidak berlakunya uang kertas Djepang 100 rupiah).
2. Supaja pendjualan obligasi jang dilakukan oleh Perseroan Bank Sumatera dipindahkan pendjualannya kepada Bank Rakjat Indonesia, dan mendjadikan B.R.I. mendjadi filial Bank Negara Indonesia.
3. Memperbaiki perhubungan dengan bangsa Timur Asing, dan menolak andjuran untuk membedakan status Djawa dan Sumatera.
4. Kontrol ekonomi jang dulu diserahkan oleh K.N.I. kepada Volksfront ditjabut kembali oleh Pemerintah. Pura Nasional diadakan dan diselenggarakan oleh satu badan dibawah pengawasan Pemerintah.

Sidang pleno ke-VII.

Sidang ini diadakan di Padang Pandjang pada tanggal 20 dan 21 Djuli 1946 dengan mengambil putusan sbb.:

1. Mengusulkan Mr. St. M. Rasjid untuk mendjadi Residen pengganti Dr. M. Djamil jang sudah diangkat mendjadi Gubernur Muda Sumatera Tengah.
2. Mengganti anggota Executief jang dalam sidang ini **meletakkan** djabatannya, dengan Executief jang baru dengan tjorak Koalisi jaitu:
 1. Marzoeki Jatim wakil Ketua K.N.I. Sumatera Barat.
 2. I. Tedjasoekmana dari fraksi Sosialis.
 3. Aziz Chan dari fraksi Agam.
 4. R.O. Ganto Suaro dari fraksi Nasionalis.
 5. Sofjan dari golongan Ekonomi.
 6. Sidi Bakaroeddin dari golongan Pemuda dan Tehnik.

3. Mengusulkan untuk Dewan Pertahanan Sumatera Saudara A. Gafar Djambek, Zainal Abidin Ahmad dan Chatib Soeleman.
4. Mengangkat satu Komisi Keuangan untuk membuat rantjangan keuangan yang berdasarkan sentralisasi seluruh Sumatera Barat yang diketuai oleh Zainoeddin P.S. Kepala Pedjabat Keuangan.
5. Mengadakan Mingguan Obligasi jaitu dari tanggal 10 sampai 17 Agustus 1946.
6. Mengadakan larangan pengeluaran beras keluar Daerah Sumatera Barat, ketjual dengan izin Pemerintah, mengandjurkan tanaman muda sebanjak-banjaknja, dan mengeluarkan beras dari kewedanaan-kewedanaan lain-lain diizinkan selain dari djalan laut.
7. Mengubah dan mengganti beberapa orang wakil untuk Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera, yang karena djabatannja tidak dapat lagi memenuhi kewadjabannja sebagai anggota Dewan sebagaimana mestinja, jaitu saudara-saudara Mr. St. M. Rasjid, Dr. M. Djamil, Mr. Nazaroeddin dan Sjarief Usman, diganti dengan Dr. Rahim Usman, Zainal Zainoer, R.S. Suriapradja dan Aziz Chan.
8. Membubarkan K.N.I. ranting di Negeri-negeri, karena semen-djak bulan Djuli 1946 Dewan Perwakilan Negeri sudah berdiri sehingga Pleno menganggap K.N.I. ranting tidak diperlukan lagi, dan selama Dewan Perwakilan Daerah belum terbentuk, maka K.N.I. Tjabang (di kewedanaan) tetap berdiri, tapi Dewan Hariannja dibubarkan.
9. Menetapkan bahwa banjaknja D.P.N. di Daerah Sumatera Barat adalah menurut banjaknja negeri pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sidang ini berlangsung dalam udara politik yang amat suram dan sesudah itupun keadaan menjadi semakin genting dan perhubungan dengan Belanda semakin bertambah buruk, sehingga semendjak bulan April tahun 1946 kantor Residen dan Pedjabat-pedjabat telah hampir semuanya dipindahkan ke Bukittinggi dan rakjat telah banjak mengungsi kedaerah pedalaman. Dalam bulan Agustus 1946, maka kantor K.N.I. atas kebidaksanaan pegawai-pegawainja berangsur-angsur dipindahkan ke Kaju Tanam beserta dokumen-dokumennja. Keadaan penghidupan dalam pengungsian telah memaksa beberapa orang pegawai K.N.I. untuk pulang ke-kampungnja masing-masing sehingga dalam hakekatnja segala pekerjaan K.N.I. diwaktu itu diselenggarakan oleh Dewan Executief di Bukittinggi dengan dibantu oleh Sekertariatnja.

Sidang pleno ke-VIII.

Sidang ini dilangsungkan di Bukittinggi pada tanggal 4, 5 dan 6 Djanuari 1947 dimana dibitjarakan anggaran belandja Sumatera Barat tahun 1947 berkenaan dengan sebentar lagi akan keluarnja

Uang Republik. Sidang mempertjajakan kepada Residen beserta Dewan Executief K.N.I. untuk mendjalankan rentjana perbelandjaan 1947 dengan dasar pengeluaran setjara hemat dan tjermat. Untuk ini ditanam sebuah Komisi terdiri dari 10 orang untuk membuat rentjana perbelandjaan baru berdasarkan perhitungan uang ORI.

2. Diputuskan bahwa Sumatera tetap merupakan 1 Propinsi dengan mempunyai 3 tingkatan autonomi jaitu, diatas sekali Propinsi, dibawah sekali Negeri dan diantara kedua itu satu tingkat lagi jang merupakan Keresidenan atau Kabupaten.
3. Menetapkan 15 tjalon anggota, untuk K.N.I. Pusat jang terdiri dari Saudara-saudara Iskandar Tedjasoekmana, Marzoeki Jatim, Dr. A. Rahim Usman, Bachtaroeuddin Chatib Soeleman, Darwis Thaib, Basjrah Loebis, Rasoena Said, Barioen A.S., Anwar St. Saidi, H. Mahmud Junus, Sidi Bakaroeuddin, A. Gafar Djambek, Djuir Muhammad dan H. Siradjuddin Abbas.

Dari tjalon jang dimadjukan ini untuk mewakili K.N.I. Sumatera Barat diangkat oleh Presiden Saudara-saudara Iskandar Tedjasoekmana, Marzoeki Jatim Dr. A. Rahim Usman, Bachtaroeuddin dan Chatib Soeleman, sedangkan dari pemimpin² rakjat di Sumatera Barat jang diangkat oleh Presiden ada jang dari tjalon² K.N.I. Sumatera Barat dan ada jang tidak jaitu Saudara-saudara Djuir Moehammad, H. Siradjuddin Abbas, Darwis Thaib, Udin, Rasoena Said, A.R. St. Mansoer, dan H. Dt. Batuah.

4. Diputuskan pula bahwa tidak dibenarkan adanja D.P.N. dalam Kota, dan D.P.N.-D.P.N. jang masih berpetjah mesti telah diselesaikan pada bulan Maret 1947, serta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sumatera Barat mesti telah berdiri pada bulan Djuni 1947.
5. Djuga diputuskan membawa orang-orang terkemuka dan para saudagar untuk menindjau Front pertempuran agar dengan mempersaksikan sendiri keadaan perdjjuangan menambah kegiatan dalam menggembléng tenaga rakjat dan mengatur perbekalan buat perdjjuangan. Untuk mengkoordinir soal perbekalan ini, maka segala badan-badan jang mengaturnja digabungkan mendjadi satu jaitu B.P.K.K.P.

Sesudah Pleno ke-VIII terdjadi pula beberapa perubahan dalam Executief K.N.I. disebabkan meninggalnja saudara Sofjan dan diangkatnja Saudara Iskandar Tedjasoekmana mendjadi wakil Ketua K.N.I.P. dan saudara Aziz Chan mendjadi Wali Kota Padang serta saudara Sjamsoe Anwar mendjadi wakil Kepala Bank Negara. sehingga susunan Executief mendjadi sbb.: Ketua Mr. St. M. Rasjid, wakil Ketua Marzoeki Jatim, dan anggota-anggota, A. Gafar Djambek, R. O. Gunto Suaro dan Djuir Moehammad.

Sidang pleno ke-IX.

Sidang ini diadakan dalam suasana kemelut dan sangat genting jaitu pada tanggal 12, 13 dan 14 Djanuari 1948, berdekatan dengan persetudjuan Renville dan sesudah aksi polisionil Belanda jang pertama bulan 7 tahun 1947, djuga sidang ini bertepatan dengan sidang Dewan Menteri di Djokja jang boleh dikatakan akan memberi ketentuan bagi nasib rakjat Indonesia. Sebelum pembukaan sidang, atas usul saudara Hamka selaku Ketua Front Persatuan Nasional, maka Pleno menjetudjui, bahwa waktu pembukaan dari sidang dikirimkan sebuah kawat ke Djokja jang isinja:

Menjokong sepeenuhnja akan usaha Pemerintah Pusat mempertahankan Kedaulatan N.R.I. dan setia berdiri dibelakang Pemerintah Pusat memperdjuangkankan Kemerdekaan bulat tunggal dan penuh dari Negara Kita.

Putusan-putusan dalam sidang Pleno ini adalah:

1. Menjetudjui pembubaran K.N.I. jang sekarang dan pembubaran itu otomatis berlaku waktu telah terbentuknja Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Barat. Dan sebagai dasar pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakjat jang baru itu dipakai rentjana jang dibuat Pleno Maret 1946 dengan beberapa amendemen jaitu, bahwa anggotanja akan berdjumlah 100 orang jakni 1 orang dalam tiap-tiap 25.000 penduduk, dan terdiri dari 3 bagian, jaitu anggota jang mewakili kewedanaan, jang mewakili partai-partai dan anggota angkatan, dengan ketentuan bahwa setiap kewedanaan diwakili oleh 2 orang anggota, dan tentang menetapkan peraturan-peraturan pemilihan djumlah anggota perwakilan partai dan pelaksanaan selandjutnja dari pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat itu diserahkan kepada Dewan Executief.
2. Mengadakan perobahan dan sisipan dalam Dewan Executief berhubung dengan banjaknja pekerdjaan jang dihadapi, hingga susunannja sebagai berikut: Ketua Mr. St. M. Rasjid, wakil Ketua Marzoeki Jatim dan anggota-anggota ialah: Saudara-saudara R.O. Ganto Suaro, Zamzami Kimin menggantikan A. Gafar Djambek jang telah mendjadi Executief Dewan Perwakilan Sumatera, Tan Tuah Bagindo Ratu menggantikan Djuir Moehammad, Dr. Ali Akbar menggantikan Sofjan dan Noersuhud mewakili Pemuda.
3. Menghapuskan Executief Kewedanaan terhitung mulai 15 Djanuari 1948, dan inventarisnja diserahkan kepada Wedana ditempat masing-masing.
4. Untuk menjatukan D.P.N.-D.P.N. jang masih berpetjah djuga, diserahkan kepada kebidjaksanaan Executief, begitu djuga

membentuk kota autonom seperti Padang Pandjang, Sawah Lunto, Batu Sangkar, Pajakumbuh dan Solok.

5. Memberikan hak legislatief kepada Executief dimana keadaan mendesak dan sukar mengadakan Pleno, begitu djuga diberikan kepada Executief hak untuk menetapkan garis besar dari dasar-dasar pembaruan dan memperluas resort autonomi negeri-negeri dalam daerah Sumatera Barat.

Dan sesudah sidang ini berlangsung mulailah Executief menjiapkan peraturan tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat jang akan dibentuk itu dan pada bulan Maret 1948 dikirimkan lah blanco² formulir keseluruh kewedanaan di Sumatera Barat diiringi dengan pemilihan serentak pada tanggal 1 sampai 3 Mei 1948 dengan hasil sbb.:

Dari Kewedanaan-kewedanaan Soeliki terpilih Saudara Zamzami Kimin dan Ahmad Zoelkarnaini, dari Lubuk Alung saudara Sjailendra dan A. Rahim Rasjid, dari Talu saudara Amran Tuanku Maradjo dan Maalif Dt. Sati, dari Air Bangis saudara H. Latif dan H. Usman, dari Sidjundjung saudara St. Madjo Arif dan M. Sjarief Dt. Gunung Emas, dari Agam Tuo saudara Dr. Ali Akbar dan H. Abdullah, dari Kota Padang saudara Dr. Athos Ausri dan Sidi Bakaroeddin, dari Painan saudara Abu Katar Idris dan Arsad Dt. Sinaro Kajo, dari Kota Bukittinggi saudara Dr. A. Rivai dan Marzoeki Dt. R. Mangkuto, dari Manindjau saudara H. Udin Rahmany dan Ma'mur Salim St. Palembang, dari Pajakumbuh saudara H. Zeinuddin Hamidy dan Djajusman, dari Alahan Pandjang saudara Riva'i Wahab dan Sjamsoeddin Sa'id, dari Lubuk Sikaping saudara Thaharoeddin Arif dan Azir Ahmad Dt. Madjo Indo, dari Solok saudara Bahar Dt. Mangkuto Alam dan Ma'ali Bagindo Radjo, dari Batu Sangkar saudara Basjaroeddin Ahmad dan Saleh Dja'far, dari P. Pandjang S.J. St. Mangkuto dan Djamaludin St. R. Ibrahim, dari Balai Selasa saudara H.A. Manan dan Maarif Umar, dari Bangkinang saudara A. Malik Jahja dan A. Hamid, dari Pariaman saudara Pakanuddin Tengku Piaman dan A. Zaini, dari Muaro Lubuk saudara A.I.D.S. Madjo Lelo dan Sjamsuddin Dt. R. Lelo, dari Sawah Lunto Dr. Darwis dan Baharoeddin Dt. Pandito Bassa, dari Padang Luar Kota Jacob Rasjid dan Jozef Ibrahim, dari Sei Penuh A. Rahman Dajah dan Djanan Thaib Bakri dan dari Mentawai saudara Mustafa Ali dan Umar.

Sebulan sesudah itu siap pulalah rantjangan anggota perwakilan partai-partai jang berdjumlah kira-kira 38 orang sehingga tinggalah lagi anggota angkatan sedjumlah 14 orang.

Sidang terachir.

Sidang ini diadakan pada tanggal 10 dan 11 Nopember 1948, dimana berhadir anggota-anggota K.N.I. lama, anggota-anggota

Dewan Perwakilan Rakjat jang baru terpilih, Partai-partai, Tentara, Pamongpradja, Polisi, Alim Ulama dan Ninik mamak, sehingga sidang merupakan satu Konperensi Rakjat Sumatera Barat.

Adapun sebabnja sidang ini diadakan ialah karena tidak ada alasan lagi untuk meneruskan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sumatera Barat, setelah keluarnya Undang-undang No. 10 tahun 1948 tanggal 29 Mei '48 tentangan pembagian Sumatera mendjadi 3 Propinsi, dan diiringi dengan Undang-undang No. 22 tahun 1948, tentang Pemerintahan Daerah Autonom, dimana dinjatakan dalam fasal 1 bab 1-nja bahwa: Daerah N.R.I. tersusun dalam 3 tingkatan ialah Propinsi, Kabupaten, (Kota Besar) dan Desa (Kota Ketjil). Dalam Undang-undang No. 22 itu dalam fasal 46 (Aturan Peralihan) ada ditegaskan bahwa daerah-daerah jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, jang telah berdiri menurut Undang-undang No. 1 tertanggal 23 Nopember 1945 (Pembentukan K.N.I. Keresidenan, Red.) dan lain-lain penetapan Pemerintah berdjalan terus, sehingga diadakan pembentukan Pemerintahan baru untuk daerah-daerah itu menurut Undang-undang ini atau dihapuskan atau diubah. Tetapi karena persediaan-persediaan telah ada untuk membentuk dengan selekasnja pemerintahan jang baru menurut rentjana Panitia Desentralisasi Sumatera Barat jang kemudian diluaskan mendjadi P.D. Sumatera Tengah, maka dirasa tidak perlu lagi diteruskannya K.N.I. dan Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Barat.

Djuga tak perlu rasanja lagi mengadakan satu sidang Pleno jang semata-mata untuk pembubaran K.N.I. dan D.P.R. baru. Maka untuk menghemat waktu dan tenaga, dianggaplah Konperensi Rakjat Sumatera Barat bulan Nopember 1948 ini, sebagai pemberitahuan Subarnja K.N.I. Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Barat jang baru terpilih itu.

Demikianlah perdjalanan K.N.I. Sumatra Barat selama 3 tahun ia memikul tugasnja dalam pelaksanaan Revolusi Indonesia, sebagai iambang demokrasi dalam masa pergolakan politik dan militer jang sesengit-sengitnja. Dan iapun bubarlah diambang pintu agresi kedua.

Pasal 12.

DI PROPINSI.

Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Tengah.

Otonomi di Sumatera Tengah barulah bermula semendjak keluarnya Undang-undang No. 10 tanggal 15 April 1948, tentang Sumatera dibagi menjadi 3 Propinsi. Sebelum itu semendjak Proklamasi, Sumatera seluruhnya adalah merupakan satu daerah otonomi dengan Dewan Perwakilan yang dinamai dengan Dewan Perwakilan Sumatera yang beranggota 100 orang terdiri dari wakil-wakil Keresidenan yang dipilih oleh dan dari K.N.I. Keresidenan. Jumlah anggota dari masing-masing Keresidenan disesuaikan perbandingannya menurut jumlah jiwa dalam keresidenan itu.

Rapat pleno yang pertama dari D.P.S. dilaksanakan di Bukit tinggi pada tanggal 17-20 April 1946, dimana 100 orang anggotanya dilantik.

Rapat pleno yang kedua dari D.P.S. ini dilaksanakan di Bukit tinggi juga pada tahun 1947 yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Mr. M. Roem, Menteri Keuangan Mr. Sjafoeddin Prawiranegara, Menteri Sosial Mr. Maria Ulfah Santoso dan Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Putuhena dari Kabinet Sjahrir.

Rapatnya yang ke III dilaksanakan di Pematang Siantar dan tak lama sesudah itu Siantar jatuh dalam agresi I, dan kedudukan Pemerintahan Sumatera dipindahkan ke Bukittinggi.

Dan setelah keluar Undang-undang No. 10 tahun 1948 dimana ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi terdiri dari anggota-anggota yang jumlah dan pemilihannya seperti Dewan Perwakilan Sumatera pada saat berlakunya Undang-undang ini, disesuaikan dengan pembagian Sumatera menjadi 3 Propinsi, atau dengan kata-kata lain D.P.S. yang beranggota 100 itu membagi tiga badannya sendiri menurut asal daerah anggotanya. Maka anggota yang mewakili Sumatera Tengah menurut Undang-undang ini, dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah.

Dengan beberapa perubahan nama-nama anggota D.P.S. yang mewakili Sumatera Barat yang telah disebutkan sebelum ini, karena disebabkan saudara Mr. Nasroen menjadi Gubernur Sumatera Tengah, saudara Aziz Chan meninggal, saudara Rasuna

Said menjadi anggota Badan Pekeraja K.N.I.P. dan saudara Barioen A.S. meninggalkan daerah Sumatera Tengah, maka susunan anggotanya adalah sbb.:

Dari Sumatera Barat saudara H. Iljas Jacob (Masjumi), Mar-zoekei Jatim (Masjumi), Sultani St. Malako (Murba), A. Gafar Djambek (Tidak berpartai), Saadoeddin Djambek (Tak berpartai), Usman Keadilan (P.K.I.), Anwar St. Saidi (tak berpartai), Dt. Simaradjo (M.T.K.A.A.M.), S.J. St. Mangkuto (Masjumi), Ahmad Sjuib (Murba), Abdullah (Murba), Bachtaroeddin (P.K.I.) R.S. Suriapradja (P.K.I.), Zainal Zainur (Pemuda), Dr. A. Rahim Usman (Partai Sosialis), Damanhoeri Djamil (P.S.I.I.), Tan Tuah Bagindo Ratu (P.B.I.), H. Siradjudin Abbas (Perti), Chatib Su-leman (P.S.I.) dan H. Mahmud Junus (tak berpartai).

Dari Riau saudara-saudara Gulmat Siregar (P.N.I.), Amat Suka (P.N.I.), Dt. Mangku (P.K.I.) rkj Azir Jahja (Perwari), dan Umar Usman (Masjumi).

Dari Djambi saudara Dr. Sjagaf Jahja (P.B.I.), Dr. R. Purwadi (tak berpartai), Dr. Sjahrial Rahman (tak berpartai), dan Sjamsu Bahroem.

Rapatnja yang pertama dipermulaan tahun dipimpin oleh Guber-nur Sumatera Tengah, Mr. M. Nasroen, menurut Undang-undang No. 10 dan anggota-anggota Executiefnja yang pertama ialah; saudara Dt. Mangku, Dr. A. Rahim Usman, S.J. St. Mangkuto. Abdoellah dan Dr. Sjagaf Jahja.

Dalam sidangnja yang ke-II yang berlangsung dalam udara po-litik sangat tegang antara Republik Indonesia dan Belanda dipilih saudara H. Iljas Jacob menjadi Ketua, dimana diterima baik rentjana Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah, mengenai luas-nja otonomi Wilayah dan Kabupaten se Sumatera Tengah dengan berarti penghapusan status Kewedanaan dan Keresidenan.

Dan sehari sesudah sidang pleno ke-II ini berachir, maka Belanda telah melantjarkan agressinja yang ke-II, dan kebanyakan anggota lalu meninggalkan kota buat menghebatkan perdjjuangan didaerah Gerilja.

Kedudukan D.P.R.S.T. dalam Darurat.

Maka dalam rapat yang dipimpin oleh Mr. Sjafroeddin tanggal 19 Desember 1948 sebelum meninggalkan kota, diputuskan bahwa Propinsi Sumatera Tengah dibekukan bersama D.P.R.-nja, dan D.P.D. Keresidenan dihidupkan kembali. Gubernur menjadi koordinator dari ketiga D.P.D. Keresidenan itu.

Dalam bulan Agustus 1949 Executief D.P.R.S.T. dijadikan penasehat Komisaris Pemerintah Sumatera Tengah oleh P.D.R.I., dan karena Komisaris Pemerintah Sumatera Tengah tidak lang-

sung mengurus pemerintahan, maka dalam bulan November 1949 Badan Executief D.P.R.S.T. ini diperbantukan kepada Gubernur Militer Sumatera Tengah.

Sesudah pemulihan dan dihapuskanja pemerintahan militer, maka terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1950 Propinsi Sumatera Tengah kembali dibangun dan D.P.R.S.T. bersidang kembali.

Sidang Pleno ke-III.

Sidang ini berlangsung di Bukittinggi dari tanggal 3 sampai 12 April 1950 yang mempunyai sedjarah pandjang. Dalam sidang ini terdjadi beberapa perubahan dalam keanggotaan dan Executief.

Karena Saudara Chatib Soeleman meninggal dalam peristiwa Situdjuh tanggal 15 Djanuari 1949, maka kedudukannja dalam D.P.R.S.T. digantikan oleh Saudara Thaher Samad, begitu djuga Saudara H. Siradjudin Abbas karena mendjadi anggota Parlemen R.I.S., digantikan oleh Saudara H. Rusli A. Wahid. Dalam Executief karena saudara Abdoellah berada di Djawa dan saudara Dr. Sagaf Jahja mendjadi pegawai R.I.S. di Padang, maka kedudukan saudara itu digantikan buat sementara oleh Ketua dan wakil Ketua D.P.R.S.T. jaitu saudara H. Iljas Jacoeb dan Gulmat Siregar, tetapi beberapa waktu sebelum sidang berlangsung,, Saudara Abdoellah mengirim telegram minta meletakkan djabatan dan saudara Dr. Sagaf Jahja belum bisa hadir, sedang Ketua dan wakil Ketua D.P.R.S.T. tidak dapat seterusnja mendjadi Executief, maka ditundjuklah saudara R. S. Suria Pradja dan Marzoeki Jatim mendjadi acting anggota Executief.

Sidang ini diadakan pada waktu masjarakat Sumatera Tengah merupakan letusan perasaan yang telah lama mengepundan sedjak masa sesudah agresi. Dari berbagai-bagai djurusan terdjadi gelombang perasaan yang membayangkan kepentingan bersilangsiur dari pelbagai golongan. Pertentangan Federal dengan Republikein, dan pertentangan diantara para pemimpin Republikein sendiri dalam persoalan beranting banjak tentang siapa yang paling berdjasa dizaman darurat, serta ditambah sentimen yang meluap dari kalangan rakjat menderita, terhadap mereka yang telah menduduki kursi pemerintahan yang tampaknya telah berangsur baik kehidupannja.

Tak mengherankan djika bajangan masjarakat ini ditjerminkan oleh para anggota dalam pemitjaraannja, diantaranya dengan menuntut pertanggungan djawab dari Pemerintahan Sumatera Tengah yang baru sadja mendapat waktu 3 bulan buat menjusun dirinja.

Pemandangan Umum dari anggota atas lapuran usaha Pemerintahan, diachiri dengan sebuah mosi yang terkenal dengan nama

Mosi Tan Tuah c.s. jang ditanda tangani oleh 15 orang anggota jang merupakan lebih dari seperdua anggota jang hadir.

Dalam konsiderans mosi ini ditegaskan bahwa lapuran Pemerintah sifatnja kabur, dan keadaannja membajangkan kelemahan, serta pimpinan dan tuntunannja politis dan juridis tak dapat dipertanggung-djawabkan, sehingga para anggota serta Ketua Dewan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah sekarang dirasa tidak dapat menghadapi keadaan dan masa jang akan datang.

Oleh karena itu memutuskan;

- a. Memadjukan usul kepada Pemerintah Pusat R.I. di Djokjakarta, agar Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah dipindahkan.
- b. Memadjukan tjalon untuk mendjadi Kepala Daerah merangkap Ketua Dewan Pemerintah Daerah, jaitu seperti dimaksud oleh Undang-undang No. 22.
- c. Menuntut pembubaran susunan Dewan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah jang sekarang (Ketua + anggota).
- d. Memilih anggota Dewan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah jang baru.

Mosi ini diterima oleh sidang dengan 16 suara setuju, 7 tidak setuju, 1 blanco, dalam sidangnya ke-3 tanggal 11 April pagi.

Laksana bunji sebuah bom, mosi ini mengguntur ditengah-tengah opini umum diseluruh Sumatera Tengah, dan mendjadi permulaan dari suatu hikajat demokrasi jang uniek diseluruh Indonesia!

Dalam sidang ini antara lain djuga diputuskan;

1. Mentjalonkan saudara H. Iljas Jacoub mendjadi Gubernur Sumatera Tengah, walaupun pentjalonan atas dirinja ini ditolak oleh Saudara H. Iljas Jacoub sendiri.
2. Memilih anggota Dewan Pemerintahan jang baru, terdiri dari Saudara S.J. Sutan Mangkuto, Sultani Sutan Malako, Thaher Samad, Dt. Mangku, dan sebuah kursi dalam Dewan Pemerintahan disediakan untuk daerah Djambi jang belum dapat diisi pada waktu itu.
3. Menanam suatu komisi buat menjusun rentjana Distribusi jang tepat, terdiri dari saudara-saudara Bachtaruddin, Bahsiar Rahman dan Dt. Simaradjo.
4. Melarang pemakaian kendaraan betja jang didjalankan dengan tenaga manusia dalam daerah Sumatera Tengah.
5. Meresmikan dibubarkannja D.P.R. ketiga keresidenan, Sumatera Barat, Djambi dan Riau.

6. Membentuk satu Panitia jang akan mengurus soal-soal tawanan perang.
7. Menetapkan zittingsgeld sebanjak Rp. 25.— buat anggota D.P.R.S.T.
8. Menanam satu panitia untuk pembentukan seksi-seksi dalam D.P.R.S.T.
9. Memilih saudara M. Rakana Daljan untuk mendjadi Sekretaris Propinsi Sumatera Tengah.
10. Mengirimkan seputjuk kawat kepada Pemerintah Pusat dalam mana didesak agar segera dikirimkan peraturan pemilihan buat D.P.R. Daerah.
11. Memutuskan bahwa kota Bukittinggi tetap mendjadi ibu kota propinsi Sumatera Tengah dan menjerahkan kepada Dewan Pemerintah tentang menempatkan Djawatan-djawatan dikota Padang jang tidak berhubungan erat dengan Gubernur.
12. Menjampaikan kepada Pemerintah Pusat R.I. supaya mendesak Pemerintah R.I.S. untuk memperjuangkan masalah Irian, sehingga sebelum waktu jang ditetapkan oleh K.M.B., Irian telah masuk daerah R.I.S.
13. Menerima dengan suara bulat usul untuk membubarkan Dewan Pemerintah Sumatera Tengah.
14. Mengadakan perubahan dalam tata-tertib D.P.R.S.T., sehingga tiap-tiap anggota diluar sidang djuga berhak bertanja (interpellasierecht) langsung kepada Dewan Pemerintah dengan lisan atau tulisan.

Demikianlah sidang D.P.R.S.T. jang ke-III itu diachiri pada tanggal 12 April 1950 dengan meninggalkan suatu kesan jang akan mendjadi sedjarah pandjang dalam perkembangan demokrasi di Sumatera Tengah.

Dan beberapa hari sesudah sidang ini berachir, maka Gubernur Mr. M. Nasroen oleh karena kesehatannja terganggu mendapat tjuti 1 bulan lamanja.

Dan diawal Djuni 1950 datanglah ketetapan dari Menteri Dalam Negeri bahwa selama Gubernur Nasroen dalam tjuti sakit, beliau diwakili oleh wakil ketua Dewan Pemerintahan S.J. St. Mangkuto. Pada tanggal 7 Djuni 1950 tanggung djawab pemerintahan Propinsi Sumatera Tengah dipikul penuh oleh Dewan Pemerintah Sumatera Tengah.

Sidang Pleno ke-IV.

Sidang ini dilangsungkan pada tanggal 10 sampai 14 Djuni 1950 dengan dihadiri oleh 20 orang anggota dimana termasuk saudara Zamzami Kimin pengganti saudara H. Mahmud Junus.

Dalam kata pembukaannya saudara H. Ijas Jacoub ketua D.P.R.S.T. menegaskan bahwa ujud yang terpenting dari suatu persidangan D.P.R. ialah memperundingkan segala soal-soal kemasjarakatan dan kenegaraan dengan seluas-luasnya, sehingga dapat diambil satu ketentuan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai tugas yang tertentu dalam memenuhi kehendak dan tjita-tjita rakyat. Beliau menegaskan lagi bahwa disamping pembangunan yang sedang kita usahakan didaerah Sumatera Tengah ini, kita, semua bangsa Indonesia, kini sedang menghadapi satu pembangunan yang maha besar, maha hebat, dan dilaksanakan dengan tenaga besar-besaran dari seluruh bangsa Indonesia yang tujuh puluh djuta. Pembangunan yang maha besar itu ialah pembentukan Negara Kesatuan untuk seluruh kepulauan Indonesia dalam arti kata yang seluas-luasnya, sesuai dengan tjita-tjita dan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Kemudian Sekretaris membatjakan lapuran Dewan Pemerintah yang baru, yang mana timbang terima dengan Dewan Pemerintah yang lama telah berlangsung pada tanggal 18 April 1950, dan menjelaskan program yang akan dilaksanakannya sebagai berikut:

1. Mendudukkan dan membagi-bagi pegawai selekas mungkin.
2. Menghidupkan auto activiteit dari badan otonomi dan badan-badan lain dari masjarakat.
3. Mendjalankan urusan Desentralisasi serta memberi isi kepada badan-badan otonom dan melaksanakan yang termaktub dalam undang-undang No. 22, diantaranya mengadakan pemilihan umum yang harus diselesaikan dalam tempo 4 bulan.
4. Menjusun begroting djawatan-djawatan yang harus selesai dalam tempo 2 bulan.
5. Melakukan pekerdjaan setjara kollegial antara Dewan Pemerintah dengan Kepala-kepala Djawatan Sumatera Tengah.

Lalu didjelaskan bahwa daerah kepulauan Riau telah selesai diambil over dari kekuasaan militer, dan dimasukkan kedalam daerah Sumatera Tengah sesuai dengan ketetapan Menteri Dalam Negeri. Timbang terima telah dilakukan oleh suatu delegasi Pemerintah Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Saudara R.M. Utojo pada tanggal 1 Mei 1950.

Tentang status Djambi yang dalam masa perang dimasukkan kedalam daerah Gubernur Militer Sumatera Selatan, dan sekarang dari pihak rakyat Djambi ada suara-suara untuk tetap masuk Sumatera Selatan, diputuskan bahwa karena Pemerintah Pusat belum mengambil putusan tentang Djambi, maka selama belum ada putusan status Djambi tetap dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, hal mana kemudian disetudjui oleh Menteri Dalam Negeri dengan kawatnya tanggal 10 Djuni 1950.

Mengenai desentralisasi telah dilaksanakan beberapa putusan seperti pembentukan wilayah, penarikan wedana-wedana, pembentukan kota-kota dan menetapkan Kepala wilayah.

Djalannja sidang ke-IV ini lebih bersungguh-sungguh dari pada sidang jang sebelumnya, karena oleh D.P.R.S.T. semakin terasa beratnja tanggung djawab pemerintahan. Djika pada sidang ketiga banjak terdengar kritik jang garang dan galak, sehingga Gubernur dan Dewan Pemerintahan mendjadi sasaran-nja, sekarang setelah Gubernur tjuti (ada desas desus bahwa tjuti itu bersifat politik) dan Dewan Pemerintahan bubar serta diganti dengan jang baru, maka banjak kita dengar suara-suara jang konstruktif.

Dalam pada itu pelaksanaan dari mosi Tan Tuah jang berkenaan dengan kedudukan Gubernur Sumatera Tengah masih menghantu dimuka mata. Memang pada sidang jang lalu telah diputuskan dengan suara bulat untuk mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Gubernur Nasroen dipindahkan, dan diusulkan tjalon penggantinya saudara H. Iljas Jacob, dengan tjatatan bahwa saudara itu sendiri menolak. Maka dalam sidang keempat ini soal ini dibitjarkan lebih landjut. Jang mana sesudah selesai sidang pleno ke-III tempo hari itu maka D.P.R.S.T. lalu mengirim missi ke Djokja untuk memperdjuaungkan keputusan sidang pleno itu. Putusan jang diambil ketika itu oleh Menteri Dalam Negeri bersama missi adalah bahwa Gubernur Nasroen akan ditarik atau dipanggil ke Pemerintah Pusat, sedangkan kekuasaan Sumatera Tengah diserahkan bulat-bulat pada Dewan Pemerintah Sumatera Tengah mendjelang ada suatu ketentuan tentang status propinsi-propinsi di Sumatera.

Pimpinan sidang jaitu wakil Ketua D.P.R.S.T., Saudara Gulmat Siregar, mendjelaskan lebih djauh bahwa sekarang timbul satu kesulitan dalam rangkaian penyelesaian keadaan, jaitu berkenaan dengan kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 dan 8 Djuni jang baru lalu. Kawat jang tanggal 3 menjerahkan soal medebewind kepada Dewan Pemerintah di Sumatera Tengah, tetapi dalam kawat tanggal 8 maka Menteri Dalam Negeri menjerahkan hak medebewind itu kepada saudara Residen R.M. Utojo.

Sebelum menindjau perdjalanannya sidang lebih djauh, patut kita djelaskan kepada pembatja, bahwa djawatan-djawatan dalam propinsi adalah dua matjam. Jang pertama ialah djawatan-djawatan jang masuk dinas propinsi sendiri, jang dengan sendirinja setelah Gubernur tjuti, djawatan itu berada dibawah pimpinan Dewan Pemerintahan Sumatera Tengah. Kedua, ialah djawatan-djawatan centraal jang langsung berhubungan dengan Menteriannja di Pusat, jang mana Gubernur adalah koordinator dari kedua matjam djawatan itu. Djawatan centraal ini hak memim-

pinnja dipropinsi dinamakan hak medebewind, jang selama ini berada ditangan Gubernur. Maka D.P.R.S.T. menuntut supaja dengan tjutinja Gubernur, hak medebewind atas djawatan-djawatan centraal ini diserahkan kepada Dewan Pemerintahan Sumatera Tengah, hal mana disetudjui oleh Menteri Dalam Negeri dengan kawatnja tanggal 3 Djuni 1950. Tetapi kemudian dengan kawatnja tanggal 8 Djuni, hak medebewind ini ditjabut kembali dari tangan Dewan Pemerintahan dan diserahkan kepada Residen Utojo. Inilah jang menimbulkan kesulitan.

Memang sedjak masuknja mosi Tan Tuah boleh dikatakan konflik antara Gubernur Nasroen dan D.P.R.S.T. telah mulai, dan semakin lama masa berdjalan, konflik ini semakin meruntjing.

Pendirian Dewan Pemerintah Sumatera Tengah didjelaskan oleh Saudara Thaher Samad anggota D.P., jang mendjadi spokesman dari Dewan tersebut, sebagai berikut:

„Berhubung dengan mosi Tan Tuah cs., jang mengenai kepindahan Gubernur sampai sekarang dan sampai pada saat timbul kesulitan ini belum djuga selesai, maka oleh Dewan Pemerintah telah dikirim missi untuk minta pendjelasan, dalam mana dinjatakan oleh Menteri Dalam Negeri pada missi, pendiriannja bahwa itu telah dilakukan, maka tanggung djawab seluruhnja dalam Pemerintahan akan diberikan kepada Dewan Pemerintah. Ketika lapuran missi ini dibitjarakan dalam sidang informeel pada tanggal 4 Mei, dan tatkala disampaikan kepada Gubernur, maka Gubernur berpendirian bahwa beliau sesudah tjuti dahulu, tidak sanggup bekerdja sama dengan D.P.R.S.T. dan Dewan Pemerintah, karena kenjataan bagi beliau, bahwa isi lapuran dari Jogja itu, baik Dewan Pemerintah ataupun Dewan Perwakilan tidak pertjaja lagi kepada beliau. Dan segera pada saat itu djuga beliau menjatakan, bahwa beliau mengambil tjuti 1 bulan lamanja. Hanja karena hal jang demikian ini, ialah karena konflik jang ditimbulkan, maka tjuti ini, tidak bisa diterima. Dengan menarik dirinja Gubernur dalam keadaan konflik jang ditimbulkan ini dengan berupakan tjuti, maka dengan sendirinja timbullah dalam Dewan Pemerintahan splittings dari pada propinsi diensten dan medebewind. Sebab menurut pendapat Dewan Pemerintah, Gubernur adalah sebagai koordinator dalam kedua diensten itu.

Dengan pendirian Gubernur oleh karena bersangkutan dengan konflik ini, maka ada bajangan, bahwa ada pemisahan antara medebewind dan Provincie diensten. Ini tidak djadi apa-apa, kalau pemisahan ini terdjadi dalam keadaan normal, tetapi dalam conflict jang telah terdjadi itu, mungkin menjulitkan kepada Pemerintah Sumatera Tengah. Berkenaan dengan jang dipertanggung djawabkan dalam pelaksanaan seterusnya. Hal ini telah dibitjarakan pandjang lebar dalam rapat Dewan Pemerintah

dengan Gubernur jang djuga dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua D.P.R. Pembijtaraan disekitar ini dengan Saudara Gubernur tidak mendapat persetudjuan.

Gubernur Nasroen menjatakan, bahwa Undang-undang No. 22 baru dipergunakan, hanja sebagai pedoman, belum lagi peraturan, dan medebewind, tidaklah masuk kepada urusan Dewan Pemerintah, tetapi menurut hierarchie jang ada sekarang djatuh, kata beliau, kepada Residen jang diperbantukan.

Pendirian jang sematjam ini, tentu tidak dapat disetudjui oleh Dewan Pemerintah jang achirnja menjerahkan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri dan dengan kawat dari Dewan Pemerintah dan Dewan Perwakilan diminta ketegasan kepada Menteri Dalam Negeri jang balasannja telah diterima pada tanggal 3 Djuni bahwa jang mewakili Gubernur buat sementara ialah wakil ketua Dewan Dewan Pemerintah.

Hal ini pada tanggal 7 Djuli telah disampaikan kepada Kepala-kepala Djawatan, kepada partai-partai dan pun kepada pers. Tetapi kemudian pada tanggal 10 kemarin, datang lagi kawat, dengan ketegasan, bahwa jang dulu telah ditentukan dalam satu tangan jaitu kepada Dewan Pemerintah, sekarang dipetjah kembali. Hal ini dirasakan oleh Dewan Pemerintah, bukan hal jang biasa, tetapi sekali ini terikat dan tergabung sebagai aliran dari pada mosi Tan Tuah c.s. jaitu supaja Gubernur dipindahkan. Dalam keadaan ini konflik itu masih dalam hangende. Dewan Pemerintah dalam hal ini membawa kepada sidang pleno IV supaja dapat memberikan pemandangan dan pendirian untuk sikap jang seterusnya".

Sesudahnja uraian saudara Taher Samad ini maka terdjadilah perdebatan sengit jang achirnja disimpulkan kepada pendirian bahwa D.P.R.S.T. tidak menerima atau menolak tudjuan kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Djuni, dalam arti selama Gubernur dalam tjuti, saudara wakil Ketua Dewan Pemerintahan ditetapkan mewakili Gubernur, berpegang dengan kawat tanggal 3 Djuni. Dan diputuskan bahwa pada hari itu mengirim seputjuk kawat ke Pemerintah Pusat jang berbunji sbb:

menteri dalam negeri

djakakarta

No. 483/pln dpr propinsi sumatera tengah dalam sidang pleno tanggal 11 bi setelah memperhatikan kwt² dari menteri dalam negeri tanggal 3 dan tanggal 8 bi dan mengingat djawaban menteri dalam negeri kepada missi, dpr ste koma dengan suara bulat menjatakan pendiriannja bahwa hak **medebewind dan hak otonomie** tidak repeat tidak dapat dipisahkan dan mesti dipegang seluruh oleh dewan pemerintah

karena dpr ste dari dahulu telah berpegang pada undang-undang No. 22 apalagi melihat keadaan suasana politik di ste sekarang ttk sebab itu dpr mendesak segera penglaksanaan djangji menteri kepada missie dpr dan dpr ste tidak dapat menjetudjui isi kwt menteri dl negeri tanggal 8 No. 11/14/3 karena isi kwt menteri tanggal 3 no. 13 16 telah diumumkan kepada kepala-kepala djawatan dan party dan pers ttk karena kedua kwt menteri tsb berlawanan isinja koma diharap supaya kwt tanggal 3 dikuatkan dan tidak ditjabut kembali ttk

dpr ste

ketua

h. iljas jacoub.

Selandjutnja tentang Djambi jang soalnja dibitjarakan dalam suatu rapat tertutup pada tanggal 12 Djuni 1950, dikeluarkan pengumuman bahwa diserahkan kepada beleid Dewan Pemerintah untuk mendjalankan usul-usul dan sugesti-sugesti para anggota untuk kemadjuan Djambi dalam soal-soal politik, ekonomi dan sosial. Disetudjui djuga dalam sidang ke IV ini pentjabutan status M.P.R.K. dan M.P.R.N. sebagai badan Pemerintahan. Djuga rapat menerima rentjana peraturan pemilihan anggota D.P.R.W., D.P.R.K., dan D.P.R.S.T. dengan 12 suara setudju dan 6 contra.

Saudara Marzoeki Jatim selaku anggota komisi penjelidik anggota pedjuang jang ditawan Belanda, melapurkan bahwa diantara mereka ini sudah dibebaskan 274 orang dan kini sudah diusulkan untuk dibebaskan lagi 10 orang.

Demikianlah sidang ke IV ini berachir sesudah 10 kali mengadakan rapat pada hari Rabu tanggal 14 Djuni 1950.

Mengirim utusan ke Djokja 17 Djuni 1950.

Dan pada tanggal 17 Djuni D.P.R.S.T. mengirim utusannja ke Djogja untuk memperdjuangkan keputusan dari pleno D.P.R. S.T. jang baru sudah berachir itu. Utusan ini terdiri dari saudara-saudara A. Gaffar Djambek, Dt. Mangku dan Abdullah. Pun djuga Gubernur Nasroen dipanggil pula ke Djogja dan berangkat pada tanggal 18 Djuni 1950.

Dalam suatu keterangannja sebelum berangkat Gubernur Nasroen menegaskan atas pertanyaan mengenai mosi jang mengusulkan kepindahannja, bahwa; hal itu bagi saja tidak mendjadi soal benar, dan saja merasa puas dapat membawa daerah ini melalui zaman perlintasan jang paling sulit waktu penjerahan kedaulatan oleh Belanda.

Sidang kilat D.P.R.S.T. 25 Djuni 1950.

Dan sekembalinja missie D.P.R.S.T. dari Djogja jang tersebut diatas, maka pada hari Minggu tanggal 25 Djuni 1950 diadakan suatu sidang kilat D.P.R.S.T. jang sifatnja tertutup bertempat dirumah Ketua H. Iljas Jacoub di Bukittinggi. Rapat ini diadakan untuk membulatkan fikiran tentang soal-soal jang dihadapi sesudahnja missie ke Djogja itu memberikan keterangannja. Apalagi Menteri Dalam Negeri Susanto akan datang pula ke Sumatera Tengah.

Susanto ke Sumatera Tengah 7 Djuli 1950.

Pada tanggal 7 Djuli sampailah Menteri Susanto di Sumatera Tengah dimana pada tanggal 8 diadakan pertemuan antara Menteri dengan para anggota D.P.R.S.T. bertempat di Gedung Nasional Bukittinggi. Dengan tegas Menteri Susanto mengatakan bahwa ujud kundjungannja kedaerah ini ialah supaya didapat suatu penyelesaian jang sebaik-baiknya dalam konflik D.P.R.S.T. dan Gubernur Nasroen, sedangkan Pemerintah Pusat sendiri belumlah mengambil suatu keputusan. Dalam rapat itu tegas bahwa para anggota D.P.R.S.T. tidak dapat lagi mengelakkan prinsip-prinsipnja jang telah ditegaskan dalam mosi Tan Tuah c.s. Anggota-anggota Dr. Rahim Usman, Ahmad Su'ib, Dt. Mangku, Damanhuri Djamil, Gaffar Djambek dan Dr. Sjagaf Jahja menjatakan bahwa tidak akan terdapat lagi satu kerdja sama dengan Gubernur Nasroen. Setelah Menteri mendengarkan beberapa suara dari anggota-anggota D.P.R.S.T., Menteri menaruh pengharapan lagi untuk mengadakan penyelesaian dengan mengemukakan beberapa sjarat² jang didasarkan kepada peraturan-peraturan perwakilan dan sebagainja dan sesudah itu Menteri meninggalkan pertemuan itu.

Dr. Djamil dan Dr Rahim Usman ditjalonkan 8 Djuli 1950.

D.P.R.S.T. meneruskan sidangnya (sidang istimewa) dengan 2/3 anggota jang hadir itu, dengan atjara pembahasan soal-soal jang dikemukakan Menteri dan dengan dasar peraturan-peraturan pula D.P.R.S.T. bertahan pada prinsip-prinsip jang telah dipengannja, hingga dalam sidang itu dimajukan tjalon Gubernur sebagai tambahan dari tjalon-tjalon jang dikemukakan dalam sidang pleno ke III dahulu, terdiri dari Dr. Djamil dan Dr. Rahim Usman.

Pada pukul 2.00 malam rapat (sidang) D.P.R.S.T. baru ditutup.

Berhubung dengan pentjalonan Dr. Djamil untuk mendjadi Gubernur Propinsi Sumatera Tengah ini, Dr. Djamil menjatakan; bahwa pada saat terdjadi perkembangan politik didalam dan diluar negeri dan melihat adanya persengketaan sendjata disatu negara

jang djauh dari kita, saja harus tidak menolak djika saja diberi satu beban berupa tanggung djawab, akan tetapi saja akan memajukan terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan.

Petang hari rombongan kembali dengan melalui Lb. Selasih ke Padang. Pada tanggal 11 Djuli 1950 Menteri Susanto terbang kembali ke Djogja.

Sebelum 1 Agustus telah ada ketentuan.

Dalam suatu pernjataannya sebelum berangkat, Susanto menegaskan: Saja telah datang kemari dengan pengharapan penuh, dapat mendekatkan kembali pertentangan jang timbul antara Gubernur Nasroen dan D.P.R.S.T. Tetapi sajang, ternjata usaha saja itu tidak berhasil. D.P.S.T. tetap mempertahankan pendiriannja jang tempo hari telah dilahirkan dalam sidang plenonja. Dalam pada itu ternjata djuga sekarang Gubernur Nasroen tidak bersedia lagi untuk mendjadi Kepala Daerah kembali, kalau ia tidak disokong sepenuhnya oleh Dewan Pemerintahan. Sedangkan untuk gantinya oleh D.P.R.S.T. telah ditjalonkan 4 orang jaitu saudara-saudara H. Iljas Jacoub, Mr. St. M. Rasjid, Dr. M. Djamil, dan Dr. A. Rahim Usman. Seterusnya Susanto menerangkan *sebelum tanggal 1 Agustus 1950*, pemerintah akan memberi ketentuan tentang pengangkatan Gubernur baru.

Sementara itu masa berdjalan djuga, dan konflik antara D.P.R. S.T. dan Gubernur Nasroen ini sudah menduri dalam daging dalam masyarakat Sumatera Tengah.

Dan sebagai seorang pegawai negara, jang bertanggung djawab, maka sehabis tjutinja jaitu sesudah hari raja, Gubernur Nasroen mulai masuk bekerdja kembali mengatur pemerintahan.

M. Nasroen kembali bekerdja selesai tjuti.

Langkah pertama ialah berusaha setjepatnja melaksanakan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1950, tentang pembentukan D.P.R. Daerah Sementara dan D.P.-nja agar pemerintahan berdjalan dengan lebih lantjar. Berdasarkan Undang-undang itu maka D.P.R. Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar, Kota Ketjil, dan daerah-daerah jang setingkat dengan daerah jang tersebut, untuk seluruh daerah R.I. dilakukan oleh sebuah panitia jang terdiri dari sedikit-dikitnja 3 orang dan sebanyak-banyaknja 4 orang dimasing-masing daerah itu, dan panitia ini diketuai oleh kepala daerah sendiri.

Panitia D.P.R. Daerah Sementara 24 Djuli 1950.

Oleh Gubernur Nasroen dibentuklah satu panitia jang diketuai oleh Gubernur dan anggota-anggotanja Saudara-saudara Sultani

St. Malako, Gulmat Siregar, Njonja Dyar Karim, dan Marzoeki Jatim. Untuk pertama kalinya pada tanggal 24 Djuli panitia itu bersidang memulai usahanya.

Pihak D.P.R.S.T. merasa heran atas tindakan Gubernur ini, dimana ketua D.P.R.S.T. H. Iljas Jacoub menegaskan bahwa D.P.R.S.T. tidak tahu menahu dengan panitia yang baru dibentuk itu. Sedangkan Dewan Pemerintahan memperlihatkan understandingnya dengan D.P.R.S.T. dengan kenyataan bahwa rapat Dewan Pemerintahan yang sedianja akan dipimpin Gubernur Nasroen pada tanggal 25 Djuli 1950 tidak djadi berlangsung. D.P.R.S.T. berpegang teguh kepada putusan plenonja yang telah mendjadi konsepsi dari Menteri Susanto jaitu bahwa Mr. Nasroen ditarik ke Pusat (Djogja), dan sementara belum ada gantinya Pemerintahan Sumatera Tengah berdjalan sebagaimana biasa dan Residen Utojo dibolehkan menghadiri sedang-sidang Dewan Pemerintahan Sumatera Tengah.

D.P.R.S.T. bersidang 24 Djuli 1950.

Dan pada tanggal 24 Djuli itu djuga D.P.R.S.T. mengadakan sidang istimewa bertempat di rumah ketua H. Iljas Jacoub dimana ditegaskan bahwa D.P.R.S.T. merasa tersinggung hak dan beleidnja melihat tindakan-tindakan Gubernur Nasroen yang sehabis lebaran telah bekerdja kembali dan merentjanakan berbagai usaha untuk stabilisasi pemerintahan dan propinsi Sumatera Tengah serta berusaha keras pula membentuk D.P.R.S.T. berdasarkan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1950. Para anggota D.P.R.S.T. menuntut wakil-wakilnja yang didudukkannya dalam Dewan Pemerintahan, antara lain menjesali anggota-anggota D.P. mengapa memberi kesempatan kepada Gubernur Nasroen untuk bekerdja terus sedangkan putusan D.P.R. S.T. ialah tetap menolak Mr. Nasroen untuk memimpin daerah propinsi Sumatera Tengah.

Berhubung dengan tuntutan D.P.R.S.T. ini terhadap para wakiinja yang duduk dalam Dewan Pemerintahan, maka pada tanggal 25-7 bertempat di Kantor Gubernur dijalan Rumah Sakit, D.P. berapat, pada waktu mana anggota-anggotanja menjerang Gubernur Nasroen dengan berbagai ketjaman, menjatakan antara lain satu tindakan tetap tidak pertjaja pada Gubernur Nasroen.

Pendirian Nasroen berdasar kepada besluit pemerintah pusat.

Gubernur Nasroen dalam keterangannya yang selalu berpegang pada peraturan-peraturan dan undang-undang merasa tetap berhak untuk meneruskan pimpinannya dipropinsi, walaupun ada tanda tidak pertjaja atau pimpinannya itu, karena sampai saat sekarang ia belum mendapat keputusan (besluit) apa-apa dari Kementerian

Dalam Negeri R.I. tempat ia langsung bertanggung djawab selaku pemimpin pemerintahan.

Demikianlah konflik ini melandjut djuga, karena masing-masing mempunyai pegangan jang dianggapnya kuat, jaitu D.P.R.S.T. berpegang teguh kepada putusan rapat plenonja jang ketiga (mosi Tan Tuah), sedangkan Gubernur Nasroen berpegang teguh pula kepada kewadjabannja sebagai pegawai negara jang harus tetap mendjalankan tugasnja sebelum ada perubahan dalam beslitnja. Sjukurlah bahwa bagaimanapun hebatnja perselisihan dalam "high level" ini akibatnja kebawah boleh dikatakan tak ada, karena segala apparaat pemerintahan tetap berdjalan sebagaimana biasa. Dalam pada itu dipusat pemerintahan di Djakarta sedang berdjalan kesibukan jang hebat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana R.I.S. beserta sekalian negara bahagiannja akan dilebur.

Pada tanggal 28 Djuli 1950 Gubernur Nasroen mendjelaskan pendiriannja dalam satu konperensi pers di Padang, dimana ia menegaskan bahwa dia sendirilah jang lebih heran lagi atas keheranan D.P.R.S.T., jang diutjapkan oleh ketuanja H. Iljas Jacoub. Tentang panitia penjunusan D.P.R.S.T. dia hanja mendjalankan Undang-undang jang telah ada jang anggota-anggotanja ditetapkan oleh Dewan Pemerintahan Propinsi Sumatera Tengah jang terdiri dari seorang wakil ketua D.P.R.S.T. Saudara Gulmat Siregar, anggota D.P. seksi desentralisasi saudara Sultani St. Malako, Rangkajo Dyar Karim, Marzoeki Jatim dan dia sendiri sebagai ketuanja. Pun sebelum pengangkatan ini dilakukan, anggota² itu telah lebih dahulu diadjuk pikiran mereka masing-masing. Dan sesudah habis perlop dia, maka dia kembali mendjalankan pekerdjaannja sebagai Gubernur. Dalam hal ini kalau posisinja berubah, tentu dia mesti mendapat pemberi tahuan dari chefnja jaitu Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini dia tidak ada menerimanja, karena itu sesudah dia perlop dia mendjabat pekerdjaannja kembali. Jang djelas untuk kepentingan Negara dia telah menundjukkan goodwill untuk bekerdja sama, sedangkan dari mereka (D.P.R.S.T.) dari pihak mereka tidak ada toenadering (langkah mendekati), malahan verscherping (mempertadjam). Achirnja Gubernur Nasroen mendjelaskan bahwa telegramnja jang pertama kira-kira 4 bulan jang lalu kepusat ialah bahwa kalau tidak ada djalan kompromi, maka *D.P.R.S.T. bubar* atau *dia pergi*. Oleh sebab itu soal ini telah ditangan Pemerintahan Pusat. Maka mendjelang ada ketentuan dia akan meneruskan kewadjabannja.

Dan tak lama kemudian ketentuan itupun datanglah!

Gubernur Nasroen dipindahkan 1 Agustus 1950.

Menteri Dalam Negeri menetapkan bahwa mulai 1 Agustus 1950, **Gubernur Nasroen dengan resmi dipindahkan ke Pusat Pemerintah R.I.** di Djogja dan diangkat menjadi Gubernur yang diperbantukan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Seterusnya pada tanggal 2 Agustus 1950 telah dilakukan upacara timbang terima pimpinan pemerintahan propinsi Sumatera Tengah antara Gubernur Mr. M. Nasroen dengan Dewan Pemerintahan Sumatera Tengah, berdasarkan petundjuk Menteri Dalam Negeri tertanggal 27 Djuli 1950.

PERATURAN

Pembubaran Propinsi Sumatera Tengah.

Dan pada tanggal 17 Agustus 1950, diundangkanlah Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 4 yang selengkapnja berbunji sebagai berikut:

PEMERINTAHAN Daerah Propinsi Sumatera Tengah, Peraturan tentang pembentukan Propinsi Sumatera Tengah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk Daerah Propinsi Sumatera Tengah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat pasal 5 ayat (1), pasal 22 ayat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 10 tahun 1948 dan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Djuli 1950 tentang pembagian Sumatera menjadi tiga propinsi.

M e m u t u s k a n :

- I. Menghapuskan Pemerintah Daerah Keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Djambi, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan-keresidenan tersebut.
- II. Menetapkan pembentukan Propinsi Sumatera Tengah dengan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

tentang

PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA TENGAH.

B A B I.

K e t e n t u a n u m u m.

Pasal 1.

- (1) Daerah yang meliputi Daerah Keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Djambi ditetapkan menjadi propinsi Sumatera Tengah.

Pasal 2.

1. Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Tengah berkedudukan dikota Bukittinggi.

2. Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Tengah terdiri dari 40 orang anggota.

2. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sumatera Tengah, jang pertama terbentuk dengan Undang-undang Pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

3. Djumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ketjuali anggota Kepala Daerah, adalah 5 orang.

B A B II.

T e n t a n g U r u s a n R u m a h T a n g g a P r o p i n s i S u m a t e r a T e n g a h .

Pasal 4.

1. Urusan rumah tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah bagi Propinsi Sumatera Tengah adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum,
- II. Urusan Pemerintahan Umum.
- III. Urusan Agraria.
- IV. Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung.
- V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
- VI. Urusan Kehewan.
- VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
- VIII. Urusan Perburuhan.
- IX. Urusan Sosial.
- X. Urusan Pembagian (Distribusi).
- XI. Urusan Penerangan.
- XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
- XIII. Urusan Kesehatan.

XIV. Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Bermotor.

XV. Urusan Perusahaan.

2. Urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

3. Tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan yang masuk rumah tangga Propinsi dan kewajiban Pemerintah yang diserahkan kepada Propinsi Sumatera Tengah, dengan Undang-undang dapat ditambahi.

Pasal 5.

1. Segala milik berupa tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintahan Daerah Keresidenan yang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Sumatera Tengah, yang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatu kepada daerah-daerah dibawahnja.

2. Segala hutang piutang Pemerintahan Keresidenan tersebut mendjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Daerah Keresidenan, sebelum diganti dengan peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun dari berdirinja Propinsi Sumatera Tengah.

B A B III.

K e t e n t u a n p e n u t u p .

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Peraturan Pemerintah Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Djogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.
Presiden Republik Indonesia,
(Pemangku Djabatan Sementara)

Menteri Dalam Negeri,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

ASSAAT.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.
Menteri Kehakiman,

A. G. PRINGGODIGDO.

KABINET NATSIR TERBENTUK.

DENGAN menumpang pesawat udara jang berangkat dari Padang pada tanggal 9 Agustus 1950 Mr. Nasroen meninggalkan Sumatera Tengah untuk mendjalankan tugasnja jang baru sebagai Gubernur jang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri R.I. berkedudukan di Djakarta.

Ganti berganti pembesar-pembesar Kementerian Luar Negeri datang ke Sumatera Tengah untuk menindjau suasana, seperti Maskun dan lain-lainnja dan kemudian kegiatan politik beralih kepada peringatan 5 tahun merdeka, dimana djuga diproklamirkan berdirinja Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian terbentuklah kabinet Natsir, sebagai kabinet pertama dari Negara Kesatuan. D.P.R.S.T. tetap berharap bahwa sebelum sidangnja jang kelima pada bulan Oktober, soal Gubernur Sumatera Tengah sudah ada hendaknja ketentuan. Diharapkan bahwa Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat akan lekas bertindak.

Menteri Dalam Negeri ke Sumatera Tengah 29 September 1950.

Dan dengan melalui Palembang, Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat datang sendiri ke Sumatera Tengah, dan sampai di Padang pada tanggal 29 September 1950. Assaat menjatakan bahwa tudjuan kedatangannja ialah untuk menyelesaikan soal Gubernur Sumatera Tengah, jang mana dari empat orang tjalon jang dimadjukan D.P.R.S.T. itu belum ada jang dipilih oleh Pemerintah, sedangkan Pemerintah Pusat sendiri ada pula mempunjai tjalon jang pentjalonannja dititik beratkan kepada ketjakaan dan kepada acceptable-nja.

Sesampainja di Bukittinggi beresoknja Menteri terus mengadakan pertemuan dengan Dewan Pemerintah Sumatera Tengah dan pembesar-pembesar Propinsi. Dalam pertemuan ini dibitjarakan soal-soal sekitar Gubernurschap dan soal-soal desentralisasi. Sampai sekian djauh siapa jang akan mendjabat pangkat Gubernur Sumatera Tengah belumlah terbajang. Dalam suatu pertemuan dengan umum di Gedung Nasional, Assaat djuga mendjelaskan bahwa untuk membangun pemerintahan perlu tenaga jang kuat dan persatuan.

Perkundjungan Assaat ini tentu sadja telah memberi pedoman kepada kabinet Natsir tentang langkah-langkah menghadapi perkembangan politik di Sumatera Tengah.

Sidang D.P.R.S.T. informeel 6 Oktober 1950.

Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1950 D.P.R.S.T. mengadakan sidang informeel dengan mengambil tempat di rumah Wali Kota Bukittinggi dimana diambil putusan bahwa sidang ke-V D.P.R.S.T. akan dilangsungkan dari tanggal 23—26 Oktober, bertempat di Bukittinggi dengan atjara mengenai desentralisasi, keuangan, dan soal Gubernur Sumatera Tengah.

Pada pertengahan bulan Oktober terpetik berita bahwa Menteri Dalam Negeri akan mengangkat Sdr. Ruslan Muljohardjo menjadi Acting Gubernur Sumatera Tengah. Sebelum agresi ke-II, Sdr. Ruslan juga bertugas di Bukittinggi sebagai Residen yang diperbantukan pada Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera.

Sidang pleno D.P.R.S.T. yang kelima.

Dalam keadaan politik seperti inilah dilangsungkan sidang pleno D.P.R.S.T. yang ke-V pada tanggal 23 Oktober 1950. Sidang dihadiri oleh 27 orang anggota dan dipimpin oleh ketua H. Iljas. Jacoub.

Dalam kata pembukaannya H. Iljas Jacoub menerangkan, bahwa sidang pleno sekarang adalah suatu sidang yang pertama kali dalam negara kesatuan.

Setelah menguraikan perubahan-perubahan yang terjadi selama revolusi dan politik petjah belah maka pembicara tegaskan supaya dibongkar keakar-akarnya, seperti rasa kedaerahan yang membahayakan kesatuan bangsa.

Dengan kekuatan kesatuan kebangsaan ini, akan dapat kita sempurnakan pembangunan setjara besar-besaran dalam lapangan rohani dan djasmani.

Achirnja dikatakan, dengan terbentuknja Negara Kesatuan, kita lebih banyak mempunyai kemungkinan-kemungkinan dari masa yang lampau untuk mewujudkan tjita-tjita pembangunan dan perbaikan nasib rakyat. Ia harus kita pergunakan dan wujudkan sebaik-baiknya. Dengan itu kita dapat mengisi kemerdekaan. Saja berharap, semoga sidang pleno ini, dapat kiranya menumbuhkan gambaran usaha-usaha Pemerintah, juga rakyat yang diarahkan kepada pembangunan masyarakat, menuju kemakmuran dan kebahagiaan rakyat.

Selanjutnja dibatjkan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Tengah tanggal 23-10 No. 79 mengenai kenaikan anggota-anggota baru, pengganti 7 orang anggota D.P.R.S.T.

Dengan ketetapan tersebut, diperhentikan: Njonja Dr. Azis, Dr. Sagaf Jahja, Zainal Zainur, Sjahrial Rachman (Djambi), Dr. Pur-

wadi (Djambi, Sjamsul Bahrum (Djambi) dan Abdullah (Padang), atas permintaan sendiri.

Penggantinya: Moh. Rusli, Sidi Muhamad (S. Barat), Hadji Nawawi dan Sudarsono (Djambi) dan Muchtar Husin, Mahmud dan Tengku Makmua (Riau). Tapi Sudarsono tidak hadir.

Selesai ini langsung 6 anggota baru ini diambil sumpahnja oleh ketua jang dilaksanakan oleh Hadji Darwis Taram Dt. Tumang-gung.

Lalu Dewan Pemerintah memberi lapuran tentang perdjalan-an usaha pemerintahan dinas sentral dan propinsi selama 6 bulan ter-achir ini. Mengenai propinsi diterangkan bahwa dengan timbul-nja konflik antara D.P.R.S.T. dengan Gubernur Nasroen pada sidang pleno ketiga jang lalu, maka kehendak kebanyakan tertarik kepada penyelesaian soal ini jang bukan sedikit pengaruhnja kepada kelantjaran djalan pemerintahan. Dalam pelaksanaan Undang-undang No. 22 lalu dibentuk wilajah-wilajah dan kabupaten-kabu-paten otonoom. Dewan Pemerintahan berpedoman kepada program kabinet jaitu terutama tiga pasal: mendjamin keamanan, mengkon-solidir pemerintahan kedalam dan memperkokoh kesedjahteraan-rakjat. Selandjutnja diuraikan perhubungan propinsi dengan Pe-merintah Pusat. Dinjatakan tidak mendapat pimpinan jang tegas dari Pemerintah Pusat. Ditjontohkan dengan konflik D.P.R.S.T.—Nasroen jang sampai kini belum selesai oleh pusat.

Sampai sekarang kita menanti-nanti, siapa jang akan djadi Gu-berneur Sumatera Tengah. Diakui perhubungan djawatan-djawatan dengan Pemerintah Pusat teratur. Hampir semua djawatan-dja-watan, bagian teknis dan keuangannja diatur oleh pusat. Hanja dalam organisasi keuangan, propinsi belum dapat persesuaian dengan pusat.

Terang-terang dikatakan, kita disini tidak mendapat pimpinan jang tegas dan atjapkali pula instruksi jang dikeluarkan oleh Pe-merintah Pusat itu sebentar-sebentar berubah, sehingga bagi propinsi menimbulkan kesukaran-kesukaran.

Diuraikan kekaburan perhubungan propinsi selaku daerah otonomi dengan pusat. Dikatakan, penjerahan-penjerahan djawat-an-djawatan kepada propinsi oleh pusat tidak disertai dengan ke-uangan. Ini sangat mengetjewakan.

Sesudah itu lalu dilapurkan pula perdjalan-an djawatan-djawatan, dan pada tanggal 25 para anggota lalu mengadakan sambutan atas lapuran Dewan Pemerintahan ini dimana berbitjara 17 orang anggota pada termijn pertama, dan udara sidang mendjadi panas sekali, sampai terpetik bahwa berita Dewan Pemerintah harus bubar dan ditukar dengan jang baru dan dalam termijn kedua

berbitjara pula 3 orang anggota lagi. Pada tanggal 27 Oktober pagi, maka Dewan Pemerintahan memberi djawaban atas gugatan para anggota itu. Soal Gubernur djadi pembijtaraan lagi, beserta kedatangan Menteri Dalam Negeri ke Sumatera Tengah. Anggota Dewan Pemerintahan Sultani St. Malako memberi pendjelasan sekitar soal Gubernur, dimana diuraikan semendjak terdjadinja conflict D.P.R.S.T.—Nasroen bulan April jang lalu, pentjalonan 4 orang oleh pleno, mengirim putusan ke Jogja beberapa kali, datangnja Susanto ke Sumatera Tengah, gagalnja usaha putusan, kawat mengawat lagi, timbang terima Kementerian R.I.S.-R.I., kawat D.P.R.S.T. lagi mendesak ketentuan pusat atas 4 tjalon itu, datangnja Menteri Assaat, pengunduran pertemuan D.P.R.S.T. dengan Assaat, keterangan Assaat untuk ambil satu dari empat tjalon itu, tapi jang capabel, dan sebagainja. Tapi sampai sekarang oleh Kementerian Dalam Negeri belum djuga ada ketentuannja tentang soal Gubernur Sumatera Tengah ini.

Kemudian secretaris membatjakan lagi korespondensi antara ketua D.P.R.S.T. dengan Menteri Dalam Negeri tentang soal Gubernur itu. Sebelas orang anggota mengemukakan pendapat jang mana kesimpulannja sebagai berikut:

1. Ada jang berpendapat untuk mengherzien putusan pleno jang lalu mengenai pentjalonan 4 orang anggota itu.
2. Tjalon jang menarik diri sadja di-herzien kembali.
3. D.P.R.S.T. tetap konsekwen dengan putusannja jang lama menurut Undang-undang No. 22 1948 itu, jaitu D.P.R. berhak mentjalonkan paling banjak 4 orang.
Bila ini diubah D.P.R. pleno akan merosot prestigenja.
4. Djalan terus dengan putusan, walaupun Pemerintah Pusat anggap Sumatera Tengah „anak nakal”, tapi kita tidak nakal, dan menunggu bagaimana ketentuan pusat nantinja.
5. Mengirim sekali lagi delegasi D.P.R.S.T. ke pusat.

Achirnja dilakuklanlah pemungutan suara terhadap pendapat-pendapat ini dan jang disetudjui dengan suara terbanjak ialah: D.P.R.S.T. tetap konsekwen dengan putusan jang lama, jaitu 4 tjalon tadi tetap, tak perlu di-herzien, hanja terserah kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan ketentuan, apa akan diangkat salah seorang dari 4 tjalon ini atau jang lainnja.

Usul Pembubaran D.P.R.S.T.

Dalam sidang ini Partai Murba Sumatera Tengah memadjukan tuntutan, supaja dalam sidang D.P.R.S.T. ini diputuskan untuk membubarkan D.P.R. ini dengan limit waktu 3 bulan. Sesudah itu haruslah tertjpta D.P.R.S.T. jang baru jang mentjerminkan aliran masjarakat di Sumatera Tengah ini. Sesudah itu terbentuk barulah D.P.R.S.T. jang sekarang dibubarkan dengan resmi. Alasan-

alasannya ialah untuk mendemokratisir D.P.R.S.T. dan Partai Murba menganggap bahwa D.P.R.S.T. yang sekarang ini tidak representatif lagi.

Dewan Pemerintahan bubar dan diganti.

Dalam sidang selanjutnya (rapat ke-6) dibicarakan mosi yang ditanda tangani oleh anggota-anggota Datuk Simaradjo c.s. menuntut pembubaran Dewan Pemerintahan, yang dengan tegas dikatakan impotent oleh pengusul mosi, yang mana dalam soal ini berlangsung perdebatan sengit. Akhirnya mosi diterima dan Dewan Pemerintahan dibubarkan, lalu diadakan pemilihan baru, yang mana untuk pemilihan baru, pemilihan suara dilakukan 6 kali dan memakan tempo satu jam 5 menit. Dalam pemilihan itu tampak kesan-kesan bahwa fraksi-fraksi dan para penanda tangan mosi telah bersimpang djalan, dan pemilihan baru itu berhasil dengan tetapnya anggota-anggota Dewan Pemerintahan yang telah dibubarkan itu dipilih kembali, dengan tambahan seorang lagi anggota yang baru yaitu sdr. Gulmat Siregar, sehingga anggota Dewan Pemerintahan Sumatera Tengah terdiri dari: sdr². S. J. St. Mangkuto, Taher Samad, Sultani St. Malako, Dt. Mangku dan Gulmat Siregar.

Hal ini memang mengetjewakan kepada pihak Djambi yang tadi-nja akan dapat kursi dalam Dewan Pemerintahan.

Dan karena sdr. Gulmat Siregar telah terpilih menjadi anggota Dewan Pemerintahan, maka sebagai gantinya menjadi wakil Ketua D.P.R.S.T. telah dipilih sdr. A. Gafar Djambek.

Setudju pembubaran D.P.R.S.T.

Sidang beresoknja tanggal 28 Oktober membitjarkan pembubaran D.P.R.S.T. dan pembentukan yang baru, apakah menurut Undang-undang No. 22 Peraturan Pemerintah No. 39, atau Undang-undang No. 7. Sesudah diambil pemungutan suara, maka sidang mengambil ketetapan untuk membubarkan D.P.R.S.T. dan membentuk yang baru menurut Peraturan Pemerintah No. 39. Diandjurkan agar setiap anggota akan mempeladjar sebaik-baiknya Undang-undang No. 39 ini dan dalam sidang beresoknja akan memajukan pendapat-pendapatnja. Tetapi dalam sidang yang sesudah itu hal ini tak djadi dibitjarkan karena sidang dilakukan setjara tertutup untuk membitjarkan interpelasi anggota Ahmad Suib terhadap anggota Dewan Pemerintahan sdr. Dt. Mangku.

Kemudian anggota-anggota Marzuki Jatim dan Basiar Rachman menjatakan telah menarik diri dari keanggotaan D.P.R.S.T.

1 Maret '50 limit terbentuknja D.P.R.S.T. baru.

Sidang untuk membitjarkan pembubaran D.P.R.S.T. ini diteruskan pada hari Senin malam (tgl. 30/10) dipimpin oleh wakil

Ketua jang baru sdr. Gafar Djambek. Anggota jang hadir 17 orang, anggota-anggota dari Riau sudah pulang, dan anggota dari Djambi hanja hadir seorang sadja jaitu sdr. Labai Hasan. Sidang memang telah setuju untuk mengambil Peraturan No. 39 menjadi dasar untuk pembubaran D.P.R.S.T. ini. Hanja sidang mengandjurkan beberapa perubahan agar sesuai dengan aliran masyarakat Sumatera Tengah. Dan tanggalnja pun diputuskan oleh pleno dan disanggupi oleh D.P. bahwa pada tanggal 1 Maret 1951 sudah terbentuk D.P.R.S.T. jang baru, dan pada waktu itu pulalah nanti D.P.R.S.T. jang sekarang akan mengadakan sidang terakhir untuk membubarkan dirinya. Atjara selandjutnja pada sidang hari Selasa pagi ialah tentang kenaikan tarif E.M.S. (Electriciteit Maatschppij Sumatera) tentang mana diambil keputusan tidak menyetujui tjaranja E.M.S. melakukan kenaikan tarif dengan Kementerian Pekerdjaan Umum dan Pembangunan, dan menuntut agar Kementerian membatalkan kenaikan tarif tersebut, serta memerintahkan kepada E.M.S. agar tambahan tarif sekarang dibitjarakan dengan Pemerintahan Kota terlebih dahulu.

Kemudian sidang menyetujui untuk mengistirahatkan rapat-rapat selama 1 minggu dan nanti tanggal 11 Nopember 1950 diteruskan kembali.

Pada tanggal 31 Oktober sore sdr. H. Iljas Jacoub menerima kawat dari Kementerian Dalam Negeri bahwa Perdana Menteri meminta agar Ketua D.P.R.S.T. datang ke Djakarta dengan segera. Djuga dipanggil Residen Utojo.

Ruslan Muljohardjo djadi Acting Gubernur 9 Nopember 1951.

Dan pada tanggal 9 Nopember tibalah ketetapan Kementerian Dalam Negeri mengenai diangkatnja sdr. Ruslan Muljohardjo menjadi Acting Gubernur Sumatera Tengah. Dalam surat ketetapan itu dalam pasal *b* dijelaskan bahwa sdr. Ruslan Muljohardjo dianggap tjukup memenuhi sjaratsjarat untuk menjadi Acting Gubernur Sumatera Tengah.

Dalam pada itu sesudah reses 10 hari maka sidang D.P.R.S.T. jang sedianja akan dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember tidak djadi berlangsung karena anggota jang hadir hanja 10 orang (kurang dari separuh) dan akan diteruskan pada hari Rebo tanggal 15 Nopember. Dan pada tanggal 15 ini sidang dilaksanakan dengan dihadiri oleh 21 anggota dibawah pimpinan wakil Ketua Gafar Djambek. Atjara ialah soal sekitar Gubernur dan perdjaulan missi D.P.R.S.T. ke Djakarta. Sdr. Gulmat Siregar melaporkan bahwa jang dirundingkan dengan Kementerian Dalam Negeri adalah soal Gubernur Propinsi Sumatera Tengah, dan kedua, sekitar pelaksanaan Peraturan No. 39.

Perundingan itu achirnja tidak lagi dapat dinamakan perundingan, karena pada ketika itu Menteri Dalam Negeri telah menjuguhkan satu keputusan dalam satu surat ketetapan tanggal 28-10-1950 No. 444, dengan mengangkat tuan Ruslan Muljohardjo sebagai Acting Gubernur Propinsi Sumatera Tengah.

Ada Menteri memberi pendjelasan, kata Gulmat Siregar, bahwa untuk menghilangkan salah faham perlu diberi pendjelasan sebagai berikut:

Untuk Konsolidasi dan pembangunan dalam pemerintahan, perlu seorang jang tjukup pengetahuan umum dalam pemerintahan.

Setelah kami menimbang ke-4 tjalon dari D.P.R.S.T. terpaksa kami mengambil diluar tjalon-tjalon itu, dengan dasar Pasal 4 Ajat 26 dari Undang-undang No. 22, tambahan lagi Mr. S.M. Rasjid tidak bersedia untuk mendjadi Gubernur Propinsi Sumatera Tengah. Sekian pernjataan Menteri Dalam Negeri jang diuraikan oleh anggota Gulmat Siregar.

Mengenai Peraturan No. 39 Pemerintah Pusat tidak dapat menerima perubahan-perubahan jang dikehendaki oleh D.P.R.S.T. dalam peraturan tersebut, walaupun tidak fundamenteel sifatnja, karena mungkin menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Selandjutnja S.J. St. Mangkuto berikan laporannja mengenai pembangunan dan keuangan, terutama jang diudjudkan untuk soal-soal perumahan, irigasi, P.M.T./Bpnk dan bekas tentera, sekolah-sekolah, djalan, pelaksanaan Peraturan No. 39, sekolah tinggi teritorium, inpassing pegawai, E.M.S., pensiun dan pembagian pekerdjaan dipropinsi. Semua itu dibitjarakan dengan Menteri Dalam Negeri.

Selesai pelaporan dan pendjelasan dari anggota S.J. St. Mangkuto, maka sekretaris membatjakan satu surat kawat dari Menteri P.U. mengenai soal E.M.S. jang antara lain menjatakan, bahwa tuntutan tentang pembajaran tarip E.M.S. seperti peraturan sebelum bulan Agustus tidak dapat dibenarkan, karena E.M.S. djuga selalu menanggung kerugian.

Malamnja diteruskan dengan atjara khusus mengenai soal sekitar Gubernur (Ketetapan Pusat).

Atjara ini adalah dibitjarakan atas desakan anggota.

Ketetapan M.D.N. directour kembali 15 Nopember 1950.

Kemudian dalam 2 kali rapat, sidang pleno ini diteruskan dan mengambil putusan jaitu bahwa ketetapan Menteri Dalam Negeri directour afzender, dan D.P.R.S.T. tetap berpegang dengan Undang-undang No. 22 serta kehendaki Gubernur bukan Acting. *Tegasnja ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 444 tentang keang-*

katan Acting Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Muljohardjo. ditolak oleh D.P.R.S.T.

Acting Gubernur tidak diterima.

Dan konsekwen atas putusannja ini, maka pada sidang Kemis 16 Nopember pleno D.P.R.S.T. telah membitjarakan sekitar soal Gubernur dengan tjalonnja jang 4 orang. Diambil putusan bahwa sidang setuju untuk menindjau kembali tjalon jang 4 orang itu, kemudian diadjudkan kepada Pem. Pusat supaya diangkat diantara tjalon-tjalon itu Gubernur Propinsi Sumatera Tengah. Dalam pada itu sampailah Acting Gubernur Ruslan Muljohardjo di Sumatera Tengah, dan pada tanggal 29 Desember, berangkat lagi ke Djakarta untuk menemui Menteri Dalam Negeri buat memadjukan soal kedudukannja di S. Tengah, karena D.P.R.S.T. mengambil putusan tidak membenarkan timbang terima dari wakil Gubernur Sumatera Tengah S.J. St. Mangkuto kepada Acting Gubernur jang baru. Selandjutnja Ruslan Muljohardjo menerangkan bahwa Menteri Assaat akan memadjukan soal ini kepada sidang kabinet.

Demikianlah konflik antara D.P.R.S.T. dan Nasroen telah melandjut mendjadi konflik segi tiga antara D.P.R.S.T.—Acting Gubernur Ruslan—Kementerian Dalam Negeri.

Tepat sehari sebelum tahun baru 1951 Acting Gubernur Ruslan sampai kembali di Padang bersama S.J. St. Mangkuto dan Residen Utojo.

Tapi ternyata bahwa sesuatunja keputusan tentangan masaalah timbang terima Pemerintah Sumatera Tengah ini belum diperdapat, karena soal jang ruwet ini akan dibitjarakan lebih dahulu dalam sidang kabinet, dan Pemerintah Tinggilah jang akan memberikan putusan terachir. Sedangkan kabinet sekarang sedang repot dengan masaalah Irian, dan sementara menunggu putusan ini Acting Gubernur akan beristirahat.

D.P.R.S.T. dibekukan 5 Djanuari 1951.

Kemudian Pemerintah (kabinet Natsir) mengambil putusan **membekukan** D.P.R.S.T. dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1951 jang ditetapkan pada tanggal 5 Djanuari 1951 dan diumumkan pada tanggal 8 Djanuari. Undang-undang jang ber-sedjarah itu selengkapnja berbunji sebagai berikut:

- Nr. 1/1951, Propinsi Sumatera Tengah, Pemerintahan. Badan Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakjat, Pembekuan. Peraturan Pemerintah Nr. 1, tahun 1951, tentang pembekuan Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi dan Badan Eksekutif Prop. Sumatera Tengah dan tjara bagaimana mengatur pemerintahan daerah di Propinsi Sumatera Tengah untuk sementara waktu.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

M e n i m b a n g,

- a. bahwa berhubungan dengan pembentukan Prop. Sum. Tengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nr. 4, tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 15 Agustus 1950, pemerintahan daerah Sumatera Tengah perlu segera disusun baru menurut dasar-dasar dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948;
- b. bahwa pemerintahan daerah Prop. Sumatera Tengah sedjak hari tersebut masih dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi dan Badan Eksekutif Prop. (Dewan Pemerintah Daerah), yang dibentuk atas dasar Undang-undang No. 10 tahun 1948, lagi pula djabatatan Gubernur masih terluang, sehingga djalannja pemerintahan daerah tidak lantjar;
- c. bahwa usaha-usaha Dewan Perwakilan Rakjat dan Badan Eksekutif Prop. Sumatera Tengah dalam membentuk pemerintahan daerah baru menudju kearah pelaksanaan Undang-undang pokok pemerintahan daerah tidak berhasil, sehingga perkembangan pelaksanaan otonomi daerah Sumatera Tengah tertahan;
- d. bahwa Acting Gubernur yang telah diangkat oleh Pemerintah untuk memangku djabatatan Kepala Daerah Prop. Sumatera dengan tugas djuga membentuk pemerintahan baru menurut instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1950 Nr. Des. 12/4/27, tidak dapat menjalankan kewadjabannja, karena penolakan Dewan Perwakilan Rakjat Prop. Sumatera Tengah terhadap keangkatannja itu, dan karena timbang terima dilarang oleh Dewan Perwakilan Rakjat Prop.;
- e. bahwa dengan perbuatan dan sikap tersebut Dewan Perwakilan Rakjat dan Badan Eksekutif Prop. Sumatera Tengah telah keliru memakai kekuasaannja dan telah menghalang-halangi terbentuknja pemerintahan daerah baru, yang dalam keadaan tersebut diatas merugikan daerah dan Negara;
- f. bahwa berhubungan dengan keadaan didaerah itu dan hasrat Pemerintah untuk segera mengadakan pemerintahan daerah yang memenuhi sjarat-sjarat seperti tersebut dalam Undang-undang No. 22, tahun 1948 sebagai pelaksanaan program kabinet, Pemerintah menganggap perlu mengadakan tindakan-tindakan dan peraturan seperti tersebut dibawah ini.

M e n g i n g a t: pasal 142 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan pasal 16 ayat 1, pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nr. 22 tahun 1948, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nr. 4 tahun 1950.

Me m u t u s k a n.

Menetapkan peraturan seperti berikut:

Pasal 1.

Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi dan Badan Eksekutif Prop. (Dewan Pemerintah Daerah) Sumatera Tengah dibekukan sampai terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah menurut peraturan berdasarkan atas Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Pasal 2.

- 1) Pemerintahan daerah Propinsi Sumatera Tengah untuk sementara waktu dijalankan oleh seorang Gubernur, Kepala Daerah jang diangkat oleh Pemerintah, bersama-sama dengan satu Dewan, jang terdiri dari seorang Ketua, jaitu Kepala Daerah dan sekurang-kurangnya 4 dan sebanyak-banyaknya 6 orang anggota, jang diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala Daerah.
- 2) Dalam menjalankan tugasnya seperti tersebut dalam ayat 1 Dewan bertanggung-djawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3.

Disamping menjalankan tugas pemerintahan pada umumnya Dewan jang tersebut dalam pasal 2 ayat 1 diberi tugas kewajiban dalam waktu jang singkat, selama-lamanya 6 bulan, menjelenggarakan pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut peraturan-peraturan berdasarkan atas Undang-undang Nr. 22 tahun 1948.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Djanuari 1951
Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO.

Diumumkan di Djakarta,
pada tgl. 8 Djanuari 1951
Menteri Kehakiman,
WONGSONEGORO.

Perdana Menteri,
MOHAMAD NATSIR,
Menteri Dalam Negeri,
ASSAAT.

Timbang terima D.P. dengan Act. Gubernur 13 Djanuari 1951.

Dan sekeluarnja Peraturan Pemerintah ini datanglah *kata putus* dalam sengketa jang telah lama berlarut-larut di Sumatera-Tengah ini. Dan tak adalah djalan lain lagi ketjuali mematuhi peraturan Pemerintah ini. Maka pada tanggal 13 Djanuari 1951 dilakukan di Bukittinggi timbang terima setjara resmi Pemerintahan Sumatera-Tengah dari saudara S.J.St. Mangkuto jang mewakili Pemerintah Sumatera-Tengah, kepada saudara Ruslan Muljohardjo, Acting Gubernur Sumatera-Tengah.

Maka segala kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pemerintah Daerah Sumatera-Tengah jang dengan P.P. No. 1 ini dibekukan, sekarang, dipegang oleh Acting Gubernur tersebut jang mulai pada tanggal 13 Djanuari 1951 telah actief mendjalankan pkerdjaannja. Serta segala surat-menjurat dan sesuatu jang selama ini diurus dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pemerintah Daerah Sumatera-Tengah, mulai 13 Djanuari dialamatkan dan diurus dengan Acting Gubernur Sumatera-Tengah.

Djadi kalau kita ambil resumenja dari sedjarah konflik ini setjara chronologis, dapatlah kita menarik suatu kesimpulan sebagai berikut;

3 April 1950;

Sidang DPRST ke-III. Dalam sidang ini DPRST menuntut pertanggungan-djawab Kepala Daerah Mr. M. Nasroen, jang telah diangkat kembali oleh pemerintah pusat, setelah menarik Mr. St. M. Rasjid kepusat. Keputusan diambil oleh sidang:

A. Memindahkan Kepala Daerah.

B. Memadjukan tjalon.

6 Mei 1950;

Oleh DPRST dikirim Missi ke Djokja.

17 Djuli 1950;

Missi jang kedua ke Djokja.

Kedua kalinja itu tidak memberi hasil apa-apa, hanja pemerintah pusat mengirim Susanto ke Sumatera-Tengah. Konsepsi Susanto ialah hendak menjujukuhkan Mr. M. Nasroen kembali, jang terang s saja tidak diterima oleh DPRST.

Sementara itu, jaitu 15 Agustus Negara Kesatuan terbentuk. Sumatera-Tengah masih belum mempunjai Kepala Daerah.

4 Nopember 1950;

Ketua DPRST diundang oleh Kementerian Dalam Negeri. Kepergiannya ditemani oleh dua anggota Dewan Pemerintah dan tiga dari DPRST.

11 Nopember 1950;

Sidang pleno ke-V babak kedua. Ketua DPRST dan anggota misi memberikan laporan bahwa saudara Ruslan Muljohardjo ditundjuk sebagai Acting Gubernur Sumatera-Tengah. DPRST beranggapan bahwa usulnya jaitu supaya menetapkan salah satu tjalon tidak diterima.

Karena itu mengirim Misi jang ke-IV ke Djakarta.

10 Desember 1950;

Misi ke Djakarta. Terdiri dari A. Gafar Djambe, S. J. St. Mangkuto dan Dr. S. Rahim Usman. Pemerintah pusat mendjandjikan hendak mendesakkan Mr. St. M. Rasjid djadi Kepala Daerah.

22 Desember 1950;

Sampai di Sumatera-Tengah S.J.St. Mangkuto, jang diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri supaya melakukan timbang terima dahulu dengan Ruslan Muljohardjo.

21 Desember 1950;

DPK seluruh Sumatera-Tengah mengadakan konperensi, jang konperensi itu dilarang meneruskan oleh Dewan Pemerintah Sumatera-Tengah. Sebelum konperensi mempeladjar pelarangan Dewan Pemerintah ini, oleh Panitia diminta saudara Ruslan Muljohardjo berbitjara.

Petangnja sidang DPRST. Salah satu dari atjara ialah mengenai pembitjaraan saudara Ruslan Muljohardjo dalam konperensi itu. Ini didjadikan alasan untuk tidak memungkinkannya timbang terima besok harinja, 22 Desember 1950.

24 Desember 1950;

Kembali lagi S.J.St. Mangkuto, bersama-sama dengan Ruslan Muljohardjo ke Djakarta. Kemudian oleh Pemerintah Pusat kedua utusan itu disuruh kembali ke Sumatera-Tengah.

8 Djanuari 1951;

Konperensi para Gubernur.

10/11 Djanuari 1951;

Dengan perantaraan radio didengar berita bahwa DPRST dan Dewan Pemerintahnya dibekukan.

11/12 Djanuari 1950;

Pertemuan anggota-anggota DPRST ditempat Wali Kota Bukittinggi jang mengambil keputusan sebagai berikut;

- A. Pelaksanaan pembekuan tersebut dilakukan oleh wakil Pemerintah Pusat di Sumatera-Tengah.
- B. DPRST tidak menentang peraturan tersebut.
- C. Akan disampaikan kepada parlemen atas nama anggota-anggota DPRST tersebut menjatakan bagaimana stelsel demokrasi jang telah berdjalan di Sumatera-Tengah sekian lama dan dengan tiba-tiba dihapuskan dengan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1951, guna mentjukupkan lembaran sedjarah demokrasi di-negara ini.
- D. Mengeluarkan suatu Statement kepada rakjat Sumatera-Tengah untuk mendjelaskan bagaimana duduk soal jang jang sebenarnya.
- E. Lepas pertanggungan-djawab, karena dilepaskan oleh Peraturan Pemerintah No. I tahun 1951 itu.
- F. Pleno ke-IV jang menurut rentjana dilangsungkan pada 15 Djanuari jang akan datang, ditiadakan.

13 Djanuari 1950;

Timbang terima antara Ruslan Muljohardjo sebagai Acting Gubernur Sumatera-Tengah dengan S.J.St. Mangkuto sebagai Dewan Pemerintah jang telah dibekukan itu.

Demikianlah perdjalanan DPRST jang telah membuat riwayat djuga dalam perkembangan demokrasi. Sidang pleno berdjumlah 5 kali, 2 sebelum agresi, dan 3 sesudah pulih.

Djika kita teliti kembali P.P. No. 1-1951 itu, jang telah men-tjatakan satu sedjarah jang uniek di Indonesia, dimana buat pertama kalinja dalam sedjarah Indonesia Merdeka satu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dibekukan oleh Pemerintah, maka ter-njatalah bahwa dalam pasal 3 P.P. No. 1 tahun 1951 itu, Gubernur diberi tugas antara lain dalam waktu selama-lamanja 6 bulan, menjelenggarakan pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut peraturan-peraturan berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 48.

Sementara itu pemerintahan didjalankan oleh Gubernur bersama-sama dengan Dewan Pemerintahan Sementara jang anggotanja

terdiri dari enam orang, diketuai oleh Gubernur serta diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dewan bertanggung-djawab kepada Menteri Dalam Negeri. Tetapi pembentukan ini tak dapat didjalankan dalam enam bulan itu, djuga sesudahnja, karena kabinet Natsir djatuh oleh mosi pentjabutan P.P. 39 jang memuat tjara membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sedangkan peraturan penggantian belum ada sampai sekarang.

Djadi DPRST tetap dalam keadaan beku, Kabinet silih berganti, dan pembentukan DPRST diperpanjang, sampai suatu waktu jang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri, menurut P.P. No. 27 tahun 1951, jang diundangkan tanggal 7 Djanuari 1951.

Delegasi ke Djakarta tentang pembentukan D.P.R.S.T.

Kemudian satu delegasi jang terdiri dari Dewan Pemerintah antara lain M. Sjafei dan Mr. A. Bakar Djaar berangkat ke Djakarta, buat menjelesaikan soal pembentukan DPRST ini. Sekembalinja maka ketua delegasi Mr. Abu Bakar, menerangkan bahwa pemerintah berniat tidak akan meng „entjer” kan kembali DPRST jang telah beku itu, tetapi akan menggantinya dengan jang baru, setjara pemilihan umum, menurut sistem jang terkandung dalam Undang-undang No. 7 dengan tjara bertingkat.

Sedangkan partai-partai menghendaki pemilihan umum setjara langsung.

Dalam pada itu Menteri Dalam Negeri menjetudjui, supaja didjalankan persiapan pemilihan umum untuk anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dan untuk anggota Parlemen sekali.

Tetapi disamping itu, Dewan Perwakilan Rakjat kabupaten, jang pada empat kabupaten, dan satu kota dibentuk menurut P.P. No. 39, dan jang lain dibentuk oleh dan dari MPRK, menurut peraturan Gubernur Militer No. 10 dan Dewan Perwakilan disebahagian Wilayah/Ketjamatan dalam lingkungan Sumatera-Tengah tetap berdjalan terus.

Hanja Dewan Perwakilan Rakjat Kota Bukittinggi dibentuk sebelum agressi kedua dengan pemilihan umum, menurut sistem sekali gus.

Pada waktu jang achir-achir ini, dari beberapa partai di Sumatera-Tengah, timbul initiatief untuk mengisi kekosongan demokrasi di Sumatera-Tengah ini, dengan djalan meng-„entjerkan” kembali D.P.R.S.T.

K.P.P.S.T. terbentuk 27 Djuli 1952.

Dan pada tanggal 27 Djuli 1952 Panitia tetap Koordinasi Partai-partai Politik se-Sumatera-Tengah mengeluarkan suatu Statement Bersama jang antara lain berbunji;

M e m u t u s k a n ;

1. Menuntut pemilihan umum langsung, rahasia, lijsstelsel, dan perwakilan berimbang.
2. Menjesali sikap pemerintah jang mengakibatkan kosongnja, demokrasi di Sumatera-Tengah sekian lama.
3. Mentjabut P.P. No. 1 tahun 1951.
4. Mengaktifeer kembali DPRST.

Dengan tjatatan bahwa;

Pertama;

Masjumi dan GPII tidak menjetudjui 3 dan 4 (mentjabut P.P. No. 1 tahun 1951 dan meng-aktifeer kembali DPRST).

Kedua;

P.N.I. menjetudjui 1, 2 dan 3.

Ketiga;

P.S.I. menjetudjui 1 dan 2.

Keempat;

Parkindo menjetudjui seluruh putusan.

Keadaan di Sumatera-Tengah ini oleh partai-partai selalu dinamakan „kekosongan demokrasi“, jang telah mendjadi kalimat biasa dan selalu terdengar dalam lingkungan politisi Sumatera-Tengah. Makin lama keadaan ini berdjalan makin besar hasrat untuk mengisi sesuatu jang dinamakan kosong ini, dan titik berat usaha beralih kepada K.P.P.S.T.

Wakil K.P.P.S.T. ke Djakarta 6 Des. 1952.

Dan pada tanggal 6 Desember 1952 berangkatlah delegasi K.P.P. S.T. untuk menemui pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri) di Djakarta guna merundingkan aktivering DPRST kembali. Menteri Dalam Negeri mendjandjikan akan memberi ketentuan dalam pertengahan Djanuari 1953. Disamping itu Pemerintah Pusat menitik-beratkan kepada persetudjuan antara partai-partai di Sumatera-Tengah.

Oleh partai-partai di Sumatera-Tengah dengan perantaraan KPPST, telah diadakan banjak kali rundingan tentang tjara-tjara meng-aktifeer DPRST kembali: 11 buah dan 14 partai-partai jang bergabung dalam K.P.P.S.T., telah dapat merumuskan dan memadjukan satu konsepsi, mengenai pentjairan kembali DPRST,

sedang 3 partai jang lainnja memadjukan konsepsinja masing-masing pula.

Pada pokoknja semua partai sudah sepaham untuk mengisi kekosongan demokrasi di Sumatera-Tengah. Perbedaan pendapat timbul tentang tjara-tjara pelaksanaannya. Perbedaan pendapat ini, nampaknja semakin hari semakin merupakan ketegangan antara partai-partai di Sumatera-Tengah. Masing-masing mempertahankan konsepsinja.

Kemudian Gubernur Kepala Daerah Sumatera-Tengah telah mentjampuri persoalan tersebut dengan mengadakan hearing dengan KPPST pada tanggal 25-2-1953.

Dalam melandjutkan usaha kearah ini, oleh KPPST, telah diadakan rapat-rapat umum, seperti di Bukittinggi pada tanggal 16-2-1953, dimana setjara aklamasi rapat menjatakan persetudjuan untuk mengisi kekosongan demokrasi dan mendesak pentjairan kembali DPRST jang beku.

Pada tanggal 1 Maret 1953, dilangsungkan pula rapat-serentak di Padang dan Solok. Dimana setelah mendengarkan uraian-uraian tentang vacuum demokrasi di Sumatera-Tengah, maka dimadjukan konsepsi sebagai berikut:

1. Memprotes kebidjaksanaan Pemerintah jang sengadja mengosongkan adanja demokrasi berlarut-larut hampir diseluruh Indonesia umumnja dan Daerah Sumatera-Tengah chususnja.
2. Mendesak supaja Pemerintah menjesali akan sikapnja jang demikian dan menuntut setjepat-tjepatnja kekosongan Demokrasi diseluruh Indonesia diachiri, dengan membentuk DPR² dilain-lain daerah dan mentjairkan DPRST jang dibekukan.
3. Menuntut agar KPPST setjepat-tjepatnja mengadakan suatu Kongres Rakjat Sumatera-Tengah untuk mengatasi segala kesulitan-kesulitan jang telah dan mungkin timbul sebagai akibat kekosongan demokrasi didaerah propinsi Sumatera-Tengah.

Demikian setjara ringkas rentetan usaha-usaha/aksi dari KPPST untuk mengisi vacuum demokrasi di Sumatera-Tengah.

LAMPIRAN
BAHAGIAN III.

1. I.G.O.B. (Stbl. 1938 No. 490).
2. Maklumat Residen S. Barat No. 21-'46.
3. Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat No. 81/Kom/U.-'48.
4. Instruksi Gubernur Militer S. Tengah No. 10 GM/ST/49.

STAATSBLAD HINDIA BELANDA.

1938 No. 490. Negeri² Tanah Seberang. Ketentuan² Umum mengenai pengaturan dan penjelenggaraan urusan rumah-tangga negeri-negeri ditanah Seberang (I.G.O.B.).

Atas nama Ratu:

GUBERNUR-DJENDERAL HINDIA BELANDA,

Dengan menjampaiakan salam kepada semua jang akan melihat atau mendengar peraturan ini dibuatja,

berkenan memberi tahukan:

Bahwa ia, dengan tudjuan untuk menetapkan ketentuan² umum tentang pengaturan dan penjelenggaraan urusan rumah-tangga negeri-negeri ditanah Seberang:

Setelah mendengar pendapat Dewan Hindia Belanda dan dengan persesuaian Volksraad;

Menjetudjuai dan berkenan:

Pertama: Mentjabut kembali:

- a. ordonnantie tgl. 27 September 1918 (Stbl. No. 677) jang menetapkan ketentuan² tentang pengaturan kepentingan² rumah tangga negeri² didaerah Sumatera Barat;
- b. d.s.t.
- c. d.s.t.
- d. d.s.t.
- e. d.s.t.
- f. d.s.t.
- h. d.s.t.
- i. d.s.t.
- j. d.s.t.
- k. ordonnantie tgl. 1 Mei 1929 (Stbl. No. 100), jang memuat suatu pengaturan hak negeri² ditanah Seberang untuk memungut pajak² dibawah pengawasan jang ditentukan didalamnja.

1. Ordonantie tgl. 1 Mei 1929 (Stbl. No. 101) jang memuat suatu pengaturan hak negeri² ditanah Seberang untuk menentukan hukuman, dalam batas² jang ditetapkan didalamnja, atas pelanggaran terhadap peraturan² jang dibuatnja.

m. ajat² d.s.t.

Kedua: Menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan² Umum,

tentang pengaturan dan penjelenggaraan urusan rumah-tangga negeri ditanah Seberang.

B a h a g i a n P e r t a m a.

Fasal I.

1. Negeri adalah suatu Inlandsrechtspersoon, jang diwakili oleh Kepala Negerinja. Panggilan² untuk menghadap kemuka hakim dan segala surat² kehakiman lainnja harus ditudjukan kepada H.P.B., pegawai pamong mana akan menjampaiannja dengan segera kepada Kepala Negeri.
2. Susunan dan hak² Negeri dan susunan Badan Pengurus Negeri dan susunan dari alat² negeri lainnja, terketjuali sebagaimana termaktub dalam fasal 8, sedapat-dapatnja akan dibiarkan diatur menurut adat.
3. Dengan tidak mengurangi kekuasaan adat untuk menuntutnja, Kepala Negeri bertanggung djawab tentang lantjarnja djalannja urusan kepada Residen dan kepada Pegawai pamong jang dalam hal ini mewakili Residen.
4. Dimana bukan seorang pemangku djabatan jang dipandang sebagai Kepala Negeri jang sebenarnja, disana segala ketentuan-ketentuan didalam Peraturan ini jang mengenai Kepala Negeri, dianggap berlaku terhadap Badan Pemerintah jang menjalankan tugas Kepala Negeri.

Fasal 2.

1. Dengan berpedoman kepada hukum² adat, Residen dapat membuat peraturan² tentang pemilihan atau menundjukkan dan pemberhentian Kepala Negeri dan Kepala² Rakjat sewawahan lainnja, demikian djuga tentang perwakilan Kepala Negeri, djika ia mendjumpai halangan untuk melakukan tugas, tidak berada pada tempat kedudukannja atau djika belum ada Kepala Negeri sama-sekali dan tentang sumpah Djabatan jang harus dilakukannja.

2. Atas Pemilihan atau Penundjukan Kepala Negeri harus dimin-takan persetudjuan Residen, oleh siapa, djika persetudjuan didapat, kepada jang bersangkutan diberikan tanda pengakuan.
3. Dengan berpedoman kepada hukum² adat, Residen dapat memberikan petundjuk² mengenai penghasilan² jang didapat dari pengakuan berbagai-bagai djabatan dalam pemerintahan negeri; petundjuk² jang dikeluarkannja itu mendjadi ketentu-an jang mengikat.

Fasal 3.

Negeri berhak membuat aturan² untuk urusan² jang mengenai rumah tangganya, dalam mana termasuk pengerahan rakjat untuk kerdja negeri dan penebusan kerdja itu dengan uang, dengan mengingat hukum² adat dan djika pengerahan rakjat untuk kerdja negeri dan penebusan kerdja itu dengan uang, dengan berpedoman kepada peraturan² jang dibuat oleh Residen.

Fasal 4.

1. Negeri berhak memungut padjak², akan tetapi negeri² terhadap mana Bahagian kedua dari peraturan ini tidak berlaku, hanya berhak memungutnja djika padjak² itu menurut pertimbangan Residen memang diperlukan untuk membeajai perbelandjaan² pemerintahan negeri dan untuk sekolah² negeri.
2. Peraturan² negeri, mengenai hal-hal seperti dimaksud belaa-kangan dalam ajat 1 itu, tidak boleh didjalankan sebelum mendapat persetudjuannja akan memintakan sjarat², bahwa terlebih dahulu telah diadakan permusjawaratan dengan orang² dinegeri itu, jang menurut kebiasaan dinegeri itu patut dibawa bermusjawarat. Peraturan² seperti ini akan ditjatat oleh H.B.H. dalam suatu daftar jang sengadja diadakan untuk ke-perluan itu, satu dan lain menurut pertundjuk Residen.
3. Djika ada penunggakan, dan setelah disampaikan peringatan untuk pembajar, maka padjak itu dengan berpedoman kepada ada, oleh Kepala Negeri dapat diberatkan dengan seringan²nja atas barang² jang dipandang patut, jang dimiliki oleh jang berhutang, dengan pengertian bahwa pembeslahan (pensitaan) itu tidak boleh dilakukan atas barang², jang sesungguhnya perlu untuk penghidupkan dan untuk perusahaan jang ber-sangkutan.

Fasal 5.

1. Kekuasaan² dan kewadjiban² dari masing alat pemerintahan negeri sedapat mungkin ditentukan oleh adat, terketjuali djika peraturan ini atau Peraturan² lain, sebagai dimaksud dalam fasal 128 (3) Indische Staatsregeling mengharuskan adanja perbantuan dari atau memberikan kekuasaan kepada alat pemerintahan negeri jang ditentukan didalamnya.

2. Hubungan antara Negeri dengan bahagian²nja dikuasai seluas-luasnja oleh adat.

Fasal 6.

1. Keputusan² Negeri, jang berlawanan dengan Peraturan Pemerintah atasan, dengan hukum² adat atau dengan kepentingan umum, dapat dibatalkan oleh Residen dengan suatu Ketetapan jang memuat keterangan tentang sebab² pembatalan itu, ketetapan mana dimana perlu djuga mengatur soal-soal jang timbul akibat pembatalan itu.
2. Ketetapan² seperti dimaksud dalam ajat 1 harus diumumkan dengan tjara jang ditetapkan oleh Gubernur.

B a h a g i a n k e d u a .

Fasal 7.

Ketentuan² dalam bahagian ini berlaku buat negeri-negeri jang dengan persetudjuan mereka, sengadja ditundjuk oleh Gubernur.

Fasal 8.

1. Pemerintahan negeri² jang telah ditundjuk seperti dimaksud dalam pasal 7 didjalankan oleh Kepala Negeri dan Dewan Perwakilan Negeri.
2. Kepala Negeri adalah Ketua serta anggota dari Dewan Pem. Negeri. Ia memegang pimpinan sehari-hari dan pelaksanaan keputusan-keputusan Dewan ditugaskan kepadanya.
3. Susunan selandjutnja dari Dewan Pemerintah Negeri berdasarkan peraturan jang akan ditetapkan oleh Dewan itu, peraturan mana terlebih dahulu harus disahkan oleh Residen. Penjusunan pertama kali dari Dewan itu dilakukan oleh Pemerintah Negeri setelah bermusjawarat dengan orang-orang dinegeri itu jang menurut kebiasaan dinegeri itu, patut dibawa berunding dan dengan memperhatikan pertundjuk-pertundjuk jang mungkin diberikan oleh Residen.
4. Residen, setelah bermusjawarat dengan Dewan Negeri, dapat menetapkan maximum untuk djumlah anggota Dewan itu.
5. Setahun sekali H.P.B. mentjatat susunan, menurut pertundjuk-pertundjuk jang akan diberikan oleh Residen.

Fasal 9.

1. Rapat-rapat Dewan Negeri dilangsungkan dengan sidang terbuka.
2. Kepala Negeri harus mendjaga agar hal-hal jang akan diperinginkan dalam rapat itu, dengan tjara jang lazim ditempat

itu, dan dengan djangka waktu jang patut, terlebih dahulu diberitahukan kepada penduduk.

3. Keputusan-keputusan Dewan, jaitu jang berupa aturan-aturan dan penetapan-penetapan diperbuat dan diumumkan sepanjang adat.

Fasal 10.

1. Keputusan-keputusan Dewan baru mempunyai kekuatan hukum setelah didaftarkan oleh H.P.B., jang hanja melakukannya setelah ia mendapat kejakinan bahwa keputusan itu telah diperdapat dengan sjah.
2. Mengenai pendaftaran keputusan-keputusan Dewan itu oleh Residen dikeluarkan petundjuk-petundjuk ketata-usahaan (administratieve voorschriften).
3. Isi jang telah didaftarkan, dan demikian djuga tanggal jang telah didaftarkan mempunyai kekuatan hukum.

Fasal 11.

Tentang hal-hal jang mengenai negeri-negeri, djika negeri-negeri ini terletak didalam ressort groepsgemeenschap atau didalam ressort daerah otonoom setempat seperti dimaksud dalam fasal-fasal decentralisatie besluit akan tetapi jang bukan kota otonoom, satu dan lain djika dianggap perlu oleh Residen akan dimintakan pendapat dari Dewan Pemerintah Groepsgemeenschap atau Dewan Perwakilan Daerah Otonoom jang bersangkutan.

Fasal 12.

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan kepada peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Negeri.
2. Dalam Peraturan-peraturan ini tidak boleh dibawa-bawa pemungutan-pemungutan jang berdasarkan kepada adat.

Fasal 13.

1. Atas pelanggaran peraturan-peraturannya Dewan Negeri berhak untuk menentukan antjaman hukum berupa hukuman pendjara buat selama-lamanja 3 hari atau hukuman denda dengan setinggi-tingginja Rp. 10.— dengan atau tidak dengan perampasan barang-barang tertentu milik sipelanggar, jang diperolehnja karena pelanggaran itu atau dengan mana dilakukan pelanggaran itu.
2. Didaerah-daerah dimana rakjat masih mempunyai pengadilan adat sendiri, ketentuan tentang beratnja hukuman sebagai disebut dalam ajat barusan itu, tidak berlaku; disana berat hukuman ditetapkan sependjang adat.

3. Perbuatan-perbuatan, yang didalam peraturan-peraturan tadi diantjam dengan hukuman dianggap sebagai pelanggaran.

Fasal 14.

1. Peraturan-peraturan pemungutan padjak dan djuga peraturan-peraturan yang mengandung ketentuan-ketentuan hukuman, harus mendapat pengesahan dari Residen-pembesar mana, djika negeri yang bersangkutan itu terletak didalam daerah yang dimaksud dalam fasal 11, wadjib meminta pendapat dari Dewan Pemerintah Groepsgemeenschap atau Dewan Perwakilan ressort Otonoom itu terlebih dahulu.
2. Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ajat 1, atas usaha Residen diumumkan didalam penerbitan dengan mana negeri-negeri itu bisa mengeluarkan pengumumannja. Pengumuman seperti ini telah tjukup untuk membuat peraturan-peraturan itu peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan hukum.
3. Peraturan itu mulai berlaku 30 hari setelah tanggal dari penerbitan yang mengumumkannja, terketjuali djika dalam peraturan-peraturan itu sendiri ada ditentukan saat lain, Ketua Dewan yang bersangkutan harus berusaha agar peraturan-peraturan itu selekas mungkin diumumkan didalam negerinja.

Fasal 15.

1. Dalam menetapkan aturan-aturan yang harus ada dibuat menurut pasal 8 ajat 3 dan peraturan seperti dimaksud dalam fasal 14, Dewan Negeri wadjib memberi kesempatan dalam kerapatan-kerapatan negeri kepada orang-orang yang patut menurut anggapan yang lazim dinegeri itu untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka tentang hal-hal itu.
2. Selandjutnja terhadap peraturan-peraturan ini berlaku petundjuk-petundjuk mengenai aturan-aturan dan keputusan-keputusan dari Dewan Negeri yang dimuatkan dalam Ordonantie ini.

Fasal 16.

1. Segala uang kepunjaan negeri harus distor dalam suatu kas.
2. Penjelenggaraan keuangan negeri dilakukan menurut pertundjuk Residen.

Fasal 17.

1. Tiap-tiap tahun, dalam triwulan ke-empat, oleh Dewan Negeri ditetapkan anggaran keuangan untuk tahun dinas yang akan datang, anggaran mana disusun menurut pertundjuk Residen. Dalam sesuatu tahun dinas yang sedang berdjalan Dewan dapat menetapkan perubahan-perubahan anggaran.

2. Anggaran dan perubahannya, baru dapat berlaku setelah disahkan oleh Residen atau oleh seorang pembesar lain yang ditunjuk untuk itu oleh Gubernur; jika pengesahan tidak dapat diberikan maka dalam surat penolakannya harus dinjatakan sebab-sebabnya.
3. Dilarang mentjampur adukkan pengeluaran dan penerimaan; segala pengeluaran dan segala penerimaan harus berdasarkan kepada kepentingan-kepentingan dan keperluan-keperluan yang dianggar.
4. Tahun dinas adalah dari 1 Djanuari sampai dengan 31 Desember.
5. Jika dianggap perlu, tiap-tiap tahun dengan petundjuk-petundjuk Residen dibuat perhitungan anggaran.

Fasal 18.

Ketentuan-ketentuan ini, dapat disebut dengan nama „Peraturan Negeri Otonoom diluar Djawa dan Madura” (Inlandse Gemeente-ordonnantie Buitengewesten)”.

Ketiga: Menentukan sebagai berikut:

Peraturan ini mulai berlaku pada saat yang akan ditetapkan oleh G.G.

Dan agar tidak ada seorangpun yang akan dapat berbuat pura-pura tidak mengetahuinya, maka peraturan ini akan diumumkan didalam lembaran Negara H.B.

Dibuat di Djakarta, pada 3 September 1938.

d.t.o. Tjarda van Starkenborch.

Sekretaris Umum,

J. M. Kiveron.

(Srt.ketetapan G.G. tgl. 3 September 1938

No. 30.)

Dikeluarkan pada
tgl. 16 September 1938
Sekretaris Umum

J. M. Kiveron.

MAKLUMAT RESIDEN SUMATERA BARAT.

No. 21-46.

SETELAH membatja dasar-dasar dalam lampiran kesatu dan lampiran kedua dari rantjangan Undang-undang Dewan Perwakilan Negeri-negeri jang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah S. Barat dalam rapatnja tanggal 17 Maret 1946.

M e n e t a p k a n :

Peraturan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Negeri dan pemilihan Wali Negeri jang pertama kali di Sumatera Barat seperti berikut;

A. PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN NEGERI.

1. Panitia Pemilihan:

Pasal 1.

1. Komite Nasional ranting dalam tiap-tiap negeri bersama kerapatan negeri jang sekarang menanam sesuatu panitia pemilihan jang terdiri dari beberapa orang penduduk Negeri, banjaknja menurut jang ditimbang perlu, sehingga didalam itu ada Kepala Negeri, wakil Penghulu-penghulu, wakil alim Ulama dan wakil Tjerdik Pandai.
 2. Kepala Negeri mendjadi Ketua dan Ketua Komite Nasional mendjadi wakil Ketua Panitia Pemilihan atau sebaliknya.
 3. Panitia Pemilihan memilih diantara anggotanja satu orang setia usaha dan seorang wakil setia usaha.
- II. Menetapkan Banjak anggota Dewan Perwakilan Negeri.

Pasal 2.

1. Panitia pemilihan menetapkan banjak anggota Dewan Perwakilan Negeri menurut tjatjah djiwa penduduk negeri berdasarkan perhitungan djiwa tahun 1930 ditambah.....
Tjontoh:
1000 orang dari hitungan penduduk jang pertama 9 anggota umpamanja negeri A, berpenduduk 7312 orang.
1000 pertama 9 anggota, 6000 selandjutnja 6×2 orang = 12 anggota.
312 lagi 1×1 orang = 1 anggota.
7312 penduduk berdjumlah 22 anggota.
Kalau Negeri A hanja berpenduduk 7248, maka djumlah ang-

gotanja 1000 pertama 9 anggota.
6000 berikutnya 6×2 orang = 12 anggota.
248 orang tidak dihitung anggota.
7248 penduduk berdjumlah 21 anggota.

III. Menjusun tjalon anggota.

Pasal 3.

1. Djumlah tjalon anggota tidak boleh lebih dari $2 \times$ lipat djumlah anggota yang ditetapkan seperti berikut:

- a. Seperlima dari djumlah tjalon disusun oleh kerapatan penghulu-penghulu, alim ulama, yang diketuai oleh Kepala Negeri.
- b. Seperlima dari djumlah tjalon disusun oleh kerapatan ranting Komite Nasional dalam negeri itu.
- c. Seperlima dari djumlah tjalon disusun oleh satu kerapatan yang dipimpin oleh ranting Komite Nasional yang dihadiri sekurangnja 100 orang laki-laki yang berhak memilih.
- d. Seperlima dari djumlah tjalon disusun oleh kerapatan yang dihadiri oleh sekurangnja 100 orang wanita yang berhak memilih dan dipimpin oleh wanita pula.
- e. Tjalon yang selebihnja disusun oleh partai-partai politik yang ada dalam negeri itu.

2. Tanggal waktu dan tempat diadakan rapat tersebut pada a, b, c, d dan e. dalam ruas 1 ditentukan oleh Panitia Pemilihan, dan dalam tiap-tiap kerapatan itu ada hadir seorang wakil Panitia itu untuk mempersaksikan perjalanannya rapat itu.

Pasal 4.

Panitia pemilihan memeriksa nama-nama tjalon itu dalam persidangan yang ditentukan untuk itu. Tjalon yang tiada sah menurut peraturan Dewan Perwakilan Negeri hendaklah dibatalkan dan kepada kerapatan yang menundjukkan tjalon yang batal itu hendaklah disuruh pilih tjalon yang baru dengan secepat mungkin.

2. Kalau semua tjalon telah ditetapkan oleh Panitia, maka nama-nama tjalon itu didaftarkan dalam proses verbaal (surat kenyataan yang dibuat rangkap 3 lembar dan ditanda-tangani oleh Ketua, wakil Ketua dan Setia Usaha panitia pemilihan).

Selembarnya proses verbaal itu untuk ranting Komite Nasional selembarnya untuk Komite Nasional Kedemangan dan selembarnya untuk Residen.

3. Salinan proses verbaal itu disiarkan sebanyak mungkin dalam negeri ditempelkan ditempat-tempat ramai, dimesjdjid, disurau dan lain-lain supaya diketahui oleh semua penduduk.

Pasal 5.

Usaha Panitia Pemilihan seperti tersebut dalam pasal 3 wadajib selesai selambat-lambatnja pada tanggal 16 Djuni 1946.

1V. Hari memilih.

Pasal 6.

Hari memilih Dewan Perwakilan Negeri diseluruh S. Barat ditetapkan pada tanggal 25 hari bulan Djuni 1946.

1V. Tjara memilih.

Pasal 7.

1. Panitia pemilihan menanam 4 orang pendaftar suara jang telah disumpah lebih dahulu menurut agamanja bahwa ia tidak akan membuka rahasia pemilihan artinja ia tiada akan memberi tahukan kepada siapapun suara-suara sipemilih terhadap jang dipilihnja.
2. Tiap-tiap pendaftar itu mempunjai sehelai daftar tjalon jang disjahkan oleh Panitia Pemilihan.
3. Pada waktu pemilihan itu pendaftar-pendaftar diberi tempat jang terasing jaitu sekurangnja 10 meter dari tempat sipemilih berkumpul.
4. Menurut giliran jang diatur oleh Panitia memilih, maka tiap-tiap suaranya sebanjak anggota Dewan Perwakilan Negerinja. Pendaftaran mentjatat dengan satu garis dibelakang nama-nama tjalon jang disebutkan oleh memilih.
5. Setelah semua memilih selesai mengeluarkan suaranya maka dengan segera Panitia Pemilihan mengumpulkan daftar-daftar suara itu serta terus bersidang menetapkan hasil pemilihan.

Pasal 8.

1. Pada tanggal 25 Djuni 1946 segala memilih berkumpul pada djam 9 pagi ditempat jang ditentukan oleh Panitia Pemilihan dimana mereka berkumpul.
2. Lebih dahulu Panitia Pemilihan menerangkan lagi sjarat-sjarat sipemilih, nama-nama tjalon, tjara-tjara memilih dengan seterang-terangnja. Sesudah itu memeriksa kalau ada sipemilih jang tiada memenuhi sjaratnja.
3. Sipemilih dikumpulkan pada suatu lapangan jang dibatasi dan mereka jang telah memenuhi kewadjabannja mengeluarkan suaranya menurut peraturan dalam pasal 6 tiada boleh kembali masuk kedalam kumpulan itu.

Pasal 9.

Pemilihan dilakukan mulai pukul 10 pagi. Sipemilih jang datang lewat dari pukul 12 tengah hari tiada boleh lagi mengeluarkan suaranya.

Pasal 10.

1. Kalau Panitia pemilih menimbang perlu, maka wanita boleh mengeluarkan suaranya pada tempat yang berpisah dari kaum laki-laki, tetapi pada hari yang ditentukan itu juga.
2. Kalau suatu negeri terlampau luas sehingga sipemilih tidak bisa dikumpulkan pada suatu tempat saja, maka pemungutan suara boleh diadakan pada beberapa tempat menurut bagian dalam negeri itu.
3. Dalam hal yang tersebut dalam ruas 1 dan 2 maka panitia pemilihan harus menahan pendaftar-pendaftar 4 orang untuk tiap-tiap tempat memungut suara itu dan untuk bagian wanita boleh ditanam pendaftar wanita pada tiap tempat pemilihan itu hendaklah diadakan beberapa orang wakil Panitia Pemilihan yang mengatur sesuatunya supaya pemilihan berlangsung sebagaimana mestinya.

V. Menetapkan hasil pemilihan.

Pasal 11.

1. Panitia pemilihan menetapkan hasil pemilihan menurut suara yang terbanyak dalam daftar-daftar yang dengan segera diambil dari pendaftar.
2. Mula-mula ditetapkan banyak orang yang turut memilih mengeluarkan suaranya.
3. Tjalon-tjalon yang mendapat suara lebih dari seperdua dari banyaknya orang yang turut memilih itu ditetapkan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Negeri.
4. Kalau tiada cukup banyaknya tjalon yang mendapat lebih dari seperdua suara, maka diadakan pemilihan diantara tjalon-tjalon yang tiada terpilih sampai tertjapai banyak anggotanya yang ditentukan.

Pasal 12.

1. Ulangan pemilihan seperti tersebut dalam ruas 4 pasal 11 dilangsungkan dengan secepat mungkin sehingga selambatnya tanggal 1 Djuli telah tetap anggota Dewan Perwakilan Negeri. Nama-nama anggota itu dikirim dengan proses verbaal pemilihan selebar kepada Komite Nasional Kedemangan, sehelai kepada Bupati, sehelai kepada Residen dan sehelai disimpan dalam persuratan Negeri.

B. PEMILIHAN WALI NEGERI.

VI. Menetapkan tjalon.

Pasal 13.

1. Wali Negeri dipilih langsung oleh penduduk negeri diantara 4 tjalon yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Negeri yang telah dipilih menurut peraturan ini.

2. Kerapatan Dewan Perwakilan Negeri untuk menetapkan tjalon-tjalon Wali Negerinja diadakan pada tanggal 5 Djuli diketuai oleh Kepala Negeri jang masih ada.
 3. Tjalon Wali Negeri itu tidak dibatasi diantara anggota Dewan Perwakilan Negeri sadja.
 4. Pemilihan tjalon itu dilangsungkan dengan kertas bertulis tertutup dan tidak ditanda-tangani.
 5. 4 orang tjalon jang paling banjak mendapat suara dari tjalon-tjalon lain itulah jang mendjadi tjalon Wali Negeri.
 6. Nama-nama Tjalon jang empat itu disiarkan sebanjak mungkin seperti menjiarkan nama anggota Dewan Perwakilan Negeri.
11. Panitia Pemilihan Wali Negeri.

Pasal 14.

Panitia pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Negeri dilarang djuga untuk menjelenggarakan pemilihan Wali Negeri.

111. Hari pemilihan Wali Negeri.

Pasal 15.

Hari pemilihan wali Negeri ditetapkan pada tanggal 10 hari bulan Djuli.

IV. Tjara memilih dan lain-lain.

Pasal 16.

1. Selain dari pendaftar suara jang ditetapkan banjaknja hanja dua orang, maka ini pasal 6, 7, 8, 9, 10 berlaku djuga menurut maksudnja dalam pemilihan Wali Negeri dengan ketentuan bahwa ulangan undian jaitu kalau tiada ada tjalon jang mendapat seperdua suara dilakukan antara 2 orang tjalon jang mendapat suara paling banjak.
2. Ulangan pemilihan didjalankan selambatnja pada tanggal 15 Djuli 1946 sehingga Wali Negeri jang baru mulai mendjabat pekerdjaannja pada tanggal 18 Djuli 1946.

Pasal 17.

Peraturan ini berlaku pada tanggalnja diumumkan.

Padang, 21 Maret 1946.

Residen Sumatera Barat,

Dr. M. Djamil glr. Dt. Rangkajo Tuo.

**PERATURAN KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT
DI BUKITTINGGI TANGGAL 30 NOPEMBER 1948
No. 81/Kom/U.**

**„KAMI KOMISARIAT PEMERINTAH PUSAT DI
SUMATERA”.**

Membatja: Surat-surat Gubernur Sumatera-Tengah tanggal 19 September 1948 No. 2431/10/Gste dan tanggal 19 Oktober 1948 No. 209/1/10/Gste, serta lapuran-lapuran dan keputusan-keputusan Panitia Desentralisasi Sumatera-Tengah jang disampaikan ke Komisariat Pemerintah Pusat pada tanggal 15 Nopember 1948.

Menimbang:

- a. bahwa untuk melantjarkan djalannja pemerintahan dan pembangunan dengan mempergunakan tenaga rakjat perlu segera didjalankan pembagian daerah Propinsi Sumatera-Tengah mendjadi daerah-daerah Kabupaten.
- b. bahwa dasar pembagian dari daerah Propinsi Sumatera-Tengah mendjadi daerah-daerah Kabupaten jang disusun oleh Panitia Desentralisasi Sumatera-Tengah dan jang telah mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Keresidenan Sumatera-Barat, Riau dan Djambi serta Badan Executief Propinsi Sumatera-Tengah, dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk mengadakan pembagian daerah tersebut diatas.
- c. bahwa daerah-daerah Kabupaten tersebut dalam rentjana itu dapat ditundjuk sebagai daerah-daerah Kabupaten, jang undang-undang Pembentukan untuk daerah-daerah itu keluar, untuk sementara berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri.

Mengingat: Undang-undang No. 10 tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah tanggal 29 Mei 1948 No. 10.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan Sementara Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera sebagai berikut:

Pasal 1.

1. Daerah-daerah jang melingkungi daerah:
 - a. 1. Kewedanaan Agam Tuo,
 2. Kewedanaan Padang Pandjang,
 3. Kewedanaan Manindjau,

4. Kewedanaan Lubuk Sikaping,
 5. Kewedanaan Talu, (ketjuali negeri Sasak dan negeri Katiagan.)
- b. 1. Kewedanaan Pajakumbuh,
 2. Kewedanaan Suliki,
 3. Kewedanaan Batusangkar,
- c. 1. Kewedanaan Solok,
 2. Kewedanaan Sawah Lunto,
 3. Kewedanaan Sidjundjung,
 4. Kewedanaan Alahan Pandjang,
 5. Kewedanaan Muara Labuh,
- d. 1. Kewedanaan Air Bangis,
 2. Kewedanaan Pariaman,
 3. Kewedanaan Lubuk Alung,
 4. Kewedanaan Padang Luar Kota,
 5. Kewedanaan Mentawai,
 6. Negeri Tiku, Sasak dan negeri Katiagan,
- e. 1. Kewedanaan Kerintji,
 2. Kewedanaan Balai Selasa,
 3. Kewedanaan Painan,
- f. 1. Kewedanaan Bangkinang,
 2. Kewedanaan Pakan Baru, ketjuali ketjamatan Singingi,
 3. Kewedanaan Pasir Pangiraian,
 4. Ketjamatan Langgam,
- g. 1. Kewedanaan Rengat,
 2. Kewedanaan Taluk,
 3. Kewedanaan Tembilahan,
 4. Ketjamatan Singingi,
- h. 1. Kewedanaan Bengkalis,
 2. Kewedanaan Bagan Siapi-api,
 3. Kewedanaan Selat Pandjang,
 4. Kewedanaan Pelalawan, ketjuali ketjamatan Langgam,
 5. Kewedanaan Siak,
- i. 1. Kewedanaan Karimun,
 2. Kewedanaan Lingga,
 3. Kewedanaan Tandjung Pinang,
 4. Kewedanaan Pulau Tudjuh,

- j. 1. Kewedanaan Muara Tebo,
2. Kewedanaan Muara Bungo,
3. Kewedanaan Bangko,
4. Kewedanaan Sarulangun,
- k. 1. Kewedanaan Djambi,
2. Kewedanaan Muara Tembesi,
3. Kewedanaan Kuala Tungkal,
4. Kewedanaan Muara Sabak,

ditundjuk sebagai daerah Kabupaten jang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganja sendiri.

2. Daerah-daerah Kabupaten tersebut dalam ajat (1) dinamakan:

- a. Kabupaten Singgalang Pasaman,
- b. Kabupaten Sinamar,
- c. Kabupaten Talang,
- d. Kabupaten Samudera,
- e. Kabupaten Kerintji — Pesisir Selatan,
- f. Kabupaten Kampar,
- g. Kabupaten Inderagiri,
- h. Kabupaten Bengkalis,
- i. Kabupaten Kepulauan Riau,
- j. Kabupaten Merangin, dan
- k. Kabupaten Batang Hari,

3. Ibu Kota dan tempat kedudukan Pemerintahan Kabupaten tersebut dalam ajat (1) diatas, ialah:

- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Bukittinggi, | f. Pakan Baru, |
| b. Pajakumbuh, | g. Rengat, |
| c. Solok, | h. Bengkalis, |
| d. Pariaman, | i. Tandjung Pinang, |
| e. Sungai Penuh, | j. Muara Tebo, dan |
| | k. Djambi. |

Pasal 2.

- 1. Pemerintahan Kabupaten terdiri dari:
 - a. Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten,
 - b. Badan Executief Kabupaten, Dewan Perwakilan Kabupaten
- 2. Ketua ialah Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dan tidak mempunyai hak suara.

3. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Kabupaten dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Kabupaten.
4. Ketua Badan Executief Kabupaten ialah Bupati, Kepala Daerah dengan mempunyai hak suara.
5. Wakil Ketua Badan Executief Kabupaten dipilih oleh dan dari anggota Badan executief Kabupaten.

Pasal 3.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Kabupaten terdiri dari pemilihan dan angkatan.

Pasal 4.

Banjaknja anggota pilihan dan angkatan untuk tiap-tiap kabupaten ditetapkan sebagai berikut:

Pilihan Angkatan Djumlah			
a. Kabupaten Singgalang Pasaman	37	7	44
b. Kabupaten Sinamar	33	7	40
c. Kabupaten Talang	31	6	37
d. Kabupaten Samudera	36	7	43
e. Kabupaten Kerintji-Pesisir Selatan	23	5	28
f. Kabupaten Kampar	12	2	14
g. Kabupaten Inderagiri	19	4	23
h. Kabupaten Bengkalis	14	3	17
i. Kabupaten Kepulauan Riau ...			
j. Kabupaten Merangin	13	3	16
k. Kabupaten Batang-hari	9	2	11

Pasal 5.

1. Untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Kabupaten tiap-tiap daerah Kabupaten dibagi-bagi dalam *Wilajah Pemilihan* yang ditetapkan oleh Badan Executief Propinsi.
2. Tiap-tiap *Wilajah Pemilihan* memilih anggota Dewan Perwakilan Kabupaten yang djumlahnja *ditetapkan* oleh Badan Executief Propinsi.

3. Tjara pemilihan dan penggantinya anggota-anggota ditetapkan oleh Badan Executief Propinsi.

Pasal 6.

Anggota *angkatan* untuk Dewan Perwakilan Kabupaten diangkat oleh Badan Executief Propinsi sesudah pemilihan anggota menurut pasal 5 selesai dijalankan.

Pasal 7.

Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten dipilih dan diangkat sampai susunan Dewan Perwakilan Kabupaten terlaksana menurut Undang-undang Dasar Pembentukan Kabupaten.

Pasal 8.

Jang dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Kabupaten ialah:

- a. Warga negara Indonesia,
- b. telah berumur 21 tahun,
- c. bertempat tinggal didalam daerah Kabupaten jang bersangkutan sedikitnja 6 bulan jang terakhir,
- d. pandai menulis dan membuatja dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin, tidak karena keputusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanja.
- l. tidak dengan keputusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih.
- f. tidak terganggu ingatannya.

Pasal 9.

Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten tidak boleh merangkap menjadi:

- a. Presiden, Wakil Presiden,
- b. Perdana Menteri, Menteri,
- c. Komisaris Negara,
- d. Ketua dan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan.
- e. Gubernur dan Residen,
- f. Anggota Badan Executief Propinsi,
- g. Pegawai jang bertanggung-djawab tentang keuangan kepada daerah Kabupaten jang bersangkutan,
- h. Kepala Djawatan dan Sekretaris daerah Kabupaten jang bersangkutan.

Pasal 10.

1. Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten menerima uang sidang, uang djalan dan uang penginapan, menurut peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Kabupaten.
2. Anggota Badan Executief Kabupaten menerima uang kehormatan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Kabupaten.
3. Peraturan-peraturan jang tersebut dalam ajat (1) dan (2) harus disahkan lebih dahulu oleh Badan Executief Propinsi.

Pasal 11.

1. Dewan Perwakilan Kabupaten bersidang sekurang-kurangnja sekali dalam tiga bulan.
2. Dewan Perwakilan Kabupaten bersidang atau berapat atas panggilan Ketuanja atau atas permintaan sekurang-kurangnja seperlima dari djumlah anggota Dewan Perwakilan Kabupaten atau atas permintaan Badan Executief Kabupaten.
3. Semua jang hadir pada rapat tertutup berkewadjaban merahasiakan segala hal jang dibitjarakan dalam rapat itu.

Pasal 12.

1. Rapat Dewan Perwakilan Kabupaten bersifat terbuka.
2. Rapat dapat memutuskan mengadakan rapat tertutup.
3. Dalam rapat tertutup tidak boleh diambil putusan tentang:
 - a. anggaran pendapatan dan belandjanja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan perubahan anggaran pendapatan dan belandja.
 - b. penetapan, perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi.
 - c. mengadakan pindjaman uang.
 - d. menerima anggota baru.

Pasal 13.

Untuk ketertiban rapat Dewan Perwakilan Kabupaten membuat peraturan tata-tertib.

Pasal 14.

1. Rapat Dewan Perwakilan Kabupaten baru boleh berunding atau mengambil sesuatu keputusan djikalau djumlah anggota jang hadir lebih dari separuh djumlah anggota Dewan Perwakilan Kabupaten.

2. Suatu keputusan rapat dipandang sah, djikalau mendapat suara jang terbanjak dari anggota jang hadir.
3. Djika dalam pemungutan suara mengenai sesuatu hal djumlah suara sama, maka pemungutan suara jang kedua kalinja diper-tanggihkan sampai rapat jang berikut.
Djika djumlah suara masih sama, maka usul dianggap tidak diterima.
4. Pemungutan suara jang mengenai orang harus dengan tulisan diatas kertas dengan tidak diberi tanda-tangan.
Bila djumlah suara sama, maka undianlah jang memberi putusan.

Pasal 15.

1. Anggota Badan Executief Kabupaten dipilih oleh dan dari Dewan Perwakilan Kabupaten atas dasar Perwakilan berimbang.
2. Ketjuali Ketua, djumlah anggota Badan Executief Kabupaten ditetapkan untuk tiap-tiap Kabupaten 4 orang.

Pasal 16.

1. Sebelum mendjalankan djabatannja anggota Badan Executief Kabupaten bersumpah menurut agamanja atau berdjandji dengan sungguh dihadapan Dewan Perwakilan Kabupaten untuk memenuhi kewadjabannja sedjudjur-djudjurnja.
2. Susunan kata sumpah dan djandji jang tersebut pada ajat (1) ditetapkan oleh Badan Executief Propinsi.

Pasal 17.

Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diangkat dan diperhentikan oleh Komisariat Pemerintah Pusat atas *usul Gubernur*.

Pasal 18.

1. Sekretaris Bupati djuga mendjadi Sekretaris Badan Executief Kabupaten dan *Dewan Perwakilan Kabupaten*.
2. Djika Sekretaris berhalangan, Badan Executief Kabupaten me-nundjuk pegawai lain untuk gantinja.

Pasal 19.

1. Pegawai Negara jang diperbantukan kepada daerah Kabupaten digadji dari keuangan Kabupaten.
2. Peraturan tentang pengangkatan, pemberhentian sementara gadji, pensiun, uang tunggu, dan lain-lainnja ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Kabupaten dengan berpedoman kepada peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai Negara.

Peraturan tersebut dalam ayat (2) harus disahkan lebih dahulu oleh Badan Executief Propinsi.

Pasal 20.

1. Dewan Perwakilan Kabupaten mengatur dan mengurus rumah tangga kabupaten.
2. Urusan-urusan yang masuk rumah tangga kabupaten ialah:
 - a. memelihara dan memajukan kesehatan rakyat,
 - b. memajukan pertanian dan perikanan,
 - c. memperbanyak dan memperbaiki mutu ternak,
 - d. membuat dan memelihara jalan-djalan, gedung-gedung dan bangun-bangunan pengairan,
 - e. memajukan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan rakyat,
 - f. menjelenggarakan penerangan kepada rakyat,
 - g. mengerdjakan pekerjaan sosial dan menimbang rakyat dalam lapangan pekerjaan itu.
3. Didalam batas kekuasaannya sendiri, *Badan Executief Propinsi* menetapkan lebih lanjut urusan-urusan tersebut dalam ayat (2) yang dapat diserahkan kepada kabupaten untuk dikerdjakan.

Pasal 21.

Beberapa Dewan Perwakilan Kabupaten dapat bersama-sama mengatur kepentingan mereka bersama-sama menurut peraturan-peraturan yang lebih dahulu harus disahkan oleh Badan Executief Propinsi.

Pasal 22.

Badan Executief Kabupaten mendjalankan pemerintahan sehari-hari dan bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Kabupaten.

Pasal 23.

1. Badan Executief Kabupaten berapat menurut ketetapan Bupati.
2. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 14 berlaku untuk rapat Badan Executief Kabupaten.

Pasal 24.

1. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten mengawasi pekerjaan Dewan Perwakilan Kabupaten dan Badan Executief Kabupaten.
2. Ia berhak menahan pelaksanaan putusan-putusan Dewan Perwakilan Kabupaten dan Badan Executief Kabupaten jika dipandangnja putusan-putusan itu bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan-peraturan Pemerintah atau Peraturan-peraturan Propinsi.

3. Penahanan tersebut dalam ayat (2) harus diberitahukan dalam tujuh hari pada Dewan Perwakilan Kabupaten atau Badan Executief Kabupaten dan pada Badan Executief Propinsi.
4. Djika dalam tiga bulan Badan Executief Propinsi dalam hal tersebut ayat (3) tidak mengambil keputusan, maka putusan yang ditahan pelaksanaannya itu sesudah itu sesudah tempo itu yang ditahan pelaksanaannya sesudah tempo itu terlampaui dapat dijalankan.

Pasal 25.

Pendapatan daerah Kabupaten ialah:

1. retribusi
2. pajak kendaraan yang tidak bermotor.
3. pajak tontonan.
4. pajak minuman keras.
5. pajak reklame.
6. pajak penerangan jalan.
7. hasil perusahaan kabupaten.
8. subsidi.

Pasal 26.

1. Dewan Perwakilan Kabupaten berhak membuat peraturan-peraturan tentang pemungutan retribusi, dan pajak-pajak serta tentang perusahaan-perusahaan Kabupaten.
2. Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat (1) untuk berlaku harus lebih dahulu disahkan oleh Badan Executief Propinsi dan kemudian diumumkan menurut tjara yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Kabupaten.

Pasal 27.

Kabupaten mempunyai urusan keuangan Kabupaten, yang sebelum ada Undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur hal itu, diselenggarakan menurut petunjuk dari Badan Executief Propinsi.

Pasal 28.

Dengan berlakunya peraturan ini, maka daerah Keresidenan Sumatera-Barat, Riau dan Djambi, yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dihapuskan, dan *Dewan Perwakilan Rakjat* serta Badan Pekerjanya masing-masing dibubarkan.

Pasal 29.

1. Hak dan kewajiban keresidenan-keresidenan tersebut dalam pasal 28 diatas diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Suma-

tera-Tengah menurut petundjuk-petundjuk dari Komisariat Pemerintah Pusat Sumatera.

2. Keresidenan-keresidenan tersebut dalam pasal 28 diatas, diserahkan kepada Propinsi Sumatera-Tengah menurut petundjuk-petundjuk Komisariat Pemerintah Pusat Sumatera.
3. Pegawai-pegawai keresidenan-keresidenan itu jang masuk dalam Kementerian Dalam Negeri diperbantukan kepada Gubernur Propinsi Sumatera-Tengah.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ajat 1, 2 dan 3 harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 1948.

Pasal 30.

Peraturan-peraturan keresidenan jang dihapuskan tersebut diatas masih berlaku untuk daerah hukumnja masing-masing sampai Propinsi Sumatera Tengah mengubah, menambah, mengganti, atau mentjabut peraturan-peraturan itu.

Pasal 31.

Peraturan ini dinamakan:

„PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DALAM PROPINSI SUMATERA-TENGAH”.

dan mulai berlaku pada tanggal *1 Desember 1948*.

Salinan ketetapan ini dikirimkan kepada:

Ditetapkan di Bukittinggi, pada
tanggal 30 Nopember 1948.
Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera.

Diumumkan pada tanggal
Nopember 1948.

Sekretariat Komisariat Pemerintah
Pusat di Sumatera.

Ketua.

Mr T.M. HASAN.

Pemimpin,
Mr A. SIDDIK.

INSTRUKSI GUBERNUR MILITER SUMATERA TENGAH
No. 10/GM/ST/49.

Tentang pembentukan Kabupaten-kabupaten berotonomie.
GUBERNUR MILITER SUMATERA TENGAH.

Memperhatikan:

1. Petundjuk Wakil Perdana Menteri N.R.I. tanggal 6 Nopember 1949, waktu berkundjung ke Sumatera Tengah.
2. Instruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wakil Perdana Menteri tanggal 1 September 1949.
3. Ketentuan dari Konferensi Medja Bundar bahasa Kedaulatan akan diserahkan kepada R.I.S. sebelum achir Desember 1949 sehingga perlu diadakan persiapan susunan ketata-negaraan.
4. Permintaan dari golongan-golongan masjarakat untuk menjusun pemerintahan menurut dasar kedaulatan rakjat seperti jang dimaksud dengan Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Menimbang:

1. Bahwa sungguhpun buat sementara belum mungkin lagi dilaksanakan pembentukan daerah-daerah berotonomie seperti dimaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 itu dengan sepenuhnya, tetapi telah tiba waktunja menetapkan peraturan sementara dari pelaksanaan pembentukan daerah-daerah berotonomie seperti dimaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 itu.

Mengingat:

Ketetapan P.D.R.I. tanggal 22 Mei 1949 No. 21 dan setelah mendengar pemandangan dari anggota staf Gubernur Militer Sumatera Tengah.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan pembentukan Kabupaten di Sumatera Tengah seperti berikut:

BAB 1.

Tentang batas-batas Kabupaten.

Pasal 1.

Kabupaten didaerah Gubernur Militer S. Tengah dengan batas-batasnja seperti jang ada pada tanggal ketetapan ini, didjadikan Kabupaten jang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan mempedomani Undang-undang No. 22 tahun 1948, dan selandjutnja dengan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB II.

Tentang penjerahan hak dan kewadajiban.

Pasal 2.

Pada Kabupaten-kabupaten jang dimaksud dalam pasal-pasal itu diserahkan sebagai urusan rumah tangganya djawatan-djawatan jang selama ini diurus oleh Pemerintah Pusat, terketjuali djawatan P.T.T., Pelabuhan, Bea Tjukai, Tambang perusahaan Negara, Polisi Kedjaksaan dan Kehakiman, Kehutanan, Iuran Negara dan Ketenteraan, Koperasi, Gas Listerik, R.P.D. Agama.

Pasal 3.

- a. Buat pembiajai urusan-urusan jang diserahkan kepada Kabupaten itu, Kabupaten-kabupaten menerima sebahagian dari penghasilan negara jang djumlahnja akan ditetapkan dalam peraturan jang tertentu.
- b. Selain dari jang ditetapkan pada sub a dari pasal ini, maka pada Kabupaten-kabupaten dapat diberikan bantuan istimewa, kalau kenjataan bahasa bagiannja dari penghasilan negara jang dipungut dalam daerah itu ditambah dengan penghasilan sendiri tidak mentjukupi untuk penutup anggaran perbelandjaan jang menurut timbangan Gubernur Militer Sumatera Tengah telah disusun setjara sehematnja.

BAB III.

Tentangan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dan Dewan Pemerintahannja.

Pasal 5.

Susunan, djumlah dan tjara memilih anggota dari Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pemerintahan Kabupaten didalam Keresidenan Riau adalah seperti jang telah ditetapkan oleh Komisi Desentralisi Sumatera Tengah sebelum tanggal 19 Desember 1948.

Pasal 6.

Buat Keresidenan Sumatera Barat susunan djumlah dan tjara memilih anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pemerintahan Kabupaten diatur seperti berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten terdiri dari:
 - a. 3 orang jang dipilih oleh dan dari anggota staf Bupati Militer jang sekarang.
 - b. anggota-anggota jang dipilih oleh dan dari anggota-anggota M.P.R. Ketjamatan itu, jaitu 2 orang buat tiap-tiap Ketjamatan.
 - c. Bupati Militer, Tjamat Militer, anggota tentera, dan Polisi jang duduk dalam staf Bupati dan M.P.R. Ketjamatan hanja boleh memilih, tetapi tidak boleh dipilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten.
2. a. Dewan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 5 orang jang dipilih oleh dan dari anggota-anggota D.P.R. Kabupaten.
- b. Anggota-anggota Dewan Pemerintahan Kabupaten memilih salah seorang diantara mereka jang mendjadi wakil Ketua Dewan Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten.

Pasal 7.

- a. Bupati jang sekarang mendjadi Ketua dari Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dan djuga dari Dewan Pemerintahannja, di D.P.R. Kabupaten dia tidak mempunjai hak suara, tetapi ada mempunjai suara di Dewan Pemerintahannja.
- b. Sekretaris Bupati jang sekarang, merangkap sekretaris dari Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pemerintahan Kabupaten berotonomie.

Aturan tambahan.

Pasal 8.

Sementara daerah-daerah berotonomie dibawah Kabupaten belum terbentuk maka peraturan-peraturan jang mengenai M.P.R. Ketjamatan dan Negeri atau Wilayah tetap berlaku.

Ditetapkan di Suliki pada tanggal
9 Nopember 1949.

Gubernur Militer Sumatera Tengah.
d.t.o.

Mr. NASRUN.

Pasal 13.

SEMENDJAK PROKLAMASI KEMERDEKAAN. KEPARTAIAN DI SUMATERA TENGAH

Pendahuluan:

SEMENDJAK beberapa tahun sebelum berachirnja kekuasaan pemerintahan pendjadjahan Belanda di Indonesia, sebagai djuga pada seluruh temppat di seluruh kepulauan Indonesia, usaha dan gerakan-gerakan Partai Politik di Sumatera Barat chususnja dan di Sumatera Tengah umumnja, mendjadi „sepi”.

„Exorbitante Rechten” jang dipersendjatakan kepada Gouverneur General der Nederlandsch Indië oleh pemerintah Pusat keradjaan Belanda di Den Haag, untuk „menenteramkan suasana politik” di Indonesia, menghasilkan suatu suasana „aman dan tenteram” (rusa en orde). Udara mendung jang meliputi dan melindungi kekuasaan imperialisme Belanda pada saat itu dengan sendirinja mendjadi „hilang lenjap”, dan karena itu tidaklah dikuatiri lagi akan timbulnja suatu tuntutan untuk menentukan nasib sendiri oleh seluruh rakjat Indonesia, bangsa „jang paling lemah lembut diseluruh permukaan bumi” itu.

Bila tidaklah karena dilindungi oleh konstitusi keradjaan Belanda jang berdasarkan kepada „demokrasi” itu, agaknja GAPI jang mendjadi satu-satunja saluran kehendak dan tjita-tjita rakjat Indonesia dalam lapangan „menentukan kedudukan sendiri dimasa jang akan datang”, djuga tidak akan dibiarkan hidup dan tegak.

Dan bila tidak karena tengah menghadapi kekeruhan suasana jang tengah terdjadi disekeliling lautan Pasifik serta antjaman akan timbulnja Perang Dunia II di Eropah pada achir tahun 1939, GAPI (Gabungan Partai-partai Politik seluruh Indonesia) dengan semua anggota-anggotanja, pasti tidak akan dibiarkan ada oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Meskipun GAPI sangat „berapi-api” dengan tuntutan dan kehendaknja (menuntut „Indonesia Berparlemen”), tapi rakjat pada waktu itu seakan-akan sudah kebotjoran perahu tempat mereka menumpangkan diri dan tjita-tjita.

„Dilebur dan ditjairkannja” PERMI dan P.S.I.I. dengan tjara paksa dari masjarakat Sumatera Barat dengan Vergader Verbod dan diasingkannja pemimpin-pemimpin besar partai-partai itu ke

Digul dan lain-lain, menjebakkan „dingin” dan „kakunja” gerakan rakjat di Sumatera Barat dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan akan terdjadinja suatu perubahan dalam kalangan pemerintahan Indonesia dimasa depan nanti.

Meskipun Partai Indonesia (Parkindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (P.N.I.) masih mendjadi dukungan sebahagian diantara pemimpin-pemimpin jang belum „diasingkan”, tapi keduanja tidak mungkin dapat mewakili keinginan-keinginan rakjat jang sebahagian besar masih pertjaja, bahwa politik dan adjaran agama tidak boleh dipisahkan dalam menentukan dasar kedudukan negara dan peri kehidupan masjarakat dimasa datang.

Dan meskipun gerakan-gerakan agama seperti Muhammadiyah, Perti dan lain-lain masih tetap bergerak menudju perkembangannya masing-masing tapi karena gerakan itu tidak dapat menjalurkan kehendaknja dalam lapangan pemerintahan dan perbaikan kedudukan dalam lapangan politik, kesepian masih terasa didalam lapangan „tjita-tjita”.

Dipaksakannya Undang-undang „vergader-verbod” untuk Partai-partai jang dipandang „berbahaja” oleh pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Barat pada tahun 1933, dan tidak diizinkanja Partai-partai itu bergerak dan diasingkannya pemimpin-pemimpin partai-partai tersebut dari masjarakat jang harus dipimpin mereka, menjebakkan pada beberapa bahagian rakjat mendjadi „apathie” dalam usaha untuk mempertahankan tanah air mereka dari kemungkinan-kemungkinan adanya serangan dari luar negeri.

Dekat sebelum mendaratnja tentera keradjaan Dai Nippon dipantai-pantai kepulauan Indonesia, oleh beberapa orang pembesar-pembesar pemerintahan Hindia Belanda dipandang „dapat memasuki hati dan djiwa rakjat Sumatera Barat” lalu ditjoba membudjuk-budjuk mereka, agar kerdja-sama dengan pemerintah pendjadjahan dapat diudjudkan oleh rakjat. Ch. O. Van der Plas, anggota Dewan Hindia jang pasih berbahasa Arab dan pandai memakai ayat-ayat Qur'an dan Hadist-Hadist Nabi untuk alat pembudjuk, datang ke Sumatera Barat untuk menjampaikan „niat dan maksud baik” keradjaan Belanda, dan meminta agar rakjat sudi bekerdja-sama dengan pemerintah dalam melindungi kepentingan-kepentingan pemerintah pendjadjahan pada waktu itu.

Djandji-djandji muluk dan lagu-lagu enak jang diperdengarkan oleh pembesar-pembesar pemerintah Hindia Belanda itu dipandang sebagai „siulan-ular” oleh pemimpin-pemimpin rakjat di Sumatera Barat, dan karena itu maka kerdja-sama jang sangat diharapkan itu tidak pernah terudjud sama sekali. „Vernielingscorps” jang bertugas untuk membumi hanguskan semua bangunan-bangunan jang dirasa dan dipandang akan menguntungkan kepada kedudukan musuh bila Indonesia buat sementara terpaksa diduduki oleh tentera asing (Djepang), tidak dapat diterima oleh rakjat. „Militie-

plicht" jang pasti hanja akan merupakan alat untuk mengekalkan pendjadjahan Belanda di Indonesia, tidak mendapat sambutan dari rakjat „Landswacht“, „Staatswacht“ dan „Hulppolitie“ jang dimaksud oleh pembesar-pembesar militer Hindia Belanda untuk membantu alat-alat kekuasaan pendjadjah, mendapat sambutan jang sepi, ketjuali dari pegawai-pegawai negeri jang terpaksa menurut.

Semua itu disebabkan karena kepertjajaan rakjat dan pemimpin-pemimpinnya kepada „niat baik“ pendjadjah sudah hampir hilang sama sekali. Hilangnja kepertjajaan itu sebahagian besar karena tidak adanja kesempatan jang mereka berikan kepada rakjat buat berketjimpung dalam lapangan politik. Disamping itu, tuntutan-tuntutan agar segera dilakukan „bestuurs-hervorming“ di Indonesia untuk menghadapi situasi dunia jang pada waktu itu tengah mendjadi-djadi, sama sekali tidak mendapat perhatian apa-apa dari pemerintah keradjaan Belanda.

Sekiranya kedatangan beberapa orang menteri keradjaan Belanda jang hidjrah ke London, diantaranya Welter dan van Kleffens ke Indonesia beberapa saat sebelum Ter Poorten dan van Starkenborg menjerahkan seluruh kekuasaan pemerintah Belanda kepada pembesar balatentera Djepang, membawakan sedikit perobahan sekeliling ketatanegaraan Indonesia, agaknja tidaklah akan setjepat itu benar lenjapnja segenap bekas-bekas kebesaran kekuasaan keradjaan Belanda dari seluruh Indonesia.

Ja, bila kehilangan kepertjajaan rakjat Indonesia ini dikadji didalam-dalamnja, orang akan menemui, bahwa jang mendjadi sebabnja jang utama, ialah karena tidak diberikannja kesempatan kepada rakjat untuk menganut suatu paham politik, tegasnja karena tidak dibiarkannja berkembang suatu partai dikalangan rakjat Indonesia sendiri. Dan tidak pula mengherankan bila pada saat hilang dan lenjapnja kekuasaan keradjaan Belanda dari Indonesia, tidak seorompokun diantara rakjat dan bangsa Indonesia jang berdjawa kebangsaan jang meneteskan air matanja. Tidak ada pula jang akan heran bila melihat atau mengetahui, bahwa kedatangan tentera kemaharadjaan Djepang disambut dan dielu-elukan oleh rakjat, karena bangsa jang sudah mengalahkan bangsa jang „sangat berkuasa“ sekian ratus tahun lamanja itulah jang dipandang dan dirasa mereka dapat memberikan kebebasan bergerak dan bertindak kepada mereka.

Sebelum tindjauan mengenai masa berkabung bagi Partai-partai Politik dizaman terachir kekuasaan pemerintahan keradjaan Belanda ini kita achiri, dapatlah disimpulkan, bahwa:

Ditekannja pergerakan rakjat dalam lapangan berpolitik dan dihapuskanja pengaruh-pengaruh serta gerak partai jang sekian lama mendjadi tumpangan rakjat di Sumatera Tengah, menjebabkan bertambah tjepat lenjapnja kekuasaan Belanda di Sumatera Barat, dan penjambutan kedatangan angkatan perang Djepang ke Suma-

tera Barat, merupakan suatu pembalasan dendam rakjat terhadap tekanan-tekanan jang pernah mereka rasakan itu.

Disaat Tentera Djepang berkuasa:

Meskipun hanja 3½ tahun sadja tentera kemaharadjaan Dai Nippon berkuasa, masa jang pendek itu sudah lebih dari tjukup dirasakan oleh rakjat di Sumatera Barat umumnja dan di Sumatera Tengah chususnja betapa pahit dan beratnja tekanan-tekanan jang dirasakan.

Disamping tekanan-tekanan dalam lapangan kehidupan sehari-hari dan dalam lapangan perampasan tenaga kerdja jang sangat banjak meminta pengorbanan, pendirian dan paham jang harus mengalami penderitaan jang sangat perih.

Sembojan „Asia untuk bangsa Asia” dipakai untuk menghambat kemungkinan timbulnja tjita-tjita untuk berdiri sendiri oleh kekuasaan jang menekan. Motto „Kerdja-sama untuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya”, didjadikan modal untuk membendung kemungkinan-kemungkinan timbulnja aliran-aliran dalam kalangan rakjat untuk kembali menggerakkan apa jang sudah dilumuhkan oleh kekuasaan pemerintahan almarhum.

Bila tekanan-tekanan dan perkosaan-perkosaan paham dan djiwa oleh tentera pendjadjahan Dai Nippon ini ditjatat dalam beberapa baris perkataan sadja, maka tjatatan itu akan berbunji: „Peratjunan djiwa jang paling besar jang pernah dilakukan terhadap bangsa Indonesia selama orang mengenal sedjarah”.

Bagaimanakah „peratjunan” itu dilakukannja.....?

Sebelum mereka mendarat, mereka lebih dahulu sudah berkenalan dengan „isi hati” rakjat di Sumatera Barat/Tengah. Mereka tahu, bahwa rakjat Sumatera Barat dalam kehidupannja sehari-hari bertaut rapat dengan adjaran-adjaran jang diberikan oleh norma-norma adat dan agama. Dalam masjarakat itu berkembang suatu hasrat untuk mendjadi bangsa jang besar dan harus terlepas dari segenap pengaruh-pengaruh asing. Pembesar-pembesar balatentera Dai Nippon itu tahu, bahwa perasaan kebangsaan Indonesia sudah bersemi didalam dada tiap-tiap putera Indonesia sedari sekian lama, jaitu perasaan jang semula disemikan oleh pergerakan-pergerakan rakjat seperti Budi Utomo, Partai Sjarikat Islam Indonesia dan lain-lain. Perasaan kebangsaan itu selalu mentjari djaln penjaluran untuk berwujud. Ditekan dan ditindasnja perwujudan tjita-tjita ini oleh kekuatan sendjata Pemerintah pendjadjahan Belanda selama berpuluh-puluh tahun, menjebabkan mudahnja bagi balatentera Dai Nippon untuk menundukkan kekuasaan Belanda itu.

Tapi, dengan diberikannja kesempatan untuk berkembang serta berwujudnja tjita-tjita kebangsaan itu, Dai Nippon tidak akan

mendapat kesempatan untuk membentuk suatu „Susunan Dunia Baru” sebagai adjaran-adjaran yang diberikan oleh para pentolan mereka. Dan untuk meneruskan tekanan sebagai yang dilakukan oleh bekas pemerintah keradjaan Belanda, djuga dipandang sebagai suatu taktik yang akan mengeruhkan suasana dan pengertian yang baik antara pemerintah Djepang dengan rakjat Indonesia sendiri.

Inilah agaknja yang mendjadi salah satu sebab, kenapa pada taraf pertama dizaman pendudukan tentera Djepang itu bagi rakjat Indonesia terbuka kesempatan baik untuk mentjerminkan tjita-tjita kebangsaan mereka. Kesempatan sebentar yang diberikan Djepang kepada bangsa Indonesia untuk mengalirkan hasrat yang sekian lama terbandung didalam dada, mereka pergunakan, baik dengan djalan memperlihatkan „sympathie” dan „mendjandjikan kerdja-sama” kepada tentera pembebas itu.

Pada saat itu terbentuklah sebuah gerakan yang diberi nama dengan „Pemuda Nippon Raya” jaitu gerakan „kebaktian” dari pemuda-pemuda Indonesia Sumatera Tengah terhadap „djasa-djasa baik” yang diberikan oleh tentera Dai Naippon terhadap perdjjuangan rakjat Indonesia dalam memperdjjuangkan kemerdekaan tanah air mereka.

Diizinkanja menaikkan Sang Dwi Warna dan melagukan lagu kebangsaan „Indonesia Raya” dipandang sebagai suatu permulaan baik dalam perwujudan tjita-tjita kebangsaan itu. Karena itu, maka pengerahan tenaga untuk memberikan kebaktian selandjutnja kepada Dai Nippon ini berkembang dalam segala lapangan.

Didirikannja „Komite Rakjat” oleh bung Karno (Presiden R.I. sekarang) yang pada waktu itu „tertjetjer” dalam pelarian oleh tentera Belanda dari Bengkulu di Padang, segera diikuti oleh tempat-tempat lain. „Komite Rakjat” merupakan badan setengah resmi yang akan memberikan tenaga dan pikiran dalam melaksanakan kebidjaksanaan dalam lapangan pemerintahan dikalangan rakjat di-masa yang akan datang.

Tapi „permulaan baik” ini tidak pandjang umurnja.

Segera sesudah Djepang merasa kedudukannja kuat, keluarlah larangan-larangan untuk mengekang langkah-langkah pertama yang sudah diajarkan itu. „Komite Rakjat” dirasakannja tidak perlu ada lagi, „Pemuda Nippon Raya” djuga tidak lagi dibutuhkan, bendera dan lagu kebangsaan Indonesia harus disimpan kembali. Kalau tidaklah karena akan mengakibatkan reaksi yang sangat besar, agaknja tidak suatu perkumpulan sosialpun yang diizinkan untuk berdiri dan hidup terus. Dengan demikian, maka usaha untuk membangunkan kembali partai-partai politik yang sekian lama di „breidel” oleh bekas pemerintahan Hindia Belanda dulu, mendjadi kandas sama sekali.

Kemudian diandjurkan gerakan „Tiga A” jang berarti :

Tjahaja Asia Nippon.

Pelindung Asia Nippon.

Pemimpin Asia Nippon.

jang tidak begitu berkembang di Sumatera Tengah.

„Dai Toa Senso” jang oleh Djepang dinamakan sebagai „perang total seluruh bangsa Indonesia untuk membebaskan Asia dari tekanan kekuasaan bangsa asing” haruslah merupakan satu-satunya objek perudjudan tjita-tjita. Dari itu segenap tenaga dan perjuangan haruslah dikerahkan kesana. Perkumpulan-perkumpulan dan gerakan-gerakan jang dibangunkan haruslah berlabangkan „untuk kemenangan perang”. Dari itu, tidak politik jang harus dikemukakan, tapi bakti jang sebesar-besarnya harus diberikan.

Saudara mendjadi salah seorang saksi jang masih tertinggal atas peratjunan djiwa dan semangat jang pernah dilakukan oleh kekuasaan tentera Djepang dizaman pendudukannya di Indonesia.

Apa jang terdjadi di Sumatera Barat/Tengah selama 3½ tahun serupa dengan jang terdjadi didaerah lain pada waktu itu. Perkumpulan-perkumpulan jang diizinkan berdiri, hanjalah perkumpulan-perkumpulan jang sengadja diandjurkan mendirikan guna „memperbesar produksi tenaga-tenaga dan bahan-bahan jang harus dikorbankan rakjat dalam lapangan kebaktian”. Lapangan-lapangan kebaktian ini, sesuai dengan mereka jang berkepentingan atasnja, hanja merupakan bermacam-macam „Kai”, seperti „Hoko Kai”, „Fudjin Kai”, „Ko En Kai” dan entah apa namanja lagi.

Benar **Muhammadiyah** masih dapat berdiri terus, dan **Perti** masih diizinkan tegak, tapi kedua badan ini tidak dibenarkan untuk bergerak menurut iradahnja masing-masing. Kesempatan untuk tidak dikuburkan bagi keduanja itu hanja karena kebetulan mereka tidak ikut mentjampuri urusan-urusan politik.

Memang **Madjelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau** (M.T.K.A.A.M.) tidak ditumpaskan, tapi kepadanja tidak diberikan keluasan untuk bergerak menurut tjara jang direntjanakannya semula. Dan kesempatan untuk hidup bagi badan kebudayaan setempat ini hanja karena kebetulan didalam programnja tidak tertjantum urusan politik.

Benar, **Madjelis Islam Tinggi** (M.I.T.), diizinkan bangun dan berdiri, tapi badan ini hanja merupakan suatu badan permusjawaratan dan tepatan dari para alim-ulama di Sumatera Barat (kemudian untuk seluruh pulau Sumatera), dimana hanja diperbintjangkan masalah-masalah jang menjangkut dengan urusan

agama Islam, bila dikalangan rakyat timbul perselisihan paham dan pendapat.

Dapatlah sekarang saudara ambil suatu kesimpulan dan perbandingan antara kedua matjam kekuasaan jang telah menekan perkembangan berpolitik didalam kalangan rakyat di Sumatera Barat/Tengah sampai kesaat berachirnja kekuasaan tentera Dai Nippon itu.

Baiklah sekarang kita pindah kezaman baru, jaitu zaman dimana perkembangan-perkembangan partai politik dikalangan rakyat Indonesia berbiak dengan pesat dalam waktu jang sangat singkat.

Zaman itu ialah zaman :

Sesudah Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan.

Dekrit Wakil Presiden Hatta tanggal 3 Nopember 1945 untuk memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat guna mendirikan partai-partai politik untuk mengalirkan dan mempersatukan tjita-tjita rakyat bagi keteguhan berdirinja Negara Republik Indonesia, disambut oleh rakyat di Sumatera Barat/Tengah dengan penuh kegembiraan.

Terbukanja kesempatan untuk mempersatukan dan mengalirkan tjita-tjita ini, merupakan terbukanja kesempatan-kesempatan baru guna membentuk partai untuk melaksanakan tjita-tjita itu.

Masa jang dilalui selama pendudukan tentera Djepang dan tahun-tahun sebelum itu merupakan pengumpulan tenaga dan pikiran untuk memperkembang kesatuan hasrat dalam memberikan bentuk untuk negara jang baru dibangunkan itu. Sisa-sisa tenaga dan tokoh-tokoh jang tidak sempat diasingkan dan dilibat didalam kedua matjam penindasan dizaman jang lampau, sekarang merupakan tokoh-tokoh jang diharapkan untuk memberikan bimbingan dan pimpinan dalam menjalurkan tjita-tjita itu.

Tokoh-tokoh besar jang diasingkan oleh bekas pemerintahan Belanda ke Digul dan lain-lain dan kemudian dibawa lari keluar negeri, seperti Hadji Iljas Jacoub, Hadji Dt. Batuah dan lain-lainja, sekarang pulang kembali. Benih-benih jang ditinggalkan mereka dahulu, sekarang sudah merupakan buah jang hampir matang dalam memberi bentuk tjita-tjita perjuangan mereka sekian lama.

Terbukanja kembali perhubungan antara pulau, menjebakkan eratnja kontak antara para pemimpin dari pulau kepulau diseluruh Nusantara. Dan dengan demikian, maka kesatuan paham dalam memberikan bentuk kepada tjita-tjita itu kian bertambah besar.

Sesuai dengan alam dan suasana jang tengah dan akan dihadapi seterusnya, maka sudah tentu sadja program tiap-tiap gabungan tjita-tjita itu harus pula mentjerminkan keadaan.

Kini tidak lagi kemerdekaan bangsa dan negara jang harus ditjapai, tetapi berkisar kepada mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan kemakmuran untuk seluruh rakjat jang harus diwujudkan. Kini tidak lagi tekanan dan perkosaan-perkosaan hak oleh bangsa jang mendjadjah jang harus disingkirkan, tetapi hubungan baik dengan seluruh negara-negara dipermukaan bumi jang harus diperkembang.

Dari itu maka pembentukan partai-partai politik sesudah kemerdekaan tanah air diproklamirkan, merupakan suatu pembentukan jang harus mempunyai keselarasan dengan perkembangan-perkembangan jang tengah dan akan ada.

Kesatuan bangsa, bahasa dan tanah air Indonesia, djuga harus mendjadi salah satu pegangan dalam membentuk tjita-tjita untuk memberi bentuk kemakmuran rakjat jang berpuluh djuta banjaknja itu.

Tapi dalam keadaan pada saat itu, sebenarnya sjarat-sjarat dan patokan tidaklah terlalu mendjadi pegangan amat. Orang hanja tahu, bahwa kesempatan sudah terbuka untuk membentuk partai-partai politik jang merupakan suatu sjarat bagi tegak teguhnja Negara. Karena itu, maka seakan-akan terdjadilah suatu „perlombaan” kearah itu di Sumatera Tengah.

Bila pembentukan dan pembangunan kembali partai-partai politik di Sumatera Tengah kita ikuti dengan setjara chronologis, maka kita akan menemui tjatatan-tjatatan jang beruntun-runtun. Dan untuk memudahkan pandangan kearah itu, ada baiknja bila dalam membitjarakannja, kita pisahkan antara partai-partai itu dengan barisan-barisan dan gerakan-gerakan jang didalam bentuknja merupakan „onderbouw” dari partai-partai tersebut.

Sebagai „pembuka djalan” dalam pembangunan kembali partai-partai politik di Sumatera Tengah, tertjatat **Partai Komunis Indonesia**. Riwayat jang sudah diukir oleh partai ini dizaman pendjadjahan Belanda, merupakan suatu riwayat radikal jang pernah dikenal rakjat dalam menentang pendjadjahan. Pemberontakan jang terdjadi di Sumatera Barat pada tahun 1926 untuk menggulingkan kekuasaan pendjadjahan Belanda, merupakan salah satu puntjak aksi jang dikerahkan oleh P.K.I. ini.

Dari itu tidaklah mengherankan bila sesudah itu namanja tidak banjak disebut-sebut lagi karena benih-benihnja tidak dibiarkan tumbuh dalam alam jang njata. Tapi dia tidak pernah lenjap. Selama pendudukan tentera Djepang dia bergerak dibawah tanah. Dengan memakai nama PARRI (Partai Rakjat Republik Indonesia) kelandjutan tjita-tjitanja diteruskan diluar daerah.

Pada tanggal 12 Nopember 1945 pemimpin-pemimpin PARRI bersama dengan beberapa orang bekas pemimpin P.K.I. lama, mengadakan rapat dan pertemuannja jang pertama di Bukittinggi. Dalam pertemuan itu dibitjarakan soal kemungkinan untuk berfusi

bagi keduanya. Persetudjuan segera diperoleh. Hari itu dipandang sebagai hari pertama dari berdirinja dan dibangunkannja kembali Partai Komunis Indonesia di Sumatera Barat, meskipun peresmian-nja terdjadi beberapa hari sesudah itu.

Partai Serikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) menjusul beberapa hari sesudah itu, jaitu pada tanggal 18 Nopember 1945, jang peresmian-nja djuga dilakukan di Bukittinggi.

Pembentukan kembali Partai Djago Tua ini tidak memakan waktu jang lama, karena dia tidak terlalu lama dibekukan oleh pihak jang berkuasa. Bulan April tahun 1942 gerakan dari partai ini buat sementara dihentikan sama sekali. Karena itu, pemimpin-pemimpin dan anggota-anggotanja tidaklah harus melalui waktu jang pandjang untuk kembali bergerak. Tidak lama sesudah peresmian dilakukan segera djuga partai ini dapat digerakan oleh para pemimpinnja ditempat-tempat jang selama ini pernah digerakkan.

Tanggal 26 Nopember 1945, dipandang sebagai hari didjadiannja gerakan **Persatuan Tarbiah Islamijah (Perti)** mendjadi partai politik Islam dengan nama P.P.I. PERTI. Pemutaran haluan ini djuga dilakukan di Bukittinggi dalam suatu pertemuan jang dihadapi oleh sebahagian besar diantara pemimpin-pemimpinnya.

PERTI jang semendjak dia dibangunkan hanja merupakan suatu badan jang bergerak dalam lapangan sosial, agama dan pendidikan, dirasakan harus ikut serta menempati kedudukan baru dalam alam merdeka.

Disamping kebaktiannja terhadap agama dan masjarakat daerahnja, dia harus pula membaktikan dharma terhadap tanah air seluruhnja. Dari itu, maka segera sesudah disusun anggaran dasarnya jang baru, gerakan inipun didjelmakan mendjadi suatu partai politik, jang djuga bergerak aktif dalam lapangan pendidikan dan amal.

Partai Kristen Nasional Indonesia (P.K.N.I.) didjelmakan di Pakan Baru oleh beberapa orang pemuda Kristen ditempat itu pada tanggal 16 Desember 1945. Meskipun pembentukan Partai ini dilakukan didalam suasana kedaerahan, tetapi pada achirnja dia merupakan suatu partai Kristen jang banjak mendapat penganut djuga. Bakti-bakti jang diberikannja terhadap perdjjuangan untuk mempertahankan tanah air dari serangan tentera Belanda, djuga tidak boleh dilupakan.

Madjelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (M.T.K. A.A.M.), gerakan untuk mempertinggi kebudayaan alam Minangkabau jang menduduki tempat dalam lapisan penghulu-penghulu dan datuk-datuk di Sumatera Barat semendjak dia mula dibangunkan, pada tanggal 21 Desember 1945 diresmikan pula mendjadi Partai Politik di Padang Pandjang. Kemudian pada tanggal 24

dan 25 April 1950 didalam kongres jang dilangsungkan di Sawah Lunto, disamping M.T.K.A.A.M. ini berdiri suatu Partai Adat jang diberi nama **Partai Adat Rakjat (P.A.R.)**. Sesudah mendjadi Partai Politik, maka M.T.K.A.A.M. selalu menjertai perkembangan-perkembangan politik dengan aktip didaerah Propinsi Sumatera dan kemudian didaerah Propinsi Sumatera Tengah.

Madjelis Islam Tinggi (M.I.T.) pada penutup tahun 1945, tanggal 25 Desember, dalam suatu pertemuan antara pemuka di Bukittinggi, didjelmakan pula mendjadi suatu Partai Politik Islam.

Sebagai pada pembagian jang berlalu sudah diterangkan, bahwa pada zaman pendudukan tentera Djepang, M.I.T. hanja merupakan suatu Badan Permusjawaratan Ulama-Ulama Islam di Sumatera jang dibangunkan untuk memperbintjangkan suatu masalah jang bersangkutan dengan amal ibadat semata. Sungguhpun demikian, badan ini pada waktu itu dapat menduduki tempat terpenting dalam kalangan masyarakat Sumatera, terutama karena didalamnja duduk Ulama-ulama Islam jang kenamaan di Sumatera. Sampai kepada berachirnja pendudukan tentera Dai Nippon di Sumatera, M.I.T. sudah berhasil menanam badan-badan tepatannja ditiap-tiap negeri, dan karena itu maka rakjat dengan setjara langsung dapat mengikuti perkembangan-perkembangannja meskipun badan ini tidak berhubungan langsung dengan rakjat.

Pada permulaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, diresmikanlah oleh pemimpin-pemimpin M.I.T. ini, mendjadi partai politik dengan pertimbangan, bahwa rakjat sangat membutuhkan pimpinan jang langsung dari suatu organisasi jang teratur. Karena itu, maka dirasa sangat perlu badan ini didjelmakan mendjadi suatu Partai Politik jang berhaluan Islam.

Sampai tanggal 10 Pebruari 1946, P.P.I. M.I.T. merupakan suatu Partai jang mempunjai tjabang hampir diseluruh daerah di Sumatera dan Putjuk Pimpinannja berkedudukan di Bukittinggi. Sebelum itu, ke Sumatera Barat sudah dialirkan suatu Partai Politik Islam jang berpusat di Djokjakarta, jang djuga mempunjai riwayat pembangunan jang hampir sama dengan M.I.T. Partai itu ialah **P.P.I. Masjumi**.

Pada permulaan tahun 1946 sudah ada rentjana untuk memfusi-kan kedua Partai tersebut. Tetapi barulah pada bulan Pebruari 1946 fusi itu dapat diudjudkan, jaitu pada saat oleh keduanja diadakan suatu konperensi bersama di Bukittinggi. Dengan bergabungnja M.I.T. dengan Masjumi ini, maka achirnja Masjumi mendjadi Partai jang terbanjak pengikutnja di Sumatera Tengah sampai pada saat sekarang ini, walaupun kemudian M.I.T. menjatakan berdiri sendiri.

Pada pembuka tahun 1946, **Partai Sosialis** dibangunkan di Bukittinggi, jaitu pada tanggal 12 Djanuari. Dalam sedjarah perkembangannja selandjutnja, Partai Sosialis di Sumatera Tengah tidak mengikut djedjak di Pusat Pemerintahan di Djokjakarta.

Sekeluarnja Sutan Sjahrir c.s. dari partai Sosialis dan membangun **Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.)** pada 12 Pebruari 1947, karena perbedaan tindjauan mengenai isi persetudjuan „Renville”, perpetjahan ini tidak menjebabkan timbulnja suatu keretakan dalam kalangan pemimpin-pemimpinnya di Sumatera Tengah. Dalam sedjarah perkembangan Partai Sosialis sebagai diketahui waktu sebelum terdjadinja „**Peristiwa Madiun**” dalam tahun 1948, Partai Sosialis dipulau Djawa segera menggabungkan dirinja dengan P.K.I. jang sebelum itu bersatu dalam Front Demokrasi Rakjat”. Perpetjahan partai ini di Sumatera Tengah berlangsung pada tanggal 12 Pebruari 1948, jaitu pada hari diumumkan berdirinja Partai Sosialis Indonesia di Sumatera Tengah.

Dengan lahirnja Partai Sosialis Indonesia ini, maka sebahagian diantara anggota-anggotanja jang masih tetap menganut Partai Sosialis tidaklah lantas meleburkan dirinja mendjadi F.D.R. atau P.K.I. tapi masih mempertahankan partainya sampai beberapa waktu lamanja. Achirnja, karena kelemahan-kelemahan dalam tenaga pimpinan, maka dengan djalan berangsur-angsur mereka sama menggabungkan diri mendjadi anggota P.S.I. Dengan demikian, maka bolehlah dikatakan, bahwa di Sumatera Tengah tidak terdjadi perpetjahan dalam Partai Sosialis ini, tapi jang terdjadi hanjalah perobahan dasar dari partai itu. Jaitu perpindahan dari Partai Sosialis ke Partai Sosialis Indonesia.

Mendjelang pertengahan tahun 1946, lahir pula di Manindjau sebuah partai jang dasarnja diletakkan untuk mempraktekkan ajaran-ajaran Islam digabungkan dengan ajaran Marx mendjadi satu, jaitu Partai Politik jang dinamakan dengan „**Partai Komunis Indonesia Lokal Islami**” (P.K.I. Lokal Islami). Pada pendengaran dan pandangan setengah orang, mungkin partai ini merupakan „peralihan” antara kedua matjam paham jang satu sama lain sangat berlainan itu, atau sebagai suatu „gabungan” dari keduanya. Tapi walau bagaimanapun djuga, partai ini dalam lingkungan daerahnja mempunyai pengikut jang tjukup banyak dan pengaruhnja djuga tjukup besar.

Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dibangun kembali dekat pada permulaan tahun 1947, jang djuga kedudukan Dewan Pimpinannya ditempatkan di Bukittinggi. Dibandingkan dengan berdiri dan lahirnja partai-partai lainnja, maka kelahiran kembali P.N.I. dipandang sedikit terlambat. Tapi lapangan untuk berkembang masih luas baginja.

Dalam daerah Sumatera Barat P.N.I. mungkin tidak terlalu berkembang sebagai partai-partai jang lahir sebelumnya. Tapi dia mendapat pengikut jang banyak didaerah-daerah keresidenan Djambi dan Riau. Hal ini disebabkan karena letak daerah Djambi ini lebih berhampiran dengan Propinsi Sumatera Selatan, dimana P.N.I. berkembang dengan baik.

Mendjelang penutup tahun 1947, berturut-turut lahir di Sumatera Tengah partai-partai politik sederhana, seperti **Partai Islam Indonesia (P.I.I.)** **Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.)** **Partai Muslimin Sjatrijah Indonesia (Pemsji).**

Semua partai jang tersebut diatas, dalam perdjuaan menegakkan tjita-tjita negara djuga memberikan sumbangan jang besar.

Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dibukanya tjabangnja di Bukittinggi djuga diwaktu hampir penutup tahun 1947 ini djuga.

Dalam tahun 1948, daerah Sumatera Tengah merupakan daerah jang „Sepi” bagi pembentukan partai-partai politik jang baru. Kegiatan-kegiatan dalam tahun itu banjak ditumpahkan kepada memperkuat organisasi partai-partai jang sudah ada, dan djuga pada beberapa partai kekuatan-kekuatan dikerahkan kepada menjempurnakan pemberian pengorbanan serta bakti. Clash pertama memaksa seluruh partai-partai buat mengerahkan barisan-barisan pemuda untuk bertempur ke front Padang, menjejabkan terbandungnja kekuatan-kekuatan untuk memperlihatkan kegiatan kegiatan dalam lapangan politik, jang meningkat hebat sesudah Linggardjati ditanda tangani. Tetapi setelah penanda tangan Renville, kegiatan berupa pertentangan tadjam memuntjak kembali, jang hanja diachiri oleh agresi ke-II.

Pada tahun 1948 itu hanja tertjat **Partai Murba** satu-satunja jang dibangun di Bukittinggi. Pembangunan Partai baru ini dengan segera djuga disambut oleh beberapa daerah dengan tjukup „hangat”.

Perkembangan partai-partai itu :

Sedjarah perkembangan Partai-partai Politik di Sumatera Tengah dalam permulaan alam kemerdekaan ini tidak akan lengkap, bila kita tidak membentangkan **aksi serentak** jang mereka lakukan didalam berusaha menjempurnakan perkembangan-perkembangan politik didaerah ini.

Sebagai kita masih ingat, dalam perkembangan „ketjerdasan berpolitik” didalam sedjarah kemerdekaan tanah air kita, kita pernah mengalami phase „ber-blok” dan „ber-front”. Blok dan front ini tidak hanja terdjadi dipusat pemerintahan sadja, tapi djuga berbiak didaerah-daerah. Puntjak dari blok dan front ini berkisar sekitar tahun 1947 dan 1948, jaitu dalam periode „Linggardjati” dan „Renville”. Dalam tahun-tahun ini pulalah memuntjaknja keruntjingan-keruntjingan disamping terudjudnja kesatuan-kesatuan tekad didalam menghadapi perdjuaan politik selandjutnja.

Sedjarah „Volksfront”, „Sajap Kiri” dan „Benteng Republik” di Djokjakarta, banjak sedikitnja tentu mempengaruhi djuga perkembangan-perkembangan ini ditempat lain, djuga didaerah

Propinsi Sumatera Tengah, meskipun tidak dalam bentuk dan tjiarak yang bersamaan.

Dalam hal ini, di Sumatera Tengah kita menjatakan sedjarah „VOLKSFRONT” Sumatera Barat, karena badan ini dalam waktu yang pendek sudah dapat mewujudkan perubahan-perubahan dan kedjadian-kedjadian besar didalam perkembangan-perkembangan alat-alat pemerintahan.

Tapi sebelum Volksfront ini kita tindjau, haruslah pula lebih dahulu kita telapaki perkembangan-perkembangan kesatuan per-djuangan dari partai-partai yang ada, karena dari sanalah nanti lahirnja Volksfront ini.

Sedjarah itu dimulai dengan adanja:

Pertemuan Wakil-wakil dan Pembangun-pembangun Partai seluruh Sumatera Barat.

Pertemuan ini dilangsungkan di Padang pada hari Ahad tanggal 18 Nopember 1945 yang selain dihadiri oleh wakil-wakil dan pembangun-pembangun Partai-partai Politik, djuga oleh kalangan pemerintahan di Sumatera Barat, diantara mana djuga oleh Residen M. Sjafei. Udjod dari pertemuan itu adalah untuk menggembleng semangat dan tenaga perdjungan rakjat yang revolusioner dalam mempertahankan N.R.I. dan membuktikan dasar Kedaulatan Rakjat. Pertemuan bersedjarah ini berlangsung dengan penuh rasa dan suasana pertjaja-mempertjapai, menghasilkan suatu resolusi yang konkrit dalam sedjarah, selaras dengan keadaan pada waktu itu. Resolusi yang disahkan itu disusun oleh suatu komisi yang terdiri dari saudara-saudara Chatib Suleiman (almarhum) dan Usman Keadilan (Uska) yang achirnja diterima baik oleh sidang.

Resolusi tersebut berbunji sebagai berikut:

1. Untuk mengokohkan Negara Republik Indonesia yang demokratis, hendaklah segala paham politik dari masjarakat dapat dialirkan dengan teratur kedalam Partai-partai dan oleh Partai-partai.
2. Berhubung dengan pemilihan wakil-wakil rakjat didalam Badan-badan Perwakilan Rakjat yang akan didjalankan dalam waktu yang pendek yang akan datang, hendaklah sedapat-dapatnja pemilihan tersebut dimadjukan atas nama dan disokong oleh partai-partai politik yang menggambarkan kemauan rakjat.
3. Untuk menggelorakan semangat rakjat agar tahu bertanggung djawab atas pemerintahan sendiri, sehingga N.R.I. mendjadi pokok dasarnya, dan terus-menerus mendapat kemadjuan yang

pesat, hendaklah rakjat diberi keinsjafan politik dan dibawa berdjuang oleh partai-partai politik.

4. Untuk membuktikan bahwa N.R.I. adalah berdasarkan demokrasi bukan bertjorak facisme, pemerintah menjukai pendirian partai-partai dan ini adalah hal jang semestinja, dan sesuai dengan kemauan rakjat jang sebenarnja.
5. Partai-partai politik jang dahulu ada dan dibubarkan oleh Pemerintahan Belanda, atau jang sama sekali tidak dapat bergerak dengan njata-njata diwaktu pemerintahan pentadbiran tentera Nippon, sebenarnja sekarang dapat mendjelma kembali tetapi karena sifat perdjuaan sekarang berlainan sekali dengan dizaman pendjadjahan, tentulah orang-orang jang berkepentingan akan memeriksa kembali dasar partai-partai itu dan menetapkan manakah partai jang dapat berdiri, selaras dengan suasana revolusi sekarang.
6. Dalam perdjuaan sengit seperti sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan atau kedaulatan kita dari fihak jang mana pun djuga, partai-partai politik hendaklah meniadakan perdjuaan antara partai-partai dan memadjukan usahanja sepenuhnya untuk mengokohkan Front Nasional seerat-eratnja bagi pertahanan Negara.
7. Meskipun pertimbangan mengadakan satu partai sadja sebagai gabungan dari semua partai-partai politik adalah sebaik-baiknya melalui zaman jang genting ini, tetapi untuk menyesuaikan suasana sekarang, partai-partai politik hendaklah dibentuk, asal tidak merugikan perdjuaan rakjat mempertahankan N.R.I.

Berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka oleh jang hadir diambil suatu putusan bersama jang berbunji sebagai berikut:

1. Akan memakai kesempatan jang seluas-luasnja mendirikan dan mengembangkan partai-partai politik.
2. Mendjundjung tinggi restriksi dari Pemerintah Agung tentang pendirian-pendirian partai-partai politik tertanggal 3 Nopember 1945, jaitu:
 - a. memperkuat perdjuaan kita.
 - b. mempertahankan kemerdekaan kita,
 - c. mendjamin keamanan masjarakat.
3. Menjiarkan resolusi ini kepada rakjat seluas-luasnja.

Adanja pertemuan ini membajangkan suatu kesanggupan untuk menampung dan melaksanakan suatu pertanggungan djawab jang besar guna memberi bentuk jang sewadjarnja bagi Pemerintahan Negara Republik Indonesia dimasa jang akan datang.

Dan dia djuga membajangkan kesatuan tekad dalam melaksanakan suatu tjita-tjita bagi kesedjahteraan Nusa dan Bangsa dalam tingkat pertama. Dia djuga sebagai pembukaan bagi suatu djalan lurus untuk mendjundjung tjita-tjita persatuan jang sudah diperdjungkan sedjak sekian lama.

Tekad bersama jang diambil dalam pertemuan di Padang Pandjang pada tanggal 18 Nopember 1945 itu segera diikuti dengan pembentukan-pembentukan partai politik sebagai diterangkan diatas tadi, meskipun sebelum itu beberapa buah partai di Sumatera Barat sudah terbentuk.

Bila perkembangan tjita-tjita partai politik itu dibentangkan satu-persatu, maka suatu tjatatan jang amat pandjang akan menghiasi lembaran sedjarah perkembangan ini, apalagi bila diketahui, bahwa tidak hanja partai-partai politik sadja jang memperlihatkan kegiatan-kegiatan dalam lapangan kemasjarakatan.

Kesatuan-kesatuan tekad dan pendirian dari berbagai golongan, golongan tani, buruh, serikat sekerdja dan lain-lain sebagainya merupakan kesibukan-kesibukan jang meminta perhatian besar. Gerakan-gerakan sosial, pemuda, wanita jang tidak berbau politik dan tidak merupakan suatu aliran paham jang tertentu, djuga merupakan suatu kesibukan-kesibukan jang tidak boleh dilupakan dari ingatan begitu sadja, dan semuanya itu harus dibitjarakan dalam lapangannya sendiri-sendiri.

Untuk mendalami pandangan sekitar perkembangan-perkembangan organisasi-organisasi perdjjuangan di Sumatera Tengah, baiklah buat sementara kita tinggalkan dulu membitjarakan perkembangan partai-partai politik, dan kita alih membitjaraan kearah:

Organisasi Massa.

Jang dimaksud dengan ini ialah, organisasi jang didalam melaksanakan programnja tidak mentjampuri urusan-urusan politik, tapi perdjjuangannya diarahkan kepada memperkokoh tegak-teguhnya N.R.I.

Dan bila dalam hal ini kita harus membagi-baginja dalam beberapa golongan, maka organisasi massa di Sumatera Tengah meliputi semua golongan masjarakat rakjat.

Pandangan pertama kita tudjukan kelapangan organisasi Pemuda, salah satu organisasi jang paling banjak menumpahkan perhatiannja terhadap perdjjuangan pada waktu itu, dan seterusnya pada waktu sekarang serta untuk masa jang akan datang.

Sebagian besar diantara organisasi-organisasi pemuda ini di djelmakan oleh dan dari partai-partai politik jang ada. Dan bila

dia tidak „dilahirkan“, oleh partai-partai politik maka kehidupannya banjak yang berada dibawah pengaruh partai-partai itu.

„**Pemuda Republik Indonesia (P.R.I.)**“ misalnja, yang pada mula pertama didirikan, merupakan suatu organisasi pemuda yang berdiri sendiri pada achir tahun 1945, dan pada tahun berikutnya memfusikan dirinya menjadi **Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo)**.

Dalam sedjarahnja yang tiada lama itu, P.R.I. sudah dapat mengembleng semangat dan persatuan pemuda-pemuda Indonesia Sumatera Tengah untuk menampung segenap kemungkinan-kemungkinan sebagai konsekwensi dari kemerdekaan.

Karena badan inilah yang merupakan satu-satunya organisasi pemuda yang dibangunkan pada saat permulaan kemerdekaan, maka dia dapat merebut lapangan yang besar dikalangan pemuda-pemuda bekas „pedjuang“ dizaman pendudukan balatentera Dai Nippon. Tapi setelah Partai-partai Politik membentuk front pemudanja masing-masing, maka pengaruh P.R.I. semakin berkurang, apalagi setelah dia menjadi Pesindo.

Sebelum Pesindo dibangunkan di Sumatera Tengah, lebih dahulu sudah ada **Gerakan Pemuda Islam Indonesia (G.P.I.I.)** yang mendapat pengikut yang besar djuga dikalangan pemuda-pemuda, terutama dikalangan pemuda-pemuda bekas peladjar sekolah Islam.

Sebagai diterangkan diatas tadi, kebanyakan diantara gerakan-gerakan pemuda ini merupakan „onderbouw“ dari partai-partai politik yang ada, maka perkembangan organisasi-organisasi pemuda inipun kelihatannya sangat pesat dan berkembang dimana-mana. „**Pemuda Komunis Indonesia**“, „**Nasional Pelopor Indonesia**“ (Napindo), „**Persatuan Pemuda Islam Indonesia**“ (Perpindo) dan lain-lain, merupakan organisasi-organisasi pemuda yang pada hakekatnja menjadi bagian pemuda dari partai-partai politik yang ada, yang didalam perjuangannya melawan musuh djuga memberikan tenaga yang sangat giat.

Disamping itu dalam kalangan peladjar-peladjar djuga timbul ikatan-ikatan yang tidak hanya merupakan pendorong bagi semangat dalam lapangan peladjar semata, tapi djuga menjadi modal perjuangannya bangsa. Dalam hal ini tertjat nama „**Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia (I.P.P.I.)**“, dan lain-lain.

Selanjutnja dapat ditjat berdirinja berbagai organisasi pemuda lainnja yang pembentukannya dilaksanakan berturut-turut, jaitu organisasi-organisasi **Pemuda Rakjat Republik Indonesia (P.R.R.I.)**, **Pemuda Demokrat** dan **Pemuda Rakjat**. Yang achir ini merupakan djelmaan dari Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).

Kegiatan-kegiatan usaha dan gerakan organisasi-organisasi ini bukan hanya ditujukan kepada memperkokoh tegak teguhnja N.R.I., tapi disamping itu juga memperkembang kegiatan-kegiatan dalam dunia kepemudaan sendiri. Dengan demikian, maka lahir pulalah beberapa organisasi khusus bagi tujuan itu, diantara mana terdapat banjak organisasi-organisasi keolahragaan, kesenian dan sebagainya.

Dalam memperkatakan lapangan ke-olahragaan dan kesenian ini, kita harus tidak melupakan adanya **Ikatan Pentjak Silat Indonesia (I.P.S.I.)** jang usahanja besar untuk memperkembang „pentjak minded” dikalangan pemuda-pemuda, meskipun olahraga ini semendjak sekian lama sudah mendjadi salah satu „permainan rakjat (Volksspel)” dikalangan an rakjat dikalangan rakjat di Sumatera Barat.

Ikatan Pemuda Pentjinta Kesenian (I.P.K.) djuga merupakan suatu organisasi jang tidak sedikit sumbangannja untuk memperkembang segala tjabang kesenian didaerah ini pada tahun-tahun pertama menegakkan kemerdekaan tanah air.

Dalam tjatatan ini tidak mungkin kita turunkan satu persatu kegiatan-kegiatan dan perkembangan-perkembangan dari segala dan semua organisasi-organisasi pemuda Indonesia di Sumatera Tengah ini, karena dalam segala lapangan kita dapati kesan-kesannja jang mendalam.

Untuk memperpendek uraian mengenai perkembangan-perkembangan itu, marilah kita pindah pula menindjau lapangan lain. Dalam tindjauan ini kita arahkan pandangan kelapangan:

Organisasi-organisasi Wanita.

Selaras dengan kegiatan-kegiatan dalam kalangan kaum putera, kegiatan-kegiatan dalam kalangan wanita untuk bergerak dalam organisasi pun tidak sunji pula. Meskipun tampaknya sebahagian besar dari kegiatan-kegiatan golongan ini diarahkan dan disalurkan kedalam lapangan amal dan sosial, tapi lapangan politik djuga tidak kurang ramainja mereka tjempungi.

Disamping merupakan bahagian dari partai-partai politik jang sudah ada, djuga dalam lapangan politik ini wanita membentuk organisasinja sendiri.

Muslimat jang dalam gerak dan langkahnja menikam djedjak Masjumi, merupakan partai politik wanita jang amat besar dan banjak pengikutnja. **Perti Bahagian Wanita** djuga merupakan bahagian jang mengambil kegiatan-kegiatan politik disamping Perti sendiri. **Bundo Kandung** djuga merupakan suatu organisasi jang

berdiri sebagai mengimbangi langkah dan gerak yang diajun oleh M.T.K.A.A.M. Tidak pula dapat dipandang sepi peranan yang dimainkan oleh bahagian-bahagian wanita dari partai-partai kiri, seperti P.K.I., Partai Sosialis dan sebagainya.

Lapangan yang terbuka untuk kebebasan bergerak menjapai tjita-tjita semula, oleh Aisjah tidak dibiarkan berlalu dengan tidak ikut serta mengukir sedjarah baru didalam kebangkitannya didaerah Sumatera Tengah. Sumbangan-sumbangan dan bakti-bakti yang diberikannya disamping yang diundukkan oleh Muhammadijah selama menghadapi perjuangan, merupakan persembahan yang tidak dapat dinilai.

Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia), Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar), P.P.I. (Pemuda Puteri Indonesia) dan **Wanita Sedar** merupakan beberapa organisasi wanita yang juga mengambil lapangan yang tjukup besar dan mengembangkan sajak yang lebar diberbagai daerah di Sumatera Tengah.

Berlainan dengan sedjarah pembentukan organisasi-organisasi lainnya, terbentuknya Perwari merupakan suatu dukungan dari organisasi-organisasi wanita yang sudah ada sebelum dia dibangunkan.

Dibangunkannya organisasi ini, merupakan dorongan dan kehendak guna mempersatukan tenaga-tenaga yang berserak-serak dan bertjerai-berai pada waktu itu.

Selain dari merupakan kebulatan tekad untuk bersatu, Perwari pada mulanya juga merupakan perlambangan tjita-tjita wanita Indonesia. Di Sumatera Barat dia dilahirkan pada tanggal **10 Maret 1946** dalam suatu konperensi para wanita se Minangkabau di Bukittinggi. Salah satu putusan yang diambil dalam konperensi itu, ialah dibangunkan Perwari yang merupakan satuan dari semua organisasi-organisasi wanita dengan tidak memandang bentuk dan tjoraknja.

Sebagai langkah pertama, dihari kebangunannya, Perwari sudah mengambil suatu mosi bersama, jaitu dengan djalan mengirim telegram kepada Pemerintah Pusat di Djakarta (P.M. Sutan Sjahrir) yang menerangkan, bahwa Perwari mempunyai kejakinan yang sangat penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kemerdekaan Indonesia akan merupakan kemerdekaan penuh (100%), dan mendjandikan akan terus memperdjauangkannya selaras dengan tjita-tjita untuk kebesaran tanah air dan bangsa yang merdeka.

Langkah-langkah selandjutnja yang diambil Perwari ini, ialah:

1. Menjatakan kepada Pemerintah, bahwa Perwari menjanggupi menjediakan guru-guru agama yang akan memberikan pelajaran agama disekolah-sekolah Pemerintah.

2. Meminta kepada Pemerintah, agar hanja Perwari sadja jang diizinkan untuk mengadakan gerakan serentak diseluruh Sumatera Barat tiap-tiap tanggal 16 dan 17 tiap-tiap bulan, guna mengumpulkan uang untuk Pura Nasional Indonesia.
3. Mengandjurkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak agar mendjaga keturunannja serta mengandjurkan agar pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi haruslah lebih dahulu memeriksakan dirinja kepada dokter sebelum mereka meningkat tangga perkawinan.

Dari beberapa fasal tuntutan dan andjuran tersebut diatas, njalah sekarang, bahwa Perwari didalam perkembangannja ikut memberikan sumbangan jang sangat besar dalam berbagai lapangan hidup.

Dalam zaman selama menghadapi kedua clash, kegiatan-kegiatan diarahkan untuk menjumbangkan tenaga dan bakti jang sebesar-besarnja dimedan pertempuran. Seluruh organisasi-organisasi wanita ini, baik jang bertjorak politik, maupun berbentuk sosial semata, sama-sama berlomba menjumbangkan bakti mereka masing-masing. Banjak diantarannja jang dengan kemauan sendiri membentuk Corps Palang Merahnja dan sama mengerahkan puteri-puteri mereka kemedan pertempuran. Sedjarah dari berbagai front di Sumatera Tengah selama menghadapi agresi Belanda pertama, dihiasi djuga dengan gugurnja beberapa orang barisan Sabil Muslimat jang mendjadi anggota Barisan Palang Merah diwaktu mereka memberikan pertolongan pertama terhadap peradjurit-peradjurit jang luka.

Wanita Sedar, Puteri Kesatria, Gerwis dan lain-lain organisasi wanita, djuga semua menjumbangkan tenaga dan djiwa raganja, didalam lapangan mempertahankan negeri dimedan perang, muka dan belakang.

G.P.I.I. Puteri djuga merupakan suatu rombongan wanita-wanita belia Indonesia jang banjak berdjasa, sebagaimana djuga dengan djasa-djasa jang diperlihatkan oleh bahagian-bahagian putri dari organisasi-organisasi lainnja.

Dan dalam memperbintjangkan kegiatan-kegiatan dalam kalangan kaum puteri ini, sedjarah perdjuangan di Sumatera Tengah djuga dihiasi dengan kegiatan-kegiatan jang ditundjukkan oleh **Keputerian Republik Indonesia (K.R.I.)**, jaitu suatu badan perdjuangan puteri Indonesia. Puteri-puteri jang tergabung didalam K.R.I. ini tidak hanja menjediakan diri mereka untuk memberikan pertolongan pertama didalam ketjelakaan, tetapi djuga menjedia-

kan diri mereka untuk sewaktu-waktu dapat maju ketengah-tengah medan pertempuran dengan mempergunakan alat-alat sendjata yang ada pada masa itu. Mereka juga berlatih bergerilja, sebagai latihan yang juga diterima oleh **Puteri Kesjatrya, Lasjkar Muslimat dan Sabil Muslimat**.

Nama dari kesatuan-kesatuan puteri pedjuang ini didalam se-djarah barisan rakjat juga banyak disebut-sebut.

Sebelum kita pindah memperkatakan peranan yang pernah dimainkan oleh Barisan Rakjat di Sumatera Tengah, haruslah lebih dahulu tjatatan ini kita hubungkan dengan perkembangan berbagai organisasi dan serikat-serikat sekerdja, karena didalam menegakkan tjita-tjita perdjuaan negara, sumbangan-sumbangan yang pernah diberikannya juga sangat besar.

Serikat-Serikat Sekerdja dan Serikat-Serikat Buruh.

Pertumbuhan Serikat-serikat Sekerdja dan Serikat-serikat Buruh di Sumatera Tengah pada permulaan tahun proklamasi Kemerdekaan Indonesia, juga berlangsung dengan pesat. Meskipun lapangan-lapangan pekerdjaan dan usaha-usaha dari mereka yang menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang setjorak itu tidak terbuka lurus sebagaimana seharusnya, tapi kesadaran berorganisasi lebih terasa.

Buruh-buruh kendaraan bermotor yang pada zaman pendjadjahan Belanda bergabung didalam B.I.C. (Bond der Indonesise Chauffeurs) yang pada permulaan proklamasi mendjadi P.S.I. (Persatuan Supir Indonesia) mendjelma mendjadi Serikat Buruh Mobil Indonesia (S.B.I.M.). Achirnja nama itu ditukar dengan **Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (S.B.K.B.)**.

Selaras dengan perkembangan kendaraan-kendaraan bermotor sesudah perang Dunia ke-II, perkembangan-perkembangan S.B.K.B. juga berdjalan setjara berangsur-angsur tapi tentu. Tjabang-tjabangnja kedapatan pada hampir tiap tempat, dimana kendaraan bermotor mendjadi alat penghubung lalu-lintas. Dari itu, maka Serikat Buruh ini mendjadi salah satu organisasi buruh yang berpengaruh.

Pun kita tjatat pula adanya **Serikat Buruh Harian Indonesia (S.B.H.I.)** yang anggotanja terdiri dari mereka yang sumber penghidupannya bergantung kepada pengambilan upah-upah yang mereka peroleh dari mengangkat barang-barang orang lain, baik pengangkutan yang merupakan pikulan, ataupun yang dibawa-bawa dengan gerobak-gerobak sorong.

Dengan tersusunja organisasi pekerdja-pekerdja harian ini, maka upah dan sewa dapat ditentukan menurut tarif yang tidak merugikan kedua belah pihak, jaitu: pekerdja dan masjarakat.

Dikota-kota jang dihubungkan dengan kereta api, lahir pula **Serikat Buruh kereta Api (S.B.K.A.)** jang anggotanja meliputi semua orang-orang jang pekerdjaannja berhubungan erat dengan alat pengangkutan jang sangat penting itu. S.B.K.A. di Sumatera Tengah berpusat di Bukittinggi.

Dikota-kota ditepi pantai, terutama dipelabuhan-pelabuhan, segera pula menjusul berdirinja Serikat Sekerdja dalam golongan pekerdja-pekerdja disana, jaitu organisasi buruh jang mereka namakan:

Serikat Buruh Pelajaran dan Pelabuhan (S.B.P.P.).

Dalam waktu jang singkat, disegenap lapangan pekerdjaan lahirlah Serikat-serikat Buruh dan Serikat-serikat Sekerdja, baik dalam lapangan dan kalangan pegawai Pemerintahan, apalagi dalam kalangan partikelir. Dengan tidak mengadakan pembagian tingkatan, dibawah ini kita turunkan nama-nama Serikat Buruh dan Serikat Sekerdja itu sependjang jang dapat kita tjatat.

1. Persatuan Guru-guru Indonesia (P.G.I.) jang achirnja mendjadi P.G.R.I.
2. Serikat Buruh Kesehatan.
3. Serikat Buruh P.T.T. jang achirnja mendjadi S.B. Postel.
4. Serikat Sekerdja Kementerian Dalam Negeri (S.S.K.D.N.).
5. Serikat Buruh Kementerian Penerangan.
6. Serikat Buruh Pertjetakan.
7. Serikat Buruh Gas dan Listrik.
8. Serikat Buruh Kehutanan.
9. Serikat Buruh Film, dan beberapa serikat buruh lainnja jang „tradisioeneel”.

Di-kilang-kilang dan tambang-tambang, muntjul pula serikat-serikat sekerdja jang banjak pengikutnja. Buruh perkebunan djuga bergabung didalam serikat sekerdja mereka jang kuat, jaitu SARBUPRI (Sarekat Buruh Perkebunan R.I.).

Sudah tentu dalam hal ini tidak boleh kita lupakan gerak dan langkah SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) jang di Sumatera Tengah dipusatkan di Bukittinggi. Sebahagian diantara Serikat-serikat Buruh Partikelir ini bergabung didalam SOBSI ini, sementara sebahagian jang lain tidak memasuki salah satu vaksentral.

Njatalah sekarang betapa kesibukan-kesibukan jang terdjadi didalam penjusunan diri guna perbaikan kedudukan pekerdja-pekerdja didalam menghadapi dunia merdeka dizaman jang akan datang.

Banjak diantara serikat-serikat sekerdja ini jang tidak kita tuliskan namanja diatas. Hal ini bukanlah menjatakan, bahwa mereka menduduki tempat jang kurang penting dalam menjumbangkan tenaga dan fikiran-fikirannya untuk menegakkan tjita-tjita negara.

Partai-Partai Politik dengan Barisan-Barisan Rakjat.

Sesuai dengan putusan bersama jang diambil dalam pertemuan antara para pemuka dan pembangun-pembangun Partai Politik se Sumatera Barat pada bulan Nopember 1945 itu, dan sesuai pula dengan suasana jang tengah dan akan dihadapi selandjutnja, perdjuaan dari tiap-tiap Partai Politik pada permulaannya lebih banjak diarahkan kepada mempertahankan kemerdekaan negara dengan setjara langsung.

Pada permulaan didirikan dan dibangukannya partai-partai itu dia tidak akan mendapat sambutan dan lapangan bergerak bila bersamanja tidak dibangukan pula bahagian pemudanja. Bahagian pemuda dari tiap-tiap partai ialah jang akan merupakan pendukung keluar perdjuaan partai-partai itu sendiri dimasa itu.

Berlangsungnya „perebutan kekuasaan” dari tangan pembesar-pembesar balatentera Djepang pada saat tentera Sekutu akan memulai perlutjutan sendjata „saudara tua” ini; mendaratnya serdadu Inggeris dan Gurkha jang bertugas melutjuti sendjata-sendjata serdadu-serdadu Dai Nippon diseluruh daerah kepulauan Indonesia; dibontjengkannya serdadu-serdadu Nica dalam pendaratan tentera-tentera Sekutu itu dan berlakunya berbagai matjam terror oleh tentera jang membontjeng ini, membajangkan adanya suatu kemelut jang akan terdjadi. Tindakan-tindakan serdadu dan tentera Sekutu jang sangat merugikan perdjuaan bangsa Indonesia dikota-kota jang mereka duduki, menimbulkan kegontjangan didalam djiwa rakjat.

Keruh dan mendungnja suasana didalam negeri disebabkan karena terdjadinja berbagai keributan dan bentrokan antara Barisan Keamanan Rakjat jang bertugas untuk memelihara keamanan dengan tentera Sekutu jang terang-terangan membantu dikembalikannya pendjadjahan Belanda ke Indonesia ini, menyebabkan perdjuaan politik didalam negeri harus dikerahkan kepada „pengusiran” tentera pengatjau-pengatjau itu keluar perairan Indonesia.

Karena demikian, maka atas inisiatip sendiri, oleh berbagai partai dibangukanlah Barisan-barisan Rakjat untuk membela dan membersihkan kembali suasana jang sudah keruh itu.

Dan sudah tentu tiap-tiap barisan itu menganut paham partai-partai jang membangunkannya, dan anggota-anggotanja terdiri dari pemuda-pemuda jang sebelumnya telah menggabungkan diri mereka

mendjadi anggota bahagian pemuda dari tiap-tiap partai tersebut, atau mereka jang menjetudju tji-tjita perđuangan partai itu.

Hizbullah tertjat sebagai barisan rakjat jang pertama jang dibentuk untuk mengembalikan keselamatan umum itu, dan akan memberikan bantuan tenaga jang sebesar-besarnya kepada T.K.R. Pembentukan dan pelantikannya dilangsungkan di Padang Pandjang pada tanggal 25 Nopember 1945 oleh organisasi Muhammadiyah Sumatera Tengah. Diakuinja Masjumi sebagai satu-satunya Partai Politik Islam oleh Muhammadiyah pada tahun berikutnya, menjebakkan barisan Hizbullah ini harus pindah pengasuh kepada Masjumi.

Untuk mengimbangi Hizbullah, barisan pemuda Islam bertem-pur itu, dibangun pula Sabil Muslimat, barisan Puteri Islam jang ditugaskan untuk memberikan pertolongan pertama dimedan pertempuran termuka. Kedua barisan tersebut banjak mengukir sedjarah pertempuran jang mengagumkan diberbagai front di Sumatera Tengah sampai kepada pertengahan tahun 1948.

Djuga dengan mengambil tempat di Padang Pandjang, P.K.I. melantik dan meresmikan berdirinja Tentera Merah Indonesia, pada tanggal 7 Desember 1945. Dalam pengerahan tenaga-tenaga pedjuang keberbagai medan pertempuran pada tahun-tahun berikutnya, Tentera Merah Indonesia ini djuga banjak mentjat keperwiraannya.

Beriringan dengan itu, P.K.I. Lokal Islami membangun pula barisan rakjatnya jang diberi nama dengan Sjaifullah, Pelantikan barisan ini berlangsung di Bukittinggi dekat pada achir tahun 1945.

Pembentukan dan pembangunan barisan-barisan pada tahun berikutnya dimulai oleh Madjelis Islam Tinggi Sumatera Barat jaitu: dengan dibentuknja Barisan Sabillillah di Bukittinggi. Upatjara pelantikan ini mendapat perhatian jang sangat besar dari berbagai kalangan dan lapisan rakjat.

Sebagai djuga dengan Hizbullah, Barisan Sabilillah ini pada achirnya mendjadi suatu barisan rakjat dibawah asuhan Masjumi, jaitu: sesudah M.I.T. berfusi dengan Masjumi. Dengan demikian, maka Masjumi mempunyai dua perangkatan barisan mudanja jang keduanya mempunyai tjara kerdja jang berlainan, meskipun mempunyai tugas jang sama. Dalam hal ini, Hizbullah merupakan barisan jang dipersendjatai dan dilatih sebagai latihan jang diterima oleh Tentera Keselamatan Rakjat, sementara Sabilillah selain dari beberapa pasukan teratur, merupakan barisan rakjat biasa. Keduanya banjak memberikan „sjuhadak-sjuhadak“ untuk tanah air.

Kemudian menjusul Lasjkar Muslimin Indonesia (Lasjmi) jang digerakkan oleh Perti. Pelantikan Lasjmi ini dilangsungkan di

Bukittinggi pada bulan Maret 1946 dalam suatu upatjara besar ditanah lapang Atas Ngarai jang dihadiri oleh Menteri Pene-rangan Natsir dari kabinet Sjahrir. Hari pelantikan barisan ini merupakan salah satu upatjara keramaian jang besar pula. Sum-bangan tenaga dan djiwa jang diberikan oleh Lasjmi diberbagai medan pertempuran djuga tidak ternilai.

Lasjkar Muslimat merupakan barisan puteri-puteri Islam jang dibangunkan oleh Perti bahagian wanita, jang didalam tugas dan kewadjabannja banjak memberikan pertolongan jang langsung dibeberapa medan pertempuran di Sumatera Barat, disamping Lasjmi.

Achirnja menjusul pula pembentukan Tentera Allah, barisan rakjat jang dibangunkan oleh Partai Politik Tharikat Islam, jang dilantik di Bukittinggi dalam tahun 1946 djuga.

Barisan Djanggut jang terdiri dari barisan istimewa jang dikenal selama menghadapi serangan tentera Belanda ke I dalam tahun 1947. Mereka mempersendjatai diri tidak hanja dengan alat-alat perang jang sudah lama harus dimasukkan kedalam gedung-artja, tapi lebih banjak jang memakai sendjata jang dalam memperguna-kannja hanja diperlukan kebulatan iktikad (tekad) sambil mengu-tjapkan beberapa baris doa (mentera) berupa djampi. Lebah dan tawon dan machluk menjengat jang tidak membinasakan djiwa karena bisanja, djuga merupakan sendjata-sendjata jang mereka angkut didalam karung-karung jang istimewa untuk itu kemedan-medan pertempuran.

Djuga tidak urung tjampuran tjabe-rawit dipipis dengan abu didapur jang mereka pergunakan untuk mengalahkan musuh mereka. Mengenai taktik jang mereka pakaikan didalam berbagai pertempuran, orang akan banjak mendengar „tjerita-tjerita jang lutju” tapi banjak pula jang meneteskan air mata. Tapi walaupun betapa djuga, mereka jang sudah landjut usianja itu, merupakan suatu lambang kebulatan tekad seluruh rakjat di Sumatera Tengah dalam mempertahankan tanah air kita dari pendjadjahan.

Usaha M.T.K.A.A.M. merupakan suatu barisan „kaum adat” jang diberi nama dengan Barisan Hulubalang. Sendjata-sendjata jang sekian lama hanja dapat didengar namanja karena sangat djarang keluar dari simpanannja, sekarang mendjadi alat-alat jang dipergunakan oleh barisan ini disamping sendjata-sendjata jang biasa dipergunakan oleh barisan-barisan lain. „Uniform” hitam seluruhnja, keris dan „kerambit” jang tersisip dipinggang, pedang dan kelewang bahari, arit dan tombak serta „sikati-muno” meru-pakan pandangan-pandangan jang „mengagumkan” dan menge-sankan kepahlawanan dari anggota-anggota barisan itu.

Zaman perkembangan bagi barisan-barisan rakjat di Sumatera Tengah selama menghadapi agresi tentera Nica jang pertama,

disempurnakan dengan barisan yang dibangun oleh B.R.I. jaitu dengan Barisan Istimewa yang anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda revolusioner dan kebanyakan pernah menerima pendidikan langsung dari tentera Djepang dulunya. Pengresmian barisan ini dilangsungkan di Bukittinggi pada tanggal 17 Nopember 1945, disaat merajakan genap 3 bulan berdirinya Negara Republik Indonesia.

Puteri Ksatria sebagai dibentangkan dalam memperkatakan organisasi-organisasi wanita, merupakan suatu barisan puteri-puteri ksatria Sumatera Tengah yang banjak djuga djasanja diberbagai medan pertempuran. Bersama-sama dengan Sabil Muslimat dan Lasjkar Muslimat, Puteri Ksatria ini telah dapat melintasi suatu hukum, pandangan, dan penghargaan kuno terhadap kaum wanita Indonesia Sumatera Barat dalam mentjapai kedudukannya sebagai orang-orang yang mempunyai hak kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam segala lapangan.

Emansipasi tidak lagi mendjadi tuntutan mereka, tapi telah dilaksanakan dan diberi berbentuk yang njata.

Kesempatan-kesempatan untuk memberikan dharma bakti selama keselamatan negara diantjam oleh dan dengan kekuatan sendjata bangsa asing, menjebakkan bangun dan bangkitnja semangat perlawanan didada tiap-tiap pemuda Indonesia di Sumatera Tengah. Kesempatan ini pulalah yang mendjadi pendorong dibangunkannya barisan-barisan rakjat yang didalam bentuk lahirnja sangat sederhana itu. Tapi perlawanan-perlawanan yang pernah diberikan mereka mengatasi semua kesederhanaan bentuk itu.

Meskipun mereka dibangun oleh suatu golongan atau partai politik, tapi perlengkapan dan keperluan hidup dalam medan pertempuran mereka peroleh dari seluruh rakjat. Hizbullah dan Sabilillah tidak hanya diberi makan dan pakaian oleh keluarga Masjumi sadja, tapi mereka mendjadi anak emas dari penganut-penganut aliran paham lain. Begitupun selandjutnja. Dalam memberikan bakti guna perlengkapan keperluan-keperluan dimedan pertempuran maka rakjat tidak pernah memilih siapa dan barisan apa yang akan mereka bekali, karena mereka berbakti tidak kepada barisan-barisan rakjat, tapi untuk tudjuan perdjjuangan semata.

Berachirnja zaman barisan rakjat ini terdjadi pada waktu dikeluarkannya peraturan oleh Pemerintah untuk menggabungkan mereka kedalam tentera negara yang resmi, Tentera Republik Indonesia. Peraturan ini diberbagai tempat disambut dengan perasaan yang „sedikit ketjewa”, terutama oleh golongan-golongan yang tidak dapat memenuhi sjarat-sjarat untuk bergabung ini. Hal ini terdjadi pada achir tahun 1947 dan permulaan tahun 1948, jaitu disaat kekerasan didalam negeri mulai memasuki udara „ketjerahan”. Tidak boleh banjak bilangan Lasjkar dida-

lam suatu negara. Suatu negara hanja mengenal satu angkatan perang. Untuk mentjapai tudjuan itu, barisan-barisan rakjat jang mentjukupi sjarat-sjarat haruslah menggabungkan diri mereka kepada angkatan perang jang ada. Tapi tidak semua anggota barisan rakjat jang dapat digabungkan kedalam tentera.

Mereka digabungkan dengan ukuran 1 : 4, jaitu untuk satu sendjata api diterima 4 orang. Ketjuali Tentera Peladjar (T.P.) jang tetap dibolehkan memelihara organisasinja.

Hikajat-hikajat pandjang dari Barisan-barisan Rakjat di Sumatera Tengah dalam usianja jang tidak terlalu lama itu dapat disimpulkan dengan:

Walaupun digerakan oleh partai-partai politik dan oleh organisasi-organisasi massa, tapi dia dibelandjai oleh seluruh rakjat, dan mereka meliputi segala golongan jang ada. Mulai dari pemuda-pemuda jang masih menduduki bangku sekolah (putera dan puteri), sampai kepada nenek jang hanja harus menunggu kedatangan maut mengambil mereka, sama-sama mengerahkan tenaga mendjadi anggota-anggota barisan rakjat di Sumatera Tengah.

Volksfront jang bersedjarah.

Persatuan Perdjuangan (Volksfront) jang dimaksud untuk menggembeng tenaga-tenaga Perdjuangan Rakjat menentang pendjadjahan Belanda kembali, sebagai diketahui, dibentuk pada tanggal 15 Djanuari 1945 untuk pertama kalinya di Solo jang di promotori oleh almarhum Tan Malaka. Pembentukan seperti itu kemudian susul-menusul diberbagai tempat diseluruh daerah jang dinaungi oleh sang Merah-Putih, terutama didaerah-daerah jang tengah menghadapi perlawanan dengan tentera Belanda.

Faedah mempersatukan tenaga perdjuangan ini, djuga dirasakan oleh pemimpin-pemimpin di Sumatera Barat. Dari itu diniat untuk ikut pula membentuk badan seperti itu disini.

Andjuran pertama untuk membentuk Persatuan Perdjuangan Rakjat di Sumatera Barat ini diandjurkan oleh rapat umum jang diadakan oleh Partai Sosialis di Padang Pandjang pada tanggal 24 Pebruari 1946.

Andjuran pembentukan baru terwujud pada tanggal 14 Maret 1946, pada hari mana dalam suatu pertemuan jang dihadiri oleh para wakil Partai-partai Politik di Bukittinggi dengan suara bulat disetujui adanya Volksfront ini.

Dalam uraiannja pada pembentukan badan itu, almarhum Chatib Sulaiman antara lain mengatakan: „Terbentuknja Persatuan Perdjuangan ini adalah soal jang terpenting dan sjarat jang mesti ada dalam menetapkan kemenangan dalam perdjuangan sekarang.

Rakjat murba mesti memberontak terhadap pendjadjahan kembali, bertahan dan mempertahankan. Djikalau diambil perbandingan adalah pemerintah dan badan-badan jang lain dalam masjarakat kita hanja sebagai buih-buih dari gelombang, dan jang sebenarnya bergerak adalah air jang tenang dibawahnja, jaitu rakjat murba tadi....."

Setelah melalui pertukaran fikiran dengan menerima petunjuk-petunjuk, pada hari itu djuga diresmikanlah berdirinja Persatuan Perdjjuangan itu di Sumatera Barat. Dalam merentjanakan usaha perkerdjaannja, badan ini menjusun dirinja, dengan organisasi dipimpin oleh suatu Dewan Pimpinan dan pekerdjaan sehari-hari dibantu oleh Dewan-dewannja, jaitu Dewan Perdjjuangan (Siasat dan Lasjkar), Dewan Pembangunan, Dewan Penjelidik, Dewan Pengadilan dan Sekretariat jang dengan susunan kira-kira seperti ini, tersebar pula tjabang dan rantingnja di tiap-tiap Kabupaten, Kewedanaan, Ketjamatan dan negeri.

Selaras dengan suasana daerah, maka sebahagian diantara sepak terdjang dan usaha lainnja dari Volksfront di Sumatera Barat ini agak menjimpang dari apa jang dilakukan oleh badan itu di Pemerintahan Pusat. Dalam waktu jang singkat, langkahnja madju dengan pesat dan pengaruhnja terasa dalam berbagai lapangan politik dan pemerintahan, bahkan dalam lapangan perekonomian.

Dibawah pimpinan saudara-saudara Chatib Sulaiman, Bariun A. S., Bachtaruddin, Iskandar Tedjasukmana, Sulaiman, Basjrah Lubis dan beberapa orang lainnja, werkprogram Volksfront Sumatera Barat ini disusun mentjerminkan keadaan jang tengah dan akan berlaku didaerah ini.

Untuk mengetahui betapa tjepat berkembang dan mendalamnja pengaruh dari Volksfront ini, dapat diketahui dari maklumat-maklumat jang pernah dikeluarkannja semendjak bulan pertama dia dibangunkan, diantaranya maklumat sebagai berikut:

„Segala matjam bakti, derma dan lain-lain jang datangnja dari rakjat umum, tidak boleh diminta atau dipungut oleh partai-partai, perkumpulan-perkumpulan, barisan-barisan manapun djuga di Sumatera Barat. Jang berhak menerima bakti, derma dan lain-lain dari rakjat umum hanjalah Volksfront sadja, bahagian pura Nasional.

Segala perbelandjaan dari badan-badan perdjjuangan rakjat diichtiarkan oleh Volksfront, dengan tidak mengetjualikan badan perdjjuangan manapun djuga”.

Tudjuan dari maklumat tersebut diatas segera djuga dilaksanakan, jaitu dengan digiatkannja Pura Nasional memungut bakti dari rakjat, baik dengan djalan langsung, maupun tidak langsung.

Dalam maklumatnja sesudah itu, Volksfront memberikan instruksi-instruksi kepada semua partai-partai dan barisan-barisan untuk memperhatikan hal-hal jang tersebut dibawah ini:

1. Untuk mendjaga nama baiknja tiap-tiap partai dan barisan-barisan hendaklah tiap-tiap partai dan barisan-barisan mengontrol sekalian anggota-anggotanja jang dengan sengadja akan membuat propakasi atau perperjahan.
2. Mengambil tindakan-tindakan jang tepat kepada anggota-anggota Warga-Negara jang sengadja memakaikan nama partai atau barisan untuk merugikan negara.
3. Mengambil tindakan jang tepat kepada siapa sadjang memakaikan topeng partai atau barisan untuk kepentingan diri sendiri.

Karena banjak dan lebarnja lapangan usaha jang dimasukinja maka pengaruh dari Volksfront ini tidak hanja dirasakan dalam lapangan politik dan Barisan-barisan semata, tapi djuga ikut berpengaruh dalam lapangan perekonomian rakjat. Kekuasaan-kekuasaan jang diberikan kepadanja untuk kontrol ekonomi serta memungut bakti guna perbelandjaan Barisan-barisan Rakjat jang banjak itu, menjebabkan badan ini dalam pandangan rakjat mendjadi sebagai instansi pemerintahan Sumatera Barat jang semi-resmi.

Dalam pertengahan tahun 1946, Volksfront di Sumatera Barat hampir dapat menguasai semua lapangan kemasjarakatan didaerah itu, bila tidak dengan tiba-tiba beberapa orang pemimpinnja harus dihadapkan kepada peristiwa jang meminta pertanggungan djawab mereka.

Hal ini terdjadi pada tanggal 24 April 1946, jaitu pada hari timbulnja kegontjangan dalam kalangan masjarakat di Sumatera Barat berkenaan dengan suatu maklumat jang dikeluarkan oleh Volksfront mengenai tidak dibenarkannja beredar lagi uang kertas Djepang harga 100 Rupiah.

Andjuran pembekuan uang kertas Djepang harga 100 Rupiah dalam peredaran di Sumatera Barat ini didasarkan oleh Volksfront kepada berita-berita jang menjatakan banjakknja uang kertas demikian jang diimport oleh tentera Nica (Belanda) dari pulau Djawa, jaitu dari tempat-tempat jang didudukinja. Pemasukan uang itu dari Djawa dan diedarkannja dikota Padang dan sekitarnja oleh tentera Belanda, menjebabkan timbulnja inflasi di Sumatera Barat jang pada saat itu tengah menghadapi krisis perekonomian jang tegang. Dari itu Volksfront berpendapat, bahwa salah satu djalan jang dapat ditempuh untuk membendung bahaja inflasi itu pada taraf pertama, ialah dengan djalan membekuan uang kertas itu dalam peredaran.

Maklumat itu menimbulkan kegontjangan yang sangat besar karena yang mendjadi korbannya yang utama bukanlah penduduk kota yang banjak menjimpan uang, tapi penduduk desa atau petani-petani yang tinggal didesa-desa. Sebab sebaik maklumat diumumkan maka desa-desa mendjadi sasaran penduduk kota. Karena itu maka sebelum penduduk desa tahu bahwa uang kertas itu tidak dibenarkan beredar lagi, mereka sudah banjak menerimanya.

Maklumat Volksfront yang dikeluarkannya dengan tiada setahu dan seizin pemerintah inilah yang menjebabkan ditangkapnja keenam orang pemimpin badan itu untuk diminta dan didengar keterangannya.

Tapi untunglah suasana mendung itu tidak lama terdjadi, karena segera dapat djuga pemerintah mengembalikan ketenteraman, jaitu dengan djalan membatalkan maklumat tersebut. Sesudah beberapa hari lamanja, penahanan atas diri ke-enam orang pemimpin-pemimpin Volksfront Sumatera Barat itu dibatalkan pula, dan mereka kembali dapat melandjutkan usahanya.

Meskipun tidak terlalu lama perkembangan Volksfront ini, karena perpetjahan mulai terasa dalam menghadapi Linggardjati tapi dia sudah dapat mengalirkan tenaga-tenaga perdjuaan rakjat yang bertjerai-berai sedari sekian lama. Meskipun achirnja timbul pula perpetjahan didalamnya, tapi perpetjahan ini tidak menimbulkan ketegangan dan tidak pula berpengaruh kepada bentuk perdjuaan negara pada waktu itu.

Berlain-lainan pendapat dan pendirian partai-partai politik mengenai persetudjuan Linggardjati, menjebabkan pada achirnja timbul kelemahan-kelemahan dalam pengendaliannya, jaitu dengan menarik dirinja beberapa Partai Politik dari keanggotaan badan tersebut.

Tapi, sebagai diterangkan tadi, perpetjahan pendapat dan pendirian partai-partai politik itu tidaklah menjebabkan berputarnya haluan perdjuaan semula, dan Persatuan Perdjuaan di Sumatera Barat tidaklah mendjelmakan dirinja mendjadi Front Demokrasi Rakjat, yang memikul kemudian akan peristiwa Madiun.

Kesatuan tekad dan pembulatan tenaga yang banjak membawa berkah dalam perdjuaan yang berlangsung beberapa lamanja itu, achirnja dari sedikit-kesedikit mendjadi mengendur.

Kekeruhan-kekeruhan suasana tanah air dizaman menghadapi penanda-tanganan Naskah „Renville” dan soal-soal yang terlahir sebelum perundingan diatas kapal Amerika itu dimulai, membayangkan akan timbul suatu kemelut baru didalam persatuan perdjuaan rakjat.

Untuk pertama kali dikalangan masyarakat rakjat Sumatera Barat yang biasa hidup setjara kekeluargaan itu, dalam periode

antara dua buah Persetudjuan jang pernah ditanda tangani dalam suasana kemerdekaan („Linggardjati dan Renville”), nampaklah ketegangan-ketegangan dan pertentangan-pertentangan fikiran dan haluan.

Tapi pertentangan-pertentangan itu sekian djauh masih dapat dialirkan melalui salurannja, sehingga bentrokan-bentrokan jang tidak dikehendaki tidak pernah terdjadi karenanja.

Berdirinja F.P.N.:

Dengan meletusnja agresi pertama, pada bulan Djuli 1947 maka atas andjuran Bung Hatta, dibentuklah kembali persatuan dari seluruh partai dan barisan rakjat di Sumatera Tengah, dengan nama **Front Pertahanan Nasional (F.P.N.)**. Dipimpin oleh satu sekretariat jang diketuai oleh sdr. Hamka. Setelah „Renville” ditanda tangani, dan pertentangan partai-partai memuntjak, maka badan ini mendjadi longgar ikatannja.

„Peristiwa Madiun” jang terkenal itu, di Sumatera Tengah hanja terasa riaknja sadja, tapi tidak pernah dapat mempengaruhi keutuhan kebulatan tekad dan usaha untuk mempererat kembali kesatuan jang sudah gojah itu.

Pertentangan-pertentangan antara partai-partai jang tergabung didalam Front Demokrasi Rakjat dengan partai-partai jang mendukung pemerintah Hatta, di Sumatera Tengah hanja berdjalan didalam lapangan politik sadja, dan tidak pernah memperlihatkan bentuk insiden. Dalam pernjataannja, ketika petjah Peristiwa Madiun, Partai Komunis Indonesia C.C. Sumatera Tengah mengumumkan, bahwa partai itu tidak berhubungan apa-apa dengan pusat partainya di Djokjakarta berkenaan dengan peristiwa-peristiwa jang tengah terdjadi. Dalam hal ini P.K.I. Sumatera Tengah djuga menambahkan, bahwa dia sama sekali tidak menjetudjui adanya perebutan kekuasaan sebagai jang dilakukan oleh P.K.I. Muso di Madiun itu.

Dengan demikian, maka hilanglah ketjemasan-ketjemasan orang tentang gerak dan langkah jang „mentjemaskan” jang disangka akan dilangkahkan oleh F.D.R. di Sumatera Tengah.

Kesatuan paham dalam mempertahankan kesatuan perdjuaan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan diadakan kembali serangan bersendjata oleh tentera Belanda, dapatlah diudjudkan kembali.

Dekat sebelum berlangsungnja agresi Belanda ke II, persatuan telah dapat dipadu kembali.

Lapangan perdjuaan Partai-partai Politik di Sumatera Tengah.

Uraian diatas tadi, merupakan tindak-tanduk dari partai-partai politik di Sumatera Tengah semendjak kemerdekaan, bergerak-terbuka dengan diproklamirkannja kemerdekaan.

Sekarang baiklah kita tindjau pula gerak jang pernah dinampakkan oleh satu-satu partai itu ditengah-tengah masjarakat Sumatera Tengah, agar dengan demikian akan lebih njata bentuk lapangan jang sudah dimasukinja semendjak dia dibangunkan kembali.

Pandangan pertama kita tudjukan kepada P.K.I. jang dalam pertemuan pertamanya pada tanggal 27 Nopember 1945 di Padang telah memutuskan fasal-fasal Dasar-Usaha serta tudjuan — sementara jang berbunji sebagai berikut:

Usaha dan tudjuan sementara dari P.K.I. Sumatera Barat atas 5 pasal, jaitu:

Pasal 1.

Mengokohkan Negara Republik Indonesia jang berdasar kedaulatan rakjat menudju masjarakat sosialis.

Pasal 2.

Menjelenggarakan dan mempertinggi kehidupan baru lahir bathin, dan budi-pekeria rakjat dengan menjusun segala lapisan rakjat dalam sosial dan ekonomi.

Pasal 3.

Mendjundjung tinggi kemakmuran dan kehidupan rakjat dalam lingkungan Indonesia Merdeka.

Pasal 4.

Meluaskan pendidikan dan pengadjaran dalam segala lapangan untuk mengekalkan Indonesia Merdeka.

Pasal 5.

Menolong orang jang kesusahan, pengangguran dan ketjelakaan.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas, ditetapkan pula rentjana usaha jang terdiri dari:

- a. Menjesuaikan pendidikan dan perdjuaan rakjat dalam susunan internasional.
- b. Menolong usaha untuk menjelamatkan dan menjempurnakan susunan Negara Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakjat.
- c. Mengatur pergaulan rakjat dari segala bangsa dan golongan.
- d. Memberantas saranan dan perbuatan kapitalisme dan imperialisisme dari segala bangsa.
- e. Mendidik dan memimpin pemuda-pemuda Indonesia untuk mendjaga dan mendjamin keselamatan rakjat.

- f. Memungut iuran dari anggota dan menerima pemberian tapi tidak meminta-minta.

Dalam konperensinja jang dilangsungkan di Kubang (Suliki) pada tanggal 18 sampai 20 Pebruari 1946 jang dihadiri oleh 20 buah rantingnja di Sumatera Barat. P.K.I. Sumatera Barat telah mengambil banjak putusan-putusan, dan djuga mengirimkan sebuah resolusi kepada Pemerintah.

Dalam resolusinja kepada Pemerintah itu, P.K.I. menuntut perbaikan beberapa lapangan penghidupan masjarakat tani dan buruh di Sumatera Barat. Tuntutan-tuntutan itu mengenai lapangan-lapangan:

- a. Tentang mengadili perkara-perkara sipil dan kriminil.
- b. Tentang kewadajiban pertanian.
- c. Tentang perbaikan perekonomian rakjat.
- d. Mengenai kesehatan dan pendidikan rakjat.

Dan putusan penting jang diambilnja dalam konperensinja itu berkenaan dengan ketegangan suasana dalam negeri, berbunji:

„Menolak sekalian permusjawaratan dengan pihak-pihak Belanda, sebelum Pemerintah Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia sepenuhnya (100%)”.

Dalam konperensi selandjutnja jang diadakan oleh P.K.I. Sumatera Barat di Bukittinggi pada tanggal 29 dan 30 Mei 1946, Partai Politik itu antara lain memutuskan pengiriman sebuah resolusi kepada Pemerintah Sumatera Barat. Resolusi itu antara lain berbunji sebagai berikut:

„Menegaskan dengan sesungguhnya untuk berusaha mengokohkan kedudukan Negara Republik Indonesia dengan djalan:

- a. Memperbaharui dan mempertjepat kerdja-sama dalam arti jang luas dengan badan-badan Pemerintahan.
- b. Selalu bersedia melantjarkan usaha-usaha Pemerintah untuk mendjaga kedudukan N.R.I. jang berdasar kedaulatan rakjat.”

Kegiatan-kegiatan politik jang diperlihatkan oleh partai ini selama masa revolusi, memperlihatkan hasil-hasil jang sangat besar dalam kalangan perburuhan. Organisasi-organisasi buruh jang terbentuk sesudah proklamasi, membajangkan besarnja pengaruh partai itu didalamnja. Tapi hal ini bukanlah menundjukkan, bahwa organisasi buruh di Sumatera Tengah merupakan hasil usaha dari P.K.I., karena banjak diantara serikat-serikat buruh jang dibangunkan oleh mereka, jang tidak menggolongkan dirinja dalam suatu partai politik jang tertentu.

Tentera Merah Indonesia jang merupakan barisan pemuda-pemuda perdjungan jang dipupuk oleh P.K.I. jang kemudian dina-

makan Barisan Merah Indonesia, djuga merupakan modal-modal besar jang pernah ditanamkannya dimasa permulaan perkembangannya di Sumatera Barat.

Meskipun dia mendapat saingan jang besar dari partai-partai jang berlawanan pendirian dengan dia, tapi bentrokan paham hampir tidak pernah terdjadi. Hubungannya sesama partai „kiri” adalah dalam gabungan „sajap kiri” terdiri dari P.K.I., Partai Sosialis dan P.B.I. Tidak ikut serta dan tidak menjetudjui adanya „perebutan kekuasaan” sebagai jang dilakukan oleh P.K.I. „Muso” di Madiun tempo hari, dapat menghindarkan P.K.I. Sumatra Barat/Tengah dari antipathienja rakjat. Dan dengan demikian, maka dia dengan leluasa dapat mengembangkan sajanja sekuat-kuatnja.

Partai Sosialis, tidak mendirikan badan-badan ketenteraan, tetapi bergerak melulu dilapangan politik. Begitu djuga P.B.I.

Gerakan-gerakan jang berdasar Islam.

Bahwa pengaruh dan adjaran-adjaran alim ulama agama Islam di Sumatera Barat mendapat tanah subur didaerah ini, sudah lama diketahui orang. Dan bahwa ulama-ulama besar di Sumatera Barat sudah semendjak pendudukan Djepang mempersatukan dirinja dalam M.I.T. ini, djuga sudah diterangkan dibahagian jang lampau. Dari itu, orang tidak akan heran bila mengetahui, bahwa dalam zaman menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air, ulama-ulama itu djuga mengambil peranan penting dikalangan rakjat.

Kegiatan-kegiatan para alim ulama dalam lapangan politik di Sumatera Barat terlihat dengan njata. Sesuai dengan paham, bahwa didalam Islam tidak dikenal pemisahan antara Negara dengan Agama. Maka perkembangan-perkembangan partai-partai politik berdasarkan adjaran agama Islam di Sumatera Barat maju dengan sangat pesat. Selaras dengan banjaknja tjabang-tjabang pendirian (mazhab) tjara beramal didalam agama Islam, maka partai politik Islam ini tidak dapat hanja setjorak sadja. Antara P.S.I.I., Masjumi, Perti, P.P.T.I., Pemsji dan P.T.M.I.I. terdapat perlainan prinsip jang njata, meskipun mempunyai tudjuan jang sama.

Karena besarnya pengaruh para alim ulama ini, maka komando rohani dalam perdjjuangan melawan musuh sebahagian besar berada ditangan mereka. Mereka diikuti oleh masjarakat, karena tindakan-tindakannya jang revolusioner dalam perang kemerdekaan seperti M.I.T. jang dalam kongresnja tanggal 6 Desember 1945 di Bukit tinggi, memutuskan:

Untuk mentjapai paduan tenaga perdjjuangan semesta bagi mempertahankan kedaulatan N.R.I. ditetapkan hal-hal jang tersebut dibawah ini:

1. M.I.T. Sumatera akan membentuk barisan **Sabilillah** jang akan mendapat latihan dari T.K.R. dan mempernai hubungan dengan badan ketenteraan.
2. Menetapkan bahwa perjuangannya mengusir musuh dari tanah air kita atau menghanturkannya, adalah fardhu'Ain hukumnya.
3. Menetapkan bahwa siapa jang tiwas dalam perjuangan ini adalah **mati sjahid dunia dan achirat**; majatnja tidak dimandikan, dikapani hanja dengan pakaian jang dipakainja sadja, dan tidak disembahjangkan.
4. Penghianat bangsa dinasehati dan diawasi, manakala sikapnja tidak berobah djuga, maka halal-lah darahnja (boleh dibunuh).
5. Barisan Palang Merah Puteri, dituntut oleh Agama Islam.

Disamping kelima putusan penting jang mentjetuskan semangat perjuangan kepada tiap-tiap pemuda Islam di Sumatera, dalam kongresnja itu M.I.T. djuga mengambil suatu resolusi jang antara lain menjatakan:

„Keprtjajaan kepada Kabinet Sutan Sjahrir, menjanggah pemboman jang dilakukan oleh Tentera Sekutu di Surabaya, Bandung, Semarang dan diberbagai kota lainnja dipulau Djawa, begitupun menjanggah dilutjutinja sendjata-sendjata pemuda Indonesia di Surabaya oleh tentera Inggeris. Djuga dituntutnja agar perlutjutan sendjata balatentera Djepang harus dilaksanakan setjepatnja dan mereka haruslah segera dikeluarkan dari Indonesia, serta agar selesai perlutjutan itu, Tentera Sekutu harus selesaknja meninggalkan Indonesia. Achirnja ditjela tindakan-tindakan tentera Inggeris jang mempergunakan kaki tangannja menghalangi tjita-tjita rakjat Indonesia dalam mempertahankan dan menegakkan kemerdekaanja”.

Kelima buah putusan diatas merupakan patokan jang diambil over oleh Partai Politik Islam M.I.T. sebelum dia bergabung menjadi satu dengan Masjumi.

Dalam perkembangannja selandjutnja, Masjumi sudah dapat mengisi tempat-tempat jang sekian lama diduduki oleh M.I.T. baik dalam politik, maupun pembelaan/pertahanan dan lain-lainnja.

Walaupun para alim ulama di Sumatera Tengah dalam lapangan politik mempunjai pendirian jang tidak sama, tapi dalam banjak soal terutama dalam soal pembelaan dan pertahanan negara, mereka sama serentak bangkit berdiri dan mengambil putusan-putusan jang harus menjadi pegangan semua umat, walaupun siapapun djuga ummat itu asal dia manusia Indonesia beragama Islam. Kesatuan paham dan pendapat para alim ulama itu dinjatakan mereka lagi dalam suatu pertemuan antara para alim ulama dan muballigh-muballigh Islam Sumatera Barat di Bukittinggi pada tanggal 26 Djuli 1947, jaitu disaat bangsa Indonesia menghadapi agresi Belanda jang pertama. Putusan-putusan itu menetapkan:

1. Pengerahan perang sabil terhadap tentera Belanda, musuh Allah dan musuh kita.
2. Hukum perang sekarang adalah fardhu'Ain atas tiap-tiap Mukallaf laki-laki dan perempuan.
3. Untuk melantjarkan perang sabil ini, para ulama dan muballighin telah menentukan tugas sebagai berikut:
 - a. Mempererat persatuan untuk mentjapai kemenangan.
 - b. Mengobar-ngobarkan semangat Djihad dan Sjahid.
 - c. Memperhebat rasa pengorbanan rakjat, darah, djiwa, harta benda, tenaga dan fikiran.
 - d. Turut mengumpulkan pengorbanan rakjat bersama-sama badan jang telah ditetapkan atau diberi kuasa oleh Pemerintah, umpamanja mengumpulkan emas, padi, lumbung-perang dan lain-lain.
 - e. Membawa rakjat thaat kepada agama, karena menurut paham agama, bahwa meninggalkan segala jang dilarang oleh Allah dan mengerdjakan suruhannja dalam masa perang, adalah mendjadi suatu sjarat kemenangan.
 - f. Membawa rakjat patuh kepada pemerintah dan Negara Republik Indonesia.
 - g. Mengandjurkan supaja seluruh kaum Muslimin dan Muslimat Indonesia laki-laki dan perempuan siap sedia dan waspada dengan segala matjam sendjata apapun djuga.
Umpamanja: Tombak, lembing, pisau, kampak dan lain-lain, untuk menjambut segala kemungkinan dan untuk menghantjurkan musuh Allah dan musuh kita (tentera Belanda).

Kesatuan dan perpetjahan didalam kalangan partai-partai politik Islam di Sumatera Tengah berdjalan menurut apa jang ditentukan oleh suasana jang dihadapi. Sebagai djuga mereka tidak dapat mempersatukan paham mengenai prinsip mereka masing-masing, maka kebulatan tenaga dalam menjusun penglaksanaan detail-detail tuntutan tidak dapat dirampungkannya. Tapi dalam merampungkan suatu masaalah mengenai kepentingan seluruh ummat, mereka sama memeras tenaga dan fikiran agar didalamnja terdapat suatu paduan adjaran dan fatwah. Demikianlah Partai-partai Politik Islam di Sumatera Tengah.

Partai-partai Politik selama menghadapi clash ke-II.

Sebelum penjerangan tentera Belanda jang kedua kalinja pada achir tahun 1948, suasana politik di Sumatera Tengah tidaklah dapat dikatakan tenang dan djernih. Bibit perpetjahan sudah lama tumbuh, jaitu semendjak lahirnja Persetudjuan Linggardjati. Kalau perpetjahan karena Linggardjati itu hampir dapat disatukan kembali, maka peristiwa jang timbul karena „Renville” dan „Peristiwa Ma-

diun" menjebabkan perpetjahan itu kian lama kian dalam nampaknja. Tidak dibenarkannya partai-partai mempunyai Barisan Rakjat jang bersendjata sebagai dikala menghadapi clash pertama, menjebabkan pertarungan-pertarungan antara partai-partai politik jang berlainan azas, tidak sampai bersifat insiden bersendjata. Benar rakjat belum dalam benar tentang berpolitik, tapi mereka amat terikat erat kepada partai-partai jang djadi anutannya. Karena itu perpetjahan paham diantara partai-partai ini menjebabkan fikiran rakjat dipengaruhi pula, dan kebanyakan sebabnja hanja, karena sentimen sadja.

Tapi suasana keruh itu mendjadi djernih kembali disaat tentera bersendjata pemerintah Belanda melakukan gempuran dan serangannya kesemua daerah-daerah Republik. Tidak hanja kota-kota jang besar-besar sadja jang mendjadi sasaran gempuran ini, tapi dusundusun dan desa-desa djuga dihudjani dengan tembakan-tembakan dan gempuran-gempuran.

Karenanya maka rakjat berada didalam suasana panik, dan kegontjangan terdjadi dimana-mana.

Pengungsian dari kota-kota berlangsung dengan tjepat. Tidak hanja alat-alat dan mesin pemerintahan sadja jang harus diungsikan dari kota-kota kedudukannya, tapi partai-partai politik djuga sama memindahkan kedudukannya kedaerah-daerah jang dirasanya aman untuk meneruskan perjuangannya.

Dengan diungsikannya Dewan-dewan Pimpinan partai-partai politik ini kedesa-desa jang terpentjil dari kota, maka rakjatpun dengan setjara langsung sama dapat menerima tuntunan dan pimpinan dari partainya masing-masing. Karena itu, maka perjuangan menentang pendjadjahan dapat diteruskan, dan taktik bergerilja jang diadjarkan kepada barisan-barisan rakjat selama ini, dapat pula dituntunkan kepada rakjat biasa, sehingga masa panik itu dapat dilampaui dengan segera.

Meskipun dalam keadaan perjuangan jang sangat genting, pemerintahan daerah merasa sangat penting untuk mengadakan suatu permusjawaratan setjara darurat dengan pemimpin-pemimpin Partai Politik, terutama dengan partai-partai jang Dewan Pimpinannya ikut serta mengungsi.

Sesudah dilakukan penindjauan, maka pada suatu hari jang direntjanakan lama sebelum itu, disuatu tempat di Sumatera Barat oleh Gubernur Militer Sumatera Barat diadakan **rapat bersama** dengan partai-partai politik jang ada. Pertemuan ini dilangsungkan pada hari Djum'at tanggal 26 Maret 1949, jaitu disaat memuntjaknja serangan-serangan tentera Belanda diseluruh tempat. Tujuan dari rapat dan pertemuan istimewa ini adalah untuk memperkokoh rasa persatuan dan membulatkan tekad untuk menentang tiap-tiap gerak dan tindakan musuh jang kian hari kian tambah mengganas nampaknja itu.

Sebagai diterangkan diatas, pertemuan istimewa ini dilangsungkan disuatu tempat jang selain oleh wakil-wakil Pemerintah Darurat, dihadiri pula oleh wakil-wakil partai-partai politik jang tersebut dibawah ini:

1. Sebagai Wakil M.T.K.A.A.M. hadir Saudara-saudara Dt. Simaradjo dan Dt. Bagindo Basa nan Kuning.
2. Perti diwakili oleh Saudara-saudara H. Siradjuddin Abas dan Hasan Zaini.
3. P.K.I. diwakili oleh Saudara Bachtaruddin.
4. Pesindo diwakili oleh Saudara Baharuddin.
5. Masjumi diwakili oleh Saudara-saudara H. Iljas Jacoub, H. Udin Rahmani dan M. Din Jatim.
6. P.S.I. diwakili oleh Saudara-saudara Djuir Muhammad dan Hamdani.
7. P.S.I.I. diwakili oleh Saudara-saudara Harun Junus dan Deradjat Daud.
8. G.P.I.I. diwakili oleh Saudara Iljas Dt. Madjo Indo.

Setelah oleh tiap-tiap partai-partai itu dinjatakan pendapat mereka dan partai mereka masing-masing, maka semuanya menjatakan bersedia untuk membulatkan tenaga jang meliputi semua lapisan masjarakat dan untuk menghadapi suasana jang tengah terdjadi, mereka bersedia untuk sementara menjampingkan perentaaan paham dan ideologie sebagai selama ini.

Kemudian mereka menjusun suatu *Pernyataan Bersama* jang ditanda tangani oleh semua jang hadir. Putusan-putusan jang ditanda tangani bersama itu berbunji sebagai berikut:

1. Tiap-tiap partai bertindak kebawah memasukkan keinsjafan sesungguh-sungguhja dalam saat menghadapi perdjjuangan melawan musuh jang satu sekarang ini, jaitu Belanda, menghindarkan suasana kemungkinan pertentangan paham, ideologie dari golongan-golongan dalam masjarakat.
2. Berusaha membasmi segala anasir-anasir dalam kalangan sendiri jang mungkin membawa akibat perpetjahan dalam masjarakat.
3. Mendjelaskan kepada seluruh partai masing-masing tentang M.P.R.K. dan M.P.R.N. serta kedudukan sebagai anggota dalam badan-badan Pemerintahan tersebut, haruslah menilik kepada kesanggupan melaksanakan pekerdjaan aktif menurut pembagian tugas."

Dalam pendjelasannja mengenai Keterangan Bersama jang dikeluarkan dan diambil pada tanggal 26 Maret 1949 itu, partai-partai politik jang bersidang pada waktu itu, memberikan pendjelasan sebagai dibawah ini:

„1. Dasar perdjuaan jang dilakukan sekarang, adalah perdjuaan kebangsaan jang sebulat-bulatnja. Dia harus merupakan perdjuaan rakjat semesta. Dalam melantjarkan perdjuaan rakjat semesta ini, haruslah disendikan kepada tenaga rakjat semesta pula, dengan tidak ada rasa retaknja baik sedikitpun djuga. Tenaga dan perdjuaan rakjat semesta itu harus terudjud lahir dan bathin. Untuk mentjapai ini, haruslah dapat diudjudkan persatuan rakjat jang kokoh, persatuan berfikir dan bertindak. Sjarat jang utama untuk melaksanakan ini, adalah menjingkirkan segala sesuatu jang mungkin menimbulkan retak dalam masjarakat, walaupun retak dalam tjara berfikir, untuk melaksanakan tiap-tiap sesuatu kewadajiban jang harus dipikul oleh tiap-tiap diri ataupun golongan.

2. Dalam menghadapi dan mewudjudkan peperangan semesta ini haruslah diinsjafi benar-benar, bahwa kita kembali menghadapi suatu musuh jang kembali mentjengkamkan kuku pendjadjahannja dan memusnahkan sendi-sendi bangsa dan negara kita.

Dalam perdjuaan menentang pendjadjahan, maka tudjuan satu-satunja jang harus ditjapai oleh seluruh masjarakat adalah mematahkan segala usaha musuh. Sendjata jang paling tadjam untuk ini, adalah hanja sendjata persatuan jang bulat. Kemadjuan dan kemenangan ideologie hanja dapat berkembang dalam negara jang merdeka. Oleh karena itu setiap pertentangan politik dalam masjarakat harus dapat dihindarkan, karena pertentangan paham itu mungkin dapat membawa ketegangan tjara berpikir dan tjara mewudjudkan perdjuaan kebangsaan kita. Kita sekarang hania menghadapi dan mempunjai satu kepentingan, jaitu: **KEPENTINGAN NEGARA.**

3. Dalam gerakannja jang sekarang ini, Belanda memakai usaha memetjah-metjah masjarakat. Tiap-tiap ketegangan dalam masjarakat, bagi Belanda adalah suatu kemenangan dan keuntungan. Kerenggangan itu dipergunakannja, ditiup-tiup dan dibesar-besarkan, sehingga kita tidak dapat mewudjudkan tenaga rakjat semesta tadi. Musuh selalu berusaha dalam propagandanja untuk memetjahkan persatuan kita. Pertentangan golongan dihidupkannja. Kaki tangannja menjebarkan ratjun-ratjun permusuhan dikalangan pemerintahan, angkatan perang, rakjat berdjuaan dan pemimpin-pemimpin, sehingga satu dengan jang lain diadu-dombakan, tjuriga-mentjurigai, sehingga kita sama kita berlaga.

4. Dalam rapat pemimpin-pemimpin partai politik se-Sumatera Barat tanggal 23-3-49 jang lalu, hal-hal ini diinsjafi benar. Dari beberapa kedjadian seakan-akan tampak ratjun permusuhan dan pertentangan ini mulai masuk masjarakat kita.

Oleh karena itu bahaya yang akan membawa akibat yang besar ini dalam perjuangan kita haruslah dibasmi lekas-lekas.

5. Pertentangan ideologie dan golongan dalam masa peperangan semesta sekarang ini harus dihentikan. Tetapi karena paham politik dan paham susunan masyarakat yang berdasarkan demokrasi yang sudah tumbuh dalam masyarakat kita, bukanlah dimaksud mematikan partai-partai. Terutama di Sumatera Barat ini susunan masyarakat adalah sedemikian rupa hingga aktiviteit partai-partai itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk menjapai kesatuan dan kemajuan tenaga rakyat seluruhnya dalam menghadapi dan melaksanakan perjuangan sekarang ini melawan agresi Belanda dan menjatuhkan langkahan dan diri serta tiap-tiap golongan dalam masyarakat hingga seluruh bangsa menjadi satu, bulat dan padu.
6. Berdasar akan pendirian ini, maka pemimpin-pemimpin partai di Sumatera Barat, yaitu H. Iljas Jacob, H. Udin Rahmani dan Din Jatim dari Masjumi, Bachtaruddin dari P.K.I., H. Siradjuddin Abas Dt. Bandaro dari Perti, Harun Junus dan Deradjat Daud dari P.S.I.I., Djuir Muhammad dan Hamdani dari Partai Sosialis Indonesia, Dt. Simaradjo dan Dt. Bagindo Basa nan Kuning dari M.T.K.A.A.M., Iljas Dt. Madjo Indo dari G.P.I.I. dan Baharuddin dari Pesindo, semuanya seia-sekata dengan suara bulat memutuskan, menjalankan koreksi dan akan menjalankan tindakan dalam partai masing-masing bila ada kenjataan atau ada anasir-anasir yang mungkin memecah dan membawa retak persatuan bangsa dan tenaga rakyat semesta. Oleh karena perjuangan yang kita lakukan sekarang ini adalah perjuangan yang akan menentukan tegak dan runtuhnya bangsa dan negara kita seluruhnya, maka petunjuk pimpinan partai-partai tersebut tidak akan ragu-ragu membasmi segala anasir-anasir yang berbahaya itu dalam kalangan dan golongan masing-masing.

Selanjutnya, putusan-putusan yang diambil oleh dan dalam pertemuan antara pimpinan-pimpinan partai tersebut dalam kenjataan sehari-hari selama menghadapi serangan-serangan tentera Belanda dalam semua lapangan, berjalan dengan lantjar. Karena itu dapatlah dikatakan, bahwa selama Pemerintahan Darurat masih berdiri, selama itu pula kesatuan pendirian diantara partai-partai itu dapat berwujud menjadi satu.

Partai-partai politiklah yang telah berjasa besar dalam menanam dan memperdalam rasa pertanggungan jawab rakyat terhadap pertahanan negaranya. Dan mereka pulalah yang pada hakekatnya mempersendjatai jiwa dan moraal rakyat selama menghadapi serangan tentera Belanda yang berjalan hampir setahun penuh lamanya itu. Dimana kesempatan yang ada, pemimpin-pemimpin partai-partai itu selalu mengadakan kontak dengan para pengikut-

nja jang banjak dan tersebar dimana-mana itu. Untuk memberikan pengertian, penerangan-penerangan dan keinsjafan-keinsjafan, tidak gedung-gedung dikota-kota jang dipergunakan sebagai sekian lama, tapi gubuk-gubuk dan pondok-pondok dikaki gunung dan dipinggir-pinggir rimba jang dipergunakan.

Herankah kita, bila dalam keadaan seperti itu bakti-bakti tenaga, djiwa dan harta benda selalu mengalir dalam menghadapi perlawanan selama itu? Dan herankah kita bila Pemerintah Darurat R.I. di Sumatera masih dapat mempertahankan kedudukannya sampai tjita-tjita perdjuaan bangsa Indonesia dapat ditjapai dengan hasil jang memuaskan itu?

Sesudah penjerahan kedaulatan.

Karena eratnja hubungan antara pemimpin-pemimpin partai politik dengan Pemerintah dan rakjat dalam menghadapi agresi tentera Belanda ke-II, itu maka mereka selalu mendapat kontak dari kedua belah pihak mengenai sesuatu perkembangan.

Mereka ikuti djalannya perundingan permulaan jang diadakan oleh delegasi R.I. dengan pihak Belanda berkenaan dengan pemulihan kembali Pemerintah R.I. ke Jogjakarta, bahkan mereka ikuti dengan seksama perundingan-perundingan jang dilangsungkan di P.B.B. mengenai masalah Indonesia. Dari itu, maka mereka selalu dapat memberikan patokan-patokan dan pandangan-pandangan dengan politik mereka terhadap Pemerintah.

Adanja *Roem-Royen Statement*, membukakan kesempatan jang lebih besar bagi mereka untuk lebih banjak mentjuraikan perhatian terhadap perkembangan-perkembangan jang akan dihadapi. Pembebasan kembali pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dari tahanan tentera Belanda diberbagai tempat, dipulihkannya daerah Jogjakarta, berlangsungnja Konperensi Medja Bundar di Den Haag, jang sebelum itu diadakannya Konperensi Antar Indonesia di Djakarta dan di Jogjakarta, semua merupakan bajangan-bajangan baru untuk terbuknja kesempatan bagi partai-partai politik itu, untuk segera bergerak kembali selaras dengan bawaan suasana.

Pemulihan-pemulihan kota-kota jang diduduki oleh tentara Belanda semendjak gempurannya jang terachir, penjerahan kedaulatan R.I. kepada Pemerintah R.I., penjerahan kedaulatan Belanda atas seluruh kepulauan Indonesia selain Irian Barat jang dilangsungkan di Den Haag kepada Pemerintah R.I.S. dan penjerahan kembali mandaat Pemerintahan Darurat R.I. oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara kepada Presiden Sukarno, merupakan lembaran baru, dimana sedjarah kebangunan bangsa Indonesia selandjutnja akan ikut diukir oleh partai-partai politik itu.

Waktu jang pendek dalam perkisaran tahun 1949 ke tahun 1950, oleh partai-partai politik di Sumatera Tengah seakan dipergunakan

sebagai „masa peralihan kembali“, dimana ruangan hanja dipakai untuk penjusunan organisasi kedalam sadja. Perdjungan jang dikerahkan dari hutan-hutan dan rimba-rimba selama berbulan-bulan jang lampau, amat banjak meminta tenaga pemimpin-pemimpin itu, karena selain dari mereka sekian lama harus memberikan pengertian kepada pengikut-pengikutnja, djuga mereka harus pula memberikan tenaga jang banjak dalam memutar roda Pemerintahan Darurat, karena walau betapapun djuga suasana jang tengah dihadapi, kekosongan-kekosongan dalam setiap bahagian instansi pemerintahan sebolehnja tidak dibiarkan. Dari itu tidak djarang bila sebahagian diantara pentolan-pentolan partai itu disaat kembalinja kekota, merupakan seorang pegawai pemerintah, pegawai jang „non“.

Dalam perkisaran antara suasana R.I.S. dengan akan dimasuki kembali Negara Kesatuan, kegiatan-kegiatan politik di Sumatera Tengah masih belum memperlihatkan bentuk jang njata, selain dari pada tuntutan-tuntutan untuk perbaikan didalam daerah sendiri, dan kesatuan paham masih dapat dipertahankan. Meskipun Dewan Perwakilan Rakjat sementara Sumatera Tengah sudah dapat dilangsungkan kembali, dan perlainan-perlainan pendapat didalamnja sudah mulai pula kelihatan, tapi pertentangan-pertentangan jang meruntjing masih dapat dihindarkan.

Tapi hal ini bukanlah menundjukan sepinja pertjaturan antara partai-partai politik itu sendiri. Pertentangan-pertentangan pendirian mengenai pembaharuan susunan dalam segala lapangan alat pemerintahan daerah, tetap berdjalan dalam suasana jang tenang.

Dibekukannja D.P.R.S.T. oleh Pemerintah Pusat pada awal tahun 1951, merupakan puntjak ketegangan-ketegangan jang timbul karena adanja pertentangan-pertentangan pendirian dan pendapat antara D.P.R.S.T. dan pemerintah.

Pembekuan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ini merupakan suatu pemangkasan putjuk-putjuk perdjungan partai-partai politik jang sedianja akan berkembang. Dari itu tidaklah mengherankan bila karena itu timbul reaksi-reaksi atas tindakan Pemerintah itu, lebih-lebih dari partai-partai jang pada masa itu memandang bahwa tindakan Pemerintah ini sangat merugikan kepada perdjungan tjita-tjitjanja.

Tertutupnja ruangan Dewan Perwakilan untuk menyatakan kehendak rakjat jang disalurkan oleh partai-partai politik di Sumatera Tengah itu, menjebabkan timbulnja musim dan zaman „beresolusi“.

Hudjan resolusi dari Sumatera Tengah.

Sesuai dengan perkembangan-perkembangan suasana dalam dan luar negeri sedari tahun pertama dari N.K.R.I. perhatian-perhatian dari partai-partai politik ini tidak hanja berpusat kepada suatu soal semata. Dipisahkannya Irian Barat dari Wilayah Negara R.I. dalam persetudjuan K.M.B., eratnja hubungan dan kerdja-sama antara Pemerintah R.I. dengan Pemerintah Belanda dalam lapangan keuangan dan pertahanan, terkongkongnja gerak dan langkah R.I. karena terikat dalam statut Uni Indonesia-Belanda, menjebakkan K.M.B. mendjadi sasaran dari resolusi-resolusi.

Beberapa Peraturan Pemerintah, djuga diresolusikan. Dalam hal ini misalnja, dapat ditjatat antara lain resolusi dari putjuk pimpinan Pemsji (Persatuan Muslimin Sjatrijah Indonesia) jang berpusat di Ulakan (Pariaman) mengenai berlakunja Peraturan N.R.T. dari Djawatan Agama Propinsi Sumatera Tengah. Dalam resolusi itu Pemsji menjatakan tidak ikut serta bertanggung djawab tentang pelaksanaan peraturan tersebut, dan menuntut agar segera ditjabut kembali. Pemsji selalu bersedia untuk berembuk dan bermusjawarat dengan kalangan Agama Islam mengenai pertikaian-pertikaian jang timbul didalam masjarakat ummat Islam.

Berkenaan dengan pendaftaran Nikah, Talak dan Rudjuk ini djuga 6 buah organisasi, diantara mana termasuk tiga buah partai politik djuga menjatakan sanggahannja pula. Ke 6 buah organisasi itu ialah: Persatuan Tarbiah Islamijah (Perti), Partai Adat Rakjat, Partai Islam Indonesia, Lembaga Kebudajaan Rakjat, Persatuan Kadhi Nikah Kabupaten Tanah Datar dan Balai Permusjawaratan Kurai dalam resolusinja menjatakan agar supaja jang dimaksud dalam undang-undang tentang N.T.R. jang dinjatakan berlaku untuk seluruh pulau Sumatera itu, ditiadakan di Minangkabau (Sumatera Barat), dan pekerdjaan tersebut dapat dilaksanakan oleh Kadhi Adat jang diangkat oleh kerapatan dalam negeri masing-masing, menurut peraturan adat jang telah ada.

Pertimbangan-pertimbangan jang timbul dalam hal ini, antara lain menjatakan bahwa adat Minangkabau telah mempunyai peraturan semendjak dahulu mengenai pelaksanaan Nikah, Talak dan Rudjuk, dan di Minangkabau pekerdjaan tersebut dilangsungkan atas persesuaian dan persetudjuan ninik mamak jang bersanqkutan. Pegawai jang melakukan pentjataan Nikah, Talak dan Rudjuk itu di Minangkabau diangkat oleh Kerapatan Negeri sependjang adat, dan bahwa Kadhi tersebut dinamai „Kadhi Adat”.

*
**

Desakan-desakan partai-partai politik se-Sumatera Tengah agar D.P.R.S.T. jang dibekukan sekian lama itu haruslah dipulihkan kembali, ternjata belum berhasil, bahkan Pemerintah Pusat menja-

takan memperpanjang jangka waktu pembekuan tersebut. Dengan demikian, maka terhenti pulalah nafas perjuangan setjara „parlementer” itu sampai jangka waktu jang tidak ditetapkan.

Mengenai tindakan Pemerintah Pusat itu, banjak pendapat-pendapat jang diketengahkan. Partai Adat Rakjat dalam hal ini menjatakan pendiriannja jang diambil pada tanggal 23 Nopember 1951, jang berbunji:

1. Bahwa tindakan Pemerintah itu sangat bertentangan dengan hukum-hukum demokrasi.
2. Bahwa P.P. No. 1/51 jang dipakai sebagai sendjata untuk membekukan D.P.R. ini, merupakan suatu perkosaan bagi hidup dan berkembangnja demokrasi didaerah Sumatera Tengah jang sudah berabad-abad lamanja itu. Didjalankannja P.P. itu berarti hilangnja saling pertjaja-mempertjajai antara Rakjat dengan Pemerintah. Hal ini djuga akan menjebabkan timbulnja rasa takut dari rakjat terhadap Pemerintahnja sendiri untuk mengeluarkan pendapat-pendapat, pernajaan-pernajaan dengan lisan ataupun tulisan karena dichuwatirkan, bahwa mereka akan mungkin ditangkap. Dengan demikian, maka perasaan dan perbuatan mengingatkan kepada zaman fasis Djepang.

Pendapat tersebut diatas merupakan salah satu pendapat dan pandangan partai-partai politik terhadap dibekukannja D.P.R. Sumatera Tengah.

K.P.P.S.T. bertindak.

Dan sesudahnja D.P.R.S.T. dibekukan itu, maka partai-partai di Sumatera Tengah lalu mengadakan suatu gabungan jang bernama *Kordinasi Partai-partai Politik se-Sumatera Tengah* (K.P.P.S.T.), jang pada tanggal 27 Djuli 1952 telah mengeluarkan suatu *Statement Bersama* a.l. berbunji sebagai berikut:

M e m u t u s k a n :

1. Menuntut pemilihan umum langsung, rahasia, lijestenstelsel, dan perwakilan berimbang.
2. Menjesali sikap Pemerintah jang mengakibatkan kosongnja demokrasi di Sumatera Tengah sekian lama.
3. Mentjabut P.P. No. 1 tahun 1951.
4. Mengaktiveer kembali D.P.R.S.T.

Dengan tjatatan bahwa:

Pertama: Masjumi dan G.P.I.I. tidak menjetudjui 3 dan 4 (mentjabut P.P. No. 1 tahun 1951 dan meng-aktiveer kembali D.P.R.S.T.).

Kedua: P.N.I. menjetudjui 1, 2 dan 3.

Ketiga: P.S.I. menjetudjui 1 dan 2.

Keempat: Parkindo menjetudjui seluruh putusan.

Dan pada tanggal 6 Desember 1952 K.P.P.S.T. lalu mengirim delegasinja ke Djakarta, untuk membitjarakan dengan Pemerintah Pusat akan soal-soal sekitar D.P.R.S.T., dan activeeringnja.

Kemudian pada tanggal 1 Maret 1953, K.P.P.S.T. melangsungkan rapat serentak di Padang dan Solok, dimana dimadjukan konsepsi tentang D.P.R.S.T. dan Kongres Rakjat Sumatera Tengah. (Lebih djauh lihat dibahagian Demokrasi!).

Pun djuga atas kegiatan partai-partai di Sumatera Tengah, dalam awal tahun 1952 ini diadakan suatu *Kongres Rakjat* Sumatera Tengah, jang dihadiri djuga a.l. oleh „Grand old man H. Agus Salim. Dalam Kongres ini dibitjarakanlah soal-soal jang spesifik buat daerah Sumatera Tengah, seperti soal harta pusaka, soal-soal adat dan agama, dan lain-lain.

Kepartaian dan soal-soal masjarakat.

Dan bila pandangan diarahkan pula kepada tuntutan untuk mengadakan perubahan jang langsung mengenai soal-soal masjarakat jang tengah dihadapi, maka kedapatan, bahwa tuntutan demikian djuga tidak sedikit djumlahnja.

Dalam suatu permusjawaratan antara para Alim Ulama, Ninik-mamak serta para tjerdik-pandai se Sumatera Tengah jang berlangsung di Bukittinggi pada tanggal 20 Djanuari 1952, jaitu *Kongres Rakjat* tadi, selain diputuskan untuk membangunkan suatu badan permusjawaratan jang tetap serta penjusunan pimpinanja jang lengkap, djuga diputuskan beberapa soal diantaranya sebagai tersebut dibawah ini:

Mengenai pembagian harta-pusaka jang di Minangkabau dipandang sangat pintjang itu, diputuskan, bahwa dalam pembagian harta-pusaka jang berasal dari pentjarian simati sewaktu hidupnja, pihak kemenakan hanja diperbolehkan menerima *sepertiga* dari djumlah pusaka tersebut, itupun bila jang meninggal meninggalkan wasiatnja pula.

Sebuah resolusi jang diambil oleh I.P.P.I. Sumatera Tengah pada tanggal 20 Mei 1952, antara lain menuntut agar Pemerintah Pusat harus lebih memperbanjak djumlah sekolah-sekolah vak didaerah ini, dan meminta perhatian para guru terhadap kemerdekaan berorganisasi dikalangan peladjar-peladjar, serta menuntut agar S.M.A. bagian C. di Padang didjadikan mendjadi S.M.A. Pemerintah.

Serikat-serikat Buruh berbagai Kementerian djuga tidak tinggal diam dengan serba-matjam tuntutanja, baik untuk perbaikan

nasib dan kedudukan anggotanja, maupun untuk perbaikan keadaan umum jang termasuk lingkungan urusannja.

Umpamanja Serikat Buruh Kementerian Perburuhan & Sosial Sumatera Tengah, menuntut antara lain agar tundjangan kemahalan bagi buruh-buruh didaerah Bukittinggi jang selama ini dimasukan mendjadi rayon V, haruslah didjadikan sekurangnja mendjadi VII.

Dengan demikian maka teranglah, bahwa perhatian terhadap perbaikan nasib dan kedudukan oleh berbagai lapisan dan golongan rakjat banjak, disalurkan melalui organisasi-organisasi dan partai-partai, terutama diwaktu belakangan, jaitu disaat faedah berpartai sudah mulai terada.

Dan karena sudah meluasnja pengaruh dan paham berpartai di Sumatera Tengah, meskipun „semangat dan djiwa berpartai” itu masih belum mentjapai taraf jang dikehendaki, maka perdjjuangan-perdjjuangan untuk mengisi kursi-kursi didalam Dewan-dewan Perwakilan Daerah terkadang mendjadi „sengit” djuga. Bila orang menindjau grafik anggota-anggota Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah diseluruh kabupaten-kabupaten di Sumatera Tengah maka orang akan mengetahui, bahwa hampir seluruh anggota-anggota itu merupakan „wakil” dari partai-partai jang dianutnja, meskipun terkadang kedudukan mereka itu hanya setjara kebetulan sadja.

Sungguhpun demikian, tidak pernah ada suatu partai jang seluruhnja mewakili rakjat didaerah itu, dan tidak pula pernah ada suatu Dewan Pemerintahan jang seluruh anggotanja terdiri hanya dari anggota satu Partai politik sadja. Dengan demikian maka sesuatu soal jang timbul dan jang harus diselesaikan sendiri oleh daerah-daerah itu, tidaklah pernah menemui ketegangan-ketegangan dan djalan-djalan buntu. Kerdja-sama jang rapat dan erat antara berbagai partai politik itu masih dapat diteruskan didaerah-daerah, meskipun dengan djalan dan tjara jang agak lain.

(Meskipun dipusat pemerintahan (di Djakarta) antara Masjumi dan P.K.I. tidak mungkin akan terudjud kerdja-sama dalam melaksanakan pemerintahan negara, tapi dikabupaten-kabupaten di Sumatera Tengah kerdja-sama antara keduanya bukanlah suatu hal jang menherankan.

Hal inilah jang mendjadi salah satu hal jang menjebakkan dapat terhindarnja segala sesuatu jang akan menimbulkan perpetjahan dikalangan rakjat sendiri.

Kerdja-sama antara semua partai-partai ini akan tetap ada selama tidak adanja suatu gerakan dari luar jang akan merubahnja.

Rakjat tidak pernah mengomel karena suatu partai misalnja: terlalu banjak mempengaruhi djalannja Pemerintahan Daerah karena mereka tahu, bahwa partai jang ketjil djuga ikut-serta melaksanakan program partai jang besar itu.

Mendjelang Pemilihan Umum jang akan dilangsungkan ini, orang sudah sama-sama mempersiapkan diri dan rentjana masing-masing untuk menghadapinja. Pemilihan Umum jang akan datang itu tentu akan disambut dengan „hangat” oleh rakjat di Sumatera Tengah ini.

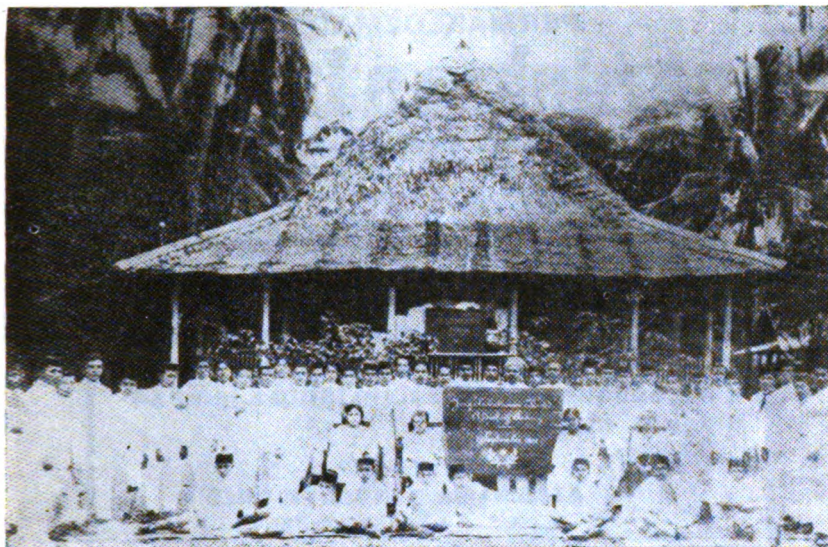
Berdasarkan kepada banjak penduduknja, Sumatera Tengah akan memilih lebih kurang 12 orang anggota Parlemen dan lebih kurang 24 orang anggota Konstituante. Partai-partai politik sudah mempersiapkan djago-djago mereka jang akan mendjadi tjalon untuk kedua matjam perwakilan rakjat itu.

Perkembangan partai-partai politik di Sumatera Tengah sedjak Proklamasi kemerdekaan ini, dapat kita simpulkan dalam beberapa garis perkataan, jaitu:

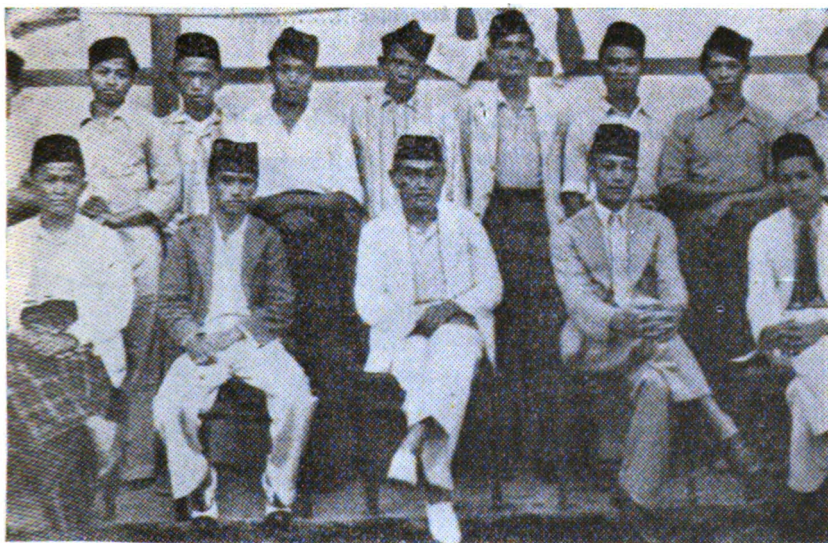
„Dia berkembang menurut iradah dan kekuatan jang ditentukan sendiri oleh masjarakat kepadanja. Meskipun partai-partai itu satu sama lain tidak dapat seajun-langkah dan gerak dalam memberikan bimbingan kepada rakjat, tapi pertentangan-pertentangan jang meruntjing sekian lama dapat dibendungnja. Dalam dan selama menghadapi serangan-serangan tentera Belanda selama clash pertama dan kedua, partai-partai ini dapat menjatukan seluruh tenaga perdjuaan rakjat, dan dengan demikian, maka perlawanan dapat diteruskan meskipun hampir seluruh daerah diduduki oleh tentera musuh.

Pembekuan Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Tengah, tidak menjebabkan partai-partai itu kehilangan lapangan untuk bergerak. Meskipun pada hakekatnja antara beberapa partai terdapat perbedaan taktik dan pendirian, tapi didaerah-daerah otonomi jang lebih ketjil, persatuan dan kerdja-sama antara mereka selalu berdjalan dengan baik.

Demikianlah pandangan sepintas lalu mengenai perkembangan partai-partai politik di Sumatera Tengah semendjak Proklamasi Kemerdekaan.



Gerakan pemuda jang bersedjarah „Jong Sumatranen Bond” tjabang Padang mengadakan rapat pada bulan September 1918. Sesudah rapat, mereka bergambar. J.S.B. ini melahirkan kader-kader gerakan kemerdekaan: al. Bung Hatta.



Dalam menghebatnja Perang Pasifik, rakjat di Sumatera Barat mengusahakan satu demonstrasi, agar Belanda menjerahkan kekuasaan kepada rakjat dan djangan menjerahkan kekuasaan rakjat sebagai inventaris kepada Djepang. Para penggerak, jaitu Chatib Sulaiman dkk. (duduk dibarisan muka kedua dari kanan) ditangkap dan ditawan di Kutatjane (Atjeh). Berdiri dibelakang adalah ex. tentera K.N.I.L. jang mengawal mereka.

PERMAKLOEMAN

Kemerdekaan Indonesia

Mengiklaskan dan mengiklaskan pernyataan Kemerdekaan Indonesia oleh Bangsa Indonesia seperti PROKLAMASI pemimpin2 besar kita Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia seperti berikut:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini, menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal2 jg. mengenai pemindahan kekuasaan dan lain2 diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat singkatnja,

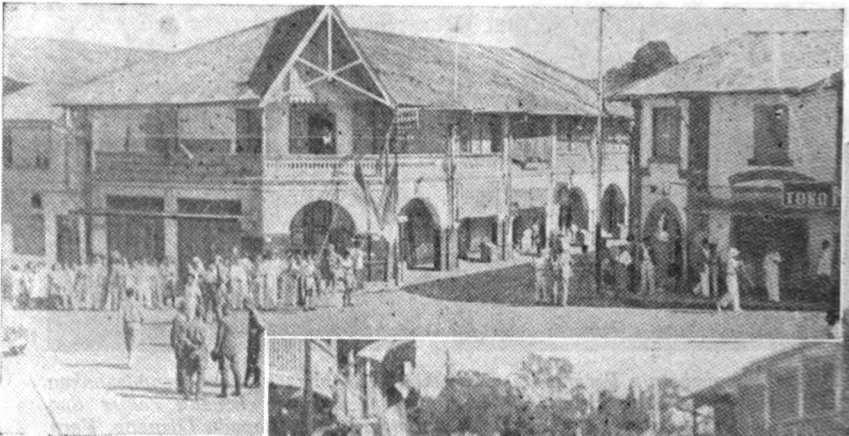
DJAKARTA HARI 17 BULAN 8 TH 1945

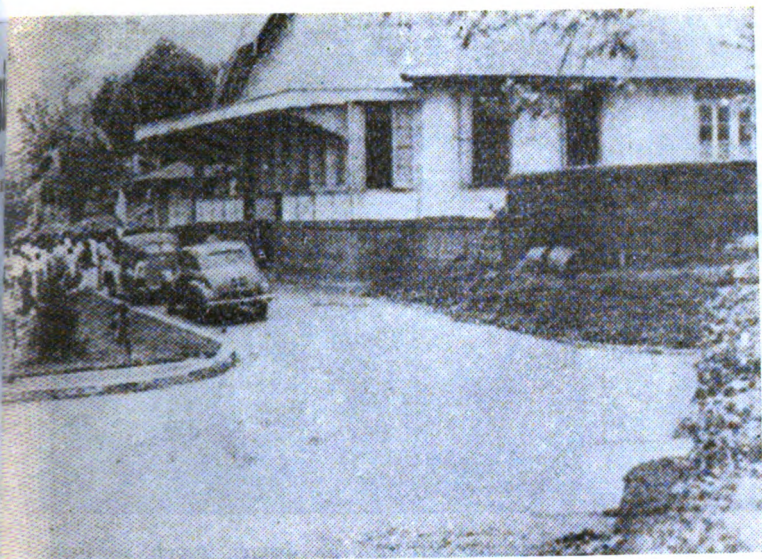
ATAS NAMA BANGSA INDONESIA
Soekarno-Hatta

Maka kami Bangsa Indonesia di Soematera dengan ini mengiklaskan Kemerdekaan Indonesia seperti diiklaskan dalam proklamasi diatas dan mendjendjeng keagungan kedoesa pemimpin Indonesia itoe
Berkas Tjaga hari 29 Bln 8 th 1945
Atas nama Bangsa Indonesia di Soematera
M. Hamid Sjafei

Tanpa komentar!

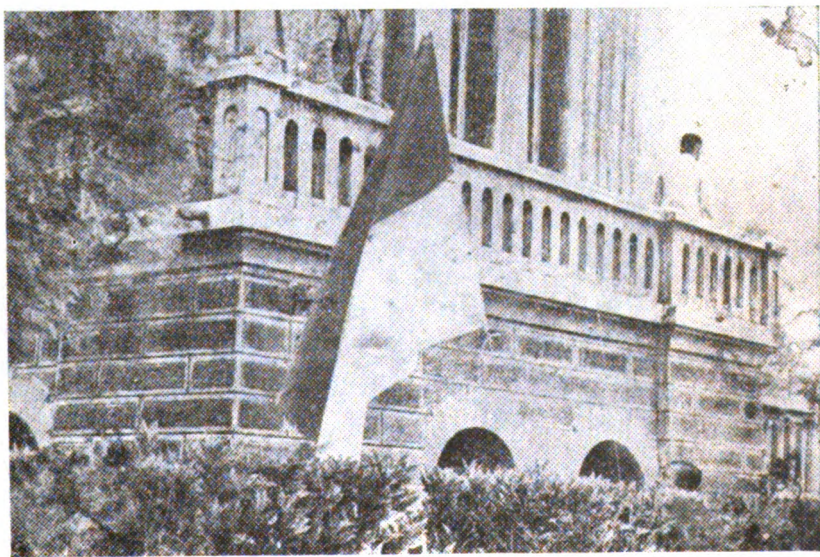
Di Bukittinggi sesudah Proklamasi. Tentera Djepang masih banjak berkeliaran.





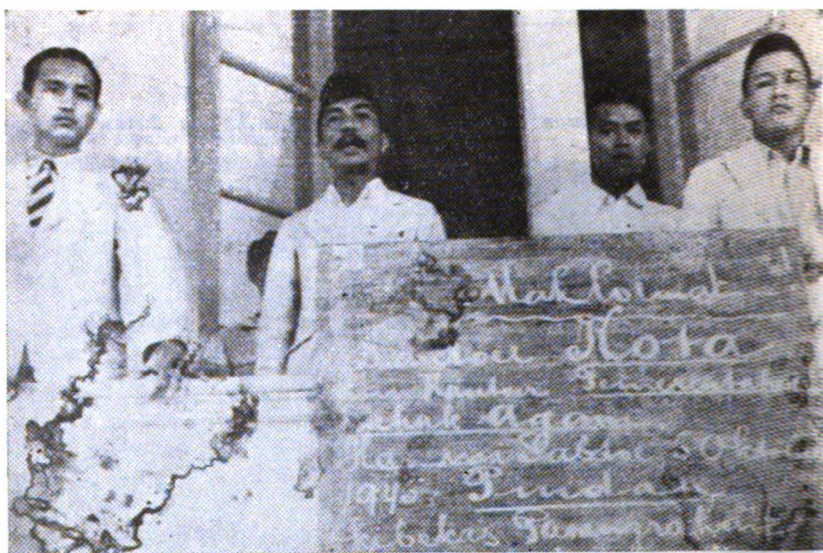
Dimuka gedung Shiyakusho (sekarang Gedung Nasional) rakjat berdesak-desak. Didalam ,pemimpin-pemimpin mereka sedang berunding mendesak Djepang menjerahkan kekuasaan.

Dwi-Warna dinaikkan untuk pertama kalinya diatas Djam-gadang.





Pemuda berbaris-baris dengan penuh semangat. Djembatan dan tembok-tembok diukir dengan kata-kata patriotis "we are free people", kami rakyat merdeka!



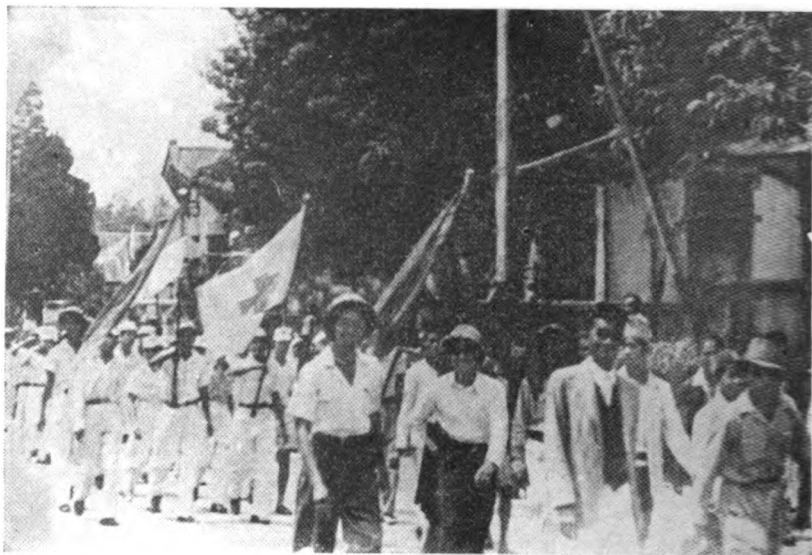
Karena gedung Shiyakusko (Gedung Nasional sekarang) tetap dipertahankan Djepang, maka kantor pemerintahan Kota dan Luhak (Kabupaten) Agam, dipindahkan ke pasanggahan (Balai Kota sekarang). Kiri I. Tedjasukmana wakil Wali Kota, dan kanan St. M. Djosan (sekarang Gubernur Maluku).



Pemandangan pada perajaan Setahun Merdeka di Bukittinggi. Para pemuda djuga berpakaian seragam.



Barisan Tjilik, atau „Tentara Semut”



Latihan Palang Merah terus-menerus digiatkan.



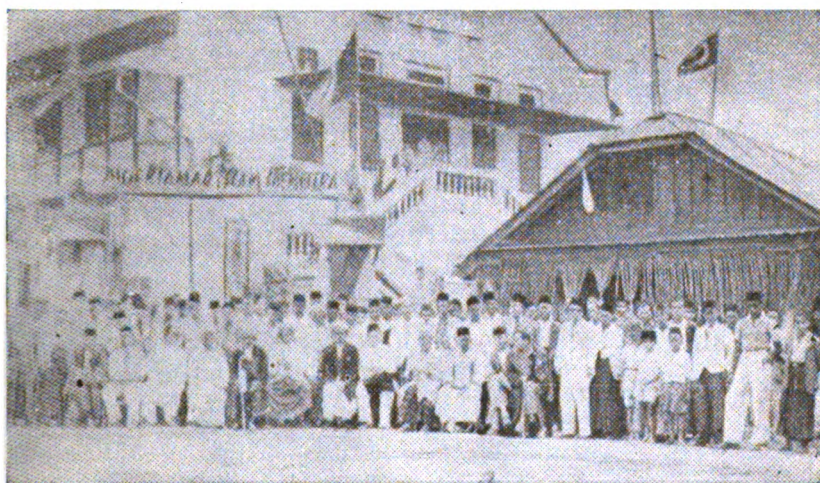
Utusan Pemerintah Pusat datang ke Sumatera Tengah, jaitu almar. Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin (tangan kiri diperban) dan Menteri Penerangan Moh. Natsir. (gambar kanan).





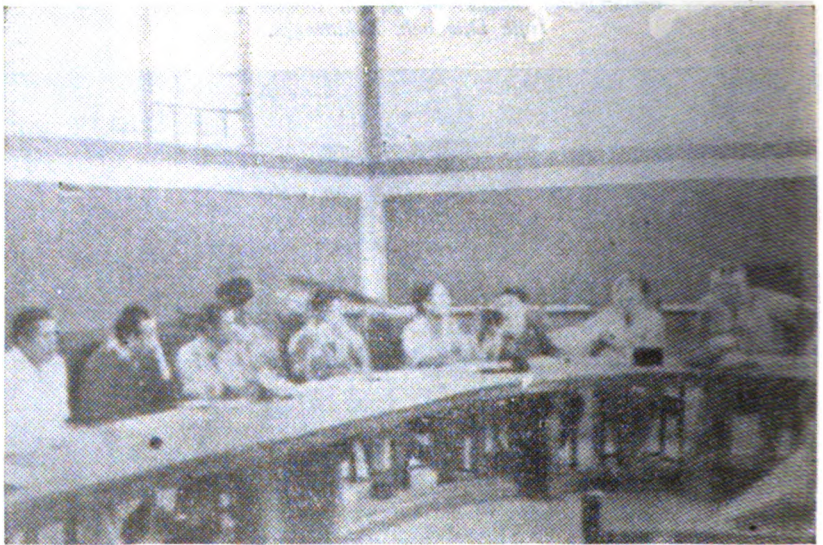
Gubernur Muda Sum.
Tengah Dr. M. Djamil,
jang terkenal dengan
nama djulukan „Pak
Lipat” karena dalam
pidato-pidatonja sering
menjerukan „Kaum
pengchianat lipat
sadja!”

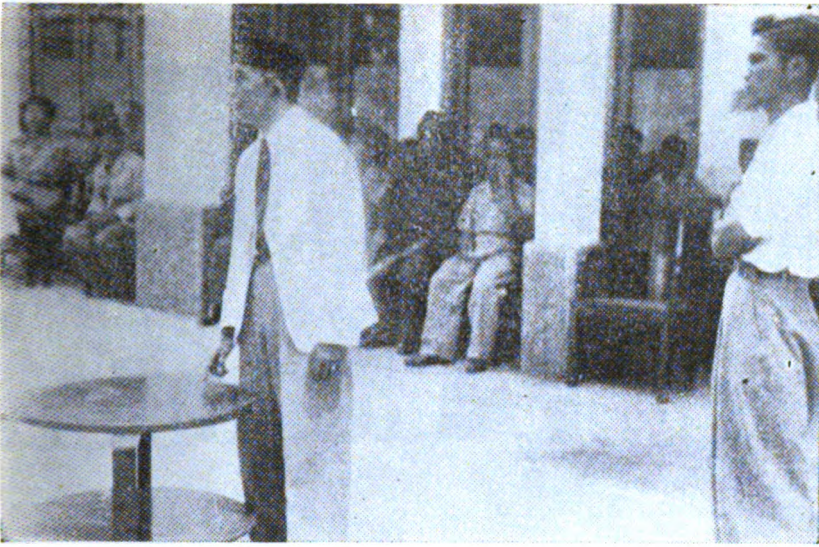
*Kaum Muslimin menjatukan tenaga menghadapi
musuh kemerdekaan. Mukhtar Islam Sumatera
berlangsung dengan mengambil tempat di Surau
Injik Djambek, Bukittinggi.*



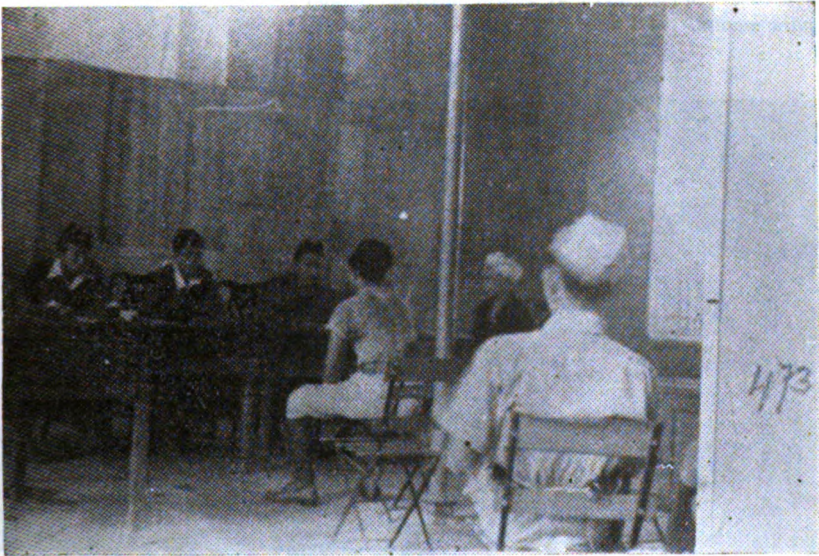


Berunding dan bertempur silih berganti. Berunding di Padang antara Pemerintah kita dan Belanda. Diatas kelihatan Residen Mr. St. M. Rasjid, dan dibawah utusan Pemerintah Pusat Mr Amir Sjarifuddin dan Dr. A. K. Gani dalam perundingan dengan Belanda.

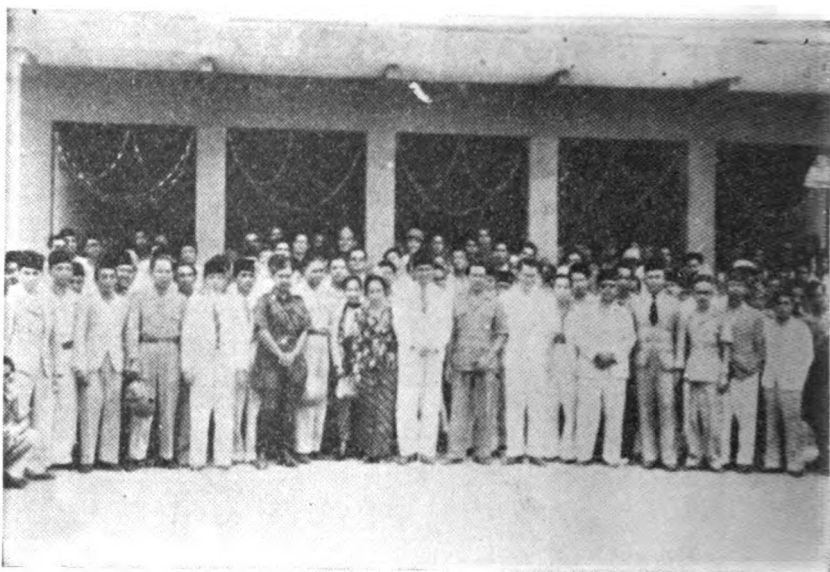




„Selama hajat dikandung badan, pemerintahan de facto N.R.I. dikota Padang akan saja pertahankan!” Demikian ditegaskan oleh Aziz Chan, Wali kota Padang (almar.) kepada pihak Belanda.



Peristiwa 3 Maret dimuka Pengadilan Militer.
 „..... talbisul haq bil bathil”, kata Menteri
 Penerangan Mohd. Natsir.



Utusan Pemerintah Pusat sekali lagi datang ke Sumatera Tengah, terdiri dari Menteri-menteri: Maria, Rum, Sjafruddin, Putuhena. Atas: Para Menteri bergambar dengan Gubernur T.M. Hassan dan Staf. Bawah: Menteri Maria ditengah-tengah para wanita.

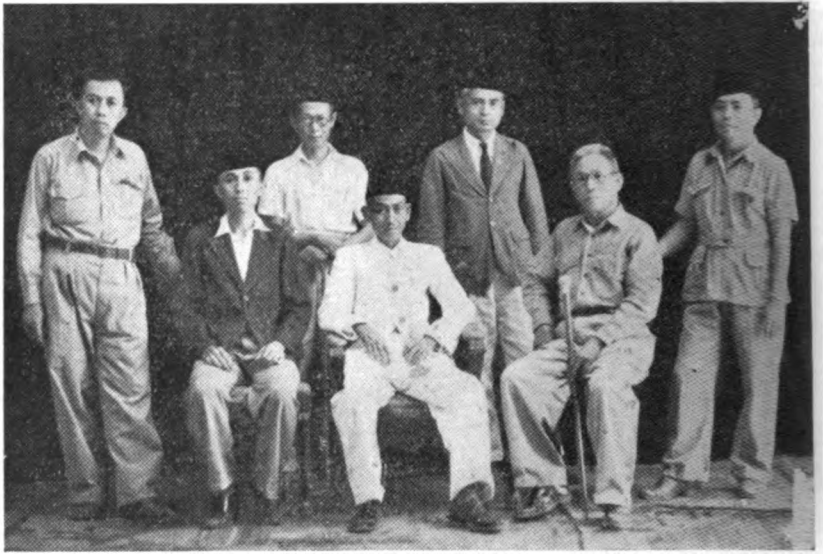




Pak Lengah (Komandan Divisi Banteng Kol. Ismail Lengah) dan pimpinan tentera Belanda sedang merundingkan pelaksanaan Garis gentjatan sendjata Linggardjati.



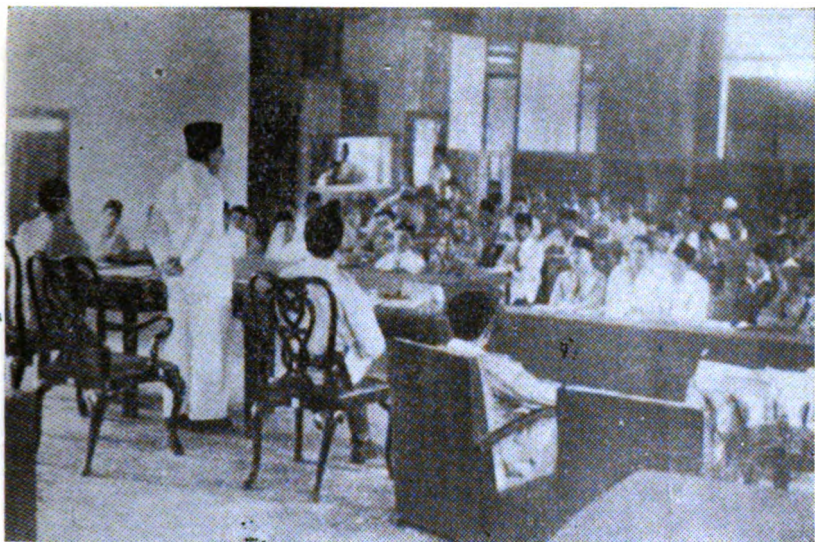
Para Wanita membulatkan tekad menjokong perdjuaan. Badan Pembantu Barisan Muka (B.P.B.M.) berkonperensi, dan sesudah Konperensi namanja diganti menjadi B.P.K.K.P. (Badan Pembantu Keluarga Korban Perang).



Perjuangan di Djambi memuntjak dengan pimpinan pemerintah keresidenan Djambi. Pada gambar diatas kelihatan Residen Djambi R. Inukertapati almar. (duduk ditengah) bersama staf pemerintahan keresidenan Djambi. Berdiri nomor dua dari kiri Pak Sjarnubi, sekarang anggota D.P.D.S. Sum. Tengah.



Peringatan 2 tahun kemerdekaan (17 Agustus 1947) beriring dengan Hari Raja Idulfitri 1366. Kedua hari besar ini dirajakan dengan meriah.



Beberapa hari sebelum agresi pertama (21 Djuli 1947) Pak Hatta tiba di Sumatera Tengah. Segera beliau bertindak memperteguh tenaga perdjuaan.



Pak Wali Negeri dan Staf, dasar kekuatan perdjuaan kita.



*Pertempuran bergedjolak di Padang area, Rakjat me-
ngungsi ke Padang Darat. Disambut oleh Panitia.*



*Penderitaan pengungsi memuntjak akibat agresi Be-
landa. Gerbong kereta api dijadikan tempat diam.*

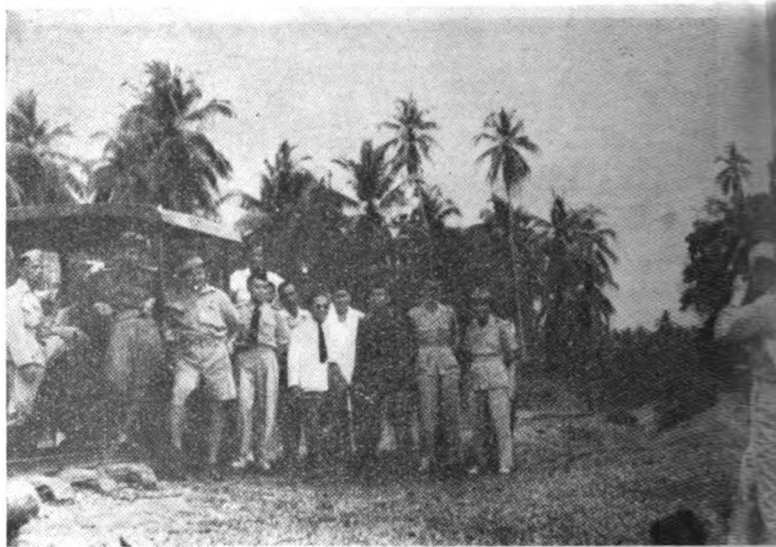


Pak Hatta mengundungi koresidenan Riau.

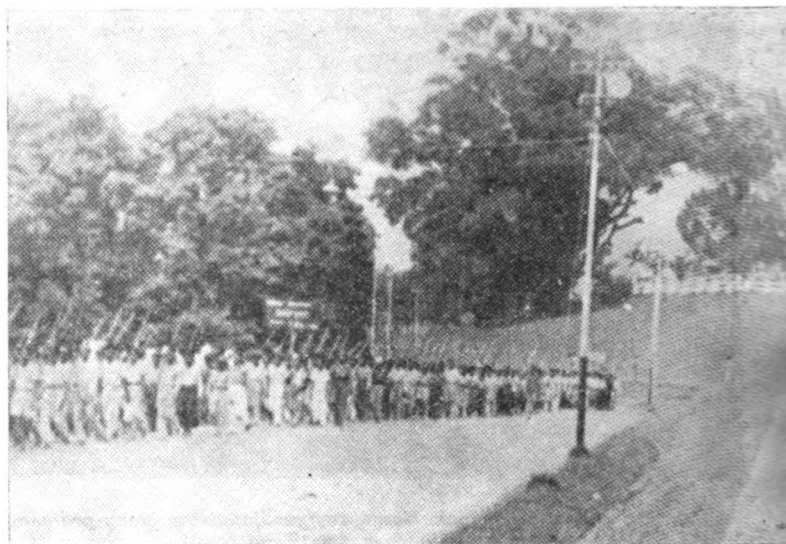


Gubernur Hassan dan pak Surio mengundungi pedjuang-pedjuang didaerah Sumatera Tengah.

Komisi Tiga Negara (K.T.N.) meninjau Sumatera Tengah. Kedatangan rombongan ini disambut oleh Gubernur Nasrun dan pembesar-pembesar tentara.



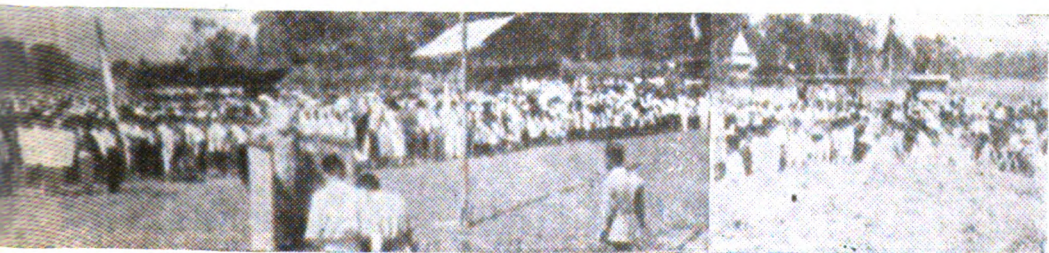
Ketika K.T.N. berada di Bukittinggi. B.P.N.K. mengadakan pawai besar-besaran, untuk menegaskan hasrat rakyat membela kemerdekaan.





*Renville mentjiptakan
Demarkasi Takih, Re-
siden Mr. St. M. Rasjid
dan staf menudju keda-
erah Belanda untuk me-
rundingkan garis de-
markasi.*

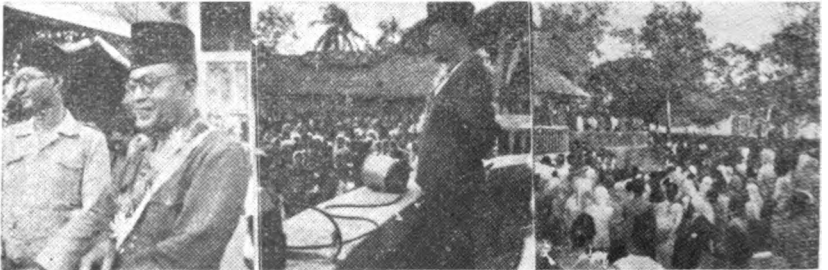
*Pemandangan pada salah satu rapat K.N.I.
Sumatera Barat, motor perdjungan
didaerahnja*



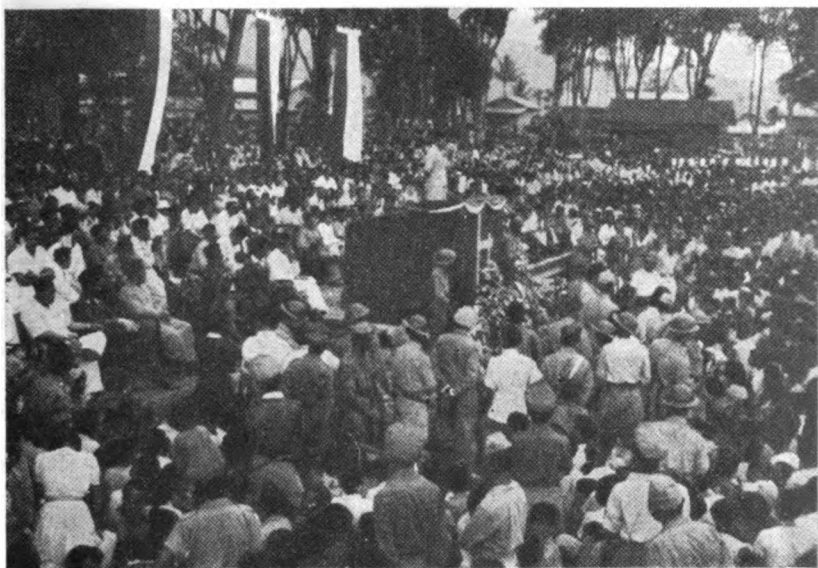


Suatu rapat Samudera dikota Djambi, dimana Pak Hatta menggembleng semangat rakjat.

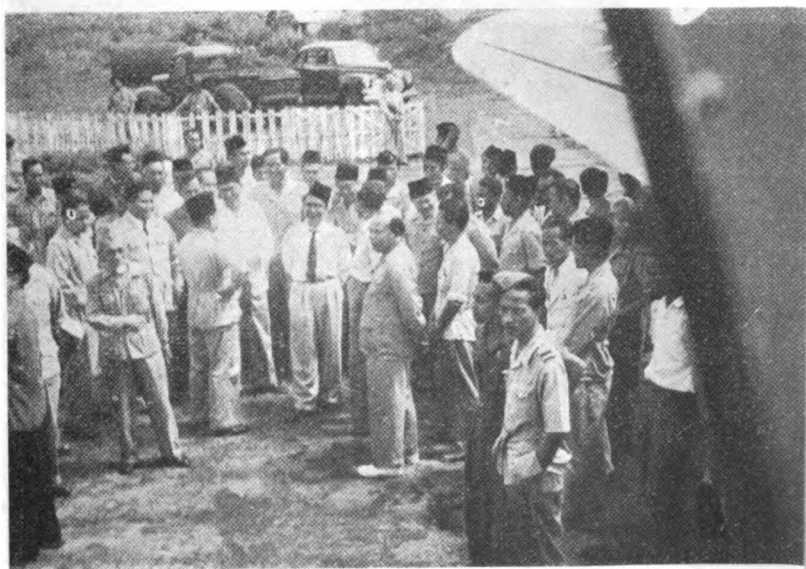
Pak Hatta dan Gubernur Hassan di-berbagai dactrah dikeresidenan Djambi.

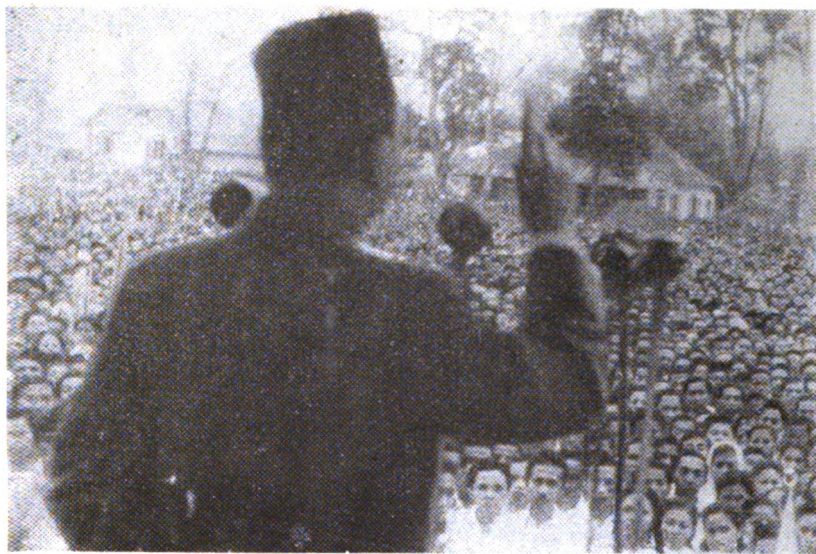


Pak Hatta datang kembali ke Sumatera Tengah disambut dengan rapat Samudera di lapangan Kantin Bukit tinggi.



Pak Hatta didjemput oleh H. A. Salim (alm). Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, dan beliau berangkat ke Djawa.





Djuni 1948. Presiden Sukarno datang buat pertamanya kalinja ke Sumatera Tengah dan di sambut dengan rapsam Samudera.



Belanda melantjarkan agresi kedua. Lubuk Sikaping diserang dari udara.

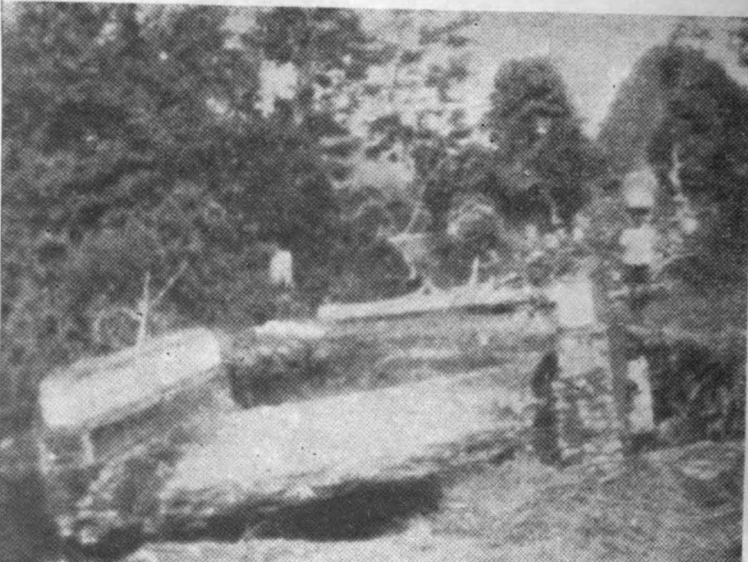
Bukittinggi diduduki Belanda dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Koto Tinggi. Gubernur Militer Sumatera Tengah dan anggota kabinet P.D.R.I., Mr. St. Rasjid dimuka tempat kediamannya di waktu darurat. Kemudian Mr. Sjafruddin Prawiranegara (Ketua P.D.R.I.) dan para anggota kabinet juga bertempat di Koto Tinggi.



Gubernur Militer dan Staf sedang berunding.



Djalan-djalan diruntuhkan agar kendaraan musuh tak dapat lalu.



Djembatan juga diruntuhkan, sehingga iringan kendaraan musuh terhambat dan lalu lintas rakyat tak terhalang.

*Pohon jang ditepi-tepi
djalan ditebang dan di-
belintangkan untuk
memblokade musuh.*



*Dan muntjullah djala
djalan darurat ditempe
tempat jang sepi.*



KORBAN-KORBAN KEGANASAN TENTERA BELAN





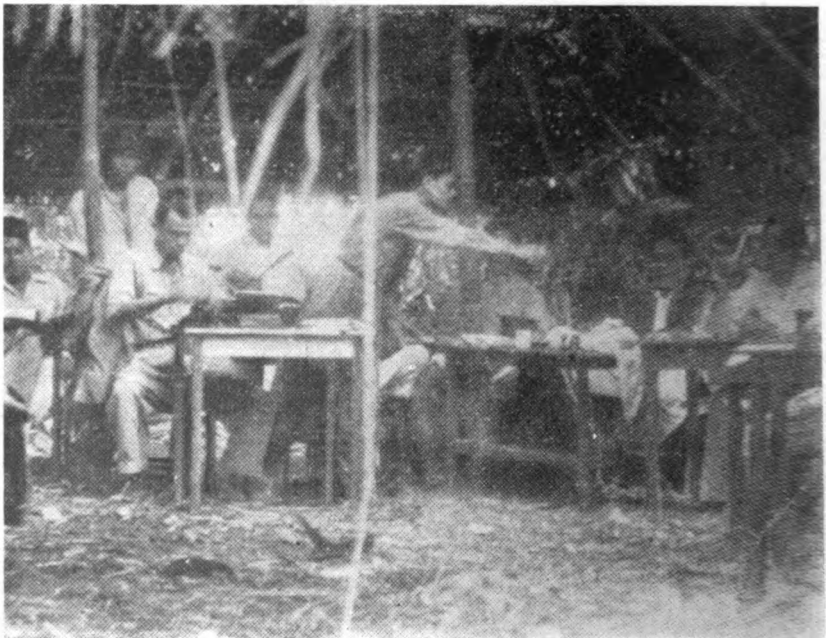
Para wanita mendjamin perbekalan perdjungan.



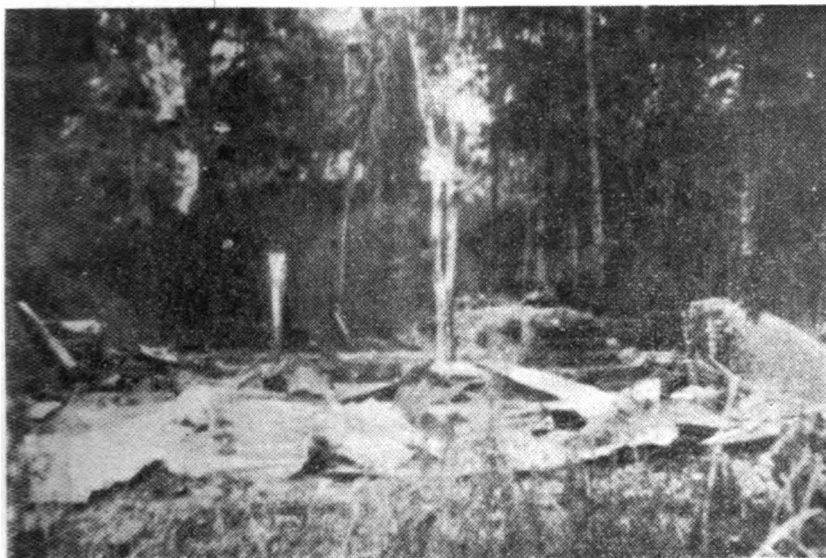
Pekan-pekan ketjil didirikan ditempat tersembunji, tempat rakjat berdjual-beli. Itupun sering benar diganggu oleh patroli Belanda.



*Walaupun dalam perang, kesehatan rakyat tetap dipelihara.
Pentjatjaran dilakukan dengan teratur.*



Dan tata usaha pemerintahan tetap diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.



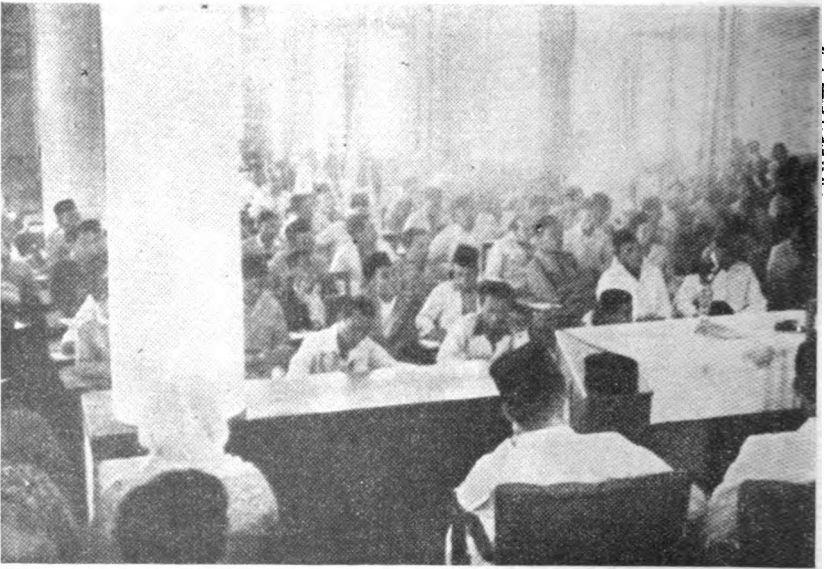
Bakar, bunuh, rampok, trilogie tentera kolonial.



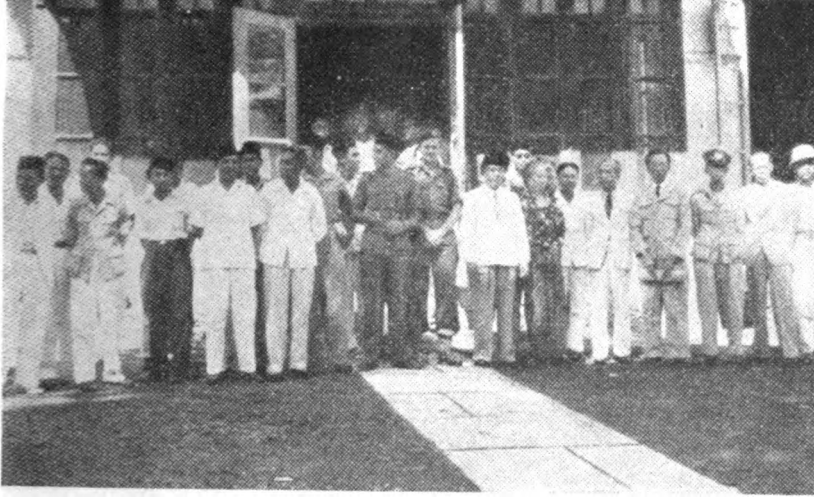
Kantor Wali Negeri Lawang III Balai di mortir dari Bukittinggi.



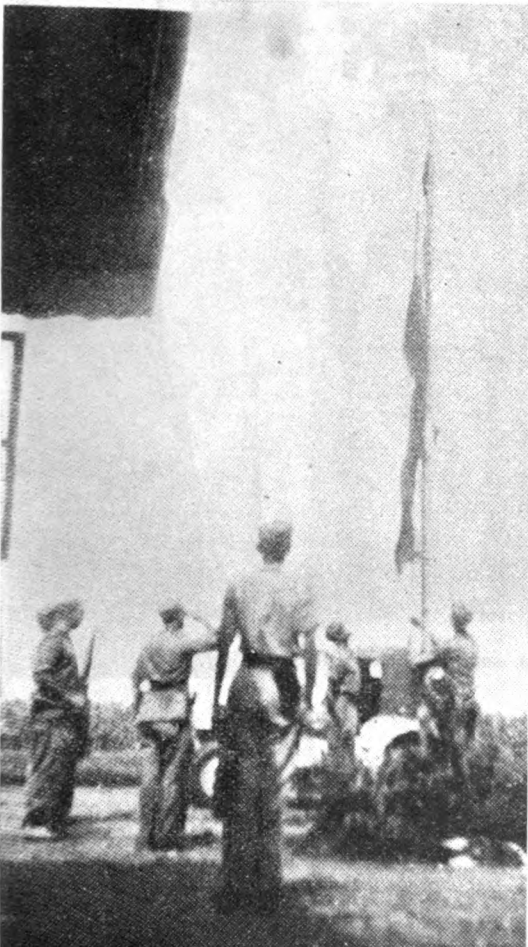
Suasana gembira diantara anggota gerilja.



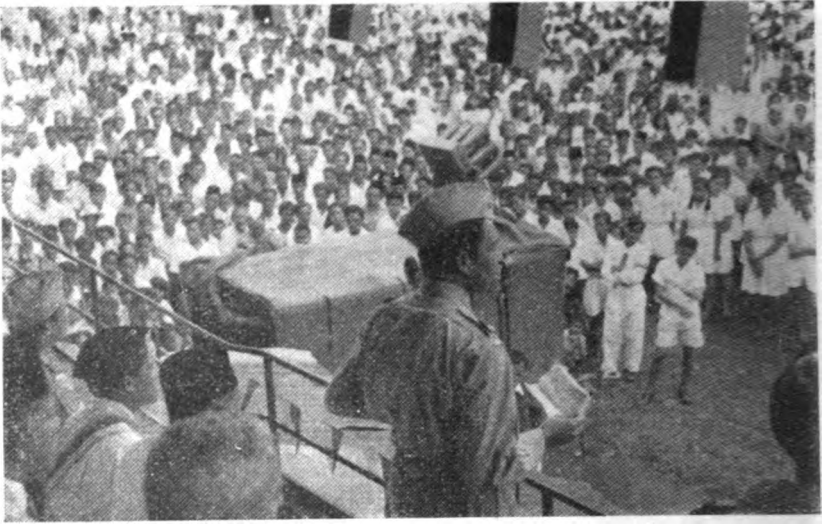
17 Agustus 1949 diperingati dengan meriah.



Zaman pemulihan tiba. Timbang-terima dilakukan dengan pihak Belanda. Sesudah itu Gubernur Mr. Nasrun dan Let. Kol. Dahlan Djambek bergambar bersama pimpinan tentara Belanda



dan sitiga-warna diturunkan dari puntjak tiang.



Let. Kol. Dahlan Djambek Komandan Brigade Banteng berpidato



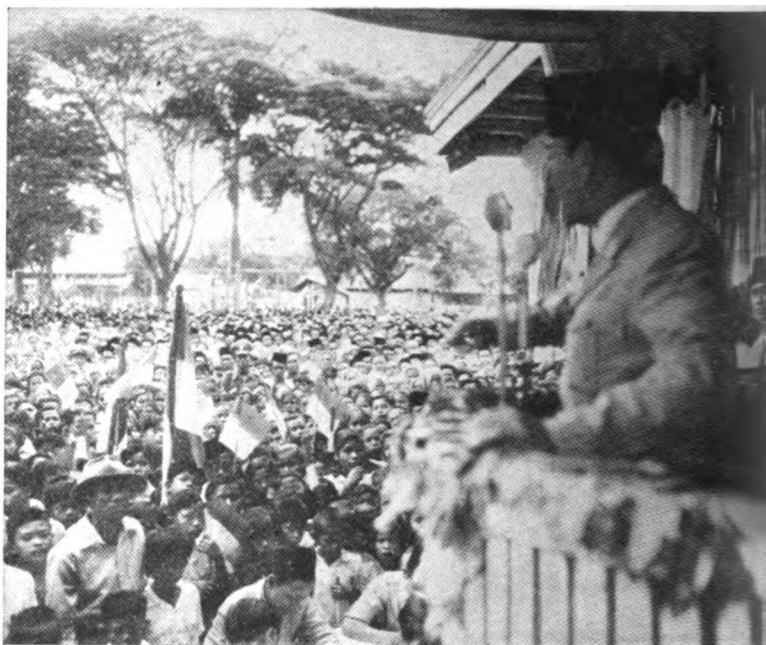
Residen Bachsan dari Djambi dengan Staf.



D.P.R.S.T. bersidang sesudah pemulihan.



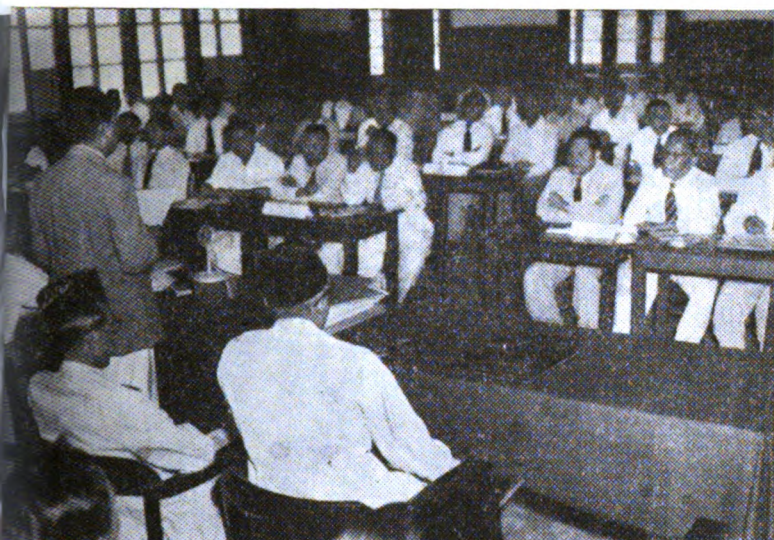
Sesudah perang, rakjat terkenang akan nasib. Demonstrasi di Bukittinggi.



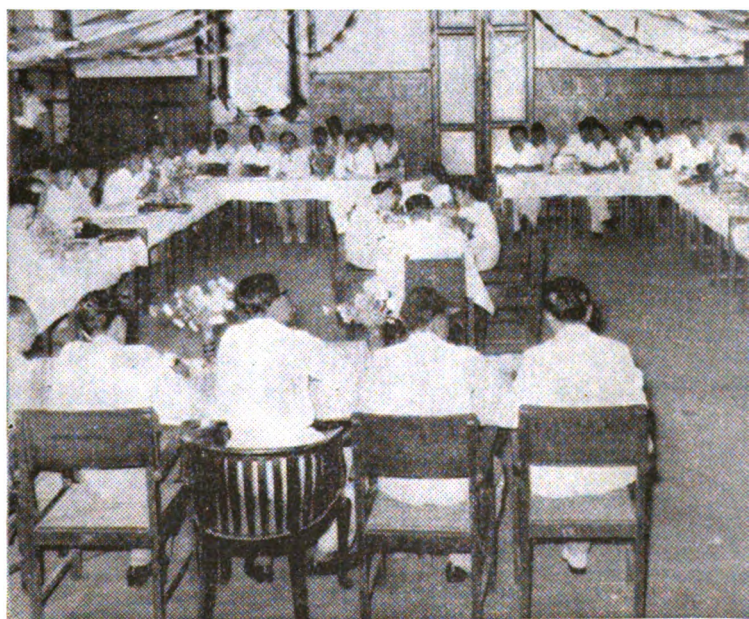
*Presiden Sukarno dalam
suatu rapat Samudera.*



*Pak Hatta datang ke
P.S.K.*



Sidang D.P.R.S.T. jang beriwajat, dimana diterima mosi tak pertjaja terhadap Gubernur Nasrun.

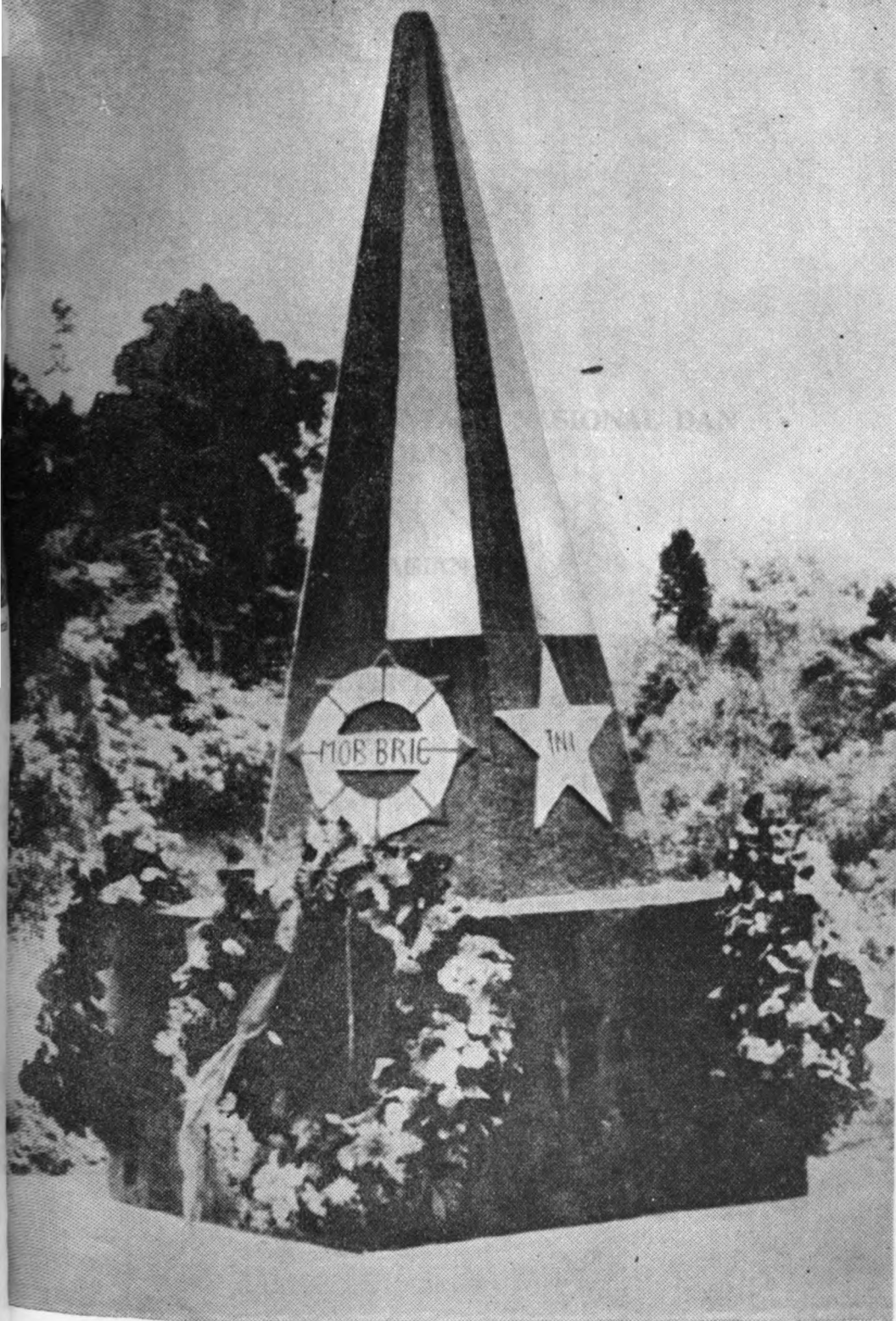




Koto Tinggi maskas PDRI, dikundungi oleh Pemerintah Sumatera Tengah.



Korban Peristiwa Situdjuh (L. Kota) diperingati dimuka mesdjid Pahlawan.



Tugu Mobrig dan T.N.I. di Pelupuh, Bondjol, Sumatera Tengah sebagai tanda peringatan perlawanan Mobrig bersama-sama T.N.I. terhadap tentera Belanda, pertahanan mana merupakan blokade jang berat bagi tentera Belanda jang menyerbu ke Sumatera Tengah.

BAB 2

PERKEMBANGAN TENTARA NASIONAL DAN KEPOLISIAN

BAHAGIAN IV

KETENTARAAN

Pasal 14.

DJIWA PERDJUANGAN DASAR TENTERA.

UNTUK menguraikan riwayat kebangunan dan perkembangan ketentaraan di Sumatera Tengah, kita harus mendahuluija dengan riwayat kebangunan semangat perdjjuangan pedjuang-pedjuang kemerdekaan kita, jang mendjadi pegangan semangat ketentaraan jang dibangunkan di Sumatera Tengah dizaman kemerdekaan. Untuk mendjelaskan ini, maka bagi masa kebangunan semangat perdjjuangan dari pedjuang-pedjuang bangsa itu sebelum T.N.I. terbentuk dalam tiga masa jaitu :

1. Masa dalam pendjadjahan Belanda.
2. Masa dalam pendjadjahan Djepang.
3. Masa Proklamasi.

**Dalam masa pendjadjahan Belanda,
di Sumatera Tengah, bergelora djiwa perdjjuangan :**

Walaupun pemerintah Nederlandsch Indië dalam tenteranja banjak memakai bangsa Indonesia, tetapi pemuda-pemuda Sumatera Tengah djarang sekali diterima, karena dipandang ongeschikt untuk didjadikan tentera kolonial, demikianlah pendapat pemerintah pendjadjahan Belanda.

Pada umumnja kita lihat didalam sedjarah perdjjuangan rakjat di Sumatera Tengah dizaman pendjadjahan Belanda, baikpun dizaman radja-radja dahulu kala, alat diplomasi lebih banjak dipakai, dibanding dengan alat sendjata dalam pertempuran langsung. Ingatlah riwayat Minangkabau menghadapi kedatangan Aditiawarman, dari riwayat mana didapat nama Menang-Kerbau begitu pula dalam menghadapi kemasukan pendjadjah Belanda dan sebagainya. Sering pula kita menderita kekalahan, karena musuh berkeras dengan sendjatanja.

Sedapat-dapatnja segala ragam ichtiar diplomasi didjalankan untuk menolak pemerintahan djadjahan itu, tapi achirnja tak mempan djuga karena sendjata Belanda jang terachir jaitu „pelor”

memaksa lahirnja „Pelakat Pandjang” jang tak pernah didjalkan buat keradjaan Minangkabau, dan pelakat-pelakat pendek buat keradjaan-keradjaan Siak Sri Inderapura, Inderagiri, dan Djambi.

Dalam suasana tekanan-tekanan pemerintah djadjahan Belanda itu, masih tetaplah berkobar didjantung rakjat semangat anti Belanda, dan djiwa perdjjuangan tetap bersemi menanti kesempatan menepatkan „pukulan” kembali.

PERDJUANGAN JANG „PATAH” TAK MEMADAMKAN API PERDJUANGAN

„Pukulan” kembali dari rakjat itu mendjelma berupa „pemberontakan-pemberontakan” terhadap pemerintah Belanda, diantaranya sebagai jang tersebut dibawah ini:

1. Perang Padri Sumatera Barat tahun 1821-1837.
2. Perang Djambi I tahun 1858.
3. Perang Djambi II tahun 1901-1907 dan tahun 1917.
4. Perang belasting dibeberapa tempat di Sumatera Barat, dan berpusat di Kamang tahun 1908.
5. Pemberontakan P.K.I. di Silungkang dan tiap-tiap pelosok tahun 1926.

Pemberontakan-pemberontakan demikian itu dengan mudah dapat dipatahkan oleh pendjajah Belanda, karena hanja berlaku setempat-setempat tidak setjara perlawanan total atau serentak.

Sungguhpun demikian djiwa perdjjuangan tidak pernah padam. melainkan terus hidup ibarat api dalam sekam. Ia mendjelma kealiran lain, kelapangan jang lebih legaal dimasa itu, jaitu kelapangan pergerakan politik, ekonomi dan sosial.

Demikianlah pedjuang-pedjuang bangsa, jang pada ketika itu biasa disebut „orang-orang pergerakan” langsung memimpin organisasi-organisasi politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Djuga mereka berdjjuang dilapangan persurat-kabaran. Pada umumnja mereka tidak bekerdja sama dengan pemerintah djadjahan.

Aksi Kontra Reaksi.

Tiap-tiap aksi dari orang-orang pergerakan itu walaupun dilaksanakan setjara legaal menurut undang-undang pemerintah djadjahan pada ketika itu, namun selalu sadja ada reaksinja, berupa halangan dan rintangan, jang sumbernja dari Pemerintah djadjahan Belanda itu sendiri. Berbagai akal dan siasat didjalkannja untuk sebisa-bisanja membasmi „orang-orang pergerakan” itu.

Muslihat dipakai pula oleh orang „orang-orang pergerakan” untuk mempertahankan gerakannja. Dengan begitu, dapatlah

dipastikan, bahwa orang-orang pergerakan di Sumatera Tengah itu sudah banyak menempuh latihan berdjuaang setjara „halus” Sungguhpun demikian tidak sedikit pula diantara mereka jang terdjebak oleh djaring pendjadjah Belanda, sehingga meringkuk dipembuangan dan dipendjara.

Diwaktu dimadjukan Petisi Sutardjo di Volksraad, tentang hak milisi supaja diberikan kepada rakjat Indonesia, maka petisi ini disambut dengan baik oleh orang-orang pergerakan di Sumatera Tengah. Mereka mengharap, semoga pemuda-pemuda di Sumatera Tengah mendapat „kepandaian” berperang setjara ketenteraan jang sebenarnja, dan dengan begitu semangat merdeka dapat dipimpin dikemudian hari untuk menghadapi pendjadjah. Rupanja maksud isi hati jang terpendam demikian itu dimaklumi djuga oleh Belanda, sehingga hak milisi tersebut tidaklah diberikannja.

Keinginan mereka untuk mempunyai pemuda-pemuda jang berkepandaian tentera dan berdisiplin ketenteraan dialirkan kepada gerakan kepanduan, sehingga ditahun-tahun 1930—'35 sebagai tjendawan tumbuh meluaslah gerakan kepanduan diseluruh Sumatera Tengah dibawah pimpinan orang-orang pergerakan.

Tindakan Belanda Jang Terlambat.

Disaat Djepang telah mulai mendjatuhkan pukulannja terhadap Hindia Belanda pada achir tahun 1941 dan awal tahun 1942, terasalah oleh pendjadjah Belanda kelemahannja, dan dengan setjara terburu-buru ia membentuk barisan-barisan L.B.D., Stadswacht dan Roode Kruis. Latihan-latihan jang bersifat ketenteraan itu diberikan hanja terbatas pula untuk pegawai-pegawai dan untuk orang-orang jang dianggapnja tidak berbahaya buat kekuasaannja.

Itulah latihan-latihan jang mirip dengan latihan ketenteraan, jang pertama kalinja diterima oleh sebagian sangat ketjil sekali pemuda-pemuda Sumatera Tengah.

Sungguhpun demikian, bandjir serangan Djepang taklah bisa ditangkis oleh angkatan perang Hindia Belanda, dan tgl 17 Maret 1942 masuklah tentera Djepang di Padang dan pada tgl 23 Maret 1942 hantjurlah kekuasaan Belanda diseluruh Sumatera Tengah dan pulau Sumatera.

Pada awal tahun 1942 sebelum Belanda menjerah pada tentera Djepang, dengan dipelopori oleh almarhum Chatib Suleiman cs. diadakan gerakan rahasia berpusat di Padangpandjang jang maksudnja mempertjepat kehantjuran pendjadjah Belanda.

Djepang mempropagandakan bahwa kedatangannja disini ialah untuk memerdekakan rakjat dari djadjahan bangsa Barat itu. Ini mendapat sambutan hangat dari orang-orang pergerakan kita, dan dimana-mana mereka mengadakan badan-badan penjambutan tentera Dai Nippon, terkenal pada masa itu gerakan letter F.

Pada saat peralihan itu, orang-orang perjuang kita yang sungguh-sungguh tak bisa menahan nafsu kebentjiaan dan dendamnya kepada pemerintah djadjahan Belanda, lalu disamping ikut aktif serta mengusir Belanda, djuga aktif menentang orang-orang yang selama ini giat menjadi kaki tangan Belanda.

Harapan Jang Ketjewa.

Pada waktu itu **Ir. Sukarno** sebagai orang buangan, ditinggalkan Belanda di Padang. Atas andjuran beliau, untuk mendjaga keamanan rakjat, dimana-mana didirikanja **Komite-komite Rakjat**.

Komite-komite Rakjat ini berdiri beberapa minggu sadja, dipimpin oleh orang-orang pergerakan yang dalam tugasnya sehari-hari seakan-akan sudah dapat mengetjap suasana pemerintahan yang merdeka dari tindasan pendjadjahan. Bendera Sang Saka Merah Putih berkibar buat pertama kalinya diseluruh Sumatera Tengah, tapi hanja beberapa hari sadja.

Harapan penuh dari para pedjuang pada permulaannya itu, bahwa segera tjita-tjitanya selama ini akan tertjapai, jaitu kemerdekaan, kedjajaan dan kemakmuran rakjat, berganti dengan ketjemasan, karena Djepang segera memperlihatkan warnanya yang sebenarnya. Djauh berbeda dibanding dengan apa yang pernah dipropagandakannya, Pemerintah Militer Djepang lebih pahit lagi keadaannya buat rakjat, dibanding dengan pemerintah djadjahan Belanda. Kelaliman-kelaliman Djepang tidak bisa ditentang sama sekali dengan djalan terus terang.

Perjuangan yang bahaja menghadapi Djepang terpaksa dilaksanakan dengan taktik yang selitjin-litjinnya.

Dengan meng„ia"kan politiknya, kita memadjukan pula „taktik" kita, yang terutama ditujukan kepada:

1. menghindarkan diri sebanyak-banyaknya dari kekedjamaan-kekedjamaan pemerintahan Militer Djepang.
2. menjuburkan bibit tjita-tjita kemerdekaan kita.
3. menambah keahlian pemuda-pemuda kita dalam ilmu ketenteraan.

Taktik litjin ini dikendalikan oleh almarhum Chatib Suleiman cs. dengan seluruh pemuka-pemuka pedjuang bangsa, bersatu dibelakangnya.

Dasar Kepandaian Tentera Mulai Diperoleh.

Pada mulanja Pemerintah Militer Djepang mengandjurkan agar pemuda-pemuda Sumatera Tengah memasuki **Hei Ho**. Andjuran ini dituruti, tapi agak sendat djalannya, karena ternjata, bahwa

„Hei Ho” ini tak berapa berbeda dengan Romusha, dan hanya menguntungkan Djepang sadja.

Sebab itu para pemimpin mengandjurkan kepada Djepang supaya diadakan tentera rakjat yang langsung dipimpin, dilambuk dan disusun oleh rakjat sendiri. Usul ini mendapat sambutan baik dari Pemerintah Militer Djepang. Sebagai pelatih tentera rakjat ini adalah opsir-opsir Djepang sendiri.

Demikianlah pada waktu telah dekat awal tahun 1943, tentara rakjat ini dibentuk dengan diberi nama Gyu Gun, atau Lasjkar Rakjat. Selain itu tak kurang pula pentingnja, latihan-latihan ketenteraan yang diperoleh oleh pemuda-pemuda yang mengikuti sekolah administrasi dan pamongpradja di B. Sangkar, dan latihan pemuda dalam organisasi Sei Nen Dan dan Bo Go Dan.

Lalu Pendjahit Lalu Kelindan.

Maka dimulailah latihan para opsir dan tentera Gyu Gun. Disetiap kewedanaan diseluruh daerah S. Barat berdirilah Badan Pengurus Gyu Gun, Lasjkar Rakjat. Disetiap Kabupaten dan kota didirikan tempat-tempat latihan Gyu Gun. Kantor untuk menjelenggarakan dan memupuk Gyu Gun (**Lasjkar Rakjat**) ini diberi nama Gyu Gun Ko En Kai, yang setelah berdirinja Hoko Kai S. Barat, menjadi sebagian dari Hoko Kai ini dengan nama Gyu Gun Ko En Bu.

Pusat Badan ini di Padang dibawah pimpinan alm. Chatib Suleiman. Sajap kiri dari Gyu Gun Ko En Bu ini diberi nama Ha Ha No Kai. (**Perkumpulan Wanita**) Dalam Gyu Gun Ko En Bu dan Ha Ha No Kai inilah berhimpun sebagian besar pemimpin-pemimpin rakjat di Sumatera Tengah pada waktu itu.

Diseluruh daerah diadakan penerangan pembentukan Lasjkar Rakjat ini, dengan menondjolkan kemuka tjita-tjita bangsa kita selama ini, jaitu suatu ketenteraan untuk menuju kemerdekaan Nusa dan Bangsa dari tindakan bangsa Barat.

Pun didaerah keresidenan, Riau dan Djambi, latihan ketenteraan dalam Gyu Gun ini, juga dihebatkan.

Ada kira-kira 44.000 pemuda-pemuda dari seluruh pelosok Sum. Tengah mendaftarkan namanja untuk ikut latihan Gyu Gun. Antara tahun 1943 sampai tahun 1945 inilah masa dan kesempatan yang dipakai oleh pemimpin-pemimpin Sumatera Tengah dengan sebaik-baiknya untuk melatih pemuda-pemuda kita sehebat mungkin dalam pengetahuan dan ketjakapan ketenteraan. Latihan-latihan technis ketenteraan diberikan oleh opsir-opsir Djepang, sedang latihan semangat ketenteraan untuk perjuangan nasional,

oleh para pemimpin kita dengan kedok anti Barat dan membantu usaha perang Djepang.

Berhubung dengan adanya pembatasan penerimaan anggota Lasjkar Rakjat ini, maka supaya latihan **ketentaraan ini** DAPAT merata diterima oleh seluruh pemuda, pemimpin-pemimpin kitapun mengandjurkan didirikannya badan-badan lain, dimana pemuda-pemuda kita yang tidak masuk Lasjkar Rakjat itu beroleh kesempatan pula berlatih menurut disiplin ketenteraan. Demikianlah berdiri **Zi Kei Dan** dan **Bo Go Dan** dikampung-kampung dan dikotakota, yang bertugas mendjaga keamanan dikampung masing-masing.

Sebagian barisan belakang dari Gyu Gun, diadakan pula gerakan pemuda angkatan baru, bernama Sei Nen Dan. Semua pengikut organisasi-organisasi mendapat latihan ketenteraan yang pada umumnya diberikan oleh opsir-opsir Lasjkar Rakjat kita sendiri, dan disamping itu sebagai sesuatu yang diutamakan, diberikan latihan rohani bersemangat nasional, dipimpin oleh pemuka-pemuka bangsa kita. Pusat latihan Sei Nen Dan ini ialah di Pelabuhan dilapangan perguruan I.N.S. Kaju Tanam.

Oleh sebab itu, seluruh kaum bapak dan kaum ibu, demikianpun pemuda dan pemudi, pada masa achir pendudukan Djepang itu sudah bersemangat „bertempur” yang djiwanja tidak lepas dari sifat Nasional, untuk kebahagiaan Nusa dan Bangsa Indonesia dikemudian hari.

Tak dapat disangkal lagi, bahwa Gyu Gun atau Lasjkar Rakjat dengan segala organisasi-organisasi yang ada disampingnya itulah yang mendjadi inti dari „pemuda-pemuda 17 Agustus 1945”. Demikianlah persiapan latihan ketenteraan didalam masa pendudukan Djepang.

Bertepatan dengan tanggal menjerah kekuasaan tentera Djepang tanggal 14 Agustus 1945 di Teluk Tokio, maka selesailah pula Djepang melutjuti segala sendjata Gyu Gun dan mereka dilepas kembali dengan begitu sadja kedalam masyarakat.

Modal Hanja Semangat Bekerdja.

Tanggal 17 Agustus 1945 diterimalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan perantaraan pegawai-pegawai P.T.T. dan Domei. Dimana sadja ada station radiotelegrafie dari P.T.T. seperti di Padang, Bukittinggi, Pakanbaru, Tembilahan dan Selat Pandjang, dapatlah ditangkap siaran proklamasi itu. Berita Proklamasi ini diterima dengan perasaan penuh harapan, tetapi dalam suasana yang diliputi kebingungan.

Pemerintah Militer Djepang kelihatannya masih berkuasa penuh, lengkap dengan alat sendjatanja. Sedangkan pemuda kita terutama golongan Gyu Gun, satu-satunya golongan yang diharapkan untuk mempertahankan proklamasi itu tidak bersendjata lagi sama

sekali. Satu-satunya senjata lagi hanyalah semangat tidak suka didjadjah kembali oleh bangsa apa djuapun. Adanja proklamasi itu, menambah besarnya semangat merdeka itu.

Tapi apa jang hendak dibuat? Tindakan apa jang mesti didjalkan?

Pemuda-pemuda Bertindak.

Dalam saat pendapat rakjat terpetjah-petjah demikian itu, pemuda-pemuda dari Djawatan P.T.T. bekerdja terus, sebagai pedjuang-pedjuang pertama melaksanakan tugasnja dalam menjarkan proklamasi kesegala pelosok

Djasa mereka ini tak dapat dilupakan. Para bekas opsir Gyu Gun merasakan sulitnja keadaan, dan dimana-mana mereka berada, lalu menjusun pendapat untuk bertindak.

Demikianlah dimana-mana kelihatan berkumpul berembuk bekas-bekas Gyu Gun/Hei Ho. Aliran pendapat pada ketika itu jang mendapat sambutan baik oleh para pedjuang bangsa dari segala golongan, ialah bahwa kita harus bertindak tepat menjokong proklamasi; dan tidak perlu menurutkan aliran jang ragu-ragu.

Para pemuda lalu mendirikan **Pemuda Indonesia**, jang terdiri dari segenap lapisan pemuda, djuga bekas-bekas Gyu Gun, Hei Ho, Kai Gun, Sei Nen Dan, Bo Go Dan, Zi Ke Dan dan lain-lain.

Serentak dengan timbulnja persatuan itu, terasalah adanja kekuatan untuk bertindak lebih landjut, semangat demikian bergejolak serentak.

Automatis seluruh rakjat, tua muda bahkan dukun-dukun kebal sakti jang telah tua-tua bangsa mengakui Pemuda Indonesia, sehingga tak ubahnja semangat ini, ibarat air bah jang maha dahsjat jang melanggar membawa lalu segala sesuatu jang merintang tudjuannya. Kepada Sukarno-Hatta, pemuda-pemuda Sum. Tengah mengetok kawat bahwa mereka berdiri dibelakang kedua pemimpin itu. Di Padang pada tgl. 25 Agustus 1945, berdirilah Balai Penerangan Pemuda Indonesia (B.P.P.I.) jaitu hasil dari rapat-rapat rahasia pemuda semendjak tgl. 18/8-1945 bertempat di Padang. Pengurus B.P.P.I. ini terdiri dari sdr.-sdr.:

Ketua I	— Ismael Lengah
Ketua II	— Suleiman
S. Usaha	— Nasrun A.S. dan Jahja Djalil
Bendahara	— Dahlan J. St. Mangkuto
Perbekalan	— Iljas Jacob
Keamanan	— Burhanuddin
Penerangan	— Roesdi

Koordinator	— Kasim Dt. Malilit Alam
Penghubung	— Sjarif Usman, Bgd. Aziz Chan, Chatib Suleiman dan Mr. Nazaruddin
Kesehatan	— Dr. Nazaruddin
Pembantu ²	— Djamaluddin, Mochtar Thaib, Jazid Abidin, H. Hasan, Sjarif Gani, Bgd. Taha, Mahjuddin dan lain-lain.

B.P.P.I. ini bermarkas di Pasar Gedang yang kemudian berkali-kali digerebek oleh tentera Inggeris karena dituduh menjadi sarangnja pemuda-pemuda pedjuang yang oleh Inggeris dinamakan terrorist.

Dalam pada itu para pemuda bekas opsir Gyu Gun lichting kedua di Bukittinggi, menjusun diri dan bergerak dilapangan keamanan, serta perampasan senjata Djepang.

Didaerah-daerah lain kesatuan pemuda ini masih tetap bernama Pemuda Indonesia. Pada tgl. 29 Agustus 1945, pemuda-pemuda di Bukittinggi mengadakan rapat yang pertama bertempat di Gedung Sekolah M.I.K. dihadiri oleh sdr. Nuzirwan seorang pemuda yang baru datang dari Djakarta. Malam itu dibentuk Pemuda Republik Indonesia daerah Bukittinggi diketuai oleh Nuzirwan dan Pemuda Republik Indonesia Sumatera diketuai oleh sdr. Mr. Zainal Zainur.

P.R.I. ini kemudian dengan bahagian-bahagiannya telah mengambil sikap mendjaga dan menetapkan keamanan daerah Bukittinggi dan menggerakkan berdirinya P.R.I. dikampung-kampung dan kota-kota didaerah Sum. Barat, hingga sampai pada tgl. 10 September 1945 telah berdiri dimana-mana P.R.I., yang bertindak sebagai suatu badan pendjaga dan pendjamin keamanan dalam daerahnya masing-masing. Pada tgl. 15 September digedung Bank Nasional Bukittinggi dilangsungkan rapat kilat gabungan antara seluruh P.R.I. daerah Agam, berhubung dengan kedatangan Dt. Radjo Mangkuto sebagai utusan B.P.P.I. dari Padang yang mengandjurkan supaya dapat menggabungkan kedua badan itu menjadi satu, dan berpusat di Padang. Dalam rapat kilat ini turut hadir sdr. Dahlan Djambek, Sjarif Usman, Mansur, dll yang masing-masing diminta pikirannya. Karena udara rapat sangat panas, berhubung dengan pendapatan berlainan, antaranya menghendaki supaya setcepatnja bertindak mengambil kekuasaan dari tangan Djepang, yang kedua supaya segera dibentuk satu **Lasjkar** yang bertanggung-djawab atas keamanan. Lainnya menghendaki supaya lebih dahulu, sebelum tindakan-tindakan keras diambil, dilatih pemuda-pemuda buat menjadi anggota pasukan keamanan. Maka usaha Dt. Radjo Mangkuto untuk menjatukan P.R.I. dengan B.P.P.I. tidak berhasil, tetapi pada malam itu djuga, masing-masing

berusaha dengan setjepatnja menjusun rentjana jang selekasnja dapat dipergunakan untuk menghadapi segala kemungkinan. Antaranja sdr. Dahlan Djambek mengusulkan supaja semua pemuda-pemuda jang telah meninggalkan Gyu Gun, Hei Ho dan Kai Gun dipanggil kembali dan terus dilatih buat mendjadi tenaga serap perdjuangan, sedang P.R.I. langsung atau tidak bertindak dalam kota untuk mentjiptakan keamanan dan mengambil oper beberapa kekuasaan langsung atau tidak, dari tangan Djepang.

Tindakan jang berupa perdjuangan pertama kali, ialah mengawal keselamatan berkibarnja Sang Saka. Awaslah barangsiapa jang berani menghalanginja. Pada umumnja, pengibaran bendera pertama kali ini mendapat rintangan-rintangan terutama dari pihak Djepang, dan dari pihak bangsa Belanda jang sudah bebas dari tawanan Djepang. Dimana-mana terdjadi insiden, jang berkat kebulatan tekad pemuda, semua itu dengan mudah dapat diatasi.

SEMBOJAN PEMUDA:

„S I A A P !!”

Teriakan perdjuangan jang populer pada waktu itu ialah: Siaap! Barangsiapa sadja mendengar teriakan itu, tanpa selidik lagi, lalu siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan dengan bersendjatakan apa jang ada, jang pada umumnja berupa bambu runtjing, parang atau pisau.



Pasal 15.

KESATUAN TENTERA DIBENTUK.

MEMATUHI decreet Kepala Negara untuk mobilisasi umum bagi pemuda-pemuda dalam Barisan Keamanan Rakjat (B.K.R.) tanggal 25 Agustus 1945, serentak dengan terbentuknja K.N.I. Sumatera Barat, maka oleh pemimpin-pemimpin K.N.I. Sumatera Barat beserta bekas-bekas opsir Gyu Gun, dibangun B.K.R. di tiap-tiap kewedanaan. Anggota-anggota Komite Nasional Indonesia tetap mendjadi pendukung dan pelambuk langsung dari Barisan Keamanan Rakjat ini. Anggota-anggota B.K.R. ini umumnya terdiri dari bekas anggota-anggota Gyu Gun, Hei Ho, Kai Gun, Sei Nen Dan, dan Bo Go Dan jang pimpinan umumnya dipegang saudara Ismael Lengah.

Atas perintah Presiden N.R.I., maka pada tanggal 5 Oktober 1945 nama B.K.R. itu diganti dengan nama **Tentara Keamanan Rakjat** (T.K.R.). Pada waktu B.K.R. dibentuk, maka mulailah diangsur pemisahan tugas dilapangan pemuda. Sebagian jang berasal dari tentera lalu masuk B.K.R., sedang jang selebihnja tinggal dalam kesatuan pemuda.

Pada tanggal 10 Oktober 1945, B.P.P.I. (Balai Penerangan Pemuda Indonesia) di Padang dibubarkan dan dibagi dua. Bekas anggota-anggota tentera masuk T.K.R. dan selebihnja masuk organisasi Pemuda Republik Indonesia (P.R.I.) sesuai dengan nama jang sudah ada di Bukittinggi.

Pada tanggal 14 Oktober 1945, jaitu sehari sesudah pendaratan tentera Sekutu di Padang, P.R.I. Bukittinggi telah siap pula membentuk T.K.R.

Demikianlah dengan tjepat T.K.R. berdiri didaerah-daerah jang susunan batalion dan kepalanja masing-masing adalah sebagai berikut:

Padang	— Jazid Abidin.
Air Hadji/Sei Penuh	— Thalib.
Sp. Gaung Air Hadji	— Alwi St. Maradjo.
Pariaman	— Mahjudin Tonek.
Padang Pandjang	— Anas.
Solok	— Sjarif Usman.
Batu Sangkar	— Dahlan Ibrahim.
Bukittinggi	— Dahlan Djambe.

Pajakumbuh	— Makinuddin.
Pakan Baru	— Hasan Basri
termasuk Bengkalis-Indragiri	
dan Kepulauan Riau	
Djambi	— Abun Djani.

Para pemuda progressief jang tidak masuk T.K.R. tinggal tetap dalam P.R.I. dan bertindak melandjutkan perdjuaan kedalam perdjuaan rakjat seluruhnja dengan mengangkat dan menentukan orang-orang jang akan duduk mengepalai pemerintahan sipil ditiap-tiap daerah.

Perebutan sendjata.

Diseluruh daerah Sumatera Tengah terdjadilah perebutan sendjata dari Djepang jang diusahakan oleh para pemuda. Buat misal, marilah kita uraikan riwayat perebutan di Kabupaten L. Kota. Ditempat lain terdjadi djuga hal jang sematjam ini, hanja berbeda ukurannja.

Perdjuaan jang pertama kali:

10 Oktober 1945 P.R.I. Kab. L. Kota telah terbentuk, dengan giat mulailah dia menjusun B.K.R. kemudian T.K.R. Perlengkapan, pakaian, persendjataan dan makanan mulailah diusahakannja. Bermatjam djalan jang ditempuh dengan sembojan: **Jang perlu ada, dari mana? Djangan ditanja.**

Pemuda kita berdjuaan, berdjuaan dengan tidak mengingat letih dan upah.

Tentera Djepang dalam panik, walaupun masih berkuasa, lalu kawan-kawan jang pernah bergaul dengan tentera Djepang memulai usahanja: Umpamanja, saudara Imran Bur (sekarang Letnan Muda C.P.M.) dapat memantjing seorang tentera untuk mentjuri sebuah senapan mesin dengan peluru-pelurnja dari persendjataan Kubu Gedang. Harga sesuai tetapi uang tak ada. Seorang saudagar menjerahkan uang Rp. 5.000,—. Besoknja pada saudagar itu diberikan seekor kuda dengan bendi. Dari mana? Jang perlu ada. T.K.R. telah bersendjata sebuah senapan mesin. Dengan sembungji dikampung, mulailah beladjar memakainja, takut ketahuan oleh Djepang. Suatu malam saudara Bakri Samat memperoleh tiga buah karabijn. Dari mana? Karena kelalaian pendjaga Djepang jang patah semangat, dia ketjurian. Banjak tentera Djepang jang hendak melarikan diri. Semuanja disanggupi, asal ada sendjata dan motor. Lebih dari 25 orang jang dapat memenuhi sjarat-sjaratnja semua selamat. Usaha tentera tjilik tak dapat pula kita lupakan. Setiap hari anak-anak dengan berani mentjuri sendjata Djepang.

Perjuangan ke-II:

T.K.R. telah diresmikan di Pajakumbuh 1 batalion. Pakaian, sendjata telah siap. 1 kompi ditugaskan ke Indarung dibawah pimpinan Let. Bainal untuk membantu perjuangan diluar kota. Dibekali dengan motor truck dan sendjata:

- 1 buah senapan mesin
- 50 buah karabijn
- 1000 buah handgranaat

lengkap dengan alat-alat tidur dan obat-obatan. Luar biasa diwaktu itu. Dari mana? Berkat diplomasi dengan Djepang, dan pentjurian. Kubu Gedung (2 Km dari Pajakumbuh) ada satu bengkel sendjata jang terbesar di Sumatera Barat, menurut perintah Sekutu mesti dirusakkan. Sebelum itu 200 orang T.K.R. telah bekerdja disana dibawah pimpinan Muchtar Kemal. Djepang berangkat T.K.R. masuk, semua kerusakan diperbaiki. Seluruh T.K.R. Sumatera Barat dapat memperoleh nikmatnja. Sewaktu rapat Opsir-opsir se-Sumatera di Bukittinggi Pak Ardjo (Let. Djenderal R. Suhardjo Hardjo Wardoyo) dapat membawa opsir-opsir T.K.R. melihat mesin-mesin tersebut. Apa katanja? Inilah bengkel persendjataan jang paling besar diseluruh Sumatera. Setiap hari MAN DIESEL 4 CYL, Generator kekuatan 95 Kva itu terus bekerdja. 1.500 orang T.K.R. bertugas disana dan diberi nama Batalion Istimewa, jang dipimpin oleh saudara Makinuddin Hs.

Dengan mesin-mesin jang ada itu buat langkah pertama telah dapat disiapkan:

- 1200 buah handgranaat (dibuat)
- 12 buah senapan mesin ketjil (geki Djepang) diperbaiki
- 3 buah senapan mesin menengah (geki Djepang) diperbaiki
- 4 buah senapan mesin Vickers (Belanda) diperbaiki
- 400 buah grendel Djepang (dibuat).

Berpuluh ribu peluru dari matjam ukuran diisi kembali.

Perjuangan ke-III:

Sendjata Djepang dirusakkan. Berton-ton setiap hari bom-bom diangkut ke Padang Siantah (antara Piladang dan Situdjuh) buat diletupkan. Gemuruh bunjinja bagaikan perang telah petjah. Sekutu jang melihat perusakan sendjata itu bergembira, karena tentulah T.K.R. jang mengharapkan persendjataan Djepang akan malang nasibnja. Tetapi apa jang kedjadian? Barang-barang tersebut tidak meledak semuanya. Lebih dari 50% jang ditimbun tanah. Barang-barang inilah jang banjak menolong persendjataan Kubu Gedang. Karena di Kubu Gedang bertimbun-timbun handgranaat jang kosong. Untuk isinja diambil barang-barang peledak dari Padang Siantah itu. Berapakah hasilnja? Tidak dapat dihitung berapa ribu

buah jang telah dibawa orang untuk front Indarung dan Pasar Usang. Berapa pula jang dipakai dalam agresi ke-II. Kalau setjara kasar dapatlah kita tetapkan lebih dari 25% sendjata-sendjata jang dipakai oleh T.K.R. Sumatera Barat dibuat di Kubu Gedang. Perdjalanen bengkel telah bertambah lantjar, karena telah diurus oleh orang-orang jang ahli. Kapten Jasin, Kapten Djanun, dan Kapten Marahimin jang dulunya pegawai Umbilin (S. Lunto) dipindahkan untuk memimpin persendjataan dan bertugas di Kubu Gedang. Pembantu-pembantunapun terambil dari orang-orang jang ahli pula. Sampai kepada agresi ke-II.

Agresi ke-II datang dan bumi hangus pun datanglah. Semua perkakas dirusakkan, gudang-gudang dibakar dan tinggallah puing-puingnja sadja lagi. Tetapi sungguhpun demikian dalam agresi ke-II Kubu Gedang masih tidak dapat djuga kita lupakan Kota Pajakumbuh telah diduduki Belanda. Setiap malam gerilja kita mentjari masuk kedalam. Sambil menjerbu tempat-tempat persembunjan Belanda, mereka tidak lupa singgah ke Kubu Gedang, mengambil barang-barang jang dirasa dapat dipakai buat persendjataan di Batu Pajung dan Situdjuh.

Usaha-usaha lain:

Tapanuli termasjhur dengan danau Tobanja, bukan karena kemolekan, tetapi karena Djepang telah menenggelamkan sendjata jang tidak sedikit disana. Setiap hari berpuluh tukang selam mentjari sendjata tersebut dan didjualnja. Hampir semuanya tidak pakai grendel. Dari Pajakumbuh berangkatlah rombongan ke Sibolga, untuk membeli karabijn jang tidak bergrendel itu. Di Pajakumbuh dibikin grendel itu.

Begitu pula dari Pakan Baru dari mana tidak sedikit dibawa karabijn jang tidak bergrendel itu, buat diperbaiki di Kubu Gedang. Berapa upahnja 50% dari sendjata itu tinggal di Kubu Gedang, separonjalah jang kembali. Lop-lop meriam jang bergulingan di Kubu Gedang dari hari kehari mulai ditjukupkan. Sebelum agresi ke-II datang telah ada 4 buah jang siap.

Pembentukan Divisi III Banteng.

PEMBENTUKAN kesatuan T.K.R. jang setjara organisatoris bersifat Sumatera Tengah barulah dapat dilaksanakan pada tanggal 1 Djanuari '46, jaitu hasil dari rapat para pemimpin T.K.R. di Padang Pandjang.

Sesudah berunding pandjang lebar, maka untuk seluruh Sumatera Tengah dibentuklah satu divisi **ketjual daerah Djambi jang Kesatuan T.K.R.-nja masuk divisi Gadjah di Sumatera Selatan.** Divisi di Sumatera Tengah itu diberi nama Divisi III Banteng.

jang berada dibawah pimpinan Divisi Komandan Kolonel Dahlan Djambek.

Diputuskan djuga bahwa dalam lingkungan divisi ini berada empat Resimen jang susunannja sebagai berikut:

- | | | | |
|------------------|---|-----|----------------------------|
| Komandan Resimen | I | — | Let. Kol. Sjarif Usman |
| „ | „ | II | — Let. Kol. Dahlan Djambek |
| „ | „ | III | — Let. Kol. Ismael Lengah |
| „ | „ | IV | — Let. Kol. Hasan Basri. |

Daerah dan pembagian daerah kesatuannja adalah sebagai berikut:

Resimen I.

- a. Bataljon Major Anas (Merapi) di Padang Pandjang.
- b. „ Major A. Halim di Bukittinggi.
- c. „ Major Makinuddin di Pajakumbuh.

Resimen II.

- a. Batalion Major Mansur di Solok.
- b. „ Major Sofjan Ibrahim di Batu Sangkar.
- c. „ Major Thalib di Kurintji.

Resimen III.

- a. Batalion Major A. Hasan di Padang.
- b. „ Major Mahjudin Tonek di Pariaman
- c. „ Major Alwi St. Maradjo di Painan.

Resimen IV.

- a. Batalion I Major D. I. Pandjaitan di Pakan Baru.
- b. „ II Major Arifin di Bengkalis.
- c. „ III Major Jusuf Nur di Rengat.
- d. „ IV Major Usman Pohan di Pakan Baru Luar Kota.
- e. „ V Major Ali Rasjid di Pakan Baru (Artileri).



Pasal 16.

TERBENTUKNJA BARISAN-BARISAN RAKJAT.

SEIRING dengan proklamasi, maka para pemuda bergerak dengan serentak menerdjunkan diri dalam organisasi-organisasi ketenteraan untuk melaksanakan perdjungan dan mendjaga keamanan negara keluar dan kedalam. Ada jang menggabungkan diri dalam T.K.R., dan ada pula jang masuk dalam badan-badan kelasjkan dan organisasi-organisasi perdjungan jang sesuai dengan alirannja masing-masing. Untuk mengokohkan perdjungan, maka setiap partai dan golongan ketika itu melatih diri dalam soal ketenteraan, dan masing-masing mendirikan barisannja jang dipersejajainja dan diperbekalinja sendiri dengan tidak mengharap-kan dari pemerintah akan bantuan apapun djuga, karena djustru mereka berdjung untuk menegakkan pemerintah jang baru didirikan ini. Dengan mendaratnja tentera Sekutu dan antjaman Nica, maka semangat perang merebak keseluruh masjarakat.

Hizbullah berdiri.

Pada tanggal 1 Oktober 1945, para pemimpin pemuda, terutama dari pemuda Muhammadiyah dan Kepanduan Hizbul Wathan berkumpul di Padang Pandjang untuk menerima Kursus Kilat tentang pembentukan Hizbullah di Sumatera Tengah, jang mana iniatif dan pimpinan diterima dari para pemimpin Muhammadiyah.

Sesudahnja berkursus selama 10 hari, maka pada tanggal 10 Oktober '45 para pemuda ini diperintahkan kembali kedaerahnja masing-masing untuk membangunkan Hizbullah diseluruh Sumatera Tengah. Merekapun kembali kedaerah dan langsung membentuk Hizbullah ditempatnja masing-masing, sehingga dalam sedikit waktu Hizbullah sudah bangun dan bergerak diseluruh Sumatera Tengah, sehingga pada 22 Nopember '45 diresmikan berdirinja Hizbullah Sumatera Tengah di Padang Pandjang, dan dilakukanlah penjumpahan terhadap pemimpin-pemimpinnja, jang mana upatjara ini dihadiri selengkapnja oleh para utusan Hizbullah dari daerah-daerah.

Latihan ketenteraan dimulai dibawah pimpinan saudara-saudara Agus Salim Murai dan kawan-kawannja, lalu disusunlah pimpinan markas sebagai berikut: Saudara Sjamsuddin Ahmad menghadapi

umum, Anwar Bey menghadapi urusan kedalam, dan Agus Salim memegang urusan kemiliteran dan latihan.

Pada 12 Pebruari '46, setelah para tjalon perwira tamat dari latihannja, maka dilantiklah Opsir-opsir Hizbullah oleh Gubernur T. M. Hasan dengan susunan sebagai berikut: Saudara-saudara Sjamsuddin Ahmad Komandan Divisi Hizbullah Sumatera Tengah, Anwar Bey Kepala Staf, Agus Salim Komandan Resimen I, Sou'ib Ibrahim Komandan Resimen II, Abu Bakar Komandan Resimen III dan Muhammad Anwar Komandan Resimen IV jang dilantik bersama 32 orang perwira lainnja.

Barisan Sabillah dibentuk:

Dalam zaman Djepang didirikan M.I.T. (Madjelis Islam Tinggi) jang segera sesudah proklamasi menjusun diri sebagai partai politik. Atas iniatif M.I.T. inilah dibentuk Barisan Sabilillah sebagai pernajaan hasrat kaum Muslimin untuk melakukan perang sabil dalam mempertahankan kemerdekaan jang telah diproklamirkan.

Setelah lengkap berdiri tjabang-tjabangnja, dan selesai pula latihan para perwiranja, maka pada hari jang bersedjarah jaitu tanggal 16 Maret '46, bertepatan dengan kundjungan utusan Pemerintah Agung ke Sumatera Barat, dilakukanlah pelantikan para Opsir Barisan Sabililah seluruh Minangkabau dengan disaksikan oleh ribuan rakjat bertempat ditanah lapang Atas Ngarai Bukittinggi. Dalam pelantikan ini hadir dan memberikan wedjangan Menteri Penerangan M. Natsir, Djenderal Major Suhardjo dan Djenderal Major Sukarnen. Pemimpin M.I.T. saudara A. Gafar Djambek menegaskan bahwa Markas Besar Sabililah Sumatera bertempat di Bukittinggi, dibawah pimpinan 15 orang Opsir jang dilantik pada hari itu.

Berdirinja Lasjmi dan Lasjkar Muslimat.

Bersamaan waktu dengan M.I.T., maka Partai Islam PERTI menjusun dirinja sebagai suatu partai politik, dan membentuk Lasjkar Muslimin Indonesia (Lasjmi), serta Barisan puterinja jang bernama Lasjkar Muslimat, pada 24 Desember 1945. Segera barisan ini tersusun disetiap tjabang dan ranting PERTI, dan pada tanggal 23 Djuni 1946 dilakukanlah pelantikan Lasjkar Muslimat ini diBukittinggi jang dihadiri oleh para pembesar Pemerintah dan Tentera serta ribuan rakjat. Pun sebelum ini telah berlangsung pula upatjara jang lebih meriah lagi pada pelantikan Lasjmi, dimana Sjech Suleiman Arrasuli melantik para opsirnja.

Berdirinja Temi (Tentera Merah Indonesia).

Pada tanggal 12 Djanuari 1946, P.K.I. membentuk TEMI, jaitu Tentera Merah Indonesia, jang kemudian diganti namanja dengan BAMI (Barisan Merah Indonesia). Setiap tjabang P.K.I. lalu menjusun pula akan TEMI ini, sehingga Temi pun tersebar diseluruh Sumatera Tengah.

Saifullah dibentuk.

Dalam pada itu P.K.I. Lokal Islami, membentuk akan barisan SAIFULLAH jang dengan segera pula tersusun disetiap tjabang dan ranting dari P.K.I. Lokal Islam ini.

Barisan Hulubalang berdiri.

Pada tanggal 21 Desember 1945, M.T.K.A.A.M. melangsungkan Kongresnja jang ketiga di Padang Pandjang, dimana diputuskan dengan suara bulat mendirikan Barisan Hulubalang, jang pada tanggal 2 Pebruari '46 dimulai latihan para Opsirnja. Dan pada tanggal 16 April '46 dilangsungkanlah pelantikan para Opsir Barisan Hulubalang se Minangkabau bertempat di Padang Pandjang.

Barisan-barisan jang lain.

Dalam pada itu dibentuk pula barisan-barisan jang lain, seperti **Barisan Istimewa** dari P.R.I., dan **Tentera Allah** jang didirikan oleh P.P.T.I. (Partai Politik Tarikat Indonesia). Djuga dibentuk oleh para wanita barisan jang bernama **Puteri Kesatria** jang djuga mengadakan latihan ketenteraan disamping latihan Palang Merah dan dapur umum.

Dalam bulan Djuni 1946, setelah timbul bermatjam-matjam Barisan, maka disusunlah Barisan-barisan itu didalam **Dewan Perdjuangan**, jang mendjadi satu bahagian dari Volksfront Sumatera Barat, untuk menjatukan siasat perdjuangan.

Pasal 17.

PEMBENTUKAN TENTERA DI RIAU.

SETELAH K.N.I. Riau terbentuk dengan pimpinan saudara R. Jusuf c.s., maka diusulkan pengangkatan saudara A. Malik menjadi Residen, usul mana diterima oleh Pemerintah, dan berdjalanlah roda pemerintahan, serta perdjuaan, apalagi setelah pemuda jang bergabung dalam P.R.I. membulatkan tenaga para pemuda untuk memelopori perdjuaan.

Maka saudara **Hasan Basri** jang telah mendapat pendidikan ketenteraan sebagai Opsir Gyu Gun, lalu memelopori pembentukan B.K.R. bersama dengan 47 orang pemuda Kai Gun (Tentera Laut) dibawah pimpinan saudara Abd. Thalib jang tewas dalam agresi ke-II beserta kawan-kawannya saudara-saudara Sardjono, Subrantas, Wijono, Himron Saiman, Suwito, Lasno, untuk mengorbankan djiwa raganja bagi mempertahankan kemerdekaan Ibu Pertiwi. Kedjadian ini disusul oleh pemuda lainnya terutama Hei Ho dibawah pimpinan saudara Mahmood dan K.N.I.L., dibawah pimpinan saudara Marsidi dan Sumbaria, pegawai-pegawai bahkan oleh seluruh lapisan masjarakat, jang telah merasakan kekedjaman Belanda dan Djepang dan menginsjafi bahwa kemerdekaanlah jang dapat memperbaiki nasib bangsa sendiri jang telah berabad-abad dihinakan itu. Patut djuga disebut disini pemuda-pemuda jang membantu saudara Hasan Basri, jang mana diantara-saudara Toha Hanafi, D. I. Pandjaitan, Mansurdin, Jusuf Noor, Arifin, Iskandar, Marahalim, Ali Rasjid, Usman Pohan, Dalian, P. Hutapea dan banjak lagi saudara-saudara lainnya.

Perampasan sendjata Djepang mulai terdjadi, hingga banjaklah sendjata-sendjata jang dapat dimiliki oleh pemuda kita; sedangkan sebahagian sendjata tentera Djepang itu, dapat kita ambil over dengan djalan diplomasi dibawah pimpinan saudara Hasan Basri dengan petundjuk ketua delegasi Indonesia jang dibentuk untuk menghadapi Djepang, jaitu saudara B. A. Muchtar Wakil Residen Riau.

Di Pakan Baru, disamping setiap hari terdjadi insiden-insiden ketjil dengan tentera Djepang dan Sekutu, terdjadi pula penjerbuan oleh pemuda-pemuda kita terhadap Markas Sekutu dan Belanda di Hotel Mountbatten jang kemudian didjadikan Hotel Merdeka, hingga banjak meminta pengorbanan. Suasana ini dapat diselesaikan oleh saudara Raden Jusuf dan Hasan Basri pada esok harinja.

Sedjalan dengan kedjadian itu, maka di Siak, Bengkalis, Bagan Siapi-api, Selat Pandjang, Taluk Kuantan, Rengat, Tembilahan, Bangkinang dan tempat-tempat lainnja terdjadilah perlawanan ketjil-ketjil jang djuga penting artinja dalam perdjungan.

Dari B.K.R. ke T.K.R.

Pemuda-pemuda kita jang telah mulai tersusun dalam organisasi bersendjata tadi, dengan instruksi dari Pemerintah Pusat, digabungkan dalam organisasi perdjungan jang berbentuk Badan Keamanan Rakjat (B.K.R.) hingga dengan demikian tersusunlah tenaga pemuda bersendjata jang melalui akan menghadapi perdjungan dan mendjaga keamanan seluruh Riau. Ditempat jang disebutkan diatas tadi, mulailah dilaksanakan apa jang mendjadi keinginan dari Pemerintah Pusat itu dengan berpusat di Pakan Baru dibawah pimpinan saudara Hasan Basri.

B.K.R. setiap waktu diusahakan penjempurnaannja dengan sokongan jang tidak sedikit dari Pemerintah dibawah pimpinan Residen Abdul Malik dan dari Dewan Perwakilan Rakjat dibawah pimpinan Raden Jusuf, bahkan dari seluruh lapisan rakjat. B.K.R. ditjintai dan dihormati rakjat, karena hasil usahanja serta keteguhan pribadi pemuda-pemudanja. Apa jang diinginkan oleh negara telah tertjapai, walaupun masih merupakan satu organisasi jang masih djauh dari sempurna.

Sesuai dengan keinginan dari Pemerintah, maka B.K.R. Sumatera Tengah berpusat di Bukittinggi, karena satu alat Negara tidaklah mungkin berdiri sendiri, tetapi harus tunduk dibawah satu pimpinan, berdjalan menurut hierarchie jang semestinja, sebab dengan djalan demikianlah kompaktheid dapat ditjiptakan, apalagi bagi satu kesatuan jang bersendjata. Kemadjuan dan penjempurnaan B.K.R. sangat dirasakan dan kenjataan memberi harapan jang takkan mengetjewakan. Achirnja B.K.R. itu diubah mendjadi T.K.R., walaupun dasar dan djiwanja serupa dengan B.K.R.

Dengan perubahan jang terus menerus terjadi itu maka didaerah Riau terbentuklah satu Regiment T.K.R. sebagai telah kita uraikan sebelum ini, dengan nama Regiment IV Divisi III Banteng Sumatera Tengah dibawah pimpinan Let. Kol. Hasan Basri.

Regiment ini pada mulanja mempunyai 5 Batalion, Bn I di Pakan Baru dibawah pimpinan Major D. I. Pandjaitan, Bn II di Bengkalis dibawah pimpinan Major Arifin, Bn III di Rengat dibawah pimpinan Major Jusuf Nur, Bn IV di Pakan Baru Luar Kota dibawah pimpinan Major Usman Pohan, Bn V di Pakan Baru (Artileri) dibawah pimpinan Major Ali Rasjid, (tiwas dalam agresi kedua). Disamping itu dibentuk Polisi Tentera Regiment IV dibawah pimpinan Kapten Mansjurdin, jang kemudian disempurnakan

dibawah pimpinan Lts. Djamhur Djamin sampai pada akhir clash kedua.

Usaha kearah penjemputan dan perbaikan Tentera kita itu terus berdjalan, terutama dalam organisasinya dan mempertinggi mutu individu tiap-tiap pradjurit dengan mengadakan **Depot-depot Pendidikan di Pakan Baru, Bengkalis dan Rengat**. Tidaklah dapat disangkal bahwa usaha-usaha itu banjak terbentur dan tertarung oleh kesulitan-kesulitan dan kekurangan; baik kesulitan materieel dan finansieel, maupun kekurangan pengalaman dan kekurangan tenaga yang tjakap dan bercapaseit. Walaupun demikian hal-hal itu sementara waktu dapat diatasi sekedarnya dan usaha itu terus berdjalan.

Sedjarah kemerdekaan berdjalan terus, perlawanan terhadap tentera Djepang; terhadap tentera Sekutu (Inggeris); terhadap Nica; terus terdjadi, namun demikian pertumbuhan tentera kita tidaklah terhenti karenannya. Demikian djuga insiden-insiden itu terdjadi pula didaerah Riau. Kepulauan Riau oleh Nica mulai diduduki dan diblokade, hingga karena kekurangan alat, sementara waktu belumlah dapat kita kuasai kembali. ALRI kita tjuma mempunyai beberapa buah motorboot yang hampir tidak ada artinja. Dapatkah dengan beberapa buah motorboot sadja, kepulauan yang ribuan djumlah pulaunya itu akan kita rampas? Ini adalah suatu persoalan yang berat dan mendjadi probleem yang meminta waktu dan modal untuk memetjahnja.

Sesuatu kedjadian yang istimewa telah terdjadi pada pertengahan tahun 1946, dengan gugurnja kapal terbang musuh dilapangan terbang Pakan Baru ditembak oleh pradjurit kita dibawah pimpinan Letnan Arfiatmin dan Sersan Munaf dimana dalam penyerbuan terhadap kapal udara ini, 6 orang tentera K.L. tiwas, 2 K.N.I.L. dan 1 orang dapat ditawan. Djuga dapat dirampas 2 senapan mesin. Kedjadian-kedjadian ini menambah semangat perjuangannya untuk terus membela kemerdekaan.

Gabungan Tentera Islam Indonesia (GATERI).

Setelah terbentuknja beberapa lasjkar yang berdasar Islam, maka dalam bulan Mei '46 diadakanlah suatu konperensi di Bukittinggi oleh para pemimpin Hizbullah, Sabililah, Lasjmi dan Barisan Hulubalang, dimana diambil keputusan untuk membentuk satu Komando dari Gabungan Tentera Islam Indonesia Sumatera Tengah. (GATERI). Kemudian diadakan pula konperensi oleh komando Gateri dengan Ulama-ulama dan pimpinan tentera, tetapi tidak berhasil baik, sehingga beberapa waktu sesudah itu terpaksa komando gabungan ini dibubarkan.

Hizbullah, Sabililah dan Mudjahidin disatukan Komandonja.

Dalam bulan Djuni '46 Hizbullah Sumatera Tengah berkonperensi di Padang Pandjang, dimana sesudah itu pimpinan dipegang oleh saudara Agus Salim sebagai Komandan Divisi VIII Hizbullah Tuanku Imam Bondjol. Kemudian dalam bulan Nopember '46 pimpinan Hizbullah, Sabilillah dan Mudjahidin se Sumatera berkonperensi di Bukittinggi, dimana pada 26 Nopember diambil putusan bahwa dengan persetujuan P.B. Masjumi Djokja dan Markas Tertinggi Hizbullah di Malang, ditetapkan satu komando untuk Hizbullah, Sabilillah dan Mudjahidin serta Barisan Wanita-nja untuk seluruh Sumatera jang dipimpin oleh saudara Bachtiar Junus. Dengan ini tertjapailah kesatuan komando dari Hizbullah, Sabilillah dan Mudjahidin di Sumatera.

Pasal 18.

KETENTERAAN DIPESISIR SAMUDERA HINDIA (FRONT SELATAN).

TADI telah dijelaskan bahwa tentera jang mendjaga daerah Pesisir Samudera Hindia mulai dari Pariaman sampai ke Kerintji adalah bergabung dalam resimen III dibawah pimpinan Letnan Kolonel Ismael Lengah. Satu batalion dari tentera ini, jaitu **Bataljon Topan** adalah rapat hubungannja dengan perdjjuangan disekitar P.S.K. Bataljon ini berada dibawah pimpinan Major Alwi St. Maradjo jang berkedudukan di Painan. Ketika perdjjuangan permulaan, djadi masih atas nama B.P.P.I. tjabang Kerintji, Painan, telah direntjanakan merebut sendjata Djepang jang berkedudukan di Painan dan Sei. Penuh. Rentjana di Painan mendjadi gagal oleh karena pendapat setengah kawan jang lebih mengutamakan keselamatan harta benda dan djiwa rakjat dari pada persendjataan jang berada ditangan Djepang. Tetapi di Sei. Penuh rentjana ini mendjadi kenjataan, sehingga terdjadilah penjerbuan pemuda-pemuda dan rakjat bersendjatakan bambu runtjing, parang dan tombak, terhadap tentera Djepang jang bertempat dipasangerahan Sei. Penuh. Pertempuran ini banjak memakan korban, dan bergema sampai kesepandjang pesisir, dan menjebabkan tentera Djepang jang berpangkalan di Painan lalu mengangkat kaki, dan dilutjuti sendjatanja oleh pemuda-pemuda dinegeri jang mereka lalui.

Pemuda pedjuang ini kemudian disusun mendjadi B.K.R. dengan pimpinan saudara-saudara Alwi St. Maradjo, M. Sanit, M. Junus dan lain-lain bekas Gyu Gun. B.K.R. ini mendjalankan tugasnja sampai mendjadi T.K.R. jang kemudian didjadikan satu bataljon dengan nama Bataljon Topan, jang kemudian mentjatat sedjarahnja dalam pertempuran-pertempuran dikota Padang mendjaga garis pertahanan Selatan Padang, Bukit Putus, Gaung, Telok Nibung dan Sei. Beramas, sedangkan markasnja bertempat di Bukit Lampu (Bukit Sikabau). Sebelum agresi pertama, komandannja Major Alwi diganti dengan Major Jusuf Ali dan kemudian diganti pula oleh Kapten Hamid Djaus.

Pasal 19.

PERKEMBANGAN DISEKITAR KURANDJI (FRONT TIMUR).

KURANDJI adalah sebuah kampung ketjil di Padang luar kota, jang banjak mentjatat sedjarah selama perang kemerdekaan. Kesatuan tentera Kurandji adalah mengambil namanja dari nama kampung Kurandji ini, dimana kesatuan ini lama bertempur. Kesatuan ini berasal dari B.P.P.I. bahagian ketenteraan, jang kemudian mendjadi T.K.R. jang disusun satu bataljon di Padang. Komandan Bataljon ini adalah saudara Jazid Abidin, dan stafnja saudara-saudara Dahlan J., Jusuf Ali, A. Hosen, dan Anwar Badu.

Saudara A. Hosen memimpin kompi II jang bermarkas di Djati, dan setelah pertempuran-pertempuran meledak di Padang dengan mendaratnja tentera Sekutu, maka kompi A. Hosen ini pindah ke Kurandji, dan sehari sesudah pindah, markasnja di Djati dibakar habis oleh tentera Sekutu. Disinilah kompi ini disusun, dilatih dan dipersendjatai. Dalam pada itu kompi Anwar Badu pindah ke Korong Gadang dekat Kurandji, dan kompi Jusuf Ali pindah ke Anduring. Sedangkan di Indarung dibentuk sebuah kompi oleh saudara Sajuti Amin. Semua ini berlangsung dalam bulan Nopember 1945.

Dalam bulan Djanuari markas resimen III divisi IX jang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ismael Lengah pindah dari Padang ke Lb. Alung. Dalam bulan Pebruari 1946 Dewan Perdjuaan Padang Luar Kota didirikan untuk mengkordinir sekalian barisan-barisan rakjat, dimana komando pertempuran diserahkan kepada saudara A. Hosen. Dalam bulan April saudara A. Hosen diangkat mendjadi komandan Batalion I resimen III Divisi IX dengan pangkat Major. Bataljon ini terdiri dari kompi Kurandji, ditambah dengan kompi Anwar Badu di Korong Gadang dan kompi Sajuti Amin di Indarung jang kemudian kompi ini diserahkan kepada almarhum Kapten Rasjid. Demikianlah bataljon ini jang berkedudukan di Kurandji dengan kekuatan kira-kira 850 orang mendjaga front timur daerah pertempuran Padang.

Pada tanggal 20 Djuli 1946 Major A. Hosen diangkat mendjadi Komandan Resimen III Divisi IX dengan pangkat Let Kol. Markas Resimen III diterima di Lb. Alung dan dipindahkan ke Solok dengan nama baru Resimen III Kurandji Divisi IX. Bataljon

II di Painan dipindahkan ke Resimen II dan diganti dengan Batalion II Resimen II Solok. Batalion III Pariaman diganti dengan Batalion Singa Harau dari Resimen I Pajakumbuh. Sehingga susunan Resimen III menjadi sebagai berikut: Komandan Regimen Let. Kol. A. Hosen, Kepala Staf Major Dahlan J., Komandan Bat. I Major A. Badu di Indarung, Komandan Bat. II Major Mahjuddin Tonek di Solok, Komandan Bataljon III Major Mustafa di Pajakumbuh, Komandan Polisi Tentera Major Jusuf Ali di Solok.

Dalam bulan Nopember 1946 **Bataljon Teras** yang terdiri dari pada gabungan Barisan Rakjat Padang Luar Kota dijadikan Bataljon IV Resimen III yang dipimpin oleh Major Su'ib.

Dalam bulan Maret 1947 dilangsungkan perundingan Cease Fire yang pertama dengan Belanda di Padang, yang diteruskan dengan perundingan kedua yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin sendiri, dan menghasilkan dalam bulan Maret itu dipantjangkannya garis demarkasi yang pertama melintang dari Selatan ke Utara melalui Sei. Beramas Lb. Begalung dan Kampung Kelawi.



Pasal 20.

PERKEMBANGAN DISEKITAR FRONT UTARA.

LANGKAH pertama, untuk menjusun ketenteraan difront Utara ini dimulai disekitar Pasar Usang (Kota Tengah), jang dipelopori oleh Major Kemal Mustafa. Rakjat disekeliling tempat itu diberi penerangan tentang perjuangannya menghadapi Belanda dan pemuda-pemuda kampung dilatih setjara ketenteraan, sehingga dari mereka ini dapatlah disusun satu kompi jang diberi nama kompi S.P.U. (Singa Pasar Usang).

S.P.U. lalu melantjarkan serangan-serangan hebat terhadap lapangan udara Tabing, dan mendjalankan pentjurian dan perampasan alat sendjata musuh dikota Padang dan sekitarnja. Masih dalam tahun 1945 satu serangan jang dipimpin oleh saudara **Azhari A.S.** telah dapat merampas sebuah truck dengan alat-alat sendjata dari tentera Sekutu jang diatasnja.

Makin lama daerah front Utara ini makin luas, dan perjuangannya disana semakin sulit, sehingga didatangkanlah dari Bataljon Bukittinggi jang dipimpin oleh Major A. Halim beberapa kompi, jaitu kompi Berantai dengan komandannya Jusuf Baron, dan kemudian dipimpin oleh almarhum Letnan satu Bakaruddin, kompi Bakapak dengan komandannya M. Nur, kompi Barajun dengan komandannya Hasan Basri, kompi Badai dengan komandannya Amarullah, kompi Baron dengan komandannya Kamaruddin dan beberapa seksi **Gati** (bekas Heiho S. Barat jang dibawa oleh Djepang ke Halmahera!). Pun diperkuat lagi dengan beberapa pasukan jang terdiri dari barisan-barisan rakjat seperti Hizbullah, Temi, Sabilillah, Hulubalang dan Napindo jang berada didaerah front Utara.

Dengan diangkatnja Major A. Halim mendjadi Komandan Resimen I, terdjadilah beberapa perobahan, dan di front Utara ditetapkan satu Bataljon, jaitu Bataljon V Resimen I (Bataljon Istimewa) jang dikepalai oleh Major Kemal Mustafa. Beberapa waktu sesudah pembentukan Bataljon V Front Utara, sebuah bom jang dijadikan mijn telah menemui sasarannya waktu serombongan tentera Belanda jang hendak berpatroli dari pelabuhan kapal udara Tabing melaluinja, dan telah meninggalkan korban sebanyak kira-kira 30 orang serdadu dan beberapa opsir.

Keesokan harinja mulai dari pagi betul, pesawat terbang Belanda telah sibuk mendjatuhkan pamflet-pamflet menjatakan perbuatan sewenang-wenang jang telah dilakukan oleh T.R.I. Front Utara dalam daerah kekuasaan Belanda, memasang mijn jang diluar peri kemanusiaan itu, dan ini semuanya adalah mendjadi tanggung djawab Komandan Divisi III (Kolonel Ismael Lengah) dan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja mestilah diselesaikan oleh Kolonel Ismael Lengah dan kalau penjelesaiannya tidak tertjapai, maka seluruh Markas T.R.I. jang di Sumatera Barat akan dihantjurkan (dibom) sekali gus. Demikianlah bunji pamflet itu jang dibawahnja ditanda tangani oleh Komandan Tentera Belanda „U” Brigade Kolonel J. Sluyters. Belum sampai lagi pamflet itu ditanah, pemboman besar-besaran telah dilakukan dan begitu djuga mustang telah menembak dengan hebatnja. Beberapa bom ukuran luar biasa jang beratnja kira-kira 600 atau 700 kg telah dilepaskan oleh pesawat Belanda menudju markas T.R.I. Front Utara Pasar Usang.

Dengan sekedjap mata sadja bom-bom jang ukurannya luar biasa itu telah menghantjurkan markas T.R.I. Pasar Usang dan mempunjai kira-kira 15 meter garis menengah dan 5 meter dalamnja bekas ledakan dan ini adalah ledakan jang paling hebat di Sumatera Tengah.

Setelah persetudjuan Linggardjati, ditentukanlah garis demarkasi sebelah timur Front Utara, jaitu dari Nanggalo ke Padang dan sebelah djalan besar adalah dari penghabisan pelabuhan pesawat terbang Tabing (tidak termasuk stasion Tabing) terus ke Padang, dan sampai disinilah kira-kira kekuasaan Belanda pada Persetudjuan Linggardjati.



Pasal 21.

PENJUSUNAN KOMANDEMEN SUMATERA.

PADA tanggal 5 Nopember 1945, oleh Markas Tertinggi T.K.R. di Djawa diangkat Dr. A. K. Gani djadi Organisator dan Koordinator T.K.R. se-Sumatera, jang dalam djabatannja ini mengangkat pula Djenderal Major Suhardjo Hardjo Wardojo mendjadi Kepala Staf Umum Markas Besar T.K.R. Sumatera. Suhardjo adalah seorang jang mendapat pendidikan militer sampai berpangkat Kapten dizaman Belanda, dan belakangan memimpin transmigrasi di Metro, Sumatera Selatan.

Dengan pengalamannja ini, maka Djenderal Major Suhardjo segera memberi petunjuk-petunjuk tentang penjusunan tentera setjara modern dari barisan-barisan bersendjata jang telah dibentuk ditiap tempat. Mulai dari Sumatera Selatan disusunnja ketenteraan, lalu ia berdjalan ke Sumatera Tengah, menjusun pula disini, buat meneruskan perdjalanannja lagi ke Sumatera Utara, menjusun ketenteraan disitu pula. Sehingga kemudian terbentuklah di Sumatera 3 Divisi, jaitu Divisi Gadjah di Sumatera Utara, Divisi Banteng di Sumatera Tengah, dan Divisi Garuda di Sumatera Selatan. Selesai penjusunan ini, lalu disusunnja pula Markas Komandemen Tentera Sumatera, jang berkedudukan di Bukittinggi. Komandemen ini dibagi kepada sebelas seksi, jang susunannja sebagai berikut : Panglima Tinggi Kepala Komandemen Tentera R.I. Sumatera :

Djenderal Major R. Suhardjo Hardjo Wardojo.

Kepala Markas Komandemen: Kolonel Klas I Moehamad Noech.

Kepala Seksi Sekretariat jaitu Seksi I Markas Komandemen : Letnan Kolonel Amin Kaoem.

Kepala Seksi Tata-Usaha Seksi II Markas Komandemen : Kolonel Klas I Hasan Kasim.

Kepala Seksi Organisasi jaitu Seksi III Markas Komandemen : Kolonel Klas I M. Simbolon.

Kepala Seksi Siasat Perang (Strategie) jaitu Seksi IV Markas Komandemen : Kolonel Aboendjani.

Kepala Seksi Penerangan dan Perhubungan jaitu Seksi V Markas Komandemen : Letnan Kolonel Abdullah Kartawirana.

Kepala Seksi Keuangan jaitu Seksi VI Markas Komandemen : Letnan Kolonel Raden Kadiman.

Kepala Seksi Kesehatan jaitu Seksi VII Markas Komandemen :
Letnan Kolonel Dokter Pirngadi.

Kepala Seksi Pimpinan Polisi Tentera jaitu Seksi VIII Markas
Komandemen : Kolonel Ahmad Tahir.

Kepala Seksi Persendjataan jaitu Seksi IX Markas Komandemen :
Kolonel Ismael Lengah untuk sementara diwakili oleh Major Ar-
tillerie Kiswoto.

Kepala Seksi Kehakiman jaitu Seksi X Markas Komandemen :
Letnan Kolonel Mr. Nazaroeddin.

Kepala Seksi Mobilisasi dan Barisan Rakjat jaitu Seksi XI
Markas Komandemen : Kolonel Sjarif Usman.

Pimpinan Sub. Komandemen I diserahkan kepada Saudara
Doktor Adenan Kapau Gani Sub. Gubernur Sumatera Selatan
Palembang.

Pimpinan Sub. Komandemen II diserahkan kepada Kolonel Klas I
Dachlan Djambek, Komandan Divisi III Tentera R.I. Sumatera.

Pimpinan Sub. Komandemen III diserahkan kepada Teuku Moe-
hammad Daud Sjah, Residen R.I. daerah Atjeh Raja.

Susunan Dewan Panglima (Generale Staf).

Ditetapkan sebagai Anggauta Dewan Panglima Sumatera :

1. Kolonel Klas I Muhamad Noech.
2. Kolonel Klas I Hasan Kasim.
3. Kolonel Klas I M. Simbolon.
4. Kolonel Aboendjani.
5. Letnan Kolonel Abdullah Kartawirana.

Ditetapkan sebagai Panitera Dewan Panglima (Sekretaris pada
Generale Staf).

Letnan Kolonel Amin Kaoem, Kepala Seksi I Markas Koman-
demen.

Kepala Intendans, Detasemen dan Personalia:

Kapten Intendans Boerhanuddin Loebis.

Ditetapkan sebagai: Kepala Pasukan Detasemen Markas
Komandemen :

Kapten Rabani, bekas Opsir staf Sub. Komandemen III.

Ditetapkan sebagai : Kepala Sub. Seksi-seksi Markas Komande-
men Tentera R.I. Sumatera :

1. Kepala Sub. Seksi Pendidikan : Letnan Kolonel Moenir.
2. Kepala Sub. Seksi Komunikasi: Kapten Soedarsono merangkap
Kepala Perhubungan Divisi III,

3. Kepala Sub. Seksi Perintah, Major Mansjoer.

Permakluman diatas dianggap sebagai pengumuman mutasi terhadap para Opsir jang bersangkutan.

Susunan ini diumumkan pada tanggal 3 Djuli 1946, dimana djuga ditetapkan Kolonel Dachlan Djambek dinaikkan mendjadi Kolonel Klas I, Letnan Kolonel Ismael Lengah dinaikkan mendjadi Kolonel, Letnan Kolonel Sjarif Usman dinaikkan mendjadi Kolonel, Major Munir mendjadi Letnan Kolonel, Major Thalib dinaikkan mendjadi Letnan Kolonel.

Penjusunan selandjutnja dari Divisi Banteng :

Serentak dengan penjusunan Markas Komandan Sumatera ini, Divisi III Banteng diubah mendjadi Divisi IX Banteng T.R.I. Komando Sumatera. Dan untuk mendjaga disiplin anggota tentera, dan mendjalankan tugas dalam perdjjuangan peperangan, maka dibentuklah Polisi Tentera (P.T.) Divisi IX Banteng dan disempurnakan susunannja dibawah pimpinan Komandan P.T. Major Sjafei jang bermarkas di Bukittinggi. Di Pakan Baru djuga disusun Polisi Tentera dibawah pimpinan Kapten Mansjurdin, dan kemudian dipimpin oleh Letnan Djamhur Djamin.

Dalam pada itu spionage dan kontra spionage musuh amatlah hebatnja, jang mana buat melawan ini dan untuk mengetahui gerak gerik musuh dalam lapangan politik dan militer disusunlah badan penjelidik (B.P.) Divisi IX Banteng jang bermarkas di Bukittinggi pula.

Disusun pula Badan Penerangan Tentera Divisi IX dibawah pimpinan Kapten Nasroen A.S., jang melantjarkan penerangan perdjjuangan kedalam dan keluar lingkungan ketenteraan dengan segala matjam media legaal dan illegaal, dan menerbitkan majdallah dan buku-buku jang penting untuk tentara dan umum.

Persendjataan adalah soal utama pada masa itu, dan dengan segala djalan diusahakan mendapatnja. Baik dengan dirampas dari musuh dalam pertempuran, maupun dengan dibeli dari saudagar-saudagar jang sanggup menjelundupkannja dari luar negeri. Begitu djuga membuat sendiri sendjata ini sangat digiatkan. Untuk ini maka didirikanlah pabrik sendjata di Pajakumbuh dan Sawahlunto, dimana dibuat sendjata-sendjata baru dan diperbaiki sendjata-sendjata jang sudah rusak. Pabrik sendjata ini dipimpin oleh Kapten Maraimin.

PEMBENTUKAN TENTERA NASIONAL INDONESIA (T.N.I.).

Dari uraian diatas tampaklah kepada pembatja bagaimana pertumbuhannja tenaga perdjjuangan bersendjata dari R.I. ini, jaitu tentera dan barisan-barisan rakjat. Berdirinja barisan-barisan

ini atas usaha partai-partai politik, pada mulanya mempertjepat lantjarnya perdjjuangan, tetapi dalam perdjjalanan keadaan dimana partai-partai politik telah mulai bertikai paham sebelum dan sesudah ditanda-tanganinja Linggardjati, antara jang pro dan anti kepada naskah itu, mendjadikan barisan-barisan terlibat pula dalam pertikaian politik, sehingga sulit menjatukan kekuatannja dibawah satu komando pertempuran, jang dalam menghadapi Belanda memang sjarat mutlak.

Bukti jang njata dari keadaan ini ialah **Peristiwa Tiga Maret**, dimana T.R.I. bertempur dengan Hizbullah, karena usaha pihak-pihak jang tidak ingin melihat kesatuan perdjjuangan rakjat Indonesia di Sumatera Tengah pada masa itu.

Oleh karena itu Presiden Panglima Tertinggi A.P. pada tanggal 5 Mei 1947 mengeluarkan satu dekrit dimana ditetapkan bahwa :

Pertama : Dalam waktu jang sesingkat-singkatnja mempersatukan T.R.I. dengan lasjkar-lasjkar mendjadi satu organisasi tentera.

Kedua : Menjerahkan pelaksanaannja kepada satu panitia jang diketuai oleh Presiden sendiri sebagai Panglima Tertinggi.

Pada tanggal 3 Djuli diresmikanlah berdirinja Tentera Nasional Indonesia, dan keluarlah pengumuman Tentera Komandemen Sumatera No. 5—47 dimana diperintahkan bahwa :

Tiap-tiap putjuk pimpinan kelasjkan supaja segera menjusun organisasi dan susunan (formasi kelasjkan), sesuai dengan organisasi dan susunan tentera, dan hasil pekerdjaan tersebut harus disampaikan dengan selekas-lekasnja kepada putjuk pimpinan T.N.I.

Kemudian tiba perintah dari Djenderal Sudirman supaja sementara menunggu instruksi lebih landjut, dibentuk Dewan Pimpinan T.N.I. Daerah.

*
**

Pasal 22.

DAERAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU DAN PERISTIWA BAGAN SIAPI-API.

DENGAN menjerahnja Djepang pada tanggal 14 Agustus 1945, bangsa Tionghoa jang merupakan penduduk jang amat banjak djumlahnja dikepulauan Riau, terutama disekitar Bagan Siapi-api, merasa bahwa mereka turut menang bersama negara-negara Lima Besar dan mengingini kedudukan jang tinggi pula dalam masjarakat di Kepulauan Riau.

Kota Bagan Siapi-api sendiri berpenduduk lebih kurang 30.000 orang jang sebagian besar terdiri dari bangsa Tionghoa. Hasilnja jang terutama adalah ikan jang dikirimkan keseluruh podjok dunia. Ahli-ahli ekonomi menegaskan bahwa perikanan di Bagan Siapi-api ini adalah jang nomor dua besarnja didunia. Disinilah terdjadi-nja insiden-insiden berupa pertempuran antara bangsa Indonesia dengan bangsa Tionghoa, jang tidak sedikit memakan korban djiwa dan harta benda.

Oleh karena pertempuran di Bagan Siapi-api ini mempunyai sifat jang berbeda dari pertempuran-pertempuran lain di Sumatera Tengah, maka kita hendak menguraikan peristiwa ini dengan sedikit pandjang.

Pada zaman Belanda di Bagan Siapi-api ini telah ada beberapa organisasi rakjat Indonesia seperti Serikat Islam dan Muhammadijah, sedangkan dari pihak bangsa Tionghoa ada pula organisasi-organisasi Sosial Ekonomis, dan dengan ditundjang Belanda ada pula sebuah missi Roomskatholik. Bangsa Tionghoa jang tinggal disini dengan Persatuan Dagangnja memegang kendali ekonomi, dan mereka ini memang keras rasa kebangsaannja sebagai bangsa Tionghoa jang sedang berdjuang menentang Djepang.

Setelah Djepang datang, segala gerakan ini berhenti, karena semua tenaga masjarakat dikerahkan Djepang untuk membantu peperangan Asia Timur Raya.

Setelah tentera Djepang menjerah, maka proklamasi kemerdekaan terlambat tibanja di Bagan Siapi-api. Pada ketika belum ada

pendjelasan dari pemerintah Keresidenan Riau, maupun dari pemerintah setempat di Bagan Siapi-api ini, maka mendaratlah tentera Sekutu dari persembunjiannja dihutan sekitar kampung Sungei Ular Penipahan, jang mana mereka ini berada disitu karena diturunkan dari pesawat terbang seketika Djepang masih berkuasa.

Kedatangan tentera Sekutu ini disambut dengan kegembiraan besar-besaran oleh bangsa Tionghoa dengan mengibarkan bendera Kuo Min Tang jang sudah tiga setengah tahun disembunjinan. Sementara itu telah terdengar berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi tiada disertai penjelasan dari pemerintah.

Maka ditengah-tengah sambutan jang meriah dari bangsa Tionghoa itu masuklah tentera Sekutu ke Bagan, dan sehari sesudah mereka berada disana, dikeluarkannjalah maklumat bahwa semua pegawai negeri harus tetap bekerdja sebagaimana biasa. Rakjat diminta tenang serta mendjaga keamanan dan Belanda akan kembali untuk mengatur ketenteraman umum. Bangsa Tionghoa bergembira, tetapi bangsa Indonesia sangat berketijil hati. Pemimpin-pemimpin kemudian lalu berhubungan dengan daratan Sumatera, dan setelah mendapat kepastian tentang kemerdekaan, maka disusunlah pemerintahan R.I. sedangkan kedatangan Sekutu dianggap sepi sadja oleh masjarakat dan rakjat Indonesia, dan dengan segala daja Sang Merah Putih dikibarkan ditiap-tiap rumah.

Demikian keadaan sampai bulan Oktober '45 dimana tentera Belanda mengadakan pendaratan dibawah pimpinan Letnan Pabeus, dan seorang anak buahnja suku Ambon menurunkan bendera Merah Putih jang berkibar dimuka kantor Pos. Rakjat djadi marah, dan pukul 4 sorenja berlangsung satu demonstrasi protes, jang mana kemudian atas usaha Kepala Pemerintah saudara B. A. Muchtar didapat penjelesaian dengan Belanda, bahwa Merah Putih dapat dikibarkan terus.

Kemudian rasa kemerdekaan ini semakin merata, dan terbentuklah Komite Nasional Kewedanaan dan T.K.R. untuk memperkuat pemerintah R.I.

Pengibaran bendera Tionghoa Kuo Min Tang jang terus menerus dilakukan oleh bangsa Tionghoa dengan tak mengibarkan Merah Putih disampingnja, sangat tak menjenangkan perasaan pemuda-pemuda Indonesia, terutama para pemuda pedjuang bersendjata, jang bergabung dalam T.K.R. Darat dan Laut. Udara mendjadi panas antara kedua belah pihak, dan ketika pada suatu kali bendera Tionghoa diturunkan dan dirobek-robek, terdjadilah pertentangan jang mengakibatkan pertempuran pada tanggal 12 Maret 1946.

Inilah peristiwa Bagan jang pertama kali !

Bangsa Indonesia mempergunakan beberapa putjuk senapan jang dirampas dari Djepang, djuga tombak dan parang, sedangkan bangsa Tionghoa mempergunakan tombak besinja.

Perkelahian ini dapat diatasi dengan perdamaian antara kedua belah pihak.

Peristiwa Bagan jang kedua, 18 September 1946.

Dalam bulan September, jaitu pada tanggal 18 September, 5 bulan kemudian sesudahnja terdjadi insiden jang pertama, maka dengan tidak disangka-sangka telah terdjadi pula insiden kembali dengan pihak bangsa Tionghoa. Insiden jang ke-II ini lebih hebat dari jang pertama. Peristiwa ini terlebih dahulu dimulai oleh pihak Tionghoa dengan setjara tiba-tiba. Pihak Tionghoa mempergunakan sendjata jang terdiri dari brengun Lee-enfield, dan karabijn Djepang. Mereka dapat menawan beberapa orang Indonesia.

Bangsa Indonesia banjak jang mendapat luka-luka parah dan ada djuga jang dibunuh dengan kedjamnja.

Walaupun ada bala bantuan didatangkan dari Tandjung-Balai Asahan serta dibantu dengan sepasukan ALRI, tetapi sia-sia sadja dan tidak berhasil, karena mereka ini dikepung dan tiwas oleh pasukan-pasukan Tionghoa jang datang dengan persendjataan jang lengkap dari Pulau Halang-Besar. Komandan Pasukan ALRI saudara Siahaan tiwas dalam pertempuran, kena tembakan dari pihak Tionghoa.

Dalam pada itu orang-orang Tionghoa dapat meluaskan daerah pertempuran sampai keluar daerah Bagan Siapi-api seperti Penipahan, Sinaboi dan mereka tidak mau lagi tahu menahu dengan kekuasaan R.I.

Oleh pemerintah pusat Propinsi Sumatera jang pada waktu itu berkedudukan di Pematang Siantar, dikirimlah delegasi ke Bagan Siapi-api untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mengembalikan keamanan dan ketertiban umum di Bagan Siapi-api.

Rombongan tersebut diketuai oleh Mr. Rafinus Lumban Tobing dan anggota-anggota delegasi terdiri dari :

Saudara B. A. Muchtar dari Keresidenan Riau Pakan Baru, jang sekarang mendjadi Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis.

Saudara Amir Hamzah dari Komandemen.
Saudara Major Jacob dari A.L.R.I.

Saudara Dt. Mangku dari Keresidenan Riau.
Saudara Dr. G. L. Tobing dari Djawatan Kesehatan.

Dr. G. L. Tobing sudah meninggal dalam clash pertama sewaktu tentera Belanda menjerang Pematang Siantar dari Medan.

Dengan kedatangan rombongan tersebut maka tertjapailah kembali perdamaian antara pihak Indonesia dan Tionghoa. Atas semufakat bersama perundingan itu dapat menghasilkan perdamaian, dan didirikanlah suatu badan jang dinamai Polisi Keamanan jang didalam bahasa Tionghoa dinamakan „**Poh An Tuan**”.

Badan inilah jang bertugas mendjaga keamanan bersama, sampai pada waktu Belanda menduduki Bagan Siapi-api dalam agresi kedua.

Pasal 23.

KETENTERAAN MENGHADAPI AGRESI BELANDA JANG PERTAMA.

DALAM susunan tentera jang beginilah Belanda melantjarkan agressinja jang pertama pada 21 Djuli 1947. Ketenteraan telah tersusun diseluruh Sumatera Tengah, jaitu dikeresidenan Sumatra Barat dan Riau, karena Djambi adalah masuk daerah ketenteraan Sumatera Selatan. Pun barisan-barisan telah bertindak menjusun formasinja masing-masing menurut susunan ketenteraan, sebagai pendahuluan untuk bergabung dalam Tentera Nasional Indonesia (T.N.I.).

Pada 21 Djuli Belanda bergerak keluar kota Padang, dan dalam pertempuran selama dua hari berturut-turut, Belanda dapat menduduki Indarung, sehingga pertahanan kita disusun dikampung Ladang Padi. Pada tanggal 23 Djuli terdjadi pertempuran di Tanah Bengkok dan Lubuk Peraku, dan pada tanggal 25 Belanda masuk sampai di Air Sirah, tetapi dapat dipukul mundur kembali ke Indarung, dan dalam pertempuran ini pasukan kita mendapat bantuan dari sepasukan Mobrig dari Bukittinggi. Pada tanggal 26 Djuli Belanda maju lagi dan terdjadi pertempuran di Kepala Datar dalam kabut tebal, dimana Belanda dapat disergap dan diserang dengan tiba-tiba, sehingga mereka mundur ke Padang. Demikianlah keadaan difront Padang Timur ketika tiba perintah cease fire. Dan akhirnya batas Padang-Solok mendjadi garis demarkasi baru.

Di *front Utara* pada tanggal 22 Djuli 1947, Belanda menghudjani pertahanan kita di Tabing dengan mortir dan senapan mesin dengan maksud hendak maju menudju Kampung Batu, Kota Tinggal dan Durian Tarung. Pertahanan kita terpaksa diundurkan kebelakang disekitar Duku dan Pasar Usang. Pada tanggal 27 Djuli, Belanda mengerahkan kekuatan jang hebat buat menerobos pertahanan kita jang sudah diatur begitu rupa. Pada saat ini, musuh berhasil menduduki Duku dan Pasar Usang. Malamnja tentera kita bersama dengan GATI (bekas Heiho dari Halmahera) memperlihatkan kegesitan dan ketangkasan dalam mempertahankan Daerah R.I., dan untuk merebut kembali daerah jang diduduki musuh. Pertempuran sengit terdjadi, dimana diantaranya kita dapat membakar asrama musuh.

Besoknja Belanda kembali melakukan serangan dengan tank, meriam, senapan mesin dan dengan dilindungi kapal udara jang mendjatuhkan bom disekitar Pasar Usang dan Lb. Alung.

Dalam pada itu tempat-tempat disekitar Lb. Alung seperti Pasir Lawas dan Sintuh tetap dikuasai oleh tentera kita. Dalam keadaan beginilah persetudjuan Renville ditanda tangani, dan kedua belah pihak harus tetap digaris status quo, jang telah ditetapkan didalam perundingan, dimana disebelah Barat berbatas dengan Toboh, dan Sintuk, disebelah djalan besar, dengan Batang Tepaki dan sebelah timur dengan Pasir Lawas.

Karena daerah front Utara semakin luas dan tidak tjukup dipertahankan dengan tenaga satu bataljon sadja, maka sudahnja Renville ditanda tangani pada 17 Djanuari 1948, didatangkanlah bantuan tenaga dari Legiun Sjahid sebanyak 3 batljon untuk dijadikan Resimen VI dengan susunan sbb.:

Komandan Resimen Major Kemal Mustafa, Komandan Bataljon I Kapten Hasan Basri, Bataljon II Alm. Kapten Baharuddin, Bataljon III Lts. Maasum, Bataljon IV Lts. Abu Bakar, Bataljon V Lts. Sjuib Ibrahim.

Markas Resimen bertempat di Padang Pandjang, sedangkan daerah Pariaman dan sekitarnja diserahkan kepada tanggung djawab ALRI jang dipimpin oleh Major Suleiman. Pun bekerdja sama dengan beberapa seksi Mobrig dan Polisi Umum jang dipimpin oleh Saudara Zaitul Ichlas jang menjalankan tugas mendjaga keamanan lalu lintas disana.

Difront Selatan mereka madju pada tanggal 21 Djuli sampai ke Siguntur Tua dengan pos terdepannja di Sungei Gundang. Untuk menahan serangan ini maka Bataljon Topan dibantu oleh Bataljon Gunung Raja dengan satu kompi jang kemudian disusul pula oleh satu seksi bersendjata lengkap dari Markas Regiment sendiri. Demikianlah garis pertahanan difront Selatan ini dapat dipertahankan selama perundingan pelaksanaan Naskah Renville, dengan garis demarkasi baru jang letaknja kira-kira 200 meter dari pertahanan kita di Siguntur Tua. Walaupun telah ada gentjatan sendjata, namun Belanda kerap djuga melantjarkan serangan kepada kita, dan dua kali mereka mendarat di Sei Pinang dan Sei. Pisang dimana pada pendaratan jang kedua di Sei. Pisang ditangkis oleh anggota Batalion Topan dan Angkatan Laut kita jang berpangkalan di Ampang Pulau Tarusan. Ketika itu pimpinan batalion telah dipegang oleh Kapten Maklum (Toke).

Pun dalam agresi pertama ini, selain dari daerah Padang, maka daerah Riau djuga mendapat serangan dari Belanda, terutama daerah perairan ditepi-tepi pantai seperti Bengkalis, Kuala Siak, Selatpandjang, Tembilahan, Bagan Siapi-api dan daerah ketjil lainnya. Blokade dimuara Sungei Siak dan Sungei Indragiri diperkuat Belanda dengan kapal R.P. jang dipersendjatai dengan lengkap. Bengkalis dan Selatpandjang ditembaki dengan meriam, nelajan kita banjak ditangkap, perahu-perahu pengangkut tentera dan perlengkapan kita diburu, hingga perhubungan kedaerah pulau-pulau

terputus dan susah sekali ditempuh. Perdagangan antara Pakan Baru dan Singapore yang menjadi sumber barang Import tertahan dan berkurang karenanya. Tentera Belanda sungguh-sungguh memperlihatkan kekedjamannya, yang tidak dapat dilupakan oleh seluruh bangsa, begitupun oleh rakyat ditepi pantai dan kepulauan Riau. Belanda tidak dapat menguasai daerah perairan lain seperti Bengkalis Selat Pandjang dan lain-lain hanya mereka berkuasa di beberapa buah pulau-pulau ketjil dikeliling kepulauan Riau sekarang, yang semendjak awal proklamasi mereka duduki.

Meneruskan menjusun tentera nasional Indonesia.

Sesudah agresi pertama diakhiri dengan cease-fire, dan daerah Republik hanya tinggal sepertiga pulau Djawa dan empat perlima Sumatera, (dengan tjatatan bahwa kemadjuan Belanda difront Sumatera Tengah hanya sedjauh-djauhnya 23 K.M. dari batas kota Padang) maka diteruskanlah usaha penjusunan T.N.I., untuk memasukkan barisan-barisan rakyat kedalam ketentaraan, sesuai dengan dekrit Presiden tanggal 5 Mei. Maka dalam bulan Agustus 1947 dibangunkanlah di Sumatera satu kesatuan lasjkar-lasjkar dengan nama *Legiun Sjahid*, dengan Koordinatornja Kolonel Sjarif Usman, yang dijalankan atas perintah Panglima T.N.I. Komandemen Sumatera, dengan persesuaian partai-partai. Kekuatannya Legiun Sjahid ini adalah satu regiment dengan bandingan sendjata 1 : 4, jaitu untuk satu sendjata api diterima dalam T.N.I. 4 orang. Penggabungan ini meliputi Hisbullah, Lasjmi, Barisan G.P.I.I., Sabillah, Barisan Merah, Sjaifullah, Tentera Allah, Barisan Hulubalang, Barisan Istimewa, dan lain-lain.

Maka Legiun Sjahid ini adalah tingkat pertama dari pelaksanaan dekrit Presiden R.I. tentang pembentukan T.N.I. itu.

Usaha-usaha seterusnya : Menggabungkan barisan-barisan masuk T.N.I.

Dalam bulan Nopember '47 Panglima T.N.I. Sumatera memerintahkan supaya nama Legiun Sjahid diganti dengan T.N.I. Maka Legiun Sjahidpun digantilah namanya dengan T.N.I. Resimen Istimewa Komandemen Sumatera.

Dalam pada itu karena ia berada di Sumatera Tengah, maka sementinja Resimen Istimewa masuk dalam Divisi IX Banteng. Maka dilangsungkanlah perundingan beberapa kali dengan Panglima Divisi IX dan stafnja, dimana T.N.I. Resimen Istimewa Komandemen Sumatera meminta supaya kemasukannya kedalam Divisi IX dengan kesatuan resimen. Tetapi Divisi IV menolak dan menghendaki supaya Resimen Istimewa masuk dalam kesatuan bataljon.

Mengadakan pimpinan keagamaan dalam ketenteraan.

Dalam bulan Desember '47 maka Panglima Tentera Sumatera menetapkan untuk mengadakan satu bahagian baru dalam ketenteraan, jang berkewajiban memberi pimpinan keagamaan dalam masing-masing staf dari kesatuan, mulai dari staf Komandemen hingga staf bataljon. Hal ini adalah oleh karena perlunya diselenggarakan pendidikan dan pemeliharaan bathin (moraal) bagi tentera dan lasjkar-lasjkar, untuk mempertebal kepertjajaan kepada Ketuhanan Jang Maha Esa, agar dalam sikap dan tindakannya memperlihatkan perikemanusiaan dan kesopanan, baik terhadap warga negara sendiri maupun terhadap musuh. Hal ini adalah sangat perlu bagi mereka jang selalu berdiri berhadapan dengan musuh dalam perjuangan mati-matian, dimana ukuran-ukuran moraal sering menjadi kabur oleh tuntutan-tuntutan perjuangan.

Maka diangkatlah untuk memimpin keagamaan ini, beberapa orang pemimpin dan ahli agama jang diberi pangkat Opsir, dan mana-mana kesatuan jang telah berhasil mendirikan badan-badan baru itu, bolehlah memulai usahanya menurut tjara jang praktis dan efektif.

Dan sebelum ini telah diangkat saudara A.R. St. Mansur pemimpin Muhammadiyah menjadi Djenderal Major Titulair, dengan tugas diantaranya memperhatikan soal-soal keagamaan dalam ketenteraan ini.

Gabungan lasjkar kedalam T.N.I. selesai.

Pada tanggal 1 Djanuari '48, Resimen Istimewa memajukan tuntutan kepada Panglima Sumatera supaya diakui dan disjahkan kesatuan Resimen Istimewa Komendemen Sumatera, dengan segala formasinja, dan agar perbelandjaan dikeluarkan untuk sebesar satu resimen T.N.I. Dan kalau hal ini tak dapat dipenuhi, meminta supaya anggotanja dipulangkan kemasjarakat.

Pada tanggal 19 Djanuari '48, dua hari sesudah penanda tangan Renville, datanglah djawaban dari Panglima Sumatera jang berisi perintah sbb.:

1. Supaja Kesatuan Resimen Istimewa dibubarkan.
2. Kalau hendak masuk T.N.I. harus berunding dengan Divisi IX.
3. Kalau tidak dikembalikan kemasjarakat.

Sesudah berunding selandjutnja dengan Divisi IX, dan dengan persetudjuan organisasi dan partai-partai maka diputuskanlah bahwa Resimen Istimewa Komendemen Sumatera bergabung dalam Divisi IX dengan kesatuannya tiga batalion riell. Dan sekalian staf Resimen Istimewa Komendemen Sumatera, dipindahkan pada staf Divisi IX.

Dan pada 2 Pebruari '48 diresmikanlah penggabungan Resimen Istimewa ini kedalam Divisi IX dengan mengambil tempat ditanah lapang Kantin Bukittinggi.

Dalam pada itu para anggota barisan jang tidak termasuk dalam formasi jang tiga batalion tsb. lalu dipulangkan kembali kemasjara-kat, dan meneruskan perdjuaan dalam susunan lain, kebanyakan dalam organisasi B.P.N.K. (Badan Pengawal Negeri dan Kota).

Reorganisasi selandjutnja dalam divisi IX Banteng.

Dengan masuknja lasjkar-lasjkar ini kedalam T.N.I. Divisi IX Banteng, maka divisi ini bertambah satu resimen lagi jang diberi nama resimen VI dibawah komando Major Kemal Mustafa.

Dan dalam bulan Agustus '47 sesudahnja agresi pertama, maka resimen IV di Riau jang berada dibawah komando Let. Kol. Hasan Basri direorganisir pula dengan dibagi dua jaitu:

1. Resimen IV dibawah pimpinan Let. Kol. Hasan Basri dengan batalion-batalionnja:
Batalion I dipimpin oleh Kapten Jusuf di Pakan Baru.
Batalion II dipimpin oleh Lts. Iskandar di Bengkalis.
Batalion III dipimpin oleh Kapten Saidina Ali di Siak.
2. Resimen V dipimpin oleh Major Toha Hanafi, dengan batalion-batalionnja:
Batalion I dipimpin oleh Kapten Marah Halim di Rengat.
Batalion II dipimpin oleh Les. Sumaria di Taluk.
Batalion III dipimpin oleh Lts. Arsjad Abdis di Tembilahan.

IX Banteng T.N.I. Komando Sumatera mendjadilah sbb.:

Panglima Divisi — Kolonel Ismael Lengah.
Komandan Resimen I Letnan Kol. A. Halim.
Komandan Resimen II Letnan Kol. A. Thalib.
Komandan Resimen III Letnan Kol. A. Husein.
Komandan Resimen IV Letnan Kol. Hasan Basri.
Komandan Resimen V Major Toha Hanafi.
Komandan Resimen VI Major Kemal Mustafa.

Sampai achir kwartaal ke-II tahun 1948 Divisi IX Banteng berdjalan sebagai biasa, jaitu sambil berdjuaan menjusun diri, dimana banjak djuga terdjadi perubahan-perubahan susunan anggota-anggota stafnja, serta kesatuan-kesatuannja.

Pasal 24.

PENJUSUNAN ALRI (ANGKATAN LAUT R.I.).

SERENTAK dengan penjusunan T.K.R., maka disusun pulalah T.K.R. Laut jang bermarkas di Pariaman, dan dimasukkan kedalam divisi IX Sumatera Tengah.

Dengan kekuatan kira-kira 1200 orang, disusunlah T.K.R. Laut ini sepanjang daerah perairan Sumatera Tengah jaitu Pariaman, Painan, Sikakap, Air Bangis, Tiku, Pakan Baru dan Bengkalis. Pimpinan Umum dipegang oleh Major Laut Suleiman jang berkedudukan dipangkalan Alri Pariaman.

Kemudian nama T.K.R. Laut diganti dengan T.R.I. Laut, dan achirnja dijadikan Alri (Angkatan Laut R.I.).

Tugas Alri jang pertama pada waktu itu, ialah patroli laut dan perairan sungai, dan dimana-mana bekerdja sama dengan Angkatan Darat dalam usaha-usaha perbekalan dan persendjataan ditempat-tempat jang djauh dari front, serta bertempur bersama Angkatan Darat disekitar front Padang dan perairan sebelah ke Timur.

Sesudah Belanda melantjarkan agressinja jang pertama dipertengahan tahun 1947, maka pada suatu kali sebuah kapal Inggeris melalui perairan Pariaman membawa barang-barang perbekalan dan pakaian untuk tentara Belanda. Dengan segera Alri bertindak menangkap kapal ini dan mensita isinja. Hal ini dapat memberi sumbangan besar untuk mengatasi kesulitan perbekalan pada masa itu.

Pun pembelian dan penjelundupan sendjata didaerah perairan Riau dan Djambi, diselenggarakan dengan sekuat-kuatnja oleh Alri, karena memanglah sumber perbekalan dan persendjataan berasal dari Malaya dan Singapura jang diselundupkan melalui perairan Timur ini.

Rasionalisasi dan rekonstruksi.

Salah satu dari rentjana empat pasal dari kabinet presidentil Hatta ialah: rasionalisasi dan rekonstruksi, jang diawal kwartaal ketiga tahun 48 dimulailah pelaksanaannja di Sumatera Tengah dilapangan ketenteraan. Pemerintah menghendaki agar T.N.I. betul-betul mendjadi tentera jang sanggup berdjuaug dan bergerilja dengan tjara dan taktik jang dapat mendjamin kemenangan dalam perdjuaugan berlama-lama.

Dalam pada itu bung Hatta datang sendiri ke Sumatera dalam djabatannja sebagai P.M. dan Menteri Pertahanan a.i. untuk meninjau pelaksanaan rasionalisasi ini. Maka dalam tentera Div. IX Banteng Sumatera Tengah dilaksanakanlah pembagian mendjadi tiga staf jang dinamakan dengan staf P. I., P. II dan P. III.

Staf P. I jang berada dibawah pimpinan Let. Kol. A. Halim terdiri dari bahagian Operasi jang meliputi Operasi dan genie. Kedua ialah bahagian C.P.M. jang meliputi djuga akan B.P. dan Penerangan, jang kemudian disatukan mendjadi Penghubung Masjarakat.

Staf P. II jang dipimpin oleh Let. Kol. Dahlan Ibrahim terdiri dari bahagian-bahagian Intendans/perengkapan, pengangkutan, dan Persendjataan, termasuk kilang-kilang sendjata di Gelanggang (Pajakumbuh) dan Sawah Lunto.

Staf P. III jang dipimpin oleh Major Thalib terdiri bahagian-bahagian Organisasi, Personalia, Kesehatan dan Penampungan Rasionalisasi.

Dalam pada itu staf P. II djuga langsung mempunyai usaha sendiri untuk persiapan menampung para anggota tentera jang menurut staf P. III harus ditampung. Usaha ini ialah a.l. kilang-kilang benang dan kain di Kota Nan Empat Pajakumbuh, Kilang rokok di Pajakumbuh djuga, Kilang Kina di Piladang, pertukangan kaju, latihan tukang gunting rambut, dan pertukangan besi jang bertempat di Bukittinggi, dan penjelenggaraan irigasi di Sungai Dareh.

Pada waktu itu Djenderal Major Suhardjo dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Djokja, dan Kolonel Ismael Lengah dipindahkan pula ke Djokja untuk mendjadi Instruktur pada Akademi Militer di Djokja, jang berangkat pada 3 Desember 1948.

Untuk menggantikan Djenderal Suhardjo diangkat Kolonel Hidajat bekas Komandan Divisi Siliwangi Djawa Barat, dengan pangkat Panglima Tentera dan Territorium Sumatera (PTTS), dan djabatan Ismael Lengah sebagai Divisi Komandan dipegang buat sementara oleh Kepala Staf Divisi Banteng Let. Kol. Dahlan Ibrahim.

Dibawah pimpinan Kolonel Hidajat didjalankanlah di Sumatera tindakan-tindakan rasionalisasi, jang diantaranya ialah menurunkan dengan setingkat pangkat para Opsir Tentera dari Letnan II keatas diseluruh Sumatera.

Selanjutnja Divisi Banteng direorganisir lagi dengan membagi-nja kepada dua kesatuan jaitu:

1. Brigade Banteng Sub. Territorium Sumatera Barat TNI Komando Sumatera, dibawah pimpinan Let. Kol. Dahlan Ibrahim dan Kepala Staf Let. Kol. A. Halim bermarkas di Bukittinggi.

2. Sub. Territorium Riau/Indragiri dibawah pimpinan Let. Kol. Hasan Basri bermarkas di Pakan Baru.

Pun sifat ketentaraan dibagi mendjadi dua tjorak jaitu:

1. Bahagian Territorial, jang mengurus segala sesuatu, diluar hal-hal jang mengenai operasi.
2. Mobile Troepen (Pasukan Mobil) jaitu semata-mata menghadapi pertempuran. Komando mobile troepen ini dipegang oleh Panglima Tentera Kolonel Hidajat.

Dan pada kesatuan-kesatuan dibawah Sub. Territorium itu diadakan pula perubahan-perubahan, diantaranya sbb.:

Badan penjelidik Divisi IX Banteng dan Badan Penerangan Tentera Divisi IX Banteng dibubarkan dan didirikan suatu bagian baru dengan nama *Penghubung Masyarakat* jang bermarkas di Ujung Karang Bukittinggi. Penghubung Masyarakat mengeluarkan harian sendiri bernama „*Banteng*” jang ditjetak dipertjetakan sendiri. Semendjak tanggal 1 Desember 1948 Harian Banteng ini, jang membawa suara pimpinan ketentaraan Sumatera Tengah jang telah merasa pasti akan datangnja serangan Belanda, setiap hari meneriakkan dengan huruf besar-besar: PERANG, PERANG!!

Dalam pada itu anggota-anggota tentera jang memenuhi sjarat-sjarat ketentaraan untuk operasi militer (veldsoldaten) lalu dimasukkan kedalam mobiletroepen, sedang jang selebihnja masuk kesatuan Sub Territoriaal. Terhadap anggota-anggota tentera jang masuk kesatuan Sub Territoriaal ini diperhebat latihan-latihan ketentaraan jang diantaranya didjalankan dilapangan pendidikan tentera Sub Territoriaal Sumatera Barat di Bukittinggi (belakang Rumah Sakit Umum), dibawah pimpinan Major D. I. Pandjaitan dan Let. I Nurmatias. Begitu djuga susunan kesatuan Resimen IV dan Resimen V Divisi IX Banteng di Pakan Baru pun mengalami perubahan-perubahan. Keenam Bataljon jang didalam lingkungan Resimen IV dan Resimen V itu didjadikan tiga batalion dalam satu kesatuan Sub Territorium Riau-Indragiri, dibawah pimpinan Let. Kol. Hasan Basri.

Tiga Bataljon tsb. adalah sbb.:

Bataljon I di Pakan Baru dibawah pimpinan Kapten Arifin.
Bataljon I di Rengat dibawah pimpinan Kapten Marah Halim.
Bataljon III di Bengkalis dibawah pimpinan Letenan Iskandar.
Dan Major Toha Hanafi Komandan Resimen V didjadikan Kepala Staf Sub Territorium Riau-Indragiri.

*
**

-Pasal 25.

BELANDA MELANTJARKAN AGRESSI KE II.

DALAM susunan ketenteraan seperti yang diuraikan diatas itulah Belanda melantjarkan agressinja jang ke II dengan besar-besaran pada tanggal 19 Desember 1948, pada waktu mana pimpinan ketenteraan Sumatera Kolonel Hidajat baru sadja mengambil over pimpinannya.

Belanda maju dari Padang keseluruhan djurusan, dengan dipelopori oleh kendaraan-kendaraan berlapis wadja, dan dinaungi pesawat-pesawat terbang pemburu dan pembom.

Detail daripada djalan pertempuran dapat pematja teliti pada pasal tersendiri, sedangkan dalam pasal ini jang kita ambil titik beratnja ialah susunan ketenteraan dalam menghadapi pertempuran itu.

Untuk mentjotjokkan tempat dengan suasana pada waktu itu, maka Markas Ketenteraan dipindahkan, jaitu bertempat dimarkas Gubernur Militer. Dari tempat inilah tenaga jang telah bertjerai berai itu mulai disusun kembali, dan dari tempat ini pulalah komando diberikan kepada seluruh kesatuan-kesatuan.

Ini adalah satu hal jang sangat sukar dan sulit pada waktu itu, karena seluruh djalan-djalan raja dikuasai oleh musuh sehingga perhubungan antara satu daerah dengan daerah jang lain sangat sukar sekali.

Tempat itu ialah *Koto Tinggi* di Suliki. Dengan usaha-usaha jang sukar tetapi masih dapat didjalankan itu, maka pembagian tugas-tugas pimpinan kesatuan disusun menurut Sub-sub Komando dari A sampai C jang terdiri dari:

Sub Komando A dibawah pimpinan Major A. Halim (Matur).
Sub. Komando B dibawah pimpinan Major A. Husen (Solok).
Sub. Komando C dibawah pimpinan Major Alwi St. Maradjo (Kerintji).

Pimpinan komando atas seluruhnja dipegang oleh Let. Kol. M. Dahlan Ibrahim jang kemudian digantikan oleh Let. Kol. Dahlan Djambek.

Masing-masing sub Komando tersebut dibagi-bagi pula kepada beberapa front sektor dan sub sektor.

Akibat terpentjarnya tenaga-tenaga kesatuan karena agresi Belanda ke II itu, banjak anggota-anggota yang tersebar kian kemari dan tidak dapat menggabungkan diri kedalam kesatuannya semula. Maka oleh sebab itu banjaklah pula anggota tentera yang menggabungkan dirinya kedalam kesatuan lain atau mentjempungkan dirinya kedalam badan-badan sipil (Pemerintahan) dari lapisan bawah sampai lapisan atas. Diantaranya menjadi Wali Perang. Tjamat, Wedana, anggota Markas Pertahanan Rakjat Daerah/Wilajah, menjadi Komandan Barisan Pengawal Negeri & Kota, menjadi Komandan Pasukan Mobil Teras dan lain-lain sebagainya. Dengan tjara dan taktik demikian, tenaga dan kesanggupan dirinya untuk berdjuaug mempertahankan kemerdekaan tanah air tidak terbuang sia-sia.

Dengan alat sendjata yang djauh dari tjukup, dengan perbekalan nasi berbungkus, dengan perlengkapan seada-adanja; anggota-anggota tentera bersama-sama dengan rakjat menghadapi perdjuaugan, melakukan sabotase dan lain-lain sebagainya, sehingga musuh tidak merasakan aman dikota-kota yang didudukinja.

Perdjuaugan didaerah sub Komando A.

Ketika Belanda melantjarkan agresi ke II itu Resimen VI (front Utara) memegang daerah yang luas semendjak L. Alung sampai ke Padang Pandjang, dalam mana termasuk pusat pertahanan Lembah Anai dan sepanjang pesisir laut daerah Paria-man sampai ke Utara.

Pada tanggal 19 Desember itu djam 5 pagi pesawat-pesawat terbang Belanda telah menjerbu dan menembaki seluruh permukaan front utara ini, sedangkan pasukan-pasukan bermotor yang dipelopori oleh barisan tank menjerang pertahanan kita. Korban pertama djatuh dari kalangan Mobrig yang berkawal di Batang Tapakih.

Pasukan genie tentera Belanda sibuk memasang djembatan Tapakih yang dari semula sudah siap dibuatnja di Padang. Pada hari itu djuga Parit Malintang telah dapat dikuasainja, dan besoknja tanggal 20 Desember Belanda terus madju menduduki daerah Sitjintjin.

Maka pada malam itu semua djalan-djalan dan tempat-tempat yang perlu bagi kemandjuaug musuh antara Sitjintjin dan Singgalang, telah kita musnahkan.

Mulai tanggal 21 pertempuran menjadi dengan hebatnja, dan sambil bertempur, sebahagian tentera kita ditarik mundur, yang pada sorenja djam 4 telah sampai di Kandang Empat dan Singgalang, dengan kekuatan kira-kira 3 kompi, dibawah pimpinan Komandan Resimen Major Kemal Mustafa.

Diputuskan akan bertahan di Singgalang! Lalu dimulai menghanturkan djalang-djalan di Lembah Anai, tetapi djam setengah enam telah terdengar tembakan-tembakan arah ke Kubu Kerambil, dan tidak lama sesudah itu tembakan senapan mesin berat dari tank-tank telah menghudjani kota Padang Pandjang.

Dari Padang Pandjang ratusan tank-tank ini lalu menudju ke Singgalang, dimana tentera kita sedang menghanturkan djalang. Dalam kabut tebal pasukan-pasukan kita menjingkir sambil menembak dari pinggir-pinggir bukit, dan dekat trowongan kereta api, bertemulah dengan pasukan musuh jang madju dari Kaju Tanam.

Tentera kita berbelah dua, sebahagian mendaki bukit Djaot Tambangan, dan sebahagian mundur ke Singgalang.

Perjuangan dilandjutkan setjara bergerilja, dan kemudian Resimen VI ini dibentuk menjadi Sub Komando A. dibawah pimpinan Let. Kol. A. Halim dan komando pertempuran dipegang oleh Major Kemal Mustafa.

Markas Sub Komando A. berkedudukan di Matur, dan terbagi kepada beberapa pasukan:

Pasukan Hasan Basri didaerah Balingka, Panta, Sungai Djarang dan Kota-Gedang. *Pasukan Amarullah* didaerah Palupuh, Bondjol dan Lubuk Sikaping. *Pasukan M. Nur* didaerah Kabupaten P. Pariaman, termasuk perairan Tiku dan Naras. *Pasukan Maujar* didaerah Kota Tengah (Padang luar kota), dan *Pasukan Djamaluddin (Wak Ketok)* didaerah Padang Kota dan Luar Kota. Demikianlah masing-masing pasukan berdjuaug didaerahnja dengan pimpinan dari markasnja di Matur.

Tentera menjusun diri ditempat-tempat jang strategis sekitar Matur, kaki Merapi, serta arah ke pesisir menjusun diri sepanjang perairan Pariaman dan sekitar serta disekeliling kota Padang, dan mempunjai djalang perhubungan bersambung dengan pimpinannja di Matur melalui djalang Malalak jang penuh dengan rimba, dan berbukit berlurah sehingga tidak dapat diduduki musuh itu.

Belanda menjangka bahasa tentera bermarkas di Malalak, sehingga kampung Malalak ini dihudjani dengan senapan mesin.

Daerah jang menudju kemarkas Sub Komando A. ini dari djurusan Bukittinggi, adalah tempat strategis jang djuga ditempuh Belanda dahulu ketika ia menaklukkan Sumatera Barat dimasa Perang Bondjol. Jaitu djalang Bukittinggi - Pantar - Matur. Djalang ini pada mulanja telah ditempuh oleh tentera Belanda, dan mereka madju terus sampai ke Matur dan Padang Gelanggang dekat Manindjau. Tetapi kekuatan mereka belum tjukup untuk mengadakan posnja disitu, dan mereka terpaksa kembali kepang-

kalannya. Penghantjuran djalan di Koto Tuo pada waktu jang tepat ini, bersamaan dengan perusakan djalan disepandjang bukit dan lurah Pantar, telah dapat menghambat kemadjuan mereka dengan kenderaan bermotor, sedangkan kemadjuan patrolinja dengan djalan kaki, dapat „diladeni” dengan baik oleh tentera kita.

Satu djalan lagi untuk madju kelurah Pantar ialah dengan me-neberang ngarai melalui Sianok, jang mana dihadapi pertahanan Djambak jang gigih dari kompi Halilintar, sehingga djalan ngarai ini tetap tertutup bagi mereka.

Front jang selalu terbuka dan setiap waktu digempur Belanda dimana pertempuran-pertempuran gerilja berlangsung dengan sengit adalah di Kamang dan kaki Merapi, jang mempunjai djalan hubungan ke Markas Gubernur Militer Kota Tinggi melalui Suajan menembus Bukit Kamang. Lt. Kol. Dahlan Djambek jang berada di Kampung, djuga merangkap djabatan Bupati Militer Agam dan Komandan Daerah Pertempuran Agam. Tetapi kemudian djabatan Bupati Militer ini dipegang oleh saudara Said Rasad bekas Wakil Wali Kota Padang.

Kemadjuan mereka ke Utara dari Bukittinggi, terbentur kepada pertahanan di Palupuh, jang diperdjuangkan dengan gigih oleh tentera dan Mobrig, sehingga Kabupaten Pasaman dapat terpelihara dari pertempuran-pertempuran, dan djalan Bondjol-Koto Tinggi tetap tertutup bagi musuh.

Demikianlah perdjuangan disekitar Sub: Komando A. ini sangat menghebat pula didaerah pesisir Pariaman, dimana pertempuran berlaku ditempat jang datar, dan ribuan rumah rakjat mendjadi korban. Tetapi sesudah memasuki Bukittinggi dan Pariaman, musuh tak dapat menembus kedjantung hati Sub. Komando A. jang bersandar kedaerah pertahanan semasa *Perang Padri* ini.

Perdjuangan didaerah sub Komando B.

Pada tanggal 19 pertahanan Air Sirah didjalan menudju Ke Solok Sub. Komando B telah ditembus Belanda, dan pada hari itu djuga 4 buah pesawat terbang Katalina mendaratkan tentera Belanda didanau Singkarak, dengan dilindungi oleh pesawat-pesawat Mustang, dan masuk ke Solok pada tanggal 20 dari djurusan Lubuk Selasih dan Singkarak dengan lk. 400 truck dan tank serta pantserwagens. Kedudukan Markas dibagi dua, sesudah meninggalkan Solok, jaitu sebagian di Sidjundjung dibawah pimpinan Kapten Anwar Badu Wakil Komandan, dan sebagian di Alahan Pandjang dibawah pimpinan Komandan Resimen Major A. Husen. Kota-kota Sawah Lunto, Sidjundjung dan Alahan Pandjang lalu diduduki oleh musuh, dan Markas Resimen dipindahkan lagi dan disarukan di Koto Baru Muara Labuh dengan pimpinan Major A. Husen, dan stafnja Kapten Dahlan J., Kapten Anwar Badu, dan

Lts. H. Salim Jacoub, sedangkan sebahagian dari bengkel persen-djataan dapat dijalankan dibengkel Kebun Pecconina. Batalion I bertempat di Sei. Daerah yang merupakan tenaga mobil yang terbesar, bataljon II bermarkas di Sirukam Muara Labuh, Bataljon III bermarkas mobil, dimana sebagian pasukannya berada didaerah Lima Puluh Koto, sebagian di Lintau, sebagian di Belimbing, dan ada yang disekitar Sawah Lunto dan Sidjundjung. Garis pertahanannya di Batu Gajah dan Setangkai.

Dalam bulan Djanuari 1949 PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) berada di Muara Labuh (Abai Sangir dan Bidar Alam), terdiri:

1. Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Ketua.
 2. Mr. Teuku Mohd. Hassan.
 3. Umar Said, Kepala Polisi Sumatera.
 4. Mr. Lukman Hakim.
 5. Ir. Indratjaja.
 6. Kolonel N a z i r.
 7. Dr. Sambijono.
 8. Komodor muda Sujono.
- dan beberapa Opsir AURI.

Dalam bulan Maret 1949, 4 orang Opsir dari Sub. Komando B. diperbantukan kepada pemerintah untuk menolong lantjarnya roda pemerintahan, jaitu Lts. H. Salim Jacoub mendjadi Wedana Militer di Muara Labuh, Lts. Dt. Bd. Pandjang djadi Wedana Militer di Solok, dan Ltd. Boer Jusuf mendjadi Wedana Militer di Sawah Lunto, dan Kadet Anwar Hamid mendjadi Tjamat Militer di Sulit Air. Sebagian dari kawan-kawan itu sampai sekarang masih berada dalam kalangan sipil.

Menurut susunan daerah pertempuran yang baru, maka Sub. Komando B. melingkungi daerah pertempuran Solok—Sawah Lunto dengan dipimpin oleh Kapten Anwar Badu, daerah Pertempuran front Timur Padang Luar Kota dipimpin oleh Ltd. Almunir, dan daerah pertempuran Sidjundjung Batanghari dipimpin oleh Kapten Su'ib.

Dalam bulan April Pemerintah PDRI berangkat dari Muara Labuh menudju Sei. Daréh, dan markas Sub Komando B. dipindahkan lagi, karena seluruh kota-kota telah diduduki Belanda. Berangkat dari Muara Labuh melalui Lubuk Gadang, Bidar Alam, Abai Sangir, Dusun Tengah, Ambak Kubu, Silago, Tandjung Gadang, Kampung Dalam, Simsok, Batu Badjandjang dan Sirukam. Perhubungan dengan markas Gubernur Militer dilakukan melalui Kampung Dalam di Ketjamatan Sidjundjung.

Perjuangan didaerah Sub Komando C.

Sub. Komando ini sebagai diterangkan diatas dipimpin oleh Major Alwi St. Maradjo, yang memegang kembali pimpinan sebagai Komandan Resimen II, tepat disaat Belanda melantjarkan agressinja pada tanggal 19 Desember, dan pada tanggal 24 Desember barulah ia sampai kemarkasnja di Sei Penuh, terus segera mengadakan tindakan-tindakan untuk bertempur. Tanggal 6 Januari '49 Belanda telah mendarat dari laut ke Painan, yang terus madju kedaerah Selida Ketjil dan Bajang, yang pada 4 Maret diteruskan kedaerah Bajang dan Terusan setjara besar-besaran, dimana mereka bertemu di Kota Berapak dengan pasukannya yang datang dari Alahan Pandjang memutus dari Simpang Alahan Pandjang melalui Bukit Gandung, Muara Air dan Asam Kumbang.

Musuh memperteguhkan kedudukannya dikota-kota, yang segera dikepung oleh tentera kita.

Pada tanggal 14 April 1949 musuh mendarat di Muara Sakai (Pasir Ganting), Indrapura dengan mempergunakan kapal-kapal perang, dan terus disambut oleh kompi Guntur dibawah pimpinan *Ltd. Imran*, dan sedjak hari itu berkobarlah pertempuran sekeliling Indrapura. Tanggal 22 April musuh menduduki Tapan, dan dengan didudukinja Indrapura dan Tapan ini, maka kota Sei. Penuh berada dalam keadaan yang terantjam.

Di Sungai Penuh sendiri sebagai pusat pemerintahan seluruh PSK., komando telah disatukan dibawah pimpinan Komandan Daerah Sub Komando C. Tanggal 22 April musuh madju menudju Sungai Penuh melalui Sungai Rotan dan Sapudua, tetapi pertahanan di Barung Talang yang dinamakan dengan pertahanan „Perwira“, dibawah pimpinan Sersan Major A. Nawi dapat menahan mereka selama 5 hari, dan pada tanggal 25 mereka telah mengepung Sungai Penuh yang dapat mereka masuki pada sore harinja, sesudah pertempuran satu lawan satu dalam kota. Pertahanan kita dialihkan ke Kerintji Hilir, Tengah, dan Hulu. Dalam bulan Mei dapatlah pasukannya yang datang dari Muara Labuh bertemu dengan yang dari Kerintji di Kaju Aro. Markas Sub. Komando C bertempat di Lumpur yang diserbu oleh Belanda pada tanggal 14 Djuni, sehingga staf komando pindah ke Muara Labuh selama dua bulan. Lalu pada tanggal 5 Agustus berada di Hulu daerah Kambang disebuah dusun yang bernama Terantang dan kemudian bertempat di Tantanggo dan *Koto Pulai*. Dan disinilah berada Komandan Sub Komando C sampai keluarnya perintah cease fire.

Perjuangan didaerah Sub Territorium Riau/Indragiri.

Pada waktu agresi Belanda yang kedua ini, Belanda mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaganya. Mereka mempergunakan

taktik untuk menaklukkan Indonesia dengan sekali gus. Penjerangan djauh berlainan dengan apa jang telah kita hadapi dalam agresi pertama. Penjerangan jang tiba-tiba dan setjara kilat ini, menjebabkan kita tidak mempergunakan systeem berhadapan, tetapi kita mempergunakan systeem gerilja dengan meninggalkan segala kota jang dirampas oleh Belanda setelah mengadakan sedikit perlawanan dan membumi hanguskan kota-kota itu. Sebulan kemudian barulah kita menjerang kembali, dan Bangkinang dapat direbut oleh Komandan front *Silalahi*. Rentjana perdjjuangan jang telah direntjanakan oleh sdr. D. I. Pandjaitan selaku Kepala Staf Resimen mulai didjalankan, dan pusat pemerintahan dipindah kan Kedaerah Pasir Pengeraiian dibawah pimpinan Gubernur Militer *R. M. Utojo* jang menggantikan Residen Malik.

Setelah mengalami berbagai-bagai pertempuran dalam perang gerilja, maka daerah Riau dipetjah mendjadi dua jaitu daerah Riau Selatan dibawah pimpinan Wk. Gub. Mil. *Hasan Basri* dengan stafnja *Lts. Djamhur Djamin, Umar Usman, Jamal Lako Sutan*, dan *H. A. Rauf*, Kedua, daerah Riau Utara dibawah pimpinan Wk. Gub. Mil. *Akil* (Kepala Staf Territorium Riau) dengan stafnja *Kapten Dr. Mugni, Wan A. Rahman, Djalaluddin, H. Muhammad, H. Bakri* dan *Dt. Bendahara Sati*.

Dengan formasi begitulah perdjjuangan bersendjata dilandjutkan setjara gerilja sampai kepada waktu cease fire, dimana dalam perdjjuangan kota-kota telah hantjur dimakan api, diantaranya Rengat, Sapat, Pakan Baru, dan kerugian harta benda dan djiwa tak terpermanai banjaknja. Apalagi keadaan daerah Riau jang datar dan berpaja-paja sangat menjulitkan bagi aksi gerilja, karena tidak mempunjai pangkalan pergunungan.

Keadaan pertempuran.

Oleh karena pertempuran bersifat gerilja, dan merata diseluruh daerah Sumatera Tengah jang sangat luas itu maka tentu sadja tak dapat ditjatat semuanya. Diseluruh daerah, biar jang disebutkan disini atau tidak, tentu berkobar pertempuran-pertempuran jang hebat dan dahsjat.

Pasal 26.

REORGANISASI DALAM KETENTERAAN.

PERDJUANGAN dilapangan ketenteraan didampingi pula oleh perundingan diplomatik, jang pada tanggal 7 Mei 1949 menjapai tingkat diutjapkannya **Statement Roem-Royen**. Tak lama kemudian dalam bulan Djuni Pemerintah R.I. dipulihkan ke Djokja, dan pada tanggal 14 Agustus berlakulah perintah **Cease-fire** di Sumatera.

Penjusunan ketenteraan diteruskan sesudah Cease-fire ini jang djika kita teliti menurut rentetan Sub Komando semasa darurat, adalah berdjalan seperti dibawah ini.

Ketenteraan didaerah Sub Komando A:

Ketenteraan didaerah Sub. Komando A. disusun menjadi bataljon IV jang diresmikan di Matur dekat kepada penjerahan kedaulatan. Susunannya adalah sebagai berikut:

Komandan Bataljon Major Kemal Mustafa, dan komandan-komandan kompi adalah: Lts. Hasan Basri, Lts. Rasjidin Rasjid, Lts. Amarullah, Lts. Abu Bakar, Lts. M. Noer, Lts. Maujar, dan Lts. Djamaluddin.

Sesudah penjerahan kedaulatan, maka bataljon IV dijadikan bataljon 102 Pagarujung dengan Komandannya Major Kemal Mustafa, dan daerahnya kewedanaan Pariaman dan Lubuk Basung. Kemudian bataljon Pagarujung ini mendapat perintah untuk bertugas diluar Sumatera Barat, mulanja ke Kalimantan, kemudian ke Djawa Barat dengan dimasukkan dalam **Divisi Siliwangi**.

Ketenteraan didaerah Sub. Komando B.

Masih dalam hangatnya pertempuran, jaitu dalam bulan Maart 1949, ketenteraan di Sub. Komando B. telah disusun dengan Komandannya Major A. Hosen, dan Kepala Staf Kapten Dahlan J, sedangkan daerah pertempuran Solok-Sawah Lunto dipimpin oleh Kapten Anwar Badu, front timur Padang Luar Kota dipimpin oleh Ltd. Almunir, daerah pertempuran Alahan Pandjang-Muara Labuh dipimpin oleh Ltd. Arif Amin, dan daerah pertempuran Sidjundjung-Batang-Hari dipimpin oleh Kapten Sju'ib.

Dengan susunan beginilah perjuangan berdjalan didaerah Sub. Komando B. sampai kepada masa cease fire, dan pada tanggal 15 Agustus diadakan pertemuan antara T.N.I. dan Belanda di Sawah Lunto dimana pihak T.N.I. diwakili oleh Lt. Ruslan Usman dan pihak Belanda oleh Kapten Westland. Pertemuan ini diiringi pula dengan pertemuan di Solok pada tanggal 17 Agustus.

Perundingan jang sebenarnja dilakukan pada tanggal 19 September dimana pihak T.N.I. diwakili oleh Komandan Sub. Komando B. Major A. Hosen bersama stafnja, dan pihak Belanda diwakili oleh Overste Jacobson dan stafnja. Perundingan berlangsung sampai 3 hari tentangan daerah patroli, perundingan mana tidak banjak hasilnja.

Dalam bulan Nopember markas regiment berkedudukan di Muara Panas (Solok Selatan). Dan ketika pemulihan kota-kota didaerah Sub. Komando B, maka pemulihan kota Sidjundjung dilakukan oleh Let. Danny, Alahan Pandjang oleh Lts. Arif Amin, Muara Labuh oleh idem, Sawah Lunto oleh Kapten Anwar Badu, Solok oleh Major A. Hosen. Dan setelah selesai pemulihan, Sub. Komando B. dihapuskan dan terbentuklah kesatuan baru dengan nama **Regiment Kurandji** terdiri dari dua bataljon dengan komandan resimen Major A. Hosen, Komandan Batalion I Kapten Anwar Badu, (Sawah Lunto) dan Bataljon II Komandannja Lts. Arif Amin (Solok). Dalam pada itu anggota Bataljon Maksim jang banjaknja kira-kira 200 orang dimasukkan dalam Resimen Kurandji.

Pun sebagian dari kompi-kompi Resimen Kurandji ini masuk Kota Padang ketika pemulihannja.

Pada tanggal 6 Djanuari 1950 Resimen Kurandji didjadikan satu batalion, jaitu Batalion II **Brigade Banteng**, dan pada tanggal 10 Pebruari didjadikan Batalion **101 B.B.** dengan Komandannja Major A. Hosen dan komandan komandan Kompi I Lts. Jahja Usman, Kompi II Lts. Bachtiar, Kompi III Ltd. Sofjan Tamala, Kompi IV Ltd. Amir Hamzah, Kompi V Ltd. Danny, Kompi VI Ltd. Almunir, dan Kompi bantuan dengan komandannja Lts. Zainul.

Pada 20 April 1950 Batalion 101 pindah ke Padang, ketjuali Kompi V jang pindah kemudian, dan Kompi IV jang dalam bulan Agustus dimasukkan kedalam kesatuan Batalion 104 BB.

Dalam bulan Desember '50, Batalion 101 (Kurandji) ini bertugas ke Djawa Barat jang kembali dalam bulan Desember '51 setahun kemudian.

Ketenteraan didaerah Sub. Komando C.

Dari ibu tempat darurat di Koto Pulai, pimpinan perjuangan dilangsungkan keseluruh daerah Sub. Komando C, dan disitulab

bermarkas Staf Sub. Komando C dengan dipimpin oleh Komandan Major Alwi St. Maradjo. Sampai kepada waktu cease fire, didaerah Sub. Komando C cease fire ini lama maka berdjalan, bahkan pada tanggal 23 Agustus '49 masih terdjadi pertempuran.

Pada tanggal 22 September Belanda jang berada di Kambang masih hendak menjerbu kedaerah kita di Kambang Utara, hingga hampir terdjadi pertempuran, dan barulah pada tanggal 3 Oktober '49 Belanda meminta berunding, dengan satu surat dari Let. Vredenburg.

Instruksi Komandan Brigade Banteng tanggal 11 Djuli '49 untuk membentuk satu batalion riel didaerah Sub. Komando C. barulah sampai pada tanggal 25 Oktober '49. Dan dengan segera diadakan rapat pada tanggal 4 Nopember oleh para perwira Sub. Komando C bertempat di Koto Pulai dimana diputuskan bahwa Sub. Komando C dijadikan Batalion 3 Brigade Banteng dengan susunan sebagai berikut:

Komandan Major Alwi St. Maradjo, Kepala Staf Lts. Sjahmenan, Kompi I Komandannja Lts. Sjahmenan, Kompi II Ltd. Imran Jr., Kompi III Ltm. Zulkufli R., Kompi bantuan Ltd. Ngatimin.

Pada tanggal 15 Nopember '49 Overste Dahlan Djambek Komandan Brigade Banteng berkundjung ke Koto Pulai, untuk menjelesaikan organisasi seterusnya.

Pemulihan Kota Painan dilakukan oleh Major Alwi, Sei. Penuh oleh Overste Thalib jang datang dari Bukittinggi, daerah Painan Selatan oleh Ltd. Munir Ahmad, Kambang Lakitan oleh Ltm. Udin, Indrapura oleh Ltd. Imran Jr., Tapan oleh Lts. Mansjur Sami.

Demikianlah pada bulan Djanuari '50, seluruh anggota Resimen II jang lama, jang kemudian mendjadi Sub. Komando C dan sekarang mendjadi Batalion III, telah berada kembali ditengah-tengah masjarakat.

Pada tanggal 1 Pebruari, Major Alwi St. Maradjo dipindahkan kemarkas Sub. Territorium Sumatera Tengah di Bukittinggi dan kedudukannja sebagai Komandan Bataljon III diganti oleh Kapten Anwar Umar.

Kemudian Batalion III ini dijadikan Batalion 104 dengan daerahnja Kabupaten P.S.K.

Ketenteraan didaerah Sumatera Barat, lainnja:

Dalam pada itu didaerah Sumatera Barat jang tidak masuk daerah sub. Komando A., B. dan C., jaitu daerah pertempuran Agam/Lima Puluh Kota, dimana pimpinan dipegang langsung oleh Komandan Brigade Banteng Let. Kol. Dahlan Djambek dan

stafnja Major Thalib, pasukan-pasukan disana sesudah pemulihan lalu disusun mendjadi beberapa kompi sebagai berikut:

1. Kompi Rimba Raja dengan Komandannja Lts. Djohan dikewedanaan Agam Tua Utara.
2. Kompi Guntur Komandannja Lts. Jusuf Ali, kewedanaan Agam Tua Selatan.
3. Kompi Dharma Bakti Komandannja Kapten Anas, kewedanaan Padang Pandjang.
4. Kompi Beruang Agam, Komandannja Lts. S.A. Husein di Bukit Tinggi.
5. Kompi Keris Komandannja Lts. Jusuf Indra kewedanaan Batu Sangkar.

Dan pasukan-pasukan Singa Harau, serta pasukan Kamaruddin di L. Kota, disusun bersama beberapa pasukan lainnja mendjadi Batalion I jang mulanja dibawah pimpinan Major Thalib dan kemudian didjadikan bataljon 103 (Kinantan) dengan komandannja Kapten Sju'ib dan daerahnja Kabupaten L. Kota.

Seterusnja kompi-kompi jang disusun di Agam jang tersebut diatas didjadikan pula sebuah bataljon dengan nama Bataljon 105 (Gumarang) jang dipimpin oleh Kapten Sofjan Ibrahim bermarkas di Bukittinggi.

Kemudian dibentuk lagi sebuah bataljon dari kompi-kompi jang masih berdiri sendiri dengan komandannja Major Burhanuddin, jaitu Bataljon **Sibinuang** bermarkas di Teluk Bajur.

Dan pada 24 Mei '50 datang pula satu bataljon tentera Divisi Siliwangi jang terus dimasukkan dalam Brigade Banteng dengan nama Batalion 106 (Biruang Putih) dengan Komandannja **Kapten Saman** jang kemudian berangkat ke Ambon dan kembali ke Djawa masuk Divisi Siliwangi.

Ketenteraan di Riau.

Diatas telah diterangkan bahwa sebelum agresi kedua ketenteraan di Riau-Indragiri didjadikan satu Sub. Territorium dibawah pimpinan Let. Kol. Hasan Basri, berkedudukan di Pakan Baru.

Sesudah pemulihan, Sub. Territorium ini dinamakan dengan Babiri (Bangka-Billiton & Riau) dan seterusnya didjadikan Brigade D.D. Sub. Terr. Riau dibawah pimpinan Let. Kol. Akil Prawiradiredja.

Pada tanggal 11 Maret 1950 dilakukan timbang terima kekuasaan Sipil dan Militer dari Pemerintah Belanda diseluruh daerah Bangka-Billiton & Riau. Susunan Brigade D.D. ini adalah sebagai berikut:

Komandan Letnan Kolonel Akil Prawiradiredja, Brigade Major, Major Prijatna dan stafnja.

Brigade ini dibagi kepada dua bataljon jaitu:

1. Batalion 120 bermarkas di Tandjung Uban dengan Komandan-nya Kapten Marahalim, dengan Kompi-kompi I, Komandannya Kapten Iskandar, Kompi II, Lts. Hutapea, Kompi 3, Lts. Joe Prekoel, Kompi 4 Lts. Subrantas.
2. Bataljon 121 dengan komandannya Kapten J.B. Andries, dengan Kompi-kompi I, Komandannya Lts. A. Muis, Kompi II, Ltd. Napitupulu, Kompi bantuan Ltd. Luat Siregar. Dan bermarkas di Pakan Baru.

Kemudian dalam tahun '52 bulan Mei, Djuni, Sub. Terr. Riau ini dilebur mendjadi 2 bataljon:

1. Bataljon 120 (dulu bermarkas di Tandjung Pinang) sekarang bermarkas di Pakan Baru dengan Komandannya Kapten Marahalim.
2. Batalion 121 (dulu di Pakan Baru) sekarang bermarkas di Tandjung Pinang dengan komandannya Kapten Iskandar.

Dalam pada itu Batalion 120 dimasukkan kedalam kesatuan Resimen IV (Sumatera Barat), sedangkan Batalion 121 (daerah perairan) langsung dibawah pimpinan Panglima T.T. I Sumatera Utara.

Kesimpulan:

Sesudahnja uraian sedaerah-daerah ini, marilah kita simpulkan kembali. Djadi sesudahnja pemulihan dibentuklah di Sumatera Barat empat bataljon sebagai berikut:

1. Batalion I, jang kemudian mendjadi Batalion 103 (Kinantan) di Kabupaten L. Kota. Mulanja dipimpin oleh Major Thalib, kemudian oleh Kapten Sju'ib, kemudian oleh Lts. Nurmatias. Namanjapun diubah mendjadi Bataljon 124 Kinantan. Inilah kesatuan tentara jang selama darurat bertugas di L. Kota, dan tidak masuk Sub. Komando A., B. dan C.
2. Bataljon II, dibawah pimpinan Major A. Hosen jang berasal dari ketenteraan didaerah front timur, dalam argessi mendjadi Sub. Komando B. (Kurandji). Bataljon ini kemudian mendjadi Batalion 101, achirnja mendjadi Batalion 122 Harimau Kurandji.
3. Bataljon III dibawah pimpinan Major Alwi Sutan Maradjo jang berasal dari kesatuan tentera di front selatan, dalam agressi mendjadi Sub. Komando C, kemudian mendjadi bataljon 104 dan achirnja mendjadi Batalion 125 Buaja Putih.
4. Batalion IV dibawah pimpinan Major Kemal Mustafa jang berasal dari kesatuan tentara didaerah front utara, dalam agressi mendjadi sub. Komando A., kemudian mendjadi Bataljon 102,

Pagar Rujung, jang karena keberangkatannja keluar daerah, nomor 102 didjadikan 123, dan dinomorkan kepada Batalion Sibinuang, mulanja dibawah pimpinan Major Burhanuddin kemudian dipimpin oleh Kapten Jusuf Ali.

5. Bataljon 107 Biruang Putih, jang berasal dari Bataljon Siliwangi jang dipimpin oleh Kapten Saman, kemudian mendjadi Batalion 127 Biruang Putih.
6. Bataljon 106 Gumarang jang berasal dari kesatuan tentara jang berdjuaug didaerah Agam semasa agresi kedua, kemudian mendjadi bataljon 126 Gumarang.
7. Bataljon 123 Sibinuang jang tersebut diatas.

Pada tanggal 1 Nopember 1950 **Barisan Banteng** dimasukkan kedalam T.T. I Sumatera Utara dengan istilah: Brigade E.E. Banteng & Sub. Terr. Sumatera Barat.

Pada tanggal 2 Desember 1950 Komandan Brigade Banteng Let. Kol. Dahlan Djambek dipindahkan ke Djakarta, dan kedudukannja digantikan oleh Let. Kol. Thalib, jang kemudian dipindahkan pula mendjadi Kepala Staf T.T.I. di Medan, lalu digantikan oleh Major A. Hosen.

Dan pada 7 April 1952 Brigade Banteng didjadikan pula Regiment IV Banteng & Sub. Terr. IV Sumatera Barat & Riau, T.T. I Sumatera Utara

Selain dari itu banyak perubahan-perubahan organisatoris berla-ku, seperti masuknja Bataljon 105 Gajah Putih dibawah pimpinan Kapten Nip Karim kedalam Brigade Banteng, dan lain-lainnja.

Dan ketenteraan di **Riau, Bangka dan Biliton**, didjadikan 2 bataljon:

1. Batalion 120 bermarkas di Pakan Baru, dipimpin oleh Kapten Marahalim, jang masuk kesatuan Resimen IV.
2. Bataljon 121 bermarkas di Tandjung Pinang jang berada langsung dibawah pimpinan Panglima T.T. I Sumatera Utara.

Demikianlah perdjalananan sedjarah ketenteraan di Sumatera Tengah dalam garis besarnja sampai kepada masa ini.

*
**

BAB II
BAHAGIAN V

KEPOLISIAN NEGARA.

KEPOLISIAN NEGARA.

Pengantar:

OLEH karena revolusi, maka segala sesuatunya yang bertjorak dan berbau kolonial hilang lenjap dari alam Indonesia. Perubahan yang dibawa oleh revolusi tersebut bukanlah mengenai pemerintah beserta instansi-instansinya s saja, malahan djuga sifat dan djiwa masjarakatnya, yang dahulunya tertekan dan terkungkung, mendjadi bebas.

Susunan serta tugas pekerdjaan dari pemerintah diselaraskan dengan perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan yang terdjadi itu. Begitu pula halnya dengan alat kekuasaannya yang bernama polisi.

Dikala pendjadjahan itu, polisi hanya dipergunakan buat mengekang dan menindas segala matjam gerakan yang ada dalam masjarakat, yang dianggap dan diduga oleh pemerintah kolonial, menentangnja. Sudah barang tentu dapat dimengerti, bahwa dimasa itu, satu-satunya alat pemerintah pendjadjahan yang sangat ditakuti dan djuga dibentji oleh masjarakat, adalah polisi.

Didalam negara yang merdeka dan demokratis, kedudukan serta tugas kewadajiban dari polisi adalah mengawasi dan mendjaga ketertiban dan keamanan rakjat. Dari itu makanja *Djawatan Kepolisian Negara* semendjak permulaan kemerdekaan Negara kita, meletakkan dasar-dasar penjusunan dan penjempurnaan alat-alat kepolisian, yang selaras dengan djiwa dan kehendak masjarakat.

Kepala Kepolisian Negara antara lain menerangkan, bahwa yang mendjadi dasar pokok pembangunan Kepolisian Negara, yang utama ialah: *Mengubah djiwa, sifat dan bentuk dari alat pemerintah djadja mendjadi alat kekuasaan negara yang demokratis*. Yang mendjadi tudjuan adalah penjempurnaan lahir bathin, yang akan dapat memungkinkan setiap pegawai polisi untuk bukan s saja mendjadi anggota alat Pemerintah, tetapi djuga disamping itu mendjadi warga dan patriot Indonesia.

Akan tetapi antara usaha dan hasil yang ditjita-tjitakan itu, ada terletak djangka waktu yang harus dilalui. Dari itu dapat dimengerti djika pada dewasa sekarang, disana-sini masih ada djuga didjumpai pada beberapa anggota polisi factor-factor yang belum lagi begitu baik yang masih merupakan sifat yang historis-psychologis.

Pasal 27.

KEPOLISIAN DIZAMAN BELANDA.

ADAPUN badan kepolisian telah ada pada masa V.O.C. Akan tetapi mulai tersusun dan teraturnja adalah pada masa pemerintahan Gubernur Djenderal Inggeris Raffles. Setelah Belanda menerima kembali kekuasaan disini dari Inggeris, maka dimulainja setjara berangsur-angsur mengadakan perubahan-perubahan tentang organisasi kepolisian. Alat-alat kepolisian jang terdapat di Indonesia selama pemerintahan Belanda adalah seperti berikut:

1. Polisi-Kota, jang dipekerdjakan hanja dikota-kota sadja.
2. Polisi-bersendjata (Gewapende Politie), dipekerdjakan ditempat-tempat jang baru diamankan oleh militer. Pada kira-kira tahun 1920 Polisi Bersendjata ditiadakan dan diganti dengan Polisi Lapangan (Veld Politie), jang dipekerdjakan buat luar kota.
3. Reserse-daerah (Gewestelijke Recherche), mempunjai tugas pekerdjaan buat melakukan pengusutan kedjahatan. Belakangan djuga dalam politik-polisionil, dan kemudian mendjadi P.I.D.
4. Polisi perkebunan (Cultuur Politie) jang dipekerdjakan di Onderneming-onderneming buat mendjaga kepentingan-kepentingan perkebunan tersebut.
5. Polisi Pamong-pradja (Bestuur Politie), adalah kesatuan jang ketjil didaerah-daerah, jang dipekerdjakan dibawah pimpinan pegawai Pamong-pradja, seperti Tjamat, Wedana/Demang dan Bupati/Residen. Sebetulnja polisi tersebut adalah merupakan suatu alat kekuasaan dari pegawai Pamong-pradja.

Melihat adanja bermatjam-matjam alat kepolisian serta tugas pekerdjaan dalam masa Belanda itu, dapatlah kita sekira-kira suatu gambaran, bahwa kepolisian itu bukanlah diadakannja untuk keselamatan rakjat, malahan buat mendjaga kepentingan-kepentingan badan-badan pemerintah dan modalnja.

Adapun organisasi kepolisian jang dinamakan Polisi Umum, berada dibawah Directeur Binnenlandsch Bestuur. Padanja diperbantukan seorang Kepala Dinas Polisi Umum (Hoofd van den dienst der Algemeene Politie). Didaerah-daerah, pimpinan taktis berada dalam tangan Kepala-kepala Daerah. Disamping itu Djaksa Agung adalah mendjadi pemimpin pusat dalam lapangan kepolisian represief dan preventief. Dalam melakukan pekerdjaan ini, dia dibantu oleh Dinas Reserse Umum.

Pasal 28.

KEPOLISIAN DIZAMAN DJEPANG.

TJORAK dari pemerintahan Djepang adalah suatu pemerintahan militer. Dari itu maka sesuatu alat dari pemerintahannya berada dibawah kekuasaan tentera. Begitu juga dengan kepolisian. Pembahagian daerah kekuasaan dari kepolisian disesuaikan dengan pembahagian daerah kekuasaan tentera. Adapun pusat dari tentara Djepang dibahagian Selatan berkedudukan di Singapura. Indonesia ini dibagi atas dua bahagian kekuasaan tentera seperti berikut:

A. Angkatan Darat, meliputi:

- a. Sumatera
- b. Djawa.

B. Angkatan Laut, meliputi:

- a. Timur Besar
- b. Kalimantan.

Dari itu kepolisian disebagian daerah berada dibawah kekuasaan angkatan darat dan disebahagian daerah lagi berada dibawah kekuasaan angkatan laut. Pusat-pusat kepolisian berkedudukan:

- 1. buat Djawa dan Madura di Djakarta,
- 2. buat Sumatera di Bukittinggi,
- 3. buat Timur Besar di Makasar,
- 4. buat Kalimantan di Bandjarmasin.

Tjara pekerdjaan dan tindakan kepolisian dimasa itu adalah seperti dalam suatu negara polisi (Politie Staat). Tjukup diketahui bagaimana takutnja rakjat dimasa itu menghadapi polisi.

Dalam selama pendjadjahan Djepang, bermacam-macam tjorak alat-alat kepolisian jang terdapat pada pemerintahan Belanda dihapuskan dan di Indonesia hanya terdapat satu matjam susunan kepolisian sipil.

Pasal 29.

KEPOLISIAN SESUDAH PROKLAMASI.

SETELAH diterima kabar resmi tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada pertengahan bulan Agustus tahun 1945, maka pemimpin-pemimpin rakyat dan kepala-kepala djawatan pemerintahan mengadakan rundingan-rundingan tentang bagaimana dalam-djalan yang akan ditempuh untuk mengambil over pimpinan dari pemerintahan Djepang. Dikalangan Kepolisian yang berada di Kota Padang mengadakan pertemuan perundingan buat mendapat suatu kebulatan fikiran untuk mengambil over pimpinan kepolisian dari tangannja Djepang, yang pada waktu itu sungguhpun telah kalah akan tetapi masih mempunyai kekuasaan berupa senjata. Antaranja jaitu Saudara-saudara *Sulaiman Effendi*, *Raden Sulaiman*, *Kaharuddin Dt. Rangkojo Basa*, *Bachtaruddin* dan beberapa pemuka dari kalangan kepolisian dari tangan Djepang. Dengan setjara tidak menimbulkan insiden yang tidak diingini, maka tertjapailah tudjuan yang dimaksud, dengan keketentuan, bahwa yang menjadi Kepala Polisi Sumatera Barat jaitu saudara R. Sulaiman dan Kepala Polisi Kota Padang, saudara Sulaiman Effendi.

Dan seterusnya dikota-kota lain pimpinan berada ditangan bangsa Indonesia.

Ditempat-tempat lain seperti diwilajah-wilajah, pada garis besarnya berlaku seperti yang kedjadian di Kota Padang, djuga di Daerah Riau dan Djambi. Dapatlah dibayangkan bahwa rakyat diwaktu itu dengan semangat kebangsaan yang sedang bergelora dan tempo-tempo sangat sulit dikendalikan, mempunyai pandangan dan perasaan yang tidak baik terhadap alat-alat bekas pemerintah djajahan, terlebih-lebih lagi kepolisian.

Dapat dibayangkan bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kepolisian buat mendjalankan pekerdjaannja. Dibeberapa tempat pernah kedjadian beberapa anggota kepolisian yang menjadi korban dari pembalasan dendam dan sakit hati dari beberapa golongan. Sungguhpun demikian halnja namun kepolisian itu mesti berdjalan terus, apalagi dikala itu kita harus memperlihatkan pada dunia luar, bahwa Pemerintah kita sudah berdiri dan berdjalan dengan segala Djawatan-djawatan dan alat-alat kekuasaannja.

Kota Padang didatangi oleh bangsa-bangsa yang baru keluar dari tawanan Djepang; mereka mentjoba mempengaruhi dan menduduki kantor-kantor Pemerintah. Kepolisian bergerak dan menolak segala

sesuatu jang datang dari pihak Belanda. Sang Saka merah putih mulai dinaikkan di Kantor Besar Polisi Kota Padang dengan disaksikan oleh beratus-ratus rakjat. Seorang diantara pemuda-pemuda jang ikut melihat bendera kebangsaan buat pertama kali berkibar diangkasa, diatas kantor jang dianggap sebagai lambang kekuasaan pendjajah, melompat dan berseru dengan mengutjapkan selamat pada kepolisian dan menjatakan „bahwa kalau di Kantor Polisi telah berkibar Sang Saka, maka ditempat lainpun akan melambailah dia diudara”.

Setelah tentara Sekutu berada dikota Padang, dan mulai melakukan tindakan-tindakan jang menjinggung perasaan rakjat, maka badan kepolisian lalu mempekerdjakan kira-kira 10 orang pemuda-pemuda jang bisa berhubungan dengan Sekutu, dengan tugas buat mengawasi perbuatan-perbuatan Sekutu jang diluar peraturan hukum. Sekiranjia ada kedjadian-kedjadian tersebut maka selain dari pada membuat lapuran, jang akan didjadikan dokumentasi, djuga melakukan protes pada pihak Sekutu jang bertanggung djawab tentang tindakan-tindakan jang diluar hukum itu.

Kader-kader jang baru itu ditempatkan hanja dibeberapa tempat sadja, seperti dikota Padang, di Polisi Luar Kota Padang, dan di Polisi Kota Bukittinggi, jaitu ditempat jang diduga, dimana tentara Sekutu akan duduk. Sementara itu di Wilayah-wilayah, polisi boleh dikatakan belum lagi actief betul, sebab selain polisi dikala itu tiada mempunjai sendjata, djuga pihak chalajak ramai masih mempunjai kesangsian djuga lagi. Dari itu makanja pemimpin-pemimpin kepolisian di Kota tidak tinggal diam dan mentjari daja upaja buat memperlantjar djalannja kepolisian.

Demikian pada tanggal 21 Desember 1945 Pemerintah Sum. Barat mengadakan satu rapat bersama antara pimpinan kepolisian Sum. Barat dan pimpinan T.K.R. Sum. Barat bertempat di Padang, dimana diputuskan: *usaha bersama dalam lapangan keamanan dan pembahagian tugas antara polisi dan tentara.*

Dan sesudah konperensi dikeluarkanlah satu maklumat dimana ditegaskan antara lain bahwa:

„Keamanan kedalam adalah kewadjiban dan tanggung djawab Kepolisian Negara, dan djika perlu serta kalau dikehendaki, maka polisi negara dibantu oleh T.K.R. Dengan keamanan kedalam dimaksud disini ialah: keamanan jang termasuk lingkungan urusan sipil, misalnja pentjurian, pembunuhan, penangkapan beras, penahanan dan sebagijnja.

Kalau T.K.R. menangkap seseorang, karena dituduh spion Nica dan lain-lain, hendaklah orang itu diserahkan selekas-lekasnja kepada polisi dengan alasan-alasan dan bukti-bukti tentang penangkapan itu. T.K.R. tidak lagi akan bertindak sebagai polisi, tetapi apabila polisi minta bantuan, maka tentera akan membantu dengan segera”.

Sekianlah setjara ringkasnja isi maklumat itu, jang pada waktu jang bersamaan dikeluarkan oleh T.K.R. Sumatera Barat dan Pemerintah Sumatera Barat.

Dalam bulan Pebruari 1946 ketika terdjadi ribut-ribut tentang wang kertas Rp. 100 Djepang, maka polisipun bertindak menentramkan keadaan dan mendjaga agar djalan ekonomi rakjat djangan katjau balau.

Kemudian untuk mengokohkan barisan kepolisian, diresmikanlah berdirinja Sekolah Polisi Istimewa Sumatera Barat pada tanggal 18 Mei 1946.

Dan karena pada masa itu perdagangan sendjata gelap memuntjak, maka diperintahkan agar rakjat mendaftarkan kepada Kepolisian Negara akan seluruh sendjata, sebelum tanggal 15 Djuni 1946, dan sendjata-sendjata jang tidak didaftarkan pada tanggal tersebut akan disita.



POLISI ISTIMEWA.

SALAH satu djalan jang diperoleh buat melantjarkan pelaksanaan pekerdjaan kepolisian kembali, ialah dengan membentuk Polisi Istimewa. Maka pada bulan April 1946 dimulailah pendaftaran pemuda-pemuda pedjuang jang akan dilatih buat dijadikan tjalon anggota polisi bentukan baru jang diberi nama Polisi Istimewa. Keistimewaan dari golongan kepolisian jang baru itu bukanlah terletak pada kelebihan ahlinja dalam ilmu kepolisian dari pada polisi didikan pendjadjahan, malahan latihannja dititik beratkan pada bagaimana tjaranja melakukan tugas serta tindakan kepolisian dalam masa pergolakan diwaktu itu. Disamping itu tudjuan adalah buat mengubah dan mengurangkan sentimen² umum jang sebahagian besar masih menganggap dan memandang polisi itu adalah alat pemerintah djadjahan jang dahulu djuga. Pada permulaan bulan Mei 1946 dimulailah melatih tjalon-tjalon anggota Polisi Istimewa itu di Bukittinggi jang berdjumlah k.l. 150 orang, selama tiga bulan dibawah pimpinan Komisaris Polisi Kaharuddin Dt. Rangkojo Basa. Antara lain guru-gurunya saudara-saudara Komisaris Polisi Djojodirdjo, Bermawi St. Radjo Emas, Gaffar Djambek dan beberapa Perwira Tentera.

Disamping Ilmu Kepolisian, djuga diberi peladjaran tentang ilmu dan latihan tentara, ilmu kemasjarakatan dan lain-lain.

Pada permulaan Agustus 1946 berachirlah latihan tersebut dan menghasilkan:

Pembantu Inspektur	6 orang
Komandan Polisi	10 orang
Agen Polisi l.k.	130 orang

Pada permulaan mereka itu dipekerdjakan dikepolisian Padang.

Didalam melakukan tugasnja ternyata, bahwa mereka itu lebih mudah menghadapi chalajak ramai dari pada teman-temannja jang berasal dari tiga zaman, disebabkan factor-factor psychologis di-masa itu.

Barisan Istimewa Polisi (B.I.P.).

Selangkah demi selangkah kepolisian melaksanakan usahanja dalam menunaikan tugasnja mendjaga keamanan dan ketertiban umum menurut keadaan masa dan suasana masjarakat diwaktu itu dengan mengadakan pembentukan bahagian kepolisian jang baru pada bulan September 1946 di Bukittinggi jang diberi nama Barisan Istimewa Polisi, jang lebih dikenal dengan nama B.I.P.

Agar sewaktu-waktu dikala keadaan memaksa, pemakaian tenaga kepolisian buat memulihkan ketenteraman dapat mentjapai hasil jang diinginkan, maka anggota-anggota dari B.I.P. semua diasramakan. Latihan-latihan berbaris, dan pemakaian bermatjam-matjam sendjata sangat dipentingkan. Alat-alat serta persendjataan dari B.I.P. boleh dikatakan lengkap. Antara lain jang mendjadi pelatihnja:

Inspektur Polisi Amir Machmud,
Inspektur Polisi L. Effendy Dt. Madjo Basa,
Inspektur Polisi Sjafei Siregar.

Selain dari membantu Kepolisian Wilayah diwaktu keadaan menghendaki, B.I.P. mendapat tugas mendjaga perbatasan dan mengawasi keluar masuk barang-barang jang tertentu dari dan keluar daerah. Antara lain mereka ditempatkan di Sidjundjung, Tandjung Simalidu, Bangkinang, Danau Bingkuang, Pariaman dan Painan. Setelah Linggardjati ditanda tangani, dikirim ke Padang 80 orang buat mendjaga keamanan. Dengan adanja B.I.P. dengan persendjataan jang boleh dikatakan lengkap, maka gezag dari pemerintah umumnja berangsur baik, dan kedudukan kepolisian chususnja bertambah kuat. Pun di Djambi dan Riau keadaan sematjam ini dapat dibentuk dan berdjalan dengan seksama.

Kepolisian Negara dikota Padang.

Dengan memuntjaknja pertempuran dan keributan di Kota Padang, antara Indonesia, Sekutu dan Belanda, maka tugas kepolisian di Padang semakin berat.

Pertempuran disela-sela oleh perundingan, dan dalam perundingan tanggal 11 Desember tahun 1946, jang diketuai oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin, ditetapkan bahwa Polisi N.R.I. jang bersendjata setjukupnja didalam kota Padang akan diperluas kekuasaannja hingga dapat mendjalankan kewadjibannja mendjaga keamanan dengan sebaik-baiknja.

Dan Polisi N.R.I. berhak mengadakan perondaan didaerah perondaan tentera Belanda.

Tentangan banjakknja bilangan Polisi N.R.I. di Padang sesudah berunding beberapa lamanja, ditetapkan sebanjak 500 orang.

Persetudjuan ini ditanda tangani pada tanggal 12 Djanuari 1947. Tetapi barulah pada 14 April 1947 anggota polisi untuk Kota Padang itu dapat berangkat dari Bukit Tinggi ke Padang. Rombongan permulaan ini berdjumlah 100 orang dengan bersendjata lengkap.

Polisi Kota Padang ini dipimpin oleh saudara Johny Anwar, jang dengan giat memperdjuangkan pemerintahan de facto N.R.I. Kota Padang disamping Wali Kota Azis Chan almarhum.

Berkali-kali saudara Johny Anwar dan stafnja ditangkap oleh militer Belanda, tetapi setiap kalinja dapat dibebaskan kembali atas usaha Pemerintah R.I.

Tetapi pada tanggal 21 Djuli 1947 ketika Belanda melantjarkan agressinja jang kesatu, maka saudara Johny Anwar bersama seluruh kepolisian R.I. di Padang ditawan oleh Belanda, bersama Wakil Wali Kota Padang Said Rasjad, sedangkan Wali Kota Azis Chan ditembak mati.

Dan beberapa lamanja kemudian, sesudah pemerintah cease-fire dilaksanakan, barulah saudara-saudara itu dibebaskan kembali ke-daerah R.I.

Mobile Brigade Polisi.

Melihat akan perkembangan keadaan dimasa itu, disamping ber-djuang djuga menjusun serta mendjaga keamanan, seimbang dengan keadaan dan tempat, disamping itu djuga untuk mentjapai persamaan dalam bentuk dan susunan kepolisian diseluruh Indonesia, maka pada bulan Djuli 1947 Barisan Istimewa Polisi tersebut diatas dilantik mendjadi Mobile Brigade Polisi, jang lebih dikenal dengan nama singkatannja Mobrig.

Mobrig djuga adalah suatu bahagian dari Kepolisian Negara. Jang mendjadi pokok tudjuan dengan pembentukan Mobrig tsb. ialah buat mempunyai pasukan-pasukan ketjil jang tangkas dan kuat, jang dapat digerakkan dengan tjepat buat memulihkan keamanan ditempat-tempat jang terganggu. Anggota-anggotanja diambil selain dari pada B.I.P. djuga dari pegawai polisi umum, jang muda, sehat dan kuat. Disamping itu dari pemuda-pemuda pedjuang seperti dari Lasjkar Rakjat. Mereka dipersendjatai lebih lengkap dari bahagian-bahagian kepolisian jang lain, dan semuanya diasramakan.

Adapun Mobrig terbagi atas kompi-kompi dan brigade-brigade, dan berada langsung dibawah Kepala Polisi Keresidenan diwaktu itu, seperti Kepala Polisi Keresidenan Sumatera Barat, Djambi dan Riau.

Sesudahnja Pemerintah Propinsi Sumatera pindah dari Pematang Siantar ke Bukittinggi pada waktu clash I, maka Tjabang Djawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera djuga berpindah ke Bukittinggi. Beberapa bulan sesudah itu dibentuklah oleh Tjabang Djawatan tersebut sebuah Korps Mobbrig jang langsung berada dibawahnja, jang diberi nama Mobile Brigade Besar. Latihan berada dibawah pimpinan Inspektur Polisi Raden Jusuf. Anggotanja berdjumlah sekira dua kompi diasramakan di Sungei Tanang dekat Bukittinggi. Tudjuan dari pembentukan itu adalah sebagai membantu Mobrig Keresidenan sewaktu keadaan menghendaki.

Polisi Keamanan (P.K.).

Setelah persetudjuan Renville pada pertengahan Djanuari 1948 tertjapai, maka dibentuklah suatu korps kepolisian jang diberi nama *Polisi Keamanan* dengan singkatan P.K.

Anggotanja terdiri dari anggota Tentara dan Polisi Sipil, jaitu Mobrig. Jang mendjadi tugas dari Polisi Keamanan tersebut adalah mendjaga garis status quo dan menjelenggarakan keamanan dan ketertiban serta harta benda dan djiwa penduduk jang berada didalam daerah jang di-demiliteriseer.

Susunan Kepolisian Negara.

Pada permulaan sesudah proklamasi, susunan kepolisian daerah ini diteruskan sebagaimana susunan kepolisian dimasa Djepang. jaitu:

Kepolisian Keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Djambi.

Kepolisian Wilajah.

Kepolisian Sub. Wilajah.

Setelah Propinsi Sumatera terbentuk, maka Kepolisian lalu menjesuaikan susunannja dengan pemerintahan, dan terbentuklah suatu Kepolisian Sumatera jang berkedudukan di Pematang Siantar dan dikepalai oleh Raden Suleiman dengan pangkat Komisariss Besar Polisi.

Pada bulan Djuni 1946 oleh Kepala Polisi Sumatera diadakan buat pertama kalinja Konperensi Kepala-kepala Polisi Keresidenan bertempat di Bukittinggi. Jang mendjadi tudjuan dari konperensi tersebut adalah untuk memperkokoh hubungan kepolisian antara satu sama lain serta untuk mengadakan suatu uniformiteit dalam organisasi dan administrasi. Setelah konperensi itu, maka berdirilah disini djabatan Kepala Penilik Kepolisian untuk Sumatera Tengah, buat menselaraskan susunan dengan pemerintahan, setelah berdirinja djabatan Gubernur Muda Sumatera Tengah.

Pada permulaan jang mendjadi Kepala Penilik Kepolisian disini adalah Raden Ating Natadikusuma dengan pangkat Komisariss Besar Polisi, jang diwaktu itu djuga mendjadi Kepala Sekolah Pendidikan Polisi, di Bukittinggi. Badan tersebut tidak mempunjai tugas buat bertindak seperti Operatif-Polisisionil, malahan merupakan satu badan koordinasi. Adapun Kepolisian Keresidenan masih tetap ada dan dialah jang melakukan tugas tersebut. Dengan berpindahnja tempat kedudukan Kepala Pemerintah Sumatera dari Pematang Siantar ke Bukittinggi, maka Kepolisian Sumatera djuga bertempat di Bukittinggi.

Sementara itu pada bulan Mei 1947 tiba disini Pembantu Komisaris Besar Polisi M. Umar Said dengan beberapa orang stafnja, jang diutus oleh Kepala Kepolisian Negara untuk mengadakan re-organisasi Kepolisian di Sumatera, sesuai dengan jang telah dilakukan di Djawa.

Dengan kedatangan beliau itu, maka kepolisian Sumatera ditukar mendjadi Tjabang Djawatan Kepolisian untuk Sumatera, jang dikepalai oleh beliau sendiri. Dengan terbentuknja pembagian Sumatera dalam tiga propinsi, maka kepolisian menyesuaikan pula susunannja dengan berdirinja Kepala Kepolisian Propinsi, seperti Sumatera Selatan, Tengah dan Utara.

Selandjutnja terdapat susunan seperti:

Polisi Kota Padang/Bukittinggi.

Kepolisian Kabupaten beserta wilayah-wilajahnja.

Di Sumatera Tengah ini terdapat 11 buah Kepolisian Kabupaten dengan 38 wilayah jang kemudian dirobah mendjadi 11 kepolisian Kabupaten dengan 1 Kepolisian Kota Padang.



Pasal 30.

KEPOLISIAN DALAM AGRESSI KE-II.

TANGGAL 19 Desember 1948. Aksi politisionil ke-II. Buat kedua kalinja Belanda merobek dan mengindjak-indjak perdjandjian jang telah mereka tanda-tangani. Polisi Keamanan Indonesia dibatas Solok — Padang, di Batang Tapakis, ditembaki dengan semena-mena waktu melaksanakan tugas mereka, dengan tidak mengetahui bahwa Belanda telah memulai angkara murkanja buat kedua kalinja.

Sebuah kuburan ditepi djalan besar Padang — Bukittinggi, ditepi sungai perbatasan daerah Republik dan daerah jang diduduki Belanda, adalah makam seorang peradjurit polisi, jang telah gugur dalam mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa.

Bukittinggi djatuh, Pajakumbuh diduduki musuh, dan hampir seluruh kota-kota di Sumatera Barat, Riau dan Djambi mereka duduki, tetapi diluar kota-kota, berkumpul, bergerak, menjerang Barisan Gerilja, terdiri dari: Pemuda-pemuda, Rakjat, Tentara dan Polisi.

Diluar Kota-kota, disusun Kepolisian kembali, tidak sadja untuk mendjaga keamanan, tetapi lebih-lebih untuk menjatakan kepada fihak manapun, bahasa Pemerintah, Pemerintah Republik Indonesia masih berdiri, dan alat-alat kekuasaannya masih ada dan bekerdja.

Diseluruh medan pertempuran berkumandang nama Kepolisian, di Riau Mobiele Brigade bertahan di Rantau Berangin, mempertahankan djalan raja Pakan Baru — Pajakumbuh. Siapa disana jang tidak kenal akan Inspektur Silalahi; rakjat tidak akan melupakan dia ! Warga Kepolisian tidak akan lupa kepada Kaharuddin Datuk Rangkojo Basa, Kepala Kepolisian Riau d'masa itu. Di Djambi pimpinan dipegang oleh Kepala Polisi A. Bastari. Dimana-mana dihutan-hutan Batang Hari, ditepi Sungai Siak dan Kampar, dipegunungan-pegunungan Minangkabau, anggota kepolisian memanggul sendjata, bertempur dan banjak jang gugur.

Siapa jang tidak kenal akan Front — Palupuh, dimana anggota-anggota Mobiele Brigade Sumatera Barat dan Sumatera Tengah, bertahan, berdjoang, menjerbu, sehingga Belanda putus asa dan tidak dapat menembus ke Utara, memperhubungkan Sibolga dengan Bukittinggi.

Rakjat akan selalu terkenal kepada pemimpin-pemimpin pertempuran seperti Amir Machmud, Raden Jusuf, Soeleiman Effendi. Mandangi, Amir Sunarjo dan lain-lain.

Rakjat akan tak lupa kepada anggota-anggota Kepolisian jang membela kampung halaman mereka, bahu-membahu dengan pemuda-pemuda rakjat.

Kuran — *kuran*, salah satu desa jang ketjil; disanalah berdiri *Tugu Peringatan* jang sederhana, dibangunkan ketika pertempuran sedang berkobar dan menghebat, tak lebih 5 Km. dari kubu-kubu tentara Belanda.

„Buat mereka jang telah berkorban untuk Nusa dan Bangsa” tertulis dengan tinta emas dikaki Tugu tersebut.”

Tugu ini adalah Lambang Rakjat, Pemuda, Mobiele Brigade dan Tentara, berdjalin satu, bersusun bahu dalam suatu daerah, mempunyai satu tudjuan dengan tekad — berdjolang untuk Nusa dan Bangsa.

Tepat pada tanggal 17 Agustus 1949, dalam udara tjerah, langit menghidjau, kaju-kajuan lambai melambai, angin berhembus sepoi-sepoi basah, tugu dibuka, dihadiri oleh Pemuda, Rakjat, anggauta-anggota Mobiele Brigade, dan sumpah dibatjakan.

Peradjurit Kepolisian dengan pakaian jang robek — rusak menundukkan kepala masing-masing mengheningkan tjipta — berdjolang — berdjolang untuk Negara.

Merapi dan Singgalang, pengawal jang abadi mendjulang kelangit hidjau, memandang kepada Putra-putranja, jang sedang berdoa kepada Tuhan, agar mereka diberi kekuatan, dan keimanan.

Apakah sebabnja maka Mobiele Brigade memilih Djalan Raya Bukittinggi — Lubuk Sikaping sebagai medan pertahanan pertempuran?. Disamping alam jang berhutan-hutan dan bergunung-gunung, disamping karena disebelah belakang terdapat daerah jang mempunyai makanan dan beras, tempat tersebut dipilih karena desakan kalbu dan karena rasa hormat dan bangga, terhadap Pahlawan Besar jang telah terdahulu, **Tuanku Imam Bondjol**, jang dalam pertempuran dengan Belanda dimasa jang silam telah memilih Palupuh sampai ke Bondjol, sebagai medan pertahanan dan perdjolongan. Dibawah naungan semangat beliau, ditempat jang sama, putera-putera turunan beliau, dibantu oleh dan bersama dengan seluruh rakjat, kembali mengangkat bedil dan tombak melawan angkara murka.

Belanda didaerah itu tak dapat madju, terpaku pada satu tempat.

Achirnja mereka harus mundur, Negara Republik Indonesia terbentuk. Kepolisian Sumatera Tengah telah memberikan sumbangan djiwa raga mereka untuk mentjapainja.

Kepolisian Republik Indonesia memasuki kota-kota, mengawal, mendjaga, memulihkan keamanan, sebagaimana tugas jang telah diwadjibkan pada mereka.

Perdjolongan melawan musuh telah selesai. Kepolisian kembali kepada tugas semula, mendjaga keamanan dan ketenteraman umum untuk kepentingan seluruh rakjat!

Pasal 31.

KEPOLISIAN SESUDAH PEMULIHAN.

Polisi R.I.S.

SESUDAH Pemulihan terdapatlah dua matjam daerah, jaitu daerah-daerah jang dulunja diduduki oleh Belanda, jang mendjadi daerah Republik Indonesia Serikat (R.I.S.) dan daerah-daerah jang diduduki oleh Republik Indonesia. Daerah Republik Indonesia Serikat jang terdapat di Sumatera Tengah ini adalah antara lain:

Kota Padang
Tandjung Pinang
Djambi.

Kepolisian didaerah-daerah itu termasuk kepolisian Republik Indonesia Serikat jang berpusat di Djakarta dan jang lain dinamakan Kepolisian R.I. jang berpusat di Djogjakarta.

Pimpinan kepolisian Republik Indonesia Serikat dipegang oleh orang-orang Republik Indonesia seperti:

Kepala Polisi Kota Padang, R.A. Rachman Soeriokusumo

Kepala Polisi Djambi, Achmad Bastari.

Kepala Polisi Kepulauan Riau (Tandjung Pinang), T. A. Aziz.

Dengan terbentuknja Negara Kesatuan, kembalilah kepolisian mempunjai tjorak jang satu, jaitu Kepolisian Negara.

Polisi-Perintis (Stootploeg).

Untuk segera dapat menghadapi segala kemungkinan jang memerlukan tindakan tjepat dan tegas dari kepolisian, maka dalam kesatuan Kepolisian Kota dan wilajah-wilajah dibentuk pasukan ketjil jang dipersendjatai lebih kuat dari pada polisi biasa pada umumnja. Mereka dilatih lebih luas tentang gerakan sebagai ke-Mobrig dari kepolisian wilajah-wilajah dan Kota. Pembentukan itu adalah berdasarkan pada putusan Kepala Djawatan Kepolisian Negara bulan Maret 1952. Singkatan nama pasukan itu adalah „PERINTIS”.

Pasukan itu adalah bagian dari Kepolisian Kota/Wilajah.

Selain untuk tugas kepolisian pada umumnja, Perintis tersebut dikerahkan untuk mengatasi kekatjauan-kekatjauan didalam lingkungan daerah kekuasaan dari Kepolisian Kota/Wilajah jang bersangkutan, sambil menunggu kedatangan perbantuan dari Mobrig, djika dibutuhkan.

Pasukan itu disusun dari anggota-anggota polisi yang ada dengan memilih dari tenaga-tenaga yang masih muda, berbadan sehat dan kuat.

Berhubung dengan keadaan keamanan di Sumatera Tengah sampai dewasa sekarang pada umumnya tiada terganggu, maka kepentingan pembentukan tersebut belum begitu terasa.

Dinas telekomunikasi kepolisian.

Diwaktu-waktu Polisi Mobrig, atau Polisi Perairan mengadakan patroulle dan tindakan kepolisian, maka mereka selalu harus mempunyai hubungan dengan pusat pangkalannya. Lebih tepat perhubungan dimaksud diadakan dengan alat-alat radio. Maka dari itu pada kepolisian diadakan dinas perhubungan radio yang dinamakan „Dinas Telekomunikasi“.

Antara lain alat-alatnya adalah: sebuah zender radio yang besar yang mempunyai kekuatan 1 kilowatt, yang dipergunakan buat perhubungan dengan propinsi-propinsi.

Sebuah zender-lokaal, yang dipergunakan buat perhubungan dengan kabupaten-kabupaten.

Pegawai-pegawainya yang terdiri dari radio-operator didik di Medan, dan radio monteur didik di Bandung.

Seksi Public Relations.

Perkembangan dalam kepolisian bukan hanya terdapat dalam tehnik dan organisasi saja, malahan juga yang mengenai kemasjarakatan, yang selaras dengan kehendak dari suatu Negara demokrasi.

Buat menjelenggarakan sesuatunya yang menjangkut dengan kemasjarakatan itu dibentuklah suatu seksi yang diberi nama „Public Relation“. Di Sumatera Tengah pembentukan itu baru berlangsung pada bulan Pebruari 1952. Yang menjadi tugas dari seksi itu pada garis besarnya adalah:

Keluar menjelenggarakan perhubungan yang baik dengan instansi-instansi dan masyarakat umumnya, dengan maksud, agar timbul suatu pengertian yang baik tentang kepolisian pada chalajak ramai; yang mewujudkan tertjapainya kerdja-sama sepenuhnya dalam melakukan tugas kepolisian.

Kedalam memelihara dan mengusahakan mempertinggi hasrat bekerdja dari anggota-anggotanya, corpsgeest, discipline serta efficiency dalam menunaikan tugas kepolisian, sehingga pada setiap pegawai kepolisian timbul kesadaran, yang dibutuhkan dalam melakukan tugas pekerdjaannya.

Seksi tersebut berkedudukan di Kantor Polisi Propinsi Sumatera Tengah, sedangkan di tiap-tiap kabupaten dibentuk seksi *Informations Service*, yang akan memberi penjelasan dan keterangan mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepolisian.

Bangun-bangunan kepolisian.

Sebagian besar dari kepolisian di Sumatera Tengah ini belum lagi mempunyai Asrama. Buat kelantjaran perdjalan discipline kepolisian, asrama-asrama untuk anggota-anggotanja adalah menjadi salah satu dasar. Kesatuan Kepolisian yang mempunyai asrama, di Sumatera Barat, adalah: di Padang, Sungei Penuh, Painan, Pariaman, Padang Luar Kota, Solok, Pajakumbuh, dan Talu.

Di Riau; di Bangkinang, Pakan Baru, Selat Pandjang, Bengkalis, Kepulauan Riau dan Rengat.

Djambi: di Djambi Kota.

Sifat asrama-asrama yang ada itu yang diwarisi dari Pemerintah Djadjahan, jaitu tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat kediaman bagi warga dari satu negara yang merdeka; sebagai kenjataan, bahwa satu kelamin mendiami satu petak yang ketjil yang hanja berukuran 3×3 meter. Dapatlah kita kira-kirakan bagaimana tjara hidup dari mereka itu.

Didalam clash yang ke-I dan yang ke-II, sebahagian besar dari asrama-asrama itu telah habis terbakar. Berhubung dengan keadaan keuangan Negara belum lagi dapat mengizinkan buat mendirikan asrama-asrama baru — yang tetap, maka hanja dapat didirikan asrama-asrama darurat.

Itupun belum dapat lagi dilaksanakan disemua tempat, hanja baru ditempat-tempat yang paling sangat membutuhinja berhubung dengan pembentukan pasukan-pasukan *Polisi Perintis*. Yang telah selesai diselenggarakan adalah seperti: di Sungei Penuh, Painan, Padang Luar Kota, Mentawai, Pariaman, Solok, Sidjundjung, Bukittinggi, Pajakumbuh, Bangkinang, Pakan Baru, Siak Seri Indrapura, Selat Pandjang, Rengat, Djambi, Muara Tebo.

Yang telah dan sedang diusahakan, yang merupakan asrama permanent, adalah ditempat-tempat, seperti: Djati (Padang) dan Padang Pandjang buat Mobrig, Batu Sangkar, Pakan Baru, Tandjung Batau (Riau). Dan selandjutnja akan diperbuat di: Tembilahan, Kuala Tungkal, Djambi, Muara Tembesi dan Muara Bungo.

Sekiranya perumahan-perumahan yang baik telah tjukup untuk anggota kepolisian, maka corpsgeest dan discipline kepolisian akan lebih teratur dan baik adanja.

Pendidikan.

Buat dapat memenuhi kekurangan yang berupa kaders maka pada bulan Djuli 1946 diadakan Sekolah Pembantu Inspektur Polisi di Bukittinggi. Tjalon-tjalon anggotanja diambil dari pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, yang mempunyai idjazah S.M.P. atau sekolah yang bersamaan dengan itu. Lama beladjar 6 bulan. Sekolah tersebut berdjalan dari 1946 sampai Desember 1947 dan menghasilkan dua lichtenen dari Pembantu Inspektur. tk. II yang berdjumlah 98 orang.

Sesudah itu ditahun 1948, diadakan pendidikan buat tjalon Inspektur Polisi, jang sesudahnja pemulihan, berhubungan dengan ditutup pendidikan tersebut di Bukittinggi, meneruskan peladjaran-nja di Sekolah Inspektur Polisi di Sukabumi. Mereka itu berdjumlah kl. 28 orang, dimana diantaranya terdapat 6 orang wanita. Selain dari kursus-kursus tersebut diatas, dimasa itu diadakan djuga aplicatie cursus (pendidikan ulangan) buat Komandan Polisi, djuga bertempat di Bukittinggi.

Setelah pemulihan, latihan-latihan ulangan diadakan di Padang dan hanja buat agen-agen Polisi. Disamping itu diadakan djuga pendidikan buat Dactyloscopy dan Photography; tjalonnja diambil dari pegawai-pegawai Polisi jang berpangkat dari Komandan Polisi kebawah.

Di Padang Pandjang dididik tjalon-tjalon Agen Polisi buat Mobrig, jang telah berdjalan semendjak bulan September 1951. Sampai sekarang telah tiga kali menghasilkan Agen Polisi buat Mobrig jang semuanya berdjumlah kl. 1200 orang.

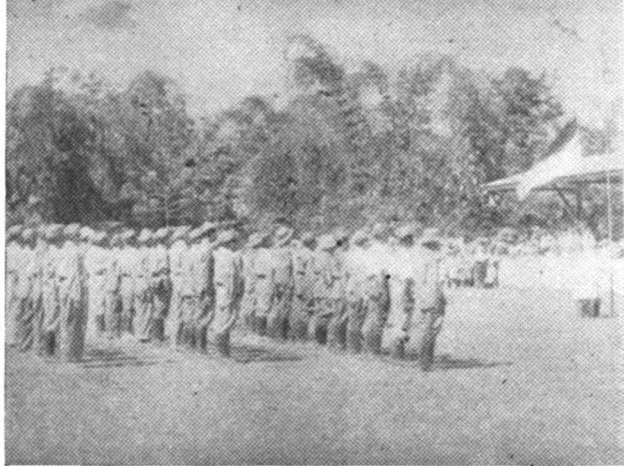
Pada permulaan bulan Mei 1953, diresmikan berdirinja Sekolah Polisi buat pendidikan Agen-agen Polisi di Padang jang sekarang mempunjai murid kl. 400 orang, sebahagian pemuda-pemuda dari Propinsi Sum. Selatan. Lama beladjar pada sekolah tsb. adalah 6 bulan.

Dengan adanja sekolah dan pendidikan bagi pegawai Polisi, maka dengan djalan demikian kekurangan-kekurangan dilapangan tenaga kepolisian jang terdidik, dengan tjara berangsur-angsur akan dapat diatasi.

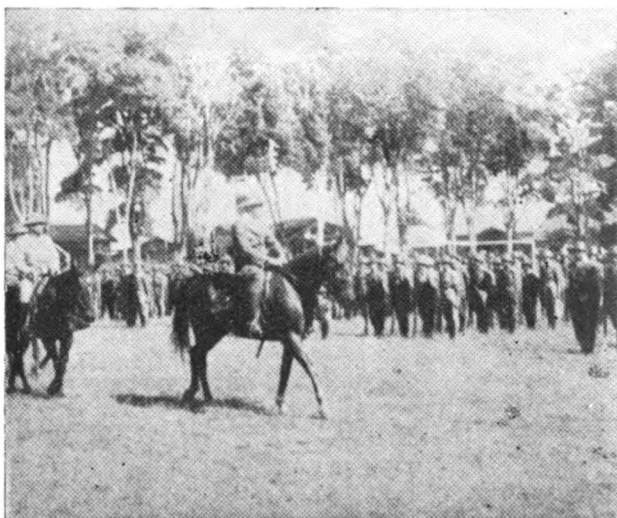
Semoga selangkah demi selangkah, penjelenggaraan, pengawasan dan pendjagaan keamanan serta ketenteraman akan meningkat maju dan mentjapai hasil jang ditjita-tjitakan.



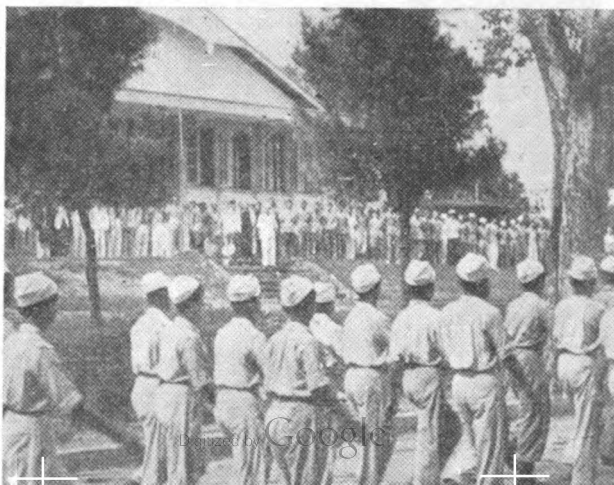
***Upatjara Pelantikan opsir
T.K.R. dilapangan Atas
Ngarai Bukittinggi.***



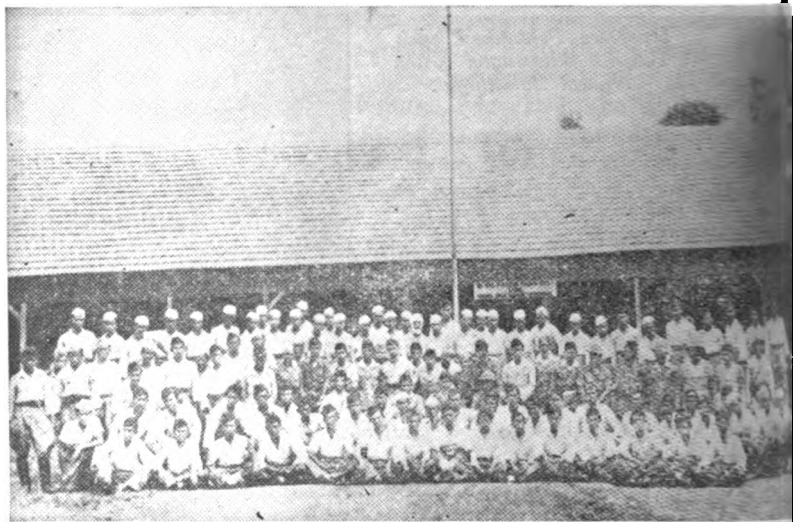
***Kolonel Dahlan Djambe
Putjuk pimpinan T.K.R.
Sum. Tengah, melakukan
pemeriksaan barisan T.K.R.
Bataljon Bukittinggi.***



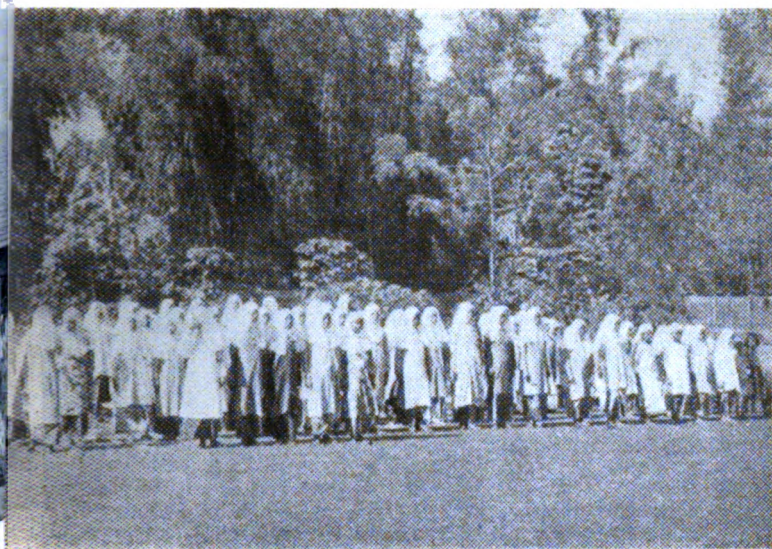
***Pengikut latihan opsir Ba-
risan Sabilillah.***



*Pembukaan latihan op-
sir-opsir T.K.R. lichtung
pertama di Bukittinggi.*



*Pemimpin-pemimpin
ri Barisan Hizbu
dan Sabilillah sel
berkonperensi. Ke
dari kiri, Agus Sa
Muray, Komd. Hiz
lah Sum. Tengah.
ngah Bachtiar Ju
Komd. Hizbullah Sa
tera dan kedua dari
nan, Sjamsiah S
Komd. Sabil Mus
Sumatera Tengah*



*Lasjkar Muslimat In-
donesia jang dibangun-
kan oleh Perti sedang
berlatih.*



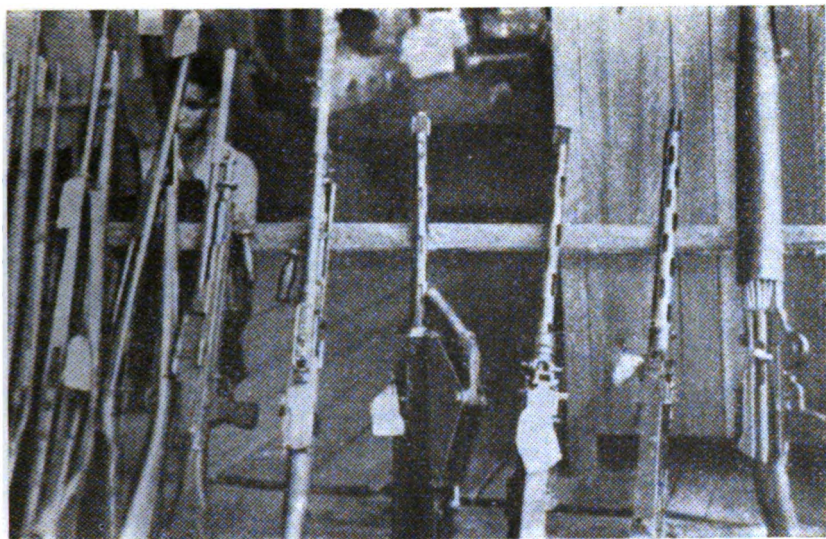
*Pemuda-pemuda desa
dilatih dalam ketentera-
an.*



Suku Anak Dalam (Kubu) didaerah Djambi menemui pemimpin negaranya. Hasrat mereka membela kemerdekaan bergolak dengan hebat.



Dari kiri kekanan: Let. Kol. Jazid Abidin, Kolonel Dahlan Djambek dan Kolonel Ismail Lengah. (Tiga orang diantara pimpinan ketenteraan di Sum Tengah).



*Sendjata baru sebagai rampasan jang diperoleh
dalam pertempuran melawan pihak-pihak jang
menghalangi arus kemerdekaan.*

..... berangkatlah mereka kemedan „sabung njawa“.

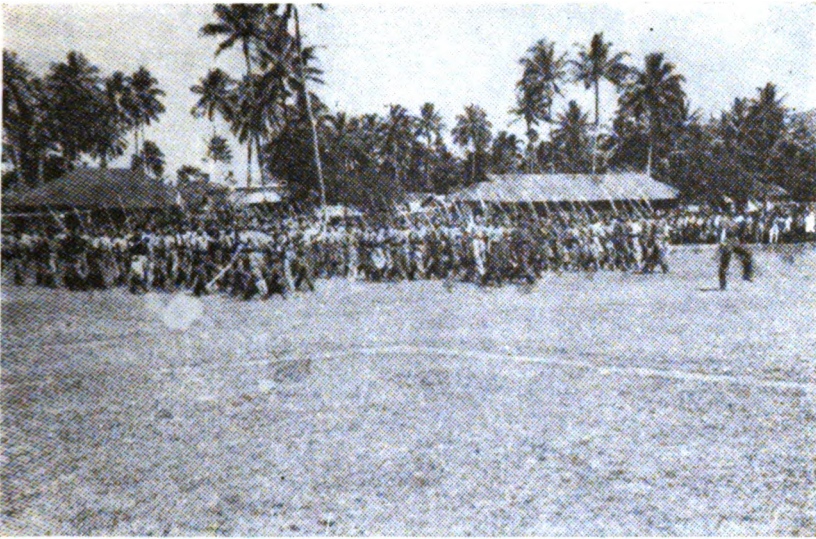




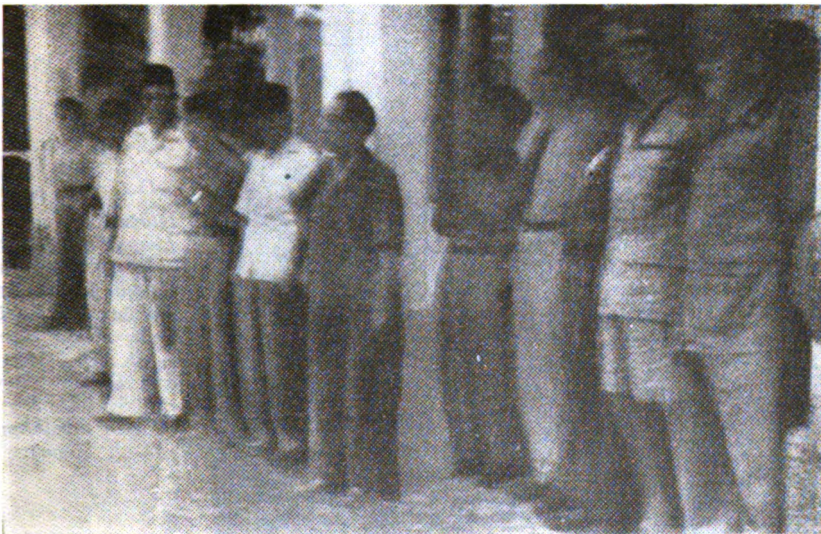
..... mereka 'lah gugur sebagai „pahlawan”.....
 Perletakan karangan bunga dimakam Pahlawan
 Bukittinggi oleh Kol. Dahlan Djambek (tengah).

Gambar bersama dimuka markas Polisi Tentera
 Sumatera di Bukittinggi.





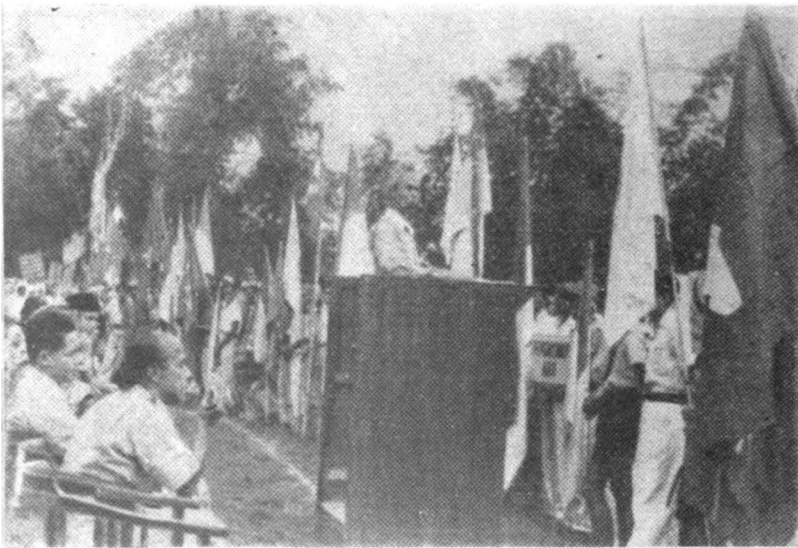
Parade waktu peringatan 5 Oktober untuk pertama kali (1945).



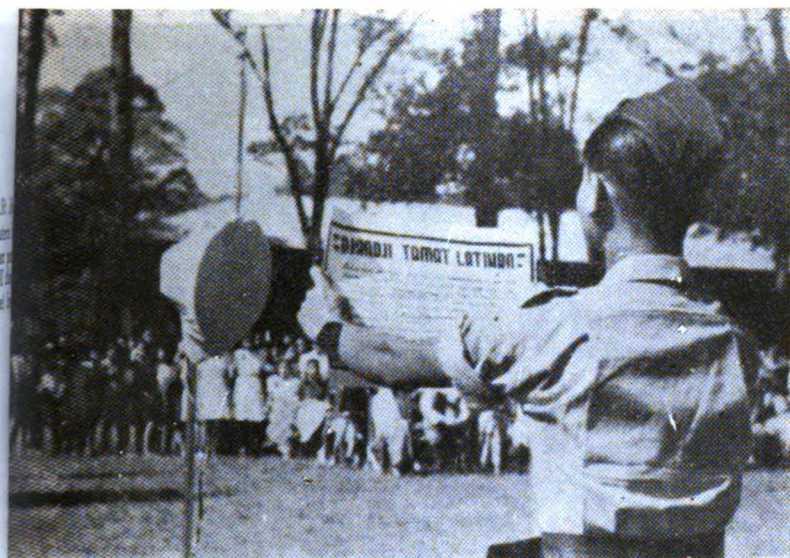
Berdiri ditengah berkatja mata, Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifuddin waktu perundingan pelaksanaan.



*Mr. St. Rasjid Rea
Sumatera Barat
rahaan pandji ba
visi IX Banteng
Kolonel Ismail Leng*



*Divisi Komandan Ismail
Lengah memberikan na
sehat-nasehat dan pe
tundjuk kepada barisan
Rakjat. Dihadiri oleh
Gub. Muda Sum. Te
ngah, Dr. M. Djami
dan Residen Sum. Ba
rat. Mr. St. M. Rasjid
(duduk dibelakang po
dium).*



Opsir jang baru tamat latihan mengutjapkan „djandji” setia negara dalam rapat umum di Bukittinggi.

Djembatan telah runtuh, mobil ditolak menjeberangi air untuk terus membawa alat-alat ke front.

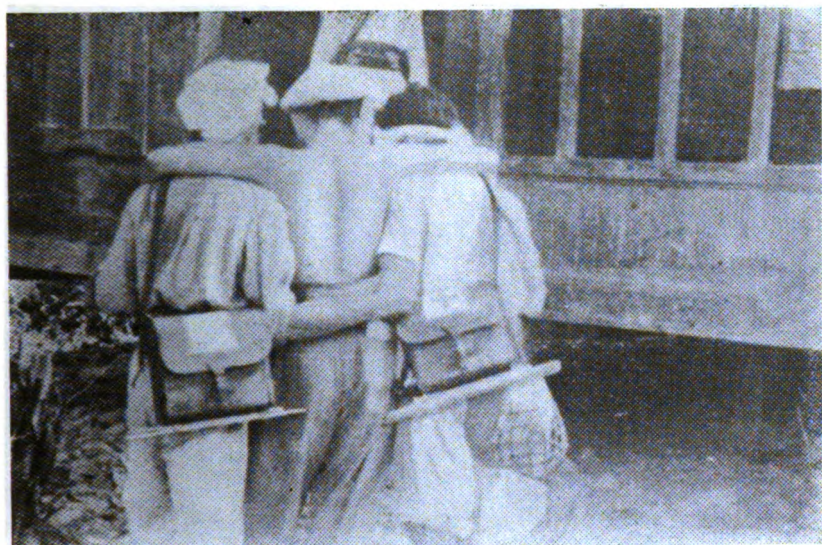




Mereka sudah siap buat melakukan tugas



*Major Ahmad Hosen mendjelaskan tjara pema-
kaian sendjata baru kepada ibu-ibu B.P.B.M.
jang mengantarkan makanan ke front.*



Palang Merah Indonesia menjelamatkan mereka yang luka dalam pertempuran.

Runtuhan gedung-gedung dan rumah sakit akibat keganasan tentara Belanda dari udara.

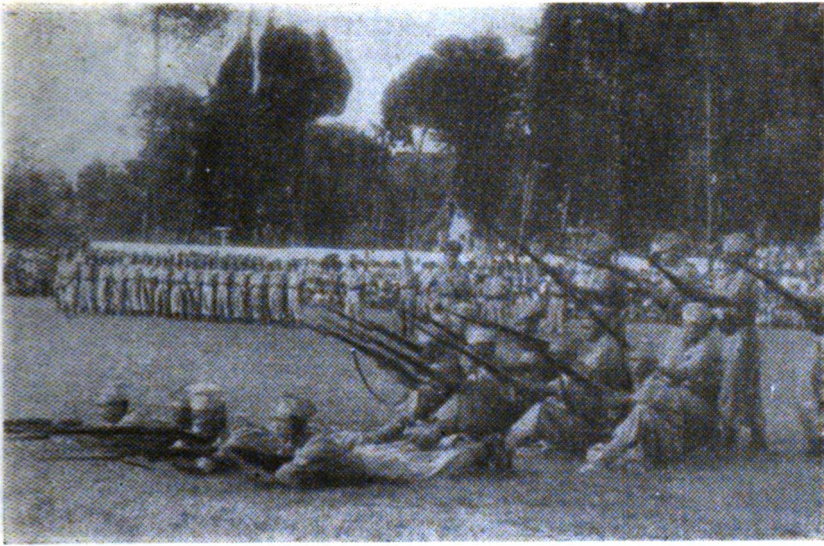




Diantara runtuhan-runtuhan karena perdjongan, mereka teruskan pertempuran guna mentjapai tudjuan.



Polisi negara. Mereka dilatih tjara bertempur. Jang baru tamat latihan mengadakan demonstrasi pada waktu penutupan latihan.



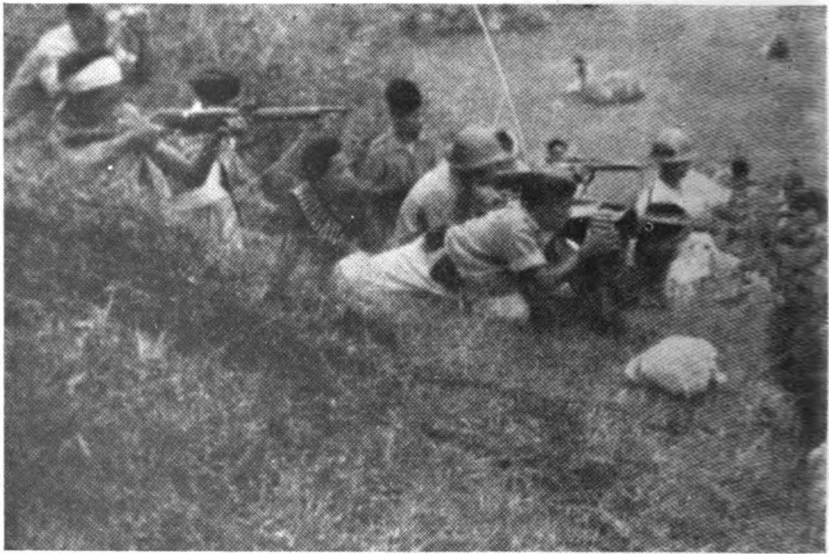
Polisi negara. Mereka dilatih tjara-tjara bertempur jang baru tamat latihan mengadakan demonstrasi pada waktu penutupan latihan.



Pantjaragam, Pasukan Musik Tentera Divisi IX Banteng.



Para pengikut latihan opsir tentera litching kedua mengadakan demonstrasi.



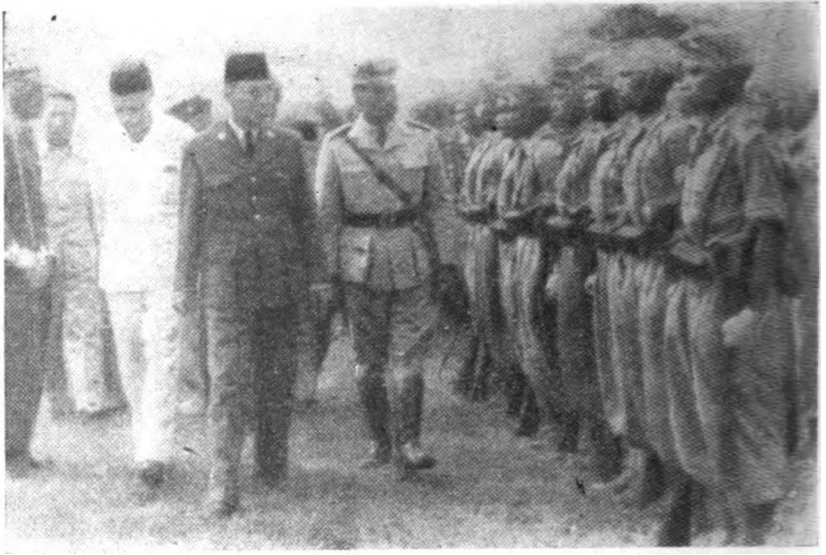
Mereka sudah siap sedia, hanja lagi menunggu perintah.



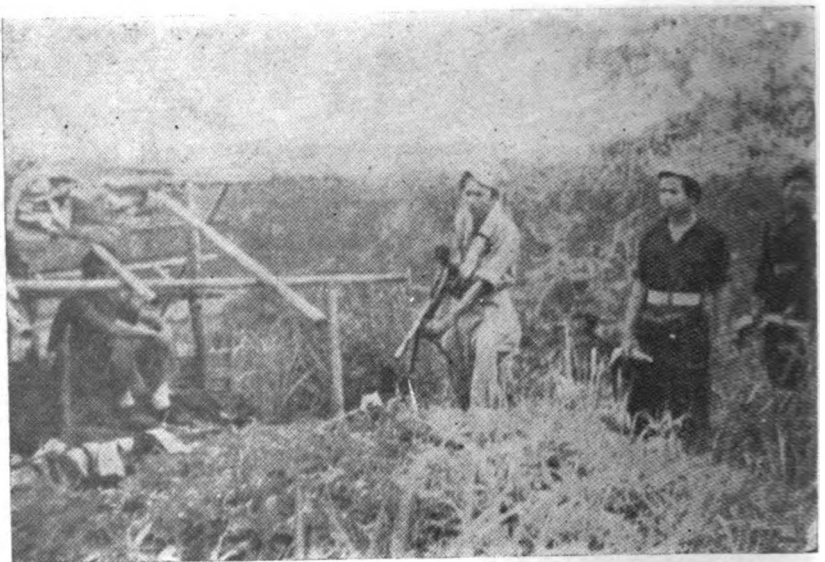
Salah seorang yang menjadi korban perjuangan.



Konperensi kesatuan tentara Divisi IX yang diikuti oleh seluruh kepala staf dan komandan-komandan Bataljon. Diabadikan selesai konperensi.



Presiden Soekarno melakukan pemeriksaan barisan pengawal kehormatan sewaktu berkundjung ke Sumatera Tengah (Djuni 1948).



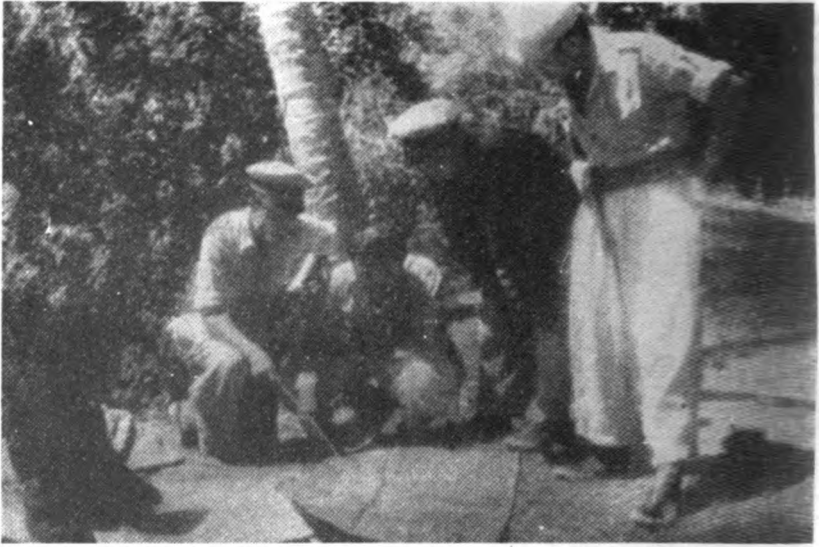
Kompi Halilintar jang sedang mengawal diatas Ngarai Sianok waktu agresi ke-II.



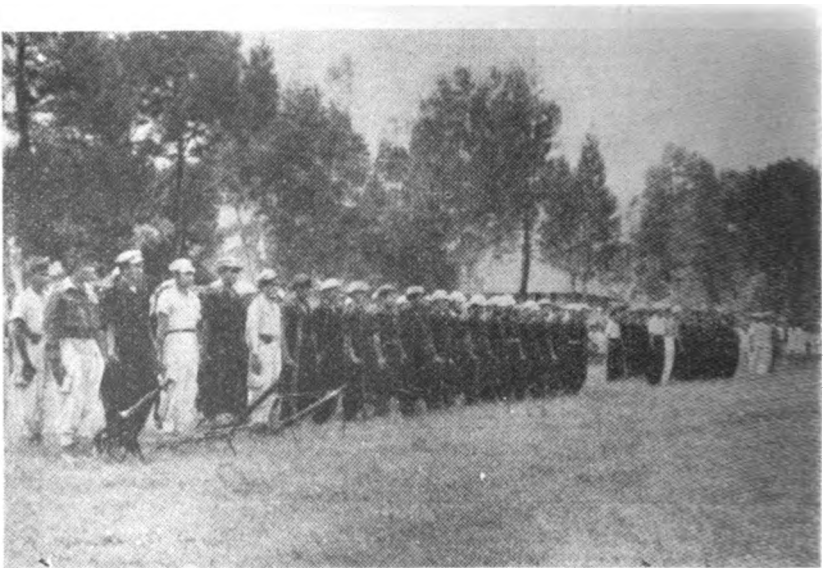
Ibu-ibu dari dapur umum membagi-bagi nasi kepada pemuda-pemuda yang baru kembali dari menjalankan tugasnja



Instruksi yang penting mesti diselesaikan dengan tjepat. Mesin tulis djuga ikut serta bergerilja.



Let. Kol Thalib mendjelaskan tjara melakukan penjerangan terhadap tentera Belanda kepada stafnja.



Mereka bersiap menerima perintah dari komandannja.



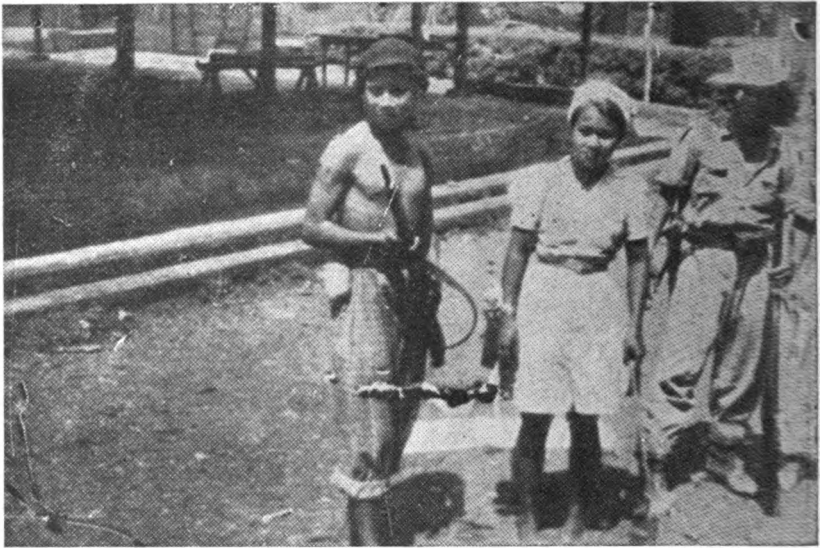
Wanita djuga ikut memanggul senapan.



Barisan Pengawal Nagari dan Kota (B.P.N.K.) ikut memegang peranan dalam agresi ke II). Dari B.P.N.K., dibentuk pula P.M.T. (Pasukan Mobil Teras)



*Sebuah lobang merupakan tebat disuatu kampung
bekas sasaran bom tentara Belanda.*



*Berpakaian seragam atau tidak, namun kewadajiban
tetap didja'ankan.*



*Sambil bergerilja mendengarkan warta
berita dari radio rimbu jang ikut gerilja.*

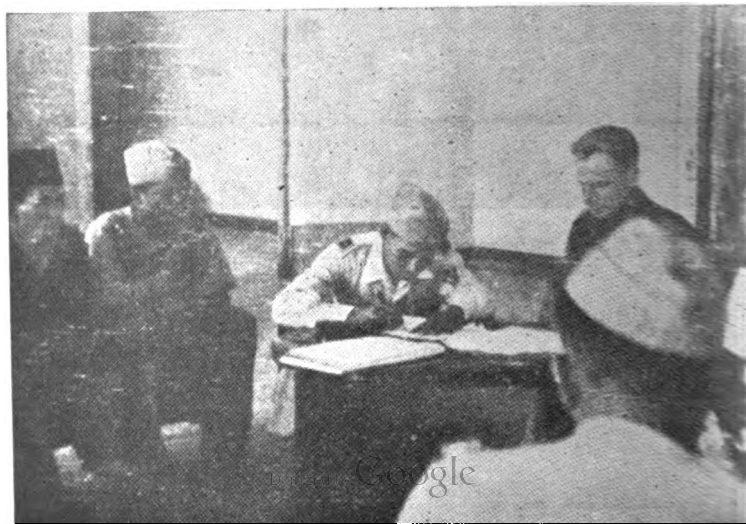


*B.P.K.K.P. mengantarkan nasi dan
bahan makanan lainnja ke Front.*



Major A. Hosen menerima penyerahan kota Solok dari Belanda.

Major Kemal Mustafa menandatangani surat timbang terima dari tentara Belanda.





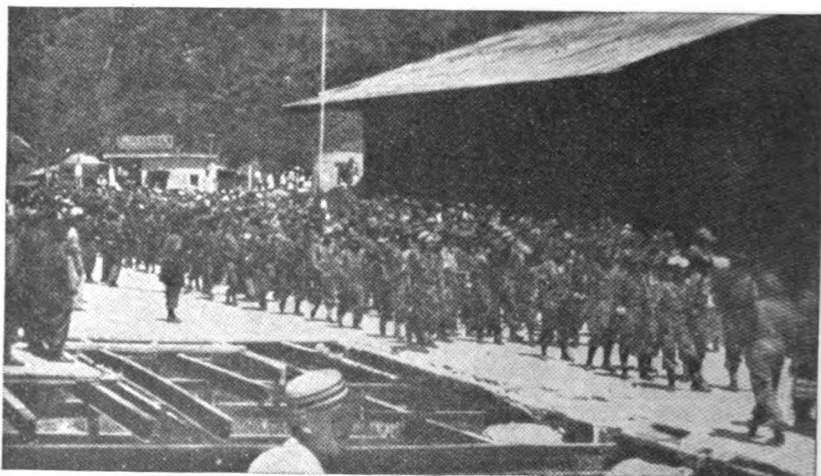
Kembali ke kota sambil melambaikan Sang Dwi- Warna.

Dari berbagai daerah pedalaman, T.N.I. memasuki kota-kota.



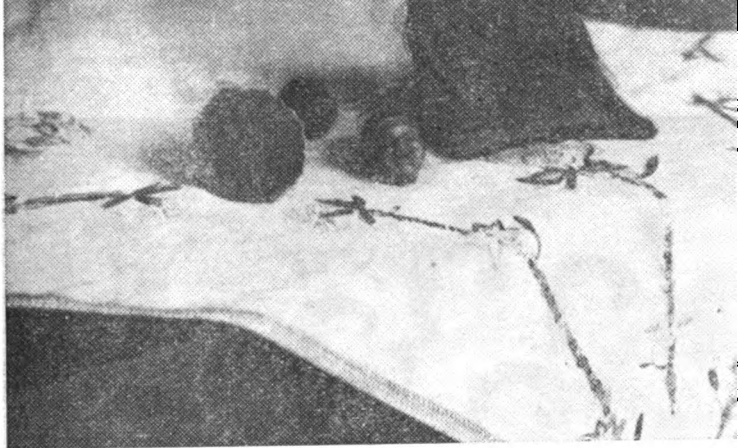


Parade dari Bataljon Pagar Rujung di Padang sebelum berangkat ketempat jang baru di Sumatera Tengah.

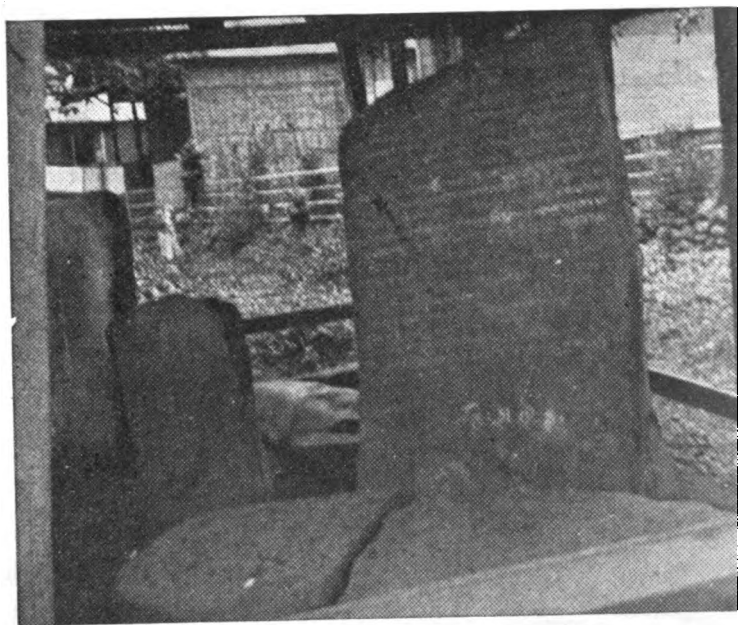


Bataljon Pagar Rujung sebelum naik kapal dipelabuhan Teluk Bujur.

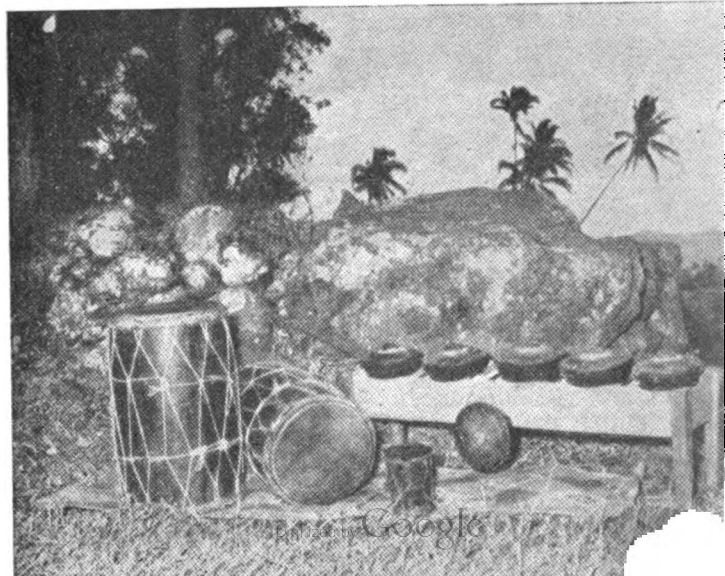
*Stempel keradjaan jang
dipergunakan oleh Tuan
Gadis.*



*Batu bersurat pada ni-
san (medjan) Alm. Adi-
tyawarman menurut se-
tengah riwayat, ialah
makam dari ayah Adi
tyawarman.*

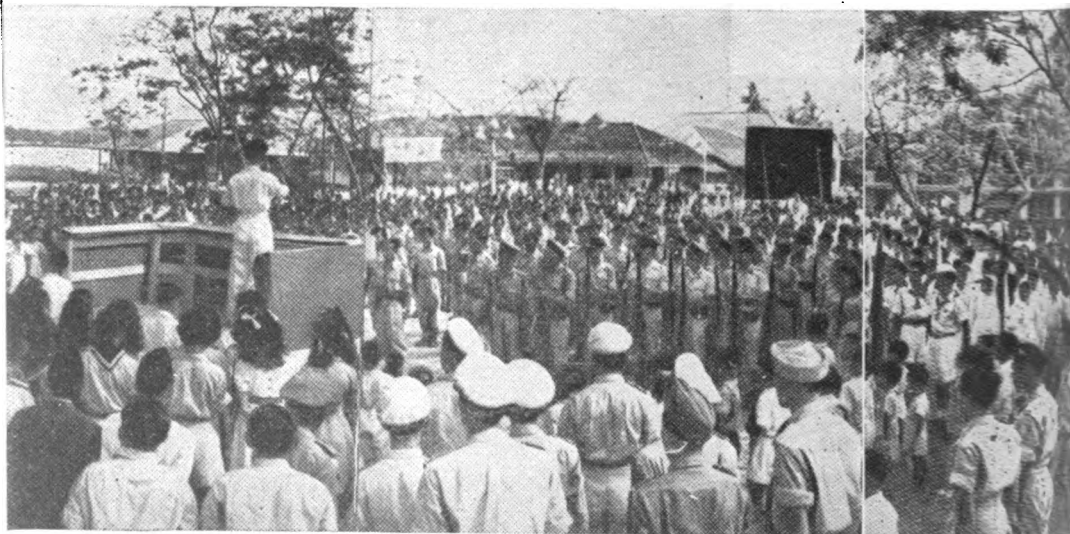


*Alat bunji-bunjan, gen-
dang dan telempong.*





*Malam perpisahan dari Bataljon 123 Sibinuang
jang hendak meninggalkan Sumatera Tengah.*



Setahun kemudian. 10 NOPEMBER di TANDJUNG PINANG.

BAB 3
PEREKONOMIAN.

BAHAGIAN VI.

MEMBANGUN EKONOMI
NASIONAL.

Pasal 32.
PERTANIAN.

DAERAH Sumatera Tengah jang bergunung-gunung berbukit-bukit, berlurah dan berawa, selain ditumbuhi oleh kaju-kaju besar, jang merupakan hutan-hutan, djuga sebagiannja dapat ditanami dengan padi.

Luas tanah jang ditanami padi (sawah) di Propinsi Sumatera Tengah 241.472 ha. jang terletak di:

1. Sumatera Barat, seluas 185.678 ha.
2. Riau, seluas 20.794 ha.
3. Djambi, seluas 35.000 ha.

Hasil padi sawah semendjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, lebih-lebih diwaktu pendudukan Djepang, belum lagi menurut hasil jang semestinja (hasil sebelum perang dunia ke-II).

Sebagai tjontoh kita turunkan tjatatan tahunan perbandingan hasil tersebut dalam daerah Sumatera Barat, dan adalah sebagai berikut:

Tahun	djiwa	hasil ton	Diperlukan ton	Berlebih ton	Berkurang ton
1938	2.083.351	484.390	515.838		21.448
1939	2.090.986	482.060	522.747		40.697
1940	2.118.620	517.894	529.654		11.760
1941	2.146.254	533.980	536.564		2.584
1942	2.181.017	565.100	547.000	18.100	—,,—
1943	2.236.929	539.003	568.718		28.815
1944	2.289.331	524.792	572.331		47.539
1945	2.323.671	420.450	580.918		160.468
1946	2.329.355	436.000	590.436		154.475
1947	2.347.410	488.190	596.513		108.723
1948	—,,—	—,,—			
1949	—,,—	—,,—			
1950/51	—,,—	530.549			
1951/1952	tjatatan belum lengkap.				

Dalam tjatatan diatas kelihatan bahwa hasil jang terbaik, jaitu ditahun 1942, disebabkan diachir tahun 1941, iklim untuk padi sawah sangat memuaskan, bandar-bandar didjaga dengan rapi, pelakat sawah dituruti dengan semestinja. Dan pada tahun 1943

hingga tahun 1945 (zaman pendudukan Djepang) hasil padi mulai meningkat turun, disebabkan bermatjam-matjam keadaan alam dan keadaan lain. Diwaktu itu bandar-bandar kurang dapat perhatian, pelakat sawah kurang dituruti, pekerdjaan sawah tidak sempurna dan lain-lain.

Pada tahun berikutnja hingga tahun 1948 hasil memuaskan, hanja pada tahun 1948 dibagian pesisir, terdapat penjakit *mentek* (penjakit urat padi, mati gadih, hampa). Sesudah clash ke-II, diwaktu penjerahan kedaulatan, kegiatan untuk bertani belum lagi nampak, pemuda-pemuda banjak jang lari kekotalkota mentjari pekerdjaan, tapi berangsur-angsur, mereka kembali lagi kekampung.

Pada tahun 1950, pengairan-pengairan jang sedjak zaman Djepang tidak terpelihara, mulai diperbaiki lagi, sawah-sawah jang sudah lama kering berangsur-angsur ditanami. Hasil padi pada tahun 1950 ini, boleh dikatakan sudah mendekati hasil sebelum perang dunia ke-II (1942), tapi belum lagi mentjukupi untuk keperluan hidup penduduknja, hingga terpaksa djuga memasukkan beras dari luar negeri.

Untuk djelasnja diturunkan pemakaian beras tahunan dibandingkan dengan djumlah penduduk tahun 1950/1951.

Daerah	Djumlah penduduk	Djumlah ton	Kebutuhan/bibit ton	Kekurangan ton
Sumatera Barat	2.492.318	530.549.8	617.388.4	86.738.6
R i a u	730.717	58.823.5	185.219.1	126.395.6
D j a m b i	322.532	67.932.8	83.333	15.400.2
Djumlah				228.534.4
				ton padi atau 125.693.9 beras.

Untuk mentjukupi kekurangan tersebut, Pemerintah mendatangkan beras dari luar negeri, dan pada tahun 1951 daftar pemasukan itu adalah seperti berikut:

Daftar import beras dalam Daerah Sumatera Tengah tahun 1951.

Pelabuhan	Banjaknja
Padang	14.190.200 Kg.
Pakanbaru	7.544.636 „
Bengkalis	9.924.519 „
Rengat	444.319 „
(Djan. 5/2 Maret dan Djuli tidak diketahui)	
Djambi	21.140.712 „
(masuk dari luar/dalam daerah pabean)	
Djumlah	53.244.386 Kg.

Usaha lain, untuk mentjukupi bahan makanan, oleh Pemerintah Sumatera Tengah, diusahakan untuk membuka tanah baru jang pada mulanja seluas 2500 ha, di Sukamenanti Wilajah Pasaman, Kabupaten Pasaman.

Pada achir tahun 1952, sudah didatangkan 10 buah tractor untuk mengerdjakan itu, seselesainja dimaksudkan oleh Pemerintah akan dibagikannja kepada tiap-tiap keluarga jang sudah mendaftarkan nama dan mau pindah ketempat tersebut, masing-masing seluas 5 ha.

Segala ongkos jang dikeluarkan Pemerintah untuk pembukaan tanah itu, akan dibayar nanti oleh orang jang memilikinja dengan djalan mentjitjil.

Tanah-tanah jang akan dibagikan ini, sebagian dapat didjadikan sawah dan sebagian lagi untuk tanaman muda, tanaman tua dan perumahan.

Selain itu untuk menambah produksi bahan makanan, diusahakan djuga:

- a. *memperbaiki pengairan* jang telah ada baik jang besar maupun jang ketjil, serta menambah pengairan baru untuk perluasan sawah.

Perbaikan dan penambahan pengairan jang sudah dilakukan adalah 3 matjam:

1. Dikerdjakan oleh P.U. dengan bantuan rakjat.
2. Dikerdjakan oleh rakjat seluruhnja.
3. Dikerdjakan oleh rakjat dengan bantuan materieel dari Djawatan Pertanian, seperti semen, kapur, kawat dan lain-lain.

- b. *Perbaikan-perbaikan pengairan* jang sudah dilaksanakan adalah seperti berikut:

- 1°. Pengairan jang diperbaiki dan diperbuat dengan perbelanjaan Pekerdjaan Umum, mengairi seluas 100.875 ha.
- 2°. Pengairan jang diperbaiki dan diperbuat dengan perbelanjaan R.K.I. mengairi seluas 5.955 ha.

Diperbandingkan dengan djumlah luas sawah jaitu di Sumatera Barat 185.000 ha. maka pengairan dan saluran jang sudah mendjalani rehabilitasi hanja mengenai + 8% dari djumlah luas sawah. Njatalah sekarang bahwa masih banyak jang perlu lagi dikerdjakan. Lebih-lebih apa jang dinamakan *Pengairan Rakjat* seperti ternjata pada daftar diatas, perbaikan pengairan itu

membawa manfaat pada penghasilan padi. Ada kalanja kenaikan hasilnja tidak begitu banjak, akan tetapi hasil dari tahun ketahun akan tetap atau kerusakan akan mendjadi serendah-rendahnja.

Perbaikan dalam tahun 1951 hanja mengenai daerah Sumatera Barat sadja, sedangkan Daerah III dan IV jaitu Riau dan Djambi belum ada jang dikerdjakan. Ini tidak berarti mengabaikan daerah itu, tetapi disebabkan:

1. Perhubungan kedaerah Riau dan Djambi, masih begitu sulit, oleh karena djalan-djalan belum diperbaiki, sehingga pemeriksaan tidak/sukar dapat didjalankan, apa lagi akan membawa alat-alat seperti semen dan lain-lain.
 2. Sedikitnja Fondsen jang diterima.
 3. Persawahan masih belum dapat perhatian jang seksama oleh Pak Tani daerah tersebut diatas.
- c. *Memupuki sawah-sawah* jang kurus dengan pupuk buatan, pupuk kandang dan pupuk hidjau.
- d. *Mengusahakan bertanam menurut waktu* jang ditentukan (pelakat sawah).
- e. *Memperbaiki pengerdjaan tanah sawah*, dengan mendatangkan perkakas-perkakas pertanian dari luar negeri dan mendjualnja langsung kepada rakjat.
- f. *Memperbaiki mutu padi* jang akan ditanam dengan djalan membuat sawah bibit seperti di Padang, Bukittinggi dan lain-lain menurut iklim tempat.
- g. *Membanteras gangguan babi* jang merusakkan padi dengan ratjun babi (fosfordeeg).

Tanaman muda.

Dalam tahun 1952 luas tanaman muda dan sajian disawah sesudah padi, ataupun digurun semakin bertambah kalau dibandingkan dengan tahun jang sebelumnya. Pada daerah karet sesudah djatuhnja harga karet, maka perhatian rakjat sudah mulai tertudju kepada usaha memperluas tanaman muda.

Hasil tanaman muda itu, dapat menolong kekurangan hasil padi.

Pada tempat-tempat jang kurang sawahnja dan tjukup gurunnja diandjurkan betul menanam tanaman muda, sebagai makanan jang berguna untuk penolong rakjat diwaktu musim patjeklik.

Oleh Djawatan Pertanian diusahakan mendatangkan bibit-bibit tanaman muda dari luar negeri dan pulau Djawa. Selain dari itu didatangkan juga pupuk, ratjun untuk pembanteras penjakit-penjakit dan hama-hama yang mengganggu tanaman itu, seperti fosfordeeg, D.D.T. terusi, Z.A. dan lain-lain.

Berhubung dengan banjaknja tanaman sajian jang ditanam didaerah Sumatera Barat, sehingga berlebih dari pada kebutuhan penduduknja, maka oleh Pemerintah sudah diusahakan mengeluarkan kedaerah jang berkekurangan seperti kedaerah Djambi dan Riau dengan perantaraan Koperasi Tani Rakjat.

Djawatan Pertanian ada memberi pindjaman tampang kepada rakjat tani, seperti kentang, padi dan lain-lain. Tetapi hal ini tak dapat diteruskan lagi, karena menurut pengalaman, untuk menagihnja kembali sangatlah sulitnja.

Dibawah ini ditjantumkan luas dan hasil tanaman muda sajian dalam tahun 1951.

Kabupaten	Kentang		Kol		Bawang		Buntjis		Lada		Lain ²	
	Ha	ton	Ha	ton	Ha	ton	Ha	ton	Ha	ton	Ha	ton
Agam	139	644	227	1587	173	675	304	458	895	1343	58	74
Pasaman	14	72	12	25	22	70	—	—	593	867	638	635
L. Kota	1	8	—	—	20	72	—	—	213	317	431	427
Tanah datar	293	1752	203	1570	400	1560	178	273	859	1289	562	815
Solo	330	1614	87	530	525	2071	444	599	922	1283	725	722
S.Lunto/Sdd	—	—	—	—	—	—	—	—	254	470	518	512
P.S.K.	664	2723	—	—	131	558	—	—	1157	1726	1961	1960
Kampar	} Belum didapat keterangan.											
Bengkalis												
Inderagiri												
Kep. Riau												
Batanghari												
Merangin												
	1441	6813	529	3712	1271	5006	926	1330	4943	7295	5693	5967

Tanaman muda lain, jang ditanam untuk penambah dan diper-
lukan pada musim patjeklik adalah seperti berikut:

Matjam tanaman	Luas tanaman muda		Luas pemungutan		Hasil ton
	pada	achir 1950	dalam tahun 1951		
	Sawah	Tanah kering	Sawah	Tanah kering	

SUMATERA BARAT

Djagung	175	1312	5131	2493	116891
Ketela pohon	—	5813	—	11689	87555
„ rambat	237	670	1630	1437	16965
Katjang tanah	68	650	4901	1791	80963
Kedele	—	15	26	281	1355

R I A U

Djagung	—	275	—	978	10758
Ketela pohon	—	1820	—	3548	26610
„ rambat	—	103	—	600	3600
Katjang tanah	—	62	—	172	1892
Kedele	—	—	—	—	—

D J A M B I

Djagung	—	—
Ketela pohon	—	—
„ rambat	—	—
Katjang tanah	—	—
Kedele	—	—

Untuk memperbaiki produksi dari tanaman muda ini oleh Peme-
rintah Sumatera Tengah telah dibagi-bagikan bahan-bahan untuk
perkebunan rakjat ini, dan daftarnja adalah seperti berikut :

Bahan-bahan Perkebunan Rakjat jang dibagi-bagikan dalam tahun 1951.

No.	Nama barang	Banjaknja dalam		Kete- rangan
		Tahun 1950	Tahun 1951	
	Tampang²:			
1.	Kol	9,490 kg.	29,930 kg.	
2.	Sawi Putih	—	17,030 kg.	
3.	Tomat	—	0,825 kg.	
4.	Kentang	—	8103,— kg.	
5.	Lain ² Sajuran	—	—	
6.	Djeruk (oculatie)	—	474,— btnng.	
7.	Rambutan (idem)	—	794,— btnng.	
8.	Sawo (anak)	—	40,— btnng.	
9.	Pokat (anak)	—	13,— btnng.	
	Ratjun (obat²an):			
1.	Ratjun ulat, jaitu	787,05 kg.	751,— kg.	
2.	D.D.T. dan Hexyclen Koperoxchloride	439,— kg.	1368,5 kg.	
	Pupuk buatan d.l.l.:			
1.	Ammophos z.a. 8	2169,— kg.	7666,— kg.	
2.	Pompa ulat	—	2,— stel.	

Tanaman tua perdagangan.

Berhubung sekarang tanaman tua perdagangan harganja sebahagian sudah mulai baik, maka rakjat tani mulai pula berusaha untuk menambah luas tanamannja, seperti tanaman kopi dan tjengkeh.

Sudah diandjurkan pula mempermuda kembali tanaman kopi jang sudah tua, dengan djalan memangkas.

Selain dari itu oleh Djawatan Pertanian Kabupaten, sudah di-buatkan kebun-kebun bibit, untuk tempat menjemaikan bermatjam-matjam bibit tanaman tua perdagangan dan buah-buahan jang sesuai dengan iklim ditempat itu, seperti bibit kopi, tjengkeh, kelapa, para, tjoklat, rambutan, djeruk dan lain-lain.

Tanaman tebu rakjat mendapat perhatian djuga dari Djawatan Pertanian, dan sudah diusahakan untuk memperbaiki-mutu tebu jang ditanam rakjat dengan mutu tebu jang lebih tinggi hasilnja dari sekarang.

Diandjurkan djuga untuk menukar kilangan kaju dengan kilangan besi, sebab kilangan besi lebih menguntungkan dari kilangan kaju.

Untuk pertjobaan sudah diberikan kilangan besi kepada tempat-tempat jang penting. Beberapa orang pemuda tani didaerah tanaman tebu, sudah dikirim kepulau Djawa, untuk mempeladjar tanaman

tebu disana, jang akan ditjontoh dan dipropagandakannja nanti dikampungnja masing-masing.

Terutama pada daerah-daerah jang panas hawanja dan baik keadaan tanahnja, sudah diandjurkan supaja pada tempat itu diperluas penanaman pohon buah-buahan. Untuk itu oleh Djawatan Pertanian sudah disediakan bibit buah-buahan pada beberapa Kabupaten.

Luas tanaman tua perdagangan rakjat adalah sebagai jang tertulis didaftar dibawah ini.

Pada umumnja perluasan dari tanah-tanah usaha rakjat dalam tahun 1951 belum begitu berarti.

Djenis tanaman	Adanja akhir tahun 1950 h.a.	Ditanam dlm. tahun 1951 h.a.	Adanja dlm. tahun 1951 h.a.	Keterangan
----------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------

Daerah 1 Bukittinggi dan Daerah II Padang (Sumatera Barat)

1. Kelapa	28,000	—	28,000
2. Karet	25,000	30	25,030
3. Kulit manis	20,000	—	20,000
4. Tebu	5,000	—	5,000
4. Tebu	5,000	—	5,000
5. Tembakau	7,000	4,650	4,650
6. Gambir	3,000	1,000	3,100
7. Kopi	1,630	450	2,080
8. Tjengkeh	2,000	—	2,000
9. Katjang tanah	—	1,800	1,800
10. Pala	850	—	750
11. Kapok	750	—	750

Daerah III Pakan Baru (Riau)

1. Kelapa	219,331 ⁽¹⁾	—	219,331 ⁽¹⁾
2. Karet	35,000 ⁽²⁾	—	182,572 ⁽²⁾
3. Sagu	60,000 ⁽³⁾	—	60,000 ⁽³⁾
4. Pinang	10,000 ⁽⁴⁾	—	10,000 ⁽⁴⁾
5. Gambir	500 ⁽⁵⁾	—	500 ⁽⁵⁾

Daerah IV Djambi (Djambi)

1. Karet	188,600	—	188,600
2. Kelapa	35,000	—	35,000
3. Pinang	300	—	300
4. Lada ketjil	200	—	200

Perubahan dalam hak milik tanah dikalangan rakjat tidak ada. Tanah-tanah kepunjaan cultuur-ondernemingen dari bangsa asing disana sini diduduki oleh rakjat atau pekerdja-pekerdja lama dari kebun-kebun besar itu. Bagaimana kedudukannja hingga kini belum terang. Djika ada patokan tentang ini jang telah diambil oleh Pemerintah, pelaksanaannja kebawah belum ada.

(1) Di Kep. Riau ditaksir 80.000 ha, selebihnja 139.331 ha. djadi djumlah 219.331 ha.

(2) Di Kep. Riau ditaksir 90.000 ha. selebihnja 92.572 ha. djadi djumlah 182.572 ha.

(3), (4) dan (5) tidak termasuk jang ada di Kep. Riau.

*
**

KEBUN BIBIT.

SEBAGAI memenuhi permintaan orang-orang tani, untuk mendapat bibit tanaman tua dan bibit-bibit lainnja yang baik, maka Djawatan Pertanian mengadakan kebun-kebun bibit di Kabupaten-kabupaten dalam Prop. Sumatera Tengah. Kebun-kebun tersebut adalah sebagai tersebut dibawah ini :

1. Gurun Pandjang (Bukittinggi).
Luas tanah 7 ha, terdiri dari sawah dan gurun.
Disediakan bibit-bibit padi, bibit buah-buahan, sajur-sajuran dan lain-lain.
2. Gobah (Tilatang Bukittinggi).
Luas tanah 0,6 ha, terdjadi dari sawah dan gurun.
Disediakan bibit padi dan tanaman bermatjam-matjam djeruk, jang didjadikan tampang.
3. Benteng (Pajakumbuh).
Luas 0,8 ha, berisi berupa-rupa djenis pohon sawo dan rambutan untuk didjadikan tampang.
4. Ladang Lawas (Batusangkar).
Luas 20 ha, terdiri dari sawah dan gurun.
Disana disediakan bibit-bibitan kelapa, tjengkih, kopi dan lain-lain.
5. Tigo Djangko (Batusangkar).
Luas 20 ha, terdiri dari tanah kering, jang ditanami dengan pohon getah dan bermatjam-matjam elonen, bibit bermatjam-matjam rambutan dan djeruk.
6. Silaing (Padang Pandjang).
Luas 0,3 ha, terdjadi dari tanah gurun, tempat pembibitan bermatjam-matjam djeruk.
7. Lubuk Minturun (Padang).
Luas 20 ha, berisi bibit bermatjam-matjam pohon buah-buahan (rambutan, djeruk, sawo, pisang) kulit manis, getah dan lain-lain.
8. Pakan Baru.
Luas 2 ha, terdiri dari sawah dan tanah kering untuk pembibitan tanaman keras (tjengkih, tjoklat, kopi) oculatie rambutan dan djeruk.

9. Perhentian Marpujan (Pakan Baru).

Luas 20 ha, terdiri dari tanah gurun dan sawah.

Dalam kebun ini ditanam bermatjam-matjam buah-buahan untuk oculatie dan pohon induk, jaitu rambutan, djeruk pokat, sawo dan nenas. Selain dari itu ditanam bermatjam-matjam tanam-tanaman keras.

10. Taluk (Inderagiri).

Luas 1.5 ha, berisikan tanaman rambutan dan djeruk dari beberapa oculatie dan berdjenis-djenis rambutan.

11. Air Molek (Inderagiri).

Luas 1 ha, berisi tanaman-rambutan dan djeruk.

12. Pekan Hiran (Inderagiri).

Luas 1,5 ha, berisi tanaman dan djeruk.

13. Sungai Tigo (Djambi).

Luas 33.5 ha, dipakai untuk pertjobaan tanaman buah-buahan, tanaman keras dan pembibitan oculatie rambutan.

Selain dari pada jang tersebut diatas banjak lagi jang lain jang sekarang baru dalam pembangunan, dan ada pula jang baru diperbaiki sebab sudah rusak berhubung dengan keadaan perang dimasa jang lalu.

Djenis	Disemaikan			Disemaikan			Dioculatie		
	Achir th. 50	Dalam th. 51	Achir th. 51	Achir th. 50	Dalam th. 51	Achir th. 51	Achir th. 50	Dalam th. 51	Achir th. 51
Djeruk	26.000	20.000	46.000	7.600	25.700	33.300	—	3.500	3.500
JC									
Rambutan ...	12.500	27.500	40.000	12.000	11.862	23.862	1.000	9.200	10.200
Sawo	2.000	—	2.000	—	400	400	—	—	—

B.P.M.D.

Sampai sekarang Djawatan Pertanian sudah mendirikan 6 buah Balai-Pendidikan Masyarakat Desa (B.P.M.D.). Maksud B.P.M.D. itu, ialah tempat orang-orang kampung menerima penerangan-penerangan tentang pertanian dan melihat tjontoh-tjontoh jang dibuat ditanah sekeliling tempat itu, jang akan dikerdjakannya nanti ditempatnja masing-masing. Selain dari itu B.P.M.D. boleh djuga dipakai oleh Instansi-instansi lain, tempat memberikan kursus, rapat atau penerangan kepada orang kampung.

Pada waktu sekarang ditiap-tiap B.P.M.D. itu dibibitkan bermatjam-matjam tanaman muda, untuk memenuhi kehendak dari orang-orang tani jang berkundjung ketempat itu.

Tempat-tempat B.P.M.D. jang ada sekarang ialah:

1. Koto Tinggi (Wilajah Baso), luas tanahnja 6 ha.
2. Aur Kuning (Pajakumbuh), luas tanahnja 2 ha.
3. Airmutus (Solok), luas tanahnja 2 ha.
4. Padang Sibusuk (Sawah Lunto), luas tanahnja 10 ha.
5. Tjubadak (Batusangkar), luas tanahnja 5 ha.
6. Lubuk Sikaping, luas tanahnja 5 ha.

Oleh karena B.P.M.D. itu besar faedahnja dan mendapat perhatian penuh oleh Masjarakat Tani, banjaklah negeri-negeri jang memberikan tanahnja kepada Djawatan Pertanian supaja didirikan disana B.P.M.D.

Sekarang djumlah B.P.M.D. itu ditambah banjaknya beberapa buah lagi, jang mana pekerdjaannja sedang dalam pelaksanaan. Luas tanah jang diberikan rata-rata seluas 5 ha.

Tempat-tempatnja adalah sebagai berikut:

1. Lubuk Basung.
2. Sintuk (Pariaman).
3. Sungai Pampan (Painan).
4. Surian (Muaro Labuh).
5. Tandjung Pati (Pajakumbuh).
6. Bangkinang.
7. Pakan Baru.
8. Tandjung Boni (Batusangkar).
9. Dan pada beberapa tempat didalam Kabupaten Inderagiri, Pasaman, Sawah Lunto, Sidjundjung, dan daerah Djambi.

Pendidikan Pertanian.

Untuk mendidik pemuda-pemuda kita kearah pertanian jang dynamis, sehingga dapat memimpin perusahaan sendiri dikemudian hari, maka oleh Djawatan Pertanian sudah didirikan 3 buah Sekolah Tani. Lama Sekolah itu 2 tahun. Murid-murid jang diterima untuk itu, ialah murid jang sudah tammat beladjar pada Sekolah Rakjat, umur sekurang-kurangnya 16 tahun, dari segala daerah dalam Prop. Sumatera Tengah.

Untuk murid jang berasal dari daerah panas 0-300 m dari permukaan laut tempat sekolah itu di Sukamenanti (Kabupaten Pasaman).

Untuk murid-murid jang berasal dari daerah sedang 301-700 m, tempat sekolah itu di Padang Manggatas (Pajakumbuh).

Untuk murid-murid jang berasal dari daerah dingin, lebih 700 m, tempatnja di Sukabumi (Kaju Aro Solok).

Melihat kepentingan sekolah itu dan permintaan dari masjarakat umum, dimaksudkan akan mendirikan sekolah-sekolah jang seperti itu di tiap-tiap Kabupaten, dengan djalan berangsur-angsur.

Tanah jang diberikan rakjat untuk itu sebagai tjendawan tumbuh banjknja.

Berhubung dengan kekurangan pegawai teknis, jang akan melantjarkan pertanian dikampung-kampung, oleh Djawatan Pertanian Prop. Sumatera Tengah, sudah didirikan Kader Kursus untuk Mantri Tani, lamanja 1 tahun. Sesudah itu dalam pertengahan tahun ini, dididik lagi tjalon untuk djadi Mantri Tani, jang akan ditempatkan didaerah Djambi dan Riau. Mereka itu terdiri dari pemuda-pemuda jang berasal dari daerah Djambi dan Riau pula.

Dan untuk mempertinggi mutu para pegawai jang ada sekarang, pada pertengahan tahun ini, sudah pula dididik Mantri-mantri Kepala dari Kabupaten-kabupaten dalam Prop. Sumatera Tengah, jang lama pendidikannja 1 tahun.

Selain dari itu beberapa orang pegawai pertanian, sudah dikirim kepulau Djawa untuk menambah ilmu pengetahuannja tentang perkebunan buah-buahan di Pasar Minggu Djakarta, penjelidikan tanaman-tanaman di Bogor, mekanisasi di Pasar Minggu Djakarta dan tebu Rakjat di Djawa Timur dan Tengah.

Mendjaga dan memperbaiki tanah.

Tanah-tanah jang miring akan diusahakan membuatnja bertingkat-tingkat supaja bunga tanah djangan hanjut kebawah, jang menjebabkan tjepatnja kurus tanah. Untuk ini sudah disediakan pertjobaan-pertjobaan dan akan diadakan perlombaan untuk itu.

Tanah-tanah jang sudah kurus, diusahakan supaja ditanami dengan pupuk hidjau, (grotalaria).

Untuk mentjegah bahaya bandjir, diusahakan dengan djalan memberi penerangan, supaja hutan djangan ditebangi rakjat dengan semau-maunja sadja,, lebih-lebih jang dekat kekampung-kampung, dan agar menanami kembali hutan-hutan jang sudah gundul.



Pasal 33.

KOPERASI.

UNTUK melaksanakan tjita-tjita Pemerintah dilapangan koperasi, sebagaimana termatkub dalam Undang-undang dasar R.I. pasal 33, maka buat pertama kali keluar maklumat dari Kementerian Kemakmuran, jaitu mengandjurkan, Koperasi Rakjat sebanjak mungkin berdiri.

Andjuran tersebut, oleh Djawatan Koperasi diluaskan kedesa-desa, kekampung-kampung. Usaha ini dapat sambutan jang baik dari masjarakat. Berkat kerdja sama dengan Pamong Pradja pemimpin-pemimpin organisasi, maka pada tahun 1946 hampir diseluruh negeri di Sumatera Barat sudah dapat didirikan 442 koperasi rakjat, beranggota 165.133 orang.

Untuk meladeni koperasi-koperasi tersebut, di Pusat oleh Pusat Kemakmuran rakjat dibentuk satu badan Pusat pembagian, pengumpulan dan pembelian barang-barang untuk Koperasi Rakjat jang dimaksud bernama (POKRA).

Sebelum badan ini berdjalan, ia sudah memberikan djandji jang muluk-muluk kepada rakjat, tetapi kemudian ia kandas dalam usahanja karena digulung inflasi, dan terpaksa dibubarkan.

Koperasi Rakjat jang telah tersebar dan baru sadja dibentuk, ikut kandas, sebelum dapat mendjalankan usahanja. Dengan demikian semangat rakjat jang bergelora mulanja dalam mendirikan koperasi, mulailah turun dan merasa ketjewa terhadap sikap Pemerintah tentang koperasi ini.

Setelah „POKRA” dibubarkan, oleh Djawatan Koperasi segera diandjurkan penggabungan koperasi bagi daerah jang berdekatan. Gabungan ini diwujudkan untuk meladeni Koperasi Negeri, dan berkedudukan didaerah Kewedanan atau Kabupaten dengan nama „Sentral Koperasi Rakjat” dengan kependekan S.K.R.

Pada pertengahan tahun 1948, terbentuklah 13 S.K.R. di Sumatera Barat sadja, dimana dalamnja bergabung 352 buah Koperasi Rakjat dengan djumlah modal Rp. 83.726,20.

Modal ini diambil 50% dari djumlah modal tiap-tiap koperasi jang bergabung.

Disamping itu banjak pula kesulitan-kesulitan jang dialami oleh Koperasi Rakjat terutama dalam pengangkutan, dan kekurangan modal. Kesulitan itu ditambah dengan tindakan Pemerintah dalam

lapangan keuangan, jaitu penarikan uang kertas Urip Rp. 25.—, Rp. 10.— dan Rp. 5.— tjetakan „Pematang Siantar”, dan paling achir Urip Rp. 25. — hidjau. Kedjadian ini melumpuhkan keuangan Koperasi Rakjat begitu pula keuangan Sentral Koperasi Rakjat.

Pada tanggal 14 Maret 1948, oleh Pemerintah, telah diberikan bantuan uang kepada S.K.R. untuk memodalinja kembali. Dengan demikian S.K.R., bisa bergerak kembali, dan menimbulkan semangat baru dalam bekerdja bagi pengurus-pengurus S.K.R.

Sokongan Pemerintah, bukan sadja dengan modal, djuga dengan tenaga, dengan djalan membelikan barang-barang jang dibutuhkan oleh koperasi.

Selain dari Koperasi Konsumsi, djuga berdiri Koperasi Produksi, hingga pada pertengahan tahun 1948, sudah tertjatat 16 buah Koperasi Produksi.

Tapi sesudah berdirinja koperasi-koperasi ini, nampak kele-suannja, disebabkan bermatjam-matjam hal, hanja jang dapat bergerak jaitu Koperasi Kilang Benang Silungkang, Koperasi Karet Taratak Baru Sidjundjung.

Kurang lantjarnja koperasi tersebut disebabkan:

- a. Kekurangan modal.
- b. Kesulitan bahan mentah.
- c. Kekurangan solidariteit antara anggotanja.
- d. Kekurangan pemimpin jang ahli.
- e. Sulitnja pasaran dari barang-barang jang dihasilkan disebabkan kesulitan perhubungan.
- f. Tjepatnja terdjadi inflasi.

Koperasi Kredit dapat perhatian djuga dari masjarakat, tapi hampir seluruh Koperasi Kredit tak dapat melantjarkan usahanja. disebabkan tak sanggup mengatasi akibat inflasi keuangan disaat itu.

Bantuan Pemerintah moreel/materiel pada koperasi.

- a. Memberikan stoot kapital untuk S.K.R. sebanjak Rp. 110.000.—.
- b. Memberikan pindjaman pada Koperasi Kilang Benang di Silungkang sebanjak Rp. 80.000.—.
- c. Memberikan petundjuk tentang:
 1. Pedoman berkoperasi.
 2. Tjara memegang buku Koperasi Rakjat.
 3. Tjontoh anggaran dasar Koperasi Produksi/Kredit.
 4. Latihan-latihan terhadap pengurus koperasi.

Untuk djelasnja kami terangkan disini daftar koperasi di Sumatera Barat sebelum clash II.

No. Kabupaten	Konsumsi		Produksi		Kredit	
	Dalam penga- wasan	Dlm. pem- angunan	Dalam penga- wasan	Dlm. pem- angunan	Dalam penga- wasan	Dlm. pem- angunan
1. Pasaman	43	1	—	—	—	—
2. 50 Kota	46	3	—	2	1	—
3. Agam	81	2	1	5	—	13
4. Tanah Datar	106	3	2	1	—	1
5. Kurintji/Painan	63	2	2	1	1	2
6. Pd. Pariaman	48	2	2	—	1	6
7. Solok	55	1	—	—	—	—
	442 (a)	15	7	9	3	22 (b)

- a. Diantaranja 352 buah Koperasi Rakjat bergabung dalam 13 Sentral Koperasi.
- b. Perkumpulan-perkumpulan ini hidup dalam zaman Djepang.

Untuk menghidupkan kembali semangat berkoperasi sesudah pemulihan ini, pada mulanja memang agak sulit disebabkan beberapa faktor:

- a. Akibat agresi II ini, melumpuhkan persaudagaran ketjil, segala tjita-tjita sementara kendur, belum lagi memikirkan kesedjahteraan ekonomi, tapi sekedar untuk penutup keperluan hidup sehari-hari.
- b. Matinja Koperasi-koperasi Rakjat (KOPRA) yang membawa pengertian buruk bagi rakjat.

Tetapi keadaan jang demikian itu, oleh Pemerintah tidak dibiarkan begitu sadja, malah ditjari djalan sebaiknja dengan bekerdja sama dengan instansi-instansi pemerintahan jang lain untuk membimbing rakjat kembali kearah pembangunan koperasi.

Dan pada akhir tahun 1950, mulailah tampak usaha kearah itu dan dipelbagai daerah satu demi satu muntjul kembali koperasi baik Koperasi Konsumsi, Kredit maupun Koperasi Produksi:

Andjuran berkoperasi ini bukan sadja datangnja dari pemimpin daerah, bahkan Wakil Presiden sendiri, sewaktu bulan Maret 1952, dalam wedjangan jang beliau berikan dirapat-rapat umum tidak ketinggalan mengandjurkan dan menjerukan supaja rakjat giat

membangunkan Koperasi untuk kemakmuran. Bahkan atas inisiatif beliau, dijadikanlah tanggal 12 Djuli menjadi Hari Koperasi

Begitu juga dengan kembalinja beberapa orang Bupati dari studi opdrachtnja ke Djawa, menambah pula kegiatan kepada daerah tersebut untuk membangunkan koperasi dalam daerahnja masing-masing.

Pada waktu sesudah pemulihan ini, perhatian masjarakat bukan sadja tertudju kepada Koperasi Konsumsi seperti ditahun-tahun sebelum clash II, tapi banjak djuga diarahkan kepada Koperasi Produksi dan Kredit.

Diakhir tahun 1951 telah didaftarkan 103 buah koperasi pada Kantor Inspeksi Koperasi, selain itu masih banjak lagi koperasi jang belum didaftarkan.

Sesuai dengan pertumbuhan koperasi didesa-desa, oleh Inspeksi Pendidikan Koperasi Sumatera Tengah, selalu diadakan bimbingan dan pemeriksaan, baik berupa anggaran dasar dan tetangga, maupun tjara-tjara administrasija untuk membawa kepada pembukuan jang teratur.

Dalam rangkaian usaha kearah ini, pada tahun 1952, dalam triwulan I, II, III, telah dilakukan pemeriksaan jang teliti terhadap 14 perkumpulan koperasi jang sudah terdaftar pada Inspeksi Koperasi Sumatera Tengah, jaitu pada koperasi seperti berikut:

No.	N a m a	Tempat	Anggota	Djumlah modal
1.	Persatuan Tenun Rakjat Silungkang	Silungkang	115	87.021,98
2.	Simpan Pindjam	Pauh Kambar	120	11.623,82
3.	Pertenunan Rakjat	Piagu	19	6.746,50
4.	Bank Koperasi Pegawai	Penindjauan	62	5.550,—
5.	S.S.K.D.N. (Konsumsi)		107	19.145,—
6.	Penjelenggara Kebutuhan Rakjat	Solok	27	1.560,—
7.	Kredit Dagang Pariaman	Solok	32	2.365,—
8.	C.K.L.	50 Kota	28	200.699,82
9.	S.P.P.N.	Kamang	97	5.416,—
10.	Memperkembang Ternak	Mungkar	22	7.732,—
11.	Karet Taratak Baru	Kateba Sw./Sdj.	93	63.500,—
12.	„Pura”	Agam	124	7.047,30
13.	Gambir Sumpur Kudus	Sw./Sidjundjung	22	3.491,—
14.	Pindjaman Rakjat Indonesia	Surian	30	20.833,87

Dalam pemeriksaan koperasi-koperasi tersebut, didapat kesan yang memuaskan, dan sebagian kecil dari koperasi-koperasi itu masih membutuhkan petunjuk, terutama dalam soal pembukuan.

Pada tahun 1952 ini, nampak benar kegiatan masyarakat untuk mendirikan koperasi ini, berkat hasil kerdja sama dari Djawatan-djawatan dan Pamong Pradja beserta pemimpin-pemimpin Rakjat, dan pemuda-pemuda keluaran Kursus Koperasi yang diadakan oleh Inspeksi Koperasi hingga dapat ditjatat pada triwulan III tahun ini seperti berikut.

**Daftar pelaksanaan pendaftaran perkumpulan² Koperasi.
Dalam daerah Insko S. Tengah s/d 22 September 1952.**

Kabupaten	Djumlah	Jang telah mendaftarkan	Angg. Dasar jang sudah dikirimkan ke Pusat dari Koperasi			Djumlah anggota	Modal			
			1951	1952	Djum-		Uang	Bt. Getah	Gam-bir	
1951.										
1. Agam	12	15	7	5	12					
2. Pasaman	39	37	13	6	19					
3. Pd/Pariaman	69	20	4	4	8					
4. Solok	26	12	4	—	4					
5. Tanah Dasar	31	3	1	2	3					
6. 50 Kota	55	5	—	—	—					
7. Sw/Sidjundjung	36	14	2	1	3					
8. P.S.K.	12	12	—	—	—					
9. Kotapr. Padang	14	5	—	—	—					
10. Kampar	19	1	1	—	1					
11. Inderagiri	13	10	1	—	1					
12. Bt. Hari	4	4	—	—	—					
13. P. Tello	11	1	1	—	1					
14. Merangin	12	—	—	—	—					
Keadaan achir 1951	343	144	34	18	52	18.177 *)	529.900	1.000	kg.	

Keterangan.

*) Rp. 1.036.386,15.

Kursus Kader Koperasi.

Oleh Inspeksi Koperasi Sumatera Tengah telah diadakan kursus untuk kader koperasi, jang mana pengikutnja diambil dari pengurus-pengurus koperasi diberbagai Kabupaten dan pemuda-pemuda lainnja.

Kursus ini dimulai sedjak 1 Oktober 1951 jang diikuti oleh 41 orang. Hingga pada tanggal 2 Oktober 1952 telah diadakan 8 X kursus jaitu di Bukittinggi, Solok, Inderagiri, dan Kerintji. Untuk djelasnja digambarkan dibawah ini keadaan kursus tersebut.

	Inspeksi.					Kabupaten.				
Kabupaten	1	3	5	8		2	4	6	7	
	51	52	52	52	Dj.	Solok.	Swl./Sdd.	Inderagiri.	P.S.K.	Djumlah
	I	II	III	IV						
Agam	7	3	7	4	21	—	—	—	—	21
Tanah Datar	4	2	2	3	11	—	—	—	—	11
50 Kota	5	2	2	7	16	—	—	—	—	16
Pd./Pariaman	5	2	5	3	15	—	—	—	—	15
Swl./Sdd.	3	4	—	2	9	—	27	—	—	36
Pasaman	3	2	2	4	11	—	—	—	—	11
Solok	3	—	2	3	8	38	—	—	—	46
Kampar	2	3	3	1	9	—	—	—	—	9
Inderagiri	3	3	3	—	9	—	—	38	—	47
Bengkalis	—	—	—	6	6	—	—	—	—	6
Batang Hari	—	4	—	—	4	—	—	—	—	4
P.S.K.	3	3	2	1	9	—	—	—	38	47
Padang	2	2	2	2	8	—	—	—	—	8
Nias	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Djumlah	41	30	30	36	137	38	27	38	38	278
Tidak lulus	7	6	4	—	17	6	11	7	9	50
Lulus	34	24	26	36	122	36	16	29	29	228
Wanita	6	2	3	2	13	2	—	—	—	15
Angka rata ²	6.5	6.5	6.6	6	—	6.3	6	6.2	6	

Rata-rata tiap bulan dapat mengeluarkan kader 23 orang.

Dengan ini nampaklah beberapa segi dari kegiatan membangun *Ekonomi Nasional*, jang mana dasar-dasarnja haruslah dititik beratkan pada usaha ber-koperasi. Terutama bagi bangsa Indonesia jang memang masih lemah dalam lapangan modal dan organisasi ekonomi.

**

Pasal 34.

KEHUTANAN.

Luas dan pembahagian hutan.

PERCENTAGE hutan dari kepulauan-kepulauan di Indonesia adalah: Djawa 23%, Sumatera 62%, Kalimantan 80%, Sulawesi 54%, Irian 76% dan kepulauan lainnja 34% dari luasnja masing-masing daerah.

Luas hutan dalam Propinsi Sumatera Tengah jang meliputi 3 Keresidenan dulu, Riau, Sumatera Barat dan Djambi, adalah $\pm 143.580 \text{ km}^2$.

Hutan-hutan jang belum begitu banyak dikeluarkan hasilnja kita dapati:

1. Di Sumatera Barat dalam Kabupaten Pasaman (Air Bangis-Sasak-Talu), Kabupaten P.S.K., Sawah Lunto Sidjundjung dan kepulauan Mentawai. Nama-nama kaju seperti: andalas, rikir, rasak, merbau, kalek, katuko, paning-paning, banio dan surian jang dihasilkan hutan-hutan itu, tjukup dikenal oleh masjarakat.
2. Di Djambi adalah kaju bulian jang terkenal (Eusideroxylon) karena kajunja jang keras dan baik buat atap sirap.
3. Di Bengkalis/Kampar dan Riau jang banyak ialah kaju-kaju seperti: resak, punak, kulim, merawan, keruing, kelat, tjengal, medang, mentangur, kempas, meranti, geronggan, dan sebagainya.

Hingga sekarang jang banyak menghasilkan kaju ialah daerah-daerah panglong jang letaknja sebagian besar dalam Kabupaten Bengkalis dan Riau. Ini bukanlah berarti, bahwa tempat-tempat lain kurang pentingnja; daerah Mandau (Siak) dan Kabupaten Kampar masih menunggu tenaga manusia jang akan mengeluarkan kekajaan hutannja.

Hutan-hutan bakau jang banyak terdapat dipantai-pantai sebelah Timur pulau Sumatera dan kepulauan Riau, kajunja baik buat kaju api dan arang, sedangkan kulitnja sebagai bahan penjamak (djenis Rhizophora, Bruguiera dan Ceriops). Hutan-hutan Nibung terutama dalam Kabupaten Bengkalis, merupakan bahan jang penting bagi perusahaan perikanan di Bagan Siapi-api (djermai dan helong).

Exploitasi hutan.

Dilakukan oleh Djawatan Kehutanan seperti penebangan di Kandang Empat, Lubuk Sikaping, Lubuk Alung dan Djambi, dan oleh pihak partikulier dengan mendirikan panglong-panglong dan penebangan oleh rakjat. Penjelenggaraan ini dalam garis besarnya masih banjak memakai tenaga manusia, bila dibandingkan dengan di Djawa atau lain-lain tempat.

Menurut matjam penghasilannya, maka panglong itu dibagi atas:

1. Panglong balak : $\pm$ 81 buah dalam daerah hutan Bengkalis Kampar dan Riau.
2. „ kaju api/teki : 207 buah.
3. „ arang : 285 buah dengan 498 dapur arang.
4. „ kulit : 37 buah.
5. „ nibung : 19 buah.
6. „ susup : 2 buah.

Kebanyakan dari panglong-panglong ini berada didaerah Kabupaten Bengkalis dan Riau dan hampir semuanya dikuasai/didjalan-kan oleh orang Tionghoa. Hasil hutan dikeluarkan dengan mem-pergunakan djalan ongkak, rel besi atau pengangkutan dengan air.

Diantara panglong-panglong itu ada jang mempunyai mesin penggergadjian sendiri seperti di Bengkalis, Selat Pandjang dan pulau-pulau sekitarnja, P. Kundur dan Pakan Baru.

Dalam Propinsi Sumatera Tengah semuanya berdjumlah $\pm$ 21 buah, diantaranya 8 buah kepunjaan bangsa Indonesia, seperti di Djambi (3 buah), Sumatera Barat (2) dan daerah Bengkalis (3).

Di Sumatera Barat penggergadjian banjak dilakukan oleh tukang-tukang harit jang djumlahnja banjak sekali.

Daerah hutan Bengkalis/Kampar banjak menghasilkan kaju per-tukangan, baik berupa kaju balak (kasar) maupun kaju gergadjian, sedangkan daerah Riau menghasilkan berupa kaju api (untuk dapur dan mesin) dan arang.

Tiap-tiap panglong arang mempunyai 1 atau lebih dapur-dapur jang dapat menghasilkan 6-8 ton arang tiap-tiap dapur/sebulan.

Dibawah ini ditjantumkan daftar penghasilan penebangan/pro-duksi dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dalam tahun 1951.

Produksi diselenggarakan oleh pihak ketiga dan Djawatan Kehutanan dalam tahun ini.

Djenis hasil hutan	Sum. Barat	Beng-kalis Kampar	Riau		Djambi	Djum-lah semua
			Tdj. Pinang	Inde-ragiri		
1. Kaju pertu- kangan m ³	21.179	115.238	32.113	6.662	2.185	177.377
2. Kaju bakar...sm	1.204	29.689	100.567	7.355	198	139.013
3. Arang ton	—	10904	19.002	29	18.441	48.376
4. Kulit kaju ... ton	—	3.095	273	78	—	3.446
5. Sirap pt.	—	—	13.000	—	7.000	20.000
6. Bambu bt.	—	—	—	—	31.370	31.370

Pendjelasan: Dari djumlah produksi ini jang diselenggarakan oleh Djawatan Kehutanan ialah:

2.902 m³ kaju pertukangan dan 161 sm kaju bakar terutama di Sumatera Barat dan Djambi.

Pemakaian dan perdagangan hasil hutan.

Terutama di Sumatera Barat dan Djambi, hasil-hasil hutan di-tudjukan untuk pemakaian dan perdagangan dalam negeri sebagai bangun-bangunan untuk gedung-gedung, asrama, sekolah, rumah, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Perusahaan tukang kaju di Kamang jang menghasilkan bermacam-macam perabot rumah dan membandjiri pasar Bukittinggi tjukup dikenal orang.

Selain dari kaju pertukangan, penting pula artinja pemakaian kaju api, terutama bagi penduduk kota-kota. Rata-rata tiap keluarga dikota membutuhkan 1—2 sm. kaju api sebulan untuk dapurnja.

Berbeda dengan keadaan didaerah Bengkalis dan Riau, disini pemungutan hasil hutan sampai pada perdagangannya berada ditangan bangsa Indonesia.

Pemilik-pemilik panglong didaerah Bengkalis dan Riau adalah orang Tionghoa; demikian pula merekalah jang memegang peranan utama dalam soal pengangkutan dan perdagangan hasil hutan.

Kebanyakan dari mereka mendjadi anggauta dari **Charcoal and Firewood Dealers Association (C.F.D.A.)** atau **Logs and Firewood Traders Association (L.F.T.A.)** jaitu suatu badan jang bertindak keluar untuk kepentingan para pemilik panglong/saudagar.

Dalam kedua daerah ini hasil-hasil hutan dapat dikatakan diarahkan kepada perdagangan di Singapura.

Jang banjak diekspor dari daerah Bengkalis ialah kaju per-
tukanan kasar dan gergadjian, kaju api, nibung, sedangkan bag-
Riau adalah hanja meliputi keperluan-keperluan perusahaan-
tambang bauxiet Nibem, tambang minjak Caltex, pembangun-
lokal dan pengiriman kaju ke Sumatera Utara (Tandjung Bala-
Asahan).

Dibawah ini adalah ekspor hasil hutan dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah sampai achir September 1952.

Ekspor hasil hutan keluar Negeri sampai achir September 1952.

Djenis hutan hutan	Ukur- an	Beng- kalis Kampar	Riau		Djambi	Sum. Barat
			Tdj. Pinang	Indera- giri		
1. Kaju balak	m ³	116.433	—	259,38	—	—
2. Kaju jang digergadji	m ³	10.836	947,82	—	—	—
3. Kaju teki	m ³	5.730	4.923,90	326,51	—	—
4. Kaju api	sm	29.218	49.708	435	—	—
5. Arang	ton	8.865	10.822,50	—	—	—
6. Kepala arang	ton	919	—	—	—	—
7. Rotan belah	ton	5,2	—	—	—	—
8. Nibung	bt.	16.414	—	3.160	—	—
9. Bengkawan	bt.	—	—	480.000	—	—
10. Daun nipah	kg.	—	—	7.203,250	—	—

Penjelenggaraan Pekerdjaan.

Penjelenggaraan pekerdjaan dalam lapangan kehutanan dilaku-
kan oleh para pegawai teknik seperti mandor, mantri, kepala
bagian dan kepada daerah hutan.

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari dipergunakan alat-alat
pengangkutan diair dan didarat. Disamping sampan-sampan,
daerah Bengkalis/Kampar dan Riau masing-masing mempunyai 3
kapal bermotor dari 40,20 dan 10 P.K. dan ditambah lagi motor-
motor tempel (aanhangmotor) bagi Riau; alat-alat ini didatangkan
dari Djakarta pada pertengahan tahun 1952.

Daerah Sumatera Barat dan Djambi mempergunakan truck, pick-
up dan jeep untuk melantjarkan pekerdjaannya sehari-hari.

Patut pula diterangkan tentang adanja bagian *Planologi*, salah
satu bagian penting dari Djawatan Kehutanan jang lapangan
pekerdjaannya meliputi soal eksplorasi, pengatur hutan dan
pengukuran/perpetaan dan sebagainya jang kantor filiaalnja berada
di Bukittinggi.

Faedah hutan lainnja.

Disamping kaju dan hasil ikutan hutan lainnja (bobijproducten).
penting pula manfaatnja hutan, karena hasilnja jang tak langsung

tampak jang mana nilainja tak dapat kita ukur dengan uang. Jang dimaksud ialah pengaruh adanja hutan terhadap pertanian dan perekonomian kita. Diantara lain dapat disebutkan disini:

1. pengaruh *hydrologis* dan *orologis*.
Hutan-hutan dapat mengatur pengairan buat pertanian; dimusim penghujan ia menahan air dan sebaliknya dimusim kemarau dapat melepaskannja. Debit air dapat mendjadi lebih baik dan teratur olehnja; bahaya bandjir dapat dihindarkan/diperketjil.
Demikian djuga hutan-hutan memperketjil bahaya erosi.
2. pengaruh *pada iklim (klimaatologis)* dan kemampuan membersihkan hawa (*sanitaire working*).
3. pengaruh *psychologis* pada manusia. Adanja tempat-tempat istirahat dipegunungan, dapat dihubungkan dengan pengaruh ini, disamping keperluannja untuk kepentingan kesehatan.
4. mempertinggi *keindahan alam* dan dapat menarik para pelan-tjong dalam dan luar negeri (*tourisme*).
5. adanja swaka margasatwa (*wildreservaten*) dan tjarag-tjarag alam (*natuurmonumenten*) untuk keperluan penjelidikan/pengetahuan atau disebabkan bersedjarah/keasliannja seperti tjarag-tjarag alam *Batang Anai, Rimbo, Panti, Batang Palupuh, Puntjak G. Indrapura, Gua Ulu Tiangko* dan sebagainya.

Hutan-hutan sedemikian terdapat didaerah pergunungan jang lazim disebut *hutan pelindung* dan karena fungsi dan faedahnja perlu dipertahankan, diatur dan dipelihara.

Pembukaan tanah-tanah hutan untuk perladangan atau keperluan lainnja didaerah-daerah pergunungan dan ditambah dengan tjara-tjara mengerdjakan tanah jang salah, membawa kita kearah kemunduran, ialah merusak perekonomian kita sendiri.

Oleh Inspeksi Kehutanan sudah dimulai kembali penanaman hutan jang rusak dengan ac. desurres, seperti complex Merapi seluas 216,2 ha, begitu djuga di complex Singgalang seluas 50 ha.

Pasal 35.

KARET RAKJAT.

DAERAH Sumatera Tengah salah satu daerah penghasil utama untuk karet, lebih-lebih daerah bekas Keresidenan Riau lama dan Djambi. Djika kita berkendara melalui daerah tersebut, maka dipinggir djalan kelihatan pohon getah berderet-deret hingga beratus-ratus kilometer pandjangnja.

Menurut registrasi pada waktu zaman Hindia Belanda, luas tanah jang ditumbuhi pohon getah pada daerah bekas Keresidenan Riau 181.460 ha dengan standard produksi 79.599 ton, pada daerah Djambi 188.578 ha dengan standard produksi 75.652 ton dan daerah Sumatera Barat 41.017 ha dengan standard produksi 16.932 ton.

Pada zaman pendudukan Djepang, banjak djuga kebun-kebun getah ini jang rusak, tapi tjatatan jang pasti masih belum dapat diketahui.

Mengenai djumlah batang pohon getah, banjak bertambah, sekalipun luasnja tetap seperti biasa. Ini disebabkan karena banjak tumbuh anak-anak pohon jang baru didekat batang-batang jang sudah tua.

Djumlah export karet rakjat didaerah Sumatera Tengah pada tahun-tahun achir ini (pada tahun 1952), ternyata lebih banjak dibandingkan dengan export pada zaman Hindia Belanda.

Dalam tjatatan dizaman Hindia Belanda achir tahun 1941 export berdjumlah 90.197 ton, sedang dalam $\frac{1}{2}$ tahun dari tahun 1952 djumlah export adalah sebanjak 71.297.197 Kg.

Begitu pula mengenai djenis karet jang diexport itu, mendapat perubahan, seperti pada tahun 1941 djenis Blanket jang dikirim keluar negeri berdjumlah 14.556 ton dan pada setengah tahun dalam tahun 1952 berdjumlah 24.419.008 Kg, dan berarti bahwa banjak memakai tenaga pekerdja dalam negeri dan menambah pula akan djumlah devizen negara.

Usaha untuk memperbaiki mutu karet rakjat ini didjalankan dengan berangsur-angsur.

Oleh Djawatan Karet Rakjat, diberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk tentang tjara menjadap, tjara pembikinan rumah asap, dan usaha pendirian remilling.

Dewasa ini sudah kelihatan berdiri beberapa buah rumah asap dan remilling, baik atas usaha perseorangan maupun atas inisiatif perseorangan, diberbagai daerah di Djambi, Riau dan Sumatera Barat.

Dan untuk selanjutnja diturunkan dibawah ini beberapa alatstek.

LUAS TANAMAN, STANDARD-PRODUKSI DAN EXPORT KARET RAKJAT.

Daerah	Ha 1942	Std. produksi (ton)	Export 1941 (ton)
R i a u (Kep)	68.604)		
Bengkalis;Kampar	61.371)	79.599	34.867
Inderagiri	51.485)	181.460	
Sumatera Barat	41.017	16.932	10.423
Djambi	188.578	75.652	44.907
Djumlah	411.055	172.183	90.197

EXPORT K.R. MENURUT DJENISNJA DALAM TAHUN 1941
(ton, equivalent droog).

Daerah	Blanket	Sheet	Slabs	Scraps	Djumlah
Djambi	9.203	36.123	—	—	45.326
Riau Inderagiri	963	10.915	167	—	12.045
Riau Vrijgebied	—	8.888	—	—	8.888
Sumatera Barat	4.390	3.644	487	—	8.521
D j u m l a h	14.556	59.570	654	—	74.780
Prosentase	19,5%	79,6%	0,9%	—	100%

EXPORT K.R. SELAMA TENGAHAN PERTAMA
TAHUN 1952 (Kg.).

Daerah	Blanket	SS	USS	Slabs	Scraps	Djumlah
Sum. Barat	265.108	432.720	330.000	1.544.263	192.229	2.764.320
Kamp.Beng.	—	1.151.802	2.042.588	—	2.652	3.197.042
Inderagiri	1.862.400	976.000	7.282.190	1.490.462	1.100.000	12.711.052
Djambi	22.291.500	16.706.310	6.188.493	7.116.000	304.480	52.606.783
Djumlah	24.419.008	19.266.832	15.843.271	10.150.725	1.599.361	71.279.197
Prosentase	34,4%	27,1%	22,3%	14,3%	2,3%	100%

Pasal 36.

PERKEMBANGAN PERINDUSTRIAN

I. Industri barang makanan.

Gilingan padi: Perusahaan-perusahaan ini dengan tenaga mesin mulai berkembang didaerah-daerah padi misalnja Sungai Penuh, Painan, Solok, Pajakumbuh, Batusangkar. Dari surat-surat izin pendirian jang dikeluarkan berdasarkan H.O. oleh Bupati dan Wali Kota dapat ditjatat tambahan djumlah-djumlah tahun 1951 dengan 14 buah perusahaan diantaranya 10 dalam daerah Sumatera Barat, 3 di Djambi dan 1 di Riau (Indragiri). Disamping itu rentjana pendirian di Padang dari satu penggilingan padi propinsi jang berkapasitet 6 ton beras sehari á 7 djam sedang dalam penjelenggaraan. Dengan tambahan izin djumlah penggilingan jang 14 diatas, maka menurut pendaftaran, djumlah gilingan padi semua pada achir tahun 1952 mendjadi 30 buah dengan kapasitet 1091 ton/setahun, disamping kintjir-kintjir padi jang didjalankan penumbukan-nja dengan tenaga air jang sangat banjak di Sumatera Barat ini dan belum dapat didaftarkan.

Pabrik minjak kelapa: Pabrik kepunjaan N.V. Lam Kiauw di Padang berdjalan dengan pesat, hasil bulanan 214 ton, disamping ini Lam Kiauw sedang berusaha mendirikan pabrik kaleng.

Bangsa Indonesia, istimewa didaerah Pariaman, jang dapat disebutkan daerah kopra, telah mulai mempunyai minat kedjurusan mendirikan pabrik minjak kelapa. Misalnja saudara-saudara Razali Abbas, St. A. Aziz telah merentjanakan pendirian pabrik-pabrik masing-masing dengan kapasitet 5 ton/8 djam dan 1 ton/8 djam. Mesin-mesin kepunjaan Razali Abbas telah sampai di Padang, merk Hander.

Perusahaan sagu: Umumnja ini didapati didaerah-daerah Bengkalis, jang hasilnja diexport keluar negeri.

II. Industri barang-barang minuman.

Didaerah Talu, Kabupaten Pasaman telah didirikan oleh rakjat dengan modal sendiri pabrik limonade dengan kapasitet 3000 botol á 300 cc sebulan.

Pabrik Es Djambu Air Bukittinggi, jang berada dibawah pengawasan Djawatan Perindustrian djuga berdjalan dengan baik.

Didaerah Riau didapati pemasukan limonade dan ijs dari Singapura, jang mengakibatkan seratnja perkembangan perusahaan ijs dan limonade dalam negeri.

III. Industrie hasil-hasil tembakau.

Perusahaan-perusahaan rokok dalam tahun 1951 berdjumlah 15 buah di Sumatera Barat. Perusahaan ini adalah landjutan dari perusahaan rokok sedjak zaman Djepang dan permulaan revolusi seperti diketahui, perusahaan ini diwaktu mulai tumbuhnja sangat madju, disebabkan rokok buatan Djawa kurang sekali masuk ke-Daerah Sumatera. Sekarang perusahaan-perusahaan rokok ini boleh dikatakan sama sekali tidak djalan lagi, sebab mereka tidak sanggup menandingi rokok-rokok jang didatangkan dari Djawa.

IV. Industri textiel.

1. Di Sumatera Tengah jang mempunyai perusahaan-perusahaan pertenunan dapat dikatakan hanja daerah Sumatera Barat dengan tempat-tempatnja di Padang dan sekitarnja, jaitu Pertenunan dari N.V. H.A. Latief, Pertenunan-pertenunan di Silungkang, Pakan Kamis di Kabupaten Agam dan Kubang di Kabupaten Limapuluh Kota.

Didaerah-daerah Djambi dan Riau hanja diperdapat disana-sini beberapa gedogans, alat-alat untuk dipergunakan wanita-wanita membuat kain-kain tjungkil sebagai pekerdjaan sambilan, umpamanja dikampung-kampung diwilajah Siak dan Rengat di Riau, dan diwilajah Kuala Tungkal di Djambi.

Umumnja dapat dinjatakan bahwa pertenunan ini seluruhnja berada ditangan bangsa Indonesia, istimewa sesudah pertenunan Padang Asli, kepunjaan Mij t.v.d.z. van Houten Steffen & Co. dibeli oleh N.V. Persdi. Perusahaan-perusahaan pertenunan ini umumnja belum dapat berdjalan dengan lantjar, karena:

1. Tenaga pembeli telah sangat berkurang.
 2. Tidak dapat menjaingi harga hasil pertenunan dari Djawa jang membandjir masuk kedaerah Sumatera Barat. .
 3. Upah buruh jang tinggi, jang akibatnja meninggikan harga pokok.
 4. Kesulitan mendapatkan bahan-bahan, misalnja benang dan alat-alat tenun, istimewa onderdeelenja.
2. Pembatikan boleh dikatakan sepi, hanja didapati batik tjap setjara berketjil-ketjil.
 3. Anjaman tikar rotan, purin, mansiang, hanja merupakan keradjinan rumah tangga setjara berketjil-ketjil.

Di Pariaman ada pembikinan tikar purin jang telah merupakan perusahaan, dengan nama Serikat Tenun Familie, dibawah pimpinan Hadji Sidi Iljas Naaman, jang telah mendapat pindjaman C.I.K. sedjumlah Rp. 8.000,—. Dalam mendjual hasil produk-sinja, perusahaan ini menemui kesulitan, sehingga banjak stock jang tertumpuk. Hal ini adalah disebabkan sekarang ini dipasar-pasar banjak terdapat tikar-tikar linoleum jang sangat laris lakunja dengan harga Rp. 27.— per yard.

4. Pertenunan *Kwatika* di Pakan Kemis, Bukittinggi oleh Tjabang Perindustrian Sumatera Barat, dialirkan pada pembikinan tikar purin, jang diterima sangat gembira oleh penduduk disekitarnja, karena didaerah tersebut bahan-bahan untuk itu, jaitu masiang banjak didapati.

V. Industrie pakaian dan barang textiel jang telah djadi.

Di Talawi, Kabupaten Sawahlunto/Sidjundjung ada didapat satu perusahaan pajung setjara koperatief, jang anggota-anggotanja terdiri dari bekas pedjuang, penghasilan sehari 30 buah pajung.

Industri pakaian di IV Angkat jang merupakan huisindustrie, berangsur-angsur menjatukan diri kedjurusan koperasi. Hari dari barang-barang konfectie ini kelihatan hampir diseluruh pasar-pasar dalam daerah Sumatera Tengah, bahkan sampai ke daerah Sumatera Selatan/Utara.

Toko Basrida dan beberapa toko-toko middenstand lain di Bukittinggi adalah tempat-tempat penampungan dari hasil sulam menjulam dari kampung-kampung disekeliling Bukittinggi.

VI. Industrie kaju, gabus, ketjuali perkakas rumah tangga dan bangun-bangunan.

Penggergadjian. umumnja perusahaan ini mulai berkembang dengan memakai mesin, misalnja didaerah Pasaman telah berdiri „Desa Baru” memakai cirkelzaag (gergadji bundar) kapasiteit 5 M³ sehari, Di Muara Sakai.

Dikota Padang sendiri atas iniatief N.V. Allinco, dalam diusahakan pula mendirikan perusahaan ini dengan kapasitas 30 M³/sehari. Didaerah Djambi sudah ada 5 buah perusahaan penggergadjian kaju, satu diantaranya kepunjaan bekas anggota Angkatan Perang, dinamai A.P.I. Masing-masing perusahaan ini telah menghasilkan, 2 M³ sehari. Disamping balok-balok dan papan-papan, A.P.I. djuga telah menghasilkan atap sirap sebanjak 250.000 buah sebulan, jang untuk bahannja dipergunakan kaju bulian, jang banjak sekali terdapat di Muara Bulian dan Uluan Djambi.

Di Riau, hilir Sungei Siak jang tadinja puluhan panglong sematamata didalam tangan bangsa Tionghoa, sekarang sudah mulai di-

sela-sela oleh perusahaan-perusahaan bangsa Indonesia seumpama di Sungei Pak Ning oleh Tjek Ulung yang telah membikin penggergajian dengan mesin dan seharinja menghasilkan pukul rata 10 M³ kaju. Di Pakanbaru sendiri sedang dalam pelaksanaan djuga satu machinal houtzagerij dari bangsa Indonesia firma „Tampan” (Ir. Usman) dengan memakai tenaga diesel lk. 70 Pk.

VII. Industrie perkakas rumah tangga/bangunan.

Kalau dalam perkembangan taraf pertama disamping perusahaan-perusahaan bangsa asing, hanya ada perusahaan-perusahaan yang ketjil-ketjil sadja dari bangsa kita, hal ini pada tahun 1952 telah berangsur baik. Berangsur-angsur muntjul perusahaan-perusahaan yang mempergunakan alat-alat mesin. Perkembangan-perkembangan tersebut mendjadi subur, dengan adanja pesanan-pesanan dari P.P.K. untuk keperluan sekolah-sekolah yang pembangunannja djuga boleh dikatakan pesat. Hanya sedikit disajangkan setelah pesanan-pesanan tersebut berdjalan beberapa waktu, timbullah kesulitan-kesulitan bagi perusahaan-perusahaan, yang bersangkutan dengan keuangan (pokok).

Perusahaan ini antaranja terdapat di Kamang, Kab. Agam. Usaha Pembangunan yang dikendalikan oleh bekas pedjuang di Pajakumbuh, dan Firma Harapan djuga dipimpin bekas pedjuang di Padang.

VIII. Industrie kertas dan hasil-hasil dari kertas.

Cement fabriek Indarung djuga melantjarkan papierzaken industrie tidak sadja buat keperluan cementnja, tetapi djuga buat bermacam-macam verpakkingsmateriaal dengan penghasilan 2.136.785 karung dalam setahun.

Dalam waktu belakangan ini perusahaan tersebut mengeluh atas termasuknja bahan kertas ini kedalam daftar golongan E I dari peraturan devizen, sedangkan papierzaken dari luar negeri tetap seperti biasa dan termasuk dalam daftar golongan A.

IX. Industrie pertjetakan, pendjilidan, penerbitan dan lain-lain.

1. Pertjetakan Nusantara, adalah sebuah N.V. Nasional yang bangun dengan tenaga sendiri. Pertjetakan yang terbesar di Sumatera Tengah dewasa ini yang mempunyai mesin-mesin yang lengkap.
2. Pertjetakan Sridharma Padang telah mempunyai bagian klise, yang dipimpin oleh seorang tenaga ahli, yang telah mendapat pendidikan khusus di Amsterdam, satu-satunja Pertjetakan Nasional di Sumatera Barat yang telah ada bagian klisenja.

3. Pertjetakan Asia di Padang dengan 5 mesin tjetak.
4. Pertjetakan Sumatera Bode Padang dengan 1 snelpers.
5. Pertjetakan Lie Bukittinggi dengan 2 degelpers.
6. Merapi Bukittinggi dengan 2 degel dan 1 snelpers.
7. Pertjetakan Gazaira jang dalam menghadapi perluasan perusahaannya nampak betul bergiat; tempat-tempat mesin jang bakal datang telah disiapkan.
8. Pertjetakan Agam salah satu pertjetakan jang banjak berdjasa dalam masa revolusi.
9. Pertjetakan Limbago Pajakumbuh.
10. Pertjetakan Tandikat.
11. Pertjetakan Negara, jang berada dibawah pengawasan kantor Gubernur.

X. Industrie kulit dan barang-barang kulit.

Sebagai djuga halnja dengan keadaan selama ini, berhubung dengan kekurangan bahan-bahan mentah, hampir semua perusahaan penjamakan kulit telah menghentikan usahanya.

Jang masih dapat bertahan terus adalah perusahaan kulit „Lembang Djaja” dan Abdullah, Sabarlilah didekat Padang dengan produksi 15200 kg/setahun dan sekarang berminat kedjurusan mekanisasi dari perusahaannya dan di Djambi Ali Albad dengan produksi 12500 kg. setahun.

XI. Industrie barang-barang dari karet.

1. Remilling-remilling jang terletak didaerah Sumatera Barat umumnya berdjalan seperti biasa, dan jang didaerah Djambi, jaitu remilling Ngie Hua dan Guan Djoe Liong dalam bulan September 1952 terpaksa sebentar tidak djalan karena kekurangan slab. Pada achir bulan Oktober 1952 telah djalan kembali.
2. Tentang pendirian remilling-remilling Negara di Siak dan Rengat pelaksanaannya sampai achir 1952 adalah sebagai berikut:

Remilling Rengat: Baru merupakan persiapan. Bahan-bahan masih dalam perdjalan, jang siap baru pekerdjaan mendaf-tarkan tanah-tanah perumahan dan pendirian beberapa hulploodsen.

3. Selandjutnja tentang remilling-remilling jang berada di Sumatera Barat, jaitu 6 buah banjaknja, umumnya bekerdja meliwati batas lisensi, baik mengenai penghasilan, maupun pemakaian mesin-mesin (mangel). Hal ini sebahagian besar adalah disebankan:

1. Keadaan slabs di Sumatera Barat masih melebihi kebutuhan 6 remilling, karena rakjat masih lebih suka membikin slabs dari pada membikin sheet.
2. Kalau mereka diperintahkan bekerdja menurut lisensi jang diperolehnja, maka mereka mengemukakan akan terpaksa mengurangi/memperhentikan buruhnja, jang mana tidak diingini waktu sekarang ini. Sebabnja remilling-remilling ini diwaktu harga karet turun masih dapat djuga berdjalan terus, adalah karena slabs di Sumatera Barat tetap dihasilkan oleh rakjat. Sebab pekerdjaan ini adalah pekerdjaan sam-bilan, disamping pekerdjaan sehari-hari dipertaniannja (sawah atau ladang).
Oleh sebab itu karet buat Sumatera Barat kurang terpengaruh oleh akibat naik turun harga, berbeda dengan lain-lain daerah getah, seperti Djambi dan Riau.
4. Rubberwarenfabriek Gho Goan The dalam tahun 1952 berhenti menghasilkan, karena kesusahan dengan buruh dan pemasukan chemicalien.
5. Latex verwerkingsfabriek Persdi jang sedjak tahun 1951 telah mulai dengan experimentnja, berhubungan dengan kekurangan tenaga, tempat dan keuangan, dihentikan buat sementara oleh N.V. tsb.

XII. Industrie Kimia dan hasil-hasilnja.

Tidak banyak jang dapat diterangkan, selain dari beberapa toko-toko obat sedang mengusahakan pembikinan obat-obat gosok a la tjap matjan.

XIII. Industrie hasil-hasil minjak tanah dan arang.

Djuga tidak banyak jang dapat diuraikan tentang ini Carbonblack fabriek jang di Djambi, tetap belum bisa didjalankan berhubungan urusan tanahnja masih belum dapat pernjelesaiannja.

XIV. Industrie barang-barang mineral bukan logam, ketjual hasil minjak tanah dan arang.

1. *Genteng/bata*, berhubungan Pemerintah/Djawatan-djawatan banyak mendirikan rumah/gedung, maka perusahaan ini berkembang dengan baik dan pesat djalannja, misalnja:
 - a. Perusahaan genteng Tanah Putih jang tadinja dapat menjapai produksi 100.000 buah genteng sebulan, dengan memakai stempel-pers sederhana sekarang telah dapat menghasilkan lebih kurang 125.000 buah genteng sebulan.
Untuk memperoleh kemadjuan jang lebih pesat, perusahaan ini memerlukan strengpas, hidraulis-stempelpers dan meng-

molen; buruhnja sekarang berdjumlah Ik. 150 orang berasal dari Djawa Barat/Timur; dapurnja masih merupakan veldoven.

- b. Perusahaan genteng Sungei Djernih, atas usaha pemerintah Kab. Agam sudah djalan dengan baik, dan pembikinan gentengnja telah menjerupai genteng Djawa, produksi sebulan 10.000 buah.
 - c. Di Solok atas initiatief Pemerintah Kabupaten telah didirikan pula sebuah perusahaan genteng, memakai peldoven dengan produksi 10.000 buah sebulan.
 - d. Di Galo Gandang, dimana terdapat tanah jang baik untuk perusahaan genteng dan keramik, sekarang ini telah disiap-kan pembikinan tungkunja.
2. *Pembakaran kapur.* Perusahaan ini terdapat di Padang Pandjang dan sekitarnja. Dahulu bekerdja dalam 3 gabungan, jaitu Pekana, Gapeka dan P.P.I. Berhubung dengan anggota-anggota tidak dapat menjetudjui tindakan-tindakan pengurus, maka gabungan-gabungan jang tiga itu dipetjah-petjah dan didjadi-kan disamping gabungan-gabungan itu gabungan lain, jaitu P.K.N. jang anggotanja terdiri dari:
- Pero dengan 1 tungku, P.M.T. dengan 1 tungku, Kopepeka dengan 2 tungku, Moehammadijah dengan 3 tungku dan Ibnu Hadjar dengan 2 tungku, dengan kapasitas 1050 M³ kapur sebulan. Berhubung tjara membakar sekarang ini masih setjara lama, jang menghendaki banjak tenaga manusia, telah diandjurkan mengusahakan continue-oven. Didaerah Pajakumbuh perusahaan kapur ini mulai bergerak kembali. Dahulu terkaturkatung karena kekurangan batu bara. Sekarang dengan keadaan batu bara jang agak baik, pengangkutan dengan kereta api pula jang agak kurang lantjar.
3. *Keramik.* Dikampung Dalai Talang dekat Pajakumbuh terdapat suatu perusahaan keramik dengan oven jang baik dan telah mempunyai dragischijf. Beberapa waktu jang lalu perusahaan ini terhenti karena kekurangan keahlian dan modal. Sekarang sedang diusahakan untuk membangunkannja kembali dengan perbantuan tenaga ahli dari Djawatan Perindustrian. Di daerah Bondjol, Kabupaten Pasaman, berhubung disana terdapat pula tanah jang baik untuk keramik, sedang diselidiki pula kemungkinan-kemungkinan untuk mendirikan satu perusahaan buat itu.
4. *Batu tulis:* Pabrik batutulis di Alahan Pandjang diusahakan oleh saudara Abas berdjalan terus, dan telah mempunyai 2 diesel agregaat, 1 vandikte bank, 1 cirkelzaag dan 2 schroefpers. Umumnja pabrik tersebut melakukan pekerdjaan pers dari tepung batu lai. Telah dimaksudkan untuk mengirimkan salah

seorang tenaga ke Djakarta untuk dididik kedjurusan memperbaiki mutu batu tulis, sehingga mentjapai tingkat jang sebaik-baiknya.

5. Dikota Padang oleh toko Irama (Bahsiar Rahman) sedang direntjanakan pendirian pabrik kapur tulis dan persetudjuan permintaan buat itu sudah diberikan oleh Djawatan Perindustrian.

XV. Industrie Logam (Dasar). Belum ada.

XVI. Industrie hasil-hasil dari logam, ketjual mesin, dan alat pengangkutan.

Sungei Puar, dari dahulu telah mempunyai sedjarah dalam menghasilkan barang alat-alat untuk pertanian, dan djika dibandingkan dengan Djawa, adalah merupakan sebuah kampung seperti Tjiwidey dan ditambah lagi dengan adanya pengetjoran barang-barang dari kuningan. Sampai sekarang masih dalam menunggu penglunasan, berkenaan dengan permintaan perkreditannya „Koperasi Pura” jang telah dimajukan ke Jajasan Kredit Pusat.

Hasil perusahaan barang-barang dari perak di Kota Gedang dekat Bukittinggi mundur sekali, berhubung barang-barang ini dilarang pengirimannya keluar negeri.

XVII. Industrie-industrie mesin, ketjual mesin listrik, dan alat-alat pengangkutan.

Belum ada di Sumatera Tengah.

XVIII. Industrie listrik/alat-alat keperluan.

Djuga belum ada di Sumatera Tengah.

XIX. Industrie alat-alat pengangkutan.

1. Perusahaan Dok/Perkapalan Tanah Timbun dari Sumatera Banking Trading Corporation (S.B.T.C.) jang pendiriannya pada akhir tahun 1952 di Teluk Bujur Padang, telah nampak perkembangannya didjurusan pembikinan motor-motor boot ketjil jang telah dan akan diserahkan atas pesanan instansi-instansi kehutanan, kesehatan, kepolisian dan lain-lain djawatan, djuga kepada perusahaan-perusahaan partikelir. Penghabisan tahun 1952 adalah sebanyak 13 buah jang telah siap, dan masih beberapa buah dalam galangan.

Sebuah sleepdok untuk kapal-kapal sebesar 150 ton sedang dalam pehjelenggaraan.

Selain pembikinan kapal-kapal motor ketjil ini, perusahaan itu djuga melakukan pemborongan-pemborongan atas melaksanakan penempatan mesin-mesin dalam perusahaan-perusahaan.

Perbantuan kredit telah diperdapatnja dari B.I.N. di Djakarta.

2. Di Muaro Bungo Djambi diperdapat satu perusahaan pembikinan tongkang dengan kapasitas 3 buah sebulan.

XX. Industri rumah tangga lain.

Selain dari jang disebutkan diatas banjak lagi terdapat industri rumah tangga diberbagai-bagai daerah seperti perusahaan terompah kaju di Parit Putus Bukittinggi, anjaman-anjaman, tikar-tikar ketjil dan lain-lain keperluan rumah tangga jang terdapat dimana-mana.

Demikianlah pandangan sepintas tentangan Perindustrian di Sumatera Tengah ini, jang masih berada pada permulaan perkembangannja. Walaupun begitu, dari kemadjuan jang didapat dilapangan ini dalam masa dua tiga tahun ini, tampak harapan baik. Apalagi alamnja mengandung potensi ekonomi jang besar.

Pasal 37.

PERIKANAN DARAT/LAUT.

A. Perikanan Darat.

SEBELUM tahun 1942, dizaman Hindia Belanda, pemeliharaan ikan diair tawar ditebat-tebat diurus oleh Djawatan Pertanian Rakjat atau jang disebut Onderafdeling Binnenvisserij van de Landbouw Voorlichtingdienst.

Untuk usaha itu diperbantukan pada Landbouw Voorlichtingsdienst Sumatera Barat seorang Adjunct vissery-consulent jang berkedudukan di Bukittinggi. Dihalaman Kantor Pertanian tersebut dibuat beberapa buah tebat peternakan ikan dan disamping itu mendatangkan pula berdjenis-djenis ikan jang mudah dikembangkan. Pada tebat-tebat peternakan itu, dikembangkan ikan Tawes (*Puntius Javanticus*), Sepat Siam (*Trichogaster Pectoralis*) dan ikan kepala timah (*Panchas-panchas*), jang disebarkan pada rakjat

Disamping itu, diusahakan pula untuk mengembangkan ikan mas/rajau jang oleh rakjat telah lama dipelihara, tapi kurang dapat kemajuan. Berkat pimpinan dari ahli perikanan tersebut, maka pemeliharaan ikan mas dapat djuga diperluas.

Pada waktu pendudukan Djepang, ahli perikanan tersebut pindah ke Djawa, hingga pemeliharaan ikan diair tawar jang telah mulai meningkat madju ditinggalkan.

Berhubung dengan kehilangan pimpinan tsb., maka pemeliharaan ikan djadi terlantar. Para pemelihara ikan tidak tahu lagi dari mana mereka akan mendapat benih ikan. Rakjat jang tadinja dapat dengan mudah membeli ikan segar dipasar, berangsur-angsur kehilangan ikan jang mereka gemari.

Untuk menutup keperluan tsb., tentara pendudukan Djepang mendatangkan ikan Mudjahir (*Tilapia Mossambica*) dari Djawa. Oleh karena djenis ikan itu belum dikenal oleh penduduk, lagi pula nama dari ikan jang diutjapkan Djepang itu tidak djelas, maka ikan itu oleh penduduk dinamakan „Ikan Djepang”.

Ikan mudjahir jang mudah menyesuaikan diri diperairan Minangkabau segera berkembang biak dalam waktu jang singkat. Dan dimana-mana orang memelihara ikan Mudjahir.

Sampai achir pendudukan Djepang, ikan Mudjahir mendjadi buah bibir rakjat, meskipun disana-sini ada pula dirasa kurang kepuasan dengan didatangkannya ikan mudjahir itu.

Pada saat kemerdekaan, semula urusan perikanan darat ini dilaksanakan oleh Djawatan Pertanian Rakjat yang kemudian pada Djanuari 1952 lalu diurus oleh Djawatan Perikanan Darat yang berkedudukan di Bukittinggi.

Keinginan dari penduduk untuk pemeliharaan ikan ditebat-tebat, dirawa-rawa, dan dikolam-kolam mulai kelihatan, dan oleh Pemerintah diusahakan pula untuk memperluas tempat-tempat peternakan ikan itu.

Dengan telah adanya kesempatan untuk mendapat benih ikan sebanyak-banyaknya, terbukti bahwa madjunta pemeliharaan ikan terus berdjalan dengan pesat.

Berpuluh quintal ikan sekarang membandjiri pasar diwaktu hari pasar di Pajakumbuh, Bukittinggi, Batu Sangkar dan dilain kota.

Adapun tempat-tempat peternakan ikan itu ialah:

1. *Peternakan ikan Padang Magek (Batu Sangkar).*

Ietak: Pada djurusan djalan ke Umbilin, 7 kilo meter dari Batu Sangkar, 450 m. tingginya dari permukaan laut.

Keadaan: Luas tanah semua 0,6 ha, dengan hanya 0,44 yang dibuat tebat-tebat sedangkan lainnya merupakan kebun djeruk dan kelapa.

Karena pemeliharaan-pemeliharaan dan perawatan yang seksama, sekarang hasil dari perikanan ini antara lain 251.800 ekor ikan yang terdiri 148.800 ekor ikan Tawes dan 103.000 ekor ikan Mudjahir (benih-benih). Dari djumlah yang sekian ini telah habis terdjual dan beredar di Kabupaten-kabupaten lainnya.

Pun telah didatangkan pula djenis-djenis ikan yang baru dari Djakarta, tetapi sampai sekarang masih belum bisa diternakkan karena masih muda: 100 ekor ikan Sinjonja, 100 ekor ikan Tambakan, 300 ekor ikan Mas Panten.

Banyak pula tempat ini dikundjungi, baik oleh pengusaha ikan, maupun dari masyarakat umum, guna sekedar mentjontoh keadaan-keadaan ditempat ini, yang mana para pengundjung ini datang dari lain-lain Kabupaten di Sumatera Tengah.

2. *Peternakan di Kabupaten Pasaman.*

Disini ada 2 tempat peternakan yang letaknya disebelah bekas Kantor Bupati, dan djalan raya djurusan Bukittinggi, yang djaraknya 1½ kilometer dari Lubuk Sikaping.

Masing-masing seluas 0.75 ha.

3. *Peternakan di Kabupaten L. Kota.*

Peternakan ini di sebelah kota, Pajakumbuh, di Padang Tinggi. Luas $\pm$ 0.75 ha.

Peternakan di kedua kabupaten ini baru sadja dibuka, karena baru didapat tanah. Karena itu peternakan-peternakan tersebut belum dapat menghasilkan bibit ikan.

Keadaan ikan-ikan pada peternakan Djawatan adalah sebagai tertjantung pada daftar-daftar jang berikut.

Penjebaran.

Benih ikan. Untuk memperbesar produksi ikan di Sumatera Tengah ini jang begitu banyak mempunyai daerah perairan, jang mungkin dapat menghasilkan ikan, diusahakanlah penjebaran-penjebaran benih-benih ikan itu pada perairan-perairan tersebut, dimana penduduk banyak melakukan penangkapan-penangkapan ikan.

Djumlah penebaran tahun 1951, adalah sebagai berikut:

Djenis ikan	Banjaknja (ekor)	Ukuran cm.
Emas	834.000	1 — 8
Tawes	775.000	1 — 5
Nilem	60.000	3 — 5
Mudjahir	100.000	3 — 5
Gurame	5.000	3 — 5
Djumlah anak ikan	1.774.000	1 — 8

Djumlah penebaran tahun 1952.

Djenis ikan	Banjaknja (ekor)	Ukuran cm.
Mas	1.543.456	1 — 8
Tawes	1.211.000	1 — 5
Nilem	244.500	3 — 5
Mudjahir	145.500	3 — 5
Gurame	5.000	3 — 5
Sepat Siam	1,257	5 — 8
Djumlah	3.130,731	1 — 8

Pada djumlah-djumlah jang tersebut diatas ini termasuk pula benih-benih ikan jang ditebarkan disungai-sungai dan sawah-sawah penduduk sebagai pertjobaan menanamkan ikan disawah, bersama tanaman padi. Serta pula jang ditebarkan di kolam-kolam sekitar

mesdjid-mesdjid, dan surau-surau. Mengenai benih-benih ikan yang ditebarkan diperairan-perairan umum sebagai danau-danau, rawa-rawa dan tebat-tebat rakjat dsb., hasilnya adalah sebagai tertera pada daftar.

Keadaan ini hanjalah meliputi daerah-daerah Sumatera Barat, sedangkan didaerah-daerah sepanjang pantai Timur belum bisa diusahakan, disebabkan karena kurangnya tenaga, dan masih sulitnya perhubungan, yang sebetulnya tidak akan kalah hasilnya dan manfaatnya dari daerah dimana telah diusahakan penjebaran bibit ikan itu.

DAFTAR KEADAAN IKAN DIPETERNAKAN-PETER-
NAKAN IKAN DJAWATAN PERIKANAN DARAT
TAHUN 1952.

Petrnakan	Djenis ikan	Induk		Tjalon induk			Benih ikan			Keterangan
							Djumlah	Jang didjual disebarkan	Sisa	
Padang/Magek (Kab. Tanah Datar)	Mas/Rajo	75	46	1.830	—	1.000	41.755	40.000	1.575	*) Belum diadakan pemilihan.
	Tawes	134	239	500	1.540*	318	157.040	152.540	4.500	
	Nilem	35	—	80	—	102	870	—	870	
	Mudjahir	500	500	—	—	—	111.300	103.300	8.000	
	Gurame	—	—	—	—	—	23	—	23	
	Sinjonja	—	—	87*	87*	—	—	—	—	
	Punten	—	—	—	50*	—	—	—	—	
	Tambakan	—	—	—	12*	—	—	—	—	
	Sepat Siam	—	—	—	—	—	35	—	35	
	Mas/Rajo	16	7	575	—	435	27.600	23.500	4.100	
Lb. Sikaping (Kab. Pasaman)	Tawes	47	16	—	300*	—	15.350	10.150	5.200	
	Nilem	25	25	—	300*	—	7.800	3.200	4.600	
	Mudjahir	25	25	—	—	—	3.450	3.300	100	
	Gurame	2	3	—	—	—	—	—	—	
	Sinjonja	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Punten	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Tambakan	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Sepat Siam	17	15	—	—	—	—	—	—	
Djumlah		876	876	2.985	2.289*	1.855	365.543	335.990	29.053	

**DAFTAR DARI ADANJA TEBAT-TEBAT DAN
GENANGAN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH.**

Kabupaten	Tebat		Danau		Telaga		Rawang		Hasil						Keterangan
Wilajah	Luas ha	Jang dile-paskan	Luas ha	Jang dile-paskan	Luas ha	Jang dile-paskan	Luas ha	Jang dile-paskan	Ikan makanan kg.				Benih ikan		
									Tebat	Danau	Telaga	Rawang	Sungai	Tebat	
Kab. Agam	152	176950	9950	82000	10	214910	—	—	152618	8910	7030	—	2835	6275000	Mengenai luas daerah penangkapan ikan disungai-sungai tak dapat ditentukan dengan tegas.
Kotapradja	32														
Tilatang/Kamang	60														
V-Koto Baso	16														
IV-Angkek Tjandung	25														
IV-Koto	7														
Tandjung Raja	6														
Lb. Basung	6														
Kab. Tanah Datar	11510	180000	5600	160000	16	300500	15	297000	76498	11000	722	850	4030	10521000	
V-Kaum	1750														
Sungai Tarab	25														
Salim-Paung	8														
Sungajang	12														
Lintau/Buo	23														
Tandjung Emas	55														
Pariangan															
Rambatan	75														
Batipuh	9.1														
X-Koto	7.50														
Kab. Pasaman	121	26400	26	—	8	30000	2700	2700000	476670	4375	45700	114693	293570	3313000	
Bondjol	11														
Lb. Sikaping	14														
Rao															
Talamau	87														
Pasaman	2														
Lb. Malintang	3														
Sungai Beramas	1														
Kab. L. Kota	29785	14500	3	116500	450	425877	20		21671	—	110	170	9886	10749000	
Pajakumbuh	765														
Luhak/Harau	221.35														
Kab. Bengkalis	3.75	21000	—	—	—	—	—	—							
Kab. Solok	23.16	100000	7950	3000	0,5	5000	0,5	5000	57090						
Kab. P.S.K.	25	—	—	—	—	—	—	—							
Kab. Bengkalis	—	—	300	—	—	—	—	—							

B. Perikanan Laut.

Adapun daerah perikanan laut ini didaerah Sumatera Tengah adalah pada 2 tempat. Pertama dipantai sebelah Barat dan jang kedua dipantai sebelah Timur.

Pelaksanaan penangkapan ikan masih dilakukan dengan alat-alat jang sederhana jang terdiri dari bermatjam-matjam menurut keadaan setempat-setempat.

Pada pantai sebelah Barat, jaitu pantai Sumatera Barat, keadaanja sangat tjuram, gelombangja tinggi dan kuat. Dari itu para nelayan melakukan penangkapan ikan ini masih ditepi pantai dengan mempergunakan alat-alat seperti:

Tjolak, Pukat-Pajung, Pukat-Tepi, Pukat-Lampur, Djaring-Irik, Djaring-Koki, Djaring-Asan Aso, Kissah, Luka (Bubu), Djala dan Pantjing Rawe.

Menurut perkiraan, penghasilan dalam tahun 1952 pada tiap-tiap Kabupaten dari pantai Sumatera Barat adalah seperti berikut:

a. Padang/Pariaman	909.600 Kg.	harga	Rp. 8.349.124.
b. Agam (Tiku)	310.900 Kg.	harga	Rp. 5.572.600.
c. Pasaman (Air Bangis Sasak)	620.600 Kg.	harga	Rp. 4.638.148.
d. Pesisir Selatan Kerintji	1751.000 Kg.	harga	Rp. 5.572.600.

Selain dari pada hasil-hasil jang disebutkan diatas, pada beberapa tempat oleh penduduk pinggir pantai itu diusahakan djuga seperti jang tersebut dibawah ini.

1. Di Air Bangis telah ada diusahakan pembuatan minjak Hati-Iju (Hati Ikan Tjutjut) jang dilakukan setjara perseorangan jang sederhana sadja dan dikerdjakan pada musim hudjan. Minjak hati iju tersebut dipakai terutama untuk penjemir pakaian kuda dan lain-lain. Pada perusahaan jang telah lebih madyu, minjak tersebut diolah mendjadi minjak ikan (Obat gemoek) dan sebagainya. Sirip dan ekornja sangat digemari oleh orang Tionghoa.
2. Telur Penju jang terdapat di pesisir pantai dan pulau jang tidak berapa djauh dari karang-karang (gosong) jang ada dilaut.
3. Sisik (sebangsa penju) jang banjak terdapat dipulau Mentawai. Kebiasaan diolah oleh orang Mentawai pembuat alat-alat seperti ikat pinggang, sisir, tempat rokok dan bermatjam-matjam perhiasan lainnja.
4. Lokan (Sudaro) jang kebanyakan didapat dan dihasilkan di Pulau Mentawai dibuat untuk buah badju dan bermatjam-matjam barang perhiasan oleh penduduk asli.

PERIKANAN LAUT DIPANTAI TIMUR SUMATERA TENGAH.

PANTAI Timur Sumatera Tengah, Bagan Siapi-api, Bengkalis, Selat Pandjang sampai Kepulauan Riau adalah daerah produkis ikan jang utama di Nusantara, malah daerah Bagan Siapi-api tersohor namanja sampai djauh diluar Indonesia sendiri, karena kedudukannja sebagai satu daerah penghasil ikan jang istimewa dalam sedjarah perikanan.

Daerah Bagan Siapi-api.

Luas daerah perikanan Bagan Siapi-api ini kl. 1600 km²., dan Kota Bagan Siapi-api mendjadi pusatnja jang terletak ditepi sebelah kanan (timur) muara sungei Rokan.

Penangkapan ikan disini sudah dimulai sedjak tahun 1880 oleh penduduk, kemudian berdiamlah disana orang-orang Tionghoa (Hokian) jang berasal pelarian dari Siam. Bangsa-bangsa Tionghoa ini mempunjai semangat kerdja dan bakat berorganisasi.

Dengan tjepat golongan penduduk Tionghoa ini bertambah, hingga terdesaklah penduduk asli, dan achirnja menguasai usaha perikanan dalam segala lapangan diseluruh daerah Bagan Siapi-api.

Dalam tjatjah djiwa tahun 1930 perbandingan djumlah penduduk Tionghoa dengan penduduk asli adalah seperti berikut:

Onderafdeling Bagan Siapi-api.

<i>Penduduk asli</i>	<i>Penduduk bangsa Tionghoa</i>
13.735 laki ²	9.994 laki ²
13.509 wanita	6.376 wanita
<u>27.244</u>	<u>16.370</u>

Ibu kota Bagan Siapi-api.

<i>Penduduk asli</i>	<i>Penduduk bangsa Tionghoa</i>
1.650 laki ²	7.030 laki ²
1.615 wanita	4.967 wanita
<u>3.265</u>	<u>11.997</u>

Faktor-faktor jang menjebakkan Bagan Siapi-api muntjul sebagai daerah jang utama dalam dunia perikanan ialah:

1. Arus air sungei Rokan jang sangat deras, jang menjebakkan besarnja selisih air waktu pasang naik dan pasang surut (k.l. 3 meter).
2. Sungai ini banjak mengalirkan tanah lumpur jang mengandung zat-zat organis jang disukai oleh bermatjam-matjam ikan.
3. Lautnja tenang dan pantainja landai, jang menjebakkan penangkapan dapat dilakukan sepanjang masa dan tidak terputus-putus.

Tjara penangkapan ikan.

Penangkapan ikan ini dilakukan dengan bermatjam-matjam alat:

1. Djermal jaitu suatu tjara dengan memasang kaju-kaju balok jang pandjangnja kira-kira 16—24 meter dimuka sungai sekira 3 depa dalamnja. Kaju-kaju balok ini ditanam berdjadjar mendjurus kearus air.

Dari bangunan ini merupakan sebuah sajak jang berbentuk „V” jang berdjumlah $\pm$ 2000 buah. Didalam bangunan ini dipasang tikar rotan jang mendatar dan berdjurusan kebelakang merupakan alur, dan berachir dikantong-kantong penampung ikan. Sajak-sajak jang berbentuk „V” itu bergerak karena arus air, dan ikan-ikan jang berada dalam bangunan ini tidak berani keluar.

Pada waktu air surut tikar rotan diturunkan dalam posisi jang miring (bahagian belakang diatas permukaan air dan bahagian muka berada dalam air). Dengan demikian ikan dipaksakan naik ketikar rotan mengikuti saluran dan achirnja masuk kedalam kantong penampungan. Pada djermal jang ketjil tjukup dipakai djaring sebagai ganti dari tikar rotan. Dan pada djermal udang, sajak itu tjukup dengan 20-25 buah djadjar.

Ongkos dari djermal besar ini menurut harga pokok ditahun 1940 sampai antara F 10.000 — F 20.000.

2. *Bubu*: jaitu dengan membenamkan kedalam air tiang kaju (nibung) jang merupakan satu garis tiap-tiap 2 buah tiang jang berdampingan satu sama lain, djumlah tiang ini sekira 21 buah. Diantara tiang-tiang itu dipasang djaring. Untuk melakukan ini diperlukan lagi 1 perahu kotak besar dan 2 buah perahu ketjil.
3. *Tjitjik Klang* alat ini berasal dari Klang (Malaka) jang merupakan sebuah djaring jang diikatkan diantara beberapa buah tonggak kaju. Untuk mendjaga supaya djaring ini tetap mengambang dilengkapi dengan tiang-tiang bambu. Alat ini dapat dipindah-pindahkan.
4. *Djaring pukut*. Djaring pukut ini digunakan untuk menangkap ikan jang besar ditengah laut. Djaring ini terdiri dari beberapa

bagian jang sampai 3 depa tinggi dan 11 depa pandjang. 30 atau 40 buah dari bagian ini didjadikan satu djaring.

Djaring ini dibawa ketengah laut dengan sampan batok.

5. *Pantjing:*

Alat ini dipergunakan untuk menangkap ikan jang lebih besar.

6. *Belat:*

Alat-alat ini dipakai untuk penampung ikan waktu air surut.

7. dan lain-lain.

Menurut tjatatan pada tahun 1940 di Bagan Siapi-api terdapat sedjumlah: 143 buah djermal besar, 46 buah djermal ketjil, 21 buah djermal udang, 221 buah bubu, 82 buah tjitjik dan 7 buah bangpo (alat penangkapan jang sederhana dan dipergunakan hanja oleh nelayan ketjil).

Bertambahnja alat-alat penangkapan ikan, disebabkan makin lama makin luasnja daerah penangkapan ikan. Kalau semula hanja terbatas pada sungai-sungai Rokan sadja, tapi kemudian berpindah kemuara sungai, dan seterusnya makin djauh keluar.

Sebab demikian menjebabkan berubah pula matjam ikan jang dapat ditangkap, dan disamping itu hasil penangkapan berupa udang meningkat naik.

Dibawah ini diturunkan perangkaan export dari tahun 37 dan 38.

Pengeluaran dari	1937		1938	
	Kg.	Gld.	Kg.	Gld.
Bagan Siapi-api				
Udang kering	704.986	139.359	842.298	208.699
Kulit udang	6.666.259	188.243	4.997.603	140.476
Petis udang	50.193	5.913	54.429	6.130
Terasi	10.993.382	451.549	12.830.431	672.187
Ikan kering/asin	22.559.646	1.001.859	20.759.837	1.589.795
Djumlah	40.974.666	1.786.923	39.484.598	2.617.287

Panipahan.

ikan kering/asin	1.629.892	137.767	1.739.693	173.809
terasi	34.176	2.051	92.280	5.203
ikan laut basah tidak ada perangkaan			66.870	33.435
kulit udang	344.176	13.256	373.804	14.535
Djumlah	3.076.671	166.973	2.772.456	185.797
Djumlah besar	45.776.195	2.103.927	44.270.646	3.033.105

Perbandingan tahun 1937 dengan tahun 38, ternyata mundurnya besar volume export, tetapi nilai dari pengeluaran itu meningkat, khusus mengenai ikan kering/asin harganya adalah lebih baik.

Selanjutnya diturunkan lagi dibawah ini perangkaan hasil penangkapan ikan di Bagan Siapi-api yang dikirim ke Djawa/Madura dan yang diexport keluar negeri terutama ke Penang, Malaka dan Singapura.

I. INTERINSULAIR (dari Bagan Siapi-api ke Djawa/Madura):

	Djakarta		Tjirebon		Semarang		Surabaya		Djumlah	
	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H
1936										
ikan	4.7	362	7.1	539	7.0	504	*)	*)	18.9	1.406
terasi	5.7	289	1.4	70	1.6	96	4.2	261	12.9	718
1937										
ikan	6.6	442	7.4	487	7.1	361	*)	*)	21.2	1.292
terasi	5.0	186	1.2	59	1.1	47	4.6	226	12.1	519
1938										
ikan	6.4	478	6.6	846	7.7	416	*)	*)	20.8	1.740
terasi	5.9	267	1.4	99	1.3	64	5.7	354	14.4	786
1939										
ikan	6.2	491	6.4	1.059	7.5	407	*)	1	20.2	1.959
terasi	5.9	279	1.7	125	1.3	61	5.2	324	14.3	790

II. INTERINSULAIR (Dari luar Djawa/Madura seluruhnya „Buitengewesten” ke Djawa/Madura).

1936										
ikan	6.5	750	7.9	619	7.6	580	2.0	180	24.2	2.131
terasi **)										
1937										
ikan	7.6	557	8.1	541	7.4	393	2.0	173	25.2	1.666
terasi **)										
1938										
ikan	7.5	623	7.5	920	8.0	453	2.3	214	25.4	2.211
terasi	5.9	273	1.4	99	1.4	78	6.3	412	15.2	863
1939										
ikan	8.9	881	8.0	1.235	8.2	504	2.3	224	27.5	2.845
terasi	5.9	282	1.7	126	1.5	75	5.8	382	15.1	866

Keterangan:

Pembulatan sampai 0.1×1 djuta kg (B) dan 1000 gld. (H).

*) = lebih kurang dari pada 0.1 djuta Kg dan lebih kurang dari pada 1000 gld.

**) = perangkaan tentang luar Bagan Siapi-api tidak ada.

Dari daftar diatas dilihat :

1. Pengiriman ikan (kering/asin) dari Bagan Siapi-api ke Djawa/Madura bergerak sekitar 20 djuta kg tiap-tiap tahun.
2. Mengenai terasi djumlah ini adalah diantara $12\frac{1}{2}$ djuta kg.
3. Ikan-ikan Bagan tersebut untuk sebagian terbesar ditampung oleh Djakarta, Tjirebon (Djawa Barat) dan Semarang dalam djumlah-djumlah jang kira-kira sama, jaitu sekitar 6-7 djuta kg. Sangat sedikit ikan-ikan ini dikirim ke Surabaya (Djawa Timur). Terasi paling banjak dikirim ke Djakarta dan Surabaya dalam djumlah-djumlah jang kira-kira sama pula, jaitu diantara 4-5 djuta kg tiap-tiap tahun.
4. Hampir semua ikan (kering/asin) dan terasi dari luar Djawa/Madura (Buitengewesten) „di absorbir” oleh Djawa/Madura. Pengiriman ikan dan terasi dari Bagan Siapi-api ke Djawa/Madura dalam tahun 1940 tidak berbeda daripada tahun-tahun jang sudah, jaitu masing-masing $20\frac{1}{2}$ djuta kg dan $14\frac{1}{2}$ djuta kg.

Ikan-ikan kering/asin djuga djumlah jang hampir-hampir sama (lebih 6 djuta kg) dikirim ke Djakarta, Tjirebon dan Semarang. (Dalam 6 bulan pertama berdjumlah ± 2 djuta kg tiap-tiap bulan (April-September), dan untuk 6 bulan lainnya berdjumlah lebih $1\frac{1}{2}$ djuta kg tiap-tiap bulan.

Mengenai terasi, Djakarta dan Surabaya djuga banjak meng „absorbir” hasil itu dalam djumlah jang kira-kira sama djuga, jaitu sekitar 6 djuta kg.

Ikan-ikan Bagan jang paling murah dikirim ke Semarang ($\pm 5\frac{1}{2}$ sen tiap-tiap kilo), kwaliteit jang lebih baik dikirim ke Djakarta dan Tjirebon, masing-masing dengan harga 9 dan 17 sen rata-rata sekilo, dengan nilai uang sebelum perang.

Dibanding harga-harga ikan Bagan ini dengan harga ikan pedasiam (import dari luar negeri) jang untuk Djakarta, Tjirebon dan Surabaya adalah masing-masing 16,15 dan 15 sen, maka dapat dimengerti bagaimana besar artinja ikan Bagan bagi konsumen di Djawa/Madura.

II. Ekport ikan dari Sumatera Timur keluar negeri (terutama Penang, Malaka dan Singapura):

(Kantor Pusat Statistik).

	1938		1939		1940	
	Kg.	Gld.	Kg.	Gld.	Kg.	Gld.
1. Ikan segar (basah)						
Bagan Siapi-api	158.234		78.560	123.845	61.561	151.732
Selatpandjang	11.015		4.466	18.649	7.455	12.699
Bengkalis	723.120		146.775	832.807	177.138	1.122.009
Kuala Mandah	8.543		1.172	—	—	—
	900.912		230.973	975.301	246.154	1.286.530
						323.301

D a r i	1938	1939			1940	
Kg.	Gld.	Kg.	Gld.	Kg.	Gld.	
2. Ikan diawetkan, diasin/dikeringkan, dikemas lepas (losver-						
pakt) dalam keran- djang dsb.						
Tandjung Balai	11.262	1.997	—	—	—	—
Bagan Siapi-api	115.113	9.176	68.808	5.733	60.843	5.106
Selat pandjang	37.011	8.238	14.085	3.145	—	—
Belawan	—	—	6.020	1.012	—	—
Bengkalis	—	—	11.555	3.757	—	—
	163.386	19.432	100.468	13.647	60.843	5.106
3. Ikan diawetkan,						
tds (tidak disebut sendiri ²), termasuk bagian ² ikan luar/ dalam jg. dapat di- makan tds. seperti perut ikan, sirip d.l.l.						
Tandjung Tiram	1.649	4.908	346	1.005	—	—
Bagan Siapi-api	8.520	7.223	7.528	6.956	13.830	14.183
Selat Pandjang	1.641	8.008	1.406	6.860	1.106	5.570
Bengkalis	543	1.409	660	1.771	688	1.933
	12.353	21.548	9.940	16.592	15.624	21.686
4. Telur ikan.						
Bengkalis	253	141	—	—	15	42
	253	141	—	—	15	42
5. Terasi.						
Bagan Siapi-api	177.158	10.438	211.721	12.188	207.860	12.346
Labuhan Bilik	16.470	1.637	—	—	—	—
Selat Pandjang	14.643	2.877	7.836	1.549	30.929	1.896
	208.271	14.952	219.557	13.737	238.789	14.242
6. Sisa² ikan tds.						
(tidak disebut sendiri ²)						
Bagan Siapi-api	495.516	9.682	375.295	7.440	445.163	8.843
	495.516	9.682	375.295	7.440	445.163	8.843
7. Kerang-kerangan dan binatang lunak segar.						
Belawan	36.004	7.073	39.114	8.264	67.430	14.260
Bagan Siapi-api	267.267	8.891	286.089	12.190	100.843	5.691
Selat Pandjang	19.290	7.716	48.379	18.952	48.853	19.184
Kuala Mandah	112.411	16.112	61.589	9.358	—	—
	434.972	39.792	435.171	48.764	217.126	39.135

8. Udang kering.

Bagan Siapi-api	498.587	139.260	528.688	87.802	316.018	53.417
Labuhan Bilik	22.513	8.786	—	—	—	—
Selat Pandjang	18.978	9.310	13.891	5.638	12.527	6.000
Bengkalis	11.180	1.676	9.444	1.147	—	—
	551.258	159.032	552.023	94.587	328.545	59.417

9. Teripang.

Djumlah p. 1 s/d 8,	2.766.921	495.552	2.667.755	433.484	2.542.620	471.719
---------------------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

Bengkalis.

Bersama dengan Bagan Siapi-api, jaitu daerah Kepulauan Bengkalis terkenal dengan **Telur Terubuknja** yang dihasilkan dari ikan Terubuk. Hasil-hasil ini dikirim ke Djawa, Palembang dan Singapura.

Menurut tjatatan tahun 1906 dan tahun 1907 export tersebut adalah sbb.:

1906		1907	
Kg.	Gld.	Kg.	Gld.
81.699	31.059	134.040	39.799

Djenis-djenis ikan lain yang dihasilkan dalam daerah ini dapat dilihat pada perangkaan angka-angka yang berlalu.

Pada masa 17 Agustus 1945 dan masa federal:

Angka-angka perangkaan dalam masa ini belum didapat, tapi dapat pula dipahami kiranja, betapa sukarnja usaha-usaha mempertahankan daerah-daerah ini, dibawah pimpinan Bupati Bengkalis R.I. terhadap blokade yang dilakukan Belanda.

Selandjutnja dibawah ini diturunkan daftar yang baru dapat dikumpulkan disekitar daerah Bagan Si-api-api dan Bengkalis.

I. Export keluar negeri (oleh Kantor Pusat statistik ditjatat mulai tahun 1947).

D a r i	1947		1948		1949	
	Kg.	Gld.	Kg.	Gld.	Kg.	Gld.
Bagan Siapi-api.						
1. Ikan segar	—	—	—	—	27.700	66.373
2. Ikan diawetkan: diasin/kering, dikemas lepas (loos-verpakt)	—	—	—	—	96.817	16.773
3. Ikan diawet (lainnja termasuk bagian ² ikan luar/dalam	—	—	—	—	5.268	14.928
4. Udang kering	—	—	—	—	136.510	323.395
	—	—	—	—	266.095	421.469

Disamping angka-angka ini maka Perwakilan Perdagangan R.I. di Singapura memberikan perangkaan pula tentang export tsb. (ke Singapura, jang agaknja tidak ditjatat oleh Kantor Pusat Statistik).

Perangkaan ini rupanja mengenai perdagangan „barter” dari daerah dollar di Indonesia ke Singapore, jang untuk tahun 1942 dan tahun 1949 djumlahnja adalah:

	1948		1949	
	tons	\$	tons	\$
U.S.I. Riouw	738.61	521.550	684.96	453.572
„ Sumatera (tempat ² export tidak dipe- rintjikan	1.203.91	728.802	1.003.90	494.788

tons = long ton = 1016 kg.

II. *Perdagangan ikan Antara-Pulau (interinsulair):*

Tentang perdagangan ini mulai ditjatat tahun 1949 oleh Kantor Pusat statistik.

Disesalkan tidak ada perintjian tempat pengiriman/penerimaan ikan dsb., sehingga hanja diberikan angka-angka mengenai Sumatera Timur seluruhnja:

Dari Sumatera Timur:		Kg.	Gld.
1. Ikan kering/asin „los- verpakt” (dalam ke- randjang dsb.).	ke Djawa/Madura „ Sum. Selatan „ Sum. Iainnja *) „ Kalimantan Barat	4.041.325 18.599 6.382 9.870	448.200 16.001 6.188 8.000
		4.076.176	478.389
2. T e r a s i	ke Djawa/Madura „ Kalimantan Barat „ Sum. Selatan	736.126 16.020 14.250	371.877 7.140 5.400
		766.396	384.417
3. Udang kering	ke Djawa/Madura	1.410	1.200
	Djumlah besar	4.843.982	864.006

Daerah Kepulauan Riau.

Daerah kepulauan Riau ini meliputi lebih dari 3000 buah pulau ketjil dan besar. Hasil dari daerah ini kebanyakan berupa ikan basah jang dikirim ke Singapura, jang djarak pengangkutannja tidak djauh, dan oleh karena tertarik pengaruh dollars.

Kota Singapura sebagian besar kebutuhannya, bergantung kepada daerah Kep. Riau, dan ini dapat dilihat sesudahnya perang dunia ke II berakhir, maka pemerintah kota tersebut, minta keizinan untuk mengirim kapal-kapal ikan buat membeli ikan-ikan didaerah itu.

Adapun alat-alat penangkap ikan didaerah ini adalah seperti berikut:

1. *Djaring pukat*. Alat ini dipergunakan dipantai ditempat jang tidak dalam, dengan mempergunakan sebuah sampan. 2. *Djaring tenggiri*. Dipergunakan untuk penangkap tenggiri dan terubuk. 3. *Djaring selangat*. 4. *Djala*. 5. *Tangkul*. 6. *Binto*. 7. *Tuwas*. (menjerupai djermal ketjil). 8. *Kelong*. 9. *Djaran* (Pantjang kail). 10. *Rawe*. 11. *Pantjang Gadung*.

Untuk mendapatkan suatu pemandangan umum atas keadaan perikanan dewasa ini didaerah-daerah Pantai Timur ini, maka dibawah ini diturunkan perangkaan setjara singkat serta pendjelaskan-pendjelasan seperlunya.

I. Banjaknya nelayan-nelayan jang aktif mengusahakan penangkapan ikan adalah untuk:

<i>Daerah</i>	<i>Djumlah nelayan:</i>
Kepulauan Riau	3.389 orang
Bengkalis	5.650 orang
Sumatera Timur Selatan	19.879 orang
Sumatera Timur Utara	10.422 orang
Atjeh	6.000 orang
Bangka/Belitung	3.000 orang
Sungsang dan sekitarnya	2.000 orang
	50.340 orang.

Akan tetapi djumlah penduduk didaerah-daerah tersebut jang hidup dari perikanan ditaksir k.l. di:

Kabupaten Bengkalis	150.000 orang
Kabupaten Indragiri	50.000 orang
Kabupaten Batanghari	30.000 orang
Kabupaten Kepulauan Riau	160.000 orang
	390.000 orang

II. *Banjaknja alat-alat perikanan.*

	Pengusaha	
	Indonesia	Tionghoa
1. Pukat	1.528	331
2. Pukat udang	128	30
3. Pukat sebelah	22	—
4. Banting	60	11
5. Djaring	820	338
6. Djermal	7	247
7. Ambei	435	715
8. Tengguk besar	4	—
9. Tangkue	90	447
10. Belat	204	23
11. Rawai	116	39
12. Djala	213	—
13. Kiso	122	—
14. Kail	26	10
15. Langgai	16	—
16. Mampak	—	5
17. Empang	69	4
18. Sedok	2	4
19. Bubu	—	228
20. Tjitji	—	81
21. Lukah	—	1
22. Bongko	4	51
23. Kelong (sero)	782	24
24. Pantjing	600	—
25. lain-lain	250	—

III. *Hasil penangkapan.*

	1951	1952
1. Kepulauan Riau	4.326 ton	4.718 ton
2. Bengkalis	45.000 ton	48.066 ton
3. Sumatera Timur Selatan	15.554 ton	12.767 ton
4. Sumatera Timur Utara	9.677 ton	10.960 ton
5. Atjeh Timur	1.400 ton	1.985 ton
6. Atjeh Utara	1.800 ton	*)
7. Atjeh Pedie	1.600 ton	
8. Atjeh Besar	1.700 ton	7.63 ton
9. Bangka/Belitung/Sungsang	4.000 ton	619 ton **)
	84.757 ton	79.878 ton

*) Perangkaan belum diperdapat.

**) Ressort Djambi.

IV. *Perdagangan Ikan.*

Untuk usaha pembelian ikan basah (terutama oleh pedagang-pedagang Tionghoa dari Singapura) di daerah-daerah perikanan itu, Pemerintah Indonesia mengharuskan izin berlajar (sailing permit) dan izin pembelian (buying permit), yang kini diberikan oleh Kepala Pemerintah Daerah menurut peraturan-peraturan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat (Kust Visserij Ordonnantie dan Maritieme kringen ordonnantie).

Di Singapura tertjatat $\pm$ 200 buah kapal carrier yang biasa membeli ikan dari perairan Indonesia.

Perdagangan ikan basah dengan Singapura ini menundukkan angka:

1947 : 2.208.907 kg	atau 22.9%	dari djumlah ikan yang masuk di Singapura.
1948 : 2.331.822 kg	atau 23.9%	dari djumlah ikan yang masuk di Singapura.
1949 : 2.156.460 kg	atau 20.9%	dari djumlah ikan yang masuk di Singapura.
1950 : 1.928.672 kg	atau 18.7%	dari djumlah ikan yang masuk di Singapura.
1951 : 2.048.256 kg	atau 18.7%	dari djumlah ikan yang masuk di Singapura.
1952 : 2.064.502 kg	atau 18.7%	dari djumlah ikan yang masuk di Singapura.

Sebelum perang adalah perangkaan ikan basah ke Singapura ini sebagai berikut:

1935 : 12.612.4 long ton	(= $\pm$ 1.016 kg.)
1936 : 12.930.3	„ „
1937 : 13.044.1	„ „
1938 : 11.484.2	„ „
1939 : 10.726.0	„ „
1940 : 10.115.6	„ „

Selainnja ikan basah ini, maka dalam tahun 1951 eksport dari Sumatera berupa perdagangan „barter” mengenai:

1. Prawn-dust sedjumlah 20.627.71 long ton = \$ 5.650.007.93 (kulit udang).
2. Fresh Fish sedjumlah 167.27 long ton = \$ 93.227.85 (ikan basah).

Dalam tahun 1952 eksport ke Singapura menundjukkan angka:
dari Kabupaten Bengkalis:

1. kulit udang	13.311.950 ton	
2. ikan basah	1.485.271 ton	
3. ikan asin	13.492 ton	
4. hasil laut lainnja	1.500 ton	
	14.812.213 ton	dan

dari Kabupaten Riau:

1. ikan basah	3.262.250 ton	
2. ikan kering	1.298.320 ton	
3. ketam	25.186 ton	
4. siput	130.973 ton	
5. Hasil laut lainnja	1.630 ton	
	4.718.359 ton	
Djumlah besar	19.530.572 ton	

Selain daripada angka-angka tsb., ada pula bahan-bahan perangkaan jang disusun oleh Kantor Pusat Statistik mengenai Eksport dan Perdagangan ikan antara pulau (Interinsulair) jang disimpulkan dibawah ini:

EXPOR DAN PERDAGANGAN IKAN ANTARA PULAN (Interinsulair).

	1950		1951		1952	
	Kg.	Rp.	Kg.	Rp.	Kg.	Rp.
1. Ikan segar (basah)	327.912	995.984	731.382	2.208.410	1.648.907	13.139.845
2. Ikan kering/diasin „losverpakt”	—	—	12.782	19.050	13.926	56.137
3. Ikan diawet lainnya termasuk bagian ²	1.612	10.595	156	2.189		
4. Ikan luat/dalam (sirip dsb.)						
5. Kerang ² an dan binatang lunak segar	1.321	1.388	4.645	7.084	24.133	84.180
6. Udang kering	5.967	31.724	5.933	34.193		
7. Sisa ² kerang ² an dan binatang lunak	8.067.270	1.863.069	20.417.355	4.779.563	12.194.250	11.647.936
8. Sisa ² ikan	29.740	6.516	9.522	2.209		
9. teripang dikering/diasap					14.737	48.243
Export Indonesia seluruhnya	8.433.822	2.909.276	21.181.775	7.052.698	13.895.953	24.976.341
Export Indonesia seluruhnya	8.685.547	3.109.349	21.236.030	7.159.591	13.968.442	25.483.299
C. Antara pulau (Interinsulair)						
ke (dari daerah lainnya di Indonesia).						
1. Ikan kering/asin „losverpakt”	2.470.017	4.651.823	13.744.882	6.169.462	10.144	54.679
2. Ikan diawet lainnya termasuk bagi						
ikan luar/dalam	318.149	478.589	743.618	3.037.262	223.838	684.362
3. Telur ikan	319.174	683.525	477.228	948.680	796.508	3.651.131
4. Terasi					339.620	744.943
5. Kerang ² an dan binatang lunak, segar					4.361	27.199
6. Udang kering	7.914	65.270	65.506	582.726	43.641	308.101
7. Teripang (dikering/diasap)	9.035	56.134	5.598	52.160	98.069	518.193
8. Kerang ² an dan binatang lunak diawet	37.504	170.582	202.612	1.331.220		
Indonesia seluruhnya	3.161.793	6.105.923	15.239.544	12.121.510	1.406.008	5.647.692
Indonesia seluruhnya	41.614.706	72.819.737	50.009.076	91.399.850	51.824.432	120.021.212

	1950		1951		1952	
	Kg.	Rp.	Kg.	Rp.	Kg.	Rp.
Dari (kedua)² lainnya di Indonesia).						
1. Ikan kering asin losverpakt jaitu dalam kerandjang	5.244.326	10.227.942	857.094	11.805.812	1.682.641	439.48
2. Ikan² diawet lainnya yang termasuk bagian ikan luar dan dalam	18.984	78.874	439.720	1.563.932	32.349.476	39.484.32
3. Terasi	445.839	637.700	66.310	97.035	7.179.701	15.329.59
4. Udang kering	84	760	2.896	17.580	20.407	300.69
5. Teripang	—	—	8.096	72.060	3.510	15.91
6. Kerang²an dan binatang lunak	1.880	26.010	13.708	89.160	35.080	344.87
7. Telur ikan	—	—	—	—	1.548.670	4.081.82
	5.711.113	10.971.286	5.387.824	13.645.579	42.819.485	60.360.70
Indonesia seluruhnya	41.614.706	72.819.727	50.009.076	91.399.850	51.824.432	120.021.21

Dalam hubungan ini perlu kiranya diingat, bahwa:

1. Kantor Pusat Statistik tersebut memperoleh bahan-bahannya daripada Djawatan Bea dan Tjukai dipelabuhan-pelabuhan seluruh Indonesia.
2. Akan tetapi mengenai „daerah bebas” (vrij tolgebied) a.l. Kep. Riau, ketjuali mengenai logam-logam seperti bauxiet, di Kantor Pusat Statistik itu tidak ada pentjataan.

Organisasi Perikanan.

Organisasi-organisasi perikanan, baik yang mengenai penangkapan ataupun perdagangan dari hasil penangkapan itu, kebanyakan berada didalam tangan bangsa Tionghoa dengan kongsi-kongsi yang bermodal besar dan organisasi yang teratur, sehingga menguasai perdagangan-perdagangan ikan baik didalam maupun keluar negeri. Akan tetapi semendjak proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, timbullah hasrat yang kuat dari bangsa Indonesia seperti dibawah ini:

1. „Koperasi Perikanan Indonesia” di Prigiradja (wilayah) Kuala Inderagiri.
2. „Persatuan Nelajan Santausa Pulau VII” di Tarempa (Anambas).
3. „Koperasi Perikanan Indonesia Tungkal” di Tungkal (Djambi) dan selandjutnja di Kabupaten Bengkalis menjusul:
4. Persatuan Penangkap Ikan Indonesia „Anaksekata” di Sendau (Selat Pandjang) dengan 98 anggauta.
5. Koperasi Perikanan Laut Indonesia di Merbau (Telukbelitung) dengan 52 anggauta.
6. Koperasi Perikanan Laut Indonesia Pambang di Teluk Pambang (Bengkalis).
7. Koperasi Perikanan Laut Indonesia Muntai di Muntai (Bengkalis) dengan 24 anggauta.
8. Koperasi Perikanan Laut Indonesia Bantanair di Bantanair (Bengkalis) dengan 32 anggauta.
9. Koperasi Perikanan Laut Indonesia Teluk Ru di Pulau Rupert Utara dengan 28 anggauta.
10. Koperasi Perikanan Laut Indonesia Tg. Punak di P. Rupert Utara dengan 30 anggauta.
11. Koperasi Perikanan Laut Tg. Medang di P. Rupert Utara dengan 24 Anggauta.
12. Koperasi Perikanan Laut Indonesia Kuala Rokan di Labuhan Tangga Besar. Bagan Siapi-api dengan 24 anggauta.

13. Koperasi Perikanan Laut Indonesia Pasirlunan Kapas di Pasirlunan Kapas (Bagan Siapi-api) dengan 32 anggauta.
14. Persatuan Perikanan Hai Giap Hwa (Tionghoa) di Sinabui (Bagan Siapi-api).
15. Persatuan Djermal Hwa Kiauw (Tionghoa Bagan Siapi-api) dengan 91 anggota.
16. Gabungan Perikanan Laut di Bagan Siapi-api, jang bersifat N.V. Tionghoa/Indonesia.
17. Persatuan Pengusaha Nasional di Bengkalis jang bersifat N.V.
18. Persatuan Perikanan Indonesia di Bengkalis jang bersifat N.V. pula.

Dikabupaten Riau:

19. Koperasi Perikanan Simpan dan Pindjaman Bintang Selatan dan
20. Koperasi Perikanan Simpan dan Pindjaman Moro Sulit.

Keadaan Koperasi tadi karena kekurangan kader, tidak dapat bergerak dengan lantjar.

Selain bimbingan dari instansi Pemerintah dan para pemimpin rakjat, dibutuhkan benar alat-alat perikanan dan uang-uang kredit dan kader pimpinan, jang merupakan suatu sjarat mutlak, supaja koperasi itu dapat berdiri disamping kongsi-kongsi kepunjaan bangsa Tionghoa, jang telah ada dan ulung dalam berusaha.

Untuk keperluan pendidikan kader koperasi, Djawatan Koperasi Insp. Sumatera Tengah pada bulan Djuni 1953 mengadakan kursus, jang disertai pula dengan peladjaran tentang techniek penangkapan ikan dan techniek perusahaan perikanan.

PERKEMBANGAN LALU LINTAS.

UNTUK daerah Sumatera Tengah yang luas itu, dibutuhi segala matjam alat-alat perhubungan.

Dari pulau kepulauan dipergunakan perahu-perahu dan kapal-kapal; untuk disungai diperlukan pentjalang dan sekunar. Didaerah pedalamannja yang berbukit-bukit itu, terentang djalan raja yang berbelit-belit. Dan untuk mentjapai pantai dan pelabuhan guna mengangkut hasil buminja, dia membutuhi „djalan besi”, spoor atau kereta api dan auto.

Lalu lintas didarat pada saat ini dapat memenuhi sjarat-sjarat dalam dunia perhubungan. Pada waktu ini tidak kurang dari 4000 kilometer djalan-djalan raja di Sumatera Tengah yang tiap hari digilas oleh roda diluruh daerah Sumatera Tengah. Dia mentjapai daerah yang tidak tertjapai oleh kapal terbang, kapal/perahu dan oleh kereta api. Karena itu, dia dapat memenuhi kebutuhan hidup rakjat yang bergerak didalam segenap lapangan hiduwnja.

Selain dari memindahkan manusia berpuluh ribu setiap hari dari satu tempat ke lain tempat, dia djuga mengangkut apa yang mungkin dapat diangkutnja,. Beribu-ribu ton karet dan kopra dari daerah yang tidak ditjapai oleh perahu, beribu ton beras dan sajur majur dari pegunungan kekota-kota besar ketjil, beratus ekor ternak yang akan dipotong dan seribu satu matjam **hasil bumi** hasil bumi dan keradjinan tangan diperdagangkan dari satu tempat kesatu tempat dengan dibawa oleh oto-oto itu.

Dan karena dia menjadi salah satu urat nadi bagi perekonomian rakjat, maka pemerintah ikut serta dalam menjusun dan mengaturnja agar dia dapat melahirkan faedah yang sebesar-besarnja.

Sebagai djuga dengan daerah lain di Indonesia ini, peraturan-peraturan tjara pemakaian kendaraan bermotor didjalan raja (automobiël) ini, di Sumatera Tengah mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1900. Meskipun sebelum itu sudah ada djuga peraturan tjara pemakaian kendaraan ini, tapi peraturan itu hanya bersifat setempat sadja. Peraturan tersebut hanya mengenai „tjara pemakaian kendaraan bermotor” itu sadja, jaitu sekedar untuk mendjaga keselamatan dan keamanan didjalan raja.

Tapi, demi hasrat dan kebutuhan terhadap kendaraan itu berkembang dengan tcepatnja, maka dirasa perlu diadakan peraturan-peraturan baru, terutama yang mengenai peraturan lalu lintas.

Tanggal 1 Oktober 1917 dikeluarkanlah peraturan yang berkenaan dengan kendaraan bermotor jaitu peraturan yang diperluas dan ditambah dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1903.

Karena perkembangan-kembangan dengan bertambahnja djalan raja dan berlipat gandanja djumlah kendaraan bermotor, maka dirasa sangat perlu diadakan pula peraturan-peraturan untuk menghindarkan saingan yang tidak sehat dari pemilik oto itu serta peraturan mengenai tarip dan djurusan perdjalan (traject)-nja.

Beberapa tahun sebelum petjah perang dunia ke II, di daerah propinsi Sumatera Tengah terdapat beberapa buah perusahaan/gabungan otobis partikelir kepunjaan bangsa Indonesia dan bangsa lainnja. Dengan adanya perusahaan dan pergabungan-pergabungan itu, maka dapat diatur perhubungan lalu lintas dengan lebih baik dan lebih sempurna, jaitu peraturan-peraturan yang membelikan keuntungan kepada penumpang-penumpang dan kepada pemiliknja.

Sajang, peraturan dan keadaan yang demikian tidak dapat berdjalan lama.

Pada waktu petjahnja perang dunia ke II, sebahagian besar dari kendaraan-kendaraan itu dipergunakan oleh pemerintah militer Belanda untuk kepentingan siasat dan pertahanannja, jaitu untuk mengangkut militer dan alat-alat perangnja dari satu daerah kedaerah lain. Diwaktu penjerbuan Djepang, tidak pula sedikit diantara kendaraan itu yang hantjur karena sasaran bom tentara Djepang, karena dia dipergunakan untuk kepentingan militer Belanda, begitu djuga banjak pula yang dihantjurkan sendiri oleh militer Belanda karena siasat „bumi hangusnja”.

Dengan demikian, maka njatalah, bahwa dizaman pendudukan tentara Djepang, di daerah Sumatera Tengah didapati sangat sedikit sekali oto pengangkut kepunjaan rakjat. Dan oto-oto yang masih ada, digabungkan oleh militer Djepang dalam suatu gabungan semi djawatan militer Djepang, yang dinamainja „Tomishima”. Sudah njata, bahwa itu tidak ada lagi peraturan lalu lintas umum, selain dari peraturan yang diadakan dan ditetapkan oleh pembesar-pembesar tentera Djepang.

Pada bulan Agustus 1945, karena dilumpuhkannja „Tomshima” oleh Rakjat, maka oleh pemerintah di Sumatera Barat didirikan suatu badan yang akan mengatur lalu lintas kendaraan bermotor

didjalan raja. Badan itu dinamai P.O.L.L. (Perusahaan Oto Lalu Lintas). Jang kemudian mendjelma menjadi P.O.L.L. (Pedjabat Lalu Lintas). Tidak lama sesudah itu berdiri pula P.O.N. Ste (Perusahaan Oto Negara di Sumatera Tengah) jang menitik beratkan pekerdjaannya untuk mengangkut barang-barang keperluan pemerintah R. I. Dan disamping itu, oleh Pemerintahpun didirikan pula suatu badan pengangkutan jang diberi bernama dengan D.A.M.R.I. (Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia).

Untuk mengurus dan meng-koordinir semua alat-alat perhubungan dilaut, darat dan udara diseluruh Sumatera, oleh Pemerintah di Sumatera didirikan pula suatu Biro jang dinamakan dengan „**Biro Koordinasi Perhubungan Sumatera**”. Badan jang baru didirikan ini direntjanakan untuk memulihkan kembali perhubungan lalu lintas kendaraan bermotor didjalan raja di Sumatera sebagai keadaan sebelum perang dulu.

Tapi rentjana usaha Pemerintah ini tidak pula dapat berlangsung sebagai ditentukan semula, karena adanya clash ke II, sementara itu oto-oto bis jang hanya tinggal beberapa buah karena telah banyak jang rusak, baik karena kekurangan bagian-bagian (onderdelen) maupun karena akibat pemakaian alat pembakar jang terdiri dari minyak karet.

Masa antara pendudukan Djepang dengan penjerahan kedaulatan, dalam lapangan lalu lintas di Sumatera Tengah hanya dipakai oleh tjikar (pedati) dan oleh sado (bendi), karena oto-oto jang masih tinggal hanya dipakai untuk keperluan Angkatan Perang dan Pemerintahan sadja.

Sesudah pemilihan kedaulatan, maka di Sumatera Tengah baru dapat didirikan kembali kantor jang mengurus lalu lintas, dinamai Djawatan Lalu Lintas Bahagian Darat Sumatera Tengah. Kemudian Djawatan ini bersama D.A.M.R.I. dilikwidir dan disatukan dengan Djawatan Pekerdjaan Umum/Perhubungan Sumatera Tengah. Mulai dari saat itu diaturlah kembali pemberian surat-surat izin (vergunning) kepada mereka jang ingin hendak mempunyai oto bis. Karena banjaknya djalan-djalan raja dan djembatan-djembatan jang rusak, dan karena hampir 95% dari kendaraan-kendaraan oto jang masih ada hanya terdiri dari oto-oto jang sudah sangat tua usianya, maka lalu lintas di Sumatera Tengah pada waktu itu masih dalam keadaan jang „sepi”.

Kekurangan-kekurangan itu segera dapat diperbaiki, diantaranya dengan diberikannya surat izin pembelian oto oleh prioriteits-commissi kepada perusahaan-perusahaan oto partikelir. Dan dengan tjara berangsur-angsur, kesibukan lalu lintas dengan oto didjalan-djalan raja di Propinsi Sumatera Tengah dipulihkan kembali.

Keadaan sekarang.

Di Propinsi Sumatera Tengah sekarang terdapat sebanyak 70 buah perusahaan atau pergabungan oto bis. 75% diantaranya adalah milik bangsa Indonesia dan 25% jang lainnja dimiliki oleh bangsa asing.

Menurut tjatatan, pada waktu ini di Sumatera Tengah terdapat 32 buah traject jang setiap hari dilalui oleh oto-oto bis untuk mengangkut segala dan semua jang bisa dan mungkin diangkutnja. Perhubungan antara ibu kota Propinsi (Bukittinggi) dengan kota-kota dan tempat-tempat lain dari seluruh daerah Propinsi ini sudah mulai dapat dilalui kembali. Hanja sewaktu-waktu dimusim hudjan, beberapa buah diantara traject jang banjak itu terpaksa ditutup buat sementara, tapi roda perekonomian rakjat didaerah jang dapat dilalui motor hampir tidak pernah terlantar karenanja.

Perhubungan otobis didaerah Sumatera Barat dilakukan oleh 25 buah gabungan atau perusahaan oto bis (lihat lampiran).

Sekurangnja 366 buah oto bis dalam sehari jang melantjar hilir mudik diseluruh djalan raja di Sumatera Barat sadja untuk memperhubungkan satu tempat dengan satu tempat. Setiap sekurangnja $\frac{1}{2}$ djam, Padang dengan Bukittinggi dihubungkan oleh 7a-8-buah perusahaan jang menjediakan tidak kurang dari 75 buah oto bis. Bukittinggi dengan Pajakumbuh djuga dihubungkan dengan setjara langsung sekali dalam 30 menit oleh 4 a 5 buah gabungan oto. Dua sampai tiga kali sehari ada oto bis jang akan membawa penumpang ke Pakan baru, ke Rengat di daerah Riau dan ke Muara Tebo didaerah Djambi, belum lagi dihitung jang memperhubungkan kota-kota Padang, Pajakumbuh, Padang Pandjang dan Batu Sangkar dengan kota-kota itu. Dari Bukittinggi ke Pakan Baru dihubungkan oleh 3 buah gabungan oto jang menjediakan tenaganja untuk itu setiap hari.

Mengenai 32 buah traject jang disebutkan diatas, frequentie jang ditjapainja pada achir tahun 1952 adalah antara 55 $\frac{1}{2}$ % sampai 87 $\frac{1}{2}$ %.

Selain dari oto-oto jang melantjar kesegala pendjuru di Sumatera Tengah jang mempunjai djalan sepanjang 6037 km 880 km djalan Negara, 2188 km djalan Propinsi dan 2968 djalan Kebupaten dan beribu kilometer lagi djalan wilajah, seperti jang disebutkan diatas, berpuluh-puluh lagi oto, pengangkutan barang jang bergerak dari satu tempat kedaerah lain untuk membawah hasil bumi rakjat dan barang-barang perdagangan mereka, seperti getah, tjengkeh, pala dan lain-lain.

Perhubungan di Perairan.

Didaerah Sumatera Tengah ini sebahagian terbesar diantara pelabuhan-pelabuhan jang banjak disinggahi oleh kapal-kapal dari luar daerah, adalah pelabuhan-pelabuhan jang terbesar dibahagian pantainya sebelah Timur. Pantai dibahagian sebelah ke Timur ini adalah persimpangan djalan dilautan antara selat Malaka, Laut Djawa dan Lautan Tjina Selatan. Djalan inilah sebenarnja jang merupakan djalan perdagangan, meskipun pantainya disebelah Barat banjak perhubungan dengan benua Afrika dan pulau Djawa.

Pelabuhan-pelabuhan dipantai Timur jang banjak disinggahi oleh kapal-kapal jang datang dari luar negeri, terutama dengan lebih dahulu menjinggahi Singapura dan Malaka, ialah pelabuhan-pelabuhan Selat Pandjang, Pakan Baru, Rengat, Kuala Tungkal dan Djambi. Bahan-bahan export jang diambil dari pelabuhan-pelabuhan tersebut jang terpenting diantaranya karet, kopra dan bahan-bahan mentah kainnja, baik hasil bumi, maupun hasil-hasil pertambangan.

Selain dari pelabuhan-pelabuhan jang tersebut diatas, terdapat pula pelabuhan-pelabuhan jang hanja disinggahi oleh kapal-kapal ketjil, seperti pelabuhan-pelabuhan Bengkalis, Tembilahan, Bagan Siapi-api dan lain-lain.

Di Pesisir sebelah Barat pelabuhan jang penting adalah pelabuhan Teluk Bujur di Padang. Disamping itu untuk pelajaran dari pantai kepantai dalam daerah dipakai pada pelabuhan Muaro (Padang), Pariaman, Sasak dan Painan.

Antara Muaro dan Teluk Bujur diadakan pelajaran tetap dengan pantai-pantai dikepulauan Mentawai.

Sekadar bajangan, dibawah ini diturunkan daftar banjaknja kapal-kapal/tongkang-tongkang jang menjinggahi pelabuhan-pelabuhan dipesisir timur Sumatera Tengah pada bulan **November 1952**.

1. Selt. Pandjang	20 bh.	10.413.49	3.675.96	259 bh.	7.913.24	2.793.37
2. P. Baru	21 „	10.274.25	—	43 „	779.16	—
3. Kuala Tungkal	20 „	7.993.94	—	98 „	4.701.63	—
4. Rengat	10 „	12.692.13	4.480.32	—	—	—

Dari pelabuhan Djambi dibandingkan dengan dipelabuhan Kuala Tungkal, maka dapat dipastikan, bahwa kapal-kapal dari luar Negeri jang memasuki pelabuhan Djambi itu tidak akan

kurang dari 30 buah. Meskipun Djambi letaknya jauh dari Muara Sungai Batang Hari, tapi pelabuhan ini menjadi salah satu penghasil devisa negara yang terpenting.

Pelabuhan Teluk Bajur merupakan salah satu pelabuhan yang besar dan ramai di pulau Sumatera; dapat dibayangkan sendiri bahwa diantara 9834,815 ton export „regim Deviezen” pada bulan November 1952, diexport oleh Teluk Bajur sebanyak 2034,692 ton, dan yang selebihnya diexport dari pelabuhan-pelabuhan pesisir timur Propinsi Sumatera Tengah.

Djadi, perhubungan dilautan antara daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan dalam dan luar negeri pada umumnya berjalan dengan pesat meskipun baru pada tingkat minimum.

Perhubungan di udara.

Selain dari alat perhubungan didarat dan dilaut, perhubungan dapat juga dilakukan dengan kapal udara, maka oleh G.I.A. biasanya perhubungan dilakukan untuk keluar Sumatera Tengah seperti Palembang, Medan, Djakarta dan lain-lain.

10.	B. Tinggi — Medan B. Tinggi — Medan B. Tinggi — Medan B. Tinggi — Medan B. Tinggi — B. Sangkar	A.D.L.M. Kingsong Sibual-buall Martumbaog C.U. Kita P.O. Gab. Padri	Lepap Lim Hong Poan — T. Tambunan M. Jusuf Harahap Ramli Hadi	Sibolga — — Tarutung Medan Pd. Pandjang	Frequentie achir 1952, 80½%. Frequentie achir 1952, 66%. Frequentie achir 1952, 78½%. Frequentie achir 1952, 86½%. Frequentie achir 1952, 77%. Frequentie achir 1952, 65%. Frequentie achir 1952, 75½%.
11.	B. Tinggi — L. Basung B. Tinggi — L. Basung B. Tinggi — Palumbaian	P.O. Gab. A.P.D. P.A. Teratai P.O. Gon	Leman St. Kajo Dt. Sidi Radjo Anwar By	Pd. Pandjang B. Tinggi —	—
12.	B. Tinggi — Matur	P.O. Gon	Anwar By	B. Tinggi	—
13.	Pajakumbuh — Padang Pajakumbuh — Padang Pajakumbuh — B. Sangkar	P.O. Gab. Sago M. Agam Gab. Padri	Zubir St. L. Alam Lepap Ramli Hadi	Pajakumbuh Padang Pd. Pandjang	—
14.	Padang — Tl. Bajur Padang — Tl. Bajur Padang — Tl. Bajur Padang — Indarung Padang — Indarung Padang — Indarung Padang — Tl. Kabung Padang — Tl. Kabung Padang — Pinaan Padang — Pinaan Padang — Siguntur Padang — Tarusan Padang — Tarusan Padang — Tarusan Padang — Tarusan Padang — Sei Penuh Padang — Sei Penuh	F.A. Selamat N.V. Atom N.V. Plastik F.A. Selamat N.V. Atom F.A. Selamat P.O. Andalas N.V. Atom F.A. Selamat P.O. A. Sentosa N.V. Atom F.A. Tosra P.O. A. Sentosa F.A. Safko N.V. Atom F.A. Tosra F.A. Tobas N.V. Atom	Rusli St. Bandaro Siauw Pek Tjoan Rusli St. Bandaro Buin B. Bungsu Siauw Pek Tjoan Rusli St. Bandaro Ong Tian Sun Siauw Pek Tjoan Basjar Hasjim Basjar Hasjim Ong Tian Sun Aminuddin Djam H. Abd. Munaf H. Abd. Munaf Siauw Pek Tjoan	B. Tinggi Padang Padang B. Tinggi Padang B. Tinggi Padang Padang Painan Painan Padang Painan Painan Padang	Frequentie achir 1952, 67%. Frequentie achir 1952, 62%. Frequentie achir 1952, 61%. Frequentie achir 1952, 55½%. Frequentie achir 1952, 61%.
15.	Padang — Sei Penuh Padang — Sei Penuh Padang — Sei Penuh Padang — Sei Penuh	P.O. Plastik P.O. Gon P.O. Andalas M.E. Agam	Siauw Pek Tjong Buin B. Bungsu Lepap	Padang Padang Padang	—

		Nama Perusahaan	Pemimpin Perusahaan	Tempat kedudukan	Dilajani dengan berapa oto	Keterangan lain-lain
18.	Padang — Indarung					
23.	Padang — Sei Penuh Padang — Sei Penuh Padang — M. Labuh Padang — M. Labuh Padang — M. Labuh Bk. — Tg Labuh	P.O. Gasti Tosra P.O. A. Sentosa F.A. Selamat G. Merah P.O. A.D.K. Gab. A.P.D.	Oei Ho Tjeng Basjar Hasjim Oei Tian Sun Rusli St. Bandaro Zakir Muluk A. Karim Leman St. Kajo	Padang Painan Padang B. Tinggi Solok Padang Pd. Pandjang	— — — — — —	Frequentie achir 1952, 59%. Frequentie achir 1952, 51%.
24.	Padang — Solok Padang — Solok Padang — Solok	P.O. G. Merah P.O. Andalas Gab. A.P.D.	Zakir Muluk Bunt B. Bungsu Leman St. Kajo Ramli Hadi Leman St. Kajo	Solok Padang Pd. Pandjang Pd. Pandjang Pd. Pandjang	— — 4 —	Frequentie achir 1952, 75%. Frequentie achir 1952, 67½%.
25.	Padang — B. Sangkar Padang — B. Sangkar	Gab. Padri Gab. A.P.D.	Bahaudin B.S. Zakir Muluk Leman St. Kajo Ramli Hadi	Pd. Pandjang Solok Pd. Pandjang Solok	— — — —	Frequentie achir 1952, 80½%.
26.	Padang Sw. Lunto Padang Sw. Lunto	N.V. Atom N.V. N.P.M.			—	Frequentie achir 1952, 87½%.
27.	Padang — M. Tebo Padang — M. Tebo	F.A. G. Merah Gab. A.P.D.			—	Frequentie achir 1952, 65%.
28.	Solok — M. Tebo	G. Merah			—	Frequentie achir 1952, 71%.
29.	P. Pandjang — B. Sangkar P. Pandjang — B. Sangkar	Gab. Padri Gab. A.P.D. P.O. Plastic	Leman St. Kajo	Pd. Pandjang Pd. Pandjang	— —	Frequentie achir 1952, 57%.
30.	Padang — L. Alung				—	
31.	Padang — Pariaman Padang — Pariaman Padang — Pariaman Padang — Pariaman	P.O. Samudera P.O. Nusantara M.E. Agam P.O. Pesisir Sebatang Pandjang	Abd. Aziz Lepap —	Padang — Padang —	— — — —	Frequentie achir 1952, 57%.

Pasal 39.

PERTAMBANGAN DI SUMATERA TENGAH.

DAERAH Sumatera Tengah selain dari menghasilkan berbagai matjam hasil hutan dan berdjenis ikan dari lautnja, djuga dari dalam buminja banjak mengeluarkan zat dan benda jang berharga seperti minjak, bauxit, emas, perak, batu bara, timah dan lain-lain.

Pertambangan ini kebanyakan dilakukan oleh maskapai partikular asing, hanja tambang batu bara Sawah Lunto jang diusahakan oleh Pemerintah. Menurut keadaan tahun 1928, hampir pada seluruh Kabupaten di Sumatera ini, diberikan tanah-tanah konsessi kepada kongsi partikular asing oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Adapun maskapai jang beruntung mendapat konsessi dan masih terus mendjalankan usahanja sampai waktu ini ialah:

1. *Tambang minjak* jang diusahakan oleh maskapai N.I.A.M. (Nederlands Indise Aardolie Maatschappij). Tanah konsessi ini terletak di Badjubang, Tempino, Kinali Asam, Muara Senami dan Tebo Ubi, semuanya didaerah Kabupaten Batang Hari.

Tambang ini diusahakannya semendjak tahun 1922 dengan kontrak sampai tahun 1995. Pada sebelum perang mengeluarkan hasil sebanjak 4000 kg ton setiap 24 djam dengan djumlah boringnja (sumur minjak) 360 buah. Minjak ini tidak dimasak di Djambi, tapi dipompa ke Pladju (Palembang) melalui pipa jang pandjangnja 300 Km.

Maskapi ini memakai tenaga pekerdja sebanjak $\pm$ 1338 orang.

2. *Tambang minjak* jang diusahakan oleh S.V.P.M. (Standard Vacuum Petroleum Mij.). Daerahnja terdapat di Malembung Kabupaten Kampar, Pelalawan Bunut di Kabupaten Bengkalis dan Lirik di Kabupaten Indragiri.
3. *Tambang Minjak* jang diusahakan oleh C.P.P.M.: (Caltex Pacific Petroleum Maatschappij). Daerahnja terdapat di Sei Rumbai, Sei Pakning dan Minas di Kabupaten Kampar dan Bengkalis. Maskapai ini menggiatkan usahanja semendjak sesudah pemulihan, dan sudah dilengkapi dengan alat-alat modern dan kapal tangki.

Dewasa ini dia memakai buruh sebanjak $\pm$ 1678 orang.

4. *Tambang Bauxit* terdapat di G. Kidjang, Pulau Bintan di Kabupaten Kepulauan Riau jang diusahakan oleh N.V. Billiton Mij.
 5. *Tambang Timah* di Dabu, Pulau Singkep di Kabupaten Kepulauan Riau jang diusahakan oleh N.V. Sitem dengan tenaga buruh 1557. orang.
 6. *Tambang Batu-bara* di Sawah Lunto Kabupaten Sawah Lunto Sidjundjung jang diusahakan oleh Pemerintah, dengan tenaga buruh 1557 orang.
 7. *Tambang Mas* di Sei. Alai Kabupaten Solok jang diusahakan oleh Redjang Lebong Mij. dengan memakai tenaga buruh sebanyak 3005 orang.
- Selain dari jang disebutkan diatas, banjak lagi tanah-tanah konsessi jang sudah diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada bermatjam-matjam maskapai partikular asing jang belum mengeluarkan hasil.

Disamping itu ada lagi tambang-tambang jang pada zaman sebelum kemerdekaan sudah mengeluarkan hasil, tapi kemudian ditutup, seperti tambang mas Manggani di Kabupaten Lima Puluh Kota, tambang mas di Salido dan Salido Ketjil di Kabupaten Pesisir Selatan, Kerintji.

Pasal 40.

SUMATERA TENGAH DENGAN PERKEBUNAN BANGSA ASING (CULTUUR BEDRIJVEN).

BUKIT barisan jang membentang dari Utara ke Selatan pulau Sumatera bahagian Barat, bertitik pusat didaerah keresidenan Sumatera Barat, Propinsi Sumatera Tengah. Sebahagian besar diantara gunung-gunung jang tertinggi dipulau Sumatera, djuga terdapat didaerah keresidenan Sumatera Barat Propinsi Sumatera Tengah ini, jang tertinggi diantara semuanja gunung Kerintji, dan jang paling aktif bekerdja gunung Merapi.

Berkat adanja gunung-gunung dan bukit-bukit barisan ini, Sumatera Barat merupakan suatu daerah jang tersubur tanahnja diseluruh kepulauan Indonesia dan dalam hal bahan makanan daerah ini dapat menghasilkan kebutuhannja sendiri. Dalam menghasilkan bahan makanan ini, penduduknja kadang-kadang dapat djuga menamakan daerahnja ini dengan „God's own Country.”

Kesuburan tanah-tanah didaerah Propinsi Sumatera Tengah ini pada umumnja adalah berkat banjak dan tebalnja bahan-bahan pegunungan (vulkanische materiaal) jang menjelimuti permukaan tanahnja jang berbukit-bukit itu. Alluviaal, graniet dan andesiet jang menjelimuti dataran-dataran tinggi daerah pegunungan Kerintji Utara dan Selatan, menjebakkan tanah ini amat tjotjok untuk ditanami dengan bahan-bahan export seperti teh, kina, kopi dan lain-lain, disamping hasil bumi jang diusahakan oleh rakjat untuk bahan makanan, terutama padi dan sajur majur.

Turunnja hudjan dari tahun ketahun jang sangat teratur didaerah pegunungan ini, jang menjebakkan sangat sedikitnja perbedaan antara musim kering dengan musim basah, djuga mendjadi salah satu bahan untuk penambah kesuburannja dan menambah besar berkahnja. Menurut tjatatan, daerah pegunungan Kerintji ini termasuk kepada „regentype ke-VIII”.

Pertukaran musim (kentering-maxima) didaerah pegunungan Kerintji bagian Utara jang terdjadi pada bulan April dan Oktober/ Nopember tiap tahun, memungkinkan daerah ini mendjadi leverancier hasil bumi jang tidak berhingga, apalagi dia mempunjai kadar-mineraal-reserve jang sangat tinggi.

Begitupun dengan daerah-daerah pegunungan Talang (Kabupaten Solok/Sawah Lunto) yang mempunyai kadar mineral-reserve yang juga tidak kurang banyak dan tingginya. Teh dan kopi yang dihasilkan dari bumi daerah dataran tinggi pegunungan ini mempunyai nilai yang tertinggi di daerah Sumatera Tengah.

Dataran-dataran tinggi daerah pegunungan Ophir (Kabupaten Pasaman), Pegunungan Sago (Kabupaten Lima Puluh Kota) dan pegunungan Merapi (bahagian wilayah Kabupaten Tanah Datar dan Agam), merupakan tanah-tanah pertanian yang sangat subur, disamping tanah-tanah pegunungan Singgalang (Kabupaten Agam).

Belum seluruh tanah-tanah pertanian daerah-daerah tinggi pegunungan-pegunungan ini yang telah diusahakan dan diolah oleh tangan manusia, terutama karena sangat sedikitnya tenaga yang dapat dipakai untuk itu. Sebahagian besar diantaranya masih diselimuti oleh rimba-rimba tjadangan dan rimba-rimba liar, disamping lebarnya „rimba larangan” atau hutan simpanan.

Meskipun tjtjah djiwa penduduk Sumatera Tengah pada saat ini mendekati angka 4 djuta djiwa, tapi tenaga yang sebanyak itu masih belum dapat memenuhi kebutuhan buminya yang harus dibuka dan diusahakan untuk mendjamin kemakmuran bangsa.

Jang ditinggalkan oleh siasat „pintu terbuka”.

Siasat „pintu terbuka” (opendeur-politiek) yang didjalankan oleh bekas Pemerintahan Hindia Belanda pada permulaan abad ke-20 ini untuk seluruh kepulauan Indonesia, menjebabkan daerah Propinsi Sumatera Tengah mendjadi salah satu sasaran bangsa asing untuk menanam modalnya. Penanaman modal oleh bangsa asing ini tidak hanya meliputi penambangan logam dan mineral (mijnen-bouw) semata, tetapi djuga tidak kurang pula besarnya didalam lapangan pertanian (cultuur-bouw).

Meskipun pengaruh modal asing dalam lapangan perusahaan tanah ini tidak terlampau terasa sebagai apa yang dirasakan dipulau Djawa dan di daerah Propinsi Sumatera Utara, tetapi „recht van erfpacht” yang diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda itu djuga tidak sedikit merebut bumi Sumatera Tengah ini dari tangan yang harus memilikinya.

Menurut apa yang dilaporkan oleh Djawatan Pertanian Propinsi Sumatera Tengah pada tahun 1950, tidak kurang dari 68.623.429.85 ha. tanah-tanah pertanian di daerah Propinsi Sumatera Tengah yang dipunyai oleh perkebunan bangsa asing (groot-landbouw-bedrijf). 34.84% (249.853.750 ha.) diantara tanah itu sudah diusahakan dan mengeluarkan hasil semendjak sekian lama. Tanah-tanah tersebut diatas sebagai diterangkan tadi hanya merupakan erfpacht-perceel untuk tanah-tanah pertanian, belum lagi disebut percelen dalam lapangan pertambangan.

Dilihat dari sudut „tanah”, mungkin orang akan merasakan banjak kerugian-kerugian yang disebabkan karena adanya erfpacht-perceel yang seluas itu, tapi orang juga mengakui adanya perkembangan kemakmuran dari hasil-hasil bumi yang dikeluarkan dari padanja.

Dari itu, untuk meluaskan tindjauan mengenai perkebunan bangsa asing didaerah Propinsi Sumatera Tengah ini, kita juga harus dapat menindjau productiviteit dari tanah-tanah pertanian erfpacht itu.

Menurut tjatatan, sampai hari ini, didaerah Propinsi Sumatera Tengah terdapat tidak kurang dari 33 buah perkebunan bangsa asing. 22 buah diantaranya terdapat didaerah keresidenan Sumatera Barat, jaitu percelen yang ditanami dengan berbagai matjam hasil bumi.

Tjatatan lengkap dari tanah-tanah perceel ini, dapat dilihat dari daftar yang disalinkan sebagai dibawah ini:

No.	Nama kebun	Ditanami dengan	Luas erfpacht	Prosentage jg. productief
1.	Halaban	Teh	10.721.506	55.14
2.	Ophir		135.678.138	36.05
3.	Merapi		2.855.632	49.00
4.	Bunga Kaju		14.831.685	?
5.	Tandikat Lama		4.691.386,5	53.07
6.	Tandikat Baru		3.546.505	71.42
7.	Anai Duku		4.377.808,5	30.75
8.	Bukit Gompong		8.417.572	42.12
9.	Taluk Gunung		10.538.302,5	24.00
10.	Akar Gadang		5.088.190,5	15.07
11.	Pinang/Awan Ulu Bangko		25.443.791	43.04
12.	Pecconina		7.095.804,5	79.06
13.	Huberta		10.481.530,5	57.04
14.	Liki		30.138.725,5	20.61
15.	Rumah Sakit Timbulun		78.061,5	—
16.	Bukit Malintang		18.144.331	23.01
17.	Kaju Aro		85.831.697	30.11
18.	Sako Dua		8.537.089,5	38.08
19.	Danau Gadang		66.447.987	56.04
20.	Batang Merangin		37.448.220	15.78
21.	Sungai Aur		9.722.205	15.04
22.	Timbarau		10.968.129	28.08

No.	Nama kebun	Ditanami dengan	Luas erfpacht	Prosentage jg. productief
23.	Okura	Kelapa Sawit	12.790.000	100.—
24.	Suka Djadi	Karet	12.310.000	74.08
25.	Balai Kajang	Karet	8.400.000	100.—
26.	Pasir Djambu	Karet	5.000.000	100.—
27.	Djapura	Karet	23.000.000	43.01
28.	Kelawat	Karet	5.280.000	93.09
29.	Sungai Lala	Karet	15.300.000	65.08
30.	Sungai Parit	Karet	12.380.000	32.01
31.	Gading & Air Molek	Karet	55.060.000	47.03
32.	Sungai Sago	Karet	29.080.000	42.02
33.	Air Putih	Karet	6.000.000	82.05
Djumlah			686.234.298,5	34.84

Apa jang dihasilkan oleh erfpacht-percelen itu.

Sebagai terlihat dari daftar tersebut diatas, tanah-tanah erfpacht di Sumatera Tengah ditanami dengan berbagai hasil bumi bahan export jang pada saat ini banjak menghasilkan devizen. Dan karena perkebunan-perkebunan itu terletak diberbagai dataran tinggi pegunungan, maka hasil dan mutu-mutu dari barang jang dihasilkan itu tidak sama keadaannya.

Sebelum kita membitjarakan mutu-mutu dari penghasilan tanah itu, lebih dahulu haruslah diketahui, bahwa hampir seluruh erfpacht perceel di Sumatera Barat pada mulanja ditanami dengan kopi oleh pemilik-pemiliknja. Tapi, karena pada permulaan tahun 1924, dilakukanlah penggantian tanaman dengan pesat sebagai akibat dari kurang memuaskannya harga kopi jang dihasilkan, dan ditambah pula dengan berkembangnja penjakit-penjakit kopi didaerah ini. Kedua faktor tersebut diatas menjejabkan berkembangnja penanaman teh dan kina didaerah keresidenan Sumatera Barat.

Tapi hal ini bukanlah menjatakan, bahwa penanaman teh di Sumatera Barat dilakukan mulai tahun 1924 itu. Menurut keterangan jang diperoleh, teh jang mula-mula ditanam dipulau Sumatera, ditanam dikebun Akar Gadang dalam tahun 1903 dan kina dikebun Taluk Gunung pada tahun 1907.

Dan karena merosotnja mutu dan harga kopi dan hasil-hasil bumi jang diusahakan sebelum tahun 1924 itu, maka penukaran dilakukan dengan giat kepada teh dan kina ini.

Dibawah ini diturunkan sebuah daftar berkenaan dengan hasil-hasil bumi jang ditanam dan diusahakan, bersama dengan tanah erfpacht jang dipakai tiap-tiap matjamnja.

1. teh	:	5.473.925 ha.	21.90%
2. kina	:	1.499.160 „	5.99%
3. akar tuba	:	202.— „	0.81%
4. kelapa sawit	:	5.750.50 „	23.00%
5. kopi	:	831.— „	3.32%
6. karet	:	11.165.28 „	44.66%
7. kulit manis	:	62.51 „	0.31%
8. kelapa	:	1.— „	0.01%

Djumlah	:	24.985,375 ha.	100.—%
---------	---	----------------	--------

Meskipun sebagian terbesar dari tanah-tanah erfpacht itu ditanami dengan getah (karet), tapi penanaman ini dilakukan bukan didaerah dataran tinggi pegunungan sebagai iklim jang disukai oleh tanaman itu. Kebanyakan diantara kebun-kebun karet ini didapati didaerah-daerah keresidenan Riau dan Diambi, jaitu dibagian sebelah Timur daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Sekarang marilah kita tindjau object-object cultuurbedrijf itu satu persatu.

Perkebunan teh di Sumatera Tengah.

Perusahaan penanaman teh ini pada umumnja masih merupakan tingkat permulaan karena sangat muda umurnja.

Dibandingkan dengan „cultuur-bedrijven” lainnja, perusahaan penanaman teh itu djauh lebih muda dari perusahaan penanaman kopi.

Berkat pengalaman-pengalaman dan peladjaran-peladjaran baik jang diperdapat dari perusahaan-perusahaan teh didaerah lain (Djawa dan Sumatera Timur), maka opzet hasil penanaman di Sumatera Barat itu dapat mentjapai tingkat jang tinggi dan memuaskan.

Meskipun pengluasan perkebunan teh itu selandjutnja terhalang oleh karena adanya „Thee Aanplant Ordonnantie, Stbld. 1933 No. 22-”, guna mempertahankan harga teh dipasar dunia, tapi produksi teh dari Sumatera Barat tidaklah terlampau bergantung kepada adanya ordonansi itu.

Mengenai areaal penanaman teh di Sumatera Barat, diterangkan bahwa rata-rata perkebunan itu meliputi 660 ha. sementara dipulau Djawa hanya mentjapai 350 ha. Dan hasil rata-rata mentjapai ± 450 ton, sedang dipulau Djawa tjuma ± 165 ton.

Diantara 15 buah perkebunan teh di Sumatera Barat, 5 buah diantaranya mentjapai produksi kelas I, 3 buah kelas II, 4 buah kelas III, sebuah kelas IV dan dua buah kelas V. Menurut perbandingan itu, diantara 211 buah perkebunan teh di Djawa Barat, 14 buah diantaranya mentjapai produksi kelas I, 13 buah kelas II, 19 buah kelas III, 44 buah kelas IV, 70 buah kelas V dan 51 buah kelas VI.

Daftar dibawah ini menggambarkan besarnya produksi dan kelas produksi teh itu dari perkebunan-perkebunan teh di Sumatera Barat, dari mana orang dapat membayangkan hasil produksi seluruhnya.

Nama kebun	hasil per ha.	kelas produksi
Bukit Malingang	1.720 kg.	III
Danau Gadang	2.500 ..	I
Halaban	1.615 ..	III
Huberta	1.700 ..	III
Kaju Aro	2.525 ..	I
Pecconina	2.024 ..	II
Sako Dua	2.825 ..	I
Tanang Talu	982 ..	V

Semendjak tahun 1934, seluruh perkebunan teh di Sumatera Barat sudah memberikan hasil.

Tapi karena beberapa kekurangan mengenai „cultuur-technis”, beberapa areaal diantaranya dibiarkan „beristirahat” buat sementara.

Perkebunan kopi.

Menurut keterangan Kielstra dalam bukunya „De koffiecultuur ter Westkust van Sumatera” (De Indische Gids tahun 1888), pada tahun 1877 didaerah Sumatera Barat terdapat sebanyak 17 buah perkebunan kopi partikelir yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha bangsa Belanda ditanah-tanah erfpacht. Menurut keterangannya selandjutnja, ke 17 buah perkebunan itu mengambil lapangan seluas 4300 bahu dan rata-rata mengeluarkan hasil sebanyak 7300 pikul kopi dalam setahun.

Perkembangan perkebunan kopi ini kemudian berdjalan dengan pesat, terutama karena adanya „dwang-cultuur” dari Pemerintah Hindia Belanda, sebagai alat untuk menampung merosot dan

mundurnja perusahaan-perusahaan kopi Pemerintah Hindia Belanda sendiri.

Dwang-cultuur itu mendjadi pendorong dalam memperlipat gandakan export kopi dari Sumatera Barat dalam waktu jang singkat karena beberapa faktor.

Faktor-faktor itu antara lain ialah:

- a. Karena mudahnja memperoleh tanah-tanah konsessi jang subur didekat tempat kediaman rakjat desa, dan dengan sendirinja mudah pula memperoleh tenaga-tenaga pekerdja dengan harga murah.
- b. Belum berdjangkitnja penjakit-penjakit kopi didaerah ini pada masa itu.
- c. Teraturnja djalan „cultuurtechnis”, dan
- d. Tingginja mutu dan banjaknja hasil jang dapat dipungut.

Mengenai djenis kopi jang dihasilkan dari Sumatera Barat, diterangkan, bahwa pada taraf pertama jang diusahakan, ialah kopi Arabica. Tapi djenis ini tidak berapa tahan menangkis serangan penjakit „daun kopi”, meskipun hasilnja memuaskan. Kopi „Arabica” ini berangsur-angsur diganti dengan kopi „Liberia” jang menurut penjelidikan lebih tahan menderita penjakit, meskipun agak kurang mengeluarkan hasil.

Dengan setjara kebetulan, pada tahun 1900 didapati orang sedjenis bibit baru, jaitu kopi „Robusta”, jang dalam segala hal mempunyai mutu jang djauh lebih tinggi dari kopi „Liberia” tadi. Dari itu tidaklah mengherankan bila dalam waktu jang tidak terlalu lama Robusta ini mengambil lapangan jang djauh lebih besar dari kopi-kopi lainnja. Pada tahun 1905, lebih dari 90% dari seluruh perusahaan perkebunan kopi di Sumatera Barat ditanami dengan kopi Robusta, sedangkan kopi Arabica hanja tinggal lagi 5% dan kopi Liberia hanja 1% sadja.

Karena besarnya pengaruh hawa dan iklim terhadap bunga dan buah kopi dalam segala musim, maka penghasilan kopi ini menempuh keadaan turun naik, meskipun luas penanamannja mempunyai garis jang lurus.

Karena mengalami krisis dan beberapa akibat lain sesudah Perang Dunia I, maka perusahaan-perusahaan kopi itu achirnja menderita zaman kemundurannja. Produksi dan konsumsi kopi dunia jang tidak berimbangan lagi, menjebakkan lapangan ini mendjadi sangat sepi dan banjak diantara kebun-kebun itu terpaksa menutup atau mengganti usahanja dengan jang lain. Tindakan jang „radikal” dari Pemerintah Brazilia pada tahun 1937, jaitu dengan djalan memusnahkan dan membakar sebahagian besar dari persediaan kopinja, merupakan salah satu tjontohn betapa buruknja nasib jang dialami oleh perusahaan kopi pada waktu itu.

Kepada perusahaan kopi di Indonesia akibatnja lebih buruk lagi karena pada tahun 1936 (tanggal 27 September) Pemerintah Belanda melepaskan standar emasnja dan harga kopi mendjadi tambah menurun lagi karenanja, sehingga tidak mungkin lagi dapat menutup perongkosan-perongkosan.

Sebagai tjontoh dapat dibayangkan, bahwa dalam tahun 1939, diantara 374 buah perkebunan kopi di Indonesia, hanja 94 buah sadja lagi jang meneruskan usahanja, dan jang 280 buah lainnja ditukar dan diganti dengan jang lain. Dan pada tahun itu, di Sumatera Barat hanja tinggal lagi sebuah sadja perkebunan kopi jang masih berdjalan, jaitu onderneming Batang Merangin, sementara onderneming Ophir didjadikan perusahaan kelapa sawit.

Onderneming Halaban didjadikan perusahaan teh.

- „ Taluk Gungu didjadikan perusahaan kina.
- „ Bukit Gompong didjadikan perusahaan kina.
- „ Pinang Awan didjadikan perusahaan kina.
- „ Pecconina didjadikan perusahaan teh.
- „ Liki didjadikan perusahaan karet.
- „ Timbarau dan Sandaran Agung ditutup.

Kelapa sawit.

Sebagai diketahui, sebahagian besar dari perusahaan penanaman kelapa sawit di Indonesia 98,08% terdapat dipulau Sumatera 90% dari penanaman di Sumatera itu, mengambil tempat didaerah Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini, Sumatera Tengah hanja mengambil tempat sebesar 2,5% dari semua jang dapat dihasilkan oleh seluruh kepulauan Indonesia.

Dibandingkan dengan penghasilan teh dan kopi, maka perusahaan penanaman kelapa sawit ini tidaklah begitu mengambil lapangan jang terpenting di Sumatera Tengah.

Di Sumatera Tengah hanja terdapat 4 buah perkebunan kelapa sawit, jaitu 3 buah didaerah Riau dan sebuah di Sumatera Barat (onderneming Ophir).

Jang terbesar diantara perkebunan dan perusahaan di Sumatera Tengah itu ialah perusahaan kelapa sawit di Gunung Melaju, (Pulau Raya-Riau), jang sebelum pendudukan Djepang djuga sudah mengeluarkan hasilnja dan disamping itu sudah mempunjai perlengkapan pembikinan minjak jang sempurna. Ketiga buah perkebunan jang lain pada waktu itu masih sibuk dalam mempersiapkan alat-alat dan mesin-mesin pemeras dan penjarangan minjaknja. Ketiga buah perkebunan jang lain, jaitu Pasir Djambu dan Okura di Riau dan Ophir di Sumatera Barat tidak seluruhnja ditanami dengan kelapa sawit, tapi disamping itu djuga ditanami dengan tanaman jang lain, terutama dengan getah.

Waktu pendudukan Djepang, kebun kelapa sawit Gunung Melaju sudah dapat menghasilkan sebanyak 347.548 kg. minjak dalam setahun dan hasil ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kebutuhan didalam daerah sadja.

Karet (getah), kelapa dan lain-lain.

Bahwa getah mengambil kedudukan jang sangat penting didalam penghidupan di Sumatera Tengah, hal ini sudah diketahui oleh umum. Terutama didaerah-daerah keresidenan Djambi dan Riau, penghasilan karet tidak dapat dipisahkan dari pokok penting dari penghidupan rakjat disana. Kota Djambi dan Rengat merupakan kota pelabuhan untuk meng-export getah jang teramai di Sumatera Tengah. Djuga Teluk Bajur dan Pakan Baru merupakan pelabuhan-pelabuhan jang sibuk dengan penumpukan dan pengiriman-pengiriman getah jang berasal dari perkebunan getah rakjat.

Sesuai dengan iklim daerah pegununganja, Sumatera Barat tidaklah mengambil kedudukan jang dapat menjamai daerah-daerah Djambi dan Riau dalam menghasilkan getah ini. Hal ini dapat diketahui, bahwa areaal penanaman getah bangsa asing didaerah Sumatera Barat hanya sebesar 300 ha. rata-rata, sementara didaerah Riau mentjapai luas 900 ha. rata-rata, tiap-tiap perkebunan. Disamping sedikitnja perhatian perusahaan besar-besar dalam lapangan perkebunan getah di Sumatera Barat ini, djuga perhatian rakjat tidak pula begitu besar, selain dari dibeberapa daerah jang banjak dan mudah perhubungan lalu lintas disungai.

Menurut tjatatan, diantara 117 buah tanah erfpacht perceel besar ketjil jang terdapat di Sumatera Tengah, lebih dari 80 buah diusahakan sebagai perkebunan karet. Dan hanya sebanyak 7 a 8 buah sadja jang terdapat didaerah Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena tanah jang dipakai untuk penanaman getah ini agak kurang kesuburannja. Begitupun banjaknja penjakit karet jang dialami oleh perkebunan-perkebunan karet bangsa asing, menjebakkan perhatian untuk memperluas penanaman getah ini mendjadi semakin kurang djuga.

Untuk memperendah exploitatie-kosten perkebunan-perkebunan karet bangsa asing di Sumatera Barat itu, maka pada tahun 1938 ditjoba mereka beberapa usaha jang dirasa akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dan dapat mentjapai hasil sebagai perkebunan-perkebunan didaerah Riau dan Djambi. Diantara usaha itu, ialah dengan djalan mengganti tanaman itu setjara berangsur-angsur dengan bibit baru jang bermutu tinggi, merobah opzet pabriknja agar sesuai dengan produksi jang akan datang, serta mendatangkan pekerdja-pekerdja, terutama tukang-tukang sadap (tappers) jang berpengalaman.

Dengan djalan demikian, maka pada tahun 1942, penukaran pohon-pohon getah itu dengan cloonen jang bermutu tinggi itu

sudah dapat dilaksanakan, begitupun dengan pemasukan tenaga-tenaga yang berpengalaman. Tapi penukaran opzet pabrik tidak segera dapat mereka selenggarakan karena sangat mendadak terdajinja Perang Dunia II.

Karena dalam bahagian ini kita hanya membitjarakan perkebunan-perkebunan bangsa asing, jaitu perkebunan-perkebunan diatas tanah konsessi, maka berkenaan dengan perkebunan rakjat telah dibitjarakan dalam ruangan yang khusus untuk itu. Dan sebelum kita menindjau perkembangan-perkembangan perkebunan ini dalam berbagai segi, baik dalam zaman pendudukan Djepang, maupun dizaman clash pertama dan kedua, marilah kita achiri pasal ini dengan sepiantas lalu membentangkan keadaan perkebunan kelapa dan akar tuba serta kulit manis.

Menurut persentase, hanya 0,01% sadja diantara erfpacht percelen yang ditanami dengan kelapa oleh pemiliknja, jaitu seluas 1 ha. Akar tuba dan kulit manis mempunjai lapangan dan kedudukan yang djauh lebih luas dari kelapa ini, jaitu 0,81% (202 ha.) bagi akar tuba dan 0,31% (62,51 ha.) bagi kulit manis.

Dari itu, maka tidaklah banjak yang akan dibitjarakan dengan penanaman pohon kelapa ini, karena hampir seluruhnja berada ditangan rakjat, apa pula kedudukannja dalam lapangan per-ekonomian rakjat agak terbatas pula dibandingkan dengan getah, kopi dan sebagian. Meskipun kopra merupakan suatu sumber devisen yang terpenting djuga bagi Negara, tapi perhatian terhadap perusahaan yang lebih sempurna dan teratur dari kalangan rakjat kearah ini nampaknja berdjalan dengan agak lembek sehingga tidak tampak kemadjuan-kemadjuannja.

Penanaman akar tuba di Sumatera Barat oleh perkebunan bangsa asing hanya baru merupakan penanaman pertjobaan sadja, tapi nampaknja untuk hari depan mempunjai aspect yang besar untuk daerah ini.

Dan penanaman kulit manis yang dilakukan sebagai tanaman selingan oleh berbagai pengusaha perkebunan teh di Sumatera Barat, nampaknja terutama ditudjukan kepada menghambat long-sornja tanah-tanah perkebunan-perkebunan teh yang dihanjutkan air hudjan.

Terutama diperkebunan-perkebunan teh yang banjak mempunjai djurang-djurang dan lembah-lembah, maka penanaman kulit manis ini mendapat perhatian yang lebih besar lagi.

Demikianlah pandangan sepiantas lalu berkenaan dengan bahan-bahan export yang diusahakan oleh perkebunan-perkebunan bangsa asing di Sumatera Tengah, jaitu perkebunan-perkebunan yang dibangunkan diatas beratus ribu ha. tanah konsessi yang merupakan erfpacht-percelen.

Untuk mentjukupkan pokok tindjauan, marilah kita perhatikan pula soal-soal lain yang mendjadi modal penghasil selandjutnja. Untuk ini baiklah kita tindjau lebih dahulu soal:

Perburuhan (tenaga).

Melihat banjak dan luasnja tanah erfpacht jang diusahakan oleh bangsa asing itu, dapatlah dibayangkan bahwa untuk ini diperlukan tenaga berpuluh ribu pekerdja (tenaga-tenaga).

Sebelumnja tahun 1924, jaitu sebelum dibukanya perkebunan-perkebunan besar seperti sekarang di Sumatera Tengah, pada umumnja pekerdja-pekerdja ini terdiri dari penduduk asli.

Hal ini disebabkan karena pada waktu itu perkebunan-perkebunan bangsa asing itu hanja ditanami kopi, tjengkeh dan kulit manis dan percelen ini berdampingan erat dengan tanah-tanah jang diusahakan sendiri oleh rakjat desa (seperti onderneeming teh „Halaban” sekarang).

Dari itu maka pemilik-pemilik dan pengusaha-pengusaha dengan mudah memperoleh tenaga pekerdja. Dan djumlah pekerdja ini dapat pula dibatasi demikian rupa, disebabkan karena beberapa faktor, jaitu:

- a. Pembukaan tanah baru dilakukan dengan tjara berangsur-angsur.
- b. Fabrikasi dari penghasilan masih sangat sederhana, dan tidak memerlukan tenaga-tenaga ahli.
- c. Berhubung dengan kesuburan tanah, maka pemeliharaan tanaman dan pengolahan tanah tidak begitu diperlukan,
- d. Tanaman, seperti kopi dan tjengkeh merupakan „seizoenbloeiers” (Tanaman jang hasilnja dipungut pada musim tertentu), maka pemakaian tenaga tetap tidak begitu dipentingkan.

Kemudian, setelah terdjadi perubahan-perubahan besar mengenai perkebunan bangsa asing itu, maka faktor-faktor tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Hal ini disebabkan karena: turunnja harga kopi dan penguasa-penguasa penanaman ini sama membongkar pohon kopinja dan menggantinya dengan teh, kina dan kelapa sawit. Penggantian ini djuga mendorong mereka untuk membuka tanah-tanah baru.

Perlombaan membuka tanah baru dan pembaharuan tanaman pada perkebunan-perkebunan lama, membutuhi tenaga-tenaga jang lebih terikat dan tetap. Pekerdja jang terdiri dari penduduk asli seperti selama ini, tidak dapat dipakai lagi, karena beberapa sebab diantaranya:

- a. Letaknja perkebunan-perkebunan jang baru dibuka itu djauh dari pusat masyarakat desa. Dan karena tidak adanja suatu sjarat jang mengikat pekerdja-pekerdja itu, untuk tetap berada pada tempatnja bekerdja, maka pengusaha-pengusaha tidak merasa terdjamin atas kesempurnaan usahanja.

- b. Keadaan physiologie rakyat penduduk asli daerah ini jang menurut pengalaman pengusaha-pengusaha itu tidak dapat dipaksa untuk bekerdja setjara teratur diperkebunan-perkebunan bangsa asing.
- c. Sukarnja memperoleh pekerdja-pekerdja jang dibutuhkan dan murah harganja, untuk keperluan pembukaan tanah baru, apalagi karena pembukaan ini dilakukan hampir serentak.

Dari itu, untuk memetjahkan kesulitan-kesulitan dan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ini, maka didatangkanlah tenaga-tenaga pekerdja dari pulau Djawa, jaitu tenaga-tenaga jang pada waktu itu dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Sudah tentu sadja pandangan dan penghargaan terhadap pekerdja-pekerdja, jang disebut dengan istilah „kuli kontrak” itu djauh lebih rendah dari pada pandangan dan penghargaan terhadap pekerdja-pekerdja selama ini (rakyat asli).

Keadaan pekerdja-pekerdja pada selama masa pendudukan Djepang.

Mungkin kurang perlu disini dibitjarkan betapa keadaan pekerdja-pekerdja perkebunan asing itu dizaman pendjadjahan Belanda, karena pengalaman-pengalaman dan penderitaan mereka akan bertjorak sama, bila kedudukan mereka djuga sama, jaitu sama-sama „kuli kontrak”. Walau diperkebunan mana djuga mereka dipekerdjakan, masjarakat kuli diperkebunan bangsa asing pada akhir zaman pendjadjahan Belanda, adalah masjarakat jang sangat bobrok, masjarakat kerdja-paksa jang disertai dengan siksa dan aniaja, masjarakat djiwa dan perasaan jang ditindas dan djasad dan tenaga jang diperas.

Betapa pula dizaman pendudukan Djepang?

Karena produksi perkebunan-perkebunan itu tidak dapat diexport lagi ke dunia luar sedang untuk kebutuhan dalam negeri sudah melebihi dari semestinja, maka nasib pekerdja-pekerdja perkebunan itu tidak sama sekali.

Selagi tentera Djepang masih dapat memperoleh tenaga-tenaga penduduk asli sebagai romusha, maka bekas-bekas kuli kontrak jang ditelantarkan itu, terpaksa mentjari pekerdjaan lain, karena tidak ada lagi sesuatu jang mengikat mereka pada pekerdjaan mereka jang lama. Dengan djalan demikian, maka mulailah terbuka djalan keluar. Mereka sekarang bekerdja sendiri, baik sebagai pekerdja-pekerdja jang menerima upah harian jang bekerdja dikebun-kebun dan disawah-sawah penduduk asli, maupun sebagai pekerdja bebas (kuli dikota-kota) dan lain-lain sebagainya.

Disamping itu tidak pula sedikit diantara mereka jang dipaksa untuk mendjadi romusha dan dikirim keluar negeri oleh pemerintah militer Djepang.

Tidak pula sedikit djumlahnja jang dikerahkan oleh Djepang untuk mengerdjakan pekerdjaan untuk keperluan bala-tentera Djepang. Dengan demikian maka njatalah sekarang bahwa sebahagian diantara keluarga mereka terpaksa pula mentjari djalan lain untuk mempertahankan hidup mereka.

Makanan jang tidak tjukup dan pakaian jang djauh dari sederhana dan tubuh jang tidak terpelihara dari serangan berbagai penjakit, merupakan warisan jang diterima oleh bekas pekerdja-pekerdja (kuli-kuli) jang terlindung dari penganiajaan langsung tentera Djepang. Mereka kehilangan semua, hilang penghargaan masjarakat dan hilang penghargaan pada diri sendiri.

Pada zaman permulaan N.R.I.

Mula-mula usaha untuk mempertinggi tingkat hidup bekas-bekas kuli kontrak itu, dilakukan dengan giat mulai bulan pertama diproklamasikannja Republik Indonesia. Tapi sudah tentu usaha itu tidak memadai dan tidak dapat meliputi semua kebutuhan.

Pengumpulan kembali bekas pekerdja-pekerdja itu ketempat pekerdjaannja semula, dilakukan dengan giat. Untuk mentjapai tudjuan perbaikan itu, usaha Pemerintah R.I. di Sumatera Barat terbentur kepada beberapa kesulitan, diantaranya:

1. Kerusakan-kerusakan jang dialami oleh perkebunan itu sendiri (dibongkar dsb.) selama peendudukan tentera Djepang, menjebabkan bahan-bahan produksi (tenaga dan alat) sudah tidak dapat menutup kerugian-kerugian dan beaja jang dikeluarkan untuk menjelenggarakannja.
2. Hasil jang masih dapat dipungut dari setiap perkebunan jang „tidak ditinggalkan“, tidak dapat di-export keluar negeri, karena ketatnya blokade tentera belanda dan produksipun tidak pula dapat dilakukan dengan tertentu (continue).
3. Tidak stabilnja perbandingan nilai upah dengan hasil pekerdjaan pekerdja, mendjadi salah satu sebab kekatjauan dalam lapangan perekonomian jang dialami pada waktu itu.

Dari itu, pada umumnja selama tahun pertama kemerdekaan N.R.I. kedudukan dan nasib kaum buruh jang sangat teraniaja ini masih belum berubah menurut semestinja.

Sungguhpun demikian mulai dari saat itu terbukalah suatu lapangan baru antara bekas pekerdja-pekerdja paksa dengan rakjat desa disekelilingnja, dan dalam berbagai lapangan hidup, diantara mereka mulai tumbuh saling mengerti dan butuh membutuhkan.

Dengan demikian, maka terbukalah kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bekerdja bersama-sama untuk membuka tanah perkebunan asing jang sudah lama tidak diurus itu mendjadi tanah perkebunan. Pembongkaran jang dilakukan dizaman pendudukan tentera Djepang, diperluas pada permulaan zaman kemerdekaan.

Pembongkaran itu tidak hanya mengenai penanaman bahan-bahan export jang dipandang sangat sedikit memberikan hasil dihari depan, tapi djuga mengenai penanaman bahan-bahan jang pada waktu dibeberapa tempat sangat dibutuhkan.

Dibawah ini kami salinkan sebuah daftar luas perkebunan bangsa asing di Sumatera Barat jang masih mungkin diusahakan menurut status tahun 1950.

Matjam tanaman	Dizaman pem. Belanda	Dibongkar Djepang	Luas jang ada
Teh	5.473.925 ha	376 ha	5097.925 ha
Kina	1.499.681 ..	115 ..	1384.681 ..
Getah	1.395.44 ..	— ..	1395.44 ..
Kelapa sawit	4.750.50 ..	— ..	4750.50 ..
Kopi	591.— ..	25 ..	566.— ..
Djumlah	13.710.546 ha	516 ha	13194.546 ha

Selanjutnja mengenai tenaga-tenaga pekerdja (buruh) pada perkebunan-perkebunan itu sesudah penjerahan tentera Djepang adalah sebagai dibawah ini.

Zaman	Luas tanah jang dipelihara	Djumlah buruh	buat 1 ha dipakai
Pendjadjahan Belanda	13710.546 ha	10882 orang	0.7 orang
Permulaan R. I.	3649.44 ..	5796 ..	1.6 ..

Dari daftar diatas teranglah, bahwa sebahagian terbesar diantara perkebunan itu mendjadi ditelantarkan, atau „diistirahatkan” buat sementara, jaitu karena ketiadaan pimpinan dan kekurangan tenaga buruh.

Kelebihan tenaga pada tiap-tiap ha. tanah jang diusahakan pada zaman R.I. ini bukanlah menundjukkan tidak rasionilnja pekerdjaan dibandingkan dengan dizaman pendjadjahan Belanda. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh pekerdja-pekerdja jang masih muda belia diangkat dan dijadikan romusha oleh Djepang,

sehingga tenaga-tenaga yang masih tinggal hanya terdiri dari orang-orang tua dan wanita-wanita belaka. Selain dari itu, adalah karena banjarknja alat-alat dan mesin-mesin yang rusak dan hilang lenjap pada zaman pendudukan Djepang.

Dua kali menghadapi agresji Belanda.

Penjerbuan bersendjata yang dilakukan dua kali berturut-turut oleh tentera Keradjaan Belanda pada tahun 1947 dan 1948 membawa perobahan yang sangat besar pula kepada perkebunan-perkebunan asing itu, terutama pada saat terdjadinja agresji ke-12.

Penjerbuan tentera Belanda kedaerah-daerah perkebunan di Sumatera Barat, disambut oleh pekerdja-pekerdja perkebunan itu dengan djalan penghantjuran dan pemusnahan bangunan-bangunan dan alat-alat yang mungkin masih dapat dipergunakan pada waktu itu. Pembumi hangusan ini dilakukan oleh pekerdja-pekerdjanja sendiri dengan bantuan rakjat disekitar tempat perkebunan-perkebunan itu, jaitu sesudah mereka mendapat petundjuk-petundjuk dari orang-orang yang mereka pertjajai.

Penghantjuran, pemusnahan dan penjingkiran alat-alat yang penting dari perkebunan-perkebunan itu tidak menjebakkan bertambah buruknja keadaan dan nasib kaum buruh dan keluarganya, karena sebelum itu sudah dipersiapkan lebih dahulu badan-badan penampung mereka dan keluarga mereka. Penjusunan badan penampung ini merupakan suatu djasa besar dari Sarbupri (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia), jaitu Organisasi buruh perkebunan yang dibentuk sebelum penjerbuan tentera Belanda yang pertama.

Dan untuk mengurus harga benda dan milik-milik perkebunan itu yang dipindahkan dan disingkirkan dari tempatnja semula, maka oleh Pemerintah R.I. di Sumatera dibeberapa daerah perkebunan ditanam satu badan yang diberi nama „Likwidasi Komisi” yang anggotanja terdiri dari wakil-wakil pemerintah, wakil-wakil dari pengurus-pengurus perkebunan dan wakil-wakil dari pekerdja-pekerdja ditiap-tiap perkebunan itu.

Selain dari bertugas untuk memelihara dan mengawasi semua alat-alat yang disingkirkan dan dipindahkan dari tempatnja semula itu, Komisi Likwidasi ini djuga dikuasakan untuk mengizinkan pemakaian alat-alat tersebut untuk kepentingan kaum buruh agar mereka djangan terlalu menderita karena akibat pembumi hangusan itu. Likwidasi Komisi ini mempunjai tjabang (sub-komisi) pada tiap-tiap perkebunan. Dan karena itu, maka segala sesuatu rentjana berdjalan dengan baik dan lantjar. Karenanja pula, maka selama menghadapi agresji ke-II, djaranglah ada para bekas buruh perkebunan itu yang hidupnja tersia-sia, bahkan mereka merupakan suatu lapisan masjarakat yang menduduki tempat terpenting pada

waktu itu, berkat kesangupan mereka untuk selalu dapat menghasilkan bahan-bahan makanan yang oleh sebahagian besar petani-petani terpaksa ditelantarkan.

Pada bulan Mei 1949, dari suatu tempat di Sumatera Barat. Gubernur Militer Sumatera Barat mengumumkan suatu peraturan baru berkenaan dengan pemakaian sebahagian dari tanah-tanah erfpacht untuk kepentingan para imigranten dari Djawa, yaitu Peraturan No. 128/GM/Ist-49. Tanah-tanah yang ditarik hak erfpacht itu, hanya terdiri dari tanah-tanah yang masih belum diusahakan oleh masing-masing onderneming. Dalam ketetapan itu. juga oleh Gubernur Militer Sumatera Barat ditundjuk 8 buah onderneming dan ditetapkan berapa ratus hektar tanah dari tiap-tiapnya yang ditarik kembali hak erfpachtnja. Menurut itu tidak kurang dari 770 ha tanah yang dimiliki kembali oleh Pemerintah.

Penetapan Pemerintah tersebut diatas disambut dengan hangat oleh bekas pekerdja (buruh) perkebunan-perkebunan itu, karena sebelumnya mereka sudah mengusahakan dan membikin rumah sendiri diatas tanah diluar batas milik onderneming itu, apalagi perkebunan mereka itu sudah mengeluarkan hasil. Tapi sudah terang, bahwa kedudukan mereka sebagai petani liar sekarang ini tidak akan terdjamin dari gangguan pemilik tanah itu yang sebenarnya. Inilah yang menyebabkan hangatnya sambutan mereka atas peraturan tersebut.

Tapi pada umumnya peraturan Gubernur Militer itu agak sukar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena buruh-buruh itu masing-masing sudah mempunyai kebun-kebun sendiri diluar lingkungan perkebunan itu. Akan amat sukar bagi mereka untuk meninggalkan tanahnya yang sudah memberikan hasil itu, atau akan membuka tanah baru. Karena luasnya tanah-tanah perkebunan yang dapat diusahakan dengan tidak terlalu banjak memakai tenaga dan waktu, maka mereka tidaklah merasa rugi bila mereka tidak kebagian tanah dalam lingkungan onderneming itu.

Keadaan perkebunan asing di Sumatera Tengah sekarang.

Meskipun suasana sekarang sudah hampir dapat menjamai suasana sebelum Perang Dunia II, tapi keadaan dan situasi perkebunan-perkebunan bangsa asing didaerah Sumatera Tengah masih belum pulih sebagai keadaannya yang lampau.

Dibandingkan dengan keadaannya sebelum Perang Dunia II. maka dalam semua lapangan didapati kemunduran-kemunduran yang pada beberapa tempat sangat menjolok mata. Kebun teh Halaban (didaerah Kabupaten Lima Puluh Koto) yang pada tahun 1941 menghasilkan 25.000 Kg. dalam sebulan dengan 900 orang buruh, pada tahun 1950 hanya menghasilkan 5000 Kg. dengan 325 orang pekerdja. Begitu juga dengan kebun teh Pecconina

jang pada tahun 1940 menghasilkan 25.000 Kg sebulan dengan 750 orang buruh, tahun 1950 hanya menghasilkan 4.636 Kg dengan tenaga dari 436 orang pekerdja.

Orang tidak usah mentjari dan menjelidiki djauh sumber-sumber kemunduran itu. Sebagai diterangkan selama menghadapi agresi Belanda ke-II, sebahagian besar diantara perkebunan-perkebunan itu mengalami kerusakan-kerusakan, terutama alat-alat dan bangunan-bangunannya.

Untuk memulihkan kembali kerusakan-kerusakan itu, penguasa-penguasa dan pemilik-pemilik tidak mempunyai kesanggupan sebagai seharusnya. Kesulitan-kesulitan untuk memperoleh tenaga-tenaga pekerdja djuga merupakan suatu soal pokok jang menjejabkan masih terlalu rendahnya produksi perkebunan-perkebunan itu. Selain dari tidak mungkin dapat didatangkan kuli-kuli dari luar daerah ini sebagai biasa dilakukan pada masa sebelumnya, kuli-kuli dan pekerdja-pekerdja jang masih ada sekarang djuga tidak mau diri mereka harus terikat pada pekerdjaannya sebagai pada zaman jang lampau itu. Disamping faktor-faktor jang njata itu, masih banjak lagi faktor-faktor jang lain jang menjejabkan sebahagian diantara pemilik-pemilik perkebunan itu tidak mau meneruskan usaha dan pekerdjaannya pada waktu ini. Beberapa buah diantara tanah-tanar konsessi perkebunan bangsa asing itu masih tinggal terbelengkalai. Tanamannya dibiarkan sadja merimba dengan tidak dipelihara. Dari itu, pada beberapa tempat sekarang terdapat, „hutan (rimba) teh” dan „hutan getah”.

Tapi disamping itu, ada pula diantaranya jang bekerdja lebih giat dan lebih produktif dari masa sebelum Perang Dunia II. Kebun kina Pinang Awan/Ulu Bangko (Solok) umpamanya, jang pada achir zaman pendjadjahan Belanda menghasilkan 30.000 Kg sebulan dengan tenaga 500 orang pekerdja tetap, sekarang menghasilkan 25.657 Kg sebulan dengan tenaga hanya dari 148 orang pekerdja sadja. Begitupun dengan kebun getah „Tandikat Lama (Padang/Pariaman) jang pada tahun 1940 menghasilkan 15.000 Kg getah dalam sebulan dengan 750 orang kuli tetap, sekarang dengan 138 orang pekerdja dapat menghasilkan $\pm$ 7.500 Kg. getah tiap bulan tiap bulan.

Kebun kelapa sawit Ophir (Pasaman) jang pada zaman berachirnya pendjadjahan Belanda belum produktif, masa pendudukan Djepang baru dipungut hasilnya.

Hari ini dengan tenaga pekerdja dari 1300 orang, kebun ini dapat menghasilkan 17.500 Kg minjak setiap bulan.

Dari tjatatan diatas, dapat dibayangkan betapa keadaan perkebunan itu seluruhnya pada waktu ini.

Dan untuk melengkapkan uraian ini, dapat pula dinjatakan, bahwa banjak djuga diantara erfpacht-percelen, terutama tanah-

tanah konsessi jang masih belum habis kontraknja, tapi tidak/ belum djuga lagi diusahakan oleh pemiliknja masing-masing, menyebabkan timbulnja soal-soal atau hal-hal dibawah ini:

1. Masih banjak buruh-buruh perkebunan itu jang tidak tentu kedudukannja karena mereka harus menunggu ketentuan selanjutnja mengenai status perkebunan itu. Mereka tidak dapat dikatakan sebagai „pekerdja liar” karena mereka berkedudukan tetap, tapi tidak pula mungkin dapat dinamakan „pekerdja tetap” karena pekerdjaan jang mereka kerdjakan bukanlah milik mereka sendiri.
2. Timbul perselisihan-perselisihan pendapat antara penduduk-penduduk asli dengan sebahagian diantara bekas-bekas pekerdja perkebunan-perkebunan itu mengenai tanah-tanah perkebunan jang diusahakan oleh mereka diluar daerah konsessi. Hal ini pada mulanja disebabkan karena keluasanja pekerdja-pekerdja itu memakai tanah perkebunan itu untuk keperluan mereka sendiri. Dan karena itu, maka sebahagian diantaranya djuga berusaha mentjari tanah jang lebih subur diluar tanah perkebunan itu. Pada mulanja penduduk asli jang merasa dirugikan itu tidak mengambil tindakan apa-apa, karena pekerdjaan itu dipandang sebagai „penampung”. Tapi setelah keadaan kembali sebagai semula, rakjat asli mau agar tanah mereka harus dikembalikan.

Demikianlah sepintas lalu mengenai keadaan dan perkembangan perkebunan-perkebunan asing (cultuur bedrijven) di Sumatera Tengah.

Pasal 41.

PETERNAKAN

**I. PEMULIHAN PETERNAKAN NEGARA
PADANG MENGGATAS.**

PETERNAKAN Negara di Padang Mengatas adalah satu-satunya peternakan jang terbesar di **Asia Tenggara** ini, dan dalam clash ke II telah dibumi-hanguskan. Kuda-kudanja bertebaran seluruh Sumatera Tengah, dan sebagian dari tanah-tanahnja telah dibagi-bagikan oleh Pemerintah Militer kepada orang-orang jang mau mendjadikan kebun atau ladang. Dari perternakan jang sangat masjhur itu hanya tinggal lagi puing-puing jang sangat menjedihkan.

Usaha-usaha jang telah didjalankan berpuluh-puluh tahun dengan segala susah pajah, dalam waktu beberapa djam sadja musnah sama sekali. Sewaktu pemulihan, jang tinggal hanjalah beberapa orang pegawai sadja lagi.

Sesudah pemulihan, 6 ekor kuda jang diterima dari Djawatan Kehewananan Pemerintah Prae-federal ditempatkan dipeternakan ini dengan membuatkannja kandang darurat. Ternak inilah jang mendjadi modal pertama dalam pembangunannja kembali.

Karena yakin, bahwa peternakan ini dapat dihidupkan kembali dan akan sangat berguna untuk pembangunan di Sumatera Tengah ini, maka Pemerintah Sumatera Tengah berusaha membangunkannja kembali.

Pada permulaan tahun 1951, usaha ini mulai digiatkan. Orang-orang jang telah menempati tanah-tanah Padang Menggatas itu dipindahkan ketempat lain dengan memberi mereka penggantian kerugian.

Padang-padangnja mulai diperbaiki dan ditanami dengan rumput-rumput jang diperlukan untuk makanan ternak. Dalam pada itu diusahakan mentjari kembali kuda-kuda Padang Menggatas jang telah bertebaran selama clash dengan membelinja kembali dari rakjat. Dalam tahun 1951 telah dapat dibangunkan kembali rumah Dokter Hewan, Kantor Klinik/apotheek/laboratorium, 9 buah kandang, 3 rumah pekerdja, 2 rumah mandur, d.l.l. Dalam pada itu dipesan pula dari Amerika 4 ekor kuda Arab asli, dari Djawa sapi-sapi perahan, biri-biri, dan oleh Pusat Djawatan Kehewananan didatangkan pula kuda Sandel untuk dितernakkan.

Dalam tahun 1952 dan tahun 1953 telah dan sedang didirikan 4 kandang lagi, 1 kandang karantina, dipbak, tambahan rumah pekerdja d.l.l. Sekiranya ini selesai semuanya, maka selesai pulalah pemulihan tempat peternakan ini.

Disamping membangun tempat peternakan itu diusahakan pula untuk memperluas pekerdjaannya dengan mendirikan lagi 4 rumah pekerdja dengan keluarga, recreatie zaal buat pekerdja-pekerdja, surau, tempat permandian untuk umum, kandang-kandang ayam, dan penetasannya, perluasan padang rumput d.l.l.

Sampai pada dewasa ini dipelihara disini 42 ekor sapi perahan, 96 ekor biri-biri, 10 ekor kambing, 63 ekor ayam luar negeri dan 53 ekor kuda, diantaranya 5 ekor kuda Arab asli. Disini njatalah bahwa opset dari peternakan ini ialah untuk menjadikannya sentral peternakan buat Sumatera Tengah. Dalam zaman Belanda dahulu hanjalah sentral buat peternakan kuda saja. Sajang pimpinannya sampai sekarang, oleh karena kekurangan Dokter Hewan, masih dirangkapkan djuga pada Kepala Resor Kehewanan Sumatera Tengah I, sehingga ini dipandang tidak effectief, karena peternakan ini memerlukan pimpinan jang tersendiri.

Minat dari rakjat sangat tertarik pada tempat peternakan ini jang dapat dilihat dari perkundjungan penindjauan jang dilakukan oleh berbagai-bagai golongan ketempat ini.

II. PEMBANGUNAN TEMPAT PETERNAKAN BARU DI SUMATERA TENGAH.

a. *Tempat peternakan ayam di Djalan Limbukan Pajakumbuh.*

Didjalan Limbukan Pajakumbuh telah dibeli 7 H.A. tanah pada awal tahun 1951. Ditempat ini telah didirikan beberapa kandang ayam dan kandang itik. Selandjutnja didatangkan dari Djawa untuk ditenakkan, ayam-ayam luar negeri dan itik-itik Tegal. Djuga telah didirikan rumah-rumah pekerdja, dan sedang dibangunkan Kantor buat Dokter Hewan.

Kepada rakjat diberi kesempatan membeli ayam-ayam luar negeri atau telur-telurnja.

b. *Tempat peternakan ayam di Djalan Panorama Bukittinggi.*

Didjalan Panorama Bukittinggi telah dibeli pula sebidang tanah, dimana pada awal tahun 1952 telah didirikan kandang-kandang ayam dan broedinrichting beserta kantor. Djuga telah didatangkan dari Australia ayam-ayam luar negeri djenis Red. Australorp dan Leghorn, ayam-ayam mana sampai sekarang telah menghasilkan telur-telur jang dipergunakan untuk memperbanyak ternak ini.

Dalam tahun 1952/1953 telah dan sedang didirikan tambahan kandang-kandang ayam, rumah pekerdja pakai keluarga dan lain-lain.

Dimaksudkan nantinja ialah untuk mendjual ayam-ayam itu kepada rakjat jang mempunyai minat untuk peternakan ayam, apabila persediaan telah tjukup. Untuk sementara diberi djuga kesempatan kepada peminat-peminat untuk membeli telur dalam djumlah jang ketjil buat diternak.

c. Tempat peternakan di Udjung Gurun Padang.

Di Udjung Gurun Padang telah dibuka sebidang tanah untuk mendirikan tempat peternakan. Ditanah ini sekarang telah/ sedang didirikan kandang-kandang ayam luar negeri, kandang sapi, Kantor Dokter Hewan dan lain-lain. Tempat ini akan dijadikan tempat peternakan hewan unggas dan sapi perahan.

d. Tempat perusahaan susu dan peternakan itik di Tarok B. Tinggi

Di Tarok Bukittinggi telah dibeli sebidang tanah dan disini sekarang sedang didirikan sebuah tempat perusahaan sapi perahan dan tempat peternakan itik.

e. Lain-lain objek.

Untuk menampung ternak-ternak jang sakit jang didatangkan dari luar daerah dengan melalui laut, telah didirikan di Teluk Bajur sebuah kandang karantina, sehingga ternak-ternak sakit jang selama ini dikarantinakan dipadangan sadja, telah dapat dirawat sebagaimana mestinja.

USAHA-USAHA LANGSUNG TERHADAP PETERNAKAN RAKJAT SAMPAI ACHIR TAHUN 1952.

1. **Peternakan kuda.**

Di Sumatera Tengah, terutama didaerah bekas Keresidenan Sumatera Barat, kuda diternakkan buat dipakai untuk penarik kereta (sado) dan untuk perlombaan-perlombaan patjuan kuda. Didaerah-daerah dimana djalan-djalan tidak begitu baik, dipakai djuga sebagai kuda beban atau kuda tunggang. Didaerah-daerah dimana rakjatnja gemar kepada daging kuda, dilakukan djuga penjembelihan kuda.

Untuk memperbaiki mutu kuda rakjat, oleh Pemerintah ditempatkan dibeberapa wilajah (Kabupaten-kabupaten) kuda bibit Pemerintah, jaitu sedjumlah 14 ekor: 5 ekor di Kabupaten Lima-puluh Kota, 3 ekor di Kabupaten Tanah Datar, 3 ekor di Kabu-

paten Agam, 1 ekor di Kabupaten Solok, dan 2 ekor di Peter-
nakan Padang Menggatas.

Untuk memperbaiki kembali gelanggang-gelanggang patjuan kuda jang telah rusak selama clash ke-II, oleh Jajasan Dana Ternak Sumatera Tengah telah dipindjamkan uang kepada Renbond se-
djumlah Rp. 130.000.—, jaitu uang subsidi jang diterima Jajasan ini dari Djawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Tengah.

Dari uang-uang ini telah diperbaiki kembali gelanggang-gelang-
gang di Pajakumbuh, Batu Sangkar dan Padang Pandjang, sehing-
ga telah dapat diadakan perlombaan-perlombaan patjuan kuda
di Bukittinggi, dan pada tempat jang disebutkan diatas, dimana
Djawatan Kehewanan Sumatera Tengah selalu mengadakan 2
buah beker dan dua hadiah sebesar 2.000,— dan Rp. 1.500.—
buat kuda-kuda jang memetjahkan rekor ketjepatan lari 1.600 dan
1.200 M.

Perlombaan-perlombaan ini ternjata sangat menarik perhatian
rakjat kembali kepada perternakan kuda, dan djuga kepada peter-
nakan hewan seumumnja.

2. Peternakan sapi.

Hewan ini di Sumatera Tengah ditenakkan buat keperluan
pertanian, sebagai hewan penarik dan untuk dipotong.

Pada awal tahun 1950 tidak didapati seekor pun sapi pedjan-
tanan asli **Ongole** lagi di Sumatera Tengah ini. Sebelum perang,
pada awal tahun 1940 didaerah Sumatera Barat sadja ada 270
sapi Ongole djantan dan 19 ekor betina, untuk keperluan peter-
nakan rakjat.

Dalam kwartal I tahun 1951 telah diterima 14 ekor bapak sapi
Ongole jang dipesan buat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan
perantaraan Pusat Djawatan Kehewanan.

Semua sapi-sapi Ongole jang dipesan melalui Pusat Djawatan
awal tahun 1951, berdjumlah 274 ekor S.O. djantan dan 100 ekor
betina. Kalau pesanan-pesanan ini dapat diterima semua, daerah
Sumatera Tengah akan mempunjai kembali djumlah bibit seperti
sebelum perang. Sampai sekarang telah diterima dari pesanan-
pesanan ini 103 ekor.

Berhubung karena djumlah ternak djantan pada rakjat sangat
kurang, dan tambahan lagi sapi jang telah dipesan tidak lekas
diperdapat, oleh Pemerintah diusahakan membeli 45 ekor sapi
djantan persilangan Ongole jang terbaik dari rakjat buat dipakai
sebagai pedjantanan.

Sapi-sapi ini ditempatkan 12 ekor di Kabupaten Pasaman, 42
ekor di Kabupaten Tanah Datar, 12 ekor di Kabupaten Padang/
Pariaman, 17 ekor di Kabupaten Solok, dan 18 ekor di Kabupaten

Agam, 3 ekor di Kabupaten Sawah Lunto/Sidjundjung, 15 ekor di Kabupaten Pesisir Selatan/Kerintji, 5 ekor di Kepulauan Mentawai dan 29 ekor di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan demikian djumlah pedjantanan jang telah diserahkan makainja kepada rakjat, mendjadi 153 ekor.

Selandjutnja dibeli dan diserahkan kepada rakjat memeliharaanja dengan perdjandjian anaknja dibagi dua, 101 ekor sapi persilangan Ongole jang ditempat 12 ekor di Kabupaten Lima Puluh Kota, beberapa ekor di Kabupaten Agam dan 6 ekor di Kabupaten Solok, 5 ekor di Kabupaten Sawahlunto/Sidjundjung, dan 48 ekor di Kepulauan Mentawai. Ternak ini dapat mereka pakai untuk membadjak, tapi dengan pendjagaan djangan sampai ternak itu terpaksa (rusak) karenanja.

Di Wilaiah bahagian Kabupaten Lima Puluh Kota pada kwartal III tahun 1951 diadakan pemberian hadiah terhadap 61 ekor sapi djantan jang baik buat bibit.

Untuk menggiatkan peternakan sapi dalam tahun 1951 di Sumatera Tengah diadakan:

- a. Perlombaan sapi di Taram (Kabupaten Lima Puluh Kota) dalam kwartal II, dan perlombaan sapi di Batusangkar (Kabupaten Tanah Datar) dalam kwartal III.
- b. Pertundjukan hewan di Wilajah bahagian Kabupaten Lima-puluh Kota pada kwartal IV, pertundjukan sapi di Batusangkar dalam kwartal III dan di Kota Lawas (Padang Pandjang) Kabupaten Tanah Datar dalam kwartal IV.
- c. Aduan sapi (berlaga) di Kota Lawas Padang Pandjang, aduan mana dilakukan dibawah pengawasan Djawatan Kehewanan, jaitu penambahan attractie dari pertundjukan sapi jang diadakan dalam kwartal IV.

Pada pertundjukan dan perlombaan-perlombaan tersebut diatas, Djawatan Kehewanan menjediakan premie-premie atau hadiah-hadiah dan membantu sebagian dari ongkos penjelenggaraannja.

Usaha menggiatkan peternakan ini telah nampak hasilnja, terbukti dengan adanja perhatian rakjat jang nampaknja telah mulai bertambah terhadap pemeliharaan sapi-sapinja dengan djalan mengadakan koperasi-koperasi peternakan, pun djuga setjara perseorangan.

3. Peternakan kerbau.

Peternakan kerbau di Sumatera Tengah terutama ditudjukan untuk keperluan pertanian dan pengangkutan (penarik pedati).

Ditempat-tempat dimana rakjatnja karena kemiskinan, tidak sanggup lagi buat membeli ternak ini untuk keperluan pertanian,

oleh Djawatan Kehewan Sumatera Tengah tahun 1951 telah dibelikan 13 ekor kerbau betina yang pemeliharaannya dengan jalan bagi dua anaknya diserahkan kepada rakjat di Wilayah-wilayah Harau dan Luhak (Kabupaten Lima Puluh Kota).

Selanjutnya untuk membantu rakjat di Kolonisasi Margo Joso (Kabupaten Merangin) dan di Kolonisasi Desa Baru (Kabupaten Pasaman) buat memperoleh ternak-ternak ini, telah diserahkan kepada Bupati Merangin untuk Kolonisasi yang pertama uang sedjumlah Rp. 30.000.— pada pertengahan tahun 1951 dan pada triwulan IV tahun 1951 dengan perantaraan Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah buat Kolonisasi yang kedua sedjumlah Rp. 20.000.—.

Makanja pembelian ini tidak langsung dilakukan oleh Djawatan Kehewan disini, ialah berhubung karena Kolonisasi-kolonisasi tersebut terletak didalam daerah-daerah yang terpencil yang oleh karenanya menjadikan satu kesulitan didalam hal pengangkutan ternak-ternak dari luar daerah-daerah itu. Dari uang ini telah dibeli 4 ekor kerbau djantan dan 7 ekor yang betina. Dalam tahun 1952 dibeli lagi 5 ekor kerbau betina dan ditempatkan di Sulit Air Kabupaten Solok.

4. Peternakan sapi perahan.

Peternakan ini di Sumatera Tengah tadinja belumlah begitu menarik perhatian rakjat Indonesia. Perusahaan sapi perahan yang agak teratur hanya baru didapati di Padang kepunjaan bangsa asing.

Oleh karena perkembangan bangsa kita dimasa yang akan datang, pasti akan menambah kebutuhan makanan rakjat yang bernilai tinggi seperti susu, mentega dan kedju, dan untuk memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia mendirikan perusahaan-perusahaan sapi perahan sendiri, oleh Djawatan Kehewan Sumatera Tengah dalam triwulan IV thun 1951 telah dimulai memasukkan 21 ekor sapi perahan dari Djawa, yang ditempatkan di Padang Menggatas, tempat mana akan dijadikan sentrum buat peternakan ini.

Kepada rakjat akan diberi kesempatan buat mengawinkan sapi-sapi betina mereka dengan sapi-sapi perahan, yang kemudian hari sedapat mungkin dilakukan dengan menempatkan yang djantan dikampung-kampung yang telah mempunyai perhatian terhadap peternakan ini.

Perhatian rakjat sekarang terhadap peternakan ini telah banjak, hanya mereka masih kekurangan pengalaman dan modal.

5. Peternakan kambing.

Untuk memajukan peternakan kambing di Sumatera Tengah, Djawatan Kehewan Sumatera Tengah telah mentjaba mendatangkan kambing-kambing bangsa Etawah djantan dan betina dari Djawa. Dalam triwulan I tahun 1951 telah diterima disini 28 ekor kambing Etawah djantan 63 ekor jang betina. Dari kambing-kambing ini telah diserahkan dengan djalan memperseduakan kepada rakjat di Kabupaten-kabupaten:

1. Lima Puluh Kota	4	djantan dan	11	betina.
2. Solok	4	" "	10	"
3. Tanah Datar	2	" "	5	"
4. Sawah Lunto/Sidjundjung	1	" "	2	"
5. Padang/Pariaman	1	" "	2	"
6. Pasaman	2	" "	4	"
7. Agam	3	" "	5	"
8. Pesisir Selatan/Kerintji	4	" "	6	"
9. Indragiri	1	" "	3	"

Selebihnja 6 djantan dan 15 betina dipelihara ditempat Stasiun Peternakan Djalan Limbukan Pajakumbuh, jang kemudian dipindahkan ke Peternakan Padang Menggatas.

Usaha jang pertama ini tidak memuaskan, karena selain ternak-ternak ini sewaktu diterima dari Djawa badannja lemah, pun rakjat jang menerimanja, belumlah dapat memberikan pemeliharaan jang semestinja kepada ternak ini, sehingga banjak jang mati diserang oleh penjakit-penjakit ternak seperti tympania, enteritis-catarrhalis, stomatitis, bronchitis, pneumonis, pun eschexis dan ceratoconjunctivitis.

6. Peternakan biri-biri.

Peternakan biri-biri belumlah populair di Sumatera Tengah, bahkan kebanyakan dari rakjat mempunyai purbasangka jang kurang baik terhadap rasa dagingnja jang belum mereka kenal dan biasakan memakannja.

Karena biri-biri ini tidak menghendaki pemeliharaan jang begitu susah seperti kambing Etawah, maka diserahkan kepada rakjat untuk menukar pemeliharaan kambing Etawah dengan biri-biri, dengan harapan dikemudian hari, selain menambah makanan daging buat penduduk, djuga akan mentjiptakan suatu perindustrian permadani dari bulu domba.

Sekarang telah mulai nampak perhatian rakjat untuk berternak biri-biri.

Diharapkan bahwa dalam tahun-tahun jang selandjutnja akan lebih banjak lagi ternak ini dapat dimasukkan ke Sumatera Tengah untuk dibagi-bagikan memelihara kepada rakjat.

7. Peternakan Unggas.

a. A j a m.

Ternak ayam tjepat dapat berkembang biak dan sangat menguntungkan kepada rakjat, karena tiap-tiap penduduk dapat memeliharanya dengan ongkos jang ketjil (biasanja tidak ada mengeluarkan ongkos hanja dengan usaha jang enteng), sehingga semua hasil jang diterima boleh dikatakan hasil bersih.

Untuk mentjegah kematiannja disebabkan penjakit *pseudovogel pest* jang merugikan usaha-usaha rakjat, telah diadakan sedjak tahun 1951 penjuntikan setjara luas, hingga memudahkan bagi rakjat untuk memperluas usaha-usahanja dalam peternakan ayam ini.

Pada permulaan tahun 1951 diterima dari Djawa 17 ekor ayam penelor luar negeri bangsa Red dan Australorp.

Dalam triwulan IV tahun 1951 diterima lagi sebahagian dari pesanan 1951, ayam penelor dari Balai Peternakan Hewan di Bogor bangsa Red, Australorp dan Leghorn, sedjumlah 207 ekor.

Kepada rakjat jang telah membuktikan sanggup memelihara ayam setjara teratur diberi kesempatan untuk menjedu airnja. Dan tiap-tiap bibit jang disedu airnja, dimestikan menjerahkan 2 ekor keturunannja kembali.

Karena permintaan-permintaan untuk menerima ayam ini sangat banjak, sedangkan pemeliharaan dikampung-kampung belum begitu teratur, maka untuk menghematkan bibit ini, untuk sementara Djawatan berhati-hati benar menjerahkannya kepada rakjat; mereka diberi kesempatan untuk membeli telur buat dieramkan jang berasal dari ayam-ajam ini.

Selanjutnja telah disediakan 6000 jard volie regaas (kawat ayam). Dimaksud dengan kawat ini akan menolong rakjat, orang-orang partikelir, djuga golongan pegawai jang mempunyai hasrat memelihara ayam penelor setjara teratur, dengan mempermudah mendapat kawat ayam ini.

Dalam tahun 1951 telah didatangkan 8 buah mesin penetas capasitet 50 telur dan mesin-mesin itu telah mulai dipindjamkan kepada siapa-siapa jang hendak mempergunakannja.

Ditiap-tiap Kabupaten nanti sekurang-kurangnya ditempatkan 2 buah mesin penetas untuk diperpindjamkan kepada rakjat.

Pada permulaan tahun 1951 telah diterima 3 buah mesin penetas telur merk „ECONOOM” jang mempunyai capasitet $\pm$ 1500 telur masing-masingnja, dari Pusat Djawatan Kehewanan. Mesin-mesin tersebut, karena broedinrichting belum ada, belumlah dapat dipakai.

Sebuah mesin sekarang ditempatkan di Padang, sebuah di Bukit-tinggi dan sebuah di Pajakumbuh.

Untuk menarik perhatian didalam tjara-tjara memperbaiki peternakan ayam kepada rakjat didaerah Djambi, Djawatan Kehewan Propinsi Sumatera Tengah telah mengirimkan sebuah penetas kapasitas 50 telur ke Djambi. Sedang Haminte disana juga telah pula mempunyai sebuah mesin penetas dari kapasitas 100 telur dan ayam-ayam luar negeri jang terdiri dari djenis Australorp dan Red, jang mana pertjobaan peternakan ini dilakukan dibawah pengawasan Penjuluh Kehewan Djambi.

Pertjobaan peternakan ini memberi hasil jang memuaskan, sehingga perhatian rakjat tertarik olehnja. Oleh hal jang demikian rakjat disana telah mulai bergerak memasukkan ayam luar negeri untuk dipeternakan.

Pemerintahan di Djambi bersedia menjerahkan kepada Djawatan Kehewan sebidang tanah untuk peternakan kambing dan unggas $\pm 117 \times 135$ M terletak dipinggir Kotapradja Djambi.

Dibahagian Resor Kehewan Sumatera Tengah I telah berdiri 3 buah perusahaan-perusahaan ayam, yakni: di Batu Bolang dan Tiakar kepunjaan perseorangan, dan di Simalanggang kepunjaan koperasi jang dibentuk oleh Pemuda bekas P.M.T. (Kabupaten Lima Puluh Kota). Perusahaan-perusahaan ini tidak sadja memelihara ayam dujga ada memelihara itik.

Disamping ini ada pula anak negeri di Pajakumbuh mempunyai mesin penetas sendiri, jang dipesannja dari Bandung. Di Rengat (Kabupaten Inderagiri) telah berdiri sebuah peternakan ayam, jang terdiri dari ayam-ayam Tembilahan turunan ayam Siam, sebanyak 45 ekor betina dan 7 djantan.

Buat keperluan alat-alat penetas dan memperhatikan tjara-tjara memelihara ayam, pada achir bulan Djuni 1951 oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri telah dibeli 3 mesin penetas „MISSOURI” kapasitas 75 telur. Dari mesin-mesin ini telah ditjoba menetas telur-telur ayam Tembilahan dan telah diperdapat ± 300 ekor anak ayam. Anak-anak ayam ini jang telah berumur satu bulan dijual dengan harga Rp. 4,— seekor.

Buat memperluas peternakan ini, Kabupaten Indragiri pada achir tahun 1951 akan mengadakan peternakan ayam dan itik, di Teluk Kuantan dan Air Molek. Disamping ini buat memperbaiki peternakan ayam di Rengat, oleh Bupati Indragiri dengan perantaraan Djawatan Kehewan telah dipesan ayam-ayam luar negeri. Dalam bulan Nopember 1951 ayam-ayam jang dipesan itu telah didjemput oleh Mantri Hewan Rengat di Pajakumbuh, yakni:

White Leghorn	2 djantan	—	11 betina
Australorp	2	„	— 5 „
R.I. Red.	2	„	— 5 „

masing-masing umur 4 bulan.

Disamping ini oleh Djawatan kehewanan Sumatera Tengah telah diserahkan untuk Kabupaten ini 3 pasang ayam Luar Negeri jang telah dewasa dari masing-masing djenis.

b. I t i k.

Dalam kwartal penghabisan tahun 1951 telah diterima di Smuatera Tengah dari pesanan 500 ekor itik Tegal sebanjak 324 ekor dari Djawa.

Itik ini ditempatkan dikampung-kampung dengan djalan memper-seduakan kepada rakjat, tetapi berhubung ternak ini sangat menderita sewaktu tiba dari Djawa, ia dipelihara dahulu oleh Djawatan ditempat Peternakan di Djalan Limbukan Pajakumbuh.

Setelah baik keadaannya semua akan di-bagi-bagikan untuk memelihara kepada rakjat, jang mempunyai hasrat untuk memper-ternakkannya. Sajang sekali djumlah itik jang djantan dibandingkan dengan djumlah jang betina terlalu sedikit diterima, sehingga tidak dapat dibagi-bagikan setjara effectief.

Sekarang rakjat telah dapat kesempatan untuk membeli telornja untuk dieramkan.

Kandang-kandang ayam sedjumlah 10 buah telah disediakan untuk Kabupaten-kabupaten jang sanggup mengusahakan sendiri pemeliharaan ayam penelor luar negeri untuk tjontoh bagi rakjat di Kabupaten itu. Sungguhpun usaha-usaha ini didjalkan dengan serba kekurangan, terutama mengenai pegawai, hasil-hasilnja dalam membangkitkan perhatian rakjat terhadap peternakan unggas, sampai sekarang adalah memuaskan.

Hasil-hasil dari usaha-usaha mendirikan tjontoh-tjontoh peternakan ini pada phase permulaan, adalah bangunnja kesadaran rakjat untuk mentjontoh dan berusaha sendiri (membangkitkan auto-acti-viteit) kearah tjara beternak jang agak intensief.

Oleh Djawatan Kehewanan Sumatera Tengah telah dikirim 3 orang pemuda ke Bogor untuk mempelajari peternakan ayam setjara teratur. Seorang dari pemuda-pemuda ini ditempatkan di Peternakan Djalan Limbukan dan 2 orang diperbantukan (masih sebagai pegawai lepas) kepada Kepala Resor Kehewanan Sumatera Tengah II di Bukittinggi.

Belum lagi selesai peternakan unggas ini dibangunkan, ia telah banjak dapat kundjungan dari pihak rakjat dan permintaan-permintaan akan bibit ternak atau petundjuk-petundjuk, banjak diterima.

Kesadaran rakjat terbukti karena telah banjak nampak jang mulai bergiat memternakkan ayam, itik sampai kepada kambing dan sapi.

Koperasi-koperasi ternak mulai berdiri. Ada jang telah mentjoba mendatangkan sapi-sapi perahan dari Djawa, sungguhpun belum berhasil.

Selain dari mendatangkan mesin-mesin penetas sendiri, telah ada pula jang mentjoba membuatnja disini.

Telah njata nampak minat jang besar dari rakjat untuk mengadakan perusahaan-perusahaan dalam lapangan Kehewanan.

PENDIRIAN JAJASAN DANA TERNAK.

Dalam bulan Mei tahun 1951 telah didirikan dengan berkedudukan diibu kota Propinsi „*Jajasan-jajasan Dana Ternak Propinsi Sumatera Tengah*“. Jajasan mana diketuai oleh Dokter Hewan/ Kepala Resor Kehewanan Sumatera Tengah II.

Tudjuan Jajasan ini ialah:

- a. memadjukan peternakan rakjat pada umumnja.
- b. menjokong perkumpulan-perkumpulan ternak rakjat jang berazas koperatief.
- c. memberi pertolongan dalam mengadakan hewan-hewan bibit jang akan diserahkan kepada jang membutuhkan dengan perdjandjian-perdjandjian jang tertentu.
- d. menjokong usaha-usaha partikelir lainnja jang dianggap berpaedah besar terhadap kemandjuaan peternakan rakjat.

Modal permulaan dari Jajasan ini diperdapat dari subsidi jang diberikan oleh Djawatan Kehewanan Sumatera Tengah sebesar Rp. 150.000.—. Djadinja pada achir tahun 1951 Jajasan ini telah mempunjai modal sebanjak Rp. 180.000.—

PROPAGANDA.

Selain dari patjuan-patjuan kuda jang dihidupkan kembali dalam tahun 1951 dan pemberian hadiah ditiap-ditiap Wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menggiatkan dan menggembirakan rakjat beternak, djuga diadakan dengan bantuan Djawatan Kehewanan:

1. Balapan sapi di Taram Kabupaten Lima puluh Kota.
3. Pertundjukan sapi di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.
3. Pertundjukan sapi di Batu sangkar Kabupaten Tanah Datar.
4. Aduan sapi (mengadu tenaga) dan pertundjukan ternak di Kota Lawas Wilayah X Kota Kabupaten Tanah Datar.

Perlombaan-perlombaan ini selalu mendapat perhatian jang memuaskan dari rakjat.

PERSATUAN SAUDAGAR INDONESIA.

PERSATUAN Saudagar Indonesia memulai pergerakannya di Sumatera Tengah semendjak tahun 1916. Ia dimasa itu digerakkan oleh almarhum Injik Basa Bandaro beserta teman-temannya. Kesedaran memperbaiki tingkat hidup telah menguatkan almarhum Injik Basa Bandaro berdjoang dialam persaudagaran. Akan tetapi usaha itu tidak mudah dan tak mungkin ditjapai dengan lekas. Kegagalan beliau dalam hal memberi keuntungan jang dapat diterima dengan lekas, bukanlah berarti suatu kegagalan ataupun suatu kemunduran, karena tjita-tjita memperdjoangkan perbaikan kedudukan dengan persatuan sudah tersebar dikota-kota perniagaan Minangkabau. Nikmat persatuan itu berangsur-angsur dapat dirasakan oleh para pengusaha/saudagar Indonesia disini.

Demikianlah pertumbuhan gerakan saudagar didaerah ini, dimulai dari kota kekota, dari kabupaten kekabupaten, hingga akhirnya tertjapai kelak satu persatuan jang lebih besar dan meliputi daerah propinsi. Organisasi para saudagar ini didirikan dalam tahun 1916 dengan nama Saudagar Vereeniging; sebagai ketuanya untuk pertama kali ialah saudara Nurdin Saleh. Kemudian dalam tahun 1929 diubah dengan Himpunan Saudagar Indonesia dan sebagai ketuanya saudara Taher Marah Sutan. Dalam tahun 1935 ia kembali bernama Saudagar Vereeniging. Dizaman pendudukan tentera Djepang namanya ditukar dengan Persatuan Saudagar. Akhirnya semendjak diadakan reorganisasi pada bulan Nopember 1946 ia tetap bernama Persatuan Saudagar Indonesia.

Di Minangkabau gerakan persaudagaran itu berpusat di Pasar Gedang, Padang, dan meliputi djalan-djalan Pasar Ilir, Pasar Mudik, Pasar Batipuh, Pasar Malintang. Disanalah terletak gedung-gedung tempat para pengusaha Indonesia melantjarkan perniagaan mereka, dan dimana kelak bertumbuh pedagang-pedagang Indonesia jang sanggup memperdjuangkan perbaikan kedudukan dan meninggikan nama persaudagaran nasional pada umumnya. Dan disana pulalah organisasi persaudagaran ini berdjoang, dan memberi pimpinan.

Hasil jang njata dari asuhan dan pimpinan itu dapat kita lihat dengan terdapatnja sekarang di kota-kota perniagaan terpenting di Indonesia, pengusaha-pengusaha berasal dari Pasar Gedang Padang. Sebagai umpama kita sebutkan:

1. Abdul Aziz Latif, presiden-direktur Sumatera Banking and Trading Corporation Ltd., dan sekarang maskapai ini bergerak dalam lapangan perusahaan dok dan pembuatan kapal; brain-trust dari N.V. Hadji Abdul Latif, jang mana selain bekerdja dilapangan impor pun mempunyai textiel-fabriek.
2. Rahman Tamin, promotor dari organisasi jang bernama Gabungan Importir Indonesia (GINDO) dan kemudian dalam tahun 1951 ditukar dengan nama Gabungan Pembelian Importir Indonesia (GAPINDO). Ia djuga pemimpin umum dari Firma Rahman Tamin, yakni satu perusahaan Indonesia jang termasuk golongan Importir Indonesia jang kuat.
3. Ismael Gani dan Jan Tamin, kedua-duanja pedagang jang masjhur dalam masjarakat dagang di Medan, dan masing-masing memimpin perusahaan impor.
4. Salim Djalil, pemimpin dari Firma Salim Djalil, importir di Surabaja.

Benih-benih jang dalam pertumbuhan dan menudju pada perniagaan/perusahaan besar banjak sekali, seperti: Firma Marah Taha-rudin exportir, Firma Sjakur Munaf importir, Firma B. Datuk Madjo Kajo importir, Firma Abdul Fatah Sutan Melano importir, N.V. Sridharma dan lain-lain.

Saudagar-saudagar dan pengusaha-pengusaha jang bonafide, dan selama perdjoangan kemerdekaan mengalami pukulan hebat, sekarang berangsur-angsur tumbuh kembali. Mereka pada umumnja menempuh waktu jang pahit sekali sebagai akibat tindakan penje-hatan keuangan kita, dan terhadap pengaruh politik perniagaan ne-gara-negara luar terhadap negara kita. Akan tetapi bagai mana djuga besarnja kesulitan itu, namun mereka tetap berusaha untuk mentjapai tjita-tjitanja.

Ditindjau dari lapangan lain, jaitu dari segi agama dan politik, maka Persatuan Saudagar Indonesia selalu memperlihatkan penga-ruhnja. Andai kata tidak terlampau dilebih-lebihkan, maka boleh disebut bahwa tulang punggung perkembangan agama dan politik didaerah ini terletak di Pasar Gedang Padang. Almarhum Injik Basa Bandaro adalah perantara dalam pergerakan politik, jaitu menghubungkan saudagar-saudagar nasional dengan pemimpin-pemimpin politik. Orang-orang tua kita seperti almarhum Hadji Abdul Latif, almarhum Marah Tetek, almarhum Angkat Sutan, almarhum H.M. Thaher almarhum, Datuk Tan Mudo, dan jang masih hidup beliau-beliau Turki Bagindo Marah, Hadji M. Rusid, dan Hadji Marah Abdul Aziz, sangat berdjasa sekali dalam gerak-an sosial dan agama.

Mereka umumnja menjokong para alim ulama dengan perbenda-an guna perdjoangan mereka dilapangan keagamaan. Islamic Col-lege, P.G.A.I., Normal Islam dengan rumah anak jatimnja adalah

suatu kenyataan. Selain dari pada itu Studie-fonds Minangkabau yang didirikan pada tahun 1916, dan Serikat Usaha yang dibentuk guna menampung anak-anak yang tidak dapat diterima pada sekolah rakjat H.I.S. dan pembangunan dari sekolah rakjat Adabiah, tidak dapat dilupakan begitu saja. Kedua-duanya adalah hasil pekerjaan orang tua-tua kita yang dimaksud diatas. Atas usaha Tjabang Himpunan Saudagar Indonesia di Bukittinggi pada tahun 1930 telah berdiri Bank Nasional dengan pemimpinnja saudara Anwar Sutan Saidi, yang kemudian disusul organisasi dagang „Bumi Putra” dan „Nusantara”.

Selama perdjongan kemerdekaan, Persatuan Saudagar Indonesia banjak pula memberikan sokongannja. Kedatangan Ir. Sukarno dari Bengkulu pada tahun 1942 disambut oleh Persatuan Saudagar Indonesia dan menjokong beliau dengan sepenuhnja dalam pembentukan Komite Rakjat dikota Padang. Pada tahun 1945, dengan adanya proklamasi kemerdekaan, Persatuan Saudagar Indonesia tidak pula hendak ketinggalan. Pengangkatan Residen Sumatera Barat yang pertama j.i. tuan M. Sjafei — dilakukan digedung Persatuan Saudagar Indonesia di Pasar Ilir 42. Sedjarah Dewan Perwakilan Rakjat didaerah ini djuga dimulai digedung Persatuan Saudagar Indonesia, karena Komite Nasional Indonesia Sumatera Barat mengadakan rapatnja yang pertama di Pasar Ilir 42. Dalam hal tersebut banjak usaha saudara Marzuki Jatim Wakil Ketua Persatuan Saudagar dimasa itu, dan sebagai pemimpin yang memasuki gelanggang politik dari golongan saudagar, dan yang telah menarik kerdjadian bersedjarah tadi ke Pasar Gedang. Pengurus-pengurus Persatuan Saudagar turut giat bergerak dalam pembentukan Tentera Keamanan Rakjat (T.K.R.), dan Perseroan Bank Sumatera yang didirikan atas inisiatip Persatuan Saudagar Indonesia, sangat banjak menolong pemerintah dalam keuangannja. Pun Persatuan Saudagar Indonesia tetap memperhatikan pendidikan, dan kepada Jajasan Sriwidjaja yang membiyai Perguruan Tinggi Pantjasila, ia dalam bulan Maret 1951 telah menjerahkan sokongan pertama sebesar Rp. 33.350,—. Akan tetapi sebagai kelanjutan proklamasi kemerdekaan tahun 1945 itu, kita meninggalkan kota Padang dan bertempat di kota-kota perniagaan lainnja di Sumatera Barat.

Dalam keadaan demikian, oleh saudara almarhum Chatib Suleman pada bulan Nopember 1946 diadakan satu konperensi perdagangan, guna menjusun kembali tenaga-tenaga yang telah terpetjah belah itu dan yang akan meneruskan perdjongan dilapangan perekonomian. Konperensi Perdagangan tanggal 11 dan 12 Nopember 1946 telah melahirkan Persatuan Saudagar Indonesia dan disingkatkan dengan nama PERSI. Sebagai memperingati waktu tersebut, baiklah kita batjakan kembali pengumuman almarhum Chatib Suleman seperti berikut:

„Dengan menghormati Konperensi Perdagangan tanggal 11 dan 12 Nopember 1946 di Bukittinggi, dimana Saudagar-saudagar da-

lam Persatuan Saudagar Indonesia telah mengambil keputusan-keputusan jang djitu, sedjalan dengan politik pemerintah, jang berudjud membantu berlakunja undang-undang/peraturan Negara, serta penjelesaian keselamatan dan kesedjahteraan umum, maka diserukan kepada pegawai-pegawai, polisi, dan lain-lain serta pemimpin-pemimpin dan rakjat seluruhnja memberikan bantuan kepada Persatuan Saudagar Indonesia, dan bekerdja sama serapat-rapatnja melantjarkan keputusan-keputusan tersebut bagi keselamatan dan kesedjahteraan bersama". Kita kenang kembali pengumuman itu, sebab djiwanja sungguh masih dibutuhkan sekali sekarang oleh para pengusaha umumnja dan organisasi Persatuan Saudagar Indonesia chususnya.

Persatuan Saudagar Indonesia sudah berumur 36 tahun, dan selama itu telah banjak pula hasil jang tertjapai olehnja. Berturut-turut kita sebutkan hasil-hasil jang dimaksud:

1916-1930.

1. Studie fonds Minangkabau, memberi bea-siswa bagi peladjar jang akan melandjutkan peladjarannja kesekolah tinggi.
2. Serikat Usaha, didirikan untuk memikirkan tjara penampungan anak-anak jang tidak diterima pada sekolah rakjat H.I.S.; sebagai hasilnja mendirikan sekolah rakjat bernama Adabiah.
3. Terbentuknja Bank Nasional di Bukittinggi jang dipimpin oleh saudara Anwar Sutan Saidi, jaitu hasil Himpunan Saudagar Indonesia tjabang Bukittinggi.

1935-1943.

1. Surat izin impor buat pemasukan dari Singapore via Pakan Baru bagi pedagang Indonesia, jaitu atas pertolongan Mr. M. Yamin: Inkorba N.V., Handel Mij Boemipoetra, dan lain-lain.
2. Berhasil menuntut claim pada leverancier (importir asing) atas kekeliruan melaksanakan pesanan, dan sanctie jang akan diambil bila tuntutan claim tidak dikabulkan ialah boycott.
3. Mendirikan Handel Mij „PERTJA" N.V. untuk menghadapi perniagaan hasil bumi.
4. Membatasi pengusaha asing masuk ke Pasar Gedang atas dasar mempertahankan Pasar Gedang buat pedagang nasional.
5. Mulai berdiri importir-importir Indonesia pada tahun 1941, jaitu atas bantuan Ir. Ibrahim.

1944-1946.

1. Mendirikan Perseroan Kilang Benang „MELATI" jang bekerdja dalam usaha pemintalan benang.
2. Pembelian Padang Gadut sebagai langkah ke-usaha pertanian.

3. Mendirikan Perseroan Bank Sumatera jang bekerdja sebagai bank perniagaan.

1947-1952.

1. Mendirikan Sumatera Banking and Trading Corporation Ltd., di Bukittinggi bersama-sama pemerintah Propinsi Sumatera.
2. Berdirinja perseroan dagang „Persdi” N.V. di Bukittinggi jang mempunjai tjabang diberbagai tempat.
3. Berdirinja Komite Gedung Persi jang akan bekerdja sampai Persi mempunjai gedung sendiri.

Hasil-hasil dimaksud tertjapai dibawah pimpinan jang baik dan bidjaksana dari pengurus-pengurus, dan untuk menjempurnakan riwayat ringkas ini kita terakan daftar orang jang telah mendjadi ketua dan sekretaris dari organisasi kita selama 36 tahun j.l.

Sebagai Ketua:

1. Nurdin Saleh (1916);
2. Taher Marah Sutan (1929);
3. Turki Bagindo Marah (1935—1943);
4. Abdul Fatah Sutan Melano (1943—1946);
5. Marzuki Jatim (1946—1952).

Sebagai Sekretaris:

1. Said Ali;
2. Taher Marah Sutan;
3. Rasjid;
4. Mr. Sutan Harun Alrasjid;
5. Mr. M. Nasrun;
6. Oemar Marah Alamsjah;
7. Bahsiar Rachman.

Selain dari pada jang telah diuraikan semula, Persatuan Saudagar Indonesia banjak sekali menerima bantuan moreel dari pemimpin-pemimpin politik, ulama-ulama, dan kaum terpeladjar seperti Mr. M. Yamin, Ir. Ibrahim, Mr. Abubakar Djaar, Mr. St. Harun Alrasjid, Mr. M. Nasrun, dan M. Sjafei.

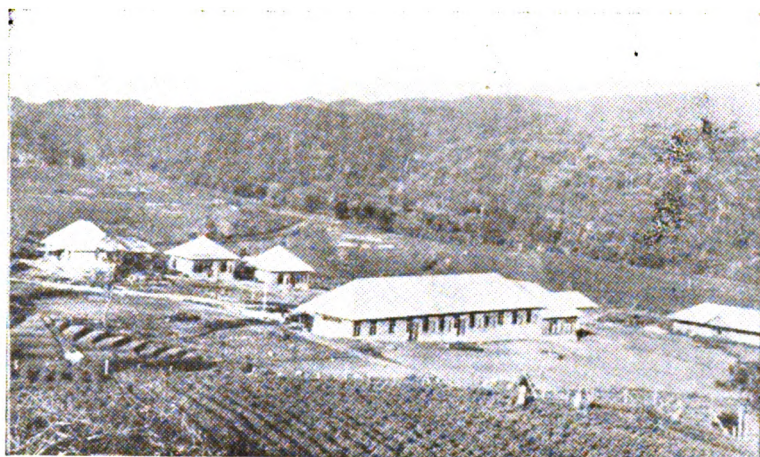


Bergotong-rojong mengerdjakan tanah untuk kebun perdjuangan jang diandjurkan oleh B.P.B.M.



Traktor sedang bekerdjia buat pembangunan daerah pertanian baru di Suka Menanti, Kab. Pasaman.

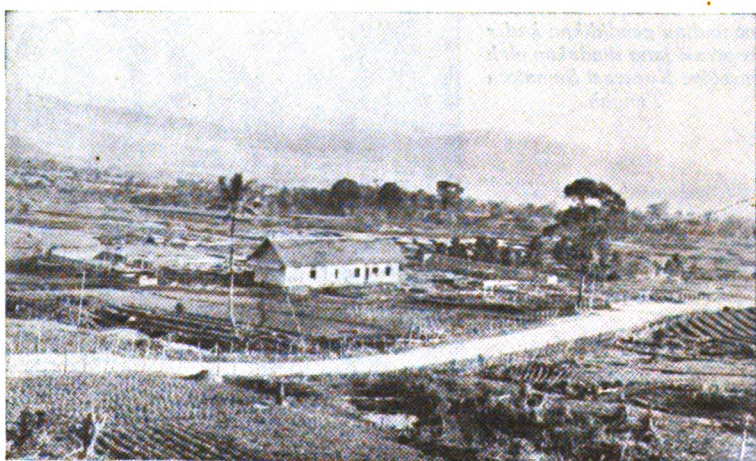
*Sekolah Pertanian Suka
Ramai (Solok).*



*Murid Sekolah Tani
Suka Ramai sedang
membikin sawah baru.*



*Kebun pertijobaan perta-
nian di Kajo Aro
(Solok).*





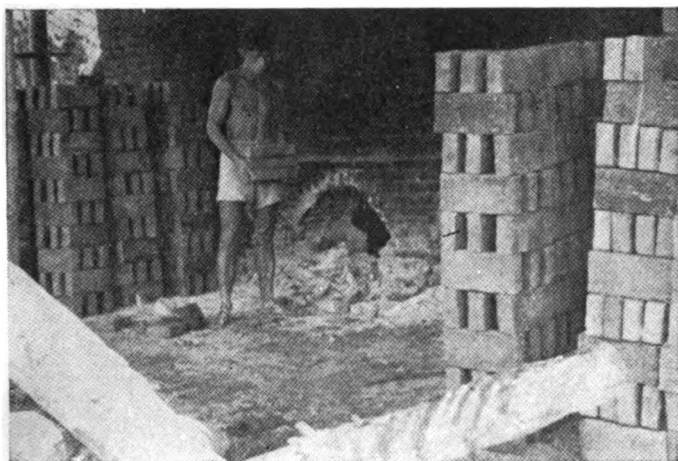
Balai Pendidikan Masyarakat Desa jang baru selesai dibangun.

*Wk. Presiden M. Hatta
menindjau pendidikan kader
koperasi jang diadakan oleh
Inspeksi Koperasi Sumatera
Tengah.*

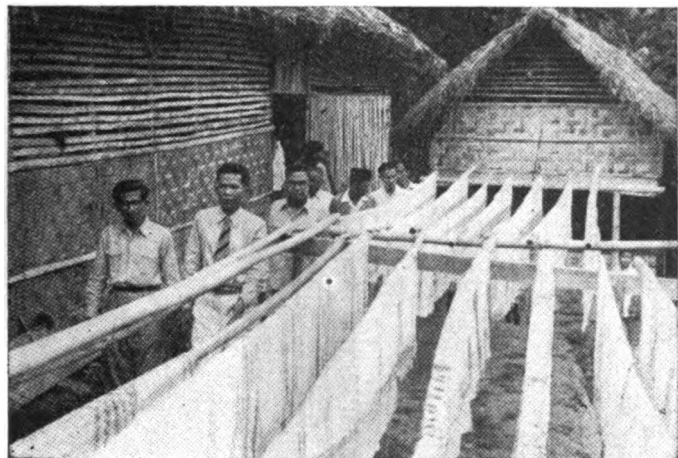




*Pembikinan genteng di
Sei. Djernih, Bukit-
tinggi.*



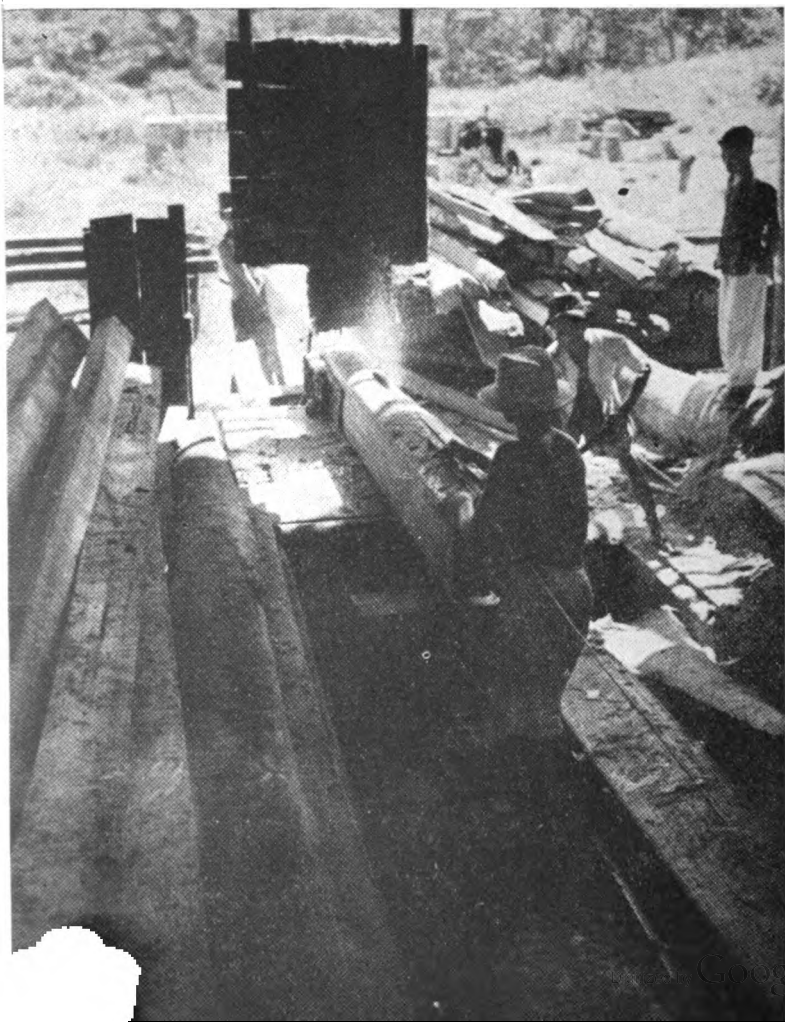
*Pembikinan batu merah
di K. Selajan, Bukit-
tinggi.*



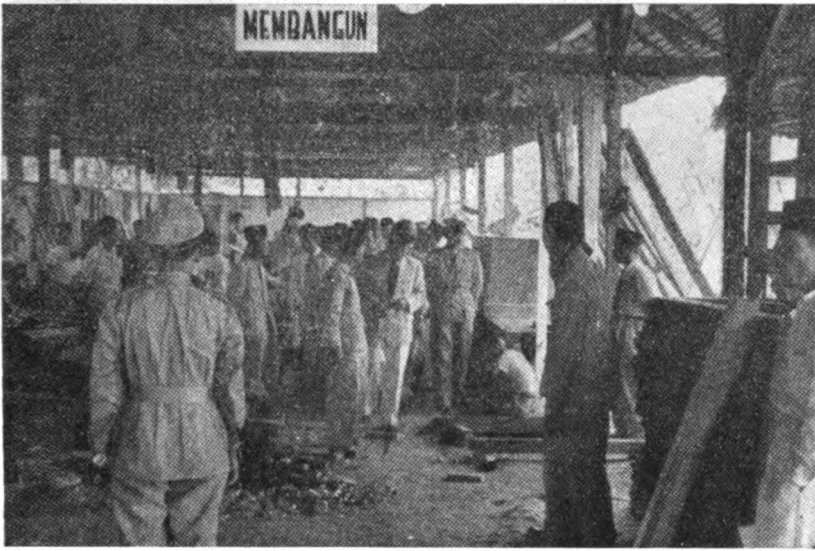
*Sebagian hasil dari Ko-
operasi pertenunan Si-
lungkang.*



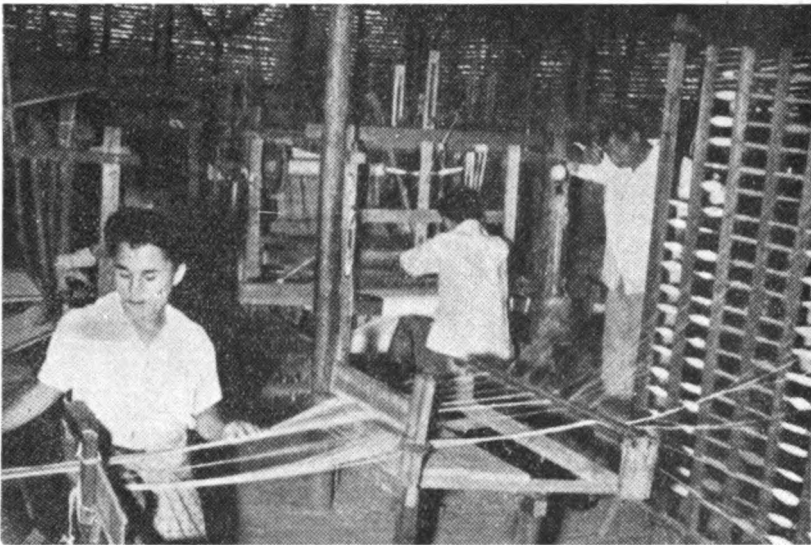
Kaju djuga banjak dihasilkan dari S. Tengah.



*Perusahaan peng-
gergajian kaju.*



Dari kaju diolah bermatjam-matjam alat keperluan rumah tangga.



Alat-alat pertenunan di Silungkang.



Perusahaan barang² kuningan, usaha rakjat di Sungai Puar (Kab. Agam).



Penangkapan ikan dikepulauan Riau.



Keadaan djalan-djalan pada tahun 1950 di Daerah Djambi.



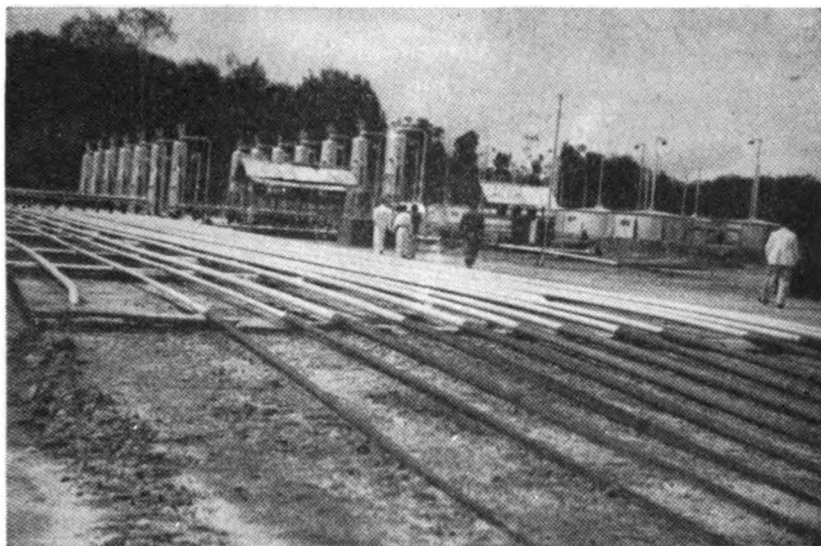
Stasion bus djurusan Pajakumbuh, Pakan Baru dari Bukittinggi.



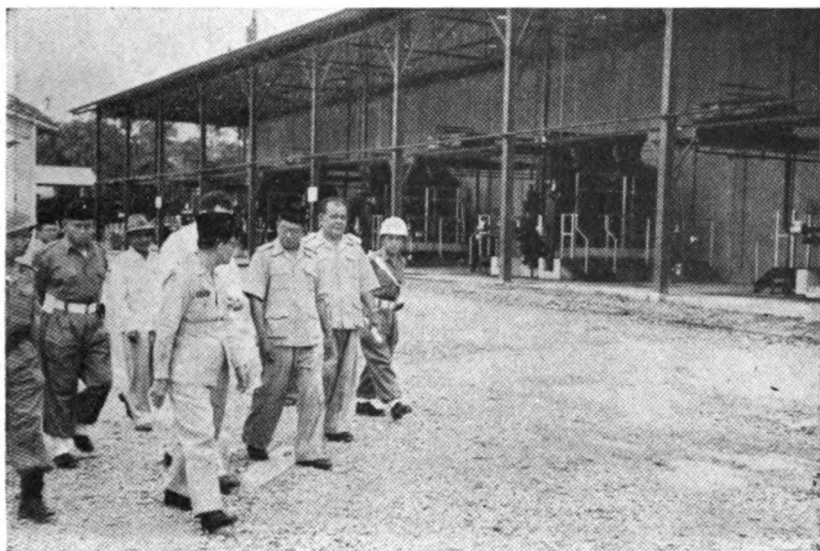
Lori jang dipergunakan untuk tambang batu bara Sawah Lunto.



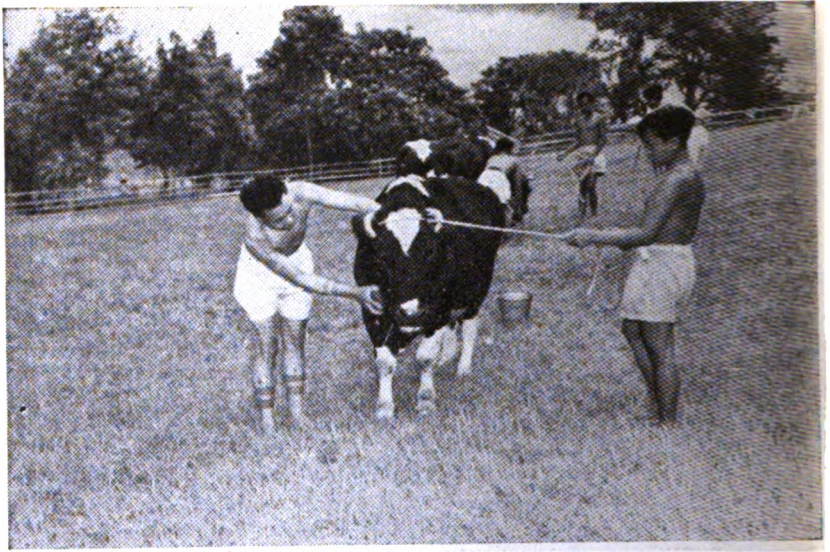
Anak Mentawai jang dididik oleh Djawatan Kehewanan di Padang Menggatas, Pajakumbuh.



Tanki-tanki minyak disalah satu pertambangan di Sumatera Tengah.



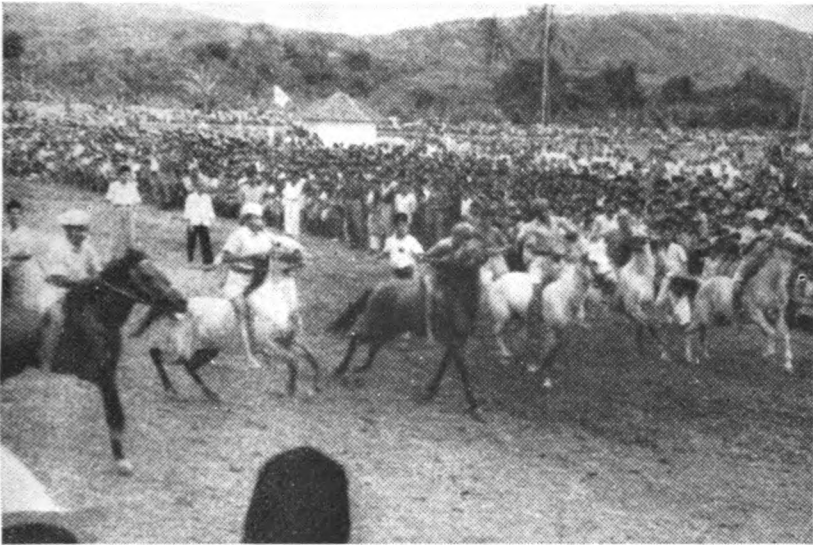
Rombongan Wk. Presiden meninjau tambang minyak Caltex Pk. Baru.



Sapi perahan di Padang Menggatas.



Sebagian dari peternakan kuda di Padang Menggatas.



Patjuan kuda, selain dari untuk keramaian rakyat, juga dijadikan salah satu usaha menggiatkan perbaikan peternakan kuda.



Perlombaan patju Djawi (sapi) dimaksudkan untuk perbaikan peternakan djawi (Batu Sangkar).

BAB 4
PEMBANGUNAN MASJARAKAT

BAHAGIAN VII

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 43.

KEADAAN DALAM MASA PEMERINTAHAN-BELANDA.

DALAM tahun 1885 wakil Pemerintah Hindia Belanda jang berkedudukan di Bukittinggi sudah mulai merasakan pentingnja untuk mengadakan sekolah bagi anak Indonesia, jang ketika itu disebutnja dengan „anak bumi putera”.

Perasaan ini adalah didorong oleh karena Pemerintah perlu memakai tenaga-tenaga bangsa Indonesia untuk melantjarkan djalanja kekuasaan pemerintahan dikalangan rakjat.

Untuk ini perlu tenaga-tenaga Indonesia dididik dan diberi peladjaran jang terbatas sekadar tjukup sadja untuk mendjadi alat apabila mereka telah dipekerdjakan mendjalankan perintah-perintah jang akan disampaikan kepada rakjat.

Pemerintah telah merasakan dan melihat kesulitan-kesulitan jang akan datang, manakala didalam mendjalankan kekuasaan ini tidak ada tenaga-tenaga dari kalangan rakjat sendiri.

Djadi, hasrat untuk mengadakan sekolah waktu itu, hanjalah karena dorongan kepentingan pemerintah Belanda semata-mata. bukanlah karena dorongan niat untuk mentjerdaskan bangsa Indonesia.

Sebaliknya dari dorongan kepentingan itu, merasai djuga, bahwa apabila anak-anak Indonesia ini diberi peladjaran jang seluas-luasnja, pasti bangsa Indonesia akan lekas madju dan mempunjai kesedaran, sehingga hal ini kelak mungkin akan membahayakan bagi kekuasaan pemerintah Belanda di Tanah Darat (Bukittinggi) sudah kira-kira 30 tahun lamanja, yakni sedjak tahun 1821.

Achirnja dalam tahun 1856 keluarlah keputusan Pemerintah untuk mengadakan sebuah sekolah Kweekschool di Bukittinggi. Sekolah ini sangat terbatas sekali dan murid-muridnja ditentukan benar orangnja, yakni dari golongan anak laras-laras dan orang-orang bangsawan jang sudah dipertjaja benar kesetiaannja kepada Pemerintah Belanda.

Guru-guru sekolah itu terdiri dari orang-orang Belanda jang bekerdja pada dinas-dinas Pemerintah dikantor residen. sedang muridnja jang mula-mula sekali berdjumlah 10 orang.

Selama 10 tahun sekolah berdjalan, maka dalam tahun 1866 sudah ada murid jang tammat 49 orang, diantaranya diangkat men-

djadi guru 12 orang dan jang lainnja dipekerdjakan pada dinas pemerintahan.

Berhubung karena sudah ada orang-orang Indonesia jang mendjadi guru, maka dalam tahun ini mulailah dibuka sekolah-sekolah rendah untuk rakjat, mulanja tiga tahun dan kemudian didjadikan 5 tahun, jang kemudian disebut dengan „Sekolah Gubernemen Kl. II”.

Adapun sekolah Kweekschool tadi, jang mulanja dianggap sebagai sekolah rendah sadja, maka dalam tahun 1873 dinaikkan deradjatnja dan ditinggikan mata peladjarannja serta diadjarkan djuga bahasa Belanda. Bahasa Belanda ini adalah salah satu mata-peladjaran jang dianggap sangat penting sekali pada masa itu untuk menambah pengetahuan murid-murid dalam mentjapai kemandjuan jang lebih tinggi.

Melihat bagaimana tjepatnja kemandjuan jang ditjapai oleh murid-murid Kweekschool dengan adanya peladjaran bahasa Belanda itu, maka dalam tahun 1884 peladjaran bahasa Belanda ini dimatikan kembali, dengan alasan-alasan, bahwa bahasa Belanda itu tidak ada faedahnja dan sangat sulit pula mengadjarkan dan difahami oleh murid-murid.

Dengan matinja peladjaran bahasa Belanda itu, maka Kweekschool jang tadinja telah mendjadi sumber kemandjuan bagi orang Indonesia, seakan-akan direndahkan kembali deradjatnja seperti bermula. Hal ini ketika itu dirasakan oleh murid-murid terutama oleh bekas-bekas murid Kweekschool jang telah mendjadi guru suatu pukulan atau usaha untuk memperlambat tertjapainja kemandjuan bangsa Indonesia, terutama karena buku-buku ilmu pengetahuan jang akan dibatja dan dipeladjadi pada masa itu hanjalah ada dalam bahasa Belanda.

Memang waktu itu ada djuga anak-anak Indonesia jang diizinkan memasuki sekolah-sekolah Belanda, tetapi djumlahnja tjuma satu dua orang sadja.

Oleh sebab itu bekas murid-murid Kweekschool jang telah mendjadi guru memandang, bahwa penghapusan kembali bahasa Belanda di Kweekschool sangat merugikan sekali, dan mereka terus memperdjuangkan dengan berbagai usaha jang bidjaksana dan tidak bosan-bosannja memadjukan permohonan supaya bahasa Belanda itu diadjarkan kembali.

Selama 6 tahun soal ini diperdjuangkan oleh mereka, jang dipelepori oleh alm. e. Nawawi St. Makmur dan Thaib St. Pamuntjak, maka dalam tahun 1904 diadjarkan kembali bahasa Belanda di Kweekschool Bukittinggi sebagai pertjobaan dikelas I. Diseluruh Indonesia waktu itu hanja di Kweekschool Bukittinggi sadja jang diadjarkan bahasa Belanda sebagai satu-satunja tempat untuk pertjobaan.

Dalam hubungan ini pihak guru-guru Belanda jang tidak senang melihat kemadjuan-kemadjuan bagi bangsa Indonesia terus djuga berusaha mempersulit tjara-tjara memberikan peladjaran bahasa Belanda ini, supaja murid-murid patah hatinja untuk beladjar. Pernah direktur sekolah itu sendiri mengatakan kepada murid-murid supaja bahasa Belanda ini dimatikan kembali dan murid-murid klas I dinaikan sadja kekelas III supaja boleh tjepat mendjadi guru.

Tetapi murid-murid tetap bertahan karena kedua alm. e Nawawi dan Thaib serta kawan-kawannja selalu memberikan dorongan kepada murid-murid supaja bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Belanda itu, karena dengan pengetahuan bahasa asing itu nanti bangsa Indonesia akan dapat mentjapai kemadjuan dan ketinggian deradjat dibelakang hari.

Achirnja untuk mendudukan soal ini, apakah bahasa Belanda akan tetap diteruskan atau tidak, maka oleh Pemerintah dibentuklah suatu komisi jang akan menjelidiki bagaimana hasil-hasil pertjobaan jang telah dilakukan itu. Melihat hasil-hasil pertjobaan itu ada memuaskan, maka komisi tadi menetapkan, bahwa peladjaran bahasa Belanda di Kweekschool Bukittinggi ada berhasil baik dan perlu seterusnya diadjarkan di Kweekschool.

Semendjak itu ditetapkanlah, bahwa disemua Kweekschool diseluruh Indonesia, seperti di Djawa, Ambon dan lain-lainnja diadjarkan bahasa asing (Belanda).

PERKEMBANGAN SEKOLAH BERTAMBAH PESAT.

Sedjalan dengan perkembangan-perkembangan djiwa jang hidup dalam masjarakat jang kesadarannja semakin hari semakin meningkat madju, terutama lagi dengan lahirnja pergerakan Budi Utomo dalam tahun 1908, jang selalu mendesak kepada Pemerintah supaja usaha-usaha pengadjaran dan pendidikan bagi bangsa Indonesia diperluas dengan seluas-luasnja, maka dalam tahun 1908 itu mulailah pula ditambah mengadakan sekolah-sekolah rendah untuk rakjat, yakni Sekolah Negeri atau Sekolah Desa 3 tahun, jang beajanja ditanggung oleh masing-masing negeri dimana sekolah-sekolah itu diadakan. Kemudian dalam tahun 1913 sekolah-sekolah negeri diberi subsidi oleh Pemerintah.

Selain dari pada itu dalam tahun-tahun berikutnja disamping sekolah Kelas II 6 tahun jang telah diadakan djuga lebih dulu, dibuka sekolah-sekolah sambungan, yakni Sekolah Sambungan buat laki-laki, dan kemudian sekolah Sambungan untuk perempuan (Meisjes Vervolkschool).

Sekolah-sekolah Sambungan ini adalah untuk penampung murid-murid jang lulus dari Sekolah Negeri (Volkschool).

Disamping itu, berhubung pula karena tenaga-tenaga guru yang berbahasa Belanda keluaran Kweekschool sudah ada, maka dalam tahun 1912 oleh Pemerintah diadakan pula Sekolah Klas I berbahasa Belanda, yang kemudian pada tahun 1915 sekolah ini dinamai H.I.S. (Hollands Inlandsche school).

Murid-murid yang diterima disekolah ini dipilih dari anak-anak demang atau pegawai-pegawai pemerintah yang lain. Anak-anak dari golongan kaum tani atau kaum buruh dan pegawai ketjil, tidak dapat sedikitpun dibolehkan masuk.

Dalam tahun 1916 di Padang Pandjang didirikan Sekolah Normal tjampuran dan kemudian pada tahun 1918 sekolah ini dibagi dua, jaitu Sekolah Normal untuk laki-laki dan Sekolah Normal untuk perempuan dan kira-kira dalam tahun 1928 dibuka pula sekolah H.I.K. di Bukittinggi.

Sekolah-sekolah vak.

Disamping sekolah-sekolah yang tersebut diatas Pemerintah djuga mengadakan sekolah-sekolah vak, yang tingkatannya sangat rendah sekali, sehingga murid-murid yang keluar dari sekolah-sekolah vak itu tidak dapat melanjutkan peladjarannya kesekolah yang lebih tinggi.

Sekolah-sekolah itu diadakan hantalah sekadar untuk mentjita tenaga-tenaga pekerdja ketjil pada perusahaan-perusahaan, bengkel-bengkel atau maskapai-maskapai. Sekolah-sekolah tersebut diantaranya sebagai berikut:

Pertama: Sekolah-sekolah Tukang, jaitu A.S.V.I. (Ambacht School Voor Inlander) yang didirikan di Bukittinggi pada tahun 1915, lamanja 2 tahun dan tertentu untuk bahagian kaju; kemudian dalam tahun 1924 sekolah yang serupa itu dibuka pula di Padang bahagian kaju dan bahagian besi. Pada tahun 1930 bahagian besi pada sekolah ini dilandjutkan 1 tahun lagi dengan bahagian mobil. Kemudian lagi dalam tahun 1931 dibuka pula sebuah lagi di Padang Pandjang dengan bahagian kaju dan besi.

Kedua: Sekolah-sekolah Daqang Ketjil. Kursus-kursus Tani. Kursus Guru-guru Negeri (C.V.O.), Sekolah Kepandaian Puteri (1938) di Padang.

Demikianlah djalannya perkembangan sekolah-sekolah dan pendidikan dizaman pemerintahan Hindia Belanda sedjak mula sekolah itu didirikan pertama kali dalam tahun 1886.

Kesimpulan.

Pada tahun 1942, yakni pada waktu kekuasaan pemerintah Hindia Belanda berachir dengan masuknya tentera Djepang pada 17 Maret 1942, maka sekolah-sekolah hanya berdjumlah sebagai berikut:

Sekolah Negeri (Volkschool)	800	buah
Sekolah Sambungan	142	„
Sekolah Sambungan pr. (Meisjes Verv.)	37	„
Sekolah Dagang Ketjil	2	„
H.I.S. dan Schakelschool	14	„
Sekolah Tukang	3	„
Kursus Guru Negeri (C.V.O.)	10	„
Sekolah Normal	2	„
Mulo	1	„
Sekolah Kepandaian Puteri (S.K.P.)	1	„

Djumlah murid dari semua sekolah-sekolah jang tersebut itu 136.682 orang, diantaranya 55.066 orang perempuan dan 81.616 orang laki-laki, sedang gurunya sama sekali berdjumlah 2336 orang.

Sekolah-sekolah partikulir.

Melihat kepada djumlah sekolah-sekolah Pemerintah jang diatas itu, ternyata belum sedikit djuga dapat dikatakan berimbangan dengan kehendak masjarakat, jang telah lama menginsjafi, bahwa kemadjuan dan ketinggian deradjat suatu umat bergantung kepada pendidikan dan pengadjaran.

Djumlah dan matjamnja sekolah jang ada itu sesungguhnya ternyata amat sedikit sekali dibanding dengan djumlah anak-anak jang mesti bersekolah.

Lagi pula sekolah-sekolah H.I.S. atau sekolah rendah landjutan lainnja hanya berdjumlah 14 buah, sedang politik penerimaan murid padanjapun mempunjai batas-batas jang sangat istimewa pula.

Oleh karena factor-factor jang tersebut diatas begitupun karena lain-lain factor jang tersimpul dalam „onderwijs politiek” pemerintah maka dikalangan masjarakat orang berusaha mendirikan sekolah-sekolah partikulir, terutama sekolah-sekolah rendah landjutan, jang oleh pemerintah sangat dipersulit sekali djalannja.

Adapun sekolah partikulir jang didirikan ialah H.I.S. Adabijah Padang, jang didirikan pada tanggal 23 Agustus 1915 oleh Sjarikat Usaha jang dipimpin oleh alm. H. Abdullah Ahmad bersama dengan kawan-kawan beliau.

H.I.S. Adabijah ini adalah satu-satunya sekolah jang bersedjarah dan sudah banyak melahirkan orang-orang berdjasa dan pemimpin-pemimpin negara sekarang ini.

Sekolah ini didirikan dengan isi dan bentuk jang lain dari H.I.S. Pemerintah, H.I.S. Adabijah diisi penuh-penuh dengan djiwa

nasional dan terbuka untuk semua anak-anak dari segenap golongan dalam masyarakat, terutama golongan tani, dagang dan buruh ketjil jang tidak dapat sedikitpun memasuki sekolah pemerintah.

Berdirinja H.I.S. Adabijah ini berarti suatu lambang bagi kemadjuan pendidikan dikalangan rakyat dan mendiadi pelopor jang dapat dituruti oleh usaha-usaha partikulir jang lain-lain. Kemudian disamping H.I.S. Adabijah ini satu-satunya pula sekolah partikulir jang sangat bersedjarah dalam perkembangan masyarakat di Sumatera Tengah bahkan di Indonesia umumnja ialah ruang pendidikan I.N.S. di Kaju Tanam, jang didirikan dan ditijptakan oleh Marah Sutan dan Mohammad Sjafe'i pada tanggal 31 Oktober 1926, dengan asuhan dari organisasi Persatuan Pegawai Kereta Api dan Tambang Umbilin.

Djiwa dan system pendidikan dari I.N.S. ialah mengutamakan aktiviteit, melahirkan dan memupuk semangat bekerdja dan „pertjaja pada diri sendiri”.

Dalam systeem pendidikan I.N.S. tidak ada murid jang tidak madju, karena tiap-tiap murid dididik dan dilatih menurut bakat jang ada padanja. „Tuhan tidak sia-sia mendjadikan manusia dan alam lainnja. Tiap-tiapnja mesti berguna, dan kalau ia tidak dapat berguna itu adalah disebabkan karena kita jang tidak pandai menggunakannya”. Demikian bapak M. Sjafe'i pernah mengatakan.

Sebab itu, seorang murid jang berbakat seni-lukis, maka dalam I.N.S. simurid itu dididik dan dilatih semasak-masaknja dalam vak seni-lukis. Demikian pula, apabila seorang murid berbakat tukang maka ia dididik pula dengan teori dan praktek bertukang sampai masak. Begitulah seterusnya, sehingga dengan systeem jang demikian itu tidak ada murid jang tidak madju.

Hasil jang lebih besar ditijptakan oleh ruang pendidikan I.N.S. ini ialah: tiap-tiap murid jang tammat dari sana tidak ada jang ketjiwa kehidupannja dalam masyarakat, karena dengan ketjakaan dan kepandaian praktek jang ada, mereka sanggup berusaha sendiri dengan tidak mengharap kepada tolongan orang lain atau menunggu djabatan dikantor-kantor terbuka.

Dalam pada itu disebabkan beberapa hal, ruang pendidikan ini lepas dari asuhan Organisasi Persatuan Pegawai Kereta Api dan Tambang Umbilin. Dengan susah payah usaha ini diteruskan oleh Marah Sutan dan M. Sjafe'i.

Disana-sini timbul reaksi, bahkan ada jang menjatakan bahwa M. Sjafe'i mentjari kekajaan dengan sekolah tersebut, apalagi waktu itu murid-muridnja tambah lama membandjir datang dari seluruh daerah. Usaha untuk kemadjuan sekolah terus dijalankan, segala reaksi beliau hadapi dengan tenang dan sabar.

Pada tanggal 31 Oktober 1941, tibalah saatnja beliau memperlihatkan kepada masjarakat umum, bahwa ruang pendidikan jang beliau pimpin dan jang diasuh selama ini diserahkan (diwakafkan) kepada Ibu Pertiwi Indonesia, dihadapan Notaris R. Kadiman, dan sebagai Wali I tetap dipegang oleh M. Sjaf'e'i.

Selain dari kedua sekolah jang sangat bersedjarah ini, banjak lagi lain-lain sekolah partikulir jang lahir sesudah itu, baik jang diusahakan oleh badan-badan serikat atau panitia, baikpun jang diusahakan oleh perseorangan.

Semuanja telah memberikan bakti dan sumbangan jang sangat besar untuk perkembangan kemandjuaan bagi masjarakat jang tengah bergolak dalam perdjuaan politik untuk mentjapai kemerdekaan.

Diantara sekolah-sekolah itu dapat disebutkan disini sebagai berikut:

1. Di Padang: Perguruan Harlon Sukandar, Gumanti Instituut, H.I.S. Muhammadiyah.
2. Di Kaju Tanam; Sekolah Ekonomi jang dipimpin oleh S.M. Latif.
3. Di Padang Pandjang; Merapi Instituut, Schakelschool S.K.P.P., H.I.S. Muhammadiyah, dan Mahameru Instituut.
4. Di Kota Baru (Padang Pandjang): Taman Siswa.
5. Di Batu Sangkar: Taman Siswa.
6. Di Bukittinggi: Sekolah-sekolah V.S.M., Taman Siswa.
7. Di Sungai Puar (Bukittingi): Taman Siswa.
8. Di Matur (Bukittinggi) Taman Siswa.
9. Di Pajakumbuh: H.I.S. Muhammadiyah.
10. Selat Pandjang: Taman Siswa.
11. Di Djambi.
12. Sekolah-sekolah Tionghoa.

*
**

Pasal 44.

KEADAAN SELAMA PEMERINTAH PENDUDUKAN DJEPANG.

DALAM zaman pendudukan Djepang semua sekolah-sekolah Pemerintah jang lama dilandjutkan terus dan semua guru jang telah berangkat kekampungnja masing-masing waktu Djepang akan masuk dipanggil kembali untuk mengajar.

Semua sekolah-sekolah tersebut itu ditukar namanja dengan bahasa Djepang, seperti Sekolah Rendah dengan Koto Kokumin Gakko, sekolah landjutan dengan Tyu Gakko, sekolah Normal dengan Sihan Gakko dan lain-lain sebagainya.

Dalam pada itu, mana-mana diantara peladjaran jang tidak sesuai atau berlawanan dengan kemauan Djepang diubah dan bahasa-bahasa Belanda dan Inggeris dimatikan sama sekali.

Hanja sekolah Mulo sadja jang tidak diizinkan membukanja, sedang bekas murid-murid dari sekolah Mulo itu ditampungkan ke Sekolah Normal.

Tjuma sadja dalam masa Djepang ini, pengadjaran jang berupa pengetahuan umum kurang lantjar djalannja karena jang diutamakan sekali disekolah-sekolah itu ialah mempeladjar bahasa Djepang, bertaiso olah raga serta bergotong rojong, sedang pendidikan jang dipentingkan ialah pendidikan semangat.

Selain dari pada sekolah-sekolah jang tersebut dahulu, oleh pemerintah militer Djepang diadakan pula sekolah-sekolah tjepat untuk mentjitak kader-kader jang akan dipekerdjakan pada pemerintah. Sekolah-sekolah itu diantaranya, Sumatera Gunsei Gakko (Sekolah administrasi) dan Sumatera Djo Kyu Kan Ri Gakko (Sekolah pamongpradja) di Batu Sangkar, dimana murid-muridnja didatangkan dari seluruh Sumatera.

Politik pendidikan dan pengadjaran dimasa pemerintah pendudukan Djepang ini, begitupun pengawasan terhadap semua sekolah, baik sekolah pemerintah, partikulir dan sekolah-sekolah agama 100% dipegang oleh Gunsei Kan bahagian Pengadjaran/Pendidikan.

Hoofdschoolopziener jang mengawasi segenap sekolah-sekolah pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dijadikan wakil kepala Pengadjaran dikantor Syu Tyo Kan dengan tiga orang opziener, antaranja seorang opziener (penilik) untuk sekolah-

sekolah agama Islam, seorang opziener bangsa Tionghoa untuk mengawasi sekolah-sekolah Tionghoa dan seorang opziener lagi untuk mengepalai 20 orang penilik-penilik sekolah jang mempunyai daerah.

Alhasil, keadaan sekolah-sekolah serta djalan pengadjaran dan pendidikan dimasa pendudukan Djepang itu, hanja dititik-beratkan kepada memperluas bahasa Djepang serta memperdalam pendidikan semangat boshido ala Djepang pula, dan dengan tjara berangsur-angsur Pemerintah Djepang djuga berusaha menukar kebudayaan asli dari penduduk dengan kebudayaan Djepang sendiri.

Demikianlah keadaannja sampai pada saat Djepang kalah tahun 1945, dimana sekolah-sekolah pada masa itu sama sekali berdjumlah 1129 buah dengan djumlah murid sebanjak 156.649 orang dan guru 2892 orang. Disamping itu djumlah sekolah-sekolah partikulier dan sekolah-sekolah Agama ada 1413 dengan djumlah murid 109.699 orang dan guru 3971 orang.



Pasal 45.

PERKEMBANGAN SESUDAH PROKLAMASI.

Adapun matjam dan banjaknja sekolah-sekolah dalam bulan September 1945, masih tidak berkurang dari waktu jang silam. Sekolah-sekolah tersebut itu adalah seperti berikut:

1. Sekolah Negeri	894	buah	dengan	murid	125.289	orang
2. Sekolah Menengah Pertama	4	"	"	"	875	"
3. Sekolah Normal	2	"	"	"	250	"
4. Sek. Rendah Landjut (HIS)	14	"	"	"	4.520	"
5. Schakelschool	5	"	"	"	837	"
6. Sekolah Sambungan laki-laki	143	"	"	"	18.295	"
7. Sekolah Sambungan pr.	39	"	"	"	5.239	"
8. Sekolah Tani	12	"	"	"	452	"
9. Sekolah Kepandaian Puteri	1	"	"	"	162	"
10. Kursus Guru Negeri	10	"	"	"	300	"
11. Sekolah Teknik	3	"	"	"	276	"
12. Sekolah Dagang Ketjil	2	"	"	"	154	"

Selain dari pada itu sekolah-sekolah partikulir bersama dengan sekolah-sekolah Pemerintah sama sekali berdjumlah 1413 buah dengan djumlah murid 109.699 orang. Semua sekolah-sekolah jang tersebut dilandjutkan pembukaannja, dengan mengadakan perubahan-perubahan disana sini untuk menjesuaikan dengan kehendak negara jang sudah merdeka.

Masa itu masih didalam kesibukan jang sangat hebat, berhubung karena perdjjuangan revolusi masih sedang berdjalan dan Pemerintah N.R.I. didaerah ini sedang didalam taraf penjusunan disegala lapangan. Disamping itu perdjjuangan menentang Sekutu jang membontjengkan Nica sedang bergedjolak pula dimana-mana, begitupun dengan pihak Djepang jang menghalang-halangi usaha-usaha kemerdekaan.

Semua sekolah-sekolah itu dilaksanakan dengan urusan Kantor Djabatan P.P.K. daerah ini, jang waktu itu masih belum lagi ada perhubungan dengan Kementerian P.P. & K. di Djawa, begitupun dengan kantor Djabatan P.P.K. Propinsi Sumatera di Medan.

Berhubung karena masih belum adanja perhubungan itu, maka jang dapat diurus oleh Djabatan P.P.K. daerah ini hanjalah sekolah-sekolah rendah sadja, sedang mengenai sekolah-sekolah menengah ditunggu penglaksanaannja sampai ada perhubungan

dengan Kementerian atau Djabatan P.P.K. Propinsi. Sementara itu berhubung dengan berbagai kesulitan jang dihadapi, maka sekolah-sekolah partikulier dan sekolah-sekolah Agama kebanyakan tidak dibuka lagi.

Merombak tjorak dan dasar pendidikan.

Seperti jang disebutkan pada halaman berlalu, pendidikan dizaman pendjadjahan sengadja diadakan demikian rupa untuk kelantjaran administrasi dan kekokohan pemerintahan mereka.

Politik perbedaan pangkat, kedudukan, kulit dan warna jang didjalankan oleh pendjadjah segera diubah dan dirombak, sesuai dengan kedudukan sebagai satu bangsa merdeka seperti jang ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar R.I. Perubahan-perubahan itu adalah seperti berikut:

Sekolah-sekolah rendah mendjadi Sekolah Rakjat.

Untuk melantjarkan djalan pendidikan dan menjamakan bentuk dan tjorak sekolah-sekolah rendah, maka dalam tahun 1946 Pemerintah mengadakan beberapa perubahan dilapangan sekolah-sekolah rendah itu dan mendjadikannja mendjadi sekolah rendah 6 tahun jang disebut dengan Sekolah Rakjat. Kedjelasan dari perobahan-perobahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. melikwidir semua sekolah-sekolah rendah landjut (H.I.S. dan Schakelschool lama) 7 tahun dan sekolah-sekolah sambungan sekolah Kelas II 5 tahun mendjadi Sekolah Rakjat 6 tahun. Murid kelas 7 pada sekolah rendah landjut (H.I.S./Schakelschool lama) ditamatkan peladjarannja 6 bulan sebelum tahun pengadjaran habis, yakni dalam bulan Maret 1946.
- b. Mentjukupkan kelas-kelas pada semua Sekolah Negeri lama jang tiga kelas mendjadi 6 kelas dengan berangsur-angsur sehingga mendjadi Sekolah Rakjat 6 tahun.
- c. Menghapuskan pembayaran uang sekolah pada sekolah rendah (sekolah Rakjat).
- d. Menerima semua anak-anak pada semua sekolah, dengan tidak membeda-bedakan pangkat dan deradjat orang tua, seperti jang berlaku pada masa pendjadjahan jang silam. (Keputusan Pemerintah Daerah tanggal 7 Mei 1946 No. 45/11).

Dengan adanya perubahan-perubahan jang tersebut diatas itu tertjptalah bentuk serta tjorak jang sama dikalangan sekolah-sekolah rendah dengan nama **Sekolah Rakjat**, seperti jang dikatakan diatas.

Rentjana dan systeem peladjaran.

Rentjana dan systeem peladjaran bagi Sekolah-sekolah Rakjat seluruhnja disesuaikan dengan ketetapan Menteri P.P.K. jang disampaikan oleh Inspektur Sekolah Rakjat Propinsi Sumatera dengan kawat tanggal 1 April 1946 No. 149, yakni disekolah Rakjat diadjarakan peladjaran-peladjaran, jang tudjuannja terutama untuk mendidik anak-anak mendjadi bangsa dan warga-negara jang berguna bagi tanah airnja, sesuai dengan Pantja Sila Negara Republik Indonesia dan sifat-sifat Kewargaan Negara dan Kemanusiaan.

Dibawah ini diturunkan matjam peladjaran dan banjak djamnja dalam seminggu bagi sekolah-sekolah rakjat tersebut.

No.	Nama Peladjaran	Kl I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
1.	Didikan budipekerti dan agama	1-2	1-2	2	2	2	2
2.	Bahasa Indonesia	10-9	10-9	8	8	8	8
3.	Berhitung	6	6	8	7	7	7
4.	Ilmu Alam	—	—	—	—	1	1
5.	Ilmu Hajat	—	—	—	2	2	2
6.	Ilmu Bumi	—	—	—	2	2	2
7.	Sedjarah	—	—	1122	1	2	2
8.	Menggambar	—	—	1	1	2	2
9.	Menulis	4	4	4	4	2	2
10.	Gerak Badan	3	3	4	4	4	4
11.	Pekerdjaan Tangan	1	1	3	3	3	3
12.	Pekerdjaan Keputerian	—	—	—	(1)	(2)	(2)
13.	Seni Suara	2	2	3	3	3	3
14.	Kebersihan!Kesehatan	1	1	1	1	1	1
Djumlah		28	28	34	36	37	37

Keadaan murid dan guru.

Djumlah murid-murid baru terutama jang masuk kelas dalam tahun adjaran 1946/1947 berlipat ganda dari zaman pendjadjahan Belanda dan Djepang, sehingga djumlah murid-murid jang masuk dalam awal tahun adjaran 1946/1947 itu ada 2,95% dari djumlah penduduk, sedang jang masuk dalam tahun adjaran 1947/1948 naik mendjadi 3% dari djumlah penduduk.

Pada achir tahun adjaran 1947/1948 djumlah murid djadi berkurang sedikit, karena sekolah-sekolah jang ada didaerah pendudukan Belanda tidak dibuka lagi.

Dari beribu-ribu murid jang tiap-tiap tahun tammat dari Sekolah Rakjat ada kira-kira 30% jang meneruskan peladjarannja kesekolah landjutan, sehingga Pemerintah dalam masa tiga tahun itu

perlu menambah sekolah-sekolah Menengah di beberapa tempat seperti di Padang Pandjang dan Bukittinggi dan mendirikan yang baru di Pajakumbuh, Solok, Batu Sangkar, Pariaman, Sei Penuh, Sawah Lunto, dan beberapa tempat lagi di daerah ini.

Berhubung dengan kebandjiran murid dan memperluas sekolah setiap tahun, maka jumlah-jumlah guru yang akan memberikan pelajaran pada Sekolah-sekolah Rakjat perlu pula ditambah agar tetap ada keseimbangan antara perkembangan sekolah dan banjaknja murid dengan tenaga-tenaga guru yang semakin lama semakin banjak yang mesti dibutuhkan.

Sebab itu pada awal tahun ajaran 1946/1947 tenaga guru perlu ditambah kira-kira 1.000 orang dan pada tahun ajaran 1947/1948 perlu ditambah kira-kira 1.000 lagi.

Pertambahan banjak murid dan guru tiap-tiap tahun dapat diinjatakan dalam daftar yang tertera dibawah ini:

Djumlah	Achir tahun 1945	Bulan Des. '46	Tam-bahnja	Bulan Sep. '47	Tam-bahnja	Bulan Maret '48
Murd Guru	134.393 2.356	161.766 3.276	20% 39%	187319 3251	16% 0%	179213 4031

Pada umumnja guru-guru yang mengajar di Sekolah Rakjat, ialah mereka yang mempunyai idjazah Kweekschool, Normalschool, Guru Bantu, Kursus Guru Negeri dan sebagainya. Tetapi jumlah ini tidak mentjukupi lagi, oleh karena:

- bertambah besar dan banjaknja Sekolah Rakjat.
- guru-guru yang beridjazah Kweekschool dan Normalschool banjak yang dipindahkan ke S.M.P. dan sekolah landjutan lain, begitupun yang diterima menjadi murid Kursus Pendidikan, Sport Akademi dan lain-lainnja di Bukittinggi.
- sekolah guru di Padang Pandjang tidak lagi menghasilkan guru untuk Sekolah Rakjat.
- Kursus Guru Negeri (K.G.N.) tidak diadakan lagi;

Oleh karena hal-hal yang tersebut itu, maka Pemerintah terpaksa mengadakan rantjangan mendesak untuk mengadakan pendidikan guru tjepat, jaitu:

- mulai tahun 1946, pada semua Sekolah Rakjat yang telah berkelas 6 diadakan didikan Guru Muda, yang peladjar-peladjar-nja diambil dari pemuda-pemuda yang beridjazah Sekolah Rakjat atau sekolah lain yang setara, berumur diatas 16 tahun. Lama kursus ini mulanja 3 bulan dan dalam tahun 1947 diperpanjang

menjadi 6 bulan. Kemudian untuk mentjapai mutu guru yang lebih baik maka dalam tahun 1948 masanja diperpanjang lagi sampai setahun.

- b. oleh Djabatan P.P.K. Propinsi Sumatera, dalam bulan Oktober tahun 1947 didirikan Kursus Guru Sekolah Rakjat tingkat I, lamanja setahun dan peladjarnja adalah pemuda-pemuda tamatan S.M.P. Disamping itu oleh perkumpulan kaum wanita (P.P.I.) diadakan kursus partikular sematjam ini dengan mendapat tundjangan dari Pemerintah.

Dalam daftar yang ditjantumkan dibawah ini, dapatlah diketahui djumlah guru-guru Sekolah Rakjat menurut pendidikan dan idjazahnja masing-masing.

Tahun adjaran	Idjazah Kweeksch	Idjazah Normal	Idjazah G.G./K.G.N.	Djumlah guru
1945/1946	—	—	—	2.356
1946/1947	56	406	2.814	3.276
1947/1948	33	427	3.571	4.031

Melihat angka-angka diatas ternjata, bahwa amat sukar menempatkan seorang atau dua guru yang beridjazah Kweekschool atau Normalschool pada tiap-tiap Sekolah Rakjat. Oleh karena itu Pemerintah berusaha mengadakan Kursus-kursus Normal bagi guru-guru yang beridjazah K.G.N. dan lain-lain agar mereka lebih sanggup menghadapi kelasnja dengan mutu yang lebih baik. Kursus tersebut sebenarnja telah berdjalan semendjak tahun 1946 dengan hasil-hasil yang sangat memuaskan.

Disamping itu dengan ketetapan Gubernur Sumatera dalam bulan Maret 1948, guru-guru yang beridjazah Normaalschool diberi kesempatan mentjapai persamaan idjazah dengan Kweekschool, jaitu dengan mengikuti udjian penghabisan S.M.P.

Disamping itu oleh Ruang Pendidikan dan Kebudajaan Sumatera di Padang Pandjang yang dipimpin oleh bapak Mohammad Sjafe'i diadakan Kursus Pekerdjaan Tangan dan Kursus Menggambar bagi guru-guru Sekolah Rakjat agar mereka itu mendapat pengetahuan yang sempurna untuk memberikan peladjaran pekerdjaan tangan (handenarbeid) dan menggambar di Sekolah Rakjat, yang dahulunya dizaman pendjadjahan tidak sedikit djuga mendapat perhatian.

Dan mengenai peladjaran Agama yang telah diadjarkan di Sekolah Rakjat, maka sedjak bulan Pebruari 1948 Pemerintah telah mengangkat sedjumlah 272 orang guru Agama, dari orang-orang yang beridjazah Normal Islam, Islamic College, Kullijatul Mubaligin. Kullijatul Muballigat, Perguruan Thawalib dan lain-lainnja.

Sekolah-sekolah vak.

Sekolah-sekolah vak jang terus berdjalan sampai clash kedua hanjalah Sekolah Teknik (kaju/besi) jang ada di Padang Pandjang dan Sekolah Teknik (kaju) jang ada di Bukittinggi, sedang Sekolah Teknik jang di Padang terpaksa dibumi hanguskan, oleh karena pertempuran dengan tentera Nica terdjadi dipekarangan sekolah itu bulan Nopember 1945.

Dalam pada itu Sekolah Tehnik di Padang Pandjang, lebih besar dikerahkan untuk membuat alat-alat persendjataan, seperti bom tangan, stengun dan sebagainya, jang waktu itu sangat dibutuhkan sekali untuk perdjungan dan pertempuran melawan Belanda.

Sekolah-sekolah landjutan.

Kalau dalam masa pemerintahan Hindia Belanda dulu sekolah Mulo hanja satu buah sadja dan dimasa pendudukan Djepang ditambah mendjadi 4 dengan nama Tzyu Gakko, maka dalam zaman kemerdekaan ini sekolah tersebut telah diperbanjak mendirikanja dengan nama S.M.P. jang diadakan ditiap-tiap kota terutama tempat-tempat ibu kabupaten, dan kewedanaan, seperti Bukittinggi, Padang Pandjang, Solok, Batu Sangkar, Sei Penuh, Pajakumbuh, Pakan Baru, Djambi dan lain-lainnja.

Untuk landjutan jang akan menampung sekolah-sekolah S.M.P. ini di Bukittinggi diadakan pula sebuah S.M.A. Negeri.

Keadaan dalam waktu —agressi (clash ke II).

Selama clash ke II, ketika seluruh kota-kota diduduki oleh tentera Belanda, maka sekolah-sekolah tak dapat dilandjutkan lagi. Peladjar-peladjar Sekolah Menengah (S.M.P.) dan (S.M.A.) membantu barisan T.P. (Tentera Peladjar) jang turut aktif dalam perdjungan dan pertempuran-pertempuran bersama dengan tentera dan barisan-barisan gerilja lainnja.

Dalam pada itu ditempat-tempat atau daerah-daerah gerilja jang tak bisa ditjapai oleh Belanda, sekolah-sekolah diteruskan setjara darurat, baik Sekolah Rakjat maupun S.M.P.

Sementara itu dikota-kota jang diduduki Belanda Sekolah-sekolah Rakjat dan S.M.P. oleh pemerintah pendudukan diusahakan membuka kembali dengan tidak mengubah systeem dan tjara jang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik sebelum agressi.

Pasal 46.

PERKEMBANGAN SELANDJUTNJA SESUDAH PENJERAHAN KEDALAUTAN.

1. SEKOLAH RAKJAT.

PERKEMBANGAN Sekolah Rakjat sesudah penjerahan ke-
daulatan ini mengalami kemadjuan jang sangat pesat sekali.
Pokok-pokok jang menjebabkan demikian, terutama sekali oleh
karena djiwa masjarakat telah bebas dari kegelisahan jang dialami
selama adanja permusuhan dengan pihak Belanda, djustru selama
adanja perjuangnjan dan pertempuran jang tidak berkeputusan
antara Indonesia dengan Belanda semendjak Kemerdekaan Indone-
sia diproklamirkan.

Sebab-sebab jang lain, adalah karena keadaan dan keinsjafan
rakjat jang semakin mendalam terhadap pentingnja pendidikan
dan pengadaran jang mendjadi pokok utama dan sjarat muthlak
untuk mentjapai kemadjuan jang lebih tinggi, untuk mentjapai
kemuliaan dan kemakmuran jang abadi sebagai satu bangsa jang
merdeka dan berdaulat.

Disamping itu disebabkan djuga karena adanja perbelandjaan
jang tjukup dari Pemerintah, sehingga usaha untuk membangun
dan melaksanakan rentjana dan urusan-urusan Sekolah Rakjat
ini, baik mengenai isi dan djiwa sekolah, baikpun mengenai alat-
alat perlengkapan dan gedung dapat berdjalan dengan lantjar,
terutama pula karena eratnja kerdja-sama antara Pemerintah de-
ngan rakjat dalam hal ini.

Sekolah-sekolah, djumlah murid dan guru.

Banjak Sekolah Rakjat dalam tahun 1950 berdjumlah 1478
dengan djumlah murid sebanyak 304.932 orang. Dalam tahun
1951 sekolah ditambah 18 buah mendjadi djumlahnja 1496, sedang
djumlah murid tahun ini bertambah mendjadi 327.722 orang. Ke-
adaan ini membuktikan, bahwa tambahan sekolah tidak berim-
bangan dengan tambahan murid jang begitu banjak, artinja tam-
bahan sekolah tjuma 18, sedang tambahan murid 22.790 orang.
Djadi untuk menampung tambahan murid jang sebanyak ini, maka
tambahan sekolah paling kurang hendaknja 40 buah.

Oleh karena kekurangan tempat jang demikian itu, maka ter-
paksalah dilakukan hal-hal jang sebenarnja menurut hukum pen-

didikan kurang baik atau merugikan, seperti besarnya jumlah murid dalam satu kelas, banyak mengadakan kelas-kelas yang sederhana dan kelas-kelas terpaksa 2 a 3 kali dalam sehari berganti masuk.

Adapun ukuran sementara yang dipergunakan oleh Pemerintah (Kementerian P.P.K.) dalam pertimbangan Sekolah Rakyat dengan jumlah penduduk ialah dalam 1800 penduduk ada hendaknja satu Sekolah Rakyat.

Kalau jumlah sekolah yang 1946 itu dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumatera Tengah yang banyaknya 3.289.000 orang itu, maka ini berarti bahwa tiap-tiap 2200 orang penduduk baru mempunyai 1 sekolah. Dan keadaannya pada beberapa kabupaten adalah seperti berikut:

Kabupaten	berpenduduk	S.R.	rata-rata
Agam	342.481 jiwa	173 tiap-tiap	2300 penduduk 1 S.R.
Padang Pariaman	424.318 ..	159 ..	2800 .. 1 ..
Pasaman	171.780 ..	111 ..	1400 .. 1 ..
Sw.Sidjundjung	122.367 ..	87 ..	1400 .. 1 ..
Panah Datar	277.789 ..	133 ..	2000 .. 1 ..
Kepulauan Riau	160.346 ..	65 ..	2300 .. 1 ..
Bengkalis	192.728 ..	85 ..	2400 .. 1 ..
Batang Hari	125.470 ..	68 ..	3900 .. 1 ..
Indragiri	246.757 ..	106 ..	1800 .. 1 ..
Kampar	151.467 ..	80 ..	1900 .. 1 ..
Solok	278.447 ..	116 ..	2400 .. 1 ..
P.S. Kerintji	303.038 ..	122 ..	2500 .. 1 ..
Lp. Kota	251.887 ..	113 ..	2330 .. 1 ..
Kota Padang	108.728 ..	24 ..	4500 .. 1 ..
Merangin	169.969 ..	92 ..	1900 .. 1 ..

Pesisir Selatan/Kerintji berpenduduk 303.038 jiwa,

Lima Puluh Kota	..	251.887	..
Kota Padang	..	108.728	..

S.R. 122, tiap-tiap 2500 orang penduduk 1 sek.

..	92	..	1900	..	..	1	..
..	113	..	2330	..	..	1	..
..	24	..	4500	..	..	1	..

Adapun jumlah murid dalam tahun 1951 hampir mentjapai 10% dari jumlah penduduk Sumatera Tengah. Dari jumlah murid yang 327722 tadi itu, diantaranya 187.921 murid laki-laki dan 139801 murid perempuan, artinya murid perempuan 44% dari jumlah murid S.R. seluruhnya.

Murid-murid kelas I ditahun 1951 semuanya berdjumlah 100.996 orang terdiri dari anak-anak berumur 6 dan 7 tahun:

djumlah ini mestinja 4% dari djumlah penduduk artinja $4\% \times 3289000$ djiwa = lebih kurang 128.000 orang. Djadi masih ada lebih kurang 27.000 anak-anak jang berumur 6 dan 7 tahun jang tidak bersekolah.

Dalam pada itu, banjak murid jang ikut udjian masuk sekolah landjutan tahun ini berdjumlah 11.000 orang, sedang jang lulus hanja 18% dari murid jang ikut atau 15% dari djumlah murid kelas VI. Murid jang lulus umumnja memang dapat ditampung pada sekolah-sekolah landjutan kepunjaan Pemerintah maupun partikulir.

Tetapi murid jang tidak lulus artinja 85% dari djumlah murid kelas VI atau lebih kurang 10.200 orang kembali kemasjarakat.

Adapun banjak guru dalam tahun ini berdjumlah 6226 orang terdiri dari 83 orang beridjazah C.V.O., Guru Bantu, K.G.Tj, dan lain-lain.

Dalam tahun 1950 guru-guru ini hanja berdjumlah 5817 orang, terdiri dari 88 orang beridjazah K.S., 632 Normal dan 5097 guru-guru jang beridjazah lain-lain. Tambahannja dalam tahun 1951 409 orang, belum termasuk lagi guru-guru jang baru tammam dari S.G.B. atau K.G.B. sedjumlah 150 orang.

Diantara guru-guru jang 6226 itu, 1771 adalah guru-guru perempuan jang didalam pekerdjaannya sudah tentu guru-guru perempuan ini kerap kali tjuti sampai 2 a 3 bulan karena hamil, bersalin dan sebagainya.

Perbaiki mutu guru-guru dan pembaharuan dalam pendidikan.

Usaha-usaha untuk menambah tinggi mutu guru-guru dilaksanakan dengan mengadakan latihan-latihan guru-guru, kursus-kursus lisan atau tulisan dari Kementerian P.P.& K. Disamping itu dilakukan pula udjian-udjian persamaan S.G.B. dua kali dalam setahun. Dalam pada itu Djawatan P.P.& K. Propinsi Sumatera Tengah mengeluarkan madjallah Penghubung untuk memperluas pengetahuan guru-guru disamping memberikan penerangan jang berguna terutama dalam hal pendidikan dan pengadjaran.

Disamping usaha mempertinggi mutu guru seperti jang disebutkan diatas dilaksanakan pula usaha-usaha pembaharuan dalam pendidikan dan pengadjaran pada beberapa sekolah serta mengadakan Sekolah-sekolah Rakjat Teladan ditiap-tiap Kabupaten.

Udjud dari usaha pembaharuan ini ialah:

1. menjapai hasil jang sebesar-besarnja dengan memperhatikan hasil penjelidikan internasional pada lapangan pendidikan dan pengadjaran.
2. memasukkan dasar-dasar kebangsaan dalam pendidikan dan pengadjaran dengan berpedoman kepada Pantja Sila.

3. mengadakan keseimbangan antara semua mata-mata pelajaran.
4. menghidupkan dasar-dasar dinamik, aktipiteit, mentjipta dan lain-lainnja.
5. 1 sampai 4 dengan tidak menjimpang dari pada rentjana Kementerian P.P.& K.

Lain dari pada hal-hal jang tersebut diatas, telah diusahakan pula mendirikan KpKpKb (Kursus Pengadjar untuk Kursus Pengantar ke Kewadajiban Beladjar), dengan ikatan dinas. Sekolah KpKpKb ini diadakan ditiap-tiap Kabupaten dan djumlahnja menurut kebutuhan.

Kesimpulan.

Didalam soal perkembangan Sekolah Rakjat ini, kenyataan, bahwa setiap tahun masjarakat senantiasa menghadapi kekurangan rumah dan kekurangan guru, berhubung karena berkembangnja kemauan bersekolah dan membandjirnja murid jang masuk.

Walaupun setiap tahun sekolah dan guru dapat ditambah, tetapi karena djumlah murid jang masuk tidak berimbangan dengan tambahan sekolah dan guru tadi.

Hal ini hendak mendjadi dorongan jang mendesak bagi masjarakat umumnja untuk berusaha lebih banjak menambah sekolah dan mentjiptakan guru-guru jang bermutu.

Penyebaran Sekolah-sekolah Rakjat menurut angka-angka jang paling achir.

Dalam daftar angka-angka dibawah ini dapat diketahui perkembangan jang paling achir dari Sekolah-sekolah Rakjat dan disini njata tentang kekurangan S.R. itu bagi daerah Propinsi ini.

No. Kabupaten/Kotapradja.	Penduduk. S.R. Murid. Guru. Satu S.R. untuk tiap-tiap:				
1. Agam/Kota Bukittinggi	423255	173	45035	1037	2.446 orang.
2. Pasaman	166315	110	17097	360	1.512 ..
3. Limapuluh Kota	256706	112	24835	537	2.292 ..
4. Tanah Datar	286493	133	31374	718	2.154 ..
5. Solok	270623	116	27321	598	2.333 ..
6. Padang/Pariaman	445260	159	36978	728	2.800 ..
7. Kota Padang	150000	24	32120	658	6.250 ..
8. Pesisir Selatan/Kerintji	320000	122	14825	260	2.623 ..
9. Sawahlunto/Sidjundjung	139109	87	8185	128	1.598 ..

No. Kabupaten/Kotapradja.	Penduduk. S.R. Murid.Guru.Satu S.R. untuk tiap-tiap						
10. Kampar	157848	79	12053	257	1.998	..	
11. Inderagiri	242342	105	11776	228	2.286	..	
12. Batang Hari	142729	45	14648	275	3.172	..	
13. Merangin	169969	97	6843	139	1.752	..	
14. Bengkalis	194928	80	11272	213	2.286	..	
15. Kepulauan Riau	167613	68	9828	197	2.465	..	
D j u m l a h :	3493193	1511	304190	6333	—	—	

Sekolah rakjat partikular dan bangsa asing.

Adapun Sekolah-sekolah Rakjat partikular jang diusahakan oleh bangsa Indonesia, banjak kedapatan didaerah-daerah Kabupaten Kepulauan Riau, Batang Hari dan Merangin. Umumnja Sekolah-sekolah itu didirikan ditempat jang ketjil-ketjil dan tidak banjak mempunjai penduduk, dan tidak ada pula disana Sekolah Rakjat. Sekolah-sekolah ini didirikan oleh rakjat dan dibiajai oleh masja-rakat dimasing-masing tempat itu.

Disamping sekolah-sekolah rakjat nasional ini, banjak pula sekolah-sekolah bangsa asing, terutama jang didirikan oleh bangsa Tionghoa, baik golongan R.R.T. maupun dari golongan K.M.T.

Sekolah-sekolah ini memang banjak tersebar didaerah Sumatera Tengah, dikota-kota jang disana banjak penduduk Tionghoa, terutama sekali didaerah kabupaten-kabupaten Bengkalis, Kepulauan Riau, Inderagiri dan Batang Hari. Terhadap sekolah-sekolah partikular bangsa asing ini dari pihak Pemerintah (P. P. & K.) tampaknja belum lagi dilaksanakan pengawasan jang teliti.

Selain dari itu di Lirik ada pula sebuah Sekolah Rakjat kepunjaan S.V.P.M., di Tanah Busuk dan Sungai Sagu masing-masing ada pula Sekolah Rakjat kepunjaan Cultuur Maatschappij Inderagiri. Ketiga-tiga sekolah ini berdjalan dengan baik dan terus memasukkan laporannja kepada Pemerintah.

2. SEKOLAH-SEKOLAH LANDJUTAN.

Sedjalan dengan perkembangan Sekolah-sekolah Rakjat jang bertambah luas dan besar djumlahnja setiap tahun, demikian pula perkembangannja Sekolah-sekolah landjutan, tidak sadja pada bahagian sekolah landjutan umum (S.M.P.), tetapi dalam bahagian Sekolah-sekolah vak, terutama sekali bahagian vak teknik dan ekonomi.

Untuk menguraikan perkembangan sekolah-sekolah landjutan ini, baiklah dimulai lebih dulu dari bahagian sekolah-sekolah vak.

I. Sekolah Teknik.

Sekolah teknik atau sekolah tukang, jang kini bernama S.T.P. (Sekolah Teknik Pertama), mula-mulanja dalam zaman pemerintahan Hindia Belanda bernama „Ambachtschool voor Inlander” atau „Inlandsch Ambachtleergang”, jang waktu itu hanya berdjumlah 3 buah, yakni 1 di Bukittinggi, 1 di Padang dan 1 di Padang Pandjang.

Ketiga-tiga sekolah tersebut, hanjalah berupa eindopleiding, jang tidak ada kelandjutannja lagi, djika simurid sudah tammat dari sana.

Hal ini pada masa itu sudah semestinja demikian, oleh karena umumnja pokok dasar untuk mendirikan sekolah ini tentu tidak terlepas dari pada tjita-tjita kolonialpolitiek, yakni untuk mengisi perkembangan perindustrian pendjadjahan.

Peladjaran-peladjarannja diatur begitu rupa, sehingga anak-anak Indonesia tidak diberi kesempatan untuk berpikir dengan luas, dan hanya semata-mata dipergunakan sebagai alat.

Pada hakikatnja bagi putra-putra Indonesia hanya dibukakan pintu sekadar untuk memasuki sekolah teknik rendah jang dinamakan Ambachtschool Voor Inlander seperti jang disebutkan mula-mula tadi.

Sekolah ini bersifat eindopleiding, dimana simurid tak diberi kesempatan lagi untuk memasuki sekolah teknik jang lebih tinggi, dan hanya apabila simurid sudah tammat dari sana, maka mereka diberi pekerdjaan sebagai tukang pada perusahaan-perusahaan, bengkel-bengkel dan perindustrian-perindustrian pendjadjahan.

Oleh karena itu harus pula diingat, bahwa peladjaran-peladjaran disekolah tersebut sangat terbatas sekali. Disamping itu, memang

ada djuga sekolah-sekolah teknik lain jang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan program jang agak luas, tetapi itu bukanlah untuk putera Indonesia, melainkan untuk bangsa-bangsa lainnja. Sekolah ini terkenal namanja dengan Europeesche Ambachtschool. Keketjualian dalam hal ini memang ada, artinja memang ada djuga anak-anak Indonesia jang diterima mendjadi murid, tetapi sudah sangat istimewa dan sangat terbatas sekali.

Sekolah-sekolah teknik lainnja dari tingkatan atas adalah K.W.S. dan technische school jang hanja ada di Djawa. Sekolah ini memang ada menerima anak-anak Indonesia, tetapi itupun sangat terbatas sekali.

Dari sekolah ini tidak dapat peladjaran dilandjutkan ke Sekolah Teknik Tinggi, meskipun ada satu-satu murid Indonesia jang luar biasa kepandaiannja. Hanja jang dapat meneruskan peladjarannja ke Sekolah Teknik Tinggi (Technisch Hoogeschool) di Bandung ialah peladjar-peladjar jang terlebih dulu harus mengadakan udjian tambahan. Pada waktu itu di Sumatera Barat hanja ada 3 Sekolah Teknik.

Dizaman pendudukan Djepang Sekolah-sekolah Teknik, terutama kursus-kursus tjepat dalam vak didirikan sebanyak mungkin. Sekolah-sekolah dan kursus-kursus tjepat jang tersebut itu, isi dan maksudnja jang terutama ditudjukan untuk menjiapkan ahli-ahli teknik jang akan dikerahkan kebengkel-bengkel, terutama bengkel-bengkel persendjataan.

Kursus vak jang didirikan pada waktu itu hampir semuanya mempunyai program spesialisasi, sehingga peladjar-peladjar tamatan kursus-kursus itu sangat terbatas dan berat sebelah pengetahuan dan kepandaiannja.

Tentu sadja dalam banjak hal kursus-kursus jang sematjam itu tidak akan menguntungkan, lebih-lebih dalam usaha-usaha pembangunan jang sangat dibutuhkan pada sa'at ini.

Oleh sebab-sebab jang demikian, maka dalam permulaan masa Republik direntjanakan mendrikan Sekolah-sekolah vak baru dengan sebanyak mungkin.

Tetapi usaha-usaha kedjurusan ini banjak kandas dan menemui berbagai-bagai kesulitan, berhubung karena hebatnja blokade Belanda dan putusnja perhubungan dengan daerah-daerah lain seperti Djawa dan sebagainja. Terutama pula oleh karena negara kita sedang menghadapi keadaan perang dengan pihak Belanda, dimana pada sa'at itu peladjar-peladjar praktek dari tiap-tiap sekolah dikerahkan untuk membantu membuat alat-alat persendjataan bagi keperluan tentera.

Akan tetapi, walaupun masih didalam keadaan sulit jang demikian, namun ichtiar dan daja upaja untuk mengadakan tambahan

sekolah-sekolah teknik dapat djuga dilantjarkan menurut kekuatan dan kesanggupan jang ada, sehingga dalam masa itu telah dapat didirikan sekolah teknik:

1. sebuah sekolah Teknik Menengah di Sawah Lunto dalam tahun 1946, jang kemudian dalam tahun 1947 dipindahkan ke Bukittinggi,
2. sebuah S.T.P. di Solok dalam tahun 1948,
3. sebuah Kursus Akte K.W.S. di Bukittinggi dalam tahun 1948.

Pendeknja, sekolah-sekolah teknik di Sumatera Tengah sebelum clash ke II berdjumlah 5 buah, jaitu: 3 S.T.P., 1 S.T.M. dan 1 Kursus K.W.S.

Dalam rentjana ditjoba mengatur susunannja, bentuk dan isi dari padanja dengan keadaan-keadaan jang sesuai dengan kebutuhan Negara dan masjarakat pada waktu itu, serta mengadakan demokratisering, sehingga bagi peladjar-peladjar jang tjakap, maka pintu untuk meneruskan peladjaran kesekolah-sekolah jang lebih tinggi sudah terbuka seluas-luasnja bagi mereka; tidak lagi tertutup seperti pada zaman pendjadjahan dulu.

Perkembangannja sesudah penjerahan kedaulatan.

Terbukanja kembali perhubungan dengan Pemerintah Pusat sedjak masa penjerahan kedaulatan, maka kantor Inspeksi S.T.P. di Bukittinggi jang daerah-daerahnja meliputi seluruh Sumatera dengan kepala inspeksinja Saudara Kahar Masjhur, berusaha sedapat-dapatnja untuk mendirikan sekolah-sekolah baru mengingat sangat kurangnja tenaga-tenaga jang dihadapi dalam bahagian teknik ini, jaitu tenaga-tenaga jang sangat dibutuhkan sekali oleh Negara dalam usaha-usaha pembangunan.

Sebagai perbandingan dari keadaan sebelum perang dengan keadaan jang sekarang mengenai sekolah-sekolah teknik diseluruh Sumatera adalah seperti berikut:

Sekolah	Masa pendjadjahan	R.I. 1953
S.T.P.	9	25
S.T.	—	5
S.T.M.	—	2

Disamping itu ada lagi kursus-kursus jang diselenggarakan disekolah-sekolah S.T.P. untuk mentjapai idjazah S.T.P., jaitu:

1. Kursus untuk Tentara di S.T.P. Medan,
2. Kursus Demobilisant djuga di S.T.P. Medan

3. Kursus Demobilisant di S.T.P. Bukittinggi,
4. Kursus Demobilisant di S.T.P. Padang Pandjang,
5. Kursus Demobilisant di S.T.P. Palembang
6. Kursus untuk Tentera djuga di S.T.P. Palembang.

Daftar S.T.P., dan S.T.M. di Sumatera.

Untuk dapat diketahui dengan djelas berapa djumlah S.T.P., S.T.; S.T.M. baru jang sudah ada di Sumatera dan dimana tempat-tempatnja diterangkan dalam daftar dibawah ini:

Propinsi	Nama tempat	S.T.P.	S.T.	S.T.M.	Bahagian
Sum. Tengah	—	12	1	1	—
1.	Bukittinggi	1	1	—	Besi/kaju
2.	Padang	1	—	—	"
3.	Padangpandjang	1	—	—	Besi
4.	Solok	1	—	—	Kaju
5.	Pariaman	1	—	—	"
6.	Batu Sangkar	1	—	—	"
7.	Sungai Penuh	1	—	—	Kaju/Besi
8.	Bondjol	1	—	—	Kaju
9.	Pajakumbuh	1	—	—	"
10.	Pakan Baru	1	—	—	"
11.	Djambi	1	—	—	"
12.	Magek (Bkittinggi)	1	—	—	Kaju
Sumatera Utara	—	9	—	—	—
1.	Medan	1	1	1	Kaju/Besi
2.	Siantar	1	—	—	"
3.	Tebing Tinggi	1	—	—	"
4.	Laguboti	1	—	—	"
5.	Sibolga	1	—	—	"
6.	Gunung Setoli	1	—	—	"
7.	Kota Radja	1	—	—	"
8.	Sigli	—	—	—	Kaju
9.	Langsa	1	—	—	"
Sumatera Selatan	—	4			
1.	Palembang	1		—	Kaju/Besi
2.	Tg. Terang	1	—	—	"
3.	Bengkulu	1	—	—	"
4.	Sungai Liat	1	—	—	"

Menurut rentjana semula, diseluruh Sumatera akan didirikan S.T.P. sebanyak 115 buah, jaitu: 45 di Sumatera Tengah, 45 di Sumatera Utara dan 25 di Sumatera Selatan. Tetapi berhubung dengan beberapa keadaan, maka seluruhnya rentjana itu belum dapat dilaksanakan.

Di Sumatera Tengah diadakan sebuah kantor Penilik S.T.P. dan dipimpin oleh Saudara Sidi Baharudin, melulu menghadapi S.T.P. Sumatera Tengah sebagai membantu kantor Inspeksi.

II. Sekolah Ekonomi.

Disamping sekolah-sekolah vak khusus untuk bahagian teknik seperti yang telah diterangkan diatas, sangat penting pula peranan sekolah-sekolah vak ekonomi.

Sama djuga keadaannya dengan sekolah vak teknik, dimasa pendjadjahan sekolah vak ekonomi ini sangat pula terbatasnya bagi bangsa Indonesia, bahkan boleh dikatakan tidak ada sama sekali.

Memang ada dibuka sebuah sekolah Dagang Ketjil untuk seluruh daerah ini, tetapi sifat dan isinya tidak sedikit djuga berbeda dengan Ambachtsleergang yang telah diuraikan diatas tadi itu, karena sekolah itu bersifat eindopleiding rendah djuga.

Memang pula pada waktu itu di Djawa ada sekolah-sekolah ekonomi yang agak tinggi (menengah) seperti P.H.S. (Prins Hendrik School) dan M.H.S. (Middelbaar Handelschool), tetapi yang sangat diutamakan adalah untuk murid-murid bangsa asing.

Pada umumnya, pokok dasar mendirikan sekolah Dagang Ketjil yang diuntukkan bagi anak-anak Indonesia itu, ialah sekedar untuk mengisi kepentingan perdagangan kolonial semata-mata.

Kemudian setelah Indonesia menjadi satu Negara yang merdeka, sangat terasa sekali kekosongan tenaga-tenaga ahli dalam bahagian ekonomi (perdagangan/perindustrian) dikalangan bangsa sendiri, dimana struktur ekonomi masih diliputi oleh struktur ekonomi pendjadjahan.

Kemerdekaan politik belum akan berarti apa-apa bagi kemakmuran Negara dan rakyat, manakala kemerdekaan ekonomi masih belum tertjipta dengan sepenuh-penuhnya.

Ekonomi itu adalah ibarat darah bagi suatu Negara, djika Negara itu dimisalkan dengan tubuh manusia. Untuk menjehtakan ekonomi Negara ini, perlulah struktur ekonomi pendjadjahan tadi itu diganti dengan struktur ekonomi nasional, dan kekosongan tenaga ahli dalam hal ini mesti diisi dengan setjepat-tjepatnya.

Untuk ini perlu didirikan sekolah-sekolah vak ekonomi dengan sebanjak-banjaknya, yakni seperti yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dengan membuka sekolah-sekolah S.M.E.P. di beberapa tempat dengan berangsur-angsur, seperti yang sudah ada di Padang dan lain-lain.

Dalam pada itu bulan Nopember 1952, telah dapat pula dibuka sebuah S.M.E.A. di Padang dibawah pimpinan saudara Ali Luis.

Sebenarnya sekolah ini resmi berdiri bulan Djuli 1952, tetapi karena beberapa hal, terpaksa pembukaannya dimundurkan sampai bulan Nopember 1952.

Walaupun pembukaan S.M.E.A. ini tidak diumumkan setjara luas, tetapi tjukup mendapat perhatian jang luar biasa dari kalangan-kalangan pemuda dan masjarakat umumnja. Hal ini membuktikan, bahwa hasrat untuk mentjiptakan „ekonomi minded” dikalangan masjarakat telah tumbuh dengan subur.

Peladjar-peladjar jang mendaftarkan diri untuk memasuki S.M.E.A. ini berdjumlah lebih dari 500 orang, jang datang dari seluruh kabupaten di Sumatera Tengah.

Jang dapat diterima hanya 78 orang, yakni sesudah diadakan secreening dengan seteliti dan seadil-adilnja, berhubung karena S.M.E.A. ini menurut perintah Kementerian P.P.& K. boleh dibuka paling tinggi 2 kelas.

Murid-murid jang 78 orang itu adalah anak-anak dari kabupaten-kabupaten dan kota:

a. Padang Kota	25 orang
b. Padang/Pariaman	11 „
c. Pesisir Selatan Kerintji	6 „
d. P a s a m a n	4 „
e. A g a m	13 „
f. Lima Puluh Kota	3 „
g. S o l o k	2 „
h. Sawah Lunto Sidjundjung	3 „
i. Tanah Datar	10 „
j. Inderagiri	1 „

III. Sekolah-sekolah vak jang lain-lain.

Selain dari sekolah teknik dan sekolah ekonomi jang tersebut diatas banjak lagi sekolah-sekolah vak jang perlu ditjatet didalam perkembangan pendidikan dan pengadjaran di Sumatera Tengah ini.

Diantaranya ialah sekolah-sekolah Bidan di Bukittinggi, Sekolah Djururawat di Sawah Lunto, Sekolah Stopio di Bukittinggi, sekolah-sekolah Pertanian jang diadakan pada beberapa kabupaten dan sekolah-sekolah SKP.

Adapun sekolah-sekolah SKP ini telah berkembang pula dengan luasnja dalam masjarakat. Selain dari S.K.P. negeri banjak pula S.K.P. partikulir jang diusahakan oleh organisasi-organisasi wanita dibeberapa kota-kota di Sumatera Tengah.

Lain dari pada itu, sekolah Taman Kanak-kanak pun memegang peranan penting pula didalam perkembangan pendidikan. Sekolah-sekolah Taman kanak-kanak inipun telah mulai pula berangsur meluas, diantaranya, disamping jang diusahakan oleh Pemerintah, banjak pula jang diusahakan oleh organisasi dalam masjarakat, terutama oleh organisasi-organisasi wanita.

IV. Sekolah-sekolah guru.

Sedjalan dengan perkembangan sekolah-sekolah rendah (S.R.) jang setiap tahun bertambah pesat seperti jang telah diuraikan dalam pasal-pasal jang terdahulu, maka hal itu menjebabkan pula sekolah-sekolah guru mendjadi menuruti arusnya.

Perkembangan sekolah-sekolah guru ini tidak sedaja untuk mengisi dan menuruti arus Sekolah Rakjat, tetapi djuga untuk S.K.P., Taman Kanak-kanak dan lain-lainnja.

Kalau dulu dizaman sebelum perang sekolah-sekolah guru ini tidak berapa buah djumlahnja didaerah ini, maka semendjak sesudah penjerahan kedaulatan sampai pada sa'at ini, telah berlipat ganda dari masa sebelum perang.

Selain dari S.G.B., K.G.B. dan KpKpKb, jang telah didirikan ditiap-tiap kabupaten telah didirikan pula 3 buah S.G.A., jaitu pertama di Padang Pandjang, dibuka tanggal 1 Maret 1950, kedua di Padang dibuka permulaan kursus 1951/1952 dan ketiga di Pakumbuh, dibuka permulaan kursus 1952/1953.

Lain dari jang tersebut diatas ada lagi dua buah sekolah guru jang sangat penting pula dalam perkembangan pendidikan dan pengadjaran, jaitu S.G.T.K. (Sekolah Guru Taman Kanak-kanak) dan S.G.K.P. (Sekolah Guru Kepandaian Puteri).

S.G.T.K. mula-mula didirikan Pemerintah Kota Padang bulan Pebruari 1951, dengan djumlah murid waktu itu 32 orang dan dua orang diantaranya dari Bengkalis

Bulan Djuli 1952 sekolah ini diserahkan kepada Kementerian P.P. & K. dan langsung dibawah penilikan Inspeksi Taman Kanak-Kanak di Djakarta.

Murid-muridnja berdjumlah 80 orang berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.

Sekolah ini sekarang baru 2 tahun dan nanti akan didjadikan 3 tahun.

Sekolah S.G.K.P. (Sekolah Guru Kepandaian Puteri) didirikan di Padang pada tanggal 14 Agustus 1952. Status sekolah ini adalah untuk Sumatera Tengah dan Sumatera Utara dan murid diterima dari kedua propinsi itu.

Sekolah ini langsung dibawah Inspeksi Pendidikan Wanita pada Kementerian P.P. & K. di Djakarta.

V. Sekolah-sekolah landjutan S.M.P. dan S.M.A.

Perkembangan Sekolah-sekolah Rendah (S.R.) jang senantiasa berdjalan dengan pesat dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran di Sumatera Tengah seperti jang telah diuraikan dalam fasal-fasal jang terdahulu, menjebakkan pula pesat dan meluasnja perkembangan-perkembangan pada bahagian sekolah-sekolah landjut S.M.P. dan S.M.A., disamping sekolah-sekolah landjut vak jang lain-lain.

Untuk mentjapai perseimbangan dilapangan pendidikan dan pengadjaran umumnja sedjak dari sekolah rendah sampai kesekolah-sekolah tinggi, memang sudah mesti sekolah-sekolah landjutan S.M.P. dan S.M.A. mengikuti perkembangan jang tumbuh dibahagian sekolah-sekolah rendah tadi.

Hal ini di Sumatera Tengah umumnja boleh dikatakan sangat memuaskan, baik dimasa sebelum clash ke-II, maupun masa darurat, lebih-lebih lagi sedjak waktu pemulihan, sehingga dalam masa jang sangat singkat sekali, sekolah-sekolah landjutan S.M.P. dan S.M.A. ini sudah mendjadi sangat populer dan mendjadi perhatian jang sangat besar dari kalangan masyarakat.

Untuk melengkapkan uraian berkenaan dengan sekolah-sekolah landjut S.M.P. dan S.M.A. ini dalam perkembangan Pendidikan dan Pengadjaran di Sumatera Tengah maka lebih djauh dapatlah dilandjutkan keterangan-keterangannja seperti berikut:

1. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (S.M.P.).

a. *Sedjarah pertumbuhannja.*

Seperti telah umum djuga diketahui, bahwa dimasa pemerintahan kolonial yakni dimasa sebelum perang 1942, pemerintah mengadakan suatu perbedaan besar dilapangan onderwijs.

Anak-anak Indonesia, terutama anak-anak dari golongan kaum tani, saudagar dan kerani-kerani ketjil seolah-olah tidak diberi kesempatan dan sekurang-kurangnya dihalang-halangi untuk memasuki sekolah-sekolah landjutan (sekolah Menengah), walaupun otak dan kepandaian dari anak-anak itu tidak kalah dari anak-anak Eropah atau bangsa asing lainnja.

Dan djika ada kesempatan itu diberikan, hanjalah terbatas kepada golongan kaum menak, anak-anak dari pegawai Pemerintah dan anak dari orang-orang jang banjak berhubungan dengan orang Belanda.

Adapun jang termasuk Sekolah Menengah Umum tingkatan pertama jang ada di Sumatera Tengah ini ketika itu hanjalah dua buah Gouvernements Mulo, jaitu: 1 di Padang dan 1 di Bukittinggi. Disamping itu terdapat pula sebuah Mulo partikelir, jaitu R.K. Mulo Frater dan Zuster di Padang jang murid-muridnja memang sebagian besar terdiri dari anak-anak Indonesia.

Oleh karena sekolah-sekolah Mulo jang tersebut itu tidak dapat memenuhi keinginan masjarakat didaerah ini, maka atas usaha-usaha partikulir dibangun Sekolah-sekolah Menengah seperti Mulo Ivorsa di Bukittinggi dan lain-lain. Tetapi sekolah-sekolah menengah partikulir ini tidak dapat berkembang dengan baik, karena adanya Wilde Scholen Ordonnantie dan karena tekanan jang hebat dari pihak guru-guru Belanda dalam udjian penghabisan Mulo. jang ditempuh oleh murid-murid jang berasal dari Mulo partikulir.

Kesimpulannja, dimasa sebelum perang itu njata, bahwa djumlah dan keadaan sekolah-sekolah menengah tidak sedikit djuga berimbangan dengan keinginan dan kehendak masjarakat di Sumatera Tengah ini, terutama karena politik differentiatie (membeda-bedakan) lapangan onderwijs serta tekanan-tekanan jang ditudjukan terhadap usaha-usaha partikulir tadi.

Kemudian dimasa pendudukan Djepang politik differentiatie di lapangan pendidikan dan pengadjaran ini dihapuskan, sehingga dibahagian perguruan rendah umum hanja terdapat dua matjam sekolah jang bertjorak satu, Koto Kokomin dan Kokomin Gakko. jang sama-sama dapat dilandjutkan kepada sekolah menengah umum Tju Gakko. Tju Gakko waktu itu hanja ada dua buah, jaitu satu di Padang dan satu di Bukittinggi.

Tjuma sajang, pengadjaran dalam bahagian ilmu umum pada Tju Gakko ini tidaklah begitu dipentingkan sebagai mestinja; hanja jang sangat dipentingkan ialah pengadjaran bahasa Djepang jang ditudjukan kepada semangat gotong-rojong dan semangat Dai Toa Senso.

Demikianlah kira-kira sedjarah pertumbuhan sekolah menengah pertama, jang kemudian setelah Indonesia lepas dari pendjadjahan, sekolah-sekolah itu ditjiptakan mendjadi Sekolah Menengah Pertama (S.M.P.), jang aliran dan systeemnja disesuaikan pula dengan keinginan dan kehendak Negara jang berdasar kepada Pantja Sila.

b. Perkembangan S.M.P. sesudah Proklamasi.

Sesudah Proklamasi, persamaan di lapangan pendidikan dan pengadjaran jang telah diadakan oleh pemerintah pendudukan Djepang tetap dipakai. Disamping itu, oleh Kementerian P.P.K. N.R.I. telah ditetapkan pula satu matjam atau satu tjorak perguruan rendah umum dengan nama Sekolah Rakjat 6 tahun, satu matjam sekolah menengah umum tingkatan pertama 3 tahun dengan nama S.M.P. (Sekolah Menengah Pertama) dan satu matjam pula

sekolah menengah landjutan 3 tahun dengan nama S.M.A. (Sekolah Menengah Atas) untuk melandjutkan peladjaran ke Perguruan Tinggi dari bermacam-matjam fakultas.

Disamping S.M.P. ini, telah dibentuk pula beberapa matjam sekolah menengah vak, seperti Sekolah Tehnik Pertama (S.T.P.) Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (S.M.E.P.) dan lain-lain, sedang disamping S.M.A. didirikan pula sekolah menengah vak landjutan, seperti Sekolah Menengah Ekonomi Atas (S.M.E.A.) jang mana keterangan-keterangan jang berkenaan dengan sekolah-sekolah tersebut telah diuraikan dibagian lain dalam buku ini.

Alhasil, semendjak Proklamasi sampai terdjadinja peristiwa clash ke-II 19 Desember 1948, perkembangan S.M.P. di Sumatera Tengah boleh dikatakan berdjalan tjepat, sehingga pada sa'at terdjadinja clash ke-II itu, S.M.P. Pemerintah sadja tidak kurang dari 15 buah, jaitu 3 buah di Bukittinggi, selainnja ada di Solok, Batu Sangkar, Padang Pandjang, Pariaman, Painan, Sawah Lunto, Manindjau, Lubuk Sikaping, Sei Penuh, Pakan Baru dan Djambi. Selain dari pada itu ada pula beberapa buah S.M.P. partikular jang terdapat dibeberapa tempat di Sumatera Tengah ini.

c. Keadaannja selama masa Darurat.

Tatkala agresi Belanda diclash ke-II akan terdjadi oleh Komisariat Pemerintah Pusat Propinsi Sumatera di Bukittinggi diperintahkan kepada Kepala-kepala Sekolah dan guru-guru untuk mengungsikan sekolah-sekolah kedaerah-daerah pedalaman manakala nanti datang penjerbuan Belanda pada sa'at-sa'at jang tidak ditentukan. Dalam perintah itu dinjatakan djuga, supaya didaerah-daerah pedalaman nanti dibuka S.M.P.-S.M.P. Darurat untuk menampung murid-murid kembali. Sebahagian besar dari perintah itu memang dapat didjalankan, sehingga pendidikan dan pengadjaran selama clash ke-II dapat terus dilaksanakan menurut mes-tinja, walaupun dalam menghadapi 1001 matjam kesulitan. Dengan djalan itu maka terdjadilah didaerah Pedalaman dua matjam tjorak S.M.P. jaitu S.M.P. jang bertjorak sebelum clash ke-II dan S.M.P. jang bertjorak darurat.

S.M.P. jang ada sebelum clash ke-II hanja adalah S.M.P. Manindjau jang dikepalai oleh almarhum M. Rasjid Djambek dan S.M.P. Lubuk Sikaping jang waktu itu dikepalai oleh saudara Munir, oleh karena kedua negeri itu tak dapat dimasuki oleh tentara Belanda.

S.M.P.-S.M.P. jang bertjorak darurat adalah seperti berikut:

1. S.M.P. Darurat di Kota Gedang dikepalai oleh saudara Joenoezir.
2. S.M.P. Darurat di Balingka dikepalai oleh saudara Zainudin St. Mangkuto.

3. S.M.P. Darurat di Matur dikepalai oleh saudara Harun al Rasjid.
4. S.M.P. Darurat di Palembang dikepalai oleh saudara Effendi Dt. Batuah.
5. S.M.P. Darurat di Lb. Basung dikepalai oleh Mahmuddin.
6. S.M.P. Darurat di Sei. Geringging.
7. S.M.P. Darurat di Kamang (Bkt) dikepalai oleh saudara Said.
8. S.M.P. Darurat di Sarik (Bkt) dikepalai oleh saudara Roesli.
9. S.M.P. Darurat di IV Angkat (Bkt) dikepalai oleh saudara Taslim.
10. S.M.P. Darurat di Tungkal (Pjk) dikepalai oleh saudara Hakim.
11. S.M.P. Darurat di Kubang/Dangung dikepalai oleh saudara Sjahboedin.
12. S.M.P. Darurat di Padang Djapang dikepalai oleh saudara Sjahboedin.
13. S.M.P. Darurat di Koto Tinggi dikepalai oleh saudara Ir Sitompul.
14. S.M.P. Darurat di Sei Djambu dikepalai oleh saudara Harun St. Penghulu.
15. S.M.P. Darurat di Kota Lawas (P.P.) dikepalai oleh saudara A. Munaf Dt. Bgd. Malano.
16. S.M.P. Darurat di Gunung (PP) dikepalai oleh saudara Daud.
17. S.M.P. Darurat di Sumanik dikepalai oleh saudara A. Manan St. Penghulu.
18. S.M.P. Darurat di Lintau dikepalai oleh saudara Ramli Marzuki.
19. S.M.P. Darurat di Sulit Air dikepalai oleh saudara Sjamsu Baharsjah.
20. S.M.P. Darurat di Bt. Pajung (Pjk) dikepalai oleh saudara Bachtiar St. Pado Penghulu.
21. S.M.P. Darurat di Pakan Rabaa dikepalai oleh saudara Kamaroedin.
22. S.M.P. Darurat di Pelangki (Swl).
23. S.M.P. Darurat di Lima Kaum dikepalai oleh saudara Harun St. Penghulu.
24. S.M.P. Darurat di Padang Ganting dikepalai oleh saudara Siam.

Disamping S.M.P.-S.M.P. Darurat jang tersebut ini mungkin ada lagi S.M.P. jang lain jang tidak diketahui dan/atau tidak ada keterangan-keterangannja pada kantor Inspeksi, sehingga tidak dapat disebutkan dalam uraian ini.

d. *Keadaannya didaerah-daerah pendudukan.*

Sementara itu didaerah-daerah pendudukan diusahakan mendirikan sekolah-sekolah Menengah jang bersifat nasional, jang diizinkan oleh Pemerintah pendudukan Belanda dengan tidak memakai nama S.M.P., jaitu: di Bukittinggi didirikan Taman Dewasa dikepalai oleh saudara Hamid dan di Padang didirikan Permindo (6 tahun) dikepalai oleh saudara M. Tambunan.

Disamping itu oleh Pemerintah pendudukan Belanda didirikan pula Sekolah-sekolah Menengah 4 tahun (S.M.) pada beberapa tempat, jaitu: di Bukittinggi, Padang Pandjang, Solok, Sawah Lunto, Batu Sankar, Pajakumbuh, Pakan Baru, Bengkalis, Tandjung Pinang, Djambi, Padang, Painan, Sei. Penuh dan Pariaman.

e. *Perkembangan sesudah pemulihan.*

Setelah pemulihan dan penjerahan kedaulatan, S.M.P. Darurat dan Sekolah-sekolah Menengah (S.M.) 4 tahun jang didirikan oleh Pemerintah pendudukan Belanda dilebur mendjadi S.M.P.-S.M.P. Negeri, jang mulanja didaerah Sumatera Tengah berdjumlah 19 buah dan kemudian ditambah mendjadi 27 buah, jaitu:

1. S.M.P. Negeri No. I di Bukittinggi
2. " " II " "
3. " " III " "
4. " " IV " "
5. " " V " "
6. " " VI " "
7. " " di Pajakumbuh
8. " " " Dangung-dangung
9. " " " Padang Pandjang
10. " " I " Batu Sangkar
11. " " II " "
12. " " I " S o l o k
13. " " II " "
14. " " " Sawah Lunto
15. " " " M a n i n d j a u
16. " " " Lubuk Sikaping
17. " " " Pariaman
18. " " I " P a d a n g
19. " " II " "
20. " " III " "
21. " " " P a i n a n
22. " " " Sei. Penuh

23.	S.M.P. Negeri	di Pakan Baru
24.	„ „	„ Bengkalis
25.	„ „	„ Djambi
26.	„ „	„ Tandjung Pinang
27.	„ „	„ R e n g a t

Selain dari pada itu, disamping S.M.P.-S.M.P. Negeri ini terdapat lagi beberapa buah S.M.P. partikular, baik jang bersubsidi maupun jang tidak bersubsidi.

Djumlah S.M.P. jang tersebut itu adalah sebagai berikut:

1.	S.M.P. „Harlond”	di Padang
2.	„ „Muhammadiyah”	„ „
3.	„ „U d a j a ”	„ „
4.	„ „Taman Djaja”	„ Bukittinggi
5.	„ „K a d e r ”	„ „
6.	„ „M.I.K.”	„ „
7.	„ „Muhammadiyah”	„ „
8.	„ „K u r a i ”	„ „
9.	„ „Muhammadiyah”	„ Sei. Penuh
10.	„ „H a r a p a n ”	„ Kaju Tanam
11.	„ „Taman Pembangunan	„ „
12.	„ „P a r t i k e l i r ”	„ Lubuk Basung
13.	„ „T i l k a m ”	„ Kamang (Bkt)
14.	„ „P a r t i k e l i r ”	„ Ma t u r
15.	„ „Merapi Singgalang”	„ Sarik (Sei Puar)
16.	„ „B a n u h a m p u ”	„ Banuhampu (Bkt)
17.	„ „Chatulistiwa”	„ B o n d j o l
18.	„ „Muhammadiyah”	„ Pariaman
19.	„ „	„ Padang Pandjang
20.	„ „	„ Djambi
21.	„ „P a r t i k e l i r ”	„ Muara Labuh
22.	„ „R.P.R.”	„ Padang
23.	„ „P a r t i k e l i r ”	„ Sawah Lunto
24.	„ „S.E.T.I.”	„ „
25.	„ „Sentadjo”	„ Sentadjo (Taluk) Kuantan
26.	„ „S o r e ”	„ D j a m b i
27.	„ „P a r t i k e l i r ”	„ Lubuk Alung
28.	„ „T a r u n a ”	„ Padang
29.	„ „Batipuh”	„ Batipuh Baruh (P.P.)

- | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------|
| 30. | S.M.P. „S a t r i a ” | di Padang Pandjang |
| 31. | „ „S a d a r” | „ „ |
| 32. | „ „P a r t i k e l i r” | „ Sei Tarab (B. Sangkar) |

S.M.P. partikulir jang bersubsidi adalah:

- | | | |
|----|------------------------|----------------|
| 1. | S.M.P. „Frater” (R.K.) | di Padang |
| 2. | „ „Zuster” (R.K.) | „ „ |
| 3. | „ „A b a d i j a h ” | „ „ |
| 4. | „ Taman Dewasa/ | |
| | Taman Siswa | „ Batu Sangkar |
| 5. | „ Taman Dewasa/ | |
| | Taman Siswa | „ Pajakumbuh |

f. Mutu sekolah dan hasil udjian.

Walaupun djumlah S.M.P. di Sumatera Tengah sebagai jang diuraikan diatas sudah hampir mendekati perseimbangan dari kehendak dan keinginan masjarakat dibandingkan dengan masa pemerintahan kolonial sebelum perang tetapi setjara djudjur harus diakui, bahwa umumnja mutu dari sekolah-sekolah S.M.P. kita itu, baik S.M.P. Pemerintah maupun S.M.P. partikulir masih belum lagi menurut mestinja. Adapun hasil-hasil udjian penghabisan S.M.P. dari S.M.P.-S.M.P. Negeri di Sumatera Tengah umumnja rata-rata, ialah:

tahun	1950	pukul rata	16,3%
„	1951	„ „	33,5%
„	1952	„ „	41,5%

Sungguhpun hasil-hasil itu telah meningkat dan melebihi dari hasil-hasil sebelum clash ke-II, tetapi hasil-hasil jang telah ditjapai itu masih belum lagi memuaskan dari pada jang dikehendaki. Hal ini adalah disebabkan oleh beberapa keadaan, seperti:

1. kekurangan tenaga guru
2. kekurangan alat-alat peladjaran
3. kekurangan gedung-gedung sekolah, ruangan-ruangan jang diperlukan
4. dan lain-lain sebab lagi.

g. Kesimpulan.

Demikianlah perkembangan S.M.P. sedjak permulaan Proklamasi sampai pada saat menulis uraian ini, dalam mana dapat disimpulkan betapa djauh dan besarnja djarak perbandingan antara masa pemerintahan kolonial dengan masa pemerintahan Indonesia Merdeka.

Dengan melihat djauhnya jarak perbandingan itu njata dan teranglah sampai kemana dan dimana usaha-usaha Pemerintah Kolonial dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran, jang mendjadi pokok-pangkal bagi kemadjuan sesuatu bangsa.

Dalam pada itu, sungguhpun sudah demikian usaha-usaha jang dilaksanakan dan kemadjuan-kemadjuan jang ditjapai dilapangan pendidikan/pengadjaran ini semendjak Indonesia sudah merdeka, tetapi semuanya itu masih dalam permulaan djalan, dan banjak lagi usaha-usaha dilapangan ini jang hendak dilaksanakan, sehingga nanti betul-betul S.M.P. dan umumnya sekolah-sekolah sedjak dari jang paling rendah dapat mentjita suatu umat baru, jang tjukup tangguh dan kuat untuk mendjamin kemakmuran dan keselamatan Negara serta perdamaian jang abadi lahir batin.

2. SEKOLAH MENENGAH ATAS (S.M.A.).

Dimana sebelum perang Sekolah Menengah Landjutan seperti S.M.A. ini belum ada lagi di Sumatera Tengah. Djadi S.M.A. jang didirikan di Bukittinggi dizaman N.R.I. sebelum clash ke-II, bukanlah kelandjutan dari Sekolah-sekolah Menengah masa pemerintahan kolonial.

Sebelum clash ke-II, hanjalah baru ada satu S.M.A. di Bukittinggi dan disamping itu memang ada djuga Kursus S.M.A. jang diusahakan oleh untuk melatih pemuda-pemuda tanmatan S.M.P. dalam melandjutkan peladjarannya.

Diantara Kursus S.M.A. jang ada di Bukittinggi, sebelum agresi pertama (clash ke-I), yakni semasa almarhum Bgd. Aziz Chan masih memimpin pemerintahan kota Padang sebagai Wali Kota, diadakan djuga Kursus S.M.A., jang mendapat perhatian sangat besar sekali dari kalangan pemuda/pemudi dikota perdjuaan itu.

Dalam zaman darurat (waktu clash ke-II) usaha-usaha melaksanakan S.M.A. dilandjutkan terus, jaitu dengan:

1. mendirikan S.M.A. Darurat di Matur dan dikepalai oleh saudara Harun Al Rasjid.
2. Mendirikan S.M.A. Darurat di Kota Gedang, dikepalai oleh saudara Ir Abunuzar dan
3. Taman Dewasa Raya Taman Siswa di Bukittinggi dikepalai oleh saudara Ir Ingkriwang.

Sesudah pemulihan, S.M.A. ini disusun kembali menurut tjara jang sebenarnya sebagai jang dikehendaki oleh Kementerian P.P. & K., jang mana selain di Bukittinggi didirikan sebuah lagi di Padang.

Disamping itu ada pula S.M.A.-S.M.A. partikulir, jaitu S.M.A. Dharmapala, S.M.A. Pemuda, S.M.A. P.S.M. ketiga-tiganya di Bukittinggi dan S.M.A. Muhammadiyah di Padang.

SEKOLAH-SEKOLAH TINGGI.

Factor-factor jang mendesak untuk mengadakan Sekolah Tinggi.

NIAT untuk mendirikan Sekolah-sekolah Tinggi di Sumatera Tengah ini memang sudah sedjak sekian lama dikandung oleh para pemimpin dan masyarakat umum.

Niat itu timbulnja adalah karena dorongan beberapa factor jang mendesak, terutama karena landjutan dari pesatnja perkembangan Sekolah-sekolah Rendah dan Sekolah-sekolah Menengah sedjak Indonesia lepas dari pendjadjahan.

Djustru, memang sudah sedjak bermula dirasakan, bahwa Sekolah-sekolah Tinggi dari berbagai-bagai fakultas sudah perlu didirikan dengan segera mungkin, untuk dapat mentjiptakan tenaga-tenaga akademi jang sangat dibutuhkan sekali oleh Negara.

Disamping itu mengingatkan lagi, karena sangat banjaknja peladjar-peladjar keluaran Sekolah Menengah jang tidak dapat melanjutkan peladjarannja ke Sekolah-sekolah Tinggi di Djawa, berhubung karena beberapa keadaan jang memaksa, terutama disebabkan karena batas kesanggupan ekonomi jang tidak mengizinkan.

Usaha mendirikan (mengadakan) Kursus Volks Universiteit jang dilaksanakan oleh saudara Adinegoro dalam tahun 1946, adalah sebagai langkah permulaan kearah tertjiptanja sekolah-sekolah Tinggi jang dimaksudkan itu.

Kemudian dalam tahun 1948 dibentuklah sebuah Panitia Sekolah Tinggi jang diketuai oleh bekas Gubernur Sumatera Tengah Dr. Mohammad Djamil, jang diberi tugas seluas-luasnja untuk membuat rentjana hingga sampai Sekolah Tinggi jang dimaksudkan itu dapat terwujud.

Walaupun Panitia telah berusaha dengan sekeras mungkin melaksanakan tugasnja, tetapi karena keadaan pada sa'at itu seluruhnja diatas puntjak kesulitan jang sangat sukar diatasi, maka usaha-usaha Panitia itu terpaksa tak dapat berdjalan dengan semestinja, lebih-lebih lagi setelah clash ke-II jang mengubah dan merusak-membinasakan itu.

Tetapi, walaupun bagaimana djuga hebatnja peristiwa-peristiwa zaman jang dilalui, namun tjita-tjita untuk mendirikan Sekolah Tinggi di Sumatera Tengah tetap terpatri dalam djiwa pemimpin-pemimpin didaerah ini dan djiwa masyarakat umumnja, demi mengingat semua factor-factor jang diatas tadi, terutama demi mengingat-

kan lagi, bahwa kemadjuan dan kemuliaan bagi bangsa Indonesia jang baru merdeka ini, sangat bergantung djuga kepada banjaknja Sekolah-sekolah Tinggi.

Setelah penjerahan kedaulatan, maka tjita-tjita mendirikan Sekolah Tinggi jang sudah dikandung sedjak bermula itu segera diwudjudkan, yakni dengan mendirikan Balai Perguruan Tinggi Hukum Pantjasila di Padang dan Perguruan Islam Tinggi Darulhikmah di Bukittinggi.

1. B.P.T. HUKUM PANTJASILA.

Terlebih dulu pada bulan Djanuari 1951 dibentuk sebuah Jajasan jang bernama Jajasan Sriwidjaja dan telah disahkan berdirinja setjara hukum pada tanggal 20 Maret 1951.

Jajasan Sriwidjaja ini dibentuk oleh:

1. Dokter Mohammad Djamil gelar Datuk Rangkajo Tuo.
2. Saalah Joesoef gelar Sutan Mangkuto.
3. Mr. Abubakar Djaar.
4. Dokter Rasjidin.
5. Mohamad Sjafei.

Tudjuan dari pada Jajasan Sriwidjaja diantaranya menurut jang dinjatakan dalam pasal 3 Anggaran Dasarnja, ialah:

- a. memberikan kesempatan jang seluas-luasnja buat menuntut pe-ladjaran dan pengetahuan serta memperkembang kebudajaan agar dengan demikian dapat turut menjiapkan tenaga-tenaga jang berguna bagi kemadjuan dan kemakmuran Nusa dan Bangsa Indonesia; dan
- b. mempertinggi budi luhur dan pribadi sutji guna membimbing masjarakat Indonesia kepada peradaban jang sutji.

Adapun usaha-usaha untuk mentjapai tudjuan jang tersebut itu, selandjutnja dalam Anggaran Dasar pasal 4 dinjatakan sebagai berikut:

- a. mendirikan serta menjelenggarakan satu Balai Perguruan Tinggi jang diberi nama Balai Perguruan Tinggi Pantjasila;
- b. mengadakan serta memelihara perpustakaan jang selengkap mungkin;
- c. memadjukan atau menjokong usaha penjelidikan ilmu pengeta-huan, kebudajaan dan kesusasteraan, dan
- d. melakukan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang bersangkutan de-ngan usaha-usaha tersebut dimuka dalam arti kata seluas-luas-nja, diantaranya terutama memberikan bea-siswa.

Badan Pengurus dari Jajasan Sriwidjaja jang diangkat buat per-tama kali menurut Anggaran Dasar pasal 23 adalah tersusun dengan:

A. Dewan Pelaksana.

B. Dewan Pengawas.

Dewan Pelaksana ialah:

Pertama Pengurus Harian: Ketua Dr. Mohammad Djamil, wakil Ketua Mohamad Sjafei dan anggota-anggotanya ialah Mr. Abubakar Djaar, Dokter Rasjidin, Let. Kolonel Mohamad Thalib dan Diyar Karim, Inspektur S.R. Sumatera Tengah;

Kedua Pembantu Pengurus Harian:

a. *Panitia Umum*, yang anggotanya adalah:

1. Let. kol. Mohamad Thalib (ketua);
2. Ir. Irdam Idris;
3. Nazarudin Thaha;
4. Datuk Simaradjo;
5. Saalah Joesoef St. Mangkoeto;
6. Dokter Marie Thomas.

b. *Panitia Keuangan*:

1. Dokter Rasjidin (ketua);
2. Eny Karim;
3. Basiar Rahman;
4. Sultani St. Malako;
5. Mr. Abubakar Djaar;
6. Bagindo Ahmad Muchtar;

c. *Panitia Fakultas*:

1. Mr. Abubakar Djaar (ketua);
2. Dokter Rasjidin;
3. Dokter Athos Ausrie;
4. Mr. St. Harun Al Rasjid;
5. Mr. Marah Nazaroedin;
6. Kapten Sofjan Ibrahiem.

d. *Panitia Perpustakaan*:

1. Diyar Karim (ketua);
2. Rahmah El Junusijah;
3. Rasjid Manggis;
4. Abdul Hamid;
5. Saadudin Djambek.

Dewan pengawas:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Tengah (ketua);
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Tengah; dan
3. Ketua Pengadilan Negeri Padang.

Mengenai bentuk, isi serta peraturan-peraturan selandjutnja dari Jajasan Sriwidjaja ini dinjatakan lebih luas dalam buku Anggaran Tetangganja sendiri.

Peresmian pembukaan Balai Perguruan Tinggi Hukum Pantjasila.

Perguruan Tinggi Hukum Pantjasila diresmikan pembukaannja pada tanggal 17 Agustus 1951, yakni dikala merayakan dan memperingati 6 tahun kemerdekaan.

Usaha dan persiapan-persiapan untuk mendirikan Perguruan Tinggi iini sampai pada waktu diresmikan tanggal 17 Agustus 1951, hanja dilakukan dalam waktu kurang 5 bulan, terhitung sedjak Jajasan Sriwidjaja diakui sah menurut hukum pada tanggal 20 Maret 1951.

Pelaksanaan usaha-usaha dan persiapan-persiapan dalam waktu jang demikian pendek, maka hal jang demikian itu adalah sesuatu pengerahan tenaga jang luar biasa dalam mentjiptakan berdirinja sebuah Perguruan Tinggi jang begitu penting dan terlalu amat berat pekerdjaannja.

Sebaliknya, usaha dan pekerdjaan jang seberat ini tentu tidak akan dapat tertjipta dan terwujud dalam waktu jang demikian pendek, manakala tenaga-tenaga jang mentjiptakannja kurang tju-kup mempunjai kekuatan hati dan kebesaran djiwa, dan manakala masjarakat masih belum merasakan penting adanja Sekolah-sekolah Tinggi di Sumatera Tengah.

Para dosen dan mahasiswa.

Para dosen jang mengajar pada Perguruan Tinggi Hukum Pantjasila adalah sebagai berikut:

1. Mr. Harun Al Rasjid;
2. Mr. Egon Hakim;
3. Mr. Marah Nazaroedin;
4. Mr. Nasrun;
5. Mr. Mak Kin San;
6. Prof. Mr. Dr. Hazairin, dan
7. Mr. Drs. A. de Goede van Oude Nieuwland.

Mr. Drs A. de Goede van Oude Nieuwland ini adalah tambahan dosen pada tahun kedua (52/53) dan beliau dikirim oleh Kementerian an P.P. & K. dan 100% atas tanggungan Pemerintah.

Mahasiswa pada tahun pertama berdjumlah 140 orang dan pada akhir tahun pertama telah lulus dalam bahagian C. I sedjumlah 24 orang, jaitu:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Ang Ie Siang | 13. Julizar Rasjid |
| 2. Lutan Sjahrial | 14. Rusli Aman |
| 3. Sidi Bakaroedin | 15. Djalaloedin |
| 4. Darwani Thalib | 16. Sjafrî Sjarif |
| 5. Bustal | 17. M. Zen Djamil |
| 6. Marah Sjojfan | 18. Ali Luis |
| 7. Sutan Sjahroedin | 19. Puteri Maimunah |
| 8. Kam Hoat Sien | 20. Sjojfan Moechtar |
| 9. Abdoellah M.S. | 21. Abdoel Aziz |
| 10. Lim Soan Hong | 22. Sutan Harun Al Rasjid |
| 11. Doerman | 23. Ibrahim Idham |
| 12. Agus Thaib | 24. Zainidar Naro. |

Dalam tahun kedua, Perguruan Tinggi Hukum Pantjasila sudah banyak dimasuki oleh mahasiswa-mahasiswa bangsa asing.

2. PERGURUAN ISLAM TINGGI „DARULHIKMAH”

Adapun Perguruan Islam Tinggi „Darulhikmah” ini didirikan pada tanggal 16 Maret 1953 di Bukittinggi, oleh satu Panitia jang susunannya adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Ketua | Nashroedin Thaha |
| 2. Wk. Ketua I | Dt. Palimo Kajo |
| 3. Wk. Ketua II | A. Malik Ahmad |
| 4. Sekretaris | Buchari Tamam |
| 5. Keuangan | a. Dahlan Ibrahim |
| | b. Rkj. Ratna Sari |

6. Perentjana Peladjaran:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Ketua | H. Iljas Mohd Ali. |
| 2. Wakil Ketua | H. Mansur |
| 3. Sekretaris | H. Bustami Abd. Gani |

7. Penerangan:

1. Fachroedin Hs
2. H. Darwis Dt. Toemenggung
3. A. Wahab Amin.

Dewan Curator:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Ketua | Roeslan Muljohardjo. |
| 3. Anggota-anggota | H. Iljas Jacob. |
| 2. Wakil Ketua | Diyar Karim, |
| | S. J. St. Mangkuto, |
| | Dan lain-lain. |

Perguruan Islam Tinggi „Darulhikmah” bertudjuan:

1. Memperdalam dan memperluas hukum-hukum Islam dan sjari'atnja.
2. Memperlengkap para siswanja dengan pengetahuan umum jang bertalian rapat dengan ke-Islaman.
3. Menampung peladjar-peladjar Sekolah Menengah Agama Lan-djutan jang tiap tahun di Sumatera Tengah mengeluarkan lebih kurang 300 orang peladjar.
4. Kelaknja mahasiswa keluaran Perguruan Islam Tinggi Darul-hikmah, sanggup mendjadi mudjtahidin jang akan menje-suaikan dan melaksanakan hukum-hukum ke-Islaman ditengah-tengah masjarakat dan Negara.

Selain dari factor-factor jang telah disebutkan dimuka tadi, maka Perguruan Islam Tinggi Darulhikmah ini didirikan, memenuhi ke-putusan rapat Alim-Ulama Sumatera Tengah tanggal 16 Agustus 1952, jang mana dalam keputusan itu diserahkan kepada ustadz Nashroedin Thaha untuk membentuk Panitia Sekolah Tinggi Islam.

Perguruan Islam Tinggi ini mempunjai tingkatan:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Candidaat I (C I) | c. Doktoral I (D I) |
| b. Candidaat II (C II) | d. Doktoral II (D II), |

dan mempunjai 3 arah dan tudjuan, masing-masing dengan fakultas:

1. Hukum dan Sjari'ah;
2. Usul-Din dan Da'wah dan
3. Pendidikan dan Bahasa Arab.

Buat pertama kali dimulai dengan fakultas Hukum dan Sjari'ah. Hukum dan Sjari'ah.

Mata peladjaran untuk bahagian tingkat C 1 ialah:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Tafsir | 7. Sedjarah Islam |
| 2. Hadis | 8. Pengantar Ilmu Hukum |
| 3. Usul | 9. Sociologie |
| 4. Fiqhi | 10. Bahasa Arab |
| 5. Tauhid | 11. Bahasa Inggris |
| 6. Sedjarah Hukum Islam | 12. Bahasa Indonesia |

MAHA GURU DAN GURU.

No.	N a m a	Mata Peladjaran
1.	Sjech Ibrahim Musa	Usul
2.	Sjech Abbas Abdullah	Tafsir
3.	Sjech Suleman Rasuli	Fiqhi
4.	Ustadz L. Mudo Hamid Hakim	Hadis
5.	Ustadz Bustami Abd. Gani	Bahasa Arab
6.	Ustadz Nachroedin Thaha	a. Sedjarah Islam b. Sedjarah Hukum Islam
7.	Mr. Harun Al Rasjid	Pengantar Ilmu Hukum
8.	Dokter A. Sani	Sociologie
9.	Adam Saleh	Bahasa Indonesia
10.	A. Hamid	Bahasa Inggeris
11.	A.R. Sutan Mansur	Tauhid.

JAJASAN DARULHIKMAH.

Penjelenggaraan Perguruan Islam Tinggi Darulhikmah untuk selanjutnya diserahkan kepada Jajasan Darulhikmah, yang telah disahkan berdirinya setjara hukum pada tanggal 20 April 1953.

Jajasan ini didirikan di Bukittinggi, dan bertudjuan:

- a. memberikan kesempatan seluas mungkin untuk mempelajari dan mendalami pengetahuan keagamaan dan hikmatnja, guna mempersiapkan tenaga yang berkesanggupan dan bermanfa'at bagi mentjiptakan keselamatan, kemakmuran dan peradaban dalam masyarakat Indonesia dan dunia seluruhnja selaras dengan ajaran-ajaran Islam.
- b. memperkembang kejakinan Ketuhanan Jang Maha Esa serta memperluas kebudajaan yang berdasarkan keimanan dan budi yang luhur serta kesutjian bathin, untuk membimbing kedjalan kebahagiaan sesuai dengan hakikat Ketuhanan.

Untuk mentjapai tudjuan yang tersebut itu Jajasan ini berusaha:

- a. membangun dan menyelenggarakan Perguruan Islam Tinggi Darulhikmah dan memperdjuangkannja supaya kelak kemudian hari Perguruan itu dapat hidup bersama dalam lingkungan satu Balai Perguruan Tinggi.

- b. mengadakan perpustakaan jang lengkap dalam berbagai ilmu pengetahuan, peradaban dan filsafat, terutama jang berhubungan dengan ke-Islaman, jang diberi nama „Darulhikmah”.
 - c. memajukan dan menjokong usaha-usaha idjtihad dan penjelidikan dalam hal Sjari'at, hukum dan kebudajaan terutama jang bertjorak ke-Islaman.
 - d. dalam lapangan penjiaran Islam dengan tjara dan sjari'at Islam jang dapat mendjadi pedoman dalam mentjapai kebahagiaan hidup dan kehidupan.
 - e. melaksanakan pekerdjaan-pekerdjaan dan kegiatan jang bertalian dengan usaha-usaha jang diuraikan diatas dalam arti jang seluas-luasnja.
-

BAB IV
BAHAGIAN VIII

PENDIDIKAN MASSA
DAN KESEHATAN

Pasal 47.

USAHA MEMPERTINGGI MUTU DAERAH.

USAHA-USAHA untuk mempertinggi mutu daerah jang dapat ditjatat disini hanjalah semendjak Indonesia sudah merdeka, yakni sedjak 17 Agustus 1945. Pada masa sebelum itu, boleh dikatakan belum ada lagi usaha kedjurusan ini, djika jang dimaksud dengan perkataan „mempertinggi mutu daerah” itu, dengan mengadakan latihan-latihan pemimpin, kursus-kursus orang dewasa dan lain-lain sebagainya.

Djika ada jang demikian, bukanlah ia diusahakan oleh badan-badan resmi (Pemerintah) melainkan adalah diusahakan oleh perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi dikalangan rakjat, seperti mengadakan perkumpulan berdjulo-djulo (gotong-rojong), mengadakan kursus untuk orang dewasa, mengadakan Panti Pengetahuan, taman pembatjaan dan lain-lain.

Usaha-usaha jang dilaksanakan oleh perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi ini, banjak mendapat rintangan dari jang berkuasa. Itulah sebabnja kemadjuan rakjat dizaman pemerintahan kolonial sebelum perang itu sangat lambat sekali perkembangannja, bahkan sebaliknya makin lama makin muram ibarat kembang ditimpa panas.

Dizaman Djepang memang ada usaha-usaha kedjurusan ini jang diandjurkan sendiri oleh pihak berkuasa Djepang dan ada pula jang diadakannja setjara resmi, seperti mengadakan latihan ketenteraan dengan mengadakan Heiho, Gyu Gun dan sebagainya latihan-latihan pegawai untuk pamong, untuk pertanian, pertukangan, perkapalan, pelaut dan sebagainya. Tetapi semuanya itu adalah ditudjukan untuk kepentingan perang pihak Djepang sendiri.

Sungguhpun demikian, namun hasil dan faedahnja sangat besar sekali untuk pembangunan Indonesia Merdeka, setelah Djepang ditundukkan oleh Sekutu.

Hasil dan faedah ini harus diakui baiknja, walaupun dimasa Pemerintahan Djepang itu kita telah mengalami berbagai matjam penderitaan jang tidak ada tolok bandingnja lagi.

Djadi, usaha-usaha untuk mempertinggi mutu daerah jang sebenarnja mulai dilaksanakan semendjak Indonesia Merdeka, dan pelaksanaan jang sesungguhnya dapat diudjudkan dengan konkrit, ialah semendjak sesudah penjerahan kedaulatan.

Adapun usaha-usaha yang telah dijalankan ialah:

1. Kursus Pemimpin diadakan pada tahun 1946 dan diusahakan oleh alm. Chatib Suleiman, Tedjasukmana bersama dengan beberapa orang pemimpin yang lain dan diketuai oleh B. Dt. Pado Penghulu.
2. Kursus Universitas Rakjat diusahakan oleh Adi Negoro di Bukittinggi tahun 1946.
3. Dan lain-lain usaha yang diadakan oleh berbagai badan terutama oleh organisasi-organisasi Pemuda, seperti dengan adanya Panti Pengetahuan Umum di Padang Pandjang dsb. kursus-kursus Kader Panti.

Demikianlah kira-kira diantara usaha yang dapat dilaksanakan pada masa itu disamping menghadapi perjuangannya yang tidak putus-putusnya.

Sementara itu oleh Pemerintah direntjanakan membuka sebuah Boys Town atau Desa Pemuda di Pasir Pangraian dalam tahun 1947/1948, sedang usaha-usaha untuk ini memang telah diangsur-angsur memulainya. Tetapi berhubung karena keadaan-keadaan yang memaksa, terutama karena pengaruh-pengaruh perjuangan dan perselisihan dengan pihak Belanda semakin memuntjak, maka rentjana itu tidak dapat dilanjutkan lagi.

Masa „keadaan perang” yang dihadapi oleh Negara ketika itu menjadi suatu factor yang amat berat sekali untuk melantjarkan usaha-usaha mempertinggi mutu daerah, terutama oleh karena segenap tenaga, pikiran dan perhatian dari kalangan Pemerintah dan rakjat semuanya ditjurahkan justru untuk menghadapi perjuangan dan persiapan-persiapan perang.

Hanya sebagai yang telah dikatakan diatas, bahwa pelaksanaan usaha yang benar-benar konkrit untuk mempertinggi mutu daerah ini ialah sedjak tahun 1950.

Pelaksanaan usaha-usaha mempertinggi mutu daerah itu dijalankan oleh segenap bahagian masyarakat, oleh Pemerintah, oleh Partai-partai/Organisasi dsb.

Usaha-usaha yang dijalankan Pemerintah, diantaranya:

- a. Mengadakan kursus-kursus pegawai oleh berbagai jawatan.
- b. Mengadakan kursus tjepat Pamong Desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/1951.
- c. Membentuk Desa Pertjobaan menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8/1951.
- d. Mengadakan Kursus Kader Koperasi yang dilaksanakan oleh Inspeksi Koperasi Sumatera Tengah.

- e. Kursus Kader Pertanian dan Balai Pendidikan Masyarakat Desa oleh Inspeksi Pertanian Sumatera Tengah.
- f. Kursus Keuangan oleh Kantor Keuangan Propinsi.
- g. Kursus-kursus K.P.U.A. dan B, P.B.H., Kursus B I dll. oleh Inspeksi Pendidikan Masyarakat.
- h. Mengadakan asrama-asrama perawatan, jatim-piatu, fakir-miskin/orang terlantar/perempuan latjur dan lain-lain diseluruh kabupaten yang dilaksanakan oleh Djawatan Sosial. Disamping itu memberikan bantuan uang kepada bekas-bekas pedjuang tawanan untuk dijadikan modal koperasi atau lain usaha yang menguntungkan dari perkumpulan-perkumpulan mereka itu.
- i. Dan lain-lain.

Usaha-usaha yang dijalankan oleh rakyat sendiri, baik dari kalangan partai/organisasi ataupun badan-badan partikular lainnya dalam masyarakat, pada umumnya meliputi akan usaha-usaha mengadakan berbagai macam kursus, mendirikan koperasi-koperasi dan persatuan-persatuan usaha dalam pertanian, peternakan, perdagangan, perindustrian yang kini telah berkembang dengan luas diseluruh Kabupaten.

Semua usaha-usaha yang telah dijalankan itu pada umumnya boleh dikatakan berhasil dengan sangat memuaskan, walaupun sebahagian-sebahagian diantaranya ada juga yang kandas karena berbagai macam kesulitan.

Kursus tjepat Pamong Desa tadi itu dijalankan diseluruh kabupaten dan tjara pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah kabupaten masing-masing. Pengikut-pengikut Kursus Tjepat Pamong Desa ini, terdiri dari wali-wali negeri, setia usaha negeri, anggota-anggota D.H.N. dan D.P.N., sedang mata pelajaran yang diberikan, yang terpenting diantaranya:

1. Tata Negara
2. Desentralisasi dan rumah tangga desa
3. Agraria (hak hukum tanah dll.)
4. Perekonomian desa (pertanian, perikanan, kehewanan, koperasi dan lain-lain)
5. Kesusilaan Masyarakat (ilmu jiwa masyarakat, hukum sosial dan sebagainya).
6. Administrasi.

Dalam usaha-usaha pembentukan Desa-desanya Pertjobaan telah dilaksanakan pula di beberapa kabupaten, diantaranya yang sudah ada:

1. diwilayah Baso Kabupaten Agam.
2. diwilayah negeri Aur Kuning kabupaten Pasaman.
3. diwilayah Pantai Tjerman Kabupaten Solok.
4. diwilayah Kampar Kabupaten Kampar.

5. dikewalian negeri Palangki Kabupaten Sawah Lunto/Sidjundjung.
6. di Marga Mestong Kabupaten Batang Hari.
7. di Lubuk Djantan Kabupaten Tanah Datar.
8. di Taram Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada kabupaten-kabupaten jang lainnja usaha itu sedang dalam persiapan, yakni: kabupaten-kabupaten Padang/Pariaman, P.S.K., Merangin, Indragiri, Bengkalis dan Kepulauan Riau.

Adapun bentuk, isi dan djiwa jang dikandung dan diudjudkan pada Desa-desa Pertjobaan itu adalah seperti berikut:

a. Tudjuan:

1. Hidup jang kokoh bersandarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Hidup jang teratur, aman-damai lahir batin, tidak ada gangguan atau tindakan-tindakan dari kelakuan-kelakuan jang merugikan masyarakat, jang mana anggotanja tersusun diatas dasar kekeluargaan jang meliputi peri kemanusiaan jang tjinta masyarakat.
3. Hidup dengan efficient dan makmur, pelaksanaan perekonomian berdasarkan gotong-rojong jang racioneel menurut dasar U.U.D.S. pasal 38.
4. Hidup jang sadar-insjaf, teratur dan berdisiplin badja dalam ujud jang creatief dan constructief.

b. Usaha jang principiel:

1. Menanam djiwa otonomi (autonomi minded) dalam dada masyarakat dengan tidak ada sistim mendikte.
2. Dalam usaha mengubah kearah perbaikan lahir-batin, harus berdasar kepada semangat dan tjara bekerdja gotong-rojong jang racioneel.
3. Melaksanakan atau menghormati keinginan-keinginan dan iniatif-iniatif jang progressief-constructief jang timbul dari pihak rakyat sendiri.
4. Mendaja-upayakan bangkit dan tumbuhnja keinginan-keinginan dan iniatif-iniatif jang bertudjuan kesedjahteraan masyarakat dalam djiwa anggota-anggota masyarakat itu, bilamana dari pihak mereka tampaknja sepi atau sunji.
5. Dengan begitu, maka diudjudkanlah sembojan „Membangun melalui pendidikan masyarakat“, karena diharuskan supaja tiap-tiap pekerdjaan jang dilakukan bisa terlaksana. ANALOGIE: „Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat“.

c. Program sifat dan bangun:

1. Hanya dalam program dengan berurat dalam dan meluaslah yang memudahkan segala usaha menjapai EFFICIENCY. Program, Organisasi dan Efficient adalah Trimurti yang tak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnja.
2. **Kerukunan masyarakat desa** haruslah berwujud suatu Organisasi yang bersifat Koordinatif yang kuat bulat, baik dalam jiwa maupun dalam bentuknja.
3. Mengingat efficiency yang harus ditjapai, maka segala usaha dan tindakan haruslah berdasarkan dan menurut keadaan yang njata, dengan mengingat pula serta mempergunakan tenaga-tenaga dan kekuatan-kekuatan yang ada dan dipunyai oleh rakjat. Dalam pada itu kewajiban dan pertanggungan djawab harus pula disandarkan kepada pertumbuhan Kesadaran dan Kekuatan.

d. Pelaksanaan program:

1. „MENJUSUN KEKUATAN MASJARAKAT”.
Menjiapkan pemerintahan Desa/Negeri yang bersifat Demokrasi-Sentralisme dengan menjusun masyarakat setjara kekeluargaan yang bersifat Rukun Tetangga menurut keadaan setempat-setempat.
2. **MEMADJUKAN KEAMANAN DAN KETENTERAMAN RAKJAT.**
Hal ini dilakukan dengan mempergiat pendjagaan desa/negeri dengan djalan:
 - a. Memberikan pertanggungan djawab penuh kepada Pamong Desa, Ninik-mamak dan Tunggana-tunggana rumah atau Kepala-kepala Rukun Tetangga.
 - b. Membentuk seksi-seksi/regu-regu pendjagaan Keamanan (dulu khususnja di Minangkabau disebut dengan „Parit-Paga”).
 - c. Mengadakan Gardu-gardu (Tjongkong-tjongkong, Rumah-rumah djaga) ditempat-tempat yang strategis.
 - d. Mengadakan latihan bagi kepala-kepala regu.
 - e. Membasmi pendjudian, adu-ajam dan sebagainya.

e. Ekonomi:

Untuk memadjukan perekonomian rakjat, maka diusahakan:

- a. **PERTANIAN:**
 1. Menjempurnakan dan memperluas pertanian berdasar kepada petundjuk-petundjuk dari Djawatan Pertanian Rakjat.

2. Membantu memperengkap/mengichiarkan perlengkapan alat-alatnja.

b. PENGAIARAN:

Membangun dan memperbaiki djalannja serta peraturan-peraturannja saluran bandar-bandar air, baik setjara gotong rojong maupun dengan djalan lain jang effectief.

c. PETERNAKAN HEWAN.

1. Memperluas usaha peternakan dikalangan rakjat, seperti kerbau, sapi, djawi, kambing, kuda, ajam, itik dan sebagainja.
2. Memadjukan tjara-tjara pemeliharaan hewan dan mempulerkan usaha-usaha pengobatan/penjuntikan hewan.

d. PEMELIHARAAN IKAN.

Meng-intensiveer pemeliharaan ikan, baik dikolam-kolam, tebat-tebat maupun disawah-sawah.

e. LUMBUNG KOPERASI.

Menjempurnakan dan memperluas usaha Lumbung-lumbung Desa serta Koperasi-koperasi, produksi, Konsumsi dan kridit.

f. KERADJINAN DAN PERINDUSTRIAN.

Menghidupkan/membantu keradjinan rakjat dan perindustrian, baik koperatief ataupun perseorangan.

g. MATA PENTJAHARIAN JANG LAIN-LAIN.

f. Sosial:

1. Memberantas pengangguran.
2. Memperbaiki perusahaan rakjat.
3. Memberantas pelatjuran.
4. Memberantas perkawinan anak jang dibawah umur.
5. Menghambat pertjeraan (thalak) jang tidak principeel.
6. Memadjukan rudjuk.
7. Menjokong kesuburan organisasi-organisasi sosial dan usaha-usaha gotong-rojong lainnja.

g. Pendidikan:

1. Mempergiat pemasukan anak-anak jang bersekolah ke-Sekolah.
2. Memperluas dan memperhebat „Pembasmian Buta Huruf”.
3. Mengusahakan sekolah kemasjarakatan desa ditiap-tiap Negeri/Desa.
4. Meng-intensiveer K.P.U./A.
5. Mengusahakan Taman-taman Batjaan dan pemeliharaannja.
6. Mengusahakan Balai Penjelidikan Desa dan terselenggaranja kekokohan kebudayaan sendiri.
7. Mempertinggi Kesenian.
8. Meng-intensiveer dan meng-activeer per-olah-ragaan.
9. Mempopulerkan Kependuan.
10. Meng-intensiveer, memperluas serta mempergiat „Pendidikan Kewanitaan”.

h. Kesehatan:

1. Membasmi tempat-tempat sarang njamuk.
2. Merentjanakan dan mengharuskan pembikinan kakus dan sebagainja.
3. Merentjanakan „Hari Pembersihan” sekali seminggu ditiap-tiap Desa/Negeri oleh Tunggana-tunggana Rumah, kepala Rukun Tetangga dengan tjara bergiliran.
4. Mempopulerkan pengobatan diklinik-klinik dan pemakaian obat-obat menurut ilmu kedokteran.

Demikianlah kesimpulan dari usaha-usaha untuk Mempertinggi Mutu Daerah jang telah didjalankan didaerah propinsi Sumatera Tengah ini, jang mana diantaranya ada pula jang sedang dalam pelaksanaan dan ada jang masih dalam rantjangan.

PENDIDIKAN ORANG DEWASA.

Kepentingannya dalam perkembangan masjarakat.

UNTUK mentjiptakan kemadjuan dan ketjerdasan jang lebih tinggi dalam perkembangan masjarakat, maka digiatkan pula usaha-usaha Pendidikan Orang Dewasa.

Selama masa pendjadjahan usaha-usaha kedjurusan itu belum pernah diadakan, artinja jang diusahakan oleh pemerintah sendiri.

Memang pada waktu itu ada djuga dilakukan usaha-usaha untuk Pendidikan Orang Dewasa seperti Sekolah Menjesal atau Sekolah Buta Huruf umpamanja, tetapi hal itu hanja diusahakan perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi/partai-partai dikalangan rakjat sendiri, seperti oleh Muhammadiyah, 'Aisjijah, Perti, Permi, P.S.I.I. dan lain-lain.

Dalam pada itu usaha-usaha tersebut sangat sukar pula meluaskannya dikalangan masjarakat, oleh karena beberapa keadaan jang memaksa, terutama karena tekanan-tekanan halus dari pihak berkuasa sendiri, jang senantiasa mengandung rasa tjuriga terhadap usaha-usaha rakjat kedjurusan ini, terutama jang digerakkan oleh perkumpulan-perkumpulan, organisasi-organisasi dan partai-partai tadi.

Tekanan-tekanan halus itu menjebabkan rakjat mendjadi sangsi dan takut-takut karenanja, seperti pernah dialami dizaman api pergerakan bergedjolak, dimana tiap-tiap rapat atau pertemuan-pertemuan jang berupa apapun djuga mesti diawasi dan dihadiri oleh pegawai P.I.D.

Disamping itu, djika memang ada usaha-usaha Pendidikan Orang Dewasa didjalankan, tidak pula luput dan terlepas dari tekanan wilde scholen ordonnantie.

Demikianlah keadaannya dizaman pendjadjahan masa pemerintahan Hindia Belanda dulu, sehingga pada waktu itu amat sukar sekali bagi rakjat untuk mentjapai kemadjuannya.

Dizaman pemerintahan Djepang keadaan ini boleh dikatakan tidak ada perubahannya. Walaupun dalam principnja pihak berkuasa Djepang ada memberikan keluasan untuk usaha-usaha jang sematjam ini, tetapi pada hakikatnja tidak dapat diwujudkan, ketju-ali bagi hal jang diperlukan untuk kepentingan perang Djepang.

Dalam pada itu kesempatan untuk melakukan usaha-usaha ini tidak pula ada, berhubung oleh karena pada masa itu, waktu hanya habis untuk keperluan bergotong-rojong sadja.

Alhasil, selama dalam zaman pendjadjahan itu, boleh dikatakan tidaklah ada usaha-usaha Pendidikan Orang Dewasa ini dilakukan, dan djika ada seperti jang diusahakan oleh perkumpulan/organisasi/partai tadi itu, tetapi hasilnja tidak sedikitpun berimbangan dengan keadaan jang dikehendaki masjarakat, jang masih sangat besar diselubungi kebodohan dalam berbagai hal.

Kemadjuan usaha Pendidikan Orang Dewasa dalam zaman R.I.

Betapa pentingnja Pendidikan Orang Dewasa ini, langsung dirasakan oleh Pemerintah dan oleh pemimpin-pemimpin rakjat dalam masjarakat.

Tetapi, bagaimanapun djuga hal itu telah dirasakan kepentingan-nja, dalam masa revolusi usaha-usaha kedjurusan itu belum dapat didjalankan setjara konkrit, berhubung karena waktu, tenaga, fikiran dan semua kesempatan ditudjukan untuk kepentingan perdjuaan.

Barulah pada waktu sesudah penjerahan kedaulatan usaha-usaha Pendidikan Orang Dewasa ini dapat diwujudkan menurut rentjana-rentjana dan organisasi-organisasi jang teratur.

Usaha-usaha kedjurusan ini adalah tugas dari Kantor Inspeksi Masjarakat dari Kementerian P.P.&K. Inspeksi Pendidikan Masjarakat Sumatera Tengah berkedudukan di Padang dan diseluruh kabupaten ada Kantor-kantor I.P.M. Kabupaten.

Untuk memudahkan usaha Pendidikan Orang Dewasa ini, maka ditiap-tiap wilajah/ketjamatan dibentuk Panitia Pendidikan Masjarakat jang akan berusaha melaksanakan segala sesuatunja dalam hal ini.

Usaha-usaha jang diwujudkan dalam melaksanakan Pendidikan an Orang Dewasa ini diantaranya ialah:

Pada achir bulan Maret 1952, djumlah kursus 1418, guru
Kursus Pengetahuan Umum (K.P.U.) tingkat A dan B,
Kursus Kemasjarakatan Untuk Orang Dewasa (K.K.O.D.),
Kewanitaan,
Taman Pustaka,
Kepanduan,
Pemuda,
Keolah-ragaan
Pendidikan Tenaga.

Hasil dari bahagian-bahagian usaha jang telah diwujudkan itu di Sumatera Tengah sampai pada achir 1952 adalah sebagai berikut:

a. P.B.H.:

pada achir bulan Maret 1952, djumlah kursus 1418, guru 1699, peladjar 49654 dan jang lulus 16680 orang.

Pada achir bulan Desember 1952, djumlah kursus 1746, guru 1873, peladjar 56747, jang lulus 23989 orang.

b. K.P.U.:

Achir Maret 1952, tingkat A: kursus 65, guru 436, peladjar 2624, jang lulus 227 orang;

tingkat B: kursus 6, guru 4, peladjar 265, jang lulus 265 orang.

Achir Desember 1952, tingkat B: kursus 1746, guru 1873, peladjar 56747, jang lulus 23989 orang;

tingkat B: kursus 4, guru 2, peladjar 103, jang lulus 32 orang.

c. K.K.O.D.:

Kursus 12 tempat, peladjar 348 orang, guru 42 dan tjorak peladjaran/usaha mengenai sosial/ekonomi dengan praktek penanaman/pemeliharaan gambir, tjengkeh, tanaman muda, peternakan ayam, pemeliharaan ikan, koperasi dan perdagangan ketjil dan perusahaan rumah tangga bagi wanita.

d. Kewanitaan:

1. P.B.H. Wanita,	kursus	295	murid	9109	orang
2. K.P.U.	" , "	15	"	417	"
3. Kader	" , "	5	"	204	"
4. Kader Ibu,	"	12	"	394	"

e. Taman Pustaka:

Pengantar,	tempat	104	kitab	6373	buah
Rendah (A),	"	89	"	11485	"
Menengah (B),	"	14	"	14775	"
Tinggi (C),	"	1	"	5459	"

f. Kepanduan:

Banjarknja 31, djumlah anggotanja 6226. Perkembangan kepanduan ini sangat menggembirakan. Tidak ada ibu kota ketjamatan jang tidak merupakan pemusatan gerakan kepanduan. Kegiatan kepanduan dikota-kota dapat dilihat setiap hari. Pandu Udara di Kota Padang mempunyai anggota jang sangat banjak sekali. Begitupun Pandu Laut

di Kepulauan Riau yang sedang menjempurnakan organisasi-nya. Didalam memberikan perbantuan dan pertolongan atas berbagai bentjana dan ketjelakaan, pandu-pandu telah memperlihatkan kegiatannya, didalam pemungutan derma untuk penolong korban bandjir dan korban kebakaran.

g. P e m u d a :

Dalam hubungan ini, sedjak tahun 1951 telah dapat didirikan 11 buah Panti Pemuda, yang usaha-usahanya baru tertudju kepada mempelopori usaha-usaha nasional, perajaan-perajaan nasional, penjelenggaraan causerie-causerie periodik dan gerakan-gerakan olah raga.

h. Keolah-ragaan:

Perkembangan keolah ragaan di Sumatera Tengah pada masa-masa yang achir ini, membuktikan suatu kemandjuan yang pesat dalam lapangan ini.

Usaha memajukan masjarakat Kubu, Mentawai dan lain-lain penduduk yang terbelakang.

Terlebih penting lagi dalam usaha-usaha melaksanakan Pendidikan Orang Dewasa ini, ialah berdaja upaja memajukan masjarakat penduduk golongan suku Kubu yang hidup dihutan-hutan dalam daerah kabupaten Merangin dan Batang Hari, masjarakat penduduk Kepulauan Mentawai, Orang Laut di Kepulauan Riau dan lain-lain lagi dari golongan penduduk yang masih sangat terbelakang di Sumatera Tengah.

Usaha kedjurusan ini sangat meminta perhatian yang sebesar-besarnya. Untuk melaksanakan usaha-usaha itu, maka dalam bulan Nopember 1952 Kepala Inspeksi Pendidikan Masjarakat Sumatera Tengah telah mengadakan penindjauan kedaerah-daerah tersebut, dan kemudian telah membuat suatu rentjana usaha yang telah dimajukan kepada Dewan Pemerintah Propinsi dan Gubernur Sumatera Tengah.

Sementara itu, dengan bekerdja sama antara Inspeksi Pendidikan Masjarakat dan Djawatan Sosial kabupaten Merangin dan Batang Hari telah dimulai pertjobaan-pertjobaan dengan djalan mengumpulkan golongan suku-suku bangsa ini pada beberapa perkampungan. Demikian pula bagi golongan suku Orang Laut di Kepulauan Riau. Hasil-hasil dari pertjobaan ini ada memberikan harapan yang baik.

Usaha-usaha di Kepulauan Mentawai berdjalan dengan lantjar, terutama disebabkan karena penduduk kepulauan itu mempunyai keinginan dan hasrat yang sungguh-sungguh untuk maju.

Karena itu, Inspeksi Pendidikan Masyarakat perlu mentjurahkan perhatian yang istimewa dengan mengirimkan kesana setjukup-tjukupnja alat-alat peladjaran untuk P.B.H., K.P.U. dan alat-alat olah-raga. Dalam pada itu, tenaga-tenaga yang terdidik dan terlatih yang diperlukan untuk pembangunan masyarakat Kepulauan Mentawai ini telah dikirim pula kesana dengan setjukupnja. Hasil-hasil dari usaha-usaha yang telah dilaksanakan disana menurut tjatatan paling achir, sungguh sangat memuaskan, djauh melebihi dari dugaan semula.

Latihan guru-guru P.B.H. yang diadakan dibeberapa di Kepulauan Mentawai untuk mengisi kekurangan tenaga guru-guru yang diperlukan, lebih kurang 40% diisi oleh lepasan P.B.H. sendiri, sedang dalam suatu pertjobaan mendadak yang diadakan dalam satu kumpulan penduduk Mentawai sendiri, ternjata telah menghasilkan angka 95% yang telah tahu tulis-batja.

Demikianlah usaha-usaha yang telah dilaksanakan dalam bahagian Pendidikan Orang Dewasa ini.

Pasal 49.

PERSURAT-KABARAN.

UNTUK menguraikan sedjarah perkembangan pendidikan massa (mass education) tidaklah dapat kita melupakan peranan jang dipegang oleh Pers dan Radio. Kedua alat ini mempunyai pengaruh jang sangat besar sekali bagi masyarakat sepanjang zaman, jang silih berganti tjorak dan keadaannya.

Pers dan lain-lain penerbitan.

Disamping Pers sebagai salah satu alat pendidikan massa jang sangat berpengaruh itu, termasuk djuga berbagai matjam penerbitan buku-buku, seperti buku-buku peladjaran disekolah-sekolah, baik sekolah-sekolah Pemerintah ataupun sekolah-sekolah partikelir dan agama, buku-buku dari tjerita-tjerita kuno, roman fantasi dsb.

Buku-buku dari tjerita-tjerita kuno jang besar pengaruhnja dalam masyarakat pada masa jang lalu, diantaranya: tjerita Rantjak Dilabuh, Tjindur Mato, Nan Tongga Magek Djabang, dan banjak lagi jang lain-lain

Tjerita-tjerita jang disadur dalam buku-buku penerbitan jang lama itu, diantaranya ada jang disusun dengan susunan sja'ir, jang dulu biasa djuga disebut orang dengan „nalam“, seperti sja'ir Siti Sawijah dan lain-lain sebagainya.

Pada masa dahulu, buku-buku jang tersebut itu sangat besar sekali pengaruhnja, sehingga ia perlu dipeladjar dan dihafal. Tjara membatjanja dilagukan bersama-sama dan ada pula jang dilagukan dengan alat bunji-bunjian seperti rebab, salung dan sebagainya.

Tidak heran, djika orang dulu-dulu banjak jang mahir dan hafal akan buku-buku dari tjerita-tjerita lama itu, walaupun orang itu buta huruf.

Sedjarah mula-mula perkembangan pers di Sumatera Tengah.

Dalam menguraikan sedjarah perkembangan Pers sebagai salah satu alat pendidikan massa di Sumatera Tengah ini sedjak masa Proklamasi, kita terpaksa menoleh kembali kezaman jang djauh kebelakang, pada sa'at mana Pers mulai tumbuh dan dikenal oleh masyarakat didaerah ini.

Hampir sedjalan dengan perkembangan persurat-kabaran (Pers) jang tumbuh di Djawa sedjak awal abad jang ke 19, maka di Sumatera Tengah perkembangan itu timbul sedjak penghabisan abad ke 19, yakni dalam tahun 1882.

Adapun surat kabar jang pertama kali terbit dalam tahun 1882 ialah Pelita Ketjil, diterbitkan di Padang dibawah pimpinan seorang Belanda Indo bernama Moss, kemudian dipimpin lagi oleh B.A. Dosseau dan paling achir oleh Datuk Sutan Maharadja.

Pada achirnja surat kabar Pelita Ketjil ini berganti nama dengan Warta Berita.

Dalam tahun 1890 terbit lagi di Padang surat kabar Pertja Barat jang mulanja dipimpin oleh Lie Bian Goan dan kemudian oleh Dja Endar Muda.

Tudjuh tahun kemudian, yakni dalam tahun 1897 di Padang djuga diterbitkan pula surat kabar Tjaja Sumatera dipimpin oleh Lim Sun Hian. Kemudian tatkala penerbitannja diusahakan oleh pertjetakan Sumatera Bode maka pimpinannja dipegang oleh Radjo Sampono.

Dalam perkembangan Pers didaerah Sumatera Tengah ini selanjutnja, hanja kota Padanglah jang selalu memegang peranan sedjak bermula. Begitulah pada permulaan abad jang ke-20, yakni dalam tahun 1903 diterbitkan pula di Kota Padang surat kabar wasir Hindia dipimpin oleh Sutan Radja Nan Gadang. Tidak lama sesudah itu terbit pula surat kabar Bintang Sumatera dipimpin oleh Lim Sun Hian.

Perkembangan Pers sedjak zaman Renaissance.

Tatkala suasana pergolakan dunia mulai menghebat dengan timbulnja peperangan Djepang — Rusia dalam tahun 1905, dan kemudian dengan lahirnja zaman renaissance bagi bangsa Indonesia dengan banggunnja pergerakan kebangsaan 1908, maka perhatian terhadap surat kabar dikalangan masjarakat semakin meluas.

Sedjak waktu itu penerbitan surat-surat kabar di Padang bertumbuh laksana bibit jang telah disemaikan.

Demikianlah dalam bulan September 1905 dengan pimpinan Lim Sun Hin di Padang diterbitkan surat kabar Sinar Sumatera, sedang penerbitannja diusahakan oleh Y. Rogge dan kemudian oleh H.J. van Tijn.

Kemudian dalam tahun 1908, oleh Pertjetakan De Padanger diterbitkan lagi surat kabar Warta Hindia, dipimpin oleh Sutan Radja Nan Gadang, bekas pemimpin Wasir Hindia jang tidak terbit lagi.

Mulai dari tahun 1910 dan selanjutnja, terbitlah berbagai-bagai surat kabar di Padang, seperti Bintang Tionghoa jang paling achir

mendjadi Dagblad Radio, Perubahan, Utusan Melaju, semuanya adalah surat-surat kabar umum; dari kalangan wanita ada pula surat-surat kabar, yakni Sunting Melaju dipimpin oleh Siti Rohana (1911) dan Suara Perempuan dipimpin oleh Sa'adah Alim (1919).

Selain dari itu ada pula surat kabar yang berhaluan agama dipimpin oleh H. Abdullah Ahmad bernama Al Munir.

Perkembangan Pers dizaman pergerakan rakyat mulai bergedjolak.

Selanjutnya, sedjak tahun 1923, sewaktu api pergerakan rakyat telah berhembus dan bergedjolak ke beberapa kota dan negeri di daerah Sumatera Barat pada masa itu, perkembangan persurat kabaran pun turut pula mendjalar ketempat-tempat lain.

Disamping surat kabar Almunir yang dipimpin oleh alm. pengandjur besar Zainuddin Labai Eljunusy, di Padang Pandjang pada tahun 1923 terbit surat kabar Djago-djago (tiga kali seminggu) dipimpin oleh Natar Zainuddin, Pemandangan Islam dengan pimpinan Hadji Datuk Batuah dan Djamaludin Tamin. Kemudian dalam tahun 1924 terbit pula Petir (mingguan) dipimpin oleh Ahmad Chatib. Surat-surat kabar yang tersebut itu tidak ada yang sampai lama hidupnya, berhubung karena tekanan yang sangat keras dari pihak pemerintah kolonial pada masa itu.

Selain dari pada itu, masa berkobarnya pergerakan Pemuda PMDS di Padang Pandjang yang dimulai pada tahun 1942, oleh PMDS sendiri pernah pula diterbitkan surat kabar yang bernama Suara PMDS. Disamping itu ada lagi sebuah surat kabar Pemuda bernama Signaal dipimpin sdr Leon Salim.

Surat-surat kabar yang terbit di Bukittinggi, yaitu periodik dipimpin oleh S. Musjafir; kemudian dalam tahun 1924 terbit pula mingguan Dunia Achirah dibawah pimpinan Sain Almaliki dan S. Parpatih, dan pada tahun 1925 terbit lagi Sasaran Rakyat (bulanan) dipimpin oleh Abu Samah.

Selain dari Bukittinggi, Sawah Lunto pun tidak pula ketinggalan dalam usaha menerbitkan surat-surat kabar ini. Demikianlah pada tahun 1924 disana diterbitkan surat-surat kabar Suara Tambang dan Panas, masing-masing dipimpin oleh Idrus dan H. Nawawi Arif.

Surat-surat kabar yang terbit di Bukittinggi dan Sawah Lunto ini sama juga nasibnya dengan surat-surat kabar yang terbit di Padang Pandjang tadi, tak ada yang sampai lama hidupnya, terutama karena surat kabar itu sangat radikal dan tadjam.

Disamping surat-surat kabar yang berhaluan radikal revolusioner ini, dalam tahun 1925 — 1926 di Padang terbit pula surat kabar Buka Mata dipimpin oleh sjech Muhammad Sahak. Haluan surat

kabar ini menurut keterangan jang tertulis dibawah namanja, dinjatakan: „Haluan menerangkan matjam-matjam kesesatan dan kegelapan jang telah ditaburkan oleh beberapa pembohong dan pendusta”.

Diwaktu pergerakan rakjat mendapat tekanan dari pemerintah kolonial terutama dengan didjalankannya undang-undang vergaderverbod, maka pada masa itu sangat besarlah djasanja surat-surat kabar didalam mengembangkan tjita-tjita perdjuaan rakjat.

Sebab itu diantara tahun 1928 sampai berachirnja kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dengan masuknja tentera Djepang pada tanggal 17 Maret 1942, banjaklah diterbitkan surat-surat kabar, terutama berupa madjallah-madjallah, ada sekali sebulan, ada dua kali, ada pula jang mingguan dan sebagainya.

Surat-surat kabar harian jang ada di Padang pada masa itu, ialah Sinar Sumatera, Dagblad Radio, Pewarta, jang tidak berapa tahun hidupnja, Berita jang kemudian mendjadi Dagblad Persamaan dan Surat kabar Belanda Sumatera Bode.

Surat-surat kabar harian jang terus hidup sampai sa'at masuk tentera Djepang, ialah Persamaan, Sinar Sumatera, Dagblad Radio dan Sumatera Bode. Wartawan-wartawan jang turut mengendalikan surat-surat kabar jang tersebut itu antaranja: saudara-saudara Rustam St. Palindih, Jap Gin Sek, Suska, Boerhanuddin Sutan Noerdin A. Gaban Dt. Sinaro, Madjid Usman, Oei Goan Po, Mulkan, S. Alaudin, Marah Alif dan lain-lain.

Sementara itu, sebelum terdjadi peleburan Persatuan Sumatera Thawalib mendjadi Persatuan Muslim Indonesia jang berdasarkan Islam dan Kebangsaan, maka pada achir tahun 1929 di Padang sudah diterbitkan surat kabar tengah bulanan jang bernama Medan Rakjat dibawah pimpinan Hadji Iljas Jakub, pemimpin Permi. Surat kabar ini kemudian didjadikan surat kabar resmi dari Persatuan Muslim Indonesia (Permi), jang terkenal dengan kupasan-kupasannya jang bersifat radikal-revolusioner didalam membentangkan djembatan jang menghubungkan antara Islam dan Kebangsaan untuk mendekatkan hati antara kaum nasionalis dan kaum golongan agama disa'at itu.

Adapun surat-surat kabar umum jang terbitnja dua kali atau tiga kali seminggu ataupun mingguan disamping surat-surat kabar harian tadi, antaranja ialah: Perantaraan Kita oleh Madjid Usman, Pompai oleh Sjamsuddin Rasjad, Energi, Tjambut dll.

Dari kalangan peladjar-peladjar sekolah-sekolah menengah Islam di Padang, diterbitkan pula berbagai matjam surat kabar, baik jang berupa madjallah umum/pengetahuan, maupun madjallah jang khusus beraliran roman pergaulan.

Madjallah² jang tersebut itu antaranja „Raja” dipimpin oleh oleh M. Dien Jatim, Dewan Pemuda dipimpin oleh Sagaf Sjamsudin Timur Baru dipimpin oleh Decha.

Dalam pada itu dilain-lain tempat djuga penerbitan madjallah-madjallah ini hidup kembali dengan pesat seperti keadaan ditahun 1923 — 1925 dahulu.

1e. *Di Padang Pandjang.*

Surat-surat kabar jang terbit di Padang Pandjang dalam masi ini, pertama Suara Sumatera Thawalib, sebagai officieele orgaan dari Persatuan Sumatera Thawalib, sebelum ia didjelmakan mendjadi partai politik jang bernama Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) dalam tahun 1928; kemudian daripada itu terbit pula madjallah Pahlawan Muda, madjallah resmi dari H.B. H.P.I.I. dibawah pimpinan A.R. Hadjat. Dalam tahun 1935 dikalangan Muhammadijah diterbitkan pula madjallah Attablig dipimpin oleh H. Abdullah Kamil dan pada tahun 1936 oleh Persatuan Peladjar-peladjar Muhammadijah Padang Pandjang diterbitkan pula madjallah Utama dipimpin oleh Sabri Munir.

Pada akhir tahun 1938, oleh SKIS (Serikat Kaum Ibu Sumatera) diterbitkan madjallah resmi dengan nama Suara S.K.I.S. dipimpin oleh entjik Djusa'ir.

Paling akhir dalam tahun 1939, oleh almarhum pahlawan Chatib Suleiman bersama dengan saudara Leon Salim diterbitkan madjallah Pemberi Sinar, satu-satunja surat kabar jang mendidik dan mengembleng semangat perdjjuangan nasional dilapangan politik dan ekonomi, terutama sekali didalam mendorong dan memajukan usaha perekonomian dikalangan rakjat. Surat kabar ini pada masa itu mempunjai pengaruh jang sangat besar sekali dikalangan masjarakat Sumatera Barat.

Disamping itu, dengan pimpinan almarhum Chatib Suleiman djuga, dikampung beliau di Sumpur (Padang Pandjang) diterbitkan pula bulanan Suara Sumpur jang khusus berhaluan untuk kemandjuan rakjat dan negeri Sumpur dan tersiar kesegenap warga negeri Sumpur jang banjak merantau diseluruh daerah Nusantara Indonesia.

Selain dari surat-surat kabar tersebut, ada pula sebuah madjalah bulanan dengan huruf Arab bernama Pelita dipimpin oleh M. Rasech.

2e. *Di Batu Sangkar.*

Surat-surat kabar jang terbit di Batu Sangkar ialah Nurul Jaqin dipimpin oleh H. Aminullah, Obor Islam oleh Oemar Oesman, sedang di Sungajang ada pula madjallah Albajir.

3e. *Didaerah Bukittinggi.*

Surat-surat kabar jang terbit di Bukittinggi dan daerah sekitarnya, ialah: madjallah Keris jaitu madjallah resmi dari Permi tjabang

Agam dipimpin oleh Saiburrahman St. Sinaro. Kebenaran (3 X seminggu) dipimpin oleh Oesman Keadilan dan Abas Rahman. Himpunan Peladjar Perguruan Muslim menerbitkan pula madjallah bulanan Bahtera dipimpin oleh Harmaini Jatim dan Muluk Na'an dan oleh H.B. Perti diterbitkan surat kabar Arrad Wal Mardud dibawah pimpinan H. Siradjudin Abas.

Disamping itu ada pula surat-surat kabar yang khusus sebagai suara perguruan dan perkumpulan, seperti Berita VSM, Abuan Guru, demikianpun surat-surat kabar daerah seperti Suluh Agam, Suara Kota Gedang dan lain-lain.

Surat kabar yang khusus dari kalangan puteri yang terbit di Bukittinggi adalah Suara Puteri dipimpin oleh Djanewar Djamil dan Sjamsidar Jahja.

Disamping itu di Parabek pun pernah pula diterbitkan surat kabar dengan nama Albajan, demikianpun di Maninjau ada pula surat kabar Almizan. Kedua surat-surat kabar (madjallah) ini lebih banyak mengutamakan soal-soal agama.

Selain dari surat-surat kabar yang tersebut itu, dalam tahun 1928 di Bukittinggi pernah juga terbit surat kabar harian bernama Seng Po dipimpin oleh A. Gaban. Tetapi surat kabar ini sangat pendek benar umurnya.

4e. *Didaerah 50 Kota (Pajakumbuh)*

Adapun surat-surat kabar yang terbit didaerah 50 Kota (Pajakumbuh) dalam masa itu hanyalah ada di Padang Djapang (Suliki). Surat-surat kabar itu ialah madjallah Al Ittifaq wal Ifтираq dikeluarkan oleh perguruan Islam yang dipimpin injik Abbas Padang Djapang dan madjallah Djihad dipimpin oleh Sjarif Thaher.

5e. *Didaerah Solok.*

Daerah Solok yang menerbitkan surat kabar pada masa itu ialah Sulit Air. Disana diterbitkan surat kabar bulanan Almunawarah dibawah pimpinan A. Miin Thalib.

Diantara surat-surat kabar yang tersebut diatas tadi itu, sudah banyak yang mengorbankan pemimpin-pemimpinnya terutama yang berhaluan radikal, oleh karena hebat dan tadjamnya randjau-randjau pers yang ditanam oleh pemerintah kolonial pada masa itu.

Selain dari pada surat-surat kabar yang tersebut diatas, ada lagi yang tidak boleh dilupakan, jaitu surat kabar untuk kanak-kanak yang bernama Rantai Mas, yang diterbitkan oleh perguruan nasional I.N.S. Kaju Tanam. Walaupun surat kabar ini hanya khusus untuk kanak-kanak tetapi dari segi pendidikan sangat penting sekali artinja.

PERS DIMASA PENDUDUKAN DJEPANG

Persurat kabaran jang dimasa sebelum perang sudah berkembang demikian rupa dan berdjalan dengan pesat sekali, walaupun senanti-asa melalui duri undang-undang karet dari pemerintah kolonial, maka selama pendudukan Djepang segala perkembangan itu telah mendjadi terpotong dan terpukul sehebat-hebatnja.

Satu-satunja surat kabar jang diizinkan terbit oleh pemerintah Balatentara Djepang, hanjalah Padang Nippon di Padang, sedang ditempat-tempat lain tidak satu djuapun lagi madjallah-madjallah jang terbit seperti sediakala.

Hanja disamping harian Padang Nippo ada lagi satu harian jang khusus untuk orang-orang Djepang bernama Sumatora Simbun dengan berbahasa Djepang huruf Kandji. Surat kabar ini mulanja diterbitkan di Padang kemudian dipindahkan ke Padang Pandjang sampai pada sa'at Djepang kalah.

Sebagai persbureau jang mendjadi pusat perkabaran pada masa itu tidak lain dari pada Domei, jang untuk Sumatera berkedudukan di Bukittinggi.

Semua pemberitaan dan ulasan-ulasan dari surat-surat kabar atau kantor berita (persbureau) pada masa itu hanja semata-mata bersifat propaganda dan memudji-mudji pemerintah dan tentera Djepang.

Wartawan-wartawan Indonesia dan Tionghoa dimasa sebelum perang, baik jang bekerdja pada staf redaksi, maupun hanja jang bekerdja sebagai korresponden, semuanya mau tak mau terpaksa bekerdja pada surat kabar Padang Nippo, Sumatora Simbun dan Domei tadi itu, karena pemerintah Fascist Djepang tidak mengizinkan adanya surat-surat kabar jang lain.

Surat-surat kabar pada masa pendudukan ini diterbitkan oleh persekutuan surat kabar se Sumatera (Sumatora Simbun Kai) dibawah pengawasan Gunseikan Bu bahagian Hodo Bu (Penerangan Tentera). Wartawan-wartawan Indonesia pada waktu itu hanja bekerdja selaku pegawai, sedang jang diberi berpengaruh dan berkuasa adalah wartawan-wartawan jang sengadja didatangkan dari Djepang.

Djadi artinja pada waktu itu, surat kabar Indonesia atau jang disebut djuga surat kabar nasional didaerah ini tidak ada sama sekali dan jang ada hanjalah surat kabar Djepang.

PERS DIZAMAN REVOLUSI.

Sesudah Djepang kalah dan berita Proklamasi telah mengumandang diseluruh daerah Sumatera Tengah, pertama kali disiarkan maklumat Proklamasi itu kepada rakjat, jang ditanda tangani oleh Muhammad Sjaf'e'i. Sekalipun waktu itu kekuasaan Djepang tidak

ada lagi, tetapi pihak Kempeitai Djepang melarang djuga tersiarnja maklumat tersebut.

Arus perdjungan dikalangan pemuda-pemuda untuk memper-tahankan Proklamasi jang bersembojan merdeka atau mati tak dapat dibendung lagi oleh Kempetai Djepang, sekalipun waktu itu tentera Djepang umumnja diberi tugas oleh pihak Sekutu untuk men-djaga keamanan, sementara tentera pihak Sekutu masih belum datang.

Dalam arus revolusi jang sedang berdjalan ini, maklumat-mak-lumat Pemerintah R.I. jang pertama tadi itu sangat besar sekali pengaruhnja, walaupun ia hanja setjarik kertas dengan kutipan isi Proklamasi jang telah diproklameerkan oleh Sukarno — Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.

Demikianpun sangat besar pula pengaruhnja surat-surat selebaran atau pamphlet-pamphlet dan sembojan-sembojan jang dituliskan dengan tulisan-tulisan besar pada dinding-dinding gedung, tembok-tembok, dinding kereta api dsb. Itulah hanja sebagai ganti surat kabar pada sa'at permulaan itu, terutama pula dengan usaha mem-perluas tersiarnja berita-berita radio walaupun dari mulut kemulut dan sebagainya.

Padang Nippo sudah tidak terbit lagi, dan pada sa'at itu tidak ada satupun surat kabar jang akan memimpin pikiran umum jang sedang dalam arus revolusi dan tempo-tempo terpaksa bertempur dengan melawan tentara Djepang jang masih tjukup alat keleng-kapan perangnja.

Masyarakat sangat haus kepada pemberitaan, terutama mengenai perdjungan dan pergolakan jang tengah berlangsung dipulau Djawa. Oleh karena itu wartawan-wartawan jang dahulunya beker-dja pada Padang Nippo, Sumatora Simbun dan Domei, masing-masing berusaha untuk menerbitkan surat kabar kembali.

Surat kabar jang pertama sekali terbit pada waktu itu, ialah madjallah bulanan „Berdjuang“, terbit di Padang Pandjang dan dipimpin oleh pemuda Bustanuddin Ismail dengan dibantu oleh be-berapa orang terkemuka disana.

Kemudian dari pada itu barulah terbit harian Utusan Sumatera di Padang diusahakan oleh saudara Bariun A. S. dengan bantuan saudara-saudara Mulkan, Muchtar Mahjuddin, Marah Alif dan lain-lain. Disamping surat kabar Utusan Sumatera oleh saudara Lie Un Sam dari pertjetakan Radio diterbitkan pula harian Suara Sumatera dipimpin oleh saudara S. Alaudin. Kedua surat kabar itu terbit dalam bulan September 1945, sedang harian Suara Sumatera tidak lama hidupnja.

Dalam bulan September itu djuga di Bukittinggi atas usaha sau-dara Yusdja dan Decha dengan bantuan beberapa orang kawan-kawan lain diterbitkan harian Pedoman Kita, dan oleh saudara

H. Aminullah dari Pertjetakan Kahamij diterbitkan pula surat kabar minggu.

Kemudian dalam bulan Oktober dengan pimpinan Adi Negoro jang telah berhasil memperdjuangkan alat-alat pertjetakan di Kaju Ramang, kertas dan lain bahan untuk keperluan penerbitan sebuah surat kabar jang besar dan sangat dibutuhi masjarakat pada masa itu, maka diterbitkanlah harian Kedaulatan Rakjat. Pemimpin redaksi dipegang oleh saudara Anwar Luthan dan stafnja terdiri dari saudara-saudara Tengku Sjahril, Zuir Djamal, Zubir Salam, Sjamsuddin Lubis, Darwis Abbas, Dja'far siddik, Maisir Thaib, Zakaria Yamin dan Hasan Ahmad.

Pada masa itu Kedaulatan Rakjat satu-satunja surat kabar jang terbesar didaerah ini, sehingga oplaagnja mentjapai sampai 14.000.

Harian Pedoman Kita tidak dapat lama terbitnja, berhubung karena antjaman Sekutu, jang disebabkan karena tulisan-tulisan jang sangat tajam dalam harian itu.

Bulan Nopember 1945 di Padang Pandjang diterbitkan harian Demokrasi, pemimpin umumnja saudara Yusdja bekas pemimpin Pedoman Kita, pemimpin Redaksi saudara M. Joesoef dan stafnja terdiri dari saudara-saudara Kasuma, M. Djana St. Malenggang dan H. M. Nur.

Harian Demokrasi ditjetak pada pertjetakan jang direbut dari Djepang, yakni bekas pertjetakan Sumatora Simbun di Pasar Usang. Perebutan ini dipimpin oleh almarhum H.M. Nur bersama saudara-saudara M. Joesoef, Marwazi (Maruo) dan beberapa orang bekas pegawai Sumatora Simbun.

Semua surat-surat kabar jang terbit dizaman pergolakan itu, sesungguhnya mempunjai peranan jang sangat penting sekali di lapangan perdjuangan. Dan jang agak lama hidupnja diantara surat-surat kabar itu, hanjalah Kedaulatan Rakjat di Bukittinggi dan Utusan Sumatera di Padang, sedang harian Demokrasi di Padang Pandjang terpaksa berhenti terbit dalam bulan Djuni 1946, berhubung karena kehabisan bahan, terutama kertas, tinta dan letter.

Kemudian dalam tahun 1946 itu pula, di Padang Pandjang diterbitkan lagi sebuah madjallah bernama Menara dipimpin oleh Hamka dan Haskim dari kalangan Muhammadiyah.

Sebagai ganti dari surat kabar Suara Sumatera jang tidak lama hidupnja, dalam tahun 1946 oleh Lie Un Sam diterbitkan harian Penerangan dipimpin oleh saudara Oei Tin Djin.

Harian Utusan Sumatera berhenti terbit pada pengabisan tahun 1946, yakni ketika perundingan setempat antara delegasi Pemerintah N.R.I. dengan pihak Belanda gagal, dan Belanda ketika itu melahirkan kata-kata antjaman terhadap kita.

Dalam sedjarah perdjalanannja, Utusan Sumatera sebagai surat kabar Republikein dalam kota pendudukan selalu menghadapi

antjaman dari pihak Sekutu, sehingga pada satu kali pertjetakan: jang mentjatak Utusan Sumatera sampai dihantjurkan oleh tentera Sekutu dengan dinamit, dan pimpinannya pada waktu jang paling achir dipegang oleh saudara Marah Alif.

Kalau Utusan Sumatera memegang peranan penting dalam kota pendudukan, demikian pula halnya harian Kedaulatan Rakjat dipedalaman. Dalam sedjarah perdjalanannya Kedaulatan Rakjat sampai beberapa kali mengalami pergantian pimpinan redaksi, berhubung karena tenaga pimpinan semula silih berganti pula dibutuhkan dilain-lain bahagian jang lebih penting.

Ketika Bung Adi Negoro pindah ke Djakarta, penerbitan Kedaulatan Rakjat dilandjutkan dengan nama „Daulat Rakjat” jang achirnya diganti dengan nama Utusan Rakjat.

Utusan Rakjat pun tidak lama hidupnya, berhubung karena kesulitan bahan-bahan dan pertjitakan, karena pertjitakan Kedaulatan Rakjat telah diambil pula oleh Pemerintah.

Disamping surat-surat kabar jang tersebut itu, maka untuk pemberitaan keluar daerah atau keluar negeri didirikanlah Kantor Berita „Antara” Bukittinggi sebagai tjabang dari K.B. „Antara Sumatera jang mulanja berkedudukan di Medan dan kemudian di Pematang Siantar. K.B. „Antara” Bukittinggi ini didirikan dalam bulan Djuni 1946 dipimpin oleh saudara Zuir Djamal, dan mempunyai wartawan-wartawan front jang aktif, jaitu saudara Hasan difront Luar Kota dan M. Joesoef dalam kota Padang.

Karena itu K.B. Antara setiap hari langsung menjiarkan keluar negeri berita-berita perdjjuangan dan pertempuran jang terdjadi diseluruh front Padang area, pendeknja segala peristiwa jang terdjadi diluar dan didalam kota sendiri.

PERS DIDAERAH-DAERAH LAIN

Selain dari Bukittinggi dan Padang, maka daerah-daerah lain jang menerbitkan surat kabar sesudah masa Proklamasi ialah Pakan Baru, Bengkalis dan Rengat.

1e. *Surat-surat kabar di Pakan Baru.*

Surat kabar jang terbit di Pakan Baru ialah mingguan Perdjjuangan dan Our Struggle dalam bahasa Inggeris. Kedua surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1946 oleh Pedjabat Penerangan Riau dengan pimpinan saudara Aminudin dan pemimpin redaksinya masing-masing saudara T. Alang Jahja dari Perdjjuangan dan Toh Bun That dari Our Struggle.

Didaerah keresidenan Riau seluruhnja kedua surat kabar ini mempunyai peranan jang sangat besar dan penting sekali sebagai alat propaganda dan penerangan dari Pemerintah NRI jang teru-

tama ditudjukan kedaerah perairan Kepulauan Riau jang telah diduduki kembali oleh Belanda. Dalam tahun 1947, tatkala kedua surat kabar Perjuangan dan Our Struggle itu tidak terbit lagi, maka digantilah dengan penerbitan madjallah Pembinaan dipimpin oleh saudara Anwar Nurin dan A. Suleman Hudum. dari Pedjabat Penerangan djuga.

2e. Di Bengkalis dan Rengat.

Dalam bulan Pebruari 1947 dengan pimpinan saudara H. Muhammad di Bengkalis diterbitkan surat kabar Obor Rakjat, sedang di Rengat atas usaha pemuda-pemuda disana diterbitkan pula Dwi Warna. Surat-surat kabar tersebut hanja distensil. Sungguhpun begitu, namun pengaruh dan kepentingannya untuk masjarakat tjukup besar.

PERS DARI KALANGAN TENTERA.

Dari kalangan Tentera, usaha penerbitan surat-surat kabar ini pun turut di:giatkan, karena tentera djuga jakin, bahwa disamping senapang dan peluru, sangat hebat pula hasilnja peluru jang dimuntahkan oleh sendjata pena dan kertas.

Karena itu, oleh bahagian Penerangan Tentera Div. IX Banteng di Bukittinggi diterbitkanlah harian Banteng dalam tahun 1946. Disamping harian Banteng diterbitkan pula harian „Suara Padang” jang ditudjukan untuk daerah pendudukan Belanda, jang memuat berita-berita perdjjuangan R.I. Kemudian pada awal 1947 oleh Komandemen Tentera Sumatera Seksi XI diterbitkan pula madjallah Senapati jang khusus untuk tentera.

KEADAAN PERS DALAM KOTA PENDUDUKAN.

Didalam sedjarah perkembangan Pers semendjak masa Proklamasi, maka didaerah pedalaman tjorak pers itu hanja satu sadja, jaitu: *Republikein*. Akan tetapi di Padang sebagai kota pendudukan jang dikuasai N.R.I. pers itu berbagai matjam tjoraknja. Ada jang *Republikein*, ada jang neutral dan ada pula jang anti-republik.

Pers jang bertjorak *Republikein* dalam kota pendudukan itu, kon-tan-kontan menghadapi langsung 1001 matjam propokasi, intimidasi dan sebagainya dari pihak musuh jang anti-republik. Andai kata, kalau pers jang berhaluan *Republikein* itu tidak ada didalam kota pendudukan, banjak sedikitnja akan hantjur dan lumpuh semangat dan djiwa orang-orang Republik didalamnya, oleh karena hebatnja propokasi dari pihak-pihak jang sangat anti-republik tadi itu.

Sebab itu dikota pendudukan sangat besar peranan jang dipegang surat-surat kabar *Republikein*, terutama didalam memelihara dan memimpin pikiran serta memupuk semangat perdjjuangan dikalangan penduduk, lebih-lebih lagi didalam menentang

propokasi dan propaganda dari pers dan dinas-dinas penerang-pihak musuh jang sangat tjukup alat kelengkapannya.

Hal ini bertambah hebat lagi, semendjak pendudukan Tentera Sekutu (Inggeris) di Padang telah digantikan oleh tentera Belanda pada 30 Nopember 1946.

Seperti telah diterangkan dalam fasal jang lalu, bahwa harian Utusan Sumatera adalah satu-satunya alat penggemblengan semangat perjuangan rakyat di kota Padang semasa pendudukan Inggeris. Kemudian oleh karena tenaga-tenaga jang mengendalikan Utusan Sumatera itu terpaksa pindah ke Pedalaman (Bukittinggi) dengan tugas jang lebih penting dalam perjuangan jang tambah memuntjak, terutama pula karena gagalnja perundingan setempat antara delegasi Pemerintah kita dengan pihak Belanda pada tanggal 30 Desember 1946 di Padang, maka Utusan sudah terpaksa berhenti terbit.

Dalam pada itu propaganda dari pihak Belanda jang sudah sedjak masa pendudukan Inggeris telah menjusun pemerintahan sipilnja dalam kota Padang jang dikuasai Republik itu semakin hari semakin bertambah hebat djuga. Selain dari mobil propaganda dari dinas penerangannya, rombongan kesehatan dan sosiale zaken jang selalu datang kekampung-kampung untuk menarik hati penduduk dengan membagi-bagikan obat-obat, pakaian, makanan dan sebagainya; Belanda pun tidak sedikit pula memasukkan surat-surat kabar jang anti republik dari Djawa setiap hari, disamping harian Padang Bode dan berbagai bulletin jang diterbitkan di Padang.

Memikirkan hal-hal jang tersebut diatas, maka pada tanggal 31 Desember malam, Wali Kota Padang almarhum B. A. Azizchan memerintahkan kepada saudara M. Joesoef dan St. Djohan. masing-masing wartawan Antara dan bekas pemimpin zetter Utusan Sumatera untuk menerbitkan sebuah harian Republik pengganti Utusan Sumatera jang telah mati.

Tanggal 2 Djanuari 1947 mulailah diterbitkan harian Tjahaja Padang dibawah pimpinan saudara M. Joesoef dan saudara St. Djohan pengurus administrasi, sedang anggota-anggota stafnja sedjak dari redaksi sampai kepada zetter dan tukang tjitak jang sama sekali berdjumlah 12 orang, semuanya terdiri dari pemuda-pemuda jang berumur antara 14 dan 20 tahun.

Pemuda-pemuda jang sangat berdjasa sekali dalam sedjarah perjuangan Tjahaja Padang ini diantaranya Sutan Djohan selaku pemimpin zetter dan pengurus administrasi dan Pangeran sebagai anggota staf redaksi

Waktu agresi pertama tanggal 21 Djuli 1947 Tjahaja Padang berhenti terbit, oleh karena pemimpin bersama dengan sekalian anggota staf dan pekerdjanja ditawan Belanda, pada malam sesudah Wali Kota Azizchan dibunuh.

PERKEMBANGAN PERS SESUDAH RENVILLE

Sesudah Renville, penerbitan Tjahaja Padang dilandjutkan kembali oleh saudara-saudara St. Djohan, Harunnarrasjid, Nursuhud Achir dan lain-lain, sedang pemimpinnya semula saudara M. Joesoef menjingkir kepedalaman (Bukittinggi) sesudah keluar dari tawanan.

Didalam sedjarah kelandjutan Tjahaja Padang ini sebagai surat kabar jang tetap berhaluan Republikein didalam kota jang 100% sudah dikuasai Belanda, sangat pahitlah penderitaan jang dialami oleh pengasuh-pengasuhnja. Berkali-kali surat kabar itu dibreidel dan diantjam, dan paling achir Tjahaja Padang dilarang terbit buat selandjutnja, sedang saudara-saudara St. Djohan dan Harunnarrasjid ditawan sampai dua tahun lamanja dan baru dibebaskan dekat terdjadinja penjerahan kedaulatan.

Sementara itu surat-surat kabar jang terbit di Bukittinggi sesudah clash pertama ini, ialah harian Detik dipimpin oleh Parada Harahap jang waktu itu mendjadi Koordinator Penerangan Sumatera berkedudukan di Bukittinggi Anggota-anggota stafnja terdiri dari wartawan-wartawan dari Djawa dan Medan (Pematang Siantar), jaitu Tasrif, Rinto Alwi, Radjab dan dari Pematang Siantar saudara-saudara Adaham Hasibuan, Mahidin dan Azwar. Selain dari itu adalagi harian Pantja Sila dipimpin oleh saudara Oesman Hasibuan, sedang surat-surat kabar jang berupa madjallah diantaranya Aksi oleh Yusuf Sju'ib, dan Genderang Sjahid oleh Tamar Djaja. Dalam pada itu surat-surat kabar dari pihak tentera, Penuntun Perjuangan, Senapati dan Banteng masih terus terbit.

Kantor Berita Antara Sumatera jang berkedudukan di Pematang Siantar pindah ke Bukittinggi dan K.B. Antara Bukittinggi dilikwidir. Pimpinan K.B. Antara Sumatera waktu itu dipegang oleh saudara Abdullah Oesman Lubis sebagai ketua umum, Zuir Djamal wakil ketua, staf redaksi terdiri dari saudara-saudara T. Sjahril, Darwis Abbas, T. Alang Jahja dan lain-lain. Pada waktu itu K.B. Antara menerbitkan Bulletin harian seperti biasa.

Bulan Djanuari 1948, KB Antara membuka kantor perwakilannja buat daerah keresidenan Riau di Pakan Baru dengan pimpinan saudara M. Joesoef bekas wartawannja dikota Padang.

Selain dari itu oleh saudara Taher Samad di Padang Pandjang diterbitkan pula surat kabar setengah bulanan bernama Mata Rakjat. Surat kabar ini tidak berapa nomor hidupnja, karena kekurangan alat-alat.

KEADAAN PERS DALAM ZAMAN GERILJA

Sedjak permulaan clash kedua bulan Desember 1948, pada sa'at mana beberapa kota telah diduduki oleh tentera Belanda, penerbitan

surat-surat kabar dan bulletin-bulletin tak dapat dilandjutkan lag. Tetapi sungguhpun demikian, adanja surat kabar lebih dirasakan lagi kepentingannja, terutama untuk penggemblengan semangat perjuangang jang menentukan hidup atau mati

Oleh karena itu di beberapa tempat didaerah gerilja diusahakan dengan segala djalan jang mungkin menerbitkan surat-surat kabar. ada jang distensil dan ada jang hanja dengan ditep sadja.

Di Pusat Pemerintahan Gubernur Militer Sumatera Tengah diterbitkan pula harian „Menara Rakjat” dibawah pimpinan Suska. Besar sekali pengaruhnja terhadap perjuangang totaliter, dan dijadiakan pedoman serta batjaan Umum oleh kaum gerilja.

Saudara Darwis Abbas dari staf K.B. Antara mengeluarkan bulletin sendiri di Gunung Singgalang sampai waktu cease fire. sedang oleh markas pertempuran mobil didaerah Padang Pandjang dikeluarkan pula madjallah Gelora Djiwa. Dan selama masa bergerilja itu, sama djuga artinja dengan surat-surat kabar berita-berita kurier jang disampaikan oleh tenaga-tenaga kurier dari satu tempat ketempat jang lain.

Dalam pada itu, sementara perang gerilja sedang menghebat. oleh saudara Adaham Hasibuan dan kawan-kawannja di Bukittinggi diusahakan menerbitkan harian Haluan dengan seizin Belanda Berita-berita dan tulisan-tulisan jang dimuat tentu sadja sesudah melalui sensur dari pihak kekuasaan Belanda lebih dahulu.

Selain dari Haluan, dikota Bukittinggi djuga diterbitkan pula madjallah Riak Buana bersifat umum dan pengetahuan.

PERS SESUDAH PENJERAHAN KEDAULATAN.

Perkembangan pers sesudah pemulihan sampai pada sa'at ini boleh dikatakan sudah merata diseluruh kabupaten di Sumatera Tengah ini.

Tjuma surat-surat kabar itu sebahagian besar diusahakan oleh Djawatan Penerangan Kabupaten Kota berikut dengan berita-berita harian untuk daerahnja masing-masing.

Surat-surat kabar jang diterbitkan oleh Djawatan-djawatan Penerangan Kab/Ko adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama surat kabar	Dikeluarkan oleh:
1.	Dunia Seminggu	Djawatan Penerangan Prop. Sum. Tengah Bukittinggi.
2.	Berita Harian	I d e m.
3.	Penuntun	Djapenkab Agam Bukittinggi
4.	Tjahaja	„ Padang/Pariaman, Pariaman
5.	Suluh Masjarakat	„ Pasaman, Lb. Sikaping

Nomor	Nama surat kabar	Dikeluarkan oleh:
6.	Pembimbing	Kampar, Pakan Baru
7.	Pelita Marga	„ Marangin, Bangko
8.	Surja	„ Inderagiri
9.	Pembangun Masyarakat	„ Sawah Lunto! Sidjundjung, Sawah Lunto.
10.	Desa Baru	„ P.S.K., Painan
11.	Pedoman Rakjat	„ Kepulauan Riau, Tandj. Pinang.
12.	Aktuil	„ Batang Hari, Djambi
13.	Utusan	„ Tanah Datar, Batu Sangkar
14.	Penjebar	Djapenko Padang.
15.	Pelita	„ Bukittinggi.
16.	Peristiwa	Djapenkab Solok.
17.	Penerangan	„ Bengkalis.

Surat-surat kabar yang tersebut diatas itu, sedjak bulan Djanuari 1953 diganti namanja dengan nama daerah kabupaten masing-masing.

Selain dari surat-surat kabar yang diterbitkan oleh Djawatan-Penerangan ini, ada pula surat kabar yang diterbitkan oleh lain-lain instansi, jaitu Perkembangan oleh Persatuan Pamongpradja dan Penghubung oleh P.P. & K. Sumatera Tengah.

Adapun Surat-surat kabar harian yang ada di Padang sesudah penjerahan kedaulatan, jaitu harian Penerangan yang diterbitkan oleh Lie Un Sam dalam tahun 1946, Haluan yang dipindahkan dari Bukittinggi yang sekarang dipimpin oleh Darwis Abbas dan Warga Merdeka yang diterbitkan dalam tahun 1950 dan dipimpin oleh sdr. M. Ridwan. Warga Merdeka ini achirnja dilikwidir dan disatukan dengan harian Penerangan.

Demikianlah perkembangan persurat-kabaran di Sumatera Tengah sebagai alat untuk Mass Education dalam perdjalanannya masa yang silih berganti sampai sekarang.

Pasal 50.

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN RADIO.

Sebelum Proklamasi 17 Agustus.

SEBELUM petjah peperangan dunia jang kedua di Sumatera hanja kedatangan sebuah pemantjar radio sadja jaitu pemantjar radio kepunjaan Belanda di Medan.

Setelah peperangan dunia kedua meletus dan tentera Djepang mulai bulan Maret 1942 menduduki seluruh Indonesia, maka beberapa bulan kemudian oleh tentera Djepang di Sumatera selain dari pada pemantjar radio jang sudah ada di Medan itu, didirikan beberapa Studio dan pemantjar radio dibeberapa tempat jang penting di Sumatera jaitu: di Palembang, Kotaradja dan Bukittinggi, dengan memakai pemantjar-pemantjar jang kekuatannya masih ketjil.

Ketika situasi perjuangn jang dihadapi Djepang sudah bertambah hebat dengan terdjadinja peperangan didaratn, lautan dan udara, dan sesuai dengan rentjana memperkuat propaganda untuk mendirikan Sumatera Baru dibawah Djepang ditambahlah mendirikan pemantjar-pemantjar baru ditempat-tempat jang dirasa strategis oleh Djepang dalam melantjarkan propagandanya, jaitu: di Djambi, Telukbetung, Tarutung dan Pakanbaru. Sedang Studio Bukittinggi didjadikan Studio pusat untuk seluruh Sumatera jang dalam bahasa Djepang disebut Sumatera Tyuo Hozo Kyoku. Sesuai dengan kedudukannya sebagai Studio pusat pada bulan September 1944 diresmikan pemantjar pusat Bukittinggi jang baru jang berkekuatan 1,5 Kw. disamping pemantjar ketjil jang lama, dari pemantjar pusat inilah diatur dan dikirim segala rentjana pusat agar di-relay oleh pemantjar-pemantjar daerah pada waktu jang ditentukan.

Oleh karena keadaan dalam perang tata-tertib siaran kerap kali berobah, disesuaikan dengan suasana dan kepentingan dalam waktu-waktu maka perlu pula setiap hari memanggil (Call) Studio daerah untuk menerima perubahan.

Kedua pemantjar jang ada di Bukittinggi tidak pernah diumumkan gelombangnya dan semua pesawat-pesawat radio penerima (pendengar) di-segel dan hanja dapat menangkap gelombang Bukittinggi sadja. Begitupun keadaannya didaerah-daerah lain tidak dibolehkan mengambil siaran radio lain terutama siaran musuh Djepang (Sekutu) baik oleh umum maupun oleh pegawai studio

sendiri; guna menghindarkan kemungkinan adanya bahaya pemboman musuh oleh Djepang dibuat sebuah lobang besar dalam tanah yang tidak jauh letaknya dari Studio. Dalam lobang itu disediakan petak-petak yang bagus untuk kamar penjiar, kamar bahagian teknik dan sebagainya. Dalam lobang itu ditempatkan alat-alat pemantjar dan alat-alat lain yang penting-penting saja sedang Studio belum dipindahkan kesana karena tidak ada tanda-tanda adanya penyerangan musuh di Bukittinggi.

Lobang itu cukup untuk menahan tekanan bom, sedang diluar-nja dibikin „tanah tinggi” pertahanan tentera untuk melindungi dari serangan darat atau sabotage.

Siasat siaran Djepang:

Di Bukittinggi adalah pusat pemerintahan tentera Djepang dimasa itu, maka dalam menentukan siasat siarannya Studio pusat Bukittinggi tunduk pada kehendak pemerintah tentera Djepang dengan perantaraan kantor propagandanya (Sendenbu).

Kepala Studio setiap hari menerima Instruksi dari Sendenbu, kemudian barulah Kepala Studio mengatur teknik siaran.

Penjiaran dibagi dua:

PERTAMA DALAM BAHASA DJEPANG.

KEDUA DALAM BAHASA INDONESIA.

Kalau perlu mengadakan siaran serentak dalam dua bahasa maka bahasa Djepang didahulukan. Dalam garis besarnya politik siaran ditunjukkan untuk menguasai jiwa bangsa Indonesia agar dapat:

1. Membantu tentera Djepang dalam peperangan Asia Timur Raya (Dai Toa Senso).
2. Mempertjajai sepenuhnya bahwa tentera Djepang pasti menang dalam melawan tentera Sekutu.
3. Menanamkan rasa lebih menjintai fasisme dari pada demokrasi.
4. Memperluas perkembangan bahasa Djepang.
5. Menjalurkan kebudayaan Djepang ditengah-tengah masyarakat.

Demikianlah siasat propaganda itu dijalankan sampai tiba saatnya Djepang menjerah kepada Sekutu, sedang pemantjar-pemantjar radio sebagai alat urat sjaraf melawan musuhnja turut menjerah kalah. Pemantjar radio Bukittinggi tidak kedengaran lagi diudara.

Sesudah Djepang menjerah:

Keadaan perubahan yang tiba-tiba itu menimbulkan kebingungan masyarakat, sehingga kalangan terpeladjarpun banjak juga

jang bingung menghadapi masa perantaraan (Overgangstijdperk) itu, apalagi kalangan masjarakat ramai jang banjak buta politik dan selama 3½ tahun sengadja dibutakan oleh Djepang.

Satu-satunja djalan untuk melepaskan masjarakat dari kebingungan ialah: Dengan adanja penjiaran, sedangkan salah satu alatnja ialah radio. Tetapi pemantjar radio Bukittinggi masih dikuasai oleh Djepang dan seluruh siaran baik keluar ataupun kedalam mereka hentikan. Ketjuali beberapa penduduk jang masih mempunjai pesawat penerima radio sendiri dengan diam-diam membuka segel radionja dan menangkap siaran Luar Negeri. Dari sanalah baru diketahui bahwa Djepang sebenarnya sudah kalah, bukan „damai” seperti jang disiarkan pemantjarnja. Saat kebebasan rakjat dari belenggu kebingungan itu tiba djuga.

Revolusi mengubah sedjarah Hindia Belanda jang dulu berada dibawah tjengkeraman hukum fasis Djepang mendjadi Indonesia Merdeka jang berdaulat.

Hal ini menimbulkan hasrat jang mendalam didjiwa pemuda-pemuda perdjuaan dimasa itu hendak menguasai Studio dan pemantjar radio Bukittinggi jang masih berada dalam kekuasaan Djepang.

Perembukan diadakan oleh pemuda-pemuda dari P.R.I. dan bekas pegawai-pegawai Radio dimasa Djepang jang terdiri dari Saudara-saudara Adnan Burhani, N. Dt. Mangkuto Ameh, Kasuma, Sjahbuddin Mz, Arsul, Basjari Latif dan lain-lain, untuk mengadakan tindakan merampas Studio dan pemantjar tersebut. Dan buat pertama kali direntjanakan supaja pemuda-pemuda bersama rakjat serentak merampas pemantjar jang terletak di Parit Natung Bukittinggi, dengan lebih dahulu melakukan pantjangan dengan memasang Sang Dewi Warna dipuntjak antene pemantjar radio tersebut. Ketika rentjana ini akan dilaksanakan dan pemuda-pemuda sudah siap mendekati pemantjar itu, ternjata tidak dapat diteruskan karena disekitar pemantjar itu dikawal oleh tentera Djepang jang mempunjai sendjata lengkap.

Kemudian dengan usaha Saudara Adi Negoro dan Saudara Djuir Muhammad berunding dengan tentera Sekutu jang menerima over pemantjar itu, maka pemantjar radio tersebut diserahkan oleh tentera Sekutu kepada Pemerintah Republik di Bukittinggi.

Tanggal 14 Djanuari 1946 diresmikan pemantjar radio pusat Bukittinggi berada kembali diudara dengan upatjara dilangsungkan dalam Studionja.

Pidato-pidato pembukaan dan sambutan diutjapkan oleh Saudara Adi Negoro wakil Pemerintah Pusat di Sumatera. Saudara Aziz dari P.T.T./Radio dan beberapa orang pemimpin jang lain. Sedangkan doa penutup untuk memohonkan berkah dari Ilahi jang Maha Esa dibatjakan oleh Almarhum Injik Sjech M. Djamil Djambek. Sedjak itu kembalilah propaganda dan penerangan untuk rakjat berdjuaan dapat disalurkan diudara.

Pemantjar-pemantjar itu bergelombang 40,2 dan 210 meter, dengan kekuatan $1\frac{1}{2}$ dan 0,3 Kw.

Sedjak pemantjar-pemantjar dua sedjoli ini dipergunakan dengan bebas oleh pengasuh-pengasuhnja yang terdiri dari Saudara-saudara N. Dt. Mangkuto Ameh, Kasuma, Adnan Burhani, Sjahbuddin Mz, Marhum Said dan lain-lainnja dibawah pimpinan Saudara Adi Negoro, keadaannja tidak lebih dari pada kumpulan alat-alat penjiaran darurat yang susah untuk menjatukannja. Tetapi dengan bantuan kerdja-sama yang erat dari P.T.T. Sumatera di Bukittinggi yang memegang tekniknja terutama tenaga-tenaga yang diberikan oleh Saudara-saudara Ardiwinata, Sjamsu Anwar, Muchtar Djafar dan lain-lainnja, maka kekurangan alat itu tidak mengetjewakan benar bagi kelantaran pekerdjaan.

Hanja sadja propaganda siaran dan tekniknja, belum dapat disempurnakan karena tudjuan yang terutama buat pertama kali, hanjalah supaja kita dapat menguasai udara guna membimbing rakjat berdjuaung, dalam menudju tjita-tjita mempertahankan kemerdekaan yang sedang terantjam dengan menjusun tenaga dalam „Total people's defence”.

Masyarakat merasa gembira sekali, karena diudara selalu mendengar radio Republik Indonesia. Utjapan „Republik Indonesia” yang menggeletar diudara dengan bebas merdeka tjukup bagi masyarakat sebagai obat penderitaan yang bertahun-tahun dialami.

Selain dari mengobarkan semangat perdjuaungan, menerangkan tudjuan „merdeka” dan mejakinkan kepertjajaan diri dapat berdjuaung terus sampai kemerdekaan diakui de facto dan de jure oleh negara-negara lain, pemantjar djuga dipakai oleh Badan Penerangan Tentera untuk penerangan-penerangan sekitar ketenteraan, pidato-pidato tentang sikap pimpinan tentera menghadapi Nica yang membontjeng dengan Inggeris dan untuk membalas propaganda dari segi kemiliteran.

Dengan perantaraan tjorong Radio Bukittinggi ini Badan Penerangan Tentera telah banjak mengetjutkan hati Belanda dan adakalanja Belanda di Padang djadi kesal dan kelam kabut. Mereka mentjoba membalas dengan mengatakan bahwa Republik Indonesia adalah satu Republik ditjorong Radio sadja, Republik yang dipunjai oleh orang-orang yang berbitjara dimuka microfoon.

Ternjata R.R.I. Bukittinggi kerap mendapat kemenangan dalam perang urat sjaraf, hingga pernah komandan U Brigade dari tentera Belanda di Padang mengabarkan akan membom Studio Bukittinggi djika siasat siarannja tidak berubah. Tetapi semangat rakjat berdjuaung tidak kundjung padam, sekali diudara tetap diudara, segala matjam antjaman diterima dengan keteguhan hati dan waspada. Setahun lamanja Studio bertempat dibekas gedung Bukittinggi Tyuo Hozo Kyoku, kemudian pada tanggal 14 Djanuari 1947 dipindahkan setjara bergotong-rojong oleh pegawai-pegawai

pedjuangnja, kemuka rumah sakit umum Bukittinggi dibawah pimpinan Saudara Muchtar Djafar.

Patut diterangkan disini bahwa sebelum itu, M. Dt. Mangkuto Ameh terpaksa meninggalkan lapangan radio karena tenaganya diperlukan oleh K.N.I. di Bukittinggi, sedang Saudara Kasuma dipindahkan ke P.T.T. pusat (Sumatera). Dan anggota pimpinan baru jang tidak lama pula dalam lapangan radio, adalah Saudara Marhum Said jang mengundurkan diri pada bulan Djanuari 1947. Semendjak dia didirikan, segala urusan kepegawaian, gedung dan technik berada dibawah pengawasan P.T.T. Sumatera, sedang siarannja dilaksanakan dibawah pimpinan wakil Kementerian Penerangan di Sumatera (Bukittinggi) jang dipimpin oleh Saudara Adi Negro.

Diwaktu ibu-kota Propinsi Sumatera berkedudukan di Pematang Siantar, maka untuk memperbaiki segala sesuatu jang mengenai nasib R.R.I. Bukittinggi pernah dibentuk sebuah panitia R.R.I. jang terdiri dari anggota-anggota dari kalangan P.T.T. Radio serta para terkemuka di Bukittinggi dan diketuai oleh Saudara Tk. Sjahril (sekarang Ketua P.W.I.).

Panitia ini merentjanakan untuk berhubungan langsung dengan Gubernur Sumatera Tk. Mhd. Hasan di Pematang Siantar guna membitjarakan segala kepentingan Studio dan pemantjar R.R.I. jang masih dalam serba kekurangan itu, tetapi setelah diadakan surat menjurat dengan Gubernur dan sementara hasilnja belum kelihatan. Pematang Siantar telah diduduki oleh musuh, sedang Gubernur bersama stafnja dan Djawatan-djawatan Propinsi pindah ke Bukittinggi.

Di Bukittinggi pada tanggal 1 September 1947, dibentuk sebuah badan Koordinasi penerangan jang dipimpin oleh Saudara Parada Harahap dengan nama „Koordinasi Penerangan Sumatera” (Kopensum) jang terdiri dari penerangan sipil dan militer.

Dengan segera dimulailah membangunkan badan jang ada dalam lingkungannja; selain dari pada badan-badan khusus jang langsung berada dalam kantor Kopensum maka dibangun pulalah Pusat Peredaran Pilem Indonesia (P.P.P.I.) dibawah pimpinan Saudara Suska dan Radio Republik Indonesia se Sumatera, dibawah pimpinan Saudara Kamarsjah sebagai Kepala Djawatan R.R.I. Sumatera.

R.R.I. Bukittinggi jang dahulunya administratif dan technis dibawah P.T.T. dan politis dibawah perwakilan Kempen (pimpinan Adi Negro) di Bukittinggi mulai bulan September 1947 itu didjadianlah mendjadi R.R.I. Sumatera.

Selain dari bahasa Indonesia jang dipakai dalam penjiaran **R.R.I. Sumatera di Bukittinggi** diwaktu itu dipakai pula bahasa asing, Inggeris, Arab, Urdhu, Perantjis dan Tionghoa untuk penjiaran keluar Negeri. Gelombang pantjarannja 28,3 m.

Semuanya berdjalan dengan baik, istimewa karena dorongan tanggung-djawab jang besar, walaupun keadaan pemantjarnja, alat-alat kantornja dan sebagainya tidak mentjukupi.

R.R.I. Pakanbaru.

Sudah dilakukan penjusunan kedalam dengan alat-alat jang masih belum mentjukupi itu, direntjanakan untuk membangunkan sebuah tjabang di Keresidenan Riau. Saudara Luthan St. Tunaro diberi tugas untuk melaksanakan rentjana jang serba sulit itu: maka pada bulan Oktober 1947 bersama beberapa orang anggota stafnja Saudara Luthan St. Tunaro pun berangkatlah ke Pakan Baru, ibu kota Keresidenan Riau dewasa itu. Di Pakan Baru Saudara Luthan St. Tunaro mulai membangun Studio baru dengan bantuan pemerintah setempat, Residen R.M. Utojo dan fihak Auri. Setelah segala persiapan boleh dikatakan rampung, maka timbul pulalah persoalan baru, jaitu kekurangan tenaga listerik-listerik. Walaupun begitu rentjana diteruskan djuga dengan seada-adanja sampai pemantjar dapat djuga bekerdja 2 à 3 djam satu hari.

Hanja dalam masa kira-kira 6 bulan suara R.R.I. Pakan Baru dapat berkumandang diudara menghadapi penjiarannja kekepu-lauan Riau jang disa'at itu diduduki Belanda dan djuga ke Malaya dimana kaum-kaum Repuklikein jang berada disana dengan penuh semangat kemerdekaan menjusun organisasi-organisasi perdjua-ngan jang tiada sedikit memberi bantuan terhadap usaha kemerdekaan Nusa dan Bangsa.

Dengan memakai bahasa Indonesia, Arab, Inggeris dan Urdhu, R.R.I. Pakan Baru jang berada dalam serba matjam kesulitan itu, telah dapat memperlihatkan djasanja untuk memperkuat semangat perdjjuangan dikalangan pentjinta kemerdekaan dan ke'adilan, sampai dia harus berhenti bekerdja dekat kepada waktu clash II. dan semua pegawai bersama Kepala Studionja, Saudara Luthan St. Tunaro kembali ke Bukittinggi untuk memperkuat Studio Pusat di Bukittinggi.

Saudara Luthan sendiri diangkat mendjadi wakil Kepala di R.R.I. Sumatera.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MERDEKA DI BUKITTINGGI.

Tanggal 21 Djuli 1947 Belanda melantjarkan agresi jang pertama. Perdjandjian Linggardjati dilanggar. Keadaan jang bermula mempunjai harapan kembali mendjadi ketjewa.

Dari Padang terdengar kabar jang menjedihkan. Wali Kota Padang Bagindo Aziz Chan dibunuh tentera Belanda. Kol. Van Erp berusaha menjembunjikan kesalahannja, seakan-akan pembu-nuhan tidak dilakukan oleh orang-orangnja.

Pidato-pidato yang bersemangat dan lagu-lagu yang berirama semangat perjuangan untuk peradjurit-peradjurit di front mendingung diudara melalui R.R.I.

Lagi R.R.I. dipergunakan sebanyak mungkin untuk menghadapi propaganda Belanda dengan memperteguh persatuan kedalam.

Dalam pada itu oleh pimpinan tentera Divisi IX diperintahkan untuk membangunkan sebuah Studio baru. Perintah ini diselenggarakan oleh Saudara Nasrun As. (sekarang kepala bhg. visueel Kempen) dengan menjusun perlengkapan dan membangunkan sebuah Studio dibekas runtuhannya gedung R.R.I. yang pada permulaan masa proklamasi dibakar tentera Sekutu, dengan memakai sebuah pemantjar ketjil yang mempunyai kekuatan 0,3 Kw; sedang untuk Kepala Studionja ditetapkan Saudara Sjabbuddin Mz. (sekarang Kepala Djapenkab Pesisir Selatan Kerintji).

Maksud membangun Studio baru ini ialah:

- a. menambah banjak penjiaran diudara, berarti kekuatan propaganda dan penerangan R.I. bertambah.
- b. menjalurkan kehendak rakjat berdjuaug yang segala isi hatinya tidak dapat ditumpahkan melalui tjorong R.R.I.
- c. djika perlu sebagai pemantjar darurat, yakni bila R.R.I. mendapat kerusakan atau kena bom musuh.

Studio baru yang siasat siarannya merupakan siasat baru jaitu: „bergerilja diudara”.

Siaran-siaran yang membangkitkan semangat rakjat, pidato-pidato membalas propaganda Belanda dipantjarkan dari Studio baru ini dan soal-soal yang hangat, yang penting, tetapi mungkin mengetjewakan menurut anggapan Pemerintah dalam usaha menjtari persesuaian usul perletakan sendjata djika disalurkan dengan R.R.I., maka dari tjorong Studio baru inilah mengumandangnya keudara.

Namanja, Radio Indonesia Merdeka disingkat R.I.M. dengan „call” „disini Markas Pemuda Pedjuang”. Setelah beberapa lama dipergunakan meskipun masih dalam pertjobaan, kemudian diresmikanlah pembukaannya yang dilakukan pada djam 12.00 tepat tengah malam menit pertama memasuki 1 Djanuari 1948.

R.I.M. tidak ditilik oleh Kopensum. Ia berdiri sendiri dan bertanggung-djawab sendiri. Banjak orang menjebut „pemantjar illegal” dan memang banjak tindak-tanduk R.I.M. yang illegal, tetapi djustru itulah yang banjak menguntungkan.

Diantara siarannya ditudjukan kepada peradjurit-peradjurit, lasjkar-lasjkar, barisan rakjat berdjuaug di front.

TAHUN KEMERDEKAAN KE-III, 1948.

Hari ulang tahun ketiga Kemerdekaan Republik Indonesia masih dapat dirajakan dalam kota. Dan Studio R.R.I. Bukittinggi tetap menjadi alat penjiaran yang penting. Pada rapat-rapat rak-sasa tampak benar bagaimana pentingnja Radio; njata keketjewaan dan kekesalan rakjat bila alat penjiaran tersebut rusak atau kurang terang suaranya.

Meskipun perjuangan kita telah menempuh tahun ketiga, namun kekurangan alat sangat terasa. Mengatasi kekurangan tersebut memang sukar, karena blokade Belanda selalu mereka perkuat. Maka terpaksa dipakai bahan-bahan yang ada saja.

Lama berselang keadaan serba tidak tjukup itu, dan kian parah lagi halnya, ketika menghadapi saat-saat genting yang diderita Negara. Walaupun demikian, Radio Republik Indonesia di Bukittinggi, tetap berada diudara, tetap mengundjungi para pendengar-nja kerumah masing-masing, keseluruh pelosok dimana dia dapat didengar. Menghibur, memberi/menjampaikan penerangan dan semangat kepada putera bangsa yang tengah mengawal pantai Negara. yang dalam perjuangan digaris depan, ataupun yang sedang terbaring dalam rawatan djururawat dirumah sakit. Semua dikundjungi suara yang meluntjur dari gelombang 17-28,3 dan 40,2 m. dari Bukittinggi.

19 Desember 1948.

Setiap warga Indonesia takkan dapat menghilangkan peristiwa pada tanggal tersebut dari ingatannya. Satu pertjobaan yang memuntjak menimpa Negara kita yang masih muda.

Inilah yang disebut Belanda aksi pembersihan kedua, dan ini pulalah yang disebut bangsa Indonesia: „Penjerangan, Pelang-garan, Peperangan oleh Belanda yang kedua kepada Indonesia”.

Maka kojaklah naskah Renville.

Tertjatat dalam sedjarah R.R.I. dan P.T.T. Bukittinggi, bahwa pada sa'at penjerangan Belanda hari Minggu 19 Desember 1948 sampai pada malam 21 achir tahun tersebut, R.R.I. tetap berku-mandang diudara „panas” dalam siang siur tjapung dan bomber musuh. Dalam pada itu suara dari „Jogja” tidak kedengaran lagi. telah lebih dahulu diduduki Belanda.

Sedjarah mentjatat pula bahwa R.R.I. Bukittinggi, adalah radio kedua sesudah „Jogja”. Kini „Jogja” lenjap. Tinggal suara „Bukit-tinggi” yang berachir pula pada tanggal 21 Desember 1948, sedang R.I.M. pada malam itu djuga, sesuai dengan taktik perjuangan tentera, dibumi hanguskan dengan tidak melupakan djasa-djasa yang sudah disumbangkan kepada perjuangan kemerdekaan.

RADIO DIZAMAN GERILJA (CLASH KE-II).

Pada bulan Nopember 1947 nama Kopensum ditukar menjadi **Djapensum** jaitu Djawatan Penerangan Sumatera.

Dengan perubahan susunan pemerintahan se Sumatera, didjadian tiga Propinsi, maka susunan Djawatan-djawatan Penerangan djuga disesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Bersama dengan itu dibangunkanlah Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Tengah dibawah pimpinan Saudara Suska dan penerangan daerah Sumatera Barat dihapuskan. Semua pegawai-pegawai daerah Sumatera Barat dipindahkan ke Propinsi dan ke Kabupaten-kabupaten.

Sebahagian Pegawai tinggal didaerah pendudukan — sebahagian ber-gerilja di front-pertempuran membantu pemerintahan ketjamatan atau kabupaten — dan sebahagian bekerdja pada pemerintahan Gubernur Militer Sumatera Tengah di Suliki dan Kototinggi.

Dengan ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 13/G.M./S.T./Ket-49, tanggal 18 Djuli 1949, diangkat Saudara-saudara Suska dan Kamarsjah masing-masing sebagai Kepala dan Wakil Kepala Penerangan Staf Gubernur Militer Sumatera Tengah. Saudara Kamarsjah djuga diangkat menjadi Kepala Djawatan Penerangan D.P.D Sumatera Barat.

R.R.I. Pusat Sumatera bersamaan dengan perubahan-perubahan jang dihadapi itu, semuanya menggabungkan diri dengan Penerangan Staf Gubernur Sumatera Tengah tadi.

Usaha-usaha R.R.I. banjak dipusatkan pada urusan-urusan perhubungan jang sifatnja pengiriman berita-berita kepulau Jawa-India (perwakilan Indonesia) dan Kotaradja. Usaha-usaha ini pada permulaan diusahakan oleh Staf Auri (djuga dalam Staf Gubernur) jang mempunyai mobiele — Zender.

Pada suatu saat Saudara Luthan St. Tunaro Wakil Pemimpin Pusat Radio Sumatera ditugaskan membawa suatu amanat untuk pemerintahan di Riau oleh Gubernur.

Dalam pada itu oleh Markas Komando Pertempuran Agam dibawah pimpinan Saudara Letnan Kolonel Mohd. Dahlan Djambek di Kamang ($\pm$ 13 Km dari Bukittinggi) diusahakan pula membangun sebuah alat penjiaran (Pengirim dan Penerima).

Sebuah pemantjar ketjil jang hidup dengan kekuatan tenaga manusia (memutar djiwanja dengan sepeda) dapat mentjapai djarak penjiaran Bukittinggi, Pajakumbuh dan Padang Pandjang, dimana listerik masih hidup dan pesawat penerima radio masih banjak dipakai.

Usaha jang serba sulit ini diselenggarakan oleh pegawai-pegawai R.R.I. jang menjingkir kesana bersama-sama dengan Pemuda-pemuda dari Tentera Peladjar, Pegawai Djawatan Penerangan

dengan bantuan rakjat jang sudah membulatkan tekad untuk mengorbankan apa saja jang dipunyai untuk mempertahankan kemerdekaan Negara.

Pada tanggal 17 Agustus 1949, hari Ulang Tahun Kemerdekaan jang ke-4 jang diwaktu bergerilja dapatlah dirajakan di Kamang dengan memantjarkan suara pertempuran dimuka microfoon jang menjampaiannja dengan getar suara radio kekota-kota jang diduduki musuh.

Tetapi sajang, ketika siaran sedang berlaku, stroom listerik di Bukittinggi berhenti, dan pesawat penerima pun tak dapat dipergunakan rakjat dikota jang ingin menurutkan upatjara tersebut. Kabarnja, ini adalah siasat musuh jang menghalangi penduduk kota supaja djangan dapat mengetahui semangat perdjjuangan jang sebenar-benarnja dari rakjat jang sedang bergerilja, karena selama ini telah digembar-gemborkan bahwa pertahanan Dahlan Djambek di Kamang sudah dihantjur leburkan.

Kemudian atas bantuan rakjat di Kamang, tenaga pemuda jang memutar sepeda untuk menghidupkan dynamo pemantjar itu dapat diganti dengan tenaga air, guna pemutar kintjir air (watermolen) membangkitkan stroom.

Aliran batang air Agam di Kamang di bendung, dan kekuatan alirannja jang sudah dikumpulkan mendjadi kekuatan air (waterkracht) jang kuat dapat menghidupkan dynamo jang tjukup memberi djiwa kepada radio.

Kembali ke kota:

Mulai bulan Oktober sampai Nopember 1949, sebelum pemerintahan R.I. di Sumatera Tengah dipulihkan kekota Bukittinggi, atas instruksi Saudara Kamarsjah, Saudara² Ardiwinata dari P.T.T. dan Luthan St Tunaro telah menjiapkan sebuah pemantjar untuk meneruskan usaha pembangunan R.R.I. jang terpaksa terlantar buat sementara, karena kita harus meneruskan perdjjuangan dari luar kota. Sedang Saudara² Kamarsjah dan Suska berangkat ke Jogjakarta untuk menghadiri Konperensi Dinas Kempen disana.

Maka pada tanggal 20 Desember 1949, bergemalah kembali diudara sembojan „Disini Bukittinggi Radio Republik Indonesia“, jang meluntjur dari microfoon pemantjar jang memakai gelombang 41,44 m. dengan kekuatan 0,3 Kw. jang ketika permulaan penjerbuan tentera Belanda terpaksa ditinggalkan.

Ketika seluruh Djawatan-djawatan Negara dipulihkan kekota, dan Staf Penerangan Gubernur Militer Sumatera, diubah statusnja mendjadi Kementerian Penerangan Dinas Propinsi Sumatera Tengah, maka R.R.I. Bukittinggi didjadikan mendjadi salah satu bahagian Djawatan tersebut dibawah pimpinan Saudara Kamarsjah jang djuga mendjadi Koordinator Djawatan R.R.I. Sumatera.

Hal ini buat sementara waktu mengakibatkan semua penjelenggaraan Studio dan Pegawai-pegawainja dihadapi oleh Kempen Dinas Propinsi Sumatera Tengah sampai datang lagi ketegasan-ketegasan jang berupa instruksi dan pedoman jang diterima dari Kempen R.I. dan Kempen R.I.S.

Menurut surat keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 28/U/50/1763 jang mestinja berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 seluruh Djawatan Radio Republik Indonesia (R.R.I.) diserahkan kepada Kementerian Penerangan R.I.S.

Semua pegawai R.R.I. berikut pegawai-pegawai Kementerian Penerangan R.I. jang diperbantukan kepada Kementerian Penerangan R.I.S. langsung mendjadi pegawai Kementerian Penerangan R.I.S.

Pelaksanaan dari surat Keputusan Menteri Penerangan tersebut barulah tanggal 1 Mei 1950 dapat dilakukan oleh R.R.I. Bukittinggi, terutama dalam hal jang mengenai penyelesaian administratif kepegawaian dan anggaran belandja.

Dengan persetujuan Menteri Penerangan tertanggal 1 Oktober 1950 No. 20144, maka mulai 10 Nopember 1950 untuk semua Studio Djawatan Radio diseluruh Indonesia dipergunakan pengutaraan „Radio Republik Indonesia”.

Dengan penetapan call tanggal 10 Nopember 1950 tersebut, maka seluruh Studio di Indonesia mempunjai pengutaraan jang sama.

Sebagai diketahui, sebelumnja itu R.R.I. difusikan dengan R.O.I.O. dengan nama R.R.I.S. Studio Bukittinggi sendiri baru mulai 1 Pebruari 1950 memakai nama Radio R.I.S., jang semestinja pada tanggal 1 Djanuari 1950.

TAHUN PEMBANGUNAN.

Sedjak tahun 1950, dengan berangsur-angsur maka Pemerintah memperlengkapi Studio Bukittinggi dengan alat-alat penjiaran modern jang uniformaliteit seperti Studio-studio lainnja. Saudara Kamarsjah mendapat tugas baru pula di Indonesia Timur dengan berkedudukan di Makassar. Saudara Luthan St. Tunaro dipindahkan pula ke Medan.

Selain dari alat-alat teknik seperti versterkers, microfoons, draaitafels dengan pick-ups-nja, tape-recorder dan lain-lainnja, djuga Bukittinggi telah beruntung mendapat sebuah pemantjar baru jang berkekuatan 1 Kw. dengan frequentie 5030 gelombang 59,66 m, jang dimulai tanggal 28 Nopember 1951. Dengan mempergunakan pemantjar baru ini kian djelaslah kedengaran suara dari ibu Propinsi Sumatera Tengah keseluruh daerahnja. Disamping itu, Pemantjar Gerilja dizaman P.D.R.I. (sekarang hanja

berkekuatan 0,3 Kw.) jang telah tua itu dengan frequentie 3270 gelombang 91,75 (tadinja frequentie 7240 gelombang 41,44 m) masih tetap bekerdja menggemakan suara penjiarnja.

Sebuah piano baru „Steinway” (vleugel) telah sampai di Bukittinggi tanggal 6 Djuni 1952 jang akan menambah giatnja para seniman seni musik di Bukittinggi serta mempertinggi mutu siaran. Studionja, studio darurat jang serba kurang itu diperbaiki dengan belandja Rp. 47.000,— Dinding kasurnja (jang berisi kapas) di tukari dengan canex.

Guna mempertinggi ketjakapan pegawai dalam menghadapi kewadjabannja jang amat berat itu, maka pada tahun 1952 kepada mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti kursus dan pelajaran-peladjaran jang berhubungan rapat dengan kewadjaban mereka dengan biaja pemerintah.

R.R.I. PADANG.

Studio Padang bersama dengan perlengkapannja jang terletak di Sawahan Padang, dahulunja dibangun oleh Djepang dan ketika tentera Belanda menduduki Kota Padang diselenggarakan oleh Dienst Leger Contacten dengan propaganda siaran jang disebut Strijdkrachten Programma.

Oleh karena pada ketika timbang terima itu seluruh radio berada dalam penilikan Kempen R.I.S. maka Radio Padang langsung mendjadi tjabang Radio Republik Indonesia Serikat jang berpusat di Djakarta.

Mengingat perlengkapan Studio dan pegawai bolehlah dikatakan agak mentjukupi, Studio hanya memerlukan tenaga pimpinan sadja jang didatangkan dari luar; dan dengan dikirimkan seorang pemimpin dari Bukittinggi, M. Arief sebagai Kepala Studio, maka dengan langsung mulai waktu penerimaan itu pemantjar sudah mulai mengudarakan penjiaran-penjiaran jang diperlukan buat sementara.

Sekalipun pada hari-hari jang pertama sedjak dilakukan timbang terima itu, siaran masih dilakukan dalam bahasa asing (Belanda) dan menurut teknik seperti jang lama, tetapi mulai detik jang bersedjarah itu Studio Radio R.I.S. Padang telah memantjarkan siaran-siaran jang melulu untuk kepentingan Nasional, untuk memperkokoh semangat kemerdekaan jang sudah kita tjapai dengan pengakuan de facto dan de jure.

Kemudian Pemimpin Studio dibantu oleh stafnja dengan setjepat-tjepatnja mengubah semua program lama, ditjotjokkan dengan rentjana penjiaran jang sesuai dengan kedudukan suatu pemantjar Radio dari suatu Negara jang Merdeka dan berdaulat.

Diantara programma jang urgent jang harus dipenuhi ketika itu ialah menjiarkan pengumuman pemerintah, baik pusat ataupun daerah, berita-berita luar dan dalam negeri dan berita-berita daerah jang diselang-selingi musik dan kesenian-kesenian daerah jang selama ini kurang diperhatikan dalam penjiaran dan tidak mendapat tempat dalam programma.

Pada sa'at pengakuan kedaulatan negara kita, radio Padang mempergunakan sebuah pemantjar dengan kekuatan 0,25 Kw. dengan memakai gelombang 91 m; jang kemudian sesudah mendjadi Radio R.I.S. ditukar dengan gelombang 41 m.

Beberapa bulan kemudian ditambah dengan sebuah pemantjar lagi dengan kekuatan 0,25 Kw. djuga dan memakai gelombang 129 m.

Pada achir Desember 1951 gelombang 41 m. ditukar mendjadi 75.76 m; sehingga sampai waktu ini R.R.I. Padang bekerdja dengan dua pemantjar jang masing bergelombang 129,2 m untuk Kota dan 75.76 m untuk daerah Sumatera Tengah. Selain dari kedua pemantjar tersebut, R.R.I. Padang mempunyai djuga beberapa alat-alat jang lain jang sangat diperlukan untuk usaha penerangan dan penjiaran didaerah ini umpamanja, loudspeaker, magnetafoon, presto snijapparaat, dan lain-lainnja.

Disamping itu kekurangan tenaga listerik jang sering sekali dialami di Padang, dapat pula diatasi dengan mempergunakan sebuah alat untuk mempertinggi tekanan listrik sampai pemantjar tidak terganggu dalam melakukan tugasnja.

Oleh karena Studio dipisahkan mendjadi dua bahagian (Studio I dan II), dengan masing-masing perlengkapan jang tersendiri maka kedua pemantjar dapat bekerdja serentak pada waktu jang bersamaan, umpamanja: Studio I menjiarkan siaran lokaal, kesenian daerah, pandangan mata dan lain-lain Studio me-relay siaran pusat R.R.I. Djakarta untuk kepentingan Regional.

Setelah gedung Studio jang baru (di Sawahan) diperlengkapi demikian rupa maka pada tanggal 18 Mei 1952, diresmikan pembukaannja oleh Paduka Jang Mulia Wk. Presiden Moh. Hatta jang sedang berada di Sumatera Tengah.

Pasal 51.

PENDIDIKAN AGAMA

Dari Sjech Burhanuddin sampai Tuanku Imam Bondjol.

SEBELUM agama Islam masuk ke Sumatera Barat, lebih dahulu telah masuk ke Sumatera Utara, Bandar-bandar jang ramai di Atjeh telah merupakan pusat perkembangan agama baru itu. Jang mendjadi muballignja ialah para saudagar bangsa asing jang datang berniaga dari pelabuhan di Timur Tengah. Bandar-bandar jang ternama adalah Samudera (Pasei), Perlak dan Singkil. Saudagar itu terutama bangsa Gudjarat, bangsa Arab dan bangsa Persi. Pada awal abad keenam belas, seorang ulama, bernama Sjech Abdurrauf, telah mendirikan tempat pengadgian di Singkil, Atjeh Barat.

Seorang muridnja bernama Burhanuddin, kemudian mendjadi penjiar agama jang pertama di Sumatera Barat, Sjech Burhanuddin, mendirikan pengadgian di Ulakan, Pariaman, setelah ia beladjar bertahun-tahun lamanja di Singkil. Perguruan Ulakan itu makin lama makin termasjhur. Dari mana-mana orang datang beladjar kesini, terutama dari daerah pesisir dan ada djuga dari Tanah Datar. Murid-murid tuan Sjech Burhanuddin itu kemudian mendjadi muballig agama Islam itu pula dinegerinja masing-masing. Diantara murid-murid tuan Sjech Burhanuddin itu jang ternama adalah Tuanku Tuo di IV Angkat, Kabupaten Agam dan Tuanku Kubung di Kubung Kabupaten Solok, Tuanku Bajang di Painan dan Tuanku Pemansiangan di Pandai Sikat, dekat Padang Pandjang dan lain-lain.

Perguruan agama itu sangat menarik perhatian rakjat, karena ia merupakan sumber kebudayaan baru jang djauh lebih tinggi dan lebih luas dari pada kebudayaan Minangkabau jang asli. Agama Islam membanteras perbuatan-perbuatan jang tidak baik seperti berdjudi, menjabung ajam dan minum tuak, jang sudah sangat melekat kepada masjarakat Minangkabau diwaktu itu. Tachjul jang menimbulkan kepertjajaan kepada bermatjam-matjam hantu dan tempat-tempat jang sakti, sangat dimusuhinja. Keper-tjajaan kepada dewata ditukarnja dengan kepertjajaan kepada Allah, Tuhan Seru Sekalian Alam, jang mempunjai sifat-sifat kesempurnaan.

Islam membawakan susunan baru dalam lapangan kepertjajaan, kehati bangsa Minangkabau. Oleh usaha para muballig dan guru

agama dari satu angkatan demi angkatan, achirnja agama Islam Susunan Adat jang lama disempurnakan dengan agama itu. Disamping balai adat simbul kekuasaan adat, diadakan mesdjid simbul agama Islam.

Pada pertengahan abad ke-tudjuh belas, bangsa Belanda mendjedjalkan kakinja di Sumatera Barat. Mula-mula sebagai saudagar, tetapi kemudian berangsur-angsur mendjadi pendjadjah. Alangkah lekasnja Sumatera Barat itu djatuh kedalam kekuasaan bangsa baru ini, sekiranya adat dan agama Islam tidak muntjul sebagai tenaga baru jang hidup ditengah-tengah masjarakat. Kekuasaan Negara Minangkabau telah lemah. Mengatur pertahanan, baik siasat apalagi pertahanan bersendjata sudah terserah kepada negeri-negeri jang tertimpa serangan, atau gabungan beberapa negeri.

Pada setiap negeri jang mempunyai ulama, hebatlah perlawanan itu, bila terdjadi pertentangan. Tekad perang sabil, untuk mempertahankan kedaulatan agama dan Negara dari tangan kaum penindas, adalah sendjata batin jang amat kuat. Hidup djaja atau mati sjahid, merupakan sembojan jang berisi padat.

Berulang-ulang terdjadi perlawanan dari anak negeri terhadap bangsa Belanda. Perang jang amat menjusahkan bangsa Belanda dan meminta pengorbanan djiwa serdadunja adalah perang Padri di Bondjol jang berlangsung dari tahun 1825 sampai tahun 1837. Kaum padri ialah angkatan perang jang terdiri dari Tuanku Imam di Bondjol dengan para murid dan pengikutnja. Pusat perlawanan berada di Bondjol, tetapi dengan perlengkapan datang dari seluruh daerah S. Barat, umumnja dari alim Ulama, jang terus menggembeleng semangat sabil itu disurau-suraunja.

Walaupun pada achirnja Belanda menang perangnja, tetapi ia tjukup menderita. Pengalaman di Bondjol dan ditempat-tempat lain telah memberi adjaran kepada Belanda apa artinja adjaran Islam dan betapa mestinja ia menghadapinja. Dari tahun ketahun bangsa Belanda, terus mentjari ichtiar untuk melemahkan pengaruh agama itu dari bangsa Indonesia umumnja.

Sampai selesainja perang Bondjol, surau-surau tempat pengadjan agama berada dalam kemadjuan. Bahaja jang mengantjam, memaksa rakjat untuk mentjari ilmu dan semangat buat berdjua. Keduanja diantaranja terdapat disurau-surau, dilanggar-langgar ditempat Tuanku mengadjarkan ilmu agama kepada murid-muridnja.

Sesudah kedjatuhan Bondjol, dengan mudah daerah jang lain dapat ditaklukkan Belanda. Bangsa Belanda berangsur-angsur mendesak kedudukan ulama dan mengurangkan pengaruh agama ditengah-tengah masjarakat. Adjaran agama diawasinja dengan saksama. Mana-mana jang akan menimbulkan perlawanan dilarang mengadjarkannja. Dengan demikian surau makin lama makin lengang dan pengadjan agama mengalami kemunduran. Surau-surau jang masih bertahan, telah kehilangan semangat dan keaktif-

annja, sebab jang dipeladjadi ialah soal-soal ibadat jang dangkal, dan masalah-masalah sekitar neraka dan sjorga.

Pengadjaran dan kelas.

Jang diadajarkan pada surau-surau tempat pengadjian itu tidaklah serupa dengan keadaan sekarang. Umumnja tiap-tiap guru, atau surau mementingkan sematjam mata peladjaran jang terbanjak ialah surau tempat mengadji Kuran.

Tingkatan pengadjaran tidak ditentukan dengan kelas tetapi oleh mata peladjaran. Tingkatan terbawah ialah mengadji Kuran. Pengadjian ini baru dianggap pandai, kadang-kadang sampai memakan waktu empat atau lima tahun.

Tingkat kedua, mata pengadjaran fikhi, jang dimulai dengan kitab bahasa Melayu dan kemudian disambung dengan kitab „Minhadjut Thalibin“ berbahasa Arab. Tingkatan ketiga, peladjaran tafsir. Jang dibatja adalah tafsir Djalalain. Sesudah beladjar tafsir, barulah dimulai beladjar ilmu Nahwu dan ilmu saraf (grammar bahasa Arab). Beladjar fikhi dalam bahasa Arab ini, kadang-kadang memakan waktu dari 10 sampai 15 tahun.

Kadang-kadang ada djuga peladjaran itu jang dipeladjadi sekali dua. Untuk menentukan tingkatan peladjaran seseorang, maka peladjar itu diberi gelar menurut mata peladjaran jang telah ditempuhja. Bila seseorang menamatkan Kuran, maka ia diberi gelaran „Qari“, jang berasal dari kata Arab (Qari = artinja ahli dalam membatja Kuran). Seseorang jang menamatkan (mempeladjadi) fikhi, diberi gelaran „faqih“. (Kata-kata ini berasal dari kata-kata faqih, artinja ahli dalam ilmu fiqih). Bila ia menamatkan tafsir, maka ia diberi gelaran lebai dan bila ia mahir dalam ilmu nahwu dan saraf, ia diberi gelaran guru atau malin.

Bila seorang guru telah mengadjar dan bermurid banjak, maka achirnja ia diberi gelaran „Tuanku“.

Selain dari mata peladjaran jang diatas, kepada murid-murid pada bahagian tinggi, diberi djuga mata peladjaran ilmu manthik, ilmu Balagah. Biasanja jang mengikuti peladjaran ini ialah guru-guru bantu jang telah mengadjar pada sesuatu surau.

Fadjar menjingsing:

Pada achir abad ke XIX dan permulaan abad ke XX, seorang putera Minangkabau berasal dari IV Angkat, Kabupaten Agam, mendjadi Mufti dalam mazhab Sjafii.

Ia memberikan peladjaran dalam Masdjidil haram. Muridnja banjak, diantaranya adalah anak-anak Indonesia Sumatera Barat. Ulama besar itu bukan sadja alim, tetapi djuga seorang pemimpin besar, jang berdjiwa madju. Kepada murid-muridnja ia mengadjar-kan supaja membaharui masjarakat Islam, membuang tachjul dan churafat jang melengket pada agama dan membuang kebiasa-

an-kebiasaan jang buruk dan meradjalela dalam masjarakat. Orang itu ialah „Sjeh Ahmad Chatib”.

Setelah peladjarannja selesai berangsur-angsur murid-murid itu kembali ke Indonesia. Di Sumatera Barat, pulang Hadji Abdullatif Sjakur IV Angkat, Sjeh Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi, Sjeh Ladang Lawas, Hadji Abdul Karim Amarullah (Injik Dr). Hadji Abdullah Ahmad Padang, Sjeh Sulaiman Arrasuli Tjandung, Hadji Abdullatif Pahambatan Bukittinggi, Sjeh Abbas Abdullah Padang Djapang dan Sjeh Muhammad Djamil Djaho Padang Pandjang, Sjeh Muhammad Thaib Umar di Sungajang Batu Sangkar dan Sjeh Ibrahim Musa di Parabek Bukittinggi dan lain-lain.

Ulama-ulama ini kemudian mendjadi orang-orang terkemuka dalam masjarakat Sumatera Barat. Beberapa orang membulatkan usaha untuk berda'wah dan membanteras churafa dan bida'ah. dengan djalan mengadakan pengadjanian sekali seminggu disuraunja. atau bertablig kenegeri-negeri berkeliling, seperti Sj. Muhammad Djamil Djambek, Sjeh Abdul Latif di Balingka dan Hadji Abdullah Ahmad di Padang Pandjang.

Jang menjediakan diri untuk mengadjar banjak pula. Jang terutama adalah Hadji Abdul Karim Amarullah mengadjar di surau Djembatan Besi Padang Pandjang, Sjeh Muhammad Thaib Umar di Sungajang, Sjeh Sulaiman Arrasuli di Tjandung, Sjeh Muhammad Djamil di Djaho, Sjeh Ibrahim Musa Parabek, Sjeh Abbas Abdullah di Padang Djapang Pajakumbuh dan lain-lain.

Tjara menuntut peladjaran:

Dalam tjara menuntut peladjaran pada masa ini mulai mendapat perubahan. Sebelum ini, pemuda-pemuda jang pergi mengadji tidaklah mendapat perbelandjaan dari orang tua atau walinja. Tiap-tiap pemuda itu, pergi ketemnat atau kesurau jang diingininja dengan tiada berbekal apa-apa. Tiba disana ia hidup dengan djalan meminta-minta beras atau lain-lainnja kepada kampung sekeliling tempatnja beladjar. Biasanja seorang peladjar membuat ibu Angkat (induk semang) seorang atau berdua dalam tiap-tiap kampung. Sekali seminggu, biasanja hari Chamis, pergilah peladjar itu dengan membawa buntilnja menemui induk semangnja. Disana ia makan dan setelah akan pergi ia mendapat beras dan kadang-kadang dengan sambalnja. Dari satu rumah ia pergi kerumah jang lain. Jang tidak memakai induk semang, pergilah ia meminta-minta dari tangga ketangga, kadang-kadang mendapat dan kadang-kadang tidak. Untuk meminta beras ini biasanja memakai pakaian serba putih, badju, tjelana dan sarongnja.

Bagaimana kedudukan seorang peladjar agama dapat dimaklumi. Masjarakat jang sehat kurang menjetudjui tjara itu.

Dalam zaman ini mulai timbul keinsjafan pada beberapa surau-surau diatas. Umpamanja Sjech Abbas Abdullah di Padang Djang, Pajakumbuh, mulai melarang muridnja pergi meminta-minta beras itu. Berangsur-angsur datanglah peladjar-peladjar jang membawa perbekalan jang tjukup dari kampungnja. Sekali seminggu atau sekali sebulan, murid-murid menerima kiriman dari orang tuanja.

Pikiran baru itu timbul oleh karena beberapa hal. Pertama, karena keinsjafan para ulama, bahwa meminta-minta itu bertentangan dengan adjaran Islam jang sutji, merendahkan deradjat seseorang peladjar dan menodai ilmu pengetahuan. Diminta-minta untuk kepentingan agama, adalah peninggalan adjaran agama Hindu dizaman purbakala.

Sebab jang kedua, karena jang pergi beladjar agama ada jang berasal dari murid sekolah desa atau sekolah sambungan Pemerintah jang telah mulai luas pemandangannja.

Dengan kesedarannja sendiri, diantara murid-murid timbul perasaan tidak senang meminta-minta. Perasaan itu makin lama makin meluas diantara murid-murid.

Dalam lingkungan masjarakat udara baru itu, timbul oleh fatwa-fatwa ulama-ulama jang berkemadjuan diatas, jang mulai mendudukkan pengetahuan agama itu pada tempat jang sebenarnja.

Mata pengadjaran:

Mata pengadjaran agama sesudah ditutup abad kesembilan belas, mulai mengalami perubahan. Tjara beladjar satu-satu mata pengadjaran sampai tammat (sampai bertahun) ditukar dengan mengadjarakan beberapa mata pengadjaran sekali gus.

Tingkatan peladjaran tidak lagi ditentukan oleh mata pengadjaran, tetapi ditentukan oleh ketjil besarnja kitab jang dipakai. Bagi murid-murid jang mulai beladjar, djuaga mempeladjadi mata peladjaran fiqhi, saraf, dan nahwu sekali djalan. Pada kelas jang lebih tinggi jaitu sesudah 5 atau 6 tahun, mata peladjaran ditambah dengan Hadis, dan musthaloh, Hadis, dan pada tingkat lebih tinggi lagi, ditambah dengan usul fiqhi, ilmu Balaghah dan ilmu manthiq.

Mutu pengadjaran tafsir dalam masa ini kurang disukai, sebab dianggap akan berakibat memutar-mutar pengertian Kuran. Tegasnja ada anggapan bahwa peladjaran itu akan menjesatkan.

Zaman perdebatan jang sengit:

Sebagai diterangkan diatas, beberapa orang murid-murid Sjech Ahmad Chatib, bekerdja dengan giat membanteras churafat dan bid'ah dengan djalan tablig dan pengadjian wirid.

Beberapa kebiasaan-kebiasaan dalam masjarakat, lantas mendjadi pokok pertikaian pikiran antara ulama-ulama. Begitu djuga masalah-masalah chilafiah timbul dan mendjadi pokok pertikaian dan kadang-kadang mendjadi perselisihan.

Masing-masing ulama, mau atau tidak, terpaksa menentukan pendiriannya dalam tiap-tiap masalah jang djadi pemitjaraan ramai. Achirnja pertukaran fikiran itu mengalir dan bermuara mendjadi dua aliran, jaitu aliran muda dan aliran tua jang masing-masing mendapat pengikut dan pembela baik dalam kalangan ulama, surau ataupun rakjat banjak.

Diantara masalah-masalah jang mendjadi pokok pertukaran pikiran dan perbantahan, adalah masalah thariqat (dimulai tahun 1904), masalah usalli (dimulai tahun 1906), masalah meniga, menudjuh, dan menjeratus hari, atau membuat sedekah dan kenduri diwaktu majat telah sampai 3.7, dan seratus hari dalam kubur (mulai tahun 1910) dan lain-lain.

Untuk memperkatakan masalah-masalah diatas, biasa diadakan perdebatan-perdebatan sengit antara ulama-ulama kedua aliran itu, bahkan sampai dengan perantaraan madjallah-madjallah. Sedjak itu mulailah timbul dua tjorak dalam pengadjian. Jang tergolong aliran tua, jang biasanja mempertahankan kebiasaan-kebiasaan keagamaan jang berlaku dalam masjarakat, Sjech Chatib Ali di Padang, Sjech Abdul Wahab di Ladang Lawas, Sjech Sa'ad di Mungka Pajakumbuh, Sjech Sulaiman Arrasul di Tjandung dan lain-lain.

Penganut aliran muda, jang menghendaki penjelidikan kembali dalam bermatjam-matjam soal kemasjarakatan dan keagamaan adalah, Hadji Abdullah Ahmad jang mula-mula mengadjar di Padang Pandjang dan kemudian pindah ke Padang, Sjech Muhammad Thaib Umar di Batu Sangkar, Sjech Abbas dan Mustafa Abdul-Karim Amarullah di Padang Pandjang dari ulama-ulama jang mempunjai pengadjian dan Sjech M. Djamil Djambek, Sjech Abdul Latif Sjukur dari Muballig. Kadang-kadang perdebatan-perdebatan itu berombak keluar Sumatera Barat. Zaman perdebatan ini telah meninggalkan beberapa kesan dalam lingkungan pengadjian agama, diantaranya:

1. Membawa surau/madrasah kepada dua aliran besar tua dan muda.
2. Merapatkan hubungan antara madrasah-madrasah jang sealiran.
3. Merapatkan madrasah kepada masjarakat, sehingga pengaruh madrasah semakin mendalam.
4. Madrasah-madrasah berlomba menudju kemadjuan.
5. Jang terpenting sekali ialah, timbulnja kemerdekaan berfikir dan keinginan menjelidiki chususnja dalam lingkungan madrasah dan umumnja ditengah-tengah masjarakat.

Zaman baru muntjul :

Suasana baru telah timbul ditengah-tengah masjarakat pengadji-an atau madrasah. Terutama hal itu disebabkan oleh perdebatan-perdebatan antara aliran tua dan muda yang menjadi dorongan bagi pelajar-pelajar untuk menjelidik dan berfikir.

Disamping itu faktor-faktor lain memperderas aliran kemajuan itu sekolah-sekolah Pemerintah yang berupa sekolah desa dan sekolah sambungan mulai tersiar.

Sekolah-sekolah ini mempunyai aturan-aturan khusus yang djauh berbeda dari surau.

Sekolah memakai kelas dan rentjana pelajaran yang tertentu, murid memakai bangku dan medja, memakai papan tulis, beladjar pada sekolah yang tertentu, dan djam tertentu pula.

Hal ini telah diakui kebajikannya oleh guru-guru agama yang mempunyai pemandangan djauh kemuka.

Pergerakan nasional dan agama yang telah timbul di Djawa, jaitu: Budi Utomo tahun 1908, Serikat Dagang Islam tahun 1911 dan Muhammadiyah tahun 1912, yang diantara usahanya memperkembang pendidikan umum/pendidikan agama maka keadaan itu telah mendesak ulama-ulama supaya menindjau susunan surau/madrasahnja.

Disamping itu kebangunan yang terdjadi diluar negeri terutama di Negara-negara Islam seperti Mesir, Mekkah dan Turki, mulai banjak tersiar dengan perantaraan surat-surat chabar, buku-buku, dan orang-orang yang kembali dari Mekkah. Pada tahun 1908 Hadji Abdullah Ahmad mendirikan sekolah modern bernama Adabiah School. Lalu tahun 1909 disusul oleh Sjech Muhammad Thaib Umar di Batu Sangkar dengan nama Madras School.

Pada bulan Oktober tahun 1915 di Padang Pandjang, Zainuddin Labai mendirikan sebuah madrasah modern, yang diberinja bernama Dinijah School, atau Almadrasatuddinijah. Pada namanja terbajang apa yang terkandung didalam dada pentjiptanja, jaitu mengawinkan pelajaran agama dan pelajaran disekolah agama. Zainuddin Labai ingin mendekatkan jarak yang terbentang antara surau dan sekolah-sekolah Pemerintah.

Dinijah School, bukan lagi surau, tetapi sekolah agama dengan pengertian sekolah dewasa ini, jaitu memakai kelas, memakai medja dan bangku, memakai alat-alat pengadjaran biasa seperti papan tulis pakai administrasi yang tjukup dan lain-lain. Murid-murid yang diterimanja ialah anak-anak yang bersekolah negeri (Desa atau sambungan) di pagi hari dan djam beladjar pada sore hari, mulai djam 2,30 sampai djam 5.

Dalam surau madrasah yang lalu yang diterima ialah murid-murid laki-laki, sedang murid-murid perempuan belum dapat masuk.

Zainuddin Labai membukakan Dinijahnja buat murid laki-laki dan perempuan dengan hak jang sama, malahan didudukkannja dalam kelas jang sama (sekolah tjampuran).

Pendirian Dinijah ini mendapat sambutan jang aneka warna dari masjarakat, antara jang anti dan jang setudju, tetapi Zainuddin Labai tetap dalam usahanja.

Dengan berdirinja Dinijah School ini, berarti zaman baru telah lahir ditengah-tengah masjarakat pendidikan agama. Sebagai seorang ahli pendidik, Zainuddin Labai, telah berhasil mempermudah tjara mengadajarkan peladjaran agama kepada anak-anak, jaitu beladjar sambil bermain. Untuk itu ia mengarang beberapa buah buku, seperti:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Empat serangkai | ilmu fiqhi. |
| 2. Ad Durusul fiqhijah | idem |
| 3. Ad Durusul Mahwijah | ilmu nahwu. |
| 4. Aqaid Dinijah | ilmu tauhid. |
| 5. Dan lain-lain. | |

Pendirian Dinijah itu berguna disekeliling Sumatera Barat. Tidak lama kemudian pendirian itu disusul oleh Dinijah School di Bukittinggi tahun 1916 oleh H. Muchtar-Lutfhi dan Hadji M. Siddik dan seterusnya di Pasar Solok 1919, di Padang Djapang Pajakumbuh oleh Nurdin Ismail, di Tiakar Guguk 1918 (Pajakumbuh) oleh e. Mudo Marah, di Pajakumbuh oleh H. Rasul Hamidy, di Balingka oleh H. Djalaludin Thaib dan lain-lain.

Madrasah dan surat chabar:

Diatas telah diterangkan bahwa madrasah-madrasah itu telah bermuara kepada dua aliran besar, jaitu aliran tua dan aliran muda. Antara kedua aliran itu dimana-mana senantiasa ada perdebatan dalam soal-soal kemasjarakatan dan keagamaan. Perdebatan itu dimulai oleh guru-guru agama setempat dan sering kemudian didjadikan perdebatan antara ulama-ulama besar seluruh Sumatera Barat.

Surat-surat kabar mulai memasuki ruangan madrasah-madrasah, membawakan berita dari dalam dan luar negeri dan sering-sering pula mentjeritakan perdebatan-perdebatan dan tablig-tablig jang terdjadi dalam satu-satu negeri.

Oleh karena demikian orang-orang jang berdjauhan dari tempat perdebatan itu mulai bertanja dengan surat kepada ulama-ulama tentang soal jang diperdebatkan, atau soal-soal lain jang diraquinja. Pertanjaan itu banjak pula jang datang dari luar Sumatera Barat.

Hal-hal diatas dan hal-hal lain, terutama muntjulnja pertjetakan-pertjetakan di Sumatera Barat, jaitu di Padang, Bukittinggi, mendorong madrasah-madrasah itu untuk menerbitkan surat-surat

chabar atau madjallah. Madjallah-madjallah itu memuat da'wah, ilmu pengetahuan keagamaan dan soal-soal kemasjarakatan, terutama dipandang dari segi agama. Jang terpenting ialah lowongan tanpa djawab. Dalam lowongan itu didjawab masalah agama jang ditanjakan oleh pematja.

Penerbitan surat-surat chabar ini kemudian mendjadi sangat meriah, karena adanya perlombaan antara pemuda-pemuda jang beladjar pada madrasah-madrasah itu.

Dibawah ini diterangkan nama madjallah itu dan para pengasuhnja jang mula-mula:

No.	Madjallah/Terbit	Tempat terbit	Pengasuh dan lain-lain
1.	Almunir, th. 1911	Padang Pandjang	H. Abdullah Ahmad
2.	Almunir, th. 1911	Padang	H. Abdullah Ahmad
3.	Almunir, th. 1919	Padang Pandjang	1. Zainuddin Labai 2. Hasjim Husaini
4.	Al Bajan, th. 1919	Parabek B. Tinggi	1. Djamain A. Murad 2. H. Abd. Muin Sianok
5.	Al Basjir, th. 1920	Sungajang	Muhammad Junus
6.	Al Imam, th. 1920	Padang Pandjang	Nuruddin Ismail
7.	Al Ittifaq wal iftiraq th. 1919	Padang	H. Abdullah Ahmad
8.	Al Ittigan, th. 1920	Manindjau	H. Muhammad Rais
9.	Al Mizan, th. 1918	Manindjau	H. Hasan Basri
10.	Ar Radd wal Mardud th. 1920	Ladang Lawas	H. Siradjuddin Abbas
11.	dan lain-lain		

Madjallah ini semuanya adalah madjallah bulanan dengan tulisan Arab atau huruf Melayu. Tetapi beberapa orang pemuda telah djuga merasa perlunya satu madjallah berdjawa agama jang diterbitkan dengan huruf latin, mengingat telah banjaknja tersiar huruf itu dengan perantaraan sekolah-sekolah Pemerintah, apalagi lapisan atas jang berkuasa dan intelek terdiri dari golongan itu. Maka untuk menjampaikan seruan agama kepada golongan itu, perlulah diadakan madjallah dengan memakai huruf Latin. Madjallah agama memakai huruf Latin jang mula terbit di Sumatera Barat adalah *Pewarta Islam*, terbit tahun 1923 di Bukittinggi, dipimpin oleh Djamain A. Murad dan H. A. Latif Sjukur.

Madrasah-madrasah membaharui diri:

Melihat baiknja hasil pengadjaran dengan sistem baru jang dipakaikan oleh Dinijah School Padang Pandjang dan tjabang-tjabangnja, maka madrasah-madrasah besar jang dipimpin oleh ulama-

ulama terkemuka, mulai menaruh perhatian. Berangsur-angsur ulama-ulama besar itu mengubah susunan sekolahnja, dengan memakai kelas, sebagai dibawah ini:

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. Sungajang | 1918. |
| 2. Padang Pandjang | 1920. |
| 3. Parabek | 1921. |
| 4. Padang Djapang | 1920. |
| 5. Tjandung | 1928. |
| 6. Tabek Gadang | 1928. |
| 7. Thawalib Tdj. Limau | 1923. |
| 8. Tarbijah Islamiah | 1928. |
| 9. Pasir IV Angkat | 1928. |

Dengan perubahan jang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah golongan tua seperti Tjandung, Djaho, Tabek Gadang, Tiakar Pajo-basung, Tandjungbingkung (Solok) dan lain-lain, dalam tahun 1928, selesailah perjuangan membaharui susunan sekolah. Peladjaran agama dahulu jang tidak dapat ditentukan tahunnja, sehingga kadang-kadang sampai 20 tahun, sekarang telah terang.

Zainuddin Labai ditahun 1915 membagi Dinijahnja kepada tudjuh kelas atau tudjuh tahun adjaran. Ulama-ulama besar menganggap masa jang tudjuh tahun adjaran dibagi kepada delapan tahun. Itupun belum termasuk tahun adjaran untuk mata peladjaran membatja Kuran. Zainuddin Labai memasukkan mata peladjaran membatja Kuran dan tadjwid kedalam mata peladjaran sekolahnja. Tetapi pada madrasah, peladjaran itu adalah sebelumnja dan didjadikan sjarat untuk dapat masuk. Mulai tahun 1930, mulai diatur sjarat-sjarat buat masuk sekolah agama beridjazah Sekolah Rakjat, (seku-rang-kurangnja 3 tahun) dan telah tammat Kuran. Masa delapan tahun pada madrasah-madrasah itu hanya semata-mata untuk mem-peladjar agama dengan seluk-beluknja.

Walaupun tahun adjaran delapan, tetapi kelas jang tertinggi adalah kelas tudjuh. Hal itu ialah karena kelas enam ditempuh dalam dua tahun jaitu kelas enam A, dan kelas enam B. Setjara formil rentjana ulama-ulama besar itu sama dengan rentjana Zai-nuddin Labai tetapi hakikatnja sangat berbeda.

Mula-mula tahun jang delapan tahun itu dianggap sebagai satu kesatuan, Idjazah diberi diakhir tahun ke VIII. Kemudian dengan pulangnja peladjar-peladjar Sumatera Barat dari Mesir, maka tahun jang delapan itu lalu dibagi dua. Empat tahun bermula dinamakan bahagian rendah (Ibtidaijah) dan jang empat kemudian, bahagian landjutan (Sanawijah).

Pada masing-masing bahagian itu diberi idjazah tersendiri jang mempeladjar tjara baru ini adalah sekolah agama Sungajang dan Padang Djapang (tahun 1930).

Dari pendjelasan diatas dapat dimaklumi, bahwa apa jang bernama sekolah Ibtidaijah itu adalah adjaran empat tahun sesudah sekolah rakjat. Pembentukan kelas-kelas diatas membawa madrasah kepada hal-hal lain, diantaranya soal udjian. Dahulu tidak dapat diadakan udjian sama sekali. Peladjar dapat turut membatja atau mempeladjar buku-buku jang diingininja. Dengan pembentukan kelas dan tiap-tiap kelas mempunyai murid-murid tertentu dan buku peladjaran jang khusus, maka sebelum naik kelas tertinggi, peladjar harus menempuh udjian lebih dahulu. Mula-mula udjian itu hanya diadakan udjian pertengahan tahun. Udjian pertengahan ini diadakan sebelum tempo hari Maulid Nabi, jang berlaku dari tanggal 8 Rabiul Awal sampai 14 Rabiul Awal. Udjian itu ada dua matjam jaitu: udjian tahriry atau udjian tulisan dan udjian sjafahy atau lisan.

Tahun adjaran madrasah adalah sesudah bulan puasa. Dahulu pengadjaran baru dimulai pada awal bulan Zulhidjah, bahkan ada djuga jang pada pertengahannja dan tahun adjaran ditutup diachir Radjab. Dengan demikian pakansi puasa ada demikian pandjangnja jaitu antara 90 dengan 100 hari.

Waktu pakansi jang lain ialah bulan Hadji atau Zulhidjah, biasanya 5 hari dari tanggal 9 sampai 14, kemudian tempo Maulud selama seminggu sebagai diterangkan diatas. Mulai tahun 1930 pakansi puasa dipendekkan dari tanggal 20 Sja'ban sampai 10 Sjawal, jaitu 50 hari.

Pengadjaran agama buat puteri:

Pendidikan puteri sama pentingnja dengan pendidikan putera, sebab seperdua bangsa adalah kaum wanita. Kemadjuan pendidikan kaum wanita mendapat perhatian.

Hakikat diatas telah dimaklumi oleh Zainuddin Labai dan dengan tidak memperdulikan keadaan kiri kanan dalam tahun 1915 ia membuka Dinijahnja. Sebenarnja Zainuddin Labai seorang jang tjerdik. Pada sekolah Desa Pemerintah, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan diadjar dalam satu kelas. Hal itu tidak mendjadi soal bagi alim ulama, sebab anak-anak dibawah umur. Maka Zainuddin Labai membuka sekolah agama buat anak-anak ketjil itulah.

Dengan demikian ia terhindar dari serangan-serangan sengit para ulama. Sebagai diterangkan diatas, Dinijah Padang Pandjang disusul oleh puluhan Dinijah lain di Sumatera Barat. Semuanya membukakan pintu buat anak-anak puteri. Sementara dalam golongan lain soal pendidikan puteri ini lima belas tahun dibelakang, belum selesai diperhatikan, tetapi prinsip Zainuddin Labai, mendjalar dengan diam-diam dan tegas. Diantara pembantu-pembantu jang menjokong pendirian Zainuddin Labai ini adalah Hadji Rasul Hamidi di Pajakumbuh dan Hadji Djalaluddin Thaib di Balingka, Bukit-tinggi, jang kemudian mendjadi Dewan Pimpinan Permi.

Walaupun pintu telah terbuka buat anak-anak perempuan, tetapi Zainuddin Labai tidaklah gembira melihat hasil usahanya, Dinijahnja tidak dapat melahirkan kader-kader pemimpin puteri sebagai diingininja. Halangan jang tidak diduga-duganja semula, telah menjadi perintang bagi tjita-tjitanja.

Halangan itu ialah adat kebiasaan mengawinkan anak-anak perempuan berada ditengah-tengah masyarakat dan langsung dibawah mata orang banjak. Biasanja anak-anak ini lekas dipinang dan bersuami.

Bersama dengan ulama-ulama besar, seperti Dr. Abdul Karim Amarullah, gurunja dan lain-lain, Zainuddin Labai, membanteras kebiasaan jang sangat berbahaja ini. Ia mengarang sebuah brosjur, jang dinamainja: „Apa benar tuahnja bermenantu?”.

Dalam buku itu ia mengupas kenjataan-kenjataan jang pahit jang diterima oleh perkawinan anak-anak. Akibatnja tidak lain dari pada penjesalan ibu bapa semata-mata.

Buat mendjalankan tjita-tjitanja mempertinggi kedudukan wanita, ia mendidik adiknja, Rahmah el Yunusiah.

Pada tahun 1923, dengan bimbingan kakaknya Zainuddin Labai Rahmah el Yunusiah melahirkan sekolah Dinijah perempuan jang pertama di Sumatera Barat. Sekolah ini adalah sangat penting artinja bagi kemadjuan Sekolah Agama Puteri umumnja. Dua tahun sesudah sekolah berdiri, Zainuddin Labai meninggal dunia (1925). maka tinggallah Rahmah mengendalikan sekolahnja.

Sekolah baru ini mendapat sambutan jang baik dari kaum puteri. Tidak lama kemudian, pada sekolah itu telah beladjar anak-anak seluruh Sumatera Barat. Hal itu ialah karena, banjak diantara peladjar-peladjar puteri jang dahulu beladjar pada sekolah Dinijah tjampuran, banjak jang pindah kesana.

Setelah mengalami kesulitan jang hebat, karena gempa tahun 1926, jang mengakibatkan runtuh gedung sekolahnja dan meninggal seorang pembantunja jang penting, Rahmah telah mendapat kedudukan jang penting, dalam pendidikan agama. Sebelum tahun 1930 disekolahnja telah terdapat peladjar puteri dari seluruh tanah air dan Malaya.

Tak ubahnja dengan Dinijah School, mempunyai tjabang-tjabang diseluruh Sumatera Barat, Dinijah Puteri inipun demikian djuga. Semuanja dipimpin oleh murid-murid keluaran Dinijah Puteri itu. Keluar Sumatera Barat, Dinijah Puteri ini banjak mengirim guru perempuan, seperti Atjeh, Sumatera Timur, Malaya, Djawa, Sulawesi dan lain-lain.

Disamping Dinijah Perempuan dan tjabang-tjabangnja ada lagi sekolah agama puteri. Jang terbesar ialah Sekolah Nahdatul-Nisaijah di Padang Djapang, Pajakumbuh, dipimpin oleh Safiah Abbas, anak Sjech Abbas Abdullah.

Bersama-sama dengan Rahmah, Safiah menggalang pendidikan anak perempuan. Dalam tahun 1930 juga sekolah Safiah ini telah menerima murid dari seluruh Sumatera Barat. Kedua gedung sekolah puteri ini, termasuk sepuluh sekolah agama yang tersempurna dan terbesar dalam daerah Sumatera Barat.

Dengan kemajuan kaum puteri itu timbul masalah, bagaimana puteri berdiri dimuka umum, seperti mengadjar, berpidato dan lain-lain.

Tahun 1929, Muhammadijah mengadakan Kongres ke XIX di Bukittinggi. Dalam salah satu sidang tardjih pada kongres, soal diatas dibahas oleh ulama-ulama besar Sumatera Barat dan akhirnya dapat keputusan hukumnya harus. Dengan putusan itu terbukalah pintu seluas-luasnya bagi wanita-wanita. Sebelum tahun 1930, guru-guru agama wanita telah memegang pimpinan bermacam organisasi dan perkumpulan bahagian wanita, seperti Permi, Aisjiah, P.S.I.I. wanita dan lain-lain.

Sesudah tahun 1930 seluruh sekolah agama Sumatera Barat, telah menerima murid-murid wanita disamping murid laki-laki dengan hak yang sama. Pada tahun 1936, Muhammadijah mendirikan sekolah guru puteri Kullijah Muballigat dan tahun 1937 Rahmah el Yunusiah mendirikan pula sekolah gurunya bernama Kullijah Mualimat. H. Sjamsijah dengan sekolahnya pula di Bengkawas Bukittinggi. Dengan berdirinya dua buah sekolah yang khusus buat puteri ini, pada hakikatnya pemudi-pemudi Islam mendapat kesempatan lebih banyak dari pemuda-pemuda, untuk mendapat didikan lebih tinggi, sebab pada sekolah-sekolah yang lain, kaum puteri dapat hak yang sama dengan laki-laki.

Persatuan guru agama.

Perdebatan-perdebatan yang sering diadakan pada negeri-negeri, apa lagi dengan adanya madjallah yang memperhubungkan satu Madrasah dengan yang lain, mengeratkan perhubungan dan pengertian antara guru-guru agama. Perkumpulan-perkumpulan yang mulai berdiri, menginsafkan guru-guru Agama akan pentingnya persatuan guru, menjatukan usaha dan pikiran untuk kemajuan pendidikan agama.

Suara menudju persatuan itu mula-mula didengungkan oleh Hadji Abdullah Ahmad. Pada tahun 1919 di Padang Pandjang, telah dibentuk persatuan guru agama yang pertama dengan nama: „P.G.A.I.” atau persatuan Guru-guru Agama Islam. P.G.A.I. ini mempunyai tjabang-tjabang seluruh Sumatera Barat dan diantara pengasuhnya yang pertama adalah Dr. H. Abdullah Ahmad, Dr. H. Abdul Malik Karim Amarullah, Sjech M. Djamil Djambek, Sjech Daud Rasjidi dan Sjech Ibrahim Musa Parabek.

Diantara usaha P.G.A.I. jang besar sumbangnja untuk kema-djuan, adalah mendirikan Sekolah Normal Islam di Padang dan disamping itu Rumah Penjantun Anak Jatim Modern jang tidak kalah oleh usaha-usaha kaum pendjadjah Belanda.

Pada tahun 1922 di Padang Pandjang beberapa guru agama muda, telah mendirikan pula satu persatuan guru baru dengan nama P.G.S.A., Persatuan Guru Sekolah Agama, dibawah pimpinan H. Djalaluddin Thaib c.s. Perkumpulan ini berusaha menerbitkan buku-buku dan madjallah dan dapat mengusahakan sebuah mesin tjetak dengan nama Drukkerij P.G.S.A. Perkumpulan ini kemudian tahun 1930 telah dilebur mendjadi perkumpulan P.M.I. jang kemudian mendjadi partai politik Permi.

Kedua perkumpulan itu adalah terutama dari aliran muda. Pada tahun 1920, atas andjuran Sjech Abbas Ladang Lawas, Sjech Sulaiman Arrasuli Tjandung dan Sjech Muhammad Djamil dari Djaho Padang Pandjang, telah diadakan pertemuan guru-guru agama dengan nama Ittihadul Ulama jang dipimpin langsung oleh ketiga ulama diatas. Sebagai terompet dari persatuan diterbitkan madjallah Ar Radd wal Mardud, dibawah pimpinan H. Siradjuddin Abas. Pada tahun 1928, atas usaha Ittihadul ulama telah diadakan pertemuan di Tjandung, dan telah berhasil melahirkan pergabungan semua sekolah agama dengan nama At Tarbijah Islamijah. Pada tahun 1930 persatuan guru ini mendjelma mendjadi organisasi dengan nama Persatuan Tarbijah Islamijah. Kemudian mendjadi partai Politik Perti. Urusan sekolah mendjadi sebuah usaha perkumpulan itu.

Kesatuan rentjana dan organisasi.

Bagi pematja jang akan mendalami tindjauan tentang madrasah-madrasah di Sumatera Barat, pasal ini perlu mendapat perhatian. Kepentingan persatuan rentjana peladjaran dan kesatuan organisasi telah lama diinsafi oleh para pemuka-pemuka sekolah agama. Bersilih ganti usaha tentang ini dilantjarkan, tetapi tidak banjak memberi hasil. Pada bahagian atas telah dibayangkan bahwa kemerdekaan berfikir, tumbuh dengan subur dalam lingkungan madrasah-madrasah, terutama jang tergolong dalam aliran Muda. maka kemerdekaan itu telah menundjukkan exesnja.

Kemerdekaan itu menjulitkan lantjarnja usaha persatuan.

Tidak dapat disangkal tiap-tiap madrasah ada kelebihannja. Maka kelebihan ini tidak akan bisa dipertahankan, bila dipakai rentjana jang sama dan buku murid jang sama. Pada pihak lain persatuan berarti mengorbankan sebahagian kedaulatan madrasah, terutama mengakui kekuasaan satu badan jang tertinggi. Maka ini nampaknja belum berhasil.

Usaha pertama menudju kesatuan itu telah dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Amarullah di Padang Pandjang tahun 1919, tidak lama sesudah persatuan guru P.G.A.I., berdiri. Seruan pertama itu untuk menjatukan susunan dan nama dari madrasah. Nama jang dimajukan adalah Sumatera Thawalib, dengan tudjuan seluruh sekolah-sekolah di Sumatera diurus oleh satu badan pusat.

Pertemuan itu tidak memberi hasil jang tjukup. Walaupun demikian, beberapa sekolah menjetudju persatuan nama itu. Diantara sekolah-sekolah jang kemudian memakai nama itu, adalah Padang Pandjang, Parabek, Tandjung Limau, Padang Djapang, Manindjau, Padang dan beberapa sekolah-sekolah jang lain. Tjuma kesatuan nama itu tidak menundjukkan kesatuan isi. Rentjana peladjaran dan organisasi tetap sendiri-sendiri. Satu badan Pusat jang mempunjai kekuasaan tertinggi tetap tidak dapat didirikan.

Tahun 1929, Muhammadiyah mengadakan Kongres di Bukittinggi, diantaraja bahagian sekolahnja. Hal itu menimbulkan ilham baru dalam lingkungan madrasah aliran muda atau golongan Thawalib dan pengikut-pengikutnja. Atas usaha Ali Imran Djamil, salah seorang pemimpin Thawalib Parabek dan H. Abdul Madjid diadakan kongres Sumatera Thawalib di Bukittinggi, tahun 1930. Meskipun jang berkongres, wakil-wakil madrasah tetapi telah melahirkan satu perkumpulan jang bernama Persatuan Muslimin Indonesia, (P.M.I.) Urusan pengadjaran mendjadi salah satu departemen usaha jang dipimpin oleh Ali Imran Djamil sendiri. Persatuan djiwa dari Thawalib-thawalib itu semakin erat tetapi usaha menudju kesatuan rentjana pengadjaran dan organisasi masih serat. Beberapa sekolah jang besar-besar seperti Dinijah Puteri dan Thawalib Padang Djapang dan lain-lain masih tidak mau bergabung, mengingat bahaja jang menimpa P.M.I. akan langsung memukul sekolah. Pikiran ini kemudian ternjata ada kebenarannja.

Tahun 1933, partai Permi mendapat vergader-verbod dan achir-nja tahun 1935 dibubarkan. Sekolah-sekolah jang berada dibawah pimpinannja, terutama jang besar-besar seperti Parabek, Padang Pandjang, Tandjung Limau dan lain-lain, mengalami kesulitan, dan sering menerima penggeledahan dari pihak pendjadjahan. Hal itu ialah karena Permi sangat aktif menentang Ordonansi Sekolah Liar, jang dewasa itu disodorkan Pemerintah.

Mulai tahun 1933 itu, pimpinan sekolah-sekolah agama kembali terlepas dari ahli politik (Permi), dan terserah kepada ulama-ulama. Aliran baru muntjul. Peladjar-peladjar dari Mesir mulai terkemuka mendjadi pimpinan. Terutama Mahmud Yunus, Muchtar Yahja, Nasaruddin Thaha dan lain-lain. Dengan perantaraan sekolah-sekolah guru jang dipimpinnja masing-masing, mulai mengusahakan persatuan rentjana madrasah.

Pada bulan Djuni 1936, di Padang Pandjang, diadakan Mukhtar Sekolah-sekolah Islam. Jang hadir dalam mukhtar itu wakil-wakil pengurus dan guru-guru dari seluruh sekolah agama di Sumatera Barat. Mukhtar ini dikundjungi banjak wakil-wakil sekolah. Rentjana jang telah disusun rapi oleh Mahmud Junus c.s beberapa masa lamanja itu, tidak diterima oleh Mukhtar. Rentjana pengantiannya pun tidak ada jang gdisetudjui. Alhasil, Mukhtar ini gagal pula.

Pokok kegagalan dewasa ini tetap kedaulatan. Dahulu kedaulatan sekolah dan ulama jang memimpinnja, sekarang lebih ruwet lagi, jaitu kedaulatan organisasi. Dalam Mukhtar ini turut wakil-wakil sekolah Perti dan Muhammadiyah, sebagai wakil sekolahnja masing-masing. Tentu sulit bagi wakil-wakil itu akan mengambil putusan jang tidak sesuai dengan putusan dalam perkumpulannya sendiri. Tambahan lagi tampaknya kurang tindjau-menindjau jang diperlukan antara pemegang rentjana dengan pimpinan sekolah perkumpulan diatas. Meskipun Mukhtar itu dimulai dengan brosur-brosur, karangan-karangan disurat-surat kabar dan madjallah-madjallah, akhirnya tidaklah memberi hasil sebagai jang diharapkan.

Djelas dari uraian diatas, bahwa persatuan seluruh sekolah-sekolah agama Sumatera Barat itu telah gagal, tetapi disamping itu persatuan sekolah-sekolah, organisasi dapat timbul dengan baik.

Sekolah Tarbijah Islamijah.

Setelah organisasi Persatuan Tarbijah Islamijah terbentuk, maka urusan sekolah adalah menjadi salah satu usahanya jang terpenting. Badan ini dipimpin oleh Sjech Sulaiman Arrasuli Tjandung. Sekolah-sekolah jang besar jang masuk Tarbijah Islamijah, adalah Djaho, Tabek Gadang (Pajakumbuh), Tiakar Pajobasung (Pajakumbuh), Tandjung Bingkung (Solok) dan $\pm$ 250 sekolah jang lain-lain, sebahagiannya berada diluar Sumatera Barat.

Sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Tahun 1927, Muhammadiyah masuk ke Padang Pandjang, dipimpin oleh A. R. Sutan Mansur, seorang ulama keluaran Padang Pandjang jang telah mendalami Muhammadiyah bertahun-tahun di Djawa. Mula-mula perkumpulan ini kurang mendapat perhatian dari kalangan ulama dan sekolah-sekolah jang besar di Sumatera Barat. Sekolah jang besar-besar itu umumnya terbagi kepada dua bahagian besar jaitu golongan tua, dibawah Ittihadul ulama dan golongan muda jang masih dalam keadaan panik, tersebab penggeledahan dan pembuangan jang berlaku bagi sebahagian murid karena tersangkut soal pemberontakan Kominis. Umumnya aliran muda ini sangat tjondong kepada organisasi politik Islam, jang pada waktu itu sedang menunggu saat lahirnja.

Meskipun demikian, berangsur-angsur meluaskan sajapnja. Pada tahun 1931, Muhammadiyah membuka sekolah Tabligh School, untuk melatih guru-guru agama dari Madrasah buat mendjadi pemimpin Muhammadiyah disamping pekerjaan mendjadi guru. Muhammadiyah lalu mendirikan sekolah-sekolah agama baru, menurut model dari Djawa, jaitu sekolah Wustha. Sekolah ini hampir sama dengan sekolah Sumatera Barat, hanja ditambah dengan peladjaran administrasi dan organisasi dan anggaran dasar Muhammadiyah. Sekolah ini kemudian terpaksa diubah. Pada tahun 1935, Muhammadiyah Sumatera Barat melahirkan susunan baru jang berupa sekolah Ibtidaijah dan Sanawijah. Sekolah Ibtidaijah 4 tahun, diterima murid-murid sekolah rakjat kelas II atau III dan peladjaran diberikan petang hari. Sesudah menamatkan sekolah rakjat langsung anak-anak itu memasuki sekolah Sanawijah. Pada Sanawijah Muhammadiyah diberikan mata peladjaran umum seperti, ilmu bumi, sedjarah, berhitung, ilmu alam, ilmu hajat, bahasa Inggris dan lain-lain, dengan tingkatan kelas dua S.M.P.

Rentjana baru ini tersiar dengan luas seluruh Sumatera Barat, dan tidak lama kemudian sekolah Muhammadiyah menduduki tempat jang penting pula disamping sekolah agama jang lain. Pada rentjana Muhammadiyah ini ada beberapa hal jang dapat diperhatikan:

1. Mengichtiarkan mata peladjaran pada tingkatan Sanawijah dapat diberikan sependek mungkin, agar ada kesempatan menjambung ke sekolah lebih tinggi.
2. Pengadjaran agama mesti disedjadjarkan dengan pengadjaran umum disekolah-sekolah negeri.
3. Kesatuan dalam organisasi, mata pengadjaran, buku-buku peladjaran dan lain-lain.
4. Mengakui adanja pimpinan pusat jang mempunjai kuasa tertinggi.
5. Pembahagian kekuasaan antara guru-guru jang mengadjar dengan pengurus jang bertanggung djawab tentang murid, gedung, keuangan dan lain-lain.

Rentjana ini menghendaki sumbangan guru mendidik anak lebih dalam, untuk djadi guru dan pemimpin organisasi. Untuk itu Tabligh School Muhammadiyah tahun 1935, diubah mendjadi Kullijatul Muballighin, sekolah guru dengan rentjana 3 tahun.

Nama-nama ahli pendidik dalam kalangan Muhammadiyah adalah diantaranya Marzuki Jatim, Jacob Rasjid, A. Malik Ahmad. Pemuda terpeladjar jang menjumbangkan tenaganya untuk Muhammadiyah diantaranya jang terkemuka adalah Raden Sulaiman.

Pendidikan Kepanduan, olah raga dan kebudayaan.

Pada tahun 1927, Muhammadiyah masuk ke Padang Pandjang. Tidak lama kemudian telah mendirikan tjabang-tjabang dan ranting di beberapa tempat di Sumatera Barat. Diantara tjabang usaha Muhammadiyah adalah mendidik para pemuda dalam organisasi kepanduan H. W. atau Hizbul Wathan. Tahun 1929, dalam kongres Muhammadiyah ke 19 di Bukittinggi diadakan arak-arakan H. W. yang sangat meriah dan menimbulkan keinginan kepada ahli-ahli pendidikan untuk menurutnja.

Organisasi H. W. diadakan pada setiap tjabang dan ranting Muhammadiyah dan mulai menarik perhatian peladjar-peladjar madrasah. Kemudian dengan berdirinja sekolah-sekolah Muhammadiyah, maka kepanduan H. W. masuk dalam sekolah-sekolah agama. Pada tahun 1929 beberapa sekolah-sekolah agama telah mendirikan kepanduan. Diantara sekolah agama yang mendirikan kepanduan adalah Dinijah putera Padang Pandjang bernama Zamzami Kimin dan sekolah Thawalib Parabek, bernama Ansarul-lah dibawah pimpinan A. Gaffar Ismail dan sekolah Thawalib Padang Pandjang bernama Al Hilal, dibawah pimpinan Leon Salim dan M. Junus Kotjek. Kepanduan yang lain adalah Al-Kasjaf di Padang Djapang dibawah pimpinan Hadji Rusli A. Wahid.

Pada kongres Sumatera Thawalib di Bukittinggi, tahun 1930 yang melahirkan perkumpulan Persatuan Muslim Indonesia, maka soal kepanduan menjadi salah satu departemen usaha disamping Departemen Pengadjaran. Sebagai pimpinan umum diangkat Saudara A. Gaffar Ismail dan dibantu oleh Saudara Leon Salim dan lain-lain.

Kepanduan Al Hilal, lalu merata kepada sekolah-sekolah agama yang bernaung dibawah Departemen Pengadjaran P.M.I. yang kemudian menjadi Permi.

Disamping Al Hilal, Kepanduan K. I. M., telah merata pula kepada sekolah Dinijah, karena kepanduan K.I.M. inipun menjadi bagian dari perkumpulan P.M.D., Persatuan Murid-murid Dinijah School, yang mempersatukan seluruh sekolah-sekolah Dinijah. Kepanduan K.I.M. membentuk kepanduan puteri. Pimpinan umum dari kepanduan ini adalah ditangan Rahmah el Junusiah, pemimpin Dinijah Puteri di Padang Pandjang.

Dalam tahun 1932 kepanduan Siap mulai masuk kesekolah agama diantaranya kepada peladjar pada Thawalib Parabek dan Darul Funun Abbasjah di Padang Djapang dan murid sekolah yang didirikan P.S.I.I. dan lain-lain.

Pada tahun 1934 Persatuan Tarbijah Islamijah mengadakan Kongres ke III di Bukittinggi. Dalam Kongres itu telah diputuskan pula membentuk bagian Kepanduan. Sesudah keputusan Perti ini seluruh sekolah agama di Sumatera Barat telah memasukkan

pendidikan kependuan kedalam susunannya, kependuan Perti bernama Anshar.

Pendidikan olah raga, telah lama masuk dalam sekolah-sekolah agama. Mulai dari zaman surau dan langgar, pendidikan ini telah masuk. Dalam zaman perang Padri, pendidikan Pentjak dan Silat sangat diutamakan. Apalagi ia mempunyai hubungan yang erat dengan perjuangan yang tengah dilantarkan melawan kaum pendjadjah.

Olah raga modern yang mula-mula masuk kepada sekolah agama adalah bola kaki. Dengan terbentuknya kependuan, maka olah raga semakin pesat terutama bahagian senam atletik dan lain-lain. Kemudian telah tersiar pula permainan badminton, bola kerandjang dan paling akhir main volley ball.

Bahagian kebudayaan yang sangat menarik perhatian madrasah ialah seni suara. Seni suara terutama lagu-lagu Arab. Seni musik amat tersiar dalam lingkungan sekolah-sekolah agama. Pusat gerakan ini adalah djuga Padang Pandjang. Orang yang terkemuka dalam hal ini, adalah Chatib Sulaiman, M. Junus Kotjek, seorang violis yang aktif. Dengan pimpinan M. Junus Kotjek, telah dapat mendirikan musik Jazz dan telah pula berhasil mendirikan musik rakjat yang kemudian tersiar luas, ialah musik suling terdjadi dari bambu (fluit orkest). Dalam tahun 1930, musik suling ini telah merata diseluruh Sumatera Barat, sampai perang dunia ke II, umumnya musik suling berada dalam lingkungan sekolah agama atau organisasi lain yang rapat hubungannya dengan sekolah atau pelajar-pelajar agama.

Bahagian lain dari Kebudayaan yang tersiar djuga ialah sandiwara sekolah. Soal ini bagi ulama menjadi pokok pertikaian (masalah chilafiah).

Namun begitu sekeliling Dinijah School, seni sandiwara telah dimulai tahun 1930. Hanya beberapa tjara didjaga, terutama sandiwara puteri hanya dipertontonkan buat kaum puteri dan bila akan dipertunjukkan buat putera dan puteri, maka pemain-pemainnya diambil dari anak-anak dibawah umur. Tjara mempertontonkannya biasanya berganti-ganti antara kaum laki-laki dan kaum wanita.

Tetapi umumnya ulama-ulama besar Sumatera Barat, kurang menjetudjui sandiwara pada sekolahnya.

Pendidikan guru.

Kemajuan sekolah-sekolah agama, makin lama makin meningkat. Oleh madjallah-madjallah yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah agama dan oleh murid-murid keluaran sekolah-sekolah agama itu, yang bertebaran diseluruh Indonesia, maka nama Sumatera Barat sangat menarik perhatian dari luar Sumatera Barat.

Tarikan itu makin lama makin hebat. Pemuda-pemuda datang dari luar, untuk bersekolah agama. Dari tahun ketahun, makin lama makin banyak murid-murid jang datang itu. Nama Thawalib Parabek, Thawalib Padang Pandjang, Padang Djapang, Tarbijah Islamijah Tandjung, Tabek Gadang, Djaho, Sekolah Dinijah Putri, Padang Pandjang dan lain-lain mempunyai daja tarikan khusus diseluruh kepulauan Indonesia. Dalam tahun 1930 di Sumatera Barat terdapat pemuda-pemuda mulai dari Atjeh, Riau dan Djambi. dan Malaya disebelah barat sampai kepulauan Maluku disebelah timur untuk bersekolah agama.

Pada tiap-tiap kota dan negeri ditanah air timbul panitia pembangunan sekolah agama, jang meminta guru-guru kepada sekolah-sekolah agama di Sumatera Barat. Gerakan agama mulai bertebaran. Perkumpulan seperti Muhammadiyah, Permi, Serikat Islam dan lain-lain, giat mendirikan sekolah-sekolah dan diantaranya banyak djuga meminta guru atau pemimpin.

Banyaknya permintaan guru itu, apalagi oleh dorongan untuk mempertinggi mutu guru-guru agama, maka hadjat kepada pendidikan guru jang lebih tinggi terasa mendesak. Mula-mula sekolah-sekolah agama itu bila ada permintaan, mengirim salah seorang gurunya jang telah praktik. Tetapi kemudian setelah permintaan banyak, hal itu tidak mungkin lagi.

Pendidikan guru itu telah mendapat djalan pula karena beberapa pemuda Sumatera Barat jang beladjar dari Mesir telah pulang ketanah air, seperti Muchtar Luthfi, Mahmud Junus, Kasim Bakry dan lain-lain.

Atas iniatief Mahmud Junus pada tahun 1930, telah diadakan sekolah agama jang pertama di Sungajang Batu Sangkar dengan nama Al Djamiatul Islamijah. Sekolah itu hanja dua tahun berdiri kemudian terpaksa ditutup sebab Mahmud Junus pindah ke Padang. Tahun 1931 adalah satu tahun jang penting bagi pendidikan guru agama di Sumatera Barat. Pada tahun itu berdiri tiga buah sekolah guru jang kemudian telah hidup dengan subur.

Tabligh School Muhammadiyah di Padang Pandjang dan di Bukittinggi oleh Departemen Pengadjaran Permi, didirikan dua buah kursus guru. Pertama Madrasah Sanawijah dan kedua Normal Kursus Puteri. Kedua sekolah ini dipimpin oleh H. Muchtar Luthfi dan sebagai pembantunya pada Normal Kursus Puteri adalah Rasuna Said. Sanawijah mempunyai rantjangan peladjaran setahun dan Normal Kursus mempunyai rentjana peladjaran tiga tahun. Kedua sekolah guru ini pada tahun 1933 mengalami kesulitan hebat, karena partai Permi mendapat larangan berapat, dan beberapa orang pemimpinnja diantaranya Muchtar Luthfi, Direktur kedua sekolah guru itu ditangkap dan achirnja dibuang ke Digul. Tahun 1934 kedua sekolah itu digabungkan djadi satu sekolah baru dengan nama Perguruan Muslim Normal Islam didirikan

oleh perkumpulan Persatuan Guru Agama Islam (P.G.A.I.) dengan pimpinan dan dorongan pemimpin tua yang djauh tindjauannya Dr. H. Abdullah Ahmad. Normal Islam mempunyai tahun adjaran empat tahun, dipimpin oleh Mahmud Junus. Tabligh School Muhammadiyah dipimpin oleh Hamka dengan tahun adjaran dua tahun. Sebagai namanja, Tabligh School disamping pendidikan keguruan ditudjukan djuga untuk mendjadi kader-kader pemimpin Muhammadiyah dan Aisjah. Oleh kader-kader ini perkumpulan Muhammadiyah berkembang dengan pesat dan mendjadi salah satu perkumpulan jang terbesar di Sumatera Barat.

Pada tahun 1931 Dewan Pengadjaran Permi mendirikan sekolah guru Islamic College di Padang. Sekolah ini mendapat sambutan jang hangat terutama Mr. A. Hakim dan ketua Badan Penasehatnya adalah Mr. Dr. Kusuma Atmadja, jang pada waktu itu mendjadi ketua Pengadilan Negeri di Padang, Pimpinan sekolah ini kemudian dipegang oleh Muchtar Yahja.

Islamic College disamping pendidikan guru, dilengkapi dengan pendidikan kepemimpinan, terutama dalam politik Islam dengan tahun adjaran empat tahun. Sekolah Tabligh School, kemudian tidak memuaskan lagi, lalu didjadikan Kullijatul Muballighin dengan rentjana 3 tahun. tahun 1936. Pada tahun itu djuga disamping Kullijatul Muballighin buat putera, didirikan pula Kullijatul Muballighat buat puteri. Muhammadiyah disamping pendidikan untuk guru-guru, sangat mementingkan pendidikan berorganisasi, seperti administrasi, azas-azas Muhammadiyah dan tjara-tjara berda'wah.

Berturut-turut kemudian lahir sekolah guru Training College dibawah pimpinan Nasharuddin Thaha tahun 1935 di Pajakumbuh, Kullijatul Muallimat el Islamijah dibawah pimpinan Rahmah el Junusiah tahun 1937 di Padang Pandjang. Sekolah ini menarik perhatian karena dia usaha puteri semata-mata untuk mendidik guru agama puteri pula.

Organisasi Perti, mula-mula mendirikan sekolah Kullijatul Sjarijah di Padang Pandjang dibawah pimpinan Sjech Muhammad Djamil Djaho tahun 1937, tetapi telah terpaksa ditutup sebelum mengeluarkan murid.

Tahun 1943 kembali Pengurus Besar Perti mendirikan kursus guru (Muallimin) di Bukittinggi, dibawah pimpinan Sjech Sulaiman Arrasuli.

Sekolah-sekolah Guru jang lain adalah M.I.K. (Moderne Islamic Kweekschool) di Bukittinggi, dipimpin oleh A. Gaffar Djambek, M.I.C. (Moderne Islamic College) di Bukittinggi dibawah pimpinan Sutan Sulaiman, seorang guru bahasa Inggeris dan Darul Maarif di Pariaman dibawah pimpinan Hadji Rasul Telur dan Nasional Islamic College dibawah pimpinan Taher Samad, Djamiah Islamijah Mahmud Junus dan lain-lain.

Pada sekolah-sekolah guru diatas, jang di Sumatera Barat lebih terkenal dengan nama sekolah menengah Islam, pengetahuan umum dan ilmu pendidikan.

Pengetahuan umum agak diberatkan kepada pengetahuan jang diperlui sebagai seorang pemimpin disamping sebagai guru, seperti ilmu tata negara, sedjarah Indonesia, sedjarah dunia, ekonomi, ilmu masjarakat, bahasa Inggeris dan bahasa Belanda.

Sekolah-sekolah Menengah Islam boleh dikatakan buah perpaduan tiga golongan terpeladjar nasionalis jang tidak mau memburuh dengan pemerintah Belanda.

Beberapa nama sebagai tjontoh dapat disebut guna menggam-barkan ketiga aliran tadi. Dari ulama progressief terdapat nama A. R. Sutan Mansur, Hamka, pada Kullijatul Muballighin Muham-madijah; Sjech H. Abdullah Ahmad dan Sjech Ibrahim Musa pada Normal Islam. Pada golongan pemuda terpeladjar agama dapat disebut nama-nama Mahmud Junus, Kasim Bakriy, Muchtar Yahja, Nasharuddin Taha, Hadji Iljas Muh. Ali dan lain-lain. Golongan pemuda terpeladjar umum jang telah turut mengasuh sekolah-sekolah diatas adalah Mr. A Hakim, Bagindo Aziz Chan, Mudigdo, Iskandar Tedjasukmana, Arrisun Sutan Alamsjah Ir. Iljas. Taher Samad dan banjak lagi jang lain-lain.

Pemuda pemudi peladjar Sekolah Menengah Islam itu disamping peladjarannja sehari-hari, melatih dirinja dengan usaha-usaha kemasjarakatan.

Pada tiap-tiap sekolah berdiri persatuan murid jang mempunjai beberapa departemen, umpamanja pada Islamic College ada Pelisco (Peladjar Islamic College) pada Normal Islam ada Peni (Peladjar Normal Islam) dan seterusnya. Perkumpulan peladjar jang lain adalah Ikatan Peladjar Kullijah-Muballighin pada sekolah Kullijah-Muballighin/Muballighat, Himpunan Peladjar Training College (H.P.T.C.) pada sekolah Training College.

Diantara departemen-departemen itu adalah bahagian pers, bahagian pidato, bahagian debating club (mubahasah), bahagian olah raga dan lain-lain. Tahun 1934—1937, madjallah-madjallah jang diterbitkan Sekolah-sekolah Menengah Islam ini tjukup me-menuhi kekurangan jang terasa diwaktu itu. Dibawah ini diterakan nama surat kabar peladjar itu, antaranja:

No.	Nama Madjallah	Sekolah jang menerbitkan	Diantara pengasuhnja
1.	Raja	Islamic College	M. Dien Jatim Rasuna Said
2.	Fadjar	Normal Islam	M. Muin B.A./Kaharuddin Junus
3.	Utama	Kullijatul Muballighin	Gozali Sjahlan
4.	Nirwana	Training College	
5.	Maharaja	N. Islamic College	M. Lawit

Pendidikan jang sedjalan dengan pengadjaran itu, telah meletakkan dasar batu ditengah-tengah masjarakat. Pertama pada sekolah Menengah Islam itu, berkumpul peladjar dari kepulauan Indonesia, sehingga menimbulkan rasa persatuan jang lebih rapat. Kedua pendidikan itu telah berhasil menutupi atau setidak-tidaknya memperketjil djurang jang ada antara surau dengan sekolah atau antara terpeladjar agama dengan terpeladjar Barat.

Kedua para pemuda agama telah mendapat sjarat-sjarat jang perlu bagi seorang pemimpin agama modern, organisasi, administrasi dan ilmu pengetahuan.

Dengan keluarnya peladjar-peladjar dari sekolah Menengah Islam itu, pendirian sekolah-sekolah agama rendahan dan landjutan diseluruh Nusantara. begitupun tidak sedikit pula pemuda jang memasuki perusahaan perdagangan dan lain-lain.

Pengadjaran tinggi.

Mendjelang tahun 1940, mulai terasa perlunya sekolah tinggi agama Islam. Pendorong-pendorong untuk itu bermatjam-matjam Diantarannya banjaknya Sekolah Menengah Islam diseluruh Sumatera Barat. Djuga perpaduan semangat dan ulama progressief, golongan terpeladjar agama, dan golongan terpeladjar umum. Nasionalis. Pada kedua golongan terachir terdapat orang-orang jang telah menempuh salah satu sekolah tinggi dalam dan luar negeri. Perkumpulan-perkumpulan Islam jang besar seperti Muhammadiyah dalam Kongres seperempat abad di Djakarta tahun 1937, telah pula memutuskan akan mendirikan sekolah Tinggi Ekonomi. Suara itu tjukup memperbesar semangat sekolah tinggi itu di Sumatera Barat, mengingat Muhammadiyah adalah salah satu perkumpulan jang terbesar di Sumatera Barat. Beberapa usaha jang lain memperdalam kejakinan para terkemuka di Sumatera Barat, umpamanya usaha Dr. Sutomo di Surabaja, usaha Dr. Sati-man di Solo, jang terkenal dengan Pesantren Luhur.

Maka atas inisiatif P.G.A.I. dengan diam-diam di Padang, telah dibentuk satu sekolah Tinggi Islam, disamping sekolahnja jang lama, Normal Islam. Direntjanakan sekolah itu dibagi kepada tiga djurusan, jaitu djurusan bahasa Arab, djurusan ilmu agama dan djurusan zending Islam. Dalam suasana sedikit bitjara banjak bekerdja, Sekolah Islam Tinggi itu telah dibuka pada tahun 1940, pada salah satu lokal Normal Islam Padang. Para peladjar ada $\pm$ 20 orang jang turut beladjar, terdiri dari pemuda/pemudi keluaran Normal Islam, Islamic College dan Kullijatul Muballighin.

Para mahaguru jang mengasuh perguruan jang baru itu, adalah Mahmud Junus, Nasharuddin Thaha, Muchtar Yahja dan Husain Yahja, semuanya dari Darul Ulum Mesir, Mr. Abu Bakar Djaar, S. M. Latief, Kaju Tanam, Saleh Djaafar B. A., Sjech Ibrahim Musa Parabek dan lain-lain.

Sekolah Islam Tinggi jang pertama ini sajang tidak pandjang usianja sebab diwaktu itu perang dunia kedua telah bertjabul dan diwaktu tahun adjaran jang kedua baru dimulai, tentera Djepang telah mendarat di Padang (Maret 1942), dan sekolah ini terpaksa ditutup.

Halangan dan rintangan.

Perkembangan jang telah ditjapai oleh sekolah agama itu, bukanlah satu perdjalanen jang enak sadja. Semuanja ditjapai dengan perdjjuangan dan ketabahan hati belaka. Bermatjam-matjam halangan telah dilalui, ada jang dihadapi setjara bersama dan ada pula jang dilalui sendiri-sendiri. Halangan-halangan itu ada dua bahagian, halangan dari dalam dan halangan dari luar.

Halangan dari dalam ialah terbit dari keadaan madrasah itu sendiri. Umumnja, sekolah-sekolah agama lemah dalam keuangan, dan sebahagiannja lemah pula dalam organisasi dan administrasi. Sebelum tahun 1920, sekolah-sekolah agama mengadakan gedung sekolah sendiri. Dalam tahun 1940, tiap-tiap dusun dan kampung di Sumatera Barat telah mempunjai gedung sekolah tetapi umumnja gedung itu tidak selesai dan kebanyakannja tidak menurut ukuran kelas jang semestinja. Banjaknja sekolah agama itu, benar-benar telah melemahkan sekolah-sekolah itu sendiri dan akibatnja tidak sedikit sekolah-sekolah itu jang mati setengah djalan.

Dari luar terutama rintangan-rintangan datang dari pihak kaum pendjadjah. Peperangan-peperangan jang berulang-ulang jang dilantjarkan oleh guru-guru agama dan kaum agama seperti perang Padri, dan perang Atjeh, tjukup menginsjapkan bangsa Belanda, bahwa terhadap agama Islam mesti diadakan perang dingin jang tidak mengenal ampun.

Gerbang tempat masuk bagi kaum pendjadjah jang terutama sekali ialah perpetjahan jang ada antara golongan tua dan muda antara kaum agama dan kaum adat, dan kemudian antara perkumpulan jang satu dengan jang lain. Pertikaian tentang masalah tharikat, usalli dan lain-lain ditolong oleh pemerintah Belanda menghembus-hembusnja. Tahun 1922 di Padang dihadapan Dr. de Vries, kepala Islamitise Zaken Belanda diadakan openbaar debat antara golongan tua dan golongan muda, jang kemudian mengakibatkan petjahnja golongan jang djauh dari rasa persaudaraan.

Pertentangan makin lama makin sengit. Tiap-tiap negeri dan dusun petjah pertikaian. Antara ulama jang satu dengan ulama jang lain, timbul bermatjam-matjam salah pengertian. Suasana jang telah genting itu dianggap oleh pemerintah Belanda telah masak buat melantjarkan maksudnja jang djahat, untuk mengekang perkembangan sekolah-sekolah agama. Pada tahun 1925 keluarlah

undang-undang jang terkenal dengan guru Ordonansi, jang tu-
djuannya mendirikan tirai-tirai besi sekeliling pengadjaran agama,
sehingga agama itu dapat didjauhkan dari masjarakat. Sesuatu
peladjaran agama jang diberikan kepada orang jang lain dari ang-
gota keluarga, mustilah lebih dahulu meminta izin buat melantjar-
kannya.

Keadaan itu tjukup pahit diterima oleh golongan ulama jang ber-
petjah-belah. Sekarang mereka insjaf, bahwa mereka telah diadu
dombakan, bukan untuk memenangkan salah satu golongan, tetapi
adalah untuk melumpuhkan kedua belah pihaknja.

Pada tahun 1928, di Bukittinggi diadakan rapat besar para ulama
seluruh Sumatera Barat menentang ordonansi guru itu. Seluruh
golongan bersatu padu, menolak bahaya jang mengantjam agama.
Kerapatan mengirim 2 orang utusan kepada Gubernur Djenderal di
Djakarta terdiri dari Hadji Abdul Madjid dan Hasanuddin Dt.
Singo Mangkuto, keduannya dari Manindjau untuk menjatakan ke-
gelisahan para ummat Islam oleh ordonansi itu.

Perjuangan itu berhasil, dan G.G. berdjandji tidak akan mela-
jukan undang-undang guru itu di Sumatera Barat. Sesudah melalui
perjuangan melawan ordonansi guru itu, kemajuan sekolah
agama bertambah pesat. Nama Sumatera Barat semakin harum
keluar, terbukti dengan bandjirnja peladjar-peladjar datang dari
luar Sumatera Barat.

Pemerintah Belanda tidak pernah melupakan maksudnja untuk
mengawasi sekolah-sekolah umumnja. Pertumbuhan sekolah-
sekolah umum Nasional dan sekolah-sekolah agama semakin hebat.

Pada tahun 1932, keluar undang-undang jang bernama „Wilde
Scholen Ordonantie“, atau ordonansi sekolah liar, jang pokoknja
mewadjabkan kepada tiap-tiap sekolah supaja meminta izin.

Ordonansi ini mendapat sambutan jang sehebat-hebatnja oleh
sekolah nasional terkenal dengan perlawanan diam-diam jang
diandjurkan oleh Kihadjar Dewantara. Di Sumatera Barat diadakan
rapat-rapat protes oleh sekolah-sekolah agama jang terutama oleh
partai Politik Permi. Oleh Permi untuk memprotes ini diadakan
rapat serentak pada tiap-tiap tjabang dan rantingnja.

Oleh protes-protes itu, perkataan minta izin dalam peraturan
itu dapat diperlunak mendjadi memberi tahu. Peraturan-peraturan
lain jang mempersulit keuangan sekolah-sekolah agama jang telah
sulit, ialah peraturan padjak upah atau Loon-belasting. Disamping
ordonansi jang ada, maka kedudukan sekolah-sekolah agama telah
dipersulit oleh perhatian istimewa jang diberikan oleh golongan
pegawai B.B. dan P.I.D. dizaman itu.

Golongan B.B. dan P.I.D., tjukup talu perintah-perintah jang
mereka terima untuk menghadapi sekolah-sekolah agama jang
ada dalam daerahnja.

Berulang-ulang sekolah-sekolah agama mendjadi sumber kegiatan politik jang menggelisahkan kaum pendjadjah. Sampai tahun 1920, madrasah-madrasah adalah sumber gerakan Serikat Islam. Tahun 1925 sampai 1927, sekolah agama jang besar-besar, seperti Padang Pandjang, Parabek, Kota Lawas dan lain-lain, tersangkut dalam peristiwa kominis, sehingga beberapa muridnja dibuang ke Digul.

Diwaktu gelombang politik naik di Sumatera Barat tahun 1932 dan 1933, maka sekolah-sekolah jang berada dibawah Departemen Pengadjaran Permi, mendapat susah. Berulang-ulang jang bertali dengan salah seorang pemimpin-pemimpin politik, seperti P.S.I.I. dan P.N.I., tidak luput dari penggeledahan.

Dalam masa ini berpuluh-puluh guru agama dikenakan pelarangan berapat dan mengadjar. Sewaktu pendidikan Djepang, sekolah-sekolah agama banjak jang mati. Kesempatan bergerak, kemiskinan hidup dan lain-lain telah memukul sekolah-sekolah agama, terutama sekolah jang besar jang menerima murid dari luar daerah. Mana-mana jang dapat hidup, waktunja telah banjak dipergunakan buat gotong-rojong.

Madrasah-madrasah dizaman pendudukan Djepang.

Setelah mendapat rintangan-rintangan jang beraneka warna dizaman pendjadjahan Belanda, tetapi masih dapat dilalui dengan tipu muslihat jang litjin disertai gerakan semangat jang senantiasia bergelora, maka madrasah-madrasah itu dizaman Djepang mendapat tekanan jang sangat berat menjebabkan kutjar katjir dan ditutupnja banjak madrasah-madrasah. Pengerahan tenaga dengan saran bergotong-rojeng untuk pembinaan Asia Timur Raya, pengawalan negeri dengan bogodan dan seinendan ditambah lagi dengan krisis ekonomi, sangat membahayakan kehidupan madrasah-madrasah jang masih sanggup bertahan. Ulama-ulama jang selama ini telah terpetjah belah dengan hasutan kaki tangan pendjadjah Belanda, telah sama melihat bahaya besar jang mengantjam, jaitu politik Djepang jang hendak memutar kiblat kaum Muslimin ke Tokio. Mereka bersatu padu mempertahankan agama jang sutji bergabung dalam perkumpulan Madjlis Islam Tinggi tahun 1944 dikepalai oleh Sjech Sulaiman Ar Rasuli Tandjung. Untuk memelihara pendidikan anak-anak belaka. Hanja diizinkan mengadakan sekolah Awwalijah petang hari untuk murid-murid S.R. Dan pada bulan Djuli 1944 itu, M.I.T. telah mengadakan latihan Pengawas Sekolah-sekolah Islam lamanja sebulan bertempat di Padang, jang langsung ditugaskan memelihara dan memimpin Madrasah didaerahnja masing-masing.

Madrasah dizaman Merdeka.

Proklamasi kemerdekaan meminta tenaga pemuda sebanyak-banyaknja. Alim ulama, guru-guru Agama sampai kepada peladjar-

peladjar sekolah agamanya merupakan tenaga penggerak semangat perang sabil, mempertahankan hak bangsa, tanah air, dan agama dari serangan-serangan Belanda jang hendak mendjadjah kembali. Dari pada mereka dan lainnja terbentuk barisan-barisan perjuang.

1. Hizbullah, diantara pemimpinnja Agus Salim Nurai dari Kull. Muballighin.

2. Sabilillah diantara pemimpinnja Anwar Muin dari Training College.

3. Lasjmi, diantara pemimpinnja Sofjan Siradj dari Perti.

Peladjar-peladjar wanitapun tak ketinggalan dengan mengga-bungkan diri kepada barisan-barisan perjuang seperti:

1. Sabil Muslimat diantara pemimpinnja Sjamsiah Sjam dari Kull. Muballighat.

2. Lasmiat dari Perti.

Mereka sama meninggalkan madrasah. Malahan banjak djuga jang masuk Tentera Republik Indonesia.

Banjak sekolah-sekolah dan Madrasah-madrasah jang terpaksa ditutup. Lebih-lebih disebabkan gangguan keamanan didaerah pertempuran. Diantaranja Sekolah Islamic College di Padang dan Normal Islam dipindahkan ke Bukittinggi dengan nama jang baru „Sekolah Menengah Islam singkatnja S.M.I. tingkat I dan II (S.M.A.I.) jang kemudian oleh menteri Agama didjadikan S.G.H.A. kepunjaan negeri dengan surat ketetapannja tanggal 13 Pebruari 1950 No. 6. Pendek kata disamping tenaga-tenaga jang lain madrasah telah dapat memberikan dharma baktinja dalam menghadapi serangan-serangan Belanda dalam agresi pertama dan kedua.

Untuk mengatur kembali madrasah-madrasah jang sangat dibutuhi masyarakat itu, maka Menteri Agama a.i. P.D.R.I. jang ditanda-tangani oleh Mr Tk. M. Hasan, telah menetapkan peraturan tentang susunan Sekolah Agama tanggal 20 Djuni 1949, No. K.A./Pn.

Dalam peraturan ini telah ditetapkan tiga tingkatan sekolah-sekolah Agama:

- a. Bahagian Ibtidaijah Raqijah atau S.M.P.I. (4 tahun).
- b. Sanawijah atau S.M.A.I. (4 tahun).
- c. Djamijah (University) (4 tahun).

Kedalam rentjana tingkatan sekolah-sekolah tersebut, selain peladjaran Agama dan bahasa Arab dimasukkan djuga peladjaran umum, jang dasarnya sama dengan peladjaran sekolah landjutan Negeri bahagian A.

Dengan dasar peraturan tersebut diatas oleh Djawatan Agama Sumatera Tengah bulan Mei 1950, telah ditetapkan rentjana

Peladjaran S.M.P.I. dan S.M.A.I. dengan perbandingan peladjaran:

1. S.M.P.I. peladjaran Agama $\pm 40\%$, umum $\pm 60\%$.
2. S.M.A.I. peladjaran Agama $\pm 30\%$ umum $\pm 70\%$.

Andjuran mendirikan S.M.P.I. disampaikan ketiapi-tiap Kabupaten diseluruh Sumatera Tengah, jang mana mendapat sambutan jang hangat ditiap-tiap daerah mendjadi pembijtaraan pada sidang-sidang pleno D.P.R.K. Dalam sedikit waktu terdirilah S.M.P.I.-S.M.P.I. pada banjak Kabupaten-kabupaten. Ada jang didirikan baru, ada pula pendjelmaan dari Madrasah-madrasah jang telah ada. Sampai sekarang berdjumlah 42 buah diseluruh Sumatera Tengah.

Kesulitan terasa kekurangan tenaga guru-guru jang akan memberikan peladjaran umum. Untuk ini oleh Djawatan Agama Sumatera Tengah, telah diadakan latihan untuk guru-guru S.M.P.I. selama 6 bulan, mulai tanggal 1 April 1950, jang diikuti oleh 40 orang guru-guru keluaran Sekolah Menengah Islam. Amat sajang kekurangan tenaga ini belum dapat dipenuhi setjukupnja.

Kesulitan jang lain terletak pada kelemahan keuangan sekolah-sekolah Agama. Bantuan jang diberikan Pemerintah belum memenuhi keperluan. Peraturan Menteri Agama No. 1, tahun 1946 dan No. 2 tahun 1948, telah menetapkan Peraturan Pemberian Bantuan Madrasah dan diubah dengan Peraturan Menteri Agama No. 7/52.

Berdasarkan Peraturan ini telah dapat diberikan bantuan kepada Madrasah:

Tahun 1950 kepada 601 Madrasah sebanjak	Rp. 165.000,—
Tahun 1951 kepada 762 Madrasah sebanjak	„ 457.210,—
Tahun 1952 kepada 804 Madrasah sebanjak	„ 500.700,—

Sampai achir tahun 1952, telah dapat ditjatat adanja Perguruan Kuran dan Madrasah-madrasah diseluruh Sumatera Tengah sebagai daftar terlampir. Selain dari itu, Kementerian Agama telah berkesempatan pula untuk mendirikan Sekolah Pendidikan Guru Agama dengan singkat P.G.A. sebuah pada tiap-tiap keresidenan dan sebuah Sekolah Guru dan Hakim Agama dengan singkat S.G.H.A. untuk mendidik tjalon guru Agama buat Sekolah/ikatan dinas.

P.G.A. dengan rentjana 5 tahun disediakan untuk mendidik tjalon guru-guru Agama buat S.R. dan Madrasah Rendah, sedang murid-murid jang diterima tamatan S.R. buat kelas I, dan tamatan Madrasah Landjutan Pertama S.M.P. buat kelas IV.

S.G.H.A. untuk mendidik tjalon guru Agama buat Sekolah/Madrasah Landjutan Pertama dan Hakim Agama. Peladjar-peladjar diterima dari tamatan Madrasah Landjutan Pertama/S.M.P.

P.G.A. Padang untuk murid-murid dari Sumatera Barat dibuka mulai tanggal 1 September 1951, dikepalai oleh H. Maani Saleh.

P.G.A. Tandjung Pinang untuk murid-murid dari Keresidenan Riau dibuka mulai tanggal 1 Desember 1951 dikepalai oleh Imam Sujono. Sedang P.G.A. untuk Keresidenan Djambi tengah dalam persiapan.

Dan S.G.R.A. di Bukittinggi adalah pendjelmaan dari S.M.I. terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1951 dengan Direktornja H. Bustami Abd. Gani.

Kesimpulan:

Banyak perguruan Quran, murid-murid dan guru-guru yang sudah belum dapat bantuan pada tiap-tiap Kabupaten dalam Propinsi S. Tengah tahun 1952 (sampai 1 Djuli 1952).

No.	Kabupaten	Perguruan Quran		
		Sekolah	Murid	Guru
1.	Agam	2.181	11.838	365
2.	Tanah Datar	771	25.456	670
3.	L. Kota	125	5.782	253
4.	Pasaman	384	2.384	84
5.	Swl. Sidjundjung	235	8.945	289
6.	Solok	610	21.385	579
7.	Padang Pariaman	347	15.543	417
8.	Ps. Kurintji	328	7.930	328
9.	Kampar	200	10.541	237
10.	Inderagiri	34	1.575	46
11.	Bengkalis	56	703	56
12.	Kepulauan Riau	261	21.337	261
13.	Merangin	75	—	—
14.	Batang Hari	—	—	—
D j u m l a h		3.644	133.299	3.585

Kesimpulan:**Banjak sekolah Rendah.**

No.	Kabupaten	Sekolah Rendah		
		Sekolah	Murid	Guru
1.	Agam	45	2.100	100
2.	Tanah Datar	36	2.528	250
3.	L. Kota	18	1.141	49
4.	Pasaman	39	6.460	367
5.	Swl. Sidjundjung	62	4.410	32
6.	Solok	29	4.763	102
7.	Padang Pariaman	59	4.392	177
8.	Ps. Kurintji	37	1.756	78
9.	Kampar	80	6.936	207
10.	Inderagiri	51	3.917	112
11.	Bengkalis	50	3.164	65
12.	Kepulauan Riau	19	1.551	33
13.	Merangin	19	790	68
14.	Batang Hari	31	3.533	122
D j u m l a h		575	47.441	1.762

Kesimpulan:**Banjak Sekolah Landjutan Pertama.**

No.	Kabupaten	Sekolah Landjutan Pertama		
		Sekolah	Murid	Guru
1.	Agam	42	2.234	196
2.	Tanah Datar	47	5.416	243
3.	L. Kota	27	2.998	191
4.	Pasaman	10	463	25
5.	Swl. Sidjundjung	9	529	32
6.	Solok	26	1.772	78
7.	Padang Pariaman	16	1.310	64
8.	Ps. Kerintji	22	1.095	82
9.	Kampar	4	251	12
10.	Inderagiri	9	702	29
11.	Bengkalis	3	509	13
12.	Kepulauan Riau	2	208	6
13.	Merangin	1	348	11
14.	Batang Hari	3	976	59
D j u m l a h		2.221	18.820	1.041

Kesimpulan:

Banjak sekolah Landjutan Atas, pada tiap-tiap Kabupaten dalam daerah Propinsi Sumatera Tengah tahun 1952 (sampai 1 Djuli 1952).

No.	Kabupaten	Matjam Perguruan		
		Sekolah	Murid	Guru
1.	Agam	2	210	16
2.	Tanah Datar	5	500	30
3.	L. Kota	1	128	14
4.	Pasaman	—	—	—
5.	Swl. Sidjundjung	—	—	—
6.	Solok	—	—	—
7.	Padang Pariaman	—	—	—
8.	Ps. Kerintji	—	—	—
9.	Kampar	—	—	—
10.	Inderagiri	—	—	—
11.	Bengkalis	—	—	—
12.	Kepulauan Riau	—	—	—
13.	Merangin	—	—	—
14.	Batang Hari	—	—	—
D j u m l a h		8	838	60

Kesimpulan:

Banjak Perguruan Quran, Madrasah-madrasah, serta Murid-murid dan guru-guru rendah/landjutan pertama pada tiap-tiap Kabupaten dalam daerah Sumatera Tengah tahun 1952 (sampai 1 Djuli 1952).

No.	Kabupaten	Perguruan Quran		
		Guru	Murid	Sekolah
1.	Perguruan Quran	3.644	133.299	3.585
2.	Sekolah Rendah	575	47.441	1.762
3.	Sekolah Landjutan Pertama	221	18.820	1.041
4.	Sekolah Landjutan Atas	8	838	60
D j u m l a h		4.448	200.398	6.448

Pasal 52.

KESEHATAN.

PADA waktu zaman pemerintahan Hindia Belanda, kesehatan rakyat kurang dapat perhatian dari pemerintah. Pendirian rumah-rumah sakit, hanya dilakukan dikota-kota dimana bangsa Belanda berdiam.

Pada waktu dekat perang dunia ke-II, pemerintah mulai merasakan pentingnja kesehatan rakyat, terutama untuk kesehatan para pegawai-pegawainja dan untuk kepentingan perang jang mungkin dihadapinja.

Diwaktu pendudukan Djepang, kesehatan rakyat boleh dikatakan tak sedikit djuga dapat perhatian, semua dokter-dokter dan mantri-mantri diserahkan militer Djepang. Obat-obat disimpan dan dikuasai oleh tentera. Rakyat dibiarkan sadja menderita bermatjam-matjam penyakit. Tak heran diwaktu permulaan proklamasi, ikatan organisasi tjara melakukan tugas tidak didapati lagi. Keadaan rumah-rumah sakit mengetjewakan, alat-alat perkakas sudah tidak ada lagi. Disebalik itu, keadaan kesehatan rakyat menguatirkan, terutama disebabkan oleh kekurangan makanan, pakaian dan kebersihan.

Walaupun keadaan demikian, dengan bersangsangsur-angsur Djawatan Kesehatan mulai disusun kembali, mantri jang sudah berpindah kerdja kebagian lain dipanggil satu persatu. Rumah-rumah Sakit jang berada didaerah Kabupaten dan kewedanaan, dibuka.

Kepada para dokter ditugaskan kembali antaranja mengadakan pengobatan jang tetap pada rumah sakit dan poliklinik-poliklinik serta mengawasi setiap waktu penyakit rakyat dan penyakit menular, dengan mengadakan penjurukan umum, pembasmian malaria dan lain-lain.

Diwaktu clash ke-II, oleh para dokter jang ikut bersama Pemerintah bergerilja dipegunungan-pegunungan, tetap diadakan pengobatan dan pengawasan terhadap penyakit rakyat. Para dokter-dokter dan mantri djururawat selalu memberikan tuntunan dan petunjuk kepada organisasi-organisasi, demikianpula Palang Merah Indonesia, dan Badan-badan Penolong Pertama Pada Kertjelakaan, tentang tjara-tjara melakukan perawatan terhadap korban-korban pertempuran dan penembakan dari pihak Belanda.

Sesudah Pemulihan Kota-kota.

a) Curatief = Pengobatan.

Sesudah penjerahan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia, Djawatan Kesehatan banjak sekali menemui kesulitan-kesulitan dan mengalami kerusakan-kerusakan disegala bagian-bagiannya, terutama kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pertempuran dengan Belanda, sehingga mengakibatkan banjaknya kerusakan Rumah-rumah Sakit dan Balai-balai Pengobatan, yang menjebabkan sebahagian besar dari rakjat, tidak mendapat pertolongan yang sewadjarnya. Apabila ditahun itu perhubungan-perhubungan banjak yang terputus, oleh karena obat-obat dan alat-alat serta tenaga-tenaga yang diperlukan amat sukar didatangkan ketempat-tempat yang dianggap perlu; begitu pula dengan susunan pegawai-pegawai dan perlengkapan materil, belum lagi tersusun sebagai yang diharapkan. Dalam keadaan yang sedemikian timbullah perubahan-perubahan besar disegala lapangan, begitu juga anggaran Djawatan Kesehatan tidak pula luput dari padanya, sehingga lebih menjulitkan lagi bagi segala lapisan rakjat, untuk melantjarkan dan melaksanakan tjara-tjara hidup yang kita katakan sehat.

Beralasan dari apa yang tersebut diatas tadi, maka timbullah dikalangan rakjat kita bermatjam-matjam penjakit.

Jang terbanjak kelihatan diantara penjakit-penjakit ini sampai sekarang, ialah:

I. *Malaria.*

Di Sumatera Barat sadja tidak kurang dari 15% yang menderita penjakit *malaria ini*. Dilain-lain Daerah, kita berkejakinan akan lebih tinggi lagi dari ini, sebab daerah ini lebih dekat pada pesisir dan lebih banjak mempunjai tanah-tanah yang berawa-rawa.

Pada achir tahun 1950 di Kabupaten Padang/Pariaman (daerah Sumatera Barat) sudah dimulai mengadakan pemberantasan penjakit malaria. Pun didaerah lain djuga sudah dimulai pula dengan tjara berangsur-angsur satu demi satu daerah, mana yang dianggap perlu.

RIAU. Dalam tahun 1951 di Kabupaten Inderagiri (Rengat) sudah mulai pula diadakan pemberantasan penjakit malaria, dengan mempergunakan minjak solar dengan menempatkan ketempat-tempat yang kedapatan uget-uget (bahan malaria), serta menimbun tempat-tempat yang airnya tidak mengalir. Djuga membikin parit-parit baru dimana-mana yang dianggap perlu.

Dalam tahun 1951 didaerah ini tidak kurang dari 12.7% penduduk jang mengandung hama malaria, dan diantaranya 940 orang jang dihinggapai penjakit malaria jang keras sekali. DJAMBI. Hampir sama dengan Riau keadaannja.

II. *Framboesia (Patek)*.

Diseluruh daerah ini memang banjak sekali kelihatan. Didaerah Sumatera Barat sadja tidak kurang dari 10½% jang dihinggapai oleh penjakit ini. Dikabupaten Padang/Pariaman sudah dimulai mengadakan pemberantasan penjakit ini dengan tjara teratur semendjak bulan Mei 1951, jang diselenggarakan oleh saudara Dr. Basjaruddin, dengan menurut sistem dari Dr Kodiat, dengan bantuan Unicef.

Usaha-usaha ini dalam tahun 1952 dilandjutkan terus.

III. *Ulcus tropicum*. (Suatu penjakit kulit jang lazim disebut tukak).

Penjakit ini banjak sekali kelihatannja dimana-mana dalam daerah Propinsi Sumatera Tengah ini.

Usaha-usaha pemberantasannja setjara istimewa, belum lagi ada, hanja orang-orang sakit ini diobati dan dipelihara ditiap Rumah Sakit dan Balai-balai Pengobatan.

Penjakit ini timbulnja ditempat-tempat jang djauh letaknja dari kota, sehingga kadang-kadang hampir tidak terpelihara lagi kelihatannja, sampai menjebabkan penjakit itu sampai bertahun-tahun baru sembuh.

IV. *Anchylostomiasis* (penjakit tjatjing tambang).

Penjakit ini banjak kelihatan pada penduduk-penduduk jang djauh dari kota-kota dan tepi pantai jang hidupnja tidak menurut aturan-aturan Hygiene djuga ditambang-tambang.

Pemberantasan setjara teratur belum lagi ada, akan tetapi sisakit diobati dan dirawat di Rumah-rumah Sakit dan Balai-balai Pengobatan.

V. *Wormziekten* (penjakit tjatjing anak-anak).

Hampir sebahagian besar anak-anak kita jang masih dibawah umur mempunjai penjakit tjatjing ini. Pemberantasan jang tertentu untuk ini belum lagi ada, hanja sisakit ditolong di Rumah-rumah Sakit dan Balai-balai Pengobatan.

VI. *L e p r a* (penjakit kusta).

Dimana-mana didaerah ini banjak sekali kelihatan, lebih-lebih diluar daerah Sub. Inspektur Kesehatan Sumatera Barat

ini, kadang-kadang orang jang menderita penjakit ini tidak mau melapurkan dirinja, sebagai berpenjakit jang tidak disenangi itu. Sekarang ini telah ditundjuk seorang Menteri Djururawat jang semata-mata diberi tugas untuk memeriksa keadaan-keadaan penjakit kusta di Sumatera Barat dan memberi obat.

Dalam tahun 1951 ini, dengan kerdja sama dengan instansi-instansi lain-lain, maka semakin djelaslah nampaknja, dimana-mana penjakit itu timbul dan menular, sehingga Djawatan Kesehatan dapat melaksanakan kesehatan rakjat dengan lantjar dan teratur sebagaimana jang kita harapkan.

Dan dari itu kesehatan rakjat umumnja, ada baiknja kalau dibandingkan dengan tahun-tahun jang lalu. Pada achir tahun 1952, sudah diterima dan dipekerdjakan disini 13 orang dokter bangsa asing, untuk membantu mengusahakan Kesehatan Rakjat dalam arti jang sebenarnya.

Dokter-dokter ini telah ditempatkan didaerah-daerah di Propinsi Sumatera Tengah, jakni:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Batu Sangkar. | 7. Muara Tebo (Djambi). |
| 2. Solok. | 8. Bagan Siapi-api. |
| 3. Padang. | 9. Selat Pandjang. |
| 4. Pariaman. | 10. Djambi. |
| 5. Sawah Lunto. | 11. Bengkalis. |
| 6. 2 orang di Painan. | 12. Bukittinggi (Dr. gigi). |

b) Preventief. (Pentjegahan didaerah dan dilaut).

Usaha-usaha dilapangan ini dalam tahun 1951 terus digiatkan sebagaimana mestinja.

- a. Pemberantasan dan pemeriksaan dipelabuhan-pelabuhan, tentang kemungkinan adanja penjakit menular, *dikapal-kapal laut* dan kapal-kapal udara terus dikerdjakan.

Untuk ini sudah ditundjuk saudara-saudara jang tersebut dibawah ini:

1. di Padang (Teluk Bajur) saudara Dr. Roemawi, sebagai penielenggara dipelabuhan ini, disamping tugas sebagai dokter Rumah Sakit Umum Megawati di Padang.
2. di Pakan Baru diselenggarakan oleh saudara Dr Iljas Dt. Batuah, disamping tugas dan pekerdjaan sebagai dokter Keresidenan.
3. di Tandjung Pinang, saudara Dr. Tjia Su Piauw, disamping pekerdjaan sebagai Kepala Djawatan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Riau, ditundjuk sebagai dokter pelabuhan dilaut dan diudara.

U d a r a.

1. Pelabuhan Kapal Udara di Tabing (Padang) saudara Dr. Roesma disamping pekerjaan sebagai dokter partikular di Padang.
2. Pelabuhan udara di Pakan Baru, saudara Dr. Iljas Dt. Batuah disamping pekerjaan sehari-hari.
3. Pelabuhan udara di Djambi, saudara Dr. Hoesin Siagian disamping pekerjaan sebagai dokter keresidenan.

Pemberantasan penjakit menular jang termasuk dalam Quarantaine Epidemie Ordonnantie, terus didjalankan sebagaimana biasa, dan dalam tahun 1951 ini, sudah banjak berkurang dan tidak kedengaran lagi timbulnja wabah-wabah jang berdjangkit didaerah ini.

Pendidikan Kader-kader Kesehatan.

Satu dari beberapa banjak usaha Djawatan Kesehatan, menudju kepada kesempurnaan pendjagaan kesehatan rakjat, adalah ihtiar untuk memperbanjak tenaga-tenaga ahli kesehatan, dari jang rendah, menengah, sampai jang tinggi.

Harus diingat bahwa sudah mendjadi urgensi program oleh Djawatan Kesehatan, djelasnja di Sumatera Tengah, untuk mengadakan ditiap-tiap wilayah sekurang-kurangnya satu Balai Pengobatan, dipimpin oleh mantri djuru-rawat jang berdiploma dan berpengalaman, seorang bidan jang beridjazah, dan dua orang pembantu jang bersekolah pula.

Disamping itu diperlukan pula tenaga jang bergerak, masuk kampung keluar kampung mengundjungi rumah sisakit, sambil memberikan penerangan tentang tjara mendjaga kesehatan hingga djauh dari penjakit, perlunja berobat kepada dokter dan sebagainya, sehingga mereka mengetahui dengan jakin kelebihan dan keuntungan mereka pergi berobat kepada Balai Pengobatan jang dilakukan oleh Pemerintahnja dari pada pergi kerumah seorang dukun, jang sama sekali tidak ahli itu.

Dengan djalan begini tentulah kebanyakan orang jang sakit itu, akan dapatlah kiranja perawatan jang betul, obat jang tepat dan nasehat-nasehat jang berfaedah, diselenggarakan oleh seorang ahli, sehingga akan turunlah angka-angka jang menjedihkan, jakni jang menundjukkan banjaknja penanggungan malaria, penderita tbc. dan sebagainya.

Djumlah kematian anak-anak jang baru lahir kedunia, ibu-ibu jang mati karena bersalin, tentulah akan berkurang banjaknja. Untuk mentjapai tjita-tjita jang mulia ini, maka Djawatan Kesehatan Inspeksi Propinsi Sumatera Tengah telah dan akan mengadakan bermatjam-matjam Sekolah dan Kursus Kesehatan.

Disini akan dicitrakan hanya Sekolah dan Kursus Kesehatan yang dibuka sesudah Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda, terhadap negara kita. Sebelum itu usaha Pemerintah untuk membuka sekolah atau kursus tersebut hanya terbatas dengan menerima beberapa pemuda/pemudi kita sebagai murid-murid pendjaga orang sakit di beberapa Rumah Sakit, djuru-rawat di Sawah Lunto, bidan di Bukittinggi, dengan alat-alat yang serba kurang ketika itu, karena blokade Belanda.

Matjam-matjam Sekolah atau Kursus Kesehatan yang sampai akhir tahun 1952 telah dibuka oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Djawatan Kesehatan Sumatera Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Bidan khusus bagi pemudi-pemudi kita yang telah tamat dengan baik dari S.M.P. atau djuru-rawat wanita berdiploma dan telah berpraktek pula sekurang-kurangnya dua tahun. Lama sekolah 3 tahun. Buat Sumatera Tengah Sekolah Bidan ini baru ada 1 buah, bertempat di Rumah Sakit Umum Bukittinggi.
2. Sekolah Djuru-rawat untuk pemuda (i) kita yang telah menamatkan Sekolah Rakjat dengan beridjazah. Lama sekolah 4 tahun.

Sekolah djuru-rawat ini ada di Sawah Lunto, Bukittinggi dan di Padang. Dus baru 3 untuk Sumatera Tengah.

3. Pada tanggal 22 Desember 1952, bertepatan dengan Hari Ibu, di Bukittinggi telah dibuka pula Kursus Pengundjung Rumah, tertentu bagi pemudi-pemudi yang lepasan Sekolah Rakjat dengan beridjazah, lamanja kursus ini tjuma satu tahun.

Setamatnja mereka dari kursus, kepada mereka yang kebanyakan diambil dan datang dari wilayah-wilayah, diberi tugas untuk memberi pengertian kepada orang-orang dikampung, tentang kesehatan dan mendjaganya, mengundjungi rumah orang sakit dan sebagainya, dalam usaha untuk mendekatkan orang-orang kampung tersebut kepada Balai-balai Pengobatan dan Rumah-rumah Sakit yang disediakan oleh negara untuk mereka.

Dengan maksud yang sama dalam tahun 1953 ini, insjaallah, akan dibuka pula beberapa tempat Kursus Penolong Bersalin, satu kursus yang dalam tugasnja tak berbeda banyak dengan Kursus Pengundjung Rumah diatas, dan kini sedang diminta pula perhatian Pusat untuk mendirikan juga Sekolah **Asisten Apoteker** di Padang.

Itulah sekolah-sekolah dan kursus-kursus kesehatan yang telah ada dan yang akan dibuka oleh Djawatan Kesehatan Inspeksi Propinsi Sumatera Tengah, dalam usahanya untuk mendjaga Kesehatan Rakjat. Disekolah dan dikursus itulah anak-anak kita dididik setjara teori dan praktek, bagaimana merawat orang sakit, memeriksa dan

memberi nasehat tentang menjaga kandungan dan sebagainya, menolong perempuan bersalin, memberi petundjuk-petundjuk bagaimana menjaga dan menjusukan, serta memandikan bayi.

Mereka itulah kader-kader kesehatan yang dikeluarkan oleh sekolah dan kursus-kursus kesehatan Sumatera Tengah.

Selain dari mereka yang dididik dalam ilmu kesehatan di Sumatera Tengah ini, ada pula yang dikirimkan ke Djawa untuk mengikuti kursus-kursus kesehatan yang belum ada pada kita disini, umpamanya Kursus Penjelidikan Malaria di Djakarta, dua orang setiap tahun kursus. Untuk mengikuti Kursus Mantri Tjatjar di Bandung, dikirim pula dua orang tiap kursus baru dimulai.

Untuk mengikuti Kursus Djuru Penerangan Makanan yang dibuka bulan Djanuari 1953 di Djakarta, Sumatera Tengah mengirimkan 4 orang pemuda yang telah tamat dari S.K.P. dan beberapa orang ke Magelang untuk Sekolah Penjelidikan Hygiene.

Sekali dalam dua bulan, kita mengirimkan dua orang Bidan kl. I ke Djokjakarta untuk mengundjungi *Refresher Course* (Kursus Ulangan Bidan) yang berada dibawah pimpinan saudara *Dr. Soelianti*, yang telah berkundjung beberapa kali ke Sumatera Tengah, dengan maksud mentjari djalan dan menjampaikan tjara-tjara yang telah didapat dalam usaha menghadapi kebidanan dan kesehatan bayi.

Beberapa orang sudah menamatkan pula Kursus Pembasmian Penyakit Kusta di Djakarta, beberapa tenaga yang lain lagi sedang mengikuti Kursus Perawat Gigi di Djakarta, dan Kursus Perawat di Rumah Sakit Umum-Rantjabadak Bandung.

Tentangan Pendidikan Kesehatan didaerah Sumatera Tengah, maka dengan tudjuan agar tenaga-tenaga kesehatan itu diambil dan tersebar sama rata dari dan dalam Sumatera Tengah yang terdiri dari 3 daerah pula, ialah Sumatera Barat, Riau dan Djambi, maka mulai dari tahun 1953 ini, sudah ditetapkan perbandingan penerimaan murid untuk tiap-tiap Sekolah Kesehatan (Bidan/ Djuru-rawat) dari 3 daerah pula, ialah seperti 13; 5 dan 2, dengan lain perkataan untuk Sekolah Bidan diterima dari Sumatera Barat 13 orang, untuk Riau ditentukan 5 orang dan untuk Djambi 2 orang. Untuk Sekolah Djuru-rawat yang banjarknja 3 buah, tentu sadjalah djumlah tersebut mendjadi 3 kali lipat pula.

Demikianlah sedikit usaha dan ichtiar yang telah didjalankan oleh Djawatan Kesehatan Sumatera Tengah untuk mentjapai sebanjak mungkin kader-kader kesehatan, dengan hanja bertudjuan menjumbangkan tenaga untuk kepentingan rakjat.

Djumlah Dokter-dokter Pemerintah, bidan, perawat/djuru-rawat.
mantri tjatjar dan mantri malaria se Sumatera Tengah.

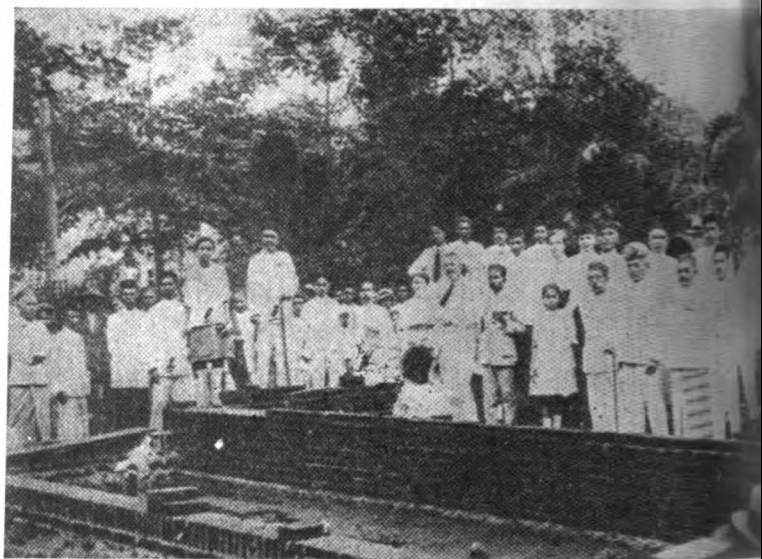
1. Dokter	=	33 orang.
2. Bidan	=	50 „
3. Perawat/Dj. Rawat	=	203 „
4. Manteri Tjatjar	=	52 „
5. Manteri Malaria	=	27 „

Djumlah Rumah-rumah Sakit/Balai-balai Pengobatan +
Dokter-dokter.

1. Kabupaten Agam	1. R.S.U. B. Tinggi	10 Balai Pengobatan.
		1. Dr. Nizar
		2. „ Riva'i.
		3. „ Auskarani.
		4. „ Sjahrial.
		5. „ Tan King Swie.
2. Kab. Tanah Datar	1. R.S.U. Bt. Sangkar 2. R.S.U. Padang Pandjang.	12 Balai Pengobatan.
	1. R.S.U. Pajakumbuh	10 Balai Pengobatan.
3. Kabupaten Lp. Kota	1. R.S.U.P. Pajakumbuh 1. Dr. Moezbar.	
4. Kab. Padang/Pariaman	1. Megawati. 2. Djambak. 3. Pariaman.	17 Balai Pengobatan.
		1. Dv. Ansevetto Ricchu (di Pariaman).
		2. „ Akam.
		3. „ S. Athos Ausrie.
		4. „ Roemawi.
		5. „ Giovam Garbarino.
5. Kabupaten Pasaman		10 Balai Pengobatan.
6. Kab. Solok/M. Labuh	1. R.S.U. Solok. 1. Dr. Alvredo Salvago. 2. „ M. Labuh	8 Balai Pengobatan.
7. Kab. Swl./Sidjundjung	1. „ Swl./Sidjundjung. 1. Dr. H. Basri Saanin.	11 Balai Pengobatan.
8. Kabupaten P.S.K.	1. „ Sei. Penuh.	11 Balai Pengobatan.
	1. Dr. Roezin.	

9. Kabupaten Kampar	1. „	Pk. Baru.	} 3 Balai Pengobatan.
1. Dr. Iljas.	2. „	Bangkinang	
	3. „	Pasir Pangaraian.	
10. Kab. Kep. Riau.	1. R.S.U.	Tg. Pinang.	} 12 Balai Pengobatan.
1. Dr. Tjia Soe Pia.	2. „	Tg. Balai. Penuba.	
2. Dr. Mas Hardadi.	3. „		
3. Dr. Haryono Hardjokoesoemo.			
11. Kab. Inderagiri	1. „	Rengat.	9 Balai Pengobatan.
1. Dr. Sutjipto.	2. „	Taluk.	
	3. „	Tembilahan.	
12. Kabupaten Bengkalis	1. „	Slt. Pandjang.	tidak ada.
1. Dr. O. Weidinger.	2. „	Bagan Siapi-api.	
	3. „	Siak Seri Inderapura.	
	4. „	Bengkalis.	
	5. „	Sei. Pakning.	
13. Kabupaten Merangin	1. „	M. Tebo.	10 Balai Pengobatan.
1. Dr. Med. J.W. Lutkemeyer.			
14. Kabupaten Batang Hari	1. R.S.U.	Djambi.	7 Balai Pengobatan.
1. Dr. Amir Siagian.			
2. Dr. F.Y.L. Dhome.			
R.S.U. Painan	=	1. Dr. E.A. Zimmermann.	
		2. Dr. M. Zimmermann Matzenauer.	
„ Bagan Siapi-api	=	1. Dr. G.E.R. de Smet.	
„ Selat Pandjang	=	1. Dr. W.R.O. Ertel.	
„ Lb. Sikaping	=	1. Dr. T. Severin Nielsen t/b. di Bt. Sangkar.	
„ Bukittinggi	=	1. Dr. Med. H.D. Huang. t/b. di Sawah Lunto.	
		2. Dr. M.E.J. Thomas.	
Djawatan Frambusia Sumatera Tengah.	=	1. Dr. B. Basjaruddin.	
Inspektur Kesehatan Sumatera Tengah.	=	Dr. J. Datuk Moedo.	

Keterangan 30 buah R.S.U. Pemerintah.
129 „ Balai Pengobatan Pemerintah.
1 „ „ „ Maskapai (di Pulau Sumbu).



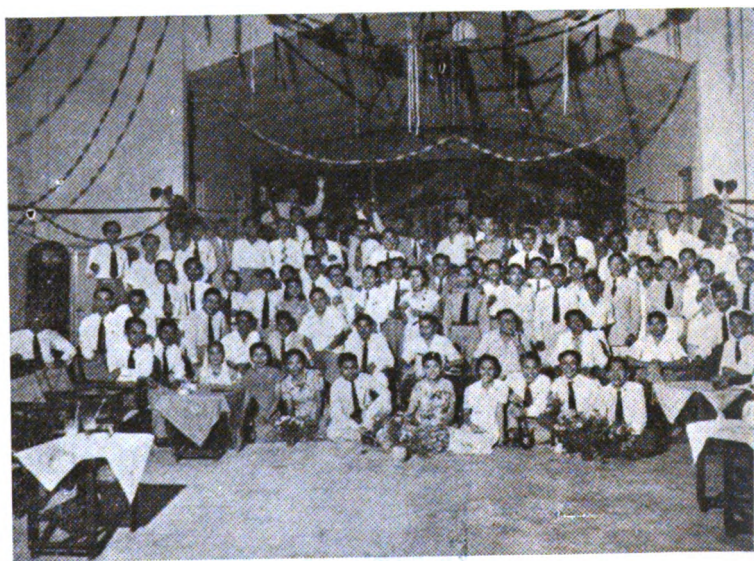
*Pendiri Sekolah Adabijah Padang berdiri No. 3
H. A. Ahmad.*



*Guru Sekolah Rakjat didaerah Painan dengan para
muridnja. Walaupun dengan berpakaian tjetana
pendek, dia tetap mendjalankan kewadjabannja
tahun 1946.*



*Tehnik Pertama mendapat kunjungan
P.J.M. Wk. Presiden Mohd. Hatta.*



Pertemuan pembukaan Sekolah Tinggi Pantjasila Padang.



Sesudah pemulihan, ruangan pendidikan jang baru mulai dibangun.



Sekolah Menengah djuga didirikan.



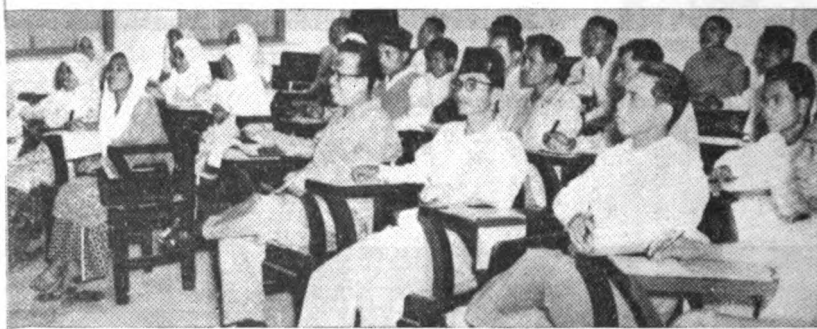
Anak-anak sedang asjik mendengarkan pelajaran dari gurunya.



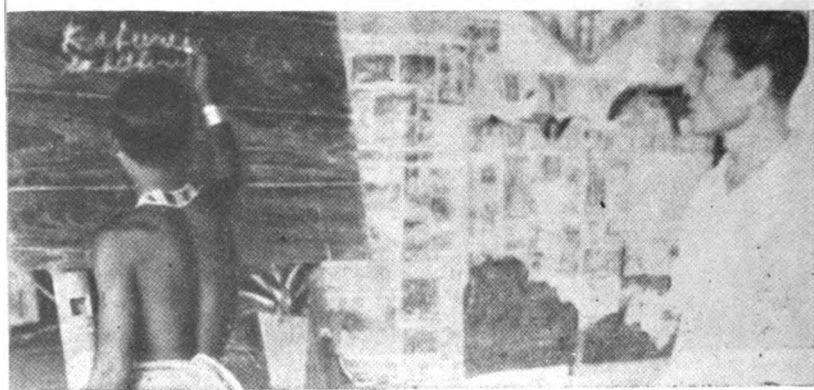
Sekolah Taman Kanak-kanak.



**Pemberantasan
huruf di Tjimp**



**Mahasiswa Sekolah
Tinggi Islam "Darul
Hikmah" Bukittinggi se-
dang mendengarkan ru-
liah.**



**Mereka yang di-survei
sedang dilatih disekolah
„pandai menulis“.**

*drasah Dinijah Pasir,
cittinggi, waktu pe-
an Chatam Quran.*

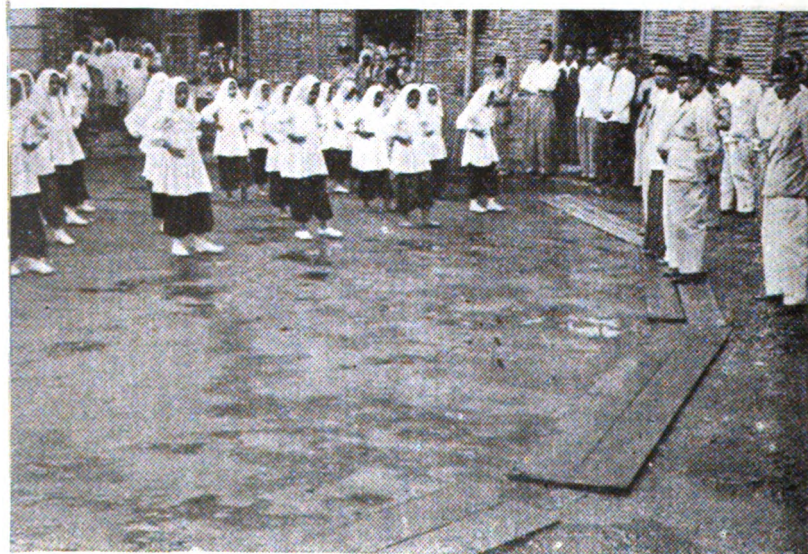


*ladjar M.I.N. Padang
andjang jang dipimpin
eh alm. Adam B.B. se-
ang beladjar musik.*



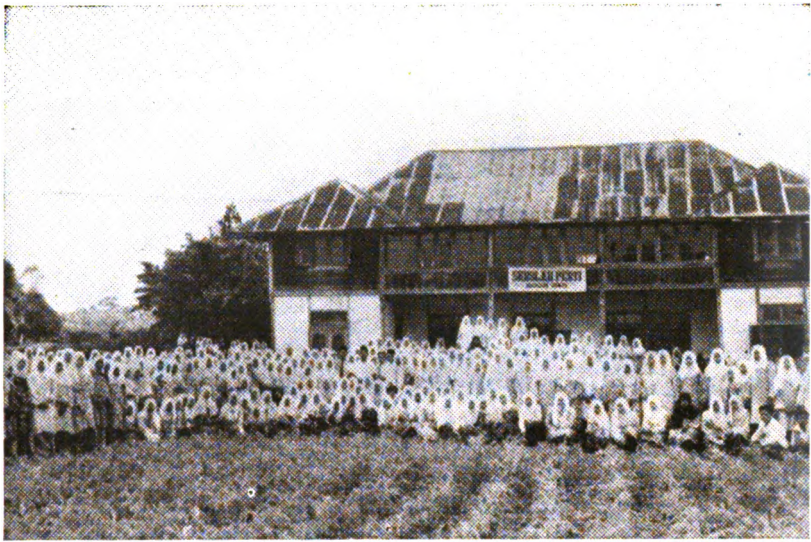


Keradjinan tangan ga diadjarkan pada Sekolah Agama dan dapat perhatian P.J.M. Presiden Soekarno.



Gerak badan djuga di-pentingkan pada Sekolah Agama. Demonstrasi gerak badan dari pe-ladjar. disaksikan oleh P.J.M. Wk. residen Mohd. Hatta

ah „Perti” Beng-
 i, Bukittinggi jang
 pin oleh Rangkajo
 Samsijah.



otong-rojong men-
 an Asrama jatim
 oleh Aisijah di
 o Selajan Bukit-
 tinggi.





Berita-berita radio sangat diperlukan diwaktu masa darurat.

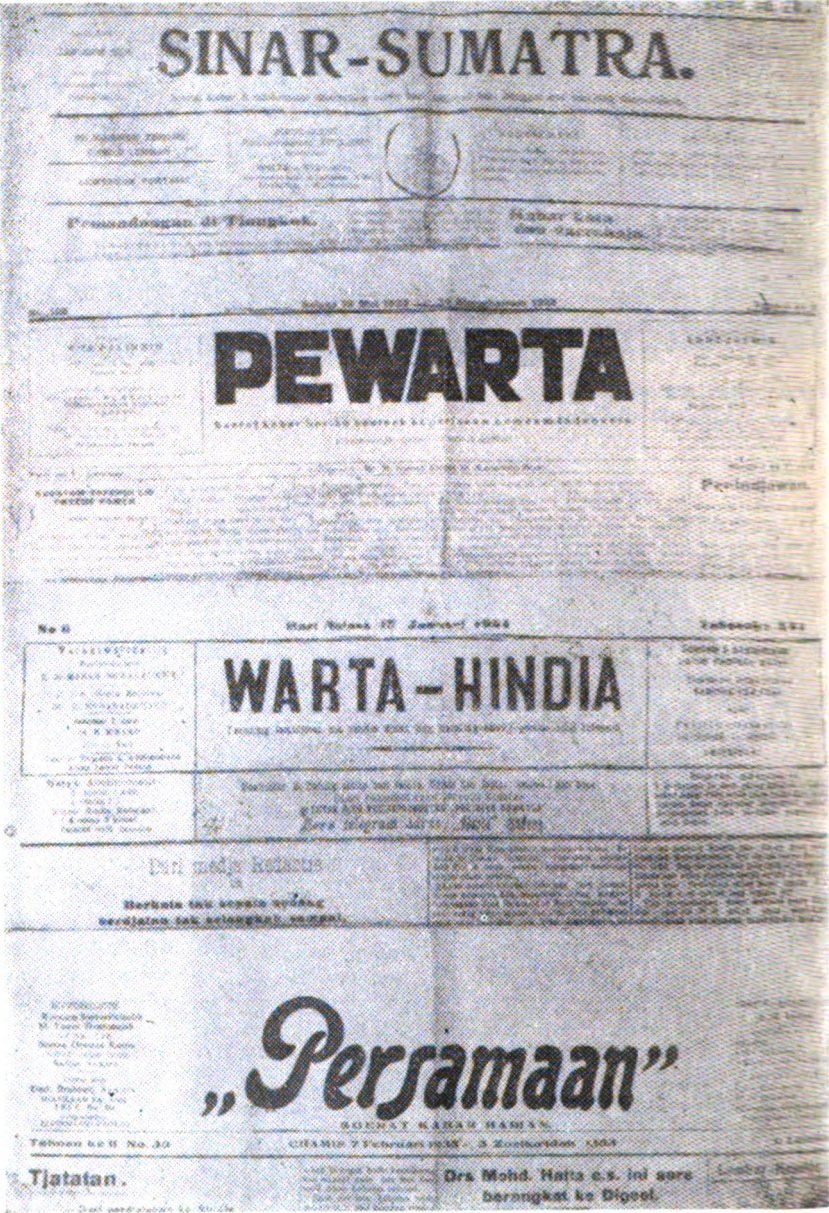
Pemantjar yang berdjasa waktu zaman P.D.R.I. sedang diperbaiki.



Staf „Kedaulatan Rakjat”. Ditengah nampak Adinegoro.



Rumah Sakit Umum Bukittinggi: Diza-man pertempuran besar peranan dan djasanja.



Harian-harian diatas banjak djasanja dalam memperkembang hasrat dan ke-tjerdasan rakjat Sumatera Tengah dizaman sebelum perang dunia ke-II.

BAB 5
KEBUDAJAAN

BAHAGIAN IX

DI MINANGKABAU

Pasal 53.

**MASJARAKAT DAN KEBUDAJAAN ALAM
MINANGKABAU**

BILA orang melihat bangunan-bangunan tempat-kediaman (rumah adat) di Sumatera Barat, jang bagian atapnja dihiasi dengan empat buah gondjong (puntjak) jang runtjing mendjulang langit; melihat wanita-wanita atau gadis-gadis berpakaian serba hitam serba longgar, lengan dan lehernja berhiaskan sulaman benang keemasan, sarung dan selendang jang sangat kaja dengan ukiran-ukiran urai, bertengkuluk (tutup kepala) jang pada udjung kiri-kanannja diruntjingkan sebagai djuga dengan gondjong rumah tempat kediaman mereka dan diberi dengan perhiasan-perhiasan jang serba keemasan pula; melihat laki-laki separuh baja berpakaian serba hitam, berbadju dan bertjelana longgar, dikepalanja terlilit sehelai destar jang seluruh pinggirnja disulami dengan benang emas, dipinggangnja melilit sehelai sarung hitam jang berbentuk dengan segi tiga, terkadang mereka mengepit seekor ayam djantan sabungan (djago) atau mendjindjing sangkar burung ketitiran (perkutut) atau burung balam dan pujuh, dan terkadang menjandang sebatang tombak dan menjeret seekor andjing perburuan, orang akan berkata: „Itulah Minangkabau”.

Itulah sebahagian diantara penambat mata diantara banjak pemandangan-pemandangan tjantik jang menghiasi alam Minangkabau, terutama pada mata dan pandangan orang-orang jang melihatnja dari pinggir djalan, atau bagi mereka jang mendapat kesempatan untuk mengundjungi daerah ini sesaat singkat. Di Minangkabau orang tidak sadja akan kagum melihat pemandangan-pemandangan tjantik disekitar gunung-gunung Merapi, Singgalang, Tandikat, Ophir dan lain-lain, melihat danau-danau dan lembah-lembah jang terdapat dimana-mana, tapi orang djuga akan kagum mempersaksikan bawaan dan adat kebiasaan penduduknja jang sangat teguh berpegang kepada adat-istiadat jang sudah beratus tahun mereka pusakai dari nenek mojang mereka.

Tapi „keistimewaan” Minangkabau sebenarnja tidaklah terletak pada apa jang dapat dilihat dengan mata semata, karena sebahagian terbesar diantara jang harus di„kagumi” itu terletak dilubuk hati rakjatnja dan jang hanja dapat diselami dengan hati pula.

Bila orang sudah mengetahui dimana „rahasia” alam Minangkabau itu, barulah orang akan bisa menempatkan masjarakatnja pada tempat jang tepat bagi mereka, dan barulah orang akan tahu kenapa mereka sangat teguh berpegang kepada „tradisi-tradisi” kuno itu, jaitu tradisi-tradisi jang masih tetap berpegang dengan kuat pada dasar-dasarnja jang lama.

Uraian dibawah ini merupakan „selaman” sesaat pendek kelubuk hati dan semangat masjarakat Minangkabau tersebut, jaitu sekedar untuk memperkenalkan „daja penarik” alam Minangkabau dengan serba singkat.

Pasal 54.

KASTA MINANGKABAU.

SEBELUM daerah ini dikenal dengan „Minangkabau“ sedjarah mengenalnja dengan sebutan „Keradjaan Melaju dipulau Andalas“. Keradjaan Melaju ini dikenal pada abad ke-12 dan kebesarannja memuntjak pada achir abad ke-13, jaitu sezaman dengan kebesaran keradjaan Singosari jang achirnja mendjelma mendjadi keradjaan Modjopahit itu.

Keradjaan Melaju dipulau Andalas ini banjak hubungannja dengan keradjaan jang pada waktu itu berkembang diseluruh Nusantara, dan dengan keradjaan-keradjaan asing diluar negeri dia djuga banjak dan kerap mengadakan perhubungan dalam dunia dagang dan persahabatan.

Mengenai sedjarah keradjaan Melaju ini jang dapat ditjatat dengan angka-angka sedjarah, jaitu sedjak kedatangan Tri Buana Raja Muli Warma Dewa kepusat keradjaan itu di Pariangan (Padang Pandjang), dimana dia achirnja dinobatkan mendjadi radja dengan sebutan daulat jang diperbuat Datuk Seri Maharadja Diradja.

Kedjadian ini berlaku pada tahun 1290. Dt. Seri Maharadja Diradja ini adalah wakil dari Radja Kartanegara dari keradjaan Singosari dipulau Djawa jang datang dengan maksud untuk menaklukkan keradjaan Melaju pulau Pertja. Tapi kedatangannja bersama dengan angkatan perangnja tidaklah disambut dengan permusuhan oleh rakjat, malah sebaliknja dia diradjakan disini serta digelar pula dengan „Nan Banago-nago“ (Jang bernaga-naga) oleh rakjat.

Pembesar keradjaan Singosari ini tidak kembali kepulau Djawa untuk mempersembahkan kemenangannja, tapi tinggal menetap disini sebagai penduduk asli jang sudah diradjakan.

Pada tahun 1293 Dt. Seri Maharadja Diradja kawin dengan salah seorang puteri dari Sang Sapurba (jang oleh rakjat disebut dengan Datuk Perpatih nan Sebatang), jaitu dengan Dewi Mambang Teruna, dan achirnja melahirkan seorang puteri jang diberi mereka nama dengan Dewi Kentjana (Dara Petak).

Pada tahun 1293 itu djuga Dt. Seri Maharadja Diradja kawin pula dengan salah seorang puteri dari Datuk Ketemanggungan (?) jang bernama Tuan Gadis Indo Djuita. Dari perkawinan ini lahir seorang puteri jang diberi nama dengan Dara Djingga (kemudian bernama „Bundo Kandung“).

Kedua puteri dari kedua orang isterinja itu dikirim oleh Dt. Seri Maharadja Diradja ke Keraton Singosari untuk dididik menurut tjara pendidikan orang-orang besar.

Di Singosari Dara Petak kawin dengan salah seorang pembesar keradjaan didalam Keraton jang bernama Karta Redjasa, mereka beroleh seorang putera jang diberi nama dengan Aditiawarman (Pan Datar), jaitu pada tahun 1318.

Sebelum itu, pada tahun 1311, Dara Djingga kembali kekeradjaan Melaju untuk menggantikan ajahnja. Tahun 1313 Dara Djingga jang disebut dengan „Bundo Kandung” (Ibu Sedjati) itu melahirkan seorang putera jang diberinja nama dengan Adji Mantrolo (Dang Tuanku), salah seorang peran jang sangat besar didalam hikajat „Tjindur Mato” jang sangat populer dikalangan rakjat Minangkabau.

Mulai pertengahan abad ke-14, Minangkabau berada dibawah pemerintahan seorang radja jang masih belia, bernama ADITYA-WARMAN. Dia datang dari pulau Djawa ke Minangkabau pada tahun 1345. Kedatangan bangsawan „asing” ini diterima dengan baik oleh rakjat karena didalam tubuhnya mengalir darah bangsawan keradjaan Melaju Minangkabau, jaitu dari pihak ibunya.

Dia tahu, bahwa kebudajaan Modjopahit dan kebudajaan Minangkabau berasal dari sumber jang sama, jaitu sama-sama datang dari Hindia bersamaan dengan masuknja agama Hindu kekepulauan Indonesia ini. Adjaran agama Hindu ini, jaitu membagi masjarakat itu mendjadi beberapa kasta, sangat berpengaruh kepada tjara pemerintahan keradjaan Modjopahit, jaitu seluruh kekuasaan dipegang oleh radja jang pada zaman ini biasa disebut „autocratie”. Dan systeem ini tampaknja mendjadikan Modjopahit mendjadi salah satu keradjaan jang terbesar didunia zamannja.

Tapi tidak demikian di Minangkabau. Keradjaan Minangkabau diperintahi menurut systeem „kata sepakat” dan susunan daerahnja merupakan susunan federasi (berpematang seperti sawah, dan bermentalak (berbatas) sebagai kebun). Menurut Adityawarman systeem seperti itu tidak memberikan kemadjuan jang diharapkan rakjat. Dan untuk membikin Minangkabau mendjadi suatu keradjaan besar, systeem Demokrasi itu harus segera ditukar dengan systeem autokrasi sebagai jang berlaku di Modjopahit. Dan untuk maksud itulah dia datang ke Minangkabau.

Sebagai diterangkan diatas tadi, kedatangannja diterima dengan baik dan kesudiannja untuk ikut memerintah negeri disambut dengan gembira.

Tapi tjita-tjitanja untuk mengubah bentuk pemerintahan itu mendapat tantangan besar dari rakjat, karena walaupun bagaimana djuga rakjat lebih menjukai „kata sepakat” (demokrasi). Karena terdapat pertentangan pendapat ini, maka oleh beberapa orang

pemimpin rakjat pada waktu itu, jaitu Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang jaitu orang-orang jang menegakkan dasar „kata sepakat” itu, ditarikan djalan tengah. Djalan tengah itu ialah:

Bukan masjarakat jang diberi berkasta, tapi alat pemerintahanlah jang harus bertingkat-tingkat, bertinggi berendah, tapi roda pemerintahan tetap berdjalan sebagai biasa.

Dengan djalan demikian, maka timbullah pangkat-pangkat baru didalam kalangan pemerintahan. Disamping „Penghulu”, diadakan pangkat bernama „Manti”, jaitu orang-orang jang akan mengurus perkara-perkara didalam kampung atau pesukuan.

Diadakan pula pangkat jang disebut dengan „Dubalang” jaitu jang bertugas untuk memelihara keamanan didalam kampung atau pesukuan itu. Disamping itu diadakan pula pangkat „Malin” jang bertugas untuk mengurus kepentingan sosial. Pemilihan dan pengangkatan ketiga djenis pangkat baru ini dilakukan oleh dan dari kalangan penghulu-penghulu dan orang-orang jang patut-patut. Kepada mereka diberikan pula gelaran „Datuk” dan pelantikannya dilakukan menurut adat, jaitu sesudah dilakukan pemotongan kerbau.

Sekarang terdapatlah empat tingkatan alat pemerintahan, jaitu Penghulu, Manti, Malin dan Dubalang. Dan dengan sendirinja maka terbukalah apa jang dikehendaki oleh Adityawarman dan ter- kabul pula kehendak rakjat, jaitu karena lahirnja keempat kasta jang tidak merugikan kepada kedua belah pihak itu.

Peraturan tersebut diatas mula-mula didjalankan didaerah Luhak Tanah Datar, kemudian di Luhak Kubung Tiga Belas. Achirnja menjusul Luhak Lima Puluh Koto. Tapi Luhak Agam tidak mau menerima, itulah sebabnja maka di Luhak Agam sampai sekarang tidak ditemui „orang jang 4 djenis” diatas.

Sekarang timbul pula soal lain jang tidak kurang pula pentingnja, jaitu soal penetapan kepala negara (radja). Sebelum kedatangan Adityawarman itu, Minangkabau tidak mengenal „radja”. Pemerintahan sehari-hari dilakukan oleh suatu dewan jang dibentuk oleh rakjat dan dikepalai oleh kedua orang ahli negara mereka, Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Rakjat sebenarnya djuga tidak mengingini adanja seorang radja, karena dengan djalan demikian maka hak-hak mereka akan berkurang, tapi Adityawarman harus mendjadi radja. Pemetjahan soal ini meminta perhatian jang sangat besar dari semua penghulu-penghulu dari ketiga Luhak itu.

Achirnja soal tersebut dapat djuga dipetjahkan oleh kedua orang Datuk jang sangat besar pengaruhnja itu.

Tjara pemerintahan itu diatur demikian:

Pertama: Adityawarman dilantik mendjadi radja untuk seluruh daerah perantauan alam Minangkabau, jaitu di Rantau Pasir Pandjang, Rantau Kuantan, Rantau Batanghari, Rantau Rokan, Rantau Kampar dan Rantau Pasaman. Disana dia diizinkan memungut serba matjam tjukai dan membikin peraturan sendiri. Djuga diizinkan untuk menegakkan „ubur-ubur gantung kemudi” (bendera kebesarannya).

Kedua: dalam daerah Luhak Nan Tiga, Adityawarman hanja diberi kekuasaan sebagai „orang tengah” (djuru pendamai) atau sebagai „Lambang Kesatuan” semata.

Disamping itu radja ini djuga diberi kekuasaan untuk memberikan „grasi” dan „rehabilitasi” kepada pembesar-pembesar didalam ketiga Luhak itu. Bila permintaan ampun ini diminta dengan djalan memohonkannya langsung ke-istana radja, maka jang diberi ampun itu dijadikan pegawai radja. Dengan djalan ini maka achirnja disekeliling istana radja itu berdirilah rumah-rumah dan bangunan-bangunan baru sehingga mendjadi sebuah kota.

Ketiga: Sebagai alat penghubung antara radja dengan Luhak. Laras, Negeri dan Pesukuan, ditanam sebuah Dewan jang diberi nama dengan „Basa Ampek Balai” (Besar Empat Balai). Anggauta-anggautanja terdiri dari: Tuanku Titah atau Bandaro di Sungai Tarab, Indomo di Saruaso, Machudum di Sumanik dan Tuan Kadi di Padang Ganting. Dan bila dipandang perlu, ditambah dengan jang kelima, jaitu Tuan Gadang di Batipuh selaku Panglima Besar.

Dewan inilah jang mengurus urusan pemerintahan Alam Minangkabau.

Keempat: Radja dan Basa Empat Balai tidak diperkenankan memasuki salah satu pesukuan karena mereka harus benar-benar merupakan orang tengah. Tapi mereka sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apa-apa diatas tiap-tiap daerah. Ini menjebakkan maka radja dan Besar Empat Balai itu tidak mempunyai tanah, suku dan tidak pula dapat diikat oleh suatu peraturan jang mengenai rakjat biasa.

Hal demikian berdjalan sampai beberapa abad lamanja, jaitu sampai kepada leburnja keradjaan Minangkabau seluruhnja, jaitu sampai pada permulaan abad ke-19 disaat berlangsungnja „revolusi” jang digerakkan oleh beberapa orang Ulama Agama Islam di Minangkabau, atau pada permulaan Perang Padri.

Radja Minangkabau jang paling achir, keturunan Adityawarman. Sultan Muding Alamsjah jang mangkat pada awal berlangsungnja Perang Padri ini bersama dengan „Besar Empai Balai”nja merupakan radja jang hampir sama sekali tidak mempunyai suatu kekuasaan apa djuga dan hanja dipandang dan dihargai hanja sebagai lambang Kesatuan semata. Dia dan pembesar-pembesarnja achirnja kembali ketengah-tengah masjarakat, jaitu dengan memilih Pesukuan.

Meskipun pada permulaan masa Pendjadjahan Belanda diseluruh Minangkabau (1837) kebesaran radja itu masih kelihatan, tapi kesan-kesan tersebut tidak berpengaruh apa-apa lagi.

Demikianlah alam Minangkabau dalam susunan ketata-negaraan nja pada perkisaran kebesarannja. Bekas-bekas systeem demikian masih berlaku dan dipegang erat diberbagai negeri sampai hari ini.

Pasal 55.

APAKAH MINANGKABAU ITU ?

MENGENAI perkataan dan sebutan „Minangkabau”, banjak definisi-definisi jang diberikan ahli sedjarah. Diantaranja ada jang mengatakan, bahwa perkataan itu berasal dari „Pinang” dan „Kerbau”, jang berasal dari suatu peminangan jang dilakukan oleh salah seorang radja Modjopahit terhadap anak (puteri) radja Keradjaan Melaju ini. Peminangan itu dilakukan dengan djalan mengantar beberapa ekor kerbau besar sebagai persembahan. Karena pinangan radja dari pulau Djawa itu diterima baik, maka keradjaan itu disebut dengan „Pinangkerbau” jang achirnja mendjadi „Minangkabau” jang didalam edjaan rakjat disebut dengan „Minangkabau”.

Difinisi lain menjatakan, bahwa perkataan tersebut berasal dari bahasa Singhala (Sailon) „Mau-Angka-Bahu” jang berarti „Berkuasa”.

Tapi rakjat sendiri mempunyai definisi jang lain pula, jaitu definisi jang paling terkenal dikalangan mereka.

Menurut tambo-tambo jang diturun temurunkan, perkataan „Minangkabau” itu berasal dari „Menangkerbau”, peninggalan dari suatu sedjarah kemenangan dan ketjerdikan pembesar-pembesar Minangkabau dalam mempertahankan keradjaannja dari pendjadjahan. Menurut hikajat itu, keradjaan Modjopahit ingin menaklukkan keradjaan Melaju dipulau Pertja tidak dengan kekuatan sendjata, tapi dengan ketjerdasan akal.

Untuk itu, utusan-utusan keradjaan Modjopahit datang menghadap pembesar keradjaan Melaju ini, dan menjatakan, bahwa keradjaan itu terpaksa harus mendjadi daerah takluk keradjaan Modjopahit, ketjuala bila para pembesar itu dapat menerka tiga buah teka-teki (sajembara). Usul ini diterima baik oleh pembesar-pembesar keradjaan Melaju karena memang keradjaan ini tidak mempunyai perlengkapan perang jang kuat.

Dua diantara sajembara itu dengan mudah dan tjepat dapat diterka oleh para pembesar keradjaan itu, jaitu menentukan djantan atau betinanja dua ekor burung jang sama besar, sama tjorak dan bentuknja, dan menentukan udjung dan pangkal sekerat kaju jang sama besar dan sama ukuran serta bentuknja.

Perlombaan ketiga jaitu mengadu kerbau jang sangat besar jang sengadja dibawa dari Modjopahit oleh para utusan itu. Untuk mengalahkan kerbau besar dari pulau Djawa itu, oleh para pem-besar keradjaan Melaju sengadja ditjarikan seekor kerbau jang masih erat menjusu kepada induknya. Kerbau ketjil ini beberapa hari lamanja dibiarkan puasa sadja. Pada hari jang ditentukan dihadapan chalajak ramai dilakukanlah pertandingan itu. Sebelum anak kerbau itu dilepaskan dari kandangnja untuk berhadapan dengan kerbau besar dari Djawa itu, lebih dahulu tengkungnja diberi berypenpen dari bambu, dan tanduknja diperuntjing dengan benda lain.

Demi kerbau ketjil ini melihat seekor kerbau besar dan karena sudah beberapa hari tidak menjusu, maka kerbau itu disangkanja induknya. Dengan tidak berpikir pandjang lagi, kerbau Modjopahit itu dikedjarnja untuk menjusu. Kedatangan dan serbuan kerbau ketjil itu nampaknja tidak diperhatikan oleh kerbau besar itu karena memang tidak lawannja. Karena kuatnja kerbau ketjil tersebut menjinduk-njindukan kepalanja jang diberi berpen keperut kerbau besar jang disangkanja induknya itu, achirnja tembuslah perut kerbau dari pulau Djawa itu dan mati.

Dengan demikian, maka terhindarlah keradjaan Melaju dari pendjadjahan keradjaan Modjopahit. Tapi mulai dari saat itu, nama keradjaan ini ditukar oleh rakjat dari „keradjaan Melaju dipulau Pertja“, mendjadi „Keradjaan Minangkabau“ sebagai peringatan atas kemenangan kerbau mereka.

Demikian menurut sedjarah jang diterima oleh para putera Minangkabau mengenai sebutan „Minangkabau“ itu jang berasal dari „Menangkerbau“.

Pasal 56.

DAERAH KERADJAAN MINANGKABAU.

MENURUT tambo Minangkabau, keradjaan Minangkabau dizaman djajanja meliputi daerah-daerah jang tersebut dibawah ini:

Sebelah selatan: Sampai ke „Riak Nan Berdebur” (negeri Bandar Sepuluh, Kab. Pesisir Selatan dan Kerintji sekarang).

Sebelah Timur : Sampai ke „Durian ditakuk Radja” (Batas Inderagiri dengan Sumatera Barat sekarang).

Sampai ke Muara Takung Mudik (negeri Alahan Pandjang sekarang),

Sekeliling gunung Merapi, selingkung gunung Singgalang.

Seedaran gunung Pasaman sampai ke Kilang Air Bangis (sebelah Barat).

Sampai ke Taratak Air Hitam (sebelah Barat).

Itulah daerah-daerah jang mendjadi wilajah keradjaan Minangkabau dahulunja. Tapi disamping daerah asal itu, keradjaan ini mempunjai daerah „rantau” (takluk) jang tjukup luas dan lebar. Adapun daerah „taklukan” itu menurut tambo berdjumlah tidak kurang dari 9 buah banjakknja, jaitu:

1. Kuantan (Inderagiri),
2. Siak Seri Inderapura,
3. Rao (Mandahiling),
4. Natal (Air Bangis),
5. Tiku (Pariaman),
6. Ranah Sungai Pagu (Alahan Pandjang),
7. Padang Pesisir Barat,
8. Tapan (Inderapura), dan
9. Djambi Sembilan Lurah.

Daerah keradjaan Minangkabau tersebut diatas, dalam zaman kebesarannja disebut dengan Alam Minangkabau.

Susunan Pemerintahan Alam Minangkabau.

Umum sudah mengetahui, bahwa orang-orang Minangkabau sampai pada masa ini sangat kuat berpegang kepada „adat lama, pusaka usang”nja. Adat lama dan pusaka usang itu tidak hanja

berlaku dalam lingkungan waktu melangsungkan upatjara-upatjara besar sadja, tapi kehidupan sehari-hari sangat berhubungan rapat dengan adat lama pusaka usang tersebut.

Semua tjara-tjara penghidupan dan pergaulan itu, merupakan suatu „code d'honneur” jang diikuti dengan patuh, meskipun tidak merupakan suatu Undang-undang jang tertulis.

Untuk mengetahui betapa pertautan masyarakat dengan „adat lama pusaka usang” itu, orang lebih dahulu haruslah mengetahui bagaimana tjara keradjaan ini diperintah dahulu.

Sebagai sudah diterangkan diatas tadi, sedjarah perkembangan keradjaan itu tertjatat mulai dari zaman Daulat jang dipertuan Datuk Seri Maharadjo Diradjo Nan Bernago-nago. Radja inilah jang menjusun dan meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan masyarakat jang sekarang masih dipusakai itu.

Berlainan dengan tjara jang lazim dipakaikan oleh seorang radja jang mempunyai suatu kekuasaan jang mutlak, radja ini tidak langsung memerintahi rakyatnja.

Pemerintahan dikendalikan oleh dua orang pembesar jang menjalankan peraturan-peraturan menurut tjara mereka masing-masing. Tapi hal ini bukanlah menundukkan, bahwa keduanja bertindak dengan semaunja sadja.

Kedua orang pembesar keradjaan itu adalah:

1. Datuk Ketemanggungan,
2. Datuk Perpatih nan Sebatang.

Bentuk pemerintahan mereka disebut dengan „Kelarasan”. Dan karena itu, di Minangkabau didapat dua buah klarasan, jang disebut dengan:

1. Klarasan „Budi-Tjaniago” dan
2. Klarasan „Koto-Piliang”.

Tjara „Budi Tjaniago” adalah menurut „adjaran” jang diturunkan oleh Dt. Perpatih nan Sebatang, sementara tjara „Koto-Piliang” menurut apa jang diadjarkan oleh Datuk Ketemanggungan. Sungguhpun demikian, kedua matjam „normen” itu tidaklah mempunyai perbedaan jang njata antara satu sama lainnja. Perbedaan antara keduanja terdapat didalam memutuskan sesuatu masalah dan dalam melakukan suatu permusjawaratan.

Permusjawaratan didalam klarasan „Koto-Piliang” didasarkan kepada sari pepatah adat jang berbunji:

„Nan babarih nan bapahek,
Nan baukur nan batjoreng;
Tjoreng barieh bulieh dilihek,
Tjupak panueh, gantangnjo bubueng”.

Indonesianja:

„Jang bergaris jang dipahat,
Jang berukur jang berkabung (dipotong);
Tjorengan garis boleh dilihat,
Sukatan Penuh, gantangnja berbubung”.

Dan tjara permusjawaratan dalam kelarasan Budi-Tjaniagq sesuatuja didasarkan kepada pepatah adat jang berbunji:

„Tuah dek sakato,
Mulonja rundiang dimufakati;
Dilahië lah samo njato,
Dibatin buliëh dilihati”.

Indonesianja:

„Tuah karena sekata,
Mulanja rundingan dimufakati;
Dilahir lah sama njata,
Dibatin boleh dilihati”.

Dari kedua matjam adjaran itu, orang agaknja dengan mudah akan dapat memperbedakan kedua tjara pemerintahan tersebut. Dan dari keterangan itu orangpun mengetahui, bahwa perkataan „kelarasan”, tidaklah merupakan suatu „status” daerah sebagai suatu status jang dipaksakan oleh pemeritahan Hindia Belanda jang lampau kepada daerah Sumatera Barat.

Status dan tingkatan daerah di Minangkabau hanja terdiri dari Luhak, Nagari dan Suku. Ketiganja mempunyai „hak otonom” dan bergabung mendjadi suatu federasi.

Suku merupakan himpunan dari beberapa buah „hindu”. Nagari himpunan dari beberapa buah Suku, dan Luhak gabungan dari beberapa puluh buah Nagari.

Di Minangkabau dikenal 3 buah Luhak jang kemudian mendjadi 4 buah, jaitu:

1. Luhak Tanah Datar, (Batu Sangkar).
2. Luhak Agam, (Bukittinggi).
3. Luhak Lima Puluh Koto, (Pajakumbuh).
Kemudian ditambah dengan
4. Luhak Kubung Tiga Belas (Solok).

Keempat buah Luhak tersebut diatas sama-sama mempunyai Dewan, jang anggauta-anggautanja terdiri dari wakil dari tiap-tiap Nagari jang untuk itu lebih dahulu mengadakan Dewan Kelarasan masing-masing. Sidang-sidang Dewan Luhak tidaklah mengenai pemerintahan tiap-tiap Nagari, karena Nagari dan Rakjat langsung dibawah pemerintahan penghulu-penghulu masing-masing.

Djadi, di Minangkabau bukan Radja jang berdaulat, tapi kekuasaan dilakukan oleh tiap-tiap Penghulu. Dalam hal ini, radja hanja merupakan suatu simbool persatuan dan hanja daerah-daerah perantauanlah jang langsung dikuasainja.

Dari itu, maka pemerintahan keradjaan Minangkabau dizaman jang lampau biasa disebut dengan kekuasaan „Tungku tiga sedjerangan“, jaitu kekuasaan radja jang tidak langsung, kekuasaan penghulu-penghulu jang memakaikan tjara jang diadjarkan oleh Dt. Perpatih nan Sebatang dan Dt. Ketemanggungan.

Didalam pekerdjaannja sehari-hari, radja dibantu oleh suatu Dewan Penasehat jang disebut dengan „Basa Ampek Balai“, Empat orang Pembesar. Keempat orang pembesar itu terdiri dari:

1. Datuk Bendahara, berkedudukan di Sungai Tarab.
2. Datuk Menghudum, berkedudukan di Sumanik.
3. Indomo, berkedudukan di Saruaso, dan
4. Tuan Kadhi, berkedudukan di Padang Ganting.

Achirnja Basa Ampek Balai ini ditambah seorang lagi anggaoutanja dengan jang kelima, jaitu:

5. Tuan Gadang, berkedudukan di Batipuh.

Radja bersama dengan Dewannja ini dalam masjarakat Minangkabau dizaman kebesarannja merupakan golongan orang jang tidak memilih suatu Suku apapun djuga.

Pasal 57.

TJARA MENDJALANKAN PEMERINTAHAN.

SEBAGAI sudah diterangkan diatas tadi, pemerintahan dan kekuasaan di Minangkabau dilakukan oleh Penghulu-penghulu, jaitu dari orang-orang jang dipilih oleh rakjat sendiri. Undang-undang dan peraturan-peraturan jang berlaku ditiap-tiap negeri, adalah peraturan-peraturan jang dibikin oleh dan dalam kerapatan penghulu-penghulu didalam negeri itu sendiri menurut garis-garis jang sudah ditetapkan oleh adjaran-adjaran „Budi-Tjaniago” atau „Koto-Piliang”. Dengan demikian, maka Dewan Nagarilah jang mempunyai kekuasaan tertinggi.

Didalam Dewan ini bersidang penghulu-penghulu dan pembesar-pembesar adat lainnja dari tiap-tiap Pesukuan. Bila nanti timbul sesuatu perselisihan paham jang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan ini, barulah Dewan Kelarasan bertindak memberikan penjelesaiannja. Dan bila didalam Dewan Kelarasan ini timbul pula suatu kekeruhan, Dewan Luhaklah jang harus memutuskan putusan terachir.

Karena demikian, maka tidaklah mengherankan bila pada berbagai soal, terutama dalam melakukan sesuatu upatjara adat, terdapat perbedaan-perbedaan tjara; antara satu negari dengan negeri lain.

Karena negari jang mendijadi „pusat djala pumpunan ikan”, maka tidaklah salah kalau dikatakan, bahwa Sidang-sidang Dewan Negari itu merupakan suatu persidangan adat jang akan menentukan.

Dalam melakukan sesuatu peraturan kepada rakjat atau anak-kemenakan, penghulu-penghulu bekerdja dengan dibantu oleh beberapa orang „pegawai adat” jang disebut dengan „Manti” dan „Dubalang”.

Setelah masjarakat Minangkabau dipengaruhi pula oleh Agama Islam, maka alat-alat pemerintahan didalam nagari ditambah pula dengan „Imam” dan Chatib” serta „Bilal” adat.

Dengan demikian, maka anggauta Dewan Nagari terdiri dari Penghulu-penghulu (Datuk-datuk), Manti, Dubalang, Imam dan Chatib.

Musjawarat Negari ini dilangsungkan diatas sebuah Balairung Adat jang disebut dengan Balai-balai Adat.

Pasal 58.

MASJARAKAT MINANGKABAU.

TIDAK mudah bagi seorang putera Alam Minangkabau untuk melepaskan dirinja dari „kundjungan-kundjungan adat” dan masjarakat bangsanja. Walaupun dimana djuga dia berada, kebiasaan-kebiasaan masjarakat tempat dia dilahirkan tidak bisa „dilepaskan” sama sekali, karena dia seakan terdiri kepada suatu norma jang dilahirkan dari adat jang disebut „tidak lapuk kena hudjan dan tidak lekang kena panas”.

Mereka tidak hanja terikat kepada orang-orang jang sedari ketjil berada dalam lingkungan mereka sadja, tapi mereka djuga terikat kepada suatu masjarakat jang djauh lebih besar dari masjarakat jang dikenalnja dengan njata. Dan karena luasnja lapangan masjarakat jang „mengikatnja” itu, diapun harus lebih banjak membiasakan dirinja dalam berbagai masalah jang timbul karena luas dan banjaknja sebab-sebab jang tertimbul karena masjarakat itu.

Bagaimana eratnja „ikatan” adat terhadap seorang putera Minangkabau, dapat diketahui antaranja dari hal-hal jang akan diterangkan dibawah ini.

Mereka mempunjai hubungan kekeluargaan jang sangat luas. Selain dari perhubungan karena suatu kelahiran, mereka djuga bertaut rapat dengan keluarga „satu hindu”. Jang disebut dengan keluarga „sehindu” itu, ialah kumpulan keluarga jang berasal dari seorang nenek perempuan jang kemudian mendjadi berkembang biak. Perhinduan jang terpetjah mendjadi beberapa buah, dikumpulkan mendjadi satu, dan disebut dengan keluarga „sepajung”. Diatas itu ada lagi hubungan kekeluargaan jang disebut dengan „seninik”.

Gabungan dari beberapa buah „pajung” atau „ninik”, mendjadi satu Pesukuan. Achirnja, barulah terdapat masjarakat bernagari.

Dalam hal ini, sebuah petitih Minangkabau membajangkan susunan masjarakat negari itu dengan:

„Manggarik bakarek kuku,
Dikarek djo sirauik,
Kaparauik batuang tuo,
Tuonja elok kalantai;
Nagari baka ampek Suku,
Dalam suku babuah paruik;
Kampung dibari batuo,
Rumah dibari batungganai”.

Di Indonesiakan dengan:

Bergerak berkerat (memotong) kuku,
Dikerat dengan seraut,
Untuk peraut betung-tua,
Tuanja baik ke lantai;
Negari diperempat suku,
Dalam suku berbuah perut;
Kampung diberi bertua,
Rumah diberi bertengganai.

Perintjihan hubungan kekeluargaan ini dengan tjara lain diterangkan sebagai berikut:

Tingkatan jang terendah dalam suatu Pesukuan, dinamakan dengan „sepajung” atau „sebuah gedang”, jaitu himpunan dari beberapa keluarga didalam naungan seorang penghulu. Kemudian terdapat hubungan karena „sehindu”, jaitu tingkatan jang lebih rendah dari hubungan „sepajung”. Hubungan kekeluargaan jang paling terdekat, dinamakan dengan „sepamit”, jaitu hubungan kekeluargaan dalam pergaulan dalam satu rumah tangga.

Pengaruh perhubungan jang paling besar, ialah perhubungan karena satu Pesukuan. Tidak „apa kampung/negeri” jang ditanjakan oleh seorang putera Minangkabau kepada putera Minangkabau lainnja, tapi „apa sukumu”, atau „apakah sukunja?”

Adapun persukuan di Minangkabau ada 4 buah djenisnja, jaitu pesukuan-pesukuan jang disebut dengan:

1. Urang (orang) nan ampek (empat),
2. Urang nan lima ninik,
3. Urang nan enam ninik, dan
4. Urang nan sembilan ninik.

Pesukuan jang termasuk lingkungan golongan pertama, jaitu Bendang, Melaju, Kampai dan Lubuk Batang.

Jang dinamakan pesukuan urang nan limo ninik, jaitu Kutianjir, Petapang, Banuhampu, Salo dan Djambak. Pesukuan Urang jang enam ninik ialah: Budi, Tjaniago, Singkuang, Sipandjang, Mandahiling dan Andomo. Dan Pesukuan Urang nan sembilan ninik adalah: Koto, Piliang, Simabur, Tandjung, Pisang, Sikumbang, Gutji, Dalimo dan Pagatjantjang.

Dengan demikian maka teranglah, bahwa tiap-tiap putera Minangkabau satu sama lainnja diperhubungkan oleh hubungan kekeluargaan jang djauh lebih luas dari jang disangka orang. Dia tidak dapat melepaskan dirinja dari ikatan Pesukuan ini, terutama dalam mengangkat tiap-tiap pekerdjaan jang besar dan berat, apalagi jang menjangkut paut dengan adat istiadatnja.

PENGHULU DAN TJARA PENGANGKATANNJA.

S EORANG penghulu jang memakai gelaran „Datuk”, memegang peranan jang sangat penting didalam masjarakat Minangkabau. Seorang Penghulu tidak hanja bertindak sebagai kepala dalam Pesukuan, tapi ia djuga dengan akitp ikut serta dalam pemerintahan Nagari. Dialah tempat anak-kemakannja mengadukan sakit dan senang, tempat bertanja kalau akan pergi dan tempat mengadu bila kembali pulang. Mereka dipandang sebagai orang jang tjerdik-tjendekia, mengetahui „lapuk akan menghimpit dan tjondong akan menimpa”. Mereka jang mengetahui dan harus mengetahui peraturan-peraturan tata-tertib kemasjarakatan dalam lingkungan Pesukuan dan Negarinja Disamping itu seorang penghulu djuga harus tahu akan „Hereng dan gendeng” (siasat) jang akan menguntungkan dan merugikan kepada anak kemenakannya masing-masing.

Karena itu maka njatalah, bahwa seorang Penghulu haruslah seorang jang tjerdas dan tangkas, seorang jang lapang dada dan banjak pengetahuannya.

Biasanja pangkat Penghulu itu adalah pangkat dan kedudukan jang turun-temurun, dari ninik kemamak, dari mamak kekemakanan. Tapi hal ini bukanlah berarti bahwa djumlah Penghulu tinggal sebanjak jang dipusakai semula. Djumlahnja boleh bertambah menurut perkembangan rakjat atau anak kemenakan jang akan diperintahi.

Pengangkatan seorang Penghulu baru, biasanja disebabkan karena salah satu hal jang tersebut dibawah ini:

1. „Mati batungkek (bertongkat) Budi”, jaitu bila seorang penghulu meninggal dunia, maka salah seorang kemenakannya ditunjuk oleh keluarga jang bersangkutan untuk menggantikan penghulu jang baru meninggal itu. Dalam hal ini biasa djuga kedjadian, sebelum meninggal seorang Penghulu meninggalkan amanat siapa jang akan menggantikan kedudukannya sesudah matinja. Upatjara meresmikan Penghulu baru ini dilakukan beberapa waktu sesudah meninggalnja penghulu jang akan digantikan itu.
2. „Hiduik (hidup) bakarelahan (berkerelahan)”, jaitu bila seorang Penghulu sudah terlampau landjut usianja dan dirasa-

nja tidak sanggup lagi menjalankan tugasnja selaku seorang Penghulu, maka ditundjuknja salah seorang kemenakannja untuk menggantikan kedudukannja selagi masih hidup.

3. „Mangambang nan talipek (mengambang jang terlipat), mam-bangkik batang tarandam (membangkik batang terendam)”, jaitu mengangkat seorang Penghulu jang gelaran pusakanja sudah lama tidak dipakai karena sudah sangat lamanja meninggal orang jang akan digantikan.

Pengangkatan Penghulu jang sematjam ini, biasanja memakan waktu jang agak lama karena lebih dahulu haruslah dikadji dan diselidiki benar siapakah dan hindu manakah jang berhak menggantikan Penghulu itu.

4. Mengguntieng (menggunting) sibak badju”, ialah bila suatu Pesukuan sudah berkembang biak sehingga penghulu jang ada tidak sempat lagi mengendalikan Pesukuan itu sendiriannja sadja. Karena itu maka ditundjuknja salah seorang kemenakannja untuk mendjadi „Andiko Putjuk” (Penghulu pembantu) dan biasa djuga disebut dengan „Penghulu Panungkek (penongkat)”. Penghulu Panungkek ini memakai gelaran jang sama dengan Penghulu jang akan dibantunja itu, dan ditambah dengan „gelaran tambahan”. Misalnja Penghulu jang menunj-djuk itu bergelar „Datuk Bandaro”. Maka Penghulu jang ditun-djuknja djuga memakai gelar „Datuk Bandaro”, tapi harus ditambah dengan „nan Hitam” misalnja. Djadi penghulu jang ditundjuk itu bergelar „Datuk Bandaro nan Hitam”. Djadi, „nan Hitam” itu menunjdjukan, bahwa dia ditundjuk oleh Dt. Bandaro sebagai pembantunja.

Itulah sebabnja maka gelar Penghulu-penghulu di Minangkabau kerap terdapat nama tambahan seperti „nan Pandjang”, „nan Labih”, „nan Sati” dan lain-lain sebagainja.

Sudah tentu sadja tidak sembarangan orang jang dapat djadi dan didjadikan Penghulu ini.

Seorang Penghulu atau tjalon Penghulu harus mempunjai sifat-sifat jang mendjadi sjarat bagi seorang Penghulu. Sjarat-sjarat itu antara lain adalah:

1. Berakal (tidak terganggu fikiran dan tubuhnja).
2. Berilmu (lahir dan bathin).
3. Tiada kekurangan, baik kehidupan, tubuh dan pikiran.
4. Bersifat pemurah, jaitu suka memberi nasehat, menolong, menundjuk dan mengadjadi.
5. Harus bersikap waspada, jaitu „menjediakan pajung sebelum hudjan”, dengan arti menjingkirkan segenap jang mungkin akan mendjadi sengketa dalam kalangan kemenakannja, berhati-hati didalam segenap gerak dan tindakannja.

6. Bersifat sabar, artinja tidak mau dan tidak suka bermusuhan dan berselisih paham dengan kemenakan-kemenakannya dan dalam kalangan kemenakan-kemenakannya itu sendiri.

Sjarat-sjarat itu diminta, karena Penghulu-penghulu mempunyai tugas kewadajiban jang sangat besar, diantaranya ialah:

1. Bertindak sebagai hakim pendamai dalam pajungnja, membuat dan menjalankan peraturan-peraturan untuk rakjat dalam pajungnja.
2. Mendjadi wakil dari semua anak kemenakannya dalam urusan-urusan jang berhubungan dengan orang dari luar pajung, misalnja dalam lapangan perkawinan, djual-beli, menuntut hak dan mendjawab segala dakwaan mengenai dengan anak-kemenakannya.
3. Memberi didikan dan tjontoh tjara hidup jang baik dalam masjarakat.
4. Ikut serta sebagai anggota Kerapatan Adat dan anggaута dari badan pemerintahan dalam negerinja.
5. dan lain-lain sebagainya.

Disamping sjarat-sjarat dan kewadajiban-kewadajiban tersebut diatas, seseorang Penghulu djuga harus memperhatikan beberapa ketentuan jang tidak boleh dilampaui dan dikerdjakannya. Ketentuan-ketentuan jang merupakan larangan bagi seorang Penghulu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Marah-marah dalam kerapatan (naik darah dan hilang kebenaran).
2. Merentak-rentak dan menghantam tanah karena marah.
3. Menjingsing lengan badju seperti orang mau berkelahi.
4. Memandjat pohon kaju dan lain-lainnja.
5. Mendjungjung sesuatu jang besar.
6. Berlari-lari.
7. Melakukan sesuatu perbuatan jang merendahkan nama dan deradjat, dan lain-lain sebagainya.

Pengangkatan dan pakaian adat seorang Penghulu.

Upatjara pengangkatan seorang mendjadi Penghulu, adalah upatjara adat jang terbesar di Minangkabau. Pada waktu upatjara itu dilakukan, dikeluarkan dan dipertunjukkanlah segenap kebesaran-kebesaran adat-istiadat dengan alat-alatnja.

Diberbagai tempat upatjara itu berlangsung beberapa hari lamanya dengan memakai dan mengeluarkan ongkos jang sangat besar dan banjak.

Rumah Gedang, dimana upatjara penobatan seorang penghulu dilakukan, mendjadi kundjungan penduduk negeri dan berhari-hari sebelum itu sudah dihiasi dan dipakai sebaik-baiknya.

Tiga hari berturut-turut selama hari upatjara itu, dipakai untuk melakukan upatjara-upatjara adat setjara resmi, jaitu jang terpenting diantaranya adalah, hari penobatan, hari perdjamaian dan hari perarakan.

Pada hari „penobatan” ini, dihadapan semua penghulu-penghulu jang ada dalam negeri itu, diletakkan sebuah destar kekepala sitjalon penghulu itu dengan sangat chidmad oleh seorang penghulu Pesukuan jang ditundjuk untuk itu. Baru sadja destar itu terletak dikepala sitjalon tadi maka „berdatang sembahlah” pegawai, manti dan dubalang jang akan mendjadi pembantu-pembantu penghulu jang dinobatkan itu. Mulai dari saat itu bermulalah suatu tugas dan kewadjiban baru bagi jang dinobatkan, karena sekarang dia sudah disahkan mendjadi penghulu. Badjunja ditukar dengan pakaian adat, dan dia disumpah menurut setjara adat. Dalam persumpahan itu dia haruslah mengikrarkan akan bertindak dengan djudjur, akan berlaku tulus dan ichlas dalam mendjalankan kewadjibannya sebagai seorang penghulu.

Besok harinja, diadakanlah perdjamaian umum untuk seluruh penduduk negeri, jang biasanja dipotong seekor kerbau besar, pilihan penghulu Pesukuan. Hari itu disebut dengan „Kuah dikatjau, daging dilapah dan tanduk ditanam”, karena pada hari itu oleh seluruh penduduk dipandang, bahwa semua sifat-sifat jang melukai perasaan orang lain dari penghulu jang baru dinobatkan itu, mulai hari itu sudah dihilangkan dan jang tinggal sekarang ini hanjalah sifat-sifatnja jang baik sadja.

Keesokan harinja penghulu jang baru diangkat itu diarak bersama-sama dengan menunggangi kuda. Perarakan ini ada kalanja ke Balai-balai Adat, ada kalanja kerumah „bako” (rumah ibu bapak dari penghulu itu), dan ada kalanja kesesuatu medan pertemuan umum dinegeri itu.

Perarakan tersebut demikian gemilangnja, karena diikuti oleh sekalian pemangku-pemangku adat didalam negeri dengan pakaian kebesarannya masing-masing, dan disepanjang djalan dielu-elukan oleh penduduk negari. Demikian besar perhatian umum terhadap perarakan ini, karena orang jang mendjadi penghulu itu dipandang sebagai:

Kaju besar ditengah padang,
Tempat berteduh bila kehudjanan,
Tempat berlindung kala kepanasan;
Uratnya tempat bersila,
Batangnya tempat bersandar,
Daunnya tempat bernaung.

Pada hari-hari upatjara adat itu dilakukan, pakaian-pakaian kebesaran lama dikeluarkan dan dipakai. Di halaman rumah ditegakkan tiang-tiang bambu jang tinggi, dimana disisipkan „merawa dan ubur-ubur” beraneka warna. Jang dinamakan dengan „merawa” ini ialah sebidang kain putih, kuning, atau merah jang ditjotjokkan pada sebatang pohon bambu jang sangat tinggi sampai mendjulai ketanah, bendera jang bukan berbentuk bendera. Kain merawa itu pada pangkalnja berukuran lebar kira-kira $1\frac{1}{2}$ hasta, tingginja kira-kira 5—6 meter jang makin lama makin lantjip. Pada sebelah udjungnja diberi berdjumbai pandjang. Bila dia ditjotjokkan ketiangnja, maka udjungnja jang berdjumbai itu menjadi meliuk ketanah dan berkibar-kibar diembus angin.

Warna kuning menjatakan, bahwa jang menjadi penghulu itu adalah orang jang berhukum kepada kelarasan Koto-Piliang, dan warna putih menundjukkan Budi-Tjaniago. Bangun jang merujuk kala ditegakkan itu menjatakan, bahwa penghulu jang ditinggikan itu bukanlah tinggi untuk mendjuluk, tapi tinggi untuk tunduk kepada kebenaran. Seorang penghulu harus memakaikan ilmu padi, kian berisi kian tunduk.

Selanjutnja mengenai dengan pakaian adat bagi Penghulu-penghulu dapat diterangkan sebagai berikut:

Badju dan tjelana serta destar jang serba hitam menjatakan, bahwa pemakainja mempunyai sifat serba „tahan tempa” karena warna hitam menjatakan *tahan* dalam semua matjam iklim dan keadaan. Lengan badju jang besar dan lebar itu menundjukkan bahwa seorang Penghulu harus selalu siap sedia untuk melakukan sesuatu pekerdjaan jang sewaktu-waktu meminta sumbangan tenaga dan fikiran dari padanja. Badju kebesaran Penghulu itu sengadja tidak diberi bersaku (berkantong) menjatakan, bahwa Penghulu tidak pernah menerima upah jang langsung dari pekerdjaan-pekerdjaan jang pernah dikerdjakannja, dan dia tidak boleh menjembujikan sesuatu kepada anak kemenakannja.

Sungguhpun demikian, seorang Penghulu haruslah pandai menjimpan sesuatu, terutama menjimpan rahasia-rahasia jang akan memberi malu kepada anak kemenakannja. Hal ini dinjatakan dengan destarnja jang berlapis banjak itu. Ruangan-ruangan diantara lapisan-lapisan destar itulah jang „disediakannja” untuk menjimpan segenap apa jang patut dirahasiakannja buat beberapa waktu lamanja. Kerut-kerut dan lipatan destar itu menundjukkan, bahwa dia mempunyai alam jang lapang dan pikiran jang lebar.

Keris seorang Penghulu dihadapkan kekiri dan seorang hulu-balang menghadap kekanan. Hal ini menundjukkan, bahwa Penghulu tidak dibenarkan mentjabut kerisnja bila ia marah, karena marah djuga menjadi salah satu larangan bagi penghulu. Keris jang dipakainja itu bukanlah diperuntukkan sebagai sendjata baginja, tapi semata sebagai tanda kebesaran sadja.

Sebaliknya dengan hulubalang, sewaktu-waktu dia dapat menuntut kerisnja karena hulu (tangkainja) menghadap kekanan agar mudah ditjabut diwaktu jang perlu. Bagi hulubalang ini keris adalah sendjata untuk mempertahankan hak-hak penghulunja.

Suatu tanda kebesaran jang lain jang khusus diperuntukkan bagi penghulu-penghulu ialah persembahan sirih dalam *tjerana bertirai*. Tjerana, adalah sebuah bedjana berkaki jang terbikin dari logam biasanja dari lojang atau kuningan. Dalam upatjara-upatjara adat, tjerana ini diberikan berselubung jang dihiasi dengan sulamaa-sulaman benang keemasan jang bertirai-tirai dan diisi dengan sirih selengkapnja, sebagai pernah kita lihat difoto-foto kala menjambut kedatangan pembesar-pembesar didaerah Sumatera Barat.

Tirai-tirai pada tjerana sirih itu diumpamakan dengan susunan djari jang sepuluh dari anak kemenakan jang mempersembahkanja. Tjerana itu berisikan daun-daun sirih jang disusun dengan teratur dan diikat dengan seksama, beberapa bidji buah-pinang ditambah dengan gambir dan kapur, jaitu perlengkapan sirih jang biasa dikunyah oleh kaum-kaum wanita diberbagai tempat di Indonesia.

Sirih dan pinang itu menundjukkan, bahwa segala sesuatu dipulangkan kepada pokoknja, sebagai pepatah:

Sirih pulang kegagangnja,
Pinang pulang ketampuknja.

Susunan daun sirih itu menjatakan, bahwa anak-kemenakan sudah tersusun dan terikat baik satu sama lain, dan kini dipulangkan kepada Penghulu-penghulu. Gambir dan kapur dari warnanja jang kuning dan putih itu dijadikan perlambang emas dan perak jang oleh Penghulu-penghulu didjadikan „benda kekajaan” atau perlambang kesutjian hati dan kekajaan budi anak kemenakannja jang harus dikendalikannja itu.

Sebesar-besar kesalahan anak-kemenakan kepada penghulu atau ninik mamaknja, akan mendjadi hilang lenjap bila jang bersalah itu mempersembahkan sirih setjerana kepada orang jang dibesarkan menurut adat itu, sebagai terbajang diddalam pepatah adat alam Minangkabau:

Dulu emas setahil-sepaha,
Kini sirih setjerana.

Achirnja, mengenai *pajung kebesaran*. Tidak semua penghulu-penghulu jang berhak memakai pajung kebesaran jang biasanja berwarna kuning itu. Biasanja jang berhak memakai pajung ini, adalah penghulu-penghulu „asal”, jaitu jang sama lahir dengan gelar kebesaran jang dipakainja, bukan „penghulu pemberian” sebagai „penghulu penungkek” jang kita bentangkan diatas tadi.

Pasal 60.

PENGAWASAN DAN PENGUASAAN ATAS HARTA BENDA.

PERHUBUNGAN kekeluargaan di Minangkabau dilangsungkan menurut stelsel Matriarchat (perhubungan ke Ibean), ini sudah umum diketahui.

Meskipun dalam waktu belakangan ini perhubungan demikian sudah kian kabur, tapi pengaruhnya masih mendalam, terutama bila ditinjau dari segi pengawasan dan penguasaan atas harta benda.

Menurut adat yang masih berlaku dan masih dipegang teguh di beberapa daerah di Minangkabau, harta benda dan pengawasan atasnya dibagi atas 4 jenis, yaitu:

1. Pengawasan dan penguasaan atas padi dan beras dan keperluan hidup sehari-hari, berada ditangan seorang ibu. Dialah yang memegang kuntji „rangkiang” tempat menjimpan padi, dan ditanggannya pula tersimpan kuntji-kuntji gudang perbekalan lainnya.
Djadi, kaum ibulah yang mengetahui besar ketijlnja persediaan bekal kehidupan di rumah tangga, dan merekalah yang tahu dari dekat naik turunnya pendapat padi disawah dari tahun ketahun. Dari itu, pegang gadai dan dijual beli sawah ladang tidak dapat dilakukan bila tidak dengan persetujuan kaum ibu (wanita) yang menjadi kepala di rumah tangga.
2. Harta benda berupa emas dan perak, seperti perhiasan dan uang dan lain-lain, adalah dibawah dan menjadi pengawasan anak-kemenakan. Merekalah yang bertanggung-djawab atas kesempurnaan perbelanjaan di rumah tangga. Mereka pergi merantau kenegeri lain, bila mereka merasa bahwa mereka tidak dapat memperoleh uang dinegeri mereka sendiri dengan kepandaian yang mereka punjai. Hal inilah yang menjebabkan maka orang Minangkabau, terutama para pemuda yang banyak yang meninggalkan kampung halamannya dan pergi menjari kehidupan kenegeri lain.
3. Sawah dan ladang menjadi milik kaum wanita. Harta milik ini menjadi pusaka yang turun-temurun yang tidak boleh dipusakkan oleh pihak laki-laki kepada anaknya masing-masing. Sawah dan ladang pusaka ini hanya boleh digadaikan untuk keperluan-keperluan yang sangat penting yang mengenai dengan dan untuk menutup malu keluarga sehindu, misalnja untuk:

- a. Menjisp atap rumah gedang jang ketirisan.
 - b. Untuk mengawinkan gadis atau randa dalam hindu in.
 - c. Bila kematian dan tidak ada tempat berkisar jang lain untuk menjelenggarakan majat simati.
4. Hutan dan belukar mendjadi milik mamak, karena dialah jang harus mendjadikan hutan dan belukar itu mendjadi sawah ladang. Dialah jang harus menaruko tanah tersebut bila patut didjadikan sawah dan sebagainja. Bila belukar itu paja, dialah jang harus mendjadikannja tebat untuk pemelihara ikan, mendjadikannja ladang bila hutan itu teleng, mendjadikannja padang-pengembalaan bila dia gurun dan sebagainja.

Dengan pembagian milik dan pengawasan serta penguasaan tersebut diatas, maka tertjapailah hubungan jang sangat harmonis dalam lingkungan kekeluargaan, satu sama lainnja tidak tjampur mentjampuri urusan masing-masing, tapi selalu bekerdja sama dalam hal-hal jang harus dikerdjakan bersama.

Pasal 61.

RUMAH GADANG, RANGKIANG, BALAI ADAT DAN MESDJID.

SUATU pemandangan yang sangat menarik hati diberbagai tempat di Minangkabau, yang merupakan lambang kebebasan daerah itu sampai sekarang, ialah kumpulan bangun-bangunan yang terdiri dari „rumah gadang” (rumah adat), dihalamannya berleret rangkiang tempat menjimpan padi; disebelah kanannya tegak sebuah mesdjid yang bergondjong tinggi, dan dikirinya terentang sebuah Balai-balai Adat.

Bangunan-bangunan yang tersebut diatas, merupakan suatu kebanggaan dan kebesaran bagi seluruh penduduk, yang sampai sekarang masih dipelihara dengan baik, meskipun bilangannya tidak sebanyak dahulu lagi.

Bangunan-bangunan itu penuh dengan ukiran-ukiran dan pahatan beraneka warna.

Karena bangunan-bangunan itu merupakan „kebanggaan” orang Minangkabau, marilah kita tindjau satu persatu.

Rumah Gadang itu merupakan rumah „petak” bertiang tinggi terdiri dari tiga, lima, tudjuh, djuga ada yang sembilan atau sebelas ruang, jaitu menurut banjaknja keluarga yang mendiaminja. Rumah tersebut didirikan diatas tiang-tiang yang kuat, atapnja dibikin dari idjuk pohon enau dan diberi bergondjong empat buah. Keempat gondjong itu merupakan simbool dari empat matjam adat yang terpakai di Minangkabau dan ada yang menjatakan sebagai perlambang dari keempat tiang perahu yang ditumpang oleh Dt. Seri Maharadjo Diradjo semula dia mendarat didaerah Minangkabau dahulunya.

Rumah itu terbagi atas empat petak dan ditiap-tiap udjungnja diberi pula „berandjung” dimana dahulunya gadis-gadis pingitan menenun pakaianja dan mengerdjakan pekerdjaan-pekerdjaan lain. Rumah ini penuh dengan ukiran dan pahatan, tidak sadja pada bahagian sebelah luar, tapi djuga dibahagian sebelah dalam dinding dan tiang-tiangnja. Rumah sematjam ini sangat banjak penghuninja, dan kadang harus tambah diperpanjang lagi agar dapat memenuhi kebutuhan sekeluarga. Tapi bila tempat tidak mengizinkan lagi, maka sebahagian dari penghuni-penghuni itu harus pindah kerumah-rumah lain yang didirikan disekeliling tempat itu. Dengan

demikian, maka rumah gedang ini akhirnya merupakan „induk” dari rumah-rumah lain itu. Karena itu, maka rumah tersebut bukanlah hanya menjadi milik oleh orang yang mendiaminya saja, tapi menjadi milik seluruh keluarga.

Dan biasanya tiap-tiap hindu mempunyai rumah demikian paling kurang agak sebuah. Biasanya rumah itu dipakai untuk keperluan-keperluan dibawah ini:

1. Tempat tinggal keluarga, terutama gadis-gadis dari orang „Sumando” (suami dari adik, kakak dan kemenakan perempuan).
2. Tempat bermusjawarat bagi seluruh anggota keluarga guna memperbincangkan sesuatu yang menjangkut dengan keperluan dan kebutuhan sehindu.
3. Tempat melakukan upatjara-upatjara yang menjangkut dengan adat, sebagai upatjara perkawinan, pengangkatan seorang penghulu dan lain-lain. Upatjara adat yang tidak dilakukan dalam rumah-gedang, tidaklah nanti akan diakui sebagai upatjara adat.
4. Tempat memelihara dan merawat keluarga laki-laki yang sakit dari rumah isterinya. Sisakit biasanya dijemput bersama-sama oleh anak kemenakannya dari rumah isterinya itu, dan selanjutnya dirawat dirumah gedang itu. Bila sisakit sudah sembuh kembali, maka dia boleh kembali pula kerumah anak dan isterinya.
5. Tempat menjelenggarakan kematian seseorang keluarga sebelum dia dikuburkan. Bila seorang laki-laki meninggal dirumah isterinya, atau seorang perempuan meninggal dirumah lain, maka majatnya dibawa kerumah gedang. Disanalah majat itu dimandikan dan dikapani dan juga disembahjangkan sebelum dikuburkan.

Bentuk rumah gedang, yang juga disebut dengan „rumah adat” ini bermacam-macam pula sebagai namanja. Diantaranya ada yang bernama „serambi papek”, tidak bertingkat hilir dan mudiknya. Rumah sematjam ini banyak terdapat didaerah Luhak Agam.

Ada pula yang bernama „radjobabandieng” (tiang bererat dibelakang) jaitu seakan-akan mempunyai spen dibelakangnya. Rumah sematjam ini banyak terdapat didaerah Luhak Lima Puluh Koto.

Akhirnya ada pula yang bernama „gajah mangaram”, sama besar udjung dan pangkalnya, jaitu sebagai yang banyak kedapatan didaerah Luhak Tanah Datar.

Tjara pemakaian petak-petak rumah itupun diatur pula sebaik-baiknya, jaitu bahagian sebelah depannya diperuntukkan bagi tempat duduk bagi ninik mamak. Landjar kedua dibelakangnya disediakan untuk anak kemenakan. Landjar ketiga, yang ditinggikan dengan sebuah bendul, diperuntukkan bagi orang semenda. Dibelakang itu, landjar keempat yang sama tinggi dengan landjar ketiga, diperuntukkan sebagai kamar tempat tidur (bilik).

Untuk mengetahui betapa pandangan orang Minangkabau terhadap rumah gadangnja, dibawah ini kita salinkan sebuah „puisi” jang membayangkan betapa pandangan dan perasaan mereka terhadap rumah itu:

Rumah gadang serambi Atjeh,
Seladjang kuda berlari,
Sepekik budak memanggil,
Sedingin selingkar makan,
Rumah bernama kesemuanja.

Rangkiang bereret dihalaman,
Seladjang kuda berlari,
Berukir bernaga-naga,
Bertirai berlangit-langit,
Berparit bertanah bata,
Berpagar dengan puding emas.

Rangkiang bereret dihalaman,
Pemberi makan musafir melintas,
Pengisi adat penuang lembaga,
Penurut alur, penampung jang pasar (biasa).

Rumah gedang tidak akan sempurna bila dia tidak mempunyai *rangkiang* (lambung padi), sebagai digambar dari „puisi” tersebut diatas.

Rangkiang (lambung padi) ini bangunnja hampir sama dengan bangun rumah gedang, jaitu didirikan diatas tiang jang tinggi, bertiang empat. Dia djuga beratap idjuk, dindingnja djuga dihiasi dengan ukiran dan pahatan. Untuk memasukkan dan mengeluarkan padi kerangkiang itu, orang terpaksa memakai dan mempergunakan tangga (djendjang) jang sangat tinggi, karena pintu satu-satunja terletak sangat tinggi diatas, dekat kepada atapnja.

Tiap-tiap rumah gedang biasa mempunyai dua atau tiga rangkiang sematjam ini, jaitu menurut kekajaan sehindu, dan ditegakkan berleret dihalaman rumah gedang. Rangkiang-rangkiang tersebut djuga mempunyai nama masing-masing, menurut untuk apa isinja akan dipergunakan. Nama rangkiang itu ditetapkan oleh ninik-mamak jang mendjadi Penghulu. Diantaranja ada jang diberi bernama dengan „Makanan Dagang Lalu”, karena isinja diperuntukkan bagi musafir-musafir jang harus diberi pertolongan dengan memandang siapa musafir itu dan dari mana dia datang serta hendak kemana dia pergi. Ada pula jang dinamakan dengan „Tabang tampek basitumpu, hinggak tampek mantjangkam” (terbang tempat bersitumpu, hinggap tempat mentjangkam), jaitu bila isinja diperuntukkan bagi melapangi kehidupan sekeluarga, dan isinja boleh didjual bila ada keperluan jang mendesak. Disamping itu sudah tentu ada pula jang hanja diperuntukkan bagi keperluan sekeluarga.

Dibawah tiap-tiap rangkang itu kerap terdapat lesung batu atau kaju tempat penumbuk padi. Disana pula disimpan alu dan tinar tempat mendjemur padi itu, serta njiru dan tempiannja sekali.

Perlengkapan seterusnya dari rumah gedang, terdiri dari sebuah beranda jang djuga bergondjong dan beratap idjuk ditengah-tengahnja. Beranda ini hanja diperuntukkan sebagai rumah untuk tangga naik kerumah gedang sadja, jaitu jang biasanja disebut dengan „batu tapakan“. Dikepala tangga itu terdapat beberapa buah gerigik atau kendi tanah jang berisi air, dan kadang-kadang sebuah kolam ketjil jang tergenang. Air itu diperuntukkan bagi pembasuh kaki tamu-tamu jang akan naik keatas rumah.

sepakat bagi seluruh penduduk negari, diterangkan dengan ringkas sebagai dibawah ini:

Mengenai dengan *Balai Adat* jang mendjadi perlambang kata-

Balai Adat ini istimewa diperuntukkan sebagai tempat berunding dan bermufakat serta memutuskan suatu soal oleh sekalian penghulu-penghulu dan ahli-ahli adat lainnja. Balai-balai adat ini dapat dinamakan dengan Balai Permusjawaratan Adat, dimana pembesar-pembesar adat itu bersidang.

Sebagai djuga dengan kedua matjam hukum jang berlaku, jaitu „hukum Koto-Piliang“ dan „hukum Budi Tjaniago“, balai-balai adat inipun mempunjai bentuk jang tidak sama pula.

Balai-balai adat bagi Penghulu-penghulu jang berhakum kepada „kelarasan Budi Tjaniago“ tidak diberi berinding, diatasnja datar sadja dan tidak di „putus“ ditengah-tengah. Diwaktu berunding dan bermusjawarat, ninik-mamak sama bersila, sama duduk diatasnja.

Tapi bagi penghulu-penghulu jang berhakum kepada kelarasan „Koto-Piliang“, balai-balai adatnja disebelah udjung dan pangkalnja diberi berandjung, ditengah-tengahnja diberi tempat kuda berlaluh dan didinding seluruhnja. Dikala bermusjawarat, ninik-mamak dan anggauta-anggauta adat duduk ditempat-tempat jang disediakan bagi mereka menurut deradjat mereka masing-masing.

Kepentingan dan kegunaan Balai-balai Adat ini dibajangkan didalam serangkum „lirik“ sebagai tersebut dibawah ini:

Disana kusut diselesaikan,
Disana keruh didjernihkan,
Boleh berasak tegak,
Tapi diatas tanah jang sebingkah;
Habis adat dibalairung,
Sesudah gajung keberbalas.

Sidang-sidang dibalai-balai adat ini dilakukan pada saat-saat jang dipandang perlu oleh penghulu-penghulu, terutama bila ada suatu soal bersama jang hendak diputuskan. Tapi bila jang akan diperbintjangkan hanja soal jang mengenai dengan suatu Pesukuan

sadja, maka biasanja tidaklah dibitjarakan dibalai-balai adat, tapi tjukup diputuskan oleh penghulu-penghulu didalam pesukuan itu sadja. Dan perkara-perkara jang menjangkut dengan sepajung atau sehindu, hanja diputuskan oleh penghulu dan ninik-mamak didalam pajung atau hindu itu sadja pula. Tapi bila pajung dan pesukuan tidak sanggup dan dapat memberikan kata putusnja, barulah dibawa kebalai-balai untuk diperbintjangkan oleh seluruh penghulu-penghulu dinegari itu. Disinilah semua perkara diputuskan, dan amat djarang sekali harus dibawa kepengadilan jang lebih tinggi, misalnja kedewan kelelasan atau kedewan luhak.

Dan memberikan putusan atas tiap-tiap perkara dan soal, biasanja Penghulu-penghulu memakai salah satu diantara empat tjara, jaitu:

1. Putusan karena diadakan perdamaian antara jang bersangkutan.
2. Putusan dipangkal, diputuskan oleh kerapatan kaum jang bersangkutan.
3. Putus karena berhukum, artinja, diputuskan oleh kerapatan penghulu-penghulu didalam balai-balai adat.
4. Putus karena terletak, jaitu oleh penghulu-penghulu tidak diberikan putusan apa-apa, tapi perkara itu dibekukan sadja, dan kedua belah pihak tidak boleh sebut-menjebut apa-apa lagi.

Djadi teranglah, bahwa balai-balai adat merupakan sidang jang tertinggi di Minangkabau. Tidak ada perkara jang tidak dapat diselesaikan disana, dan tidak pula ada keruh jang tidak dapat didjernihkannja.

Meskipun adat-istiadat Minangkabau sudah berkembang sebelum Agama Islam masuk dan berkembang didaerah itu, tapi pengaruh agama dan kebudajaan Islam ditempat itu dalam waktu jang singkat dapat mempengaruhi segenap segi-segi masjarakat. Hal ini dapat diketahui dengan adanja Mesdjid-mesdjid jang mempunyai bentuk dan stijl jang hampir sama dengan Balai Adat.

Pengaruh dan adjaran Agama Islam ini demikian mendalamnja dalam lapangan adat-istiadat, karena kerapatan-kerapatan adat tidak akan sempurna bila tidak disertai oleh pembesar-pembesar agama Islam ditiap-tiap negeri. Kalau dulu anggauta-anggauta kerapatan adat hanja terdiri dari penghulu-penghulu dan ninik-mamak jang tjerdik pandai sadja, kini haruslah disertai pula oleh ahli-ahli Agama Islam jang terdiri dari Imam dan Chatib. Kedua pembesar Agama ini achirnja mendjadi sebahagian dari perlengkapan pemerintahan negeri, sandar-menjandar antara adat dan agama.

Pepatah-pepatah adat jang berbunji:

Adat bersendi sjarak,

Sjarak bersendi Kitabullah,

menjatakan, betapa besarnja pengaruh agama terhadap hukum adat.

Dari itu tidaklah mengherankan, bila *mesdjid* djuga dipandang sebagai kebesaran dan kebanggaan rakjat negari. Dia tidak dapat dipisahkan dari Balai-balai Adat, dan dia dipandang sebagai bagian dari bangunan-bangunan jang harus dan mendjadi sjarat muthlak bagi tiap-tiap negari, bahkan satu negari jang hanja mempunyai sebuah balai-balai adat, mempunyai dua atau tiga buah mesdjid.

Pasal 62.

BENTUK DAN PERINTJIAN ADAT.

TIDAK dapat dimungkiri lagi, bahwa segenap liku dan lapangan kemasjarakatan di Minangkabau bertaut rapat dengan hukum-hukum adat. Adat di Minangkabau merupakan suatu penghubung kemasjarakatan (*maatschappelijke-verhoudingen*), dan dia mempunjai bentuk jang tersendiri.

Dari itu orang tentu ingin mengetahui banjak sedikitnja apakah bentuk dan tjorak adat jang berpengaruh itu, dan kenapa maka pengaruhnja demikian mendalam didaerah ini.

Menurut uraian dan pendjelasan ahli-ahlinja, adat di Minangkabau terbagi kepada empat matjam, jaitu:

1. Adat jang sebenarnja adat,
2. Adat jang diadatkan,
3. Adat jang teradat, dan
4. Adat istiadat.

Ada pula ahli adat jang membagi adat itu atas sembilan matjam, jaitu:

1. Adat jang sebenarnja adat,
2. Adat jang diadatkan,
3. Adat jang teradat,
4. Adat istiadat,
5. Adat purbakala,
6. Adat jang berkala-kala,
7. Adat jang berdjendjang naik, bertangga turun,
8. Adat hukum idjtihat, dan
9. Adat Undang-undang permainan alam.

Sampai kemana pengaruh tiap-tiap bentuk adat itu, dan apa-apa lapangan jang dikenainja, sukar memperbedakannja satu sama lain, karena semuanya merupakan „Undang-undang jang tidak tertulis“, tapi hanja bersendi kepada „alur“ dan „patut“ belaka.

Alur (mungkin) dan Patut inilah sebenarnja jang mendjadi ukuran untuk menempatkan sesuatu didalam golongan tiap-tiap matjam adat itu, jaitu mungkin dan patut menurut ukuran dan pertimbangan budi dan susila. Dan untuk menentukan sesuatu kemungkinan dan kepatutan itu, orang mepedomaninja kepada tiga matjam ketentuan himpunan adat dibawah ini, jaitu:

1. Adat muthlak, jaitu suatu hukum jang sudah mendjadi hukum alam sebagai ditaksirkan oleh Tuhan, tidak seorang manusia pun jang mungkin dapat mengatasinja. Dalam hal ini misalnja api membakar, air membasahi dan benda tadjam melukai.
2. Adat Mukajat, jaitu segala sesuatu haruslah didasarkan dan berdasarkan kepada hukum „wadjib (perlu)” menurut pandangan Agama Islam, atau paling kurang termasuk kepada hukum „harus”.
3. Adat Muntana, jaitu segala kebiasaan jang menurut hukum Agama Islam termasuk kepada „makruh” hingga kepada „haram”, jaitu perbuatan-perbuatan jang dilarang dan tidak diizinkan melakukannya.

Dengan ketiga matjam pedoman jang tersebut diatas, akan mudahlah bagi jang berkepentingan untuk menentukan hukum-hukum dan dasar-dasar mana jang dipakai dalam memberi bentuk dan tjorak sesuatu dikalangan masjarakatnja. Sudah tentu sadja „Adat Mukajat”lah jang mendjadi dasar pertimbangan, dan „Adat Muntana,, dipandang sebagai dasar untuk mendjatuhkan hukum; seperti hukum pidana dan perdana.

Mengingat kepada pembagian-pembagian dan ketentuan-ketentuan diatas, orang tidak heran dan ragu untuk menjatakan, bahwa „adat-istiadat alam Minangkabau adalah „Adat jang bersendi Sjarak (hukum agama Islam)”.

Pasal 63.

HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN UPATJARA PERKAWINAN.

HUKUM Matriarchaat jang berlaku di Minangkabau, menjebakkan pertalian seseorang lebih erat kepada keluarga ibunya; ini sudah sewadjarnya. Meskipun pada waktu belakangan ini keadaan demikian kabur, tapi pengaruhnja masih sangat besar dan tidak mudah untuk mengubahnja, dan nampaknja kedudukan seperti sekarang ini lebih menguntungkan kepada kaum perempuan jang menjebakkan mereka tidak pula hendak berkisar dari kedudukan jang demikian.

Bahwa seorang ibu mempunyai „kekuasaan” jang sangat besar di Minangkabau terhadap harta dan keluarganja, ini dapat diketahui dari uraian-uraian jang berlalu. Dan kekuasaan ini akan bertambah njata, bila diketahui, bahwa tidak mungkin suatu pekerdjaan besar akan dapat berlangsung, bila persetudjuan kaum ibu tidak diperoleh. Ibu tidak hanja mendjadi seorang bendahara jang memegang anak kuntji kekajaan sekeluarga, tapi seorang ibu di Minangkabau djuga mengambil peranan penting dalam menentukan perkembangan keturunan hindu dimasa jang akan datang. Dialah jang harus menentukan siapa jang akan mendjadi djodoh anaknja, baik anak itu seorang putera, maupun seorang puteri, dan dia pula jang mengetahui „asal”, „bangsa” dan „keturunan” orang jang mendjadi tjalon menantunja.

Karena sangat eratnja hubungan ibu dengan pertalian kekeluargaan ini, maka dengan sendirinja pengaruh paman terhadap kemenakannja mendjadi lebih besar dari pengaruh seorang ajah terhadap anaknja. Dari itu, di Minangkabau orang tidak merasa heran bila kepadanja ditanjakan siapa mamaknja (paman = saudara laki-laki ibunya), dan tidak menanjakan siapa ajahnja. Dengan mengetahui mamak seseorang, orang akan tahu siapa penghulunya dan apa Pesukuannja. Dan dengan demikian orang akan tahu pula betapa perhubungannja dengan orang jang ditanjanja itu.

Karena itu, maka pusaka (harta dan kebesaran-kebesaran adat) tidak diturunkan kepada anak, tapi harus diberikan kepada kemenakan. Tapi karena kuatnja dorongan pengaruh hukum Agama Islam, tjara-tjara peninggalan harta-harta pusaka ini achirnja berubah djuga, meskipun tidak seluruhnja. Kini harta pusaka itu tidak seluruhnja harus diberikan kepada kemenakan, tapi jang berasal dari pentjarian sendiri (tidak harta jang dipusakai), harus

diserahkan kepada anak. Dengan adanya perubahan ini, maka hubungan antara seorang bapak dengan anak dan kemenakannya kian lebih harmonis dari biasa dan perhubungan kekeluargaan makin bertambah erat.

Bagaimana seharusnya seorang mamak bertindak dalam penghidupan sehari-hari, dinjatakan dengan serangkum petiti sebagai tersebut dibawah ini:

Keluk paku katjang belimbing,
Tempurung laga-lagakan,
Bawa menurun ke Sarusa;
Anak dipangku kemenakan dibimbing,
Orang kampung dipertenggangkan,
Pelihara negari djangan binasa.

Dan bagaimana eratnja perhubungan kekeluargaan ini dikalangan masjarakat Minangkabau dapat kita perhatikan disaat-saat dilakukannya suatu upatjara perkawinan disana.

Upatjara perkawinan di Minangkabau termasuk salah satu upatjara adat jang terpenting, karena soal ini tidak lepas dari soal kekeluargaan sehindu dan sepesukuan. Seorang Penghulu atau Tengganja tidak akan merasa aman djiwanja, bila dalam kalangan mereka masih terdapat seorang budjang atau gadis jang seharusnya sudah hidup berumah-tangga tapi masih tetap membudjang. Oleh hindu atau Pesukuan akan dipandang sebagai suatu penghinaan bila dalam kalangan mereka masih terdapat seorang „gadis tua” atau seorang „randa muda”. Bila terdjadi hal jang demikian, maka dengan segala akal dan ihtiar akan mereka usahakan agar „malu jang tertjoreng dikeneng” dapat mereka pupus setcepat mungkin. Harta benda jang tidak boleh didjual dan digadaikan, dapat dan diizinkan mendjual dan menggadaikannya guna keperluan mengawinkan seorang gadis atau randa.

Karena upatjara perkawinan adalah upatjara adat, maka dalam lapangan ini ninik-mamak memegang peranan jang besar dan penting. Suatu perkawinan tidak mungkin akan dapat dilangsungkan bila Penghulu tidak memberikan keizinannya, meskipun ajah atau wali pihak perempuan menjetudjuinja. Sebuah perkawinan akan dapat dibatalkan kembali bila seorang ibu atau keluarga perempuan salah satu pihak tidak membenarkannya.

Untuk agak mendalami soal ini, baiklah kita ketahui dengan pendek bagaimana suatu upatjara perkawinan di Minangkabau dilakukan.

Bila seorang gadis atau budjang dipandang sudah masanja untuk hidup berumah tangga dan sudah memenuhi sjarat-sjarat jang dibutuhi, maka ninik-mamak jang terdekatpun mulailah „menjelangkan matanja” untuk mentjari dan menjelidiki siapakah jang patut, pantas dan mungkin untuk mendjadi djodoh dari anak-kemenakan-

nja itu. Bila jang ditjarinja itu sudah ditemuinja, maka dibawanjalah keluarga jang terdekat untuk merundingkannya, terutama dengan ibu dari anak-kemenakan jang akan diperdjodohkan itu. Bila ibu ini sudah sesuai, maka perundingan kedua dilakukan dengan keluarga-keluarga sehindu jang dipandang patut dibawa serta berunding. Disini diperbintjangkan „buruk-baik” tjalon menantu itu, buruk dan baik ninik mamaknja serta asal usul keturunannya dan sangkut-pautnja dengan keluarga itu. Bila perundingan itu berdjalan lantjar, maka dibitjarakanlah soal peminangan.

Tjara melakukan peminangan ini tidak sama pada seluruh tempat dan berlainan ditiap-tiap negeri. Diberbagai tempat pihak laki-laki jang melakukan peminangan, tapi jang terbanjak, pihak perempuan-lah jang harus meminang. Tjaranja kebanyakan sebagai berikut:

Seorang jang diwakilkan oleh keluarga jang meminang, biasanja disebut Manti; biasanja seorang jang agak landjut umurnja dan berpengaruh didalam hindu, membikin „kontak” pertama dengan seorang jang dipandangnja berdekatan dengan jang akan dipinang, jaitu salah seorang mamak dari keluarga orang jang akan dipinang itu. Dalam „kontak” jang pertama ini, kedua belah pihak hanja „tindjau menindjau” sadja. Bila ternjata bahwa „tindjauan” ini akan memberikan hasil, maka pada pertemuan kedua nanti oleh kedua Manti itu ditentukan suatu ketika jang baik untuk mendatangi rumah keluarga jang dipinang. Dan bila pinangan itu tidak dapat diterima oleh satu pihak, maka pada pertemuan jang kedua itu dinjatakanlah dengan setjara halus dan litjin, bahwa pinangan itu tidak dapat diterima.

Tapi bila pinangan itu, sesudah diperbintjangkan pula oleh keluarga jang dipinang, diterima baik, maka pada hari jang ditetapkan datanglah perutusan pihak jang meminang kerumah jang dipinang dengan membawakan sekali „tanda-tanda” sebagai bukti. Upatjara ketjil ini biasa disebut dengan „bertimbang tanda”, artinya tukar-menukarkan tanda.

Perutusan jang meminang ini biasanja terdiri dari dua-tiga orang laki-laki jang separo baja dan jang pandai berpepatah dan petitih, orang tjerdik didalam kampung. Kedatangan mereka biasanja ditunggu oleh beberapa orang ninik-mamak. Sesudah makan-minum sekadarnja, maka oleh mereka jang datang ini dinjatakanlah udjud kedatangan mereka, jaitu untuk meminang anak kemenakan penghulu dikampung itu untuk diperdjodohkan dengan anak kemenakan penghulu dari kampung anu dan mereka sebagai utusannya.

Karena sebelum itu sudah ada „kontak” lebih dahulu, maka jang mendjadi soal penting dalam pertemuan itu hanjalah untuk menjerahkan dan menerima tanda bukti, bahwa pinangan tersebut diterima.

„Tanda” jang dipertukarkan itu biasanja tidak terdiri dari benda-benda jang mahal harganja, tapi harus terdiri dari barang-barang

jang dimuliakan oleh kedua belah pihak, misalnja **sebentuk** tjintja pusaka. Sebelum tanda-tanda itu dipertukarkan, maka **diperbintjangkan** pula besarnja uang antaran atau perlengkapannja, dan bila kira-kira perkawinan akan dilangsungkan dan bagaimana tjara dan besarnja upatjara perkawinan itu nanti. Bila sudah disepakati pula semua, barulah „tanda” itu dipertukarkan.

Mendjelang berlangsungnja perkawinan itu, kedua belah pihak diresmikan sudah bertunangan, tapi keduannya tidak diizinkan bertemu muka satu sama lain. Selama pertunangan ini bila salah seorang diantaranya mungkir akan perdjandjian atau ingin hendak membatalkan perdjodohan itu, maka tandanja akan hilang, dan tidak dikembalikan oleh pihak jang dirugikan. Karena itu, maka biasa djuga „tanda” kedua belah pihak dipegang oleh tangan ketiga, jaitu salah seorang penghulu jang dipertjajai oleh kedua belah pihak. Dan pernah djuga kedjadian, bila suatu pihak memungkiri perbuatan itu, maka dia diwadjibkan melipat gandakan tanda jang sudah diberikannja sebagai denda dari djandji jang dimungkirinja.

Uang antaran sebagai diputuskan dalam pertemuan mengantar kan tanda diatas, diantarkan kira-kira sepekan sebelum upatjara perkawinan itu dilangsungkan, dan kadang-kadang kira-kira sebelum sebelumnya. Besar atau ketjilnja uang antaran itu bersangkut kepada besar dan ketjil helat perkawinan jang akan dilangsungkan, dan menurut perdjandjian kedua belah pihak.

Karena sampai pada hari ketiga sesudah berlangsungnja helat perkawinan kedua orang jang diperdjodohkan itu tidak dibenarkan untuk bertemu muka, maka tidaklah mengherankan bila sebahagian terbesar diantara suami-isteri baru itu sama sekali tidak mengenal sebelumnya, apalagi bila pihak gadis seorang perempuan pingingan.

Sekarang marilah kita tindjau pula bagaimana *helat perkawinan* itu dilakukan.

Ada tiga matjam helat perkawinan jang biasa dilangsungkan di Minangkabau. Tjara pertama, jaitu apa jang disebut dengan „*Gon-teh Putjuk (pangkas putjuk)*”. Perhelatan ini hanja dihadiri oleh beberapa orang ninik mamak dan keluarga jang terdekat sadja, jang dalam istilah biasa di Minangkabau biasa djuga disebut dengan perhelatan „selingkung selingkar parit, sedusun-dua dusun, sesebar djala, selantak galah”.

Tingkat kedua disebut dengan „*Kabung Batang*”, jaitu perhelatan jang dilangsungkan dengan tjara jang lebih besar dari pada tingkat pertama tadi. Untuk perhelatan ini biasanja disembelih beberapa ekor kambing untuk pendjamu helat. Perhelatan ini djuga disebut dengan „*Sekoto-dua koto*, dihimpun mana jang patut, dipanggil mana jang beralur; bila dekat tjerana tiba, bila djauh surat ter-lajang”.

Dan tingkat ketiga dinamakan dengan „*Lambang Urat*“, jaitu perhelatan setjara besar-besaran dan untuk mana harus disembelih beberapa ekor sapi atau kerbau dan berlangsung beberapa hari lamanja. Pada perhelatan ini biasanja terdjadi apa jang dibajang dengan „Panggilannja sisik-pelapahan“ (dipanggil sampai terba-wa), pakai tombak dan gendala serta pedang berapit, terkembang pajung ubur-ubur, tertegang neratja dihalaman, lengkap dengan gong dan talempong (gemong), gendang dan serunai; dihimbau dengan dengungan gong, dilepas dengan letusan bedil. Bila perdja-muan lah usai, dilakukan pula arak-arakan, dimana laki-laki dan perempuan-perempuan berbaris beriring-iringan memakai pakaian adat selengkapnja”.

Helat perkawinan ini tidak hanja habis sehingga itu sadja, tapi bersambung pula dengan upatjara-upatjara lain jang berlangsung diantara keluarga kedua belah pihak. Jang terpenting diantaranya, ialah perarakan anak dara kerumah mempelai jang berlangsung esok hari sesudah perarakan mempelai kerumah anak-dara. Perarak-an ini adakalanja dilakukan pada siang hari dan adakalanja pada malam hari, dengan diikuti oleh arak-arakan jang pandjang pula.

Sesudah kira-kira seminggu semendjak berlangsungnja perhelatan ini, barulah kedua suami isteri itu memasuki kehidupan berumah tangga. Berlainan dengan diberbagai tempat dikepulauan Indonesia, isteri tidaklah dibawa pindah kesuatu rumah atau kekampung suami-nja, tapi sisuamilah jang harus pindah tempat kerumah isterinja.

Dalam keadaan ini, kalau tidak ada kedjadian-kedjadian jang penting, paling kurang dua kali dalam setahun, ibu dan keluarga pihak suami ini haruslah datang mengundjungi menantunja. Kedatangan dan kundjungannja kerumah menantunja itu pada hakekat-nja adalah untuk meninjau keadaan dan kesehatan mereka. Bila musim panen lah tiba, menantu ini biasanja diundang pula oleh mertuanja untuk membantu pekerdjaan disawah. Sesudah itu nanti kepadanja diantarkan padi berpuluh sukat.

Dan bila kedua suami isteri itu akan kedatangan bahagia dengan akan lahirnja putera mereka, maka siisteri ini didjemput pula kerumah mentuanja dan diantarkan kembali bersama dengan mengantarkan makanan dan buah-buahan jang mendjadi peng idaman perempuan hamil. Waktu puteranja lahir, beberapa hari sesudahnja, sisuami mengadakan pula suatu perhelatan untuk memperkenalkan puteranja kepada keluarganja dan keluarga isteri-nja. Pada perhelatan ini biasanja baji itu diberi bernama. Perhelatan itu disebut „Membawa turun Mandi”.

Kemudian, bila baji ini sudah berumur beberapa bulan, dia dibawa kerumah neneknja dengan upatjara pula dan kemudian diantarkan kembali pulang kerumah ibunja. Pengantaran pulang ini biasanja disertakan dengan perarakan jang membawakan padi, ternak dan lain-lain pemberian kepada baji ini oleh keluarga ajahnja, atau

bakonja. Ternak pengiring itu adakalanja terdiri dari seekor sapi betina jang masih muda, atau seekor kambing betina, jaitu menurut kesanggupan dan kekajaan bako itu. Binatang ternak ini haruslah diperkembangkan guna mengongkosi dan membiajai pendidikan anak itu dihari depan.

Perhubungan antara anak dengan bakonja ini dimasa depan akan bertambah banjak, terutama dinegeri-negeri dimana gelar seseorang dihadiahkan oleh bako. Gelar jang dimaksud disini sudah tentu bukan gelaran bagi seorang penghulu.

Seorang putera Minangkabau jang sudah dewasa, disamping namanja jang asli, djuga memakai *gelaran* (bijnaam). *Gelaran* itu biasanja dihadiahkan oleh bako pada waktu helat perkawinan atau balagak penghulu dilangsungkan. Kerap kedjadian, gelar itu lebih dipopulerkan dari nama ketjil atau nama asli. Bila seseorang sudah beristeri, maka mentua dan kaum keluarga isterinja bukan menjebut dan memanggilkan nama ketjilnja, tapi harus dipanggilkan gelarannya. Kalau sebelum beristeri dia bernama Adnan, misalnja, dan diwaktu upatjara perhelatan bakonja menghadihkan gelar „Soetan Pamenan” kepadanya, maka „Soetan Pamenan” inilah nama panggilan seterusnya nanti.

Gelar jang dihadiahkan oleh seorang bako merupakan pemberian jang dipandang sangat tinggi mutunja, karena dari gelar pemberian itu orang akan tahu, bahwa selain dari mamaknja, bapaknja orang jang „berketurunan” djuga.

Karena sangat rapat hubungan seseorang dengan bakonja inilah, pada sebahagian tempat di Minangkabau seorang gadis atau djanda tidak diizinkan kawin dengan seorang laki-laki jang berasal dari luar negerinja sendiri. Tapi adat kebiasaan tidak mengizinkan bersuamikan seorang laki-laki dari tempat lain itu, pada waktu belakangan ini hampir hilang, dan hanja dibeberapa buah negeri kebiasaan demikian masih dipertahankan. Bagi mereka jang berani melanggar kebiasaan itu, biasanja dikenakan hukuman, jaitu jang bersalah itu dipentjil dari masjarakat negeri tersebut, tidak dibawa sehilir semudik lagi. Hukuman itu akan ditjabut kembali bila dia mengakui „kesalahannja” dengan menjembelih seekor kerbau untuk pendjamu isi negeri.

Ditengah-tengah masjarakat itu sendiri tidak pula kurang banjak-bersangkut paut dengan perkawinan itu, jaitu sebagai jang biasa kedapatan dalam masjarakat jang dinamakan „beradat”.

Pasal 64.

ADJARAN-ADJARAN DAN ETIQUETTE DALAM PERGAULAN.

DARI uraian-uraian jang berlalu, ternjatalah sekarang, bahwa gerak dan langkah seorang putera Minangkabau didalam masjarakat bangsanja sangat terikat kepada segenap norm-norm jang berlaku didalam masjarakat itu sendiri. Dia tak boleh dan tidak kuasa melepaskan dirinja dari kongkongan susila jang sudah dipusakai semendjak beratus tahun lamanja dari nenek mojangnja itu, selagi dia masih merupakan sebahagian diantara mereka. Meskipun oleh sebahagian dari para angkatan baru itu sudah ditjoba untuk menguasai adat kebiasaan jang dipandang dan dirasanja tidak lagi sesuai dengan bawaan masa itu, tapi usaha-usaha mereka ini amat sedikit memperlihatkan buah dan hasil, entah kalau dalam lingkungan masjarakat jang sudah lama bersarang didalamnya pengaruh-pengaruh kebudayaan barat, sebagai dikota-kota jang agak besar.

Ditengah-tengah masjarakat itu sendiri tidak pula kurang banjaknja orang-orang jang mentjoba berusaha untuk memperbaharui bawaan „adat lama pusaka usang” ini agar dia selaras dengan zaman, tapi hasilnja djuga sangat sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena eratnja hubungan antara semua unsur masjarakat itu satu sama lainnja, unsur-unsur mana, gerak dan geriknja lebih dahulu sudah diatur menurut alur dan garis-garis adjaran adat. Dan karena itu, maka tidak hanja apa jang berbau adat sadja jang dipengaruhi oleh adat itu, tapi tiap-tiap bawaan pergaulan harus disesuaikan dengan dia.

Adjaran adat Minangkabau tidak hanja dilakukan didalam kalangan dan lingkungan „pedjabat-pedjabat adat” sadja, tapi diberikan dengan tjara jang „merata” kepada anggota masjarakat. Butir-butir adjaran itu disusun demikian rupa, didjadikan pepatah dan petiti jang „bersadjak” sampai menjerupai bentuk proza dan poëzi jang amat sedap didengar oleh telinga bila dibatjakan kepada seseorang. Tjara menjusun adjaran-adjaran adat setjara demikian itu bukan sadja menjebakkannja „menarik” untuk didengar dan diperhatikan, tapi djuga menjebakkan para pemuda ini bertambah halus perasaannja untuk menerima sesuatu dengan setjara tidak langsung, dan menjatakan sesuatu dengan hanja setjara „bajangan” sadja. Djadi, dengan demikian mereka seakan mentjari djalan jang halus pula untuk menjatakan perasaan mereka masing-masing.

Untuk mengetahui dan memberi tahukan sesuatu jang menjangkut dengan adat dan basa-basi dalam pergaulan, seseorang terkadang tidak usah dengan sengadja mendatangi orang jang dirasa dan dipandangnja tahu dalam hal itu. Dilanggar-langgar atau disurau-surau, dimana para pemuda itu biasa tidur, — seorang pemuda jang meningkat dewasa dipandang hina bila masih tidur dirumah ibunya —, atau dipemedanan dimana biasanja para pemuda itu kerap berkumpul pada sore dan malam hari, merupakan tempat jang baik untuk memperdalam pengetahuan mengenai dengan adjaran-adjaran dan basa basi adat.

Tidak hanja apa jang menjangkut dengan adat-istiadat jang diberikan kepada para pemuda itu, tapi diadjarkan djuga bagaimana mereka harus memelihara dirinja dari sesuatu „serangan“, baik langsung maupun tidak langsung. Pemedanan (lapangan untuk mengadakan pertemuan) itu tidak hanja disediakan untuk berkumpul dan berkelakar, tapi djuga disediakan sebagai tempat untuk mempeladjar silat dan pentjak, untuk mempeladjar sisik dan tuah ajam sabungan, tempat mempeladjar pusar-pusar dan tuah binatang ternak dan lain-lain sebagainya. Untuk mereka djuga tersedia sebuah „tjongkong (gardu)“ tempat berdjaga-djaga dimalam hari bila musim kemarau lah datang. Disini kadang mereka mempeladjar bagaimana memakai dan mempergunakan alat-alat bunji-bunjian jang terdiri dari salung, puput, rebab, ketjapi, gemong, gendang, serunai dan sebagainya, dan disini pula mereka beladjar berpantun dan bergurindam.

Dan nanti, bila mereka hendak tidur dilanggar mereka masing-masing, dari salah seorang jang tertua diantara mereka dibentangkan dan dipaparkan segala sesuatu jang menjangkut dengan adjaran-adjaran masjarakat jang harus mereka ketahui dan amalkan dimasa jang akan datang.

Untuk mengenal adjaran itu, dibawah ini diturunkan beberapa bahagian diantara beratus matjam pepatah dan petitih jang mengandung adjaran-adjaran tersebut.

Untuk mentjapai hasil baik dalam lapangan kehidupan diadjarkan agar :

Kalau duduk meraut randjau,
Bila tegak menindjau djarah,
Menelentang menghitung kasau,
Menghereng menghitung dinding,
Menelungkup menghitung lantai,
Berdjalan mendjemput laba.

Kemudian dipesankan pula, bahwa:

Harus menimbang berat dengan ringan,
Mengukur tinggi dengan rendah,
Menghitung laba dengan rugi,
Mengingat hina dengan mulia,
Mengingat pakaian pada tubuh.

Untuk bekal pergaulan sehari-hari, dipesanan agar:

Berlajar bernachoda,
Berdjalan ber-jang tua,
Berbitjara ber-jang pandai,
Tuah sekata, tjelaka bersilang.

Agar selalu memakaikan kebidjaksanaan dalam semua lapangan, maka kepada seluruh putera Minangkabau itu dipesanan supaya mereka dapat segera membedakan sesuatu. Adjaran ini dinjatakan dengan:

1. Terkilat ikan didalam air, lah tentu djantan betinaja.
2. Belum berkilat lah berkelam, bulan disangka tiga puluh.
3. Melenguh sapi didalam badjak (luku),

Berkotat ajam didalam telur,
Berkata anak didalam tian (rahim),
Lah tentu siupik sibujungnja.

4. Putjuk sidjawi-djawi lontas,
Putjuk sidjawi-djawi muda,
Dilangit dia lah melintas,
Kami dibalik itu pula.

Untuk mendorong agar giat bekerdja dan berusaha, dipetaruhkan agar:

Lebihkan tegak dari duduk,
Lebihkan sabar dari bebal,
Lebihkan radjin dari segan,
Lebihkan baik dari djahat.

Ketika ada djangan dimakan,
Lah tidak ada baru dimakan.

Hemat pangkal kaja,
Sia-sia utang tumbuh.
Sediakan pajung sebelum hudjan.

Hendak kaja berdikit-dikit,
Hendak tua bertabur urai.

Hilang bangsa tak beruang,
Hilang warna karena penjakit.

Etiquete dalam pergaulan sehari-hari jang akan membajangkan budi pekerti seseorang didjaga dengan baik dan seksama. Beberapa pa adjaran berkenaan dengan itu menjatakan, bahwa:

1. Jang tua harus dimuliakan,
Jang ketjil harus dikasihi,
Sesama besar lawan bergurau,
Elok dipakai, buruk dibuang.

2. Orang Silungkang membawa kapas,
Orang Bantan membawa air,
Jang memantjing jang memampas,
Jang berutang jang membajar.
3. Keluk paku katjang belimbing,
Bawa menurun ke Saruaso,
Tanam Sirih dengan uratnja;
Anak dipangku, kemenakan dibimbing.
Tenggang negeri agar sentosa.
Tinggang serta dengan adatnja.
4. Jang kurik ialah kundi,
Jang merah ialah saga;
Jang baik ialah budi,
Jang murah ialah basa (budi bahasa).

Mengingat kedudukan seorang suami didalam rumah tangganya dan mengingat pula kepada perhubungan sisuami ini dengan keluarga-keluarga isterinja, maka dapatlah dibayangkan, bahwa sebelum mendjadi suami itu seorang laki-laki Minangkabau haruslah terlebih dahulu dibekali dengan banjak petundjuk-petundjuk dan pedoman-pedoman betapa dia harus berlaku dan berlagak terhadap kepada keluarganya jang baru itu nanti. Selain kepadanya ditundjukkan perlakuan-perlakuan sopan santun dan manis budi-pekeri jang harus mendjadi pembawaannya sehari-hari, djuga kepadanya diterangkan bagaimana harusnja seorang suami bertindak terhadap isterinja, seorang bapak terhadap anak-anaknja dan seorang menantu terhadap mertuanja.

Mengenai ini, kepada seorang pemuda jang meningkat dewasa mulai diberikan petundjuk-petundjuk bagaimana nantinja seorang pemuda (urang mudo-mudo) harus bersifat. Mereka haruslah memakaikan fatwah-fatwah dibawah ini dalam pergaulan dan kehidupan mereka sehari-hari, jaitu:

1. Baik rupa (djangan pemberengut),
2. Manis mulut (baik tegur dan sapa) kutjindan murah,
3. Sutji hati, pakaian dan tubuh,
4. Teguh dan setia dalam persahabatan serta bertabiat mulia,
5. Berilmu dan berpengetahuan, serta mejakinkan ilmu dunia dan achirat (Agama),
6. Dan lain-lain sebagainya.

Kepada seorang bakal suami atau kepada seorang jang akan mentjari sumando diadjarkan, bahwa sumando itu ada enam matjam banjaknja, jaitu:

1. Sumando „katjang miang”, artinja semanda jang dirumah isterinja banjak menimbulkan sengketa dikalangan keluarga.

2. Sumando „langau hidjau“, artinja semanda jang tidak mau ikut serta menghiraukan buruk baik dalam rumah tangga isterinja.
3. Sumando „tuo dapua (tua dapur)“, jaitu semanda jang hanja tahu apa jang akan dimakan dan tidak menghiraukan bagaimana makanan tersebut dihasilkan.
4. Sumando „lapik buruek (tikar buruk)“, jakni semanda jang malas bekerdja, lebih banjak tidurnja dari usahanja,
5. Sumando „bapak padja (bapak kanak-kanak)“, jakni semanda jang hanja pandai beranak tapi tidak mengatjuhkan penghidupan dan pendidikan anak-anaknja itu, dan
6. Sumando „Ninik-mamak“, semanda sebenar semanda, jaitu jang ikut menentukan buruk dan baik dirumah tangga isterinja serta bertanggung djawab atas keselamatan keluarganja.

Sedjalan dengan itu, dinjatakan pula saran-saran untuk menegakkan keselamatan dan kesentausaan hidup berumah tangga. Hal ini terutama dipesankan kepada tungganai (ketua) didalam rumah tangga dan kepada bekal mertua, bahwa dalam mentjari seorang „sumando“ itu haruslah diperhatikan benar dengan seksama siapa orang jang akan diambil mendjadi menantu itu. Menantu dan sumando itu haruslah:

„Ditjari jang sepadan, pandang anak pandang menantu, tidak harap dikaja orang, tidak harap dipangkat besar, hanja budi jang dipandang utama, sebagai dibajangkan dalam pantun:

Berbelok berbilin-bilin,
 Berbelok ke Batang Hari;
 Di elok orang tak ingin,
 Budi, bahasa baik jang kita tjari.

Jang merah ialah saga,
 Jang kurik ialah gundi,
 Jang murah hanja basa,
 Jang baik hanja budi.

Karena seseorang tidak mungkin dapat melepaskan dirinja dari hubungan kemasjarakatan, maka untuk menghadapi usaha-usaha dan norm-norm didalam masjarakat itu, setiap orang harus mempunjai bekal jang banjak pula.

Tugas utama dalam menghadapi masjarakat jang besar itu, disimpulkan didalam adjaran-adjaran berikut:

1. Berat sama dipikul, ringan sama didjindjing.
2. Kerdja baik berhimbauan (berpanggilan), kerdja buruk berhambauan (berdatangan).

3. Oleh almarhum Datuk Perpatih Nan Sebatang diamanahkan agar:

- a. Harus kasih kepada isi negeri (bangsa dan negara),
- b. Kasih kepada negeri (tanah air),
- c. Kasih kepada orang-orang tua,
- d. Kasih kepada alim-ulama (ilmu pengetahuan),
- e. Kasih kepada orang-orang besar (pemimpin-pemimpin).

Dan untuk menjadi seorang anggauta masyarakat yang berfaedah, seseorang haruslah mempunyai sifat-sifat:

- a. Kuat mentjari ilmu (pengadjaran) yang baik,
- b. Kuat berbelanja untuk kebadjikan,
- c. Kuat memperbaiki parit-pagar didalam negeri (artinja harus ikut serta dengan giat membina kesedjahteraan),
- d. Kuat menjelesaikan yang kusut didalam negeri,
- e. Kuat membendung segala matjam persengketaan.

Dalam perhubungan antara suami isteri, adat Minangkabau menghendaki agar mereka harus hidup rukun dan damai, aman dan sentausa. Bila kedua suami isteri itu harus berpisah atau bertjerai, maka perpisahan ini haruslah „tjarai tambilang” (perpisahan karena salah seorang meninggal dunia).

Didaerah ini berlaku system poligamie sebagai yang dihalalkan oleh adjaran Agama Islam.

Hal ini dapat dipersaksikan didalam tiap-tiap helat (upatjara) perkawinan. Dalam perhelatan demikian, terutama bila yang diperhelatan itu seorang gadis dengan seorang djedjaka, diadakan pidato „pengantar” dan „penjambut”.

Karena keluarga pihak laki-laki berada dalam pihak „jang mengantarkan” mempelai kerumah anak dara, maka pidato-pidato adat dari pihak laki-laki banyak merupakan „mempertaruhkan” anak kemenakan mereka. Biasanja dalam hal ini oleh pihak yang mengantar itu diharapkan kepada pihak yang menunggu, agar menantu mereka yang diantarkan itu hendaklah selalu diberi petundjuk-petundjuk dan pengadjaran-pengadjaran agar nanti djangan sampai memberi malu didalam lingkungan keluarga yang baru dimasukinja itu, karena mempelai ini masih sangat muda, „umurnja belum setahun djagung dan darahnja belum setampuk pinang” dan lain-lain sebagainja.

Begitupun dari pihak yang didatangi (pihak anak dara), didatangkan pula pengharapan-pengharapan yang serupa tapi dengan tjara dan langgam yang berlainan. Didalam pidato yang bersadjak dan tersusun rapi itu, diselipkan pula beberapa rangkum pantun yang antara lain berbunji:

Si Amat padang Si Abung,
Nan lalu ke Padang Serai;
Berkimat kain berkabung,
Lah luluh maka bertjerai.

Jang dimaksud dengan kedua bait pantun dibawah itu, jaitu sesudah hantjur luluh kain kapan pembungkus djasat salah seorang keduannya itu nanti dimakan oleh tanah pekuburan, barulah keduannya akan berpisah.

Demikianlah uraian sepintas lalu mengenai adjaran-adjaran dan saran-saran hidup dalam segi-segi pergaulan jang diadjarkan kepada pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi Minangkabau, jaitu hanja beberapa bahagian jang diambil sebagai tjontoh.

Adjaran kepada pemuda-pemuda itu biasa dilakukan dilanggar-langgar atau ditempat-tempat pertemuan jang khusus bagi pemuda-pemuda itu, karena seorang pemuda jang sudah mulai meningkat umur dewasa (biasanja sesudah mereka chitan) dipandang hina bila masih tidur dirumah orang tua mereka. Adjaran-adjaran demikian biasa diadjarkan oleh jang lebih tua dari mereka, baik dengan tjara berdendang sambil mengisahkan kedjadian-kedjadian dan kebesaran-kebesaran dizaman jang lampau, maupun dengan djalan biasa sadja.

Ditempat itulah mereka beladjar kenal dengan sedjarah keturunan mereka, dan disana pula mereka diadjar fasih berbitjara dalam bermatjam-matjam ilmu jang lain.

*
**

Pasal 65.

NORM HUKUM DAN NORM SOSIAL.

HUBUNGAN kemasjarakatan (*maatschappelijk verhoudingen*) dikalangan rakyat Minangkabau merupakan perhubungan yang mengikat gerak dan langkahnya dalam semua lapangan. Hal ini tentu dengan mudah dipahami bila segi-segi kehidupan mereka sudah diselami, sebagai sudah kita bajangkan pada bahagian yang lampau. Pengaruh perhubungan sematjam ini tidak saja kelihatan dengan nyata ditempat-tempat dimana mereka dilahirkan, juga terasa didaerah-daerah dimana mereka berada.

Adjaran „hampir mentjari hindu, djauh mentjari suku” menjebabkan perhubungan kekeluargaan dikalangan mereka hampir tidak pernah memisahkan diri mereka walaupun dimana juga mereka berada. Seorang pemuda Minangkabau yang buat pertama kalinya merantau ketempat djauh, dengan mudah akan beroleh pengakuan kekeluargaan dari seorang putera Minangkabau lainnya yang sudah berpuluh tahun lamanya tidak pernah kembali kekampung tempat kelahirannya, bila mereka kenal mengenalkan suku (pesukuan) mereka masing-masing.

Perhubungan demikian tidak hanya dihubungkan oleh pertalian atau persamaan suku saja, tapi juga karena mereka serasa dikungkung oleh suatu norm yang mengharuskan mereka sewaktu-waktu mendekatkan diri mereka satu sama lain.

Norm Susila (*fatsoennormen*) seluruh puak bangsa di Indonesia mungkin mempunyai bentuk yang sama, karena norm ini merupakan refleksi dari Agama dan kebudayaan yang „didatangkan” dari daerah yang sama pula. Tapi tidak demikian halnya dengan norm hukum dan norm sosial karena pada semua tempat kedua norm ini merupakan „Undang-undang yang tidak tertulis”, tapi selalu dipatuhi sebagaimana mestinya.

Memperkirakan norm hukum dan norm sosial rakyat Minangkabau dizaman keemasannya dulu, tentu saja bukan soal yang mudah, karena sampai sekian djauh orang masih harus berusaha sendiri untuk menjelidiki dasar-dasar kedua norm itu sebab selain dari tidak atau sangat sedikitnya pokok-pokok yang dapat dijadikan bukti, pokok-pokok itu kebanyakannya tersimpan didalam lubuk jiwa.

Dan karena kedua soal ini merupakan suatu patokan untuk menjempurnakan suatu tindjauan perkembangan peradaban suatu bangsa, sedikit banjaknja keduanja tentu harus mendapat kupasan pula. Dari itu marilah kita tindjau pula kedua soal pokok ini sekadar jang kita dapati.

Bahwa kebudajaan Minangkabau merupakan kebudajaan jang „suka memberikan tempat”, mudah mendapat pengakuan. Hal ini dibuktikan dengan „doctrine” „Adat jang tidak lapuk karena hudjan dan tidak lekang kena panas”, berubah mendjadi „Adat bersendi Sjarak (Agama) Agama bersendi Kitabullah”. Dan karena bergandengannja hukum adat dengan hukum agama itu, dengan segera berubah pulalah „code-code” hukum kemasjarakatan di Alam Minangkabau, jaitu dengan djalan „melunakkan” tekanan hukum adat untuk memberi tempat kepada hukum sjarak karena jang baru datang ini tidak mungkin „mengurangkan tuntutannja”.

Disaat-saat dimana „adat” jang sudah banjak berkorban itu tidak hendak memberikan peluang-peluang sebagai dikehendaki oleh „Agama”, maka timbullah ketegangan-ketegangan didalam negeri, jaitu ketegangan-ketegangan jang terkadang menjebabkan darah harus tertumpah sebagai jang diketahui pada sebelum terdjadinja Perang Padri.

Tapi hal ini bukanlah menjebabkan tidak dapatnja dikumpulkan bahan-bahan untuk mengetahui codeficatie dari serba matjam Undang-undang jang pernah berlaku di Minangkabau dizaman dahulu. Soal itu dapat diterangkan sebagai dibawah ini:

Adapun Undang-undang hukum di Minangkabau tersimpul kepada sebuah code jang dinamakan „Undang-undang 20”. Undang-undang nan 20 ini merupakan pokok-pokok ketentuan dalam mengupas dasar-dasar dan alasan-alasan mengenai suatu peristiwa jang harus diselesaikan.

Kedua puluh matjam pokok ini dibagi kepada tiga matjam dasar, jaitu:

Pertama, pengupasan mengenai perkara-perkara kedjahatan,

Kedua , mengenai soal-soal jang menjangkut dengan tuduhan,
dan

Ketiga , mengenai soal-soal jang menjangkut dengan dakwaan.

Pada Bahagian pertama termasuk 8 matjam perkara, jaitu:

1. **Tikam-bunuh:** dengan pengertian, bahwa „Tikam” berarti melukai seseorang dengan sendjata tadjam, tapi tidak menjebabkan orang itu meninggal. „Bunuh”, artinja perbuatan jang menjebabkan orang meninggal dunia.

2. **Upas-ratjun:** dengan pengertian, bahwa „Upas” ialah memberi seseorang makanan jang menjejabkan orang itu mendapat sakit, dan „Ratjun”, memberi makanan kepada seseorang jang menjejabkan orang itu meninggal dunia.
3. **Maling-tjuri:** dengan pengertian, bahwa „Maling” ialah mengambil harta simpanan seseorang dengan tidak setahu orang itu „Tjun” ialah, mengambil harta diluar simpanan seseorang dengan tidak setahu orang jang empunya.
4. **Kitjuh-Kitjang:** „Kitjuh” ialah, melebihi atau mengurangi jang sebenarnya, dan „Kitjang” menukarkan nama atau rupa sesuatu.
5. **Samun-Sakar:** jang dimaksud dengan ini, jaitu „Samun” berarti membunuh orang dengan maksud untuk memperoleh harta orang itu, dan „Sakar” berarti menjakiti seseorang karena untuk memperoleh harta orang tersebut.
6. **Rebut-Rampas:** „Rebut” artinja mengambil harta orang lain dengan djalan tjara kekerasan, dan „Rampas” berarti mengambil serta membawa lari harta orang diambil itu.
7. **Dago-Dagi:** „Dago” diartikan dengan membantahi/menjalahi perintah pihak atasan dengan tidak ada alasan jang tepat, dan „Dagi”, jaitu membikin huru-hara didalam negeri.
8. **Sumbang-Salah:** Jang dimaksud dengan „Sumbang”, ialah memperdjodohkan seseorang sesuatu tidak dengan djodohnja, dan „Salah” jaitu berbuat djahat dengan orang lain.

Bahagian kedua, jaitu menjangkut dengan soal-soal tuduhan, terdiri dari 6 pasal, jaitu:

1. **Terlelah-Terkedjar:** Seorang tersangka melarikan diri dan dikedjar oleh jang tersangkut. Jang mengedjar ini tidak dapat menangkap jang dikedjar. Orang banjak datang menolong dan jang tertuduh dapat ditangkap bersama-sama. Hal ini disebut dengan „merawal (pandji-pandji) berkibar diatas bukit; ajam putih terbang siang, hinggap dikaju meranggas; bersuluh matahari, bergelanggang mata orang banjak”. Si tertuduh tidak dapat melepaskan dirinja lagi.
2. **Tertanda-Terbukti:** Pada tersangka didapati bukti-bukti dia melakukan suatu kedjahatan dan pada orang jang dianiaja djuga terdapat bukti-bukti penganiajaan.
3. **Tertjentjang-Teragas (terpotong):** Pada diri jang tersangka kedapatan bukti-bukti bahwa jang dianiajanja memberikan perlawanan.
4. **Terikat-Terkungkung:** Pada waktu kedjadian suatu penganiajaan orang jang disangka melakukan kedjahatan itu tidak berada ditempatnja jang biasa ditempatinja, dan bukti-bukti

tidak dapat diberikannya dengan terang bahwa dia melakukan pekerjaan itu sementara sekian lama dia disangka dipandang sebagai seorang yang berkelakuan kurang baik.

5. **Tertumbang-Tertjiak:** Misalnya, pada seseorang didapati sebuah benda yang berasal dari tjurian. Bila dia dapat membuktikan bahwa barang tersebut dibelinya atau diperolehnya dari orang lain, maka hal ini dinamakan dengan „tumbang-tertjabut“. Tapi bila dia tidak dapat membuktikan, disebut „tumbang dilantak“.
6. **Tertangkap dengan salahnya:** Seseorang yang tertangkap tangan dalam melakukan suatu kejahatan.
Dan pada bahagian ketiga, yaitu menjangkut dengan dakwaan, tersemat enam buah pasal pula, yaitu:
 1. **Bersurih bagai si-pesin:** seseorang ditemui tengah membawa barang-barang tjurian pada waktu terdjadi pentjurian tersebut.
 2. **Berdjedjak bak bekik:** Seseorang ditemu tengah berdjalan tergesa-gesa pada waktu terdjadi suatu kejahatan/pentjurian.
 3. **Terbajang-Tertabur:** Seorang yang dikabarkan melakukan suatu kejahatan dan pada dirinja disangka ada bukti-bukti kejahatan tersebut.
 4. **Berdjedjak-Berunut:** Hilangnya djedjak sifersangka waktu diadakan penelapakan atau pengusutan.
 5. **Ketjendorongan mata nan banjak:** sebelum terdjadinja pentjurian seorang yang disangka hidupnya dalam kemiskinan. Tapi sesudah pentjurian itu terdjadi, tiba-tiba hidupnya mewah dan dia tidak dapat membuktikan dari mana bahan kemewahan hidup itu diperolehnya.
 6. **Elang lalu, antah djatuh:** seseorang tersangka yang mungkir melakukan suatu kejahatan, tapi waktu kejahatan itu terdjadi dan berada dekat tempat itu sementara orang banjak sekian lama tidak begitu pertjaja kepadanya.

Itulah pasal-pasal yang menjadi pokok dalam Undang-undang nan 20 yang pada waktu dahulunya menjadi Undang-undang pokok untuk mengadili suatu perkara di Minangkabau. Kepada pasal-pasal dalam Undang-undang inilah semua hakim di Minangkabau berpegang baik diwaktu mengadili, maupun diwaktu memberikan hukuman kepada pesakitan-pesakitan.

Dan bagaimana pulalah bentuknya „Hukum Sosial“ yang sudah tertentu mempunyai tjorak istimewa itu?

Bahan penyelidikan untuk norm utama ini, agaknya haruslah diselidiki dari tjara-tjaranja mereka mengerdjakan sesuatu pekerjaan umum. Dan sebagai biasa, kerdja bersama untuk keperluan bersama ini pada umumnya kita sebut dengan perkataan: Bergotong Rojong.

Pasal 66.

BERGOTONG-ROJONG.

DASAR hidup kekeluargaan di Minangkabau adalah dasar gotong-rojong. Lapangan bergotong-rojong ini kedapatan dalam semua segi kebutuhan hidup dan kesedjahteraan bersama.

Kebiasaan baik yang dipusakai semendjak beberapa abad yang lampau itu sampai pada hari ini masih hidup dengan subur, dan tidak seorangpun diantara rakyat Minangkabau yang belum pernah mengerdjakannya.

Pekerdjaan bergotong-rojong bukan hanya dilakukan untuk membikin sesuatu yang akan menjadi milik masyarakat saja, tapi juga dilakukan untuk keperluan satu individu, bahkan suatu keluarga.

Lapangan pekerjaan bergotong-rojong itu biasanya meliputi pekerjaan :

1. Mendirikan rumah,
2. Mendirikan Mesdjid dan Balai Adat,
3. Membersihkan kampung dan jalan-djalannya,
4. Menjabit dan mengirik padi,
5. Memperhelatkan keluarga (perkawinan dan sebagainya),
6. Menjelenggarakan dan menguburkan majat,
7. Dan lain-lain sebagainya.

Baiklah kita selidiki lapangan bergotong-rojong tersebut diatas satu-persatu.

Pandangan dan penghargaan orang Minangkabau terhadap rumah tangganya, terutama terhadap „rumah gadang“, melebihi dari pandangan orang terhadap kampung halamannya. Karena untuk mendirikan rumah itu seluruh penduduk negeri sama mengerahkan tenaga. Terhadap rumah gadang itu dia tidak boleh berkata „rumah saja atau rumah kami“, tapi dia harus berkata dengan „rumah kita“, karena:

1. Maksud untuk menegakkan sebuah rumah gadang harus dibitjarkan lebih dahulu dengan orang sehindunya. Bila sudah mendapat persetujuan, dasar tempat rumah itu akan ditegakkan dikerdjakan bersama oleh orang sehindu.

2. Tiang-tiang untuk rumah tersebut ditjari bersama ketengai rimba oleh orang sepesukuan. Dan bila tiang-tiang ini sudah lengkap semua, maka jang membawanja kekampung haruslah orang itu pula, bahwa kadang-kadang oleh penduduk negeri. (Bila jang akan dibikin rumah gadang 5 ruang, tiangnja berdjumlah 30 buah).
3. Pada saat pentjetjahan (pemahatan) tiang jang pertama, keluarga sepesukuanpun harus pula hadir.
4. Waktu tiang-tiang rumah tersebut akan ditegakkan, diadakan pula perhelatan besar dengan memotong sapi atau kerbau, dimana seluruh penduduk negeri harus dijamu.
5. Alat-alat lain seperti atap atau papan untuk dinding dan lantai rumah tersebut sebahagian djuga diperoleh sebagai pemberian penduduk negeri diwaktu perhelatan menegakkan rumah itu dilangsungkan.
6. Dan bila rumah itu nanti sudah selesai dibangunkan, dipanggil pula orang sepesukuan untuk menaikinja.

Dengan demikian maka njatalah, bahwa sebuah rumah gadang di Minangkabau adalah rumah „kepunjaan bersama jang mendjadi milik keluarga“. Dan karena itu tidak mengherankan ada ketentuan, bahwa rumah itu tidak boleh dibuka dan dipindahkan kalau tidak setahu penduduk negeri. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa rumah gadang jang dikagumi karena ukiran-ukirannja itu, adalah tugu kesatuan tenaga kerdja, hasil dari pekerdjaan bergotong-rojong di Minangkabau.

Bila rumah tempat berdiam hasil dari bergotong-rojong, maka bangunan-bangunan lain seperti langgar-langgar, mesdjid-mesdjid dan Balai-balai Adat (dalam waktu belakangan ini, djuga gedung-gedung sekolah) adalah buatan seluruh pasang tangan.

Tidak pernah suatu langgar di Minangkabau jang mendjadi milik perseorangan meskipun dia sanggup membikin sepuluh langgar dari kekajaannja, karena langgar bukan tempat peribadatan seseorang, tapi mendjadi tempat beribadat bersama. Dengan demikian dapatlah dibayangkan bagaimana kesibukan-kesibukan jang terdapat dalam sebuah dusun atau negeri jang lagi membina sebuah Mesdjid atau Balai-balai Adat. Tidak hanya bahan-bahan untuk keperluan pembinaan itu jang mereka bergotong-rojongkan mengumpulkan, tapi djuga tenaga-tenaga untuk mengerdjakan pekerdjaan besar itu mereka pergotong-rojongkan.

Begitupun dengan pembangunan gedung-gedung sekolah, terutama sekolah-sekolah Agama karena sebahagian diantara gedung-gedung sekolah negeri jang dibangunkan itu ditanggung oleh negara.

Pada beberapa waktu jang tertentu, terutama pada bulan-bulan akan memasuki kedua matjam Hari Raya Islam (Idulfetri dan Idulkorban) orang akan bertemu dengan kesibukan-kesibukan diseluruh kampung di Minangkabau dalam bergotong-rojong membersihkan djalan-djalan dan pekarangan-pekarangan dan pekarangan-pekarangan dikampung-kampung dan dusun-dusun. Pekerdjaan membersihkan kampung dan djalan-djalan kampung itu tidak hanja dilakukan oleh laki-laki dewasa, tapi semua isi kampung ikut menjertainja. Anak-anak dan kaum-kaum wanita sama menjingsingkan lengan badjunja untuk membersihkan pekarangan rumah dan langgar mereka.

Didalam lapangan pertanianpun pekerdjaan bergotong-rojong ini berkembang dengan suburnja. Bila musim hudjan hampir tiba, bendar-bendar sawah harus diperbaiki terutama pada bahagian-bahagian jang botjor pada musim kesawah dahulunja. Batu-batu dan pasir didatangkan mereka dari tempat-tempat jang djauh guna memperbaiki jang runtuh dahulu. Dan bila air sungai sudah mengalir kebandar-bandar sawah ini, mereka bergotong-rojong pula mengerjakan sawah-sawah mereka, karena didalam kalangan mereka kadang-kadang terdapat keluarga jang sangat sedikit bilangan djiwanja mempunjai sawah jang djauh lebih lebar dari keluarga-keluarga jang besar.

Tiba musim panen, semangat bergotong-rojong inipun tersembul pula dengan pakaiannja jang baru. Penuaian, penjabitan, pengirikan padi dilakukan bersama-sama dengan bergiliran. Laki-laki menjabit, wanita-wanita mengangkut sabitan itu ketempat mengirik, kembali laki-laki mengirik bersama diiringi dengan suara bernjanji dan ditingkah bunji tabuh-tabuhan. Pekerdjaan mengangin padi itu dilakukan oleh perempuan-perempuan, pengangkutan kelumbung (rangkiang) dilakukan pula oleh kaum laki-lakinja. Untuk semua keperluan itu jang empunja sawah hanja menjediakan makanan dan minuman selama bekerdja untuk pekerdja-pekerdja gotong-rojong itu.

Ditindjau kelapangan perhelatan, terutama helat perkawinan, Adat lama Minangkabau mengadjarkan, bahwa jang berkuasa atas kemenakan hanja mamak (paman) dan bukan ajah jang menentukan kedudukan anak. Dari itu bila seorang gadis akan dipersuamikan, maka pekerdjaan itu mendjadi pekerdjaan dan kesibukan keluarga sehindu. Selain dari djodoh sigadis itu haruslah lebih dahulu disepakati oleh seluruh keluarga jang terdekat, pendapat-pendapat keluarga sepesukuanpun haruslah pula ditindjau. Lama sebelum perhelatan itu dilangsungkan, persiapan-persiapanpun dimulai mengadakannja. Keluarga-keluarga jang djauh sama berdatangan. Alat-alat perhelatan itu disediakan bersama, baik merupakan pakaian jang akan dipakai oleh bakal penganten dan

mempelai, baik menghiasi rumah dan kamar dimana mempela akan ditempatkan, maupun jang disuguhkan kepada semua tamu jang ratusan orang bilangannja itu nanti. Hadiah-hadiah dan sum-bangan-sumbangan diterima dari semua pendjuru, terutama dari kalangan keluarga sehindu.

Tiba dimasa kerusuhanpun, djiwa bergotong-rojong ini kelihatan dengan tegas. Seorang keluarga sehindu jang sakit dirumah isteri-nja/suaminja, didjemput bersama untuk dirawat dirumah gadang. Mentjarikan obat penawari sisakit mendjadi tugas semua keluarga, djuga mentjari dan mendjemput dukun djauh dan dekat. Sisakit didjaga berganti-ganti diwaktu malam, dan didjenguk bergiliran diwaktu siang hari. Segala ichtiar didjalankan agar sisakit sembuh pula. Tapi bila tidak sesuatu jang dapat menolong, maka bala kematian mendjadi bala bersama. Jang meratapi majat bukan hanja keluarga jang bertalian darah, tapi semua merasa kerugian, baik jang djauh maupun jang dekat. Pusara tempat simati dikuburkan, adalah pusara pesukuan, dan lobang kuburan digali bersama. Memandikan dan mengapani dilakukan oleh keluarga dipesukuan pula dan penjembahjangan dilakukan di langgar atau di mesdjid. menurut permintaan keluarga jang tinggal. Iring-iringan jang pandjang menudju pusara terdiri dari penduduk negeri, keluarga djauh atau dekat. Dan penghiburan terhadap keluarga jang meninggal itupun dilakukan bersama pula. Bila harus diadakan sedekah, maka bahan-bahan untuk ini dikumpulkan dengan djalan gotong-rojong pula.

Njatalah sekarang bagaimana besarnja pengaruh semangat gotong-rojong didalam masjarakat Minangkabau. Hampir seluruh tjabang kehidupan dikuasainja. Kepada tjara bergotong-rojong demikianlah masjarakat Minangkabau didasarkan dan dari sana bersumber segenap tenaga-tenaga pengabdian penduduknja.

Pasal 67.

**ADAT-ISTIADAT MINANGKABAU DAN
PERSINTUHANJJA.**

URAIAN-URAIAN mengenai perkembangan kebudajaan dan adat istiadat Alam Minangkabau ini tidak akan lengkap bila tidak disertakan dengan persintuannja dengan objek-objek perkembangan-perkembangan jang mempengaruhi masjarakat bangsa dan rakjatnja.

Walaupun betapa djuga adat-lama-pusaka-usang itu bertahan diri dan mempertahankan „kebesarannja“, tapi karena „giginja“ pengaruh-pengaruh kebudajaan dan peradaban jang datang sesudah itu mentjoba mengubah bentuknja jang asli itu, adatlama-pusaka-usang itu terkadang seakan harus memberikan tempat kepada „tamu“ jang baru datang ini.

Persintuhan-persintuannja dengan peradaban dan kebudajaan jang dengan setjara terpaksa harus diterimanja itu, mengubah sifatnja jang asli, meskipun dia masih tetap bertahan kepada kebesarannja.

Tempat jang diberikannja kepada „pengaruh adjaran agama Islam dan kebudajaan jang terlahir karena pengaruh agama itu, mengubah „norm-norm adat Minangkabau“ ini demikian rupa, sehingga adat tidak mungkin berdjalan kalau agama tidak berdjalan. Tapi dalam hal ini, sebagai djuga dengan „konsesi“ jang diberikannja kepada „tjara pemerintahan baru jang dibawa oleh Adityawarman dari Modjopahit dekat pada pertengahan abad ke-14“, tidak seluruhnja adjaran dan kebudajaan Islam itu mempengaruhi kebesarannja.

Hal ini terbukti pada masih berdjalannja „hukum Matriarchaat“ didaerah itu, sementara menurut andjuran Islam, hubungan kemasjarakatan itu haruslah berbentuk „Patriarchaat“.

Dan meskipun untuk hukum dan adjaran agama Islam ini diberikannja lapangan jang tjukup besar untuk berkembang, tapi dia tidak mengalah sama sekali.

Sampai kemanakah adjaran dan pengaruh agama Islam ini dapat menguasai pelaksanaan adjaran dan hukum-hukum Adat Minangkabau?

Haruslah diakui, semua segi-segi hubungan kemasjarakatan dipengaruhi. Adjaran agama tidak hanja kelihatan dalam

upatjara melangsungkan perkawinan dan jang berhubungan dengan itu sadja. Dia djuga berpengaruh dalam pelaksanaaz pembahagian harta pusaka, dan lapangan kehidupan dan pentjaharian, dalam lapangan hubungan kekeluargaan jang lain.

Sebelum agama Islam berpengaruh di Minangkabau, agaknya orang disana belum berkenalan dengan „gadis pingitan“, belum berkenalan dengan serba matjam bentuk djiwa jang lebih patuh dari biasa. Dan karena berpengaruh adjaran-adjaran agama itu dalam segala lapangan pergaulan, maka pada suatu bahagian adjaran-adjaran adat itu lebih dipermurninja, tapi pada bahagian lain lebih dipersempitnja.

Dalam lapangan perkawinan misalnja, terdjadilah perubahan jang sangat njata, meskipun tempatnja tidak berkisar. Kalau dahulu pihak perempuan jang meminang dan berkadang harus pula membayar uang antaran, maka sekarang hal demikian hampir tidak ditemui lagi.

Dan karena itu, maka wanitalah sekarang jang harus mendjadi subjek, dimana dulunja mereka mendjadi objek. Dan karena demikian, maka terbuka pulalah kesempatan bagi para wanita Minangkabau untuk dapat bergerak lebih leluasa. Bagi mereka terbuka peluang-peluang untuk ikut serta menentukan nasib dan kedudukannja, tidak hanja berserah diri kepada kaum laki-laki sebagai sekian lama.

Hukum-hukum adat terhadap pergaulan, djuga menghadapi perobahan besar. Orang sekarang harus lebih banjak mengenal anak dan bapaknya, tidak mamak lebih banjak mengenal kemenakannja. Tapi kepada para gadis lebih banjak dikenakan „taboe“ baru. Kebebasan bagi mereka hanjalah mendjelang mereka dipandang sudah meningkat dewasa. Dari itu, hanja mendjelang umur 12-14 tahunlah mereka beroleh kesempatan untuk bebas bergerak dan melangkah. Sesudah itu, mendjelang mereka mendjadi seorang isteri, mereka haruslah tetap menghuni rumah gedang, duduk dan belangir diandjung peranginan. menenun dan menjulam dalam suatu ruangan jang diperuntukkan bagi mereka.

Mereka sekarang sudah mendjadi „gadis pingitan“ mendjelang datang seorang djedjaka untuk meminang mereka sebagai seorang isteri. Dari itu, mereka tidak pernah kenal dengan orang jang akan mendjadi suami mereka, dan dalam lapangan ini mereka terpaksa harus menjerahkan nasib mereka dimasa depan kepada orang jang menguasai mereka. Bila pinangan seseorang diterima baik oleh keluarga mereka, kepada mereka hanja diberi tahukan, bahwa tidak lama lagi ada laki-laki jang ditundjukkan dan diperuntukkan bagi mereka. Dan sudah tentu demikian pula keadaan dengan laki-laki jang akan mendjadi suami mereka. Amat djarang tjalon suami ini jang mengenal siapakah tjalon isteri mereka itu sebelum pada malam pertama dihari perkawinan mereka.

Orang akan dapat membayangkan, betapa djadinja kebanyakan pergaulan mereka serumah tangga seterusnya. Tapi kedudukan dan tjara tersebut diatas tidak berumur terlampau lama.

Terbukanya kesempatan bagi para pemuda Minangkabau untuk merantau kenegeri-negeri dan ketempat-tempat lain, menjebabkan terbukanya pintu-pintu baru guna memperbaharui bawaan dan susunan adat lama ini. Banjak jang mendjadi pendorong bagi seorang putera Minangkabau untuk buat sementara meninggalkan kampung halamannya dan mentjari penghidupan ditempat-tempat lain.

Djiwa jang resah dan gelisah dan hasrat untuk tahu lebih banjak dan mengalami lebih banjak, tertutupnja kesempatan untuk berusaha menurut bakat dan pembawaan masing-masing dalam negeri sendiri, sempitnja lapangan penghidupan karena berkembangnja masyarakat dengan tjepat sementara harta pusaka terlalu sedikit untuk menghidupi keturunan-keturunan jang tengah berkembang itu, menjebabkan sebahagian diantara mereka haruslah angkat kaki dari kampung halaman mereka.

Karena semendjak dari mula berkembangnja, keradjaan Minangkabau mempunjai rantau-rantau, maka rantau-rantau tersebutlah jang mendjadi sasaran pertama dari orang-orang jang berdarah perantau ini. Perginja mereka merantau, terkadang merupakan suatu „kewadjiban” jang diperintahkan setjara halus kepada para pemuda Minangkabau ini, sebagai dibayangkan dalam sebuah pantun jang berbunyi:

Keratau medang dihulu,
Berbuah berbunga belum;
Merantau budjang dahulu,
Dirumah berguna belum.

Djadi, bila nanti „dirumah” (dikampungnja sendiri) mereka sudah dibutuhkan, maka mereka dengan sendirinja akan kembali pulang.

Dapatlah orang membayangkan sendiri, bahwa „pergi merantau” terkadang merupakan suatu kemestian bagi seorang pemuda Minangkabau. Pergi merantau ini selain dari mengumpulkan kekajaan jang harus diperolehnja dengan djalan-djalan jang dihalalkan oleh agama dan adat, djuga merupakan suatu udjian atas ketabahan hati mereka, djuga untuk mengukur kesanggupan mereka sendiri, disamping buat sementara mereka harus „menghilang” dari pandangan orang kampung mereka untuk satu waktu akan muntjul pula kembali dengan membawa semangat dan djiwa serta kesanggupan dan pengalaman jang baru.

Pulang dari merantau bagi seorang pemuda, kerap kali merupakan suatu pernjataan jang tidak langsung, bahwa dia sekarang sudah harus dipandang sebagai seorang manusia jang sudah

serba sanggup. Selain dari sudah sanggup untuk berdiri diatas kakinya sendiri, diapun djuga sudah sanggup untuk berumah-tangga sendiri. Pemuda-pemuda sematjam ini adalah kebanggaan bagi seisi rumah, kebanggaan seorang ibu. Pada waktu-waktu jang ditentukan, pemuda-pemuda seperti itu diberi kesempatan untuk memperlihatkan dirinja ditengah-tengah keramaian-keramaian dikampungnja, dan kadang-kadang sengadja berdjalan berbondong-bondong disepanjang djalan-djalan dikampungnja itu, memperlihatkan dirinja kepada orang-orang kampung, bahwa dia sekarang sudah mendjadi seorang djedjaka jang sanggup berdiri sendiri. Dengan demikian, maka bila nanti dari pihaknja datang pinangan untuk meminang orang jang berkenan dihati keluarganja, akan dapatlah dengan mudah orang mempertimbangkannya.

Perantauan ini diteruskan pula dimasa jang lain, baik sebelum atau sesudah dia hidup berumah tangga. Dengan demikian, maka mereka inilah sebenarnja jang membawa perubahan-perubahan baru dalam kalangan masjarakat bangsanja. Karena mereka masih diharuskan menghormati ninik-mamak (penghulu-penghulu) mereka, maka datang dan pergi keperantauan haruslah dengan memberi tahukan kepada ninik-mamak ini. Dari sebab itu ninik-mamak djuga mendjadi orang:

Tempat bertanja bila nak pergi,
Tempat mengadu bila lah pulang.

Bertambah sempurnanja alat perhubungan, bertambah meluasnja daerah perantauan bagi seorang pemuda Minangkabau. Tidak hanya rantau-rantau sadja jang mendjadi daerah perantauan sekarang, tapi sudah menjebar keseberang lautan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bila orang mengetahui, bahwa perantauan orang-orang Minangkabau tersebar sampai-sampai keluar negeri.

Perhubungan dengan orang-orang „asing” dan pergaulan-pergaulan dengan masjarakat jang lain dari masjarakat bangsanja sendiri, membikin mata mereka djadi terbuka. Mereka sekarang sudah dapat membikin perbandingan sendiri, dan memilih sendiri. Dari itu, dalam waktu jang sangat pendek, berubah pulalah tjorak-tjorak dan bentuk-bentuk pembawaan adat istiadat mereka, dan perubahan-perubahan dinegeri tempat kelahiran merekapun berubah pula dari sedikit kesedikit.

Datangnja bangsa Belanda mendjadjah daerah Minangkabau pada permulaan abad ke-19, menjebabkan masjarakat Minangkabau dimasuki pula oleh peradaban barat jang djuga banjak sedikitnja ikut berkembang didaerah itu.

Dengan demikian maka teranglah bahwa adat-istiadat Minangkabau jang masih terdapat pada saat ini sudah mengalami masa persintuhan jang pandjang dan lama. Dalam tiap-tiap masa persintuhan tjara peladenan jang baik.

Dia tidak pernah menolak sesuatu yang datang, sebagai juga dengan sifat bangsa dan rakjat yang sangat suka damai dan menerima tamu itu. Tapi dia tidak pula hendak mau menelan mentah-mentah apa yang dihidangkan dan disuguhkan kepadanya itu.

Meskipun sekarang orang hampir tidak dapat lagi membedakan „djiwa Minangkabau yang asli” dengan „djiwa baru sesudah mengalami persintuhan-persintuhan baru”, tapi seseorang putera Minangkabau masih dapat menjisahkan yang asli dengan yang baru itu.

Perubahan-perubahan „radikal” terdjadi mulai dari permulaan abad ke-20, jaitu sesudah „terbentuknja mata” sebahagian diantara para pemuda mereka, jaitu pemuda-pemuda yang pernah mengetjap pendidikan menengah dan tinggi, didalam dan diluar daerahnja.

„Sekolah Radja” di Bukittinggi, merupakan tangga pertama untuk meningkat guna menjelami peradaban-peradaban barat, jaitu sekolah-sekolah yang menelorkan „pelopor” intelektuil dalam kalangan masjarakat Minangkabau.

Terbukanja kesempatan untuk memasuki pendidikan agama yang lebih landjut diluar negeri, terutama di Mekkah dan kemudian di Mesir, melahir pula perubahan masjarakat baru didaerah ini. Pandangan-pandangan yang pitjik dalam lapangan penghidupan dan ketegangan-ketegangan yang tidak pada tempatnja ditindjau dari segi adjaran agama Islam dan peradaban, mulailah berubah.

Permulaan abad ke-20 itu, merupakan phase permulaan bagi rakjat Minangkabau untuk membikin perubahan-perubahan tjepat. Mulai dari waktu itu diberbagai tempat banyak didirikan sekolah-sekolah partikelir, terutama sekolah pendidikan agama rendah dan menengah. Karenanja, maka hasrat untuk beladjar mendjadi bertambah subur dan berkembang.

Tidak hanja pemuda-pemuda putera sadja yang berlomba-lomba dalam lapangan ilmu pengetahuan ini, tapi juga pemuda-pemuda puterinja tidak mau ketinggalan. Puteri-puteri ini tidak hanja diterima dan memasuki pendidikan agama sadja, tapi tidak pula djarang diantara mereka yang berketjimpung didalam lapangan pendidikan barat yang kian berkembang itu. Hal ini lebih njatakan kelihatan dikota-kota terutama dalam kalangan pegawai-pegawai negeri, dimana sebahagian besar diantara mereka dengan tidak ragu-ragu menjerahkan puteri-puteri mereka memasuki „sekolah-sekolah Belanda”. Perantau-perantau yang mempunjai „kesanggupan” pun mengikuti teladan ini.

Tinggallah sekarang ruangan rumah gadang tempat berpingit, dan tjadar penjelubungi muka sekian lama sudah dilipat dan disimpan.

Perlombaan-perlombaan dilapangan pendidikan ini kemudian disusul pula dengan perlombaan-perlombaan dilapangan kesenian dan kebudayaan, dan berdjalan pesat sampai sekarang.

Di Minangkabau orang tidak merasa asing melihat serombongan gadis jang memakai kekudung (mudawarah) bergaul rapat dengan gadis-gadis jang „bobed hair” dengan memakai pakaian „new look”. Dikantor-kantor terdapat pegawai-pegawai wanita jang memakai kekudung ini duduk bergandengan dengan gadis-gadis pakai jurk potongan terachir. Wanita-wanita ini sekarang tengah maju dengan pesat, tapi masih mempertahankan nilai-nilai kebesaran mereka masing-masing.

Seorang puteri Minangkabau modern dalam pandangan mata sepiantas lalu merupakan seorang wanita jang sudah terlampau dipengaruhi oleh peradaban barat, baik dilihat dari pakaian, maupun dari gerak gerik bawaannja, bila dia sudah sampai dirumah tangganja, dia akan merupakan seorang puteri Minangkabau asli. Meskipun pada saat ini pembikinan rumah-gadang jang baru tidak lagi mendjadi tjita-tjita dari kebanyakan orang Minangkabau jang sudah melalui masa persintuhan itu, tapi hal ini tidaklah berarti bahwa mereka sudah mementjilkan diri dari tradisi lama itu. Masih terikat dengan serba matjam ketentuan-ketentuan jang mereka pusakai sedari nenek mojang mereka.

Serba matjam kedudukan penting dalam abad modern jang sudah diduduki oleh banjak wanita-wanita Minangkabau sekarang, tidaklah menjejabbkan dia harus meninggalkan sama sekali kebiasaan-kebiasaan lama jang oleh pandangan mata sekarang sudah disebut kuno itu.

Memang tidak dapat disangkal, bahwa sekarang Balai-balai Adat tidak dan sangat djarang dipakai sebagaimana mestinja, dibeberapa tempat banjak penghulu-penghulu dan datuk-datuk jang tidak lagi digantikan sesudah matinja, pemerintahan negeri sekarang kebanyakan dipegang oleh orang-orang jang dipilih langsung oleh rakjat dan tidak ada sangkut pautnja dengan adjaran-adjaran adat, tapi orang tidak akan mungkin memupus peninggalan-peninggalan itu sama sekali dan kebesaran-kebesarannja masih djelas kelihatan pada bermatjam segi kehidupan.

Karena perantaraan sekarang sudah mendjadi suatu „keharusan” jang didorong oleh beberapa sebab, maka perhubungan dengan kaum keluarga mendjadi agak renggang dibandingkan dengan masa sebelumnya. Proses baru dalam hubungan kekeluargaan karenanja mengalami perubahan baru pula. Dan karena sangat eratnja hubungan kekeluargaan di Minangkabau, maka kerengangan tempat tinggal tidaklah menjejabbkan terputusnja sama sekali pertalian antara mereka.

Pada waktu-waktu jang dipandang dan dirasa perlu, perantau-perantau itu tetap mengirimi ibu dan keluarganja kebutuhan-kebutuhan jang harus bersumber dari padanja, seperti uang, bahan pakaian dan lain-lain sebagainya.

Terkadang, bila siperantau ini beruntung ditempat lain dan dia dapat mengumpulkan uang banjak, maka uang jang dikirimnja

kekampung tidaklah hanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sadja bagi keluarganja, tapi djuga dikirimkan untuk pembeli atau „pemegang” beberapa piring dan tumpak sawah, atau untuk mendirikan rumah baru bagi kemenakan-kemenakannja. Dalam hal ini, dia tidak perlu mengurus pembelian dan pembangunan itu setjara langsung kalau dia tidak sempat meninggalkan pekerdjaan dan urusannja dirantau orang. Tjukupnja ditundjuknja seorang jang akan mewakilnja dalam menghadapi pekerdjaan-pekerdjaan itu, dan dia nanti akan menepati terselenggaranja urusan-urusan jang dikendalikannja dari djauh itu.

Kerap kali djuga kedjadian, bahwa dia harus membawa anak dan isterinja ikut serta kerantau orang, baik dia seorang pegawai atau seorang saudagar. Bila hal ini terdjadi, maka dengan sendirinja perhubungan keibuan, dasar sekian lama, mendjadi lebih longgar dan renggang hubungannja. Sebaliknya, maka hubungan kebapaan (patriarchat) mendjadi lebih erat dan rapat. Karena anak sekarang lebih erat dan rapat berhubungan dengan ayah, maka renggang pulalah perhubungan antara kemenakan dengan mamaknja.

KEDUDUKAN ADAT MINANGKABAU DIHARI DEPAN.

HUKUM dan kedudukan adat Minangkabau seperti jang masih berlaku sekarang sudah melalui masa jang pandjang. Dia sudah mulai berkembang sedari akhir abad ke-13, pada tahun 1290, jaitu sedari Tri Buana Raya Muli Warna Dewa (Datuk Sri Maharadja Diradja) mentjatakan dirinja mendjadi Daulat Jang Dipertuan keradjaan Melaju pulau Pertja. Djadi sudah hampir 700 tahun lamanja masjarakat Alam Minangkabau membiasakan dirinja berketjimpung didalam norm-norm „kesaktian” sebagai jang disebut oleh sebahagian penduduknja. Mereka djundjung tinggi adat istiadat „pusaka turun-temurun” jang kadang-kadang „sangat pitjik dan sempit” menurut tindjauan abad modern ini. Dan terhadap susunan adat istiadat ini mereka seakan „membutakan mata” untuk mengadakan pembaharuan (rasionalisasi), djangankan akan „merombak dan merompaknja”.

Timbul pertanyaan sekarang: Akan tetap berpegang teguhkah mereka kepada kebiasaan-kebiasaan jang sebahagiannja „sudah ketinggalan kereta api itu”.....? Bukankah „rumah gadang” mereka sudah tersingkir kebelakang dan kini hanja sebagai seorang „perempuan tua” jang dikala mudanja sangat membanggakan ketjantikkannja karena dia mendjadi permainan mata semua pemuda, tapi kini sudah „merasa malu” memperlihatkan dirinja ditengah-tengah kelompok gadis-gadis modern jang berhiaskan serba matjam „make up” jang didatangkan dari benua baru. Tidakkah matanja akan selau menentang wadjah muda berseri jang memantjar dari tubuh angkatan baru, gesit dan tjekatan, riang gembira melawan dan menentang bawaan hidup untuk segala zaman?

Dan telundjuk jang biasa direntang dari djari-djari Penghulu-penghulu sambil mengatakan „tu, itu si anu adalah anak kemenakan saja, orang „dibawah pajung” saja, jang harus patuh mengikut apa jang saja perintahkan”, tidakkah akan terkulai telundjuk itu dengan tidak dipaksa dan ditantang demi menghadapi gerak bibir seorang ajah jang menjatakan dengan bangga, „dia anakku, pusakaku kepadanja akan saja turunkan?”

Banjak „djurang-djurang” jang terentang tempat adat kebiasaan itu akan djatuh, dan banjak pula tenaga-tenaga jang tersedia jang dalam segala waktu bersedia untuk menguburkannja disaat kedjatuhanja. Apakah dia masih dapat bertahan, dan kalau dapat sampai pabila?

Meskipun demikian banjaknja bala dan bentjana jang mungkin akan terdjadi dalam lapangan adat istiadat jang masih mempertahankan diri ini, tapi belum nampak suatu tanda dia akan menjerah kalah. Dan meskipun dasar-dasar tempat dia berdiri hari ini sudah tidak sekuat dasar beberapa abad jang lampau, air mukanja tidak memperlihatkan bajangan putus asa walaupun tidak lagi memperlihatkan senjuman bangga.

Dia sudah biasa menghadapi rasionalisasi, dan revolusi terhadap dirinja, pun sudah pernah dialaminja. Kelahirannja bukanlah atas kehendaknja, tapi masjarakatlah jang memaksa dia harus lahir dan kemudian djaja. Dan kedjajaan itupun bukan pula atas kemauannja. Dia tidak menghendaki pudji dan sandjung. Dia bersedia datang dan pergi, dari itu bersedia pula ditjertja dan dipudji.

Lebih kurang 22.000 orang penghulu-penghulu jang terpentjar pada kira-kira 500 negeri di Minangkabau sekarang, bukanlah merupakan peradjurit-peradjurit atau opsir-opsir jang disediakan untuk mempertahankan adat lama pusaka usang itu.

Mereka ditundjuk oleh anak kemenakan mereka adalah hanja sebagai pelaksana dari hukum-hukum „nankawi, adat lama pusaka usang” sadja. Mereka ditundjuk bukan untuk seumur hidup mereka; sewaktu-waktu mereka boleh menarik dirinja dari kedudukannja bila dirasanja dia tidak sanggup dan mampu lagi menghadapi gelombang bawaan masa. Meskipun dahulunjia mereka diberi kekuasaan untuk mengadili suatu perkara dikalangan anak buah mereka, tapi kekuasaan itu sudah lama ditjabut dari mereka, ditjabut dengan kekuatan „besluit pemerintah Hindia Belanda No. 94b, tanggal 1 Nopember 1875, Staatsblad No. 1874”, dan semendjak itu mereka hanja merupakan „pusat djala pumpunan ikan” semata.

Sesudah itu terdjadilah perubahan-perubahan besar dalam lapangan hukum adat jang didjundjung tinggi itu, perubahan mana terpaksa mereka terima karena bersifat merupakan „to be or not to be”, „rawe-rawe rantas, malang-malang putung”.

Apalagi sesudah itu

Merekalah biasa menerima dan mengalami perubahan-perubahan, dan merekapun selalu bersedia untuk menerima selandjutnja. Sebagai djuga dengan tuan, merekapun tidak tahu dengan apa jang akan terdjadi nanti dalam lapangan adat istiadat Alam Minangkabau.

Bersama-sama kita tunggu, dan bersama-sama pula kita persaksikan nanti.

Pasal 69.

TJANDI-TJANDI DAN PENINGGALAN LAINNJA.

BEKAS-BEKAS dan peninggalan-peninggalan purba jang ada didjumpai di Sumatera Tengah menundjukkan perkembangan agama Buddha Mahayana, terutama dari aliran Tantrayana. Hal itu dapat difahamkan, kalau dihubungkan keadaan itu dengan sedjarahnja jang berpusat kepada Melaju dan Sriwidjaja. Karena itulah sebahagian besar peninggalan-peninggalan itu terdapat di Sumatera Tengah ini disekitar sungai Batang Hari dan sungai Kampar.

Tjandi-tjandi dan barang-barang peninggalan-peninggalan tersebut ada jang terbuat dari batu biasa, apa jang dari terra-cotta dan ada pula jang diperbuat dari perunggu. Patung Buddha jang didjumpai didaerah Batang Hari itu, terbuat dari perunggu.

Dimuara sungai Batang Hari atau Muara Djambi terdapat bekas-bekas tjandi Gumpung dan tjandi Tinggi. Pada hulu sungai Batang Hari di Sungai Langsung (Siguntur) terdapat patung Bhairawa jang dianggap sebagai lambang Adityawarman, radja Minangkabau. Patung tersebut jang tingginja 3 meter itu telah dipindahkan ke Djakarta, jang dapat dilihat sekarang di Gedung Artja Djakarta. Patung Amoghapaca jang didirikan oleh Adityawarman pada kira-kira tahun 1347, didjumpai pula. Sebuah stupa jang tingginja menjerupai sebuah mahligai telah diketemukan di Muara Takus, didaerah Kampar Kanan.

Pada daerah-daerah jang disebelah Timurnja di Sumatera Tengah ini, jaitu dikepulauan Riau, masih didjumpai bekas-bekas kebesaran keradjaan Melaju, jang pernah memusatkan pemerintahannja bertempat terutama dipulau Penjengat dan pulau Kota Piring. Bekas-bekas kebesaran keradjaan Melaju itu, sekarang merupakan tembok-tembok bekas istana jang berada dipulau Penjengat, jang dikabarkan djuga, bahwa batu-batu untuk pembangunan tersebut ada jang didatangkan dari Hongkong. Jang menarik perhatian pula disana ialah bentuk mesdjid jang merupakan bangunan lama. Pembuatan temboknja menurut kata-turun-temurun dari orang-orang tua, ditjampur dengan putih telur.

Dipulau Kota Piring didjumpai pula pada bekas-bekas benteng keradjaan Melaju itu piring-piring kuno jang tertempel dibekas-bekas dindingnja.

Penjelidikan lebih lanjut mengenai kebudayaan dari keradjaan Melaju itu berhubungan dengan daerah-daerah lainnja yang merupakan bangun-bangunan dan peninggalan-peninggalan lainnja masih dinantikan.

Dalam abad ke-16, agama Islam mulai dikembangkan oleh Sjech Burhanuddin di Ulakan (Pariaman), seorang murid dari Sjech Abdurauf dipusat Pemerintahan yang berdasarkan agama Islam di Pidi (Atjeh).

Masyarakat mulai menganut kepertjajaan baru itu. Banjak sedikitnja bertjampur dengan kepertjajaan-kepertjajaan Hindu, karena pengaruh dari kepertjajaan-kepertjajaan yang djadi kebiasaan selama ini.

Tempat untuk mendalami agama Islam, mengadji sah dan batlnja, haram dan halalnja, masih ditempat yang lama djuga, jaitu tjandi, yang diberikan nama barunja dengan mesdjid setelah disesuaikan dengan keadaan baru.

Sampai sekarang masih didjumpai mesdjid-mesdjid di Sumatera Tengah ini, yang menyerupai bentuk tjandi. Lama kelamaan hal itu mendjalani perobahan bentuk, seperti sebuah mesdjid yang ada dikota Padang, dengan atapnja merupakan pertjampuran bentuk tjandi India dengan mesdjid dinegeri Mesir.

Kebanyakan pula ditempat-tempat rumah adat bergondjong banjak didjumpai, berada mesdjid yang atapnja mendjulang runtjing keatas, melengkung kedalam garis-atapnja, kebalikan dari melengkung keluar yang didjumpai dari bentuk tjandi-tjandi yang ada di India dan Birma.

Didekat mesdjid-mesdjid berdiri pula sebuah bangunan yang lebih ketjil, dinamakan surau, yang dijadikan tempat mengadji, terpisah dari tempat sembahjang. Rumah-tabuh berdiri tak djauh pula dari mesdjid tadi.

Ukiran dan bangun-bangunan yang ada, seperti rumah-gadang, rangkiang atau lumbung-padi, balairung atau balai-adat, mempunyai bentuk yang tersendiri dari bangunan-bangunan lainnja yang ada di Indonesia. Lengkung gondjong-atapnja yang meruntjing seperti tanduk kerbau, dua, empat, enam dan adakalanja berdjumlah tudjuh, dengan gondjong bahagian atap dari djendjang yang terletak ditengah-tengah depan; tonggak-tonggak tepi yang tjondong keluar, jaitu tjondong-harap-gojah berpantang tanggal; bentuk-atas dari dinding yang melengkung, semuanya itu adalah mengherankan arsitek-arsitek luar negeri dan tingginja mutu bangun-bangunan ini, adalah suatu kemegahan bagi bangsa Indonesia.

Pasal 70.

UKIR-UKIRAN DAN BANGUN-BANGUNAN.

SENI ukir bangun-bangunan berkembang dengan pesatnja. Tempat-tempat seperti Pandai Sikat, Tjandung, dan dibeberapa negeri di kabupaten Tanah Datar, Batu Sangkar dan Lima-puluh Kota, terkenal dengan seni ukir kajunja.

Semua pekajuan jang kelihatan didalam dan diluar rumah dan bangunan lainnja ditaburi dengan ukir-ukiran serta diwarnai dengan bermatjam-matjam warna jang dihasilkan sendiri dimasa itu.

Ukir-ukiran itu bermatjam-matjam ragamnja serta djenis ukiran-nja, seperti ukiran-datar, ukiran-pahat, ukiran-tembus dan ukiran-bakar. Unsur-unsur lukisannja terdiri kebanyakannja dari tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang unsur lukisan untuk ukiran itu diambil dari benda jang disangkakan ada jang diperdapat dari kepertjajaan. Perlainan ukiran berarti pula perlainan tempat pemakaiannja. Ada jang tertentu untuk tonggak sadja, begitu pula untuk lainnja.

Diantara nama-nama ukiran jang dapat disebutkan disini jang semuanya ada berdjumlah lebih dari enam puluh buah ialah: putjuk-rebung, tirai-tirai, sajat gelankeluk paku, itik pulang petang, tantadu berdjompak, gajah meneng, daun sakek, daun sirih, bunga katjang, daun bodi, bunga tjengkeh, bunga mentimun, buah keladi, talipuk laju, lapik ketaja, tampuk manggis, bunga lada, kapas kemhang, bunga kundur, kelajau, lokan-lokan, tupai menegun, kutjing tidur, elang terbang, dan lain-lainnja. Jang bergaris lurus, patah siku dan jang sebetuk dengan itu digajakan, diberi beranak, berputjuk berketjambah, belah ketupat, ular gerang, bunga sitawar, bintang Timur, sajat nenas bundar melingkar, bernama akar tjina, akar tjina banjak daun, akar tjina banjak batang, sarang tjernin dan lainnja. Adakalanja selain diberi berukiran pahat tadi, katjakatja berwarna turut menghiasi pekajuan itu jang dilekatkan menurut susunan ukiran jang ada.

Perkembangan seni ukir itu sampai meluas kedaerah-daerah sebelah Timurnja, seperti Siak Sri Indrapura.

Perubahan zaman membawa perubahan pula kepada bangun-bangunan tadi. Atap idjuk jang dipergunakan selama ini telah banjak ditukar dengan atap seng. Ukiran-ukiran telah banjak di-

tiadakan sadja. Bahan-bahan baru jang didatangkan dari luar negeri telah banjak menggantikan bahan-bahan lama. Walaupun demikian, masih ada jang mempertahankan bentuk lama dengan bahan-bahan barunja. Dikota-kota akan dapat dilihat itu, rumah atau bangunan dengan mempergunakan bentuk atap tjorak Minangkabau jang dipermodern.

Mengenai rumah-rumah lama itu, masih ada sekarang jang asli, jang berumur lebih kurang tiga ratus tahun dalam keadaan kukuh. Sangat disayangkan sekali, rumah-rumah adat serta bangun-bangunan lainnja jang penuh dengan keasliannja itu, pada beberapa negeri banjak jang dibakar oleh tentera Belanda. Sebuah model rumah adat jang besar, jang tiada berlumbung padi didekatnja, jang terletak dikebun binatang Bukit Tinggi, semendjak zaman pendjadjahan, didjadikan musium sampai sekarang. Barang-barang peninggalan dahulu jang bersedjarah jang bernilai kebudayaan jang ditempatkan disana, sekarang tiada lengkap lagi.

Pasal 71.

RANDAI DAN SANDIWARA.

SALAH satu jang tersendiri pula dari daerah-daerah lainnja ialah kesenian randai. Permainan itu merupakan sandiwara dilapangan terbuka, jang dilakukan dalam sebuah lingkaran jang terdiri dari pelaku-pelaku jang banjaknja lebih kurang lima belas orang. Pemain-pemain jang mendjalankan tjeritera jang memegang peranan penting, berada dalam lingkaran tersebut. Tiap-tiap perubahan babakan dan adegan, ditjeritakan dengan njanjian serta gerakan-gerakan jang merupakan silat dalam rangkaian lingkaran. Penonton-penonton berada pula tak djauh dari lingkaran tadi. Untuk mendjalankan tjeritera, kebanyakan dipergunakan pemain-pemain laki-laki ganti pemain-pemain wanita.

Tjeritera-tjeritera jang dimainkan adalah tjeritera-tjeritera lama, seperti Bunda Kandung, Tjindue Mato, Nan Tongga Magek Djabang, Santan Batapih dan lainnja. Disaat jang terachir ini permainan randai itu, telah dimainkan dipemantjar radio Bukit Tinggi dan Padang dengan mempergunakan waktu sebanjak satu tiga perempat djam.

Dalam seni sandiwara banjak ditjapai kemadjuan. Pertundjukan-pertundjukan jang pada masa dahulunya merupakan opera jang dinamakan djuga komidi bangsawan atau stambul, dari memainkan tjerita-tjerita radja-radja kajangan dan djin-djin, bidadari-bidadari, memasuki perkembangannja kearah pertundjukan setjara realistik. Sandiwara Dardanella jang mengundjungi daerah ini pada sebelum perang dunia jang kedua, meninggalkan pengaruhnja didaerah ini. Perkumpulan-perkumpulan sandiwara dikota-kota dan desa, mulai banjak didirikan. Ada jang dipertundjukkan untuk keperluan sosial dan begitu pula untuk kemadjuan perkumpulan itu sendiri. Dizaman Djepang berdiri sebuah perkumpulan sandiwara jang bernama „Ratu Asia” jang mendapat sambutan hangat dari masjarakat. Tjeritera-tjeriteranja banjak berisikan perdjuaan bangsa.

Sesudah proklamasi kemerdekaan, disamping banjaknja perkumpulan-perkumpulan sandiwara lainnja berdiri dikota-kota dan desa, „Ratu Asia” memegang peranan penting untuk membangkitkan semangat perdjuaan bangsa. Dalam pada itu pertundjukan-pertundjukan untuk menghidangkan tjeritera-tjeritera lama jang dikenal oleh masjarakat, mendjadi perhatian penting dari perkumpulan-perkumpulan sandiwara jang ada. Padang Pandjang banjak

didjadikan tempat pertundjukan dengan Gedung Kebudajaan: untuk mempertundjukkan hasil kesenian sandiwara dan tari-tara: bagi bangsa asing jang mengundjungi daerah Sumatera Tengah ini. Disaat jang terachir ini, disamping sandiwara pentas, sandiwara radio lebih menguntungkan untuk tempat memperkembang bakat bagi pentjinta-pentjinta dan seniman-seniman sandiwara.

Pasal 72.

BUNJI-BUNJIAN DAN TARI-TARIAN.

TARI piring, Tari pajung dengan iringan lagu kaparinjonja banjak dikenal orang sampai keseluruh Indonesia, bahkan sampai keluar negeri. Gerakan-gerakan jang ada jang dapat dilihat pada tari piring itu menundukkan tjara-tjara hidup rakjat dimulai dari suasana penjabitan padi disawah. Tari Ilau untuk penghormatan kepala pahlawan-pahlawan dan tari-tari lainnja seperti tari Rantak Kudo (rentak kuda) masih terpendam di beberapa negeri jang tidak banjak dipertundukkan, menjejabkan masih kurang dikenal oleh seluruh masjarakat Sumatera Tengah ini, umumnja di Indonesia. Didaerah Mentawai dan pada beberapa tempat lainnja, tari-tarian masih tetap berisikan pemudjaan-pemudjaan jang bersendikan kepertjajaan keagamaan. Disamping semua jang ada itu, seniman-seniman muda di Sumatera Tengah ini terutama di Padang Pandjang, telah banjak berusaha dan mentjiptakan tari-tarian baru jang masih bernafaskan ke Timuran.

Rebab jang merupakan alat bunji-bujian gesek, salung, puput batang padi alat bunji-bunjian tiap, gendang, talempong (gemong) alat bunji-bunjian pukul, mengiringi setiap njanji-njanjian asli Sumatera Tengah ini. Rebana merupakan pengiring njanjian pada upatjara-upatjara keagamaan. Dizaman terach'r ini, pemakaian biola dan alat-alat bunji-bunjian lainnja jang didatangkan dari luar negeri, dipergunakan untuk lagu-lagu lama jang diperbaharui.

Lagu-lagu jang ditjiptakan oleh penggubah-penggubah lagu di Sumatera Tengah ini, seperti Dajung Palinggam, Sekuntum Bunga ditepi Danau, mendapat sambutan baik diseluruh kepulauan Indonesia. Diantaranja pula jang sampai mendapat sambutan hangat diluar negeri seperti di Malaya, ialah lagu „Takana Dikampung”.

Perkembangan seni musik telah dapat dilihat dengan adanya perkumpulan-perkumpulannja dikota-kota sampai kedesa-desa. Pemantjar-pemantjar radio membimbing perkumpulan-perkumpulan itu kearah kemadjuan. Salah satu jang terbesar jang didirikan pada sebelum agressi jang kedua, ialah Sumatera Symphony Orchestra, jang banjak memperkenalkan seni-musik Barat dan berachir pula perkumpulan ini diwaktu agressi kedua ditahun 1948. Perkembangan selandjutnja jang merupakan usaha-usaha jang besar, sesudah pemulihan kota belum ada kelihatan. Hanja untuk lebih terkenalja lagu-lagu daerah di Sumatera Tengah ini, oleh Radio Republik Indonesia, telah diadakan perekamannja.

Pasal 73.

SENI LUKIS.

MUNGKIN dapat kita katakan, bahwa pertumbuhan seni lukis di Sumatera Tengah ini dimulai dengan perkembangan seni ukir, seperti yang didjumpai hasil-hasil seni itu pada rumah, perhiasan dan pakaian. Pada beberapa abad yang dahulu itu, bahan-bahan pewarna telah dihasilkan sendiri oleh rakjat.

Walaupun alat-alat dan bahan-bahan pewarna telah dihasilkan sendiri ketika itu, bukti-bukti belum ada menunjukkan, bahwa seni lukis telah berkembang dimasa itu. Belum ada didjumpai lukisan-lukisan yang berupa apapun juga, baik diatas kertas, kain atau diatas barang lainnja.

Dipermulaan abad yang kedua puluh ini, masjarakat mulai berkenalan dengan gambar-gambar yang datang dari India dan negara-negara Arab lainnja, yang melukiskan apa-apa yang ada dalam kepertjajaan keagamaan. Akhirnya hal itu telah dapat digantikan oleh lukisan-lukisan yang dibuat sendiri oleh pelukis-pelukis dikotakota, yang tjepat tersebarnja keseluruh negeri. Masjarakat mulai mengenal hasil-hasil tjiptaan dari bangsanja sendiri. Kebanyakan lukisan-lukisan itu melukiskan tjeritera-tjeritera Minangkabau-lama, seperti Tjindur Mata dengan si Binuangnja, serta lain-lainnja.

Bibit-bibit senilukis mulai disebarkan oleh suatu perguruan, Kweekschool di Bukittinggi, yang lebih terkenal dengan Sekolah Radja.

Mulai dari tahun 1926, seni lukis di Sumatera Tengah mendjalani zaman barunja. Perhatian kepada seni itu ditumpahkan oleh Ruang Pendidik INS di Kaju Tanam, yang didirikan pada tahun itu oleh ahli pendidikan yang terkenal M. Sjafei. Berkat didikan dan pelajaran melukis yang diberikan disana, terutama oleh pelukis Wakidi, sekolah itu menghasilkan pelukis-pelukis yang tjorak seninja mulai dikenal oleh masjarakat.

Dizaman pendudukan Djepang, pelukis-pelukis muda ada yang dapat meneruskan latihannja dengan adanja badan penerangan dan kebudayaan yang diadakan Djepang.

Sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, suatu pertunjukkan telah dapat diadakan ditahun 1946 di Badan Kemadjuan Rakjat, Bukittinggi. Kelihatan tanda-tanda, bahwa pelukis-pelukis telah mulai menudju kepada suatu organisasi kesenian yang di-

perluan untuk kemadjuan bergerak dimasjarakat. Ditahun 1948 ada pula suatu pertundjukan jang dikundjungi oleh Presiden Soekarno jang kebetulan melawat ke Sumatera Tengah. Pada hari pertundjukan itu, 7 Djuli 1948, diresmikan sebuah organisasi kesenian, jaitu „Seniman Muda Indonesia” di Bukittinggi, jang anggota-anggotanja terdiri dari pelukis-pelukis dan pemahat-pemahat patung.

Disamping Ruang Pendidik INS Kaju Tanam melatih pemuda-pemuda jang berbakat melukis, di Gedung Kebudajaan Padang Pandjang, diadakan pula latihan-latihan melukis untuk guru-guru dan peladjar-peladjar jang tenaga pelatihnja terdiri dari bekas guru Ruang Pendidik INS Kaju Tanam.

Aksi militer Belanda kedua ditahun 1948, banjak mendatangkan kerugian terhadap hasil-hasil perkembangan seni lukis. Kumpulan-kumpulan lukisan jang di INS Kaju Tanam, „Seniman Muda Indonesia” Bukittinggi, Gedung Kebudajaan Padang Pandjang, banjak jang hantjur. Suatu hal jang tak mudah untuk dilupakan, ialah tertangkap dan ditembak matinja oleh tentera Belanda pelukis Arifin Zainoen, jang telah banjak memberikan latihan-latihan melukis pada anak-anak jang dilihatnja berbakat melukis. Pendidikan „Taman Kesenian”nja di Bukittinggi, banjak mendapat perhatian dari masjarakat/pelukis tersebut, djuga seorang bekas peladjar dari INS Kaju Tanam.

Selama aksi militer Belanda kedua itu, pelukis-pelukis tak tinggal diam. Pelukis jang ternama Wakidi dan pelukis muda Djanain telah dapat mempertundjukan hasil-hasil tjiptaan mereka jang baru, jang dilukis selama bergerilja, di-ibu tempat Gubernur Militer Sumatera Barat di Kota Tinggi dan Suliki, diwaktu ulang tahun kelima Proklamasi Kemerdekaan dan 10 Nopember 1950.

Pelukis-pelukis jang dalam kota Bukittinggi, siap pula dengan kumpulan-kumpulan lukisan-lukisan dan patung-patung, jang dipertundjukan diwaktu tentera Belanda meninggalkan kota Bukit Tinggi. Tjukup memberi kesan kepada tamu-tamu luar negeri, seperti Milobs UNCI dari Amerika, Australia dan Perantjis serta bangsa-bangsa lainnja, bahwa pemuda Indonesia tidak ketinggalan giat bergerak dalam lapangan kesenian disamping giat berdjuang menghadapi musuh kemerdekaannja. Beberapa buah lukisan jang dipertundjukan ada jang dibawa keluar negeri oleh sipengundjung pertundjukan tersebut.

Buat pertama kalinja sesudah pemulihan kota, suatu pertundjukan diadakan oleh „Seniman Muda Indonesia” di Bukittinggi, dengan bantuan P.P.K. Sumatera Tengah, pada bulan Maret 1950. Diwaktu mengadakan pertundjukan berkeliling oleh organisasi itu di bulan Agustus pada tahun itu djuga kedaerah Indragiri, Rengat, Tembilahan, Taluk dan Air Molek, organisasi kesenian jang baru didaerah itu, „AKSI” banjak memberikan bantuannja.

Pada bulan September 1952, di Bukittinggi, telah diadakan pula oleh Djawatan Kebudayaan dari Djokjakarta pertunjukkan seni lukis dan pahat, dari kumpulan lukisan-lukisan di Djawa, jang dinamakan Pameran Pelukis Muda Indonesia.

Dibulan Maret 1953, Pameran Seni Rupa di Gedung Kebudayaan Padang Pandjang diadakan pula dengan pimpinan M.Sjafei. Berikut pula sesudah itu suatu pertunjukan di Padang dalam bulan April 1953.

Diantara pelukis-pelukis muda jang dapat disebutkan disini jang telah banyak memperkenalkan tjiptaan-tjiptaannya kepada masyarakat antara lain: Ali Akbar, Nurdin, Zetka, Hasan Basri, Djanain, Muslim, Dahlan M., Djalinus, Sabirin, Baharuddin, A. Ramli, Dahlan Djash.

Perkembangan seni lukis di Sumatera Tengah ini kelihatannya mempunyai tjorak tersendiri dari daerah lainnja. Alam fikiran banyak mentjerminkan keadaan, suasana dan alam tanah air dari daerah ini. Umumnja berkejakinan, bahwa seni itu adalah alat dari tudjuan hidup dari harus mempunyai wudjud dengan adanya itu, untuk kemuliaan dan keluhuran kemanusiaan.

Masyarakat banyak menaruhkan perhatiannya kepada perkembangan seni lukis di daerah ini. Ternjata dengan didatangkannya oleh Djawatan Kebudayaan dari Djokjakarta, kumpulan lukisan-lukisan pelukis di Djawa, dipertunjukkan di Bukittinggi, dibulan September 1952 itu, masyarakat akan bertambah menaruh perhatian kepada setiap perkembangan seni lukis di Indonesia, dan adanya pertimbangan mana-mana hasil-hasil kesenian jang dapat membawa rakjat kepada kemuliaan bangsa dan keluhuran kemanusiaan.

Pasal 74.
PAKAIAN.

SUASANA pemandangan mata, dengan aneka warna jang tegas-segar dari pakaian, dan perhiasan dari sebuah perarakan perkawinan atau suatu upatjara adat, masih dapat banjak didjumpai dikampung-kampung.

Warna jang tegas dari kain dan badju wanita, seperti merah-kesumba, dengan biru tua, merah-lembajung dengan hidjau daun pisang, kuning kunjit dengan lembajung tua, selendang, badju dan kain jang penuh dengan sulaman-sulaman jang penuh dengan ukir-ukiran aneka warna, disana sini ditaburi dengan katja berwarna dan manik-manik jang didjahitkan. Benang emas memegang peranan penting dalam semua sulaman, Gelang, dukuh dan sunting dengan susunan pemakaian jang memberatkan kelihatannja. Selendang untuk jang lainnja, bukan diselempangkan, atau melilit kepala, melainkan merupakan bentuk atap rumah, jang adakalanja sebahagian dimuka diberi berdjumbai-djumbai. Tiap daerah ada perbedaannja dari pemakaian pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasannja itu. Begitu djuga halnja dengan pakaian dan perhiasan laki-laki.

Kaum laki-laki dengan badju hitam, lembajung atau merah tua, digelang-djahit lengannja dengan kain jang kekuning-kuningan atau keemas-emasan, tjelana gelembong jang djauh sedikit dari lutut pandjangnja, jang kebanyakan berwarna hitam, mudah melakukan gerakan-gerakan diwaktu bersilat. Destar jang mengandjung-run-tjing dan berdjumbai kebelakang. Kain sarung jang sebahagian dengan tenunan berukir-ukiran benang emas, jang menjelempang melalui bahu dan badan. Tempat rokok jang merupakan kampir jang dihiasi dengan menir-menir jang beraneka warna, dan tjetus api serta api berada dalam saku-saku. Datuk-datuk atau penghulu-penghulu dengan saluk dan tongkatnja, keris tersisip dipinggang dan penuh dengan ukir-ukiran. Perkembangan pertukangan besi dan kuningan sampai sekarang masih menundukkan kegiatan-kegiatan-nja, seperti Sungai Puar dan pada negeri-negeri lain. Logam-logam lainnja seperti emas dan perak diusahakan sendiri oleh rakjat. Kesenian-ukir perak dan mas Kota Gedang mendapat nama jang gemilang jang tetap dapat dipertahankan ditanah air Indonesia. Perhatian luar negeri terhadap kesenian itu adalah besar. Dalam setiap upatjara-upatjara jang tertentu, pandji-pandji dan marwal jang berwarna merah putih serta hitam dan pajung kuning, masih dipergunakan, jang menundukkan kebesaran adat alam Minangkabau.

Akibat pendudukan Djepang dan perang kemerdekaan melawan Belanda perlengkapan-perengkapan pakaian adat dan barang-barang yang bernilai kebudayaan yang tiada merupakan kelengkapannya lagi. Untuk mencari sesuatu yang lengkap, kadang-kadang bermatjam-matjam tiorak dari berbagai-bagai daerah dipergunakan.

Bahan-bahan kain-kain dari keluaran baru dipertjampurkan dengan yang lama. Usaha pemerintah kearah kesempurnaan memelihara barang-barang yang bernilai kebudayaan itu, baru kelihatan dengan adanya sekarang djawatan yang menjelidiki dan memelihara tumbuhnya kebudayaan rakyat.

Sutera memegang peranan penting dalam segala bahan pakaian adat. Saudagar-saudagar yang datang dari negeri Tiongkok telah mendatangkan kain-kain dan benang sutera kenegeri ini dahulu.

Dengan adanya benang-benang tersebut mulai menumbuhkan kegiatan dalam lapangan pertenunan. Penanaman kapas di halaman-halaman rumah dan usaha-usaha pemintalan benang merata diseluruh negeri. Pertenunan berkembang dengan pesatnya. Negeri-negeri Silungkang, Sungai Pagu, Kubang, Naras (Pariaman) dan Kota Gedang, menjadi negeri-negeri yang ternama dengan pertenunannya. Benang-benang emas dan benang sutera yang didatangkan dari luar negeri menghasilkan kain-kain yang bertiorak indah dan bernilai tinggi, seperti kain Balapak, kain Songkit dan lain-lainnya.

Diantara kain-kain perhiasan ada yang dihias-djahit dengan manik-manik dan katja berwarna. Banyak kemungkinan manik-manik dan katja-katja itu, dibawa pada masa dahulunya oleh pedagang-pedagang luar negeri kenegeri ini.

Dikampung-kampung wanita-wanita kebanyakan sekarang memakai badju kurung dengan berselendang yang disusun belitkan dikepala. Kebaja-kebaja panjang, masih dijumpai pemakaiannya pada wanita-wanita yang dipesisir barat, seperti kota Padang.

Peladjar-peladjar puteri dan kaum puteri yang dikota-kota sebagian besar memakai jurk. Puteri-puteri yang diperguruan agama tetap memakai badju kurung dengan kain panjangnya serta selendang yang dililitkan dikepala.

Pada beberapa negeri, pemakaian jurk dengan kain panjang, serta pemakaian selendang, dapat dijumpai. Perkembangan kepada pemakaian kebaja pendek bagi wanita-wanita yang sudah kawin telah kelihatan dimana-mana dikota-kota.

Dalam keramaian di Sumatera Tengah ini, akan terlihat tiorak-tiorak pakaian yang tjampuran dari seluruh itu.

Kaum laki-laki yang dikampung-kampung kebanyakan dapat dilihat dengan badju gunting belangannya atau gunting tjina, dengan telana kain batik, kain sarung yang diselempangkan dibadan, serta pemakaian kupiah.

Bertambah lama keadaan itu telah berangsur melalui perubahan dengan datangnja tjorak badju, seperti kemedja dan pentalon.

Bertambah kekota, suasana berpakaian itu lebih banjak memperli-
hatkan tjara Barat dengan satu, dua orang memakai kupiah.

Pemakaian-pemakaian adat dilihat sekarang pada upatjara-
upatjara adat dan perhelatan-perhelatan perkawinan.

Pasal 75.

PENTJAK SILAT.

PENTJAK silat jang terkenal, pada zaman pendjadjahan banjak didjadikan peramaian upatjara-upatjara dan perajaan. Ketangkasan jang diperlukan pada kepandaian silat itu, untuk mempertahankan diri dari serangan dan untuk melakukan penjerangan sangat menambat perhatian benar. Gerakan-gerakan jang ada pada permainan itu pada zaman kemerdekaan sekarang ini, sebahagiannja dimasukkan dalam tari-tarian dan senam disekolah-sekolah.

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan untuk pentjak dan silat pada masa sekarang ini, mendjadikan pentjak silat itu berkembang didalam masyarakat dengan pesatnja.

Pentjak silat itu berlainan ditiap-tiap daerah dengan nama jang berlainan pula. Tak kurang dari 500 buah matjam dan namanja semuanja. Jang paling dikenal diantara seluruhnja itu ialah antara lain: Silat Gaib (silat tua), Lintau (bula tore), Kumango, Silat Pauh, Gadjah badorong, Tapiiek dalam lago, Gantung tjeri, Bandaro ramudiek.

Perkembangan matjam-matjam pentjak silat itu, bukanlah merata keseluruh negeri dengan samanja, seperti Siterlak jang paling banjak berkembangnja adalah di Tarusan, Batang Kapas, Air Adji, umumnja diseluruh kabupaten Pesisir Selatan Kerintji. Pada lima puluh tahun belakang ini sudah mulai berkembang di Manindjau, Lubuk Basung, jaitu kabupaten Agam.

Silat Gaib (silat Tua) berkembang kabupaten Agam, seperti di Kamang, Balingka, Matur, Lawang, Manindjau, Lubuk Basung, umumnja diseluruh kabupaten Agam. Walaupun begitu dibeberapa daerah lain didjumpai pentjak silat Gaib itu, tetapi tidaklah begitu meluas benar.

Silat Lintau (gula tare) berkembang diseluruh kabupaten Tanah Datar dan sedikitnja kabupaten Lima Puluh Kota (Pajakumbuh). Berkembangnja Silat Lintau ini kedaerah lain, seperti Minangkabau, mendjadikan perubahan nama, Silat Gula Tare.

Silat Kumango. Berkembang kabupaten Tanah Datar, tetapi tidaklah seluas Silat Lintau. Di Pajakumbuh Silat Kumango ini djuga didapati, tetapi tidak begitu berkembang.

Silat Pauh (gadja bedorong). Berkembang disekitar Lubuk Alung, Sitjintjin dan Padang, tetapi jang sangat meluas pentjak ini adalah di Padang luar kota. Dan djuga dikabupaten Solok nampak djuga berkembang, jaitu didaerah Sahingbabar.

Silat Tapiék Balam Lago. Berkembang didaerah kabupaten Agam antaranja nampak di Matur, Lawang, Palembang, Tantan dan Batu Kambing.

Silat Gantung Tjeri. Silat ini setelah kita perhatikan njata bahwa telah ditjampuri antara silat Siterlak dan silat Lintau. Berkembangnja menurut tindjauan belumlah lama betul, terbukti hanja silat ini didapati di Gantung atjeri sendiri, kabupaten Solok.

Silat Bandaro Ramudiek. Nama silat ini terambil dari nama orang jang mula: mengembangkannja di Tarusan. Silat ini berkembang di Pesisir Selatan Kerintji.

Silat Koto Anau. Silat ini hanja berkembang disekitar Kota Enau sadja.

Pasal 76.

KESUSASTERAAN MINANGKABAU.

MENGINGAT kata-kata jang tersusun rapi dan teratur, djauh lebih mudah dari mengingat kata-kata dalam susunan biasa. Hal ini pulalah salah satunja jang mendjadi sebab terdapatnja banjak susunan poëtis dalam pemitjaraan di Minangkabau. Pidato-pidato adat mesti diutjapkan setjara poëtis dalam upatjara-upatjara resmi.

Seperti pengangkatan penghulu, kawin, mendirikan rumah, berburu, kematian dan lain-lain Susunan kata setjara prosa, susunan biasa kurang menarik perhatian dan tidak begitu mudah mengekalkannja dalam ingatan otak seseorang.

Sedemikian pentingnja seseorang pemuda di Minangkabau memahami akan susunan poëtis baik pantun atau gurindam ataupun sjair dan jang lainnja dapat dinjatakan oleh sebuah pantun Minangkabau:

Sarantjak saelok ikolah parak
indak badasun agak tjiek.
Sarantjak saelok ikolah awak
indak bapantun agak tjiek.

Maksudnja:

Sebagus seindah ini susunan taman
tidak ditanami dasun agak sebuah.
Sebagus seindah ini tampan badan
tidak memahami pantun agak sebuah.

Bukan pemuda sadja jang biasanja mempergunakan kata-kata dalam susunan pantun itu bahkan djuga orang tua-tua biar dalam pemitjaraan sehari-hari apalagi dalam pidato tertentu. Ibu-ibu bangsawan dalam pertjakapan biasa menjuruh anaknja melakukan suatu pekerdjaanpun membiasakan memakai kata-kata berirama itu. Pertjakapan itu berbalas-balasan berganti-ganti. Penuh dengan keindahan bahasa dan selalu ada hubungan antara pantun dalam utjapan pertama dengan djawabannja dan seterusnya. Begini kata teman berbitjara, telah ada pantun tersedia pendjawabnja. Tak boleh gugup, tetapi harus lantjar mahir. Kegugupan dan ketidak lantjaran berarti kekurangan dan belum bisa dibawa ketengah.

Sifat-sifat berbitjara serba poëtis ini masuk dengan sendirinja ke dalam sastera Minangkabau. Andai katapun ada sastera Minangkabau jang bersusun dalam susunan kata-kata biasa, tetapi langgam irama poëtis tetap terbawa. Minangkabau pada tingkatan pertamanya mempunjai kesusasteraan jang hanja beredar dari mulut kemulut. Bermatjam-matjam hasil kesusasteraan Minangkabau lama, antaranya dapat disebut Malin Deman, Sabai Nan Aluih, Rantjak Dilabuh, Si Sariaman, Malin Kundang dan jang lebih terkenal adalah Tjindur Mato. Semuanya itu adalah tjerita-tjerita jang beredar dari mulut kemulut pada mulanja. Dengan kata-kata jang penuh irama seorang nenek bertjerai kepada tjutju-tjutjunja, bapa bertjerita kepada anaknja dst. Disamping itu jang lebih menarik lagi serta lebih memudahkan perkembangannja ialah adanja kebiasaan bakaba. Bakaba bukan berarti mengelamun, tetapi dalam arti berberita atau berchabar. Seorang ahli bakaba itu mentjeritakan salah satu hasil kesusasteraan Minangkabau pada malam hari didengar oleh beratus-ratus penonton-pendengar. Waktunja dari djam 9 malam sampai djam 3 dinihari. Ada jang diiringi dengan rebab ada jang tidak. Rebab ialah sematjam bunji-bunjian berbentuk biola tetapi sangat sederhana. Bakaba itu memegang peranan jang penting. Pengaruhnja meluas dalam masjarakat. Dia mendjadi kesukaan dan kegemaran umum. Dengan bakaba itu dapatlah hasil sastera tadi dinikmati oleh masjarakat rakjat banjak. Hal ini tidak berarti bahwa golongan-golongan lain dalam masjarakat Minangkabau tidak menjukainja. Bahkan atjap kali usaha mengadakan bakaba itu dipelopori oleh mereka jang termasuk golongan bangsawan.

Susunan sastera Minangkabau itu ada jang semata-mata setjara poëtis seperti Rantjak Dilabuh disusun berbentuk pantun. Tetapi lebih banjak lagi disusun dalam bentuk liris-prosa seperti Tjindur Mato dan Sabai Nan Aluih. Jang dimaksud dengan susunan dan bentuk liris-prosa ialah tjerita-tjerita jang lebih dekat kepada susunan kata biasa (prosa) susunan kata-katanja, tetapi membatjanja dengan irama tertentu (lirik). Liris-prosa inilah terutama satu keistimewaan dalam seni sastera di Minangkabau.

Sumber-sumber hasil sastera Minangkabau ini bermatjam-matjam pula. Ada jang didasarkan kepada sedjarah seperti Tjindur Mato jang mentjeritakan sedjarah keradjaan Minangkabau Pagarrujung dimasa Bunda Kandung dengan pahlawan Tjindur Mato-nja. Ada pula jang bersumber kepada kisah kepahlawanan kaum wanitanja (ingat matriarchat di Minangkabau) seperti tjerita Sabai Nan Aluih jang mengisahkan wanita Sabai Nan Aluih membunuh mati Radja Nan Pandjang sebagai tuntutan bela atas kematian bapanja jang bernama Radja Berbanding. Disamping itu ditemui pula tjerita jang berdasarkan kepada pendidikan agar kuat berusaha dan beladjar seperti tjerita Rantjak Dilabuh jang artinja Gagah Didjalanan sadja. Rantjak Dilabuh memberitakan keadaan seorang pemuda jang mulanja hanja melagakkan kegagahan dirinja dan pakaianja

sadja mundar mandir didjalan raja tetapi achirnja terbentur dengan kenjataan jang ada karena orang tidak mengharapkan hanja ke-gahannja sadja tetapi orang memperhatikan kepada penghidupan dan pendidikannja. Achirnja dia beladjar ilmu dan beladjar hidup. Sumber jang lain kita dapati dalam tjerita Malin Kundang suatu tjerita jang masjhur terutama dari daerah pesisir Minangkabau. Disini ditjeritakan keadaan seorang anak jang mendurhakai ibu kandungnja. Seorang pemuda jang tak hendak mengaku ibu lagi kepada ibunja karena dia telah kaya dan mempunyai kapal sedang ibunja tetap seorang tua kampung jang buruk. Anak jang durhaka ini di-djelmakan djadi batu beserta kapalnja. Malin Kundang berdasarkan kepada pendidikan menghormati orang tua. Djuga tak kurang pentingnja tjerita jang berdasarkan kepada pendidikan untuk mendjaga ketenteraman didalam suatu keluarga dalam satu rumah tangga. Untuk ini dapat dikemukakan tjerita Si Sariaman. Berisikan pertjeraan sepasang suami isteri jang berkasih-kasihan akibat tjampur tangan seorang mertua jang inginkan menantu baru jang lebih kaya. Akibatnja kematian bagi kedua suami isteri itu dengan djalan membunuh diri. Demikianlah kita sebutkan beberapa sumber timbul-nja hasil sastra di Minangkabau.

Orang jang mula-mula mentjiptakan tjerita-tjerita itu tak dapat dikenal lagi. Sehingga tjerita-tjerita itu tidak mendjadi milik perseorangan tetapi mendjadi milik masyarakat, milik umum. Tiap-tiap orang berhak merper-kabakannja kepada umum asal dia sanggup. Tetapi sungguhpun dia telah mendjadi milik masyarakat, tjerita-tjerita itu hampir tak berubah kata-katanja biar si A, atau si B, atau si C jang mengabakannja.

Achirnja ketika telah lebih maju ketjerdasan membatja dalam masyarakat Minangkabau maka dibukukanlah tjerita-tjerita itu. Dalam buku-buku jang mengenai tjerita itu tidak ada pengarang jang mendakwakan karangannja, tetapi mengatakan hanja menjunnja. Mereka melakukan penjusunan dari tjerita-tjerita jang telah bertebar didalam masyarakat itu. Pembukuannja ini menghendaki buku jang tebal karena banyak bunga-bunga tjeritanja jang harus dimasukkan. Pada angkatan muda ada jang merasa terlalu pandjang, tetapi ternjata dalam bunga-bunga tjerita itulah antara lain terdapatnja susunan bahasa jang berisi rasa seni jang tinggi serta pula keenakan telinga kita mendengar kalau dia sedang dibatjakan orang dengan langgam iramanja jang menarik itu.

Paling achir diusahakan orang meringkaskan dengan maksud mengambil keringkasan isinja seperti Sabai Nan Aluih disandiwarkan susunan Dr. A. K. Gani dan djuga Tjindur Mato. Bahasanja pun telah di Indonesiakan. Memang tak ada terasa salah susunan bahasanja tak djanggal dibatja dan didengar, tetapi kalau kita dalam dengan rasa seni sastra, terasa oleh kita ada jang kurang tak kena rasanja. Hal ini djustru terasanja bagi mereka jang berasal dari daerah ini. Tetapi peng-Indonesiaannja itu memang

mempunyai arti jang besar dalam usaha memperkenalkan seni sastra daerah pada seluruh bangsa Indonesia untuk memperkaja kesusa-
teraan Indonesia dan mendjadikannja sebagai milik bersama di Indo-
nesia djadi milik nasional.

Semua buku-buku tjerita jang telah disebut diatas disusun dalam bahasa daerah Minangkabau. Bahasa Minangkabau termasuk rum-
pun bahasa Melaju jang paling dekat dengan bahasa Melaju Riau.
dalam lingkungan induk bahasa Ostronesia. Sedang bahasa Melaju
Riau itulah dasar dari bahasa Indonesia modern sekarang. Peru-
bahan bahasa daerah Minangkabau dengan bahasa Riau tidak berapa
kelihatan. Hanja penjederhanaan dalam huruf-huruf hidup jang
terdapat. Huruf a kerap ditukar dengan huruf o, menurut permu-
dahan menjebutnja bagi lidah Minangkabau. Sedang huruf matinja
djarang jang ditukar, kalau tak hendak dikatakan tidak ada sama
sekali

Ketika seni sastra Indonesia telah lebih berkembang di Minang-
kabau, maka tjerita-tjerita jang disusun kemudian telah disesuaikan
dengan perkembangan ini. Roman sedjarah dan roman adat jang
keluar kemudian telah lebih bertjorak sastra persatuan nasional
Indonesia, tidak banjak tjorak daerahnja lagi. Bahasapun bahasa
Kesatuan. Tetapi aspeknja masih persoalan daerah. Ketika kawin
paksa masih terdapat di Minangkabau, keluarlah buku tjerita ber-
bentuk roman adat penentangnja. Buku Siti Nurbaja dari Marah
Rusli keluar sebagai roman adat dalam tugas menentang kebiasaan
kawin paksa itu. Begitu djuga isi roman adat Salah Asuhan karang-
an A. Muis dan Tenggelamnja Kapal Van Der Wijk dari Hamka.
Disamping itu kita dapati pula roman sedjarah sebagai hasil sastra
Indonesia jang djuga berintikan persoalan-persoalan di Minang-
kabau.

Dalam tingkatan terachir ini, maka sastra Minangkabau itu telah
menjatu dengan sastra Indonesia. Tidak dapat dipisah-pisah lagi.
Begitu sampai sekarang. Tetapi djangan dilupakan bahwa sastra
asli daerah tetap hidup ditengah-tengah masjarakat Minangkabau.

Pasal 77.

KEPULAUAN MENTAWAI DAN MASJARAKATNJA.

KEPULAUAN Mentawai jang membudjur dibahagian barat pulau Sumatera dan masuk wilajah daerah Propinsi Sumatera Tengah dan dikelilingi oleh Samudra Hindia itu, dalam waktu belakangan ini menarik banjak perhatian. Daerah kepulauan Mentawai ini mendjadi salah satu subjek dalam usaha untuk „memper-kembang dan mempertinggi ketjerdasan” didalam lingkungan meng-udjudnja usaha demikian dikepulauan Indonesia ini. Dia menarik banjak perhatian, karena disana tengah berkembang kegiatan-kegiatan hendak madju, dan segenap lapisan masjarakatnja banjak membutuhkan tenaga-tenaga jang akan memberikan bimbingan dan tuntunan.

Kepulauan itulah jang hendak kami perkenalkan sekarang, jaitu perkenalan jang bertudjuan hendak menarik perhatian lebih banjak kepadanya. Dengan itu, kami mengharapkan, agar usaha-usaha untuk mempermadju dan mengangkat deradjat bangsa Indonesia didaerah itu akan lebih mendapat perhatian jang djauh lebih besar lagi dari pada jang ada sekarang ini.

Daerahnja.

Daerah kepulauan Mentawai jang terdiri dari berpuluh-puluh buah pulau besar-ketjil ini, dalam waktu jang belakangan ini didiami oleh kira-kira 19.000 orang penduduk aslinja, jaitu penduduk jang mempunjai tjara hidup jang tersendiri pula. Sebahagian besar diantara penduduk asli ini bertempat tinggal dipulau-pulau Siberut, Sipora dan Pagai, pulau-pulau jang terbesar diantara pulau-pulau didaerah kepulauan itu.

Pakaian dan kebiasaan penduduk.

Pada umumnja penduduk asli, jaitu jang biasa disebut dengan „orang Mentawai” ini masih sangat sederhana kehidupannja. Mereka sampai sekarang, masih kuat mempertahankan pembawaan-pembawaan hidup jang mereka pusakai dari nenek-mojang mereka, meskipun perubahan-perubahan sudah kelihatan dengan njata. Kesederhanaan ini terlihat pada pakaian jang biasa mereka pakai sehari-hari. Kaum laki-lakinja memakai pakaian jang lebih sederhana dari kaum wanitanja.

Laki-laki Mentawai biasanja hanja memakai tjawat jang terbikin dari kulit kaju tarab sekadar untuk penutup aurat mereka sadja. Kaum wanitanja memakai pakaian jang lebih „kaja” dari kaum laki-laki. Sepintas lalu melihat pakaian kaum wanita Mentawai ini, kita teringat kepada pakaian wanita-wanita dikepulauan Hawai dan Tahiti dalam upatjara sambil melakukan tari „hula-hula”-nja.

„Perhiasan-perhiasan” tubuh jang biasa terdapat pada kaum laki-laki ini terdiri dari ukiran-ukiran pada segenap tubuhnja, jaitu ukiran-ukiran jang biasa mereka sebut dengan „Kabit”.

Kabit ini adalah ukiran-ukiran sepenuh tubuh jang diukirkan atau dititik dengan benda tjair jang berwarna hitam. Ukiran-ukiran ini terkadang demikian halus dan dibikin dengan sangat hati-hati. Kabit ini merupakan kembang-kembang dan akar-akaran, diukir sama berat, sama banjak kiri dan kanan bahagian tubuh. Terkadang terdapat djuga ukiran-ukiran jang merupakan binatang-binatang, jang konon kabarnja merupakan suatu pernyataan, bahwa jang memakainya itu pernah membunuh binatang jang agak luar biasa.

Kaum wanita biasanja tidak memakai kabit ini. Untuk penutup sebahagian tubuhnja, mereka memakai rok jang terbikin dari daun pandan. Diwaktu bekerdja ditempat terbuka, dada dan kepala mereka tutup dengan selemba kain atau kulit kaju terap. Tapi dalam melakukan suatu pesta, tutup dada itu mereka tanggalkan. Untuk lebih „mempertjantik” diri, kepala mereka dihiasi dengan bunga-bunga dan daun-daunan jang biasanja terdiri dari daun puding atau daun ruku-ruku.

Perhiasan lain jang biasa terdapat pada mereka, laki-laki atau wanita, ialah manik-manik jang beraneka warna jang digatungkan dileher masing-masing. Manik-manik ini terdiri dari uang senan jang berlobang-lobang, lokan-lokan dan akar-akar jang didapati mereka ditepi pantai atau didalam laut. Manik-manik ini terkadang digatungkan untuk menghiasi sekudjur badan mereka. Beberapa tahun jang lampau, terutama diakhir pendjadjahan bangsa Belanda, hampir seluruh penduduk laki-laki dikepulauan itu memakai rambut pandjang dan disanggul. Tapi kebiasaan itu sekarang hampir hilang dan hanja terdapat didusun-dusun jang djauh ditengah-tengah pulau itu.

Mereka hidup dari hasil penangkapan ikan dan perburuan. Makanan pokok (Hoofdvoedsel) mereka adalah sagu dan keladi (ketela rambat). Nasi dan djagung mereka makan djuga dalam keadaan jang istimewa.

Agama dan pemerintahan.

Sebahagian besar rakjat masih memeluk paham animisme, jang oleh penduduk disebut dengan „Sjabulungan”. Peraturan-peraturan beribadat dan sebagainya didalam „Sjabulungan” ini tidak

pernah ada tertulis, tapi segala sesuatunja berada dibawah pengen-dalian seorang pendita jang mereka sebut dengan „Sikerei“. Selain dari mendjadi „kepala Agama“, sikerei djuga mendjadi dukun dan tukang tenung akan menentukan buruk baiknja suatu nasib jang akan menimpa seseorang akan sepesukuan. Penghormatan dan peng-hargaan kepada sikerei ini terkadang demikian besarnja, sehingga orang inilah jang akan menentukan baik atau buruk sesuatu, karena dia djuga merangkap pekerdjaan sebagai kepala.

Selama persintuhan dengan peradaban asing banjak djuga diantara rakjat jang sudah pindah kepada agama lain. Banjak diantara mereka jang sudah masuk mendjadi salah seorang penganut agama Kristen, dan dalam waktu jang belakangan ini banjak pula jang sudah pindah memeluk agama Islam.

Dengan perbedaan agama itu, maka timbul pula perbedaan tjara melakukan pemerintahan. Rakjat jang masih mendjadi penganut Sjabulungan mempunyai tjara pemerintahan sendiri, jang bentuknja kira-kira sebagai dibawah ini.

Badan pemerintahan dikalangan mereka terdiri dari 4 matjam golongan, jaitu:

1. Kepala suku jang mereka namakan djuga dengan „Rimata“. Pangkat ini dipusakakan turun-temurun. Tugasnja ialah untuk mengurus soal-soal umum jang terdjadi didalam persukuannja. Bila tidak Rimata ini tidak ada meninggalkan keturunan jang akan menggantikan kedudukannja, maka dipilihkan seorang lain oleh rakjat pesukuan diantarannja mereka jang akan mendjadi Rimata baru. Dan sudah tentu orang baru jang akan dipilih mendjadi Rimata ini haruslah seseorang jang mempunyai kelebihan-lebihan dikalangan rakjat itu.
2. Dibawah Rimata terdapat pangkat jang disebut dengan Sipengemuri, jaitu hulubalang jang bertugas untuk mengawasi segala peraturan-peraturan dan adat-adat kebiasaan dan perintah-perintah Rimata.
3. Disamping Sipengemuri ini terdapat sebuah pangkat jang disebut dengan „Sikautek Dulang“, jaitu seorang pembesar jang akan mengatur perbekalan rakjat, terutama diwaktu-waktu akan dilangsungkannja suatu upatjara adat setjara besar-besaran, atau diwaktu mendjalan „punen“, jaitu masa beristirahat untuk memperingati sesuatu jang penting jang mengenai pesukuan.
4. Achirnja terdapat pangkat jang disebut dengan „Sipenanoga“, jaitu panggilan jang disebutkan kepada orang jang ditugaskan untuk menjampaikan sesuatu pesan Rimata kepada rakjat, atau untuk menjampaikan panggilan Rimata kepada rakjat.

Keempat tingkatan jang tersebut diataslah jang mempunyai kedudukan tinggi dalam kalangan rakjat jang masih memeluk „Sjabu-

lungan", jaitu orang-orang jang mempunjai kekuasaan tertinggi didalam kalangan masjarakat itu.

Dalam kalangan rakjat jang menganut agama Islam dan agama Kristen, berlakulah peraturan-peraturan jang biasa berlaku dalam kalangan rakjat asing dikepulauan itu.

Perkampungan.

Sistim jang dilahirkan oleh „Sjabulungan” dan besarnja pengaruh „Sikerei” dikalangan rakjat, menjejabkan timbulnja perpetjahan dikalangan mereka, dan perhubungan antara suku dengan suku karena terganggu karenanja.

Perpetjahan itu terkadang demikian besarnja, sehingga antara suku dengan suku dan antara kampung dengan kampung timbul perselisihan jang memuntjak dan menjejabkan timbul pula perselisihan jang memuntjak dan menjejabkan timbul pula perlawanan-perlawanan dan peperangan sesama mereka. Pertentangan-pertentangan itu kemudian menimbulkan dendam jang tidak kundjung padam dikalangan mereka sendiri, dendam jang turun-temurun.

Dari itu tidaklah mengherankan bila perkampungan mereka terpisah djauh satu sama lainnja, jaitu untuk mengelakan persengketaan dan pertempuran-pertempuran. Dan untuk mempertahankan diri, rumahpun haruslah dipersendjatai pula dan didirikan diatas tonggak-tonggak jang kuat.

Suatu kampung biasanja tidak mempunjai rumah jang banjak, hanjalah beberapa buah sadja, dan biasanja besar-besar pula. Didalam rumah besar itulah tinggal 5 sampai 6 kelamin jang kadangkadang sampai 20 atau 30 orang djumlahnja. Bahkan ada diantara rumah itu jang didiami oleh 10 sampai 15 kelamin. Dapatlah dibayangkan, betapa ramainja penduduk dan penghuni rumah tersebut. Dan susunan masjarakat sematjam ini mempermudah djalannja pemerintahan setjara ber-„Sjabulungan”, karena perintah-perintah dari Rimata dengan mudah dapat diselenggarakan oleh „Sipengemuri”, „Sikautek Dulang” dan „Sipenanoga”. Sebaliknya, amat sukar bagi pemerintah jang sekarang sedang berkembang disana, terutama karena sangat berdjauhannja letak antara satu dusun dengan dusun jang lain, lebih-lebih karena pedusunan-pedusunan ini terletak ditengah-tengah rimba belantara jang sukar dimasuki oleh orang lain.

Perkembangan-perkembangan.

Berkat usaha pemerintah didaerah itu, keadaan masjarakat Mentawai sekarang sudah banjak beroleh perubahan-perubahan penting. Tidak sadja tjara-tjara hidup dan adat kebiasa-

an kuno itu sudah mulai berubah, tapi dalam semua lapangan tampak perubahan jang njata.

Kalau dulu perdagangan antara rakjat hanja dilakukan dengan djalani tukar menukar sadja, sekarang sudah dipakai mata uang.

Sekolah-sekolah rakjat djuga sudah banjak didirikan oleh pemerintah dan disamping itu poliklinik-poliklinik djuga terdapat diberbagai tempat.

Penghasilan rakjat sekarang tidak hanja tergantung kepada rotan dan segala hasil hutan lainnja sadja, tapi sekarang sudah dapat mereka menghasilkan padi sendiri, berkat luasnja sawah jang dibuka dan ditanami ditempat itu.

Pulau-pulau dikepulauan Mentawai pada umumnja sangat subur tanahnja. Dari itu, pulau tersebut tidak hanja menghasilkan kopra sadja, tapi disamping itu banjak pula dia mengeluarkan buah-buahan, ubi, tebu dan sebagainja jang di-„export” ketempat-tempat lain.

Sungguhpun demikian, daerah itu masih membutuhkan jang djauh lebih banjak lagi dari apa jang diterima mereka sekarang.

Demikianlah pandangan sepintas lalu mengenai dengan masjarakat dikepulauan Mentawai jang dalam segala hal masih tertjetjer itu, tapi jang dari sedikit-kesedikit bertindak madju.

BAB V
BAHAGIA X.

DI DJAMBI.

Pasal 78.

UNDANG-UNDANG ADAT DJAMBI.

PEMERINTAH Djambi dalam zaman beradja-radja sampai kira-kira pada tahun 1904, mempunjai „Undang-undang Adat“, jang didjalankan untuk kelantjaran roda pemerintahan.

Undang-undang mana terbagi kepada:

1. Dinamakan Induk Undang.
2. Dinamakan Putjuk Undang nan Delapan.
3. Dinamakan Anak Undang nan Dua belas.
4. Dinamakan Sendi Undang ialah jang disebut „Teliti“.
5. Dinamakan Undang-undang Hukum.

Disebut didalam kata-kata Adat „Putjuk Djambi sembilan lurah mempunjai Undang-undang dan Teliti, Undang-undang turun dari Minangkabau Teliti mudik dari Djambi“.

Jang dimaksud dengan Putjuk Djambi sembilan lurah ialah: Sembilan anak sungai:

1. Batang Merangin.
2. Batang Mesumai.
3. Sungai Tabir.
4. Batang Pelepat.
5. Batang Senamat.
6. Batang Tebo.
7. Batang Bungo.
8. Batang Djudjuhan.
9. Batang Abuan Tungkal.

Undang-undang turun dari Minangkabau jaitu: Undang-undang jang terpakai di Djambi, petjahan dari Undang-undang jang terpakai di Minangkabau djuga, seperti: Putjuk Undang nan Delapan adalah petjahan dari Undang-undang nan Dua puluh di Minangkabau.

Induk Undang-undang jaitu:

1. Titian teras, bertangga batu.
Maksudnja: Titian teras, Undang-undang dari Nabi. Bertangga batu. Undang-undang dari Allah (Al qur'anulkarim).

2. Tjermin nan tiada kabur.

Maksudnja: Berteladanlah kepada jang telah sudah. Djalan jang telah dirambah jang akan diturut, badju jang telah didjahit jang akan dipakai. Bersesap berdjerami, bertunggul berpemaran, berpandam beperkuburan. Lihatlah alam jang telah terbentang ini.

3. Lantak nan tiada gujah.

Maksudnja: Kata benar jang tidak boleh diubah-ubah. Beruk dirimba disusun, anak dipangku diletakkan, jang benar itu djangan berubah.

4. Nan tiada lapuk karena hudjan, tiada lekang karena panas.

Maksudnja: Kata jang hak.

5. Kata se ijo.

Maksudnja: Pembijtaraan jang telah dipermusjawaratkan. Bulat boleh digilingkan, pipih boleh dilajangkan. Terhampar sama kering terendam sama basah. Beban berat sama dipikul, beban ringan sama didjindjing. Djika dapat sama berlaba, djika hilang sama merugi.

Putjuk Undang nan Delapan jaitu:

1. Dago Dagi.

Maksudnja: Dago, bersalah kepada pemerintah. Dagi membikin fitnah dan kekatjauan didalam negeri.

2. Sumbang Salah.

Maksudnja: Sumbang, hal-hal jang pada pendapat umum, tidak senonoh atau tidak selajaknja.

Salah, jang sudah terang berbuat suatu kesalahan terhadap seseorang.

3. Samun Sakar.

Maksudnja: Samun, perampokan jang disertai dengan pembunuhan. Sakar, perampasan terhadap harta benda sadja.

4. Upas Ratjun.

Maksudnja: Upas, membunuh seseorang dengan perantaraan makanan atau minuman jang telah diberi ratjun jang sangat berbisa sekali, sehingga orang itu mati seketika itu djuga dengan tidak bertangguh. Ratjun, menganiaja seseorang dengan perantaraan makanan atau minuman jang telah diberi zat ratjun, sehingga menyebabkan orang itu sakit dan merana, baik membawa kepada kematiannja ataupun tidak.

5. **Sijur Bakar.**

Maksudnja: Sijur, membakar dusun atau kampung. Bakar, membakar satu atau beberapa djumlah rumah.

6. **Tipu Tepok.**

Maksudnja: Tipu, merugikan seseorang dengan djalan berpura-pura mengemukakan kebenaran atau kebaikan, tetapi jang dimaksud adalah sebaliknja.

Tepok, merugikan seseorang dengan djalan budjukan atau rajuan.

7. **Maling Tjuri.**

Maksudnja: Maling, mengambil harta orang jang terkuntji dengan tidak setahu jang empunja atau mengambil harta orang dengan tidak setahu jang empunjanja pada malam hari. Tjuri, mengambil harta jang tidak terkuntji dengan tidak setahu jang empunja atau mengambil harta itu dengan tidak setahu jang empunja pada siang hari.

8. **Tikam Bunuh.**

Maksudnja: Tikam, melukai seseorang dengan sendjata jang runtjing, baik sendjata itu mempunjai mata jang tadjam ataupun tidak. Bunuh, perbuatan terhadap seseorang dengan mempergunakan sendjata, baik tadjam atau pun tidak, sehingga sampai mematikan orang itu ditempat perbuatan itu terdjadi.

Anak Undang nan Dua belas.

Mendjadi pokok untuk menjalurkan pembahagian Undang-undang, jang dikatakan didalam Adat: Hidup dikandung Undang djo Pusako, Mati dikandung oleh tanah. Anak Undang itu terbagi kepada 12:

1. Undang-undang jang takluk dengan hak Kullah.
2. Undang-undang jang takluk dengan Anak Adam dan hak-haknja.
3. Undang-undang jang takluk dengan hak rumah nan bertungganai, kampung nan bertua.
4. Undang-undang jang takluk dengan hak luhak nan berpenghulu.
5. Undang-undang jang takluk dengan negeri nan berbathin, rantau nan berdjenang.
6. Undang-undang jang takluk dengan Alam nan beradja.
7. Undang-undang hukum.

Luka dipampas, mati dibangun, salah berhutang, sumbing menitip, pindjam mengembalikan.

8. Undang-undang jang takluk dengan hak perkawinan semenda menjemenda.
9. Undang-undang jang takluk dengan hak penghidupan, penjaharian, kepandaian dan pekerdjaan Anak Adam.
10. Undang-undang jang takluk dengan hak harta benda, berat dan ringan.
11. Undang-undang jang takluk dengan hak permainan-permainan.
12. Undang-undang jang takluk dengan kekajaan alam, laut, darat, sawah, ladang, tasik, tambang, gunung, bukit, hutan, tanah, lupak, lebung, paja, rawang, tandjung, teluk, danau, rimba, dan remban.

Sendi Undang, jang disebut djuga *Teliti*. Ialah undang-undang jang telah diperkuat lagi dan telah ditambah dengan peraturan-peraturan khusus.

Undang-undang hukum.

Ialah undang-undang jang menentukan berat ringannja hukuman dan pembahagian-pembahagian jang termasuk kepada hukuman berat atau ringan, jang disebut djuga hukuman diatas dan hukuman dibawah. Undang-undang hukum ini masih terpakai sebahagian besarnya sampai kepada Kemas Abdulkadir diangkat oleh pendjadjahan Belanda menjadi Adviseur Adat Djambi sebelum tahun 1925. Dipergunakan oleh Belanda disamping *wetboek van Strafrecht*.

Pasal 79.

PERSUKUAN.

Djambi dalam zaman beradja-radja.

KERADJAAN Djambi dahulunya, dinamakan djuga Keradjaan jang 12 karena masjarakat terdiri dari 12 suku. Asal suku ini telah dibentangkan pada bahagian „Perkembangan Masjarakat Keradjaan Djambi”. Dusun-dusun, kampung-kampung dan negeri dibagi-bagi menurut suku-suku jang 12 itu, dengan tugas dan kewadjiban penduduknja masing-masing. Beberapa kampung dan dusun-dusun diberi nama (dimasukkan) mendjadi „anak kandung” dari suku-suku jang 12 itu. Pun suku-suku tersebut diberi nama djuga menurut nama dusun-dusun:

I. *Suku Djebus.*

Negeri-negeri jang mendjadi anak dari suku ini:

1. Sabak dan Dendang. 2. Simpang. 3. Aur Gading. 4. Tandjung. 5. Landrang. Kepala dari suku Djebus, bergelar, „Radja Sari”. Pekerdjaan dan kewadjiban penduduknja menjelenggarakan penobatan dan penabalan Radja-radja dengan menjisipkan pada pinggang Radja jang sedang dinobatkan itu sebilah „keris” jang bernama „keris Sigindjai”.

II. *Suku Pemajung.*

Negeri-negeri jang mendjadi bahagian suku ini:

1. Teluk sebelah ulu. 2. Pudak-Kumpeh. 3. Berembang. Jang mendjadi anak:
 1. Sipin-Kumpeh. 2. Pulau Mentaro-Kumpeh. 3. Muara Djambi. 4. Teluk Sekerat. 5. Pematang kanan. 6. Kunangan.Kepala dari suku Pemajung bergelar „Lurah”. Pekerdjaan dan kewadjiban penduduknja memajungi Radja.

III. *Suku Maro Sebo.*

Negeri-negeri jang mendjadi bahagian suku ini:

1. Sungai Buluh. 2. Pelajang. 3. Sengketi ketjil. 4. Sungai Ruan.

5. Buluh Kasap. 6. Kembang Seri. 7. Rengas sembilan. 8. Sungai-Aur. 9. Teluk Leban. 10. Sungai Bengkal. 11. Mangupeh. 12. Remadji. 13. Rantau Api. 14. Rambutan Masam. 15. Kubu Kandang.
Jang mendjadi anak:

1. Semabu. 2. Teluk Pandak. 3. Beberapa dusun di Tungal. 4. Penjengat. 5. Mendalo. 6. Selat.

Kepala dari suku Maro Sebo bergelar „Kedemang”. Pekerdjaan dan kewadajiban penduduknja menjelenggarakan soal permakanaan dengan segala keperluanja, alat dan persiapannja.

IV. Suku Petadjin.

Negeri-negeri jang mendjadi bahagian suku ini:

1. Betung Bedarah. 2. Penapalan. 3. Sungai Keruh. 4. Teluk Rendah. 5. Dusun Tuo. 6. Penindjauan. 7. Tambun Arang. 8. Pemunduran Kumpeh.

Jang mendjadi anak.

1. Dusun Danau Embat. 2. Rantau Madjo. 3. Sengeti. 4. Kerangan. 5. Sakernan. 6. Sungai Baung. 7. Dusun Aro.

Kepala dari suku Petadjin bergelar „Lurah”. Pekerdjaan dan kewadajiban penduduknja pertukangan, untuk persiapan mendirikan rumah, perahu, tongkang dan pengajuh-pengajuhnja.

V. Suku VII Koto, jang bernama djuga „Kembang Paseban”.

Negeri-negeri jang mendjadi bahagian suku ini:

1. Teluk Ketapang dan tjabang-tjabangnja. Teluk Tjempaka dan Udjung Tandjung.
2. Muara Tabun dan tjabang-tjabangnja Pulau Musang dan Lemajo.
3. Nirah dan tjabang-tjabangnja Aur Tjina, Sungai Dua dan Dusun Baru.
4. Sungai Abang. 5. Teluk Kaju Putih. 6. Kuamang dan tjabang-tjabangnja Koto Djajo dan Pendukun. 7. Tandjung dan tjabang-tjabangnja Padang Kapuk, Rawang Pandjang, Bukit Gongtang, Lagam Ulu, Pulau Gading dan Empelu.

Jang mendjadi anak: ialah IX Koto:

1. Pagar Gading (Puding), tjabang-tjabangnja: Sungai Malintang dan Sungai Rambe.
2. Djambu, tjabang-tjabangnja: Teluk Kasai, Sungai Bengkal dan Sungai Besar.

3. Rambahan. 4. Teluk Lengkap tjabangnja: Tandjung Aur. 5. Teluk-Djambu. 6. Kebung. Tjabang-tjabangnja Sialang Ketjil dan Puar Pandji. 7. Teluk Kuali. 8. Sago. 9. Dusun Tuo, tjabang-tjabangnja Suko Beradjo, Pasir Majang dan Sengalau. Dikala Pemerintahan Sulthan Thaha, Kepala dari suku VII Koto, bergelar „Temenggung” „Depati” „Penghulu Mudo” dan „Mangku”. Pekerdjaan dan kewadjiban penduduknja memperbaiki benteng, pertahanan, pagar, tebat dan mempertahankan Keradjaan bila ada musuh.

IX Koto, kemudian tidak lagi mendjadi anak dari Suku VII Koto, tetapi telah mempunjai Kepala sendiri.

VI. *Suku Awin.*

Negeri-negeri jang mendjadi bahagian suku ini: 1. Pulau Kaju Aro. 2. Dusun Tengah.

Tidak mempunjai anak. Kepala dari suku Awin, bergelar „Lurah” Pekerdjaan dan kewadjiban penduduknja mendjaga dan memegang tombak disebelah kanan Radja.

VII. *Suku Penagan.*

Negeri jang mendjadi bahagian suku ini, satu sadja jaitu Dusun Kuap dan tidak mempunjai anak. Kepala dari suku Penagan, bergelar „Lurah”. Pekerdjaan dan kewadjiban penduduknja mendjaga dan memegang tombak disebelah kiri Radja.

VIII. *Suku Mestong.*

Negeri-negeri jang mendjadi bahagian suku ini: 1. Tarikan. 2. Lopak-Alai. 3. Koto Karang. 4. Sarang Burung. Tidak mempunjai anak.

Kepala dari suku Mestong, bergelar „Lurah”.

Pekerdjaan dan kewadjiban penduduknja, ahli bunji-bunjian, rebab dan ketjapi tari menari dan bernjanji untuk mendjadi Biduan Radja.

IX. *Suku Serdadu.*

Negeri jang mendjadi bahagian suku ini, satu sadja jaitu Sungai Terap. Tidak mempunjai anak. Kepala dari suku Serdadu, bergelar „Lurah”. Pekerdjaan dan kewadjiban penduduknja berdjalan madju dimuka Radja, memegang bedil dan kelewang.

X. *Suku Kebalen.*

Negeri jang mendjadi bahagian suku ini, hanya satu, jaitu: Terusan dan tidak mempunjai anak. Kepala dari suku ini, bergelar „Lurah”. Kemudian gelar ini diganti dengan „Djojopati”.

Pekerdjaan dan kewadajiban penduduknja pengiring dan pengawal Radja dari belakang dengan alat persendjataannja.

XI. *Suku Aur Hitam.*

Negeri-negeri jang mendjadi bahagian suku ini:

1. Durian Idjo. 2. Tebing Tinggi. 3. Padang Kelapa. 4. Sungai Siluang 5. Pematang Buluh 6. Kedjasung.

Jang mendjadi anak, hanja satu jaitu: Dusun Penjengat. Kepala dari suku Aur Hitam, bergelar „Lurah“. Pekerdjaan dan kewadajiban penduduknja mengadakan dan mendjaga persediaan air serta dengan persiapannja.

XII. *Suku Pinokawan Tengah.*

Negeri-negeri jang mendjadi bahagian suku ini: 1. Dusun Dure. 2. Lupak Aur. 3. Pulau Betung. 4. Sungai Durian.

Jang mendjadi anaknja:

1. Dusun Setiris. 2. Dusun Baru. 3. Djambi Tulo. 4. Dusun Tengah. 5. Dusun Danau. 6. Dusun Rukam. 7. Dusun Penjengat kampung Senaung.

Kepala dari suku Pinokawan Tengah, bergelar „Lurah“. Pekerdjaan dan kewadajiban penduduknja mendjaga dan mengawal Istana serta menjelenggarakan semua urusan peralatan dan pekerdjaan harian didalam Istana itu. Maka adalah Djambi Keradjaan jang 12 itu, mempunyai Dewan Patih Luar dan Dewan Patih Dalam.

Dewan Patih Luar itu, ialah seperti Dewan Perwakilan Rakjat.

Tempat pemitjaraan wakil-wakil Rakjat dari Putjuk Djambi sembilan lurah dibawah pajung nan sekaki, tombak nan sebatang. Terdiri dari 5 anggota, jang diberi bergelar dengan gelar kehormatan jaitu: Pangeran atau Temenggung. Anggota-anggotanja, pilihan rakjat dari rumah nan bertungganai, kampung nan bertua dan negeri nan berbathin. Dewan Patih Dalam ialah Dewan Menteri. Terdiri dari 5 anggota dan 1 orang Ketua. Ketua dari Dewan Patih Dalam ini, bergelar „Pangeran Ratu“.

Pasal 80.

ZAMAN PEMERINTAHAN SULTAN ABDUL KAHAR AGUNG.

TATA Negara dan tata tertib pemerintahan sebagai tersebut diatas berdjalan dengan baik sampai kezaman pemerintahan Sultan Abdul Kahar Agung Seri Ingologo.

Pada zaman pemerintahan Sultan ini, tata tertib itu tidak dapat dipertahankan lagi dengan tjara seksama, karena pada waktu itu kemurnian Keradjaan Djambi mulai dinodai oleh tenaga-tenaga jang dipaksakan oleh Kompeni Belanda, pada permulaan abad ke 18, meskipun sebelum itu kebesaran keradjaan Djambi sudah mulai pudar djuga.

Mengenai dengan zaman pemerintahan Sultan Abdul Kahar Agung jang dapat ditjatat hanjalah didekat masa berachirnja kebesaran Sultan itu.

Diterangkan, bahwa Sultan Abdul Kahar Agung Seri Ingologo mempunyai dua orang putera jang berasal dari permaisuri keradjaan. Anaknja jang pertama bernama Pangeran Depati Anom Singo Nagoro, dan jang kedua bernama Raden Singo Pati. Disamping kedua orang putera ini, baginda djuga mempunyai 40 orang putera lainnja, jaitu anak dari 16 orang isteri. (Keturunan jang berkembang dari 40 orang anak ini achirnja mendjelmakan sebuah pesukuan jang bernama „Suku Empat Puluh”).

Pengeran Depati Anom pada suatu hari kedapatan melakukan perbuatan jang terlarang dan akan dikenakan hukuman oleh bapaknja Sultan Abdul Kahar, dan rakjatpun sangat tidak senang dengan pekertinja.

Tapi sebelum hukuman itu didjatuhkan, Pengeran Depati Anom dapat melarikan diri dan meminta perlindungan kepada kompeni Belanda. Karena Kompeni Belanda pada waktu itu sedang berbaik dengan Sultan Abdul Kahar, maka Depati Anompun dibuang kepulau Banda.

Sultan Abdul Kahar mangkat. Kedudukannja sebagai Sultan harus digantikan oleh Raden Singo Pati jang diberi djuga gelaran dengan Pengeran Ratu. Tapi karena pemerintah Kompeni Belanda merasa kerugian dengan pengangkatan Pengeran Ratu mendjadi radja, maka dengan tidak mendapat persetudjuan dari Rakjat di-angkatnjalah Pengeran Singo Pati untuk menggantikan Sultan Abdul Kahar, dengan gelaran Ratu Marto Kusumo Ningrat dan

berkedudukan disebuah dusun jang baru dibangunkan jaitu Mangundjaja, karena rakjat Djambi tidak mau menerima radja baru itu.

Karena keadaan jang genting itu, maka Pengeran Ratu pun berangkatlah ke Pagarrujung untuk mengabarkan halnja dan keradjaan Djambi kepada jang dipertuan Besar Alam Minangkabau.

Di Pagarrujung dia dinobatkan mendjadi radja jang mengepalai daerah jang terletak antara keradjaan Djambi dengan Keradjaan Minangkabau, jaitu daerah jang territoriumnja disebut dengan „Durian ditakuk Radjo, Sialang berlantak besi, Si Pisak-pisak hanjut“. Sebagai radja daerah baru ini, dia diberi bergelar dengan Sultan Abdul Djalil Agung Seri Ingologo.

Kembalinja ke Djambi, Sultan ini djuga membawa seputjuk surat (Protes-nota) dari Jang dipertuan Besar Pagarrujung untuk disampaikan kepada pembesar Kompeni Belanda di Djambi.

Setelah menerima „Protes“ keras dari Minangkabau itu, maka Kompeni Belandapun membatalkan pengangkatan Pengeran Depati Anom dan dia diasingkan ke Betawi, dan achirnja dibuang kepulau Pedamaran.

Kekuasaan pemerintahan keradjaan Djambi seluruhnja djatuhlah ketangan Sultan Abdul Djalil, dan memerintah bertahun-tahun lamanja.

Sultan ini tidak lama memerintah, karena meninggal diwaktu muda.

Kekuasaan berpindah tangan kepada Sultan Abdul Mahji Agung Seri Ingologo, tjutju dari Sultan Abdul Djalil. Sementara itu pengaruh Kompeni Belanda makin melebar dan roda pemerintahan tidak berdjalan lagi bagaimana mestinja.

Dengan maksud untuk membalaskan dendam, tiga orang keturunan Pengeran Depati Anom bermaksud hendak merebut kekuasaan dari radja jang belia ini. Ketiga orang itu ialah Raden Lawang Tusek, Raden Kuning dan Raden Nato. Ketiga-tiganja terkenal kebal dan banyak ilmu gaibnja.

Pada suatu hari jang ditentukan, perebutan kekuasaan itupun dilangsungkan mereka menurut rentjana semula, tapi mendapat perlawanan dari pihak sultan. Didalam peperangan ini, Raden Lawang Tusek dan Raden Nato menemui adjalnja.

Perlawanan ini termasukjur dengan nama peperangan „Kumpeh“, jaitu perlawanan „Radjo 40 Malik Djagat“.

Achirnja kekuasaan berada ditangan Sultan Thaha Sjaifuddin Agung Seri Ingolo. Tapi sultan ini tidak lama memerintah karena keradjaan Djambi diduduki dan ditaklukkan oleh Kompeni Belanda. Karena perlawanannja jang tidak berhasil, Sultan Thaha terpaksa melarikan diri kedaerah pedalaman Djambi.

Sebagai gantinja, oleh Kompeni Belanda diangkat Sultan Achmad Nazaruddin Agung Seri Inggologo untuk mengepalai daerah Djambi jang berbatas antara Muara Tembesi dengan Kuala Djambi. Sebagai Pengeran Ratu Sultan ini, oleh Kompeni Belanda diangkat Raden Mohammad Marto Kusumo Ningrat.

Pasal 81.

PEMBAHAGIAN TANAH.

KETENTUAN-KETENTUAN hukum terhadap tanah Djambi, terbagi kepada :

1. Dinamakan Tanah Keradjaan.
2. Dinamakan Tanah Bahagian.
3. Dinamakan Tanah Serenan.
4. Dinamakan Tanah Kurniaan.

Jang termasuk kedalam hukum „tanah keradjaan” jaitu, tanah-tanah jang tidak dalam hukum tanah bahagian tanah serenan dan tanah kurniaan.

„Tanah Bahagian” ialah tanah jang telah diserahkan oleh Radja atau Sultan kepada saudaranja jang perempuan. Tanah ini boleh didjual kembali kepada Radja.

„Tanah Serenan” ialah tanah, jang telah diberikan oleh Radja kepada tiap-tiap Kepala kampung untuk keperluan penghidupan rakjat jang dibawah perintah tiap-tiap kepala kampung itu. Pemberian ini, mempunjai satu surat piagam jang dipegang oleh Kepala-kepala kampung itu. Djika Kepala Kampung itu meninggal dunia maka „piagam” tadi diserahkan kepada Dewan Patih Luar. Tanah Serenan ini, kuasa rakjat banjak. Kepala-kepala kampung jang memegang „piagam”, tidak boleh melarang atau mentjegah rakjat banjak mempergunakan tanah itu, karena memang diuntukkan untuk keperluan penghidupan rakjat. „Tanah Kurniaan” ialah tanah jang dikurniakan Radja kepada siapa jang telah menundukkan djasanja atau memperbuat kebaikan terhadap Radja atau Keradjaan. Tanah kurniaan ini, tidak boleh didjual.

Turun temurun sampai kepada anak tjutju dari orang jang mendapatnja.

Nama-nama tempat jang tanahnja masuk hukum „tanah bahagian” jaitu:

1. Tanah Pelepat. 2. Tanah Penakaos. 3. Tanah Sidjendjang. 4. Tanah Sungai Kaos. 5. Tanah Tebo. 6. Tanah Bungo. 7. Tanah Sungai Tabir. 8. Tanah Batin Delapan.

Tempat-tempat jang tanahnja masuk hukum „tanah kurniaan”.

1. Tanah Teriti Pandjang 2. Tanah Berembang. 3. Tanah Kerintji. 4. Tanah Pangkalan Djambu. 5. Tanah Batin Sembilan. 6.

Tanah Danglo Lantau Gedang. 7. Tanah Djeruk. 8. Tanah Tandjung Gundik. 9. Tanah Sungai Bendahara, dikurniakan oleh Sultan kepada Temenggung Astro Wingono Umar pada tahun 1871 Masehi. 10. Tanah Kebun Timun sampai ke Tambak, dikurniakan kepada bangsa Arab, sewaktu peperangan Temas Intan Djemantan. Selain dari pada jang tersebut itu, adalah matjam jang lain pula atas pembahagian dan hak tanah jaitu: 1. Tanah Radja 2. Tanah Batin. 3. Tanah milik.

Jang dimaksudkan dengan tanah Radja ialah hutan belukar dan gunung-gunung jang mendjadi milik Keradjaan atau Negara. Tanah Milik ialah tanah jang telah mendjadi milik perseorangan. Tanah Batin ialah tanah jang mendjadi tjadangan pertanian rakjat, tidak mendjadi milik perseorangan.

Boleh diusahakan oleh rakjat, siapapun djuga dengan tidak memandang asal usulnja asal sadja dia bertempat tinggal didusun itu, karena bersesuaian dengan pepatah adat, jang dinamakan djuga „Seloko”: Dimana bumi dipidjak, disana langit didjudjung, disana adat diisi lembaga dituang. Tanah Batin ini sebetulnja telah terbagi-bagi menurut persukuan persukuan dan djika seorang lain hendak mengusahakannja, haruslah lebih dahulu berhubungan dengan persukuan itu. Dan djika hendak memilikinja untuk mendjadi milik perseorangan, haruslah tanah itu ditanami atau diusahakan dengan tanaman-tanaman keras dan usaha-usaha berat seperti membikin sawah, perkebunan tanaman-tanaman jang berumur. Tetapi djika ditanami dengan tanaman muda sadja, djikalau tinggal tidak diusahakan selama 3 tahun, maka tanah itu kembali mendjadi milik Batin.

Beberapa hak-hak jang tersebut didalam pepatah Adat Djambi.

1. Alam mempunyai Radja.
2. Rantau mempunyai Djenang.
3. Negeri mempunyai Batin.
4. Kampung mempunyai Penghulu.
5. Rumah mempunyai Tenggana.

Alam maksudnja satu daerah jang luas lagi lebar jang haknja mempunyai satu Kepala Pemerintahan ialah Radja.

Rantau daerah jang lebih ketjil atau bahagian-bahagian dari daerah jang haknja mempunyai Djenang jaitu Kepala dari Rantau itu, sebagai wakil dari Radja. Kewadjiban Djenang ini, oleh rakjat pergi tempat bertanja pulang tempat berberita, jang terkata didalam pepatah Adat: Takak djalan ke Djanang, titian djalan ke Radja. Djuga Djenang itu bertugas mengawasi Batin-batin dan Penghulu-penghulu.

Batin lebih ketjil dari rantau. Kepala Batin bergelar Rio atau Depati, umpamanja: Rio Suko Negeri Depati Sekerat Kain. Nama Batin ini, diseluruh Djambi telah ditukar mendjadi Marga dari semendjak tahun 1926.

Tengganai ialah Kepala dari satu rumah tangga. Begitu djuga kata-kata Adat Alam sekata Radja, negeri sekata Batin, kampung sekata penghulu, rumah sekata Tengganai. Maksud Alam sekata Radja ialah tindakan-tindakan jang akan dilakukan dan didjalan-kan oleh Radja, telah seia sekata dengan Dewan Patih Luar. Tidak-lah Radja itu berbuat sekehendaknja sadsja. Radja adil Radja disem-bah, tidak adil Radja disanggah. Negeri sekata Batin artinja tindak-an-tindakan jang akan dilakukan oleh Rio atau Depati, telah seia-sekata dengan rakjat lebih dahulu.

Pasal 82.

WARIS DAN HARTA PUSAKA.

HUKUM waris didaerah Djambi, adalah jang menurut Adat dan ada pula jang diatur setjara agama (Islam).

Menurut adat jang dinamakan harta pusaka ialah harta kepunjaan famili rumpung jang dari pihak ibu. Harta pusaka ini tidak boleh diberikan atau diturunkan kepada anak sebab sudah berlainan perut. Begitu pula gelar tidak boleh diturunkan kepada anak.

Hanja, kedua-duanja pusaka dan gelar diturunkan kepada kemenakan.

Hukum waris jang diatur setjara agama, jaitu mengenai harta pentjaharian sendiri atau pentjaharian laki isteri. Harta jang seperti ini, boleh diberikan atau diturunkan kepada anak. Bahagian anak jang lelaki hanja „harta ringan“, seperti uang, pakaian dan lain-lain jang termasuk kepada harta ringan.

Anak perempuan, mendapat „harta berat“ seperti kebun, sawah, rumah dan lain-lain jang termasuk kepada harta berat. Tetapi ada djuga anak lelaki mendapat „harta berat“, dengan sjarat jang bahwa dia belum kawin. Apabila anak lelaki itu kawin maka harta berat tersebut tetap tinggal pada pihak ibunya. Sungguhpun anak perempuan mendapat hak jang lebih kuat dari anak laki-laki, tetapi dia tidak boleh berbuat sesuka hati sadja atas harta berat itu. Pengawasan dan pengamatan tetap dipegang oleh anak lelaki. Maka tidak dapatlah anak perempuan hendak mendjual atau hendak menggadaikan harta itu, dengan tidak setahu dan persetudjuan dari pihak anak jang lelaki. Dengan demikian pada umumnja adalah sangat sukar sekali untuk memperlakukan djual beli atas harta berat itu, baik oleh pihak anak jang lelaki maupun oleh pihak anak jang perempuan, ketjuali djika kedua belah pihak telah menjetudjuinja. Disebabkan oleh karena aturan-aturan jang seperti itu, maka djarang sekali harta-harta berat warisan itu keluar kepada orang dan bangsa lain dan dengan begini maka djarang pulalah kedapatan seseorang jang tidak mempunjai harta bekal hidup, sebab setidaknya seseorang banjak sedikitnja masih mempunjai harta djuga dirumah familinja jang dari pihak ibu.

Harta bapak turun kepada anak.

Gelar turun kepada kemenakan.

Harta berat tinggal pada anak jang perempuan.

Harta ringan tinggal pada anak-laki-laki.

Kalau tumbuh hutang sama dibajar.

Tumbuh piutang sama diterima.

Rama-rama terbang kesasak.

Tiba disasak memakan padi.

Dari nenek turun kebabak.

Dari bapak turun kekami.

Didalam pepatah Adat tersebut :

Pasal 83.

PERKAWINAN.

ADAT dan kebiasaan dalam perkawinan di-daerah Djambi dari beberapa segi ada bersamaan dengan di Minangkabau. Hanya terdapat beberapa perbedaan tentang perkawinan-perkawinan yang terlarang menurut Adat. Di Minangkabau larangan perkawinan itu berlaku bagi mereka yang sepersukuan. Menentukan suku itu, dihitung dari garis ibu. Tetapi di Djambi, larangan perkawinan itu berlaku bagi mereka yang seperut, Tjara-tjara peminangan lebih dahulu dilakukan dengan djalan tanja bertanja. Baik dari pihak laki-laki yang dahulu atau pun dari pihak yang perempuan. Kemudian kira-kira telah terdapat kata yang sepakat, maka diadakanlah, yang dinamakan „bertimbang tanda“. Bertimbang tanda ini, pihak yang perempuan mendatangi pihak yang laki-laki, dengan membawa tjerana yang diiringi-tjintjin nan sebetuk, keris nan sebilah. Apabila rundingan telah setjotjok dan tjerana diterima oleh pihak yang lelaki, maka ditentukanlah hari pertemuan yang pertama. Biasanya hari pertemuan yang pertama itu, diadakan sesudah 1 bulan dari pertimbangan tanda atau paling lama 3 bulan. Waktu hari dan malamnya dipilih seketika bulan naik jaitu diantara tanggal 1 dan 14 hari bulan. Tjerana tadi diberikan kembali oleh pihak yang laki-laki kepada pihak yang datang dengan berisi kuwe-kuwe.

Dilain hari jaitu pada waktu yang baik pula, maka dari sebelah yang lelaki mengadakan perkundjungan pula kepada pihak yang perempuan dengan membawa seekor kerbau yang diarak beramai-ramai, gembira dan meriah beserta dengan bunji-bunjian, lagu dan njanji.

Perkundjungan dari pihak laki-laki ini, dinamakan „mengantar serah“.

Ditengah halaman diadakanlah upatjara timbang terima diantara mamak yang laki-laki dengan mamak yang perempuan.

Disini ditentukanlah hari perkawinan jaitu hari pertemuan yang ketiga atau pertemuan yang penghabisan. Dengan demikian, maka antara yang laki-laki dan yang perempuan sudah didalam bertunangan. Kedua belah pihak tidak boleh mungkir djandji. Djikalau berubah didalam djandji, djika yang mungkir pihak laki-laki, maka berlaku hukum Adat:

Mas terserak di padang lalang,
tebu setuntung dimakan gadjah,
tanda jang diserahkan djadi terpidjak.

Artinja: tanda jang diberikan oleh pihak jang laki-laki hilang.
Djikalau mungkir dari sebelah jang perempuan, maka „satu balik dua”.

Artinja tanda jang diberikan oleh pihak perempuan dikembalikan oleh laki-laki dua kali ganda.

Seloko kata-kata Adatnja:
Puteri tetap dimahligainja.
Radja tetap di-pondoponja.
Tiap berdjandji tidak mungkir.
Tiap berkata tidak dusta.

Setelah sampai ketikanja hari pertemuan jang pertama maka rumah dari kedua belah pihak dihiasi dengan serba keindahan. Malamnja bersuka ria, baik dirumah jang laki-laki maupun dirumah jang perempuan dengan serba matjam kegembiraan. Hari dan malam jang pertama ini dinamakan „madjang”. Kemudian datang pulalah waktunja untuk hari pertemuan jang kedua. Pada malam ini, mempelai datang kerumah jang perempuan diiringkan oleh pengiring-pengiringnja. Disini didudukkan bersama-sama dengan penganten perempuan. Keduanya berpakaian penganten. Pakaian jang perempuan:

Memakai kain sarong „sungket”, badju dari beledru hitam atau merah, memakai ikat pinggang „patah sembilan” atau ikat pinggang „pending”, dikepala „patah sangko dan ditangan „gelang puntu”. Perhiasan-perhiasan jang tersebut ini terbikin dari emas. Pakaian jang lelaki, biasanja memakai setjara hadji jaitu memakai „gamis” dan „sadriah”, „djubah” dari sebelah luar, „iqal” dan „shal” dikepala. Duduk bersanding seketika, ditonton oleh para hadirin dan kemudian kembali pulang. Hari pertemuan jang kedua ini, dinamakan „bertandang”.

Hari pertemuan jang ketiga, bernama „sedekah labuh”. Pada malam ini, perkawinan diresmikan. „Aqad nikah dan idjab qabul”. Tetapi belum boleh tjampur. Pada masa Keradjaan diwaktu „sedekah labuh” ini, badan dari penganten jang laki-laki ditimbang dengan uang. Ada djuga jang dengan benda lain jang dianggap berharga menurut deradjat masing-masing.

Semalam-malamannja diadakanlah bermatjam-matjam permainan dan tari menari. Siang pada keesokan harinja kedua penganten mandi bersiram. Bedak diserak seraikan berkeliling kepada orang banjak dan para undangan. Sorak soraipun talu bertalu. Malam jang kedua dari „sedekah labuh” ini, mempelai dan penganten „duduk bersanding makan berdua” bersuap-suapan, jang dinamakan

makan bersopi. Malam penutup adalah malam bersuluh dan pada paginja kedua penganten laki isteri datang menjembah (memberi hormat) kepada mertua masing-masing. Dengan begini, senanglah hati semua keluarga dan famili dari kedua belah pihak tandanja pekerdjaan adalah selamat. Kelaziman jang berlaku menurut Adat Djambi, sesudah perkawinan itu laki-laki harus tinggal dirumah jang perempuan, sebagaimana djuga di Minangkabau. Tetapi sesudah beberapa bulan kemudian sesudah mendapat perundingan jang setjotjok dengan antara famili jang perempuan, lelaki dibolehkan djuga membawa isterinja. Hanja djika isteri itu adalah satu-satunja anak tunggal dari ibu bapaknja, tidaklah akan dapat idzin boleh dibawa oleh suaminja.

Pasal 84.

PERGAULAN BUDJANG DAN GADIS

DIDALAM pergaulan antara budjang dan gadis dapat disimpulkan kepada 4 tjara :

1. Dinamakan bertandang.
2. Dinamakan berserambahan.
3. Dinamakan bedak berkelam.
4. Dinamakan nompang berangkat.

Dalam negeri pemuda-pemuda mempunyai Ketua dan pemudi-pemudi mempunyai Ketua.

Ketua ini, mendjaga dan mengawasi pergaulan antara budjang dan gadis tadi supaya djangan ada jang meluar dari batas dan melanggar apa-apa jang tidak diidzinkan dalam peri kesopanan pergaulan. Dalam tiap-tiap tjara dari jang empat matjam itu, haruslah selalu dipimpin dan diawasi oleh Ketua dari pihak pemuda dan Ketua dari pihak pemudi. Bertandang ialah si-pemuda pada suatu malam pergi kerumah sigadis. Siangnja orang tua dari sigadis tadi diberi tahu lebih dahulu.

Untuk ini, pemuda dimestikan membawa sebagai sjarat 2-3 kebat sirih jang telah dipepat kepalanja. Sirih itu diperlengkapi setjukupnja, pinang kapur tembakau dan gambir. Dia boleh membawa seorang teman pemuda jang lain pula. Sebelum naik kerumah sigadis, lebih dahulu batuk-batuk ketjil seolah-olah memberi tahu. Sehingga ibu dari sigadis membuka pintu dan menerimanja. Setelah duduk, maka ibu dari gadis bertanja dengan tjara berpantun dan berseloka kepada „budjang” nan datang:

„Kenapa engkau,
Orang sesat didalam hutan,
Engkau sesat didalam kampung”.

Pemuda mendjawab dengan langgam pantun pula, menerangkan maksudnja datang. Setelah itu, barulah gadis keluar datang menemui pemuda dan membalas dengan pantun pula.

Balas berbalasan pantun terus mendjadi dengan kata-kata jang berirama dan membajangkan tjinta asmara. Djika pemuda masih ragu-ragu, sampai dimana isi hati pemudi itu dalam pertjintaan, maka pemuda harus memberi beberapa pantun, jang mana tiap satu persatunja mesti didjawab oleh pemudi.

Mudik Tebo ilir Semangi,
Patah tongkat batang setawar,
Habislah daja tenggang kami,
Buah lebat batang bersawar.

Maksudnja dia hampir berputus asa karena „pemudi” itu, terdengar kabar angin telah dipinang orang.

Gadis mendjawab:

Kami tidak bergantung dua,
Gantang satu didalam padi,
Kami tidak berkata dua,
Kata satu didalam hati.

Maksudnja bahwa perempuan masih berindung dan pura-pura belum dipinang.

Pemuda membalas:

Dusun baru tinggi bertambak,
Tambak anak Radja Temenggung,
Bukan baru kami berkehendak,
Sedjak langit sekembang pajung.

Maksudnja pertjintaannja kepada perempuan itu sudah lama dan mendalam adanja.

Gadis:

Padi pulut menggelintjir
Padi talang hitam batang
Manis mulut hingga dibibir
Hati didalam kebelakang.

Maksudnja bahwa gadis itu belum pertjaja dengan kata-kata pemuda dan takut tertipu.

Pemuda membalas, seolah-olah meradang dan menjatakan keketjewaannja:

Menurun hendak mendaki,
Lurah dalam sangkakala,
Orang ulit boleh dinanti,
Orang enggan apa kan daja.

Dan disambungnja dengan seloka jang penghabisan:

Kalau hudjan hudjankan bae,	Kalau enggan, enggankan bae
Djangan hudjan serta guruh.	Djangan enggan serta embuh
Boleh kami bertudung rumput,	Boleh kami menarik surut
Tudung kain tidak 'kan ada.	Apa sebab maka begitu
Apa sebab maka begitu	Kami hina dari nan banjak.
Pino-pino didalam semak	

Maksudnja bahwa dari pihak pemuda tadi, telah mengambil kesimpulan, jang bahwa perhubungan diantara mereka berdua, tidaklah mendapat persesuaian dan lantas mengambil djalan mundur teratur. Ini semuanya dilakukan dengan setjara damai, tidaklah akan mendjadi silang sengketa, dendam dan mara bahaja dibelakang hari. Dalam beberapa kalimat dari pantun-pantun jang diatas, ada terdapat bahasa daerah, seperti bae artinja: sadja, pino-pino nama burung, embuh artinja: mau.

Djika bertandang itu, merupakan memperhubungkan tali pertjintaan diantara pemuda dan sigadis, diantara kedua belah pihak hati telah sama tersangkut, maka terdjadilah balas berbalasan pantun, sindir menjindir didalam tjinta, seolah-olahnja perang kata-kata dengan irama dan pesona atau bertanding kemahiran dalam berpantun berseloka. Sekiranya pemuda tak dapat mengeluarkan kata-katanja lagi untuk mengatasi dan mendjawab pantun dari pemudi, maka ini berarti kalah. Dan pemuda mesti membajar dengan meninggalkan tjintjin ataupun kain.

Begitu djuga halnja, djika jang kalah itu dari pihak pemudi. Barang-barang itu dilain hari boleh diambil kembali setelah selesai perundingan.

Berserambahan.

Malam, diterang bulan, menumbuk padi dilesung berpasang-pasangan, budjang dengan gadis sampai beberapa pasang. Pekerdjaan ini sebetulnja, menundjukkan pertolongan jang bergotong-rojong dari pihak pemuda untuk menumbukkan padi milik pihak pemudi.

Dalam pekerdjaan menumbuk diterang bulan ini, gadis dan budjang sama-sama memperlihatkan keahliannja berpantun ber'ibarat, berkata-kata jang bersadjak, jang dinamakan djuga „seloka muda“.

Bedak berkelam terdapat di Dusun Tuo. Ialah berbedak-bedakan dan bermain pupur dimalam hari didalam gelap. Nompang berangat terdapat di Sungai Tenang, dan pergi bertandang terdapat di Muara Talang. Selain dari pada jang tersebut itu, ada lagi jang dinamakan „pergi berpinang“ dan „berkandis“ jaitu bersama-sama pergi mentjari pinang dan buah asam kandis.

Peri masjarakat pergaulan antara budjang dan gadis jang telah dibentangkan matjam-matjamnja itu adalah terpakai dari semen-djak tahun 1930 Masehi kebawah.

BUNJI-BUNJIAN DAN TARI-TARIAN.

A LAT bunji-bunjian lama jang masih terpakai didaerah Djambi: 1. Rebab, 2. Gambus (guitar ketjil), 3. Ketjapi, 4. Serunai, 5. Gendang, 6. Tawak (gong), 7. Keromong (telempong), 8. Terompet tangan, 9. Kelintang, 10. Gedap dan 11. Rebana.

Gendang, gedap, kelintang dan tawak dipakai diwaktu mengadakan tari jang bernama „tauh”. Lebih dahulu sebelum main disetel dengan baik. Setelah bunji menurut imbangan suara do-re-mi. Sehingga setelah bagus dan rapi susunannja, terdengarlah suara bunji jang menarik. Makin terdengar dari djauh, makin menarik. Djauh-djauh, orang sudah tahu, itulah bunji gendang tauh.

Djenis tari dan lagu.

1. Tauh nan berlikak.
2. Tari nan berlambai.
3. Tari Mandiangin.

dengan beberapa matjam lagu:

1. Dinamakan ber „pantun”.
2. Dinamakan ber „karinok”.
3. Dinamakan ber „senandung”.
4. lagu dinamakan „asam paja”.
5. lagu „tjerai kasih”.
6. lagu „sendjang”.
7. lagu „aladdun ayum-ayum”.

Tauh atau tauh nan berlikak diadakan diwaktu perhelatan kawin. Apabila gendang tauh sudah berbunji, diiringi oleh tawak dan kelintang maka berdirilah beberapa pemuda jang disusul oleh beberapa pemudi, hendak menarikan tarian tauh. Sebanjak bilangan pemuda sebegitu pula banjak pemudi, jang sekurang-kurang susunannja ialah 3 dengan 3. Taripun dimulai, dengan likak dan likuknja, lijuk dan lenggangnja. Djika laki-laki menghadap kekiri, jang perempuan menghadap kekanan atau laki-laki menghadap kekanan jang perempuan menghadap kekiri, sehingga terdjadilah selang seli. Setelah menari seketika, jang laki-laki mengambil sapu

tangan lalu dilambai ditarikan, jang perempuan bermain dengan selendang, lalu dilenong dibentangkan. Laki-laki memberi pantun, menjinggung hati perempuan.

Buah pantun:

dari laki-laki:

Memikat diatas beringin,
kenal anak burung taun.
Tjelik lekat hati kepingin,
sajang kami belum ketahuan.

djawaban dari perempuan:

Apa guna kain pelekat,
Surabaja banjak kini.
Apa guna kami nan bangsat.
Orang kaja banjak kini.

Muara Bungo ada beringin,
beringin ditanam di Tanah Tumbuh.
Pada bunga hati kepingin,
bunga didalam lipat sanggul.

Kedidi tergendak gendak,
orang Kerintji menuba bidai.
Kalau hati sama berkehendak,
Langit terkuntji boleh diungkai.

Rotan segulung penjimpan badjak,
lapuk disimpan baru diganti.
Ikan terkurung didalam tedjak,
tuba seratus tiada mati.

Menarai hudjan di Mampa,
tiba dipadi menarai djangan.
Bertjerai kita dimuka,
tiba dihati bertjerai djangan.

Ini berarti jang bahwa pemuda sudah minta diri hendak pulang dengan meninggalkan kata-kata harapan.

Maka laki-laki membayangkan kesedihan hatinja karena akan berpisah lagi dan kata-kata sudah banjak jang terdorong, lalu berpantun ber'ibarat:

„Aliputi menuba limbat,
tuba terhantjur air dalam
Sedih hati siburung pikat
edjek terlandjur sudah karam.

2 Kemudian djika sekiranja tarian tauh ini membawa larut kepada
2 pemuda, sehingga dia tergoda dan djatuh kedalam gelombang per-
tjintaan, sedangkan dari pihak pemudi menjambut pula akan
pertjintaan itu dengan kedua belah tangannja, maka kedua mereka
itupun diperhubungkanlah dengan perkawinan. Dan sekiranja dari
kedua belah pihak tidak memberi kesan apa-apa hanjalah sekadar
bertjumbu-tjumbuan, maka habislah didalam permainan sadja.

Pakaian waktu bertauh.

Sarung „tulisan Djambi”
Selendang „tulisan Djambi”
Badju „belederu hitam dan merah”
Anting-anting „gambang besar”
Sanggul „lipat pandan”
Kalung „ringgit perak”.

Tari nan berlembai, diadakan diwaktu perhelatan „tindik dabung”
jaitu perhelatan ramai besar-besaran.

Pakaian pemudi diatur:

Badju belederu,
Kain sungket
Peniti geronseng
Selendang pelangi
Kepala pakai bunga
Bunga tandjung atau kenanga
Dikaki gelang suasa
Ditangan gelang banjak.

Tari Mandiangin.

Mandiangin satu kampung jang terletak disebelah hilir Saro-
langun. Disana kita dapat menemui satu matjam kesenian tari,
hampir serupa dengan geraknja tarian „gending Sriwidjaja”. Di-
mainkan oleh gadis-gadis dan pemudi jang molek tjantik djelita.
Gerak pinggang jang lemah gemulai, djari tangan jang halus me-
lentik, langkah kaki ajun berdombai. Djika sigadis telah bersuami
menari tidak dizinkan lagi, karena terlarang menurut adat.

Karinok ialah berupa lagu dan njanji jang suaranya ditarik
dengan keras bersahut-sahutan, tidak terbatas pada budjang dan
gadis sadja, bahkan djuga turut orang-orang jang telah dewasa.
Karinok ini biasanja dilakukan diwaktu menugal padi ladang ber-
sama-sama. Bersenandung ialah bernjanji jang didalam kata-
katanja ada terkandung kalimat-kalimat „senandung-sajang”. Lagu
asam paja jaitu lagu jang dimulai dengan kata-kata:

Asam paja masak dihutan
masak satu dimakan tjigak.

lagu ini sangat terkenal dikalangan anak muda dan biasanja ditarikan dengan sapu tangan.

Lagu sendjang ialah suatu lagu jang digunakan untuk meminta idzin kepada tuan rumah supaja dapat turut bermain seperti:

Serai serumpun dibalik rumah
kapal mudik ke Mandiingin
Terbit ampun orang dirumah
Kami menompang tegak bermain.

Lagu aladdin ayun-ayun satu lagu jang menurut gaja dan langgamnja terambil dari kata-kata Arab. Hebatnja lagu ini dia dimainkan dengan terompet tangan.

Njanjian „chatar hati”, timbul didalam perdjuangan.

Diam dibawah gunung Semeru,
Meniti bukit barisan,
Kiri kanan banjaklah djurang.
Melajang kegunung Mesurai.
Hati hiba bertjampur rindu,
Mengingatkan nasib perdjuangan,
Entahlah bila badan 'kan mati,
Disitulah kita akan bertjerai.

Selilit pakai orang budjang,
Subang gambang pakai 'rang Kerintji,
Hendak melilit 'alam Palembang,
Hendak menimbang 'alam Kerintji.

Nama-nama „ukiran” Djambi.

1. Ukiran „bunga tampuk manggis”.
2. Ukiran „akar tjina”.
3. Ukiran „mentadu berkerat”.
4. Ukiran „Tawang”.
5. Ukiran „Kupang”.
6. Ukiran „daun”.

Nama-nama sendjata.

1. Meriam kela.
2. Senapang langsar.
3. Pedang.
4. Tombak.
5. Keris.
6. Badik.
7. Kempilan.

Pasal 86.

SUKU „ANAK DALAM” DIDAEARH PROPINSI
SUMATERA TENGAH.

DISAMPING suku Mentawai jang mendiami kepulauan Mentawai jang dalam pandangan mata masjarakat dunia baru masih dipandang sangat primitip, didaerah Propinsi Sumatera Tengah berdiam pula suatu puak bangsa jang mungkin lebih primitip lagi dari suku Mentawai, jaitu puak suku **Anak Dalam**. Berlainan dengan suku Mentawai jang hidupnja dilingkungi oleh lautan besar, suku **Anak Dalam** hidup ditengah-tengah hutan belantara.

Daerah jang didiami mereka adalah daerah keresidenan Djmbi lama, atau daerah-daerah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin sekarang.

Meskipun mereka hidup ditengah-tengah dataran pulau Sumatera jang sangat makmur, tapi sangat sedikit jang diketahui berkenaan dengan peri penghidupan mereka sehari-hari. Hal ini disebabkan karena sebahagian diantara mereka sangat mementjilkan diri dari pergaulan biasa dan kadang-kadang tidak hendak mengadakan perhubungan dengan masjarakat jang sudah lebih tjerdas dari masjarakat mereka.

Kesukaran-kesukaran jang dihadapi dalam mentjari perhubungan dengan puak bangsa ini dapat diketahui dan dirasakan sendiri bila diketahui bagaimana tjara penghidupan mereka.

Mereka hidup berkelompok-kelompok (berhorde) dan mengembara ditengah-tengah hutan belantara (bosnomaden) untuk mentjari penghidupan. Mereka tidak mengenal rumah tangga, tidak binatang ternak dan tidak pula tumbuh-tumbuhan jang dipelihara (pertanian). Jang mereka kenal hanja binatang-binatang buruan, buah-buah kaju dirimba dan ikan disungai karena dari situ mereka hidup. Memakai pakaian mereka tidak suka, karena apa jang melekat pada tubuh mereka menggelikan tubuh dan menghambat langkah mereka.

Keperluan-keperluan sehari-hari jang mereka butuhkan dari dunia diluar lingkungan mereka, mereka peroleh dengan perantaraan badan-badan perantara (golongan suku **Anak Dalam** jang sudah djinak), jaitu dengan djalan menukarkan sesuatu dengan hadjat keperluan mereka itu.

Besar kemungkinan, sebahagian terbesar diantara mereka tidak tahu apa dan siapakah pemerintahan pendjadjahan Belanda, siapa

dan apa pemerintah facis Djepang, bahwa apa dan siapa pemerintah rakjat yang dikepalai, oleh Bung Karno sekarang. Jang mereka ketahui hanja, mereka hidup, berburu, kemudian kawin, anak mereka lahir, bapak atau keluarga meninggal, dan karena ini hutan tempat mereka tinggal itu mereka tinggalkan karena dewa-dewa marah kepada mereka.

Siapakah puak suku **Anak Dalam** ini sebenarnja?

Bentuk dan pengawakan lahirnja tidak berbeda dengan semua bentuk dan pengawakan bangsa Indonesia lainnja. Rangka-rangka mereka tidak dijadikan pokok penjelidikan oleh ahli-ahli pengetahuan untuk mengenal ras dan keturunan umat manusia, dan orang atau bangsa lainnja tidak lebih mengherani mereka dari pada keheranan jang harus ditumpahkan kepada suku-suku bangsa dipulau Irian, dipulau Sailan (bangsa Veda), kepada suku-suku bangsa dipusat benua Afrika atau kepulauan Nicronesia.

Jang diketahui perihal mereka ialah:

Pada umumnja taraf dan kedudukan mereka dapat dibagi menjadi dua tingkatan, jaitu **Anak Dalam** Djinak dan **Anak Dalam** Liar.

Mengenai **Anak Dalam** Djinak ini pada tingkat pertama sudah tidak dilalui satu faset permasjarakat bagi mereka, meskipun baru merupakan langkah baru. Semendjak sekian lama, dengan kemauan sendiri, mereka sudah memulai hidup baru menudju kehidupan jang lebih sempurna. Mereka tidak lagi hidup dengan tjara mengembara dihutan-hutan dan menggantungkan kemakmuran mereka dari hasil perburuan-perburuan.

Mereka sudah menetap didalam suatu perkampungan jang dibangun sendiri serta sudah berkenalan dengan pertanian dan peternakan.

Dalam waktu belakangan ini, anak-anak mereka sudah ada jang memberanikan diri untuk memasuki ruangan pendidikan rendah.

Sebagai biasa didapati dalam kalangan masjarakat jang baru „didjinaki“, dalam masjarakat suku **Anak Dalam** Djinak ini masih terdapat beberapa sifat jang meminta pengesahan jang seksama, terutama didalam lapangan kesehatan dan kebersihan, baik jang mengenai dengan pakaian, maupun mengenai makanan mereka.

Mereka masih merupakan golongan jang berdiri sendiri jang didalam semua hal seakan merupakan djelmaan antara jang kuno dengan jang modern. Kedudukan mereka seperti itu buat sementara nampaknja menguntungkan beberapa pihak, jaitu pihak mereka sendiri, pihak Pemerintah dan golongan-golongan masjarakat jang sudah lebih tjerdas dari pada mereka, serta pihak suku **Anak Dalam** Liar jang masih tinggal dihutan-hutan. Kadang-kadang mereka merupakan pihak ketiga jang harus didengar pendapatnja

mengenai sesuatu tindakan yang harus didjalankan oleh pemerintah terhadap kepada horde bangsanja yang masih liar, begitupun sebaliknya. Djadi mereka adalah „badan kontak” antara suku **Anak Dalam** Liar dengan masjarakat diluar rimba-raja.

Didaerah Kabupaten Batang Hari kelompok-kelompok perkampungan dan masjarakat suku **Anak Dalam** Djinak ini didapati ditempat-tempat dibawah ini, jaitu di:

1. Tandjung Katung,
2. Serasan (Pidjon) didaerah Muara Tembesi,
3. Pinang Tinggi,
4. Perumahan Djangga (Muara Bulian),
5. Perumahan Djeruk (Singoan),
6. Sungai Kilangan (Muara Bulian),
7. Sungai Djebak (Muara Tembesi),
8. Pemurisan (Sarolangun),
9. Sekamis (Muara Tembesi) dan
10. Lubuk Kepajang (Air Hitam).

Suku **Anak Dalam** Liar yang sangat sedikit dikenal dari dekat itu, sebagai diterangkan diatas, masih merupakan masjarakat yang terpencil dari masjarakat-masjarakan lainnja. Mereka hidup ditengah-tengah hutan dan dipinggir-pinggir sungai yang sangat djarang didatangi oleh manusia diluar lingkungan hordenja. Dari itu tidaklah dapat ditundjukkan dengan tepat daerah-daerah dimana mereka biasa mengambil tempat tinggal karena hidup mereka mengembara.

Dari keterangan-keterangan yang diperoleh, puak-puak suku **Anak Dalam** Liar ini terdapat didaerah-daerah yang tersebut dibawah ini:

1. Disepandjang perairan Sungai Olek,
2. „ „ Air Tantan,
3. „ „ Sungai Ngai
4. „ „ Sungai Arai.

Keempat tempat tersebut merupakan Wilayah daerah Kabupaten Batang Hari.

Diwilayah-wilayah daerah Kabupaten Merangin didapati dan dikenal pula daerah tempat pengembaraan mereka, jaitu di:

1. Daerah perairan Sungai Senamat (Muara Bungo),
2. Daerah perairan Tabir (Muara Tebo), terdiri dari puak-puak yang disebut dengan Batu Sawar, Tanah Garo, Kedjasung dan Lumahan Manis.

Mengenai peri kehidupan mereka banjak hikajat-hikajat gandrung yang dapat ditangkap telinga, jaitu terutama yang disampaikan oleh rakyat yang dengan tjara kebetulan atau terpaksa harus berhubungan dengan mereka. Misalnja dikatakan, bahwa Subu **Anak Dalam** Liar ini sangat besar pengaruh „magi”nja, sangat tahan menahan kekuatan alam sekeliling, serba gesit dan tjekatan didalam segenap gerak dan langkahnja, meskipun tubuh mereka sangat tidak terpelihara menurut ukuran masyarakat biasa. Banjak pula yang „gemas-gemas” yang dibitjarkan mengenai dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Dikatakan, bahwa mereka terlampau „pengemis” terutama bila melihat benda-benda yang sangat baru pada penglihatannja, meskipun kadang-kadang benda itu tidak mungkin dapat diberikan orang dengan pertjuma. Sifat ini sesuai pula dengan sifat mereka yang „terpujji” jaitu suka memberi. Djadi disamping „hebzucht” mereka djuga „gulzucht”. „Bila sekali saudara berdjasa kepada mereka, saudara akan selalu menerima perimbangan djasa itu dari mereka”. „Kalau ada apa-apa yang harus saudara berikan, saudara tidak akan dapat memberikan kepada seorang diantara mereka, tapi seluruh anggauta horde itu harus mendapat bahagiannja. Kalau tidak, saudara tidak akan aman”.

ADAT-ISTIADAT SUKU ANAK DALAM

MENURUT penjelidikan jang dilakukan atas suku-suku **Anak Dalam** jang sudah „djinak” atau jang „setengah liar”, adat-istiadat jang berlaku dikalangan mereka sampai sekarang, adalah adat-istiadat jang diturunkan dari Pagarrujung (Minangkabau), begitupun dengan kebiasaan-kebiasaan lain. Hal ini dapat dikenal dari kebiasaan-kebiasaan mereka, diantaranya :

1. Menumbuk padi dilesung batu,
2. Kain sekabung, 4 hasta,
3. Emas setahil, 16 mas,
4. Jang dibeli dibajar, jang diminta dapat pertjuma,
5. Hak orang djangan diambil, hak kita djangan disia-siakan.

Dalam pergaulan hidup sesama mereka, mereka masih berpegang teguh dengan tjara-tjara:

Anak menurut kata bapak, kemenakan menurut kata mamak (paman) besar berganti, pusaka bergiliran.

Bila diantara mereka timbul perselisihan, maka perselisihan itu harus diselesaikan dalam lingkungan ninik-mamak mereka.

Adat-istiadat dalam perkawinan tidak berbeda dengan jang terdjadi didalam masjarakat suku-suku bangsa sekeliling mereka meskipun tjara melaksanakan perkawinan itu tidak serupa.

Upatjara perkawinan dikalangan suku **Anak Dalam** di Djambi itu dilakukan dengan djalan:

Jang meminang ialah pihak perempuan. Bila pinangan ini diterima oleh ninik-mamak pihak laki-laki dan disjahkan pula oleh ninik-mamak pihak jang perempuan itu, maka perkawinan ini sudah dapat dilangsungkan.

Upatjara perkawinan ini biasanja dilakukan diwaktu musim pohon buah-buahan didalam rimba sedang mendjadi dan binatang perburuan mudah ditangkap. Upatjara dipersaksikan oleh seluruh horde, laki-laki perempuan tua dan muda, dihadapan Batin (Kepala horde) mereka.

Untuk keperluan perkawinan itu disediakan sekerat kaju Batang Antui (sebangsa pohon jang sangat litjin bila dikuliti), sepan-

djang kira-kira tiga depa. Sesudah pohon itu dikuliti, maka diletakan ditengah-tengah kumpulan orang banjak jang mempersaksikan upatjara itu.

Penganten laki-laki disuruh berdiri diudjung kaju itu dan penganten perempuan diudjung jang lain. Kemudian penganten laki-laki disuruh mentjoba meniti (berdjalan diatas) kaju itu, hingga dapat mentjapai penganten perempuan. Bila dalam pertjobaan meniti ini gagal, maka perkawinannja tidak disahkan. Tapi bila dia dapat mentjapai tangan pengantin perempuan dalam atau waktu meniti kaju itu, maka ninik-mamaknjapun berseru „Sah Batin”. Bila seruan ninik-mamak ini disahuti oleh orang banjak dengan „sah”, maka perkawinan itu dipandang sudah sah. Mulai dari saat itu kedua penganten itu sudah boleh bergaul sebagai suami isteri, dan masjarakat hordenja sudah memandang mereka sebagai suami dan isteri pula.

Itulah jang dapat ditjeritakan mengenai suku **Anak Dalam** di daerah Propinsi Sumatera Tengah. Kewadajiban jang berat bagi badan-badan Sosial setempat sekarang adalah untuk men-sivilisasikan masjarakat jang masih sangat „primitip” itu. Usaha ini pasti akan berhasil bila dia dikerdjakan dengan sepenuh-penuh hati dan pertanggungan djawab jang sempurna.



BAB V
BAHAGIAN XI
DI KEPULAUAN RIAU.

Pasal 88.

SUMBER SEDJARAH.

UNTUK mentjatat perkembangan-perkembangan masjarakat dan kebudajaan suatu golongan masjarakat, kita harus banjak mempunjai sumber-sumber penjelidikan, baik sumber jang berupa bukti-bukti jang masih tertinggal, maupun bukti-bukti jang tertulis.

Tapi bukti-bukti demikian sangat sedikit kita perdatap untuk membentangkan sedjarah perkembangan-perkembangan masjarakat dikepulauan Riau, sebagai djuga amat sedikit kita mendapat sumber sedjarah untuk memaparkan perkembangan-perkembangan masjarakat dibanjak daerah dikepulauan Indonesia lainnja.

Apa jang akan kita bentangkan dibawah ini, hanja bersumber dari tjatatan-tjatatan jang dapat dikumpulkan dari beberapa orang Pamongpradja didaerah itu, jaitu tjatatan jang mereka kumpulkan dari uraian-uraian jang diberikan oleh beberapa orang jang dipandang mengetahuinja dalam wilajah mereka masing-masing. Tjatatan-tjatatan para Pamongpradja ini kemudian dikumpulkan mendjadi satu oleh Saudara Acting Bupati Mohd. Apan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Djadi teranglah, bahwa apa jang akan diuraikan ini lebih banjak berbentuk suatu „sage” dari pada bertjorak sedjarah, — terutama dalam membentangkan keadaan kepulauan Riau pada zaman sebelum daerah itu diperintah oleh seorang radja —, karena orang tidak dapat menundjukan bukti-bukti, dan tidak pula ada tjatatan angka-angkanja.

Dan tjatatan-tjatatan selengkapnja tidak pula mungkin dibentangkan, karena dalam kalangan rakjat sendiri ada sebuah pepatah jang menerangkan, bahwa: „Adat dipegang oleh radja, dan radjalah jang beradat.

„Ada radja, adat berdiri; hilang radja, adatpun mati”. Karena itu, jang kenal akan seluk beluk adat dan tjabang-tjabangnja hanjalah radja-radja atau keturunan-keturunan mereka, atau orang-orang besar dan keturunan-keturunan orang besar itu.

Masa sedjarah.

Untuk dapat diketahui dan dipahami lebih mudah, sedjarah perkembangan masjarakat dan kebudajaan Riau ini baiklah kita bagi mendjadi 3 bahagian jang masing-masing ber-

tingkat dan berkebesaran sendiri-sendiri, jaitu sesudah lebih dahulu disesuaikan „kebenarannya” dari tambo-tambo dan sedjarah-sedjarah negeri-negeri lain yang pernah berhubungan dengan keradjaan Riau pada zaman kebesarannya.

Adapun tingkatan itu adalah:

1. Riau dizaman sebelum diperintah oleh radja.
2. Riau selama dibawah pemerintahan radja, dan
3. Riau dalam zaman pendjadjahan Belanda.

Sebelum diperintahi Radja.

Lama sebelum seorang radja yang berasal dari keradjaan Sriwidjaja, keturunan dari Bukit Seguntang berkuasa didaerah yang terdiri dari beribu buah pulau ini, orang menduga, bahwa daerah itu sudah mempunyai penduduk dan peradaban tersendiri. Hal ini terbukti dengan datangnya sebuah delegasi dari kepulauan itu kekeradjaan Sriwidjaja untuk bermohon agar mereka dianugerahi seorang radja yang akan memerintahi mereka dan daerah mereka. Permintaan para utusan ini dikabulkan oleh radja Sriwidjaja.

Dan karena kepulauan ini amat dekat perhubungannya dengan keradjaan-keradjaan Melaju, maka adat istiadat yang berlaku di Malaja itu merupakan sebahagian dari adat istiadat mereka. Hal ini kian bertambah njata, demi radja mereka menaklukkan sebahagian daerah Melaju. Ditaklukkannya Malaka oleh radja dari Riau ini menjebabkan radja ini beralih negeri, dan hingga sekarang berturun-temurun disana. Dan karena itu pula, maka kota-kota yang pernah dijadikan ibu keradjaan, jaitu Ulu Sungai Riau, Penjengat dan Daik mendjadi sepi, dan hanya merupakan kota-kota yang ditinggalkan.

Pasal 89.

SUKU BANGSA DAN ASAL USULNJA.

RAKJAT kepulauan Riau pada asasnya terdiri dari 3 puak suku jang pada dahulu kalanja satu sama lain berpisah djauh sekali, Ketiga puak suku ini terdiri dari :

1. **Orang Bintang dan orang Penaung**, jaitu rakjat jang berkampung dan bertempat tinggal di Ulu Sungai Riau, Bukit Batu, Pekake, Nujung, Kopak dan Nau serta tempat-tempat sekeliling gunung Bintan. Puak suku ini mengambil tempat kediaman tetap didaratan, berumah-tangga.

2. **Orang Enam Suku**, jang menurut dongengan berasal dari setjeper garam jang karena kesaktian seorang radja ditjiptakan Tuhan mendjadi manusia, jang achirnja berkembang biak mendjadi rakjat radja jang sangat sakti itu.

Puak suku ini tidak mempunjai tempat tinggal didaratan. Mereka berumah-tangga diatas perahu-perahu mereka dan berpindah dari Tandjung ke Tandjung, dari Hulu Sungai ke Hulu Sungai dan dari Teluk ke Teluk. Dimana perahu-perahu mereka berkumpul-kumpul, dimana mereka berkampung, jaitu menurut turun naiknya hasil laut dan pentjarian-pentjarian jang mereka peroleh diperkampungan mereka itu.

3. **Orang Pesukuan Asing**, jaitu orang-orang jang berasal dari daratan pulau Sumatera jang karena sesuatu hal pindah tempat kekepulauan itu. Mereka ini sebahagian besar terdiri dari orang-orang Minangkabau, terutama dari pradjurit-pradjurit keradjaan Minangkabau jang berpetjah belah karena menghadapi peperangan dengan keradjaan Atjeh dahulu kala.

Mengenai puak suku ini diterangkan djuga, bahwa sebahagian diantara pradjurit-pradjurit Minangkabau jang bertjerai berai itu achirnja memisahkan diri dari masjarakat dan achirnja mendjelma mendjadi suku Talang Mamak didaratan pulau Sumatra, terutama didaerah Siak Sri Indrapura.

Puak suku Asing ini didaerah kepulauan Riau bertempat tinggal didaerah Ungar, dimana mereka hidup dengan djalan bertani dan menangkap ikan.

Pasal 90.

TJARA-TJARA PEMERINTAHAN.

KARENA didiami oleh tiga puak suku yang satu sama lain berbeda kedudukan dan tjara hidupnja, maka tiap-tiapnja diperintah oleh seorang yang paling berani dan terkemuka diantara mereka. Kepala Pemerintah tiap-tiap puak suku itu disebut dengan „**Orang Kaja**”, yang didalam kalangan puaknja mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Pangkat „Orang Kaja” itu merupakan pangkat yang turun-temurun. Kepada rakjat dibawah pemerintahannja dia bertindak sebagai wakil dari seorang radja, dan berhak menjatuhkan hukuman bila dipandangnja perlu, dan tindakan-tindakan lainnja.

Dengan demikian, maka dalam daerah kepulauan Riau pada waktu itu terdapat 3 „Orang Kaja” yang terdiri dari:

1. **Orang Kaja Bintan**, yang mengepalai rakjat suku Bintan dan Penaung.
2. **Orang Kaja Lingga**, jaitu yang mengepalai rakjat suku Orang Enam Suku, yang disebut djuga dengan „Orang Mantang”.
3. **Orang Kaja Ungar**, mengepalai orang dari Pesukuan Asing, yang djuga disebut dengan „Orang Tambus dan Aidjong”.

Sebagai pembantu atau orang sebahawannja dalam melakukan pemerintahan, tiap-tiap Orang Kaja itu mempunyai beberapa orang Penghulu dan Batin. Penghulu atau Batin ini mendjadi kepala suatu negeri. Disamping Penghulu dan Batin itu terdapat pula pangkat yang disebut dengan Djuru dan Djenang, jaitu kepala kelompokan yang masih dekat pertalian darahnja, kepala hindu, (horde).

Sebutan **Penghulu** terdapat dalam puak suku orang-orang Bintan, dan perkataan **Batin** berlaku untuk rakjat dalam puak suku Orang Asing.

Dengan demikian maka njatalah, bahwa dalam masjarakat Kepulauan Riau dahulu terdapat susunan pemerintahan yang ber-tingkat-tingkat.

Tingkatan yang paling rendah, jaitu yang langsung berhubungan dengan rakjat disebut Djuru atau Djenang, yang mengepalai beberapa famili dan keluarga. Beberapa orang Djuru/Djenang dikepalai oleh Penghulu atau Batin. Dan beberapa orang

batin/penghulu dikepalai oleh „Orang Kaja”. Pangkat-pangkat itu diturun-temurunkan kepada anak laki-laki mereka jang sulung (paling tua).

Karena tingginja kedudukan Orang Kaja dalam masjarakat, maka tidak djarang diantara Orang-orang Kaja itu sangat ditakuti dan apa kehendaknja harus diikut. Tidak pula kurang kedjadian, banjak diantara Orang-orang Kaja itu dipandang keramat sesudah matinja. Arwahnja dipudja dan kuburnja sangat dimuliakan.

Karena sifat-sifatnja melindungi kepentingan-kepentingan rakjat dan tidak gentar menentang maut, menjebabkan rakjat patuh dan sangat hormat kepada kepala mereka masing-masing, baik Penghulu/Batin, maupun Djuru/Djenang.

Karena hampir tidak berbatasnja kekuasaan seorang Orang Kaja, maka pengadilan tertinggi didalam masjarakat terletak ditangannja.

Bila suatu perkara tidak dapat diputuskan oleh Penghulu/Batin, atau rakjat mengingkari putusan-putusan mereka, maka perkara itu diadjukan kepada Orang Kaja. Rakjat jang ingkar ini oleh Orang Kaja didjadikan mendjadi „**Orang Olo**”, jaitu golongan masjarakat jang paling rendah tingkatannja didalam tiap-tiap puak Pesukuan.

Tjara mengangkat kepala Pemerintahan.

Sebagai diterangkan diatas tadi, pangkat tiap-tiap kepala pemerintahan itu biasa dipusakakan kepada anak laki-laki jang sulung. Tapi dalam hal ini berlaku pula suatu upatjara jang tertentu. Upatjara pengangkatan itu adalah sebagai berikut:

Bila seorang Orang Kaja meninggal dunia, maka sebelum djenazahnja dikebumikan, berkumpullah sekalian Penghulu-penghulu/Batin-batin jang bersangkutan dihalaman Orang Kaja jang sudah meninggal itu. Mereka „mengadakan permusjawaratan” untuk membitjarakan siapakah jang patut diangkat untuk menggantikan Orang Kaja jang sudah meninggal itu.

Pada waktu majat Orang Kaja jang meninggal itu diturunkan dari atas rumahnja untuk dibawa kepekuburan, maka tampillah kemuka salah seorang diantara Penghulu/Batin jang banjak itu. — biasanja seorang jang dipandang gagah-berani dan bidjaksana. — sambil menghunus lembing. Dihadapan majat dan orang banjak itu dengan suara jang keras dia bertanja sambil berteriak, menjerukan: „Siapakah jang akan menggantikan Datok kami ini? Patah Tumbuh, hilang berganti !!!

Kalau tidak ada jang akan menggantikannja, tidak kami izinkan djenazahnja itu dikuburkan”.

Mendengar hardikan itu, maka semua penghulu/batin jang ada itu dengan serentak menjebutkan nama orang jang sudah mereka mufakati tadi untuk menggantikan Orang Kaja jang sudah meninggal itu, jaitu anak laki-laki jang sulung dari jang meninggal.

Dengan demikian, maka majat jang meninggalpun dibenarkan untuk dikuburkan, dan pengangkatan Orang Kaja jang baru itu-pun dipandang sudah sjah. Seorang demi seorang diantara mereka jang hadir itupun berdatang sembahlah kepada Orang Kaja jang baru mereka „pilih” itu dan mempersembahkan hadiah mereka masing-masing.

Pengangkatan seorang Penghulu/Batin baru dilakukan sebagai dibawah ini:

Tujuh hari sesudah meninggalnja seorang Penghulu/Batin, maka semua Djuru/Djenang dinegeri itupun pergilah kepada Orang Kaja mereka untuk bertanyakan siapakah jang akan diangkat untuk mendjadi Penghulu/Batin baru. Oleh Orang Kaja mereka disuruh kembali ketempatnja untuk mentjari dan memilih seseorang jang akan menggantikan jang sudah meninggal itu. Beberapa hari sesudah itu, mereka datang kembali menghadap kepada Orang Kaja mereka bersama dengan „tjalon” jang mereka pilih, jaitu anak laki-laki jang sulung dari Penghulu/Batin jang baru meninggal.

Kemudian maka Orang Kaja bersama dengan tjalon Penghulu/Batin dan rombongan itu berangkatlah bersama-sama kedusun/kampung jang kehilangan pemimpinnja itu. Sesampai disana, dihadapan chalajak ramai oleh Orang Kaja diumumkanlah pengangkatan seorang Penghulu/Batin baru dan mempertaruhkan kepada rakjat agar mereka patuh mengikut perintah-perintah dari pemimpin jang baru diangkat itu, dan kepada Penghulu/Batin jang baru itupun dipesankan pula agar dia selalu berusaha untuk mendjaga dan memimpin serta melindungi anak buahnja.

Dengan demikian maka berachirlah upatjara pengangkatan itu.

Pengangkatan seorang Djuru/Djenang baru dilakukan oleh Penghulu/Batin menurut tjara jang dipakai dalam upatjara.

Pasal 91.

KEPERTJAJAAN AGAMA DAN PERKAWINAN.

KARENA tersebar diatas beratus-ratus buah pulau dan tidak mempunyai kedudukan jang tetap serta dikelilingi selalu oleh ombak-ombak lautan, maka rakjat dikepulauan Riau ini nampaknja agak terlambat menerima pengaruh kebudayaan-kebudayaan baru. Dari itu mereka agak lebih lama pula terikat kepada kepertjajaan-kepertjajaan kuno jang mereka pusakai dari nenek mojang mereka.

Sampai kira-kira kepada pertengahan abad ke 16, rakjat masih terikat untuk mempertjajai roch-roch dan arwah-arwah nenek mojang mereka, dan sangat takut kepada apa jang mereka namakan „sakti“, atau roch gaib jang dapat mendatangkan balabentjana, bahagia dan berkah.

Kepertjajaan-kepertjajaan itu mereka pusatkan kepada pohon-pohon kaju jang luar biasa besar dan tinggi serta angkernja, kepada ombak-ombak dilautan, kepada batu-batu karang jang besar dan menakutkan, bahkan kepada perseorangan jang mereka herani sifat dan pembawaannja.

Dan karena itu, maka upatjara-upatjara jang mereka lakukan, hampir tidak ada jang berhubungan dengan kepertjajaan mereka kepada agama.

Dalam melakukan upatjara perkawinan misalnja, tiap-tiap puak suku memakai kebiasaannja masing-masing.

Dalam hal ini, menurut penjelidikan Saudara Asisten Wedana Midai, dalam kalangan Pesukuan Orang Enam Suku dan Orang Asing terdapat kebiasaan melakukan perkawinan sebagai dibawah ini:

Seorang pemuda dan seorang pemudi jang ingin terikat hidup serumah tangga sesudah persesuaian ibu bapak mereka sendiri, haruslah datang menghadap kepada Djuru/Djenang mereka untuk menjatakan niat mereka. Dengan disaksikan oleh Penghulu/Batin, pada suatu ketika jang ditentukan kedua tjalon suami isteri ini dinaikkan keatas sebuah perahu ketjil. Perahu itu diluntjurkan ketengah-ketengah lautan besar jang bergelombang tinggi. Bila keduanja nanti kembali kepantai dengan selamat bersama dengan perahu mereka, maka diumumkanlah bahwa keduanja sudah diakui sebagai suami isteri dan mereka sudah boleh hidup serumah tangga.

Njatalah, bahwa jang dikehendaki dari sepasang suami-isteri dalam masjarakat itu, adalah keberanian dan keuletan mereka menempuh mara bentjana didalam lautan, dimana kehidupan mereka bersumber. Dalam hal ini sudah tentu tidak semua pemuda dan pemudi jang beruntung.

Banyak djuga diantara mereka jang tidak kembali lagi ketepi pantai, dan terkadang djuga pernah majat salah seorang diantara mereka sadja jang selamat kembali pulang.

Demikianlah tradisi perkawinan jang lama berlangsung dalam lingkungan masjarakat puak bangsa itu.

Pasal 92.

ZAMAN PEMERINTAHAN RADJA-RADJA.

SEDJARAH ini dimulai semendjak dari permulaan abad ke 18. Pada kira-kira tahun 1722, Radja Djohor, Sultan Soelaïman Abnoel Sultan Abdoel Djalil datang sebagai pengungsi ke Kepulauan Riau. Di Bintan dia menuzulkan dirinja mendjadi radja dan berkedudukan di Ulu Sungai Riau.

Sesudah itu datang pula Radja Ketjil keturunan Radja Siak jang semendjak beberapa lama memandang bahwa dialah jang berhak didaerah itu karena semendjak beberapa lama daerah tersebut mendjadi daerah taklunja. Pertikaian antara kedua Radja inipun timbullah.

Dalam pada itu, mendarat pula dari Bugis seperangkatan orang-orang besar keradjaan itu, jang dikepalai oleh Radja Daeng Kambodja. Karena ada pertikaian antara Radja Djohor (Sultan Soelaïman) dengan Radja Ketjil, maka radja dari Bugis ini mendjandjikan bantuan kepada Sultan Soelaïman untuk menundjukkan Radja Ketjil.

Setelah Radja Ketjil dapat diusir oleh Radja Bugis ini, maka dia diangkat mendjadi radja muda dengan sebutan Jam Tuam Muda Keradjaan Riau.

Sultan Soelaïman dan orang-orang besarnja pindah tempat ke Daik dan mendirikan keradjaan pula disana. Jam Tuan bersema-jam kemudian pindah dari Ulu Sungai Riau dan berkedudukan di Penjengat. Sebagai pernjataan terima kasihnja, maka oleh Sutan Soelaïman, Jam Tuan Muda ini dikawinkannja dengan salah seorang adiknja.

Semendjak dari saat itu, maka kekuasaan dikeradjaan Riau berada dalam tangan dua orang radja, meskipun kekuasaan itu sudah ditentukan lebih dahulu. Jam Tuan Muda hanya berkuasa atas rakjat daerah jang diperintahinja, sementara hak milik dan harta benda didaerah itu tetap mendjadi milik Sultan Soelaïman.

Dengan demikian, maka dalam masjarakat sekarang timbul pula suatu perubahan baru. Kalau sekian lama didalam kalangan masjarakat hanya terdapat tiga puak suku bangsa, sekarang sudah bertambah bilangannja.

Sekarang sudah ada penduduk Asli dan penduduk jang bukan Asli.

Jang disebut dengan penduduk asli, ialah penduduk jang berasal dari ketiga buah pesukuan jang disebutkan dibahagian atas, dan jang tidak asli, adalah mereka jang datang bersama dengan kedatangan kedua orang Radja jang ditjeritakan itu.

Dengan demikian, maka sekarang timbullah dua golongan masjarakat jang satu sama lain mempunyai kedudukan jang terpisah-pisah.

Golongan masjarakat itu ialah:

1. **Bumiputra tidak asli**, jang terdiri dari:

- a. Radja dan mereka jang berhak memakai gelaran radja.
- b. Mereka jang disebut dengan panggilan Said dan Intji'wan.
- c. " " " " Daeng.
- d. Mereka jang menjadi keturunan radja.
- e. " " diberi gelaran Intji'.
- f. " " disebut „Merdeheka” (Merdeka).
- g. " " menjadi hamba sahaja radja.

2. **Bumiputera asli**, terdiri dari:

- a. Orang Kaja dan keluarganja jang disamakan kedudukannja dengan „Intji”.
- b. Orang-orang Bintan dan Penaung jang disamakan kedudukannja dengan kasta hamba sahaja radja.
- c. Orang Enam Suku dan Orang Asing jang kedudukannja hanja merupakan Rakjat biasa sadja.

Adanja perubahan tersebut diatas berlangsung sesudah Jam Tuan Muda beroleh kekuasaan untuk memerintahi rakjat keradjaan Riau, terutama sesudah Sultan Soelaiman mengungsi dari Ulu Sungai Riau.

Pengungsian sultan ini ke Bintan mungkin karena adanja serangan dari bangsa Portugis atau oleh keradjaan Atjeh di Malaka (Djohor).

Kedatangan dan kekuasaan jang dipegang oleh Jam Tuan Muda hanja membawakan perubahan-perubahan didalam susunan dan bentuk pemerintahan.

Pada zamannja itu timbul pula djabatan-djabatan baru didalam keradjaan, jaitu djabatan-djabatan jang disebut dengan:

1. Datok Bandar, (Wali Kota),
2. Panglima Kawal (Komandan Pasukan Keselamatan),
3. Datok Inderaguru (Inspektur Pendidikan),
4. Penghulu Semberap (Kepala Pengawal Radja).

Kepala djabatan-djabatan tersebut diatas selain dari mengurus dan mengepalai tugas jang diserahkan kepada mereka masing-masing, djuga mempunyai hak untuk m'elakukan pemerintahan dengan setjara langsung dan sebagai penasehat radja.

Untuk mengepalai urusan pemerintahan ditempat-tempat jang djauh dari tempat kedudukan radja, oleh radja diangkat pula beberapa orang jang diberi gelaran „Amir“, jaitu orang-orang jang akan melakukan pemungutan tjukai (beaja keluar masuk), padjak dan sebagainya. Disamping itu, Amir-amir ini djuga mengerdjakan pekerdjaan sebagai wakil radja didalam daerahnja masing-masing.

Pasal 93.

HUBUNGAN KEMASJARAKATAN.

PERUBAHAN-PERUBAHAN dalam susunan pemerintahan keradjaan dan timbulnja kasta baru didalam masjarakat itu, menjebabkan perhubungan kemasjarakatan mendjadi berubah pula. Meskipun sudah ada djabatan-djabatan jang tertentu, tapi pemerintahan kepada rakjat tetap berlangsung sebagai tjara jang lama djuga. Tiap-tiap golongan dan kasta didalam masjarakat hanja berhubungan dengan kepala mereka masing-masing sadja. Dengan demikian, maka timbul pulalah kepala-kepala rakjat jang baru, menurut kasta mereka.

Antara satu kasta dengan kasta jang lain timbul kerenggangan dan mereka seakan tidak dapat dipersatukan. Perkawinan hanja berlaku didalam lingkungan golongan dan kasta mereka sadja.

Dengan demikian, maka rakjat asli didaerah itu seakan terpenjil, atau sengadja mementjilkan diri dari masjarakat jang berkuasa pada saat itu. Dan karena sangat renggangnja perhubungan mereka sesamanja, maka kebudajaan-kebudajaan baru tidak kundjung dapat mempengaruhi peri kehidupan dan pergaulan mereka.

Hal ini dengan njata akan kelihatan dalam melakukan upatjara-upatjara perkawinan. Rakjat asli masih tetap mempertahankan kebiasaan mereka jang lama, sementara rakjat jang tidak asli memakaikan tjaranja pula. Agama Islam dan peraturan-peraturan baru jang dilahirkan karena adjaran agama itu, hanja berpengaruh dikalangan rakjat jang tidak asli sadja, dan sangat sedikit serta sangat lambat tumbuhnja dikalangan rakjat jang asli.

Pokok penghidupan jang selama ini hanja dari penghasilan penangkapan ikan dilaut sadja, sekarang sudah ditambah dengan mata penghidupan jang lain, terutama dengan bertjotjok tanam. Selain dari hasil perkebunan sendiri, hasil-hasil hutan djuga sudah mendjadi mata penghidupan.

Pasal 94.

HUKUM DAN HAK TANAH.

UNDANG-UNDANG, jang didaerah itu disebut dengan „Kanun-kanun“, jang berlaku semendjak Jam Tuan Muda berkuasa, terdiri dari :

1. Hukum Ibadat, jaitu hukum-hukum jang mengenai dengan tata tertib mengerdjakan amal ibadat. Hakim dari undang-undang hukum ini terdiri dari Imam, Chatib dan para ulama.
2. Hukum Munakahat, jaitu undang-undang jang menjangkut dengan tata tertib keradjaan. Jang bertindak sebagai hakim dalam lapangan ini, ialah hakim-hakim pada hukum Ibadat juga.
3. Hukum Djinajat (kedjahatan); hakimnja terdiri dari orang-orang jang ditundjuk oleh radja dan pengadilannja dilakukan setahu radja.
4. Hukum Muamalat (sengketa) jang diputuskan oleh menteri-menteri jang ditundjuk untuk itu.

Pengadilan terhadap orang-orang bumiputera asli dilakukan oleh Penghulu-penghulu dan batin-batin mereka masing-masing putusan-putusan mereka ini haruslah lebih dulu dibanding oleh djabatan-djabatan kehakiman jang tersebut diatas mengenai lapangan kewadajiban mereka masing-masing.

Mengenai dengan hukum tanah diterangkan, bahwa sampai sekian djauh, tanah-tanah masih mendjadi milik dan kepunjaan radja, walau siapapun djuga jang mengusahakan tanah itu. Jang berhak mendjual dan menghadiahkan tanah hanjalah Sultan sadja.

Rakjat diberi kesempatan untuk mengerdjakan dan mengusahakan tanah perkebunan sekuasa mereka sendiri. Mereka diizinkan menebas tanah-tanah hutan untuk didjadikan kebun dan ladang. Selama tanah-tanah itu masih diusahakan, mereka berhak untuk memilikinja dan radja beroleh 6% dari hasil tanah itu. Bila tanah tersebut ditinggalkan oleh pengusahanja, maka tanah tersebut kembali mendjadi hak dan milik sultan.

Penebangan-penebangan kaju dihutan-hutan keradjaan untuk didjadikan mata pentjarian, dikenakan tjukai, begitupun dengan pemungutan-pemungutan hasil-hasil hutan lainnja. Tapi pene-

bangun kaju-kaju itu untuk keperluan rakjat sendiri, untuk mendirikan rumah dan membikin perahu dan sebagainya, dibebaskan dari pemungutan tjukai itu.

Keadaan tersebut diatas berlangsung sampai kepada zaman pendjadjahan Belanda.

Pasal 95.

DIZAMAN PENDJADJAHAN BELANDA.

BERKUASANJA bangsa Belanda didaerah kepulauan Riau ini mulai dari achir abad ke 19 dan permulaan abad ke 20, menjabkan timbulnja perubahan-perubahan besar dalam kalangan masjarakat Keradjaan Riau dalam semua tingkat dan lapisan hubungan kemasjarakatan.

Perubahan-perubahan ini dengan njata kelihatan dalam kalangan pemerintahan sendiri. Banjak djabatan-djabatan jang dihapuskan dan kekuasaan jang diambil over oleh pembesar-pembesar pemerintahan pendjadjahan itu. Jang masih tinggal hanjalah pangkat „Amir“, penghulu dan batin sadja.

Dengan sendirinja maka pekerdjaan seorang Amir sekarang mendjadi sangat berat. Dengan bertambah banjaknja pekerdjaan dan kewadajiban seorang Amir, maka diatasnja ditempatkan seorang Controleur B.B. Belanda jang mengepalai beberapa orang Amir. Karena itu, maka Amir-amir itu sekarang ditetapkannja untuk mendjadi „Inlandsche Bestuurshoofden (kepala-kepala Pemerintahan Bumiputera) dengan pangkat Onder dan Hoofd der Districten.

Dan karena sudah berkembangnja penduduk, maka Penghulu-penghulu dan Batin-batin banjak jang dibutuhi. Karena itu maka pangkat Orang Kaja sekarang disamakan pula kedudukannja dengan Penghulu-penghulu itu.

Karena sudah ramainja perhubungan dengan dunia luar, maka perubahan-perubahan besar djuga berlangsung dalam semua segi-segi pergaulan.

Perhubungan antara pulau berlangsung dengan tjepat dan karenanja maka pergaulanpun mendjadi bertambah rapat pula.

Radja hampir tidak mempunjai kekuasaan apa-apa lagi, karena pengaruh seorang Kontler djauh lebih besar dari pengaruhnja. Dan meskipun radja masih tetap ada, tapi dia hanja merupakan seorang jang kehilangan kebesarannja.

Perkembangan-perkembangan adjaran Agama Islam berkembang dengan tjepat. Karena itu, maka upatjara-upatjara banjak pula jang dimasuki oleh pengaruh adjaran agama itu. Perkawinan antara satu suku dengan suku jang lain sudah mulai berkembang. Bahkan

perkawinan antara Bumiputera jang Asli dengan jang bukan asli sudah tidak heran lagi.

Demikianlah pandangan sepintas lalu mengenai perkembangan pengaruh dan sedjarah turunan adat istiadat dan kebudayaan didaerah Kepulauan Riau, dimana menurut pepatah jang sekarang masih mendjadi sebutan disana: „Ada radja, adat berdiri; tidak ada radja, adat mati”.

BAB V
BAHAGIAN XII

PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM.

MASUKNJA ISLAM DAN PENGARUHNJA,

SEABAD sebelum Sri Maharadja Diradja Adityawarman memerintah di Minangkabau dalam tahun 1243, disebelah utara pulau Sumatera telah berdiri satu keradjaan Islam jang terkenal dengan keradjaan Islam Pasai, Perlak dan Sumatera. Al Malikus Saleh seorang ulama jang terkenal telah mengembangkan agama Islam sampai kenegeri-negeri sekitarnja. Pada pertengahan abad ke-14 Islam telah mulai disarankan dari Atjeh kepantai Minangkabau. Kemegahan Islam semangkin memuntjak lebih-lebih setelah Malaka dikalahkan Portugis (1511). Ketika itu radja-radja Atjeh telah dapat menanamkan pengaruhnja dan kekuasaannja kenegeri-negeri pesisir Minangkabau seperti Tiku, Pariaman, Padang, Salido, Bandar X, Indrapura dan Bengkulu. Beberapa orang ulama terkenal ketika itu adalah Sjamsuddin, Hamzah, dan Abd. Rauf jang meskipun pendirian mereka berbeda-beda tentang memahami ke Tuhanan menurut ilmu Tasauf, namun pengaruh mereka tidak sedikit artinja untuk menentukan bentuk faham Islam diseluruh Sumatera. Seorang dari murid Abd. Rauf jaitu Burhanuddin diutusnja ke Minangkabau mendjadi guru agama dan menetap di Ulahan-Pariaman. Sedjak itu tersiarlah Islam di Minangkabau. Njatalah bahwa tjara masuknja Islam ke Sumatera Tengah dari 2 djalan, yakni dari Malaka melalui perairan Siak dan Kampar dan jang kedua ialah dari Atjeh. Dua djalan jang ditempuh ini djuga membawa akibat kepada pergaulan, kebudajaan dan tjara beragama rakjat Minangkabau sendiri. Sebagai jang kita lihat agama dan adat dikotjok keduanja sehingga djalannja paralel „Adat mendaki, sjarak menurun. Adat bersendi sjarak dan sjarak bersendi adat”.

Bagi kaum agama hal inipun tidak mendjadi soal benar, karena dianggap belum begitu penting apalagi berhadapan dengan orang jang baru sadja dapat di Islamkan dan ada soal-soal besar jang tengah dihadapi kaum ulama ketika itu. Masalah ke Tuhanan sedang mendjadi pembijtaraan hangat. Ketika itu terdapat dua aliran jang bertentangan: Wihdatussjuhud dan Wihdatulwudjud. Kepala dari faham Wihdatulsjuhud ialah Hamzah Fansuri dan Sjamsuddin sedang A. Rauf menentangnja dengan faham Wihdatulwudjud dan disamping itu ia sendiri mempunyai tarikat suluk Sjazilijah. Dengan sendirinja Sjech Burhanuddin Ulahan murid dari Sjech A. Rauf turut menjiarkan faham gurunja dan mengadjar-kan tarikat suluk Sjazilijah. Oleh karena hal ini Hamzah Fansuripun

datang pula ke Minangkabau untuk mengembangkan fahamnya itu dan sampai pula menanamkan pengaruhnya di Sidjundjung. Pertentangan ini hanya sekedar mengenai faham, tapi melandjut sampai tuduh-menuduh bahkan telah meningkat djadi sengketa perang.

PENGARUH GERAKAN PADERI.

DALAM tahun 1801 persis awal abad ke-19 kembalilah 3 orang pemuda dari Mekkah ke Sumatera, jaitu Hadji Miskin Pandai Sikat, H.A. Rahman Piabang dan Tuanku di Sumanik jang kebetulan pula berasal dari 3 luhak di Minangkabau, Agam, 50 Kota dan Tanah Datar. Mereka ini membawa perasaan dan tjita-tjita baru jaitu agama Islam harus berkuasa. Orang agama djangan hanya membatja doa dirumah orang kematian, serta fatwa didengarkan tapi tidak dijalankan masjarakat. Mereka djuga tidak puas melihat pengaruh Hindu masih berakar, memudja tempat-tempat sakti dan keramat. Didapatinja ulama bertengkar perkara suluk terikat dan perkara jang tidak termakan oleh orang awam. Hakekatnja semua itu akan membawa lebih banjak kerusakan dari pada kebajikannya, sehingga lantaran perpetjahan itu kaum adat dan radja-radja masih tetap berkuasa dan kedua ulama tersisih dari masjarakat. Dengan segala kebidjaksanaan ketiga ulama ini mendjalankan pengaruhnja. Mereka mempunjai kejakinan bahwa kekuasaan harus diambil dengan tidak menumpahkan darah, sehingga achirnja rakjat telah lebih dekat kepada ulama dari pada kepada radja-radja dan kaum adat.

Ketiga ulama ini lalu mengadakan perundingan dengan Tuanku nan Rentjeh di Agam jang kebetulan dihadiri djuga oleh Tuanku Imam Peto Sjarif (kemudian bergelar Imam Bondjol) jang pada mulanja bermaksud hendak meminta bantuan untuk mengalahkan kaum adat di Bondjol. Dalam pertemuan ini dibentuklah satu barisan dengan nama Paderi (orang putih) dan Tuanku Imam langsung diangkat sebagai pemimpin Tjabang Paderi di Bondjol.

Kembalinja Tuanku Imam ke Bondjol dengan membawa bantuan, merupakan satu modal bagi perdjjuangan Islam menegakkan kekuasaan dengan kekuatan. Pengaruh Islam mulai merembet kemana-mana dan Bondjol achirnja dijadikan pusat perdjjuangan menentang adat pada mulanja, tapi kemudian djuga menjadi pusat perdjjuangan menghadapi Belanda jang djuga tidak merasa senang melihat semakin besarnja pengaruh agama Islam, jang ketika itu telah sampai mendjalar ke Kuantan, Batanghari, Djambi, Air Bangis, Barus, Singkel, Sibolga, bahkan Tapanulipun terantjam bahaja paderi.

Maka mulailah masuk infiltrasi Belanda, kepada kaum adat karena mereka merasa bahwa kemerdekaannya telah terikat dan adatnya tidak berkuasa.

Maka tahun 1921 mulailah Belanda menjusun siasatnya untuk memerangi kaum agama dan membela kaum adat. Oleh karena perang tidak dapat dielakkan lagi, maka salah seorang diantara ulama-ulama yang gagah berani diangkat menjadi kepala perang yakni Tuanku Imam Bondjol sendiri. Dan Bondjol dijadikan pusat pertahanan yang teguh 16 tahun lamanya ada perang di Sumatera Barat yang mulanya antara kaum adat dan agama, tapi kemudian ternyata antara Minangkabau dan Belanda. Walaupun Minangkabau dapat dikalahkan, Tuanku Imam dibuang dan kawan-kawannya dianggap tidak berpengaruh lagi, kaum adat bukannya tambah kuasa tapi juga ditjabut kukunya dan dikurangi kekuasaannya. Peraturan monopoli-stelsel dijalankan, rakyat dipaksa menanam kopi dan dipaksa menjualnya kepada pemerintah.

Tetapi semangat dan pengaruh Islam bukannya padam. Islam bukannya tidak berjasa membawa aliran baru ketengah masyarakat Minangkabau. Kaum Agama terus berusaha menjiarkan agama dengan bermatjam tjara dan siasat. Sikap dan antjaman Belanda tidak menjebabkan surau dan mesjid lengang walaupun ajaran agama diawasi dengan sangat streng sekali. Beberapa orang yang berkesanggupan mengirim puteranya beladjar keluar negeri, dan diantara yang dikirim ini ialah Ahmad Chatib, A. Latief dan Taher Djalaluddin.

Dibawah tekanan pendjadjahan Belanda kaum agama memperdalam pengaruhnya kepada rakyat umum bahkan kepada kaum adat, dengan pendirian kalau ulama sudah berpengaruh dengan sendirinya hukum agama akan berdjalan. Kata-kata adat bersendi sjarak dan sjarak bersendi adat tadinya sekarang telah berganti menjadi „Adat bersendi sjarak, sjarak bersendi kitabullah”.

Pasal 98.

PEMBAHARUAN.

PADA awal abad ke-19 kaum muslimin merasa putus asa dan banjak diantaranya yang sudah tidak pertjaja lagi akan kekuatan diri sendiri, menjerah sadsja kepada takdir dengan tidak berusaha. Roh dan semangat Islam sedjati yang hidup penuh dengan tauhid telah diselubungi oleh pnjakit churafat dan bid'ah. Untunglah pada permulaan tahun 1902 kembalilah dari Mekkah beberapa orang Tuanku setelah menamatkan peladjarannja pada seorang guru besar jaitu Sjech Ahmad Chatib yang kita sebutkan diatas tadi, yang telah mendjadi guru besar dan bermukim di Mekkah. Kesan-kesan betapa tidak puas perasaannja dengan sistem pemerintahan, sebagai yang djuga terdjadi dizaman Imam Bondjol, tjelaannja terhadap harta pusaka, adjaran faham Wahdatulwudjud dan rabithah, semuanja itu diadjarkannja kepada semua orang yang beladjar padanja. Hal ini terdjadi 100 tahun sesudah pulangnja H. Miskin, Tuanku Piabang dan Hadji Sumanik, pelopor dari Gerakan Paderi dahulu. Diantara murid-muridnja yang pulang ini ialah Sjech Suleman Arasuly Tjandung, Sjech M. Djamil Djambek, H. Abdullah Ahmad, H.A. Karim Amrullah dan H.M. Thaib. Kemudian disusun pula oleh H. Abas Padang Djepang, H. Mustafa, H. Daud, H.A. Latief, H.M. Djamil Djaho, H.M. Zen Simabur, H.M. Rasjid Manindjau dan H.M. Salim Bajur, Sjech Ibrahim Musa Parabek, dan lain-lain. Riwayat tetap mengakui bahwa beliau-beliau inilah yang membaharui dan menjegarkan adjaran Islam dialam Minangkabau.

Murid-murid dari Sjech M. Djamil Djambek c.s. yang terkenal sampai sekarang ini ialah Zainuddin Labay El Junusy, A. Hamid Hakim, A.R. St. Mansur. Mulailah ulama-ulama modern ini mengadakan perubahan sedikit demi sedikit, achirnja keras dan tegas. Bid'ah dan churafat dibanteras habis, adat yang diagamakan dibantah terang, sihir dan kepertjajaan lainnja yang merusakkan kejakinan dikembalikan kepada kedudukan yang sebenarnja, didjelaskan yang hak dari yang bathal.

Rupanja pihak Belanda tetap mendjalankan siasatnja yang busuk litjin dengan menekan rakjat. Achirnja pada tahun 1908 kedjengkelan rakjat pada sebahagian negeri sudah bersangatan sehingga mengakibatkan timbulnja pemberontakan yang terkenal di Kamang, Manggopoh, Ulakan, Lubuk Alung, Batipuh dan lain-lain yang semuanja dipimpin oleh ulama yang berpengaruh seperti di Kamang oleh Tuanku H.A. Rahman dan muridnja A. Wahid Kari Mudo. Walaupun pemberontakan ini hanja terbatas, tapi Belanda telah bertambah yakin bahwa kaum adat dan kaum agama tidaklah dapat

dipisahkan dan diadu-dombakan lagi. Kader-kader ulama semakin bertambah banjak dan pengadjan tetap digiatkan. Sjech Djamil Djambek siang malam menjiarkan adjaran tauhid dengan Kamang sebagai sasarannja. H. Abdullah Ahmad mendidik anak-anak di Padang Pandjang setjara sekolah agama dan H.A. Karim Amrullah di Sei Batang*). Dalam tahun 1911 H. Abdullah Ahmad menerbitkan madjallah Al Munir di Padang dan sebelumnya djuga telah diterbitkan madjallah Al Imam oleh Sjech Thaher Djalaluddin di Singapura. Sajang karena perbelandjaan tidak tjukup madjallah ini tidak dapat diteruskan. Tapi buku-buku agama telah banjak diterbitkan ketika itu, seperti ilmu sedjati, Aiqazun Nijam, Usul Fikhi karangan H. Abdullah Ahmad sendiri dan H.A. Karim Amrullah.

Pada tahun 1918 atas usaha H.A. Karim Amrullah diandjurkan kepada murid-muridnja supaya mendirikan organisasi keagamaan, dan berdirilah perkumpulan Sumatera Thawalib. Pun sebelum ini oleh H. Abdullah Ahmad telah didirikan pula sekolah Adabijah menurut sistim dan bentuk baru jaitu disamping peladjaran agama diadjaran djuga peladjaran umum. Sistim pondok diubah dengan tjara berkelas-kelas dan dalam sebentar waktu sadja karena ternjata ada baiknja buat pendidikan, segera mendapat perhatian dan sambutan diseluruh Minangkabau (Sumatera Tengah). Pengaruh nama dari perkumpulan Sumatera Thawalib sungguh menggemparkan dan sampai meluas keseluruh Sumatera dan Malaja. Minangkabau telah membukakan mata orang banjak sampai ada beberapa sekolah jang dipimpin dari Minangkabau seperti Thawalib Tapak Tuan, Dinijah Kuala Simpang, Muhibbul Ihsan Bengkulen, dan lain-lain. Meskipun waktu itu terdjadi pertentangan jang amat hebat antara kaum tua dan kaum muda, namun hasil jang diperdapat tidak sedikit. Sebab banjak faham didalam perkara masalah-masalah agama jang berlainan, sedang dalam hal jang lain kaum tua sudah terpaksa menuruti langkah kaum muda. Hasilnja ialah kemadjuan perasaan agama djuga.

Pada tahun 1920 atas iniatief dari H. Abdullah Ahmad djuga telah didirikan Persatuan Guru-guru Agama Islam (P.G.A.I.).

Pada mulanja perkembangan dilapangan pendidikan dan per-surat kabaran itu tidaklah ada mengenai perdjjuangan politik. Tapi pada tahun 1923 seorang dari murid H.A. Karim Amrullah jang terkenal sangat alim jaitu H. Dt. Batuah kembali dari Djawa membawa gerakan baru jaitu komunis. Gerakan ini diterimanja karena selama dalam perdjjalanan ia bertemu dengan Muso, Alimin dan Tan Malaka. Tapi gerakan ini hanja namanja sadja jang Komunis sedang pada hakikatnja ialah Islam revolusioner.

Pengaruh gerakan baru ini amat tjepat mendjalarnja dikalangan peladjar-peladjar agama ketika itu. Tapi kalau Lenin menjaksikan tentu dia tidak akan mengakui mereka komunis sedjati, sebab didasarkan kepada agama, bukan pada Marxisme.

*) Selandjutnja lihat tentang pendidikan Agama di Bhg. Pembangun Masjarakat.

Oleh karena pengaruh politik, kedudukan Sumatera Thawalib djadi gontjang. Pertentangan kaum tua dan muda semakin mendjadi, Komunis berdjangkit, tapi surau dan mesdjid tetap ramai. Pada tahun 1925 Dr. H.A. Karim Amrullah melawat ke Djawa karena menurut kejakinannja di Minangkabau harus diadakan perubahan lagi. Diselidikinjalah Muhammadiyah salah satu organisasi Islam jang didirikan oleh K.H. A. Dahlan pada tahun 1912, dan karena bersetudju dihatinja dibawanjalah pergerakan itu ke Minangkabau. Gerakan baru ini mendapat sambutan dari kalangan masjarakat dan berdirilah tjabang Muhammadiyah di Sei Batang dan Padang Pandjang walaupun disampingnja banjak ditemui halangan. Pada tahun 1928 gerakan Sumatera Thawalib diperbaiki kembali dan pada tahun 1930 sesudah Muhammadiyah mengadakan kongresnja ke-19 di Minangkabau, Sumatera Thawalib, berganti nama mendjadi Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) jang kemudian diubah sifat perdjuangannja dari pada semata-mata pergerakan agama mendjadi berpolitik.

Waktu itu termasukhurlah nama-nama Iljas Ja'coub, Muchtar Lutfhi dan H. Djalaluddin Thaib. Sedjak itu berkembanglah pergerakan Muhammadiyah dan Permi diseluruh Sumatera Barat dan boleh dikatakan dari sinilah sumber Kebangunan gerakan berorganisasi diseluruh Sumatera.

Peristiwa-peristiwa jang menjakitkan hati.

Karena disamping kemadjuan agama jang telah mulai dirasakan kembali pengaruhnja ditengah-tengah masjarakat, Belanda semakin hati-hati mengintjerkkan matanja kepada kaum agama dan terutama ulama-ulamanja. Belanda jakin kalau kekuatan Islam tidak dipatahkan dan kukunja tidak dikerat dan pengaruhnja tidak dihambat, pastilah tiang-tiang pendjadjahan akan gontjang karenanja. Oleh sebab itu halangan harus diadakan jaitu dengan mengeluarkan satu peraturan untuk guru (Guru ordonansi 1928) jang isinja melarang guru-guru agama Islam mengadjarkan agamanja kalau tidak lebih dulu mendapat izin dari pemerintah Belanda. Masjarakat Minangkabau dan kaum ulama ribut dan gontjang. Belanda memang tjerdik. Untuk maksud ini sengadja dikirim Dr. De Vries jang akan mendjalankan pengaruhnja dengan djalan membisiki ulama-ulama kaum tua dan muda. Tapi karena kebulatan hati dan tekad kaum ulama seluruhnja ordonansi itu tidak djadi dilangsungkan di Minangkabau. Begitulah beruntun-runtun sadja didjalankan oleh Belanda ichtiar untuk melemahkan perdjjuangan kaum Muslimin. Ordonansi Sekolah Liar, Ordonansi Nikah bertjatat, dan lain-lain aturan jang semuanya dengan maksud membuatkan dju-rang untuk mendjatuhkan atau mengasingkan pemimpin-pemimpin dan kaum ulama. Disamping itu memang ada pula baiknja. Semakin banjak tekanan ditimpakan Belanda semakin kuat pula persatuan kaum Muslimin. Hilang pertentangan muda dan tua, timbul kerdjasama jang sebaik-baiknja untuk menegakkan agama.

Dimana-mana timbul pergerakan rakjat dan perkumpulan-perkumpulan agama menggembeleng ummat dalam lapangan politik, pendidikan dan agama. Tidak dapat dilupakan usaha Permi dan P.S.I.I. dilapangan politik. Muhammadiyah dan Perti dilapangan agama, dan Taman Siswa jang senantiasa memperdalam kesedaran rasa kebangsaan. Sekolah, pesanteren dan madrasah-madrasah jang diadakan oleh rakjat sendiri telah membawa perubahan besar dilapangan pendidikan. Dinegeri-negeri telah merata sekolah-sekolah agama dan sebagai pusat dari perguruan agama ketika itu tertjat Sumatera Thawalib, Dinijah School Rahmah El Junusiah, Muhammadiyah m/d Qur'an dan Tarbiah Islamijah Djaho dan Tjandung, Thawalib Parabek dan banjak lagi jang lain. Sesudah tahun 1935 muntjul pula Sekolah-sekolah Menengah landjutan dari madrasah jang telah sebagai tjendawan tumbuh itu seperti Normal Islam dan Islamic College (Padang), Training College (Pajakumbuh), Kulijahatul Muballighin (P. Pandjang), Kullijah Dijanah (Parabek), Kullijah Sjarijah (P. Pandjang) jang kemudian banjak sekali menghasilkan pemuda-pemuda revolusioner Islam jang mendjeladjah kesegenap pelosok tanah air untuk menjiarkan dan menegakkan Islam.

Hampir sedjalan dengan perkembangan agama di Sumatera Barat (Minangkabau) didaerah Djambi terdjadi perubahan-perubahan dalam lapangan faham dan pendidikan jang sudah dapat djuga terlihat disamping hebatnja pula tekanan pendjadjahan Belanda dengan mempergunakan kaum feodal sebagai alat untuk melumpuhkan agama.

Pembaharuan dipelopori oleh murid-murid dari Sjech Ahmad Chatib djuga. Sedjak tahun 1915 di Djambi telah dibangunkan satu organisasi jang dipimpin oleh Said Al Almusawwa dan ulama-ulama lainnja seperti K.H. Saleh, H. Ahmad Sjakur, H. Ibrahim, H.A. Samad, H. Usman, Said Alwi, dan lain-lain. Selain mengadakan pembaruan faham dalam kehidupan keagamaan, djuga telah dapat dibangunkan beberapa buah madrasah seperti Nurul Iman dibawah pimpinan H. A. Sjakur, Djauhar Ain, dibawah pimpinan A. Mundjin, Nurul Islam dibawah pimpinan H.M. Saleh, Saadatuddarain jang dipimpin oleh H. Ibrahim, Alchairijah dan Assaad. Keempat madrasah inilah jang mendjadi sumber pengetahuan agama Islam diserata daerah Djambi. Berlainan dengan Minangkabau oleh karena pemuka-pemuka agama dapat diikat dalam satu gabungan Tsamaratul Ihsan, maka Djambi tidak mengenai adanya aliran muda dan tua dalam faham keagamaan.

Djusteru sebaliknya tidak adanya pertentangan inilah jang menjebabkan kurang adanya djiwa perlombaan dan musbaqah sehingga melambatkan djalannja kemandjuan. Tapi dalam satu hal antara Djambi dan Minangkabau ada persamaan, yakni adanya perubahan dan pembaruan faham keagamaan terdjadi beriringan dan sama-sama ditimbulkan oleh bekas murid-murid Sjech Ahmad Chatib Mekkah.

Pasal 99.

DIZAMAN PENDUDUKAN DJEPANG.

DENGAN meletusnja perang di Pasifik jang achirnja merata mendjadi perang Asia Timur Raya pada tanggal 8 Desember 1941, berubahlah tjorak masjarakat Indonesia dari tertindas dibawah terungku pendjadjahan Belanda berpindah mendjadi terdjepit dibawah tekanan bajonet Djepang.

Politik fasisme Djepang semakin njata hendak mendjadikan bangsa Indonesia sebagai anak matahari jang harus menjerahkan dirinja hanja untuk kepentingan Dewa Matahari dalam Perang Asia Timur Raya. Kemakmuran Bersama, Nippon-Indonesia sama-sama adalah sembojan jang harus diutjapkan dibelakang antjaman samurai dan kempetai. Djepang mengerti bahwa bangsa Indonesia terutama suku bangsa Minangkabau (Sumatera Tengah) sangat tebal djiwa agamanya dan oleh karena itu mereka harus didekati dengan semangat Bushido, Nippon Sheisin jang terkenal. Nasihat agama kepada pemerintahan Djepang, tapi pada hakekatnja tiada lain dari pada alat.

Apalagi setelah berdiri Madjelis Islam Tinggi, gabungan ulama-ulama Minangkabau, mata Djepang semakin tadjam memperhatikan segenap tindakan dan langkah dari umat Islam jang sudah mulai dirasakannya sebagai lawan jang berbahaya. Umat Islam mulai pula memainkan politik kantjilnja. Pada lahirnja M.I.T. dilahirkan sebagai badan penasihat dari Djepang jang oleh karena itu ia diizinkan berdiri, tapi pada hakekatnja M.I.T. didjelmakan untuk mendjaga semangat iman dan tauhidnja kaum Muslimin. Sekolah-sekolah agama dipergiat dan diperbanjak, pengadjian-pengadjian dan tabligh ditakmirkan dimana-mana. Keirei ke Tokyo mendjadi persoalan jang dianggap merubah kiblat kaum Muslimin, dan diten-tang mati-matian terutama oleh alm. Dr. H.A. Karim Amrullah. Beliau jang berani mengarangkan buku „Hanja Allah” dimana diterangkan bahwa tidak ada jang boleh disembah oleh manusia selain dari pada Allah.

Buku dan pendirian jang diterangkan oleh beliau ini telah mengemparkan pemerintah Djepang dan djuga kaum Muslimin, sebab bagi kaum Muslimin sendiri inilah pernjjataan jang telah lama dirasakan sebagai api dalam sekam, dan sekarang timbul dengan tiba-tiba disaat umat Islam hampir kehilangan pegangan. Semangat umat

Islam timbul kembali dan walaupun tekanan dan penderitaan umat sudah sampai dipuntjaknja, tapi iman dan tauhid mereka masih tetap utuh dan tidak dapat dibeli dan dibudjuk.

Disamping itu kita djuga melihat usaha dari persjarikatan Muhammadiyah jang masih tetap berdiri menggembleng umat menegakkan amal-amal dan agama. Sekolah-sekolahnja masih terus dibuka, tapi kepada pemuda-pemuda dan peladjar-peladjar sudah ditanamkan semangat djihad untuk mempersiapkan diri bila tiba saatnja kelak mendjadi pembela Allah (Hizbullah) berdjuaug merebut kemerdekaan dari tangan Djepang. Kalau pemerintahan Djepang mengandjurkan menabung dan memperingati hari perang Asia Timur Raja, maka Muhammadiyah mengandjurkan menabung kepada Bank Muslimin Indonesia dan bergotong-rojong kekebun sendiri.

Demikianlah politik Djepang hendak menghapuskan agama di Minangkabau tidak mempan dan sebaliknja daftar hitam jang sedianja akan didjalankan terhadap ulama-ulama, terhenti dengan sendirinja dengan djatuhnja bom atom di Hirosjima.

Pasal 100.

DIZAMAN INDONESIA MERDEKA.

SESUDAH proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 umat Islam telah bangun, sadar dan bangkit serentak untuk melaksanakan kehendak kemerdekaan yang suci dan kejakinan bahwa tidak ada harga kemerdekaan kalau tidak dibeli dengan darah. Kesatuan dan kekuatan timbul, perselisihan ketjil dizaman yang silam hilang dengan sendirinja, pertentangan ideologie tidak begitu meruntjing lagi karena rasa agama amat besar pengaruhnja dikalangan rakyat walaupun partai yang dianutnja terang-terangan bukan partai Islam.

Kekuatan Umat Islam hanya dapat diudjudkan dengan pembelaan. Untuk pembelaan harus ada satu barisan yang akan mempertahankan dan membela agama, bangun atau lebur bersama-sama Republik Indonesia didjalan Allah. Untuk itu dibentuklah Barisan Hizbullah pada tanggal 12 Nopember 1945 di Padang Pandjang. Menjemputnakan sekolah-sekolah agama belum dimulai lagi karena sebahagian peladjar-peladarnja mentjeburkan diri kedalam perdjungan. Guru-guru dan ulama-ulama muda turut menjiapkan diri menggalang kemerdekaan apalagi setelah njata bahwa Belanda dibawah perlindungan Sekutu datang kembali hendak mengulangi pendjadjahan di Indonesia. Dengan tidak berfikir pandjang lagi dimanamana ulama-ulama bersama-sama pemimpin lainnja yang memimpin badan-badan perdjungan senantiasa memberikan semangat sjahid dan djiwa sabil kepada umat, sehingga karenanja Belanda mengakui bahwa didalam revolusi Indonesia pada ulamalah yang memegang peranan dan djiwa agama yang mengisi semangat dari pedjuang-pedjuang kemerdekaan Indonesia.

Pada permulaan bulan Desember berlangsunglah Kongres Islam Sumatera melahirkan Barisan Sabilillah dan kemudian Kongres Persjarikatan Agama Islam pada tanggal 22 Desember 1945 bertempat di Bukittinggi, dengan dukungan organisasi-organisasi Islam yang ada seperti Muhammadiyah, Perti dan lain-lain.

Kaum Muslimin harus mengambil pelajaran kepada sedjarah, kesatuan hati dan tekad harus diudjudkan, perselisihan ketjil dan purbasangka mesti disingkirkan untuk dapat mengangkat amal besar. Kedua Kongres ini akhirnya menghasilkan gabungan dari kedua organisasi ini mendjadi satu partai dengan nama MASYUMI yang sementara waktu daerahnja meliputi Sumatera. Dewan pimpinan baru dibentuk yang terdiri dari Z.A. Achmad, H.A. Rahman

Sjihab, Bachtiar Junus, K.H. Tjikwan, Dt. Palimo Kajo, Diar Karim, dan lain-lain sedang kedudukan Dewan Pimpinan dipindahkan ke Medan.

Dalam waktu yang pendek diseluruh negeri telah berdiri Tjabang-tjabang Masjumi yang merupakan satu saluran kesatuan perjuang-an umat Islam untuk membela dan menegakkan kemerdekaan.

Muhammadiyah sebagai organisasi langsung menjadi anggota istimewa, dan anggota-anggota dikerahkan masuk dengan sembojan: „Muhammadiyah tempat beramal dan Masjumi tempat berjuang”.

Sesudah agresi I kedudukan Dewan Pimpinan Masjumi dipindahkan ke Bukittinggi dan sesudah Sumatera dibagi kepada 3 propinsi, pimpinan Sumatera diadadakan dan Masjumi Sumatera Tengah tetap berkedudukan di Bukittinggi sampai sekarang dibawah pimpinan Saudara Datuk Palimo Kajo.

Semakin hari semakin dirasakan berapa beratnya tugas yang harus dipikul oleh pemimpin-pemimpin Islam dan dalam hal ini ulama-ulamanja terutama dalam memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan yang terdjadi dalam masyarakat telah begitu menekan budi dan achlak. Keruntuhan moril dan kemerosotan budi telah meradjalela, pendidikan anak-anak dan pemuda-pemuda telah diratjuni oleh pergaulan bebas dan hal ini telah menjadi rahasia umum. Memang berat tugas kaum ulama disamping membangun negara harus pula membangun budi. Sedar akan hal ini serta pula memikirkan berapa banyak daerah-daerah terbelakang yang harus menjadi sasaran pemimpin dan muballigh Islam, maka pada bulan April 1951 dibentuklah BADAN PERMUSJAWARATAN PENJIARAN ISLAM selaku missi Islam di Bukittinggi yang djuga didukung oleh seluruh organisasi dan partai Islam di Bukittinggi demikian djuga oleh organisasi dan partai Islam Sumatera Tengah. Diantara usaha-usahanja yang dapat kita lihat adalah Badan Sjiar Islam, meluaskan usaha kearah civilisasi penduduk Mentawai dan untuk ini Panitia Muallaf Mentawai telah berhasil memberikan bantuan pakaian dan wang sebanyak 10.000 potong pakaian dan alat-alat yang lain sedang 25 orang anak-anak Mentawai telah dibawa ke Bukittinggi untuk dididik dalam sekolah-sekolah agama dan umum, diantaranya telah ditempatkan disekolah M.I.N. dan Dinijah Padang Pandjang, Sekolah Parabek, dan Batu Hampar. Beberapa orang pemuka suku Mentawai itupun telah memeluk Agama Islam dan ada djuga yang masih beragama pelbegu telah dididik dan dilatih di Padang, Pajakumbuh dan Batu Sangkar dengan maksud kemudian mereka dikirim kembali ke Mentawai selaku muballigh, guru dan pemimpin dikalangan kaumnja.

Djuga dengan pengertian yang sama telah dapat diudjudkan kerdjasama untuk mengadakan Kongres Alim Ulama, ninik mamak, tjerdik pandai, dalam mana oleh para ahlinja telah diberikan prausul

jang berarti mengenai soal-soal demoralisasi, harta pusaka, pendidikan keagamaan, kerumah tanggaan. Diantaranja Kongres ini dihadiri djuga oleh djago tua H.A. Salim.

Walaupun dalam daerah Sumatera Tengah disamping partai politik Islam Masjumi ada djuga beberapa partai Islam lainnja seperti P.S.I.I., Perti, P.I.I., P.T.T.I. tapi dalam membendung aliran-aliran jang akan merugikan pihak Islam serta menuntun dan memelihara iman dan tauhid umat, organisasi dan partai-partai ini tetap satu. Apalagi setelah semakin terasa bagaimana mero-sotnja achlak dan semangat keagamaan kaum Muslimin dewasa ini, diudjudkanlah satu Front Islam Indonesia sebagai federasi dari partai-partai dan organisasi jang tersebut diatas., di Bukittinggi dengan diketuai oleh Saudara H.A. Darwisj Djambak. Badan ini telah dapat menjalurkan pendapat-pendapat jang selama ini berten-tangan dan dengan demikian dapatlah diharapkan bahwa Front Islam ini benar-benar akan merupakan benteng pertahanan bagi Islam dari setiap anasir jang akan merugikan dan melumpuhkan Islam dan kaum Muslimin umumnja.

Statistik Mesjid/Langgar dalam daerah Propinsi Sumatera Tengah menurut keadaan bulan Desember 1952.

No. Kabupaten	Mesjid dibuat dari		Djumlah	Djumlah langgar
	Batu	kaju/bambu		
	$\frac{1}{2}$ batu			
1. Agam	186	79	135	400
2. SO Kota	120	100	86	306
3. Swl. Sidjundjung	25	29	81	135
4. Padang Pariaman	100	160	72	332
5. Tanah Datar	33	98	74	205
6. Solok	10	74	102	190
7. P. S. Kerintji	63	151	120	334
8. Pasaman	50	120	200	378
9. Kampar	40	100	151	291
10. Inderagiri	100	160	280	460
11. Bengkalis	35	45	140	120
12. Merangin	100	100	141	341
13. Batang Hari	—	—	—	—
14. Kepulauan Riau	51	41	81	185
D j u m l a h	913	1.341	1.411	3.677
				8.813

BAB V
BAHAGIAN XIII

PERKEMBANGAN AGAMA KRISTEN.

Pasal 101.

DIKEPULAUAN MENTAWAI.

DAERAH Sumatera Tengah ini boleh dikatakan selain dari Kepulauan Mentawai, ialah suatu daerah jang tidak menerima agama Kristen. Rakjat asli jang menerima agama Kristen hanyalah rakjat Kepulauan Mentawai, dimana pekerdjaan pengabaran Indjil telah dimulai pada permulaan abad 20 ini dengan kedatangan pendeta-pendeta Djerman dari Kongsi Barmen jang bernama „Rheinische Mission Gesellschaft“. Agama Kristen jang dibawa oleh pendeta-pendeta ini ialah aliran Protestant menurut ajaran Martin Luther.

Pendeta jang pertama jang datang ke Mentawai ialah pendeta Let pada tahun 1901. Ia mengambil tempat di Kampung Nemneleleu dekat Sikakap, ibu negeri pulau Pagai Utara sekarang. Dari sana ia pada tahun 1902 dan 1903 pergi pula mengundjungi pulau Enggano, tetapi ia kembali lagi ke Pagai. Disini usahanja jang terutama ditudjukan kepada pendidikan anak-anak dan pemberantasan buta-huruf dikalangan orang tua. Boleh dikatakan sampai pada tahun 1910 belum ada dari rakjat jang diadjarnja itu jang mau masuk agama Kristen, mereka masih berpegang kuat kepada agamanya jang lama jaitu agama Sabulungan (heidenen).

Tetapi pada tahun 1911 ketika terdjadi pemberontakan rakjat Mentawai melawan pemerintahan Belanda jang memaksakan belasting dan rodi, maka pendeta Let telah tiwas pula kena batjokan parang rakjat, didalam usahanja menenteramkan hati rakjat jang sedang bergelora menghadapi musuh itu. Majat pendeta Let telah dikuburkan di Kampung Nemneleleu djuga.

Kemudian telah datang lagi pendeta-pendeta jang lain menggantikannja ja'ni tuan-tuan **F. Borger** dan **Finke**. Darah pendeta Let rupanja sudah tertanam sebagai bibit jang baik, karena pendeta-pendeta tadilah jang telah dapat menjabit hasil-hasil pertama, ja'ni beberapa orang menjatakan bersedia untuk menerima agama Kristen dan meninggalkan agama Sabulungan. Salah seorang dari pemandian jang pertama itu sekarang (ketika menulis karangan ini) masih hidup dan telah berumur $\pm$ 80 tahun, dan bertempat tinggal di Silaonan Taikako. Semua anak-anak dan tjutjunja sekarang mendjadi Kristen jang setia.

Pendeta-pendeta Djerman jang pernah datang di Kepulauan Mentawai sampai pada tahun 1940 telah ada 9 orang. Jang peng-

habisan sekali ialah pendeta Rudolf Smith jang datang pada tahun 1938.

Kemudian pada tahun 1940 ia telah ditangkap oleh Belanda karena timbulnja peperangan dunia II di Eropah.

Sebagai pembantu dari pendeta-pendeta Djerman itu telah turut bekerdja di Kepulauan Mentawai guru-guru dan pendeta-pendeta Batak. Oleh karena itu tjara-tjara dan peraturan-peraturan djemaat di Mentawai adalah serupa dengan jang ada di Tanah Batak (Tapanuli).

Hasil dari pekerdjaan mereka jang terbesar ialah dipulau-pulau Pagai Utara dan Selatan, sebab penduduk disana sekarang telah lebih 60% jang memeluk agama Kristen, ja'ni berdjumlah kira-kira 4000 djiwa dari djumlah penduduk jang kira-kira 6000 djiwa. Jang kedua ialah pulau Sipora dimana terdapat 1500 djiwa orang Kristen dari djumlah penduduk jang kira-kira 4000 djiwa. Di pulau Siberut baru hanja kira-kira 1000 djiwa jang beragama Kristen dari djumlah 10.000 penduduk. Djadi djumlah semuanya sekarang 6500 djiwa. Mereka telah mempunjai 48 buah rumah geredja jang masing-masing dapat memuat kira-kira 300 sampai 500 orang. Djawatan P.P.K. sekarang ada memindjam 13 buah dari geredja-geredja itu menjadi rumah-rumah sekolah Pemerintah.

Oleh karena peperangan dunia jang lalu maka segala urusan keagamaan telah terganggu. Pemerintah Belanda pada tahun 1940 telah menangkapi pendeta-pendeta Djerman. Pemerintah Djepang telah mengganggu pula pendeta-pendeta dan guru-guru dari tanah Batak, sehingga mereka ini berangsur-angsur telah kembali ke Tapanuli. Dan sekarang pada zaman kemerdekaan ini Ummat Kristen Mentawai berdiri sendiri dengan pimpinan beberapa orang anak Mentawai sendiri. Dipulau Enggano sekarang sudah semua penduduk asli memeluk agama Kristen, djumlahnja hanja kira-kira 300 djiwa. Penduduk lainnja jang berasal dari luar berdjumlah kira-kira 200 djiwa. Pengabarah Indjil disini ialah sesudah kedatangan pendeta Let jang kemudian dilandjutkan oleh pendeta Link pada tahun 1906. Pendeta ini bekerdja disana hanja $\frac{1}{2}$ tahun sadja, karena ia dipindahkan ketanah Batak tahun 1907.

Ia digantikan oleh seorang pendeta Batak, namanja pendeta Johannes L. Tobing, sedjak mana tidak pernah lagi datang pendeta-pendeta Djerman. Dari tahun 1915 setelah pendeta Batak ditarik pula hanjalah guru sadja lagi jang bekerdja. Guru jang penghabisan sekali bekerdja disana ialah saudara E. Manalu, jang sekarang bekerdja sebagai Kepala Bahagian Kristen pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang/Pariaman dan Kota Padang. Saudara ini dua kali ditempatkan disana ja'ni dari tahun 1928 sampai tahun 1933, kemudian dari tahun 1938 sampai tahun 1948. Selama peperangan jang lalu boleh dikatakan pekerdjaan Indjil disana tidak terganggu, peribatan dan pendidikan anak-anak berdjalan dengan baik.

Pasal 102.

DI SUMATERA BARAT.

DIDARATAN Sumatera Tengah ini boleh dikatakan tidak pernah diusahakan pengadjaran Indjil kepada rakyat Minangkabau karena larangan dari pemerintah kolonial Belanda dulu. Oleh karena itu agama Kristen hanya didapatkan dikalangan beberapa suku penduduk saja, ja'ni Nias, Batak, Ambon, Menado, Djawa, Tionghoa dan Eropah. Sedjak abad jang lalu sudah ada pendeta-pendeta Belanda di Kota Padang jang bekerdja hanya dikalangan militer saja, karena pada masa itu sebagian terbesar dari tentera Belanda terdiri dari bangsa Belanda jang beragama Kristen Protestant dan Katholik. Mereka telah mengusahakan mendirikan beberapa rumah peribadatan dari kaju, baik di Padang maupun di Bukittinggi.

Setelah petjah perang Eropah tahun 1914 militer Belanda mulai berangsur-angsur ditarik dan diganti oleh militer Ambon, Menado dan Djawa, sehingga tahun 1915 sudah sebagian terbesar militer itu dari bangsa Indonesia saja. Oleh karena dikalangan mereka kebanyakan pula jang beragama Kristen, maka mereka pun meminta supaya pendetanja jang berbangsa Indonesia pula. Maka pada tahun 1953 pendeta-pendeta De Boer dan Pikauly telah mulai mengusahakan pendirian geredja Protestant jang baru di Padang dan diselesaikan pada tahun 1936. Itulah geredja Protestant jang di Djalan Benteng sekarang.

Di Bukittinggi telah lebih dahulu, yakni pada tahun 1916—1917. diusahakan mendirikan sebuah geredja baru. Ketika itu jang menjadi pendeta di Bukittinggi ialah pendeta Grammer.

Pendeta-pendeta jang penghabisan sebelum perang, di Padang ialah pendeta **Ursepuney** jang menggantikan pendeta Latumahina pada tahun 1937, dan pendeta **Bronsveld**. Kedua pendeta ini telah ditawan oleh Djepang. Pendeta Ursepuney telah meninggal dalam tahanan pada tahun 1943.

Di Bukittinggi pendeta jang penghabisan ialah pendeta **Warou Lumanon** jang berasal dari Menado. Ketika pendudukan Djepang pendeta ini tidak ditangkap malahan diperlakukan dengan baik, sehingga pada masa kemerdekaan ia telah dituduh orang sebagai mata-mata Djepang. Untuk menghindarkan diri dari pada tuduhan ini, pendeta itu pada tahun 1947 telah berangkat berdjalan kaki menuju Palembang, tetapi ketika sampai di Sei. Dareh ia telah tertangkap, dan mati terbunuh.

Pasal 103.

NIAS KRISTEN.

D IKALANGAN orang Nias jang banjak kedapatan didaerah Padang Pariaman, pengadjaran Indjil telah dikerdjakan sedjak permulaan abad 20 ini. Pengerdja jang pertama ialah pendeta Djerman, bernama **Dorsaf** jang diutus oleh Kongsi Barmen „Rheinische Mission Gesellschaft“. Permandian-permandian pertama ialah pada kira-kira tahun 1907. Salah seorang dari permandian pertama ini sekarang masih hidup dan telah berumur $\pm$ 65 tahun, namanja **Tarufa Mendrofa**. Pendeta Dorsaf telah bekerdja dengan segenap ketjntaan hatinja dan dengan radjin sehingga ia ditjintai Kristen Nias. Di Padang ia telah dapat mendirikan sebuah geredja dari kaju jang sekarang masih berdiri di Djalan Tan Malaka (Dj. Hiligoo dahulu). Ketika pendeta Dorsaf djatuh sakit pada tahun 1914 dan pergi berobat ke Bukittinggi, ia telah memesankan supaya pendeta Finke datang dari Mentawai menggantikannya. Pendeta Dorsaf telah meninggal di Bukittingi lalu dibawah dan dikuburkan di Padang.

Sehari sebelum penguburan itu pendeta Finke telah tiba di Padang, dan ialah jang menggantikan pendeta Dorsaf sampai tahun 1924. Pada tahun 1915 telah datang dari Nias seorang guru Indjil bernama F.M. Mendrofa, jang dikenal kalangan Nias sebagai guru Musa. Guru ini djuga bekerdja dikalangan orang Nias jang ada dalam Bui Sawah Lunto. Pada tahun 1919 ia telah diangkat menjadi guru, sebab waktu itu telah dibuka sebuah sekolah untuk anak-anak Nias di Kataping dekat Pasar Usang. Guru ini sekarang sudah berumur 70 tahun dan tinggal di Pasar Usang (Wilajah Lubuk Alung). Setelah pendeta Finke berangkat ke Djerman pada tahun 1924 ia digantikan oleh pendeta **Ligi Zebua**. Di Pasar Usang dan Tandjung Basung telah didirikan pula geredja dan rumah pendeta, jang kemudian dalam agressie Belanda pertama tahun 1947 semua telah habis dibumi hanguskan. Pada tahun 1928 pendeta Ligi Zebua digantikan oleh pendeta **Helune Ndraha**, jang memimpin geredja Nias sampai tahun 1942. Selama pendudukan Djepang dan kemerdekaan mereka dipimpin oleh guru Zeti, jang kemudian berangkat pule ke Gunung Sitoli untuk melandjutkan peladjarannya pada Sekolah Pendeta.

Pimpinan diteruskan oleh saudara B. A. Zoga dan B. Zebua. Pada bulan Agustus tahun 1952 ini fihak ketentaraan telah mengangkat pendeta **Jafeti Zoga** mendjadi pendeta tentera untuk Sumatera Tengah ini jang kebetulan seorang berasal dari Nias, sehingga pimpinan kerohanian buat geredja Nias terselenggara lagi sebagaimana mestinja.

Pasal 104.

MISSI ROMA KATHOLIK.

BERSAMA dengan pekerdjaan pendeta-pendeta Protestant Belanda pada achir abad 19 dan permulaan abad 20 ini djuga pastor-pastor dari geredja Roma Katholik turut bekerdja menjelenggarakan peribadatan dikalangan militer dan pereman bangsa Belanda. Pastor-pastor ini pun telah mengusahakan mendirikan beberapa rumah peribadatan dari kaju, baik di Padang maupun di Bukittinggi dan Sawah Lunto.

Pada mulanja Sumatera ini menurut rentjana Missie Roma Katholik termasuk daerah pekerdjaan perkumpulan Jesuiten. Pada tahun 1912 daerah ini diserahkan kepada perkumpulan **Capucwnen**. Pemimpin-pemimpin perkumpulan ini jang pernah tinggal di Padang sebagai Uskup ialah **Mgr. Cluts** jang memberkati geredja Sawah Lunto pada tahun 1920, dan **Mgr. L.T.M. Brans** jang sekarang (1952) masih hidup di Medan sebagai Uskup Ap. Vicariat Sumatera Utara.

Kota Padang ialah sebagai pusat gerakan pekerdjaan geredja Roma Katholik, dimana pimpinan berkedudukan sampai tahun 1932 dan kemudian dipindahkan ke Medan. Di Kota Padang sendiri pada tahun 1912 sudah ada $\pm$ 750 orang anggota Roma Katholik dan diseluruh Sumatera Barat $\pm$ 1300 orang. Dari djumlah ini $\pm$ 95% terdiri dari bangsa Eropah. Pada ketika itu telah ada beberapa orang pastor-pastor jang dibantu oleh beberapa zusters. Pastor-pastor jang pertama ialah Mattheus de Wolf, R. van Hoof, Dyonisius Pessers dan Ruppertus Verbrugge. Mereka ini jang selalu menjelenggarakan peribadatan ke Bukittinggi dan Sawah Lunto.

Pada tahun 1915 pastor Dyonisius Pessers pindah ke Medan, dan kemudian disusul pula oleh pastor Mattheus de Wolf pada tahun 1917. Di Padang jang terutama sekali diusahakan ialah soal pendidikan dan pekerdjaan sosial ja'ni perawatan anak-anak piatu.

Sedjak tahun 1920 sekolah-sekolahnja di Padang sangat pesat madjunja, terlebih-lebih setelah tahun 1923 datang beberapa orang fraters dari negeri Belanda sebagai tenaga guru-guru. Bersama-sama dengan Zusters mereka mendirikan beberapa sekolah rendah dan sekolah Mulo. Sekolah-sekolah ini terutama sekali dikunjungi oleh anak-anak Tionghoa dan Belanda. Untuk mengikat perhatian murid-murid ini maupun jang sudah tamat sekolah fraters membentuk beberapa perkumpulan-perkumpulan pemuda dan pemudi dan djuga

Tengah ini pada permulaan tahun 1952 dipersatukan oleh pendeta **M.G. Simandjuntak** dengan berkedudukan di **Pakan Baru**. Djumlah anggotanja sekarang kira-kira 1700 orang. Sebuah geredja H.K.B.P. ada di **Pakan Baru** jang didirikan tahun 1950. Sebuah sekolah rakjat Kristen telah dibuka pada tahun 1951 untuk anak-anak Kristen, atas usaha Djema'at Kristen **Pakan Baru**.

Geredja Pantekosta (Geredja Pinkster).

Gerakan geredja Pantekosta ini dimulai di Amerika $\pm$ 1900. Tiba di Indonesia (Djawa Timur) tahun 1921 dengan kedatangan satu keluarga Belanda pula ja'ni **Ermel Scherer** tahun 1932. Tetapi jang menggerakkannja ialah isterinja.

Pada tahun itu djuga telah dipermandikan beberapa orang Tionghoa. Salah seorang dari permandian ini sekarang masih hidup ialah saudara **Lie Oen Seng**. Pekerdjaan njonja **Ermel Scherer** dibantu oleh Saudara **A.E. Siwi** jang datang dari Palembang.

Pada tahun 1936-1938 pimpinan diserahkan pada **Melboom** dengan isterinja, jang kemudian digantikan oleh saudara **Lie Sie Po** sampai 1952 dengan bantuan saudara-saudara **Gho Sie Thay**, **Thio Boen Seng** dan lain-lain.

Anggotanja sekarang ada $\pm$ 100 orang. Geredjanja ialah di rumah jang disewa di **Djalan Damar No. 1**.

Geredja Methodist.

Di Sumatera Tengah geredja Methodist ini hanja terdapat di Bagan Siapi-api dan anggotanja orang Tionghoa sadja. Usaha geredja ini jang terpenting ialah dalam lapangan pendidikan. Sekolahnja sekarang mempunyai 350 orang murid. Geredjanja besar dan mempunyai anggota 300 djiwa. Pendetanja sekarang ialah pendeta **Chua Beng Wan** jang dibantu dengan radjin oleh isterinja.

Pasal 105.

GEREDJA H.K.B.P. (Huria Kristen Batak Protestant).

ANGGOTA geredja H.K.B.P. ini ialah orang-orang Batak Kristen dari Tapanuli. H.K.B.P. ialah Djemaat jang menurut pengadjaran Martin Luther, karena lahirnja agama Kristen di Tapanuli ialah dengan kedatangan pendeta-pendeta Djerman dari „Reinische Mission Gessellschaft” di Barmen tahun 1861. H.K.B.P. berdiri sendiri pada tahun 1930, dan kemerdekaannja itu diresmikan dengan Gouv. Besluit tanggal 11 Djuni 1931 No. 48.

Sebelum tahun 1920 di Sumatera Tengah ini baru hanja beberapa keluarga sadja orang Batak jang bekerdja sebagai pegawai, militer dan pereman. Pada umumnja dalam soal peribadatan mereka menjatakan diri dengan geredja-geredja Protestant Indonesia atau Belanda. Setelah dikota Padang makin bertambah keluarga Kristen Batak, maka pimpinan Kristen Batak di Tapanuli pada tahun 1922 mengirinkan guru **PeterSitanggang** sebagai guru Indjil untuk Sumatera Barat. Setelah guru ini kembali ke Tapanuli pada tahun 1925 ia digantikan oleh guru **Melathon L. Tobing** sampai tahun 1930. Guru ini pergi ke Tapanuli untuk menuntut pendidikan pada sekolah pendeta, dan pada tahun itu djuga kembali ke Padang setelah mendjadi pendeta. Ia menunaikan pekerdjaannja disini sampai pendudukan Djepang. Kemudian ia kembali ke Tapanuli.

Selama pendudukan Djepang dan revolusi kemerdekaan peribadatan tidak berketentuan lagi. Oleh karena agressive Belanda pertama tahun 1947 Pemerintah R.I. Propinsi Sumatera Tengah dari Pematang Siantar ke Bukittinggi, maka pegawai-pegawai Kristen Batak banjak jang turut pindah kemari. Oleh karena banjak pula orang Kristen dari daerah lain seperti Ambon, Menado, Djawa dan Mentawai se Djawa dan Mentawai sehingga berdjumlah $\pm$ 250 orang, mereka membentuk suatu sidang jang bernama Djemaat Kristen Protestant Indonesia (Dj. K.P.I.) dibawah pimpinan Saudara-saudara **Mr. Rufinus L. Tobing** dan **Marnix Huta Soit**. Peribadatan Dj. K.P.I. ini kemudian diselenggarakan oleh pendeta tentara T.N.I. ja'ni pendeta **Kenan Sihombing** dan guru **Jetro Sinaga**.

Setelah agressive kedua Djemaat ini berpetjah dan anggotanja terserak kesegala pendjuru. Setelah kedaulatan R.I. timbullah lagi kelompok-kelompok Kristen Batak diseluruh kota-kota di Sumatera

kependuan. Disana anak-anak itu diadjar berbagai-bagai matjam sport (sepak bola, bola kerandjang, berenang), musik (biola, piano, suling), bermain tonil dan permainan lain-lain (biljart, kartu, tja-tur). Kepada anak-anak perempuan diadjarkan berbagai kerajinan tangan.

Di Bukittinggi sebuah sekolah telah dimulai pada tahun 1923 dalam sebuah geredja jang sudah tua dan diperbuat dari pada bambu. Anak-anak Tionghoa jang mula-mula beladjar ada 40 orang. Pada tahun 1926 geredja itu telah rusak oleh gempa, sehingga tahun 1927 dimulailah mendirikan geredja baru selesai pada tahun 1928. Pada tahun 1930 telah siap pula rumah sekolah dan klooster.

Di Pajakumbuh pastor-pastor R. van Hoof membuka sebuah sekolah pada tahun 1924 jang dimulainja dalam sebuah kandang motor. Pada tahun 1928 didirikan rumah sekolah baru dan tahun 1933 berdirilah geredja dan klooster. Pada tahun itu djuga pastor van Hoof digantikan oleh pastor W. Derksen. Di Sawah Lunto Katholik Tionghoa dengan bantuan direksi Tambang Ombilin telah dapat mendirikan sebuah geredja dan rumah pastor dari batu pada tahun 1920. Pada tahun berikutnja (1921) datanglah pastor Woestenbergh bertempat tinggal disana lalu membuka sekolah. Kemudian ia dibantu oleh pastor G. Driesen dan zusters telah datang pada tahun 1925. Pada tahun 1926 pastor M. Raateland sampai pendudukan Djepang. Di Bagan Siapi-api missie Roma Katholik telah dimulai oleh pastor **Benitius Pijnenburg** dengan beberapa zusters pada tahun 1928. Sebagai hasil pertama jang diperdapat ialah permandian seorang gadis Tionghoa pada tahun 1930. Setelah bekerja dengan giat dan ketjintaan terhadap anak-anak piatu, orang-orang tua jang terlantar dan pengobatan orang-orang sakit barulah terdapat hasil pada tahun-tahun berikutnja.

Geredja Roma Katholik sekarang di Sumatera Tengah mempunyai anggota $\pm$ 4300 djiwa, geredja 7 buah, kapel 4 buah, paderi 15 orang, broeders 14 orang, zusters 25 orang, Sekolah Rakjat 8 buah, S.M.P. 2 buah, Taman Kanak-kanak 4 buah, S.K.P. 3 buah, Seminary ketjil 1 buah. Djumlah murid-murid sekolah semuanya $\pm$ 3000 orang.

Pasal 106.

GEREDJA MASEHI ADVENT HARI KE-TUDJUH.

KOTA Indonesia jang pertama sekali mendjadi tempat geredja Advent ini menjiarkan Indjil ialah kota Padang. Dalam bulan Djanuari 1900 keluarga pendeta **R. W. Munson** telah tiba di Padang. Sebagai hasil jang pertama dipermandikan ialah seorang pemuda Batak namanja Immanuel Siregar dengan beberapa pemuda Tionghoa. Pendeta Munson tinggal di Padang sampai tahun 1910. Ia digantikan oleh pendeta B. Jugde beserta isterinja dibantu oleh kakaknja perempuan dan seorang guru P.S. Robert. Mereka ini telah membuka sebuah sekolah jang sangat madju. Merekapun selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang sakit dan kaum perempuan jang hamil. Tahun 1915 pendeta Jugde digantikan oleh pendeta G.S. Jates jang mendirikan geredja Advent di Djalan Melati No. 9 sekarang dalam tahun 1916.

Pada tahun 1919 datang pendeta G.A. Wood jang bekerdja di sini dengan sangat radjinnja sehingga mendapat kemadjuan jang pesat sekali. Sepuluh tahun kemudian pendeta Wood pindah ke Tapanuli sampai zaman Djepang, dimana ia ditawan ke Medan dan kemudian meninggal tahun 1944 dalam tahanan.

Pekerdjaan pendeta Wood dilandjutkan oleh pendeta J.H. Stui-venga dan kemudian oleh guru Ong Ban Giok sampai tahun 1936. Mulai tahun 1937 pendeta S. Rantung memegang pimpinan sampai masa perang. Ketika peperangan pekerdjaannja sangat terhalang, sebahagian besar dari anggota-anggota berpindahan dan ada jang ditawan pula. Kemudian pada tahun 1946 isteri saudara Rantung ditjulik orang dan sampai sekarang tidak diketahui dimana. Pada tahun 1946 serombongan bangsa Indonesia bagian Timur bekas tawanan Djepang dari Tapanuli dibawa oleh tentera Sekutu masuk di Padang, diantaranya keluarga saudara E. Sabari, jang kemudian diangkat mendjadi guru Indjil pada tahun 1948 sampai sekarang.

Sebagai geredja-geredja lainnja djuga Advent sangat sulit menjampaikan berita Indjil kepada masjarakat Minangkabau. Pada masa pendeta S. Rantung beberapa orang laki-laki dan perempuan sudah bersedia menerima dan sedang beladjar, tetapi ketika masa peperangan djiwa-djiwa ini telah hilang lagi. Pada tahun 1950 ketika beberapa orang pemuda Minangkabau Adventist dari Singapura datang ke Bukittinggi, barulah lagi beberapa pemuda lainnja

mulai beladjar, sehingga 4 orang pada tahun 1951 telah diperman-
dikan oleh pendeta M. Siregar jang datang dari Palembang. Seka-
rang anggota geredja Advent di Sumatera Tengah ini berdjumlah
90 orang.

TJATATAN GEREDJA DAN PENGANUT KRISTEN PROTESTANT DI SELURUH SUM. TENGAH.

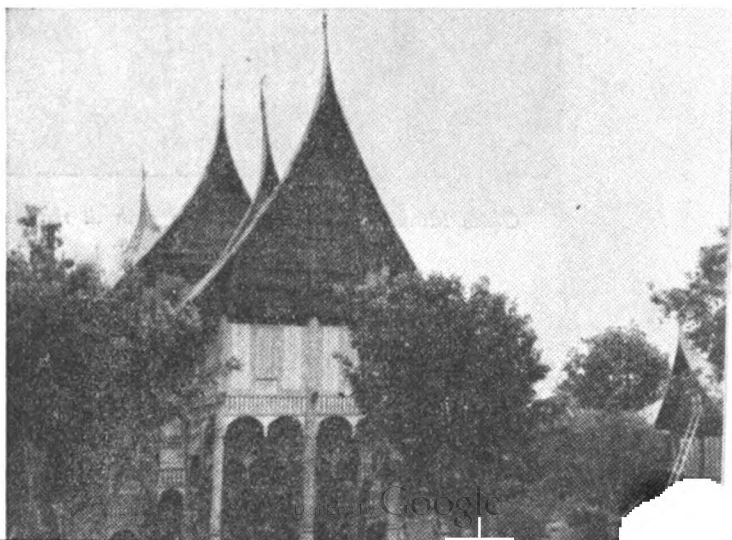
No.	Tempat	Geredja	Pendeta	Penganut	Djumlah	Keterangan
1.	Pulau-pulau Pagai (Mentawai)	48	4	6.500		Seluruh Geredja di
2.	Keresidenan S. Ba- rat jang lama.	9	1	2.500		S. Tengah dikemu- dikan oleh/Pendeta
3.	Keresidenan Riau jg. lama.	9	2	3.500		Distrik jang bertem- pat di Pakan Baru.
4.	Keresidenan Djambi jang lama.	2	—	350	12.850	

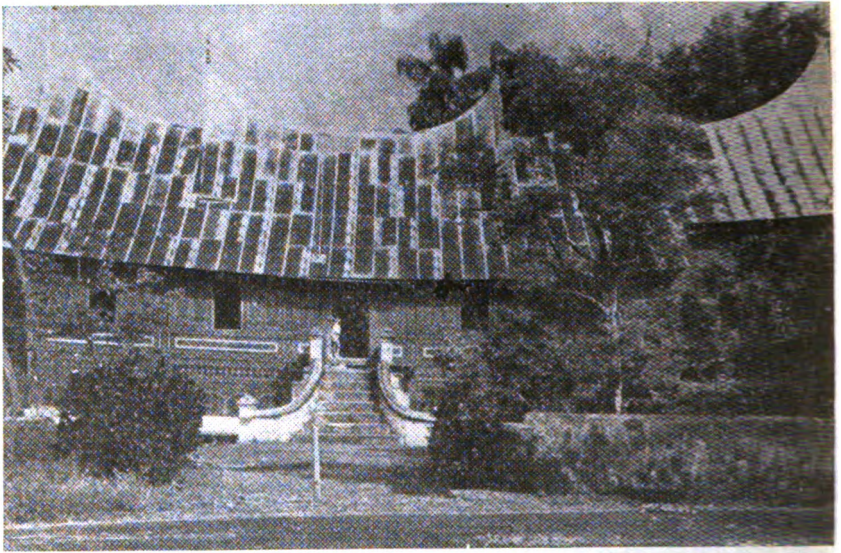
Berdiri: Penghulu dengan pakaian kebesaranja. **Duduk:** Wanita dengan pakaian adatnja.



Salah satu bentuk rumah adat.

Rumah adat dan rangkiang-nja.





Rumah adat di Bukit Surungan Padang Pandjang.



Gadis Minangkabau menjunjukkan sirih di tjerana kepada Presiden dan rombongan.



Pengantin Baru dengan pakaian adatnja.



Serambi muka dari sebuah rumah adat modern.



Kubu Radjo, satu lapangan tempat bersidang adat di Minangkabau, Batu sandaran jg. bertjerita ialah tempat kedudukan Dt. Saridi dan Dt. Perpatih nan Sebatang.

Batu Ganting. Batu ganting ini sebagai satu peringatan dari ninik-mamak negeri Batipuh dahulu kala. Tingginja hanja k.l. setengah meter. Ditengahnja genting, letaknja di Ganting tengah-tengah negeri Batipuh.

*Batu ini melambangkan:
Genting nan tidak mau putus
Biang nan tidak mau tabuak
Kaitan dan tidak rekah
Tali nan tak putus.*



Batu bertikam di Lima Kaum menurut riwayat ditikam oleh Datuk Perpatih nan Sebatang waktu berselisih paham (ideologie) dgn Datuk Ketemanggungan.

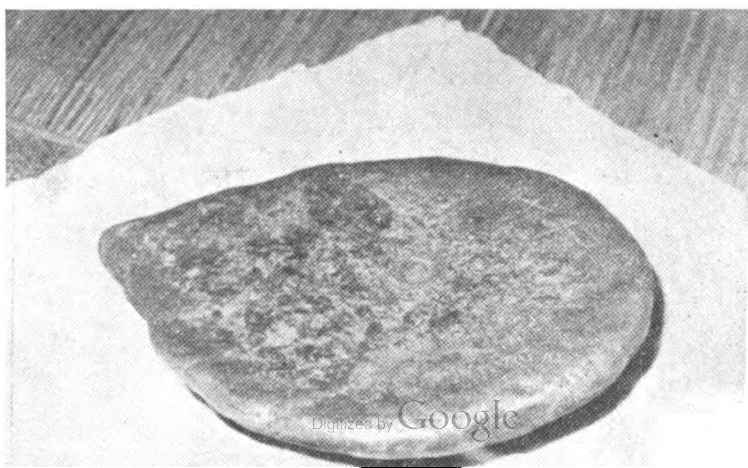
Barang-barang dan senjata purbakala peninggalan radja-radja Pagar Rujung tersimpan di rumah Tuan Gadis, yaitu beberapa keris, stem-pel, kain sangseto dan si Katimuno.

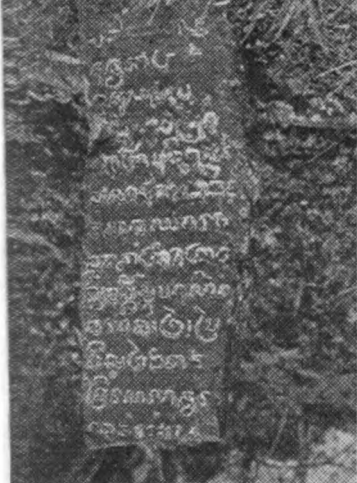


Batu tempat menumbuk limau.



„Batu udjian”, tempat mengudji dapatkah sesuatu tjita terkabul atau tidak. Kalau terkabul, batu tsb. dapat diangkat oleh orang yg. mengudji. Kalau tidak, tandanja tjita² tidak kabul. Besarnja kurang lebih hanja sebesar batu lada (lumpang).





Batu bersurat di Pagar Rujung ditaman Adityawarman. Arti tulisan pada batu bersurat ini menurut keterangan jang diperoleh adalah tersimpul dalam perkataan:

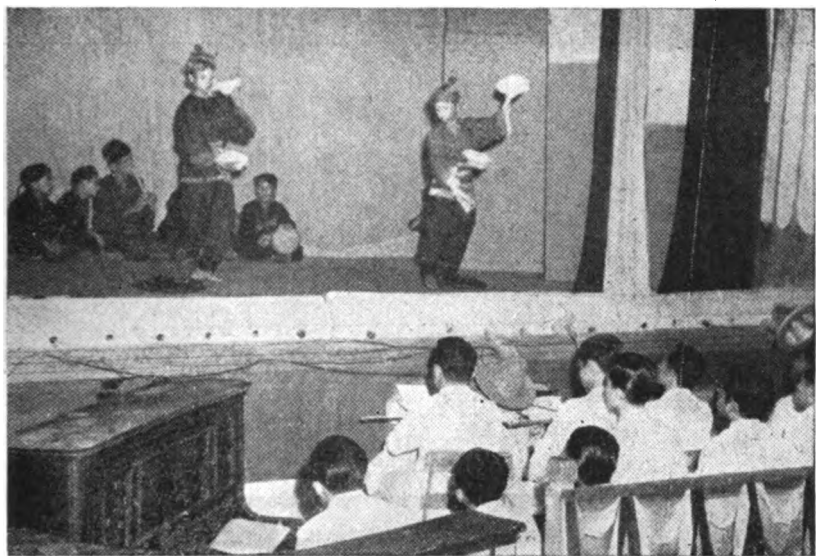
„Dikota Pagar Rujung diorong kampung Tengah, didusun Balai Djanggo diranah kampung Gudam, didorong kampung, tungku nan tigo sedjarangan, radja nan tiga naik tobat“, letak batu bersurat buatan anak Indo Djati (anak Hindu Sedjati) lebih kurang tahun 1375. Waktu penobatan inilah radja tsb. membebaskan sekalian orang tawanan“.



Tjandi Muaro Takus di Pagan Baru.



Batu Sandaran

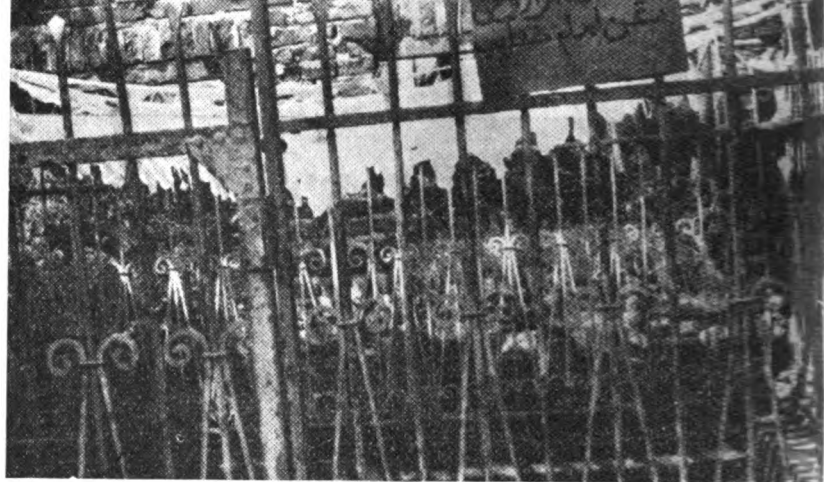


Pertunjukan tari-piring jang diiringi dengan lagu-lagunja.



Anggota Pentjak Minang jang ikut ke Pon ke-II.

*Makam Sjech
Burhanuddin di
Ulakan. Pari-
aman.*



*Makam Sjech
urhanuddin dili-
at dari djauh.*

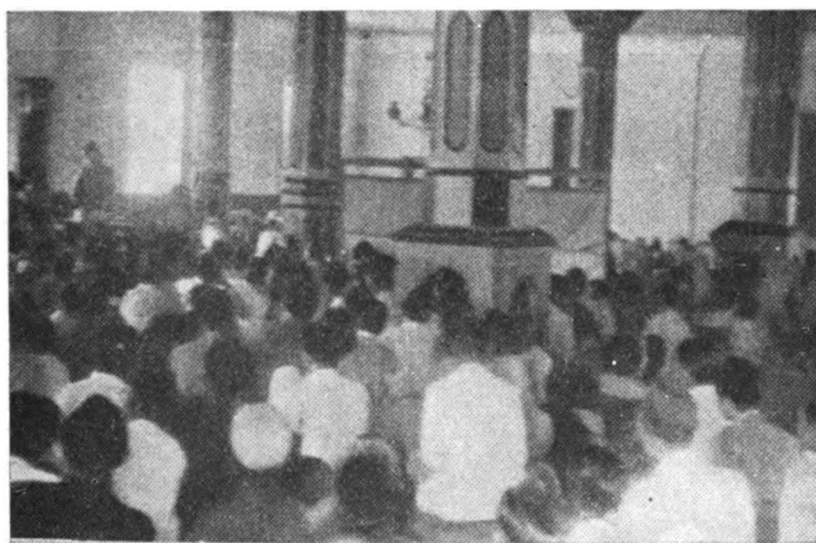


*ap-tiap bulan
far thn. Arab,
kajat dari berba-
ni daerah ber-
ndjung ketem-
at makam Sjech
urhanuddin.*





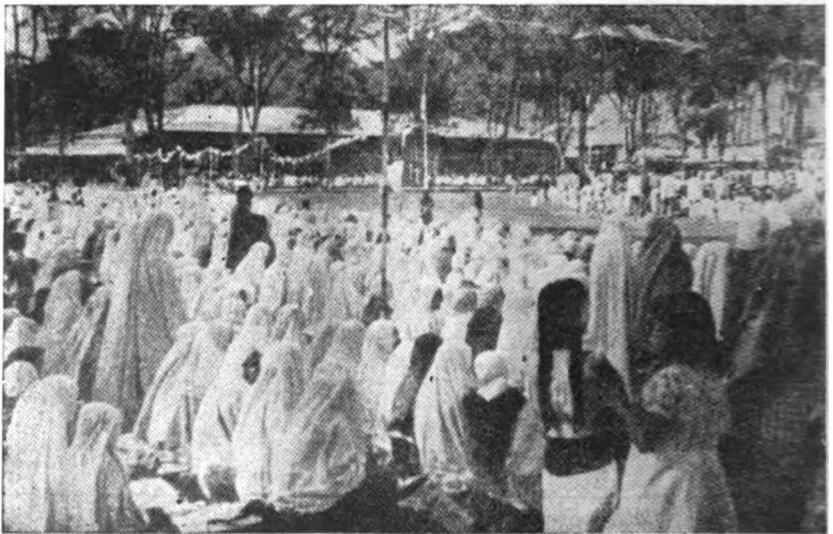
Para wanita Minangkabau sedang mengikuti wirid penjiaran agama Islam.



Pencerangan-penerangan Agama Islam dilakukan di Mesdjid-mesjdjid atau langgar, dan selalu mendapat perhatian yang sangat besar.



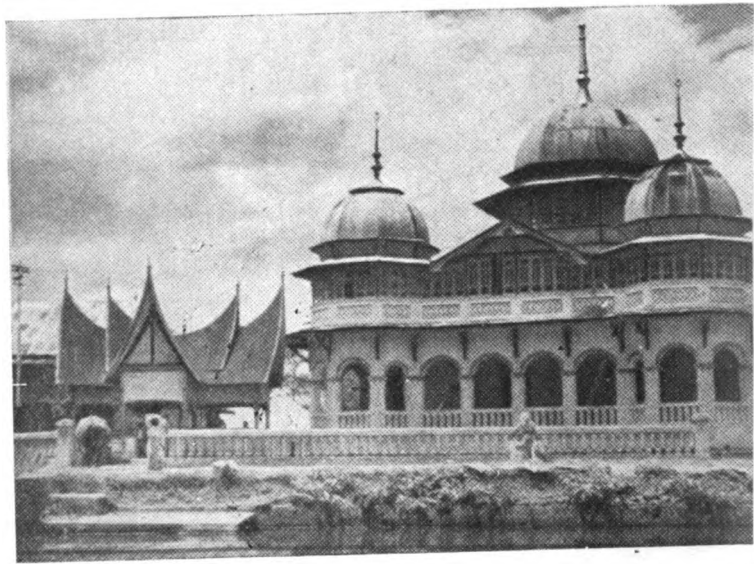
Konperensi Muballigh Islam se-Sumatera Tengah.



Sembahjang Hart Raja ditanah lapang.



Bangun dan bentuk mesjid ini mewujudkan peradukan kebudayaan dan peradaban timur asli.



Dengan disampinginya oleh rumah adat, mesjid ini memperlihatkan wajah yang lebih spesifik.



Gereja ini pun lebih banyak mengambil „wajah“ timur, sesuai dengan sumber ajaran yang dikembangkan.

R

89034866152

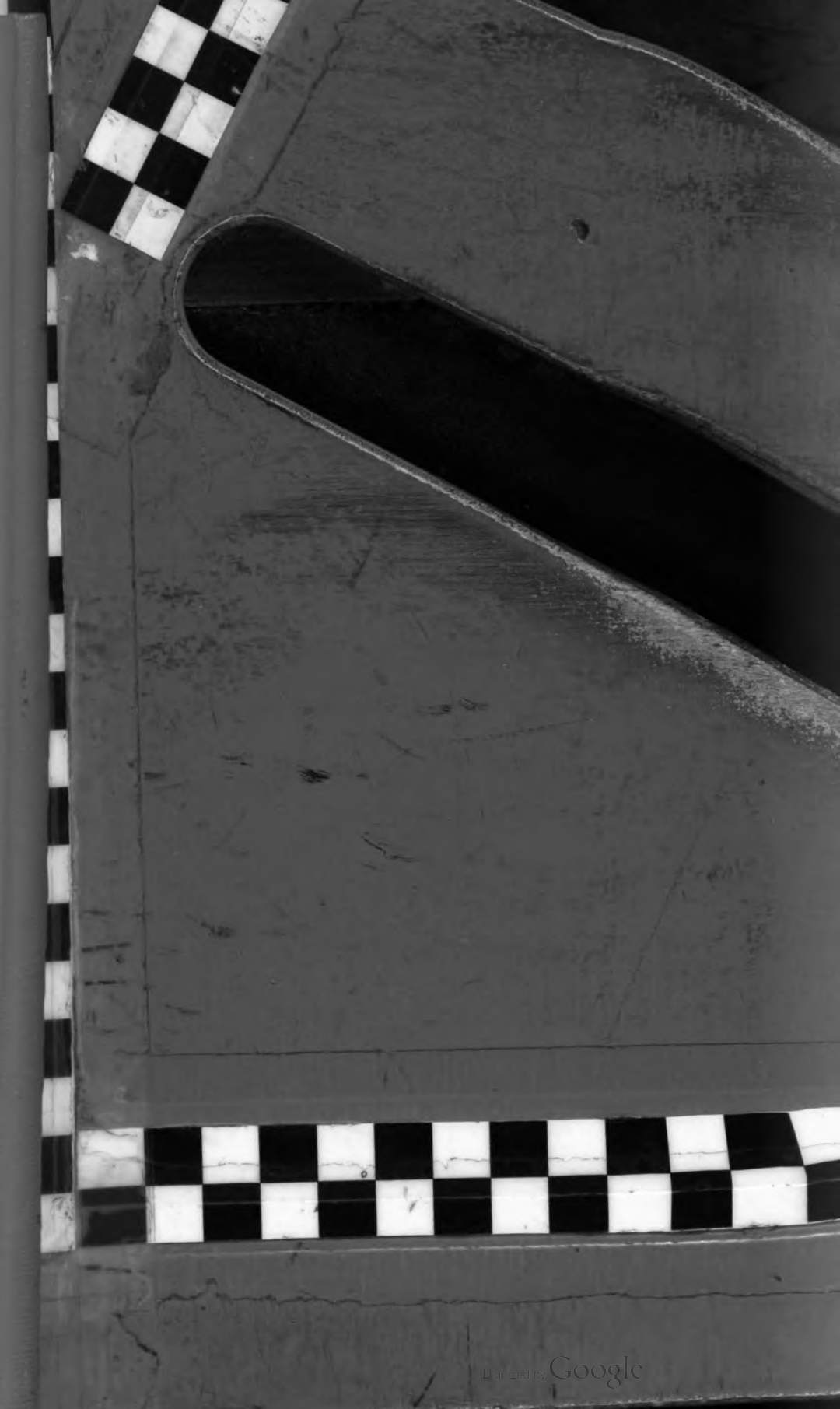


7 b89034866152a

89034866152



b89034866152a



89034866152



b89034866152a